RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL KOTA BIMA
TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA BIMA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2024. Penyusunan Rencana kerja merupakan salah satu upaya sistematis Dinas Sosial Kota Bima dalam melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan social selama 1 (satu) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Bima merupakan upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, secara menyeluruh dan merata. Selain itu Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2024 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, khususnya di Kota Bima.

Demikian penyusunan Rencana Kerja ini dibuat, atas dukungan berbagai pihak disampaikan terima kasih.

Raba-Bima, Januari 2024
Kepala Dinas Sosial Kota Bima,



Yuliana, S.Sos
Pembina TK. I, (IV/b)
NIP. 19720213 199402 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022 .. 7
2.1. Evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 13
2.3. Isi-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 14
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 15
2.5 Penelaah Ususlan Program dan Kegiatan Masyarkat . 15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 16
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional terhadap Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 16
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD 17
3.3. Program dan Kegiatan (sesuai dengan form Matriks terlampir) 17
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD 19

BAB V : P E N U T U P 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada, dan hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur lingkup dan tingkatan perencaanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan beberapa tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat serta mutu hidup manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatkan peranan/partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Selain itu pembangunan bidang Sosial juga diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga pelayanan sosial melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara

berkelanjutan, dan sarana prasarana dalam bidang kesejahteraan sosial.

Untuk mendukung arah kebijakan bidang Sosial sebagaimana tersebut di atas, maka langkah yang tepat adalah dengan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Sosial Tahun 2024 dengan maksud untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang dimulai dari analisa situasi dan kondisi dengan menggunakan data yang akurat (valid), baik yang menyangkut berbagai masalah-masalah sosial. Melalui analisa data tersebut kita dapat mengetahui kondisi saat ini dengan kondisi yang akan datang, dengan demikian kita dapa menentukan target yang diharapkan maupun trend dalam beberapa tahun ke depan. Dengan demikian kita dapat menentukan langkah kegiatan apa yang perlu dilakukan saat ini dan ke depan untuk mencapai harapan yang diinginkan sebagaimana visi pembangunan kesejahteraan sosial yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah **“Membangun Kemandirian menuju Masyarakat Sejahtera“.**

Pengertian dan makna yang terkandung dalam visi tersebut kata kuncinya adalah :

a. Membangun adalah upaya meningkatkan potensi sosial masyarakat melalui program dan kegiatan yang terencana, sistematis dan berkelanjutan.
b. Kemandirian adalah kemampuan masyarakat membangun dirinya dalam upaya menata kehidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
c. Masyarakat adalah seluruh masyarakat Kota Bima yang termasuk dalam kategori miskin, cacat, terlantar, tuna

sosial, ketertinggalan atau terpencil, korban bencana alam, dan bencana sosial.

d. Sejahtera adalah adanya kondisi sosial ekonomi yang baik berupa memiliki pendapatan per kapita yang baik, angka kemiskinan yang terus berkurang, pemenuhan kebutuhan dasar yang membaik serta daya beli

1.2. Landasan Hukum.

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Kota Bima adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;
18. Peraturan Walikota Bima Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bima.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Kota Bima disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. **Maksud Penyusunan Rencana Kerja**

   Untuk memberikan arah dan pedoman rencana pelaksanaan kegiatan bidang Sosial sebagai kebijakan dalam mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

2. **Tujuan Penyusunan Rencana Kerja**
   a. Mengetahui kondisi Umum Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kota Bima dan rencana pembangunan menuju tercapainya Visi dan Misi Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
   b. Merencanakan Program dan Kegiatan Tahun 2024, di Bidang Sosial Kota Bima secara terpadu, terencana, terarah, dan menyeluruh.
   c. Sebagai bahan evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Bima.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Bima disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Balakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud Dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulis

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Terhadap Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program Dan Kegiatan (Sesuai Dengan Form Matriks Terlampir)

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kota Bima yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Bima.

Penetapan target kinerja atas kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) berupa: *input, output, dan outcome*. Evaluasi kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi indikator kinerja dari setiap kegiatan serta rencana kinerja dan realisasi dari setiap indikator kinerja sasaran.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian sasaran beserta target dan realisasinya dapat dilihat dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023

Dinas Sosial Kota Bima

Kode Rekening					Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Tahun 2023	Realisasi Terget Kinerja Hasil s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2021	
									Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian	Tingkat capaian realisasi
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
1					**Urusan Wajib**									
1	**06**				**Bidang Dinas Sosial**									
1	**06**	**19**			**Dinas Sosial**									
1	**06**	**01**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Capaian pelayanan administrasi perkantoran**								
1	**06**	1 19	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 Tahun	3000 lbr	750 Lbr	1558 Lbr	1558 Lbr	100%		1558 Lbr	77 %
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah alat komunikasi,sumber daya air dan listrik	2 Buah	2 buah	2 buah	2 buah	100%		2 buah	80%
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	40 Unit	6 Unit	10 Unit	10 Unit	100%		29 Unit	72%
				07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%

				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1250 jenis	410 jenis	250 jenis	240 jenis	80%		910 jenis	72%
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang cetak dan digandakan	50000 Lbr	7000 Lbr	12000 Lbr	12000 Lbr	100%		3600Lbr	72%
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Persentase terwujudnya penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
				13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	50 unit	20 unit	10 unit	10 unit	100%		40Unit	80%
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur	15 Media	8 Media	10 Media	10 Media	100%		12 Media	90%
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan makan minum rapat	30 Kali	12 Kali	6 Kali	3 Kali	50%		21 Kali	70%
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah	84 Kali	28 Kali	20 Kali	18 Kali	90%		66 kali	79%
				19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah	40 Kali	8 Kali	8 Kali	0 Kali	0%		16 kali	40%
1	**06**	1 19	02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**								
1	**06**	1 19	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	13 Unit	3 unit-	2 Unit	2 Unit	100%		7 unit	53 %
				22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Berfungsi dengan baik gedung kantor	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%		4 Unit	80%
				23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	39 Unit	31 Unit	0 Unit	0 Unit	0 %		34 Unit	87%
				24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ oprasional	Berfungsi dengan baik kendaraan dinas/Operasional yang memadai	40 Unit	6 Unit	10 Unit	10 Unit	100%		29 Unit	72%
				28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Persentase terpeliharanya peralatan Gedung Kantor	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%		4 Unit	80%
1	**06**	1 19	**03**		**Program Peningkatan Disiplin**	**Persentase tersedianya sarana**								

					Aparatur	**peningkatan disiplin aparatur**								
1	**06**	1 19	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Presentase pegawai yang memakai pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
				05	Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	Presentase pegawai yang memakai pakaian hari-hari tertentu	100%	100%	100%	100%	-		100%	100%
				06	Pengadaan pakaian Olah Raga	Presentase Pegawai yang memakai pakaian Olah Raga	100%	-	100%	100%	100%		100%	100%
1	**06**	1 19	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**								
				02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya dokumen laporan keuangan semester	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%		4 dok	80%
				03	Penyusunan pelaporan keuangan Prognosis	Tersedianya pelaporan keuangan Prognosis	5 dok	2 dok	1 dok	0dok	0%		3 dok	60%
				04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 dok	2 dok	1 dok	1dok	100%		4 dok	80%
				05	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja pernagkat daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja pernagkat daerah	30 dok	12 dok	6 dok	4 dok	67%		22 dok	73%
				06	Penyusunan Lakip,LPJ dan LPPD	Tersedianya Dokumen Lakip,LPJ dan LPPD	15 dok	6 dok	3 dok	2 dok	67%		11 dok	73 %
1	**06**	1 19	**17**		**Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**	**Persentase PMKS yang Terlatih**								
				1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial	Jumlah PSM/TKSK yang diberdayakan	300 orang	38 orang	38 orang	38 orang	100 %		136 orang	45 %

					pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya									
				3	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang terlatih	1.200 KK	120 KK	120 KK	120 KK	100 %		480 KK	40%
				6	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah PMKS seluruhnya	11.710 PMKS	7986	2690	8060	86,36			73%
					Penyuluhan Sosial	Jumlah Peserta Penyuluhan Sosial	250 org	50 org	50 org	50 org	100 %		150 0rg	60 %
					Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Basis data Fakir miskin	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %		3 laporan	60 %
					Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), E-Warong dan Kube Jasa	Jumlah Keluarga PKH dan KKS	11000 KK	8393 KK	8393 KK	8393 KK	100 %		9400 KK	86 %
1	**06**	**1 19**	**19**		**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial**								
				2	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	32 LKS	27 LKS	29 LKS	29 LKS	100 %		30 LKS	93 %
				6	Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Jumlah elemen kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan dari Pemerintah	100 org	50 org	55 org	50 org	90 %		95 org	95 %
				7	Lomba Potensi Sumber Kesejahteran Sosial (PSKS)	Jumlah Lomba PSKS	5 keg	5 keg	4 keg	4 keg	100 %		4 keg	95 %
														93 %
1	**06**	1 19	20		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi Sosial								

				1	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Persentase anak terlantar yang terlatih	80 %	30 %	50 %	50 %	100 %		60 %	75 %
				2	Pelayanan Psikososial terhadap anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	Persentase anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) yang dilayani psikososialnya	**80 %**	30 %	50 %	50 %	100 %		60 %	75 %
				3	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mengikuti pelatihan	250 org	30 org	40 org	40 org	100 %		120 org	48 %
				4	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani	**80 %**	30 %	50 %	50 %	100 %		60 %	75 %
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial**								
					Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan	73.232 KK	3435 KK	6263 KK	6263 KK	100 %		15.961 KK	22 %
					Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Persentase korban bantuan bencana alam dan sosial yg tertangani selama masa tanggap darurat	**80 %**	30 %	50 %	50 %	100 %		60 %	75 %
					Pendampingan Kegiatan Keserasian Sosial	Jumlah masyarakat rawan konflik sosial yang tertangani	5 klpk	2 klpk	1 klpk	1 klpk	100 %		3 klpk	60 %
					Asuransi Kesejahteraan Sosial dengan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan jaminan kesehatan daerah	50.000 org	7933 org	16.600 org	16.600 org	100 %		34.147 org	68 %
					Perlindungan terhadap Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran	Persentase korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran yang tertangani	80 %	20 %	35 %	35 %	100 %		70 %	90 %
					Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial	Basis data dana bantuan sosial	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %		3 laporan	60 %

					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah						2 dok	12 Orang	100
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD						1 dok	1 Dok	100
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 dok	1 Dok	100
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD						1 dok	1 Dok	100
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 dok	1 Dok	100
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (triwulan)						4 laporan	4 Dok	100
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah						2 laporan	2 Dok	100
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan						30 org	30 Orang	100
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan						15 org	15 Orang	100
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun						1 lap	1 Dok	100
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran						4 lap	4 Dok	100
					Administrasi Umum Perangkat Daerah										
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan komponen instalasi listrik						12 bulan	12 bulan	100

					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor						12 bulan	12 Bulan	99,97
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan						20 jenis	0	00,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor						30 jenis	30 Jenis	94,54
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan						90714 lembar	90.714	100
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media						1 media	1 Media	100
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan						10 buah	10 Buah	100
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah						65 kali	65 Kali	85,58
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan penatausahaan arsip dinamis skpd						12 bulan	12 Bulan	100
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainya						5 unit	5 Unit	99,81
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor						15 jenis	15 Jenis	100
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun						3300 lembar	3294 Lembar	99,84
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						12 bulan	12 Bulan	100
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan jasa pelayanan umum kantor						12 bulan	12 Bulan	98,60
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara						15 unit	15 Unit	86,97

					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara							25 unit	25 Unit	95,39
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian gedung kantor yang direhab							100 %	0	0
					Program Pemberdayaan Sosial	**Persentase PMKS yang diberdayakan**									
					Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	**Persentase KAT yang diberdayakan**									
					Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah kelompok sasaran yang difasilitasi							250 KK	250 KK	100
					Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	jumlah pendamping yang mengikuti bimtek							60 org	60 Orang	59,94
					Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**									
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	jumlah rekomendasi yang diterbitkan untuk kegiatan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang							10 dok	10 Dok	100
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah PSKS yang dikembangkan**									
					Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta yang mengikuti Bimtek							65 org	65 Orang	53,68
					Program Rehabilitasi Sosial	**Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial**									
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Persentase pelayanan rehabilitasi sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**									
					Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas							150 org	150 Orang	98,05

						Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sandang								
					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan alat bantu						27 org	27 Orang	100
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar dan Lansia terlantar yang mendapatkan Bimbingan fisik, mental , spritual dan sosial						150 org	150 Orang	99,21
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang mendapatkan bimbingan sosial						150 org	150 Orang	88,95
					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Cakupan layanan rujukan yang diberikan						5976 KK	8376 KK	71,34
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Persentase pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**								
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						30 org	30 Orang	79,31
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya						30 org	30 Orang	76,21

					(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Bimbingan Sosial								
					Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya yang menerima akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.						12 bulan	12 Bulan	75,87
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	**Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial**								
					Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**Persentase anak-anak terlantar yang ditangani**								
					Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapat pemantauan dan pemeliharaan						50 org	50 Orang	99,49
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Data base data miskin yang terupdate**								
					Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data base fakir miskin						1 dokumen	1 Dok	100
					Program Penanganan Bencana	**Persentase Korban Bencana yang tertangani dalam masa tanggap darurat**								
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**								
					Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan makanan						300 jiwa	5605 Jiwa	100
					Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan sandang						300 jiwa	488 Jiwa	100
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana**								

						Kabupaten/Kota								
					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah peserta yang megikuti kegiatan kampung siaga bencana						100 org	100 Orang	100
					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah peserta yang megikuti Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						50 org	50 Orang	100

❖ **Penjelasan Tabel 1:**

- Hampir seluruh Program dan Kegiatan yang terdapat dalam DPA Dinas Sosial telah terakomodir sesuai dengan Renstra Dinas Sosial 2019-2022 dengan rata-rata realisasi sebesar 98,15 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Bima adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kota Bima

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi 2023
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase PMKS yang tertangani	80		65%	70%	75%	80%	65,30 %	84,97 %	82,06%	84,24 %	80 %

Sumber:
Dinas Sosial
2019

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Bima termuat pada **tabel kinerja pelayanan (terlampir).**

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Beberapa isu-isu penting yang berkembang dan berkaitan dengan TUPOKSI Dinas Sosial Kota Bima dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kemiskinan, meliputi kelompok warga yang karena sesuatu hal, baik karena faktor internal individu maupun faktor eksternal individu mengakibatkan ketidakmampuan sosial ekonomi atau rentan menjadi miskin yakni: (1) keluarga fakir miskin; (2) wanita rawan sosial ekonomi;
2. Ketelantaran, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami ketelantaran fisik, mental dan sosial yakni: (1) balita terlantar, (2) anak remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) orang dewasa terlantar, (4) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (5) lansia terlantar.
3. Kecacatan, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan sehingga terganggu fungsi sosialnya, yakni: (1) tuna daksa, (2) tuna netra, (3) tuna rungu/wicara, (4) tuna grahita, dan (5) cacat ganda.
4. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian secara normative, yakni: (1) tindak tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/nakal, (3) bekas narapidana, (4) korban narkotika, (5) gelandangan, (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar.
5. Korban Bencana, meliputi korban bencana alam, bencana sosial.
6. Korban Tindak Kekerasan meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti; (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk, (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) lanjut usia korban kekerasan, dan (4) pekerja migrant korban tindak kekerasan.
7. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial meliputi: (1) PSM, (2) Karang Taruna, (3) Orsos/LSM, dan (4) WKSBM (5)

Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), (6) Dunia Usaha

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa rancangan awal RKPD telah sesuai dengan yang diharapkan, baik program dan kegiatan. Rencana kerja yang telah disampaikan Dinas Sosial Kota Bima telah memenuhi usulan masyarakat. Tabel berikut menunjukkan review terhadap rancangan Awal RKPD tahun 2024 **(tabel terlampir)**

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Beberapa bentuk kebijakan nasional yang akan dilaksanakan, antara lain:

1. Melakukan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) guna memperoleh data yang valid sebagai dasar pertimbangan pembuatan program dan kegiatan.
2. Menggali dan mengembangkan kegiatan sesuai potensi yang ada di masing-masing kelurahan.
3. Mendayagunakan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Yayasan/Orsos dan organisasi pemuda karang taruna sebagai ujung tombak dan partner kerja untuk mendeteksi/mengetahui serta mendata permasalahan sosial secara dini.
4. Optimalisasi peran organisasi melalui penguatan sistem dan penataan kelembagaan.

Selanjutnya secara nasional untuk menjalankan kebijakan nasional, telah ditetapkan beberapa strategi, diantaranya ;

1. *Pemberdayaan*, yaitu melakukan pemberdayaan bagi masyarakat; PMKS, PSKS, melalui pemberian kepercayaan dan peluang pada masyarakat, dunia usaha dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mencegah dan mengatasi masalah dalam dirinya sesuai dengan kondisi lingkungannya.
2. *Kemitraan sosial*, yaitu melakukan kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan dan jaringan kerja yang menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra.
3. *Partisipasi sosial*, yakni adanya prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

4. *Advokasi sosial*, yaitu upaya-upaya memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak warga masyarakat yang dilanggar oleh pihak lain agar mampu mendapatkan haknya kembali.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

1. Tujuan

Adapun tujuan secara umum pelaksanaan program atau kegiatan tahun 2024 pada Dinas Sosial Kota Bima adalah : **Menurunnya Tingkat kemiskinan.**

2. Sasaran

Adapun sasarannya adalah **Meningkatnya layanan Kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** yang secara umum dijabarkan dengan pelaksanaan program atau kegiatan tahun 2024 pada Dinas Sosial Kota Bima, diantaranya ;

a. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
b. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
c. Meningkatnya disiplin aparatur
d. Meningkatnya kualitas penyajian laporan capaian kinerja dan keuangan
e. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial
f. Meningkatnya Rehabilitasi Sosial
g. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
h. Meningkatnya Penanganan Bencana

3.3. Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran SKPD merupakan penjabaran teknis daripada visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan. *Program* merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. *Kegiatan* adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh masing-

masing unit kerja yang ada dalam Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program dengan mengerahkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, prasarana dan sarana maupun financial sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dengan Indikator kinerja utamanya adalah penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bima. Program dan Kegiatan yang akan dirancang harus berdasarkan Renstra SKPD seperti pada tabel **TABEL T - C.33 (terlampir).**

BAB IV
P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah strategis, target dan sasaran yang tepat. Oleh karena itu diharapkan mempertegas posisi dan peranan pembangunan kesejahteraan sosial dan dapat menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan (*stakeholders*) baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan permasalahan yang kompleks dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial secara lokal, dan regional.

Demikian dan semoga bermanfaat bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dibidang kesejahteraan Sosial Kota Bima.

Raba-Bima, Januari 2024
Kepala Dinas Sosial Kota Bima,

PEMERINTAH KOTA DINAS SOSIAL BIMA

Yuliana, S.Sos
Pembina TK. I, (IV/b)
NIP. 19720213 199402 2 001

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bima tahun 2018-2023

(Dalam ribuan rupiah)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-						Realisasi Capaian tahun ke-						Rasio Capaian tahun ke-					
										2108	2019	2020	2021	2022	2023	2108	2019	2020	2021	2022	2023	2108	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(11)	(12)	(13)	(14)			(16)	(17)	(18)			(19)
1	**Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)**	**Meningkatnya perlindungan Sosial bagi PMKS**	**Persentase PMKS yang tertangani**	**1 06 01 00**	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase kegiatan administrasi perkantoran**				**80%**	**85%**	**90%**	**98%**			**80%**	**85%**	**90%**				**80%**	**85%**	**90%**			
				1 06 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat (caraka/petugas pengantar surat)	cakupan surat yang terkirim				1200	1250	1300				1200	1250	1300				100	100	100			
				1 06 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)	cakupan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik				12	12	12				12	12	12				100	100	100			
				1 06 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Cakupan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas				4	6	8				4	6	8				100	100	100			
				1 06 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi Keuangan)	Cakupan pembayaran jasa administrasi keuangan				12	12	12				12	12	12				100	100	100			
				1 06 01 08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih				0	0	510				0	0	510				0	0	100			
				1 06 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan penyediaan ATK				31	30	31				31	30	31				100	100	100			
				1 06 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan penggandaan dan cetak bahan				37.000	38.000	40.000				35.000	37.000	39.500				94	97	98,75			
				1 06 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen intalasi listrik				12	12	12				12	12	12				100	100	100			
				1 06 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor				6	7	7				5	6	6				83	85	85			
				1 06 01 14	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				0	0	0				0	0	0				0	0	0			
				1 06 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan kerjasama dengan media				5	5	6				5	5	6				100	100	100			
				1 06 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Kegiatan makan minum rapat				25	30	45				30	30	45				120	100	100			
				1 06 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				60	75	75				60	75	75				100	100	100			
				1 06 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Cakupan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				0	0	50				0	0	50				0	0	100			
2				**1 06 02 00**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**				**83%**	**84%**	**100%**				**83%**	**84%**	**100%**				**83%**	**84%**	**100%**			
				1 06 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas baru				0	1	0				0	1	0				0	100	0			
				1 06 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor				25	25	30				25	25	30				100	100	100			
				1 06 02 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur				5	0	5				5	0	5				100	0	100			
				1 06 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan gedung kantor yang direhab/pelihara				100%	100%	100%				100%	100%	100%				100	100	100			
				1 06 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				12	12	12				12	12	12				100	100	100			
3				**1 06 03 00**	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**Persentase disiplin aparatur**				**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**	**100%**			
				1 06 03 01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah seragam dinas lengkap yang diadakan				27 stel	26 stel	27 stel				27 stel	26 stel	27 stel				27 stel	26 stel	27 stel			
				1 06 03 02	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan				0	0	0				0	0	0				0	0	0			
				1 06 03 06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah seragam olahraga yang diadakan				27 stel	26 stel	27 stel				27 stel	26 stel	27 stel				27 stel	26 stel	27 stel			
4				**1 06 06 00**	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Nilai LKIP**				**CC**	**B**	**B**				**CC**	**B**	**B**				**CC**	**B**	**B**			
				1 06 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD				2 dok	2 dok	2 dok				2 dok	2 dok	2 dok				2 dok	2 dok	2 dok			
				1 06 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester				1 dok	1 dok	1 dok				1 dok	1 dok	1 dok				1 dok	1 dok	1 dok			
				1 06 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran				0	2 dok	0				0	2 dok	0				0	2 dok	0			
				1 06 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun				1 dok	1 dok	1 dok				1 dok	1 dok	1 dok				1 dok	1 dok	1 dok			
				1 06 06 05	Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja				5 dok	5 dok	5 dok				5 dok	5 dok	5 dok				5 dok	5 dok	5 dok			
				1 06 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan				5 dok	5 dok	5 dok				5 dok	5 dok	5 dok				5 dok	5 dok	5 dok			
5				**1 06 21 00**	**Program pemberdayaan Fakir Miskin**	**Persentase PMKS yang Terlatih**				**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**	**100%**			
				1 06 15 01	Pelatihan Tenaga Pendamping Sosial Pemberdayaan fakir miskin	Jumlah Tenaga Pendamping Sosial yang mengikuti pelatihan				43	43	43				43	43	43				100	100	100			
				1 06 15 02	Bimbingan Tekhnis Kelompok usaha bersam (KUBE) bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang mengikuti Bimtek				120	120	120				120	120	120				100	100	100			
				1 06 15 09	Penyuluhan Sosial	Jumlah Peserta Penyuluhan Sosial				0	0%	50 org				0	0%	50 org				0	0	0			

				1	06	15	10	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan rujukan terpadu yang difasilitasi oeh puskesos				0	0	0				0	0	0				0	0	0						
				1	06	15	11	Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), E-Warong dan Kube Jasa	Jumlah Keluarga Penerima manfaat yang memperoleh BPNT				0	0	0				0	0	0				0	0	0						
6				**1**	**06**	**16**	**00**	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi Sosial**				**99,64**	**99,64**	**99,64**				**99,64**	**99,64**	**99,64**				**99,64**	**99,64**	**99,64**						
				1	06	16	10	Bantuan Bencana Sosial	Persentase korban bantuan bencana alam dan sosial yg tertangani selama masa tanggap darurat				80	80	80				80	80	80				100	100	100						
				1	06	16	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan monev				1 laporan	1 laporan	1 laporan				1 laporan	1 laporan	1 laporan				2 laporan	3 laporan	4 laporan						
				1	06	16	12	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan				3745 kk	3745 kk	3745 kk				3745 kk	3745 kk	3745 kk				3746 kk	3747 kk	3748 kk						
				1	06	16	13	Pendampingan Kegiatan Keserasian Sosial	Jumlah masyarakat rawan konflik sosial yang tertangani				2 klmpk	2 klmpk	3 klmpk				2 klmpk	2 klmpk	3 klmpk				6 klmpk	7 klmpk	8 klmpk						
				1	06	16	14	Asuransi Kesejahteraan Sosial dengan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan jaminan kesehatan daerah				0	0	3795 KK				0	0	3795 KK				1202 KK	1203 KK	3795 KK						
				1	06	16	15	Perlindungan terhadap Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran	Persentase korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran yang tertangani				0%	0%	0%				0%	0%	0%				80%	80%	80%						
				1	06	16	16	Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial	Basis data dana bantuan sosial				0	0	0				0	0	0				0	0	0						
7				**1**	**06**	**17**	**00**	**Program Pembinaan Anak Terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)**	**Jumlah anak terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)**				**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**	**100%**						
				1	06	17	02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Persentase anak terlantar yang terlatih				100%	100%	100%				100%	100%	100%				100	100	100						
				1	06	17	06	Pelayanan Psikososial terhadap anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	Persentase anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) yang dilayani psikososialnya				0%	0%	0%				0%	0%	0%				0%	0%	0%						
				1	06	17	06	Monitoring dan Evaluasi	Laporan Monev				0	0	0				0	0	0				0	0	0						
8				**1**	**06**	**18**	**xx**	**Program pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma**	**Persentase Penyandang Cacat dan trauma yang tertangani**				**2 Dok**	**2 Dok**	**0**				**2 Dok**	**2 Dok**	**0**				**2 Dok**	**2 Dok**	**0**						
				1	06	18	04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mengikuti pelatihan				0	20 org	0				0	20 org	0				0	0	0						
				1	06	18	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan monev				0	0	0				0	0	0				0	0	0						
9				**1**	**06**	**20**	**xx**	**Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya)**	**Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani**				**80%**	**80%**	**0%**				**80%**	**80%**	**0%**				**80%**	**80%**	**0%**						
				1	06	20	04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani				0%	70%	0%				0%	70%	0%				0	100	0						
10				**1**	**06**	**21**	**00**	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial**				**100%**	**2 Dok**	**100%**				**100%**	**2 Dok**	**100%**				**100%**	**2 Dok**	**100%**						
				1	06	21	03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial				19 LKS	21 LKS	21 LKS				19 LKS	21 LKS	21 LKS				19 LKS	21 LKS	21 LKS						
				1	06	21	05	Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Jumlah elemen kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan dari Pemerintah				30 org	35 org	40 org				30 org	35 org	40 org				100	100	100						
				1	06	21	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan monev				0	0	0				0	0	0				0	0	0						
				1	06	21	07	Lomba Potensi Sumber Kesejahteran Sosial (PSKS)	Jumlah Lomba PSKS				0	0	5 keg				0	0	5 keg				0	0	5 keg						
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																										
								Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah																										
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				12 Dokumen									12 Dokumen											
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen									1 Dokumen											
								Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen									1 Dokumen											
								Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen									1 Dokumen											
								Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen									1 Dokumen											
								Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (triwulan)				4 Dokumen									4 Dokumen											
								Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				2 Dokumen									2 Dokumen											
								Administrasi Keuangan																										

								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan				34 orang											34 orang								
								Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah ASN yang memperoleh jasa administrasi keuangan				15 orang										15 orang								
								Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan akhir tahun				4 Dokumen										4 Dokumen								
								Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran				1 Dokumen										1 Dokumen								
								Administrasi Umum					**24 kali**										**24 kali**								
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan komponen instalasi listrik				12 bulan										12 bulan								
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan K	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor				13 bulan										13 bulan								
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan				20 jenis										20 jenis								
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor				30 jenis										30 jenis								
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggand	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan				90714 lembar										90714 lembar								
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media				1 media										1 media								
								Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan				10 buah										10 buah								
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah				65 kali										65 kali								
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan penatausahaan arsip dinamis skpd				12 bulan										12 bulan								
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainya				3 unit										3 unit								
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor				1 Dokumen										1 Dokumen								
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun				3300 lembar										3300 lembar								
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan										12 bulan								
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan jasa pelayanan umum kantor				12 bulan										12 bulan								
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				15 unit%										15 unit%								
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				25 unit										25 unit								
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian gedung kantor yang direhab				100%										100%								
								PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					**40%**										**40%**								
								Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	***Persentase Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)***				**40%**										**40%**								
								Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Kelompok Sasaran yang di Fasilitasi				250 KK										250 KK								
								Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Pendamping yang Mengikuti Bimtek				60 orang										60 orang								
								Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	jumlah kegiatan undian berhadiah				2 kali										2 kali								
								Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah PSKS yang diberdayakan**																								
								Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah pendamping yang diberikan bintek				60 orang										60 orang								
								PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase pelaksanaan program Rehailitasi Sosial**				**40%**										**40%**								
								Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Persentase pelayanan rehabilitasi dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**																								

							Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Bantuan Sandang				150 orang									150 orang									
							Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota																						
							Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, yang Mendapatkan Alat Bantu				27 orang									27 orang									
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Ke	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																						
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lansia Terlantar yang Mendapatkan Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial				150 orang									150 orang									
							Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat				150 orang									150 orang									
							Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota																						
							Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS Lainnya yang menerima Akses Kelayanan Pendidikan dan kesehatan Dasar				5975 KK									5975 KK									
							Pemberian Layanan Data dan Penga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota																						
							Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota																						
							Pemberian Pelayanan Penelusuran K	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																						
							Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota																						
							Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	**Persentase pelayanan rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**																						
							Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota																						
							Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan bantuan sandang																						
							Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota																						
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				30 orang									30 orang									
							Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan Bimbingan Sosial				30 orang									30 orang									
							Pemberian Layanan Rujukan	Cakupan Layanan Rujukan yang Diberikan				12 bln									12 bln									
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase pelaksanaan program Perlindungan dan Jamnian Sosial**				**40%**									**40%**									
							Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar																						
							Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota																						
							Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapat Pemantauan dan Pemeliharaan				50 orang									50 orang									
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																						
							Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Database Fakir Miskin				1 dokumen									1 dokumen									
							Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																						

							Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																						
							PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase pelaksanaan program Bencana**				**100%**									**100%**								
							Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**				**100%**									**100%**								
							Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Makanan				300 jiwa									300 jiwa								
							Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Sandang				300 jiwa									300 jiwa								
							Penyediaan Tempat Penampungan I	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota																						
							Penanganan Khusus bagi Kelompok	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota																						
							Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota																						
							Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**				**100%**									**100%**								
							Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Kampung Siaga Bencana				100 orang									100 orang								
							Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				50 orang									50 orang								

Raba-Bima, 2024

Mengetahui

Kepala Dinas Sosial Kota Bima,

YULIANA, S.Sos

Pembina, (IV/a)

Nip. 19720213 199402 1 181

Tabel
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Dinas sosial Kota Bima

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program / Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program / Kegiatan**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kota Bima**			**5.362.141.272**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kota Bima**			**5.362.141.272**
1	***Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah***	**Kota Bima**			**81.338.000**	***Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah***	**Kota Bima**			**81.338.000**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 Dokumen	9.144.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 Dokumen	9.144.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.916.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.916.000
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.916.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.916.000
4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.816.000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.816.000
5	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.916.000	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.916.000
6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (triwulan)	4 Dokumen	17.965.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (triwulan)	4 Dokumen	17.965.000
7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bima	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	21.665.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bima	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	21.665.000
2	***Administrasi Keuangan***	**Kota Bima**			**3.890.618.002**	***Administrasi Keuangan***	**Kota Bima**			**3.890.618.002**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	36 orang	3.702.458.802	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	36 orang	3.702.458.802
2	Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	41.423.000	Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	41.423.000
3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah ASN yang memperoleh jasa administrasi keuangan	15 orang	124.000.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah ASN yang memperoleh jasa administrasi keuangan	15 orang	124.000.000
4	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	4 Dokumen	14.063.600	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	4 Dokumen	14.063.600
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	1 Dokumen	8.672.600	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	1 Dokumen	8.672.600
3	***Administrasi Umum***	**Kota Bima**		**24 kali**	**462.774.000**	***Administrasi Umum***	**Kota Bima**		**24 kali**	**462.774.000**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	Cakupan komponen instalasi listrik	12 bulan	13.530.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	Cakupan komponen instalasi listrik	12 bulan	13.530.500
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor	13 bulan	59.112.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor	13 bulan	59.112.900
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bima	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 jenis	2.300.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bima	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 jenis	2.300.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima	Jumlah logistik kantor	30 jenis	59.805.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima	Jumlah logistik kantor	30 jenis	59.805.000
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	90714 lembar	43.618.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	90714 lembar	43.618.500
6	Penyediaan Bahan/Material	Kota Bima	Jumlah bahan/material yang disediakan	10 buah	1.936.000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Bima	Jumlah bahan/material yang disediakan	10 buah	1.936.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	65 kali	251.840.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	65 kali	251.840.000
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Kota Bima**	Cakupan penatausahaan arsip dinamis skpd	12 bulan	30.631.100	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Kota Bima**	Cakupan penatausahaan arsip dinamis skpd	12 bulan	30.631.100
4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**			**77.922.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**			**77.922.000**
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainya	3 unit	67.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainya	3 unit	67.000.000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	1 Dokumen	10.922.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	1 Dokumen	10.922.000

5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**			**358.207.270**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**			**358.207.270**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	3300 lembar	100.228.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	3300 lembar	100.228.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	33.697.170	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	33.697.170
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima	Cakupan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	224.282.100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima	Cakupan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	224.282.100
6	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Kota Bima**			**491.282.000**	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Kota Bima**			**491.282.000**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	15 unit%	233.122.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	15 unit%	233.122.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	25 unit	21.160.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	25 unit	21.160.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Capaian gedung kantor yang direhab	100%	237.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Capaian gedung kantor yang direhab	100%	237.000.000
B	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**Persentase PSKS yang diberdayakan**	**80%**	**150.136.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**Persentase PSKS yang diberdayakan**	**80%**	**150.136.000**
1	***Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	**Kota Bima**	**Jumlah dokumen izin/rekomendasi yang diterbitkan**		**20.000.000**	***Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	**Kota Bima**	**Jumlah dokumen izin/rekomendasi yang diterbitkan**		**20.000.000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 dokumen	20.000.000
2	***Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota***	**Kota Bima**	**Persentase PSKS yang terlatih**	**30%**	**130.136.000**	***Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota***	**Kota Bima**	**Persentase PSKS yang terlatih**	**30%**	**130.136.000**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	130.136.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	130.136.000
C	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial**	**60%**	**1.031.624.800**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial**	**60%**	**1.031.624.800**
1	***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial***		**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terlayani**	**40%**	**806.552.500**	***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial***		**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terlayani**	**40%**	**806.552.500**
1	Penyediaan Permakanan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	330 orang	210.000.000	Penyediaan Permakanan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	330 orang	210.000.000
2	Penyediaan Sandang	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	210 orang	335.020.500	Penyediaan Sandang	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	210 orang	335.020.500
3	Penyediaan Alat Bantu	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	26 orang	96.153.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	26 orang	96.153.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	23.280.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	23.280.000
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Bima	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	65.340.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Bima	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	65.340.000

5	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Bima	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	22.839.000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Bima	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	22.839.000
	Fasilitasi Pembuatan NIK, Akta kelahiran, surat nikah, dan KIA	Kota Bima	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	15.000.000	Fasilitasi Pembuatan NIK, Akta kelahiran, surat nikah, dan KIA	Kota Bima	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	15.000.000
6	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	7.500.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	7.500.000
	Pemberian layanan data dan pengaduan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	10.000.000	Pemberian layanan data dan pengaduan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	10.000.000
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	4.420.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	4.420.000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	10.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	10.000.000
	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Bima	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	7.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Bima	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	7.000.000
2	***Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial***	**Kota Bima**	**Persentase pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**		***225.072.300***	***Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial***	**Kota Bima**	**Persentase pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**		***225.072.300***
1	Penyediaan Permakanan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	10.236.500	Penyediaan Permakanan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	10.236.500
2	Penyediaan Sandang	Kota Bima	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan bantuan sandang	35 orang	8.750.000	Penyediaan Sandang	Kota Bima	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan bantuan sandang	35 orang	8.750.000
3	Penyediaan Alat Bantu	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang	10.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang	10.000.000
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	169.897.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	169.897.000
5	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Kota Bima	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	13.050.000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Kota Bima	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	13.050.000
6	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Bima	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	15 orang	3.178.800	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Bima	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	15 orang	3.178.800
7	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Bima	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	9.960.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Bima	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	9.960.000
D	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**3.245.753.702**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**3.245.753.702**
1	***Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar***		**Persentase anak-anak terlantar yang ditangani**	**30%**	***55.200.000***	***Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar***		**Persentase anak-anak terlantar yang ditangani**	**30%**	***55.200.000***

1	*Pejangkauan Anak Anak terlantar*	Kota Bima	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	16.367.000	*Pejangkauan Anak Anak terlantar*	Kota Bima	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	16.367.000
2	Rujukan anak-aak terlantar	Kota Bima	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 orang	16.922.000	Rujukan anak-aak terlantar	Kota Bima	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 orang	16.922.000
3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Bima	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	21.911.000	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Bima	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	21.911.000
2	***Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***		**Jumah Fakir miskin yang verifikasi dan validasi**	**9.200 orang**	***3.190.553.702***	***Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***		**Jumah Fakir miskin yang verifikasi dan validasi**	**9.200 orang**	***3.190.553.702***
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	104.651orang	172.162.900	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	104.651orang	172.162.900
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	33.530 KK	45.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	33.530 KK	45.000.000
3	Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga	Kota Bima	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 KK	2.952.323.302	Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga	Kota Bima	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 KK	2.952.323.302
4	Fasilitasi bantuanpengembangan ekonomi masyarakat	Kota Bima	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	21.067.500	Fasilitasi bantuanpengembangan ekonomi masyarakat	Kota Bima	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	21.067.500
E	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**100%**	**207.460.000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**100%**	**207.460.000**
1	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial**	**100%**	**91.740.000**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial**	**100%**	**91.740.000**
1	Penyediaan Makanan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	22.365.000	Penyediaan Makanan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	22.365.000
2	Penyediaan Sandang	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	44.650.000	Penyediaan Sandang	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	44.650.000
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Kota Bima	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 unit	4.750.000	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Kota Bima	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 unit	4.750.000
4	Penanganan khusu bagi kelompok rentan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	13.175.000	Penanganan khusu bagi kelompok rentan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	13.175.000
5	Pelayanan dukungan psikososial	Kota Bima	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	6.800.000	Pelayanan dukungan psikososial	Kota Bima	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	6.800.000
2	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**Persentase kampung siaga bencana yang terbentuk**	**100%**	**115.720.000**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**Persentase kampung siaga bencana yang terbentuk**	**100%**	**115.720.000**
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Bima	Jumlah kelurahan usulan pelaksanaan pembentukan kampung siaga bencana	2 kelurahan	6.255.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Bima	Jumlah kelurahan usulan pelaksanaan pembentukan kampung siaga bencana	2 kelurahan	6.255.000
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Bima	Jumlah peserta yang megikuti Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	40 orang	109.465.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Bima	Jumlah peserta yang megikuti Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	40 orang	109.465.000
	TOTAL				**9.997.115.774**					**9.997.115.774**

Raba-Bima, 2024

Mengetahui

Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Bima,

YULIANA, S.Sos
Pembina TK. I, (IV/b)
Nip. 19720213 199402 1 181

TABEL T - C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KOTA BIMA

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**5.362.141.272**	**APBD II**			**5.898.355.399**
	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				**81.338.000**	**APBD II**			**89.471.800**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Bima	12 Dokumen	9.144.000	APBD II		12 Dokumen	10.058.400
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	7.916.000	APBD II		1 Dokumen	8.707.600
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	7.916.000	APBD II		1 Dokumen	8.707.600
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	8.816.000	APBD II		1 Dokumen	9.697.600
	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	7.916.000	APBD II		1 Dokumen	8.707.600
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (triwulan)	Kota Bima	4 Dokumen	17.965.000	APBD II		4 Dokumen	19.761.500
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bima	2 Dokumen	21.665.000	APBD II		2 Dokumen	23.831.500
	Administrasi Keuangan		Kota Bima		**3.890.618.002**	**APBD II**			**4.279.679.802**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Kota Bima	36 orang	3.702.458.802	APBD II		36 orang	4.072.704.682
	Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bima	2 dokumen	41.423.000	APBD II		2 dokumen	45.565.300
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah ASN yang memperoleh jasa administrasi keuangan	Kota Bima	15 orang	124.000.000	APBD II		15 orang	136.400.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	4 Dokumen	14.063.600	APBD II		4 Dokumen	15.469.960
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Kota Bima	1 Dokumen	8.672.600	APBD II		1 Dokumen	9.539.860
	Administrasi Umum		Kota Bima	**24 kali**	**462.774.000**	**APBD II**		**24 kali**	**509.051.400**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan komponen instalasi listrik	Kota Bima	12 bulan	13.530.500	APBD II		12 bulan	14.883.550
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	13 bulan	59.112.900	APBD II		13 bulan	65.024.190
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Bima	20 jenis	2.300.000	APBD II		20 jenis	2.530.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor	Kota Bima	30 jenis	59.805.000	APBD II		30 jenis	65.785.500

						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	Kota Bima	90714 lembar	43.618.500	APBD II		90714 lembar	47.980.350
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	Kota Bima	10 buah	1.936.000	APBD II		10 buah	2.129.600
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	Kota Bima	65 kali	251.840.000	APBD II		65 kali	277.024.000
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan penatausahaan arsip dinamis skpd	Kota Bima	12 bulan	30.631.100	APBD II		12 bulan	33.694.210
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Bima		**77.922.000**	**APBD II**			**85.714.200**
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainya	Kota Bima	3 unit	67.000.000	APBD II		3 unit	73.700.000
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	Kota Bima	1 Dokumen	10.922.000	APBD II		1 Dokumen	12.014.200
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Bima		**358.207.270**	**APBD II**			**394.027.997**
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	Kota Bima	3300 lembar	100.228.000	APBD II		3300 lembar	110.250.800
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	12 bulan	33.697.170	APBD II		12 bulan	37.066.887
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan jasa pelayanan umum kantor	Kota Bima	12 bulan	224.282.100	APBD II		12 bulan	246.710.310
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Bima		**491.282.000**	**APBD II**			**540.410.200**
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kota Bima	15 unit	233.122.000	APBD II		15 unit	256.434.200
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Kota Bima	25 unit	21.160.000	APBD II		25 unit	23.276.000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian gedung kantor yang direhab	Kota Bima	100%	237.000.000	APBD II		100%	260.700.000
						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase PSKS yang diberdayakan**	Kota Bima	**60%**	**150.136.000**	**APBD II**		**60%**	**165.149.600**
						Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen izin/rekomendasi yang diterbitkan**	Kota Bima	**12 dokumen**	**20.000.000**	**APBD II**			**22.000.000**
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Bima	12 dokumen	20.000.000	APBD II		12 dokumen	**22.000.000**
						Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PSKS yang terlatih**	Kota Bima	**50 orang**	**130.136.000**	**APBD II**		**50 orang**	**143.149.600**
						Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	50 orang	130.136.000	APBD II		50 orang	143.149.600
						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial**	Kota Bima	**60%**	**1.031.624.800**	**APBD II**		**60%**	**1.134.787.280**
						Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terlayani**	Kota Bima	**40%**	**806.552.500**	**APBD II**		**40%**	**887.207.750**
						Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	330 orang	210.000.000	APBD II		330 orang	231.000.000

						Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	210 orang	335.020.500	APBD II		210 orang	368.522.550
						Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	26 orang	96.153.000	APBD II		26 orang	105.768.300
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	12 orang	23.280.000	APBD II		12 orang	25.608.000
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	150 orang	65.340.000	APBD II		150 orang	71.874.000
						Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	100 orang	22.839.000	APBD II		100 orang	25.122.900
						Fasilitasi Pembuatan NIK, Akta kelahiran, surat nikah, dan KIA	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	30 orang	15.000.000	APBD II		30 orang	16.500.000
						Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	36 orang	7.500.000	APBD II		36 orang	8.250.000
						Pemberian layanan data dan pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	20 orang	10.000.000	APBD II		20 orang	11.000.000
						Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	10 orang	4.420.000	APBD II		10 orang	4.862.000
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	10 orang	10.000.000	APBD II		15 orang	11.000.000
						Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	10 orang	7.000.000	APBD II		10 orang	7.700.000
						Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	**Persentase pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Kota Bima**		***225.072.300***				***247.579.530***
						Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	15 orang	10.236.500	APBD II		15 orang	11.260.150
						Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan bantuan sandang	Kota Bima	35 orang	8.750.000	APBD II		35 orang	9.625.000
						Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	4 orang	10.000.000	APBD II		4 orang	11.000.000

						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	50 orang	169.897.000	APBD II		50 orang	186.886.700
						Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	30 orang	13.050.000	APBD II		30 orang	14.355.000
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kota Bima	15 orang	3.178.800			15 orang	3.496.680
						Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	20 orang	9.960.000	APBD II		20 orang	10.956.000
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		**Kota Bima**		**3.245.753.702**	**APBD II**			**3.570.329.072**
						Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**Persentase anak-anak terlantar yang ditangani**	**Kota Bima**	**30%**	***55.200.000***			**30%**	***60.720.000***
						Pejangkauan Anak Anak terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	20 orang	16.367.000	APBD II		20 orang	18.003.700
						Rujukan anak-aak terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	24 orang	16.922.000	APBD II		24 orang	18.614.200
						Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	50 orang	21.911.000	APBD II		50 orang	24.102.100
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumah Fakir miskin yang verifikasi dan validasi**	**Kota Bima**	**9.200 orang**	***3.190.553.702***	**APBD II**		**9.200 orang**	***3.509.609.072***
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kota Bima	104.651orang	172.162.900	APBD II		104.651orang	189.379.190
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kota Bima	33.530 KK	45.000.000	APBD II		33.530 KK	49.500.000
						Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	6.828 KK	2.952.323.302	APBD II		6.828 KK	3.247.555.632
						Fasilitasi bantuanpengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	5 orang	21.067.500	APBD II		5 orang	23.174.250
						PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Kota Bima	**100%**	**207.460.000**			**100%**	**228.206.000**
						Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial**	Kota Bima	**100%**	**91.740.000**	**APBD II**		**100%**	**100.914.000**
						Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	100 orang	22.365.000	APBD II		100 orang	24.601.500

						Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	100 orang	44.650.000	APBD II		100 orang	49.115.000
						Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	2 unit	4.750.000	APBD II		2 unit	5.225.000
						Penanganan khusu bagi kelompok rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	10 orang	13.175.000	APBD II		10 orang	14.492.500
						Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	20 orang	6.800.000	APBD II		20 orang	7.480.000
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase kampung siaga bencana yang terbentuk**	**Kota Bima**	**100%**	**115.720.000**			**100%**	**127.292.000**
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kelurahan usulan pelaksanaan pembentukan kampung siaga bencana	Kota Bima	2 kelurahan	6.255.000	APBD II		2 kelurahan	6.880.500
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah peserta yang megikuti Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Bima	40 orang	109.465.000	APBD II		40 orang	120.411.500
						TOTAL				**9.997.115.774**				**10.996.827.351**

Raba-Bima, 2024

Mengetahui

Kepala Dinas Sosial Kota Bima,

YULIANA, S.Sos

Pembina TK. I, (IV/b)

Nip. 19720213 199402 1 181

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KESEHATAN KOTA BIMA
TAHUN 2025



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi– tingginya yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Lebih dari pada itu, peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan menjadi sangat penting. Oleh karenanya dipandang perlu untuk mengadakan perencanaan yang baik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan tahun 2025.

Pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan tercermin dalam strategi dan sasaran utama Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2026 yang dituangkan dalam Renja ini. Program-program pembangunan kesehatan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bima diarahkan untuk Penurunan angka stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi, meningkatnya rumah tangga ber PHBS, menurunnya penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi. Penerapan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKMB) diharapkan mampu menanggulangi faktor resiko masalah kesehatan setempat, akan terus dikembangkan.

Melalui kesempatan ini kepada semua unsur Dinas Kesehatan Kota Bima, untuk saling bahu membahu dalam menyenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan tujuan Dinas Kesehatan Kota Bima, yaitu "Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat".

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bima ini dilakukan oleh semua unsur Dinas Kesehatan. Dan telah mengacu pada kebijakan– kebijakan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada para pihak atas perhatian, dan kontribusinya dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Bima ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah kita berlindung dan berserah diri. Semoga upaya kita bersama untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan Kota Bima mendapatkan rahmat, hidayat, dan ridho-Nya, Amin.

Raba-Bima, Desember 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Bima



Ahmad, S.Sos

NIP.19660704 1986081003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
BAB I.	PENDAHULUAN		1
	1.1	LATAR BELAKANG	1
	1.2	DASAR HUKUM	3
	1.3	MAKSUD DAN TUJUAN	5
	1.4	SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II.	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN 2019		8
	2.1	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	8
	2.2	ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	25
	2.3	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA BIMA	29
BAB III.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		31
	3.1	TELAAHAN TERHADAPA KEBIJAKAN NASIONAL	31
	3.2	TUJUAN DAN SASARAN	32
	3.3	PROGRAM DAN KEGIATAN	33
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		49
BAB V.	PENUTUP		50

LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KESEHATAN
Jln.. Soekarno Hatta No. 66 Raba – Bima Telp. (0374) 646044

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BIMA
NOMOR: / / DIKES-01 / XII / 2025

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA BIMA
TAHUN 2025

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan, sesuai amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan;

b. bahwa rencana kerja sebagaimana yang dimaksud pada huruf a telah disusun sebagai dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan dan perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 100, Tambahan lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/II/SK/2004 tentang Sistem kesehatan Nasional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/ Menkes / Per/ XI/ 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Kedua : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 Sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga : Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kota Bima dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan tahun 2025

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada Tanggal : Agustus 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BIMA,



Ahmad, S.Sos
NIP.19660704 1986081003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan urutan pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bima hendaknya disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Untuk menjamin keberlanjutan tersebut, rencana pembangunan kesehatan Kota Bima dituangkan dalam wujud dokumen perencanaan yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 25 ayat 2, dimana dalam pasal tersebut diatur tentang tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang. Dalam Undang-undang itu juga disebutkan bahwa Renstra SKPD sebagai rencana 5 tahunan SKPD, harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD.

Sejalan dengan hal tersebut di atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 disebutkan bahwa bidang kesehatan merupakan kewenangan/ urusan wajib bagi daerah sehingga kabupaten mempunyai kewenangan yang seluas-luasnya dalam pengaturan dan penyelenggaraan upaya kesehatan. Dengan demikian kabupaten/kota mempunyai peluang sekaligus tantangan untuk menyusun pembangunan kesehatan yang spesifik daerah guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Secara substansi, Renja SKPD memuat evaluasi Renja SKPD tahun sebelumnya, analisis terhadap evaluasi dan rancangan prioritas pembangunan kesehatan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif.

Dokumen Renja SKPD 2025 merupakan dokumen penjabaran tekhnis Rencana Strategis lima tahunan Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2025-2026 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026. Selain itu dalam Renja SKPD ini juga merupakan dokumen perencanaan yang memuat data dan informasi tentang kebijakan dan prioritas program serta rencana aktivitas detail masing-masing program prioritas di bidang-bidang lingkup Dinas Kesehatan Kota Bima serta melibatkan Puskesmas pada Tahun anggaran 2025 dari berbagai sumber pembiayaan. Renja SKPD ini juga memiliki peran strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis di bidang kesehatan tingkat kota, provinsi dan pusat. Oleh karenanya penyusunan Renja SKPD tahun 2025 ini juga mengacu kepada Kebijakan-kebijakan di tingkat Provinsi dan juga nasional, yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Pusat, Renstra Kementerian Kesehatan, *Standar Pelayanan Minimal* bidang kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Stnadar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan) dan juga rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diarahkan pada meningkatnya kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatnya masyarakat berPHBS.

Untuk mendukung arah kebijakan bidang kesehatan sebagaimana tersebut di atas maka langkah yang tepat adalah dengan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang kesehatan tahun 2025 dengan maksud untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penggangaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Penyusunan Renja bidang kesehatan tahun 2025 dimulai dari analisis situasi dan kondisi dengan menggunakan data-data yang akurat, baik yang menyangkut berbagai masalah kesehatan maupun pelayanan kesehatan yang ada. Melalui analisa tersebut kita dapat mengetahui kondisi saat ini dengan kondisi saat yang akan datang dengan demikian kita dapat menentukan target yang diharapkan maupun trend dalam beberapa tahun kedepan dengan demikian kita dapat menentukan langkah kegiatan apa yang perlu dilakukan saat ini dan kedepannya. Sehingga ditetapkan Tujuan strategis yaitu Angka Harapan Hidup. Dan sasaran Strategis terdiri dari kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat dan masyarakat ber PHBS. Dalam menjalankan tujuan dan sasaran tersebut Dinas Kesehatan akan melakukan berbagai upaya yang diwujutkan dalam berbagai program-proagram kerja.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta untuk dapat mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia di Kota Bima maka dipandang perlu disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bidang Kesehatan TA. 2025 yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2025, termasuk di dalamnya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Dinas Kesehatan tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

i. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

l. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);

m. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;

n. Peraturan Walikota Bima Nomor 90 Tahun 2021 tentang tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Bima.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Bima agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bima pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan dalam Renja masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Renja ditetapkan melalui Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RPD, serta merupakan bagian dari

rangkaian kegiatan penyusunan RPD.

Adapun tujuan penyusunan Renja bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan Umum**: Untuk memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai referensi dan pedoman dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun 2025 dan proses awal penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah) Kota Bima tahun anggaran 2025.
2. **Tujuan Khusus**:
   a. Melakukan evaluasi terhadap capaian rencana kerja Dinas Kesehatan tahun lalu dan capaian rencana strategis (Renstra).
   b. Melakukan analisis terhadap pelayanan kesehatan di Kota Bima terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama, Indikator SPM dan Indikator Program dan Kegiatan.
   c. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bima pada tahun 2025.
   d. Memberikan arah kebijakan dan aktivitas operasional program kesehatan baik itu di lingkup Dinas Kesehatan Kota Bima, Puskesmas dan Jaringannya serta para pihak terkait.
   e. Sebagai bahan Evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam LAKIP Dinas Kesehatan Kota Bima.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bima 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 DASAR HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN 2024
- 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
- 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA BIMA

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAPA KEBIJAKAN NASIONAL

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan pada Tahun 2023 tetap mengacu pada pencapaian indikator program kesehatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2026 maupun dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2026.

Evaluasi kinerja merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang, sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan dalam melaksanakan pengembanan visi dan misi Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja berpedoman pada ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Penetapan Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Kota Bima tahun 2025 didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu tujuan dan sasaran. Berdasarkan Dokumen penetapan kinerja Dinas Kesehatan tahun 2023 terdapat 2 Sasaran Strategis dan 4 Sasaran Program. Adapun rincian dari capaian masing-masing indikator kinerja yang terdapat dalam Penetapan Kinerja (PK) untuk tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 2.1

Rekapan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Pogram /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TARGET capaian KINERJA Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Pd Tahun 2023			Target Program Dan Kegiatan Renja Pd Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Pd s/d Tahun 2024	
								Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Target
1					**2**	3	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	02	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1 Dokumen	1	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100

1	02	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1 Dokumen	1	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
1	02	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1 Dokumen	1	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1	02	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1 Dokumen	1	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
1	02	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1 Dokumen	1	100	4 Laporan	4 Laporan	100
1	02	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1 Laporan	1	100	2 Laporan	2 Laporan	100
1	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	02	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	12	621 Org x 12 Bulan	100	621 orang/bulan	621 orang/bulan	100

1	02	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	12 Dokumen	12	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
1	02	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1 Laporan	1	100	1 Laporan	1 Laporan	100
1	02	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1 Laporan	1	100	4 Laporan	4 Laporan	100
1	02	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1	02	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1 Laporan	1	100	4 Laporan	4 Laporan	100
1	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1	02	01	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1 Dokumen	1	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
1	02	01	2,05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	100 orang	100	100	100 orang	100 orang	100

1	02	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	100 orang	100	100	100 orang	100 orang	100
1	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	02	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4 Paket	2	100	4 Paket	4 Paket	100
1	02	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	4 Paket	2	100	4 Paket	4 Paket	100
1	02	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					10 Paket	10 Paket	100
1	02	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5 Dokumen	2	100	5 Dokumen	5 Dokumen	100
1	02	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	6	100	12 Laporan	12 Laporan	100
1	02	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1 Laporan		100	1 Laporan	1 Laporan	100
1	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	02	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		100 Unit			100 Unit	100 Unit	100

1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	02	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	12 Laporan	12	100	12 Laporan	12 Laporan	100
1	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	02	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Dokumen	1	100	25 Unit	25 Unit	100
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	02	2,01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7				1 Unit	1 Unit	100

1	02	02	2,01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	20				6 Unit	6 Unit	100
1	02	02	2,01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	**1**	1 pAKET	1 pAKET	100	100 Unit	100 Unit	100
1	02	02	2,01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	1 pAKET	1 pAKET	100	70 Paket	70 Paket	100
1	02	02	2,01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	8	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	84 Paket	84 Paket	100
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	02	2,02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3719	3622	2935	81	3130	2817	90
1	02	02	2,02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3090	3454	2809	81	3112	2801	90

1	02	02	2,02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3293	3293	2767	84	2917	2625	90
1	02	02	2,02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13292	15212	8954	59	15212	12930	85
1	02	02	2,02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah AnakUsia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18530	31767	7656	24	31767	9530	30
1	02	02	2,02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	166876	102284	15892	16	102284	20457	20
1	02	02	2,02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20696	16087	11863	74	16087	12065	75
1	02	02	2,02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10459	8049	2946	37	8049	3622	45
1	02	02	2,02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3968	3054	3608	118	3054	3054	100
1	02	02	2,02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	533	425	994	234	425	425	100

1	02	02	2,02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4085	2571	4298	167	2571	2571	100
1	02	02	2,02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4607	5064	4504	89	5064	4558	90
1	02	02	2,02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	12 Dokumen	12	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
1	02	02	2,02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12	12 Dokumen	12	100	12 Dokumen	12	100
1	02	02	2,02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	12 Dokumen	12	100	12 Dokumen	12	100
1	02	02	2,02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	12 Dokumen	12	100	12 Dokumen	12	100
1	02	02	2,02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	12 Dokumen	12	100	12 Dokumen	12	100

1	02	02	2,02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	12 Dokumen	12	100	12 Dokumen	12	100
1	02	02	2,02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10000	34973 Orang	20388	58,30	499 Orang	499	100
1	02	02	2,02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	34	34 Orang	27	79,41	34 Orang	27	80
1	02	02	2,02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	12 Dokumen	12	100,00	12 Dokumen	12	100
1	02	02	2,02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	12 Dokumen	12	100,00	12 Dokumen	12	100
1	02	02	2,02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	20	20 Paket	20	100,00	10 Paket	10	100
1	02	02	2,02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	12 Laporan	12	100,00	4 Laporan	4	100

1	02	02	2,02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52	52 Dokumen	52	100,00	12 Dokumen	12	100
1	02	02	2,02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		752 Orang	405	53,86	529 Orang	423	80
1	02	02	2,02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		29 Orang	16	55,17	191 Orang	115	60
1	02	02	2,02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		75 Orang	4	5,33	500 Orang	450	90,00
1	02	02	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	02	2,04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	20	16 Unit	16	100	1 Unit	1	100
1	02	02	2,04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	7	11 Unit	11	100	8 Unit	8	100
1	02	02	2,04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12	12 Dokumen	12	100	4 Dokumen	4	100

1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
1	02	03	2,01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								
1	02	03	2,01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12	12 Dokumen	12	100	12 Dokumen	12	100
1	02	03	2,01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4	4 Dokumen	4	100	12 Dokumen	12	100
1	02	03	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								
1	02	03	2,02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12	12 Dokumen	12	100	12 Dokumen	12	100
1	02	03	2,02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1	550 Orang	550	100	550 Orang	550	100

1	02	03	2,02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	4 Dokumen	4	100	12 Dokumen	12	100
1	02	03	2,03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	03	2,03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	90				100 Orang	100	100
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								
1	02	04	2,01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
1	02	04	2,01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12	4 Dokumen	4	100	20 Dokumen (40 Sarana)	20	100

1	02	04	2,03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
1	02	04	2,03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12	1 Dokumen	1	100	12 Dokumen (110 Sarana)	12	100,00
1	02	04	2,05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								
1	02	04	2,05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		12 Dokumen	12	100	12 Dokumen	12	100,00

1	02	04	2,06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								
1	02	04	2,06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	161	36 Sarana	36	100	51 Sarana	51	100
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	05	2,01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	12 Dokumen	12	100	1 Dokumen	1	100,00

1	02	05	2,02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	05	2,02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4	4 Dokumen	4	100	4 Dokumen	4	100,00
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	05	2,03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4	4 Dokumen	4	100	4 Dokumen	4	100,00

Dari program dan kegiatan prioritas yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kota Bima pada tahun 2023, sebagian besar sudah memenuhi target kinerja/ keluaran yang telah direncanakan. Adapun capaian indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar belum mencapai target dengan capaian 74% dari target 100%
2. Persentase Ibu Bersalin yang mendapat pelayanan persalinan masih kurang dengan capaian 81,24% dari target 90%
3. Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapat pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir belum mencapai target dengan capaian 73% dari target 96%
4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar belum mencapai target dengan capaian 59% dari target 100%
5. Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar masih kurang dengan capaian 45,8%
6. Persentase orang usia produktif (15 – 59 tahun) yang mendapat pelayanan skiring kesehatan sesuai standar belum mencapai target dengan capaian 23,6% dari target 58,1%
7. Persentase orang berusia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar belum mencapai target dengan capaian 66,36% dari target 84%
8. Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar belum capaian 37% dari target 66,4%
9. Persentase penderita diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sudah baik dengan capaian 97,62% dari target 96,3%
10. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sudah mencapai target dengan capaian 101% dari target 100%
11. Persentase orang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar belum mencapai target dengan capaian 100,6% dari target 100%
12. Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar yang sudah baik dengan capaian 199,2% dari target 92%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bima

Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun IKK. Jenis Indikator yang dikaji sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Analis Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN

KOTA BIMA

NO	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target Indikator Kinerja Lainnya (SPM)	Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) / Output / Outcame	Angka / Nilai Target /Standar			TARGET RENSTRA (TRANSISI)			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				IKU	SPM	IKK								
							2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*5*					*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentasi ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	89,00	98	3.130	98%	98%	98%	81,03	90,0%	90%	90%	
2	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	Persentasi ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	47	85	3.112	90%	90%	92%	81,24	90,0%	90%	90%	
3		Persentasi Bayi baru lahir yang mendapat pelayanan sesuai standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai		95	2.917	96%	96%	96%	84,30	90,0%	90%	90%	

			Standar											
4		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		90	12.293	90%	90%	90%	68,79	70,0%	73%	75%	
5		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100	31.767	100%	100%	100%	45,8	50,0%	55%	55%	
6		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		30	102.284	58,1	58,1	58,1	23,6	58,3%	58%	58%	

7		Persentase warga negara berusia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		82	16.087	84%	84%	84%	66,36	70,0%	70%	75%	
8		Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		30	8.049	66,4	66,4	66,4	37 %	66,4	66,4	66,4	
9		Persentase penderita diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		30	3.054	96,3 %	96,3 %	96,3 %	97,62	100%	100%	100%	

10		Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100	429	92%	95%	95%	199,20	100%	100%	100%	
11		Persentase orang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		85	2857	96,4	96,4	96,4	100,6	98,42	100%	100%	
12		Persentase orang yang resiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		25	5.064	100%	100%	100%	101 %	100%	100%	100%	

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kota Bima selama tahun 2023 sebagian masih belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan adanya perubahan/peningkatan SPM yang baru yang mengharuskan semua target SPM mencapai 100%, sedangkan Sumber Daya Kesehatan Kota Bima

masih belum mencukupi baik tenaga maupun keuangan sehingga capaian program masih belum memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Derajat kesehatan masyarakat di Kota Bima masih rendah. Kasus kematian Ibu. Angka kematian ibu ini masih tinggi bila dibandingkan dengan standar nasional. Masih tingginya angka stunting. Meningkatnya beberapa penyakit menular seperti TB paru, ISPA, dan HIV-AIDS. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dengan kegiatan antara lain: Sosialisasi terkait HIV-AIDS, kegiatan zero survey, dan pemeriksaan spesimen. Akselerasi pengendalian HIV-AIDS selain dengan kegiatan di atas juga dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial (umur 15-24 tahun), dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus, serta peningkatan pengetahuan komprehensif. Selain itu juga penyakit tidak menular menunjukan kecenderungan meningkat seperti hipertensi dan Diabetes;
2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas kinerja tenaga kesehatan yang di miliki serta pemanfaatannya melalui pendidikan formal dan non formal dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan serta keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat;
3. Dampak Desentralisasi terhadap anggaran Pembangunan kesehatan

   Dengan desentralisasi terjadi perubahan sistem administrasi dan pembiayaan pembangunan daerah. Dimana anggaran-anggaran yang sebelumnya bersumber dari pusat sudah ingklud diakui menjadi APBD, sehingga mengurangi komposisi anggaran lainnya;
4. Peran serta masyarakat;

   Meningkatkan peran masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk berperilaku hidup bersih sehat dan mampu menolong dirinya sendiri khususnya pada kasus-kasus darurat. Peran serta masyarakat termasuk sektor swasta dan LSM/NGO akan semakin penting karena sangat dibutuhkan sebagai mitra dalam melaksanakan pelayanan dan pembiayaan pembangunan kesehatan, tidak saja pada tahap pengobatan dan rehabilitasi tetapi lebih berperan pada tahap promotif dan preventif.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM yang sesuai standar yang menunjang pelayanan kesehatan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu.

2.3.1. Koordinasi dan Sinergitas Program Dengan Kabupaten/Kota

Model pembangunan kesehatan di era desentralisasi saat ini, memperhatikan kondisi natural dan kebutuhan lokal sekaligus mengakomodasi tujuan pembangunan kesehatan secara nasional. Pendekatan *intersectoral convergence* sangat membantu pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi level kerja sama baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota sehingga dapat dilakukan pemetaan yang komprehensif tentang peran dan keterlibatan masing- masing aktor dan organisasi dalam pembangunan kesehatan. Selain itu pendekatan tersebut juga mengakomodir persoalan kompleksitas urusan administrasi dan operasional teknis lewat pertimbangan kongkurensi antara tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian terjadi kejelasan antara siapa saja (*who*) yang terlibat dan bagaiamana (*how*) peran mereka dalam mendukung peningkatan status kesehatan.

Koordinasi dan sinergitas program kesehatan baik dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai dengan pusat yang selama ini terjalin menjadi acuan keberhasilan berbagai program kesehatan dan masing-masing level mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing pula, dari level pembuat kebijakan, koordinasi sampai eksekusi kebijakan dilapangan. Hal ini dapat tercermin dari harmonisnya pelakasanaan kegiatan dan program untuk mencapai berbagai indikator keberhasilan dalam bidang kesehatan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Beberapa hal yang menyebabkan kinerja program kesehatan belum dapat dilaksanakan optimal antara lain sebagai berikut:

a. Ketimpangan/ disparitas derajat kesehatan masyarakat antar wilayah.

Hambatan dalam pelayanan kesehatan antara lain : rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, dukungan keuangan dari pemerintah daerah masih kurang; kondisi geografis yang memungkinkan terjadinya KLB dan bencana; banyaknya tempat perkembangbiakan vektor penular penyakit; dinamika epidemiologi penyakit yang cepat berubah dan mobilisasi penduduk yang tinggi; regulasi yang belum berpihak pada kesehatan; kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan masyarakat; serta kurangnya keterlibatan lintas sektor dalam penyelenggaraan upaya kesehatan berbasis masyarakat.

Hambatan ini menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan sehingga menyebabkan menurunnya angka derajat kesehatan. Pertama kematian ibu dan bayi masih merupakan masalah yang dominan di Kota Bima. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus kematian ibu antara lain; faktor ekonomi, sosial, budaya, geografis, transportasi , dan faktor tersedianya fasiitas kesehatan rujukan yang memadai (Rumah Sakit Umum Daerah). Faktor-faktor tersebut secara implisit adalah "3 Terlambat" (Terlambat mengambil keputusan merujuk ke fasilitas kesehatan, Terlambat menjangkau fasilitas kesehatan dan Terlambat mendapat pelayanan Tenaga kesehatan), Sehingga penanganannya menjadi terlambat .

Gizi juga memiliki hubungan langsung dan mendasar dengan HDI (Human Development Indeks), sebab gizi merupakan elemen dasar pembentukan otak yang menjadi ukuran dalam menentukan kualitas SDM. Pemenuhan gizi merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat

b. Masalah double burden of diseases.

Permasalahan penyakit menular belum tuntas diselesaikan, namun terjadi pula peningkatan prevalensi penyakit tidak menular yang begitu cepat akibat pergeseran prilaku hidup yang konsumtif, seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, Diabetes Mellitus (DM) dan kanker, sehingga diperlukan upaya keras untuk mengatasi beban ganda terhadap permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, munculnya penyakit masyarakat akibat prilaku menyimpang seperti, HIV dan AIDS yang cendrung meningkat, yang pada umumnya mendominasi usia produktif. Meningkatnya jumlah penduduk, pergeseran pola penyakit dan pola hidup masyarakat yang sangat variatif serta perubahan struktur deografi penduduk berimplikasi terhadap tuntutan terhadap jumlah, jenis dan kualitas pelayanan yang berdampak pada peningkatan biaya pelayanan kesehatan.

c. Rendahnya upaya pencegahan dan promosi kesehatan

Mencermati pemasalahan kesehatan masyarakat secara umum, sebenarnya dapat dilakukan dengan pendekatan promosi dan preventif yang terjangkau masyarakat. Namun dalam upaya ini masih belum optimal dan belum secara massal diadop oleh masyarakat karena merubah prilaku dan kebiasaan masyarakat dalam konteks sosial budaya memerlukan effort yang besar dan terus menerus sehingga

masyarakat yakin bahwa upaya pencegahan jauh ebih efektif dan efisien dibanding pengobatan penyakit. Oleh karena itu upaya pencegahan dan promosi kesehatan perlu dan segera digaungkan kembalisecara massal dan berkeninambungan.

Rendahnya upaya peningkatan promotif dan pencegahan kesehatan dapat dilihat dari berberapa indikator antara lain rendahnya cakupan imunisasi lengkap, cakupan pemberian ASI Eksklusif, tinggi prevalensi kasus TB, malaria dan insiden DBD.

d. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan

Intervensi terhadap kondisi kesehatan lingkungan harus dilakukan secara lintas sektor dan melibatkan masyarakat. Rendahnya kondisi lingkungan, berdampak buruk terhadap status kesehatan, baik individu, keluarga maupun kelompok karena ketersediaan dan akses terhadap air bersih dan sanitasi dasar mutlak diperlukan dalam siklus kehidupan manusia.

Indikator kesehatan lingkungan dapat dilihat dari persentase kelompok masyarakat yang akses terhadap air bersih yang masih rendah dan sanitasi dasar yang belum standar sesuai kaedah-kaedah kesehatan.

e. Masih rendahnya keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan

Seluruh kabupaten/kota telah memiliki rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta dan puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan, namun kualitas pelayanan masih rendah, sehingga tidak jarang terlihat sebagian masyarakat tidak puas dan bagi mereka yang mampu akan memilih pelayanan kesehatan diluar Kota Bima dan bahkan keluar negeri. Ketidak puasan terhadap pelayanan terutama dikarenakan lambatnya pelayanan, ketidakjelasan informasi pelayanan, proses administrasi dan lamanya waktu tunggu. Sebenarnya di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah berlangsung selama 7 tahun ini, adalah era penguatan sistem pelayanan yang berorientasi pada kualitas/mutu pelayanan, walaupun pada awalnya terasa sulit.

f. Terbatasnya tenaga kesehatan strategis dan distribusi yang tidak merata.

Ketersediaan tenaga strategis (dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, farmasi, gizi dan laboratorium) masih belum

terpenuhi dan merata, kecuali untuk jenis tenaga bidan dan perawat yang memang sudah tercukupi. Kebutuhan dan ketersediaan tenaga dilihat dari ratio tenaga strategis terhadap 100.000 penduduk

2.3.3 Dampak terhadap pencampaian Visi dan Misi kepala daerah terhadap capaian program

Tabel 2.3

Dampak terhadap pencampaian Visi dan Misi kepala daerah terhadap capaian program

Visi : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat Maju dan Mandiri				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;	1.Tingginya angka kematian ibu	a. Masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan b. Rendahnya keterlibatan suami dan keluarga	a. Tersedianya sarana pelayanan kesehatan di tiap wilayah b. Tersedianya tenaga Bidan desa
		2.Tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular	a. Rendahnya kesadaran masy. dalam berprilaku hidup bersih dan sehat b. Mobilitas penduduk yg tinggi c. Anggaran yg masih terbatas	a. Tersedianya tenaga terlatih untuk pendeteksian dini penyakit b. Tersedianya tatalaksana penanggulangan penyakit
		3.Kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan berdasarkan spesifikasi masih kurang	a. Masih kurangnya Kuota penerimaan PNS dari kesehatan dan masih terbatas pada profesi tertentu b. kualitas rekrutmen yg belum maksimal c. Mudahnya mekanisme pindah tugas pagawai, sehingga kebutuhan akan profesi tertentu selalu kurang	a. Regulasi penerimaan CPNS dan tenaga P3K b. minat SDM kesehatan tinggi dalam mengikuti pendidikkan yang lebih tinggi.
		4. Alokasi anggaran tidak mencukupi kebutuhan	a. Penetapan pagu anggaran belum memenuhi kebutuhan skala prioritas b. banyaknya anggaran dengan spesifikasi khusus, sehingga mengurangi alokasi anggaran yang lainnya	a. Adanya support dana BOK puskesmas, jamkesmas, jampersal dan NGO b. Adanya komitmen kepala daerah terkait pemenuhan anggaran kesehatan sesuai permenkes
		5. Masih Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan kesehatan	a. Kurangnya biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan b. Sulitnya birokrasi terkait mekasisme pemutihan aset-	Tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK)

			aset yang sudah tidak bisa di gunakan lagi	

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel : 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-Rp11	-12
1	Terlaksananya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Saryankes yang Terakreditasi Minimal Madya	7 Saryankes	Rp43.876.792.545	Terlaksananya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Saryankes yang Terakreditasi Minimal Madya	10 Saryankes	Rp43.876.792.545	
2	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sumber Daya Manusia yang sesuai standar	95	Rp467.533.050	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sumber Daya Manusia yang sesuai standar	95	Rp50.918.000	

3	Terlaksananya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	95	Rp452.699.100	Terlaksananya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	95	Rp425.516.300	
4	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah UKBM Yang di Bina	96	Rp481.633.200	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah UKBM Yang di Bina	96	Rp426.520.000	
5	Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah Pelaksanaan Penunjang urusan pemerintah daerah		Rp72.302.675.464	Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah Pelaksanaan Penunjang urusan pemerintah daerah		Rp72.302.675.464	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan tahun 2023 dari para pemangku kepentingan Kota Bima

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pagar Pustu Kelurahan Panggi	Kel.Panggi	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Rp100.000.000	
2	Rehabilitasi Polindes Lelamase	Kel. Lelamase	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Rp97.500.000	
3	Rehabilitasi Pustu Oi Fo'o	Kel Oi Fo'o	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Rp97.500.000	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Sasaran pembangunan kesehatan pada sebagai berikut:

1. Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan ;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; dan
5. Program Administrasi Umum/Program Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah

Sedangkan sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Transformasi pelayanan kesehatan
b. Meningkatnya tata kelolah pemerintahan yang akuntabel di tingkat Perangkat Daerah

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik di tingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2025, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kota diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Bima dapat menyentuh sasaran yang tepat.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin kompleks dan bahkan tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demikratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Dinas Kesehatan Kota Bima sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang melaksanakan pembangunan khususnya bidang kesehatan dan membantu Walikota Bima dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di

bidang kesehatan.

Prioritas dan Sasaran dari Dinas Kesehatan Kota Bima adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator sasaran daerah (Outcome)	Sasaran PD	Indikator sasaran PD (Outcome)
1	Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan Masayarakat,
2				Meningkatnya masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat	Porsentase masyarakat ber PHBS

Hubungan antara Tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat daerah dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	**Tujuan dan Sasaran PD**		**Indikator Tujuan dan Sasaran PD**	**Target Kinerja Tujuan dan sasaran Tahun 2025**
	Tujuan	**Sasaran**		
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kepuasaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	89
		Meningkatnya Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat	Persentase Masyarakat berPHBS	47

Sedangkan Indiktor Kinerja Utama Dinas kesehatan Kota Bima adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Indikator Kinerja utama Dinas Kesehatan

NO	**SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**NAMA PROGRAM**
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

2.	Meningkatknya Masyarakat BerPHBS	Persentase Masyarakat berPHBS	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Program Penunjang urusan pemerintah daerah

3.3. Program dan Kegiatan

a. Adapun Prioritas Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Prioritas Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan dansasaran pembangunan kesehatan

NO	SASARAN PD	PROGRAM	KEGIATAN
1	**Meningkatnya kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat**	**1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	a Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			b Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			c Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			d Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
		2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	a Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
			b Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
			c Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	a Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
			b Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

			c Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
			d Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
2	**Meningkatnya masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat**	**4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	a Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
			b Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
			c Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			c Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			d Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			e Administrasi Umum Perangkat Daerah
			f Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			g Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			h Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber Data: Subag Perencaan dan Keuangan Tahun 2024

b. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Kesehatan Kota pada Rencana Kerja Tahun 2025 terdapat 5 Program dan 22 Kegiatan pendukung. Secara umum, Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Bima dapat dilihat dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Bidang Kesehatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.464.381.760
			b	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp32.509.551.085
			c	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp894.539.700
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp8.320.000
		2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	a	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp18.500.000
			b	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp47.242.000
			c	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp401.791.050

		3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**a**	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp86.598.100
			b	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp192.387.000
			c	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Rp2.500.000
			d	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp171.214.000
		4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**a**	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp309.891.600
			b	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp76.094.800
			c	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp95.646.800
		5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp179.566.976

		DAERAH KABUPATEN/KOTA	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp70.331.310.738
			c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp24.999.800
			d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp201.786.900
			e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp472.871.300
			f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp344.849.300
			g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp604.920.450

TABEL 33
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Bidang Kesehatan Tahun 2025

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Alokasi Dana APBD		Keterangan		
							Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Perkiraan Main	Sumber Dana	SKPD	Jenis Kegiatan
							Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	(RP)	(RP)	APBN	01/02/2003	a/b
1					2	3	4	5	6	7	8	9	Rp10	Rp11	12	13	14
					Usia Harapan Hidup	Meningkatnya kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	71,26									
						Meningkatnya masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat	Porsentase masyarakat ber PHBS	89									
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Rp102.153.260.190	Rp141.972.059.927			
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								Rp102.153.260.190	Rp141.972.059.927			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Rp72.301.855.464	Rp63.626.801.503			

1	2	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Rp179.566.976	Rp177.008.044			
1	2	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp50.965.000	Rp45.061.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama
1	2	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		4 Dokumen	Terpenuhinya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Rp13.818.754	Rp15.200.629	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama
1	2	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	Terpenuhinya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp12.000.000	Rp13.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama
1	2	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4 Dokumen	Terpenuhinya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Rp16.150.572	Rp13.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama

1	2	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp17.500.000	Rp13.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama
1	2	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	Terpenuhinya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Rp69.132.650	Rp76.045.915	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama
1	2	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Rp70.331.310.738	Rp61.497.717.934	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Lama
1	2	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		621 Orang/bulan	Terpenuhinya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	621 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	621 Orang/bulan	Rp70.067.947.238	Rp61.208.018.084	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama
1	2	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen	Rp222.964.000	Rp245.260.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		

1	2	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp9.999.500	Rp10.999.450	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama
1	2	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	Terpenuhinya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp30.400.000	Rp33.440.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama
1	2	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								Rp24.999.800	Rp27.499.780			Lama
1	2	1	203	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		7		7		7	Rp10.000.000	Rp11.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		

1	2	1	203	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		7		7		7	Rp5.000.000	Rp5.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
1	2	1	203	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	Terpenuhinya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp9.999.800	Rp10.999.780	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama
1	2	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								Rp201.786.900	Rp221.465.590	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Lama
1	2	1	205	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	Rp5.000.000	Rp5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
1	2	1	205	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	Terpenuhinya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Rp134.825.000	Rp148.307.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama
1	2	1	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	Terpenuhinya Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Rp56.462.200	Rp62.108.420	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama

1	2	1	205	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	Terpenuhinya Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Rp5.499.700	Rp6.049.670	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama
1	2	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah								Rp472.871.300	Rp513.658.430			Lama
1	2	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Terpenuhinya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp5.358.000	Rp5.893.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama

1	2	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Terpenuhinya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp5.000.000	Rp5.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama
1	2	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Laporan	Terpenuhinya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Laporan	Rp10.000.000	Rp11.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama

1	2	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5 Dokumen	Terpenuhinya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Rp75.003.300	Rp82.503.630	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama
1	2	1	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	Rp17.510.000	Rp12.761.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
1	2	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp360.000.000	Rp396.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama

1	2	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Rp344.849.300	Rp368.334.230	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Lama
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							Rp150.000.000	Rp165.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
1	02	01	2.08	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							Rp134.849.300	Rp148.334.230	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
1	02	01	2.09	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							Rp25.000.000	Rp27.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
1	02	01	2.10	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1 Unit		1 Unit	Rp35.000.000	Rp27.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		

1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Rp604.920.450	Rp665.412.495			
1	2	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Terpenuhinya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp604.920.450	Rp665.412.495	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	sekretariat	Lama
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Rp141.550.000	Rp155.705.000			

1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 unit		2 unit		2 unit	Rp141.550.000	Rp155.705.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
A	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								Rp28.502.190.376	Rp76.857.822.639		P3PL	Lama
1	2	2	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								Rp10.439.181.760	Rp56.992.947.893		Binkesmas	Lama

1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		Rp1.745.315.013	Rp1.919.846.514	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		
1	02	02	2.02	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana,Prasaran a, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		7	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	7	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	7	Rp1.603.615.013	Rp1.763.976.514	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		
1	02	02	2.03	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		2	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	2	Rp40.000.000	Rp44.000.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		
1	02	02	2.04	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		6	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	6	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6	Rp337.076.800	Rp548.180.640	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		

1	02	02	2.05	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		2	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	Rp36.900.000	Rp40.590.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
1	2	2	201	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		1 Paket	Terpenuhinya Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	Rp4.800.225.934	Rp6.656.700.325	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	yankes	Lama

1	2	2	201	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		70 Paket	Terpenuhinya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	70 Paket	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	70 Paket	Rp1.801.386.800	Rp1.981.525.480	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	yankes	Lama
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		84	Terdistribusinya Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	84	Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan yang terdistribusi ke Fasilitas Kesehatan	84	Rp74.662.200	Rp82.128.420	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		

1	2	2	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Rp17.168.468.916	Rp18.880.881.076		P3PL	Lama
1	2	2	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3654	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	3380 org	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3380 org	Rp250.754.700	Rp275.830.170	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		
1	2	2	202	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3485	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	3057	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3057	Rp26.100.000	Rp28.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
1	2	2	202	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3293	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	2.975	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.975	Rp137.625.000	Rp151.387.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD		

1	2	2	202	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		13.108	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	11802	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11802	Rp15.500.000	Rp17.050.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		
1	2	2	202	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		18510	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	17148	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17148	Rp25.486.700	Rp28.035.370	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
1	2	2	202	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		137914	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	75633	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75633	Rp24.752.600	Rp24.903.129	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		

1	2	2	202	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		17.012	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	11.082	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.082	Rp15.000.000	Rp15.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
1	2	2	202	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		9975	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	7214,00	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7214,00	Rp92.445.100	Rp101.689.610	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	P3PL	Lama

1	2	2	202	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3.785	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	3.609	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.609	Rp7.000.000	Rp7.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	P3PL	Lama
1	2	2	202	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		488	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	488	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	488	Rp8.000.000	Rp8.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		
1	2	2	202	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		4.521	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	2.456	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.456	Rp216.303.400	Rp237.933.740	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	P3PL	Lama

1	2	2	202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		4.394	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	4.340	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4.340	Rp66.555.000	Rp73.210.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	P3PL	Lama
1	2	2	202	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		12	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	Rp25.500.000	Rp28.050.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	surveilans	Lama

1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		12	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12	Rp5.000.000	Rp5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
1	02	02	2.03	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	Rp712.972.400	Rp784.269.640	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		
1	02	02	2.04	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		12	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	Rp24.126.400	Rp26.539.040	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		

1	02	02	2.05	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	Rp330.939.300	Rp364.033.230	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		
1	2	2	202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	Rp53.400.000	Rp58.740.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	P3PL	Lama
1	2	2	202	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		10000	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	9000	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	9000	Rp17.272.441	Rp18.999.685	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	P3PL	Lama

1	2	2	202	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		10000	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	9000	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	9000	Rp27.450.100	Rp30.195.110	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	P3PL	Lama
1	2	2	202	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	Rp278.980.000	Rp306.878.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	P3PL	Lama
1	2	2	202	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	Rp14.663.600.775	Rp16.129.960.852	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN,	Saryankes	Lama

															DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL KLAIM KEPADA BPJS, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), INSENTIF FISKAL		
1	2	2	202	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		20	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	20	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	20	Rp12.450.000	Rp13.695.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	P3PL	Lama

1	2	2	202	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		12	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	Rp17.000.000	Rp18.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	P3PL	Lama
1	2	2	202	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		12	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12	Rp27.000.000	Rp29.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	P3PL	Lama
1	2	2	202	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		752	Terlaksananya pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	752	Jumlah Orang Yang mendapatkan Pelayanan kesehatan dengan tuberkulosis	752	Rp17.300.000	Rp19.030.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	P3PL	Baru

1	2	2	202	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		29	Terlaksananya pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	29	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	29	Rp21.500.000	Rp23.650.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	P3PL	Baru
1	2	2	202	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		500	Terlaksananya pelayanan kesehatan Malaria	450	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	450	Rp48.455.000	Rp53.300.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	P3PL	Baru
1	2	2	204		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Rp894.539.700	Rp983.993.670			Lama

1	2	2	204	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar		16	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	16	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	16	Rp149.762.000	Rp164.738.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Saryankes	Lama
1	2	2	204	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		11	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	11	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	11	Rp681.027.700	Rp749.130.470	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Saryankes	Lama

1	2	2	204	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		12	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12	Rp63.750.000	Rp70.125.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Saryankes	Lama
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								Rp467.533.050	Rp514.286.355	APBN	Saryankes	Lama
1	2	3	201		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								Rp18.500.000	Rp20.350.000		Saryankes	Lama
1	2	3	201	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		12	Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12	Rp3.500.000	Rp3.850.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, INSENTIF FISKAL		

1	2	3	201	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		4	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4	Rp15.000.000	Rp16.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		
1	2	3	202		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								Rp47.242.000	Rp51.966.200	APBN	sdmk	Lama
1	2	3	202	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		12 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	Rp10.000.000	Rp11.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Saryankes	Lama
1	2	3	202	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		550 Orang	Terpenuhinnya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	550 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	550 Orang	Rp5.918.000	Rp6.509.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Saryankes	Lama

1	2	3	202	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		4	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	Rp31.324.000	Rp34.456.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Saryankes	Lama
1	2	3	203		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Rp401.791.050	Rp441.970.155		Saryankes	Lama
1	2	3	203	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		500 Orang	Terpenuhinnya Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	458 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	Rp401.791.050	Rp441.970.155	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Saryankes	Lama
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								Rp452.699.100	Rp501.269.010			Lama

1	2	4	201		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								Rp86.598.100	Rp98.557.910			Lama
1	2	4	201	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		12 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	Rp86.598.100	Rp98.557.910	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Saryankes	Lama
1	2	4	203		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								Rp192.387.000	Rp211.625.700			Lama

1	2	4	203	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		4 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4 Dokumen	Rp192.387.000	Rp211.625.700	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Saryankes	Lama
1	2	4	205		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan									Rp2.500.000	Rp2.750.000			Lama

1	2	4	205	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		12 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen	Rp2.500.000	Rp2.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Saryankes	Lama
1	2	4	206		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								Rp171.214.000	Rp188.335.400			Lama
1	2	4	206	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		141	Terpenuhinnya Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	141	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	141	Rp171.214.000	Rp188.335.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Saryankes	Lama

1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								Rp428.982.200	Rp471.880.420			Lama
1	2	5	201		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Rp309.891.600	Rp340.880.760			Lama
1	2	5	201	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Rp309.891.600	Rp340.880.760	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	kesmas	Lama
1	2	5	202		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Rp76.094.800	Rp83.704.280			Lama
1	2	5	202	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		1 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Rp76.094.800	Rp83.704.280	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA	kesmas	Lama

															ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1	2	5	203		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									Rp42.995.800	Rp47.295.380			Lama
1	2	5	203	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		4 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	Rp42.995.800	Rp47.295.380	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	kesmas	Lama
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									Rp441624000	**Rp463694700**		Binkesmas	Lama

X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Rp441624000	**Rp463694700**			Lama
X	XX	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Rp222964000	Rp234112200			Lama
X	XX	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Rp216.150.000	Rp226957500			Lama
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Rp1.173.399.000	Rp1232068950			Lama
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								Rp1.173.399.000	Rp1232068950			Lama

1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								Rp1.173.399.000	Rp1232068950			Lama
1	2	2	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								Rp25.200.000	Rp27.720.000			Lama
1	2	2	201	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		240 Unit	Terpenuhinnya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	240 Unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	240 Unit	Rp25.200.000	Rp27.720.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Labkesda	Lama

1	2	2	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									Rp1.148.199.000	Rp1205608950			Lama
1	2	2	202	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		10 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Dokumen	Rp1.148.199.000	Rp1.263.018.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Labkesda	Lama
					Puskesmas Paruga								Rp2.752.016.284	Rp2.889.617.098			Lama
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Rp2.752.016.284	Rp2.889.617.098			Lama

1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								Rp2.752.016.284	Rp2.889.617.098			Lama
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Rp100.000	Rp110.000			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								Rp100.000	Rp110.000			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan							Rp100.000	Rp110.000	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								Rp2.752.016.284	Rp2.889.617.098			Lama

1	2	2	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									Rp2.752.016.284	Rp2.889.617.098			Lama
1	2	2	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		85 Orang	Terkelolannya Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85 Orang	Rp58.201.300	Rp64.021.430	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Paruga	Lama
1	2	2	202	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 Orang	Terkelolannya Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Rp18.294.000	Rp20.123.400	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Paruga	Lama

1	2	2	202	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 Orang	Terkelolannya Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Rp10.800.000	Rp11.880.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Paruga	Lama
1	2	2	202	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		1082 Orang	Terkelolannya Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1082 Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1082 Orang	Rp43.200.000	Rp47.520.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Paruga	Lama
1	2	2	202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar							Rp7.000.000	Rp7.700.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		

1	2	2	202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		100 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	Rp383.098.200	Rp421.408.020	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Paruga	Lama
1	2	2	202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	Rp28.850.000	Rp31.735.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Paruga	Lama
1	2	2	202	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		100 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 Dokumen	Rp201.716.000	Rp221.887.600	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Paruga	Lama
1	2	2	202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		100 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	Rp11.850.000	Rp13.035.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Paruga	Lama

1	2	2	202	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		100 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	Rp15.850.000	Rp17.435.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Paruga	Lama
1	2	2	202	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		100 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Dokumen	Rp1.519.128.000	Rp1.671.040.800	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Paruga	Lama
1	2	2	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		100 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	Rp362.611.884	Rp398.873.072	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Paruga	Lama
1	2	2	202	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							Rp100.000	Rp110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		

1	2	2	202	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							Rp2.000.000	Rp2.200.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	2	2	202	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							Rp7.400.000	Rp8.140.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	2	2	202	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							Rp6.000.000	Rp6.600.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	2	2	202	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi							Rp22.080.000	Rp24.288.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		

1	2	2	202	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak							Rp110.100.000	Rp121.110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								Rp3.000.000	Rp3.300.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							Rp3.000.000	Rp3.300.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								Rp19.957.000	Rp21.952.700	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Rp19.957.000	Rp21.952.700	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		

1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							Rp19.957.000	Rp21.952.700	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
					Puskesmas Mpunda								Rp3.424.406.092	Rp3.766.846.701			Lama
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Rp3.424.406.092	Rp3.766.846.701			Lama
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								Rp3.424.406.092	Rp3.766.846.701			Lama
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Rp-	Rp-			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								Rp-	Rp-			

1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan							Rp-	Rp-	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								Rp3.464.026.516	Rp3.766.846.701			Lama
1	2	2	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Rp3.464.026.516	Rp3.766.846.701			Lama

1	2	2	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 % Orang	Terkelolannya Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 % Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 % Orang	Rp9.480.000	Rp10.428.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Mpunda	Lama
1	2	2	202	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 % Orang	Terkelolannya Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 % Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 % Orang	Rp30.765.000	Rp33.841.500	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Mpunda	Lama
1	2	2	202	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 % Orang	Terkelolannya Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 % Orang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 % Orang	Rp33.250.000	Rp36.575.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Mpunda	Lama

1	2	2	202	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		100 % Orang	Terkelolannya Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 % Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 % Orang	Rp11.050.000	Rp12.155.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Mpunda	Lama
1	2	2	202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		100 % Orang	Terkelolannya Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 % Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 % Orang	Rp15.600.000	Rp17.160.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Mpunda	Lama
1	2	2	202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		100 % Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 % Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 % Dokumen	Rp275.444.000	Rp302.988.400	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Mpunda	Lama

1	2	2	202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		100 % Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 % Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 % Dokumen	Rp42.900.000	Rp47.190.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Mpunda	Lama
1	2	2	202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		100 % Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 % Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 % Dokumen	Rp32.282.000	Rp35.510.200	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Mpunda	Lama
1	2	2	202	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		100 % Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 % Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 % Dokumen	Rp96.700.000	Rp106.370.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Mpunda	Lama
1	2	2	202	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		100 % Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 % Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 % Dokumen	Rp2.412.764.092	Rp2.654.040.501	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Mpunda	Lama

1	2	2	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		100 % Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 % Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 % Dokumen	Rp208.549.000	Rp229.403.900	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Mpunda	Lama
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							Rp8.100.000	Rp8.910.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							Rp6.000.000	6.600.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							Rp9.300.000	Rp10.230.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		

1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							Rp6.000.000	Rp6.600.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi							Rp4.008.000	Rp4.408.800	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak							Rp187.240.000	Rp205.964.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								Rp3.000.000	Rp3.300.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							Rp3.000.000	Rp3.300.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							Rp31.974.000	Rp35.171.400	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		

1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Rp31.974.000	Rp35.171.400	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							Rp31.974.000	Rp35.171.400	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
					Puskesmas Penanae								Rp2.821.786.992	Rp3.103.965.691			Lama
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Rp2.821.786.992	Rp3.103.965.691			Lama
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								Rp2.821.786.992	Rp3.103.965.691			Lama

1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Rp10.000	Rp11.000			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								Rp10.000	Rp11.000			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan							Rp10.000	Rp11.000	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								Rp2.821.766.992	Rp3.103.943.691			Lama
1	2	2	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Terkelolannya Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Rp2.821.366.992	Rp3.103.503.691	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Penanae	Lama

1	2	2	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 % Orang	Terkelolannya Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 % Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 % Orang	Rp31.000.000	Rp34.100.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Penanae	Lama
1	2	2	202	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 % Orang	Terkelolannya Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 % Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 % Orang	Rp36.309.000	Rp39.939.900	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Penanae	Lama
1	2	2	202	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		7241 Orang	Terkelolannya Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7241 Orang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7241 Orang	Rp71.600.000	Rp78.760.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Penanae	Lama

1	2	2	202	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		1014 Orang	Terkelolannya Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1014 Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1014 Orang	Rp16.660.000	Rp18.326.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Penanae	Lama
1	2	2	202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		1111 Orang	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1111 Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1111 Orang	Rp7.400.000	Rp8.140.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Penanae	Lama
1	2	2	202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		100 % Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 % Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 % Dokumen	Rp282.849.000	Rp311.133.900	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Penanae	Lama

1	2	2	202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		47900 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	47900 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	47900 Dokumen	Rp16.000.000	Rp17.600.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Penanae	Lama
1	2	2	202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		31313 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	31313 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	31313 Dokumen	Rp18.645.000	Rp20.509.500	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Penanae	Lama
1	2	2	202	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		100 % Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 % Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 % Dokumen	Rp147.550.000	Rp162.305.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Penanae	Lama
1	2	2	202	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	Rp1.977.997.992	Rp2.175.797.791	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Penanae	Lama

1	2	2	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Rp215.246.000	Rp236.770.600	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Penanae	Lama
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							Rp10.000	Rp11.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							Rp10.000	Rp11.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							Rp10.000	Rp11.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		

1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							Rp10.000	Rp11.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi							Rp10.000	Rp11.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak							Rp60.000	Rp66.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								Rp400.000	Rp440.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							Rp400.000	Rp440.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							Rp10.000	Rp11.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		

1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Rp10.000	Rp11.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							Rp10.000	Rp11.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
					Puskesmas Rasanae Timur								Rp1.394.991.748	Rp10.105.845.068			Lama
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Rp1.394.991.748	Rp10.105.845.068			Lama
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								Rp1.394.991.748	Rp10.105.845.068			Lama

1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Rp100.000	Rp110.000			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								Rp100.000	Rp110.000			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan							Rp100.000	Rp110.000	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								Rp1.394.791.748	Rp10.105.625.068			Lama
1	2	2	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Rp1.394.671.748	Rp10.105.493.068			Lama

1	2	2	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Rp6.000.000	Rp6.600.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Rasanae Timur	Lama
1	2	2	202	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Rp20.610.000	Rp22.671.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Rasanae Timur	Lama
1	2	2	202	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Rp21.493.800	Rp23.643.180	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Rasanae Timur	Lama

1	2	2	202	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Rp20.000.000	Rp22.000.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Rasanae Timur	Lama
1	2	2	202	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Rp8.083.800	Rp8.892.180	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Rasanae Timur	Lama
1	2	2	202	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Rp4.400.000	Rp4.840.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Rasanae Timur	Lama

1	2	2	202	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Rp4.400.000	Rp4.840.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Rasanae Timur	Lama
1	2	2	202	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100% Orang	Rp10.735.000	Rp11.808.500	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Rasanae Timur	Lama

1	2	2	202	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100% Orang	Rp13.600.000	Rp14.960.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Rasanae Timur	Lama
1	2	2	202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100% Orang	Rp2.500.000	Rp2.750.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Rasanae Timur	Lama
1	2	2	202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		100% Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100% Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100% Dokumen	Rp144.400.000	Rp158.840.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Rasanae Timur	Lama

1	2	2	202	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		100% Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100% Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100% Dokumen	Rp4.384.800	Rp4.823.280	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Rasanae Timur	Lama
1	2	2	202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		100% Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100% Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100% Dokumen	Rp3.500.000	Rp3.850.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Rasanae Timur	Lama
1	2	2	202	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		100% Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100% Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100% Dokumen	Rp86.722.000	Rp95.394.200	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Rasanae Timur	Lama
1	2	2	202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		100% Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100% Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100% Dokumen	Rp13.485.000	Rp14.833.500	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Rasanae Timur	Lama

1	2	2	202	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		100% Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100% Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100% Dokumen	Rp48.000.000	Rp52.800.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Rasanae Timur	Lama
1	2	2	202	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		100 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Dokumen	Rp865.793.348	Rp9.523.726.828	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Rasanae Timur	Lama
1	2	2	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		100% Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100% Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100% Dokumen	Rp115.064.000	Rp126.570.400	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Rasanae Timur	Lama
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							Rp100.000	Rp110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		

1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							Rp100.000	Rp110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							Rp100.000	Rp110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							Rp100.000	Rp110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi							Rp100.000	Rp110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		

1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak							Rp1.000.000	Rp1.100.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								Rp120.000	Rp132.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							Rp120.000	Rp132.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							Rp100.000	Rp110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Rp100.000	Rp110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		

1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							Rp100.000	Rp110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
					Puskesmas Kolo								Rp766.733.815	Rp849.807.197			Lama
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Rp766.733.815	Rp849.807.197			Lama
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								Rp766.733.815	Rp849.807.197			Lama
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Rp10.000	Rp11.000			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								Rp10.000	Rp11.000			

1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan							Rp10.000	Rp11.000	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								Rp766.713.815	Rp849.785.197			Lama
1	2	2	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Rp766.213.815	Rp849.235.197			Lama

1	2	2	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Rp13.000.000	Rp14.300.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Lama
1	2	2	202	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Rp18.210.000	Rp20.031.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Lama
1	2	2	202	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Rp-	Rp1.100.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Lama

1	2	2	202	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Rp-	Rp1.000.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Lama
1	2	2	202	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Rp6.200.000	Rp6.820.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Lama
1	2	2	202	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Rp-	Rp1.000.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kolo	Lama

1	2	2	202	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Rp-	Rp1.100.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kolo	Lama
1	2	2	202	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Rp-	Rp1.100.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kolo	Lama
1	2	2	202	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Rp-	Rp1.100.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kolo	Lama

1	2	2	202	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100% Orang	Rp2.600.000	Rp2.860.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kolo	Lama
1	2	2	202	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100% Orang	Rp5.600.000	Rp6.160.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kolo	Lama
1	2	2	202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		100% Orang	Terkelolannya Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100% Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100% Orang	Rp2.400.000	Rp2.640.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kolo	Lama

1	2	2	202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		100% Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100% Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100% Dokumen	Rp96.991.000	Rp106.690.100	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kolo	Lama
1	2	2	202	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		100% Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100% Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100% Dokumen	Rp24.874.000	Rp27.361.400	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kolo	Lama
1	2	2	202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		100% Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100% Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100% Dokumen	Rp11.500.000	Rp12.650.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kolo	Lama
1	2	2	202	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		100% Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100% Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100% Dokumen	Rp52.238.000	Rp57.461.800	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kolo	Lama

1	2	2	202	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		100% Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100% Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100% Dokumen	Rp2.000.000	Rp2.200.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kolo	Lama
1	2	2	202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		100% Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100% Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100% Dokumen	Rp13.782.000	Rp15.160.200	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kolo	Lama
1	2	2	202	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		100% Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100% Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100% Dokumen	Rp40.650.000	Rp44.715.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kolo	Lama

1	2	2	202	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		100% Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100% Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100% Dokumen	Rp432.471.815	Rp475.718.997	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kolo	Lama
1	2	2	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		100% Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100% Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100% Dokumen	Rp43.547.000	Rp47.901.700	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kolo	Lama
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							Rp10.000	Rp11.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							Rp10.000	Rp11.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		

1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							Rp10.000	Rp11.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							Rp10.000	Rp11.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi							Rp10.000	Rp11.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak							Rp100.000	Rp110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								Rp500.000	Rp550.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		

1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							Rp500.000	Rp550.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							Rp10.000	Rp11.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Rp10.000	Rp11.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							Rp10.000	Rp11.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
					Puskesmas Jatibaru								Rp2.504.015.750	Rp2.754.417.325			Lama
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Rp2.504.015.750	Rp2.754.417.325			Lama

1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								Rp2.504.015.750	Rp2.754.417.325			Lama
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Rp100.000	Rp110.000			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								Rp100.000	Rp110.000			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan							Rp100.000	Rp110.000	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								Rp2.503.815.750	Rp2.754.197.325			Lama
1	2	2	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Rp2.502.815.750	Rp2.753.097.325			Lama

1	2	2	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		95% Orang	Terkelolannya Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95% Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95% Orang	Rp8.100.000	Rp8.910.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama
1	2	2	202	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		95% Orang	Terkelolannya Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95% Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95% Orang	Rp26.730.000	Rp26.730.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama
1	2	2	202	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		70% Orang	Terkelolannya Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70% Orang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70% Orang	Rp25.100.000	Rp27.610.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama

1	2	2	202	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		70% Orang	Terkelolannya Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70% Orang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70% Orang	Rp30.100.000	Rp33.110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama
1	2	2	202	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2748 Orang	Terkelolannya Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2748 Orang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2748 Orang	Rp7.690.000	Rp8.459.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama
1	2	2	202	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1497 Orang	Terkelolannya Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1497 Orang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1497 Orang	Rp6.000.000	Rp6.600.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama

1	2	2	202	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		568 Orang	Terkelolannya Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	568 Orang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	568 Orang	Rp6.000.000	Rp6.600.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama
1	2	2	202	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		77 Orang	Terkelolannya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang	Rp9.000.000	Rp9.900.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama

1	2	2	202	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		625 Orang	Terkelolannya Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	625 Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	625 Orang	Rp8.400.000	Rp9.240.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama
1	2	2	202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		683 Orang	Terkelolannya Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	683 Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	683 Orang	Rp3.000.000	Rp3.300.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama
1	2	2	202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		27 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen	Rp207.030.000	Rp227.733.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama

1	2	2	202	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		15 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15 Dokumen	Rp12.371.000	Rp13.608.100	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama
1	2	2	202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		30 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30 Dokumen	Rp10.000.000	Rp11.000.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama
1	2	2	202	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		21 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	21 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	21 Dokumen	Rp175.160.800	Rp192.676.880	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama

1	2	2	202	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		32 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	32 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	32 Dokumen	Rp22.042.000	Rp24.246.200	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama
1	2	2	202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		15 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15 Dokumen	Rp12.340.000	Rp13.574.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama
1	2	2	202	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		38 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	38 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	38 Dokumen	Rp91.450.000	Rp100.595.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama

1	2	2	202	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		100 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Dokumen	Rp1.689.278.950	Rp1.858.206.845	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama
1	2	2	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		72 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72 Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72 Dokumen	Rp154.453.000	Rp169.898.300	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Jatibaru	Lama
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							Rp100.000	Rp110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							Rp100.000	Rp110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		

1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							Rp100.000	Rp110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							Rp100.000	Rp110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi							Rp100.000	Rp110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak							Rp500.000	Rp550.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								Rp1.000.000	Rp1.100.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		

1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							Rp1.000.000	Rp1.100.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							Rp100.000	Rp110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Rp100.000	Rp110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							Rp100.000	Rp110.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
					Puskesmas Kumbe								Rp511.403.388	Rp1.689.924.368			Lama

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Rp511.403.388	Rp1.689.924.368			Lama
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								Rp511.403.388	Rp1.689.924.368			Lama
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Rp500.000	Rp550.000			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								Rp500.000	Rp550.000			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan							Rp500.000	Rp550.000	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		

1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								Rp510.403.388	Rp1.688.824.368			Lama
1	2	2	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Rp510.103.388	Rp1.688.494.368			Lama
1	2	2	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		186 Orang	Terkelolannya Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	186 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	186 Orang	Rp9.072.000	Rp9.979.200	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kumbe	Lama

1	2	2	202	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		178 Orang	Terkelolannya Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	178 Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	178 Orang	Rp13.150.000	Rp14.465.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kumbe	Lama
1	2	2	202	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1490 Orang	Terkelolannya Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1490 Orang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1490 Orang	Rp26.000.000	Rp28.600.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kumbe	Lama
1	2	2	202	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		6442 Orang	Terkelolannya Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6442 Orang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6442 Orang	Rp6.150.000	Rp6.765.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kumbe	Lama

1	2	2	202	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		919 Orang	Terkelolannya Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	919 Orang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	919 Orang	Rp740.000	Rp814.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kumbe	Lama
1	2	2	202	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		501 Orang	Terkelolannya Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	501 Orang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	501 Orang	Rp13.000.000	Rp14.300.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kumbe	Lama
1	2	2	202	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		190 Orang	Terkelolannya Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	190 Orang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	190 Orang	Rp1.800.000	Rp1.980.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kumbe	Lama

1	2	2	202	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		26 Orang	Terkelolannya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	26 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	26 Orang	Rp8.000.000	Rp8.800.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kumbe	Lama
1	2	2	202	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		232 Orang	Terkelolannya Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	232 Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	232 Orang	Rp9.100.000	Rp10.010.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kumbe	Lama
1	2	2	202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		191 Orang	Terkelolannya Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	191 Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	191 Orang	Rp3.100.000	Rp3.410.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kumbe	Lama

1	2	2	202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		335 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	335 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	335 Dokumen	Rp110.000.000	Rp121.000.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kumbe	Lama
1	2	2	202	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		12 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Rp940.000	Rp1.034.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kumbe	Lama
1	2	2	202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		142 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	142 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	142 Dokumen	Rp7.000.000	Rp7.700.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kumbe	Lama
1	2	2	202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		179 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	179 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	179 Dokumen	Rp14.647.000	Rp16.111.700	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kumbe	Lama

1	2	2	202	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		438 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	438 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	438 Dokumen	Rp68.000.000	Rp74.800.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kumbe	Lama
1	2	2	202	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		57 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	57 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	57 Dokumen	Rp113.932.388	Rp1.253.256.268	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kumbe	Lama
1	2	2	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		16 Dokumen	Terpenuhinnya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	Rp100.122.000	Rp110.134.200	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	PKM Kumbe	Lama

1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							Rp300.000	Rp330.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							Rp300.000	Rp330.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							Rp250.000	Rp275.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		

1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							Rp2.000.000	Rp2.200.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi							Rp2.000.000	Rp2.200.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak							Rp500.000	Rp-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								Rp300.000	Rp330.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							Rp300.000	Rp330.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							Rp500.000	Rp550.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		

1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Rp500.000	Rp550.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							Rp500.000	Rp550.000	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Kesehatan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.3 diatas. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan RENSTRA tahun 2025-2026 dan RKPD tahun 2025 yang sudah ditetapkan. Tujuan Dinas Kesehatan berdasarkan arah kebijakan tahun 2025 dalam RPJMD adalah Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia dengan sasaran meningkatnya kesehatan ibu dan anak, menurunnya angka penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya mutu pelayanan kesehatan. Pada tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Bima memiliki 5 Program, 22 Kegiatan dan 93 sub kegiatan guna mendukung untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan.

BAB V
P E N U T U P

Percepatan Desentralisasi Kesehatan merupakan langkah dan peluang untuk meningkatkan pembangunan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan daerah, namun disisi lain merupakan tantangan yang perlu pendekatan dan pembelajaran yang sistematis, bertahap serta terencana.

Keterbatasan semua sumber daya (SDM, pembiayaan, sarana, prasarana, peralatan dan kemampuan penguasaan teknologi dan manajemen) merupakan hambatan sekaligus tantangan yang perlu pemecahan secara cepat melalui capacity building, peningkatan akses dan mutu yang mengacu pada Rencana Strategis Kesehatan Kota Bima 2025–2026.

Adanya kendala-kendala dalam penyusunan perencanaan memerlukan proses pembelajaran secara kreatif dan inovatif bagi Tim Perencana Kabupaten/Kota (TPKK) dan kepedulian (awareness) dari pemegang kebijakan (Kepala dinas dan sub-sub dinas kesehatan) serta semua stake-holder yang terkait.

Perlu adanya terobosan-terobosan program inovatif di bidang kesehatan yang mempunyai daya ungkit besar dan kemandirian serta berkesinambungan untuk dapat memecahkan masalah kesehatan secara efektif dan efisien.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja 2025, sebagai acuan rencana dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2025 dapat memberikan arah program pembangunan kesehatan dalam rangka mengantisipasi permasalahan kesehatan dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan Kota Bima.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kota Bima merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bima yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Program Nasional berdasarkan RKP Tahun 2025 yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima yaitu: Urusan Wajib

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja.
4. Program Hubungan Industrial

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah YANG TERKAIT KEWENAGAN TUGAS DAN FUNGSI DENGAN SEKTOR / SKPD (apabila ada)

15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota;

17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;

18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun dengan maksud digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2025

1.3.2. Tujuan Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Kota Bima dalam kurun waktu satu tahun sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Kota Bima.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja, hubungan Renja Dinas Tenaga Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Disnaker Kota BimaTahun 2025

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DinasTenaga Kerja Kota Bima

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima

3.3. Program dan Kegiatan

3.4. Matriks Renja 2025

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima 2020 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya dan Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Rerencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Dinas Tenaga Kerja Kota Bima adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode						urusan)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Pada Yang di Evaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
														I		II		III		IV											
1						2	3	5				6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2.01	2.01.1	.1				DINAS TENAGA KERJA																									
2.01	2.01.1	.1	.01			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi	100%	768.401			100%	611.936.000	20 %	124.467.710	37 %	227.522.031	16,4 %	100.190.669	22,4 %	137.304.318	96 %	589.484.728	9.633	96,33	96,33	589.484.728	96,33	76715,77	DINAS TENAGA KERJA	
2.01	2.01.1	.1	.01	.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar selama setahun	1.200 Lembar	21.400			980 Surat Keluar dan Masuk	20.050.000	231 Surat Keluar dan Masuk	4.950.000	231 Surat Keluar dan Masuk	3.300.000	244 Surat Keluar dan Masuk	5.200.000	216 Surat Keluar dan Masuk	6.600.000	922 Surat Keluar dan Masuk	20.050.000	94,08	100,00	922	20.050.000	77	93691,59		
2.01	2.01.1	.1	.01	.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	3 Jasa	25.000			3 Jasa	19.200.000	3 Jasa	2.555.710	3 Jasa	4.014.031	3 Jasa	3.563.169	3 Jasa	5.029.318	3 Jasa	15.162.228	100,0	78,97	3	15.162.228	100,00	60648,91		
2.01	2.01.1	.1	.01	.06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	1 1 Mobil Dinas	25.000			1 Mobil Dinas	16.600.000	1 Mobil Dinas	1.650.000	1 Mobil Dinas	1.100.000	1 Mobil Dinas	9.650.000	1 Mobil Dinas	4.200.000	1 Mobil Dinas	16.600.000	100,00	100,00	1	16.600.000	100,00	66400,00		
2.01	2.01.1	.1	.01	.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	5 Orang	70.000			9 Orang	81.960.000	9 Orang	18.915.000	9 Orang	14.149.000	9 Orang	20.025.000	9 Orang	28.700.000	9 Orang	81.789.000	100,00	99,79	9	81.789.000	180,00	116841,43		
2.01	2.01.1	.1	.01	.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	100 %	3.000			7 Orang	39.000.000	7 Orang	8.300.000	7 Orang	5.400.000	7 Orang	8.800.000	7 Orang	11.100.000	7 Orang	33.600.000	100,00	86,15	7	33.600.000	7,00	1120000,00		
2.01	2.01.1	.1	.01	.09		Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	8 Unit	3.001			4 Unit	3.000.000	- Unit	-	- Unit	-	- Unit		4 Unit	3.000.000	4 Unit	3.000.000	100,00	100,00	4	3.000.000	50,00	99966,68		
2.01	2.01.1	.1	.01	.10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	12 Bulan	54.000			12 Bulan	49.579.000	3 Bulan	6.000.000	3 Bulan	12.000.000	3 Bulan	14.000.000	3 Bln	16.000.000	12 Bulan	48.000.000	100,00	96,82	12	48.000.000	100,00	88888,89		
2.01	2.01.1	.1	.01	.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	45.000 Lbr	30.000			43.348 Lbr	20.007.000	21.533 Lbr	5.100.000	2.019 Lbr	5.113.000	5.019 Lbr	6.872.000	2.019 Lbr	2.900.500	30.590 Lbr	19.985.500	70,57	99,89	30.590	19.985.500	67,98	66618,33		
2.01	2.01.1	.1	.01	.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor	11 Unit	272.000			12 Unit Laptop/ Printer	84.250.000	Unit Laptop/ Printer	-	10 Unit Laptop/ Printer	80.010.000	10 Unit Laptop/ Printer	-	-	995.000	10 Unit Laptop/ Printer	81.005.000	83,33	96,15	10	81.005.000	90,91	29781,25		
2.01	2.01.1	.1	.01	.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media	6 Media	20.000			10 Media Masa	74.790.000	10 Media Masa	48.200.000	10 Media Masa	4.215.000	10 Media Masa	6.615.000		10.480.000	10 Media Masa	69.510.000	100,00	92,94	10	69.510.000	166,67	347550,00		
2.01	2.01.1	.1	.01	.17		Penyediaan makanan dan minuman	Volume Kegiatan Rapat	14 Kali	30.000			12 Bulan	4.500.000	3 Bulan	750.000	3 Bulan	3.000.000	3 Bulan	750.000		-	9 Bulan	4.500.000	75,00	100,00	9	4.500.000	64,29	15000,00		
2.01	2.01.1	.1	.01	.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	30 Kali	200.000			15 Kali	199.000.000	3 Kali	28.047.000	6 Kali	95.221.000	6 Kali	24.715.500		48.299.500	15 Kali	196.283.000	100,00	98,63	15	196.283.000	50,00	98141,50		
2.01	2.01.1	.1	.01	.19		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2 Kali	15.000			5 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-			- Kali	-	-	#DIV/0!	-	-	-	0,00		
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)				96				589.484.728				

| | | |

2.01	**2.01.1**	**.1**	**16**		**PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA**	**Meningkatnya Porsentase Pencari kerja yang**	**100%**		**144.000**			**100%**		**257.520.000**	**4,41**	**%**	**11.355.000**	**7,59**	**%**	**19.545.000**	**72,81**	**%**	**187.495.000**	**11,66**	**%**	**30.032.000**	**12,00**	**%**	**248.427.000**	**1.200**	**96,47**	**12,00**	**248.427.000**	**12,00**	**172518,75**		
2.01	2.01.1	.1	16	02	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	3	Keg	16.000			2	Keg	65.885.000	1	Keg	11.355.000	1	Keg	19.545.000			-	1	Keg	28.132.000	2	Keg	59.032.000	100	90	2,00	59.032.000	67	368.950		
2.01	2.01.1	.1	16	06	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis	Meningkatnya Wawasan dan pengetahuan serta pemahaman	50	TKM	8.000			50	TKM	174.980.000	-	TKM	-		TKM		50	TKM	170.980.000	50	TKM	1.900.000	50	TKM	172.880.000	100	99	50,00	172.880.000	100	2.161.000		
2.01	2.01.1	.1	16	08	Pembinaan perusahaan penempatan tenaga kerja indonesia	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di bidang	88	Orang	120.000			9	perusahaa	16.655.000	-	perusah	-		perusah		9	Perusa	16.515.000	-	-	-	68	Orang	16.515.000	756	99	68,00	16.515.000	77	13.763		
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)						**96**				**248.427.000**				
2.01	**2.01.1**	**.1**	**17**		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN**	**Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan Pengembangan Lembaga**	**100%**		**307.275**			**100%**		**316.646.000**	**15,00**	**%**	**47.495.000**	**13,05**	**%**	**41.324.000**	**34,19**	**%**	**108.269.000**	**34,97**	**%**	**110.731.500**	**28,05**	**%**	**307.819.500**	**2.805**	**97,21**	**28,05**	**307.819.500**	**28,05**	**100177,20**		
2.01	2.01.1	.1	17	01	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	33	Persahaan	120.514			33	Persaha	35.700.000	11	Persaha	8.420.000	17	Persaha	21.785.000			-	5	Persaha	5.325.000	33	Prsahaan	35.530.000	100	100	33,00	35.530.000	100	29.482		
2.01	2.01.1	.1	17	02	Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian	Terlaksanya mediasi perselisihan hubungan industrial	22	Kasus	50.164			20	Kegiatan	80.330.000	8	Kasus	39.075.000	6	Kasus	19.539.000	4	Kasus	15.859.000	2	Kasus	5.331.000	20	Kasus	79.804.000	100	99	20,00	79.804.000	91	159.086		
2.01	2.01.1	.1	17	03	Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Prosedur, Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan UMK dan Jaminan Sosial	254	Persahaan	46.841			25	Persaha	54.116.000		Persaha	-		Persaha		15	Perusa	37.130.000	10	Perusa	13.906.000	25	Perusah	51.036.000	100	94	25,00	51.036.000	10	108.956		
2.01	2.01.1	.1	17	04	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Terlaksananya Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	60	Orang	49.829			60	Orang	69.520.000		Orang	-		Orang				-	60	Org/ Perus	68.320.000	60	Org/ Perus	68.320.000	100	98	60,00	68.320.000	100	137.109		
2.01	2.01.1	.1	17	05	Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terlaksananya survey kebutuhan hidup layak dan penetapan UMK	33	Persahaan	39.927			30	Persaha	76.980.000		Persaha	-		Persaha		30	Perusa	55.280.000			17.849.500	30	Persha	73.129.500	100	95	30,00	73.129.500	91	183.158		
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)						**97**				**307.819.500,000**				

Dari tabel di atas diuraikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja Kota Bima pada tahun 2024, dianggarkan sebesar Rp.3.955.229.795 dan terealisasi sebesar Rp.3.767.046.152 atau sebesar 95%. Berikut akan disajikan capaian kegiatan-kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan total anggaran Rp.58.997.400 terealisasi Rp.58.613.400 dengan persentase 100.00% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp.2.461.988.359 terealisasi Rp.2.439.900.601 dengan persentase 97.85% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan total anggaran Rp. 10,380,000, terealisasi Rp. 10,380,000 dengan persentase 92% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100%
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan total anggaran Rp. 274,128,800, terealisasi Rp. 251,693,230.00 dengan persentase 99,92% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100%
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah, dengan total anggaran Rp. 624,750,236, terealisasi Rp. 599,313,247 dengan persentase 96% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100%
6. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan total anggaran Rp. 310,254,000 terealisasi Rp. 264,408,933.00 dengan persentase 85% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100%
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan total anggaran Rp. 183,870,000, terealisasi Rp. 118,813,741.00 dengan persentase 65% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100%

B. Program Perencanaan Tenaga Kerja.

Program Perencanaan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 11,842,400 dan terealisasi Rp. 11,640,000 atau sebesar 98,00%. Secara umum Program Perencanaan Tenaga Kerja dapat berjalan dengan baik. Berikut akan disajikan kegiatan yang mendukung dalam Program Perencanaan Tenaga Kerja:

1. PenyusunanRencana Tenaga Kerja dianggarkan sebesar Rp. 11,842,400 dan terealisasi Rp. 11,640,000atau sebesar 98,00%.. Penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaiakan 100%.

C. Program Pelatihan Kerja dan Proktifitas Tenaga Kerja.

Program Pelatihan Kerja dan Prokduktifitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2024, dianggarkan sebesar 511,543,000 dan terealisasi Rp. 460,131,500.00 atau sebesar 90%Secara umum Program Pelatihan Kerja dan Proktifitas Tenaga Kerja dapat berjalan dengan baik. Berikut akan disajikan kegiatan yang mendukung dalam Program Pelatihan Kerja dan Proktifitas Tenaga Kerja:

1. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan unit Kompetensi, dengan total anggaran Rp 511,543,000terealisasi Rp 460,131,500.00 dengan persentase 90% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan total anggaran Rp. 76,227,000 Terealisasi Rp 75,970,880.00 dengan persentase 27% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %

D. Program Penempatan Tenaga Kerja.

Program Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2024, dianggarkan sebesar Rp. 172,502,400 dan terealisasi Rp. 165,032,400.00 atau sebesar 96%Secara umum Program Penempatan Tenaga Kerja dapat berjalan dengan baik. Berikut akan disajikan kegiatan yang mendukung dalam Program Penempatan Tenaga Kerja:

1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan total anggaran Rp. 86,713,000 Terealisasi Rp. 80,693,000.00. dengan persentase 93% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan total anggaran Rp. 53,702,400 Terealisasi Rp. 52,752,400.00 dengan persentase 98% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
3. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan total anggaran Rp. 32,087,000 Terealisasi Rp. 31,587,000.00 dengan persentase 98% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %

E. Program Hubungan Industrial.

Program HubunganIndustrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2021, dianggarkan sebesar Rp. 168,253,000 dan terealisasi Rp. 140,559,283.00 atau sebesar 99.53%. Secara umum Program Hubungan Industrial dapat berjalan dengan baik. Berikut akan disajikan kegiatan yang mendukung dalam Program Hubungan Industrial:

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan total anggaran Rp. 107,809,000. Terealisasi Rp. 85,599,200.00 dengan persentase 79% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
2. Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahan di Daerah Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp. 60,444,000. Terealisasi Rp. 54,960,083.00 dengan persentase 91% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %

Dari uraian diatas terlihat bahwa capaian Kinerja semua Kegiatan Rata-rata 100%. Pengukuran Kinerja kegiatan (PKK) diatas menunjukan bahwa sasaran yang diinginkan pada tahun 2024 telah memenuhi target. Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian Kegiatan/ Program/ Sasaran Strategis Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja Kota Bimat Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4.913.050.395,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.637.833.015,00,- atau 94%.

Untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan indikator Kinerja Ketersediaan Data base tenaga kerja daerah target 1 Dokumen , Jumlah lembaga pelatihan tenaga kerja swasta yang dibina dengan target 12 LPTKI dan Jumlah Tenaga kerja yang dilatih berdasarkan jenis pelatihan, pendidikan dan ketrampilan 100 Orang dilaksankan sesuai target yang telah ditentukan.

Untuk sasaran strategis Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan indikator Kinerja jasa iklan radio dan cetak iklan target 1 Dokumen , Jumlah Peserta Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja, Kegiatan Peningkatan Mutu Standar ISO dengan target 1 kegiatan , Jumlah PPTKIS yang dibina dan Jumlah tenaga kerja mandiri TKM dengan target 100 tenaga kerja Mandiri (TKM) dilaksanakan sesuai target yang ditentukan.

Dalam rangka perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan ditetapkan tujuan sasaran strategis Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan indikator kinerja jumlah perusahaan yang dibina dengan target 12 perusahaan, Jumlah Pekerja Anak yang disurvey target 120 Anak, Jumlah perusahaan yang dibina norma kerja target 15 perusahaan, jumlah peserta sosialisasi perlindungan keselamatan

dan kesehatan kerja dengan target 50 orang peserta kegiatan target 50 Orang dan indicator kinerja jumlah peserta sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan target 50 orang kesemuanya dapat dipenuhi sesuai target. dan tujuan sasaran strategis Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan indikator kinerja jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama target 15 kasus, Tersedianya dokumen penetapan nilai kehidupan layak target 1 dokumen dan Meningkatnya falitas operasional dewan pengupahan dengan target 11 Orang dapat dipenuhi sesuai target yang di tentukan. Untuk lebih jelas target dan realisasi atas tujuan sasaran dan indikator kinerja dinas tenaga kerja kota bima pada table berikut :

PENGUKURAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
Meningkatkan Kesempatan Kerja	**75,970,880.00**	**100.00**	**100%**	**98%**	**98.68%**	**11,842,400**	**11,640,000**	**98.00%**
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen ketangakerjaan	100%	100%	**100%**	**11,842,400**	**11,640,000**	**98.00%**
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen RTKD dan database ketenagakerjaan	2 dokumen	2 dokumen	**100%**	**11,842,400**	**11,640,000**	**98.00%**
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**a. Persentase tenaga kerja yang terlatih**	**100%**	**90%**	**81.00%**	**511,543,000**	**460,131,500.00**	**99.53**
		b. Angka Produktivitas Tenaga Kerja						
	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	**Tingkat kelulusan peserta pelatihan berdasarkan unit kompetensi**	**100%**	**100%**	**100%**	**511,543,000**	**460,131,500.00**	**99.53**
	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Jumlah calon tenaga kerja terlatih	100 orang	100 orang	100%	341,523,000	340,111,500.00	99.17
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	4 Paket	4 Paket	100%	170,020,000	120,020,000.00	100.00
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Jumlah LPKS yang diakreditasi minimal B**	**5 LPTKS**	**5 LPTKS**	**100%**	**76,227,000**	**75,970,880.00**	**100.00**
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang terbina	12 LPKS	12 LPKS	100%	**76,227,000**	**75,970,880.00**	**100.00**
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Pesentase Pencari Kerja yang ditempatkan**	**98%**	**91.70%**	**93.57%**	**172,502,400**	**172,502,400.00**	**165,032,4**
		Tingkat kepuasan pelayanan ketenagakerjaan	**95%**	**94.90%**	**94.90%**			
	Pelayanan Antar Kerja di daerah kabupaten/kota	**Jumlah penempatan yang dilaksanakan**	**250 penempatan**	**227 pernempatan**	**91%**	86,713,000	80,693,000.00	**99.99**
	Penyuluhan dan bimbingan bagi pencari kerja	Jumlah peserta sosialisasi AK1	350 orang	350 orang	100,00	54,340,000	51,090,000.00	54,340,000

	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pekerja padat karya yang terserap	480 orang	480 orang	100.00	32,373,000	29,603,000.00	99.99
Sasaran Strategis	**Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**%**	**Jumlah Anggaran**	**Realisasi**	**%**
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	***Pengelolaan InformasiPasar Kerja***	**Persentase Pencari Kerja yang di tempatkan**	**100%**	**100%**	**100,00**	53,702,400	52,752,400.00	**100.00**
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	12 LPTKS	12 LPTKS	100,00	53,702,400	52,752,400.00	100.00
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kelurahan bebas pemberangkatan PMI un procedural**	**100%**	**100%**	**100,00**	32,087,000	31,587,000.00	**99.97**
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/PMI	Jumlah kelurahan yang tersosialisasi	41 kelurahan	41 kelurahan	100,00	32,087,000	31,587,000.00	99.97
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**a. Persentase perusahaan yang melaksanakan K3**	**20%**	**16.36%**	**81.80%**	168,253,000	140,559,283.00	
		b. Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan	**70%**	**44.17%**	**63.10%**			
		c. Persentase Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK)	**25%**	**18.40%**	**73.60%**			
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan	**Jumlah Perusahaan yang melaksanakan peraturan perusahaan yang terkait dengan HI dan terdaftar di WLKP online**	**150 perusahaan**	**144 Perusahaan**	**96.00%**	107,809,000	85,599,200.00	79 %
	Pengesahan Peraturan Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan	**150 perusahaan**	**144 Perusahaan**	**144 Perusahaan**	**37.420.000**	**18.210.000**	48,66%
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja Yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta pengupahan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	70,389,000	67,389,200.00	96%

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	**Jumlah aduan konflik hubungan industrial**	**15 kasus**	**17 kasus**	**113%**	60,444,000	54,960,083.00	**91 %**
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Jumlah perselisihan yang dicegah	15 Kasus	12 Kasus	80%	6,969,000	6,705,000.00	96%
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjiaan bersama	15 kasus	14 kasus	93.33%	22,314,000	21,410,000.00	96%
	Pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	150 perusahaan	150 perusahaan	100%	31,161,000	26,845,083.00	86 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima dapat diukur melalui capaian target kinerja dengan menggunakan berbagai indikator Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya. serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan, penetapan kinerja pelayanan OPD pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bima. Analisa Kinerja Pelayanan OPD Dinas Tenaga kerja Kota Bima adalah Analisis terhadap Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja serta Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, maka penyusunan capaian kinerja urusan Ketenagakerjaan harus memperhatikan target SPM yang sudah ditetapkan.

Pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Pelatihan Kerja, indikator SPM : besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, target tahun 2019 adalah 25 orang besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan tenaga kerja Mandiri (TKM), target tahun 2018 adalah 50 Orang; Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, indikator SPM : besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, target tahun 2018 adalah mencapai 54%. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, indikator SPM adalah besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), target sampai tahun 2018 adalah 100% Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, indikator SPM : besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek, target tahun 2018 adalah mencapai 50%.
2. Terhadap Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan dan dan besaran pengujian peralatan di perusahaan, indikator SPM bukan sepenuhnya merupakan kewenangan Kota Bima karena sudah dialihkan menjadi kewenangan Provinsi, namun demikian pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tetap dilakukan oleh dinas tenaga kerja kota bima.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan antara lain

1. Lapangan pekerjaan semakin terbatas;
2. Tingginya jumlah pengganggguran;
3. Rendahnya tingkat pendidikan;
4. Minimnya perlindungan hukum;
5. Pemberian upah belum sesuai dengan Upah Minimum Kota;
6. Adanya faktor eksternal, seperti fluktuasi kondisi politik yang berpengaruh pada kondusifitas daerah;
7. Penganggur atau pencari kerja kurang memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, diantaranya adalah: belum tersedianya gedung dan instruktur pelatihan BLK, terbatasnya tenaga fungsional pengantar kerja, mediator, dan pengawas ketenagakerjaan, masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja, masih terdapat anak dibawah umur yang bekerja, banyaknya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia akibat ketidaksesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja. Faktor- faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan, adalah: kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya, lemahnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global, berbagai perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha sehingga tidak mendukung penciptaan lapangan kerja baru, rendahnya pendidikan dan produktivitas tenaga kerja, tekanan kenaikan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil.

Isu Strategis Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kota Bima disusun berdasarkan kompilasi yang ada dalam RPJMD Kota BimaTahun 2018-2025, hasil analisis situasi dan kondisi eksisting, serta persepsi masyarakat, tokoh, dan para pakar ketenagakerjaan. Dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut, dapat diangkat sebagai isu strategis dengan kriteria berikut :

1. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;
3. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, dan meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial;
4. Masih kurang maksimalnya pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.

Cakupan masalah yang luas: 1. Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan berdampak negatif; 2. Memiliki basis keunggulan atau potensi

lokal Kota Bima; 3. Memberikan daya dorong dan daya sinergis terhadap penyelesaian sejumlah permasalahan; 4. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu. Permasalahan menurut stakeholders : 1) Sektor ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi relatif belum didayagunakan secara maksimal; 2) Sinergitas modal sosial masyarakat bagi pembangunan belum maksimal; 3) Kurang link and match-nya antara lulusan pendidikan formal dengan dunia kerja; 4) Penyerapan tenaga kerja lebih tinggi pada pekerja tidak tetap/outsourching, berpotensi pada terjadinya pekerja kembali menjadi penganggur; 6) Tingginya angka kecelakaan kerja; 7) Tingginya pelanggaran norma kerja; 8) Kasus perselisihan hubungan industrial yang berlarut-larut.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bima secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan (a-spatial). Oleh karena Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan Indonesia. Mengingat kondisi ketenagakerjaan sebagai muara dari berbagai kondisi, maka keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi, politik maupun sosial sangat berpengaruh pada akselerasi pembangunan bidang ketenagakerjaan.Arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan 2019-2025 selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, bidang ekonomi, wilayah serta pembangunan aparatur Negara.

Agenda pembangunan bidang ketenagakerjaan disebut dengan *NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN,* yaitu:

1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi tenaga Kerja;
3. Percepatan Sertifikasi Profesi;
4. Perluasan kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;
6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan produktif;
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel

RPJPD 2015-2045 dan RPJMD Tahun 2018-2025 Provinsi NTB adalah Pembangunan jangka panjang Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2045 adalah mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang beriman, maju, dan sejahtera dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur dalam negara Kesatuan Republik Indonesia seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta kemandirian daerah sebagaimana cita-cita otonomi daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

Untuk mencapai tingkat kesejahteraan, keadilan, kemandirian dan kemajuan yang diinginkan, arah pembangunan jangka panjang Daerah Nusa Tenggara Barat di bidang tenaga kerja adalah menyediakan lapangan kerja, diarahkan untuk:

1. Mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor informal.
2. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian perselisihan yang memuaskan semua pihak.
3. Meningkatkan produktivitas pekerja agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi.

Kebijakan Umum dan Program Prioritas RPJMD NTB Tahun 2018-2025, adalah: Meningkatkan sinergitas tenaga kerja dengan lapangan kerja dimaknai melalui kebijakan peningkatan BLK, KLK dan lembaga pendidikan keterampilan usaha lainnya

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan program dan kegiatan secara optimal. Oleh karena itu setiap Satuan Kerja harus merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Bima secara komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bima tahun 2025 menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai berikut:

TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
5	6	7	8	10	11	12	14	15	16
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penurunan Tingkat Pengganggguran Terbuka	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Meningkatnya Partisipasi angkatan kerja serta tumbuhnya wirausaha baru mandiri melalui pembangunan BLK sebagai wadah penyediaan tenaga ketrja terampil serta peningkatan akses permodalan	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	Meningkatnya akurasi data ketenagakerjaan	Persentase Kesesuaian Perencanaan Tenaga Kerja dengan kebijakan ketenagakerjaan	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja makro	Tersusunnya RTKD dan Database ketenagakerjaan	Dokumen RTKD dan database ketanagakerjaan
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	a.Persentase tenaga kerja yang terlatih	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi Tersedianya Sarana Prasarana Paket Pelatihan	Jumlah calon tenaga kerja terlatih Jumlah paket sarana pelatihan kerja
						b.Produktivitas tenaga kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terbinanya Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang terbina
		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	Meningkatnya Perluasan kesempatan kerja	a. Pesentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Penyuluhan dan bimbingan bagi pencari kerja	Terlaksananya Sosialisasi AK1 pada Perguruan Tinggi dan SMA/SMK	Jumlah peserta sosialisasi AK1
						b. Tingkat kepuasan pelayanan ketenagakerjaan	Perluasan Kesempatan Kerja	Terlaksananya Program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan

									Kesempatan Kerja

							Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi bursa tenaga kerja yang tersebarkan
							Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya job fair/bursa kerja	Jumlah kesepakatan kerja yang disepakati
							Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perlindungan PMI di daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan bebas pemberangkatan PMI un procedural
							Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/PMI	Terlaksananya Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Jumlah CPMI dan PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya
		Meningkatnya perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh	**Program Hubungan Industrial**	Meningkatnya cakupan perlindungan dan Pengembngan lembaga ketenagakerjaan	a. Persentase perusahaan yang melaksanakan K3			

						b. Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan		Fasilitasi Dewan Pengupahan Daerah	Draft Dokumen UMK
						c. Persentase Perusahaan yang melaksanakan	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Terlaksananya Pembinaan dan sosialisasi Norma	Jumlah perusahan yang dibina

						Upah Minimum Kota (UMK)	Perusahaan	Kerja dan K3	
							Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Terlaksananya mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah aduan konflik hubungan industrial
							Pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya PEmbinaan dan sosialisasi Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang dibina norma jaminan sosial tenaga kerja

3.3 Pogram dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran SKPD merupakan penjabaran teknis dari pada Visi dan Misi Dinas Tenaga Keraja yang dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada dalam Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program dengan mengerahkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia.

secara rinci masing-masing program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja diuraikan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
      f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
      f. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
      b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
      c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
   a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

III. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
   a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
   a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja SwastaPenyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

IV. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
   a. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
   b. Perluasan Kesempatan Kerja
2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
   a. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
   b. Job Fair/Bursa Kerja
4. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
   a. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

V. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   a. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
   a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   c. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**7.534.679.202**				**9.994.679.202**
2	**07**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**7.534.679.202**				**9.994.679.202**
2	**07**	**2.07.00.00.01**				**DINAS TENAGA KERJA**				**7.534.679.202**				**9.994.679.202**
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bima**	**100%**	**6.326.596.102**	DAU		100,00%	**6.326.596.102**
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**01**	**20.1**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Cakupan dokumen perencanaan dan kinerja yang disusun sesuai ketentuan**	**Kota Bima**	**100%**	**54.612.000,00**	**DAU**		**A**	**54.612.000,00**
2	07	2.07.00.00.01	01	20.1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Kota Bima	1 dokumen	**4.734.000**	DAU		2 dokumen	**4.734.000**
2	07	2.07.00.00.01	01	20.1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	1 dokumen	**4.734.000**	DAU		1 dokumen	**4.734.000**
2	07	2.07.00.00.01	01	20.1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	1 dokumen	**4.734.000**	DAU		1 dokumen	**4.734.000**
2	07	2.07.00.00.01	01	20.1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	1 dokumen	**8.064.000**	DAU		1 dokumen	**8.064.000**
2	07	2.07.00.00.01	01	20.1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	1 dokumen	**4.734.000**	DAU		1 dokumen	**4.734.000**
2	07	2.07.00.00.01	01	20.1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	Kota Bima	4 dokumen	**4.734.000**	DAU		4 dokumen	**4.734.000**
2	07	2.07.00.00.01	01	20.1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LAKIP dan LPPD	Kota Bima	2 dokumen	**22.878.000**	DAU		2 dokumen	**22.878.000**
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**	**Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**100%**	**2.915.332.002**	**DAU**		**100%**	**2.915.332.002**
2	07	2.07.00.00.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan penyediaan gaji dan tunjangan	Kota Bima	100%	**2.709.373.002**	DAU		100%	**2.709.373.002**
2	07	2.07.00.00.01	01	2.02	06	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan penyediaan ATK	Kota Bima	100%	**42.180.000**	DAU		4 dokumen	**42.180.000**
2	07	2.07.00.00.01	01	2.02	07	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima	100%	**145.920.000**	DAU		2 dokumen	**145.920.000**
2	07	2.07.00.00.01	01	2.02	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	4 dokumen	**4.734.000**	DAU		1 dokumen	**4.734.000**
2	07	2.07.00.00.01	01	2.02	09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan semester	Kota Bima	2 dokumen	**4.734.000,00**	DAU		1 dokumen	**4.734.000,00**
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi BMD pada perangkat daerah**	**Kota Bima**	**100%**	**12.330.000**	**DAU**		**100%**	**12.330.000**
2	07	2.07.00.00.01	01	2.03	02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pengamanan BMD SKPD	Kota Bima	100%	**6.054.000**	DAU		100%	**6.054.000**

2	07	2.07.00.00.01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan BMD pada SKPD	Kota Bima	4 dokumen	6.276.000	DAU		4 dokumen	6.276.000
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Kota Bima**	**100%**	29.920.000	**DAU**		**100%**	29.920.000
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Bima	100 orang	29.920.000	DAU		100 orang	29.920.000
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**01**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**Kota Bima**	**100%**	197.846.000			**100%**	197.846.000
2	07	2.07.00.00.01	01	2,06	01	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah komponen instalasi listrik	Kota Bima	1 paket	30.360.000	DAU		1 paket	30.360.000
2	07	2.07.00.00.01	01	2,06	05	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	100%	132.370.000	DAU		71.833 lembar	132.370.000
2	07	2.07.00.00.01	01	2,06	06	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kerjasama media cetak dan online	Kota Bima	10 media	35.116.000	DAU		12 bulan	35.116.000
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah**	**Kota Bima**	**85%**	2.624.742.000			100,00%	2.624.742.000
2	07	2.07.00.00.01	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	Kota Bima	1 paket	20.500.000	DAU		1 paket	20.500.000
2	07	2.07.00.00.01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah paket pengadaan	Kota Bima	1 paket	84.142.000	DAU		1 paket	84.142.000
2	07	2.07.00.00.01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Bangunan BLK	Kota Bima	1 unit	2.520.100.000	DAU		1 unit	4.520.100.000
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Bima**	**100%**	283.229.000,			**100%**	283.229.000,
2	07	2.07.00.00.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa surat menyurat	Kota Bima	100%	75.054.000	DAU		100%	75.054.000
2	07	2.07.00.00.01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan kebersihan kantor	Kota Bima	100%	208.175.000			100%	208.175.000
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah**	**Kota Bima**	**100%**	195.860.000			**100%**	195.860.000
2	07	2.07.00.00.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Cakupan pemeliharaan kendaraan perseorangan jabatan	Kota Bima	100%	42.860.000			100%	42.860.000
2	07	2.07.00.00.01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Cakupan pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional dan lapangan	Kota Bima	100%	15.390.000	DAU		100%	15.390.000
2	07	2.07.00.00.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pemeliharaan peralatan dan mesin	Kota Bima	100%	12.180.000	DAU		100%	12.180.000
2	07	2.07.00.00.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	Kota Bima	100%	125.430.000	DAU		100%	125.430.000
2	07	2.07.00.00.01	01	2.13	02	**Penataan Organisasi**	Cakupan Organisasi	Kota Bima	100%	12.725.100				12.725.100
2	07	2.07.00.00.01	01	2.13	02	Fasilitasi pelayanan Publikdan tata laksana	Cakupan Organisasi	Kota Bima	100%	12.725.100				12.725.100
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase ketepatan waktu penyelesaiaan dokumen ketenagakerjaan**	**Kota Bima**	**100%**	11.854.000	DAU		**100%**	11.854.000
2	07	2.07.00.00.01	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Perusahaan yang menyusun rencana kerja mikro	Kota Bima	7%	11.854.000	DAU		8%	11.854.000
2	07	2.07.00.00.01	02	2.01	01	Fasilitasi Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana kerja mikro	Kota Bima	100 Perusahaan	11.854.000			120 Perusahaan	11.854.000
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**a. Persentase tenaga kerja terlatih**	**Kota Bima**	**35%**	327.144.000	**DAU**		**Rp. 38 juta**	427.144.000
							b.Angka produktivitas Tenaga Kerja	**Kota Bima**	**42 Juta**	327.144.000	DAU		8%	427.144.000

2	**07**	**2.07.00.00.01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Tingkat kelulusan peserta pelatihan**	**Kota Bima**	**100%**	**327.144.000**			**100%**	**427.144.000**
2	07	2.07.00.00.01	03	2.01	01	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensiensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	**Kota Bima**	232 Orang	**327.144.000**	DAU		150 orang	**427.144.000**
2	07	2.07.00.00.01	03	2.01	01	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah paket Sarana/peralatan pelatihan Kerja	**Kota Bima**	1 paket	0	DAU		1 paket	**150.000.000**
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah LPTKS yang terakreditasi minimal B**	Kota Bima	**7 LPTKS**	**37.024.000**	DAU			**47.024.000**
2	07	2.07.00.00.01	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		12 LPTKS	**37.024.000**	DAU		12 LPTKS	**47.024.000**
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Pesentase Pencari Kerja yang ditempatkan**	**Kota Bima**	**98%**	**205.344.500**	**DAU**		**98%**	**305.344.500**
							Tingkat kepuasan pelayanan ketenagakerjaan	**Kota Bima**	**97%**				**97%**	
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penempatan yang dilaksanakan**	**Kota Bima**	**250 penempatan**	**109.745.000**			**300 penempatan**	**159.745.000**
2	07	2.07.00.00.01	03	2.01	01	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta sosialisasi AK1	Kota Bima	225 orang	62.290.000	DAU		300 orang	87.290.000
						Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah calon tenaga kerja magang G to G ke Jepang	Kota Bima	40 Orang	47.455.000			50 Orang	72.455.000
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**04**	**2.02**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase informasi kerja yang tersampaikan**	**Kota Bima**	**98%**	**58.275.500**	DAU		**100%**	**88.275.500**
2	07	2.07.00.00.01	04	2.02	02	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Kota Bima	250 Orang	58.275.500	DAU		300 Orang	88.275.500
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**04**	**2.03**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kelurahan bebas pemberangkatan PMI un procedural**	**Kota Bima**	**100%**	**37.324.000**	DAU		**100%**	**57.324.000**
2	07	2.07.00.00.01	04	2.03	03	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kota Bima	100 orang	**37.324.000**	DAU		120 orang	57.324.000
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**a. Persentase perusahaan yang melaksanakan K3**	**Kota Bima**	**30%**	**608.373.400**	**DAU**		**35%**	**708.373.400**
							b. Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan	**Kota Bima**	**80%**				**85%**	0
							c. Persentase Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK)	**Kota Bima**	**35%**				**40%**	0
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perusahaan yang melaksanakan UMK**	**Kota Bima**	**150 perusahaan**	**138.699.600**	**DAU**		**200 perusahaan**	**188.699.600**
2	07	2.07.00.00.01	05	2.01	03	Pengesahan Peraturan Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kota Bima	50 perusahaan	54.880.000	DAU		70 perusahaan	79.880.000
				2.01	04	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kota Bima	4 Laporan	83.819.600	DAU		5 Laporan	108.819.600
2	**07**	**2.07.00.00.01**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah aduan konflik hubungan industrial**	**Kota Bima**	**14 Kasus**	**469.673.800**	**DAU**		**16 Kasus**	**519.673.800**
2	07	2.07.00.00.01	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kota Bima	15 Perkara	6.993.000	DAU		orang	31.993.000
2	07	2.07.00.00.01	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kota Bima	10 Perkara	22.488.000	DAU		12 Perkara	47.488.000
2	07	2.07.00.00.01	05	2.02	05	Pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Pekerja Yang Mengikuti Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Bima	100 Orang	440.192.800	DAU		120	440.192.800

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima ini yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima 2018-2025, sehingga target indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Kerja ini dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025. Kami menyadari bahwa Renja ini masih jauh dari kesempurnaan/sesuai yang diharapkan maka saran dan pendapat sangat dibutuhkan, terima kasih.

Kota Bima, Januari 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima

Taufikrahman, S. Pd, M. A. P
Pembina TK I (IV/b)
Nip. 19691217 199403 1005

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2025



DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2025 yang disusun disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluais Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1/15/5/1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bima Tahun 2025.

Kota Bima, 15 Juli 2024

Kepala Dinas,

ICHWANUL MUSLIMIN. SP. MM
Pembina IV.b
NIP. 19720229 200501 1 005

\

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistimatika Penulisan 5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKATDAERAH .....TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah 27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 42
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 45
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 47
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 52
BAB V. PENUTUP 65

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1.	Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2020	7
Tabel. 2.2.	Capaian Kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2020	8
Tabel 2.3.	Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan APBD Perubahan Tahun 2020	10
Tabel 2.4.	Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan APBD Perubahan Tahun 2020	16
Tabel 2.5.	Anggaran Belanja Langsung Untuk Mencapai Sasaran Tahun 2020	16
Tabel 2.6.	(Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Tahun Berjalan) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima	17
Tabel 2.7.	Capaian Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH Konsumsi) Kota Bima, Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2020	25
Tabel 2.8.	Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran	26
Tabel 2.9.	(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima	29
Tabel 2.10	Pemetaan Permasalaahn Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima	30
Tabel 2.11	(Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima	34
Tabel 2.12	(Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima	43
Tabel 3.1	Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Badan Ketahanan Pangan Pusat Tahun 2020-2024	46
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023	46
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2022	48
Tabel 3.4	Prioritas dan Sasaran	48
Tabel 3.5	Tujuan dan Sasaran PD	49
Tabel 3.6	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2022	49
Tabel 4.1	Sasaran dan Program/Kegiatan	52
Tabel 4.2	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Bima	54
Tabel 4.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 (Tabel C-33 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima	57

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan dan pembangunan yang yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2023-2026, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2024-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsisitensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima. Selanjutnya, Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2025 ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2025.

1.1.1. Pengertian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan

berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima periode 2024-2026, yang memuat penjabaran dari tujuan, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima suatu lembaga yang berdasarkan Peraturan Daerah Walikota Bima Nomor 103 Tentang Kedudukan, Susunan Oeganisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021, memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu walikota dalam melaksanakan tugas di bidang ketahanan pangan. Pencapaian Ketahanan Pangan dilakukan dengan berlandaskan pada Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan. Kemandirian pangan diartikan bahwa pangan yang beraneka ragam harus dapat dipenuhi dari kemampuan dalam negeri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Sedangkan kedaulatan pangan menekankan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Implementasi kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan mengacu pada pencapaian tujuan ke-1 (Pertama) dan sasaran ke-4 (empat) RPD Kota Bima Tahun 2024-2026 yang telah dijabarkan pada RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2024-2026, arahan Prioritas Pembangunan RKPD tahun 2025, Prioritas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Prioritas Badan Ketahanan Pangan Nasional, dan Prioritas pembangunan ketahanan pangan daerah.

1.1.2. Keterkaitan Renja PD dengan RKPD, Renstra OPD, Renstra OPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

Rencana Kerja OPD nantinya merupakan bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam penyusunan Renja PD disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap PD. Proses perencanaan tahunan PD diawali dengan menyusun rancangan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta mempertimbangkan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran/kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah dapat bersinergi dalam pencapaiannya.

Melalui Rapat Koordinasi Bidang (Pra Musrenbang RKPD) dilakukan pembahasan terhadap keseluruhan Rencana Kerja PD yang kemudian dikoordinasikan dalam upaya penyusunan Rancangan RKPD. Rancangan RKPD yang telah disahkan menjadi RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai tahap dalam penyusunan RAPBD dan juga sebagai pedoman bagi PD untuk menyusun RKA-OPD.

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan

perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dengan tetap harus terintegrasi dengan prioritas pembangunan pemerintah Provinsi maupun Pemeritah Pusat.

Dalam sistem dan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan perangkat daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun.
2. Renja Perangkat Daerah mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjudnya menjadi pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah. RKA ini menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penggaran. Selanjudnya RKA Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar ditetapkanya dokumen peralaksanaan anggaran yaitu DPA.
3. Substansi Renja Perangkat Daerah memuat arah/ kebijakan, program, kegiatan tahun kerkenaan yang mencau pada RKPD pada tahun yang sama. Dan proses penyusunanya dilakukan secara paralel antara RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kota Bima Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);;
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir degan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):

8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-588 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikai, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9) Peraturan Walikota Bima Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024 – 2024 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 820);
10) Peraturan Walikota Bima Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah tahun 2025 dalam rangka mensinergikan arah dan prioritas pembangunan jangka menengah dengan program, kegiatan guna pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima secara berkesinambugan.

Tujuan, penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2025 Bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan alokasi kegaitan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun Anggaran 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan

dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas KetahanancPangan Kota Bima tahun lalu (tahuncn-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Rencana Kerja beserta Pendanaan Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2024.

BAB V. PENUTUP

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2018-2023

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangn Kota Bima.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima melaksanakan sebanyak 4 Program, 12 kegiatan, dan 38 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2023 sejumlah Rp. 4.431.334.174,- Dalam Pelaksanaanya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya 100% dengan realisasi anggaran Rp. 4.327.332.545 atau sebesar 98%.

Pelaksanaan program – program Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tahun 2023 sebagi berikut:

A. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

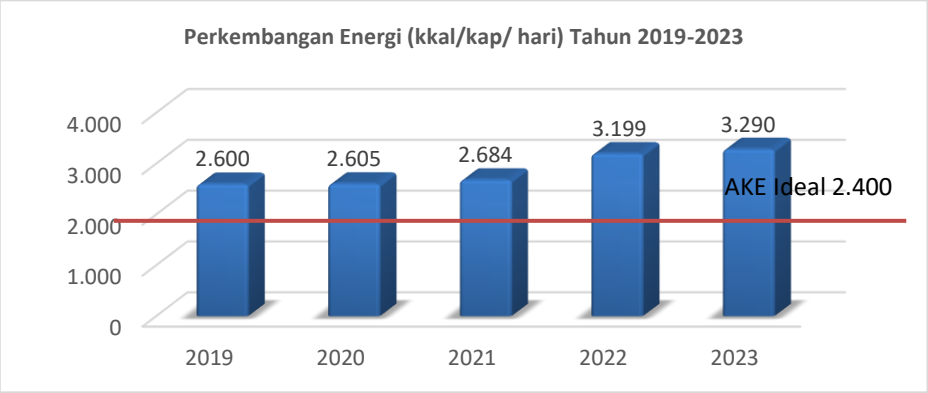
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dilaksanakan dengan dua indikator yaitu Angka Ketersediaan Energi dan Angka ketersediaan protein. Program ini dilaksanakan oleh dua bidang, yaitu Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan Bidang Ditribusi dan Harga Pangan. Target program pada tahun 2023 untuk indikator 1 (Angka ketersediaan energi) adalah 2.692 Kka/Kap/hari dengan realisasi sebesar 3.290 Kka/Kap/hari, dan capaian kinerja program indikator 1 sebesar 122%. Target program pada tahun 2023 untuk indikator 2 (Angka ketersediaan protein) adalah 2.692 Kka/Kap/hari dengan realisasi sebesar 67,68 gram/ kap/ hari dan capain kinerja kedua I ndikator tersebut sebesar 112%.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 759.652.853,- dengan realisasi sebesar Rp. 753.284.635,- atau 99%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan terlaksana disertai ketersediaan data yang mendukung analisis. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah karena pencatatan stok, pasokan dan harga masih secara manual yaitu saat di lapangan menggunakan kertas kemudian input data secara manual Terkadang terjadi keterlambatan input data karena bersamaan dengan kegiatan yang lain, namun sudah teratasi.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 12 sub kegiata, yaitu:

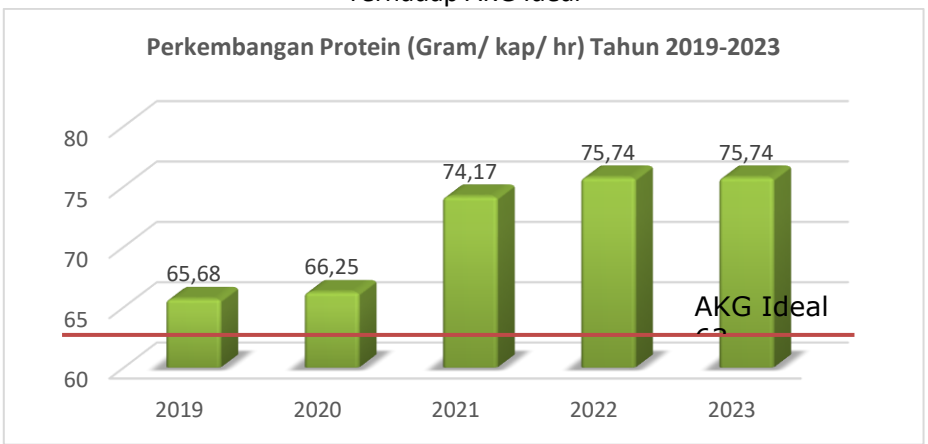
1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 174.292.813,- dengan realisasi sebesar Rp 173.646.613,- atau terserap 100%, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.49.815.200,- dengan realisasi sebesar Rp.49.587.200, atau terserap 100%.
   b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.15.906.600,- dengan realisasi sebesar Rp.15.713.400,- atau terserap 99%.
   c. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.65.406.191,-dengan realisasi sebesar Rp.65.406.191,- atau terserap 100%
   d. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.43.164.822,- dengan realisasi sebesar Rp.42.939.822,- atau terserap 99.99%

Gambar.3.11 Perkembangan AKE Kota Bima Tahun 2019-2023 terhadap AKE Ideal



Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan kota Bima berdasarkan analisis Aplikasi perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) 2023 dengan data dasar survey tahun 2023

Gambar.3.12. Perkembangan AKG Kota Bima Tahun 2019-2023 Terhadap AKG Ideal



Sumber *data: Dinas Ketahanan Pangan kota Bima berdasarkan analisis Aplikasi perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) 2023 dengan data dasar survey tahun 2023*

2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 263.560.000 dengan realisasi sebesar Rp 263.056.000 atau terserap 99.81%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.
      Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.39.057.640,- dengan realisasi sebesar Rp.39.057.640,- atau tersera 100%.
   b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.18.451.900,- dengan realisasi sebesar Rp.17.503.100,- atau terserap 95%.
   c. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.297.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.297.500.000,- atau terserap 100%.
   d. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.33.765.300,- dengan realisasi sebesar Rp.33.198.100,- atau terserap 98%.

3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.208.202.650 dengan realisasi sebesar Rp.208.058.650 atau terserap 99.93%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.106.450.200,-dengan realisasi sebesar Rp.102.813.180,- atau terserap 97%
   b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.90.135.000, dengan realisasi sebesar Rp.89.884.002,-, atau terserap 100%.

B. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan didukung oleh 1 kegatan yaitu, Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan indikator Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan. Realisasi indikator kegiatan Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan dari target 5 Kelurahan, terealisasi 6 Kelurahan dengan capaian 120% da 12 Kelurahan Rawan rentan pangan hasil FSVA tahun 2023 (data kelurahan rawan rentan pangan tahun 2022 dapat di akses pada wen side Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima (https://dkp.bimakota.go.id/web/halaman/29/download).

Anggaran untuk program ini sebesar Rp.93.547.600,- dengan realisasi sebesar Rp.93.072.598,- atau 100%. Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah karena adanya koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik sehingga tersedia data yang akurat untuk analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian program diantaranya karena pengumpulan data dari instansi terkait memerlukan waktu, sehingga proses analisis data harus menunggu data tersebut.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.75.987.200,- dengan realisasi sebesar Rp.75.524.750,- atau terserap 99%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

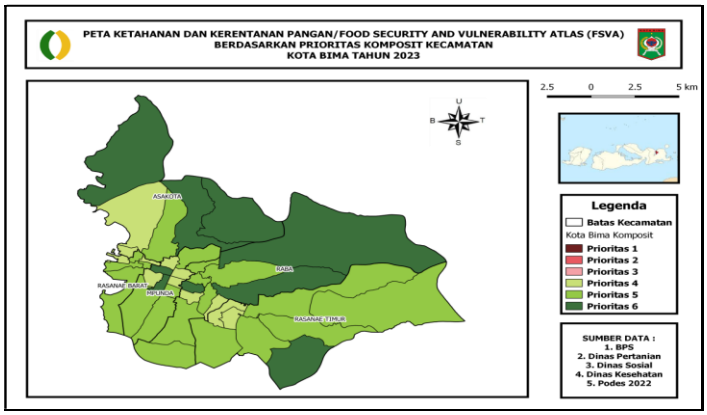
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.75.987.200,- dengan realisasi sebesar Rp.75.524.750,- atau terserap 99%.

Manfaat program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan masyarakat yang mandiri. Salah satu intervensi yang dilakukan oleh DSHANPAN Kota Bima berupa Pemberian paket makanan tambahan kepada anak usia dibawah lima tahun sebanyak 115 orang anak Balita di Kelurahan Kelurahan Lampe, Kelurahan Dodu, Kelurahan Nungga, Kelurahan Ntobo, Kelurahan Lelamase dan Kelurahaan Oi Fo'O dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah/ CPP di 11 kelurahan rawan rentan pangan.

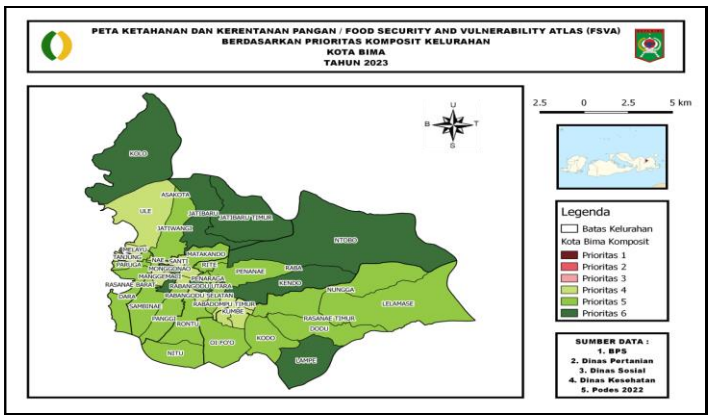
Berikut Peta Rawan Rentan Pangan berdasarkan Hasil Analisis FSVA Kota Bima Tahun 2023, yang menggambarkan secara komposit tidak terdapat daerah rentan pangan.

Gambar. 3.12. Peta FSVA Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Berdasarkan Prioritas Per Kecamatan dan Prioritas Per Kelurahan

Peta FSVA Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Berdasarkan Prioritas Per Kecamatan



Peta FSVA Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Berdasarkan Prioritas Per Kelurahan



Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, kelurahan-kelurahan dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (kelurahan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (kelurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (kelurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan. Berdasarkan hasil analisis komposit 6 indikator ketahanan dan kerentanan pangan, dari 41 kelurahan yang ada di Kota Bima, tidak ada kelurahan yang masuk dalam kategori rentan pangan (Prioritas 1, 2 dan 3), sedangkan Prioritas 4 sebanyak 12 kelurahan, Prioritas 5 sebanyak 20 kelurahan dan Prioritas 6 sebanyak 9 kelurahan.

Samber Data: Dinas Ketahanan Pangan Kota Berdasarkan Dokumen FSVA Kota Bima tahun 2023

C. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Pengawasan Keamanan Pangan dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Presentase bahan pangan yang aman konsumsi. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Target program pada tahun 2023 adalah 90%, realisasi program sebesar 100% dan capaian

kinerja program sebesar 111%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah karena adanya Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik, dukungan SDM cukup baik, kerjasama yang baik dengan pihak ritel, pelaku usaha berkomitmen memenuhi persyaratan Registrasi PSAT PDUK, pembinaan dan sosialisasi terkait keamanan PSAT, pelaku usaha ritel di wilayah Kota Bima antusias dengan kegiatan monitoring dan pengawasan rutin terkait dengan registrasi PSAT. Sedangkan faktor penghambat masih ada pelaku usaha yang kurang kooperatif, metode pengujian masih bersifat kualitatif, kurangnya sarpras untuk mengembangkan metode pengolahan pangan lokal, serta beberapa bahan dasar pangan lokal sulit didapatkan, rendahnya pelaku usaha PSAT yang melakukan pengemasan mandiri, rendahnya kesadaran pelaku usaha PSAT untuk melakukan pengemasan mandiri, adanya pelaku usaha terdampak relokasi pasar, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha PSAT untuk melakukan registrasi PSAT.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

   2. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.93.547.600,- dengan realisasi sebesar Rp.93.072.598,- atau terserap 99%. Dengan indikator jenis pangan segar yang diawasi. Realisasi indikator kegiatan ini dari target 80% terealisasi 100%. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah
      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.41.136.000,- dengan realisasi sebesar Rp.41.136.000,- atau terserap 100%.
   b. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.41.402.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.402.000,- atau terserap 100%.
   c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.
      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.11.009.600,- dengan realisasi sebesar Rp.10.534.600,- atau terserap 96%.

D. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Bidang Sekretariat. Target program pada tahun 2023 adalah 100%, realisasi program 100% dan capaian program sebesar 100%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah karena adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pejabat dalam upaya meningkatkan nilai capaian kinerja perangkat daerah, tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terlaksana sesuai tatakal yang telah disusun, tercapainya seluruh indikator kinerja program dan kegiatan dengan capaian kinerja diatas 100%, serta terlaksananya monitoring dan evaluasi secara rutin.

Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh dari 7 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yang terdiri atas sub kegiatan yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan dokumen penganggaran evaluasi dan pelaporan kinerja, penatausahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, penatausahaan barang, administrasi kepegawain, penyediaan peralatan dan perlangkapan kantor, pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor, pemeliharaan kendaraan serta pemeliharaan bangunan gedung kantor.

Secara umum seluruh capaian kinerja output sub kegiatan tercapai 100%, dengan capaian realisasi keuangan hampir seluruh sub kegiatan memiliki capaian di atas 95.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel.3.54. Realisasi Anggaran dan Rekapitulasi Evisiensi Anggaran Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
Tahun Anggaran 2023

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian Kinerja 2023	Efisiensi	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100%**	**3.502.146.521**	**3.405.540.342**	**100 %**	**97%**	**100%**	**3%**	**Efisien**
2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**13.304.200**	**13.218.200**	**100 %**	**99%**	**100%**	**1%**	**Efisien**
2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.204.000	2.189.000	2	99%	100%	1%	Efisien
2.09.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	561.000	528.000	2	94%	100%	6%	Efisien
2.09.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	561.000	528.000	2	94%	100%	6%	Efisien
2.09.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	341.000	341.000	2	100%	100%	0%	Efisien
2.09.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	547.000	547.000	2	100%	100%	0%	Efisien
2.09.01.2.01.6.01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	Dokumen	2	9.090.200	9.085.200	2	100%	100%	0%	Efisien

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian Kinerja 2023	Efisiensi	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
2.09.01.2.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100%**	**2.644.229.071**	**2.579.220.283**	**100 %**	**98%**	**100%**	**2%**	**Efisien**
2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Bulan	1656	2.549.989.271	2.491.095.483	1638	98%	99%	1%	Efisien
2.09.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	112	91.091.800	86.091.800	112	95%	100%	5%	Efisien
2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.278.000	2.033.000	1	89%	100%	11%	Efisien
2.09.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	870.000	-	4	0%	100%	0%	Efisien
2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**500.000**	**480.000**	**100 %**	**96%**	**100%**	**4%**	**Efisien**
2.09.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	500.000	480.000	1	96%	100%	4%	Efisien
2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Persen**	**100%**	**7.840.400**	**5.070.400**	**100 %**	**65%**	**100%**	**35%**	**Tidak Efisien**
2.09.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30	30	7.840.400	5.070.400	30	65%	100%	35%	Tidak Efisien

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian Kinerja 2023	Efisiensi	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**404.267.700**	**398.775.792**	**100 %**	**99%**	**100%**	**1%**	**Efisien**
2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	13.439.000	13.314.100	1	99%	100%	1%	Efisien
2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	108.290.500	108.240.800	1	100%	100%	0%	Efisien
2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.524.000	8.710.000	1	83%	100%	17%	Efisien
2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	45.614.200	42.349.000	2	93%	100%	7%	Efisien
2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	226.400.000	226.161.892	10	100%	1000%	0%	Efisien
2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100%**	**108.257.500**	**101.089.110**	**100 %**	**93%**	**100%**	**7%**	**Efisien**
2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	Laporan	12	70.701.000	67.057.700	12	95%	100%	5%	Efisien
2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan kebersihan kantor	Laporan	12	28.803.000	25.830.410	12	90%	100%	10%	Efisien
2.09.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan	1	8.753.500	8.201.000	1	94%	100%	6%	Efisien
2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100%**	**323.747.650**	**307.686.557**	**100 %**	**95%**	**100%**	**5%**	**Efisien**
2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	31.339.150	27.921.650	1	89%	100%	11%	Efisien
2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	11	16.290.000	10.632.060	4	65%	36%	-79%	Tidak Efisien

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian Kinerja 2023	Efisiensi	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	11.530.000	11.350.000	8	98%	100%	2%	Efisien
2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	264.588.500	257.782.847	1	97%	100%	3%	Efisien
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Angka ketersediaan energi**	**kka/ kap/ hari**	**2.692**	**759.652.853**	**753.284.635**	**3.290**	**99%**	**122%**	**19%**	**Efisien**
	Angka ketersediaan protein	**gram / kap/ hari**	**67,68**			**75,74**		**112%**	**0%**	**Efisien**
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Persentase ketersediaan pangan pokok terhadap kebutuhan daerah**	**Persen**	**100%**	**174.292.813**	**173.646.613**	**138,52%**	**100%**	**139%**	**28%**	**Tidak Efisien**
2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	4	49.815.200	49.587.200	4	100%	100%	0%	Efisien
2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	15.906.600	15.713.400	1	99%	100%	1%	Efisien
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	4	65.406.191	65.406.191	4	100%	100%	0%	Efisien
2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	1	43.164.822	42.939.822	1	99%	100%	1%	Efisien
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap total kebutuhan daerah**	**Ton**	**20**	388.774.840	386.940.840	**24,36**	100%	122%	18%	Efisien
2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	2	39.057.640	39.057.640	2	100%	100%	0%	Efisien
2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	1	18.451.900	17.503.100	1	95%	100%	5%	Efisien
2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	20	297.500.000	297.182.000	24,36	100%	122%	18%	Efisien

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian Kinerja 2023	Efisiensi	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton	20	33.765.300	33.198.100	24,36	98%	122%	19%	Efisien
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Jumlah konsumsi energi**	**kka/ kap/ hari**	**2.288**	**196.585.200**	**192.697.182**	**2.026**	**98%**	**89%**	**- 11%**	**Efisien**
2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	106.450.200	102.813.180	1	97%	100%	3%	Efisien
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	90.135.000	89.884.002	1	100%	100%	0%	Efisien
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani**	Persen	20%	75.987.200	75.524.750	50%	**99%**	250%	60%	Tidak Efisien
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan**	kelurahan	5	75.987.200	75.524.750	5	99%	120%	33%	Tidak Efisien
2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Laporan	4	75.987.200	75.524.750	4	81%	100%	19%	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Presentase bahan pangan yang aman konsumsi**	Persen	90%	93.547.600	93.072.598	100%	**99%**	111%	10%	Efisien
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Jenis pangan segar yang diawasi**	Persen	80%	93.547.600	93.072.598	100%	99%	125%	20%	Efisien
2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	41.136.000	41.135.999	1	100%	100%	0%	Efisien
2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	41.402.000	41.401.999	1	100%	100%	0%	Efisien
2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Dokumen	1	11.009.600	10.534.600	0	96%	0%	0%	Efisien

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Anggaran 2023	Capaian Kinerja 2023	Efisiensi	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Kabupaten/Kota									
Rata-rata Capaian Kinerja							**98%**	**131%**	**25%**	**Tidak Efisien**
Predikat Kinerja							**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
Total anggaran dari seluruh program				**4.431.334.174**	**4.327.422.325**					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)					**1.081.855.581**		**99%**	**131%**	**24%**	**Tidak Efisien**
Predikat Kinerja dari seluruh program							**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
Predikat Kinerja dari seluruh program							**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Resntra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Kota Bima

Dinas Ketahanan Pangan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan {Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)}	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun Berjalan (2024)	
					Target RKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024 {Tahun berjalan (n-1)} TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100%	100	300	300%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	300	300%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	2	2	2	100%	2	6	300%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	2	2	2	2	100%	2	6	300%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	2	2	2	2	100%	2	6	300%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	2	2	2	2	100%	2	6	300%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan {Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)}	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun Berjalan (2024)	
					Target RKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024 {Tahun berjalan (n-1)} TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	2	2	2	2	100%	2	6	300%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	2	2	2	2	100%	2	6	300%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100%	100	300	300%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Bulan	26	26	39	39	100%	26	91	350%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	112	112	112	112	100%	50	274	245%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1	1	1	1	100%	1	3	300%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan {Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)}	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun Berjalan (2024)	
					Target RKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024 {Tahun berjalan (n-1)} TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lap	4	4	4	4	100%	12	20	300%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	300	300%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	1	1	1	1	100%	4	6	600%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	%	100	100	100	100	100%	100	300	300%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Lap	1	1	1	1	100%	38	40	4000%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	300	300%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	100%	1	3	300%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan {Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)}	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun Berjalan (2024)	
					Target RKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024 {Tahun berjalan (n-1)} TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	100%	1	3	300%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	100%	1	3	300%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2	2	2	100%	2	6	600%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	10	10	10	10	100%	7	27	270%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	300	300%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	Lap	12	12	12	12	100%	3	27	225%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan kebersihan kantor	Lap	12	12	12	12	100%	1	25	208%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Lap	1	1	1	1	100%	1	3	300%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	300	300%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan {Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)}	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun Berjalan (2024)	
					Target RKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024 {Tahun berjalan (n-1)} TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	100%	1	3	300%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	11	7	64%	7	25	227%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	8	8	8	100%	11	27	338%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	100%	1	3	300%
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka ketersediaan energi	kka/ kap/ hari	2.692	3.290	2.692	3.290	122%	3.444	10.024	372%
	Angka ketersediaan protein	gram/ kap/ hari	67,68	75,74	67,68	75,74	112%	127	278,48	411%
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan pokok terhadap kebutuhan daerah	%	100	139%	100	100	100%	113	214,39	2,1439
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Lap	2	4	4	4	100%	4	12	600%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan {Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)}	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun Berjalan (2024)	
					Target RKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024 {Tahun berjalan (n-1)} TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Lap	1	1	1	1	100%	1	3	300%
Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dok	1	4	4	4	100%	4	12	1200%
Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	1	1	1	1	100%	2	4	400%
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap total kebutuhan daerah	Ton	20	24,36	20	24,36	122%	20	68,72	344%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Lap	2	2	2	2	100%	1	5	250%
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dok	1	1	1	1	100%	25	27	2700%
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	20	24,36	20	24,36	122%	25	73,72	369%
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton	20	24,36	20	24,36	122%	25	73,72	369%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan {Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)}	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun Berjalan (2024)	
					Target RKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024 {Tahun berjalan (n-1)} TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah konsumsi energi	kka/ kap/ hari	2288	2026	2288	2026	89%	2067,24	6119,24	267%
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dok	1	1	1	1	100%	1	3	300%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Lap	1	2	2	2	100%	1	5	500%
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	%	20	50	20	50	250%	1	101	505%
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	Kelurahan	5	5	5	5	100%	10	20	400%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Lap	4	4	4	4	100%	4	12	300%
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase bahan pangan yang aman konsumsi	%	90	100	90	100	111%	90	290	322%
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jenis pangan segar yang diawasi	%	80	100	80	100	125%	85	285	356%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan {Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)}	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun Berjalan (2024)	
					Target RKPD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024 {Tahun berjalan (n-1)} TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang dibina	Dok	1	1	1	1	100%	1	3	300%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1	1	1	1	100%	1	3	300%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	1	1	1	100%	1	3	300%

Berikut tabel menggambarkan realisasi Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pagan Kota Bima Tahun 2019-2022

Tabel 2.3.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
Tahun 2019-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (000)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*
Belanja Daerah	3.812.333	3.390.825			3.721.631	3.299.590			97,62%	97,3%			-12,43%	-12,8%
Belanja Operasi	3.701.459	3.343.340			3.619.617	3.251.805			97,79%	97,3%			-10,71%	-11,3%
Belanja Modal	110.874	47.485			102.014	47.785			92,01%	100,6%			-133,49%	-113,5%
Program Berdasarkan RPJMD 2019-2020														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	638.439	661.134			601.155	598.307			94,16%	90,5%			3,43%	-4,05%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	163.024	141.890			157.534	88.547			96,63%	62,4%			-14,89%	-54,85%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.958	31.000			24.958	30.580			100,00%	98,6%			19,49%	-1,37%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	26.650	10.000			25.250	9.250			94,75%	92,5%			-166,50%	-2,43%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	181.300	151.100			170.800	151.100			94,21%	100,0%			-19,99%	5,79%
Program peningkatan ketahanan pangan	881.593	1.474.875			860.003	1.440.210			97,55%	97,6%			40,23%	0,10%
Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	86.800	60.000			84.165	59.801			96,96%	99,7%			-44,67%	2,71%
Program Permendagri Nomor 90 Tahun 2019														
Belanja Daerah			**3.941.078**	**3.930.109**			**3.685.657**	**3.849.221**			**93,5%**	**97,9%**	-0,3%	4,2%
Belanja Operasi			**3.941.078**	**3.908.963**			**3.685.657**	**3.828.076**			**93,5%**	**97,9%**	-0,8%	3,7%
Belanja Modal				**21.146**				**21.145**					100,0%	100,0%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			2.652.299	2.966.878			2.512.753	2.902.988			94,7%	98%	10,6%	13,4%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (000)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.129	6.548			5.563	5.672			90,8%	87%	6,4%	1,9%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.406.543	2.590.577			2.318.967	2.540.050			96,4%	98%	7,1%	8,7%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			476	500			476	500			100,0%	100%	4,8%	4,8%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.992	4.992			4.992	4.642			100%	93%	0%	-7,54%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			131.823	227.965			69.522	227.843			80,4%	100%	42,2%	69,5%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.278	91.899				85.200			81,5%	93%	7,2%	100,0%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22.048	44.394				39.078			#REF!	88%	50,3%	100,0%
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			1.102.434	816.483			1.003.224	802.733			91,0%	98%	-35,0%	-25,0%
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			147.153	147.934			136.129	142.881			92,5%	97%	0,5%	4,7%
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota			230.151	190.206			204.369	182.751			88,8%	96%	-21,0%	-11,8%
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			725.129	478.343			662.726	477.100			91,4%	100%	-51,6%	-38,9%
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			115.543	68.033			113.228	66.184			98,0%	97%	-69,8%	-71,1%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (000)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota			115.543	68.033			113.228	66.184			98,0%	97%	-69,8%	-71,1%
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			63.412	78.714			49.140	77.315			77,5%	98%	19,4%	36,4%
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota			63.412	78.714			49.140	77.315			77,5%	98%	19,4%	36,4%

Pada tabel Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2019-2023. Rasio antara realisasi dan anggaran ditahun 2019 - 2022 sebesar 96,7 persen atau dikatan BAIK, karena rata-rata realisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan diatas 90 persen baik pada realisasi pada pelaksanaan kegiatan penunjang urusan ketahanan pangan atau program kesekretariatan maupun pelaksanaan program kegiatan tekhnis ketahanan pangan. Artinya kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Panga Kota Bima dapat dikatakan BAIK. Meskipun dari segi prosedur/mekanisme pelayanan ketahanan pangan bisa dikatakan Baik namun dari segi jumlah (sumber daya manusia) masih kurang.

Rata-rata pertumbuhan dari total anggaran dan realisasi selama periode 2019-2023 mengalami penurunan sebesar 6,35% untuk rata-rata pertumbuhan realisasi dan penurunan sebesar 4,27% % untuk rata-rata pertumbuhan realisasi. Selama periode 2019-2023 terjadi beberapa kali penurunan belanja antara lain karena adanya Covid -19, sehingga anggaran belanja sebagian besar diperioritaskan untuk penanganan Covid-19, dilihat dari rata-rata pertumbuhan anggaran pada tahun 2019 ke 2020 penurunanya sebesar 12,43 % dan rata-rata pertumbuhan realisasinnya sebesar 12,8%.

Rata-rata pertumbuhan anggaran dan rata-rata pertumbuhan realisasi pada tahun 2021 dan 2022 menurun sebesar 0,28% atau dibanding dua tahun sebelumnya ada peningkatan 12,5%, dan dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 4,25%. Hal ini juga dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan penganggaran yang bersumber dari dana DAK Non Fisik.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T.C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Kota

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*15*	*16*
	Ketahanan Pangan											
A.	Indikator Tujuan											
	Indeks Ketahanan Pangan	v	v	%	63,6	63,65	72,49	74,74	70,25	-	72,49	74,74
B.	Indikator Sasaran											
1	Persentase peningkatan ketersediaan Pangan Utama	v	v	%	24	25			172	-	172	172
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	v	v	%	88,3	89,6	82,7	84,2	79,8	-	82,7	84,2

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*15*	*16*
3	Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	v	v	Angka	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	-	≤ 10	≤ 10
C.	Indikator Program											
1	Jumlah Ketersediaan Energi	v		kkal/ kap/ hr	2.662	2.692	3444	3599	3.198,97	-		3.198,97
2	Jumlah ketersediaan protein	v		gr/ kap/ hr	67,2	67,7	67,8	67,9	67,68	-	67,8	67,9
3	Penguatan Cadangan Pangan	v		Ton	17	18	20	21	11	-	20	21
4	Jumlah konsumsi energi kkal/ kap/ hari	v		kkal/ kap/ hr	2.288	2.269	2.067	2.088	3.290	-	2067,2	2087,93
5	Presentase bahan pangan yang aman konsumsi	v		%	88	90	100	100	100	-	100	100

2.2.1. Analisis Pencapaian Kinerja Tujuan

Indikator Tujuan (Indeks Ketahanan Pangan) yang diambil Tujuan Sasaran RPJMD Kota Bima Tahun 2019-2023. Ketahanan Pangan bersifat multi demensi, sehingga penilaian situasi katahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

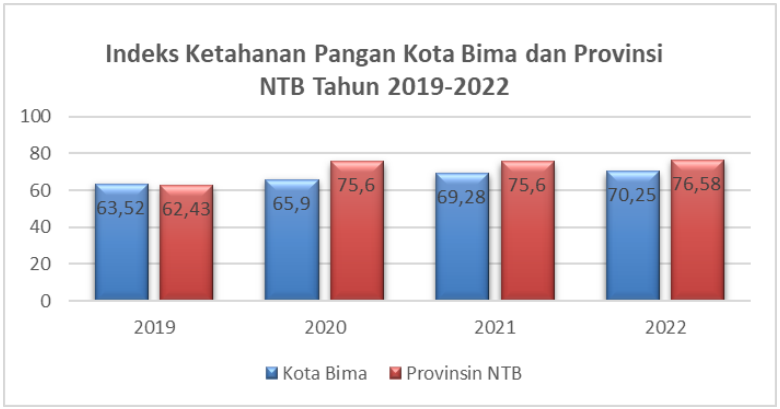
Nilai IKP merupakan bagian dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA). IKP tingkat Kabupaten/Kota/ Provinsi disusun oleh Badan Ketahanan Pangan.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota/Provinsi) dan peringkat (ranking) relative antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainya. Oleh karena itu salah satu sasaran RPJMD yang menjadi tujuan Dinas Ketahanan Pangan untuk mendukung Misi Pertama RPJMD Kota Bima Tahun 2019-2023 adalah Meningkatnya Ketahanan Pangan yang diukur dari nilai Indeks Ketahanan Pangan.

Pencapaian target kinerja tujuan pada tahun 2020 adalah 104% dari target 63,58 dan terealisasi 65,9 dan tahun 2021 pencapaian target kinerja adalah 108% atau terealisasi 68,69 dari target 63,6. IKP pada tahun 2020 dan 2021 Kota Bima masuk kedalam kelompok tahan pangan dan mengalami peningkatan ditahun 2021 atau masuk pada kelompok tahan pangan.

Berikut data yang menggambarkan Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2020 dan 2021.

Gambar 2.5.
Indeks Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 219-2023



Sumber Data: Dokumen IKP BAPANAS 2019-2022

Nilai IKP Kota Bima 2 tahun terakhir mengalami kenaikan 2,38 poin, dan Cut Off Poin Indeks Ketahanan Pangan Kota Bima masuk dalam kelompok 5 atau pada prioritas 5. Dapat dikatakan Kota bima jiak dilihat dari angka IKP nya masuk dalam kategori BAIK artinya termasuk dalam kelompok kota yang memiliki ketahanan pangan baik tahun 2021. Berikut perbandingan nilai IKP Kota Bima dibandingkan dengan Provinsi NTB dari tahun 2020 dan 2021.

Untuk mendukung Capaian Indikator Tujuan diatas berikut secara rinci uraian pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan misi adalah sebagai berikut.

Nilai IKP Kota Bima 2 tahun terakhir mengalami kenaikan 2,38 poin, dan Cut Off Poin Indeks Ketahanan Pangan Kota Bima masuk dalam kelompok 5 atau pada prioritas 5. Dapat dikatakan Kota bima jiak dilihat dari angka IKP nya masuk dalam kategori BAIK artinya termasuk dalam kelompok kota yang memiliki ketahanan pangan baik tahun 2021. Berikut perbandingan nilai IKP Kota Bima dibandingkan dengan Provinsi NTB dari tahun 2020 dan 2021.

Untuk mendukung Capaian Indikator Tujuan diatas berikut secara rinci uraian pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

2.2.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Pelayanan urusan pangan Tahun 2019-2023 dilakukan melalui aspak ketersediaan pangan, distribusi, Distribusi dan harga dan pangan, Konsumsi pangan, keamanan pangan dan manajeman ketahanan pangan.

a) Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distrubisi Pangan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distrubisi Pangan dengan indikator

a). Persentase penyediaan Pangan Utama

Rumus/ Formulasi Perhitungan

$$\frac{\Sigma \text{ Ketersediaan pangan utama tahun N (Kg)}}{\Sigma \text{ Kebutuhan pangan}} \times 100$$

Tabel. 2.10.
Ketesedian dan Kebutuhan Pangan Kota Bima
Tahun 2019-2022

No	Ketersediaan Pangan	Jumlah (Ton)			
		2019	2020	2021	2022
1	Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima	10	10	13.5	11
2	Cadangan Pangan di masyarakat	28.152	24.917	21.682	13.128
3	Lumbung Pangan di masyarakat (LPM)	0,6	0,5	0,5	0
4	LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat)	50	50	50,9	37,25
5	Penggilingan/ pengusaha	13,66	13,00	12,2	10.234,22
6	Pedagang				6.142,82
7	Persediaan Beras Perum Bulog sub Divre Wilayah Kota Bima (GBB.Jatiwangi)	3.000	3.000	3.229	1.056
	Total stok Pangan/ Ketersediaan Pangan Kota Bima	**31.226**	**27.991**	**24.975**	**30.717**
	Kebutuhan	**16.364**	**14.285**	**17.782**	**17.908**

Sumber data Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

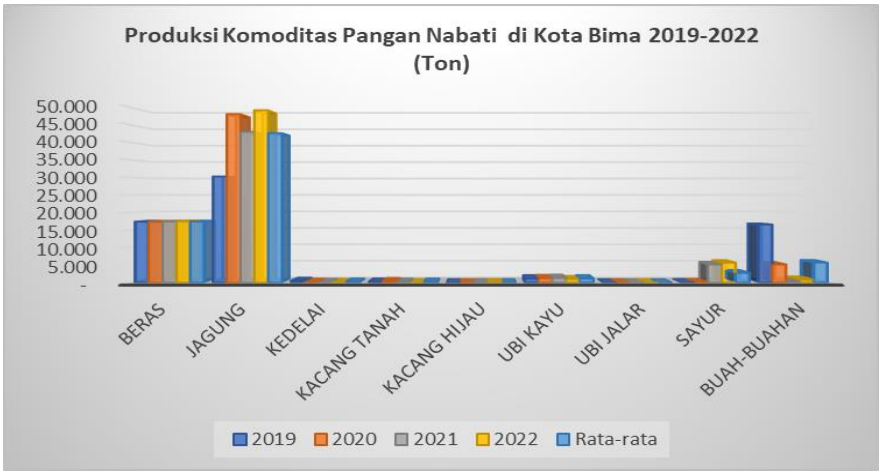
1. Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima adalah cadangan pangan milik dan dikelola oleh pemerintah Kota Bima yang berada di Gudang Cadangan Pangan Kota Bima yang berlokasi di jalan Gajah Mada Nomor 92 atau tepatnya berada di belakang kantor Dinas Ketahanan pangan Kota Bima. Kewajiban daerah berdasarkan Permentan No. 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah adalah sebesar 85,67 Ton. Dimana perhitungan CPP didasarkan pada jumlah penduduk, konsumsi beras perkapita pertahun dan proporsi terhadap cadangan beras nasional. Pengadaan CPP yang di laksanakan oleh Pemerintah Kota Bima lewat Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima rata-rata 7,75 Ton atau 9,05%. Penyaluran CPP dilakukan untuk menaggulangi a) Kekurangan Pangan; b) Gejolak Harga Pangan; c) Bencana Alam; d) Bencana Sosial; dan atau e) Keadaan Darurat. Penyediaan CPP yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima masih kurang jika dilihat dari kebutuhan CPP selama empat tahun terakhir. Penyediaan CPP Kota Bima lebih banyak digunakan pada kebencanaan, terutama bencana banjir tahunan yang terjadi di akhir dan awal tahun.
2. Cadangan Pangan di masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga. Data cadangan pangan di masyarakat diambil dari data produksi padi kota Bima. Berikut data produksi padi di Kota Bima Tahun 2019-2022.

Tabel. 2.11.
Produksi Komoditas Pangan Nabati di Kota Bima Tahun 2019-2022

No.	Jenis Pangan	Jumlah Produksi (Ton)				Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	
1.	Beras	17.391	17.389	17.428	17.489	17.424
2.	Jagung	30.307	48.070	43.044	49.193	42.654
3.	Kedelai	479	196	141	132	237
4.	Kacang Tanah	252	380	242	3	219
4.	Kacang Hijau	11	12	31	47	25
5.	Ubi Kayu	1.223	1.322	1.383	1.015	1.236
6.	Ubi Jalar	-	-	-	-	-
7.	Sayur	69,40	136,90	5.185,4	5.703,96	2.774
8.	Buah-buahan	16.569,20	5185,42	334,02	852,56	5.735
	Jumlah	***83.947,05***	***90.435,42***	***83.581,33***	***87.206,12***	***86.292,48***

Sumber data Dinas Pertanian Kota Bima NBM Kota Bima 2019-2022

Gambar. 2.8.
Produksi Komoditas Pangan Nabati di Kota Bima Tahun 2019-2022



Tabel di atas menunjukan bahwa komoditi pertanian nampak sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Tahun 2019 akumulasi realisasi produksi 7 (tujuh) komoditi pertanian tanaman pangan sebesar 83.947,05 ton sementara pada akhir tahun 2022 realisasi produksi mencapai 87.206,12 ton. Terjadi peningkatan produksi sebesar 3.259 ton atau terjadi peningkatan sebesar 3,60%. Perlu menjadi catatan bahwa produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan khususnya sangat fluktuatif dan rentan terhadap pengaruh eksternal seperti kondisi pasar (supply demand) dan cuaca termasuk perubahan kebijakan dan dukungan/bantuan pemerintah akibat terjadinya pandemic covid-19 semenjak akhir Desember 2019. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap pergeseran animo masyarakat terhadap komoditi yang diusahakan. Pada produksi daging pun mengalami fluktuatif dengan rata pertumbuhan 0,17 %

Tabel. 2.12.
Produksi Komoditas Pangan Hewani di Kota Bima 2019-2022

No.	Jenis Pangan	Jumlah Produksi (Ton)				Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	
1.	Daging Sapi dan Kerbau	539,46	529,46	1.156,0	4.264,9	1.622
2.	Daging Ayam	79.454,0	24.581	494.410	893.214	372.915

No.	Jenis Pangan	Jumlah Produksi (Ton)				Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	
3.	Telur	222,40	222,40	189,32	2.030,47	666
5.	Ikan	2.093,90	3.099,46	3.056,69	3.112,50	2.841
	Jumlah	*82.309,76*	*28.432,32*	*498.812,01*	*902.621,40*	*378.043,87*

Sumber data Dinas Pertanian Kota Bima NBM Kota Bima 2019-2022

b). Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)

Stabilitas harga pangan dapat digambarkan dengan Coefisien Variasi (CV) Komoditas Pangan ditingkat konsumen dengan nilai rata-rata (Average) harga pangan (beras) di tingkat konsumen yang dinyatakan dengan pesentase (%). Rata-rata harga pangan (beras) di tingkat konsumen dihitung dari hasil survey harga pangan harian di pasar strategis yang ada di Kota Bima. koefiisen varian harga pangan (beras) menggambarkan seberapa jauh fluktuasi harga yang dipantau. Kondisi yang diharapkan adalah angka koefisien varian yang kecil karena semakin rendah angka koefisien varian berarti harga pangan (beras) yang semakin stab il. Target nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis nasional di tingkat konsumen untuk Tahun 2020 ditetapkan di bawah 10 - 30% untuk komoditas beras.

Berikut Formula dalam perhitungan ***indikator Stabilitas harga pangan*** (beras) di tingkat konsumen:

$$CV = \frac{\text{Std. Deviasi Harga Pangan}}{\text{Rata-rata Harga Pangan tahun Berjalan}} \times 100$$

Tabel 2.13
Perkembangan Nilai Koefisien Varian (CV) Komoditas Pangan Strategis
Kota Bima Tahun 2019-2022

No.	Komoditi	2019		2020		2021		2022	
		rata2 (Rp)	cv	rata2 (Rp)	cv	rata2 (Rp)	cv	rata2 (Rp)	cv
1	Beras Premium	10.750	3,00	11.079	1,60	11.079,17	1,6	11.000	3,32
2	Beras Medium	10.125	2,94	10.058	1,36	10.103,07	2,26	10.000	3,6
3	Jagung Pipilan Kuning	5.849	4,29	5.713	7,19	6.270,24	,77	6.704	6,7
4	Kedelai Biji Kering	11.448	4,33	9.830	9,58	10.759,27	8,70	-	-
5	Bawang Merah	19.623	30,14	19.049	20,79	24.468,24	19,85	23.434	25,4
6	Bawang Putih (bonggol)	33.039	23,19	27.317	4,73	26.728,97	4,37	27.189	5,7
7	Cabai Merah Keriting	38.233	39,61	41.829	29,74	36.006,24	33,65	48.411	30,0
8	Cabe Rawit Merah	33.517	44,78	54.854	43,34	56.874,09	62,00	47.948	29,3
9	Daging Ayam Ras	45.036	9,50	48.559	6,91	43.146,02	4,50	49.797	4,6
10	Telur Ayam Ras	1.686	1,59	24.029	4,70	23.931,74	5,60	28.982	8,9
11	Gula Pasir Lokal	12.918	1,58	13.323	2,84	13.877,42	4,38	15.202	2,0
12	Minyak Goreng (curah)	11.540	3,21	12.230	5,34	15.471,30	11,06	26.276	11,8
13	Tepung Terigu (curah)	7.480	0,95	7.231	8,0	7.762,09	2,70	9.037	8,0
14	Daging Sapi Murni	117.326	3,63	121.889	2,35	121.280	2,0	121.280	2,0

Sumber Data, Bidang Distribusi dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

a. Perkembangan nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis nasional di tingkat konsumen untuk Tahun 2020 ditetapkan di bawah 10 - 30% (Untuk komoditas beras dan daging sapi maksimal 10%; untuk komoditas Hortikultura seperti jagung, kedelai, bawang merah dan cabai maksimal 30%, dan komoditas pabrikan seperti Gula Pasir dan Minyak Goreng maksimal 30%).
b. Dari data harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen tahun 2019-2022 menunjukkan bahwa harga komoditas pangan pokok dan strategis menunjukkan nilai coefisien variasi harga masih dibawah batas maksimum yang berarti harga pangan pokok strategis hampir semuanya stabil. sesaui dengan kriteria batas maksimum yang telah ditetapkan.
c. Komoditas pangan hortikultura yang selalu mengalami fluktuasi dan berada pada batas ambang gejolak harga (CV) pada tahun 2019 hingga tahun 2021 adalah cabe rawit merah, tahun 2019 dan 2021 pada komoditas cabe merah keriting. Harga Cabe Rawit Merah sering terjadi kenaikan harga di bulan maret, April dan Mei yang disebabkan oleh terjadinya peningkatan permintaan yang sangat signifikan yang kurang diimbangi oleh ketersediaan stoknya.
d. Untuk komoditas pangan lainya masih berada pada batas ambang gejolak harga (CV). Stabilitas harga pangan tersebut tidak terlepas dari upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan yang secara berkesinambungan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima. Berbagai langkah strategis yang dilaksanakan meliputi:
    1. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) yang merupakan kegiatan memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat (Gabungan kelompoktani (Gapoktan), kelompok tani (Poktan), lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan) dalam melayani Toko Tani Indonesia (TTI).
    2. Gelar Pasar Murah bersama stageholder terkait dan dukungan dari pihak swasta (Kolaborasi Dinas ketahanan Pangan Kota Bima bersama Dinas Perindustrian dan perdagangan, Bulog, Alfa Mart, Petani Peternak Telur dan UMKM).
    3. Panel Harga Pangan yang telah berhasil mendukung terciptanya stabilitas harga pangan pokok dan strategis.

Berikut gambar nilai Coefisien Varian Komodotas Beras tahun 2019-2022 dan masih berada pada batas ambang gejolak harga (CV ≤ 10 atau Maksimal 10).

Gambar.2.10
Perkembangan Nilai Coefisien Varian Komodotas Beras
Di Kota Bima Tahun 2019-2022



b) Indikator Sasaran II Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Aspek pembangunan ketahanan pangan pemanfaatan pangan dalam hal ini konsumsi pangan. Pangan yang tersedia dalam jumlah cukup dan dapat terjangkau oleh masyarakat baik secara fisik maupun secara social, namu bila dikonsumsi tidak dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang maka dapat dikatakan pembangunan ketahanan pangan belum optimal sampai ke tingkat perseorangan.

Capaian konsumsi pangan dapat dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kualitas diukur dari jumlah pangan yang dikonsumsi, sedangkan kualitas dilihat dari keragaman kelompok pangan yang dikonsumsi yang diukur dengan skor PPH. Cakupan konsumsi pangan dan keragaman konsumsi pangan di Kota Bima menunjukkan bahwa konsumsi pangan terbanyak rata-rata masyarakat Kota Bima adalah beras. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator konsumsi kelompok pangan, konsumsi energi per kapita per hari, dan skor PPH.

Berbagai upaya dan strategi dilakukan Pemerintah untuk mencapai keadaan masyarakat dengan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman menuju Pola Konsumsi Pangan yang ideal, guna meningkatkan kualitas SDM. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan dan sosialisasi serta promosi penganekaragaman pangan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi pangan di tingkat rumah tangga sebagai sumber pangan keluarga, yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dapat meningkatkan perekonomian keluarga, serta dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga. Program Percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Pencapaian Kinerja Sasaran dua (2) Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan diuraikan sebagai berikut:

Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan atau Skor Pola Pangan Harapan/ PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah

100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.

Uraian singkat tentang Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi,

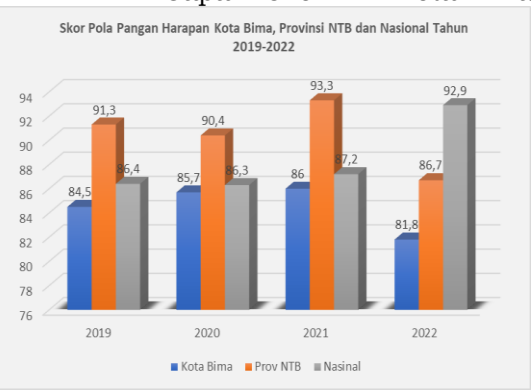
1. *Konsumsi Pangan* adalah jenis dan jumlah pangan (baik bentuk asal maupun olahan) yang dikonsumsi oleh seseorang/penduduk dalam jangka waktu tertentu (maupun konsumsi normative) untuk hidup sehat dan produktif.
2. *Angka Kecukupan Gizi* adalah rata-rata asupan gizi sehari yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi hampir semua orang sehat (97,5 %) menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh aktifitas fisik, dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
3. *Tingkat Konsumsi Energi* adalah perbandingan antara banyak energi yang dikonsumsi (kalori) terhadap kecukupan energy, dalam satuan % AKG.
4. *Pola Pangan Harapan adalah* susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok umur pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor pola pangan harapan. Skor PPH maksimal 100.

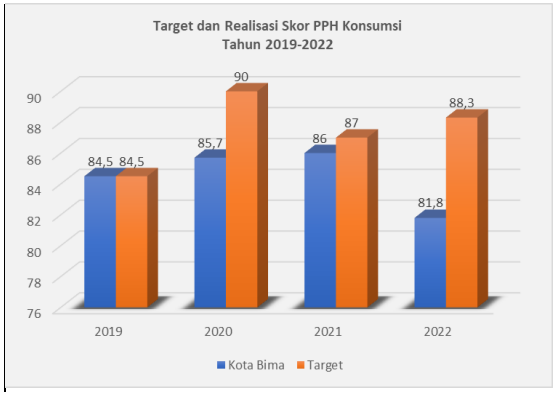
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi menggambarkan susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan dengan memepertimbangkan segi daya terima, ketersediaanpangan, ekonomi,, budata dan agama. Beragam, Bergizi, Seimbangn dan Aman adalah, aneka ragam pangan yang harus dikonsumsi dalam jumlah seimbang, sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan dan bebas dari cemaran fisik, kimi dan biologi.

Tabel.2.14.
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Perkembangan PPH Konsumsi Kota Bima, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2022

Sasaran Ke-2	Tahun	Kota Bima			Provinsi			Nasional		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragaman	2022	88,3	81,8	93%	94,4	86,7	92%	92,8	92,9	100%
	2021	87	86	99%	86,2	93,3	108%	91,6	87,2	95%
	2020	90	85,7	95%	85,8	90,4	105%	90,4	86,3	95%
	2019	84,5	85,0	101%	85,3	91,3	107%	86,4	86,4	100%

Gambar.2.11.
Capain Skor PPH Kota Bima, Provinsi NTB dan Nasional 2019-2022



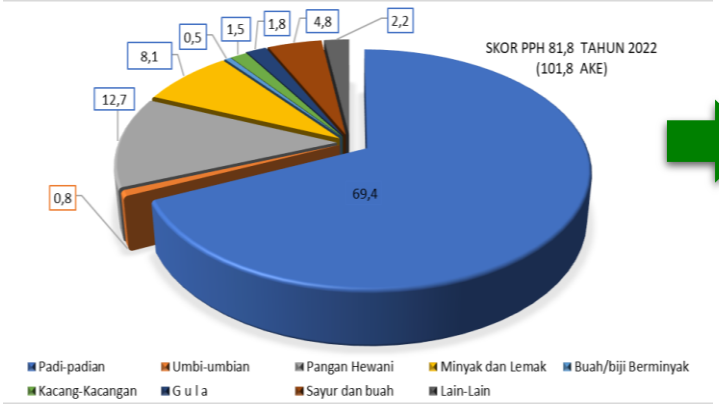


Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan data 2019-2022

Gambar.2.12.
Pola Konsumsi Pangan Harapan Penduduk Kota Bima

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Bima Tahun 2022

Skor PPH Kota Bima Tahun 2022: 81,8
(Skor PPH 81,8 terhadap Angka Kecukupan Energi (Kategori Cukup)



Skor PPH Ideal

No	Kelompok Pangan	% AKG
1	Padi-padian	50,0
2	Umbi-umbian	6,0
3	Pangan Hewani	12,0
4	Minyak dan Lemak	10,0
5	Buah/biji Berminyak	3,0
6	Kacang-Kacangan	5,0
7	G u l a	5,0
8	Sayur dan buah	6,0
9	Lain-Lain	3,0
	J u m l a h	**100,0**

Masih tingginya konsumsi padi-padian dan bahkan paling dominan dari 8 kelompok pangan lainya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faaktor antara lain:

a. Perilaku masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi;
b. Masih rendahnya daya beli masyarakat, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang serta masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan;
c. Kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu;
d. Produksi umbi-umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian di pasar;
e. Keterlibatan swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan, berasan/butiran, dan lain-lain) belum memasuki tahap industrialisasi (scaling up production), sehingga harga pangan lokal sumber karbohidrat masih tinggi di tingkat pasaran dan masyarakat belum mampu mengaksesnya;
a. Teknologi penyimpanan pangan lokal/ umbi-umbian dalam jangka waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke masyarakat;

Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang melalui:

a. Prencanaan intensifikasi, eksentifikasi dan diversifikasi pangan;
b. Perencanaan dan pemasyarakatan paket tekhnologi diversikasi pangan serta pengembangan UMKM berbasis pangan local melalui kegiatan pengembangan industry pangan lokal;
c. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui Komunikasi, Informasi, Lomba Cipta Menu B2SA, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik);
d. Upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya lokal, Melaui pengembangan

"beras" yang menggunakan bahan tepung-tepung local non beras dan terigu didukung fortifikasi mikronutrien (misalnya vitamin A dan E, zat besi);

e. Peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga.

Evaluasi Pencapaian Kinerja sasaran strategis selama 4 (empat) Tahun Terakhir.

Kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018 - 2022 dari tabel diatas menggambarkan bahwa tren selama tiga tahun terjadi kenaikan yang signifikan. Pada capaian 3 (tiga) indikator sasaran 1 dan sasaran 2 yaitu 164%. Untuk capaian kinerja pada sasaran 2 kenaikanya fluktuatif selama empat tahun terakhir. Kenaikan ataupun penurunan di terjadi di tahun 2019, dimana nilai Skor PPH Konsumsi turun 1,2 poin. Demikian juga di tahun 2022 terjadi penurunan Skor PPH Konsumsi dari Skor PPH 86 di tahun 2021 turun menjadi 81.8 di tahun 2022 atau turun sebesar 4,2 poin, ini disebabkan adanya perbaikan kualitas data perhitungan PPH Konsumsi antara lain, adanya penambahan data pada 10 item bahan pangan, factor peubah pada aplikasi yang tadinya menggunakan Justifikasi menjadi Aktual dan penggunaan AKE 2.100 Kkal/Kapita/Hari menjadi AKE 2.150 Kkal/Kapita/Hari.

Gambar.2.13.
Tren Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 2018-2022



Sumber data Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan

Evaluasi Pencapaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD dan Target Akhir Renstra PD.

Pada tabel 3.6. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022, dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk sasaran 1 dengan indikator Persentase penyediaan Pangan Utama di tahun 2022 tercapai 72% atau sudah melebihi capaian RPJMD dan Resntra Dinas Ketahanan Pangan. Artinya kedepan bisa dilakukan perubahan target dengan menaikan target capaian di tahun 2023.

Capaian kinerja untuk sasaran 2 dengan Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan di tahun 2022 tercapai 92,64% dibandingkan dengan target akhir RKPD maupun Renstra PD tercapai sebesar 91,3%.

2.2.3. Capain Kinerja dan Evaluasi Kinerja Program

Untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran I dan sasaran II didukung dengan indikator program:

a) Indikator Jumlah Ketersediaan Energi

Melalui angka ketersediaan energi dapat diketahui situasi ketersediaan pangan secara rata-rata wilayah. Formula perhitungan Angka Ketersediaan Energi adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisa Neraca Bahan Makanan} = \frac{\text{Produksi + Import - Eksport - Pemakaian Dalam Negeri}}{\text{Jumlah Penduduk) / 365 Hari}}$$

Capaian kinerja Angka ketersediaan energi tahun 2021 dan tahun 2022 Sangat Baik atau berada diatas 100%. Pada tahun 2020 realisasi angka ketersediaan energy adalah 2.605 Kilo kalori per kapita per tahun, dibandingkan dengan standar nasional WNPG X tahun 2012 sebesar 2,400 KKa/kap/tahun. Dan capaian ditahun 2021 sebesar 2.684 KKa/kap/hari dan 3.198,97 Kka/kap/hari. Realisasi pencapian ini Sangat Tinggi, pencapaian ini juga sudah melebihi satndar yang ditetapkan yaitu 2.400 Kka/kap/hari. Sedangkan dilihat dalam kaitanya dengan target akhir periode Renstra, pencapaian ini telah mencapai 120% (Angka ketersediaan energi). Pada periode tersebut ketersedian energi naik rata-rata 0,5 Persen pertahun.

Capaian kineja yang tinggi ini disebabkab ketersediaan pangan di Kota Bima didominasi impor bahan pangan dari luar daerah. Kelancaran penyediaan dan distribusi bahan pangan didukung adanya sarana prasarana distribusi yang baik dan kondisi politik, sosial dan ekonomi yang stabil.

Dilihat dari kelompok bahan makanan pembentuk angka ketersediaan ini energi ini tampak yang paling dominan adalah pada kelompok bahan makanan padi-padian, minyak dan lemak dan buah-buahan dapat dilihat pada dibawah ini.

b) Indikator Jumlah Ketersediaan Protein

Berdasrkan table diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian indikator Angka ketersediaan protein tahun 2022 sebesar 75,74 Gram/ kap/ hari telah melebihi target (113%) dari target 67,18 Gram/ kap/ hari, dengan pencapaian yang Sangat Tinggi. Sedangkan bila dilihat kaitanya dengan target akhir kinerja periode Renstra, pencapain ini telah mencapai 112% dari target akhir Renstra sebesar 67,68 Gram/ kap/ hari. Pada periode tersebut ketersedian protein naik rata-rata 0,06 Persen pertahun.

Tabel 2.15.
Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan
Neraca Bahan Makanan Tahun 2019 - 2021

No.	Kelompok Bahan Makanan	2019		2020		2021		2022	
		Energi (kkal/kap/ hari)	Protein (Gram/ kap/ hr)	Energi (kkal/kap/ hari)	Protein (Gram/ kap/ hr)	Energi (kkal/kap/ hari)	Protein (Gram/ kap/ hr)	Energi (kkal/kap/ hari)	Protein (Gram/ kap/hr)
1.	Padi-padian	3.006	75,67	1.949,30	47,3	1.573	38	885,21	22,96
2.	Makanan Berpati	1,51	0,01	6,1	0,1	6	0,06	24,80	0,17
3.	Gula	63,38	0,3	102,1	0,3	107	7,65	342,42	0,00
4.	Buah Biji Berminyak	68,98	4,55	107,4	7,6	290	3	106,41	10,98
5.	Buah-buahan	122,32	1,31	1.357,90	311,9	33	10	3,95	0,00

No.	Kelompok Bahan Makanan	2019		2020		2021		2022	
		Energi (kkal/kap/ hari)	Protein (Gram/ kap/ hr)	Energi (kkal/kap/ hari)	Protein (Gram/ kap/ hr)	Energi (kkal/kap/ hari)	Protein (Gram/ kap/ hr)	Energi (kkal/kap/ hari)	Protein (Gram/ kap/hr)
6.	Sayur-sayuran	17,94	8,65	121,3	33,2	290	3	358,99	17,00
7.	Daging	59,19	3,83	93,2	166,4	128	9	191,49	16,00
8.	Telur	41,76	3,36	57	4,4	47	4	47,53	3,82
9.	Susu	3,48	0,18	9,3	0,5	9	0	0,59	0,03
10.	Ikan	21,9	3,75	13,1	2,3	10	2	14,11	2,49
11.	Minyak dan Lemak	293	0,05	43,5	367,5	368	0	1223,46	2,24
		2.600	**65,68**	**2.605**	**66,25**	**2.684**	**74,17**	3.198,97	**75,74**

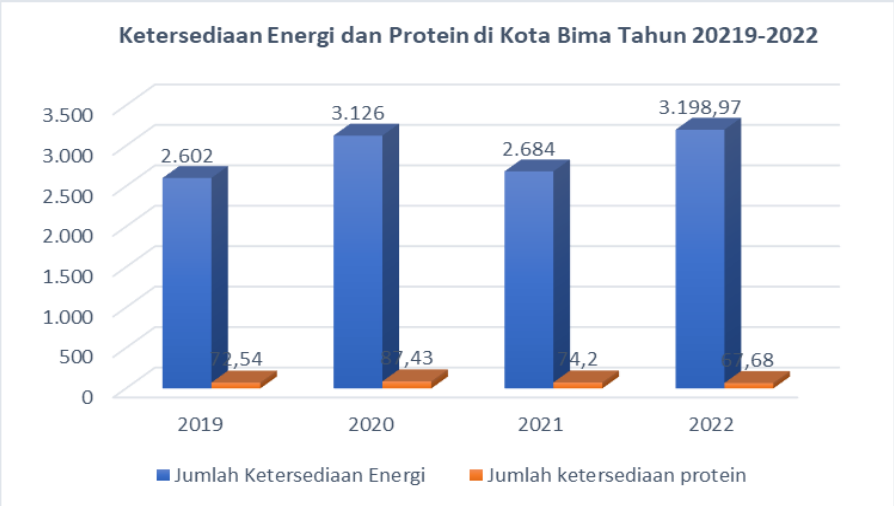
Sumber data hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan 2021, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2022.

Tabel. 2.16.
Ketersediaan Energi dan Protein di Kota Bima

No.	Jenis Pangan	Ideal	Jumlah Produksi (Ton)			
			2019	2020	2021	2022
1	Enegi (Kkal/ Kap/ Hari)	2.400	2.602	3.126	2.684	3.198,97
2	Protein (gram/ Kap/ Hari)	63	72,54	87,43	74,2	67,68

Sumber Data: NBM Kota Bima 2019-2022, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Gambar. 2.14.
Ketersediaan Energi (Kkal/kap/tahun) dan Ketersediaan Protein (gram/kap/tahun) Tahun 2019-2022



Ketersediaan energi perkapita per tahun dan protein per gram per kapita per tahun dihitung berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) ketersediaan pangan di Kota Bima. Dimana produksi ditambah import dikurangi eksport dan dikurangi pemakaian dalam negeri dibagi jumlah penduduk.

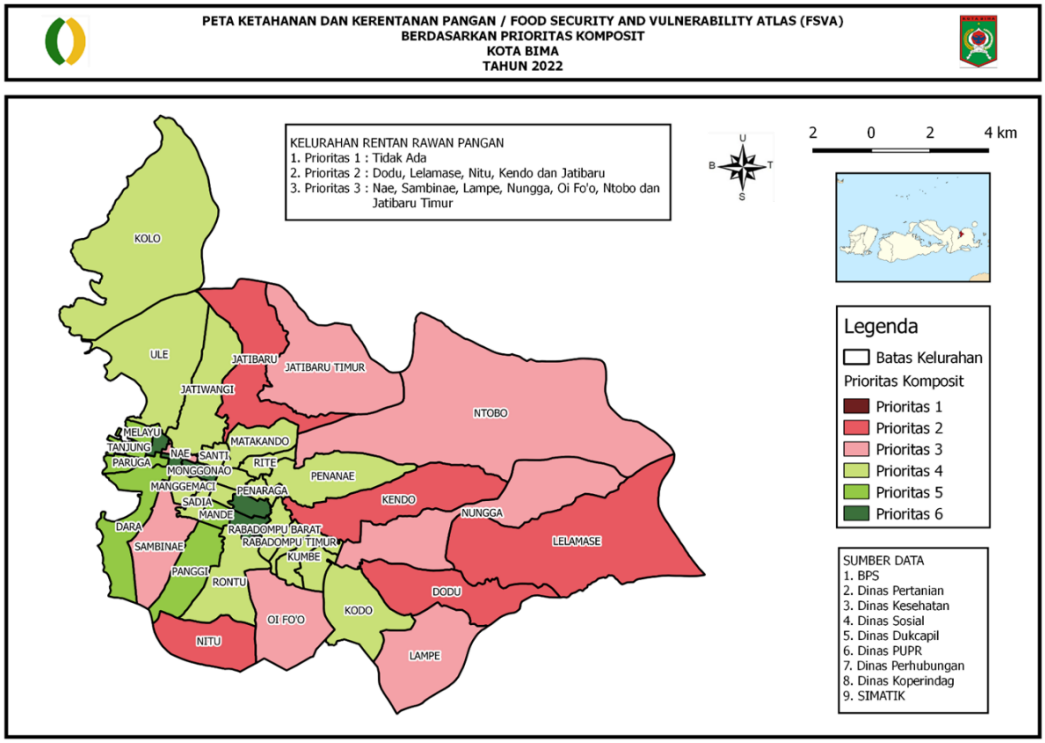
Ketersediaan energi tang dihailkan dari 11 (sebelas) kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaratn kualitas keragaman ketersediaan yang siap di konsumsi oleh penduduk/masyarakat.

Namun demikian angka ketersediaan bukan satu-satunya factor dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Faktor aksesibilitas dan daya beli masyarakat lebih berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Oleh karenanya keberhasilan pencapaian angka ketersediaan ini perlu dibarengi upaya peningkatan aksesibilitas tersebut. Permasalahan lain dalam pembangunan ketahanan pangan yaitu masih adanya daerah yang mengalami

rawan pangan. Ketahanan dan kerentanan pangan ditunjukkan dengan peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) yang diukur berdasarkan aspek ketersediaan,akses dan pemanfaatan pangan yang dirilis setiap tahun. Peta FSVA baru dibuat dua tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan tahun 2022.

Tahun 2021 terdapat 9 (Sembilan) kelurahan yang masuk dalam kelurahan rawan rentan pangan. 2 (dua) Kelurahan pada Prioritas I, 6 (enam) Kelurahan pada prioritas II, dan 1 (satu) Kelurahan pada prioritas III.

Gambar.3.15.
Peta Rawan Retan Pangan 2022



Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan Bidanf Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2022

Dan di tahun 2022 terdapat 12 (Duabelas) Kelurahan yang masuk dalam kelurahan rawan rentan pangan. 6 (Enam) Kelurahan pada Prioritas II dan 6 (enam) Kelurahan pada prioritas II.

Salah satu upaya untuk penanganan rawan pangan yaitu dengan Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Desa Mandiri Pangan, program penanganan kerawanan pangan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di kelurahan dengan prosentase KK miskin, Stunting, dan bedasarkan hasil pengolahan data pada Peta FSVA. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan. Intervensi penanganan daerah kerawanan/rentan pangan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan melalui APBN, APBD maupun APBD Provinsi dengan kegiatan pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari, Pemberian Makanan Tambahan pada anak usia dibawah lima tahun, Pemberian CPP pada masyarakat miskin, Gelar pasar murah.

c) Indikator Jumlah konsumsi energi kkal/ kap/ hari

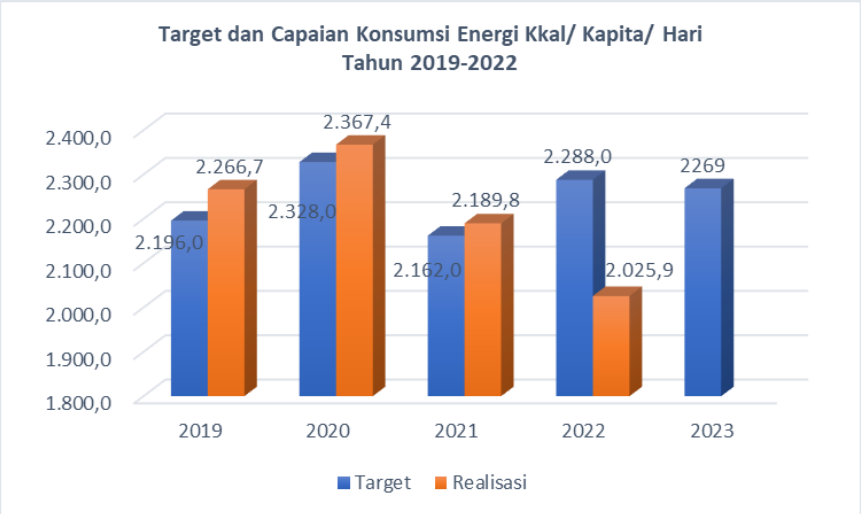
Konsumsi energi tahun 2022 sebesar 2.025,9 kkal/kap/hari, menurun dibanding tahun 2021 sebesar 2.189,8 kkal/kap/hari). Namun capaian tersebut berada diatas standar AKE 2.150 kkal/kap/hari. Konsumsi energi selama kurun waktu 2019-2022 masih berada pada diatas standar AKE. Demikian juga dengan konsumsi protein masih berada diatas Angka Kecukupan Protein (57 gram/kapita/hari). Pemenuhannya lebih dari 60% tersebar dari pangan sumber protein, selama tahun 2019-2022. Dimana komposisi konsumsi protein terbesar dari padi-padian.

Tabel.2.17
Perkembangan Konsumsi Energi Kkal/Kap/Hari Tahun 2019-2022

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari		Konsumsi Energi Per Hari		Konsumsi Energi Per Hari		Konsumsi Energi Per Hari	
		Kkal/ Kapita	% AKE*)	Kkal/ Kapita	% AKE*)	Kkal/ Kapita	% AKE*)	Kkal/ Kapita	% AKE*)
		2019		2020		2021		2022	
1.	Padi-padian	1.544,1	71,8	1.672,8	77,8	1.492,6	68,2	1.375,1	64,0
2.	Umbi-umbian	21,0	1,0	14,2	0,7	16,4	0,7	23,6	1,1
3.	Pangan Hewani	210,2	9,8	241,7	11,2	273,6	12,5	242,9	11,3
4.	Minyak dan Lemak	178,5	8,3	167,2	7,8	173,8	7,9	159,5	7,4
5.	Buah/Biji Berminyak	17,3	0,8	14,5	0,7	9,7	0,4	7,7	0,4
6.	Kacang-kacangan	46,7	2,2	30,7	1,4	32,7	1,5	50,1	2,3
7.	Gula	63,3	2,9	46,8	2,2	39,6	1,8	30,8	1,4
8.	Sayur dan Buah	131,4	6,1	128,0	6,0	104,1	4,8	96,5	4,5
9.	Lain-lain	54,0	2,5	51,5	2,4	47,2	2,2	39,8	1,8
	Total	**2.266,7**	**105,4**	**2.367,4**	**110,1**	**2.189,8**	**100,0**	**2.025,9**	**94,2**

Sumber Data: PPH Konsumsi Tahun 2018-2022, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Gambar. 2.16.
Konsumsi Energi (Kkal/kap/tahun) dan Konsumsi Protein (gram/kap/tahun)
Tahun 2019-2022

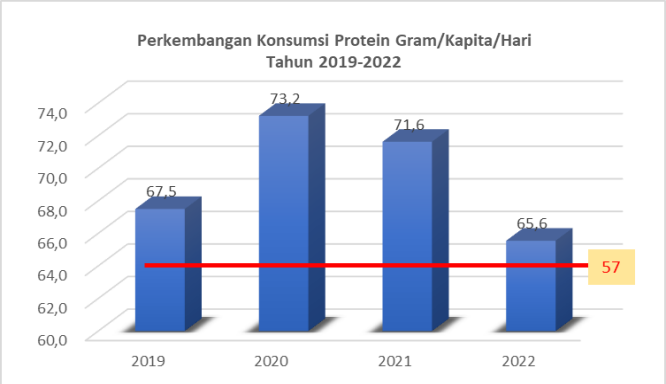


Tabel.2.18
Perkembangan Konsumsi Protein Gram/Kap/Hari Tahun 2019-2022

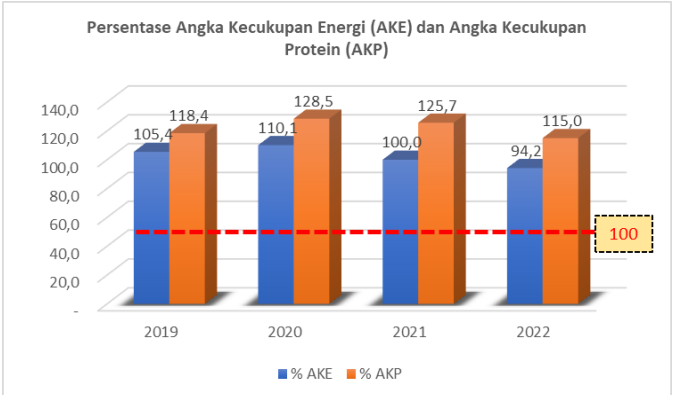
No	Kelompok Pangan	Konsumsi Protein Per Hari		Konsumsi Protein Per Hari		Konsumsi Protein Per Hari		Konsumsi Protein Per Hari	
		Gram/ Kapita	% AKP*)	Gram/ Kapita	% AKP*)	Gram/ Kapita	% AKP*)	Gram/ Kapita	% AKP*)
		2019		2020		2021		2022	
1	Padi-padian	35,4	62,2	39,0	68,4	34,8	61,0	31,8	55,8
2	Umbi-umbian	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4
3	Pangan Hewani	21,8	38,2	25,0	43,9	28,8	50,5	25,1	44,0
4	Minyak dan Lemak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2
6	Kacang-kacangan	4,4	7,8	3,2	5,6	3,3	5,7	4,0	7,1
7	Gula	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1
8	Sayur dan Buah	4,2	7,3	4,5	7,8	3,5	6,2	3,5	6,1
9	Lain-lain	1,2	2,2	1,2	2,1	0,9	1,6	0,8	1,4
	Total	**67,5**	**118,4**	**73,2**	**128,5**	**71,6**	**125,7**	**65,6**	**115,0**

Sumber Data: PPH Konsumsi Tahun 2018-2022, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Gambar. 2.17.
Konsumsi Protein (gram/kap/tahun) Tahun 2019-2022



- Konsumsi penduduk melebihi standar Angka Kecukupan Protein (57 gram/ kap/ hari)'
- Pemenuhannya lebih dari 60 persen dari pangan sumber nabati, selama tahun 2019-2022.
- Komposisi konsumsi protein terbesar dari padi padian.



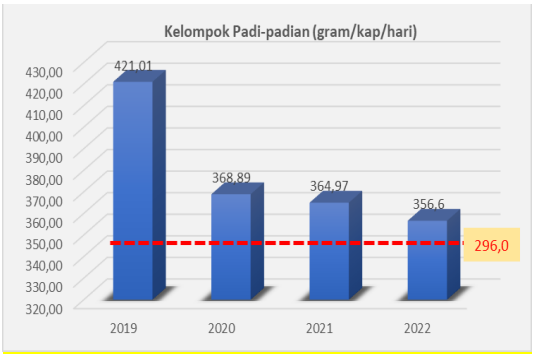
- Persentase Angka Kecukupan Energi penduduk selama empat tahun 2019-2022 masih berada diatas batas ambang yang dianjurkan (100%).

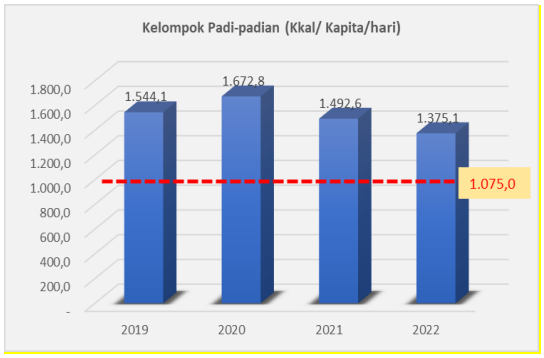
- Ditahun 2022 mengalami penurunan 5,8%. Disebabkan adanya perbaikan kualitas data perhitungan PPH Konsumsi antara lain, adanya penambahan data pada 10 item bahan pangan dan faktor peubah pada aplikasi yang tadinya menggunakan Justifikasi menjadi Aktual.

Tabel.2.19
Perkembangan Konsumsi Protein Gram/Kap/Hari Tahun 2019-2022

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari		Konsumsi Energi Per Hari		Konsumsi Energi Per Hari		Konsumsi Energi Per Hari	
		Kkal/ Kapita	% AKE*)	Kkal/ Kapita	% AKE*)	Kkal/ Kapita	% AKE*)	Kkal/ Kapita	% AKE*)
		2019		2020		2021		2022	
1.	Padi-padian	1.544,1	71,8	1.672,8	77,8	1.492,6	68,2	1.375,1	64,0
2.	Umbi-umbian	21,0	1,0	14,2	0,7	16,4	0,7	23,6	1,1
3.	Pangan Hewani	210,2	9,8	241,7	11,2	273,6	12,5	242,9	11,3
4.	Minyak dan Lemak	178,5	8,3	167,2	7,8	173,8	7,9	159,5	7,4
5.	Buah/Biji Berminyak	17,3	0,8	14,5	0,7	9,7	0,4	7,7	0,4
6.	Kacang-kacangan	46,7	2,2	30,7	1,4	32,7	1,5	50,1	2,3
7.	Gula	63,3	2,9	46,8	2,2	39,6	1,8	30,8	1,4
8.	Sayur dan Buah	131,4	6,1	128,0	6,0	104,1	4,8	96,5	4,5
9.	Lain-lain	54,0	2,5	51,5	2,4	47,2	2,2	39,8	1,8
	Total	**2.266,7**	**105,4**	**2.367,4**	**110,1**	**2.189,8**	**100,0**	**2.025,9**	**94,2**

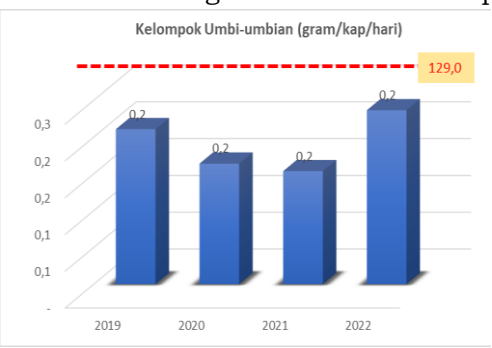
Gambar. 2.18.
Perkembangan Konsumsi Kelompok Padi-Padian Tahun 2019-2022

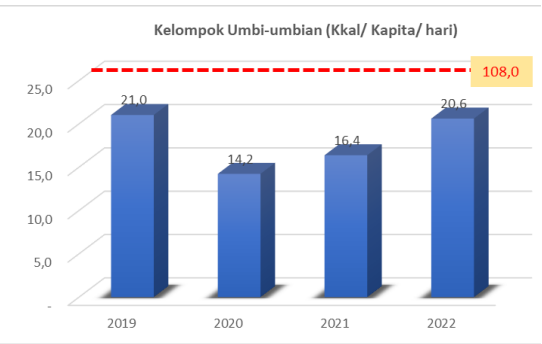




Kuantitas konsumsi kelompok pangan padi-padian dari tahun 2019-2022 berada diatas konsumsi ideal (296 gram/kap/hri) dengan laju penurunan rata 6,0%. Sejalan dengan itu, kualitas konsumsi kelompok pangan padi-padian dari tahun 2019-2022 berada diatas standar ideal (1.075 kkal/ ka/ hari) dengan laju penurunan 4,1%.

Gambar. 2.19.
Perkembangan Konsumsi Kelompok Umbi-umbian Tahun 2019-2022

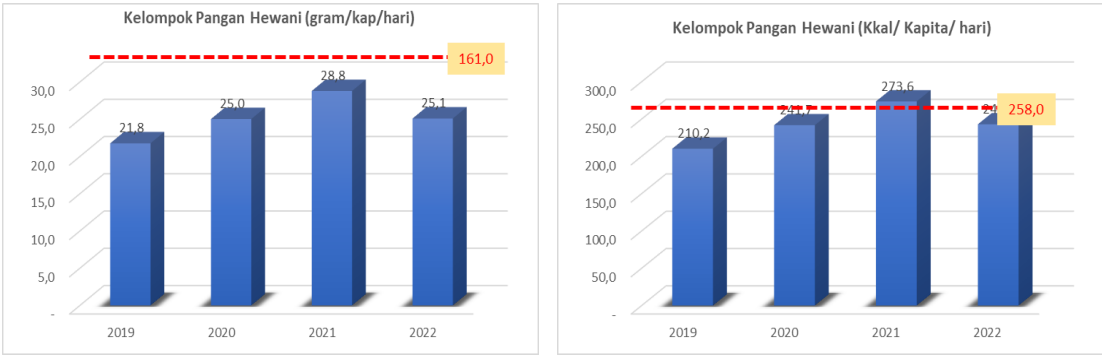




Kuantitas konsumsi kelompok pangan Umbi-umbian dari tahun 2019-2022 berada dibawah konsumsi ideal (129,0 gram/kap/har) tidak ada perubahan ataupun

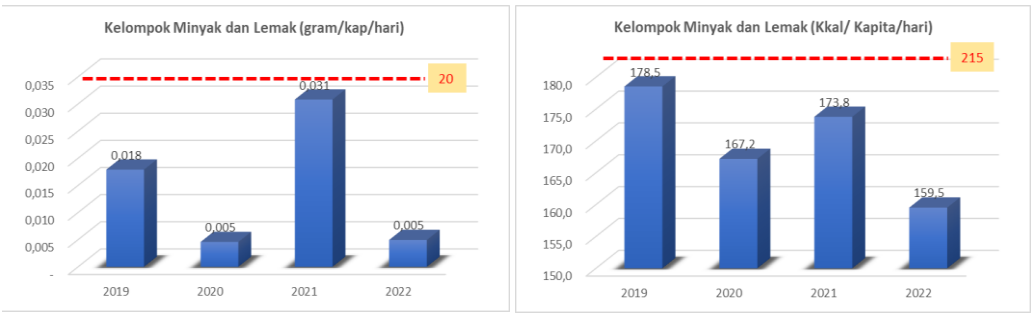
pertumbuhan pada kelompok pangan Umbi-umbian. Sejalan dengan itu, kualitas konsumsi kelompok pangan Umbi-umbian dari tahun 2019-2022 berada dibawah konsumsi ideal (129,0 kkal/kap/har).

Gambar. 2.20.
Perkembangan Konsumsi Kelompok Hewani Tahun 2019-2022



Kuantitas konsumsi kelompok pangan Hewani dari tahun 2019-2022 berada dibawah konsumsi ideal (160,0 gram/kap/har). Kualitas konsumsi kelompok pangan Hewani di tahun 2019, 2020 dan tahun 2022 berada dibawah konsumsi ideal (258,0 kkal/kap/har), sedangkan di tahun 2021 berada diatas standar ideal.

Gambar. 2.20.
Perkembangan Konsumsi Kelompok Minyak dan Lemak Tahun 2019-2022



Kuantitas konsumsi kelompok pangan Hewani dari tahun 2019-2022 berada dibawah konsumsi ideal (20 gram/kap/har). Kualitas konsumsi kelompok pangan Hewani di tahun 2019, 2020 dan tahun 2022 berada dibawah konsumsi ideal (215 kkal/kap/har).

Kuantitas dan kualitas konsumsi kelompok pangan Buah/Biji Berminyak, Kacang-kacangan, Gula, Sayur dan Buah dan lain-lain masih berada dibawah angka ideal yang dianjurkan.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Dampak Kegiatan Desa Mandiri Pangan:

1) Ditahun 2019-2022 terdapat peningkatan luas lahan pertanian hortikultura dari kelompok sebelum program dan setelah program P2L.
2) Kelompok P2L mengalami peningkatan jumlah ternak dari sebelum dan selama program dilaksanakan, yaitu ternak ayam.
3) *Aspek ketersediaan pangan,* Pendapatan kelompok tani pada usaha tani, buruh tani dan non pertanian mengalami peningkatan yang sognifikan.

4) *Dari Aspek Distribusi.* Menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ketersediaan pangan pokok di warung/kios.
5) Aspek Konsumsi. Terdapat penurunan beberapa indikator konsumsi pangan, antara sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan P2L.

d) Indikator Presentase bahan pangan yang aman konsumsi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 memberikan amanat pada Pemerintah Daerah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu (ayat 1) dan membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan (ayat 5).

Pengawasan Pengawasan keamanan pangan segar diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya baik karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat

Pengawasan keamanan pangan segar dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a) Pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan (pre market) Pengawasan ini merupakan mekanisme pengawasan terhadap keamanan pangan segar yang dilakukan sebelum pangan segar diedarkan kepada konsumen akhir (Saat produksi, panen, grading, packing).
b) Pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran (Post Market) Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pangan segar yang ada diperedaran (pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern). Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan diperedaran mencakup Pengawasan terhadap penerapan GRP (Good Ritel Practices) pada pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern. Apabila diperlukan, maka dilakukan pengambilan contoh dan di uji laboratorium terhadap parameter keamanan pangan (residu pestisida, cemaran mikroba pathogen dan logam berat)

a.1. Pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan (pre market)

Pengawasan PSAT, dilakukan bersama provinsi NTB dalam rangka memfasilitasi produk PSAT yang siap edar. Sertifikat prima dan pendaftaran PSAT merupakan salah satu bentuk pengakuan atau jaminan bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi disamping kualitas/mutu yang terjamin. Dampak dari bentuk jaminan tersebut, maka produk pangan segar yang sudah bersertifikat mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, sehingga ada perbaikan harga dibanding pangan yang belum bersertifikat. Selain itu juga ada dampak peningkatan kualitas produksi pada kelompok yang sudah disertifikasi. Karena kelompok yang telah disertifikasi harus menerapkan GAP (penanganan produksi yang baik dan benar).

a.1. Pengawasan keamanan pangan segar diperedaran (post market).

Pengawasan keamanan pangan segar diperedaran (post market) dilakukan untuk:

1) Untuk meningkatkan keamanan pangan baik pangan segar maupun olahan agar aman dikonsumsi masyarakat;
2) Memberikan rasa aman pada konsumen karena baik pangan segar dan olahan terjaga keamanan panganya;
3) Secara kontinyu mensosialisasikan kepada masyarakat, pangan segar dan olahan yang aman untuk di konsumsi.

Pengawasan dilakukan dengan pengujian secara kualitatif melalui Uji cepat kandungan formalin dan rhodamin pada sampel pangan olahan, sampel pangan olahan asal hewan dan sampel pangan perikanan (BBPOM), dan uji cepat kandungan formalin dan pestisida golongan organophospat dan carbamate.

Tabel. 2.20.
Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Tahun 2019-2022

No.	Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah Sampel Uji	Jumlah Sampel Aman	Jumlah Sampel Uji	Jumlah Sampel Aman	Jumlah Sampel Uji	Jumlah Sampel Aman	Jumlah Sampel Uji	Jumlah Sampel Aman
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	PSAT	39	39	40	40	51	51	40	40
2	Pengawasan Pangan Segar	33	22	44	32	45	31	45	45
3	Total	72	61	84	72	96	82	85	85
4	Persentase Aman	85%		85,7%		85%		100%	

Sumber Data Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Bidang Konsumis dan Keamanan Pangan.

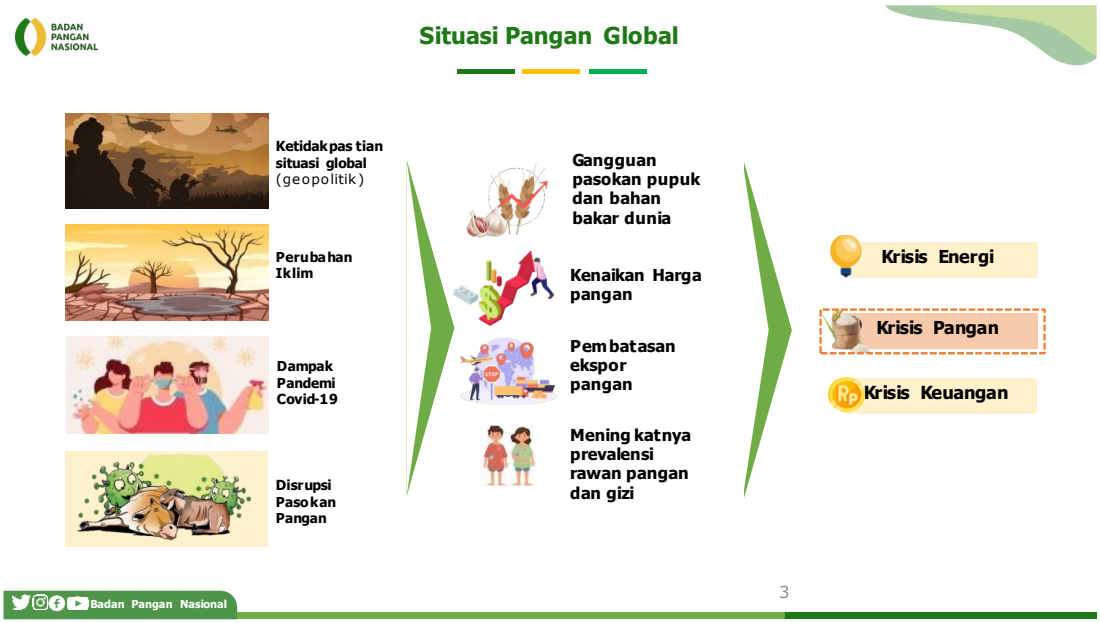
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Isu Strategis Nasional di dalam RKP Nasional 2024

Isu trategis pada Rancangan Awal RKP Tahun 2024, yang menjadi isu strategis tahun 2024 diuraikan dalam beberapa bidang. Isu strategis bidang pembanguan SDM pada tahun 2024 adalah *"Pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata untuk percepatan penurunan angka kematian ibu, stunting dan wasting, percepatan penemuan kasus secara massal dan pengobatan penyakit secara tuntas penyakit menular, serta penguatan pada sistem Kesehatan"*

2.3.2. Isu Strategis Nasional di Dalam Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024

Gambar. Situasi Pangan Global



Sumber: Materi Badan Pangan Nasional dalam Forum Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggra Barat 23 Maret tahun 2023

Situasi pangan global sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian situasi global (situasi politi), perubhan iklim, dampak pandemic covid-19 dan disrupsi pasokan pangan. Yang berpengaruh terhadap ganguan pasokan pupuk dan bahan bakar dunia, kenaikan harga pangan, pembatasan ekspor pangan, meningkatnya prevalensi rawan panga dan gizi. Secara global berdampak pada Krisi ekonomi, krissi pangan dan Krisi keuangan. Pembangunan pangan di Indonesia masih menghadapi permasalaahn baik dari sisi Suppy (penyediaan) dan dari sisi Deman (permintaan) pangan.

1. Supply (penyediaan), berbagai faktor yang mempengaruhi:
   a. Produksi
      1) Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan OPT dan ketersediaan air.
      2) Skala usaha pertanian yang didominasi oleh usahatani kecil disertai laju konversi lahan yang cukup tinggi
      3) Penyediaan sarana dan prasaran pertanian yang belum merata
      4) Inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan adaptasi tanaman belum dilaksanakan secara mas
      5) Regenerasi petani berjalan lambat
      6) Tingginya *food loss and waste*

   b. Distribusi
      1) Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (miskin) dan fisik (daerah terpencil)
      2) Konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai.
      3) Sebaran wilayah produksi di daerah daerah tertentu menyebabkan arus distribusi pangan hanya searah dari produsen ke konsumen.
      4) Rantai distribusi yang Panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.

2. *Demand* (permintaan), berbagai factor yang mempengaruhi yaitu:
      a. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang cukup tinggi
      b. Keamanan pangan akibat penggunaan bahan berbahaya dan/atau bahan kimia berbahaya pada makanan. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat.
      c. Meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif.
      d. Meningkatnya permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsinya
      e. *Triple burden malnutrition* yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita, kelebihan gizi (*overweight* dan obesitas), dan kekurangan zat gizi mikro yang masih cukup tinggi terjadi di Indonesia.

2.3.3. Isu Strategis Provinsi NTB didalam Rancangan Awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB 2024-2026

a. Masih adanya Daerah (Kecamatan dan Desa) dengan kategori rentan rawan pangan;
b. Masih adanya penduduk terkategori Rawan Pangan (1,78% atau 97.431 Jiwa dari Penduduk NTB Rp. 5.473.671 Jiwa);
c. Fluktuasi harga dan pasokan pangan pokok strategis

d. Masih tingginya tingkat konsumsi beras penduduk NTB (118,8 Kg/Kap/tahun dari syarat ideal 100,4 Kg/Kap/Tahun)
e. Rendahnya penerapan standar mutu dan keamanan pangan segar

2.3.4. Isu Strategis Kota Bima di dalam RPD 2024-2026 dan RKPD Kota Bima Tahun 2024

Berdasarkan RPD Kota Bima Tahun 2024-2026 dan RKPD Kota Bima Tahun 2024, terdapat 6 (enam) isu strategis. Isu strategis RPD dan RKPD yang beririsan langsung dengan pelayann Dinas Ketahanan adalah pada ***isu strategis pertama***, yaitu "***Peningkatan dan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan bermartabat"*** dan beberapa variable yang menjadi penekanan pada isu ini adalah:

a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka stunting; (Variabel ke dua pada RPD)
b. Mempromosikan budaya hidup sehat bagi masyarakat segala usia; (Variabel ke empat pada RPD)
c. Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak bencana Covid 19; (Variabel ke tujuh pada RPD)
d. Penguatan ketahanan dan keamanan pangan. (Variabel ke delapan pada RPD)

2.3.5. Isu Strategis Pembangunan Ketahanan Pangan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2024

1. Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Ketahanan Panngan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
2) pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
4) pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kota Bima Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan dan kemandirian pangan.

2. Permasalahan dan Hambatan

Tabel 2.10.
Pemetaan Permasalaahn Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	*2*	*3*	*4*
	Sasaran PD: Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan Pemanfaatan Pangan		
1.	Belum optimalnya ketahanan pangan (Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan pangan) di Kota Bima	Ketersediaan pangan belum memenuhi kaidah yang ditetapkan	1. Masih adanya daerah terkategori desa rentan rawan pangan; 1. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum masih rendah 2. Data dan informasi kondisi pangan kurang valid; 3. Keterbatasan sumberdaya pangan. 4. Pemberdayaan dan pengembangan kawasan mandiri pangan masih kurang;
		Akses/ keterjangkauan terhadap pangan, masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah.	1. Harga pangan strategis yang fluktuatif 2. Panjangnya rantai pasok dan jaringan distribusi pangan 3. Penguatan modal kelompok pangan masih rendah; 4. Rendahnya ases pangan pada kondisi tertentu.
		Pemanfaatan pangan belum memenuhi standar anjuran	1. Kurangnya ketersediaan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman ditingkat rumah tangga 2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman. 3. Belum optimalnya pengembangan, pemanfaatan dan pendampingan pangan lokal di Kota Bima. 4. Pengentahuan masyarakat terkait diversifikasi pangan masih rendah 5. Terbatasnya sarana prasarana pengujian keamanan pangan

Tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan selain mengacu pada RPD Kota Bima tahun 2024-2026, RKPD Kota Bima tahun 2024 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2024, Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024, juga memperhatikan kondisi di Kota Bima. Dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kota Bima, serta berdasarkan prioritas mendesak, serius dan bila tidak ditangani akan menjadi masalah (Urgent, Serious and Growth), dan didasari untuk ***Penguatan ketahanan dan keamanan pangan*** daerah. Pengutan ketahanan pagan pangan tidak bisa lepas dari *Ketersediaan pangan, Aksesibilitas dan Pemanfaatan pangan*

1. Ketersediaan pangan'

   Isu ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Kota Bima. Kekurangan ketersediaan masih terjadi hampir pada setiap komoditas tanaman pangan sehingga sampai saat ini kebutuhan harus ditutup dari impor.

   Meskipun Meskipun ketersediaan pangan pokok beras di Kota Bima suplus, lebih dari jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bima. Namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun, hal itu disebabkan karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stock beras.

   Ketersediaan pangan erat kaitanya dengan *lahan pertanian* sebagai salah satu faktor produksi pangan, *luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan* pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

   Perubahan iklim global, dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan prakiraan iklim, melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan, serta mengembangkan delivery system untuk menyampaikan kepada para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.

2. Cadangan Pangan

   Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3. Informasi Harga, Rantai Pasok, Jaringan Distribusi dan Sistem Logistik Daerah dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan.

   Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengamanatkan pada Pemerintah dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan local yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen.

   Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distrbusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Kota Bima masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah

Penduduk rawan/rentan pangan pada daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami banjir tahunan. Penduduk dan daerah yang rawan/rentan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan.

Penanganan kerawanan pangan memerlukan intervensi berupa tindakan pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.

5. Konsumsi pangan masyrakat

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaan konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

Permasalaahn Gizi, Peningkatan pendapatan terutama pada masyarakat perkotaan telah mengubah pada gaya hidup terutama pola makan. Telah terjadi perubahan konsumsi dari tinggi karbohidrat kompleks, tinggi serat dan rendah lemak menjadi karbohidrat sederhana, rendah serat dan tinggi lemak. Perubahan tersebut terjadi pada sebagian besar kelompok umur dari usia dibawah 5 tahun hingga dewasa. Selain diet yang tidak seimbang, aktivitas fisik rendah juga menjadi salah satu faktor resiko yang menyebabkan overweight dan obesitas.

6. Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak ditemukan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

2.3.6. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan diatas dapat ditentukan isu strategis dalam upaya peningkatan ketahanan pangan Kota Bima tahun 2024. Dimana pada dasarnya perencanaan tidak dapat dilepaskan dari isu strategis baik itu yang bersifat lokal, regional, nasional, dan

internasional. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang di masa mendatang. Identifikasi isu strategis ketahanan pangan akan memberikan panduan dalam penyusunan perencanaan yang tanggap terhadap perubahan atau dinamika lokal, regional, nasional, dan internasional. Hasil identifikasi isu strategis bidang Ketahanan Pangan dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah ***"Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Daerah"*** dimana ketahanan pangan tidak lepas dari 3 (tiga) aspek, Aspek Ketersediaan, Aspek Aksesibilitas dan Aspek Pemanfaatan pangan

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan/ peningkatan pelayanan SKPD Badan Ketahanan Pangan di Kota Bima, antara lain:

1. Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia di Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.
2. Pertambahan jumlah penduduk
3. Semakin terbatasnya daya dukung sumber daya alam
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana usaha di bidang pangan
5. Semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor
6. Belum meratanya pengendalian harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya.
7. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi Pangan.
8. Skor pola pangan harapan belum maksimal, sehingga pola konsumsi masyarakat belum ideal;
9. Perilaku masyarakat yang masih bersandarkan pada paradigma "belum makan kalau belum makan nasi" sehingga cenderung sulit untuk merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal dari sumber pangan lokal), dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.
10. Adanya kecenderungan masyarakat mengkonsumsi makanan cepat saji dari bahan impor.
11. Kemampuan produksi dan pelaku usaha pangan di dalam menjamin mutu dan keamanan pangan segar dan olahan yg dihasilkan belum optimal.

b. Peluang

Peluang yang dimiliki pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang antara lain :

1. Adanya kebijakan pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib.
2. Tersedianya teknologi budidaya informasi dan komunikasi
3. Adanya kebijakan Nasional Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
4. Adanya pekarangan masyarakat yang tersedia untuk dilaksanakan penanaman pangan lokal yang berkualitas serta dapat sebagai sumber pangan keluarga dan meningkatkan pendapatan.
5. Adanya harga pembelian pemerintah yang dilaksanakan Bulog, LDPM dan kelompok lumbung masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara umum tidak terdapat banyak perbedaa antara Rancangan Awal RKPD dengan Renja PD tahun 2023. Dalam Rancanan Awal RKPD, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

mengusulkan anggaran sebesar Rp. 3.763.370.932 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang direncanakan dipergunakan untuk keperluan belanja gaji, belanja rutin maupun kegiatan untuk mencapai sasaran strategis tahu 2023.

Dari total rancangan anggaran tersebut, sebesar Rp.1.041.638.120,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Rupiah) untuk keperluan kegiatan inti dalam mencapai target kinerja PD. Dengan Besaran angaran tersebut, rencana capaian kegitan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Dinas Ketahana Pangan Kota Bima berikut:

Tabel 2.11.
(Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu ndikatif	Sumber Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				
01.00	**Dinas Ketahanan Pangan**				**3.763.370**		**Dinas Ketahanan Pangan**			**3.763.370**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kota Bima**	**Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**2.721.732**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kota Bima**	**100%**	**2.721.732**	
2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**13.298**	**APBD**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**100%**	**13.298**	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2.204	APBD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	2 Dok	2.204	
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	561	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 dokumen	561	
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	561	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 dokumen	561	
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	341	APBD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 dokumen	341	
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	541	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 dokumen	541	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	2 dokumen	9.090	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	2 dokumen	9.090	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu ndikatif	Sumber Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**2.383.839**	**APBD**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**100%**	**2.383.839**	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	2.258.197	APBD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	39 Orang	2.258.197	
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	100%	122.400	APBD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100%	122.400	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan/ Dokumen	2.285	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Laporan/ Dokumen	2.285	
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Semester	957	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	2 Semester	957	
2.09.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**500**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**100%**	**500**	
2.09.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	500	APBD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Dokumen	500	
2.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**100%**	**4.992**	**APBD**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**100%**	**4.992**	
2.09.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 PNS	4.992	APBD	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	30 PNS	4.992	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu ndikatif	Sumber Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**182.633**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**100%**	**182.633**	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1749	APBD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Paket	1749	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26789	APBD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Paket	26789	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4735	APBD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Paket	4735	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23238	APBD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Paket	23238	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	126121	APBD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	17 Laporan	126121	
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**104.445**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**104.445**	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	72.395	APBD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	12 Laporan	72.395	Gj. Honorer
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29089	APBD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	12 Laporan	29089	
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2960	APBD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	12 Laporan	2960	
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**32.023**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**32.023**	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	8.423	APBD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Unit	8.423	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu ndikatif	Sumber Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	2.850	APBD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	11 Unit	2.850	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	4750	APBD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	8 Unit	4750	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	16.000	APBD	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Unit	16.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Angka ketersediaan energi	**2692**	**872.924**		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		**2692**	**872.924**	
			Angka ketersediaan protein	**67,68**					**67,68**		
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Persentase ketersediaan pangan pokok terhadap kebutuhan daerah	**20%**	**150.967**		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		**20%**	**150.967**	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	50.476	APBD	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	50.476	Data dan informasi tentang ketersediaan pangan daerah (NBM, Prognosa, PPH Ketersediaan)
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	16.034	APBD	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	16.034	Bantuan alat pengolahan pangan lokal
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	4 Dokumen	51.556	APBD	Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	51.556	Informasi mingguan harga pangan strategis daerah
2.09.03.2.01.06	Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	4 Unit	32.899	DAU, APBD I & APBN	Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	32.899	Mendukung kegiatan PUPM dalam rangka stabilitas harga dan pasokan pangan bantuan Operasional,

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu ndikatif	Sumber Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
											Bantuan pengisian, dan modal usaha
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota		Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap total kebutuhan daerah	20 Ton	**206.013**		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota		20 Ton	**206.013**	SPM Permentan no. 11 mengamanatkan 80 ton beras
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	33.931	APBD	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	33.931	
2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	17.742	APBD	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	17.742	
2.09.03.2.02.01	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20Ton	129.360	APBD	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20Ton	129.360	
2.09.03.2.02.02	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	20Ton	24.980	APBD	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	20Ton	24.980	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Jumlah konsumsi energi	2.269 kka/ kap/ hari	**515.943**		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		2.269 kka/ kap/ hari	**515.943**	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per ahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	88.973	APBD	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita pertahun	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	88.973	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 laporan	426.969	APBD	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan	426.969	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu ndikatif	Sumber Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	**20%**	**80.000**		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		**20%**	**80.000**	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	5 kelurahan	80.000		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota		5 kelurahan	80.000	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	80.000	APBD	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	80.000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Presentase bahan pangan yang aman konsumsi	90%	88.714		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		90%	88.714	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota		Jenis pangan segar yang diawasi	90%	88.714		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota		90%	88.714	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Klpk Tani, Ditributor dan Pasar	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	40.800	APBD	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	40.800	
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	36.870	APBD	Registrasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	36.870	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	11.044	APBD	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	11.044	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mekanisme penerimaan usulan program/kegiatan dari masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang dan penerimaan proposal yang langsung ditujukan ke SKPD.

Namun secara kuantitas, proporsi usulan yang masuk lebih banyak melalui pengajuan proposal ke SKPD, dibandingkan pada saat forum musrenbang.

Dari Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat/ pemangku kepentingan yang diperoleh dari pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bima, hasil desk Musrenbang Kota bersama Bappeda dan Litbang Kota Bima, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima maupun Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB juga dari hasil penalaahan isu-isu strategis yang ingin dicapai, adalah sebagai berikut (terlampir T-C.32). Usulan hibah di sesuaikan dengan target yang telah di tetapkan sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2024-2026 dan rencana kerja dinas ketahanan pangan tahun 2024.

Tabel .2.12.
(Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				
01.00	**Dinas Ketahanan Pangan**				
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Angka ketersediaan energi	**2.692,0**	
			Angka ketersediaan protein	**67,68**	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Persentase ketersediaan pangan pokok terhadap kebutuhan daerah	**20%**	
2.09.03.2.01.06	Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	Mendukung kegiatan PUPM dalam rangka stabilitas harga dan pasokan pangan bantuan Operasional, Bantuan pengisian, dan modal usaha.
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota		Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap total	**20%**	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			kebutuhan daerah		
2.09.03.2.02.01	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kelurahan/daerah rentan pangan, kelutahan terdampak banjir/ bencana	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Ton	Bantuan pangan kepada msyarakat terdampak banjir/bencana, kelurahan rentan pangan.
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	**20%**	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kelurahan rentan pangan	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	5 kelurahan	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Bantuan makanan tambahan bagi anak usia dibawah lima tahun gizi kurang/ stanting

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Visi Badan Pangan Nasional (BAPANAS)

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya pada peningkatan produktifitas yang tinggi, tetapi juga apakah peningkatan produksi pangan tersebut sudah dapat memperbaiki gizi masyarakatnya. Oleh karena itu perencanaan ketahanan pangan harus besifat holistik, realistik, kontinyu dan aktual. Konsekuensinya dalam pembuatan perencanaan pangan bukan hanya hasil saja yang harus diperlihatkan, tetapi juga mengenai bagaimana caranya merumuskan pilar ketersediaan dan kerentanan pangan, pilar distribusi pangan dan pilar pola konsumsi dan keamanan pangan dapat berproses dan berjalan secara sinergis.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 berdasarakan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 adalah "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong", yang akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi. Misi tersebut dikenal sebagai nawacita kedua yang merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan nawacita pertama. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

3.1.2. Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan visi jangka menengah tahun 2020-2024 yakni:

"Terwujudnya tatakelola system pangan nasional yang inklusif, Tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan".

Berikut **misi** Badan Pangan Nasional dalam mendukung pencapaian visi diatas:

1. Menguatkan **ketersediaan dan cadangan pangan**;
2. Memantapkan **stabilitas pasokan dan harga** Pangan di produsen dan konsumen;
3. Mengentaskan **kerawanan pangan dan gizi**;
4. Menjamin **keamanan dan mutu pangan segar**
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang **beragam dan bergizi seimbang;**
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang **bersih, efektif, dan terpercaya.**

Tujuan dan Indikator Tujuan BAPANAS

Tujuan : Peningkatan **ketahanan pangan** yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan

Indikator	2021	Target		
		2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan **(PPH)**	87.20	92.80	94.00	95.20
Global Food Security Index **(GFSI)**	59.20	66.90	68.40	69.80
Inflasi Pangan Bergejolak (%)	3.62	4.0±1	4.0±1	4.0±1
Food Insecurity Experience Scale /**FIES** (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat)	4.79	4.50	4.20	4.00

Tabel. 3.1.
Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Badan Pangan Nasional
Tahun 2022-2024

Tujuan	Sasaran Startegis	Kebijakan	Arah Kebijakan
Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	Kebijakan menjamin ketersediaan pangan	1. Penguatan Cadangan/Stok Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan; 2. Pengendalian impor dan ekspor pangan; 3. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan; 4. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.
	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	Kebijkan menjamin keterjangkauan pangan	1. Penguatan Sistem Logistik Pangan Nasional; 2. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen; 3. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan; 4. Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, BUMN/BUMD pangan).
		Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	1. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; 2. Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana; 3. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; 4. Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat.
	Kebijakan Menjamin Pemanfaatan Pangan	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	1. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan; 2. Peningkatan kapasitas stakeholder sistem pangan dalam rangka jaminan keamanan dan mutu pangan segar.

Tujuan	Sasaran Startegis	Kebijakan	Arah Kebijakan
		Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	1. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA); 2. Peningkatan konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan local; 3. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*).
	Aspek Pendukung	Pengembangan Data dan Informasi Pangan	1. Integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis; *2. Platform* pangan berbasis *data driven;* 3. Pemanfaatan sistem informasi iklim untuk pengamanan ketersediaan pangan;
		Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	1. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokrasi, deregulasi dan digitalisasi; 2. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel

Sumber Data Renstra Badan Ketahanan Pangan Pusat Tahun 2020-2024

3.1.3. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada rancangan Renstra 2024-2026 adalah:

Tabel.3.2.
Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pada Rancangan Awal Renstra Tahun 2024-202

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi
Terwujudnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan	1. Meningkatnya Ketersedian Pangan yang Beragam	1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat; 2. Pemantauan dan Pengedalian Ketersediaan Pangan; 3. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi.
	2. Menurunnya Penduduk Rawan Pangan	1. Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. 2. Penguatan Pangan Bergizi untuk daerah Rentan Rawan Pangan dan terdampak bencana;
		3. Peningkatan Aksesibilitas Pangan bagi Masyarakat dari daerah surplus ke daerah deficit 4. Perluasan Akses Informasi Kerawanan Pangan dan Gizi
	3. Meningkatnya Stabilitas Harga Komoditas Pangan Strategis	Stabilisasi Harga Pangan di Produsen dan Konsumen Perluasan Akses Infromasi Ketersediaan, Harga dan Pasokan Pangan Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat yang Inklusif
	4. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) Peningkatan Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya dan kearifan local Pengendalian Pemborsan Pangan (Food Waste)

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi
	5. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Sehat dan Aman	Penguatan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Peningkatan Kapasitas Stakeholder system pangan dalam rangka jaminan keamanan dan mutu pangan segar

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan:

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan yang hendak dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima adalah *Meningkatnya Ketahanan Pangan Pangan Masyarakat d*engan Indikator Tujuan Indeks Ketahanan Pangan. Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikaor yang mampu menjelaskan ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yaitu Ketersediaa, Keterjangkauan/ Akses pangan, dan Pemanfaatan pangan.

Tujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran ke IV (Empat) Rencana Pemerintah Daerah 2022-2024 (RPD) yaitu:

"Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat"

Yang merupakan salah satu penjabaran dari tujuan Pertama RPD ***"Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing"***. Dan berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022-2026 yang kemudian di jabarkan ke dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tahun 2024.

Secara sistematis dapat diuraikaan pada tabel 3.3 berikut. Dan pada tabel 3.4 menjabarkan sasaran, program, indikator sasaran, indikator program, dan formula/penjelasan perhitungan indikator.

Tabel 3.3.

Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2024

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Mendukung Tujuan Pertama RPD Tahun 2024-2026: *"Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing"*.			
Sasaran Ke Empat RPD: *"Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat"*			
Tema Pembangunan RKPD 2024: 'Mempercepat pertumbhan ekonomi yang inklisif dan berkelanjutan melalui pengembangan SDM yang berdaya saing dan pengentasan kemiskinan"			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan	Peningkatan Kuantitas dan kualitas kersediaan pangan yang beragam	1. Penguatan Cadangan pangan daerah; 2. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan daerah; 3. Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat. 4. Penguatan System Kewaspadaan kerawanan Pangan dan Gizi; 5. Perluasan akses informasi kerawana pangan dan gizi; 6. Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana.
		Stabilitas pasokan dan harga pangan stabil ditingkat konsumen	1. Penguatan system logistik pangan daerah; 2. Stabilisasi harga pangan; 3. Perluasan akses informas ketersediaan, pasokan dan harga pangan; 4. Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku uasaha pangan, BUMD dibidang pangan); 5. Penyaluran Cadangan Pangan Pemeringah untuk daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana; 6. Peningkatan akesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit.
		Peningkan Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang aman Beragam Bergizi dan Seimbang	1. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi. Simbang dan aman (B2SA); 2. Peningkatan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; 3. Pengutan system jaminan keamanan dan mutu pangan; 4. Pengendalian pemborosan pangan (food waster)

Sumber: Hasil analisis dan Casecading

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan berdasarkan prioritas pembangunan yang tercantum pada RKPD Tahun 2024, dinas Ketahanan Pangan Kota Bima mendukung Prioritas Pembangunan Daerah pada aspek *Pembangunan Kesehatan*.

Tabel berikut menggambarkan secara sistematis prioritas pembangunan daerah menurut sasaran pada tujuan pembangunan.

Tabel 3.4.

Prioritas RKPD 2024 dan Sasaran Renja 2024

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator sasaran daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator sasaran PD (outcome)
	Meningkatnya kualitas	Terwujudnya Ketahanan		Meningkatnya Ketersediaan,	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator sasaran daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator sasaran PD (outcome)
	kesehatan masyarakat	Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan	Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Tabel 3.5.
Tujuan dan Sasaran PD

No	Tujuan dan Sasaran PD	Indikator tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran 2024
1.	Tujuan:		
1.1.	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	72,49
2.	Sasaran:		
2.1	Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	84
		Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	<10
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82,7

Tabel 3.6.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target Tujuan/ Sasaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
	Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bima yang Merupakan Tanggung Jawab Dinas Ketahanan Pangan				
1.	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	Formula: $Y(j) = \sum_{i=1}^{9} a_i X_{ij}$ Dimana: I : Indikator ke-1,2,3,...7,8 dan 9 J : Kabupaten ke-1,2,3,...414,415 dan kota ke-1,2,3,...96,97 dan 98 Y_j : Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/ Kota ke-j ai : Bobot masing-masing Indikator ke-i Xij : Nilai Standarisasi masing-masing indikator pada Kabupaten/Kota ke-j	72,49
	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan				
2.	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Formula : Rasio antara nilai skor PPH Ketersediaan tahun berjalan terhadap nilai yang dianjurkan PPH Ketersediaan: Hasil perhitungan PPH Ketersediaan dan NBM	84

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target Tujuan/ Sasaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
			Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	$CV = \frac{\text{Std. Deviasi Harga Pangan}}{\text{Rata-rata Harga Pangan tahun Berjalan}} \times 100$	<10
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) X bobot masing-masing kelompok pangan Rasio antara nilai skor PPH konumsi tahun berjalan terhadap nilai yang dianjurkan	82,7

Penjelasan singkat indikator Tujuan dan sasaran:

1. Indikator Tujuan: Indeks Ketahanan Pangan

   Pengertian: Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah.

   Perwujudan ketahanan pangan dicapai melalui 4 pilar yaitu: (1) Ketersediaan pangan (produksi dan import); (2) Cadangan pangan; (3) Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan (4) Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan terhadap penyediaan pangan tersebut. Pe

   Tujuan: Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk *mewujudkan ketersediaan pangan* yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; *tercapainya stabilitas* ketersediaan dan akses pangan secara makro dan mikro, *tercukupinya kualitas* (keragaman dan keamanan pangan) *dan kuantitas konsumsi pangan* yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabitas pasokan dan harga pangan. Dan sebagai bahan evaluasi dan bahan perumusan kebijakan ketersediaan pangan

   Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian (IKP Tahun 2018 s.d 2021) merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu (bulanan/tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Gambar. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi



2. Indikator Sasaran:
   a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan:

   Pengertian: Ketersediaan Energi dan Zat Gizi yang dihasilkan dari 11 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kulitas keragaman ketersediaan pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/ masyarakat. Yang digambarkan dari ketersediaan Energi, Ketersediaan Protein dan Lemak yang digambarkan dari hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM).

   NBM: memberikan informasi tentang ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya/produk turunannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. Penyediaan diperoleh dari jumlah total bahan pangan yang diproduksi dikurangi dengan perubahan stok ditambahkan dengan jumlah impor dan dikurangi dengan jumlah ekspor selama periode tersebut. Sedangkan penggunaan diperoleh dari jumlah total kebutuhan pakan, bibit, industri makanan dan non makanan, tercecer, dan penggunaan lain serta bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi manusia. Ketersediaan pangan per kapita untuk dikonsumsi diperoleh dengan membagi ketersediaan bahan makanan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

   NBM: menyajikan angka rata-rata bahan makanan per komoditas yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kilogram per kapita pertahun serta dalam gram per kapita per hari. Selanjutnya untuk mengetahui nilai gizi bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi tersebut, maka angka ketersediaan bahan makanan per kapita per hari dikonversi ke dalam satuan energi, protein, dan lemak.

   NBM bermanfaat untuk: (i) bahan evaluasi tentang pengadaan, penggunaan, dan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi sesuai rekomendasi kecukupan gizi dari Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012; (ii) Untuk penyusunan pola pangan harapan (PPH) tingkat ketersediaan; (iii) bahan acuan dalam perencanaan produksi/pengadaan pangan; (iv) bahan perumusan kebijakan pangan dan gizi; (v) bahan referensi bagi pemerhati pangan dan gizi

   Tujuan: dapat memberikan gambaran/data dan informasi tentang kondisi *ketersediaan/pengadaan* berbagai bahan pangan di Kota Bima yang mencakup penyediaan, penggunaan, dalam bentuk volume maupun zat gizi sehingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk.

   Dan sebagai bahan evaluasi dan bahan perumusan kebijakan ketersediaan pangan.

b. Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)

Pengertian: Stabilitas harga/pasokan menggambarkan fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga/pasokan selama kurun waktu tertentu. Semakin kecil fluktuasi harga/pasokan pada kurun waktu tersebut, maka kondisi harga/pasokan dikatakan stabil, dan sebaliknya.

Fluktuasi harga/pasokan pangan diukur dengan nilai koefisien variasi (CV). Target nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis nasional di tingkat konsumen untuk Tahun 2020 ditetapkan di bawah 10 - 30% (Untuk komoditas beras, jagung, kedelai, gula pasir, dan daging sapi maksimal 10%; bawang merah maksimal 25% dan cabai maksimal 30%)

Dasar: Undang-undang Nomor 18 Tahub 2012 tentang Pangan. Pasal 13 "Pemerintah **berkewajiban** mengelola **stabilisasi pasokan** dan **harga** Pangan Pokok, mengelola **cadangan** Pangan Pokok Pemerintah, dan **distribusi** Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat"

c. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Pengertian: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi adalah proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Jumlah skor PPH Konsumsi mansksimal 100. Dalam menghitung Skor PPH Konsumsi, dengan cara : mengkalikan antara presentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui pencapaian skor PPH. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100.

Tujuan:

untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis situasi konsumsi pangan, karena situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Untuk mencapai konsumsi energi dan PPH yang ideal perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber karbohidrat lainnya. Meskipun tren konsumsi umbi-umbian mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi energi penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan. Untuk itu, di masa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman.

3.2.1. Sasaran dan Fokus Kegiatan Tahun 2024

1. Pemerataan Kesejahteraan, Penanganan Kemiskinan dan Rawan Pangan:
   - Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) (APBD, APBD Provinsi dan APBN);
   - Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) (APBD dan APBD Provinsi)
2. Stabilitas harga dan Pasokan Pangan:
   - Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) / Toko Tani Indonesia (TTI);

- Monitoring Harga dan Pasokan Pangan
- Pemantauan Arus Distribusi Komoditas pangan
- Cadangan Pangan
- Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat LDPM)

3. Penigkatan Diversifikasi Pangan:
   - Gerakan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
4. Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT):
   - Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
5. Analisis, Kajian dan Kebijakan
   - Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
   - Monitoring Stok Beras di Penggilingan dan Pedagang
   - Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)
   - Neraca Bahan Makanan (NBM)
   - Prognosa Ketersediaan Pangan

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tahun 2024 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan RPD 2024-2026;
b. Pencapaian SDGs;
c. Pengentasan Kemiskininan;
d. Pencapaian NSPK dan SPM;
e. Pendayagunaan potensi daerah;
f. Pencapaian tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2024;
g. Pencapaian tujuan Indikator Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2024 dan
h. Prioritas terwujudnya ketahanan pangan masyarakat.

Berikut Program dan indikator Program Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Bima Tahun 2024, Pencapaian SDGs, Pencapaain NSPK

Tabel.3.7
Difinisi Operasional Variabel dan Formula Perhitungan setiap Indikator Kinerja Program Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
Tahun 2024

Program	Indikator	Satuan	Formulasi/ Definisi	Pencapaian			Keterangan	Sumber Data	Penanggungjawab
				RPD	SDGs	NSPK & SPM			
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	Gram/ kap/ hari	Hasil perhitungan PPH Ketersediaan dan NBM Rasio AKP = Konsumsi Protein X 100% (Terhadap AKP 57 Gram protein/kapita/ hari)	v	v	v	Penilaian terhadap konsumsi pangan penduduk secara kuantitas melalui volume konsumsi pangan penduduk gram/kap/hari dari konsumsi protein penduduk gram protein/kap/hari. Dengan perhitungan: Perbandingan antara protein penduduk terhadap Angka Kecukupan Protein sebesar 57 gram/kap/hari	BPS; Bulog; Dinas Pertanian; Dinas Kelautan dan Perikanan; Pelaku Usaha pangan;	Dinas Ketahanan Pangan, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	Kkal/ kap/ hari	Hasil perhitungan PPH Ketersediaan dan NBM Rasio AKE = Konsumsi Energi X 100% (Terhadap AKE 2100 Kkal/kapita/ hari)	v	v	v	Penilaian terhadap konsumsi pangan penduduk secara kuantitas melalui volume konsumsi pangan penduduk Kkal/kap/hari dari konsumsi Energi penduduk Kkal/kap/hari. Dengan perhitungan: Perbandingan antara protein penduduk terhadap Angka Kecukupan Protein sebesar 57 gram/kap/hari	BPS; Bulog; Dinas Pertanian; Dinas Kelautan dan Perikanan; Pelaku Usaha pangan;	Dinas Ketahanan Pangan, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase berkurangnya daerah rawan/ rentan pangan	Persen	Jumlah Daerah rentan rawan pangan (Prioritas 1-3 pada FSVA)/ Jumlah Daerah di Kota Bima x 100%	v	v	v	Situasi ketahanan pangan daerah berdasarkan Peta FSVA	BPS; Dinas Pertanian; Dinas Perikanan; Dinas Koperindag; Dinas Kesehatan; BPBD; BMKG; Bulog	Dinas Ketahanan Pangan, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Program	Indikator	Satuan	Formulasi/ Definisi	Pencapaian			Keterangan	Sumber Data	Penanggungjawab
				RPD	SDGs	NSPK & SPM			
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Produk Pangan Segar Asat Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Persen	Pengawasan dan pengujian terhadap produk pangan segar dengan parameter residu pestisida, logam berat, mikrobiologi dan mikotoksin. = (Sampel memenuhi persyaratan terhadap batas maksimum residu /Jumlah Total Sampel PSAT) X 100%	v	v	v	Pengawasan Keamanan PSAT dilakukan sebelum peredaran dan pada saat peredaran; Pengawasan sebelum peredaran dilakukan ditempat produksi, panen, pasca panen dan pengolahan minimal. Pengawasan pada saat peredaran dilakukan ditempat distribui, penyimpanan dan ritel	Dinas Ketahanan Pangan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

3.3.2. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2024 disusun mengacu kepada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2024-2026 yang mengacu kepada RPD Kota Bima Tahun 2024-2026. Pada tahun 2024 direncanakan ada 4 (empat) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 43 (Empat Puluh Tiga) Sub Kegiatan. Yang terdibagi menjadi 1 (satu) Program penunjang urusan ketahanan pangan terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan rutin. Adapun tujuan san sasaran program/kegiatan tahun 2024 ditetapkan indikator kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan, tagrget capaian kinerja, serta kebutuhan dana/pagu indikatif, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.8.
(Tabel T-C.33 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Bima
Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dinas Ketahanan Pangan				**4.579.188.430,00**				**5.037.107.273,00**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.579.188.430,00**				**5.037.107.273,00**
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**4.579.188.430,00**				**5.037.107.273,00**
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah		100 Persen	3.495.036.630,00				3.844.426.773,00
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	20.125.000,00				22.137.500,00
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	2 Dokumen	6.575.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	7.232.500,00
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	2 Dokumen	1.655.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.820.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	2 Dokumen	1.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.144.000,00
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	2 Dokumen	695.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	764.500,00
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	2 Dokumen	576.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	633.600,00
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	2 Dokumen	9.584.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	10.542.400,00
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi		100 Persen	2.606.089.080,00				2.866.697.988,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						keuangan perangkat daerah							
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	26 Orang/bulan	2.478.405.080,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26 Orang/bulan	2.726.245.588,00
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	150 Dokumen	124.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 Dokumen	136.444.000,00
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Laporan	2.764.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.040.400,00
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	14 Laporan	880.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Laporan	968.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 Persen	750.000,00				825.000,00
2	09	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	14 Laporan	750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Laporan	825.000,00
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		100 Persen	10.241.400,00				11.265.540,00
2	09	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Dokumen	826.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	908.600,00
2	09	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Dokumen	2.645.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.910.490,00
2	09	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	45 Orang	6.769.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Orang	7.446.450,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	285.986.200,00				314.584.820,00
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Paket	6.575.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	7.232.500,00
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Paket	29.898.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	32.888.460,00
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Paket	9.621.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	10.583.540,00
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Paket	32.481.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	35.729.650,00
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	25 Laporan	207.409.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Laporan	228.150.670,00
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100 Persen	315.899.450,00				355.070.100,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	50 Unit	43.782.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	48.160.200,00
2	09	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Unit	76.364.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	84.000.400,00
2	09	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Unit	195.753.450,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	222.909.500,00
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	135.305.500,00				148.836.050,00
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	12 Laporan	72.395.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	79.634.610,00
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Laporan	56.765.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	62.441.940,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Laporan	6.145.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.759.500,00
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	120.640.000,00				125.009.775,00
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Unit	39.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	38.291.000,00
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	7 Unit	11.430.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	11.434.500,00
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	11 Unit	10.270.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	8.129.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	1 Unit	59.940.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	67.155.275,00
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan		3444 KKal/kap/hari	807.804.500,00				888.689.670,00
						Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan		127 Gram/kap/hari					
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan		100 Persen	190.890.400,00				209.979.440,00
2	09	03	2.01	001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	62.429.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	68.671.900,00
2	09	03	2.01	016	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	- Kota Bima, Semua Kecamatan,	1 Laporan	20.278.200,00	Dana Transfer Umum-Dana		1 Laporan	22.306.020,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Semua Kel/Desa			Alokasi Umum			
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	64.901.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	71.391.100,00
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	43.282.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	47.610.420,00
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap kebutuhan berdasarkan anjuran yang ditetapkan		20 Persen	410.834.100,00				451.917.510,00
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	36.732.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	40.405.200,00
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	28.551.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	31.406.100,00
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Bima, Semua	25 Ton	295.890.000,00	Dana Transfer Umum-		25 Ton	325.479.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Kecamatan, Semua Kel/Desa			Dana Alokasi Umum			
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Ton	49.661.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Ton	54.627.210,00
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi		3444 KKal/kap/hari	206.080.000,00				226.792.720,00
						Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi		127 Gram/kap/har					
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	115.960.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	127.644.220,00
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	90.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	99.148.500,00
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase berkurangnya daerah rawan/ rentan pangan		1 Peren	147.807.700,00				162.588.470,00
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan		10 Kelurahan	147.807.700,00				162.588.470,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	147.807.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	162.588.470,00
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Produk Pangan Segar Asat Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan		100 Persen	128.539.600,00				141.402.360,00
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan keamanan pangan yang kompeten		85 Persen	128.539.600,00				141.402.360,00
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	41.133.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	45.249.600,00
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	41.401.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	45.542.200,00
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	46.004.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	50.610.560,00
TOTAL									**4.579.188.430,00**				**5.037.107.273,00**

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Ketahanan Pangan merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD dan Renstra Dinas Ketahaan Pangan tahun 2024-2026.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima 3 (tiga) program utama ketahanan pangan dengan 6 (enam) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan. Dan terdapat 1 program penunjang urusan ketahanan pangan dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Program-program ini guna pendayagunaan potensi ekonomi daerah, utamanya pemanfaatan pangan lokal yang ada di Kota Bima, serta mendukung pencapaian target standar pelayanan minimal (SPM), NSPK, SDGs urusan Ketahanan Pangan yang diharapkan dicapai di tahun 2024.

Pendanaan program dan kegiatan tahun 2024 akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima. Untuk mendukung pencapaian target kinerja OPD akan diupayakan melalui pembiayaan dari dana APBN maupun Coorporate Social Responsibility (CSR) dari pihak luar.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan
Prioritas Pembangunan Kota Bima

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan (SIPD RI) Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Dinas Ketahanan Pangan								4.579.188.430,00					5.037.107.273,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								4.579.188.430,00					5.037.107.273,00
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								4.579.188.430,00					5.037.107.273,00
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.495.036.630,00					3.844.426.773,00
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								20.125.000,00					22.137.500,00
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	6.575.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.232.500,00
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	1.655.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.820.500,00
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	1.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.144.000,00
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	695.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	764.500,00
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	576.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	633.600,00
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	9.584.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.542.400,00
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.606.089.080,00					2.866.697.988,00
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangk	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	26 Orang/bulan	100 Persen	2.478.405.080,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.726.245.588,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								at daerah										
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	150 Dokumen	100 Persen	124.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	136.444.000,00
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	2.764.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.040.400,00
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	14 Laporan	100 Persen	880.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	968.000,00
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								750.000,00					825.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	09	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	14 Laporan	100 Persen	750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	825.000,00
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								10.241.400,00					11.265.540,00
2	09	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangk	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	826.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	908.600,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								at daerah										
2	09	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	2.645.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.910.490,00
2	09	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	45 Orang	100 Persen	6.769.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	7.446.450,00
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								285.986.200,00					314.584.820,00
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	1 Paket	100 Persen	6.575.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.232.500,00
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Bima, Mpunda, Panggi	100 Persen	1 Paket	100 Persen	29.898.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.888.460,00
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	1 Paket	100 Persen	9.621.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.583.540,00
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	1 Paket	100 Persen	32.481.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.729.650,00
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Penatoi	100 Persen	25 Laporan	100 Persen	207.409.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	228.150.670,00
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								315.899.450,00					355.070.100,00
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	50 Unit	100 Persen	43.782.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	48.160.200,00
2	09	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud													
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	1 Unit	100 Persen	76.364.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	84.000.400,00
2	09	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	1 Unit	100 Persen	195.753.450,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	222.909.500,00
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								135.305.500,00					148.836.050,00
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	72.395.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	79.634.610,00
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	56.765.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	62.441.940,00
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Bima, Mpunda, Penatoi	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	6.145.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.759.500,00
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								120.640.000,00					125.009.775,00
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Unit	100 Persen	39.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.291.000,00
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	7 Unit	100 Persen	11.430.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	11.434.500,00
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	11 Unit	100 Persen	10.270.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	8.129.000,00
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Unit	100 Persen	59.940.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	67.155.275,00
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								807.804.500,00					888.689.670,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								190.890.400,00					209.979.440,00
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan													
						Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3444 KKal/kap/hari 127 Gram/kap/hari	2 Laporan	100 Persen	62.429.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	68.671.900,00
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3444 KKal/kap/hari 127 Gram/kap/hari	1 Laporan	100 Persen	20.278.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	22.306.020,00
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3444 KKal/kap/hari 127 Gram/kap/hari	1 Dokumen	100 Persen	64.901.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	71.391.100,00
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3444 KKal/kap/hari 127 Gram/kap/hari	1 Unit	100 Persen	43.282.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	47.610.420,00
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								410.834.100,00					451.917.510,00
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap kebutuhan berdasarkan anjuran yang ditetapkan	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127 Gram/kap/har 3444 KKal/kap/hari	4 Laporan	20 Persen	36.732.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	40.405.200,00
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Persentase cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap kebutuhan berdasarkan anjuran yang ditetapkan	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127 Gram/kap/har 3444 KKal/kap/hari	1 Dokumen	20 Persen	28.551.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	31.406.100,00
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap kebutuhan berdasarkan anjuran yang ditetapkan	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127 Gram/kap/har 3444 KKal/kap/hari	25 Ton	20 Persen	295.890.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25 Ton	325.479.000,00
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Persentase cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap kebutuhan berdasarkan anjuran yang ditetapkan	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127 Gram/kap/har 3444 KKal/kap/hari	25 Ton	20 Persen	49.661.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	25 Ton	54.627.210,00
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								206.080.000,00					226.792.720,00
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3444 KKal/kap/hari 127 Gram/kap/har	1 Dokumen	2067,24ed Kka/kap/hari 114,21 Gram/kap/har	115.960.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	127.644.220,00
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3444 KKal/kap/hari 127 Gram/kap/har	1 Laporan	2067,24 ed Kka/kap/hari 114,21 Gram/kap/har	90.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	99.148.500,00
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								147.807.700,00					162.588.470,00
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								147.807.700,00					162.588.470,00
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Persentase berkurangnya daerah rawan/ rentan pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan daerah	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Peren	12 Laporan	1 Dokumen	147.807.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	162.588.470,00
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								128.539.600,00					141.402.360,00
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								128.539.600,00					141.402.360,00
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase Produk Pangan Segar Asat Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Persentase pengawasan keamanan pangan yang kompeten	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	85 Persen	41.133.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	45.249.600,00
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Persentase Produk Pangan Segar Asat Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan keamanan pangan yang kompeten	- Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	85 Persen	41.401.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	45.542.200,00
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase Produk Pangan Segar Asat Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan keamanan pangan yang kompeten	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	85 Persen	46.004.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.610.560,00
												TOTAL	**4.579.188.430,00**					**5.037.107.273,00**

BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 ini disusun dalam rangka pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah digariskan dalam RPD Kota Bima Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan merupaakan proses pencapaian tujuan Dinas Ketahanan Pangan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2024, Rentra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2024-2026, Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tahun 2022 serta dari permasalahan dan potensi-potensi yang ada dengan mendasarkan metode pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintahan, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk pengembangan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Diharapkan, dengan berpedoman pada Renja 2024 ini, pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kota Bima dapat lebih terarah untuk mencapai sasaran yang diharapkan, dalam rangkaian pembangunan jangka menengah Kota Bima 2024-2026.

Kota Bima, 2024

Kepala Dinas,

ICHWANUL MUSLIMIN. SP. MM
Pembina Tk. I /IV.b
NIP. 19720229 200501 1 005

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA BIMA - TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BIMA
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata da Kebudayaan Kota Bima Tahun 2024. Penyusunan Rencana kerja merupakan salah satu upaya sistematis Dinas Pariwisata Kota Bima dalam melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan untuk mewujudkan Pelestarian, Pengembangan Budaya Lokal baik Adat istiadat maupun Seni dan Atraksi Tradisional, Pengembangan Pengelolaan Obyek Wisata Alam dan pembangunan sarana prasarana pendukung baik sarana prasarana pariwisata serta sarana prasarana olah raga dan juga peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pariwisata, Pemuda dan Olaharaga Kota Bima merupakan upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pembangunan Sektor Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga secara menyeluruh dan merata. Selain itu Rencana Kerja Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Bima Tahun 2020 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunan di Sektor Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga khususnya di Kota Bima.

Demikian penyusunan Rencana Kerja ini dibuat, atas dukungan berbagai pihak disampaikan terima kasih.

Kota Bima, Juni 2023

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima,

MUHAMMAD NATSIR, M.Pd
NIP. 19731025 200501 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

SK PENYUSUNAN RENJA 2024 ii

DAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUAN.....4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 9

1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II : HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 10

2.1. Evaluasi Pelaksaan Renja PD dan Capaian Renstra PD …….. ….10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 16

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas da Fungsi PD 17

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD 18

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 23

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 24

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 24

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 29

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....33

BAB V : PENUTUP 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bima dengan peradaban Budaya Dou Mbojo yang sudah mengakar sejak jaman kerajaan hingga sekarang masih dapat terlihat dalam kehidupan masyarakat Kota Bima dalam kesehariannya. Baik System, Budaya dan Seni tradisional yang melekat pada kegiatan Upacara Adat, Prosesi Pernikahan, Khataman Qur”an, Khitanan dan lain-lain serta bukti-bukti sejarah Kerajaan dan Kesultanan masih juga dapat dilihat sebagai Situs, Kepurbakalaan dan bahkan menjadi Objek Daya Tarik Wisata yang ada di Kota Bima dan menjadi objek kunjungan bagi wisatawan 4yste, nusantara bahkan mancanegara.

Disisi lain, sumber daya alam Kota Bima juga memiliki daya tarik tersendiri sebagai Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) karena Kota Bima berada di bibir Teluk Bima yang sangat indah yang menawarkan berbagai atraksi wisata laut dan pantai seperti; berenang, berperahu, memancing, bersantai, melihat kehidupan masyarakat nelayan serta menikmati makanan khas desa tradisional nelayan. Disisi lain alam dan hutan serta hamparan sawah yang luas juga dapat dilihat di Kota Bima sebagai 4yste potensial wisata alam yang pada saat nya nanti akan menjadi salah satu Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) andalan bagi Kota Bima.

Disisi lain, Kebijakan Pemerintah, Pemuda Dan Olaharaga Kota Bima untuk mengembangkan sektor pariwisata telah memicu pembangunan terutama pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata seperti : Hotel, Losmen, Home Stay, Bungalow, Rumah Makan, Restoran, Bar/Cafe, Travel Agen, Money Changer, Pusat perbelanjaan dan Pusat pelayanan informasi. Kegiatan-kegiatan yang menjadi pendukung kegiatan kepariwisataan di Kota Bima telah dapat memberikan peranan dan kontribusi yang cukup besar terhadap percepatan pembangunan daerah

terutama terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja dan peningkatan lapangan usaha sehingga pemerintah Kota Bima menetapkan sektor Kebudayan dan Pariwisata sebagai sektor andalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbazis ekonomi kerakyatan.

Keseriusan pemerintah Kota Bima dalam mengembangkan sektor pariwisata ditunjukan dengan keseriusannya mengalokasikan dana guna membangun, memperbaiki dan mengembangkan berbagai macam infrastuktur dikawasan wisata utamanya kawasan Teluk Bima sebagai Destinasi Unggulan Kota Bima .

Untuk mempercepat proses pengembangan pariwisata sesuai harapan pemerintah maka pemerintah segera merumuskan langkah yang tepat, efektif dan terpadu sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bima untuk Tahun 2024. Dimana rencana kerja merupakan landasan awal perencanaan, pengembangan serta pengelolaan kegiatan kepariwisataan sekaligus sebagai upaya dalam memberikann informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan selama Tahun bersangkutan untuk mencapai target dan sasaran program kegiatan Dinas Pariwisata Kota Bima.

Dengan berpedoman pada Rencana kerja ini, seluruh sumber daya yang ada di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Bima dapat menyelenggarakan program kegiatan secara sistimatis, konsisten, seimbang dan berkesinambungan sehingga pencapaian program kegiatan dapat terlaksana dengan mudah serta dapat mencapai sasarannya.

Pengembangan sektor Pariwisata di Kota Bima dalam tahapan pembangunan daerah telah dapat memberikan peranan dan kontribusi yang cukup besar terhadap percepatan pembangunan daerah terutama terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja dan peningkatan lapangan usaha sehingga

pemerintah Kota Bima menetapkan sektor Pariwisata sebagai sektor andalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbazis ekonomi kerakyatan.

Disisi lain julukan Kota Bima sebagai salah satu Daerah Transit / persinggahan bagi wisatawan untuk mengunjungi Daerah Tujuan Wisata (*International Tourism Object*) antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur harus kita upayakan sebagai salah satu *Main Core* yang dapat kita manfaatkan untuk memperpanjang waktu singgah / *lenght of stay* wisatawan.

Sehingga dapat merubah imej Kota Bima tidak lagi menjadi daerah persinggahan / *transit* tetapi melainkan Daerah Tujuan Wisata Unggulan dengan mengemas seluruh sumber dan potensi wisata yang ada, baik wisata alam, wisata Bahari, Wisata Religius, wisata peninggalan sejarah serta wisata budaya yang didalamnya dihiasi berbagai kegiatan adat dan atraksi kesenian daerah, sehingga salah satu *icon* / merek Kota Bima sebagai ***Traditional Art And Various Civilization*** (daerah beragam Seni Budaya Tradisional). Sehingga dalam konstelasi pengembangan berbagai obyek wisata di Kota Bima yang terstruktur maka patut direncanakan pengembangannya dalam sebuah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA) sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan pengembangan Pariwisata dan Pemuda Olahraga di Kota Bima yang berkesinambungan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Rencana Kerja Pengembangan Pariwisata tahun 2024 diarahkan untuk pengembangan destinasi kawasan Wisata Teluk Bima, Pembinaan dan pengembangan Wisata Budaya dalam bentuk pembinaan seni budaya, aktualisasi atraksi-atraksi budaya dalam even-even budaya serta peningkatan sarana dan prasaranan pendukung sektor pariwisata lainnya serta pembinaan pemuda dan olah raga.

Keberhasilan pembangunan pariwisata pemuda olahraga sesuai rencana yang tertuang dalam Renja 2024 ini perlu dilakukan secara profesional, terpadu (lintas sektoral dan kewilayahan), serta didukung oleh sistem jasa dan layanan yang handal serta diperkuat oleh sistem dan strategi pemasaran yang aktif, terfokus, dan terpadu.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bima Tahun 2024 mengacu pada beberapa Peraturan Perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tantang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tengang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2003 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota ;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas – Dinas Daerah Kota Bima ;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tentang Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2013;
19. Keputusan Walikota Bima Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Bima.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olaharaga Kota Bima adalah sebagai berikut :

1. Maksud :

Untuk memberikan arah dan pedoman Rencana Kerja dalam melaksanakan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bima dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Bima.

2. Tujuan :

   a. Mengetahui kondisi umum dan rencana program / kegiatan menuju tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Bima.
   b. Merencanakan Program Kegiatan Tahun 2024 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bima berdasarkan perencanaan dan pengembangan kawasan hingga atraksi wisata serta standar pelayanan minimal dan jenis pelayanan sehingga dapat menciptakan optimalisasi pelayanan Dinas Pariwisata Kota Bima.
   c. Sebagai bahan evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kota Bima.

1.4. Sistimatika Penulisan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bima disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam mengevaluasi hasil Perencanaan Rencana Kerja tahun lalu perlu pengukuran kinerja sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi. Pengkuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari sumber internal dan eksternal Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bima, baik data Primer maupun Sekunder

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dapat di evaluasi dengan sebarapa banyak / prosentase program kegiatan yang di rencanakan dengan rencana program kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi Rencana Kerja secara umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Bima

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				**Urusan Pariwisata**	**Kontribusi PDRB sektor pariwisata**	**10%**	**10%**	**10%**			**10%**	**10%**	**10%**
1	02			**Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata**									
1	02	02		**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Pengembangan ODTW**	**32%**	**32%**	**32%**			**32%**	**32%**	**100%**
1	**02**	**02**	**01**	**Pengelolaan Daya tarik Wisata Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Dayatarik Wisata yang di kelola**	**2 Lokasi**	**2 Lokasi**	**2 Lokasi**			**2 Lokasi**	**2 Lokasi**	**100%**
				Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota			40 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	02	02	02	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi peningkatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1	**02**	**02**	**03**	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten Kota**	**Jumlah Kawasan strategis yang di kelola)**	**2 kawasan**	**2 kawasan**	**2 kawasan**			**2 kawasan**	**2 kawasan**	**100%**
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota)	7 Unit	7 Unit	10 Unit			25 Unit	25 Unit	100%
				Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota	**Persentase Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota**	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata kabuapaten / kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi			2 Lokasi	2 Lokasi	100%
1	01			**Bidang Pemasaran Pariwisata**									

1	01	01		**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**32%**	**32%**	**32%**			**32%**	**32%**	**100%**
1	**01**	**01**	**01**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasidan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Dayatarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**
1	01	01	02	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik dDalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen hasil Penguatan Promosi Melalui Media cetak, Elektronik dan Media lainnya baik dalam dan luar negeri	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1	01	01	03	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri	6 Laporan	6 Laporan	14 Laporan			4 Laporan	4 Laporan	100%
				Penyedian Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Propinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyedian Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	03			**Bidang Ekonomi Kreatif**									
1	03	01		**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM Kepariwisataan yang terlibat**	**32,5%**	**32,5%**	**32,5%**			**32,5%**	**32,5%**	**100%**
1	**03**	**01**	**01**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasa**	**Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**
1	03	01	02	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlahi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya	80 Orang	80 Orang	50 Orang			60 Orang	60 Orang	100%
1	03	01	03	Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	40 Orang	0 Orang	80 Orang			10 Orang	10 Orang	100%
				Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah Laporan HasilFasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	100%
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Berkembang**						**100%**	**100%**	**100%**
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						2 Orang	2 Orang	100%
				Urusan Kebudayaan									
				Bidang Kebudayaan									

				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase SDM Kebudayaan yang dibina**			**30%**			**30%**	**30%**	**100%**
				Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	**Persentase Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota**			**100%**			**100%**	**100%**	**100%**
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						6 Orang	6 Orang	100%
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**100%**			**100%**	**100%**	**100%**
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			5 Objek			5 Objek	5 Objek	**100%**
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			5 Laporan			5 Laporan	5 Laporan	100%
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Persentase Cagar Budaya Yang Diletariakan dan Dikelola**			**40%**			**40%**	**40%**	**100%**
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Jumlah cagar budaya yang ditetapkan**			**8 Objek**			**5 Objek**	**5 Objek**	**100%**
				Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan			8 Objek			5 Objek	5 Objek	100%
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			**100%**			**100%**	**100%**	**100%**
				Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan			13 Objek			1 Objek	1 Objek	**100%**
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	**Persentasi capain program penunjang urusan pemerintah daerah kabupatrn/kota**	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	100%
				Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Persentase Terwujudnya Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**
				Penyusuana dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	3 Dok			2 Dok	2 Dok	100%
				Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	4 Dok			2 Dok	2 Dok	**100%**
				Evaluasi kinerja perankat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	3 Dok			2 Dok	2 Dok	100%

				Administrasi keuangan perangkat daerah	**Persentase terwujudnya Administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**
				Penyedian gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	33 Orang	34 Orang			35 Orang	35 Orang	100%
				Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian / fervikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			12 Dokumen	12 Dokumen	**100%**
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir thun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	100%
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semeteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	**100%**
				Penyusunan pelaporan dan analisa prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	100%
				Administrasi umum perangkat daerah	**Persentase pemenuhan layanan Administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**
				Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	42 Paket	43 Paket			20 paket	20 paket	100%
				Penyedian barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	500 blok	500 blok	1 Paket			10 Paket	10 Paket	**100%**
				Penyedian Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	25 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	**100%**
				Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	42 Laporan			24 Laporan	24 Laporan	**100%**
				Penyedian jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	**Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**
				Penyedian jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	**100%**
				Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	100%

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**
				Penyedian jasa pemiliharaan, biaya pemiliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kenaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 pralatan	35 pralatan	1 Unit			1 Unit	1 Unit	100%
				Penyedian jasa pemiliharaan, biaya pemiliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas operasional atu lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 Unit	10 unit			10 Unit	10 Unit	**100%**
				Pemiliharan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	25 Unit			20 Unit	20 Unit	100%
				Pemiliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit			2 Unit	2 Unit	**100%**

Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan tujuan, misi dan visi. Mulai dari visii sampai dengan kegiatan harus terdapat hubungan turunan. Oleh karena itu antara turunan dengan yang menurunkan harus selaras dan mempunyai hubungan logis, sehingga tidak semua komponen di dalam renstra yang diukur capaian kinerjanya. Komponen yang diukur kinerjanya hanya sasaran dan kegiatan.

Akumulasi pencapaian sasaran otomatis akan mewujudkan tujuan, akumulasi pencapaian tujuan otomatis misi diemban dengan baik, dan bila misi dapat diemban dengan baik maka visi dapat diwujudkan. Semua komponen tersebut mempunyai kaitan logis dan sebagai strategisnya adalah pelaksanaan program dan kegiatan. Renstra Dinas Pariwisata Kota Bima tahun 2024 s/d 2026 sudah terdapat kaitan logis mulai dari kegiatan sampai ke pencapaian visi dalam pelaksanaanya sampai dengan tahun 2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan tujuan, misi dan visi. Mulai dari visii sampai dengan kegiatan harus terdapat hubungan turunan. Oleh karena itu antara turunan dengan yang menurunkan harus selaras dan mempunyai hubungan logis, sehingga tidak semua komponen di dalam renstra yang diukur capaian kinerjanya. Komponen yang diukur kinerjanya hanya sasaran dan kegiatan.

Akumulasi pencapaian sasaran otomatis akan mewujudkan tujuan, akumulasi pencapaian tujuan otomatis misi diemban dengan baik, dan bila misi dapat diemban dengan baik maka visi dapat diwujudkan. Semua komponen tersebut mempunyai kaitan logis dan sebagai strategisnya adalah pelaksanaan program dan kegiatan. Renstra Dinas Pariwisata Kota Bima tahun 2024 s/d 2026 sudah terdapat kaitan logis mulai dari kegiatan sampai ke pencapaian visi dalam pelaksanaanya sampai dengan tahun 2024 Seperti yang terlihat pada tabel berikut

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Bima

No	Indikator	SPM/stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)	(13)
	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke ODTW	Jumlah kunjungan wisatawan ke ODTW tahun n-(n-1) dibagi Jumlah kunjungan wisatawan ke ODTW tahun n-1 dikali 100%	Jumlah kunjungan wisatawan ke ODTW tahun n-(n-1) dibagi Jumlah kunjungan wisatawan ke ODTW tahun n-1 dikali 100%	10%	10%	10%	10%	-52,94%	11,2%	-	10%	
	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina	Jumlah Nilai Budaya, Adat dan Tradisi yang dibina dibagi Nilai Budaya, Adat dan Tradisi yang ada di Kabupaten/Kota dikali 100%	Jumlah Nilai Budaya, Adat dan Tradisi yang dibina dibagi Nilai Budaya, Adat dan Tradisi yang ada di Kabupaten/Kota dikali 100%	-		6,3%	6,3%	-	-	-	6,3%%	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan khusunya pada urusan kebudayaan dan pariwisata. Adapun isu – isu sentral yang harus diupayakan untuk dapat diprioritaskan dalam kurun waktu yang harus ditentukan dan sedapat mungkin dapat dilaksanakan dalam kegiatan rutin atau tahunan. Beberapa isu penting itu antara lain:

1. Penambahan Event kebudayaan dalan mengapresiasikan seni tradisional masyarakat sehingga pelestarian dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat dapat terlaksana secara berkelanjutan
2. Pelestarian dan Perlindungan asset dan peninggalan sejarah kepurbakalaan (Cagar Budaya) yang harus dimaksimalkan sehingga penghargaan serta pemahaman sejarah masyarakat Bima bisa diketahui oleh para generasi sebagai educational information resource.
3. Perlunya memberikan bantuan dan penghargaan kepada sanggar-sanggar seni pada masing-masing kelurahan 1 (satu) sanggar seni guna menggali dan melestarikan budaya tradisional Bima dalam rangka menjadikan Kota Bima sebagai Kota ***Seribu Atraksi Seni Budaya***.

4. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan
5. Melaksanakan dan mengefektifkan kemitraan kegiatan kepariwisataan dengan masyarkat dan stakeholder pariwisata.
6. Kajian serta perencanaan secara multi sektoral terkait dengan pengembangan kawasan wisata sampai pada atraksi wisata yang berkelanjutan.
7. Penataan kawasan, obyek daya tarik serta atraksi wisata secara komprehensif dan kontinyu dengan tidak mengabaikan lingkungan dan keberlanjutannya.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Pelaksanaan RKPD yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata sudah dapat dikatakan sangat relevan dengan kondisi kerja dan tantangan yang ada pada urusan pariwisata dan pemuda olahraga, hal ini dapat dilihat dari program kegiatan yang telah tertuang dalam RKPD yang sudah menghimpun segala bentuk kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan yang ada pada masyarakat Kota Bima.

Begitupun halnya dengan hasil peleksanaan program kegiatan tersebut, yang mana sudah mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan, baik evaluasi kinerja program, kegiatan maupun evaluasi sasarannya. Seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Bima

Nama Perangkat Daerah:Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima Lembar…….dari……

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Kota Bima**	**Persentase Pengembangan ODTW**	**32%**	**11.160.438.000**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Kota Bima**	**Persentase Pengembangan ODTW**	**32%**	**11.160.438.000**	
	Pengelolaan Daya tarik Wisata Kabupaten/ Kota	**Kota Bima**	Jumlah Dayatarik Wisata yang di kelola	2 Lokasi	**103.612.000**	**Pengelolaan Daya tarik Wisata Kabupaten/ Kota**	**Kota Bima**	Jumlah Dayatarik Wisata yang di kelola	2 Lokasi	**103.612.000**	
	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya	2 Dokumen	64.362.000	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya	2 Dokumen	64.362.000	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Dokumen Rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik	4 Dokumen	39.250.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Dokumen Rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik	4 Dokumen	39.250.000	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten Kota	**Kota Bima**	Jumlah Kawasan strategis yang di kelola)	2 kawasan	**556.826.000**	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten Kota**	**Kota Bima**	Jumlah Kawasan strategis yang di kelola)	2 kawasan	**556.826.000**	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	25 Unit	556.826.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	25 Unit	556.826.000	
	Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota	**Kota Bima**	Persentase Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota	100%	**10.500.000.000**	**Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota**	**Kota Bima**	Persentase Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota	100%	**10.500.000.000**	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah destinasi pariwisata kabuapaten / kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	**10.500.000.000**	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah destinasi pariwisata kabuapaten / kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	**10.500.000.000**	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Kota Bima**	**Persentase Peninmgkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**10%**	**1.067.097.900**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Kota Bima**	**Persentase Peninmgkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**10%**	**1.067.097.900**	

	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasidan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	**Kota Bima**	**Persentase Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasidan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**	**100%**	**1.067.097.900**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasidan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**	**Kota Bima**	**Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**100%**	**1.067.097.900**	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik dDalam dan Luar Negeri	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	271.157.500	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik dDalam dan Luar Negeri	Kota Bima	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Dayatarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	271.157.500	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	726.189.900	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Bima	Jumlah Dokumen hasil Penguatan Promosi Melalui Media cetak, Elektronik dan Media lainnya baik dalam dan luar negeri	4 Laporan	726.189.900	
	Penyedian Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Propinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	69.750.500	Penyedian Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Propinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Bima	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	69.750.500	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Kota Bima**	**Persentase SDM Kepariwisataan yang terlibat**	**32,5%**	496.540.279	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Kota Bima**	**Persentase SDM Kepariwisataan yang terlibat**	**32,5%**	496.540.279	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Bima	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100%	367.566.800	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Kota Bima	**Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	100%	367.566.800	
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Bima	Jumlahi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan	60 Orang	108.400.000	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Bima	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi	60 Orang	108.400.000	
	Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Kota Bima	Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang	10 Orang	89.626.800	Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Kota Bima	Jumlahi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan	10 Orang	89.626.800	
	Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Kota Bima	Jumlah Laporan HasilFasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	169.540.000	Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Kota Bima	Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	2 Laporan	169.540.000	
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Kota Bima**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Berkembang**	**100%**	**128.973.479**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Kota Bima**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Berkembang**	**100%**	**128.973.479**	

	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	**Kota Bima**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	**2 Orang**	128.973.479	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	**Kota Bima**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	**2 Orang**	128.973.479	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Kota Bima**	**Persentase SDM Kebudayaan yang dibina**	**30%**	**625.731.700**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Kota Bima**	**Persentase SDM Kebudayaan yang dibina**	**30%**	**625.731.700**	
	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	**Kota Bima**	**Persentase Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota**	100%	**94.436.300**	**Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota**	**Kota Bima**	**Persentase Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota**	100%	**94.436.300**	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	6 Orang	94.436.300	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Bima	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Orang	94.436.300	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bima**	**Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**531.295.400**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**531.295.400**	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Bima	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	218.317.400	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Bima	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	218.317.400	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Bima	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5 Laporan	312.978.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Bima	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5 Laporan	312.978.000	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Kota Bima**	**Persentase Cagar Budaya Yang Diletariakan dan Dikelola**	**40%**	**139.621.600**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Kota Bima**	**Persentase Cagar Budaya Yang Diletariakan dan Dikelola**	**40%**	**139.621.600**	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Kota Bima**	**Jumlah cagar budaya yang ditetapkan**	**5 Objek**	119.877.600	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Jumlah cagar budaya yang ditetapkan**	**5 Objek**	119.877.600	
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kota Bima	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	119.877.600	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kota Bima	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	119.877.600	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Kota Bima**	**Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**100%**	19.744.000	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**100%**	19.744.000	
	Pemanfaatan Cagar Budaya	Kota Bima	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	19.744.000	Pemanfaatan Cagar Budaya	Kota Bima	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	19.744.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Kota Bima**	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	**100%**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kota Bima**	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	**100%**		

	Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Kota Bima**	Persentase Terwujudnya Perencanaan, anggaran, penganggaran dan	**100%**	**32.773.200**	**Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Kota Bima**	Persentase Terwujudnya Perencanaan, anggaran, penganggaran dan	**100%**	**32.773.200**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2.597.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2.597.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dok	19.580.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dok	19.580.200	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	10.596.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	10.596.000	
	Administrasi keuangan perangkat daerah	**Kota Bima**	**Persentase terwujudnya Administrasi keuangan**	**100%**	**3.714.561.386**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Kota Bima**	**Persentase terwujudnya Administrasi keuangan**	**100%**	**3.714.561.386**	
	Penyedian gaji dan tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3.521.571.386	Penyedian gaji dan tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3.521.571.386	
	Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian / fervikasi keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	157.200.000	Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian / fervikasi keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	157.200.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir thun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	14.910.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir thun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	14.910.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semeteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	12 Laporan	16.286.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semeteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	12 Laporan	16.286.000	
	Penyusunan pelaporan dan analisa prognosis realisasi anggaran	Kota Bima	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	2 Laporan	4.594.000	Penyusunan pelaporan dan analisa prognosis realisasi anggaran	Kota Bima	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	2 Laporan	4.594.000	
	Administrasi umum perangkat daerah	**Kota Bima**	**Persentase pemenuhan layanan Administrasi**	**100%**	**503.016.600**	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Kota Bima**	**Persentase pemenuhan layanan Administrasi**	**100%**	**503.016.600**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 paket	86.360.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 paket	86.360.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	10 Paket	70.926.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	10 Paket	70.926.600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	12.880.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	12.880.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bima	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	32.850.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bima	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	32.850.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	24 Laporan	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	24 Laporan	300.000.000	
	Penyedian jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	**Kota Bima**	**Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang**	**100%**	**230.999.940**	**Penyedian jasa penunjang Urusan pemerintah daerah**	**Kota Bima**	**Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang**	**100%**	**230.999.940**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 Laporan	171.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 Laporan	171.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan	59.999.940	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan	59.999.940	

	Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Kota Bima**	**Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**156.130.500**	**Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Kota Bima**	**Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**156.130.500**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.349.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.349.700	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	45.480.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	45.480.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	27.300.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	27.300.800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	2 Unit	37.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	2 Unit	37.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Community Base Tourism (pariwisata berbasis masyarakat) merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima khususnya urusan Pariwisata,Kepemudaan dan Olahraga mengingat dampak yang sangat meninjol yang terjadi oleh kegiatan Pariwisata adalah masyarakat lokal terutama yang ada disekitar objek daya tarik wisata (ODTW). Begitupun dengan dampak ekonomi yang dihasilkan sangat luas dan mampu menggerakan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Beberapa usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada urusan Pariwisata, Kepemudaan olahraga Kota Bima sudah banyak yang di akomodir dan dilaksanakan secara terus menerus dan berlanjut setiap tahunnya, terutama pada **Program pengembangan pemasaran pariwisata, Program pengembangan industri dan kemitraan pariwisata dan Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga**. usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Bima

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bima

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan destinasi pariwisata kabuapaten / kota	Kota Bima	Jumlah destinasi pariwisata kabuapaten / kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	pemangku kepentingan pengusul

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Berbagai organisasi internasional antara lain PBB, Bank Dunia dan World Tourism Organization (WTO), telah mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azazi manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang termasuk pula Indonesia. Pertumbuhan pariwisata di dunia mengakibatkan Indonesia menjadi sadar akan pentingnya pariwisata bagi perekonomian dan taraf hidup bangsa. Pendapatan terbesar Republik Indonesia berasal dari dua sektor yaitu migas dan non migas.

Berbicara mengenai pariwisata, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya dan alam yang luar biasa sebagai *basic needs of tourism.* Letak yang strategis diantara dua benua dan dua samudra menjadikan alam Indonesia memiliki perpaduan - perpaduan yang tentunya mengundang wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Untuk mendukung kepariwisataan di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah terus melakukan peningkatkan atau mengembangkan serta terus melestarikan kebudayaan tradisional untuk menunjang pariwisata dan kebudayaan nasional. Jika di lihat dari sektor eksternalnya yakni dengan mengadakan pembangunan sarana dan prasaranya, (infrastruktur) dari semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian barjalan sedemikian rupa sehingga memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan. Misalnya mempersiapkan sarana hotel yang bertaraf internasional, mempermudah sarana komunikasi dan memperlancar sarana transportasi baik darat, laut maupun udara dalam skala internasional dan sarana dan prasarana olahraga. Oleh karena itu Pengembangan

pariwisata di Indonesia sangatlah penting, hal ini sangat terlihat jelas dengan dimasukannya keberadaan pariwisata dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) melalui ketetapan MPR NO 11/ MPR/ 1993.

"*pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan Negara, serta penerimaan devisa meningkat dengan terpeliharanya kepribadian bangsa serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup serta peningkatan prestasi cabang olahraga."*

Pembangunan kepariwisataan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang melibatkan seluruh kegiatan masyarakat, bangsa dan negara untuk terwujudnya salah satu aspek dari kepentingan nasional. Sektor pariwisata dalam pengembangannya diharapkan dapat menempati posisi utama untuk menggantikan sektor migas sebagai salah satu pilar penopang devisa negara. Masalah pariwisata merupakan suatu hal yang sudah mendunia. Masing masing negara berusaha mempromosikan potensi yang berhubungan dengan kepariwisataannya. Dalam konteks regional, Indonesia pun terus berupaya untuk terus mempromosikan potensi kepariwisataannya. Tiap tahun angka kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara terus mengalami peningkatan, sehingga telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan global sebagai akibat dari perkembangan dunia pariwisata, baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, dorongan orang untuk melakukan perjalanan wisata, cara berfikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan sektor kepariwisataan secara global serta peningkatan arus kunjungan wisatawan internasional, maka secara tidak langsung telah berdampak kepada kebutuhan penyediaan segala komponen atau produk-

produk pariwisata. Penyediaan produk-produk pariwisata tersebut (*supply side*) dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang mencakup penyediaan sarana dan prasarana alat transportasi, akomodasi, agen perjalanan, makanan dan minuman, tour operator, pramuwisata dan barang souvenir wisata lainnya baik pada skala nasionasl, regional bahkan lokal / Kabupaten dan Kota.

Untuk mendukung industri pariwisata, khususnya dalam rangka penyediaan seluruh komponen industri pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata termasuk Kabupaten / Kota bahkan pedesaan (*rural tourism*), maka perlu dilakukan suatu perencanaan yang baik dan terpadu dengan melibatkan seluruh unsur terkait, seperti pemerintah, tenaga ahli pariwisata, masyarakat setempat (yang terlibat dalam usaha wisata) dan para pemangku kepentingan lainnya. Perencanaan penyediaan produk-produk wisata tersebut tidak hanya akan berdampak positif dalam rangka menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata (DTW), namun juga untuk memotivasi para pelaku industri pariwisata untuk lebih innovatif, kreatif dan menciptakan nilai tambah (value added) terhadap berbagai produk atau pelayanan (services) yang akan diberikan kepada para wisatawan yang akan berkunjung terutama sekali pada daerah obyek wisata unggulan yang ada di Kabupaten / Kota di indonesia yang masih sangat kental nuansa seni budaya tradisional dan alamnya termasuk Nusa Tenggara Barat yang sudah menjadi kawasan unggulan pariwisata di indonesia bersama dengan Sumatera Barat, Sulawesi Utara dan selatan serta Nusa Tenggara Timur .

Sangat disadari bahwa pengembangan pariwisata sebagai suatu industri strategis memerlukan investasi yang sangat besar, seperti perbaikan aksesibilitas (jembatan, dan jalan) dari dan ke daerah tujuan wisata, pembangunan hotel dengan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh para wisatawan, jaringan angkutan wisata (darat, laut dan udara) yang perlu diperluas, pembangkit tenaga listrik yang perlu ditingkatkan,

penyediaan air bersih yang harus diciptakan, sarana dan jaringan komunikasi yang perlu diperluas, SDM para pelaku bisnis pariwisata yang perlu ditingkatkan, promosi, pemasaran produk-produk pariwisata unggulan ke dalam dan luar negeri yang perlu ditingkatkan dan kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan suatu daerah wisata.

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dewasa ini pada hakikatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Salah satu aspek pembangunan yang penting adalah pengembangan dalam bidang ekonomi, dimana kepariwisataan termasuk salah satu sektor pembangunan yang diharapkan. Pembangunan kepariwisataan indonesia sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan bertujuan untuk turut mewujudkan peningkatan kepribadian bangsa dan masyarakat indonesia yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Melalui pembangunan kepariwisataan yang dilakukan secara komprehensif dan integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, budaya dan kondisi geografis diseluruh wilayah republik indonesia secara arif, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Sehingga kegiatan pariwisata mampu memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti; sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan tehnologi, keterkaitan lintas sektor, kerjasama antar negara, pemberdayaan usaha kecil serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya, sehingga secara implisit pembangunan pariwisata juga mampu mendorong pembangunan daerah sehingga mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendorong pemanfaatan potensi dan kapasitas masing-masing daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang dapat membangun pariwisata nusantara dalam memupuk persatuan dan cinta tanah air.

Kebijakan pariwisata nasional merupakan kebijakan dasar dari pengembangan pariwisata regional dan daerah sehingga terjadi kesinambungan dengan kegiatan di propoinsi dan daerah, begitupula halnya dengan struktur organisasi yang secara hirarkis masih memiliki kesamaan tugas dan fungsinya. Disisi lain prioritas pembangunan pariwisata di utamakan kepada daerah – daerah yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. Kemudian program dan strategi pemasaran yang dikemas sesuai dengan produk unggulan dan objek – objek wisata yang layak dijual. Bahkan Kementrian Kebudayaan dan pariwisata telah mengalokasikan dana khusus bagi daerah-daerah baik propinsi maupun Kabupaten/Kota yang memiliki objek dan destinasi unggulan yang layak untuk dipromosikan baik skala regional maupun internasional. Peraturan perundangan kepariwisataan, kebijakan – kebijakan sosial budaya, lingkungan dan ekonomi yang secara hirarkis dilakukan oleh pemerintah pusat, pendidikan dan latihan pariwisata masih dilakukan secara sentral guna menyamakan pemahaman serta kemampuan mengembangkan ide – ide yang inovatif terhadap kegiatan kepariwisataan, begitu pula halnya dengan sosialisasi kepada daerah terhadap standarisasi pengembangan fasilitas, desain dan sistim pelayanan masih dilakukan oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata khususnya Ditjen – Ditjen yang membawahi langsung kegiatan – kegiatan tersebut.

Rencana Pengembangan Pariwisata Nasional juga dibuat dengan berbagai pertimbangan dan alasan untuk dapat dilaksanakan pada level regional (propinsi) maupun Kabupaten / Kota), dimana kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang mampu memberi kontribusi dan manfaat yang maksimal terhadap kegiatan pariwisata di segala sektor dengan berbagai alasan;

1. Ekonomis,

- Adanya kontribusi pendapatan masyarakat (pengusaha jasa pariwisata dan masyarakat lokal)
- Penciptaan lapangan kerja
- Kontribusi neraca pembayaran
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Diversifikasi kegiatan ekonomi dan ekspor

2. Politis
   - Konsep dasar di bidang politik adalah pendekatan keamanan
   - Peraturan dan prosedural keluar masuk negara
   - Menjalin hubungan dengan negara lain (internasional)
   - Mampu menjadi duta dalam menjaga citra dan nama negara dimata dunia
   - Serta pengakuan ke – integrasian.
3. Lingkungan Hidup dan Tata Guna Lahan
   - Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
   - Kompetesi penggunaan tanah
   - Kebutuhan infrastruktur
4. Kebutuhan Koordinasi
   - Lintas Sektoral
   - Jenis Produk Komposit
   - Pengembangan terpadu dengan citra yang sama
5. Sosial Budaya
   - Bangga atas budaya asli (Penggalian dan penciptaan budaya dari budaya indonesia sampai pada tataran budaya lokal / tradisional)
   - Konsevasi Budaya (Menjaga dan Melestarikan budaya indonesia juga budaya lokal / tradisional)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Sebagai upaya mencapai **VISI** dan **MISI** Pemerintah Kota Bima maka ditetapkan beberapa **TUJUAN** pembangunan dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor Pariwisata
2. Meningkatkan pengembangan kebudayaan

Sedangkan **SASARAN** yang akan dicapai dalam mencapai Tujuan :

1. Meningkatnyam kunjungan wisatawan
2. Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran Perangkat Daerah dengan format tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator sasaran daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator sasaran PD (outcome)
1	Pariwisata	Meningkatknya pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kunjungan wisatawan	persentase peningkatan kunjungan wisatawan
2	Kebudayaan	Meningkatnya kualitas pendidikan	Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat Daerah dengan tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan dan Sasaran PD	Indikator tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran
	Tujuan:		
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor Pariwisata	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	10%
2	Meningkatkan pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	6,3%
	Sasaran		
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	persentase peningkatan kunjungan wisatawan	10%
2	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina	6,3%

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, seperti disajidakan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	IKU	Indikator IKU	Target Kinerja IKU
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	**Jumlah kunjungan wisatawan ke ODTW tahun n−** (**n−1** dibagi **Jumlah kunjungan wisatawan ke ODTW tahun** n-1 dikali 100%	10%
2	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Jumlah Nilai Budaya, Adat dan Tradisi yang dibina dibagi Nilai Budaya, Adat dan Tradisi yang ada di Kabupaten/Kota dikali 100%	6,3%

3.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2024 sebagai tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima 2024-2026. Selain untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dipengaruhi oleh:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah. Program dan kegiatan direncanakan

dan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan Kota Bima sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Bima.

b. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah. Pariwisata menjadi salah satu motor penggerak perekonomian Kota Bima.
c. Memperhatikan upaya – upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pencapaian SDGs. Dinas Pariwisata tidak mempunyai program kegiatan khusus untuk pengentasan kemiskinan, namun program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisisata dan Kebudayaan Kota Bima mendukung upaya pengentasan kemisikinan.

Dengan telah ditetapkannya kebijakan dan program-program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima, maka selanjutnya masing-masing program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan indikatif sebagai upaya sistematis guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Perlu diketahui bahwa program-program yang telah ditetapkan ada yang bersifat penunjang dari pelaksanaan visi dan misi Dinas dan yang bersifat teknis yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Adapun kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Bidang Kepariwisataan Kabupaten Lumajang dalam mencapai target dan sasaran serta percepatan program dan dukungan terhadap fokus tematik “Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Usaha Mikro dan Parawisata” dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Progam Utama dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima
Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Kota Bima**	**Persentase Pengembangan ODTW**	**32%**	**11.160.438.000**	DAU
Pengelolaan Daya tarik Wisata Kabupaten/ Kota	**Kota**	**Jumlah Dayatarik Wisata yang**	**2 Lokasi**	**103.612.000**	DAU

	Bima	**di kelola**			
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	64.362.000	DAU
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Dokumen Rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	4 Dokumen	39.250.000	DAU
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten Kota	**Kota Bima**	**Jumlah Kawasan strategis yang di kelola)**	**2 kawasan**	**556.826.000**	**DAU**
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota)	25 Unit	556.826.000	DAU
Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota	**Kota Bima**	**Persentase Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota**	**100%**	**10.500.000.000**	**DAU**
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah destinasi pariwisata kabuapaten / kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	10.500.000.000	DAU
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Kota Bima**	**Persentase Peninmgkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**10%**	**1.067.097.900**	**DAU**
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasidan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	**Kota Bima**	**Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**100%**	**1.067.097.900**	**DAU**
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik dDalam dan Luar Negeri	Kota Bima	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Dayatarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	271.157.500	DAU
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Bima	Jumlah Dokumen hasil Penguatan Promosi Melalui Media cetak, Elektronik dan Media lainnya baik dalam dan luar negeri	4 Laporan	726.189.900	DAU
Penyedian Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Propinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Bima	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	69.750.500	DAU
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Kota Bima**	**Persentase SDM Kepariwisataan yang terlibat**	**32,5%**	496.540.279	DAU
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Kota Bima**	**Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**100%**	**367.566.800**	**DAU**
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kota	Jumlahi SDM Pariwisata dan	60 Orang	108.400.000	DAU

Tingkat Dasar	Bima	Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya			
Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Kota Bima	Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	10 Orang	89.626.800	DAU
Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Kota Bima	Jumlah Laporan HasilFasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	169.540.000	DAU
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Kota Bima**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Berkembang**	**100%**	**128.973.479**	DAU
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2 Orang	128.973.479	DAU
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Kota Bima**	**Persentase SDM Kebudayaan yang dibina**	**30%**	**625.731.700**	DAU
Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	**Kota Bima**	**Persentase Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota**	**100%**	**94.436.300**	**DAU**
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	6 Orang	94.436.300	DAU
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bima**	**Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**531.295.400**	DAU
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Bima	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	218.317.400	DAU
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Bima	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5 Laporan	312.978.000	DAU
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Kota Bima**	**Persentase Cagar Budaya Yang Diletariakan dan Dikelola**	**40%**	**139.621.600**	DAU
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Kota Bima**	**Jumlah cagar budaya yang ditetapkan**	**5 Objek**	119.877.600	DAU
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kota Bima	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	119.877.600	DAU
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Kota Bima**	**Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**100%**	19.744.000	DAU
Pemanfaatan Cagar Budaya	Kota Bima	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	19.744.000	DAU

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Kota Bima**	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	**100%**		DAU
Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Kota Bima**	**Persentase Terwujudnya Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas**	**100%**	**32.773.200**	**DAU**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2.597.000	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	19.580.200	DAU
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	10.596.000	DAU
Administrasi keuangan perangkat daerah	**Kota Bima**	**Persentase terwujudnya Administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**3.714.561.386**	DAU
Penyedian gaji dan tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3.521.571.386	DAU
Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian / fervikasi keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	157.200.000	DAU
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir thun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.910.000	DAU
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semeteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	16.286.000	DAU
Penyusunan pelaporan dan analisa prognosis realisasi anggaran	Kota Bima	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	4.594.000	DAU
Administrasi umum perangkat daerah	**Kota Bima**	**Persentase pemenuhan layanan Administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**503.016.600**	DAU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	86.360.000	DAU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	70.926.600	DAU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1 Dokumen	12.880.000	DAU

Perundang-undangan		Perundang-Undangan yang Disediakan			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bima	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	32.850.000	DAU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	300.000.000	DAU
Penyedian jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	**Kota Bima**	**Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah**	**100%**	**230.999.940**	DAU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	171.000.000	DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59.999.940	DAU
Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Kota Bima**	**Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**156.130.500**	DAU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.349.700	DAU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	45.480.000	DAU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	27.300.800	DAU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	37.000.000	DAU

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Prioritas pembangunan, Pencapaian SDGs, Pengurangan kemiskinan, Pengurangan

ketimpangan pendapatan dan wilayah, Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), Pencapaian IKU, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Untuk menghasilkan upaya kinerja yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Bima Tahun Anggaran 2024, maka diharapkan juga untuk meningkatkan dan memelihara mutu Lembaga pelayanan Pemerintah melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara berkelanjutan dan dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas tentang program kegiatan yang akan dilakukan dan sasarannya, sehingga dapat meningkatkan sikap, mental dan pola pikir serta kualitas aparatur dalam melayani masyarakat.

Rencana Program dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat kami uraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/Kegiatan

No	Sasaran PD	Nama Program/Kegiatan
1	Porsentase peningkatan kunjungan wisatawan	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** - Pengelolaan Daya tarik Wisata Kabupaten/ Kota - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten Kota - Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota **Program Pemasaran Pariwisata** - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif** - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
2	Persentase nilai budaya, adat	**Program Pengembangan**

	dan tradisi yang dibina	**Kebudayaan** - Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya** - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Perioritas Pembangunan Kota Bima terdapat dalam Misi Kota Bima yang kedua yang berbunyi “Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan”. Terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima pada Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Bima

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Ket
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** 1. Pengelolaan Daya tarik Wisata Kabupaten/ Kota 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten Kota 3. Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota	Rp. 103.612.000 Rp. 556.826.000 Rp. 10.500.000.000	
		Program Pemasaran Pariwisata 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Rp. 1.067.097900	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata		

		Dan Ekonomi Kreatif 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Rp. 367.556.800 Rp. 128.973.479	
		Program Pengembangan Kebudayaan 1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 94.436.300 Rp. 531.294.400	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional 1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp. 119.877.600 Rp. 19.744.000	

Rencana Kerja tahun 2024, dari 5 (lima) Program urusan Pariwisata dan Kebudayaan serta 1 Progran penunjang urusan pemerintah daerah yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima, semuanya siap dilaksanakan dan mencapai sasarannya, kemudian terdapat 15 (lima belas) kegiatan serta terdapat 35 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan strategis yang ingin diwujudkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima, Lokasi Program dan Kegiatan sendiri meliputi beberapa Kawasan di Kota Bima diantaranya di Kelurahan Kolo dan Kelurahan Dara sebagai destinasi Utama Pariwisata Kota Bima serta beberapa kawasan dilakukannya kegiatan Kebudayaan. Dari beberapa Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima membutuhkan total dana indikatif sebesar Rp. 18.126.911.105 (Delapan belas juta miliar seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus sebelas ribu seratus lima ribu rupiah) yang bersumber dari

dana alokasi umum (DAU) Kota Bima. Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Persentase Pengembangan ODTW**	**Kota Bima**	**32%**	**11.160.438.000**			**32%**	12.276.481.800
				Pengelolaan Daya tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dayatarik Wisata yang di kelola	**Kota Bima**	2 Lokasi	**103.612.000**	**DAU**		2 Lokasi	113.973.200
				Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata	**Kota Bima**	2 Dokumen	64.362.000	DAU		2 Dokumen	70.798.200
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi peningkatan	Kota Bima	4 Dokumen	39.250.000	DAU		4 Dokumen	43.175.000
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten Kota	Jumlah Kawasan strategis yang di kelola)	**Kota Bima**	2 kawasan	**556.826.000**	**DAU**		2 kawasan	612.508.600
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan	Kota Bima	25 Unit	556.826.000	DAU		7 Unit	612.508.600
				Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota	Persentase Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota	**Kota Bima**	100%	**10.500.000.000**	**DAU**		100%	11.550.000.000
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata kabuapaten / kota yang dikembangkan	Kota Bima	2 Lokasi	**10.500.000.000**	DAU		2 Lokasi	11.550.000.000
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Persentase Peninmgkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**Kota Bima**	**10%**	**1.067.097.900**			**32%**	1.173.807.690
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasidan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	**Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**Kota Bima**	**100%**	**1.067.097.900**	**DAU**		100%	1.173.807.690

				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik dDalam dan Luar Negeri	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Dayatarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Bima	3 Dokumen	271.157.500	DAU		3 Dokumen	298.273.250
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil Penguatan Promosi Melalui Media cetak, Elektronik dan Media lainnya baik dalam dan luar negeri	Kota Bima	4 Laporan	726.189.900	DAU		14 Laporan	798.808.890
				Penyedian Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Propinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri	Kota Bima	2 Dokumen	69.750.500	DAU		3 Dokumen	76.725.550
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase SDM Kepariwisataan yang terlibat**	**Kota Bima**	**32,5%**	496.540.279			**32,5%**	546.194.307
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Kota Bima**	100%	367.566.800	**DAU**		100%	404.323.480
				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlahi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya	Kota Bima	60 Orang	108.400.000	DAU		50 Orang	119.240.000
				Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Kota Bima	10 Orang	89.626.800	DAU		80 Orang	98.589.480
				Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah Laporan HasilFasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Bima	2 Laporan	169.540.000	DAU		2 Laporan	186.494.000
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Berkembang**		**100%**	**128.973.479**				141.870.827
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi		**2 Orang**	128.973.479				141.870.827

				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase SDM Kebudayaan yang**	**Kota Bima**	**30%**	**625.731.700**			**30%**	688.304.870
				Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	**Persentase Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota**	**Kota Bima**	100%	**94.436.300**	**DAU**		**100%**	103.879.930
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	Kota Bima	6 Orang	94.436.300	DAU		Objek	103.879.930
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**100%**	**531.295.400**			**100%**	584.424.940
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kota Bima	5 Objek	218.317.400	DAU		Objek	240.149.140
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya	Kota Bima	5 Laporan	312.978.000	DAU		Laporan	344.275.800
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Persentase Cagar Budaya Yang Diletariakan dan Dikelola**	**Kota Bima**	**40%**	**139.621.600**			**40%**	153.583.760
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Jumlah cagar budaya yang ditetapkan**	**Kota Bima**	**5 Objek**	119.877.600	**DAU**		**Objek**	131.865.360
				Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kota Bima	5 Objek	119.877.600	DAU		Objek	131.865.360
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat**	**Kota Bima**	**100%**	19.744.000	**DAU**		**100%**	21.718.400
				Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Kota Bima	1 Objek	19.744.000	DAU		Objek	21.718.400
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**100%**					
				Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Persentase Terwujudnya Perencanaan,**	**Kota Bima**	**100%**	**32.773.200**	**DAU**		**100%**	36.050.520

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	2 Dok	2.597.000	DAU		2 Dokumen	2.856.700
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	2 Dok	19.580.200	DAU		2 Dokumen	21.538.220
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	2 Dok	10.596.000	DAU		3 Laporan	11.655.600
				Administrasi keuangan perangkat daerah	**Persentase terwujudnya Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Kota Bima**	**100%**	**3.714.561.386**	**DAU**		**100%**	4.086.017.525
				Penyedian gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Kota Bima	35 Orang	3.521.571.386	DAU		2 Dokumen	3.873.728.525
				Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian / fervikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Kota Bima	12 Dokumen	157.200.000	DAU		1 Laporan	172.920.000
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir thun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Bima	1 Laporan	14.910.000	DAU		1 Laporan	16.401.000
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semeteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Kota Bima	12 Laporan	16.286.000	DAU		1 Dokumen	17.914.600
				Penyusunan pelaporan dan analisa prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bima	2 Laporan	4.594.000	DAU		2 Dokumen	5.053.400
				Administrasi umum perangkat daerah	**Persentase pemenuhan layanan Administrasi umum perangkat**	**Kota Bima**	**100%**	**503.016.600**	**DAU**		**100%**	553.318.260
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	20 paket	86.360.000	DAU		43 Paket	94.996.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Kota Bima	10 Paket	70.926.600	DAU		1 Paket	78.019.260
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Kota Bima	1 Dokumen	12.880.000	DAU		4 Dokumen	14.168.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bima	12 Laporan	32.850.000	DAU		25 Laporan	36.135.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Kota Bima	24 Laporan	300.000.000	DAU		42 Laporan	330.000.000
				Penyedian jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	**Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah**	**Kota Bima**	**100%**	**230.999.940**	**DAU**		**100%**	254.099.934
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kota Bima	12 Laporan	171.000.000	DAU		400 Laporan	188.100.000

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bima	12 Laporan	59.999.940	DAU		3 Laporan	65.999.934
				Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Kota Bima**	**100%**	**156.130.500**	**DAU**		**100%**	171.743.550
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kota Bima	1 Unit	46.349.700	DAU		1 Unit	50.984.670
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Kota Bima	10 Unit	45.480.000	DAU		10 unit	50.028.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bima	20 Unit	27.300.800	DAU		25 Unit	30.030.880
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bima	2 Unit	37.000.000	DAU		1 lokasi	40.700.000

BAB V
PENUTUP

Percepatan Desentralisasi merupakan langkah dan peluang untuk meningkatkan pembangunan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan daerah, namun disisi lain merupakan tantangan yang perlu pendekatan dan pembelajaran yang sistematis, bertahap serta terencana dan terarah.

Keterbatasan Sumber Daya Manuasia (SDM), Pembiayaan dan peralatan merupakan hambatan sekaligus tantangan yang perlu pemecahan secara cepat melalui capacity building, peningkatan akses dan mutu.

Adanya kendala dalam penyusunan perencanaan memerlukan proses pembelajaran secara kreatif, inovatif bagi Tim Perencana Kota (TPK) dan kepedulian dari pemegang kebijakan serta semua *stakeholder* yang terkait.

Dengan disusunya Rencana Kerja sebagai acuan rencana dalam melaksanakan program / kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima tahun 2021 dapat memberikan arah program pembangunan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang muncul dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bima yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Kota Bima, Juni 2023

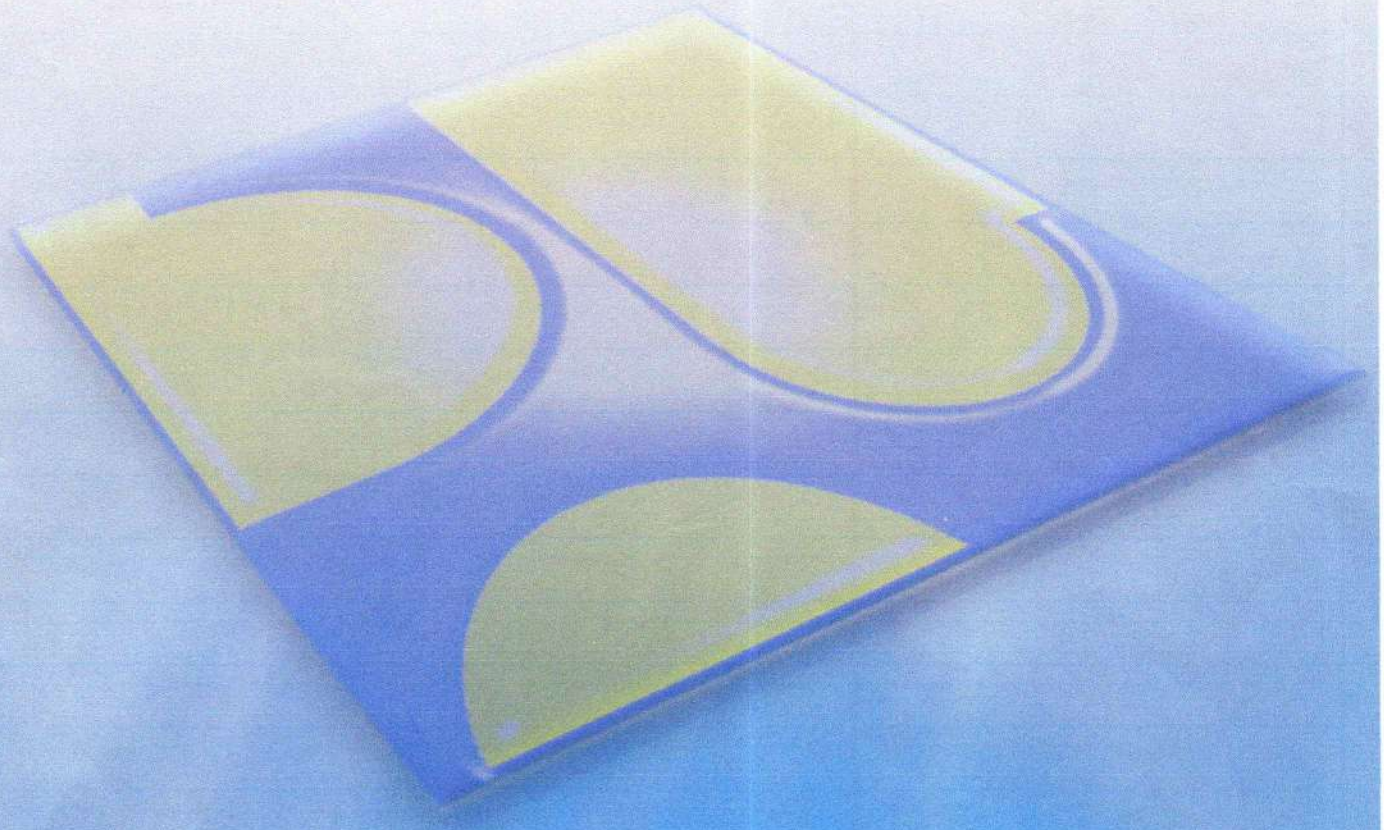
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima,

PEMERINTAH KOTA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

MUHAMMAD NATSIR, M.Pd
NIP. 19731025 200501 1 010

RENCANA KERJA OPD (RENJA)

Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KOTA BIMA

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Jl. Gatot Subroto No.01 Telp. 0374 – 646441

TAHUN 2022

PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmad dan hidayahNyalah kita dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 hingga selesai.

Sehubungan dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88), serta Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja OPD Kota Bima, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bima perlu menindaklanjuti dengan menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Harapan kami Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 dan tentunya saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan guna kelancaran dalam implementasinya.

Kota Bima, Oktober 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kota Bima,

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

AGUS PURNAMA, S.T.,M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670818 199603 1 005

DAFTAR ISI

PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Restra Perangkat Daerah 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 31
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 33
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 91
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 91
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 93
3.3 Program dan Kegiatan 97
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 109
BAB V PENUTUP 126

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Realisasi indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 5

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) Kota Bima 13

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima 31

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Bima 37

Tabel 2.5. Usulan Musrenbang Untuk Tahun 2025 67

Tabel 3.1. Prioritas dan Sasaran di Tahun 2025 93

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 95

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 96

Tabel 4.1. Sasaran dan Program/Kegiatan 2025 110

Tabel 4.2. Sasaran dan Program/Kegiatan 2025 112

Tabel 4.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 115

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis dan terarah, mengacu pada peraturan yang ada dinyatakan bahwa setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan Kebijakan Pembangunan Kota Bima, dalam Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima memprioritaskan program dan kegiatan untuk terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
4. Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan;
11. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
12. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028.

21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2025.
22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2007 tetang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima;
23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;
24. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
25. Peraturan Walikota Bima Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
26. Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan Pembangunan (merealisasikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) selama satu tahun (2025).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 adalah Untuk menjabarkan Tujuan, Kebijakan, Program, Kegiatan, sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, sebagai upaya mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Restra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Restra Perangkat Daerah

Pada Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima terdapat target dan indikator sampai pada sub kegiatan, Realisasi indikator program/Kegiatan/ terhadap target adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Realisasi indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2023 (5/4)
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEKERJAAN UMUM				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100,00%
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**100,00%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**100%**	**100,00%**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan pada perangkat daerah	71 Orang/ Bulan	71 Orang/ Bulan	100,00%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**100,00%**
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100,00%
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100,00%**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangDisediakan	29 buah	29 buah	100,00%
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	250 Paket	250 Paket	100,00%
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	100,00%
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100,00%**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100,00%

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28 Laporan	28 Laporan	100,00%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100,00%**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	100,00%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 unit	8 unit	100,00%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	49 Unit	100,00%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,00%
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peninngkatan luas area pertanian yang dilayani irigasi teknis	2,310%	2,363%	102,29%
7	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peninngkatan luas area pertanian yang dilayani irigasi teknis**	**2,310%**	**2,363%**	**102,29%**
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 dokumen	5 dokumen	250,00%
2	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1,250 Km	0,952 Km	76,16%
3	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	1 unit	2 unit	200,00%
4	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,5 Km	0,230 Km	46,00%
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00%

8	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peninngkatan luas area pertanian yang dilayani irigasi teknis**	**2,310%**	**2,363%**	**102,29%**
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,6 Km	0,460 Km	76,67%
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,3 Km	3,815 Km	1271,67%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Porsentase Rumah tangga pengguna air bersih	2,920%	3,074%	105,28%
9	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penduduk yang memperoleh akses air minum layak**	**2,920%**	**3,074%**	**105,28%**
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	50 SR	50 SR	30,00%
3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	150 SR	275 SR	183,33%
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	500 SR	986 SR	197,20%
5	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100,00%
6	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	1 Penyelenggara SPAM	1 Penyelenggara SPAM	100,00%
7	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	100,00%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses IPAL Domestik	**2,920%**	1,879%	64,36%
10	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses IPAL Domestik**	**2,920%**	**1,879%**	**64,36%**
1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	780 SR	780 SR	100,00%

2	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	1 unit	1 unit	1 Unit
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik**	**4,410%**	**3,267%**	**74,09%**
11	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik**	**4,410%**	**3,267%**	**74,09%**
1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Terbangun	2000 meter	4816,49 meter	240,82%
2	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Terpelihara	1500 meter	3282 meter	218,80%
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Sistem Jaringan	5 Sistem Jaringan	0,00%
12	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**5 Sistem Jaringan**	**5 Sistem Jaringan**	**0,00%**
1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Sistem Jaringan	5 Sistem Jaringan	100,00%
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Jumlah terselenggaranya urusan bangunan gedung (IMB, SLF dan TABG)**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**100,00%**
13	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah dokumen yang diterbitkan**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**100,00%**
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Laporan Jumlah IMB yang diterbitkan, Jumlah SLF dan Jumlah gambar teknik yang diverifikasi dan direkomendasikan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kualitas infrastruktur skala lingkungan	5 Kawasan	5 Kawasan	**100,00%**
14	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatkan kualitas infrastruktur skala lingkungan**	**5 Kawasan**	**5 Kawasan**	**100,00%**
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang terdata dan ditata	3 Kawasan	3 Kawasan	100,00%
2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah jalan lingkungan yang dipelihara	2 Kawasan	2 Kawasan	100,00%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Kondisi Mantap Jalan Kota	2,430%	**1,760%**	**72,42%**

15	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Kota**	**2,430%**	**1,760%**	**72,42%**
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen Perencanaan jalan dan Jembatan	2 Dokumen	8 Dokumen	400,00%
2	Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen Leger Jalan	2 Dokumen	2 Dokumen	350,00%
3	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Database Kondisi Jalan dan Jembatan di Kota Bima	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%
4	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun	0,9 Km	3,023 Km	335,89%
5	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang di Rekonstruksi	1,2 Km	8,055 Km	671,25%
6	Pemeliharaan Berkala Jalan	Mempertahankan Kondisi Mantap Jalan	3,52 Km	5,802 Km	164,83%
7	Pemeliharaan Rutin Jalan	Mempertahankan Kondisi Mantap Jalan	4,8 Km	16,774 Km	349,46%
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi Komponen Jasa Konstruksi Sesuai Standar	15 Badan Usaha	15 Badan Usaha	100%
16	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Badan Usaha Konstruksi sesuai standar**	**15 Badan Usaha**	**15 Badan Usaha**	100%
1	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Badan Usaha Konstruksi sesuai standar	15 Badan Usaha	15 Badan Usaha	100%
17	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Data Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**
1	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Data Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya	3,650%	21,610%	454,25%
18	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang**	**3,650%**	**21,610%**	**454,25%**
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Subtansi RDTRK	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Kebijakan	1 kali	1 kali	100,00%
19	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang**	**3,650%**	21,610%	454,25%

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi TKPRD untuk izin investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
20	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Database Pemanfataan Ruang Kota Bima**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100,00%**
1	Sistem Informasi Penataan Ruang	Database Pemanfataan Ruang Kota Bima	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
21	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang**	**6 Dokumen**	**9 Dokumen**	**100,00%**
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rapat koordinasi penataan ruang daerah	6 Dokumen	9 Dokumen	100,00%

Faktor - faktor yang mempengaruhi Pemenuhan target adalah sebagai berikut:

1) Adanya komitmen dari semua pihak pengambil kebijakan agar memprioritaskan kegiatan – kegiatan untuk mencapai target indikator – indikator capaian kinerja.
2) Ada tidaknya kegiatan survey dan pandataan terhadap indikator – indikator capaian kinerja sehingga metode perhitungan maupun data yang digunakan sesuai dengan dilapangan.
3) Pelaksanaan pekerjaan yang sesuai peraturan dan tepat waktu
4) Ada tidaknya peralatan atau sumber daya penunjang pemeliharaan Prasarana dan sarana yang telah terbangun.
5) Adanya sosialisasi kepada masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan pembangunan.
6) Adanya koordinasi dengan instansi - instansi yang terkait dalam pembangunan.

Selain itu ada hambatan atau masalah sebagai berikut:

1) Jumlah sarana dan prasana yang terbangun tidak sebanding dengan peningkatan jumlah Rumah Tangga
2) Kurangnnya anggaran dalam mencapai target terhadap indikator – indikator capaian kinerja
3) Tidak adanya kegiatan survey atau pendataan terhadap indikator – indikator capaian kinerja.
4) Keterbatasan peralatan atau sumber daya penunjang pemeliharaan Prasarana dan sarana yang telah terbangun.

Kebijakan atau tindakan yang perlu diambil unuk mengatasi farktor – faktor tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1) Komitmen dari semua pihak pengambil kebijakan agar memprioritaskan anggaran untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapainya indikator – indikator capaian kinerja.
2) Dilakukan pekerjaan Survey dan pendataan oleh pihak yang berkompeten terhadap indikator – indikator capaian kinerja
3) Sosialisasi dan koordinasi dengan Stakeholders sebelum dan sesudah pelaksanaan pembangunan.
4) Mengoptimalkan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pekerjaan di lapangan.
5) Mengoptimalkan peralatan penunjang yang ada dan mengusulkan penambahan peralatan penunjang.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Pada Tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang memiliki Anggaran sebesar Rp. 110.163.895.597 (Pagu Anggaran Setelah Perubahan) terbagi menjadi Belanja Operasi sebesar Rp. 32.803.833.914 dan Belanja Modal sebesar Rp. 77.360.061.683,- dengan 11 program dan 21 kegiatan.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) Kota Bima

Kode				Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
				LINTAS URUSAN									
1	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	23,751%	69,56%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100,00%	**100,00%**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	100,00%	7 Dokumen	2 Dokumen	62,32%
1	3	1	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	61,66%
1	3	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	100,00%	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	66,91%

Kode				Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
					Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
1	3	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00%	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	71,05%
1	3	1	8	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00%	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	58,60%
1	3	1	10	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00%	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	43,13%

Kode				Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	1	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00%	2 laporan	4 laporan	4 laporan	100,00%	4 laporan	4 laporan	100,00%
1	3	1	13	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	2 Laporan	2 Laporan	48,27%
1	3	1	15	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	100,00%	**12 Dokumen/Lap**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	100%	73,296%	73,30%
1	3	1	17	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan pada perangkat daerah	100,00%	74 Orang	71 Orang	71 Orang	100,00%	74 Orang	76 Orang	73,80%
1	3	1	18	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	1 Dokumen	8 Orang	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	63,92%

Kode				Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
					Keuangan SKPD Bidang sekretariatan								
1	3	2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Bulanan	100%	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	83,91%
1	3	2	24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	58,60%
1	3	2	26	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	91,43%
1	3	3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	72,67%

Kode				Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	3	2	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	1 Laporan	**1 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**100,00%**	12 Laporan	12 Laporan	99,77%
1	3	3	3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	99,77%
1	3	6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah**	100%	**5 Dokumen**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	100%	**61,226%**	61,23%
1	3	6	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29 Buah	29 buah	29 buah	29 buah	100,00%	20 Paket	20 Paket	60,94%
1	3	6	2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	2500 Exp.	2500 Exp.	250 Paket	250 Paket	100,00%	250 Paket	250 Paket	64,25%
1	3	6	3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan makan minum	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	30,84%
1	3	6	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah	100 Laporan	100 Kali	80 Laporan	80 Laporan	100,00%	100 Laporan	100 Laporan	62,31%

Kode				Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	6	5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**12 Bulan**	**100%**	**100%**	100,00%	100%	**46,743%**	64,62%
1	3	6	6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	120 Surat	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	88,18%
1	3	27		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28 Laporan	96 buah	28 Laporan	28 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	38,80%
1	3	27	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	29 Buah	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	66,89%
1	3	16		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**100,00%**	**100%**	**100%**	**100,00%**	100%	61,188%	57,32%
1	3	16	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	53,42%

Kode				Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	16	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100,00%	8 Unit	8 Unit	50,00%
1	3	27	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	89 Unit	49 Unit	49 Unit	100,00%	89 Unit	89 Unit	25,84%
1	3	30		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 gedung	1 Unit	1 Unit	100,00%	3 Unit	3 gedung	100,00%
1	3	30	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peninngkatan luas area pertanian yang dilayani irigasi teknis	92,78 %	22,734%	2,310%	2,363%	102,29%	1,600%	3,210%	110,33%
1	3	30	2	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peninngkatan luas area pertanian yang dilayani irigasi teknis**	54%	**22,734%**	**2,310%**	**2,363%**	**102,29%**	1,600%	3,210%	103,33%
1	3	29		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan,	2 Dok	3 dokumen	2 dokumen	5 dokumen	250,00%	2 dokumen	2 dokumen	100,00%

Kode				Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
					embung dan bangunan penampung air lainny embung dan bangunan penampung air lainnya								
1	3	29	2	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		1889,23 m	1,250 Km	0,952 Km	76,16%	0,25 Km	0,300 Km	120,00%
1	3	29	6	Pembangunan Check Dam	jumlah unit check dam baru yang terbangun		2 unit	1 unit	2 unit	200,00%	1 Unit	1 Unit	100,00%
1	3	15		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		99,64%	718,10 m	0,230 Km	46,00%	0,35 Km	0,35 Km	100,00%
1	3	15	3	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Tahun	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00%	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00%
1	3	15	5	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)**	**Persentase Peninngkatan luas area pertanian yang dilayani irigasi teknis**		**22,734%**	**2,310%**	**2,363%**	**102,29%**	1,600%	3,210%	117,33%

Kode				Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
				Daerah Kabupaten/Kota									
1	3	18		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		4166 m	0,6 Km	0,460 Km	76,67%	0,6 Km	0 Km	
1	3	18	3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		0 m	0,3 Km	3,815 Km	1271,67%	4,5 Km	5.28 Km	117,33%
1	3	7		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Porsentase Rumah tangga pengguna air bersih		1,718%	2,920%	3,074%	105,28%	1,780%	52,759%	138,79 %
1	3	7	3	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penduduk yang memperoleh akses air minum layak**		**1,718%**	**2,920%**	**3,074%**	**105,28%**	1,780%	52,759%	138,79 %
1	3	22		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan SPAM		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	0,000%	70,00%
1	3	22	1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu		100 Rumah Tangga	50 SR	50 SR	30,00%	150 SR(0,69 Liter/Detik)	100 Rumah Tangga	8,00%

Kode				Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
					yang terbangun								
1	3	23		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu		100 Rumah Tangga	150 SR	275 SR	183,33%	150 SR (0,69 Liter/Detik)	100 Rumah Tangga	8,00%
1	3	23	10	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu		363 Rumah Tangga	500 SR	986 SR	197,20%	500 SR	363 Rumah Tangga	8,00%
1	3	23	13	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi		1 laporan	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100,00%	1 Kelompok Masyarakat	1 laporan	32,00%

Kode				Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	39		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya		1 laporan	1 Penyelenggara SPAM	1 Penyelenggara SPAM	100,00%	1 Penyelenggara SPAM		5,00%
1	3	39	1	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan		1 Kegiatan	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	1 Kegiatan	40,00%
1	3	24		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga Bersanitasi Layak		1,687%	2,920%	1,879%	64,36%	2,780%	0,000%	7,20%
1	3	24	10	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses IPAL Domestik**		**1,687%**	**2,920%**	**1,879%**	64,36%	2,780%	0,000%	**13,50%**
1	3	24	18	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik		700 Rumah Tangga	780 SR	780 SR	100,00%	780 SR	700 Rumah Tangga	2,00%

Kode				Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
				Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi		-	1 unit	1 unit	100,00%	1 unit	1 unit	25,00%
1	3	17		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik		3,507%	4,410%	3,267%	74,09%	4,410%	- 5599,458 %	69,17%
1	3	17	3	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Saluran Drainase Dalama Kondisi Baik**		**3,507%**	**4,410%**	**3,267%**	**74,09%**	4,410%	- 5599,458 %	69,17%
1	3	17	4	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Terbangun		3816 meter	2000 meter	4816,49 meter	240,82%	2000 meter	3816 meter	102,89 %
				Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Terpelihara		3143 meter	1500 meter	3282 meter	218,80%	1500 meter	3143 meter	
1	3	31	6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah terselenggaranya urusan bangunan gedung (IMB, SLF dan TABG)		1 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	1 Dokumen	30,00%

Kode				Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	31	18	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**jumlah dokumen yang diterbitkan**		**1 Laporan**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**100,00%**	4 Dokumen	1 Dokumen	**30,00%**
				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Laporan Jumlah IMB yang diterbitkan, Jumlah SLF dan Jumlah gambar teknik yang diverifikasi dan direkomendasikan		1 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	1 Dokumen	30,00%
1	3	33		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kualitas infrastruktur skala lingkungan		10,531 Km	5 Kawasan	5 Kawasan	100,00%	5 Kawasan	0 Kawasan	100,00 %
1	3	33	7	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatkan kualitas infrastruktur skala lingkungan**		**10,531 Km**	**5 Kawasan**	5 Kawasan	**100,00%**	5 Kawasan	0 Kawasan	**100,00 %**
1	3	33	9	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang terdata dan ditata		3,838 Km	3 Kawasan	3 Kawasan	100,00%	3 Kawasan	0 Kawasan	100,00 %

Kode				Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Kondisi Mantap Jalan Kota		0,385%	2,430%	1,760%	72,42%	1,030%	1,030%	216,67%
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Kota**		**0,385%**	**2,430%**	**1,760%**	**72,42%**	1,030%	1,030%	216,67%
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen Perencanaan jalan dan Jembatan		6 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	400,00%	2 Dokumen	6 Dokumen	300,00%
				Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen Leger Jalan		3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	350,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
				Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Database Kondisi Jalan dan Jembatan di Kota Bima		7 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%
				Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun		0,88 km	0,9 Km	3,023 Km	335,89%	0,9 Km	1,2 Km	133,33%
				Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang di Rekonstruksi		7,920 km	1,2 km	8,055 Km	671,25%	1,2 km	4,8 km	400,00%

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Kota**		**0,385%**	**2,430%**	**1,760%**	**72,42%**	1,030%	1,030%	216,67%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen Perencanaan jalan dan Jembatan		6 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	400,00%	2 Dokumen	6 Dokumen	300,00%
	Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen Leger Jalan		3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	350,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Database Kondisi Jalan dan Jembatan di Kota Bima		7 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%
	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun		0,88 km	0,9 Km	3,023 Km	335,89%	0,9 Km	1,2 Km	133,33%
	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang di Rekonstruksi		7,920 km	1,2 km	8,055 Km	671,25%	1,2 km	4,8 km	400,00%
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Mempertahankan Kondisi Mantap Jalan		4,16 km	3,52 km	5,802 Km	164,83%	0,74 km	0,74 km	100,00%

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Mempertahankan Kondisi Mantap Jalan		4,71 m	4,8 km	16,774 Km	349,46%	0,5 km	2,0 km	400,00%
	Pembangunan Jembatan	Terbangunannya jembatan baru		2 unit	2 Unit	2 unit	100,00%	1 Jembatan	2 Jembatan	200,00%
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi Komponen Jasa Konstruksi Sesuai Standar		100%	15 Badan Usaha	15 Badan Usaha	100%	15 Lembaga/40 Tenaga Konstruksi	15 Lembaga/ 24 Tenaga Konstruksi	100,00%
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Badan Usaha Konstruksi sesuai standar**		**15 Badan**	**15 Badan Usaha**	**15 Badan Usaha**	**100%**	15 Lembaga/ 40 Tenaga Konstruksi	15 Lembaga/ 24 Tenaga Konstruksi	100,00%
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah jasa konstruksi yang dibina		15 Badan	15 Badan Usaha	15 Badan Usaha	100%	15 Lembaga/ 40Tenaga Konstruksi	15 Lembaga/ 24 Tenaga Konstruksi	100,00%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Data Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**1 Dokumen/Lap**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen/La	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
				p						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya		-17,438%	3,650%	21,610%	454,25%	3,650%	0,51%	133,33%
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang**		**-17,438%**	3,650%	21,610%	454,25%	3,650%	0,51%	100,00%
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00%
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi		2 Kali	1 kali	1 kali	100,00%	20 Orang	50 Orang	250,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang**		**617,52%**	**3,650%**	21,610%	454,25%	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi TKPRD untuk izin investasi		-17,438%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Database Pemanfataan Ruang Kota Bima**		**1 Dokumen/Lap**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100,00%**	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Database Pemanfataan Ruang Kota Bima		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang**		**1 Dokumen/Lap**	**6 Dokumen**	**9 Dokumen**	**100,00%**	6 Dokumen	12 Dokumen	200,00%
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang		1 Dokumen	6 Dokumen	9 Dokumen	100,00%	6 Dokumen	12 Dokumen	200,00%
	TOTAL						**143,74%**			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisa kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dilakukan melalui peninjauan kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan indikator yang telah ditentukan dalam Standar Pelayana Minimum (SPM) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), karena kinerja TA. 2024 belum selesai 100% maka kinerja pelayanan yang dipakai adalah hasil kinerja tahun sebelumnya, yaitu capaian SPM dan IKK Tahun Anggaran 2023.

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematik dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik dan perencanaan kinerja tahunan. Pengukuran kinerja tahun 2023 dilaksanakan terhadap kinerja realisasi aktual penetapan kinerja tahun 2023 sebagai ikhtisar rencana kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2023 yang diturunkan dari kebijakan program dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian terhadap kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator keluaran (*output*), dan indikator hasil (*outcome*), sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2024	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Rumah Tangga Yang dapat mengakses IPAL domestik	90,00%	100,00%	76,50%	80,00%	90,00%	2,92%	74,27%		90,00%	2,92%	Ke-enam Indikator yang menjadi tolak ukur keberhasi lan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang juga menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah serta serta Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM).
2	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih/air minum layak	100,00%	100,00%	80,83%	87,00%	95,00%	2,92%	77,82%		95,00%	2,92%	
3	Persentase Peningkatan Saluran Drainase dalam kondisi baik		31,71%	81,66%	78,84%	72,88%	4,63%	46,14%		72,88%	4,63%	
4	Porsentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik		85,00%	74,18%	77,40%	81,40%	2,43%	72,92%		81,40%	2,43%	
5	Persentase Jaringan Irigasi Teknis yang berfungsi baik		65,00%	50,00%	52,00%	60,00%	2,43%	64,20%		60,00%	2,43%	
6	Persentase meningkatnya penggunaan ruang yang sesuai dengan RTRW/RDTRK		-	97,00%	98,00%	99,00%	72,00%	50,89		99,00%	72,00%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu – isu penting pada tiap bidang dinas Pekerjaan Umum dan Pennataan Ruang dapat dilihat pada tebel berikut ini:

2.3.1. Isu strategis Bidang Bina Marga

1. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, dimana dari daerah irigasi yang telah dibangun dan menjadi kewenangan DI Kota Bima, masih banyak daerah irigasi yang belum dapat berfungsi secara optimal karena adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.
2. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
3. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.
5. Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur SDA.
6. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan irigasi.
7. Belum tercovernya data baik potensi maupun permasalahan yang ada pada setiap DI yang dapat dijadikan rujukan bagi pengambilan kebijakan penanganan dan peningkatan kesediaan air.
8. Masih sangat kurannya SDM baik sebagai pengelola maupun sebagai tenaga operator pada penjaga pintu air maupun sarana prasarana SDA lainnya, yang dapat memastikan pendistribusian air pertanian secara lebih optimal.

2.3.2. Isu strategis Bidang ke Cipta Karyaan

1. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam.
2. Saat ini masih ada penduduk Kota Bima tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasan Pesisir dan Pegunungan
3. Di satu sisi desentralisasi berhasil membawa pemerintah daerah dalam nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan perkotaan di masing-masing daerah.
4. Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru akan membahayakan daya dukung kota, terutama di wilayah Kec. Rasanae Barat, Mpunda dan Raba.
5. Kerusakan lingkungan hidup
6. Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan.
7. Kebutuhan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih tinggi.

2.3.3. Isu strategis Bidang Bina Marga

1. Mulai banyaknya titik kemacetan lalu-lintas pada jaringan jalan di perkotaan, yaitu jalan akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pendidikan.
2. Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan jalan di kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
4. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).
5. Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRW, yang meliputi pemantapan jaringan jalan Kota Bima.

2.3.4. Isu strategis Bidang Penataan Ruang

1. Belum Efektifnya Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang belum efektif, dan

3. RTRW belum dijadikan acuan pembangunan berbagai sektor

2.3.5. Isu strategis UPT BPMKP, UPT Air Limbah dan UPT Air Minum

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada UPT
2. Minimnya peralatan teknis, dan pendukung lainnya dalam pengelolaan UPT .
3. Belum optimalnya peran pembinaan jasa konstruksi di daerah, yaitu dengan pasar jasa konstruksi daerah masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara supply dan demand.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4.1. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan dalam rangka menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan, meliputi:

1. Fasilitasi, Revitalisasi/Konstruksi jalan, Jembatan, terminal, Pelabuhan, sumber air baku dan air bersih
2. Regulasi dan perbaikan pengelolaan sanitisi
3. Sinkronisasi dan integrasi pengelolaan sungai
4. Regulasi/Inventarisasi/ sosialisasi/ fasilitasi/ reklamasi yang diarahkan pada Pengendalian dampak pemanfaatan SDA khususnya daerah pertambangan
5. Invetarisasi kawasan dan regulasi pemanfaatan areal sekitar kawasan sumber mata air

Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RENSTRA SKPD Tahun 2024-2029, maka arah kebijakan umum pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima untuk tahun 2025 meliputi:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur Daerah
2. Meningkatkan ketaatan terhadap rencana tata ruang

2.4.2. Prioritas Daerah

Sebagaimana diuraikan dalam Bab II dalam RKPD Kota Bima, adalah merupakan hasil RPD Kota Bima Tahun 2024 -2026, rancangan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan kesehatan;

2) Pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
3) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan layanan publik;
4) Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan permukiman;
5) Mitigasi bencana;
6) Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta stabilitas daerah.

Dari prioritas diatas untuk dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima terdapat pada point nomor 4 yaitu Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan permukiman.

Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Bima

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	**11.999.073. 421,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	**11.999.073. 421,00**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	**82.041.700, 00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	**82.041.700, 00**	

1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	2 Dokumen	14.617.900,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	2 Dokumen	14.617.900,00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	4.829.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	4.829.000,00	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.829.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.829.000,00	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.070.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	2.070.000,00	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.498.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.498.800,00	

1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	9.460.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.460.000,00	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	44.737.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	44.737.000,00	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	**9.225.957.901,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Prosentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	**9.225.957.901,00**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan pada perangkat daerah	76 Orang	8.770.332.901,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan pada perangkat daerah	76 Orang	8.770.332.901,00	

1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bidang sekretariatan	12 Dokumen	427.107.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bidang sekretariatan	12 Dokumen	427.107.000,00	
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Bulanan	12 Dokumen	11.093.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Bulanan	12 Dokumen	11.093.000,00	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	4.780.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	4.780.000,00	
1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	3.153.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	3.153.000,00	

1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Sem esteran SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semes teran SKPD	12 Laporan	9.492.000,0 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Se mes teran SKPD	12 Laporan	9.492.000,0 0	
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	**36.655.200, 00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	**36.655.200, 00**	
1.3.1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	12 laporan	36.655.200, 00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanan ya pembinaan, pengawasa n dan pengendali an barang milik daerah	12 Laporan	36.655.200, 00	
1.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah	100%		

1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pakaian Dinas beserta atributnya	76 Orang	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pakaian Dinas beserta atributnya	76 Orang	-	
1.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	**1.395.893.880,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	100%	**1.395.893.880,00**	
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Paket	359.717.880,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Paket	359.717.880,00	
1.5.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	250 Paket	119.544.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	250 Paket	119.544.000,00	
1.5.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan yang disediakan	29 Buah		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan yang disediakan	29 Buah	13,375	

1.5.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan makan minum	12 Laporan	21.452.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan makan minum	12 Laporan	21.452.000,00	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/ Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah	100 Laporan	895.180.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah	100 Laporan	895.180.000,00	
1.6						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit		
1.6.1						Pengadaan Alat Besar	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kendaraan besar	1 Unit	700,000	

1.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**311.228.240,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	311.228.240,00	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	12 Laporan	12.454.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	12 Laporan	12.454.000,00	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Laporan	262.527.080,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Laporan	262.527.080,00	
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	36.247.160,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	36.247.160,00	

1.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**947.296.500,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	947.296.500,00	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	23 Unit	212.670.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	23 Unit	212.670.000,00	
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Penyediaan alat besar	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alat berat yang beroperasi dan berfungsi baik	8 Unit	499.231.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alat berat yang beroperasi dan berfungsi baik	8 Unit	499.231.500,00	
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89 Unit	49.190.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89 Unit	49.190.000,00	

1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	2 Unit	186.205.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	2 Unit	186.205.000,00	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	"1,50 Km 0,6 Km 7 titik lokasi "	**1.755.408.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% Peningkatan Luas wilayah Pertanian yang terlayani irigasi Teknis	"1,50 Km 0,6 Km 7 titik lokasi "	**1.755.408.000,00**	
2.1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,60 Km	**1.362.113.000,00**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kota dalam kondisi baik	0,60 Km	1.362.113.000,00	

2.1.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	1 dokumen	146.927.000 ,00	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya	1 dokumen	146.927.00 0,00	
2.1.2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir	2 dok		
2.1.3	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	panjang turap/talud/bronjong terbangun	0,25 Km	783.392.000 ,00	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	panjang turap/talud/ bronjong terbangun	0,25 Km	783.392.00 0,00	

2.1.4	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pintu air baru yang terbangun	1 paket		Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pintu air baru yang terbangun	1 unit		
2.1.5	Pembangunan Check Dam	Kota Bima, Mpunda, Panggi	jumlah unit cek dam baru yang terbangun	1 unit		Pembangunan Check Dam	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah unit cek dam baru yang terbangun	1 unit		
2.1.6	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah embung dan penampun airnya yang terpelihara	3 paket	828.000,00	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah embung dan penampun airnya yang terpelihara	1000 meter peregi	828.000,00	
2.1.7	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah unit pintu air yang dilakukan perbaikan	1 paket	-	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah unit pintu air yang dilakukan perbaikan	2 paket	-	
2.1.8	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	panjang turap/talud/bronjong terpelihara	0,13 Km	288.406.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	panjang turap/talud/bronjong terpelihara	0,13 Km	288.406.000,00	

2.1.9	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terbentuknya komisi irigasi	1 Lembaga	142.560.000,00	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terbentuknya komisi irigasi	1 Lembaga	**142.560.000,00**	
2.2	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**393.295.000,00**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% Pengembangan dan Peningkatan serta Pemeliharaan Sistem Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi di Kota Bima	52.50%	393.295.000,00	
2.2.1	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	panjang jaringan irigasi terbangun	17 paket	-	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jaringan Irigasi yang Terbangun	0 Km	-	
2.2.2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	panjang jaringan irigasi terpelihara	16 paket	650.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	panjang jaringan irigasi terpelihara	600 meter	688,941	

2.2.3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	panjang jaringan irigasi terpelihara	12 Km	393.295.000 ,00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	panjang jaringan irigasi terpelihara	12 Km	**393.295.00 0,00**	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		Persentase Penduduk yang terlayani air minum		**15.601.314. 588,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Rumah Tangga pengguna air bersih/air minum	2.65%	**15.601.314. 588,00**	
3.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bima	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		**15.601.314. 588,00**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Rumah Tangga pengguna air bersih/air minum	2.65%	15.601.314. 588,00	
3.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Database Air Minum dan Sanitasi	3.856 KK	148.804.000 ,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Database Air Minum	1 dokumen	148.804.00 0,00	
3.1.2	Supervisi Pembangunan/Peningkat an/ Perluasan/Perbaik an SPAM	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Supervisi Pembangunan/Pe nin gkatan/ Perluasan/Perbaik an SPAM	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen supervisi	1 Dokumen	14,711	

3.1.2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SR Terlayani Kebutuhan Air Minum	1.936 KK	100.000	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SR Terlayani Kebutuhan Air Minum	200 kk		
3.1.3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SR Terlayani Kebutuhan Air Minum	1936 KK	12.234.776. 270,00	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kk terlayani air bersih	100 kk	12.234.776. 270,00	
3.1.4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SR Terlayani Kebutuhan Air Minum	1936 KK	1.914.357.0 00,00	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SR Terlayani Kebutuhan Air Minum	0 kk	1.914.357.0 00,00	
3.1.5	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	laporan	1 laporan	58.585.000, 00	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan	1 Laporan	58.585.000, 00	
3.1.6	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	laporan	1 laporan		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan	1 Laporan		

3.1.7	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	laporan	1 laporan	50.000	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan	1 Laporan		
3.1.8	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	laporan	1 laporan	1.099.582.318,00	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan	1 Laporan	**1.099.582.318,00**	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		**1.028.980.080,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang dapat mengakses IPAL domestik	2.65%	**1.028.980.080,00**	
4.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		**1.028.980.080,00**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses IPAL	2.65%	1.028.980.080,00	

4.1.1	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	700 KK	509.990.440 ,00	Pembangunan/Pe nye diaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah KK Pembangun an Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik	250 kk	509.990.44 0,00	
4.1.2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penduduk penerima manfaat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	200 KK	518.989.640 ,00	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penduduk penerima manfaat Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik	200 kk	**518.989.64 0,00**	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		**6.106.366.5 51,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	4.20%	**6.106.366.5 51,00**	
5.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		**6.106.366.5 51,00**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% Peningkatan Saluran drainase dalam kondisi baik	4.20%	6.106.366.5 51,00	

5.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1 Dokumen	5,958	
5.1.2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Saluran Drainase Terbangun	1392 meter	6.106.366.551,00	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Saluran Drainase Terbangun	1392 meter	6.106.366.551,00	
5.1.3	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Saluran Drainase Terpelihara	1392 meter	949.500	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Saluran Drainase Terpelihara	1392 meter		
5.1.4	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Supervisi Pembangunan/Penin gkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan	0 Laporan	-	

6	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Bangunan Gedung		**279.510.000,00**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pendirian bangunan gedung yang sesuai dengan dokumen tata ruang (RTRW/RDTR)	1	**279.510.000,00**	
6.1	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		**279.510.000,00**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terselenggaranya urusan bangunan gedung (IMB, SLF dan TABG) serta tahapan renovasi bangunan Masjid Agung Al Muwwahiddin	1 laporan	279.510.000,00	

6.1.1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah IMB yang diterbitkan, Jumlah SLF dan Jumlah gambar teknik yang diverifikasi dan direkomendasikan	1 laporan	279.510.000,00	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan	1 Laporan	279.510.000,00	
6.1.2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan bangunan gedung yang representatif	2 Ha	-	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan bangunan gedung yang representatif	0 Unit	-	
7	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan		**21.664.617.498,00**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pendirian bangunan gedung yang sesuai dengan dokumen tata ruang (RTRW/RDTR)	1	**21.664.617.498,00**	

7.1	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		**21.664.617.498,00**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% meningkatkan kualitas infrastruktur skala lingkungan	0,04	21.664.617.498,00	
7.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata	40 %	21.664.617.498,00	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata	4 %	21.664.617.498,00	
8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan	3,34 Km	**37.723.706.400,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	3,34 Km	**37.723.706.400,00**	
8.1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3,34 Km	**37.723.706.400,00**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Kota	3,34 Km	37.723.706.400,00	

8.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	251.502.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	251.502.000,00	
8.1.2	Pengelolaan Leger Jalan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Leger Jalan	2 Dokumen	142.640.400,00	Pengelolaan Leger Jalan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Leger Jalan	2 dokumen	142.640.400,00	
8.1.3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen jalan dan jembatan yang disusun	6 Dokumen	441.659.000,00	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Survey	6 dokumen	441.659.000,00	
8.1.4	Pembangunan Jalan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	panjang jalan yang dibangun	2,7 km	2.752.854.000,00	Pembangunan Jalan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan kondisi baik	2,7 km	2.752.854.000,00	
8.1.5	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ruas Jalan memenuhi standar	26.78 Km		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan kondisi baik	0.2 km		

8.1.6	Rekonstruksi Jalan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kondisi Mantap Jalan	7,52 km	29.954.060.000,00	Rekonstruksi Jalan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan kondisi baik	7,52 km	29.954.060.000,00	
8.1.7	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Mempertahankan Kondisi Mantap Jalan	7,5 km	3.396.728.000,00	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan kondisi baik	7,5 km	3.396.728.000,00	
8.1.8	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Mempertahankan Kondisi Mantap Jalan	2,42 km	510.223.000,00	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan kondisi baik	2,42 km	510.223.000,00	
8.1.9	Pembangunan Jembatan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbangunannya jembatan baru	1 Jembatan	274.040.000,00	Pembangunan Jembatan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jembatan dalam kondisi baik	1 Jembatan	274.040.000,00	
8.1.10	Penggantian Jembatan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penggantian jembatan yang rusak	1 unit		Penggantian Jembatan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jembatan dalam kondisi baik	2 unit		
8.1.11	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Mempertahankan kondisi jembatan	10 unit		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jembatan dalam kondisi baik	0 unit	-	

9	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi	15 Badan/40 Tenaga Konstruksi	**175.925.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya kualitas Penyedia Jasa Konstruksi	15 Badan/40 Tenaga Konstruksi	**175.925.000,00**	
9.1	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	15 Badan/40 Tenaga Konstruksi	**89.406.000,00**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya kualitas pembinaan jasa konstruksi daerah	15 Badan/40 Tenaga Konstruksi	89.406.000,00	
9.1.1	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jasa Usaha Konstruksi yang di bina	15 Tenaga Konstruksi	89.406.000,00	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Badan	15 Tenaga Konstruksi	**89.406.000,00**	
10.2	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	**86.519.000,00**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	1 Dokumen	86.519.000,00	
10.2.1	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Database Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen		Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Database Tenaga Kerja dan Badan Usaha	0 Dokumen	-	

10.2.2	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	86.519.000,00	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	cakupan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sistim informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	**86.519.000,00**	
11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang	12 Dokumen	**788.085.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya**	**12 Dokumen**	**788.085.000,00**	

11.1	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**5 Dokumen**	**444.702.000,00**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang sudah di tetapkan untuk dijadikan acuan perizinan	5 Dokumen	444.702.000,00	
11.1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah persetujuan substansi RDTRK	3 Dokumen	338.486.000,00	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah persetujuan substansi RDTRK	3 Dokumen	338.486.000,00	
11.1.2	Penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	peraturan walikota tentang titik lokasi dan pengaturan reklame	1 Dokumen	61.408.000,00	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	peraturan walikota tentang sempadan Jalan	1 Dokumen	61.408.000,00	
11.1.3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sosialisasi Kebijakan	60 Orang	44.808.000,00	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sosialisasi Kebijakan	60 Orang	**44.808.000,00**	

11.2	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% Peningkatan Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	3.47%	4,000	
11.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Review Dokumen RDTR Asakota, RDTR Raba dan RDTR Rasanae Timur	12 Dokumen		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	1 Dokumen	**4,000**	
11.3	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**77.883.000,00**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi TKPRD untuk izin investasi	1 Dokumen	77.883.000,00	
11.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rekomendasi TKPRD	24 Dokumen		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	0 kegiatan	-	

11.3.2	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Database Pemanfataan Ruang Kota Bima	1 Dokumen	77.883.000,00	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Database Pemanfataan Ruang Kota Bima	1 Dokumen	**77.883.000,00**	
11.4	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**6 Dokumen**	**265.500.000,00**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	265.500.000,00	
11.4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Monitoring Evaluasi Penertiban Bangunan	4 kali		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Monitoring Evaluasi penertiban bangunan	0 kali	-	
114.2	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rapat koordinasi penatan ruang daerah	6 Dokumen	265.500.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rapat koordinasi penataan ruang daerah	6 Dokumen	265.500.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja SKPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Sebagai salah satu SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Bima, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat kelurahani, kecamatan maupun di tingkat Kota. Dalam Musrenbang tahun 2025, banyak aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang maupun Bappeda harus mampu memilih dan memperioritaskan usulan yang diterima dan dimasukkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan menjadi perhatian serius Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Tabel 2.5.
Usulan Musrenbang Untuk Tahun 2025

NO	KEGIATAN	ALASAN	LOKASI	KELURAHAN	BIDANG
1	Penimbunan dan Pembuatan Taman Lapangan Umum Kel. Rite	Area pertamanan sebagai Ruang Terbuka Hijau tidak tertata dan dirawat dengan baik	Jln Pemuda Rite, Kota Bima	Rite	Cipta Karya
2	Tidak adanya penyediaan air,selama ini beberapa RW memanfaatkan air PDAM tapi jika air PDAM macet tidak mengalir maka air bersih tidak ada	Akses air minum/air bersih masyarakat masih sangat terbatas	RW 01,02,03&04, Kota Bima	Dara	Cipta Karya
3	Di musim hujan sering terjadi banjir, dan itu meninggalkan material tanah/pasir dan sampah lain maka perlu dilakukan normalisasi drainase dan penutupan drainase	Drainase tersumbat karena material tanah, bebatuan dan lumpur serta sampah masuk ke dalam drainase karena tidak adanya penutup drainase	RW 01,02,03,04, Kota Bima	Dara	Cipta Karya
4	Kondisi kantor yg belum memiliki pagar menimbulkan ketidaknyamanan karena banyak anak-anak yg panjat tembok yg pendek untuk duduk nongkrong di areal kantor kelurahan sampai pagi	Bangunan kantor Kelurahan belum memilik pagar	RT 01 RW 01 lingkungan Tolodara , Kota Bima	Dara	Cipta Karya
5	Kantor lurah sudah tidak representatif karena berada di tengah pemukiman warga,sudah tidak memberikan kenyamanan dan keamanan,areal kantor sudah sering dipakai nongkrong anak2 sampai pagi ,sudah sangat menganggu dan menimbulkan kriminal seperti judi online dan game online	Masih terdapat kantor Kelurahan dalam kondisi rusak atau kurang representatif	RT 01 RW 01 lingkungan Tolodara , Kota Bima	Dara	Cipta Karya

6	di depan jalan Amahami sampai Koramil RasanaE terjadi tumpukan lumpur yg mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas dan pengguna jalan.	Sering terjadi banjir lumpur dari gunung akibat tidak ada bronjong/tanggul	RT 09 RW 03 lingkungan Dara , Kota Bima	Dara	Bina Marga
7	Akibat terlalu banyak sedimen air meluap ke areal pemukiman sehingga menyebabkan banjir	Kondisi sungai yang dangkal dan terganggunya DAS karena adanya bangunan, longsor dll	RW 01 lingkungan Tolodara , Kota Bima	Dara	Sumber Daya Alam
8	Tidak ada ruang atau bangunan olahraga baik VOLY ball maupun sepak bolanya	Masih kurang sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat	RW 01, 02,03,04,05&06, Kota Bima	Dara	Cipta Karya
9	Drainase rusak atau buntu sehingga menyebabkan air meluap di jalan	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	RW 01,02,03,04,05, Kota Bima		Cipta Karya
10	Masih banyak lingkungan yang perlu penataan lebih baik seperti rabat,drainase, penataan taman lingkungan, penanganan sampah di pemukiman,dll	Kondisi lingkungan belum tertata baik	Di lingkungan RW 01,02,03,04,05&06, Kota Bima	Dara	Cipta Karya
11	Kondisi jalan yang belum teraspal dan hotmik mengakibatkan genangan air dan becek serta mengakibatkan bahaya bagi pengguna jalan	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 005,RT 19,RT 20,RT 21,RT 10,RT 11,RT 13, Kota Bima	Jatibaru Timur	Cipta Karya
12	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada dan rusak mengakibatkan air meluap dan masuk kerumah warga	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	RT 10, RT 11,RT 17,RT 18,RT 16 RT 15, RT 21, Kota Bima	Jatibaru Timur	Cipta Karya
13	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat tidak adanya jalan penghubung	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat tidak adanya jalan penghubung	LINGK.RENGGE NGGAPI, Kota Bima	Jatibaru Timur	Bina Marga

14	Rabatnisasi gang sangat perlu karena kondisi akan mengakibatkan pengguna jalan nyaman	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 10, RT 11,RT 17,RT 18,RT 16,RT 19,RT 20,RT 21,RT 005 RT13,RT 14, RT 15, Kota Bima	Jatibaru Timur	Cipta Karya
15	Pembuatan Embung untuk pertanian dan air bersih	Belum terpenuhi kebutuhan air untuk pertanian serta kurangnya daerah resapan air untuk mengurangi risiko banjir	MATA AIR NGGARO MBARI, Kota Bima	Jatibaru Timur	Sumber Daya Alam
16	Sering terjadi banjir lumpur dari gunung akibat tidak ada bronjong/tanggul	Sering terjadi banjir lumpur dari gunung akibat tidak ada bronjong/tanggul	Kelurahan jatibaru Timur, Kota Bima	Jatibaru Timur	Sumber Daya Alam
17	Akses air minum/air bersih masyarakat masih sangat terbatas	Akses air minum/air bersih masyarakat masih sangat terbatas	Kelurahan Jatibaru Timur, Kota Bima	Jatibaru Timur	Cipta Karya
18	Kurangnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat - lapangan sepak bola dan lainnya	Kurangnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat	Kel. jatibaru Timur, Kota Bima	Jatibaru Timur	Cipta Karya
19	Sempadan sungai terjadi longsor akibat tidak adanya penguatan tebing sungai	Sempadan sungai terjadi longsor akibat tidak adanya penguatan tebing sungai	Kel. Jatibaru Timur, Kota Bima	Jatibaru Timur	Sumber Daya Alam
20	saluran drainase didepan masjid al-istiqomah jatiwangi sampai ke sungai	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	Lingkungan Jatiwangi, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya/Sumber Daya Alam
21	Pengaspalan jalan kuburan Tato di lingkungan jatiwangi RT 06	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Lingkungan Jatiwangi, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya

22	Pengerukan kembali sepanjang bantaran sungai	Kondisi sungai yang dangkal dan terganggunya DAS karena adanya bangunan, longsor dll	Lingkungan Tato, Kota Bima	Jatiwangi	Sumber Daya Alam
23	Penutup drainase sepanjang lingkungan tato	Drainase tersumbat karena material tanah, bebatuan dan lumpur serta sampah masuk ke dalam drainase karena tidak adanya penutup drainase	Lingkungan Tato, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya
24	Pembuiatan Gorong gorong sampai tembus jalan raya	Masih diperlukan sarana prasarana sanitasi yang memadai	Lingkungan sukadamai, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya
25	Rabat Gang	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Lingkungan sukadamai, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya
26	Pembuatan Saluran Drainase	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	Lingkungan sukadamai, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya
27	Pembuatan drainase	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	Lingkungan KLK, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya
28	Pengaspalan jalan gang masuk depan gudang bulog	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Lingkungan KLK, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya
29	Pembuatan Parit	Masih diperlukan sarana prasarana sanitasi yang memadai	Lingkungan Pelita, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya

30	Pengaspalan Jalan atau Gang	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Lingkungan Pelita, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya
31	Pengaspalan Jalan	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Lingkungan Radio permai, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya
32	Pembangunan drainase dari jembatan kompi sampai jembatan ranggo	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	Lingkungan Radio permai, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya
33	perbaikan irigasi jalan masuk BTN	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Lingkungan Muhajirin, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya
34	Perbaikan pondasi parit	Masih diperlukan sarana prasarana sanitasi yang memadai	Lingkungan muhajirin, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya
35	Pengaspalan Jalan	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Lingkungan Muhajirin, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya
36	Pembuatan Got	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	Lingkungan BTN Gindi, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya
37	rehabilitasi drainase	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	Lingkungan Gindi, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya

38	Pembangunan Bibir Jalan	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Lingkungan Gindi, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya
39	Pembuatan Got	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	Lingkungan Gindi, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya
40	Pembuatan Plat Jembatan (Cor)	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak	Lingkungan Gindi, Kota Bima	Jatiwangi	Bina Marga
42	Normalisasi Drainase Depan SMP 7	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	Lingkungan Gindi, Kota Bima	Jatiwangi	Cipta Karya/Bina Marga
43	kondisi Jalan rusak RT 06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,20,Lingkungan Kolo	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Jln. Udaya Kelurahan Kolo, Kota Bima	Kolo	Cipta Karya
54	Drainase di lingkungan Rt 11,13,14,15,19,20 rusak sehingga aliran air tersumbat	Drainase tersumbat karena material tanah, bebatuan dan lumpur serta sampah masuk ke dalam drainase karena tidak adanya penutup drainase	RT 11 lingkungan Kolo, RT 13,14,15,19,20 lingkungan Bonto, Kota Bima	Kolo	Cipta Karya
55	Tidak ada talut untuk mencegah abarasi pantai	Belum ada pintu air untuk mengatur air di sungai, bendungan penahan banjir, maupun di tanggul sungai untuk mengurangi risiko banjir	RT 14 dan 15 Lingkungan Bonto Kelurahan Kolo, Kota Bima	Kolo	Sumber Daya Alam
56	Jalan menuju destinasi wisata So Numbe RT 17, jalan lingkar lingkungan Bonto RT 20 rusak/belum di aspal	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 17 kolo dan 20 lingk. Bonto Kelurahan Kolo, Kota Bima	Kolo	Bina Marga

57	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 11 lingkungan Kolo, RT 19 Lingk. Bonto, Kota Bima	Kolo	Cipta Karya
58	Rabat jalang gang dan perbaikan Deker yang rusak yang mengakibatkan saluran air tersumbat	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	RT 17 RW 01 Kolo, Kota Bima	Kolo	Cipta Karya
59	Pengadaan alat sablon	Kurangnya fasilitas pendukung kegiatan organisasi wanita, pemuda maupun kemasyarakatan lainnya	Kelurahan Kolo, Kota Bima	Kolo	
60	masih ada jalan/gang yang belum di benah dan di perbaika untuk akses jalan antar RW/RT	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak		Lelamase	Cipta Karya/Bina Marga
61	halaman kantor kering dan kusut akibat dari bebasnya keluar masuk unsur manuasia dan hewan sehingga belum bisa ditata dengan taman dan pepohonan yang rindang	Bangunan kantor Kelurahan belum memilik pagar	Lelamase, Kota Bima	Lelamase	Cipta Karya/Bina Marga
62	pembuatan jembatan Beton Permanen lewati sungai kuburan	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak	lingk. waki Rt.04 Rw.02, Kota Bima	Manggemaci	Bina Marga
63	Pembuatan Tutupan Got dan rehab jalan Musholla	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT.01 dan RT.02, Kota Bima	Manggemaci	Bina Marga
64	Pengaspalan jalan yang rusak	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Ling. Bedi RT.08 Rw.03, Kota Bima	Manggemaci	Cipta Karya

65	pembuatan Talud Tebing Sungai	Kondisi sungai yang dangkal dan terganggunya DAS karena adanya bangunan, longsor dll	Lingk.samporo RT.12 RW.04, Kota Bima	Manggemaci	Sumber Daya Alam
66	Pembuatan Jembatan Untuk Jalan Lingkar Penghubung Pemukiman	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat tidak adanya jalan penghubung	Lingkungan Rabantala RT. 15 RW. 04 Kelurahan Matakando, Kota Bima	Matakando	Bina Marga
67	Pembuatan Jembatan dan Peningkatan Jalan Menuju pekuburan Induk Kelurahan	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat tidak adanya jalan penghubung	Lingkungan Soncolela RT, 12 dan 13 RW. 06 Kelurahan Matakando, Kota Bima	Matakando	Cipta Karya/Bina Marga
68	Pengaspalan Jalan Lintas Soncolela dari RT. 02 s/d RT.04 diperkirakan 200 M	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Lingkungan Tolotando RT. 02 s/d RT 04 Kelurahan Matakando, Kota Bima	Matakando	Bina Marga
69	Peningkatan Jalan Wisata	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat tidak adanya jalan penghubung	Lingkungan Rabantala RT. 08 RW.04, Kota Bima	Matakando	Bina Marga
70	Pembuatan Jembatan Mini dan Pembukaan Jalan Pemukimman Baru penghubung RT. 08 dengan RT.15 RW. 04	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat tidak adanya jalan penghubung	Lingkungan Rabantala RT. 08 dan RT. 15 RW. 04 Kelurahan Matakando, Kota Bima	Matakando	Bina Marga
71	minta di pasang Pafing Blok Halaman Kantor kelurahan Matakando	Halaman kantor Kelurahan/kecamatan becek di musim hujan dan tidak tertata dengan baik	Kantor Kelurahan Matakando RT.08 RW.04 , Kota Bima	Matakando	Cipta Karya
72	Pemasangan Bronjon	Tanah tebing labil, mudah terjadi pengikisan sehingga menyebabkan longsor	Masjid An-Nur Lingkungan Rabantala RT. 05. RW. 03 , Kota Bima	Matakando	Cipta Karya

73	Dibutuhkan Pemasangan Penguatan Tebing Sungai	Sempadan sungai terjadi longsor akibat tidak adanya penguatan tebing sungai	Kantor Kelurahan Matakando, Kota Bima	Matakando	Sumber Daya Alam
74	Pembuatan Saluran Drainase	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	Lingkungan Soncolela RT. 09, 10 dan RT. 12, Kota Bima	Matakando	Cipta Karya
75	Pemasangan Tanggul	Sering terjadi banjir lumpur dari gunung akibat tidak ada bronjong/tanggul	Lingkungan Rabantala RT. 08 dan RT. 15, Kota Bima	Matakando	Cipta Karya
76	Setiap Musim Hujan Selalu Tergenang dan Airnya tidak Mengalir	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	RT 13 ,RT 12,RT 07 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, Kota Bima	Melayu	Cipta Karya
77	kebutuhan air minum sangat dibutuhkan oleh warga	Akses air minum/air bersih masyarakat masih sangat terbatas	RT. 005 RW. 002 Lingkungan Lewirowa, Kota Bima	Monggonao	Cipta Karya
78	setiap hujan selalu terjadi genangan air diatas bahu jalan lingkungan	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	RT. 003 RW. 001 dan RT. 009 RW. 004, Kota Bima	Monggonao	Cipta Karya
79	dibutuhkan pekerjaan tutupan saluran drainase	Drainase tersumbat karena material tanah, bebatuan dan lumpur serta sampah masuk ke dalam drainase karena tidak adanya penutup drainase	RT. 04 RW. 02 Lingkungan Nurul Qalbi, RT. 001 RW. 001, RT. 006 dan RT. 007 RW. 003, Kota Bima	Monggonao	Cipta Karya
80	dibutuhkan kegiatan pengaspalan gang	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT. 006 RW. 003 Lingkungan Karara, Kota Bima	Monggonao	Cipta Karya

81	Selama ini keamanan lingkungan kantor belum maksimal diakibatkan oleh sarana pagar kantor Kel. Nae kondisinya sangat rusak.	Bangunan kantor Kelurahan belum memilik pagar	Jln. Anggrek No. 05 tolomundu kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima, Kota Bima	NaE	Cipta Karya
82	selama bertahun tahun Kondisi drainasi sangat buruk akibat sendimentasi	Drainase tersumbat karena material tanah, bebatuan dan lumpur serta sampah masuk ke dalam drainase karena tidak adanya penutup drainase	Lingkungan RT 04 RW 01 Kel. Nae , Kota Bima	NaE	Cipta Karya
83	masih banyak jalan lingkungan yang belum di aspal	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	lingkungan Ranggo, Lingkungan Nae dan Lingkungan Salama Kel. Nae, Kota Bima	NaE	Cipta Karya/Bina Marga
84	Petani kesulitan mengairi sawah/lahan pertanian karena DAM Sari sudah tidak berfungsi lagi (rusak parah).	Sarana irigasi teknis yang tidak tersedia	Kelurahan Ntobo, Kota Bima	Ntobo	Sumber Daya Alam
85	apabila setiap turun hujan sering terjadi penggenangan atau luapan air akibat air yang turun dari gunung karna tidak adanya saluran drainase, yang menghambat aktifitas pengguna kendaraan maupun pejalan kaki	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	Lingkungan Mase. 001 RW. 001 Kelurahan Nungga, Kota Bima	Nungga	Cipta Karya
86	sering terjadi masuknya hewan ternak dari masyarakat yang menyebabkan rusaknya bangunan dan tanaman - tanaman yang ada disekitar halaman kantor	Bangunan kantor Kelurahan belum memilik pagar	Lingkungan Mase, RT. 001 RW.001 Kelurahan Nungga, Kota Bima	Nungga	Cipta Karya
87	dibutuhkan pemasangan Talud pemukiman agar tidak terjadi longsor saat hujan pada tebing, yang membahayakan warga setempat	Tanah tebing labil, mudah terjadi pengikisan sehingga menyebabkan longsor	Lingkungan Nungga, RT.003 RW. 001, Kota Bima	Nungga	Cipta Karya
88	sering terjadi luapan air ketika banjir akibat semakin banyak nya lumpur yang menutupi lubang deker, oleh sebab itu perlu pelebaran saluran deker atau pengerukan tanah di saluran tersebut	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak	Lingkungan Toloweri Kelurahan Nungga, Kota Bima	Nungga	Bina Marga

89	tidak ada nya jalan baru penghubung antara warga RT. 08 dengan RT. 09 di lingkungan toloweri yang menyebabkan akses jalan yang sulit untuk di lewati sehingga untuk melakukan kegiatan di kemasyarakatan menjadi susah	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat tidak adanya jalan penghubung	RT. 008 dan RT. 009 RW. 003 Lingkungan Toloweri Kelurahan Nungga Kec. Rasanae Timur Kota Bima, Kota Bima	Nungga	Bina Marga
90	Kantor Kelurahan Pane Kalau Datang Hujan maka air akan masuk kedalam kantor karena ruangan dalam kantor sama rata dengan halaman. atap juga sudah bocor serta tidak representatif disebut sebagai kantor karena bangunan awanya adalah sebuah Rumah Tinggal. Mengingat Lokasi Kantor Kelurahan yang sempit maka diharapkan agar kantor dibangun susun dua	Masih terdapat kantor Kelurahan dalam kondisi rusak atau kurang representatif	Jalan Patimura RT 03 RW 01 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Kota Bima	Pane	Cipta Karya
91	Jika Hujan turun maka air akan tergenang dikarenakan Kondisi Gang yang berlubang dan sudah rusak. Gang yang rusak ini adalah hasil dari pekerjaan Rabatnisasi Tahun 2021 dan sekarang sudah rusak dan butuh perawatan	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Jalan Pondok Pesantren RT 011 RW 04 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Kota Bima	Pane	Cipta Karya
92	Pintu Air yang tidak bisa berfungis secara maksimal dikarenakan ukurannya yang kecil. jadi harus dibuat agak besar sehingga mampu mengalirkan air yang volumenya besar dari dalam lingkungan ke sungai.	Pintu air yang tidak berfungsi dengan baik (untuk mengatur air di sungai, bendungan penahan banjir, maupun di tanggul sungai)	Jalan Soekarno Hatta RT 06 RW 02 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Kota Bima	Pane	Sumber Daya Alam
93	Petani kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah/tanaman karena Waduk (DAM Santunu/Raba Abu Taher) sudah tidak berfungsi lagi.	Belum terpenuhi kebutuhan air untuk pertanian serta kurangnya daerah resapan air untuk mengurangi risiko banjir	So Tolomango Lingkungan Nggarolo Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima, Kota Bima	PenanaE	Sumber Daya Alam

94	Petani kesulitan mengairi sawah/lahan pertanian karena DAM Santunu sudah tidak berfungsi lagi (sudah rusak).	Sarana irigasi teknis yang tidak tersedia	So Tolomango Lingk. Nggarolo Kel. Penanae Kec. Raba Kota Bima, Kota Bima	PenanaE	Sumber Daya Alam
95	Jembatan yang menghubungkan antara warga di wilayah RT. 001 tidak memadai untuk dilewati karena pondasinya sudah terkikis air sungai	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak	RT. 001 RW. 001 Lingk. Penanae Kelurahan Penanae Kec. Raba Kota Bima, Kota Bima	PenanaE	Bina Marga
96	Kondisi jalan penghubung menuju Lingkungan Wenggo sudah rusak	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT. 006 Lingk. Penanae & RT. 011, 012 Lingk. Wenggo Kel. Penanae Kec. Raba Kota Bima , Kota Bima	PenanaE	Bina Marga
97	terjadi longsor di daerah aliran sungai Ntobo-Penanae, Sungai Kendo-Penanae	Belum ada pintu air untuk mengatur air di sungai, bendungan penahan banjir, maupun di tanggul sungai untuk mengurangi risiko banjir	Penghubung sungai Ntobo-Penanae dan Penghubung sungai Kendo-Penanae, Kota Bima	PenanaE	Sumber Daya Alam
98	Keadaan Kantor Kelurahan tidak aman karena belum memiliki pagar	Bangunan kantor Kelurahan belum memilik pagar	Kantor Kelurahan Penanae, Kota Bima	PenanaE	Cipta Karya
99	Pembuatan Tutupan Drainase	Drainase tersumbat karena material tanah, bebatuan dan lumpur serta sampah masuk ke dalam drainase karena tidak adanya penutup drainase	Kelurahan Penaraga, Kota Bima	Penaraga	Cipta Karya/Bina Marga
100	Pembuatan Tanggul Penahan Banjir	Belum ada pintu air untuk mengatur air di sungai, bendungan penahan banjir, maupun di tanggul sungai untuk mengurangi risiko banjir	RT 01 RW 01, Kota Bima	Penaraga	Sumber Daya Alam
101	Pembuatan Pintu Air pengatur air banjir	Belum ada pintu air untuk mengatur air di sungai, bendungan penahan banjir, maupun di tanggul sungai untuk mengurangi risiko banjir	RT 01 RW 01, Kota Bima	Penaraga	Sumber Daya Alam

102	ruang kantor masih banyak yang kurang dan sudah banyak yang rusak sehingga pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal	Masih terdapat kantor Kelurahan dalam kondisi rusak atau kurang representatif	kelurahan rabadompu barat, Kota Bima	Rabadompu Barat	Cipta Karya
103	susahnya jalan penghubung untuk wilayah yang satu dengan yang lainya	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak	RT.12 /RW.05 Kelurahan Rabadompu Barat, Kota Bima	Rabadompu Barat	Bina Marga
104	setiap musim hujan air tergenang karena ketidaklancaran air yang mengalir ke parit	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Jl. Sonco Kel. Rabadompu Timur, Kota Bima	Rabadompu Timur	Cipta Karya
105	Apabila terjadi luapan hujan tidak dapat mengalir ke saluran drainase, karena drainase sudah rusak	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	RT,16, RT, 15, RT, 08 dan RT. 06 Kelurahan Rabangodu Utara , Kota Bima	Rabangodu Utara	Cipta Karya
106	Apabila terjadi luapan hujan tidak dapat mengalir ke saluran drainase, karena drainase sudah rusak	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	RT,16, RT, 15, RT, 08 dan RT. 06 , Kota Bima	Rabangodu Utara	Cipta Karya
107	Akses jalan warga terhambat karena kondisi jalan sudah rusak	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT. 001, Kota Bima	Rabangodu Utara	Cipta Karya
108	Apabila terjadi luapan hujan tidak dapat mengalir ke saluran drainase, karena drainase sudah rusak	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	RT. 01, RT. 16, RT. 15, RT. 08 dan RT. 06 , Kota Bima	Rabangodu Utara	Cipta Karya
109	Perbaiki Jalan Lintas Rite-Ndano Nae	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Jln. Lintas Rite Ndano Nae, Kota Bima	Rite	Bina Marga

110	Berbaiki Talud yang longsor akibat banjir gunung dan pergeseran tanah	Drainase tersumbat karena material tanah, bebatuan dan lumpur serta sampah masuk ke dalam drainase karena tidak adanya penutup drainase	jln. Lintas rite Ndano Nae, Kota Bima	Rite	Cipta Karya
111	Dainase lingkungan, Untuk Memperlancar Saluran/pembuangan air warga yang sudah mampet akibat timbunan sirtu banjir gunung	Belum terpenuhi kebutuhan air untuk pertanian serta kurangnya daerah resapan air untuk mengurangi risiko banjir	jln. Lintas Rite Ndano nae, Kota Bima	Rite	Cipta Karya
112	masih kurangnya bak penampungan air bersih	Akses air minum/air bersih masyarakat masih sangat terbatas	jalan oi sii , Kota Bima	Rontu	Cipta Karya
113	penambahan jaringan air bersih untuk penerima manfaat baru	Akses air minum/air bersih masyarakat masih sangat terbatas	kelurahan rontu, Kota Bima	Rontu	Cipta Karya
114	talud tebing sekitar pemukiman warga karena sering terjadi longsor	Tanah tebing labil, mudah terjadi pengikisan sehingga menyebabkan longsor	kelurahan rontu, Kota Bima	Rontu	Cipta Karya
115	masih banyak jalan berlubang dan drainase yang rusak	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Kelurahan Rontu, Kota Bima	Rontu	Cipta Karya
116	air banyak meluap kebahu jalan dan pemukiman warga	Drainase tersumbat karena material tanah, bebatuan dan lumpur serta sampah masuk ke dalam drainase karena tidak adanya penutup drainase	jalan adipura kelurahan rontu, Kota Bima	Rontu	Bina Marga
117	di butuhkan pelebaran jalan So ndano Wau	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT. 10 Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Bina Marga

118	pada saat hujan terjadi banjir gunung karena materil batu dan kayu selalu nyangkut di jembatan karena jembatan rendah sehingga air mengalir keluar	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak	Jembatan Gerbang Masuk Mako Brimob Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Bina Marga
119	kelurahan sambinae masih kekurangan air bersih sehingga di butuhkan bor dalam	Akses air minum/air bersih masyarakat masih sangat terbatas	RT. 08, RT. 09, RT. 10, RT.11, RT.12 Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Cipta Karya
120	masih kurangnya Akses antar lingkungan diakibatnya tidak adanya jembatan gantung	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak	RT. 06 Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Bina Marga
121	Lapangan Olahraga Sambinae Belum memiliki pagar Pengaman	Bangunan kantor Kelurahan belum memilik pagar	RT. 10 Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Cipta Karya
122	Jalan, Drainase dan Talud Rusak sehingga menyebabkan terganggu aktifitas masyarakat	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT. 01 Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Cipta Karya
123	Jembatan Penghubung Lingkungan dengan Lapangan Pacuan Kuda Sambinae Tidak ada	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak	RT. 01 Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Cipta Karya/Bina Marga
124	Masih Belum ada jalan Inspeksi di bantaran sungai padolo wilayah kelurahan Sambinae	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat tidak adanya jalan penghubung	Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Sumber Daya Alam/Cipta Karya
125	masih terjadi luapan air akibat masih kurangnya Drainase	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	RT.11, RT. 12 Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Cipta Karya

126	kondisi jalan Rusak dan Drainase Rendah dan Rusak	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT. 08 Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Cipta Karya
127	Belum adanya Cekdam/Bendungan di Kawasan Londa sehingga saat hujan air meluap mengalir ke pemukiman masyarakat	Belum ada pintu air untuk mengatur air di sungai, bendungan penahan banjir, maupun di tanggul sungai untuk mengurangi risiko banjir	Kawasan Londa Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Cipta Karya
128	Kondisi Jalan rusak sehingga mengganggu Aktifitas masyarakat maka dibutuhkan Pemeliharaan jalan (Aspal/Hotmix)	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 08 dan RT. 09 Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Cipta Karya/Bina Marga
129	Talud dan Drainase yang tidak ada mengkibatkan air meluap sehingga mengganggu aktifitas masyarakat	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	RT. 06 Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Cipta Karya/Bina Marga
130	Masih Kurangnya sarana dan prasarana olahraga bagi masyrakat maka dibutuhkan Pengalihan fungsi lahan (Halaman Pacuan Kuda Sambinae) Dijadikan Gor	Masih kurang sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat	Lapangan Pacuan Kuda Sambinae Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Cipta Karya
131	Drainase Rusak dibutuhkan Untuk Renovasi	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	RT. 06 Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Cipta Karya/Bina Marga
132	Penyelesaian SK Kumuh Waikota Bima	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat tidak adanya jalan penghubung	RT. 08 dan RT. 09 Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Cipta Karya/Bina Marga
133	Kondisi jalan dan drainase rusak dibutuhkan untuk di renovasi	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	RT.04 dan RT. 09, Kota Bima	Sambinae	Cipta Karya

134	kondisi Talud dan drainase Rusak	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	RT. 09 Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Cipta Karya
135	Terhambatnya aktifitas masyarakat karena kurangnya akses jalan, diharapkan untuk pembukaan jalan baru	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat tidak adanya jalan penghubung	RT. 08 Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Cipta Karya/Bina Marga
136	Terhambatnya altifitas masyarakat dibutuhkan Rabat Gang	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT. 07 Kelurahan Sambinae, Kota Bima	Sambinae	Cipta Karya
137	Jalan penghubung sudah tidak layak dan berlubang	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 07 dan RT 08, Kota Bima	SaraE	Cipta Karya/Bina Marga
138	Air tidak dapat mengalir dgn baik karna penyumbatan saluran dan kerusakan drainase secara permanen	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	RT 06, Kota Bima	SaraE	Cipta Karya
139	Pada musim hujan air sungai meluap ke pemukiman melalui pintu air yg tak memiliki pintu air	Belum ada pintu air untuk mengatur air di sungai, bendungan penahan banjir, maupun di tanggul sungai untuk mengurangi risiko banjir	RT 16 Rw. 06, Kota Bima	SaraE	Sumber Daya Alam
140	masih terdapat Tanggul penahan banjir yg belum d kerjakan di bagian atas	Belum ada pintu air untuk mengatur air di sungai, bendungan penahan banjir, maupun di tanggul sungai untuk mengurangi risiko banjir	RT 16 Rw. 06, Kota Bima	SaraE	Sumber Daya Alam
141	Kondisi Gang Lingkungan yang sangat buruk	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Rt 13 dan 14, Kota Bima	SaraE	Cipta Karya

142	air tidak langsung menuju pembuangan akhir melainkan akan berbelok pada drainase lain sementara akan lebih efektif bila dibuatkan gorong gorong atau buis penghubung	Terjadi luapan air akibat saluran drainase yang tidak ada/rusak	RT 06, Kota Bima	SaraE	Cipta Karya
143	Permohonan Lahan Baru untuk Lokasi Perkuburan Kelurahan Tanjung	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Kelurahan Tanjung, Kota Bima	Tanjung	
144	Pembuatan Rabat Gang Kelurahan Tanjung	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Rt. 01 s/d Rt. 15 Kelurahan Tanjung, Kota Bima	Tanjung	Cipta Karya
145	Normalisasi atau Pemeliharaan Drainase Lingkungan Kelurahan Tanjung	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	Rt. 01 s/d Rt. 15, Kota Bima	Tanjung	Cipta Karya
146	Kurang lancarnya aliran air sehingga mudah terjadinya banjir	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 14, 15, 16 RW 006 Lingkungan Mekar Baru Kelurahan Ule, Kota Bima	Ule	Cipta Karya
147	Saluran air tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 11 RW 05 Lingk. Lewijambu Kelurahan Ule, Kota Bima	Ule	Cipta Karya
148	Saluran air sungai tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak	RT 06 RW 03 Kelurahan Ule, Kota Bima	Ule	Cipta Karya/Bina Marga
149	Akses jalan yang rusak	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak	RT 01 RW 01 Lingk. Tolotongga Kel. Ule, Kota Bima	Ule	Cipta Karya

150	Saluran air tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak	RT 01 RW 01 Lingk. Tolotongga Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
151	Akses jalan yang rusak	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 02 RW 01 Lingk. Tolotongga Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
152	Aliran air sungai tidak normal sehingga harus dilakukan normalisasi agar tidak terjadi banjir	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak	RT 02 RW 01 Lingk. Tolotongga Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Sumber Daya Alam
153	Tidak ada akses jalan sehingga warga kesulitan terhubung	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat tidak adanya jalan penghubung	RT 02 RW 01 Lingk. Tolotongga Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Sumber Daya Alam
154	Saluran air tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir dan harus dibuatkan talut	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak	RT 03 RW 01 Lingk. Tolotongga Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
155	Akses jalan gang yang rusak	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 03 RW 01 Lingk. Tolotongga Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
156	Akses jalan gang yang rusak	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 04 RW 01 Lingk. Tolotongga Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
157	Saluran air tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir dan harus dibuatkan drainase	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 04 RW 01 Lingk. Tolotongga Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya

158	Saluran air tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir dan harus dibuatkan drainase	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 07 RW 01 Lingk. BTN Tolotongga Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
159	Akses jalan yang rusak dan harus dilakukan rabatnisasi	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 07 RW 01 Lingk. BTN Tolotongga Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
160	Saluran air tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir dan harus dibuatkan drainase	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 08 RW 01 Lingk. Al Hilal Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
161	Akses jalan yang rusak dan harus dilakukan pengaspalan	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 08 RW 01 Lingk. Al Hilal Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
162	Akses jalan yang rusak dan harus dilakukan rabatnisasi	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 08 RW 01 Lingk. Al Hilal Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
163	Akses jalan yang rusak dan harus dilakukan pengaspalan	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 09 RW 01 Lingk. Al Hilal Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
164	Saluran air tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir dan harus dibuatkan drainase	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 09 RW 01 Lingk. Al Hilal Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
165	Akses jalan yang rusak dan harus dilakukan rabatnisasi	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 09 RW 01 Lingk. Al Hilal Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya

166	Saluran air tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir dan harus dinormalisasi drainase	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 010 RW 01 Lingk. Al Hilal Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
167	Saluran air tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir dan harus dibuatkan drainase	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 011 RW 01 Lingk. Lewijambu Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
168	Akses jalan yang rusak dan harus dilakukan rabatnisasi	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 011 RW 01 Lingk. Lewijambu Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
169	Aliran air sungai tidak normal sehingga harus dilakukan pembuatan talut agar tidak terjadi banjir	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 011 RW 01 Lingk. Lewijambu Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Sumber Daya Alam
170	Saluran air tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir dan harus diperbaiki saluran irigasi	Akses air minum/air bersih masyarakat masih sangat terbatas	RT 012 RW 01 Lingk. Lewijambu Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
171	Saluran air tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir dan harus dibuatkan drainase	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 012 RW 01 Lingk. Lewijambu Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
172	Akses jalan yang rusak dan harus dilakukan rabatnisasi	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 014 RW 01 Lingk. Mekar Baru Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
173	Saluran air tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir dan harus dibuatkan drainase	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 014 RW 01 Lingk. Mekar Baru Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya

174	Saluran air tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir dan harus dibuatkan drainase	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 015 RW 01 Lingk. Mekar Baru Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
175	Tidak ada akses jalan sehingga warga kesulitan terhubung	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat tidak adanya jalan penghubung	RT 015 RW 01 Lingk. Mekar Baru Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Bina Marga
176	Akses jalan yang rusak dan harus dilakukan pengaspalan	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 015 RW 01 Lingk. Mekar Baru Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya/Bina Marga
177	Akses jalan yang rusak dan harus dilakukan pengaspalan	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 016 RW 01 Lingk. Mekar Baru Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya/Bina Marga
178	Tidak ada akses jalan sehingga warga kesulitan terhubung	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat tidak adanya jalan penghubung	RT 017 RW 01 Lingk. Kedo Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya/Bina Marga
179	Akses jalan yang rusak dan harus dilakukan pengaspalan	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 017 RW 01 Lingk. Kedo Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya/Bina Marga
180	Saluran air tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir dan harus dibuatkan drainase	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 017 RW 01 Lingk. Kedo Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
181	Saluran air tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir dan harus dibuatkan talud	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 018 RW 01 Lingk. Kedo Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya

182	Akses jalan yang rusak dan harus dilakukan perbaikan/ pengaspalan	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 018 RW 01 Lingk. Kedo Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya/Bina Marga
183	Akses jalan yang rusak dan harus dilakukan rabatnisasi gang yang rusak	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 018 RW 07 Lingk. Kedo Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
184	Saluran air tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir dan harus dibuatkan drainase	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 024 RW 08 Lingk. Kedo Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
185	Akses jalan yang rusak dan harus dilakukan pengaspalan jalan yang rusak	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 024 RW 08 Lingk. Kedo Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
186	Saluran air di sepanjang jalan tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir dan harus dibuatkan drainase	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 019 RW 07 Lingk. Ule Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
187	Akses jalan yang rusak dan harus dilakukan rabatnisasi gang	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 019 RW 07 Lingk. Ule Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
188	Akses jalan yang rusak dan harus dilakukan rabatnisasi gang umum	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 020 RW 08 Lingk. Songgela Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
189	Akses jalan rusak akibat hempasan air laut sehingga harus dibuatkan talud	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 020 RW 08 Lingk. Songgela Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Sumber Daya Alam/Cipta Karya
190	Tidak ada akses jalan sehingga warga kesulitan terhubung	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat tidak adanya jalan penghubung	RT 021 RW 08 Lingk. Songgela Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya/Bina Marga

191	Akses jalan yang rusak dan harus dilakukan rabatnisasi gang	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 021 RW 08 Lingk. Songgela Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
192	Saluran air tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir dan harus dibuatkan drainase	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 021 RW 08 Lingk. Songgela Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya
193	Tidak ada akses jalan sehingga warga kesulitan terhubung	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat tidak adanya jalan penghubung	RT 022 RW 08 Lingk. Songgela Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya/Bina Marga
194	Tidak adanya jembatan penghubung sehingga harus dibuatkan jembatan	Aksesibilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat tidak adanya jalan penghubung	RT 022 RW 08 Lingk. Songgela Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Bina Marga
195	Saluran air tidak lancar sehingga mudah terjadinya banjir dan harus dibuatkan drainase	Aksebilitas antar wilayah/kawasan terbatas akibat kondisi jalan lingkungan yang rusak	RT 023 RW 08 Lingk. NSD Kel. Ule , Kota Bima	Ule	Cipta Karya

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.1.1. Terhadap RPJMN

RPJMN 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. 8 Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2025 – 2029 salah satunya adalah Melanjutakan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif dan mengembengkan agromaritim industri di sentra industry melalui peran aktif koperasi. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

3.1.2. Terhadap Renstra PUPR

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2024-2026 terdapat beberapa prinsip dasar yaitu:

1) Membangun Kemandirian, yaitu dengan melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.
2) Menjamin Keadilan, dimana pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warganegara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
3) Menjaga Keberlanjutan, yaitu dengan memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa

mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti.

3.1.2. Terhadap Renstra PUPR Provinsi NTB

Terdapat 4 Tujuan dan Sasaran Strategis RPD Provinsi NTB Tahun 20242026 yang akan didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB sesuai dengan tugas dan fungsi Yaitu Tujuan (3) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan yang Lestari dan Asri dan Sasaran (5) Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara, dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yaitu :

1. Persentase Sanitasi Aman,
2. Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air minum curah lintas kab/kota,
3. Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kab/kota
4. Persentase Kemantapan Sistem Irigasi.

Tujuan (7) Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Daerah dan Sasaran (11) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kawasan Strategis, Kawasan Transmigrasi dan Perdesaan, Mendorong Investasi dan Percepatan Industrialisasi, dengan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yaitu :

Persentase Kesesuaian

1. Pemanfaatan Ruang,
2. Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis.

Tujuan (1) Terwujudnya Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas Daerah Menuju NTB Sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali dan Nusa Tenggara yang Inklusif dan Berkelanjutan dan Sasaran (1) Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah, dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yaitu : Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Konstruksi.

Tujuan (5) Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Sasaran (9) Meningkatnya kemandirian fiskal daerah, dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yaitu : Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas PUPR (Retribusi).

Tujuan yang ingin dicapai Dinas PUPR Provinsi NTB adalah : Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Bidang PUPR dengan Indikator "Cakupan Infrastruktur PUPR yang Mantap". Sasaran Dinas PUPR Provinsi NTB meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan SPM;
2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung Pendayagunaan Sumber Daya Air;
3. Meningkatnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Kawasan Prioritas Bidang PUPR;
5. Meningkatnya Produktifitas masyarakat Jasa Konstruksi;
6. Meningkatnya Penerimaan PAD Bidang PUPR.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja merupakan pedoman perencanaan SKPD untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD secara rinci. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyiapkan Renja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra SKPD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3.2.2. Prioritas dan Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 3 (tiga) tahun mendatang yaitu:

1. Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Pekerjaan Umum melalui indikator – indikator sebagai berikut:
    1) Persentase Peningkatan Luas wilayah Pertanian yang terlayani irigasi Teknis dan Infrastruktur Pengendali Banjir
    2) Persentase Peningkatan Penduduk yang memperoleh akses air minum layak
    3) Persentase Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses Tangki Septik
    4) Persentase Peningkatan Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik
    5) Persentase Peningkatan Bangunan ber PBG
    6) Persentase Jumlah Kawasan Strategis yang tertata dan Persentase Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani
    7) Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap
    8) Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart
2. Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Pekerjaan Umum melalui indikator Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya

Tabel 3.1. Prioritas dan Sasaran di Tahun 2025

No.	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman	Meningkatnya kemantapan infrastruktur	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam	Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan Luas wilayah Pertanian yang terlayani irigasi Teknis

			kondisi baik		dan Infrastruktur Pengendali Banjir
				Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan Penduduk yang memperoleh akses air minum layak
				Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses Tangki Septik
				Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik
				Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan Bangunan ber PBG
				Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Jumlah Kawasan Strategis yang tertata Persentase Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani
				Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap

				Meningkatnya Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart Persentase Tukang yang terlatih	Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart
5.	Ruang kota yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Meningkatnya ruang kota yang sesuai Peruntukannya	Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Tujuan dan Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran
1.	Tujuan: Meningkatnya kemantapan infrastruktur Daerah Sasaran: Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	1. Persentase Peningkatan Luas wilayah Pertanian yang terlayani irigasi Teknis dan Infrastruktur Pengendali Banjir	1,65%
		2. Persentase Peningkatan Penduduk yang memperoleh akses air minum layak	1,91%
		3. Persentase Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses Tangki Septik	1,40%
		4. Persentase Peningkatan Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	4,20%
		5. Persentase Peningkatan Bangunan ber PBG	0.45%
		6. Persentase Jumlah Kawasan Strategis	

		6. Persentase Jumlah Kawasan Strategis yang tertata	71,43%
		7. Persentase Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani	100%
		8. Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	1,06%
		9. Persentase Peningkatan Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart	6,50%
2.	Tujuan: Meningkatnya kemantapan infrastruktur Daerah Sasaran : Meningkatnya ruang kota yang sesuai Peruntukannya	1. Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya	3,36%

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja IKU
1.	Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan Luas wilayah Pertanian yang terlayani irigasi Teknis dan Infrastruktur Pengendali Banjir	1,65%
2.	Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan Penduduk yang memperoleh akses air minum layak	1,91%
3.	Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses Tangki Septik	1,40%
4.	Meningkatnya kemantapan intrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	4,20%

5.	Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan Bangunan ber PBG	0,45%
6	Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Jumlah Kawasan Strategis yang tertata	71,43%
7	Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani	100%
8	Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	1,06%
9	Meningkatnya Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart Persentase Tukang yang terlatih	Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart Persentase Tukang yang terlatih	6,50%
10	Meningkatnya ruang kota yang sesuai Peruntukannya	Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya	3,36%

3.3 Program dan Kegiatan

Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2023/ 2024)	Unit Kerja SKPD Penangung Jawab		Unit Kerja SKPD Penangung Jawab	Lokasi
								2025			
								Target	Rp. (Dalam Juta Rupiah)		
1						2	4	5	6	7	8
1	3	0.0.0.0.1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	11.999.073.421 ,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	82,041,700	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.01	1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	14.617.900	Dinas PUPR	Kota Bima

1	3	0.0.0.0.1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	4.829.000	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	4.829.000	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	2.070.000	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1.498.800	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	4 Lap	9.460.000	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	2 Lap	44.737.000	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	9,225,957,901	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	71 org/Bulan	74 org/Bulan	8.770.332.901	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dok	12 Dok	427.107.000	Dinas PUPR	Kota Bima

1	3	0.0.0.0.1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dok	12 Dok	11.093.000	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	4.780.000	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dok	1 Dok	3.153.000	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Lap	12 Lap	9.492.000	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	36.655.200	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	12 Lap	36.655.200	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1,395,893,880	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29 Buah	20 Paket	359.717.880	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	250 Paket	250 Paket	119.544.000	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan	12 Lap	12 Lap	21.452.000	Dinas PUPR	Kota

						Tamu					Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Lap	100 Lap	895.180.000	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	**311.228.240**	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	12.454.000	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.08	7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	12 Lap	262.527.080	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Lap	12 Lap	36.247.160	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	947.296.500	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23 Unit	23 Unit	212.670.000	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	8 Unit	8 Unit	499.231.500	Dinas PUPR	Kota Bima

						Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					
1	3	0.0.0.0.1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49 Unit	89 Unit	49.190.000	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	2 Unit	186.205.000	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2,310%	1,50%	1.755.408.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,310%	54,00%	1.362.113.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	2	2.01	128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dok Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2 Dok	2 Dok	146.927.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	2	2.01	109	Pembangunan Bangunan Perkuat Tebing	1250 Km	1000 m	783.392.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	2	2.01	114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1 Unit	2 titik	828.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima

1	3	0.0.0.0.1	2	2.01	080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		0,5 Km	288.406.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	2	2.01	075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota		1 Lembaga	142.560.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,310%	54,00%	7.000.000.000	Dinas PUPR	Kota Bima
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,6 Km		852.313.000,00		
1	3	0.0.0.0.1	2	2.02	021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	0,3 Km	750 m	393.295.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2,920%	1,80%	15.601.314.588 ,00	Dinas PUPR	Kota Bima

1	3	0.0.0.0.1	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2,920%	1,80%	15.601.314.588,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	3	2.01	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Dokumen	2 Dokumen	148.804.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	3	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	50 SR		1.058.107.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	3	2.01	26	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	150 SR	3 Liter/ Detik	12.234.776.270,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	3	2.01	32	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	500 SR	400 SR	1.914.357.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	3	2.01	24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		1 Kelompok Masyarakat	58.585.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	3	2.01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	1 Penyelenggara SPAM		99.052.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	3	2.01	29	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1 Unit	1 Unit	1.099.582.318,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2,920%	2,80%	1.028.980.080,00	Dinas PUPR	Kota Bima

1	3	0.0.0.0.1	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,920%	2,80%	1.028.980.080,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	5	2.01	8	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		-	518.989.640,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	5	2.01	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		1 m3/hari	509.990.440,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4,410%	4,00%	6.106.366.551,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	6	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,410%	4,00%	6.106.366.551,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	6	2.01	29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2000 meter	4000 meter	6.106.366.551,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	6	2.01	07	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1500 meter		3.116.290.286,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	5 Sistem Jaringan		12.500.000.000	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	7	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Startegis Daerah Kabupaten/Kota	5 Sistem Jaringan		12.500.000.000	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	7	2.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis			12.500.000.000	Dinas PUPR	Kota Bima

						Daerah Kabupaten/Kota	5 Sistem Jaringan				
1	3	0.0.0.0.1	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4 Dokumen	200 Dokumen	279.510.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4 Dokumen	200 Dokumen	279.510.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	8	2.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	4 Dokumen	200 Dokumen	279.510.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	5 Kawasan	3 Kawasan	21.664.617.498,00	Dinas PUPR	Kota Bima

1	3	0.0.0.0.1	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5 Kawasan	3 Kawasan	21.664.617.498,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	9	2.01	08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	3 Kawasan	21.664.617.498,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	9	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2 Kawasan		13.032.410.252,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2,430%	3,34 Km	37.723.706.400,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2,430%	3,34 Km	37.723.706.400,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	10	2.01	29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2 Dokumen	2 Dok	251.502.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	10	2.01	28	Pengelolaan Leger Jalan	2 Dokumen	2 Dok	142.640.400,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	10	2.01	43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	6 Dokumen	6 Dok	441.659.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima

1	3	0.0.0.0.1	10	2.01	32	Pembangunan Jalan	0,9 Km	2,7 Km	2.752.854.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	10	2.01	33	Rekonstruksi Jalan	1,2 Km	7,52 km	25.043.947,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	10	2.01	34	Pemeliharaan Berkala Jalan	3,52 Km	7,5 km	3.396.728.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	10	2.01	46	Pemeliharaan Rutin Jalan	4,8 Km	2,42 km	510.223.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	10	2.01	40	Pembangunan Jembatan		1 Jembatan	274.040.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	15 Badan Usaha	15 Badan/40 Tenaga Konstruksi	175.925.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	15 Badan Usaha	15 Badan/40 Tenaga Konstruksi	89.406.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	11	2.01	11	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	15 Badan Usaha	15 Tenaga Konstruksi	89.406.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	86.519.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	11	2.02	13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	86.519.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3,650%	12 Dokumen	788.085.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	3,650%	5 Dokumen	444.702.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dok	61.408.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	12	2.01	06	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3 Dok	338.486.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima

1	3	0.0.0.0.1	12	2.01	13	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	1 Kali	60 Orang	44.808.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dok	77.883.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	12	2.03	07	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	1 Dok	1 Dok	77.883.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	265.500.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima
1	3	0.0.0.0.1	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	6 Dok	6 Dok	265.500.000,00	Dinas PUPR	Kota Bima

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Perumusan program dan kegiatan di Kota Bima diarahkan untuk mencapai visi dan misi Walikota Bima terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Walikota terpilih nantinya.

b. Kesediaan infrastruktus yang layak

Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Jalan dan jembatan merupakan prasarana mutlak untuk memperlancar kegiatan ekonomi suatu daerah. Jalan dan jembatan dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas penduduk maupun perdagangan barang antar wilayah.

c. Pengurangan kemiskinan;

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

d. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM);

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bias dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan public meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

e. Pencapaian IKU

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam

RPJMD, Renstra maupun Renja masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra dan Renja di Kota Bima.

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan 2025

No	Sasaran PD	Nama Program/Kegiatan
1	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas infrastruktur Daerah	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** - Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota **Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional** - KegiatanPengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah** - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase** - Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota **Program Penataan Bangunan Gedung** - Kegiatan Penyelenggaraan

		Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung **Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya** - Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota **Program Penyelenggaraan Jalan** - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
2	Sasaran 2 Meningkatkan ketaatan terhadap rencana tata ruang	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi** - Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** - Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan di atas, berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima tahun 2018-2024 melaksanakan 11

program dan 21 kegiatan yang terbagi dalam 2 urusan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 1 Program dengan 6 kegiatan dan 25 sub kegiatan rutin yang mendukung program/kegiatan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari 10 program dengan 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan.

b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan;

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kota Bima sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kota Bima dan melingkupi semua Kelurahan.

c. Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif ; Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah sebesar Rp. 111.489.930.838 dan prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sebesar Rp. 117.064.427.380.

d. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; Pada bagian ini dipaparkan juga rekapitulasi program dan kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan prioritas pembangunan, sebagaimana disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sasaran dan Program/Kegiatan 2025

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan
1	Prioritas 1	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** - Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

		- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota **Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional** - KegiatanPengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah** - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase** - Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota **Program Penataan Bangunan Gedung** - Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung **Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya** - Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota **Program Penyelenggaraan Jalan** - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
2	Prioritas 2	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi** - Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

		- Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

KodeRekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					LINTAS URUSAN								
1	0 3	02			**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	Persentase Peningkatan Luas wilayah Pertanian yang terlayani irigasi Teknis	Kota Bima	"1,50 Km 0,6 Km 7 titik lokasi "	1.755.408.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		102.43%0%	2,743,394,258 2.241,73
1	0 3	02	2.01		- Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kota dalam kondisi baik	Kota Bima	0,60 Km	1.362.113.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10055.13%0 Surat	1,973,287,061 213,36
1	0 3	02	2.01	128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi	Kota Bima	Dokumen	146.927.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		3 Dokumen	217.000.000,00

KodeRekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Bangunan Penampung Air Lainnya	Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya				UMUM			
1	03	02	2.01	109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Kota Bima	1250 m	783.392.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3031,875 meter	1.880.000.000,00
1	03	02	2.01	114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitas	Kota Bima	1000 meter peregi	828.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 titik lokasi Daerah Irigasi	1.416.000.000,00
1	03	02	2.01	080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Kota Bima	500 meter	288.406.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		992 meter	98.000.000,00
1	03	02	2.01	075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	1 tahun	142.560.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Terbentuknya Komisi Irigasi Kota Bim	130.000.000,00
1	03	02	2.02		- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	% Pengembangan dan Peningkatan serta Pemeliharaan Sistem	Kota Bima	2.31%	393.295.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		96 55.00%Buah	795.000.000,00

KodeRekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi di Kota Bima				UMUM			
1	03	02	2.02	021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Bima	300 meter	393.295.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		827 meter	140.000.000,00
1	03	03			**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	Persentase Peningkatan Rumah Tangga pengguna air bersih/air minum	Kota Bima	2,92%	15.601.314.588,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			8.161.000.000,00
1	03	03	2.01		-Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Rumah Tangga pengguna air bersih/air minum	Kota Bima	2,92%	15.601.314.588,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.92%	8.161.000.000,00
1	03	03	2.01	025	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Bima	1 Lembaga	145.210.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
1	03	03	2.01	025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Kota Bima	1 dokumen	148.804.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 kegiatan	138.000.000,00

KodeRekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	03	2.01	026	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Kota Bima	150 kk (0,69 Liter/Detik)	12.234.776.270,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2135 KK	1.508.000.000,00
1	03	03	2.01	032	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Kota Bima	500 SR	1.914.357.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1158 KK	5.144.000.000,00
1	03	03	2.01	024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Kota Bima	1 Laporan	58.585.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 kelompok manyarakat	43.000.000,00
1	03	03	2.01	029	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Kota Bima	1 Laporan	1.099.582.318,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 kegiatan	243.000.000,00
1	03	05	2.01		**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi layak	Kota Bima	2,92%	1.028.980.080,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.92%	7.627.000.000,00

KodeRekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	05	2.01		- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses IPAL	Kota Bima	2,92%	1.028.980.080,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.78%	7.627.000.000,00
1	03	05	2.01	039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Kota Bima	780 kk	518.989.640,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		780 KK	7.407.000.000,00
1	03	05	2.01	019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	Kota Bima	1 Unit	509.990.440,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	220.000.000,00
1	03	06	2.01		**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**	Presentase panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	Kota Bima	4,63%	6.106.366.551,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.63%	7.568.000.000,00
1	03	06	2.01		- Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Saluran drainase dalam kondisi baik	Kota Bima	4,63%	6.106.366.551,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.41%	7.568.000.000,00
1	03	06	2.01	029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kota Bima	1500 meter	6.106.366.551,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1535 m	4.450.000.000,00

KodeRekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	08	2.01		**Program Penataan Bangunan Gedung**	Persentase pendirian bangunan gedung yang sesuai dengan dokumen tata ruang (RTRW/RDTR)	Kota Bima	100%	279.510.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100%	291.000.000,00
1	03	08	2.01		- Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	terselenggaranya urusan bangunan gedung (IMB, SLF dan TABG) serta tahapan renovasi bangunan Masjid Agung Al Muwwahiddin	Kota Bima	1 laporan	279.510.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 laporan	291.000.000,00
1	03	08	2.01	023	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Bima	1 Laporan	279.510.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		300 rekomendasi teknis IMB, 100 SLF, dan 1 laporan penyelenggaraan bangunan gedung/TABG	291.000.000,00
1	03	09	2.01	1	**Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**	Persentase pendirian bangunan gedung yang sesuai dengan dokumen	Kota Bima	5 Kawasan -	21.664.617.498,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		100%-	17.458.000.000,00

KodeRekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						tata ruang (RTRW/RDTR)				UMUM			
1	03	09	2.01		- Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatkan kualitas infrastruktur skala lingkungan	Kota Bima	5 Kawasan	21.664.617.498,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	17.458.000.000,00
1	03	09	2.01	008	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kota Bima	5 Kawasan	21.664.617.498,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			11.551.000.000,00
1	03	10	2.01		**Program Penyelenggaraan Jalan**	Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	Kota Bima	3,34 Km	37.723.706.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-2.43%	34.433.000.000,00
1	03	10	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kondisi Mantap Jalan Kota	Kota Bima	3,34 Km	37.723.706.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80.47%-	34.433.000.000,00
1	03	10	2.01	029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian	Kota Bima	2 dokumen	251.502.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA		16 Dokumen	251.000.000,00

KodeRekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				ALOKASI UMUM			
1	03	10	2.01	028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Kota Bima	2 dokumen	441.659.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen	128.000.000,00
1	03	10	2.01	043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Bima	6 dokumen	441.377.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen	444.000.000,00
1	03	10	2.01	032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kota Bima	2,7 km	2.752.854.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		34,90 Km	5.364.000.000,00
1	03	10	2.01	033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Kota Bima	7,52 km	29.954.060.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.3 km	16.910.000.000,00
1	03	10	2.01	034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Kota Bima	7,5 km	3.396.728.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		14,07 Km	5.200.000.000,00

KodeRekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	10	2.01	046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kota Bima	2,42 km	510.223.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		27,55 Km	636.000.000,00
1	03	10	2.01	040	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Kota Bima	1 Jembatan	274.040.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	2.500.000.000,00
1	03	11	2.01		**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	Meningkatnya kualitas Penyedia Jasa Konstruksi	Kota Bima	15 Badan/40 Tenaga Konstruksi	175.925.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.43%-	247.000.000,00 -
1	03	11	2.01		- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatnya kualitas pembinaan jasa konstruksi daerah	Kota Bima	15 Badan/40 Tenaga Konstruksi	89.406.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	112.000.000,00
1	03	11	2.01	011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kota Bima	15 Tenaga Konstruksi	89.406.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Badan	112.000.000,00
1	03	11	2.02		- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	Kota Bima	1 Dokumen	86.519.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 dokumen	135.000.000,00

KodeRekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	11	2.02	013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Kota Bima	1 Dokumen	86.519.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
1	03	12			**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya	Kota Bima	12 Dokumen	788.085.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.65%	661.000.000,00
1	03	12	2.01		- Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang sudah di tetapkan untuk dijadikan acuan perizinan	Kota Bima	5 Dokumen	444.702.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	391.000.000,00
1	03	12	2.01	003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Kota Bima	1 Dokumen	61.408.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	30.000.000,00
1	03	12	2.01	006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Terlaksnanya Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kota Bima	3 Dokumen	338.486.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
1	03	12	2.01	013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Kota Bima	60 Orang	44.808.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 kali	67.000.000,00

KodeRekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	12	2.03		- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi TKPRD untuk izin investasi	Kota Bima	1 Dokumen	77.883.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen.	78.000.000,00
1	03	12	2.03	007	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Kota Bima	1 Dokumen	77.883.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	78.000.000,00
1	03	12	2.04		- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	6 Dokumen	265.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			181.000.000,00
1	03	12	2.04	004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang -	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Bima	6 Dokumen	265.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen	181.000.000,00

BAB V
PENUTUP

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima tahun 2025 yang didalamnya mencakup Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima tahun 2024 s/d 2026 ini dimaksudkan agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu bidang infrastruktur irigasi, air bersih/minum, pengelolaan air limbah, drainase pembangunan gedung, Penataan bangunan dan lingkungan, jalan dan tata ruang.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima serta seluruh aparatnya diharapkan dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Bima dalam rangka pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima.

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2024



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Jalan Soekarno – Hatta Nomor.54 Kota Bima NTB Kode Pos 84113
Telepon (0374) 43663,43366 Fax. (0374) 646823

KATA PENGANTAR

Puji sukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya jualah penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Tahun 2024 dapat di selesaikan.

Rencana kerja ini adalah merupakan gambaran dari serangkaian pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima yang dilaksanakan pada Tahun 2024.

Kami menyadari Rencana Kerja (RENJA) ini perlu penyempurnaan agar dapat menyajikan data yang lebih imformative dan komunikatif sehingga dapat di pertanngungjawabkan, oleh karena itu masukan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat di harapkan.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Bima Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan media koreksi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kerja dimasa yang akan datang.

Raba - Bima, 28 Januari 2024
Plt. Sekretaris DPRD Kota Bima,

(SUKARNO, SH)
Nip. 19681222 200210 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BIMA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Restra Perangkat Daerah 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 12

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 14

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan dan Sasaran..... 23

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program dan Kegiatan 26

4.2. Analisa Kebutuhan dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Bima..... 32

4.3. Kegiatan Pokok Indikatif 33

BAB V PENUTUP 36

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, secara substansial lebih menekankan kepada pelaksanaan azas Desentralisasi, Undang-Undang ini juga mengisyaratkan kepada Pemerintah Indonesia bahwa semua kebijakan pemerintah agar diformulasikan melalui proses analisis faktual serta dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah (Local Government) sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Local Spesific) dan potensi daerah masing-masing (Local Setting).

Dari beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dikembangkan, prinsip otonomi daerah yang tidak kalah penting adalah bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi Badan Legislatif Daerah, baik sebagai fungsi Legislatif, fungsi Anggaran maupun fungsi Pengawasan. Hal ini merupakan prinsip yang menjadi dasar pijakan analisis untuk memformulasikan strategi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam relevansinya dengan upaya peningkatan peran dan fungsi Badan Legislatif Daerah, dimana elemen pokoknya adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan didalamnya terdapat elemen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada prinsipnya bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan sumber energi bagi pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien di daerah. Tetapi disatu sisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dihadapkan pada berbagai tantangan yang berat dan mendasar.

Persoalan pertama yang dihadapi oleh DPRD adalah mewujudkan dengan sungguh-sungguh rangkaian kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jika DPRD gagal mewujudkan kekuasaan tersebut sebagai realitas politik bukannya tidak mungkin DPRD akan jatuh seperti masa-masa yang lalu.

Masalah kedua adalah pengawasan public yang ekstra ketat dari LSM, Ormas, Media Masa dan kampus. Sektor-sektor masyarakat ini diminta atau tidak diminta akan mempengaruhi proses perumusan kebijakan; dan Persoalan ketiga pihak Eksekutif belum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, system Negara Kesatuan dan Persatuan serta Penguasaan atas Uang Negara membuat Pemerintah masih akan menunjukkan dominasi yang kuat. Secara simultan tantangan-tantangan tersebut akan membuat DPRD kelelahan

dan kewalahan untuk bekerja efektif dan efisien, begitu banyak tantangan yang akan dihadapi oleh DPRD, masyarakat akan memberikan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja DPRD.

Penilaian akuntabilitas kinerja DPRD merupakan penilaian rasional terhadap Lembaga Legislatif dan Lembaga Perwakilan Rakyat. Menciptakan DPRD yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat akan sangat tergantung pada elemen pendukungnya yaitu Sekretariat DPRD. Kualitas dan kuantitas keduanya merupakan faktor yang sangat menentukan.

Secara structural DPRD didukung oleh Sekretariat DPRD yang memiliki peran dan fungsi sebagai pelayanan, fasilitator dan mediator dituntut mengikuti dinamika DPRD. Mengingat hal tersebut, maka strategi efektifitas dan efisiensi peran dan fungsi Sekretariat DPRD merupakan factor penentu, Sekretariat DPRD tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan administrasi saja tetapi ***Sense Of Politik*** juga sangat penting.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan/ fasilitator terhadap DPRD dalam rangka membantu menyelenggarakan tugas dan wewenang DPRD serta memiliki tugas memberikan pelayanan/ fasilitator administrative kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta menyediakan tenaga ahli yang bertugas membantu Anggota DPRD dalam mewujudkan peran dan fungsinya.

Kesuksesan dan kegagalan Sekretariat DPRD dalam mengaktualisasikan peran dan fungsinya akan berakibat pada kesalahan dan kegagalan DPRD dalam mengambilan keputusan. Kesalahan dan kelambanan Sekretariat DPRD mempublikasikan kegiatan dan produk DPRD akan mengurangi citra baik DPRD dikalangan public. Kaitannya dengan uraian diatas maka Sekretariat DPRD dituntut berbenah diri.Salah satunya adalah dengan menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD.

Rencana Kerja dimaksud secara konsepsional juga merupakan perencanaan strategis bagi DPRD, yang merupakan upaya dalam pelaksanaan keseluruhan peran dan fungsi DPRD sebagai Legislatif dan Lembaga Perwakilan Rakyat.

1.2. LANDASAN HUKUM

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuagan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3) Undang-Undang Nomor 15 Tahu 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lenbaran Negara Republik Indonesi Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undand-Undang
6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4725);
7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahu 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang - Undangan
9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4585);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2005 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4585);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelengggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2005 nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4593);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2006 nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4609);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahu 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Istansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
14) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintahan, Pemerintahan Propinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahu 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
17) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
18) Peraturan Pemerinta Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalain dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalain dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013 – 2018;
22) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Biama Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan Lembaran daerah Nomor 88)
23) Peraturan Walikota Bima Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Bima

1.3. Maksud dan Tujuan

31.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Bima ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kota Bima dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat Kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan Good and Clean Governance. Disamping itu, Rencana Kerja (Renja) ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi dan Program serta sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran.

31.2. Tujuan

Sedangakan tujuan penyusunan Renja ini antara lain :

a. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dukumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bima.
b. Tersusunnya instrument pengukuran kinerja pembangunan.

c. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat DPRD Kota Bima .
d. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kota Bima dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan pembanguanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bima.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bima Tahun 2024 sesuai lampiran V huruf c.1.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas latar belakang Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja, Gambaran UmumSekretariat DPRD Kota Bima yang berisi tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan uraian tugas serta landasan hukum dan sistematika penulisan Rencana Kerja.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BIMA TAHUN LALU

Memuat informasi tentang evaluasi pencapaian kinerja indicator makro Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bima serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rencana tahunan 2024.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan tentang Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bima.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 oleh Sekretariat DPRD Kota Bima.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan rencana kerja Seretariat DPRD Kota Bima tahun 2024, khususnya arahan agar rencana kerja dijadikan pedoman penyusunan rencana kerja atau rencana kerja tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Bima.

BAB 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Restra Perangkat Daerah

Gambaran umum program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bima adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bima adalah meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan untuk mendukung meningkatnya kinerja DPRD dan terbinanya hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kota Bima. Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/ kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/ kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Dari pengurusan pencapaian sasaran dapat diuraikan Sasaran Meningkatnya kualitas dukungan Sekretariat DPRD dalam penguatan Kelembagaan DPRD Kota Bima. Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah realisasi kegiatan bimbingan tehnis Anggota Dewan, dan Frekuensi pelaksanaan sosialisasi perda kepada masyarakat dalam setahun sedangkan manfaat yang diharapkan dari sasaran ini adalah efektifitas hasil dari kegiatan pertemuan/rapat yang dilaksanakan, kegiatan sidang yang dilaksanakan, meningkatnya kapasitas dan kompetensi pimpinan dan anggota dewan, serta tersiolisasikannya peraturan daerah yang dihasilkan kepada masyarakat, yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dapat.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Bima tahun 2024 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima.

Pada Tahun anggaran 2023, Sekretariat DPRD Kota Bima mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 31.840.515.087,00 (Tiga Puluh Satu Milyar

Delapan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah) terdiri dari:

I. APBD II

1. Belanja Operasi = Rp. 31.638.515.087,00
2. Belanja Modal = Rp. 202.000.000,00

Adapun realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 31.176.351.640,00 (97,91%) dengan rincian sebagai berikut :

I. APBD II

1. Belanja Operasi = Rp. 30.979.132.390,00
2. Belanja Modal = Rp. 197.219.250,00

Melalui fasilitasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kota Bima tahun 2024 telah mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Bima, baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan sasaran program maupun kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Bima tahun 2024, maka evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bima Tahun 2024 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bima Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2024 adalah meningkatnya indeks kepuasan pelayanan DPRD dengan capaian sebagai berikut :

- ❖ Meningkatnya Cakupan jumlah Rapat yang difasilitasi tempat waktu :
  - Meningkatnya Cakupan Rapat Pembahasan Raperda yang disetujui 83,33%
  - Meningkatnya Cakupan Rapat Paripuna DPRD 130,71%
  - Cakupan Alat Kelengkapan DPRD 100%
- ❖ Meningkatnya Jumlah Hasil Reses 100%
- ❖ Meningkatnya Kapasitas DPRD 100%

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bima tahun anggaran 2024 menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 98,80%.

Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 31.176.351.640,00 atau (97,91%) dari total rencana anggaran sebesar Rp. 31.840.515.087,00 uraian kegiatan beserta target dan realisasi anggaran serta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	PAGU DANA	REALISASI	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**19.616.008.933**	**19.200.463.430**	**97,88**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.614.300	12.571.300	99,66
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.353.805.133	13.177.527.770	98,68
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	485.171.700	478.250.862	98,57
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	674.560.000	671.768.979	99,59
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	204.720.000	199.939.250	97,66
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.620.630.700	1.534.788.847	94,70
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.083.145.000	1.051.368.122	97,07
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1.257.142.100	1.233.416.800	98,11
9	Layanan Administrasi DPRD	924.220.000	840.831.500	90,98
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**12.224.506.154**	**11.975.888.210**	**97,97**
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	933.055.000	858.713.363	92,03
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	840.600.000	809.776.594	96,33
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	70.470.000	48.870.000	69,35
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.439.371.900	2.350.252.367	96,35
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.860.041.000	1.837.923.000	98,81
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	124.074.500	113.510.500	91,49
7	Fasilitasi Tugas DPRD	5.956.893.754	5.956.842.386	100,00
	JUMLAH	**31.840.515.087**	**31.176.351.640**	**97,91**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, ada beberapa kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100% hal ini disebabkan beberapa persoalan antara lain adalah :

- Sumber Daya Manusia yang terbatas baik yang teknis maupun non teknis membuat pelaksanaan kegiatan kurang optimal
- Sarana dan prasarana yang terbatas mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal
- Adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran

Sasaran Strategis Berdasarkan Indikator Sekretariat DPRD tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Target
1	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan DPRD	1	Jumlah Fasilitasi Penyele nggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.		
			a	Jumlah Pembahasan Perda	6 Kali
			b	Jumlah Pembahasan Anggaran	4 Kali
			c	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan	13 Kali
			d	Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi	300 Kali
			e	Jumlah Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD	3 Kali
		2	Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD		140 Kali

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengingat Visi Sekretariat DPRD Kota Bima adalah *Terwujudnya Pelayanan Prima Sebagai Fasillitator Dan Mediator Pelaksanaan Kegiatan*

DPRD Kota Bima dalam menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dan Misi yang ditetapkan adalah membantu DPRD dalam menyeleggarakan tugas dan wewenang, mewujudkan kerjasama antara Pimpinan Dewan, Anggota Dewan dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan pelayanan dan fasilitasi kegiatan rapat-rapat Dewan, maka sulit menentukan tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji. Namun demikian kami mencoba menentukan tolak ukur dan indikator kinerja pelayanan berdasarkan target capaian dari usulan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan analisis kinerja Sekretariast DPRD Kota Bima dinilai dari perbandingan antara realisasi capaian kinerja antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024 dan dari peningkatan capaian yang diraih pada Tahun 2023. Realisasi capaian kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut :

Tabel 3 Realisasi capaian kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2024

Program/ Kinerja		Program Kegiatan Th. 2023					Program Kegiatan Th. 2024				
		Target		Relisasi		Cap.%	Target		Relisasi		Cap.%
1		***2***		***3***		***4***	***5***		***6***		***7***
1	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.	100%		98,80%		100	100%		109,01%		100
a	Jumlah Pembahasan Perda	7	Kali	6	Kali	85,71	6	Kali	6	Kali	83,33
b	Jumlah Pembahasan Anggaran	4	Kali	4	Kali	100,00	4	Kali	4	Kali	100,00
c	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan	27	Kali	27	Kali	100,00	13	Kali	13	Kali	100,00
d	Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi	450	Kali/ Aspirasi	450	Kali/ Aspirasi	100,00	300	Kali/ Aspirasi	300	Kali/ Aspirasi	100,00
e	Jumlah Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD	3	Kali	3	Kali	100,00	3	Kali	3	Kali	100,00
2	Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD	147	Kali	173	Kali	117,69	140	Kali	183	Kali	130,71

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kota Bima tahun 2024, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hambatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bima dapat terjadi apabila kondisi pelaksanaan tugas, fungsi serta wewenang DPRD tidak berjalan sebagaimana yang telah dituangkan dalam agenda kegiatan DPRD. Pada tahun 2024 tidak terjadi hambatan yang signifikan terhadap target yang ditetapkan. Karena hambatan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan target akan bergantung sungguh pada pelaksanaan kegiatan DPRD itu sendiri.
2. Rendahnya etos kerja aparatur; kerana belum adanya kesamaan cara pandang antar instansi dalam menyikapi penegakkan disiplin pada satuan kerja masing-masing yang menyebabkan tidak optimalnya penegakkan disiplin yang berpengaruh pada motivasi kerja;
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pejabat yang ada;

4. Dualisme kedudukan aparatur Sekretariat DPRD Kota Bima, secara operasional berada dibawah Pimpinan DPRD dan secara administrative dibawah Walikota Bima melalui Sekretaris Daerah. Hal ini menuntut suatu pemahaman yang tepat, karena akan sangat berpengaruh pada kinerja Sekretariat DPRD;
5. Kurang cermatnya merencanakan suatu kegiatan dengan waktu yang tersedia;

Dengan hasil analisa secara komprehensif terhadap pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bima pada tahun 2024 dapat dikatakan mengalami keberhasilan walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang merupakan hambatan dengan intensitas kecil tersebut diatas.

Dan selanjutnya, analisis pencapaian kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kota Bima dapat disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1 Jumlah Fasilitasi Penyele nggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.								
	a Jumlah Pembahasan Perda	Kali			6 Kali	7 Kali	7 Kali	6 Kali	5 Kali
2.	b Jumlah Pembahasan Anggaran	Kali			4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali
3.	c Jumlah Pelaksanaan Pengawasan	Kali			25 Kali	27 Kali	27 Kali	13 Kali	13 Kali
4.	d Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi	Kali / Aspirasi			450 Aspirasi	450 Aspirasi	450 Aspirasi	300 Kali	300 Aspirasi
	e Jumlah Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD	Kali			3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali
	2 Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD	Kali			86 Kali	147 Kali	173 Kali	140 Kali	183 Kali

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD, diperlukan peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kota Bima meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

d. Peningkatan kualitas perencanaan dalam penyusunan / perancangan peraturan daerah, peraturan DPRD dan Keputusan DPRD. Isu-isu strategis berdasarkan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Sekretariat DPRD Kota Bima dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga sistem pendukung DPRD, maka isu-isu srategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam satu tahun kedepan adalah :

1) Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diperlukan sistem administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mengikuti perkembangan teknologi, dengan mengikuti perkembangan teknologi diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih efisien dan efektif.
2) Pemantapan Peran Sekretariat DPRD sebagai Fasilitator dan Mediator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD perlu lebih ditingkatkan, Sekretariat DPRD Kota Bima harus selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergidengan lembaga legislatif guna mewujudkan sinersitas kelembagaan di daerah.
3) Sekretariat DPRD Kota Bima sebagai Lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dimana dalam rangka perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secara transparan dan berkoordinaasi dengan Badan Anggaran DPRD serta dilaksanakan secara transparan dengan demikian, perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan indentifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawaban. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Bima ini merupakan isu-isu srategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD

Kota Bima yaitu dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal dapat dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang professional dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

Tabel Sasaran Strategis dan Isu Strategis
Program Kegiatan Sekretariat DPRD Kota BimaTahun 2024

No	Sasaran Strategis	Isu Strategis	Ket
1	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan DPRD	1 Jumlah Fasilitasi Penyele nggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.	
		a Jumlah Pembahasan Perda	
		b Jumlah Pembahasan Anggaran	
		c Jumlah Pelaksanaan Pengawasan	
		d Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi	
		e Jumlah Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD	
		2 Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD	

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD di buat berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026 yang demikian disesuiakan dengan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam tahun 2023 rancangan awal RKPD khususnya program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023 telah dilakukan review terhadap rancangan awal sebagaimana disajikan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN EMERINTAHAN DAERAH	Kota Bima	Cakupan Penunjang Urusan Kantor	100%	19.616.008.933,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bima	Cakupan Penunjang Urusan Kantor	100%	19.200.463.300,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya kegiatan Perencanaan dan evaluasi kinerja selama satu tahun		12.614.300,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya kegiatan Perencanaan dan evaluasi kinerja selama satu tahun		12.571.300,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang dikerjakan	2 dok	1.604.400,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang dikerjakan	2 dok	1.585.400,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan yang dikerjakan	5 dok	2.444.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan yang dikerjakan	5 dok	2.436.400,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi PD yang dikerjakan	3 dok	1.945.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi PD yang dikerjakan	3 dok	1.945.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah DPA - SKPD	1 dok	0,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah DPA - SKPD	1 dok	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah DPA Perubahan - SKPD	1 dok	2.529.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah DPA Perubahan - SKPD	1 dok	2.529.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar yang dikerjakan	1 dok	2.123.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar yang dikerjakan	1 dok	2.115.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen LKIP, LPPD & LPJ yang dikerjakan	3 dok	1.968.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen LKIP, LPPD & LPJ yang dikerjakan	3 dok	1.960.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianyan Administrasi Keuangan		13.353.805.133,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianyan Administrasi Keuangan		13.177.527.770,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Pegawai yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang	13.134.348.733,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Pegawai yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang	12.977.171.370,00	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Bahan yang di Verifikasi	12 berkas	213.817.500,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Bahan yang di Verifikasi	12 berkas	194.717.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dikerjakan	1 dok	3.973.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dikerjakan	1 dok	3.973.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang dikerjakan	2 dok	1.665.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang dikerjakan	2 dok	1.665.000,00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya SDM yang Berkualitas			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya SDM yang Berkualitas			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Bima	Jumlah Peserta Sosialisasi	1800 orang	485.171.700,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Bima	Jumlah Peserta Sosialisasi	1800 orang	478.250.862,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianyan Administrasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianyan Administrasi Umum			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	Jumlah Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	1 paket	18.925.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	Jumlah Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	1 paket	18.925.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	1 tahun	0,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	1 tahun	0,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan	1 paket	35.635.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan	1 paket	35.635.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima	Jumlah Media Langganan Koran dan publikasi / Iklan	1 tahun	0,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima	Jumlah Media Langganan Koran dan publikasi / Iklan	1 tahun	0,00	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar	Kota Bima	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi / Konsultasi Keluar Daerah	1 tahun	620.000.000,00	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar	Kota Bima	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi / Konsultasi Keluar Daerah	1 tahun	617.208.979,00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memadai	1 tahun	204.720.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memadai	1 tahun	199.939.250,00	

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.620.630.700,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.534.788.847,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah ketersediaan pelayanan surat	25.000 Surat	187.456.500,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah ketersediaan pelayanan surat	25.000 Surat	166.491.500,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Pembayaran Iuran Telepon, Wifi, Listrik dan Publikasi/Iklan	12 bulan	387.022.200,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Pembayaran Iuran Telepon, Wifi, Listrik dan Publikasi/Iklan	12 bulan	368.919.447,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Perlalatan Gedung Kantor yang Terpelihara	1 tahun	112.700.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Perlalatan Gedung Kantor yang Terpelihara	1 tahun	107.825.000,00	
	Pemyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kota Bima	Jumlah ATK yang dibeli, Jumlah Jasa Kebersihan Kantor, Jumlah Makanan dan Minuman	1 Tahun	933.452.000,00	Pemyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kota Bima	Jumlah ATK yang dibeli, Jumlah Jasa Kebersihan Kantor, Jumlah Makanan dan Minuman	1 Tahun	891.552.900,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai		1.083.145.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai		1.051.368.122,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara dan Beroperasi dengan Baik, dan Jumlah Kendaraan Dinas yang disewa dan dibayar Pajaknya	1 Tahun	248.580.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara dan Beroperasi dengan Baik, dan Jumlah Kendaraan Dinas yang disewa dan dibayar Pajaknya	1 Tahun	237.309.322,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan yang layak	1 Tahun	0,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan yang layak	1 Tahun	0,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Tahun	834.565.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Tahun	814.058.800,00	
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Terselenggaranya Kesejahteraan DPRD		1.257.142.100,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Terselenggaranya Kesejahteraan DPRD		1.233.416.800,00	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang dikerjakan	1 tahun	76.232.100,00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang dikerjakan	1 tahun	66.427.100,00	

	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Bima	Jumlah PSH, PSL, PDH, PSR dan Pakaian Khusus	130 stel	1.105.910.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Bima	Jumlah PSH, PSL, PDH, PSR dan Pakaian Khusus	130 stel	1.97.989.700,00	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kota Bima	Jumlah Medical Check Up	25 orang	75.000.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kota Bima	Jumlah Medical Check Up	25 orang	69.000.000,00	
9	Layanan Administrasi DPRD		Terselenggaranya Layanan Administrasi		924.220.000,00	Layanan Administrasi DPRD		Terselenggaranya Layanan Administrasi		840.831.500,00	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Bima	Jumlah Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapat Paripurna dan lainnya	1 tahun	924.220.000,00	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Bima	Jumlah Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapat Paripurna dan lainnya	1 tahun	840.831.500,00	
II	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Kota Bima**	**Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**100%**	**12.224.506.154,00**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Kota Bima**	**Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**100%**	**11.975.888.210,00**	
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Terwujudnya Perda		933.055.000,00	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Terwujudnya Perda		858.713.363,00	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Bima	Penetapan Program Pembentukan Perda 2022	1 dok	460.905.000,00	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Bima	Penetapan Program Pembentukan Perda 2022	1 dok	410.946.725,00	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kota Bima	Penetapan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tatib	1 dok	420.800.000,00	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kota Bima	Penetapan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tatib	1 dok	414.431.638,00	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Bima	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda	1 dok	5.800.000,00	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Bima	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda	1 dok	5.785.000,00	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kota Bima	Jumlah Kajian untuk Penetapan Keputusan DPRD, Perauran DPRD dan Rancangan Perda Usulan DPRD	1 dok	42.650.000,00	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kota Bima	Jumlah Kajian untuk Penetapan Keputusan DPRD, Perauran DPRD dan Rancangan Perda Usulan DPRD	1 dok	24.650.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kota Bima	Tersedianya Naskah Akademik Raperda Usulan DPRD	1 dok	2.900.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kota Bima	Tersedianya Naskah Akademik Raperda Usulan DPRD	1 dok	2.900.000,00	

2	Pembahasan Kebijakan Anggaran				840.600.000,00	Pembahasan Kebijakan Anggaran				809.776.594,00	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Bima	Penandatangan Nota Kesepahaman KUA dan PPAS	1 dok	135.150.000,00	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Bima	Penandatangan Nota Kesepahaman KUA dan PPAS	1 dok	128.135.000,00	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Bima	Penandatangan Nota Kesepahaman KUA dan PPAS Perubahan	1 dok	135.150.000,00	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Bima	Penandatangan Nota Kesepahaman KUA dan PPAS Perubahan	1 dok	4.637.142,00	
	Pembahasan APBD	Kota Bima	Penetapan Persetujuan APBD	1 dok	260.150.000,00	Pembahasan APBD	Kota Bima	Penetapan Persetujuan APBD	1 dok	15.170.844,00	
	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Bima	Penetapan Persetujuan APBD Perubahan	1 dok	310.150.000,00	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Bima	Penetapan Persetujuan APBD Perubahan	1 dok	4.000.420,00	
	Pembahasan Laporan Semester	Kota Bima	Pembahasan Laporan Semester oleh Komisi 2	1 dok	0,00	Pembahasan Laporan Semester	Kota Bima	Pembahasan Laporan Semester oleh Komisi 2	1 dok	0,00	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Bima	Penetapan Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban APBD	1 dok	0,00	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Bima	Penetapan Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban APBD	1 dok	0,00	
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				70.470.000,00	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				48.870.000,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Bima	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi 1	6 Kali	9.270.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Bima	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi 1	6 Kali	8.190.000,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Bima	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi 3	6 Kali	8.910.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Bima	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi 3	6 Kali	0,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Bima	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi 1	6 Kali	0,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Bima	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi 1	6 Kali	0,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Bima	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi 2	6 Kali	6.210.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Bima	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi 2	6 Kali	5.670.000,00	

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kota Bima	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi 3	6 Kali	6.210.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kota Bima	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi 3	6 Kali	2.550.000,00	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Bima	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi 2	6 Kali	6.210.000,00	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Bima	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi 2	6 Kali	0,00	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Bima	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi komisi	3 kali	33.660.000,00	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Bima	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi komisi	3 kali	32.460.000,00	
4	Peningkatan Kapasitas DPRD		Tersedianya SDM yang Berkualitas		2.439.371.900,00	Peningkatan Kapasitas DPRD		Tersedianya SDM yang Berkualitas		2.350.252.367,00	
	Orientasi DPRD	Kota Bima	Jumlah Anggota DPRD yang Berkualitas	1 kali / 25 orang	589.371.900,00	Bimbingan Teknis DPRD	Kota Bima	Jumlah Anggota DPRD yang Berkualitas	1 kali / 25 orang	583.871.969,00	
	Bimbingan Teknis DPRD	Kota Bima	Jumlah Anggota DPRD yang Berkualitas	3 kali / 25 orang	1.140.000.000,00	Bimbingan Teknis DPRD	Kota Bima	Jumlah Anggota DPRD yang Berkualitas	3 kali / 25 orang	1.129.087.898,00	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Bima	Jumlah Kelompok Pakar atau Tim Ahli	5 orang	480.800.000,00	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Bima	Jumlah Kelompok Pakar atau Tim Ahli	5 orang	480.100.000,00	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Bima	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	229.200.000,00	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Bima	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	157.192.500,00	
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Terselenggaranya Kegiatan Kemasyarakatan		1.860.041.000,00	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Terselenggaranya Kegiatan Kemasyarakatan		1.837.923.000,00	
	Penyusunan Pokok - pokok Pikiran DPRD	Kota Bima	Jumlah Pokok - pokok Pikiran DPRD	1 Kali	2.680.000,00	Penyusunan Pokok - pokok Pikiran DPRD	Kota Bima	Jumlah Pokok - pokok Pikiran DPRD	1 Kali	2.680.000,00	
	Pelaksanaan Reses	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Reses	3 kali	1.857.361.000,00	Pelaksanaan Reses	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Reses	3 kali	1.835.243.000,00	

6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Terselenggaranya Kegiatan Kemasyarakatan		124.074.500,00	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Terselenggaranya Kegiatan Kemasyarakatan		113.510.500,00	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kota Bima	Penetapan Kode Etik dan Tata Beracara BK	2 dok	11.774.500,00	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kota Bima	Penetapan Kode Etik dan Tata Beracara BK	2 dok	11.764.500,00	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Bima	Jumlah Pengawasan Kode Etik yang dilaksanakan oleh BK	3 dok	112.300.000,00	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Bima	Jumlah Pengawasan Kode Etik yang dilaksanakan oleh BK	3 dok	101.746.000,00	
7	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Tersedianya Fasilitas Koordinasi dan konsultasi		5.956.893.754,00	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Tersedianya Fasilitas Koordinasi dan konsultasi		5.956.842.386,00	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Bima	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	1 tahun	5.956.893.754,00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Bima	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	1 tahun	5.956.842.386,00	

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tingkat penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pelayanan terhadap kebutuhan DPRD dalam menunjang terciptanya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bima, maka Sekretraiat DPRD Kota Bima menetapkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bima, sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan SKPD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1.	Terwujudnya pelayanan yang optimal untuk kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kota Bima	Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan program kerja tahunan	100%	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan DPRD	1 Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.
					a Jumlah Pembahasan Perda
					b Jumlah Pembahasan Anggaran
					c Jumlah Pelaksanaan Pengawasan
					d Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi
					e Jumlah Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD
					2 Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Bima pada Tahun 2024-2026 sebagaimana tujuan dan sasaran srtategis dalam tabel tersebut diatas, Sekretariat DPRD telah menetapkan 1 (satu) program prioritas Yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD yang ditunjang oleh 2 (dua) program pendukung, Sasarana Stategis utama adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Kegiatan DPRD,** sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Program Perioritas yaitu : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

   Melalui program perioritas ini, maka sasaran strategik yang ingin diwujudkan adalah **Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kegiatan DPRD,** dengan indikator kinerja utama yang dijadikan dasar pengukuran kinerja adalah :

   1. Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan :
      a. Jumlah Pembahasan Perda
      b. Jumlah Pembahasan Anggaran
      c. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan
      d. Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi

e. Jumlah Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD

2. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD yang terdiri dari :
   a. Rapat Paripurna
   b. Rapat Panitia Khusus
   c. Rapat Badan Musyawarah
   d. Rapat Badan Anggaran
   e. Rapat Bapemperda
   f. Rapat Badan Kehormatan
   g. Rapat Alat Kelengkapan DPRD
   h. Rapat Fraksi - fraksi
   i. Rapat Komisi – komisi
   j. Rapat Dengar Pendapat

2. Program Pendukung : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dari program ini, ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan adalah

a. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :**
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
   1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

d. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

e. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

g. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

h. **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**

1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

i. **Layanan Administrasi DPRD**

1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

BAB 4 PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang mempunyai tujuan yang sama. Dengan demikian dalam satu program antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya memiliki keterkaitan yang erat, saling bersinergi dan memiliki daya ungkit tinggi. Dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bima Tahun 2024 – 2026 dirumuskan berbagai program dan kegiatan yang bersifat strategis sebagai program-program dan kegiatan pilihan yang memiliki prioritas tinggi untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan adalah:

a. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelayanan lembaga DPRD
b. Mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif
c. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur
d. Meningkatkan sistem perencanaan, pelaksanaan dan control yang optimal

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Bima pada Tahun 2024-2026 telah menetapkan 1 (satu) program perioritas Yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan perioritas serta ditunjang oleh 1 (satu) program pendukung yang dijabarkan dalam 9 (Sembilan) kegiatan dengan 1 (satu) sasaran strategis yang menjadi sasaran utama Sekretariat DPRD Kota Bima, yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap kegiatan DPRD**. Program utama adalah merupakan program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Bima untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Bima dalam mewujudkan Pencapaian sasaran strategik sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2024-2026, sedangkan Program Pendukung adalah merupakan program rutin tahunan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Bima untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Bima. program dan sasaran strategik dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

Program Utama yaitu :

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Dari kegiatan tersebut diatas, penetapan target dan capaiannya dapat digambarkan dalam tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	
		Program/ kegiatan	Anggaran
1	2	3	4
I	1 Jumlah Fasilitasi Penyele nggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.		
	a Jumlah Pembahasan Perda	6 Kali	933.055.000,00
	b Jumlah Pembahasan Anggaran	4 Kali	840.600.000,00
	c Jumlah Pelaksanaan Pengawasan	13 Kali	70.470.000,00
	d Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi	2 Kali / 300 aspirasi	1.860.041.000,00
	e Jumlah Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD	3 Kali	2.439.371.900,00
	2 Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD	140 Kali	6.881.113.754,00
Anggaran Program			12.100.431.654,00

b. Program Pendukung :

a) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 1

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Target	Anggaran
1	2	3	4
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1.604.400,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	2.444.400,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	1.945.500,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	2.529.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	0,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	2.123.000,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	1.968.000,00
Jumlah			12.614.300,00

b) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Tabel 2

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Target	Anggaran
1	2	3	4
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang	13.134.348.733,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 berkas	213.817.500,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	3.973.900,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 dok	1.665.000,00
Jumlah			13.353.805.133,00

c) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Tabel 3

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Target	Anggaran
1	2	5	6
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1.800 orang	485.171.700,00
JUMLAH			485.171.700,00

d) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Tabel 4

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Target	Anggaran
1	2	5	6
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	18.925.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	35.635.000,00
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar	1 tahun	620.000.000,00
JUMLAH			674.560.000,00

e) **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 5

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Target	Anggaran
1	2	5	6
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	204.720.000,00
JUMLAH			204.720.000,00

f) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Tabel 6

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Target	Anggaran
1	2	5	6
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000 Surat	187.456.500,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	387.022.200,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	112.700.000,00
	Pemyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Tahun	933.452.000,00
JUMLAH			1.620.630.700,00

g) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 7

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Target	Anggaran
1	2	5	6
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	248.580.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	834.565.000,00
JUMLAH			1.083.145.000,00

Program/kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bima sesuai dengan dokumen rencana Strategis, maka Sekretariat DPRD telah menetapkan Sasaran Srategis yaitu **Meningkatnya Pelayanan terhadap Kegiatan DPRD dengan 4 (empat) indikator Kinerja,** dari sisi pencapaian target dapat digambarakan pencapaian pada tahun 2024 dan pencapaian pada tahun 2023, melalui tabel sesuai dengan sasaran strategis yang dicapai sebagai berikut :

1. *Sasaran Strategik Utama yaitu* Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Kegiatan DPRD, sesuai dengan tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1

Indikator Kinerja			2023					2024				
			Target		Realisasi		Cap. %	Target		Realisasi		Cap. %
1			2		3		4	4		4		4
1	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.		100,00		103,92		103,92	100,00		109,01		109,01
	a	Jumlah Pembahasan Perda	7	Kali	6	Kali	85,71	6	Kali	5	Kali	83,33
	b	Jumlah Pembahasan Anggaran	4	Kali	4	Kali	100,00	4	Kali	4	Kali	100,00
	c	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan	27	Kali	27	Kali	100,00	13	Kali	13	Kali	100,00
	d	Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi	450	Kali/ Aspirasi	450	Kali/ Aspirasi	100,00	300	Kali/ Aspirasi	300	Kali/ Aspirasi	100,00
	e	Jumlah Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD	3	Kali	3	Kali	100,00	3	Kali	3	Kali	100,00
2	Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD		147	Kali	173	Kali	117,69	140	Kali	183	Kali	130,71

2. Sasaran Strategik Kedua yaitu Terwujudnya Urusan Pemerintahan Daerah, sesuai dengan tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2

NO	INDIKATOR KINERJA	Program Kegiatan Tahun 2024			Program Keg. Tahun 2025
		Target	Relisasi	Cap.%	Target
	1	2	3	4	5
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	100%	2 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dok	5 dok	100%	2 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dok	3 dok	100%	2 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	100%	2 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	100%	2 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	1 dok	100%	2 dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	100%	2 dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52 org	52 org	100%	52 orang
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 berkas	12 berkas	100%	12 berkas
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	1 dok	100%	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 dok	2 dok	100%	2 dokumen
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1800 orang	1800 orang	100%	1800 orang
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100%	1 paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket	100%	1 paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit / th	4 unit / th	100%	4 unit / th
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000 Surat	25.000 Surat	100%	25.000 Surat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan

	dan Listrik				
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun
	Pemyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun

4.2 ANALISA KEBUTUHAN DAN PERKIRAAN SUMBER-SUMBER PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BIMA

Dengan mempedomani program dan kegiatan yang telah disusun untuk dilaksanakan pada tahun 2024, maka dengan dukungan dana dari APBD Kota Bima diharapkan semua program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanaan dengan baik, setelah direncanakannya program dan kegiatan dimaksud maka kedepan pengukuran kinerja dengan penilaian kuantitatif dapat dihasilkan.

Aktualisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bima berupa pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh sumber pembiayaan yang berasal dari Dana APBD. Pembiayaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bima tahun 2024 sangat ditentukan oleh penetapan sasaran kinerja dan plafon anggaran yang tersedia pada beberapa sumber pembiayaan sebagaimana tersebut diatas.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga visi dan misi dapat diwujudkan.Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta program yang telah ditetpkan, Sekretariat DPRD Kota Bima memperoleh sejumlah dana rutin atau belanja tidak langsung dan dana pembangunan atau belanja langsung yang bersumber dari APBD Kota Bima. Belanja tidak langsung dipergunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan administrasi sedangkan belanja langsung digunakan untuk merealisasikan program pembangunan.

Program dan kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bima Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN APBD

No.	URAIAN	PAGU DANA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB /KOTA	**19.616.008.933**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.614.300
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.353.805.133
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	485.171.700
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	674.560.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	204.720.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.620.630.700
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.083.145.000
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1.257.142.100
9	Layanan Administrasi DPRD	924.220.000

	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**12.224.506.154**
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	933.055.000
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	840.600.000
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	70.470.000
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.439.371.900
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.860.041.000
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	124.074.500
7	Fasilitasi Tugas DPRD	5.956.893.754
	JUMLAH	**31.840.515.087**

4.3 KEGIATAN POKOK INDIKATIF

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Bima pada Tahun 2024-2026 telah menetapkan 1 (satu) program perioritas Yaitu **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** yang ditunjang oleh 1 (satu) program pendukung **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** yang dijabarkan dalam 16 kegiatan dengan 1 (satu) sasaran srategik yang menjadi sasaran utama Sekretariat DPRD Kota Bima, yaitu **Meningkatnya Pelayanan terhadap Kegiatan DPRD,** dengan Indikator Kinerja Utama yang dijadikan tolok ukur pelaksanaan program adalah :

1. Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.
    a. Pembahasan Peraturan Daerah yang dilaksanakan
    b. Pembahasan Anggaran yang dilaksanakan
    c. Pelaksanaan Kontrol/Pengawasan DPRD
    d. pelaksanaan Reses DPRD yang dilaksanakan
    e. pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang diselesaikan
    f. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD yang diselesaikan tepat waktu
2. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD

Dari Sararan Strategis dan indicator kinerja utama tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kota Bima telah menetapkan program utama yaitu **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
4. Peningkatan Kapasitas DPRD;
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
7. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD;

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut Sekretariat DPRD Kota Bima menetapkan Program dukungan yang terdiri dari **Program Penunjang**

Urusan Pemerintahan Daerah, sasaran strategik ini diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
9. Layanan Administrasi DPRD.

BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja sangat di tentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang di bangun untuk mencapai visi dan misiyang telah di canangkan.

Tahap perencanaan merupakan faseh yang sangat menentukan realisasi dari kebijakan dan implementasi program yang di nilai tepat menurut kajian teoritik.Idiealisme perencenaan tidak selalu paraler dengan kenyataan. Untuk itu perubahan organisasi perlu terus di cermati, karena akan berpengahu terhadap perubahan strategis, program serta kegiatan - kegiatan yang di butuhkan.

Sekretariat DPRD merupakan unsurpelayanan dan fasilitator terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka membantu dalam manyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, memiliki tugas memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan menyediakan tenaga ahli yang tugasnya membantu Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Kedepan peranan Sekretariat DPRD Kota Bima akan segera di fokuskan pada peran dan fungsi sebagai pelayanan, fasilitator dan mediator yang selalu di tuntut untuk mengikuti dinamikan DPRD.

Demikian rencana ini di susun dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas – tugas Sekretariat DPRD Kota Bima yang tertuang dalam program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Raba - Bima, Januari 2025
Sekretaris DPRD Kota Bima,

(SISWADI, S.Si,. M.Ak)
Nip. 19810925 200604 1 007

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA
TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Secara Nasional dalamsepuluh tahun terakhir, konsentrasi arah pembangunan nasional telah mengalami pergeseran, yang semula dititikberatkan pada sektor pertanian dan indistri, kini bergeser ke arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dimungkinkan karena potensi kelautan dan perikanan memiliki landasan yang kuat untuk dijadikan isu utama dalam pembangunan nasional baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Beberapa landasan tersebut antara lain; **Pertama** : melimpahnya sumber daya kelautan dan perikanan yang kita miliki, dengan sejumlah keunggulan komparatif dan kompetitif yang sangat tinggi; **Kedua** : keterkaitan yang kuat antara industri yang berbasis kelautan dan industri yang berbasis ekonomi lainnya; **Ketiga** : sumber daya kelautan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui ; **Keempat** : luasnya perairan dengan jaminan keamanan yang cukup menjadi simbol bargaining politik luar negeri yang kuat; **Kelima** : dari aspek sosial budaya orientasi dibidang kelautan dan perikanan dapat *menggugah* bangkitnya nilai budaya dan tradisi kita sebagai masyarakat bahari.

Untuk itu dalam memaksimalkan pemanfaatan potensi SDA tersebut, perlu merancang dan merumuskan arah pembangunan melalui kepekaan dan ketajaman analisa secara matang sesuai dengan potensi dan daya dukung yang tersedia. Karena itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) harus mempertimbangkan hasil analisa dan kajian yang komprehensif dari semua pihak, serta bercermin kepada arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) serta Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun.

Demikian kata pengantar dari kami, semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi referensi bagi kita semua dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara bijak dan berkesinambungan.

Raba-Bima, 26 April 2023

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kota Bima

PEMERINTAH KOTA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIMA

Ir. H. Sarafuddin,MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19640715 199203 1 017

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana Kerja SKPD 2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……			I
Daftar Lampiran ……			II
BAB I	PENDAHULUAN…….……..		1
	1.1	Latar Belakang .....……..	1
	1.2	Landasan Hukum.....…….	2
	1.3	Maksud dan Tujuan….....	4
	1.4	Sitematika Penulisan.....	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA TAHUN 2023.....		5
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Ranja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.....……..	5
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.....…….	16
	2.3	Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.……...……...	19
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD……..	23
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……..	27
` BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH…….		28
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	28
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah……...	31
	3.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan……	32
	3.4	Program dan Kegiatan…….	33
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH…….		36
BAB V	PENUTUP……		44

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……			I
Daftar Lampiran ……			II
BAB I	PENDAHULUAN…….……..		1
	1.1	Latar Belakang .....……..	1
	1.2	Landasan Hukum.....…….	2
	1.3	Maksud dan Tujuan….....	4
	1.4	Sitematika Penulisan.....	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA TAHUN 2022.....		5
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Ranja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.....……..	5
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.....…….	16
	2.3	Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.……..…….	19
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD……..	23
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……..	27
` BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH……		31
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	28
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah……...	31
	3.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan……	32
	3.4	Program dan Kegiatan…….	33
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH…….		36
BAB V	PENUTUP……		44

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya perhatian yang cukup besar terhadap pembangunan kelautan dan perikanan baik secara nasional maupun regional dilandasi oleh pemikiran bahwa pembangunan sektor ini sangat strategis untuk mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Sejalan dengan itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan desentralisasi pembangunan dengan memberikan otonomi kepada daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi Daerah dapat mendorong keikutsertaan masyarakat dalam mengambil kebijakan pembangunan di daerah, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan dengan memperhatikan potensi daerah baik keuangan maupun sumber daya yang dimiliki.

Untuk menjamin kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan berhasil guna maka diperlukan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah salah satu diantaranya adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja (Renja) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pemerintah Daerah melalui Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Renja SKPD yang dihasilkan melalui forum SKPD dengan cara menyerasikan subtansi antar rancangan Renja masing-masing SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemuktahiran rancangan RKPD. Rancangan RKPD tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai Forum antara

pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Setelah rancangan akhir RKPD disusun, maka Kepala Daerah menetapkan rancangan RKPD menjadi RKPD Periode 1 tahun dengan Peraturan Daerah, yang selanjutnya akan digunakan dalam menyusun RAPBD Kota Bima Tahun 2024.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima diharapkan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan khususnya Tahun 2024 akan semakin baik.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Nomor Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
14. Peraturan Walikota Bima Nomor : 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima;

15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 239).
16. Peraturan Walikota Bima Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 706).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Renja ini disusun agar dapat dijadikan, sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima selama kurun waktu Tahun 2024. Selain itu Renja disusun sebagai acuan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun lalu dan rencana kinerja tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, ditetapkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima

Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Meliputi Kegiatan :
    1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        a. Kinerja fisik pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencapai 100%. Kinerja keuangan tidak terserap 100%, karena beberapa hal antara lain adanya sisa dari sisa anggaran pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkatan daerah dan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd.
        b. Kinerja fisik pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah telah mencapai 100%. Kinerja keuangan terserap 100%.
        c. Kinerja fisik pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah telah mencapai 100%. Kinerja keuangan tidak terserap 100%, karena beberapa hal antara lain adanya sisa pada sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang – undangan.
        d. Kinerja fisik pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah mencapai 100%. Kinerja keuangan terserap 100%.
        e. Kinerja fisik pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah telah mencapai 100%. Kinerja keuangan terserap 100%.

f. Kinerja fisik pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah telah mencapai 100%. Kinerja keuangan tidak terserap 100%, karena beberapa hal antara lain adanya sisa anggaran dari belanja barang dan jasa khususnya belanja alat tulis kantordan belanja jasa kantor

g. Kinerja fisik pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah telah mencapai 100%. Kinerja keuangan tidak terserap 100%, karena beberapa hal anatar lain adanya sisa belanja pemeliharaan pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya serta pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Meliputi Kegiatan :
   1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
   3. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
      a. Kinerja fisik pada kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota telah mencapai 100%. Kinerja keuangan tidak terserap 100%.
      b. Kinerja fisik pada kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota sudah mencapai 100%. Kinerja keuangan terserap 100%.
      c. Kinerja fisik pada kegiatan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota telah mencapai 100%, Kinerja keuangan terserap 100%.
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Meliputi Kegiatan :
   1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
   2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

a. Kinerja fisik pada kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan telah mencapai 100%. Kinerja keuangan tidak terserap 100% karena adanya sisa anggaran pada sub kegiatan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil
b. Kinerja fisik pada pengelolaan pembudidayaan ikan telah mencapai 100%. Kinerja keuangan tidak terserap 100% karena adanya sisa anggaran pada sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Meliputi Kegiatan :
   1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
   2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
   3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
      a. Kinerja fisik pada kegiatan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil telah 100%. Kinerja keuangan terserap 100%.
      b. kinerja fisik kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil sudah mencapai 18,66%. Kinerja keuangan tidak terserap 100%, karena beberapa hal anatar lain adanya sisa belanja pemeliharaan pada sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
      c. kinerja fisik kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota telah mencapai 100%.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kota Bima

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bima Lembar : .....

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)(tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3.	25				**Kelautan dan Perikanan**									
3.	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Presentase Kualitas Penyajian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Prangkata Daerah**	100 %							
3.	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	1	9	27 Dokumen	3

3.	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokemen	1	Dokumen	1	dokemen	1	Dokemen	1	1	3	Dokemen	3
3.	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1	Dokemen	1	Dokemen	1	Dokemen	1	Dokemen	1	1	3	Dokemen	3
3.	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1	Dokemen	1	Dokemen	1	Dokemen	1	Dokemen	1	1	3	Dokemen	3
3.	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1	Dokemen	1	Dokemen	1	Dokemen	1	Dokemen	1	1	3	Dokemen	3
3.	25	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunanan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1	Dokemen	1	Dokemen	1	Dokemen	1	Dokemen	1	1	3	Dokemen	3
3.	25	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokemen	2	Dokemen	1	Dokemen	1	Dokemen	1	2	5	Dokemen	2,5
3.	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokemen	2	Dokemen	1	Dokemen	1	Dokemen	1	2	5	Dokemen	2,5
3.	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan**	4	Dokumen											
3.	**25**	**01**	**2.02**	**0001**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	24	Orang	24	Orang	31	Orang	31	Orang	1	24	79	Dokumen	3,29
3.	**25**	**01**	**2.02**	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	1	12	36	Orang	3,00
3.	**25**	**01**	**2.02**	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	3	Bulan	3,00
3.	**25**	**01**	**2.02**	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	1	2	6	Dokumen	3,00
																		Dokumen	

3.	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**	25	Orang									
3.	**25**	**01**	**2.05**	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	25	Orang	25	Orang	50	Orang	50	Orang	1	25	100	Orang	4,00
3.	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	80000	Lembar									
3.	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan perelengkapan kantor	7	Unit	7	Unit	7	Unit	7	Unit	1	7	21	Unit	3,00
3.	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan	80000	Lembar	80000	Lembar	80000	Lembar	80000	Lembar	1	80000	240000	Lembar	3,00
3.	25	01	2.06	0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	25	Orang	25	Orang	25	Orang	25	Orang	1	25	75	Orang	3,00
3.	**25**	**01**	**2.07**		**Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia**													
3.	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4	Unit	4	Unit	4	Unit	4	Unit	1	4	12	Unit	3,00
3.	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Permerintah Daerah**	3	Kegiatan											
3.	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim Selama 1 Tahun	500	Surat	500	Surat	500	Surat	500	Surat	1	500	1500	Surat	3,00
3.	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	1	12	36	Bulan	3,00
3.	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang di perlihara**	57	Unit											

3.	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak	22	Unit	22	Unit	22	Unit	22	Unit	1	22	66	Unit	3,00
3.	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	35	Unit	35	Unit	35	Unit	35	Unit	1	35	105	Unit	3,00
3.	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	50	%	50	%	50	%	50	%	1	35	135	%	2,70
3.	25	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	2,01	%											
3.	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Data/Informasi Sumber Daya Ikan, Sarana, dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia**	723	Unit											
3.	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan informasi Sumber daya ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Dokumen	1	Dok	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	3	Dokumen	3,00
3.	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	723	Unit	723	Unit	202	Unit	202	Unit	1	723	1648	Unit	2,28
3.	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Nelayan dan Unit Usaha yang diberdayakan**	23	Kelompok											
3.	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	10	Kelompok	10	Kelompok	10	Kelompok	10	Kelompok	1	10	30	Kelompok	3,00
3.	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5	Kelompok	5	Kelompok	5	Kelompok	5	Kelompok	1	5	15	Kelompok	3,00

3.	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	8	Unit Usaha	8	Unit Usaha	8	Unit Usaha	8	Unit Usaha	1	8	24	Unit Usaha	3,00
3.	**25**	**03**	**2.04**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang memiliki izin**	1	Dokumen											
3.	25	03	2.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	50	Dokumen	50	Dokumen	1	1	52	Dokumen	52,00
3.	**25**	**04**			**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	1,55	%											
3.	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah kelompok pembudidaya daya ikan Skala kecil yang diberdayakan**	20	Kelompok											
3.	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10	Kelompok	10	Kelompok	5	Kelompok	5	Kelompok	1	10	25	Kelompok	1,25
3.	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5	Kelompok	5	Kelompok	5	Kelompok	5	Kelompok	1	5	15	Kelompok	1,50
3.	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5	Kelompok	5	Kelompok	0	0	0	Kelompok	0	5	10	Kelompok	2,00

3.	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah pembudidaya ikan, luas lahan, produksi ikan, sarana dan prasarana yang dikelola**	**10**	**Unit**									
3.	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	4	Dokumen	0	0	0	0	0	4	0	Dokumen	0,00
3.	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Unit	5	Unit	4	Unit	4	Unit	1	5	14	Unit	3,50
3.	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Unit	5	Unit	11	Unit	11	Unit	1	5	21	Unit	4,20
3.	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	6	Dokumen	6	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	1	6	14	Dokumen	2,80
3.	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20	Orang	20	Orang	20	Orang	20	Orang	1	20	60	Orang	10,00
3.	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan dan Persentase Peningkatan Produk Olahan Hasi Perikanan Serta Tingkat Angka Konsumsi Ikan Perkapita per Tahun**	3,3/	%											
3.	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil**	**Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang terbit**	4	Dokumen											
3.	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	1	4	12	Dokumen	3,00

3.	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan**	30	Unit Usaha									
3.	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30	Unit Usaha	30	Unit Usaha	30	Unit Usaha	30	Unit Usaha	1	30	90	Unit Usaha	3,00

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima 2023

No	Indikator	SPM/Stan dari Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			1,5 %	1,55 %	1,74 %	1,77 %	1,55 %	103 %	1,74 %	1,77 %	
2	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya			1,2 %	1,20 %	1,36 %	1,52 %	92,49	92,29 %	1,36 %	1,52 %	
3	Persentase Produk Olahan hasil perikanan			20 %	2,1 %	2,2 %	2,3 %	489,83 %	55 %	60 %	65 %	
	Angka Konsumsi Ikan (AKI)			40,9 Kg/kapita/ thn	42,6 Kg/kapita/ thn	45,2 Kg/kapita/ thn	47,8 Kg/kapita/ thn	41,17 Kg/kapita/ thn	42,6 Kg/kapita/ thn	45,2 Kg/kapita/ thn	47,8 Kg/kapita/ thn	

Analisis kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Capaian jumlah produksi perikanan tangkap Tahun 2023 adalah sebesar 2.410,10 ton atau 105,71 % dari target sebesar 2.279,90 ton. Capaian tersebut meningkat sebesar 32,00 Ton (1,33%) dari tahun 2022. Peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 disebabkan oleh semakin tertib dan berkualitasnya pendataan statistik perikanan tangkap serta adanya program/kegiatan yang mendukung peningkatan upaya penangkapan seperti penyediaan sarana prasarana perikanan tangkap. Adapun perbandingan capaian dari indikator "Jumlah produksi perikanan tangkap" pada Tahun 2022 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA Tahun 2018-2023 MENCAPAI ANGKA 2.378,10 Ton atau sebesar 21,57 % dimana target kinerja pada akhir periode renstra adalah sebesar 11,026,21 Ton. Dengan demikian maka target Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan

untuk periode 2018-2023 belum mencapai target. Perkembangan produksi perikanan tangkap selama Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

Tahun	JUMLAH PRODUKSI (Ton)
2018	2,074,1
2019	2,093,9
2020	2.313,55
2021	2.262,56
2022	2.378,10
2023	2410,10

2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Capaian jumlah produksi perikanan budidaya pada Tahun 2023 adalah sebesar 821,09 ton, atau tercapai sebesar 92,73 % dari target 885,5 Ton dari target, capain ini meningkat sebesar 11,23 Ton (1,37 %) dari tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2018-2023, maka capaian indikator produksi perikanan budidaya pada Tahun 2023 adalah sebesar 92,73 %.

Perkembangan produksi perikanan budidaya Tahun 2018 s/d 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

Tahun	JUMLAH PRODUKSI (Ton)
2018	773,63
2019	776,12
2020	785,9
2021	794,13
2022	809,86
2023	821,09

3. Tingkat Konsumsi Ikan per kapita per tahun

Capaian Tingkat Konsumsi Ikan di Kota Bima pada Tahun 2023 adalah sebesar 46,82 kg/kapita/tahun atau 101,34 % dari target 46,2

kg/kapita/tahun. capain ini menurun sebesar 4 kg/kapita/tahun atau 7,87 % dari tahun 2022.

Hal ini terjadi karena adanya program/kegiatan yang mendukung pengolahan dan pemasaran seperti penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil yang bersumber dari APBD II. Disamping itu, peningkatan jumlah konsumsi ikan disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam menkonsumsi ikan terutama ikan segar. Perkembangan tingkat konsumsi ikan selama kurun waktu 2018 s/d 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

CAPAIAN TINGKAT KONSUMSI IKAN

Tahun	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg Per Kapita)
2018	42,33
2019	38,46
2020	41,17
2021	42,15
2022	50,82
2023	46,82

4. Jumlah Produk Pengolahan Hasil Perikanan

Capaian kinerja produk olahan hasil perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2023 sebesar 500.276 ton atau mencapai 545,41 % dari target 917,25 ton jika di bandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 494,34 ton atau 98,81 %. Jika dibandingkan dengan target Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2018-2023, maka capaian indikator Jumlah Produk Olahan pada Tahun 2022 adalah 661,13 % atau sudah memenuhi target.

Pengembangan produk hasil perikanan yang bernilai tambah merupakan suatu hal yang harus terus dilakukan, hal ini disebabkan karena adanya beberapa pergeseran yang terjadi di masyarakat antara lain adanya perubahan gaya hidup, perubahan pola konsumsi, banyaknya wanita/ibu rumah tangga yang bekerja, konsumen yang lebih menyukai produk yang lebih praktis, daya simpan produk olahan lebih lama dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka untuk tahun berikutnya peningkatan produk olahan akan dilakukan melalui beberapa

cara antara lain lebih mengintensifkan pembinaan pada kelompok pengolahan yang ada baik melalui pembinaan rutin maupun Bimbingan Teknik atau pelatihan-pelatihan, promosi produk olahan baik skala lokal maupun nasional, pembentukan kelompok-kelompok pengolahan yang baru serta mengaktifkan kembali kelompok-kelompok yang sudah non aktif.

CAPAIAN BERDASARKAN JUMLAH PRODUK OLAHAN HASIL PERIKANAN

Tahun	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)
2018	857,57
2019	6.324,63
2020	4.211,88
2021	6.746,59
2022	5.930,00
2023	500.276

5. Jumlah Kelompok Madya

Capaian kinerja terhadap jumlah kelompok madya pada Tahun 2023 dari target 24 kelompok terealisasi 24 kelompok atau 100 %.

Untuk analisis terhadap capaian kinerja terhadap peningkatan jumlah kelompok madya rata-rata mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2018-2023, maka capaian indikator pada Tahun 2023 adalah sebesar 24 Kelompok dari target sebesar 24 kelompok atau 100 %.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima yaitu :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan luas wilayah Kota Bima yang cukup luas.
2. Harus jelasnya target/sasaran program/kegiatan sehingga tidak terjadi salah sasaran.
3. Peningkatan produksi dan produktivitas pembibitan/pembenihan sehingga bisa menghasilkan bibit unggul/benih unggul lokal.

4. Pengembangan sistem budidaya perikanan yang mampu meningkatkan produksi sehingga bisa secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dari luar daerah.
5. Peningkatan teknologi perikanan tepat guna di masyarakat sehingga dapat memudahkan dalam budidaya ikan.
6. Peningkatan pemasaran dengan pangan olahan hasil ikan yang bervariasi.
7. Peningkatan kelembagaan yang mendukung produktivitas usaha perikanan.
8. Pengembangan infrastruktur dibidang kelautan dan perikanan yang mendukung upaya pembibitan, budidaya, penangkapan, pengolahan, pemasaran dan pengelolaan wilayah pesisir.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Bima

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan Lembar....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bima	Presentase Kualitas Penyajian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Prangkata Daerah	100%		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kota Bima	Presentase Kualitas Penyajian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Prangkata Daerah	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase kualitas penyajian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.685.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase kualitas penyajian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.685.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kualitas penyajian perencaan dan evaluasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1.979.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kualitas penyajian perencaan dan evaluasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1.979.500	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kualitas penyajian perencaan dan evaluasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1.979.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kualitas penyajian perencaan dan evaluasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1.979.500	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kualitas penyajian perencaan dan evaluasi kinerja SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kualitas penyajian perencaan dan evaluasi kinerja SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kualitas penyajian perencaan dan evaluasi kinerja SKPD	2 Dokumen	3.499.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kualitas penyajian perencaan dan evaluasi kinerja SKPD	2 Dokumen	3.499.800	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kualitas penyajian perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	2 Dokumen	3.888.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kualitas penyajian perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	2 Dokumen	3.888.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai yangmemperoleh gaji dantunjangan serta jumlahpegawai yang memperolehjaminan pemeliharaankesehatan	1 tahun	3.038.117.926	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai yangmemperoleh gaji dantunjangan serta jumlahpegawai yang memperolehjaminan pemeliharaankesehatan	1 tahun	3.260.541.162	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	12 Dokumen	139.347.700	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	12 Dokumen	178.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	4.805.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	4.805.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan	2 Dokumen	25.139.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan	2 Dokumen	25.139.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	1 Kegiatan	11.011.900	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	1 Kegiatan	11.011.900	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan Jumlah alat tulis kantor Jumlah peralatan dan mesin perelengkapan	7 unit	7.572.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan Jumlah alat tulis kantor Jumlah peralatan dan mesin perelengkapan	7 unit	7.572.000	

			kantor					kantor			
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan Jumlah peralatan dan mesin perelengkapan kantor	80000 lembar	9.212.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan Jumlah peralatan dan mesin perelengkapan kantor	80000 lembar	9.212.500	
3	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	25 orang	250.000.000	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	25 orang	250.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin perelengkapan kantor	4 unit	37.025.850	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin perelengkapan kantor	4 unit	37.025.850	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah surat terkirim	500 Surat	20.634.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah surat terkirim	500 Surat	20.634.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Kegiatan	54.624.244	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Kegiatan	55.736334	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan yang layak	22 unit	112.160.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan yang layak	22 unit	112.160.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	35 Unit	20.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	35 Unit	20.300.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	50 %	45.750.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	50 %	45.750.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kota Bima	Jumlah produksi Perikanan Tangkap	22007,7 Ton		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Kota Bima	Jumlah produksi Perikanan Tangkap	22007,7 Ton		
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Asakota, Kolo	Jumlah data dan Informasi sumberdaya ikan	1 Dokumen	20.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Asakota, Kolo	Jumlah data dan Informasi sumberdaya ikan	1 Dokumen	20.000.000	
2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, Asakota, Kolo	tersedianya sarana penunjang perikanan tangkap	375 unit	924.936.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, Asakota, Kolo	tersedianya sarana penunjang perikanan tangkap	375 unit	307.000.000	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya kapasitas SDM nelayan kecil	10 kelompok	47.373.700	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya kapasitas SDM nelayan kecil	10 kelompok	27.000.000	
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kota Bima,RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Asakota, Ule	Meningkatnya jumlah kelompok yang terbentuk	5 kelompok	23.325.700	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kota Bima,RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Asakota, Ule	Meningkatnya jumlah kelompok yang terbentuk	5 kelompok	17.000.000	
3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Asakota, Ule	Meningkatnya jumlah lembaga usaha perikanan tangkap yang mendapat fasilitas bantuan pendanaan	8 kelompok	28.834.700	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Asakota, Ule	Meningkatnya jumlah lembaga usaha perikanan tangkap yang mendapat fasilitas bantuan pendanaan	8 kelompok	21.000.000	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung	Meningkatanya Jumlah Kapal Yang Terdaftar	50 unit	30.456.200	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung	Meningkatanya Jumlah Kapal Yang Terdaftar	50 unit	19.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kota Bima,	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	858,25 Ton		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Kota Bima,	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	858,25 Ton		
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					
1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, RasanaE Timur, Oi Fo'o Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Ule Kota Bima, Mpunda, Santi Kota Bima, Mpunda, Mande	Meningkatnya penyediaan bibit dan pakan ikan	3 paket	315.753.520	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, RasanaE Timur, Oi Fo'o Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima,	Meningkatnya penyediaan bibit dan pakan ikan	3 paket	200.000.000	

							Asakota, Ule Kota Bima, Mpunda, Santi Kota Bima, Mpunda, Mande				
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Kumbe Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, RasanaE Timur, Oi Fo'o Kota Bima, RasanaE Timur, Oimbo Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Asakota, Jatibaru Timur Kota Bima, Asakota, Ule Kota Bima, Raba, Kendo Kota Bima, Raba, Rabangodu Selatan Kota Bima, Mpunda, Monggonao Kota Bima, Mpunda, Santi Kota Bima, Mpunda, Mande	Meningkatnya kelas kelompok pembudidaya ikan	10 kelompok	23.126.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Kumbe Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, RasanaE Timur, Oi Fo'o Kota Bima, RasanaE Timur, Oimbo Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Asakota, Jatibaru Timur Kota Bima, Asakota, Ule Kota Bima, Raba, Kendo Kota Bima, Raba, Rabangodu Selatan Kota Bima, Mpunda, Monggonao Kota Bima, Mpunda, Santi Kota Bima, Mpunda, Mande	Meningkatnya kelas kelompok pembudidaya ikan	10 kelompok	17.000.000	
3	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, Asakota, Ule	Pelatihan dan pendampingan terhadap pelaku usaha perikanan Budi Daya	1 Kali	0		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, Asakota, Ule	Pelatihan dan pendampingan terhadap pelaku usaha perikanan Budi Daya	1 Kali	0	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					
1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan prasarana penunjang perikanan budi daya	4 paket	191.958.200		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan prasarana penunjang perikanan budi daya	4 paket	85.000.000	
2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, Asakota, Melayu	jumlah ketersediaan sarana penunjang perikanan budidaya	120000 ekor	89.297.300		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, Asakota, Melayu	jumlah ketersediaan sarana penunjang perikanan budidaya	120000 ekor	75.000.000	
3	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Ule Kota Bima, Raba, Kendo	Jumlah pemantauan hama dan penyakit ikan serta lingkungan budidaya	2 Kali	51.212.000		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Ule Kota Bima, Raba, Kendo	Jumlah pemantauan hama dan penyakit ikan serta lingkungan budidaya	2 Kali	20.000.000	
4	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaku usaha budidaya perikanan	2 Kali	41.970.500		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaku usaha budidaya perikanan	2 Kali	20.000.000	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kota Bima	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikkanan, Angka Konsumsi Ikan (AKI)	877,06 Ton, 45,2 Kg/Kapita/Th n			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Kota Bima	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikkanan, Angka Konsumsi Ikan (AKI)	877,06 Ton, 45,2 Kg/Kapita/Th n		
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil					
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Dara	Jumlah dokumen informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Jumlah promosi produk kelautan dan perikanan	6 Dokumen 2 Kali	211.544.696		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Dara	Jumlah dokumen informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Jumlah promosi produk kelautan dan perikanan	6 Dokumen 2 Kali	100.000.000	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil											
1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Raba, Rabangodu Utara	Jumlah dokumen informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Jumlah pasar/UPI yang memenuhi persyaratan dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan Jumlah Poklahsar yang mengikuti bimbingan/pelatihan Jumlah promosi produk kelautan dan perikanan	5 Dokumen 2 Lokasi 50 Orang 2 Kali	76.020.600		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Raba, Rabangodu Utara	Jumlah dokumen informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Jumlah pasar/UPI yang memenuhi persyaratan dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan Jumlah Poklahsar yang mengikuti bimbingan/pelatihan Jumlah promosi produk kelautan dan perikanan	6 Dokumen 2 Lokasi 50 Orang 2 Kali	50.000.000	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung	Jumlah dokumen informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Jumlah pasar/UPI yang memenuhi persyaratan dan keamanan pangan hasil	5 Dokumen 2 Lokasi 50 Orang 2 Kali 12 Unit 1 Unit	102.601.500		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung	Jumlah dokumen informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Jumlah pasar/UPI yang	5 Dokumen 2 Lokasi 50 Orang 2 Kali 12 Unit 1 Unit	1.200.0000.000	

			kelautan dan perikanan Jumlah Poklahsar yang mengikuti bimbingan/pelatihan Jumlah promosi produk kelautan dan perikanan Jumlah sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tersedia Jumlah sarana rantai dingin yang difasilitasi					memenuhi persyaratan dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan Jumlah Poklahsar yang mengikuti bimbingan/pelatihan Jumlah promosi produk kelautan dan perikanan Jumlah sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tersedia Jumlah sarana rantai dingin yang difasilitasi			
2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Pane Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Oimbo Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Raba, Penaraga Kota Bima, Raba, Rontu Kota Bima, Raba, Rabangodu Utara Kota Bima, Mpunda, Santi Kota Bima, Mpunda, Mande	Jumlah dokumen informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Jumlah pasar/UPI yang memenuhi persyaratan dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan Jumlah Poklahsar yang mengikuti bimbingan/pelatihan Jumlah promosi produk kelautan dan perikanan Jumlah sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tersedia	5 Dokumen 2 Lokasi 50 Orang 2 Kali 12 Unit	584.220.650	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Pane Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Oimbo Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Raba, Penaraga Kota Bima, Raba, Rontu Kota Bima, Raba, Rabangodu Utara Kota Bima, Mpunda, Santi Kota Bima, Mpunda, Mande	Jumlah dokumen informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Jumlah pasar/UPI yang memenuhi persyaratan dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan Jumlah Poklahsar yang mengikuti bimbingan/pelatihan Jumlah promosi produk kelautan dan perikanan Jumlah sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tersedia	6 Dokumen 2 Lokasi 50 Orang 2 Kali 12 Unit	75.000.000	

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD diambil berdasarkan analisis kebutuhan dari tiap bidang yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima. Namun, seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan-perubahan kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diprioritaskan.

Pada saat proses penginputan program dan kegiatan terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, sehingga diperlukan penyesuaian rumusan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renstra SKPD dan RPJMD. Disamping itu, juga karena ada beberapa kegiatan yang mengalami rasionalisasi anggaran pada saat APBD Perubahan.

Tabel 2.4

Usulan Program Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kota Bima

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Kualitas Penyajian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Presentase kualitas penyajian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Dkumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Persentase kualitas penyajian perencaan dan evaluasi kinerja SKPD	1 Dkumen	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Persentase kualitas penyajian perencaan dan evaluasi kinerja SKPD	1 Dkumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Persentase kualitas penyajian perencaan dan evaluasi kinerja SKPD	1 Dkumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Persentase kualitas penyajian perencaan dan evaluasi kinerja SKPD	2 Dkumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase kualitas penyajian perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	2 Dkumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan serta jumlah pegawai yang memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan	1 Tahun	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan yang dihasilakan	12 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Bima	Persentase kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan	2 Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	1 Kegiatan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan Jumlah alat tulis kantor Jumlah peralatan dan mesin perelengkapan kantor	7 Unit	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan Jumlah peralatan dan mesin perelengkapan kantor	80000 Lembar	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	25 orang	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah peralatan dan mesin perelengkapan kantor	4 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah surat terkirim	500 Surat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Kegiatan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan yang layak	22 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Kota Bima	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	35 Unit	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Bima	cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	50 %	
	Program Pengeloaan Perikanan Tangkap	**Kota Bima**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	**2.279,50 Ton**	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Asakota, Kolo	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 Dokumen	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, Asakota, Kolo	tersedianya sarana penunjang perikanan tangkap	6 Unit	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya kapasitas SDM nelayan kecil	10 kelompok	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kota Bima,RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Asakota, Ule	Meningkatnya jumlah kelompok yang terbentuk	5 kelompok	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Asakota, Ule	Meningkatnya jumlah lembaga usaha perikanan tangkap yang mendapat fasilitas bantuan pendanaan	8 kelompok	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalm 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung	Meningkatanya Jumlah Kapal Yang Terdaftar	50 unit	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Kota Bima**	**Jumlah produksi Perikanan Budidaya**	**885,50 Ton**	
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil				
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima,	Meningkatnya penyediaan	3 Paket	

		RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, RasanaE Timur, Oi Fo'o Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Ule Kota Bima, Mpunda, Santi Kota Bima, Mpunda, Mande	bibit dan pakan ikan		
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Kumbe Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, RasanaE Timur, Oi Fo'o Kota Bima, RasanaE Timur, Oimbo Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Asakota, Jatibaru Timur Kota Bima, Asakota, Ule Kota Bima, Raba, Kendo Kota Bima, Raba, Rabangodu Selatan Kota Bima, Mpunda, Monggonao Kota Bima, Mpunda, Santi Kota Bima, Mpunda, Mande	Meningkatnya kelas kelompok pembudidaya ikan	10 Kelompok	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan prasarana penunjang perikanan budi daya	1 Paket	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, Asakota, Melayu	jumlah ketersediaan sarana penunjang perikanan budidaya	500 Ekor	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Ule Kota Bima, Raba, Kendo	Jumlah pemantauan hama dan penyakit ikan serta lingkungan budidaya	2 Kali	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaku usaha budidaya perikanan	2 Kali	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kota Bima	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikkanan	917,25 Ton	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Raba, Rabangodu Utara	Jumlah dokumen informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Jumlah promosi produk kelautan dan perikanan	6 Dokumen 2 Kali	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat,	Jumlah dokumen informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	6 Dokumen 2 Lokasi	

	Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dara Kota Bima, Raba, Rabangodu Utara	Jumlah pasar/UPI yang memenuhi persyaratan dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan Jumlah Poklahsar yang mengikuti bimbingan/pelatihan Jumlah promosi produk kelautan dan perikanan	50 Orang 2 Kali	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Jumlah pasar/UPI yang memenuhi persyaratan dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan Jumlah Poklahsar yang mengikuti bimbingan/pelatihan Jumlah promosi produk kelautan dan perikanan Jumlah sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tersedia Jumlah sarana rantai dingin yang difasilitasi	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung	6 Dokumen 2 Lokasi 50 Orang 2 Kali 12 Unit 1 Unit	
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Jumlah pasar/UPI yang memenuhi persyaratan dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan Jumlah Poklahsar yang mengikuti bimbingan/pelatihan Jumlah promosi produk kelautan dan perikanan Jumlah sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tersedia	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Pane Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Oimbo Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Raba, Penaraga Kota Bima, Raba, Rontu Kota Bima,	6 Dokumen 2 Lokasi 50 Orang 2 Kali 12 Unit	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan yang datang dari masyarakat di peroleh melalui Proposal yang diantar/diajukan langsung oleh masyarakat/kelompok ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.

Pada Umumnya Usulan-usulan yang berupa proposal yang datang dari kelompok-kelompok tersebut sangat sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam sepuluh tahun terakhir, konsentrasi arah pembangunan nasional telah mengalami pergeseran, yang semula dititik beratkan pada sektor pertanian dan industri, kini bergeser ke arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Dilihat dari segi ketersediaan sumber daya alam, sektor kelautan dan perikanan merupakan aset yang paling menguntungkan. Di sepanjang pantai sering terdapat hutan bakau dan akar nafasnya yang khas. Ekosistem laut sebagai tempat hidup berbagai flora dan fauna laut, membentuk keanekaragaman hayati yang tinggi. Di dalam perairan laut biasanya juga terdapat jejeran terumbu karang dan padang lamun yang sangat beraneka ragam. Potensi ini menjadi indikator bagi kelimpahan potensi ikan, karena merupakan habitat dan tempat berlindung bagi ikan dan biota laut lainnya. Selain itu keindahan terumbu karang juga dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi pengembangan wisata bahari.

Potensi kelautan dan perikanan memiliki landasan yang kuat untuk dijadikan isu utama dalam pembangunan nasional baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Beberapa landasan tersebut antara lain; (1) Melimpahnya sumber daya kelautan dan perikanan yang kita miliki, dengan sejumlah keunggulan komparatif dan kompetitif yang sangat tinggi; (2) Keterkaitan yang kuat antara industri yang berbasis kelautan dan industri yang berbasis ekonomi lainnya; (3) Sumber daya kelautan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui; (4) Luasnya perairan dengan jaminan keamanan yang cukup menjadi simbol bargaining politik luar negeri yang kuat; (5) Dari aspek sosial budaya orientasi di bidang kelautan dan perikanan dapat menggugah bangkitnya nilai budaya dan tradisi kita sebagai masyarakat bahari.

Meskipun demikian, kerusakan di sektor kelautan dan perikanan yang terus menurun daya dukungnya, menjadi masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan. Berbagai macam bahan pencemar dari sungai, daratan atau lautan dapat mencemari pantai. Sungai yang bermuara di laut membawa berbagai macam limbah padat, cair, bahan berbahaya

dan beracun (B3), sampah dan sebagainya. Selain itu eksploitasi dan eksplorasi sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan secara destruktif dan tidak bertanggung jawab oleh manusia dan tenaga asing telah menyebabkan potensi tersebut telah mengalami degradasi yang cukup signifikan, sehingga semakin memperparah rusaknya ekosistem laut dan pesisir serta menurunnya biota-biota laut.

Fenomena ini berdampak pada semakin menurunnya hasil penangkapan ikan para nelayan. Para nelayan yang biasanya cukup dengan menangkap ikan di sekitar perairan atau teluk terdekat kini harus berjuang keras dan mencari ikan pada laut lepas. Tentu saja dengan peralatan atau sarana dan prasarana yang sangat terbatas menjadi pembatas dalam perolehan ikan bagi nelayan kecil. Kenyataan ini mengharuskan kita untuk terus memperhatikan dan menjadikan sektor kelautan dan perikanan dan perairannya sebagai potensi yang vital untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendapatkan perlindungan, pengawasan dari pemerintah dan masyarakat setempat.

Secara nasional kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan telah diarahkan untuk : (1) Pengentasan kemiskinan (*pro poor*); (2) Penciptaan Lapangan kerja (*pro job*); (3) Percepatan pertumbuhan (*pro growth*); (4) Pengembangan agribisnis (*pro bussines*); dan (5) Pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable development*). Bahkan untuk pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang sebagian besar merupakan daerah kepulauan, pembangunan sektor kelautan mendapat prioritas cukup tinggi dan menjadi salah satu andalan sebagai motor penggerak perekonomian regional maupun nasional.

Secara Fisik, Provinsi NTB memiliki potensi pembangunan kelautan dan perikanan yang cukup menjanjikan dengan luas perairan laut ± 29.159,04 km, (sedangkan luas wilayah darat 20.153,15 km2), dan panjang garis pantai sekitar 2.333 km. Dengan kondisi perairan laut yang pada umumnya masih bersih, provinsi NTB memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan perikanan budidaya, baik untuk budidaya laut maupun budidaya tambak (*Marineculture*).

Disisi lain rata-rata luas pemilikan lahan pertanian hanya sekitar 0,3 HA per KK sehingga kurang mampu memberikan pendapatan yang layak bagi masyarakat. Fakta tersebut merupakan isyarat bahwa kita harus berpaling ke laut, sehingga sektor kelautan menjadi andalan NTB

di masa depan. Namun demikian saat ini, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di NTB belum optimal karena beberapa faktor yaitu : (1) Masih rendahnya kualitas SDM yang antara lain tercermin dari cara-cara pemanfaatan yang masih tergolong tradisional dan belum didukung oleh sistem pengolahan dan strategi pemasaran hasil perikanan yang memadai. (2) Terbatasnya sarana dan parasarana penunjang perikanan dan kelautan. (3) Terbatasnya akses untuk memperoleh permodalan, (4) Masih berlangsungnya pola pemanfaatan sumberdaya dengan cara-cara yang merusak kelestarian sumberdaya dan lingkungan hidup.

Pemberlakuan otonomi daerah, diharapkan menjadi peluang yang lebih strategis bagi Daerah, dalam rangka penataan, pengelolaan, eksplorasi, eksploitasi, pengawasan, dan konservasi wilayah sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pemerintah Daerah Kota Bima memiliki panjang garis pantai sekitar 27,7 km dengan luas daerah konservasi 256 Ha, luas daerah budidaya laut 710 Ha, luas daerah budidaya air tawar 365 Ha, luas daerah budidaya air payau 350 Ha. Tingginya potensi tersebut memungkinkan dijadikannya sektor Kelautan dan Perikanan Kota Bima sebagai basis pengembangan agro bisnis di daerah.

Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima melaksanakan beberapa strategi dan kebijakan antara lain :

a. Strategi :

1. Fasilitasi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan
2. Mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan.
3. Mengintensifkan perlindungan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

b. Kebijakan :

1. Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Revitalisasi kelautan dan perikanan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima selama 5 Tahun adalah sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima 2024-2026 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima adalah meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima beserta target kinerja sasaran periode tahun 2024–2026 secara lengkap tersaji pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	Pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomin	Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan :
					1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
					2.Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
				Meningkatnya daya saing Produk perikanan	1.Persentase Peningkatan Produk Olahan hasil perikanan
					2 Persentase peningkatan angka Konsumsi Ikan Per Kapita Per Tahun
				Meningkatnya Kualitas masyarakat kelautan dan perikanan	Persentase Peningkaytan Kelompok Perikanan Sampai Dengan Madya

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD dengan tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Prioritas dan Sasaran

No	Tujuan dan Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran
	Tujuan :		
1	Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan	PDRB Sub Sektor Perikanan	3,2 %
	Sasaran		
2	-.Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan :	3,29 %
		1. Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	1,77 %
		2.Persentase Pertumbuhan Produksi	1,52 %

		Perikanan Budidaya	
3	-.Meningkatnya daya saing produk perikanan	1. Persentase Produk Olahan hasil perikanan	2,3 %
		2. Persentase peningkatan konsumsi ikan perkapita per tahun	5,06 Kg/kapita/ thn
4	-.Meningkatnya kualitas masyarakat kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan kelompok perikanan sampai dengan madya	20 %

Disajikan juga mengenai indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, seperti disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama PD

No	IKU	Indikator IKU	Target Kinerja IKU
1	-.Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan :	3,29 %
		1. Persentase Pertumbuhan Produksi perikanan Tangkap	1,77 %
		2. Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	1,52 %
2	-.Meningkatnya daya saing produk perikanan	1. Persentase Produk Olahan hasil perikanan	2,3 %
		2.Persentase peningkatan konsumsi ikan perkapita per tahun	5,6 Kg/kapita/ thn
3	-.Meningkatnya kualitas masyarakat kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan kelompok perikanan sampai dengan madya	20 %

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan

Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima adalah sebagai berikut :

Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : "Mewujudkan Kota Bima Yang BERKUALITAS dan SETARA Menuju Masyarakat Maju Dan Mandiri"			
Misi ke-2 : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
	Meningkatkan Daya Saing Produk Perikanan	Fasilitasi pembinaan, pelatihan dan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	Meningkatnya kualitas masyarakat kelautan dan perikanan	Pembinaan, sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat	Optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan

3.4 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2024 sebagai berikut :

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TAHUN 2024		
									TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1						2	3	4	5	6	7
3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
3	**25**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					
3	**25**	**3.25.00.00.01**				**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**6.742.363.185,74**	
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Presentase Kualitas Penyajian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**100 %**	**4.086.298.815,74**	**DAU**
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**9 dokumen**	**20.769.480,00**	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	1 dokumen	2.177.450,00	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	Kota Bima	1 dokumen	2.177.450,00	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Bima	1 dokumen	2.200.000,00	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	Kota Bima	1 dokumen	2.200.000,00	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunanan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Kota Bima	1 dokumen	3.849.780,00	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	2 dokumen	4.276.800,00	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	2 dokumen	3.888.000,00	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan**	**Kota Bima**	**15 dokumen**	**3.528.150.588,60**	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	Kota Bima	25 Orang	3.341.929.718,60	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	12 dokumen	153.282.470,00	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.02	05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Bima	1 dokumen	5.285.500,00	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Bima	2 dokumen	27.652.900,00	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.05**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**	**Kota Bima**	**25 Orang**	**12.113.090,00**	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	Kota Bima	25 Orang	12.113.090,00	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**82500 Lembar**	**245.047.153,74**	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan perelengkapan kantor	Kota Bima	2500 Buah	8.329.200,00	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan	Kota Bima	80000 Lembar	10.133.750,00	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	30 Orang	226.584.203,74	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.07**		**Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia**	**Kota Bima**	**4 Unit**	**40.728.435,00**	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Kota Bima	4 Unit	40.728.435,00	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Permerintah Daerah**	**Kota Bima**	**3 Keg**	**93.784.068,40**	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim Selama 1 Tahun	Kota Bima	500 Surat	22.697.400,00	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	12 Bulan	71.086.668,40	DAU

3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang di perlihara**	**Kota Bima**	**57**	**Unit**	**145.706.000,00**	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak	Kota Bima	22	Unit	123.376.000,00	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Kota Bima	35	Unit	22.330.000,00	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	Kota Bima	50	%	50.325.000,00	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	Kota Bima	**2,01**	**%**	**1.034.916.300,00**	DAU dan DAK
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Data/Informasi Sumber Daya Ikan, Sarana, dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia**	**Kota Bima**	**375**	**Unit**	**924.936.000,00**	DAU dan DAK
3	25	3.25.00.00.01	02	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Penunjang Perikanan Tangkap	Melayu, Dara, Tanjung, Ule, Paruga, Kolo	250	Unit	190.000.000,00	DAU dan DAK
3	25	3.25.00.00.01	02	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Melayu, Dara, Tanjung, Ule, Paruga, Kolo	125	Unit	734.936.000,00	DAU dan DAK
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Nelayan dan Unit Usaha yang diberdayakan**	**Kota Bima**	**23**	**Kelompok**	**79.524.100,00**	DAU
3	25	3.25.00.00.01	02	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok Nelayan Kecil yang fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	Melayu, Dara, Tanjung, Paruga, Kolo,Ule	10	Kelompok	27.373.700,00	DAU
3	25	3.25.00.00.01	02	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Melayu, Dara, Tanjung, Paruga, Kolo, Ule	5	Kelompok	23.325.700,00	DAU
3	25	3.25.00.00.01	02	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Rasanae Barat, Asakota	8	Kelompok	28.824.700,00	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang memiliki izin	Kota Bima	50	Unit	**30.456.200,00**	
3	25	3.25.00.00.01	02	2.04	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Melayu, Dara, Tanjung, Paruga, Ule, Kolo	50	Unit	30.456.200,00	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya		1,55	**%**	**553.317.520,00**	**DAU**
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah pembudidaya ikan, luas lahan, produksi ikan, sarana dan prasarana yang dikelola**	**Kota Bima**	**10**	**Kelompok**	**318.879.520,00**	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kota Bima	5	Klp	295.753.520,00	DAU
3	25	3.25.00.00.01	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Jatiwangi, Nungga Dodu Mande Santi	5	Kelompok	23.126.000,00	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**03**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Jumlah pembudidaya ikan, luas lahan, produksi ikan, sarana dan prasarana yang dikelola		15	Unit	**234.438.000,00**	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	03	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Melayu, Dara, Paruga, Nungga, Lelamase, Mande, Rabangodu Selatan, Penatoi,Rabadompu, Kendo, Jatiwangi,Dodu	4	Unit	116.958.200,00	DAU/DAK
3	25	3.25.00.00.01	03	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Melayu, Dara, Paruga, Nungga, Lelamase, Mande, Rabangodu Selatan, Penatoi,Rabadompu, Kendo, Jatiwangi,Dodu	11	Unit	69.297.300,00	DAU

3	25	3.25.00.00.01	03	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kota Bima	2	dokumen	21.212.000,00	DAU
3	25	3.25.00.00.01	03	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Bima	20	Orang	26.970.500,00	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**05**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan**		**3,3**	**%**	**1.067.830.550,00**	
							Persentase Konsumsi Ikan (AKI)		**6,36**	**%**		
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**05**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil**	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang terbit	Kota Bima	6	Dokumen	**204.987.800,00**	DAU
3	25	3.25.00.00.01	05	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kota Bima	6	Dokumen	204.987.800,00	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**05**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan	Kota Bima	30	Unit Usaha	**76.020.600,00**	DAU
3	25	3.25.00.00.01	05	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Bima	30	Unit Usaha	76.020.600,00	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**05**	**2.03**		**Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia	Kota Bima	384	Ton	**786.822.150,00**	DAU
3	25	3.25.00.00.01	05	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	384	Ton	102.601.500,00	DAU
3	25	3.25.00.00.01	05	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kec. R. Barat, Kec. Asakota, Kec. Raba	8	Pelaku Usaha	684.220.650,00	DAU

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Sasaran dan Program / Kegiatan

No	Sasaran PD	Nama Program / Kegiatan
1	-.Meningkatnya Produksi Perikanan	Program Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
		Program Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
		Program Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
		Program Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	-.Meningkatnya daya saing produk perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
		Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	-.Meningkatnya kualitas masyarakat kelautan dan perikanan	Program Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Bima

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Ket
1	Program pengembangan budidaya perikanan	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	88.000.000	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	12.000.000	
		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	12.000.000	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
		Penyediaan Data dan Informasi	12.000.000	

		Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	125.126.712	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.500.150	
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.003900	
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	12.000.000	
2	Program pengembangan perikanan tangkap	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	121.296.900	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	549.199.500	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	14.999.800	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	13.000.000	
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	12.999.000	
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	15.000.000	
3	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu)	155.204.000	

		Daerah Kabupaten/Kota		
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	35.530.000	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	69.615.400	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.500.000	

TABEL 4.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN TAHUN 2025	
									TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3	**25**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
3	**25**	**3.25.00.00.01**				**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**6.742.363.185,74**				**7.471.957.004,31**
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Presentase Kualitas Penyajian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**100 %**	**4.086.298.815,74**	**DAU**	**Kota Bima**	**100 %**	**4.550.286.197,31**
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**9 dokumen**	**20.769.480,00**	**DAU**	**Kota Bima**	**9 dokumen**	**22.846.428,00**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	1 dokumen	2.177.450,00	DAU	Kota Bima	1 dokumen	2.395.195,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	Kota Bima	1 dokumen	2.177.450,00	DAU	Kota Bima	1 dokumen	2.395.195,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Bima	1 dokumen	2.200.000,00	DAU	Kota Bima	1 dokumen	2.420.000,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	Kota Bima	1 dokumen	2.200.000,00	DAU	Kota Bima	1 dokumen	2.420.000,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunanan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Kota Bima	1 dokumen	3.849.780,00	DAU	Kota Bima	1 dokumen	4.234.758,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	2 dokumen	4.276.800,00	DAU	Kota Bima	2 dokumen	4.704.480,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	2 dokumen	3.888.000,00	DAU	Kota Bima	2 dokumen	4.276.800,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan**	**Kota Bima**	**15 dokumen**	**3.528.150.588,60**	**DAU**	**Kota Bima**	**15 dokumen**	**3.880.965.647,46**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	Kota Bima	25 Orang	3.341.929.718,60	DAU	Kota Bima	30 Orang	3.676.122.690,46

3	25	3.25.00.00.01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	12	dokumen	153.282.470,00	DAU	Kota Bima	12	dokumen	168.610.717,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.02	05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Bima	1	dokumen	5.285.500,00	DAU	Kota Bima	1	dokumen	5.814.050,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Bima	2	dokumen	27.652.900,00	DAU	Kota Bima	2	dokumen	30.418.190,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.05**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**	**Kota Bima**	**25**	**Orang**	**12.113.090,00**	**DAU**	**Kota Bima**	**25**	**Orang**	**13.324.399,00**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	Kota Bima	25	Orang	12.113.090,00	DAU	Kota Bima	25	Orang	13.324.399,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**82500**	**Lembar**	**245.047.153,74**	**DAU**	**Kota Bima**	**82500**	**Lembar**	**269.551.869,11**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan perelengkapan kantor	Kota Bima	2500	Buah	8.329.200,00	DAU	Kota Bima	2500	Buah	9.162.120,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan	Kota Bima	80000	Lembar	10.133.750,00	DAU	Kota Bima	80000	Lembar	11.147.125,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	30	Orang	226.584.203,74	DAU	Kota Bima	30	Orang	249.242.624,11
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.07**		**Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia**	**Kota Bima**	**4**	**Unit**	**40.728.435,00**	DAU	Kota Bima	**4**	**Unit**	**44.801.278,50**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Kota Bima	4	Unit	40.728.435,00	DAU	Kota Bima	4	Unit	44.801.278,50
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Permerintah Daerah**	**Kota Bima**	**3**	**Keg**	**93.784.068,40**	**DAU**	**Kota Bima**	3	Keg	**103.162.475,24**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim Selama 1 Tahun	Kota Bima	500	Surat	22.697.400,00	DAU	Kota Bima	500	Surat	24.967.140,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	12	Bulan	71.086.668,40	DAU	Kota Bima	12	Bulan	78.195.335,24
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang di perlihara**	**Kota Bima**	**57**	**Unit**	**145.706.000,00**	**DAU**	**Kota Bima**	**57**	**Unit**	**215.634.100,00**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak	Kota Bima	22	Unit	123.376.000,00	DAU	Kota Bima	22	Unit	135.713.600,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Kota Bima	35	Unit	22.330.000,00	DAU	Kota Bima	35	Unit	24.563.000,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	Kota Bima	50	%	50.325.000,00	DAU	Kota Bima	50	%	55.357.500,00

3	**25**	**3.25.00.00.01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	Kota Bima	**2,01**	**%**	**1.034.916.300,00**	DAU dan DAK	Kota Bima	**3,02**	**%**	**1.138.407.930,00**
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Data/Informasi Sumber Daya Ikan, Sarana, dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia**	**Kota Bima**	**375**	**Unit**	**924.936.000,00**	DAU dan DAK	Kota Bima	**375**	**Unit**	**1.017.429.600,00**
3	25	3.25.00.00.01	02	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Penunjang Perikanan Tangkap	Melayu, Dara, Tanjung, Ule, Paruga, Kolo	250	Unit	190.000.000,00	DAU dan DAK	Kota Bima	250	Unit	209.000.000,00
3	25	3.25.00.00.01	02	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Melayu, Dara, Tanjung, Ule, Paruga, Kolo	125	Unit	734.936.000,00	DAU dan DAK	Melayu, Dara, Tanjung, Ule, Paruga, Kolo	125	Unit	808.429.600,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Nelayan dan Unit Usaha yang diberdayakan**	**Kota Bima**	**23**	**Kelompok**	**79.524.100,00**	DAU	**Kota Bima**	**23**	**Kelompok**	**87.476.510,00**
3	25	3.25.00.00.01	02	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok Nelayan Kecil yang fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	Melayu, Dara, Tanjung, Paruga, Kolo,Ule	10	Kelompok	27.373.700,00	DAU	Melayu, Dara, Tanjung, Paruga, Kolo,Ule	10	Kelompok	30.111.070,00
3	25	3.25.00.00.01	02	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Melayu, Dara, Tanjung, Paruga, Kolo, Ule	5	Kelompok	23.325.700,00	DAU	Melayu, Dara, Tanjung, Paruga, Kolo, Ule	5	Kelompok	25.658.270,00
3	25	3.25.00.00.01	02	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Rasanae Barat, Asakota	8	Kelompok	28.824.700,00	DAU	Rasanae Barat, Asakota	8	Kelompok	31.707.170,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang memiliki izin	Kota Bima	50	Unit	**30.456.200,00**			**50**	**Unit**	**33.501.820,00**
3	25	3.25.00.00.01	02	2.04	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Melayu, Dara, Tanjung, Paruga, Ule, Kolo	50	Unit	30.456.200,00	DAU	Melayu, Dara, Tanjung, Paruga, Ule, Kolo	50	Unit	33.501.820,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya		1,55	**%**	**553.317.520,00**	**DAU**	**Kota Bima**	1,60	**%**	**608.649.272,00**
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah pembudidaya ikan, luas lahan, produksi ikan, sarana dan prasarana yang dikelola**	**Kota Bima**	**10**	**Kelompok**	**318.879.520,00**	**DAU**	**Kota Bima**	**10**	**Kelompok**	**350.767.472,00**

3	25	3.25.00.00.01	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kota Bima	5	Klp	295.753.520,00	DAU	Kota Bima	5	Klp	325.328.872,00
3	25	3.25.00.00.01	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Jatiwangi, Nungga Dodu Mande Santi	5	Kelompok	23.126.000,00	DAU	Jatiwangi, Nungga Dodu Mande Santi	16	Kelompok	25.438.600,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**03**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Jumlah pembudidaya ikan, luas lahan, produksi ikan, sarana dan prasarana yang dikelola		15	Unit	**234.438.000,00**	**DAU**	**Kota Bima**	**15**	**Unit**	**257.881.800,00**
3	25	3.25.00.00.01	03	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Melayu, Dara, Paruga, Nungga, Lelamase, Mande, Rabangodu Selatan, Penatoi,Rabadompu, Kendo, Jatiwangi,Dodu	4	Unit	116.958.200,00	DAU/DAK	Melayu, Dara, Paruga, Nungga, Lelamase, Mande, Rabangodu Selatan, Penatoi,, Rabadompu, Kendo, Jatiwangi,Dodu	4	Unit	128.654.020,00
3	25	3.25.00.00.01	03	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Melayu, Dara, Paruga, Nungga, Lelamase, Mande, Rabangodu Selatan, Penatoi,Rabadompu, Kendo, Jatiwangi,Dodu	11	Unit	69.297.300,00	DAU	Melayu, Dara, Paruga, Nungga, Lelamase, Mande, Rabangodu Selatan, Penatoi,, Rabadompu, Kendo, Jatiwangi,Dodu	11	Unit	76.227.030,00
3	25	3.25.00.00.01	03	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kota Bima	2	dokumen	21.212.000,00	DAU	Kota Bima	2	dokumen	23.333.200,00
3	25	3.25.00.00.01	03	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Bima	20	Orang	26.970.500,00	DAU	Kota Bima	20	Orang	29.667.550,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**05**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan**		**3,3**	**%**	**1.067.830.550,00**			**3,4**	**%**	**1.174.613.605,00**
							Persentase Konsumsi Ikan (AKI)		**6,36**	**%**				**8,28**	**%**	
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**05**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil**	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang terbit	Kota Bima	6	Dokumen	**204.987.800,00**	DAU	Kota Bima	**6**	**Dokumen**	**225.486.580,00**
3	25	3.25.00.00.01	05	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan	Kota Bima	6	Dokumen	204.987.800,00	DAU	Kota Bima	6	Dokumen	225.486.580,00

							Risiko									
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**05**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan	Kota Bima	30	Unit Usaha	**76.020.600,00**	DAU	Kota Bima	5	Upi/Pasar	**83.622.660,00**
3	25	3.25.00.00.01	05	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Bima	30	Unit Usaha	76.020.600,00	DAU	Kota Bima	30	Unit Usaha	83.622.660,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**05**	**2.03**		**Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia	Kota Bima	384	Ton	**786.822.150,00**	DAU	Kota Bima	**384**	**Ton**	**865.504.365,00**
3	25	3.25.00.00.01	05	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	384	Ton	102.601.500,00	DAU	Kota Bima	384	Ton	112.861.650,00
3	25	3.25.00.00.01	05	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kec. R. Barat, Kec. Asakota, Kec. Raba	8	Pelaku Usaha	684.220.650,00	DAU	Kec. R. Barat, Kec. Asakota, Kec. Raba	8	Pelaku Usaha	752.642.715,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima. Dalam melaksanakan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2023 ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholder*s sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Raba – Bima, 26 April 2023

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kota Bima



Ir. H. Sarafuddin, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19640715 199203 1 017

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA BIMA

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat-Nya karena berkat karunia-Nya, tim penyusun Rencana Kerja DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK Kota Bima dapat menyelesaikan " **RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BIMA TAHUN 2024"** dengan baik dan lancar.

Renja ini secara garis besar mengupas tentang tujuan, sasaran, program & kegiatan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima tahun 2024, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini didasarkan pada pelaksanaan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima tahun 2024-2026. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan bidang-bidang lingkup Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima selama 1 (satu) tahun kedepan.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap dengan renja ini semua kebijakn, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah Kota bima maupun masyarakat, serta DPRD dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman serta bermanfaat bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima maupun bagi pihak lain yang memerlukan.

Kota Bima, Juli 2023

Kepala Dinas

(Drs. H. Mahfud, M.Pd)
Nip. 19660623 198603 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
BAB I	**PENDAHULUAN**		1
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	4
	1.3.	Maksud dan Tujuan	5
	1.4.	Sistematika Penulisan	5
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU**		7
	2.1.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
	2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD	9
	2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
	2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	17
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**		27
	3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
	3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	29
	3.3.	Program dan Kegiatan	32
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**		37
BAB V	**PENUTUP**		42

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Bima Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima	7
Tabel 2-2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kota Bima	12
Tabel 2-4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kota Bima	17
Tabel 3-2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	29
Tabel 3-3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kota Bima	31
Tabel 4-1	Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Daerah Kota Bima Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; Keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima sebagai Perangkat Daerah (PD) yang membidangi 3 bidang yaitu bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang Kominfo, statistik dan Sandi yang dilaksanakan Dinas Kominfotik maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi, informatika, statistik dan persandian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kota Bima.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui

kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat.

Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua PD. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai PD yang membidangi Kominfo, Statistik dan Sandi, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima untuk kurun waktu tiga (3) tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 s/d 2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2024 -2026.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bima di Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian yang bertanggung jawab kepada Walikota Bima melalui Sekretaris Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja PD Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima disusun berdasarkan isu strategis yang selalu dinamis dan mempertimbangkan permasalahan komunikasi, informatika, Statistik dan persandian di Kota Bima, dimana Renja tersebut berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen rencana strategis Pemerintah Kota Bima, sehingga penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam ketentuan umum menyebutkan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat

program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2024 memuat tujuan dan sasaran rencana kerja tahun berjalan serta memuat program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima. Penyusunannya dilaksanakan mengacu pada RENSTRA 2024- 2026 meliputi target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, rancangan rencana kerja awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telaah usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan telaah kebijakan Nasional bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

Untuk mencapai hal tersebut maka proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil hasilnya. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan merupakan instrument pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, kerana perencanaan yang baik dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar, disamping peranan tersebut, bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian bagi suatu daerah memiliki peranan lainnya, yaitu sebagai "Promoting Sector" artinya Kominfo memiliki peran untuk mempromosikan potensi yang dimiliki daerah sehingga potensi yang ada lebih produktif untuk dapat tumbuh dan berkembang, Kominfo berperan dalam menunjang distribusi informasi dalam meningkatkan aktifitas sosiol ekonomi masyarakat. Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki fungsi sebagai "mediator" penerapan teknologi informasi untuk memperlancar pelayanan publik berbasis web. Dengan rencana kerja (renja) tersebut dapat dijadikan acuan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dapat bekerja berdasarkan target Renstra yang ada untuk dijadikan komitmen bersama.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2024 ini ada beberapa peraturan dan Undang-Undang yang mendasari Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50/3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Walikota Bima Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari rencana kerja ini adalah sebagai panduan dalam melakukan penyusunan program/kegiatan Renja Tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah sebagai salah satu dasar untuk penyusunan renja selanjutnya di tahun 2025. Penyusunan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) yang nantinya di tuang ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima terdiri dari :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran, strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2018-2023. Tabel 2-1 merupakan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Bima Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima.

Tabel 2-1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah Kota Bima
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			-	2	2,3	2,5	2	2,3	2,4		
	Persentase Penurunan Kasus informasi kebocoran daerah			50%	60%	75%	95%	60%	75%	95%		
	Persentase Satu Data Kota Bima			-	72%	84%	90%	72%	84%	90%		

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima ada 3 (tiga) indokator untuk mengukur capaian kinerja yaitu ;

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

   Untuk target capaian pada tahun 2020 belum ada hal ini disebabkan adanya perubahan indikator kinerja utama pada perubahan Renstra 2018-2023 dan 2023 realisasi indikator kinerja mencapai 99% sesuai dengan penilaian oleh Tim Evaluasi SPBE dari Kemenpan RB.

2. Persentase Penurunan Kasus informasi kebocoran daerah

   Untuk target capaian pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 60% dan 75%. Capaian Kinerja pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 60% dan 75%, ini menunjukan capain kinerja pada indikator kedua sebesar 100%, tercapainya capaian kinerja ini menunjukan pelayanan dibidang persandian sangat tinggi dan perlu dipertankan untuk proyeksi capaian kinerja sampai dengan akhir RPJMD.

3. Persentase Satu Data Kota Bima

   Untuk target capaian pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 72% dan 84%. Capaian Kinerja pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 72% dan 84%.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan dalam pencapaian sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima antara lain:

1. Mengoptimalkan SDM yang ada sesuai dengan keahlian;
2. Membuat Inovasi-inovasi yang mendukung tercapaianya capaian kinerja masing-masing indikator;
3. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Pusat;
4. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetap.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerahtahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/ataukegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalamrangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. sebagai berikut :

Program dan Kegiatan 2022

A. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
    1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
        - Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
        - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
        - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
        - Layanan Hubungan Media
        - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
        - Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
        - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2. Program Aplikasi Informatika
    a. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
        - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
        - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
        - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
        - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
        - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
        - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

B. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
    1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
        - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

- Membangun Metadata Statistik Sektoral
- Pengembangan Infrastruktur

C. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
   a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
      - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
      - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program dan Kegiatan 2023

A. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
   a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      - Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
      - Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
      - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
      - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
      - Layanan Hubungan Media
      - Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
      - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
   a. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

B. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
      - Membangun Metadata Statistik Sektoral
      - Pengembangan Infrastruktur

C. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
   a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
      - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
      - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2-2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Pemerintah Daerah Kota Bima

KODE					KET	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022(n-2)	Tingat Realisi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Urusan Komunikasi dan Informatik									
						Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika									
						Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Predikat PLID Kota Bima	A	C	B	B	100%	A	A	100%

KODE					KET	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022(n-2)	Tingat Realisi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 (n-1)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Kunjungan Website Pemerintah Daerah	100%	50%	70%	70%	100%	95%	95%	70%
						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase PD yang menerapkan e-goverment	95%	75%	85%	85%	100%	95%	95%	85%
						Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang memanfaatkan e-Goverment	28 PD	15 PD	25 PD	25 PD	100%	28 PD	28 PD	25 PD
						Urusan Statistik									
						Bidang Urusan Statistik									
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan		72%	84%	84%	100%	92%	92%	84%

KODE					KET	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Thn 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022(n-2)	Tingat Realisi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023 (n-1)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data statistik sektoral		72%	84%	84%	100%	92%	92%	84%
						Urusan Persandian									
						Bidang Urusan Persandian									
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase kasus penyalahgunaan informasi daerah yang selesai di tanggani		85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang menggunakan jaringan komunikasi sandi		20 pd	20 PD	20 PD	100%	30 PD	30 PD	20 PD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan salah satu perangkat daerah yang baru dibentuk. Oleh karena itu, isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD lebih pada bagaimana mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan secara baik, tepat, efisien dan efektif.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota dalam hal perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 100 Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statisik dan persandian;
b) penyusunan program kerja dan kegiatan komunikasi dan informatika, statisik dan persandian;
c) pengoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statisik dan persandian;
d) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statisik dan persandian;
e) pembinaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik bagi badan-badan publik instansi pemerintah daerah;
f) pembinaan penyelenggaraan sistem informasi elektronik yang aman yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah;
g) pengoordinasian Strategi Pengembangan Pemerintahan berbasis elektonik (e-Government), Smartcity dan Government Chief Information Office (GCIO) di lingkungan Pemerintah Daerah;
h) pengoordinasian pembangunan jaringan komunikasi/ telekomunikasi dan pengamanan akses informasi guna memfasilitasi hubungan komunikasi antara perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah;
i) pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan Program Pelayanan administrasi perizinan di bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan TIK dan Persandian serta tugas pembantuan;

j) penyelenggaraan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, statisik dan persandian;
k) pengoordinasian pembinaan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informatika, statisik dan persandian;
l) pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi serta sistema informasi pemerintah daerah;
m) penyelenggaraan ketua harian PPID dan mengoordinasikan pembinaan PPID di lingkungan Pemerintah Daerah;
n) penyelenggaraan pusat data terintegrasi lingkup Pemerintah Daerah dan infrastruktur pendukungnya; dan
o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam rangka pengembangan e-government Pemerintah Daerah Kota Bima masih mengalami beberapa tantangan, diantaranya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk memberikan akses informasi ke masyarakat tanpa terkecuali. Kondisi demikian mengharuskan setiap Badan Publik di Pemkot Bima menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, dengan memperhatikan batasan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Semangat meningkatkan pelayanan publik selaras dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa dimana dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, Badan Publik wajib menyelenggarakan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki kewenangan dalam penyediaan informasi publik yang berkualitas. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi baik keluhan ataupun masukan kepada Pemkot Bima melalui aplikasi E-Lapor Kota Bima. Selain itu aplikasi ini mampu berperan sebagai sarana dalam menjembatani masyarakat dan pemerintah dalam komunikasi pelayanan pengaduan masyarakat. E-Lapor Kota Bima juga telah diintegrasikan dengan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Whiste Blowing System (WBS). Keluhan masyarakat merupakan salah satu bentuk aspirasi yang cukup menjadi fokus pelayanan publik saat ini. Masukan dan keluhan masyarakat dapat dijadikan bahan evaluasi dalam peningkatan lapayanan publik di Pemkot Bima. Selain melalui aplikasi E-lapor, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui media sosial, email atau telepon.

a. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2-4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Pemerintah Daerah Kota Bima

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bima**	**Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan PD**	**100%**	**7.699.362.846**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bima**	**Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan PD**	**100%**	**7.699.362.846**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kota Bima**	**Persentase tercapainya Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**	**100%**	**91.160.050**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**Persentase tercapainya Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**	**100%**	**91.160.050**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	21.209.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	21.209.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dok	4.485.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dok	4.485.000	
	Koordinasi dan	Kota	Jumlah Dokumen	1 Dok	4.110.250	Koordinasi dan	Kota	Jumlah Dokumen	1 Dok	4.110.250	

	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bima	Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bima	Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dok	4.099.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dok	4.099.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dok	4.013.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dok	4.013.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	53.243.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	53.243.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kota Bima**	**Persentase terwujudnya penata usaha keuangan**	**100%**	4.906.846.422	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**Persentase terwujudnya penata usaha keuangan**	**100%**	4.906.846.422	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang / Bulan	4.720.042.922	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang / Bulan	4.720.042.922	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	178.979.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	178.979.000	
	Koordinasi dan	Kota	Jumlah Laporan	1 Lap	4.770.250	Koordinasi dan	Kota	Jumlah Laporan	1 Lap	4.770.250	

	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bima	Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bima	Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bima	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	3.054.250	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bima	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	3.054.250	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Bima**	**Persentase terwujudnya Administrasi Umum PD**	**100 %**	**503.375.000**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**Persentase terwujudnya Administrasi Umum PD**	**100%**	**503.375.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 pkt	8.505.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 pkt	8.505.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 pkt	12.672.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 pkt	12.672.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 pkt	37.733.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 pkt	37.733.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 pkt	63.955.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 pkt	63.955.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	100.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	100.000.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	280.510.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	280.510.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Bima**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**	**3 Unit**	**25.947.250**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bima**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**	**3 Unit**	**25.947.250**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	25.947.250	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	25.947.250	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bima**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**2.059.839.124**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**2.059.839.124**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	153.650.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	153.650.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.876.785.124	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.876.785.124	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.720.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.720.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.684.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.684.000	
	Kegiatan Pemeliharaan	**Kota**	Persentase	100%	**112.195.000**	**Kegiatan**	**Kota**	Persentase	100%	**112.195.000**	

	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Bima**	Pemeliharaan BMD PD			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bima**	Pemeliharaan BMD PD			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	92.215.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	92.215.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.980.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.980.000	
2	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Kota Bima**	**Tercapainya Predikat Informatif (A) bagi pemerintah daerah dalam rangka Penilaian Layanan Informasi Publik**	**A**	**1.441.761.200**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Kota Bima**	**Tercapainya Predikat Informatif (A) bagi pemerintah daerah dalam rangka Penilaian Layanan Informasi Publik**	**A**	**1.441.761.200**	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bima**	**Persentase Tercapainya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi penggunaan Media Layanan Informasi Publik Daerah**	**100%**	**1.441.761.200**	**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Persentase Tercapainya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi penggunaan Media Layanan Informasi Publik Daerah**	**100%**	**1.441.761.200**	
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi	4 Dok	6.336.000	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda	4 Dok	6.336.000	

			Pemerintah Daerah					Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4 Dok	7.446.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4 Dok	7.446.000	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dok	241'306'000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dok	241'306'000	
	Layanan Hubungan Media	Kota Bima	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	1.137.133.200	Layanan Hubungan Media	Kota Bima	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	1.137.133.200	
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	98 Dok	20.031.000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	98 Dok	20.031.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	41 Dok	29.509.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat , Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	41 Dok	29.509.000	
3.	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Kota Bima	Persentase PD yang menerapkan e-goverment	**88%**	**598.699.000**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Kota Bima	Persentase PD yang menerapkan e-goverment	**82%**	**598.699.000**	
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bima**	**'Jumlah PD yang memanfaatkan e-Goverment**	**2 PD**	**598.699.000**	**Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**'Jumlah PD yang memanfaatkan e-Goverment**	**2 PD**	**598.699.000**	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	7.457.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	7.457.000	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 Dok	42.444.000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 Dok	42.444.000	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Bima	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	330.742.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Bima	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	330.742.000	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Bima	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung	4 Layanan	48.007.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Bima	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem	4 Layanan	48.007.000	

			Layanan Pemerintah Daerah					Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Bima	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	12 Dok	149.512.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Bima	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	12 Dok	149.512.000	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dok	20.537.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dok	20.537.000	
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Kota Bima	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**	**65%**	**186.125.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Kota Bima	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**	**65%**	**186.125.000**	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	**Jumlah ketersediaan data statistik sektoral**	**610 Data Sheet**	**186.125.000**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bima	**Jumlah ketersediaan data statistik sektoral**	**610 Data Sheet**	**186.125.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Bima	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data StatistikSektoral	3 Dok	89.962.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Bima	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data StatistikSektoral	3 Dok	89.962.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Bima	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	40 Orang	15.777.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Bima	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	40 Orang	15.777.000	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Bima	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	610 Data Sheet	33.493.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Bima	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	610 Data Sheet	33.493.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik	Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat	40 Orang	13.239.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik	Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat	40 Orang	13.239.000	

	Sektoral	Bima	Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS			Sektoral	Bima	Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS			
	Pengembangan Infrastruktur	Kota Bima	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	33.654.000	Pengembangan Infrastruktur	Kota Bima	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	33.654.000	
C	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Kota Bima**	**Persentase kasus penyalahgunaan informasi daerah yang selesai di tanggani**	**100%**	**244.107.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Kota Bima**	**Persentase kasus penyalahgunaan informasi daerah yang selesai di tanggani**	**100%**	**244.107.000**	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bima**	**Persentase PD yang menggunakan jaringan komunikasi sandi**	**68,57%**	**108.959.000**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Persentase PD yang menggunakan jaringan komunikasi sandi**	**68,57%**	**108.959.000**	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	12 Dok	64.753.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	12 Dok	64.753.000	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	30.561.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	30.561.000	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Bima	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan	7.144.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan	7.144.000	

	Sektoral	Bima	Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS			Sektoral	Bima	Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS			
	Pengembangan Infrastruktur	Kota Bima	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	33.654.000	Pengembangan Infrastruktur	Kota Bima	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	33.654.000	
C	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Kota Bima**	**Persentase kasus penyalahgunaan informasi daerah yang selesai di tanggani**	**100%**	**244.107.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Kota Bima**	**Persentase kasus penyalahgunaan informasi daerah yang selesai di tanggani**	**100%**	**244.107.000**	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bima**	**Persentase PD yang menggunakan jaringan komunikasi sandi**	**68,57%**	**108.959.000**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Persentase PD yang menggunakan jaringan komunikasi sandi**	**68,57%**	**108.959.000**	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	12 Dok	64.753.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	12 Dok	64.753.000	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	30.561.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	30.561.000	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Bima	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan	7.144.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan	7.144.000	

						Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 PD	6.501.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 PD	6.501.000	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bima**	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	**17,14**	**135.148.000**	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	**17,14**	**135.148.000**	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	4 PD	135.148.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	4 PD	135.148.000	

Program kegiatan tahun anggaran 2024 berasal dari anggran APBD terdiri dari lima (5) program, sebelas (11) kegiatan dan empat puluh lima (45) sub kegiatan. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada empat (4) program sedangkan satu (1) program sebagai pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Sedangkan program yang medukung capaian sasaran ada empat (4) yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Perencanaan anggaran program kegiatan pada tahun 2025 yang bersumber dari anggaran APBD sebesar Rp. 10.170.055.046,00. Berdasarkan Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan STatistik Kota Bima menghasilkan kesepakatan diantaranya bahwa perencanaan dan penganggaran program kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima telah sesuai dengan rancangan awal RPKD 2025 dan target capaian yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Dengan demikian program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima sudah sejalan dan bisa mengakomodasi kebutuhan stakeholder Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Kebijakan Nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional. Arah kebijakan umum pembangunan Nasional 2020 – 2024 seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

   Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiscal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan UMKM dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan.

   Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energy, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energy, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar sector dan antar wilayah, dan meningkatnya efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan

   Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi dan listrik), menjamin

ketahanan air, pangan dan energy untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan system transportasi massal perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah – Swasta.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.

   Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; perkuatan kapasitas mitigasi bencana alam untuk mengurangi resiko bencana, mempercepat rehabilitasi daerah yang terkena bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.

   Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

6. Meningkat Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.

   Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah

   Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pousat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanann dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat

penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut di atas menjadi pedoman Pemerintah Kota Bima dalam menyusun kebijakan daerah yang terurai dalam Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Bidang Ekonomi, Tenaga Kerja dan Mobilitas penduduk, Investasi, Bidang Infrastruktur, Bidang kesehatan, Bidang Agama, Sosial dan Budaya.

Arah kebijakan nasional yang dikembangkan menjadi arah kebijakan Pemerintah Kota Bima, diimplementasikan secara teknis oleh masing-masing SKPD sesuai dengan Tupoksi masing-masing SKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima merumuskan suatu tujuan dalam Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian yaitu untuk meningkatkan pelayanan komunikasi, informasi, statistik dan persandian yang lebih baik dan berkelanjutan dengan pilar-pilar utama pada sektor informasi, komunikasi, statistik dan persandian. Arah kebijakan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern berbasis Informasi dan teknologi (IT) dengan sistem pengelolaan secara efektif, efesien dan berorientasi pada pelanggan. Peranan sumber daya sangat menentukan dalam keberhasilan penerapan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informasi, statistik dan Persandian.

Kebijakan di sektor Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bima diuraikan sebagai berikut :

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima.

Tabel 3-2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Konerja	Target		
			2024	2025	2026
Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya Pengelolaan E-Goverment	Persentase PD yang menerapkan e-goverment	88%	94%	100%
	Layanan Informasi Publik Meningkat	Indeks Layanan Informasi Publik	76,65	80,20	85
	Meningkatnya Pengamanan Informasi Melalui Layanan keamanan informasi	Persentase keamanan informasi Melalui Layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah	75%	85%	95%

	Pemerintah Daerah				
	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, sebagai faktor penunjang dalam proses perencanaan, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi prinsip SDI	84%	86%	89%

	Perubahan DPA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Bima						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	4 Lap	53.243.000	APBD		6 Laporan	10.490.700,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terwujudnya penata usaha keuangan**	**Kota Bima**	**100%**	4.906.846.422	**APBD**		**100%**	**5.493.803.607,60**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	12 Orang / Bulan	4.720.042.922	APBD		50/Bulan	5.261.220.707,60
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	12 Dok	178.979.000	APBD		12 Dok	223.757.600,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	1 Lap	4.776.250	APBD		1 Laporan	5.328.400,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bima	1 Dok	3.054.250	APBD		1 Dok	3.496.900,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase terwujudnya Administrasi Umum PD**	**Kota Bima**	**100%**	**503.375.000**	**APBD**		**100%**	**672.465.750,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	1 pkt	8.505.000	APBD		1 Paket	13.520.100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	6 pkt	12.672.000	APBD		1 Paket	173.833.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bima	1 pkt	37.733.000	APBD		1 Paket	41.394.100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bima	1 pkt	63.955.000	APBD		1 Paket	79.618.550,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bima	12 Dok	100.000.000	APBD		1 Dok	55.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Kota	12 Lap	280.510.000	APBD		12 Lap	309.100.000,00

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bima						
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**	**Kota Bima**	**3 Unit**	**25.947.250**	**APBD**		**3 Unit**	**25.947.250**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Bima	4 Unit	25.947.250	APBD		4 Unit	25.947.250
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Kota Bima**	**100%**	**2.059.839.124**	**APBD**		**100%**	**2.431.402.050,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	12 Laporan	153.650.000	APBD		12 Laporan	222.255.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bima	1 Laporan	1.876.785.124	APBD		12 Laporan	2.119.035.050,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	12 Laporan	10.720.000	APBD		1 Laporan	40.876.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bima	12 Laporan	18.684.000	APBD		12 Laporan	49.236.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan BMD PD**	**Kota Bima**	100%	**112.195.000**	**APBD**		**100%**	**237.195.200,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bima	11 Unit	92.215.000	APBD		1 Unit	69.454.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bima	1 Unit	19.980.000	APBD		1 Unit	167.741.200,00
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Tercapainya Predikat Informatif (A) bagi pemerintah daerah dalam rangka Penilaian Layanan Informasi Publik**	**Kota Bima**	**A**	**1.441.761.200**	**APBD**		**A**	**[illegible].700,00**
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Tercapainya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi penggunaan Media Layanan Informasi**	**Kota Bima**	**100%**	**1.441.761.200**	**APBD**		**100**	

	1.392.904.700,00
	1.392.904.700,00

		Publik Daerah							
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Bima	4 Dok	6.336.000	APBD		12 Laporan	1.034.766.700,00
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Bima	4 Dok	7.446.000	APBD		41 Komunitas	40.425.000,00
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Bima	4 Dok	241'306'000	APBD		80 Permohonan	132.693.000,00
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kota Bima	4 Layanan	1.137.133.200	APBD		30 Persen	16.500.000,00
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kota Bima	98 Dok	20.031.000	APBD		4 Media	168.520.000,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kota Bima	41 Dok	29.509.000			41 Dok	29.509.000
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase PD yang menerapkan e-goverment**	**Kota Bima**	**88%**	**598.699.000**	**APBD**		**82%**	**334.128.300,00**
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah PD yang memanfaatkan e-Goverment**	**Kota Bima**	**2 PD**	**598.699.000**	**APBD**		**2 PD**	**334.128.300,00**
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kota Bima	1 Unit	7.457.000	APBD		4 Aplikasi	18.398.600,00
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kota Bima	4 Dok	42.444.000	APBD		1 Dok	55.797.500,00
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kota Bima	2 Unit	330.742.000	APBD		2 Aplikasi	79.899.600,00
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Bima	4 Layanan	48.007.000	APBD		1 Aplikasi	34.071.400,00
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kota Bima	12 Dok	149.512.000	APBD		34 Unit	133.386.000,00
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Bima	1 Dok	20.537.000	APBD		34 PD	[illegible]00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam proses perencanaan dan evaluasi**	**Kota Bima**	**65%**	**186.125.000**	**APBD**		**75'**	

		%
	279.987.400,00	
	12.575.200/	

		pembangunan daerah							
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah ketersediaan data statistik sektoral**	**Kota Bima**	**610 Data Sheet**	**186.125.000**	**APBD**		**630 Data Sheet**	**279.987.400,00**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data StatistikSektoral	Kota Bima	3 Dok	89.962.000	APBD		50 Orang	67.844.700,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Bima	40 Orang	15.777.000	APBD		50%	106.315.000,00
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kota Bima	610 Data Sheet	33.493.000	APBD		50%	54.923.000,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Kota Bima	40 Orang	13.239.000	APBD		1 Dok	40.564.700,00
	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Kota Bima	1 Unit	33.654.000	APBD		1 Dok	10.340.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Persentase kasus penyalahgunaan informasi daerah yang selesai di tanggani**	**Kota Bima**	**100%**	**244.107.000**	**APBD**		**100%**	**301.818.000,00**
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PD yang menggunakan jaringan komunikasi sandi**	**Kota**	**68,57%**	**108.959.000**	**APBD**		**100%**	**169.540.000,00**
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kota Bima	12 Dok	64.753.000	APBD		12 Dok	70.763.000,00
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	12 Laporan	30.561.000	APBD		4 Laporan	30.910.000,00
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Bima	6 Laporan	7.144.000	APBD		2 Laporan	63.635.000,00

	Elektronik								
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	10 PD	6.501.000	APBD		24 PD	21.186.000,00
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi**	**Kota Bima**	**17,14**	**135.148.000**	**APBD**		**100%**	**115.324.000,00**
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kota Bima	4 PD	135.148.000	APBD		**8 PD**	115.324.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada tahun 2024 mempunyai lima (5) program, sebelas (11) kegiatan dan empat puluh lima (45) sub kegiatan berasal dari anggaran APBD. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada empat (4) program sedangkan satu (1) program sebagai pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Program yang medukung capaian sasaran ada empat (4) yaitu Program Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Perencanaan anggaran program kegiatan pada tahun 2025 yang bersumber dari anggaran APBD sebesar Rp. 10.170.055.046,00.

Tabel 4-1 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Daerah Kota Bima Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Rencana Pendanaan (Rp)	Bidang Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Kota Bima**	**Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan PD**	**100%**	**7.699.362.846**	**Sekretariat**
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kota Bima**	**Persentase tercapainya Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**	**100%**	**91.160.050**	**Sekretariat**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	21.209.800	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dok	4.485.000	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dok	4.110.250	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dok	4.099.000	Sekretariat

			DPASKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dok	4.013.000	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	53.243.000	Sekretariat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kota Bima**	**Persentase terwujudnya penata usaha keuangan**	**100%**	4.906.846.422	**Sekretariat**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang / Bulan	4.720.042.922	Sekretariat
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	178.979.000	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	4.770.250	Sekretariat
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bima	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	3.054.250	Sekretariat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Bima**	**Persentase terwujudnya Administrasi Umum PD**	**100%**	**503.375.000**	**Sekretariat**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 pkt	8.505.000	Sekretariat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 pkt	12.672.000	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 pkt	37.733.000	Sekretariat
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 pkt	63.955.000	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	100.000.000	Sekretariat

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	280.510.000	Sekretariat
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Bima**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**	**3 Unit**	**25.947.250**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	25.947.250	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bima**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**2.059.839.124**	**Sekretariat**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	153.650.000	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.876.785.124	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.720.000	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.684.000	Sekretariat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Bima**	**Persentase Pemeliharaan BMD PD**	100%	**112.195.000**	**Sekretariat**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	92.215.000	Sekretariat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.980.000	Sekretariat
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Kota Bima**	**Tercapainya Predikat Informatif (A) bagi pemerintah daerah dalam rangka Penilaian Layanan Informasi Publik**	**A**	**1.441.761.200**	**Bidang Kominfo**
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	**Kota Bima**	**Persentase Tercapainya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Layanan**	**100%**	**1.441.761.200**	**Bidang Kominfo**

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi penggunaan Media Layanan Informasi Publik Daerah**			
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	4 Dok	6.336.000	Bidang Kominfo
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4 Dok	7.446.000	Bidang Kominfo
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dok	241'306'000	Bidang Kominfo
	Layanan Hubungan Media	Kota Bima	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	1.137.133.200	Bidang Kominfo
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	98 Dok	20.031.000	Bidang Kominfo
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	41 Dok	29.509.000	Bidang Kominfo
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Bima	Persentase PD yang menerapkan e-goverment	**88%**	**598.699.000**	**Bidang TIK**
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bima**	**'Jumlah PD yang memanfaatkan e-Goverment**	**2 PD**	**598.699.000**	Bidang TIK
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	7.457.000	Bidang TIK
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 Dok	42.444.000	Bidang TIK
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Bima	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	330.742.000	Bidang TIK
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Bima	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Layanan	48.007.000	Bidang TIK
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Bima	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	12 Dok	149.512.000	Bidang TIK
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dok	20.537.000	Bidang TIK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kota Bima	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**	**65%**	**186.125.000**	**Bidang Statistik Sektoral**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	**Jumlah ketersediaan data statistik sektoral**	**610 Data Sheet**	**186.125.000**	**Bidang Statistik Sektoral**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	Kota Bima	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	3 Dok	89.962.000	Bidang Statistik Sektoral

	Sektoral		StatistikSektoral			
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Bima	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	40 Orang	15.777.000	Bidang Statistik Sektoral
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Bima	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	610 Data Sheet	33.493.000	Bidang Statistik Sektoral
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Bima	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	40 Orang	13.239.000	Bidang Statistik Sektoral
	Pengembangan Infrastruktur	Kota Bima	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	33.654.000	Bidang Statistik Sektoral
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	**Kota Bima**				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Kota Bima**	**Persentase kasus penyalahgunaan informasi daerah yang selesai di tanggani**	**100%**	**244.107.000**	**Bidang Persandian**
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bima**	**Persentase PD yang menggunakan jaringan komunikasi sandi**	**68,57%**	**108.959.000**	**Bidang Persandian**
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	12 Dok	64.753.000	Bidang Persandian
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	30.561.000	Bidang Persandian
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Bima	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan	7.144.000	Bidang Persandian
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	10 PD	6.501.000	Bidang Persandian
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Bima**	**Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi**	**17,14**	**135.148.000**	**Bidang Persandian**
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	4 PD	135.148.000	Bidang Persandian

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika dan Informatika Kota Bima ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan sebagai panduan dalam pelaksananaan kegiatan urusan komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian di Pemkot Bima.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima untuk melakukan pengelolaan dan penataan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemkot Bima dalam mendukung evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik (SPBE) serta mengawal Kota Bima Smart City, maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi berbagai perubahan/dinamika yang terjadi. Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik.

Kepala Dinas



(Drs. H. Mahfud, M.Pd)
Nip. 19660623 198603 1 011

RENCANA KERJA PD (RENJA)

Tahun Anggaran 2024









Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Jl. Kesehatan No.2, Kelurahan Leiwrato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunianya dan kekuasaannya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima Tahun 2024. Renja ini menyajikan uraian penjelasan tentang beberapa program dan kegiatan yang telah dan akan kami kerjakan serta disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaaan program dan kegiatan organisasi secara nyata.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima dimaksudkan sebagai acuan untuk kami dalam merencanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya, sehingga dapat mengalokasikan anggaran sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Kota Bima, 26 September 2023

Kepala Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman
Dan Pertanahan Kota Bima,

A . FARUK, S.ST.Par.M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19780722 201001 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Struktur Organisasi 4
1.5. Sistematikan Penyusunan 9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 28
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 30
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 37
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 37
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 49
3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 52
BAB IV PENUTUP 60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kota/Kabupaten) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari visi, misi dan program Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2022.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana kerja ini bersifat dinamis, dengan kata lain akan diadakan evaluasi dan penyesuaian didasarkan pada perkembangan hasil pelaksanaannya, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka koordinasi horizontal dan vertikal terus ditingkatkan, mengingat Rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacar Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, dan memberikan arah dalam penyusunan rencana pembiayaan yang menggambarkan rencana pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kota Bima. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai tolak ukur dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok serta kegiatan.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 52 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima terdiri atas :

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

   Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

   a) penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
   b) pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
   c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
   d) pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; dan pertanahan;

2. Sekretariat

   Sekretariat Mempunyai tugas Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :

   a) pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
   b) pengelolaan urusan keuangan;
   c) pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
   d) pengelolaan urusan ASN; dan
   e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi berbagai Sub yaitu :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara.Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c) Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
d) Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
e) Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
f) Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
g) Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

a) Penyiapan bahan penyusunan rencanan kerja, program dan kegiatan;
b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
c) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
d) Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.;
e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
f) Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
g) Pelaksanaan pengelolaan data dan kerjasama;
h) Pelaksanaan penyusunan laporan hasil perencanaan;

i) Pelaksanaan urusan keuangan;
j) Pelaksanaan urusan akutansi, verifikasi keuangan;
k) Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
l) Penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
m) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasansesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan, pembangunan dan pembinaan di bidang perumahan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kegiatan operasional dan program di bidang perumahan rakyat.
b) Penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan perumahan formal dan perumahan swadaya, pemeliharaan prasarana dan sarana dan utilitas perumahan dan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (Rusunami) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
c) Pembinaan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, lembaga keuangan dan lembaga pendukung perumahan dalam pembangunan perumahan formal dan swadaya.
d) Pengaturan pelaksanaan penyusunan rencana penataan perumahan
e) Pengaturan, penelitian, pembinaan izin dan rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan\
f) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan
g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perumahan Rakyat Membawahi :

1) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan rakyat.

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kawasan Permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan penyiapan perumusan kebijakan bidang kawasan permukiman;Perumusan dan penyusunan rencana strategis bidang
b. pelaksanaan kebijakan bidang kawasan permukiman;
c. pelaksanaan kegiatan pengoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan pengembangan kawasan;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman;
e. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang kawasan permukiman;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kawasan permukiman; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman membawahi :

1) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Kawasan Permukiman.

1.4.1. Tabel Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima



1.5. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima Tahun Anggaran 2024 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA PD Tahun 2021 s.d. Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023, mengacu pada APBD Tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA PD tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi, dan realisasi RENSTRA PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD bersangkutan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaah kebijakan nasional yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, serta tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan juga menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Penutup berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun kemungkinan ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2021-2022

Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak kegiatan-kegiatan dalam program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan obyektif. Pengklasifikasian dilaksanakan yakni sebelum berlangsung (ex ante), pada saat berlangsung (on going), atau sesudah selesai (ex post). Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai dan kegagalan yang dihadapi terhadap pelaksanaan dari suatu kegiatan. Parameter yang digunakan sebagai pembanding dalam melaksanakan evaluasi kinerja adalah kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya dan atau dengan kinerja lainnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan OPD baru

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KOTA BIMA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BIMA

NO	KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2022 (%)	
1	2					3	4		5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%	
							Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	1	4				**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**																
1.	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan akupan Administrasi Perkantoran Terwujud	Persen	821	16.991.906.710,95	59,56	8.374.467.843,20	20,10	3.424.259.789,00	20,00	3.293.512.723,00	99,502	96,18	79,56	11.667.980.566,20	9,69	68,67

	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok./Lap.	35	163.189.125,00	21	136.341.300,00	7	9.072.600,00	7	9.072.600,00	100	100,00	28,00	145.413.900,00	80,00	89,11
	1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (RENJA&REVIU RENSTRA	Dok./Lap.	10	35.568.583,33	6	28.555.233,33	2	2.465.900,00	2	2.465.900,00	100	100,00	8,00	31.021.133,33	80,00	87,21
	1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dok./Lap.	5	19.750.416,67	3	14.802.066,67	1	1.763.400,00	1	1.763.400,00	100	100,00	4,00	16.565.466,67	80,00	83,87
	1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA	Dok./Lap.	5	17.530.416,67	3	14.210.066,67	1	1.171.400,00	1	1.171.400,00	100	100,00	4,00	15.381.466,67	80,00	87,74
	1	4	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dok./Lap.	5	16.317.666,67	3	13.886.666,67	1	848.000,00	1	848.000,00	100	100,00	4,00	14.734.666,67	80,00	90,30
	1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	Dok./Lap.	5	16.335.666,67	3	13.891.466,67	1	425.000,00	1	425.000,00	100	100,00	4,00	14.316.466,67	80,00	87,64
	1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok./Lap.	5	57.686.375,00	3	50.995.800,00	1	2.398.900,00	1	2.398.900,00	100	100,00	4,00	53.394.700,00	80,00	92,56
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok./Lap.	210	13.661.097.011,95	126	6.514.919.965,20	42	2.861.208.311,00	42	2.761.478.983,00	100	96,51	168,00	9.276.398.948,20	80,00	67,90
	1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan pada perangkat daerah	Bulan	60	12.847.677.136,95	36	6.088.920.765,20	12	2.689.537.111,00	12	2.594.820.796,00	100	96,48	48,00	8.683.741.561,20	80,00	67,59

	1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan	Bulan	60	624.517.625,00	36	244.947.900,00	12	168.888.600,00	12	163.875.587,00	100	97,03	48,00	408.823.487,00	80,01	65,46
	1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Dok./Lap.	5	100.084.375,00	3	97.914.900,00	1	752.900,00	1	752.900,00	100	100,00	4,00	98.667.800,00	80,00	98,58
	1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dok./Lap.	80	61.810.375,00	48	57.884.500,00	16	1.379.300,00	16	1.379.300,00	100	100,00	64,00	59.263.800,00	80,00	95,88
	1	04	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dok./Lap.	5	27.007.500,00	3	25.251.900,00	1	650.400,00	1	650.400,00	100	100,00	4,00	25.902.300,00	80,00	95,91
	1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dok./Lap.	20	16.380.750,00	12	4.368.200,00	4	4.240.200,00	4	4.240.200,00	100	100,00	16,00	8.608.400,00	80,00	52,55
	1	4	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dok./Lap.	20	16.380.750,00	12	4.368.200,00	4	4.240.200,00	4	4.240.200,00	100	100,00	16,00	8.608.400,00	80,00	52,55
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dok./Lap.	16	3.318.000,00	6	866.800,00	4	884.800,00	4	884.800,00	100	100,00	10,00	1.751.600,00	62,50	52,79
	1	04	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok./Lap.	16	3.318.000,00	6	866.800,00	4	884.800,00	4	884.800,00	100	100,00	10,00	1.751.600,00	62,50	52,79

	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	240	1.727.550.689,00	144	1.062.654.586,00	48	228.783.257,00	48	228.134.414,00	100	99,72	192,00	1.290.789.000,00	80,00	74,72
	1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Bulan	60	141.770.875,00	36	130.487.500,00	12	19.353.900,00	12	19.346.000,00	100	99,96	48,00	149.833.500,00	80,00	105,69
	1	4	1	2,1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Bahan Logistik Kantor	Bulan	60	248.969.144,00	36	170.592.920,00	12	26.280.000,00	12	26.136.000,00	100	99,45	48,00	196.728.920,00	80,00	79,02
	1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	60	58.197.000,00	36	45.794.680,00	12	3.220.000,00	12	3.146.000,00	100	97,70	48,00	48.940.680,00	80,00	84,09
	1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	60	1.278.613.670,00	36	715.779.486,00	12	179.929.357,00	12	179.506.414,00	100	99,76	48,00	895.285.900,00	80,00	70,02
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	120	1.030.156.985,00	72	511.355.774,00	24	257.235.621,00	24	229.299.726,00	100	89,14	96,00	740.655.500,00	80,00	71,90
	1	4	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan surat menyurat	Bulan	60	117.761.250,00	36	76.283.000,00	12	15.047.000,00	12	15.047.000,00	100	100,00	48,00	91.330.000,00	80,00	77,56
	1	4	1	2,1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Umum Kantor	Bulan	60	912.395.735,00	36	435.072.774,00	12	242.188.621,00	12	214.252.726,00	100	88,47	48,00	649.325.500,00	80,00	71,17
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	180	390.214.150,00	108	143.961.218,00	36	62.835.000,00	36	60.402.000,00	100	96,13	144,00	204.363.218,00	80,00	52,37

	1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at	Cakupan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	60	235.680.150,00	36	41.747.218,00	12	37.270.000,00	12	34.840.000,00	100	93,48	48,00	76.587.218,00	80,00	32,50
	1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	60	98.096.500,00	36	76.204.000,00	12	2.440.000,00	12	2.440.000,00	100	100,00	48,00	78.644.000,00	80,00	80,17
	1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	60	56.437.500,00	36	26.010.000,00	12	23.125.000,00	12	23.122.000,00	100	99,99	48,00	49.132.000,00	80,00	87,06
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	99,50	96,18			9,69	68,67
Predikat Kinerja																	ST	ST			SR	S
2.	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pengembang an perumahan layak huni bagi masyarakat berpengahsilan rendah	Persen	35.087 (100 %)	6.851.455.442,50	94,46	3.603.592.093,00	1,11	1.945.873.632,00	0,94	1.832.989.023,00	84,81	94,20	95,40	5.436.581.116,00	0,27	79,35
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pendataan dan survei bangunan Rumah Tinggal terkena dampak bencana atau program relokasi	Dok./ Lap.	10	1.602.421.187,50	3	373.312.425,00	2	250.233.435,00	2,00	249.840.000,00	99,90	99,84	5,00	623.152.425,00	49,98	38,89
	1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi	Surfei dan pendataan	Dok./ Lap.	5	801.210.593,75	3	373.312.425,00	1	203.955.475,00	1,00	203.571.000,00	99,81	99,81	4,00	576.883.425,00	79,96	72,00

						Program Kabupaten/Kota															
	1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Surfei dan pendataan	Dok./Lap.	5	801.210.593,75	0	-	1	46.277.960,00	1,00	46.269.000,00	99,98	99,98	1,00	46.269.000,00	20,00	5,77
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun / diperbaiki	Unit	34.742	2.804.033.331,00	32.807	2.487.804.181,00	55	1.484.370.000,00	55,00	1.399.365.000,00	100,00	94,27	32.862,00	3.887.169.181,00	94,59	138,63
	1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit	34.742	2.804.033.331,00	32.807	2.487.804.181,00	55	1.484.370.000,00	55,00	1.399.365.000,00	100,00	94,27	32.862,00	3.887.169.181,00	94,59	138,63
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Unit Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus yang dibina dan dikelola	KK	335	2.445.000.924,00	332	742.475.487,00	333	211.270.197,00	273,75	183.784.023,00	82,21	86,99	605,75	926.259.510,00	180,82	37,88
	1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah KK penerima manfaat	Kegiatan	3	1.222.500.462,00	0	-	1	76.795.997,00	1,00	73.310.023,00	100,46	95,46	1,00	73.310.023,00	33,49	6,00
	1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah KK penerima manfaat Rumah Susun Umum dan / Rumah Khusus	KK	332	1.222.500.462,00	332	742.475.487,00	332	134.474.200,00	272,75	110.474.000,00	82,15	82,15	604,75	852.949.487,00	182,15	69,77
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	84,81	94,20			0,27	79,35
Predikat Kinerja																	T	ST			SR	T

3	1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	Persen	384 (45,05 %)	43.381.092.000,00	99,07	1.646.798.930,00	22,04	3.730.532.800,00	20,02	3.393.877.000,00	90,85	90,98	119,09	5.040.675.930,00	30,97	11,62
	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Menurunnya jumlah luasan kumuh Kota Bima	Ha	91,49	711.980.625,00	185,90	779.752.130,00	7,75	335.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,90	779.752.130,00	203,19	109,52
	1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Kumuh yang dilakukan pendampingan dalam perencanaan	Ha	91,49	711.980.625,00	185,90	779.752.130,00	7,75	335.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,90	779.752.130,00	203,19	109,52
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Menurunnya jumlah luasan kumuh Kota Bima	Dok./ Lap.	5	14.223.037.125,00	2	154.802.600,00	1	31.165.800,00	1,00	31.165.800,00	100,00	100,00	3,00	185.968.400,00	60,00	1,31
	1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Sosialisasi pencegahan munculnya kawasan kumuh baru	Dok./ Lap.	5	14.223.037.125,00	2	154.802.600,00	1	31.165.800,00	1,00	31.165.800,00	100,00	100,00	3,00	185.968.400,00	60,00	1,31
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Menurunnya luasan kumuh Kota Bima	Unit	288	28.446.074.250,00	193	712.244.200,00	76	3.363.407.000,00	76,00	3.362.711.200,00	100,00	99,98	269,00	4.074.955.400,00	93,40	14,33
	1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	Dok./ Lap.	3	14.223.037.125,00	0	-	1	88.460.000,00	1,00	88.125.200,00	99,62	99,62	1,00	88.125.200,00	33,21	0,62

						Peremajaan/Pemugaran Permuk															
	1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Menurunnya luasan kumuh Kota Bima (Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR))	Unit/(Ha)	285	14.223.037.125,00	193	712.244.200,00	75	3.274.947.000,00	75,00 / (27,58 Ha)	3.274.586.000,00	100,00	99,99	268,00	3.986.830.200,00	94,04	28,03
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	90,85	90,98			30,97	11,62
Predikat Kinerja																	ST	ST			SR	SR
5.	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Prosentase Pengadaan Tanah Berdasrkan Prioritas Pembangunan	Persen	174,26 (100 %)	7.510.595.406,25	72,15	10.594.287.120,00	2,16	3.580.799.600,00	2,26	3.228.624.260,00	104,49	90,16	74,41	13.822.911.380,00	42,70	184,05
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lahan untuk pembangunan	Ha	174,26	7.510.595.406,25	125,73	10.594.287.120,00	3,76	3.580.799.600,00	3,93	3.228.624.260,00	104,49	90,16	129,66	13.822.911.380,00	74,40	184,05
	2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Lahan untuk pembangunan	Ha	174,26	7.510.595.406,25	125,73	10.594.287.120,00	3,76	3.580.799.600,00	3,93	3.228.624.260,00	104,49	90,16	129,66	13.822.911.380,00	74,40	184,05
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	104,49	90,16			42,70	184,05

																	Predikat Kinerja	ST	ST			SR	ST
6.	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Prosentase Jumlah pengajuan penerbitan sertifikat aset tanah pemerintah	Sertifikat	654.451 (100 %)	7.510.595.406,25	49,42	299.643.530,00	0,02	206.696.000,00	0,01	81.196.280,00	26,92	39,28	49,43	380.839.810,00	0,01	5,07
	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah sertifikat aset tanah pemerintah yang diterbitkan	Sertifikat	654.451	7.510.595.406,25	323.407	299.643.530,00	130	206.696.000,00	35,00	81.196.280,00	26,92	39,28	323.442,00	380.839.810,00	49,42	5,07
	2	10	08	2.02	02	Pemanfataan Tanah Kosong	Jumlah sertifikat aset tanah pemerintah yang diterbitkan	Sertifikat	654.451	7.510.595.406,25	323.407	299.643.530,00	130	206.696.000,00	35,00	81.196.280,00	26,92	39,28	323.442,00	380.839.810,00	49,42	5,07
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	26,92	39,28			0,01	5,07
																	Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)														12.888.161.821,00		11.830.199.286,00						
																	(PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)						
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)	81,32	91,79			0,06	44,20
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)	T	ST			SR	SR

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni	%	$\frac{\Sigma \text{ Rumah Layak Huni (Thn n)} - \Sigma \text{ Rumah Layak Huni (Thn n-1)}}{\Sigma \text{ Jumlah Rumah Layak Huni (Thn n-1)}} \times 100$ Dengan Kriteria Rumah Layak Huni : 1. Keselamatan Bangunan. a. Persyaratan Struktur : - Pondasi - Tiang/Kolom - Balok - Rangka Atap b. Non Struktur : - Dinding Pengisi - Kusen - Penutup Atap - Lantai 2. Luasannya Sumber: Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat (Nomor: 403/KPTS/2002 Keputusan Menteri Kipraswil 2002 tentang RSH) a. Standar/Jiwa 9 (m^2) b. Unit Rumah : 36 (m^2) c. Luas Lahan : 60 (m^2) dengan asumsi 1 KK = 4 Jiwa 3. Kesehatan a. Penghawaan b. Pencahayaan c. MCK/Sanitasinya d. Air Bersih Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 4/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan	Data Rumah Layak Huni (Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman)	Dinas PERKIM dan Dinas PUPR

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
				Penataan Ruang. Kebutuhan Air Bersih 60 liter/Orang/Hari		
2.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Penurunan kawasan kumuh	%	$\frac{\Sigma \text{ Luas Kawasan Kumuh (Thn n-1)} - \Sigma \text{ Luas Kawasan Kumuh (Thn n)}}{\Sigma \text{ Luas Kawasan Kumuh (Thn n-1)}} \times 100$ <u>Penjelasan</u> : a. Kawasan perkotaan adalah total luas wilayah administratif Kota Bima. b. Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. c. Indikator kawasan kumuh, antara lain : 1. Bangunan Gedung 2. Jalan Lingkungan 3. Penyediaan air minum 4. Drainase lingkungan 5. Pengelolaan air limbah/Sanitasi 6. Pengelolaan persampahan 7. Pengamanan kebakaran 8. Ruang terbuka publik	Data Luas Kawasan Kumuh (Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman)	1. Dinas PERKIM dan Dinas PUPR 2. Dinas PUPR 3. Dinas PUPR 4. Dinas PUPR 5. Dinas PUPR 6. Dinas LH 7. Dins Pemadam Kebakaran 8. Dinas LH dan Dinas PUPR

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 9.452.260.524,00, yang terbagi dalam Belanja Operasi Rp. 8.718.480.226,00, yang terdiri dari (Belanja Pegawai Rp. 2.745.310.796,00, Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.758.169.430,00, Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.215.000.000,-) dan Belanja Modal Rp. 3.111.719.060,00, yang terdiri dari (Belanja Modal Tanah Rp. 3.035.329.060,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.

35.890.000,00, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp.40.500.000,00) yang terurai dalam 6 program dan 16 serta 38 Sub kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

- Hambatan dan Permasalahan :
  a. Kualitas SDM masih harus ditingkatkan.
  b. Jumlah Personil/PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum ideal, akibatnya pelaksanaan tugas berjalan kurang optimal. Idealnya untuk Kota Bima dengan kompleksitas masalah dan jumlah penduduk serta luas wilayah minimal harus memiliki 2 staf untk masing-masing eselon IV.
  c. Sarana dan Prasarana penunjang yang masih kurang, termasuk didalamnya kendaraan operasional, bahkan ada kendaraan operasional yang kondisinya sudah rusak berat, sehingga menghambat monitoring dan evaluasi lapangan

- Upaya Pencegahan Masalah :
  a. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan merencanakan serta menganggarkan;
  b. Meningkatkan jumlah PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui dan meningkatkan kwalitas SDM melalui kegiatan pembinaan pegawai, baik yang diselenggarakan internal maupun bekerjasama dengan instansi terkait;
  c. Meningkatkan sinergitas dengan PERANGKAT DAERAH dalam sosialisasi perundang-undangan daerah yang terkait langsung dengan program PERANGKAT DAERAH yang bersangkutan dan menambah jumlah PNS yang memiliki kualifikasi dengan mengirim PNS untuk ikut Diklat PNS;
  d. Mengalokasikan anggaran pengadaan kendaraan operasional untuk memudahkan dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas monitoring, walaupun hanya kendaraan roda 2.

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Bima tahun 2018-2023 adalah"*Terwujudnya kondisi daerah dan masyarakat Kota Bima yang aman, tenteram, tertib dan teratur*"selanjutnya ditetapkan sasaran dan tujuan pembangunan. Dalammewujudkan Visi, sasaran serta tujuan pembangunan tersebut maka harusdiperlukan suasana yang aman, tentram dan kondusif ditengah-tengahmasyarakat.

Agar dapat memberikan rasa aman, tentram dan kondusif ditengah-tengah masyarakat yang optimal baik secara ekonomis, sosial dan ekologi termasuk peranannya bagi Pemerintah Daerah diperlukan pengawalan dan penegakan dalam Pelaksanaan Perda/Perwali Kota Bima.

Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi pembangunan dimaksud maka Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima sebagaimana yang tercantum dalam RENSTRA Tahun 2024-2026 mengacu pada Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2026, adalah sebagaiberikut :

A. VISI : "Terwujudnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan"

B. MISI :

1. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman
2. Meningkatkan penanganan pertanahan pemerintah untuk kepentingan umum

2.2.1 Adapun isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah :

1. Sumber Daya Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih kurang.
2. Kualitas Sumber Daya Aparatur masih rendah.
3. Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah.
4. Adanya Kawasan Kumuh.
5. Konflik-konflik akibat pengadaan tanah.

2.2.2 Rekomendasi dan Catatan Strategis

1. Jumlah PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi masih belum memadai, sehingga berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tugas baik administrasi maupunoperasional.Untuk itu perlu ditingkatkan kapasitas PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, sehingga diharapkan jumlah PNS yang ideal. Kebijakan ini dilakukan guna menunjang tugas fungsi serta operasional dan penegakan Perda dan Perwali sejalan dengan perkembangan pembangunan.
2. Sumber Daya Aparatur merupakan unsur penentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Meningkatkan kwalitas sumberdaya aparatur sebagai satu kebutuhan dasar merupakan bagian usaha dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima. Kondisi relatif masih rendahnya kwalitas sumberdaya aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima tercermin dari tingkat kemampuan dalam kajian dan penjabaran pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi khususnya yang terkait dengan tugas-tugas teknis penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan

3. Pengentasan kemiskinan dengan pola Perbaikan kualitas hidup, khususnya pada ketidak layakan hunian.
4. Fokus pada kelurahan yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM), RTLH dan tingkat kekumuhan tinggi.
5. memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan
6. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain:
   a. Meningkatkan Pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
   b. Mengurangi kawasan kumuh
   c. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan dengan pengadaan tanah
   d. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas terkait lainnya, diantaranya dengan membentuk PokJa PKP Kota Bima sehingga memberikan peran dalam menegakanperaturan daerah dan keputusan kepala daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. DISPERAKIMTAN Kota Bima menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan kinerja organisasinya yakni Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni, Persentase Penurunan Kawasan Kumuh yang Tertangani. Sampai akhir Tahun 2022 capaian kedua indikator kinerja tersebut sudah tercapai sesuai target. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima diantaranya sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kebutuhan pemenuhan rumah (Backlog Perumahan) di Kota Bima sebanyak 5.088 unit;

2. Keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap Rumah Layak Huni, di Kota Bima, Sisa Data RTLH Per Desember 2021 sebanyak 11.233Unit;
3. Belum optimalnya penanganan perumahan pasca bencana;
4. Masih Banyak kawasan permukiman kumuh seluas 103,32 Ha;
5. Belum Adanya Ketersediaan basis data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang valid, terkini (up-to-date) dan terintegrasi;
6. Kebijakan terkait kegiatan sertifikasi regristrasi yang belum terlaksana;
7. Penyediaan Hunian Yang Layak Huni melalui Kemitraan;
8. Belum optimalnya pelayanan informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
9. Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan dan pelayanan penyelesaian permasalahan pertanahan;

Dalam mengatasi isu-isu penting dan permasalahan di atas, DISPERERKIMTAN Kota Bima telah melaksanakan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan dengan Kementerian PUPR dan Kementerian ATR, melalui Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renja DISPERKIMTAN Kota Bima tahun 2024. Selain melalui kegiatan Rakor dan Forum OPD tersebut, koordinasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota Bima serta saat Rakortekbangnas (dengan Kementerian PUPR, Kementerian ATR Kemendagri dan Bappenas).

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan (nonbankable) – (backlog kepemilikan);
2. Keterbatasan bantuan pemerintah maupun CSR untuk menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat tidak mampu (backlog hunian);
3. Masih banyak masyarakat tinggal di daerah yang rawan bencana atau bahkan tinggal di daerah yang bukan diperuntukkan untuk permukiman;
4. Terbatasnya jumlah ASN DISPERAKIM Kota Bima yang tidak sebanding dengan pelaksanaan program/kegiatan dan pengolahan data sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
5. Tingginya frekuensi rotasi personil di Pemerintah Kota Bima, sehingga pemegang data sering berubah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Setelah dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD, terdapat proses analisis dan penyesuaian antara rancangan awal RKPD dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyesuaian RKPD antara lain usulan dan masukan dari Bappeda, OPD lain, dan masyarakat melalui rangkaian proses Musrenbang tersebut. Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD 2023 dengan usulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2023 dengan hasil analisis adalah sesuai Tabel 2.4.1 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bima Tahun 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
A	NON URUSAN										
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah serta Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD	100%	3.462.710,27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah serta Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD	100%	3.150.599.324,00	Termasuk dengan Gaji dan Tunjangan (semula Belanja Tidak Langsung)
B.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										

1.	Program Pengembangan Perumahan	Kota Bima	persentase pengembangan perumahan layak huni bagi masyarakat berpengahsilan rendah	100%	1.527.505.200,00	Program Pengembangan Perumahan	Kota Bima	persentase pengembangan perumahan layak huni bagi masyarakat berpengahsilan rendah	100%	1.783.472.452,00	
2.	Program Kawasan Permukiman	Kota Bima	Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	100%	1.149.967.820,00	Program Kawasan Permukiman	Kota Bima	Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	100%	4.875.000.000,00	
3.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Bima		100%	0,00	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Bima		100%	2.000.000.000,00	
C.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
1.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Kota Bima	Presentase Kualitas Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan	100%	0,00	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Kota Bima	Presentase Kualitas Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan	100%	1.000.000.000,00	

2.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Kota Bima	Presentase Kualitas Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan	100%	4.153.019.202,00	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Kota Bima	Presentase Kualitas Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan	100%	3.010.000.000,00	
3.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Kota Bima	Jumlah sertifikat aset tanah pemerintah yang diterbitkan	100%	525.257.400,00	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Kota Bima	Jumlah sertifikat aset tanah pemerintah yang diterbitkan	100%	150.000.000,00	
	Jumlah Anggaran				7.359.212.332,27	Jumlah Anggaran				12.959.071.776,00	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima dilakukan dengan mengkaji Rencana Strategis (Renstra) Kementerian. Hal ini diperlukan untuk mengetahui fokus kinerja kementerian dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

3.1.1 Rancangan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 tersebut ditetapkan empat pilar pembangunan yang terdiri dari:

a. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Pembangunan ekonomi berkelanjutan;
c. Pemerataan pembangunan;
d. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pilar ketiga “Pemerataan Pembangunan” tersebut diimplementasikan salah satunya melalui “Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi”, di mana pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah secara fisik dan virtual, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 yaitu sebagai berikut :

a). Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m^3/kapita/tahun;
b). Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyakbanyaknya material lokal dan menggunakan teknologi recycle;
c). 100% Smartliving (Hunian Cerdas).

Untuk mewujudkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 tersebut terutama yang terkait dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dicapai melalui tahapan sebagai berikut:

a). Tahun 2017 – 2019 :

- 78% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 1,5% (menjadi 27.000 ha), dan 75% Pelayanan Sanitasi. Jumlahanggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.45 Triliun;
- Backlog rumah bagi MBR sebesar 6,46 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 814 ribu unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.165 Triliun melalui 17% APBN/APBD dan 83% Swasta/Masyarakat.

b). Tahun 2020 – 2024 :

- 88% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha), dan 85% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.128 Triliun;
- Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% Swasta/Masyarakat.

c). Tahun 2025 – 2030 :

- 100% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 4,4% (menjadi 0 ha), dan 100% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.170 Triliun;
- Zero Backlog rumah bagi MBR 3 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 4,88 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.1.220 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% Swasta/Masyarakat.

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: *“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”*

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

a. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
b. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
c. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
d. Meningkatan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pelaksanaan Visi dan Misi dari Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat dalam rangka pencapaian tujuan sebagai berikut :

a. Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestic, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energi, industry dan sektor ekonomi unggulan.
b. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan system logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
c. Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang parstisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
d. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin merata untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat.
e. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis.
f. Peningkatan infratruktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
g. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi.
h. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya.
i. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi.
j. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan 2020-2024 yang tertuang dalam RPJP pada RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat ndonesia yang mandiri, maju, adil, dan

makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dimana terdapat 4 (empat) pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keberadaan 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020 – 2024 merupakan fokus utama yang diarahkan oleh RPJP Nasional 2005 – 2025 untuk mencapai tujuan utama dari periode terakhir dari acuan rencana pembangunan nasional yang diterjemahkan dalam Tema RPJMN IV tahun 2020 – 2024, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong". Arah kebijakan dan Strategi tersebut lebih jauh meliputi:

1) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Permukiman

Peningkatkan penyediaan infrastruktur permukiman yang disertai dengan pengembangan sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang partisipatif dan berkelanjutan.

No.	Kebijakan	Strategi
Pengembangan Permukiman		
1.	Peningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap ermukiman layak dan aman untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	a) Penyusunan dan penyiapan landasan penyelenggaraan kawasan permukiman. b) Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk penanganan permukiman. c) Pengelolaan sistem informasi nasional yang terintegrasi dengan system informasi daerah d) Membangun dan mengelola sistem informasi nasional yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah dan dimutakhirkan secara berkala e) Penanganan permukiman kumuh perkotaan terkait dengan upaya penurunan kumuh perkotaan menjadi 0% melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan prasarana dan sarana dasar permukiman dengan pendekatan kegiatan fisik maupun nonfisik f) Pengembangan permukiman baru dan perkotaan layak huni terkait dengan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan perwujudan Kota Berkelanjutan. g) Percepatan peningkatan pelayanan sarana dan

		prasarana dasar permukiman perdesaan. h) Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas kawasan perdesaan i) Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. j) Percepatan penyediaan sarana dan prasarana permukiman perbatasan memenuhi SPM k) Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang memiliki ketahanan terhadap bencana.

2) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan

Peningkatan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau.

No.	Kebijakan	Strategi
Pengembangan Perumahan		
1.	Penyediaan rumah baru layak huni	a. Integrasi pembangunan hunian vertikal untuk masyarakat berpengahasilan rendah dengan simpul transportasi publik. b. Penyediaan perumahan melalui inclusive urban renewal dan konsolidasi tanah dalam rangka penanganan permukiman kumuh skala kawasan di wilayah perkotaan. c. Penyediaan hunian layak bagi ASN/TNI/POLRI d. Pengoptimalan potensi penyediaan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan kolaborasi. e. Pemanfaatan tanah BMN/BUMN/BMD/BUMD untuk mendukung penyediaan rumah sewa untuk kelompok MBR (social rental housing) bagi MBR, termasuk kelompok millennial dan keluarga baru yang berpenghasilan rendah, khususnya di wilayah perkotaan. f. Penyediaan hunian layak untuk mendukung pembangunan dan pengembangan ibu kota negara. g. Pengoptimalan penyediaan PSU untuk mendorong pengembangan perumahan skala besar pada lingkungan hunian baru perkotaan. h. Dukungan penyediaan PSU untuk mendorong

		pengembangan perumahan skala besar pada lingkungan hunian perkotaan i. Integrasi penyediaan hunian dengan tata ruang, sistem infrastruktur wilayah, arah pengembangan wilayah/kawasan strategis dan memperhatikan aspek mitigasi-adaptasi terhadap potensi bencana.
2.	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	a. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sehingga memenuhi indikator kekayaan secara minimal melalui pengoptimalan potensi keswadayaan masyarakat, dukungan pemda dan stakeholder lainnya, serta pemanfaatan bahan/material lokal. b. Dukungan regulasi afirmatif yang mengakomodasi rumah adat/desain tradisional sebagai rumah layak huni. c. Dukungan regulasi terhadap upaya peningkatan kualitas bagi rumah yang ditempati oleh lebih dari 1 (satu) keluarga secara bersama (co-housing)
3.	Penyiapan enabling environment untuk mengoptimalkan penyediaan hunian layak	a. Harmonisasi dan penyediaan regulasi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasn permukiman. b. Dukungan regulasi untuk mengakomodasi pemanfaatan rumah selain rumah formal, seperti rumah yang ditempati oleh lebih dari 1 (satu) keluarga secara besama (co-housing), rumah singgah (social housing, dan rumah adat. c. Penguatan implementasi standar keamanan dan kelayakan bangunan. d. Peningkatan kapasitas pemerintah/ pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. e. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. f. Pembentukan dan peningkatan peran badan badan perumahan public dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman di perkotaan/metropolitan, termasuk untuk mengelola rumah sewa untuk

3.1.2 Renstra Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah dengan menelaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dalam hal ini Renstra Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019.

Visi Kementrian ATR mengaju pada Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 yakni "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah:

1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu "Memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019 adalah:

1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;
2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian yang terkait dengan pertanahan adalah sebagai berikut :

1) Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan

Penyediaan Peta Dasar dan infrastruktur lainnya bagi kepentingan agraria, tata ruang dan pertanahan merupakan upaya mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Program utama adalah penyiapan Peta Dasar skala besar, pengukuran dan pemetaan bidang tanah selama lima tahun sebanyak 9 juta hektar (dikonversi dalam bidang menjadi 18 juta bidang) dengan target per tahun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, integrasi tata batas kawasan hutan ke sistem pendaftaran tanah dan sosialisasi tanah adat/ulayat, peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang bergeoreferensi serta penyiapan model pelaksanaan pendaftaran tanah stelsel positif.

2) Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan legasisasi aset tanah melalui Program Nasional Agraria tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona), baik subyek, obyek maupun ruang lingkup kegiatan Prona. Pelaksanaan kegiatan legalisasi aset tanah melalui Program Prona, Nelayan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Petani, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Transmigrasi Tahun 2015 dengan target sebanyak 922.093 bidang untuk seluruh Indonesia, menjadi kegiatan Prona harus direalisasikan dengan tepat waktu dan kualitas yang baik.

Tim Mobilisasi yang dibentuk guna menjamin ketepatan waktu penyelesaian Prona yang dibentuk oleh Menteri ATR/KBPN atau Kepala Kantor Wilayah, menggunakan tenaga teknis untuk melakukan kegiatan pengumpulan data administrasi/pemberkasan, pengumpulan data fisik dan yuridis serta pengukuran dan pemetaan bidang tanah, bertindak juga sebagai Panitia Pemeriksa Tanah. Kegiatan percepatan sertipikasi terhadap pulau-pulau terluar Indonesia sebanyak 92 titik dan pelaksanaan sertipikasitanah-tanah yang terkait untuk keperluan peribadatan, kegiatan sosial dan sebagai sumber kegiatan ekonomi masyarakat dan situs bersejarah akan ditingkatkan.

3) Pengaturan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Pengaturan dan pengendalian hubungan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan perwujudan kehadiran Negara dalam memastikan tercapainya tujuan pemanfaatan sumberdaya agraria bagi kesejahteraan masyarakat yang adil, harmoni dan berkelanjutan dalam ruang wilayah Republik Indonesia melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang dan tanah. Sehubungan dengan itu Kementerian ATR/BPN menyiapkan program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMN 2015-2019 yang merupakan perwujudan Nawa Cita berupa Reformasi Agraria pada tanah

seluas 9 juta Ha, yang terdiri dari Redistribusi Tanah seluas 4,5 juta Ha dan 4,5 juta Ha hasil legalisasi aset yang subyeknya memenuhi syarat.

Program ini diawali dengan IP4T yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan bersama (ATR/BPN, Dalam Negeri, Kehutanan, PUPera). Adapun obyek IP4T ini diprioritaskan pada Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung sedangkan yang berada di Hutan Produksi yang dapat dikonversi menjadi prioritas berikutnya.

4) Pengadaan Tanah

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 telah berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2015 sehingga seluruh proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik di tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil perlu dilaksanakan menurut ketentuan perundangan ini dan ketentuan pelaksanaan lainnya. Koordinasi dan komunikasi perlu diintensifkan antara kanwil dan kantah dengan pihak yang memerlukan tanah dan pihak lain yang terkait, sehingga sejak awal kanwil/kantah dapat bersiap diri dalam penyediaan tenaga, peralatan dan waktu serta perencanaan penganggaran.

Bimbingan teknis kementerian ATR/BPN terhadap penyelenggaraan pengadaan tanah kepada instansi-instansi yang memerlukan tanah, pemerintah daerah, dan jajaran ATR/BPN di Provinsi/Kabupaten/Kota terus diintensifkan agar agenda pembangunan infrastruktur terwujud sesuai dengan maksud dan tujuannya. Perlu dilakukan workshop antar kementerian/lembaga dalam rangka mengumpulkan informasi kebutuhan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum agar memudahkan didalam perencanaan dan antisipasi permasalahan yang mungkin terjadi.

5) Penanganan Sengketa

Mandat kerangka Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-2019 untuk mewujudkan penanganan masalah hingga sedikitnya berkurang sampai dengan 50%. Upaya yang akan dilaksanakan sampai dengan 2019 antara lain melalui penyiapan model-model penanganan sengketa, inisiasi peradilan pertanahan, pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah incracht dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penanganan perkara/sengketa.

Target penurunan kasus pertanahan sampai dengan 50 % (limapuluh persen) sampai tahun 2019 di seluruh Indonesia yang ditempuh dengan cara mengelola pengaduan pertanahan melalui seleksi terhadap seluruh pengaduan yang diterima, dengan ketentuan bahwa tiap pengaduan yang tidak termasuk pada kategori kasus pertanahan supaya dibalas/disurati kepada pengadu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengaduan diterima.

Terhadap pengaduan yang masuk dalam kategori kasus pertanahan, untuk dilaksanakan dengan mengedepankan mediasi melalui pola win-win solution, sebagai bentuk dan representasi kehadiran negara dalam penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

3.1.3 Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai agenda pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca-2015, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu penipisan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Tiga Prinsip Pelaksanaan SDG's:

1. Universality – SDGs dilaksanakan oleh negera maju maupun Negara berkembang
2. Integration – SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan
3. *No One Left Behind* / Tidak Meninggalkan Satu Orangpun
    a) Harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan
    b) Pelaksanaan melibatkan semua pemangku kepentingan
    c) Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan
    d) Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Tujuan SDGs mencakup skala universal, dengan kerangka kerja yang utuh dalam membantu negara-negara di dunia menuju pembangunan berkelanjutan, melalui tiga pendekatan, yakni pembangunan ekonomi, keterbukaan dalam tatanan sosial, serta keberlangsungan lingkungan hidup.Secara rinci SDGs mempunyai 17 Tujuan dan 169 target.

Adapun tujuan dan target SDGs yang berkaitan langsung dengan DISPERKIMTAN adalah sebagai berikut:

No.	Goal/Target Global	Indikator Global	Target Nasional (RPJMN 2020-2024)	Indikator Nasional	Target Daerah (RPJMD 2019-2023)	Indikator Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Goal I. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun						
I.	1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua lakil-aki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumberdaya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	1.Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hokum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu termasuk penyandang disabilitas dan lansia.	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses aman air minum, sanitasi, rumah layak huni	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak
Goal 11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan						
I.	11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh	11.1.1 Proporsi populasi penduduk urban yang tinggal di daerah kumuh pemukiman liaratau rumah yang tak layak	Tercapainya pengentasan kawasan pemukiman kumuh perkotaan	Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses aman air minum, sanitasi, rumah layak huni	Persentase Kawasan Permukiman yang layak Huni dan Berkelanjutan

Sumber: Dokumen SDGs BAPPENAS

3.1.4 Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang dimaksud dengan SPM ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sedangkan yang dimaksud Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Adapun SPM Perumahan Rakyat yang diampu oleh DISPERKIMTAN terdiri atas:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yang diampu ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Sedangkan Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
b) Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Disperkimtan 2024 pada dasarnya harus sinergis dengan prioritas pembangunan Kota Bima sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional

3.2.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perumaha, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima pada jangka waktu 3 (Tiga) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2024-2026.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumaha, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 3 (Tiga) tahun mendatang.

Tabel 3.2.1 Tujuan dan Sasaran DISPERKIMTAN Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana		Persentase luas kawasan permukiman layak	%	97,87
		1) Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni	%	0,54
		2) Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	3,06

3.2.2 Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan Kebijakan merupakan rumusan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi. Strategi dan kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dituangkan sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki	Peningkatan rumah menjadi layak huni	Peningkatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
			Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana, relokasi akibat program pemerintah, rumah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam
				Fasilitasi Penyediaan rumah bagi korban

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		keterbatasan akses pembiayaan perumahan	umum dan rumah khusus beserta PSU-nya dalam rangka Mendukung Pembangunan dan pengembangan perumahan	akibat program pembangunan
				Penyediaan rumah umum dan rumah khusus
			Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan	Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman	Penanganan Kawasan Kumuh Kota Bima
			Peningkatan keterpaduan penyelanggaraan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Peningkatan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman
			Pengurangan awasan kumuh dalam rangka mendukung Peningkatan kualitas kawasan permukiman dalam pengembangan wilayah	Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman
				Pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
				Pembinaan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
			Peningkatan tertib administrasi pertanahan dalam rangka mendukung Peningkatan aspek pertanahan dalam pengembangan wilayah	Meningkatkan pelayanan pengadaan tanah
				Sertifikasi bidang tanah negara, kas desa dan masyarakat
			Penanganan permasalahan pertanahan	Sertifikasi bidang tanah negara, kas desa dan masyarakat

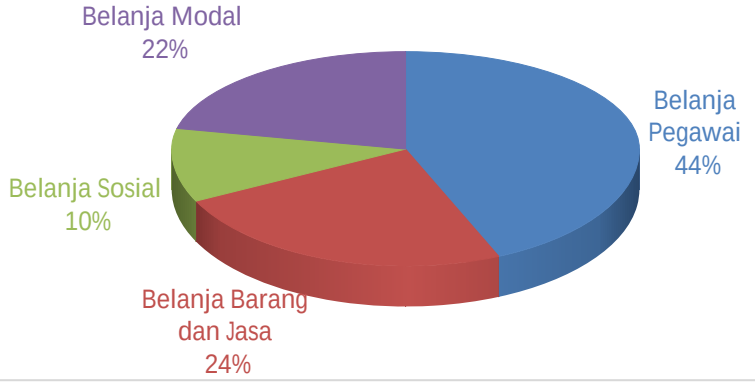
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Sumber : Renstra Review Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, Tahun 2024-2026

3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Disperkimtan pada tahun 2024 mengajukan usulan sebanyak 5 (lima) Program dengan 14 (Empat belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 8.837.790.469,-, yang terdiri Belanja Pegawai Rp. 3.841.867.354,-, Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.138.582.115,-, Belanja Sosial Rp. 900.000.000,-. Dan Belanja Modal Rp. 1.957.341.000,- Adapun rincian rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut.

GAMBAR 3.3
PROPORSI USULAN ANGGARAN TAHUN 2024



Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota BimaTahun 2023

KodeRekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				6.589.730.780	DAU			9.586.742.370
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bima	100 Persen	3.912.257.760	DAU		100 Persen	4.048.566.330
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	7 Dok./Lap.	12.049.600	DAU		6 Dok./Lap.	8.363.700
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (RENJA&REVIU RENSTRA	Kota Bima	2 Dok./Lap.	3.495.500	DAU		2 Dok./Lap.	3.428.400

1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Kota Bima	1 Dok./Lap.	2.369.200	DAU			0
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA	Kota Bima	1 Dok./Lap.	1.894.200	DAU		1 Dok./Lap.	1.136.500
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Kota Bima	1 Dok./Lap.	1.030.000	DAU		1 Dok./Lap.	920.900
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	Kota Bima	1 Dok./Lap.	1.030.000	DAU		1 Dok./Lap.	579.000
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	1 Dok./Lap.	2.230.700	DAU		1 Dok./Lap.	2.298.900
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**18 Dok./Lap.**	**2.951.050.872**	**DAU**		**19 Dok./Lap.**	**3.049.534.830**
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan pada perangkat daerah	Kota Bima	12 Bulan	2.780.299.672	DAU		12 Bulan	2.812.259.130
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan	Kota Bima	12 Bulan	168.201.600	DAU		1 Dokumen	234.437.900
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	1 Dok./Lap.	673.400	DAU		1 Dok./Lap.	1.417.400

1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	16 Dok./Lap.	1.256.300	DAU		16 Dok./Lap.	1.209.400
1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bima	1 Dok./Lap.	619.900	DAU		1 Dok./Lap.	211.000
1.04.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**4 Dok./Lap.**	**1.919.200**	**DAU**		**4 Dok./Lap.**	**1.838.200**
1.04.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima	4 Dok./Lap.	1.919.200	DAU		4 Dok./Lap.	1.838.200
1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				0	**DAU**		**1 Paket**	**41.110.000**
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan			0	DAU		1 Paket	41.110.000
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**12 Bulan**	**276.426.000**	**DAU**		**12 Bulan**	**296.172.000**
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kota Bima	12 Bulan	22.366.000	DAU		1 Paket	31.240.000
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima	12 Bulan	30.840.000	DAU		12 Paket	11.712.000

1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	12 Bulan	3.220.000	DAU		12 Paket	3.220.000
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	12 Bulan	220.000.000	DAU		12 Laporan	250.000.000
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**	**12 Bulan**	**427.102.788**	**DAU**		**12 Laporan**	**402.222.600**
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima	12 Bulan	427.102.788	DAU		12 Laporan	402.222.600
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**	**12 Bulan**	**243.709.300**	**DAU**		**12 Bulan**	**249.325.000**
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	12 Bulan	35.897.500	DAU		5 Unit	39.000.000
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	12 Bulan	7.800.000	DAU		12 Unit	11.940.000
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	12 Bulan	200.011.800	DAU		1 Unit	198.385.000
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase pengembang an perumahan layak huni bagi masyarakat berpengahsil an rendah**	**Kota Bima**	**100 Persen**	**1.527.505.200**	**DAU**		**100 Persen**	**767.183.740**

1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah pendataan dan survei bangunan Rumah Tinggal terkena dampak bencana atau program relokasi**	**Kota Bima**	**2 Dok./Lap.**	**247.106.300**	**DAU**		**2 Dok./Lap.**	**229.791.140**
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Surfei dan pendataan	Kota Bima	1 Dok./Lap.	169.629.860	DAU		1 Dok./Lap.	205.803.250
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Surfei dan pendataan	Kota Bima	1 Dok./Lap.	77.476.440	DAU		1 Dok./Lap.	23.987.890
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah korban bencana yang dibangun / diperbaiki**	**Kota Bima**	**32 Unit**	**1.000.000.000**	**DAU**		**15 Unit Rumah**	**374.462.600**
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Bima	32 Unit	1.000.000.000	DAU/DID		15 Unit Rumah	374.462.600
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Jumlah Unit Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus yang dibina dan dikelola**	**Kota Bima**	**332 KK**	**280.398.900**	**DAU**		**2 Laporan**	**162.930.000**
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah KK penerima manfaat	Kota Bima	1 Kegiatan	59.443.000	DAU		1 Laporan	33.432.700
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah KK penerima manfaat Rumah Susun Umum dan / Rumah Khusus	Kota Bima	332 KK	220.955.900	DAU		1 Dok./Lap.	129.497.300

1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh**	**Kota Bima**	**100 Persen**	**1.149.967.820**	**DAU**		**100 Persen**	**1.664.305.000**
1.04.03.2.01	**Penerbitan Izin pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman**		**Kota Bima**		**0**	**DAU**		**1 Dok./Lap.**	**120.000.000**
1.04.03.2.01.01	**Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik**	**Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan pengembang/pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik.**	Kota Bima		**0**	DAU		**1 Dok./Lap.**	**120.000.000**
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Menurunnya jumlah luasan kumuh Kota Bima**	**Kota Bima**	**1 Dok./Lap.**	**199.999.820**	**DAU**		**5 Laporan**	**119.525.000**
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Sosialisasi pencegahan munculnya kawasan kumuh baru	Kota Bima	1 Dok./Lap.	199.999.820	DAU		5 Laporan	50.000.000

1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan bidang PKP	Jumlah Laporan Pelaksanaan penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumjuh	Kota Bima		0	DAU		1 Dok./Lap.	20.000.000
1.04.03.2.02.012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kota Bima		0	DAU		2 Kelompok Masyarakat	49.525.000
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Menurunnya luasan kumuh Kota Bima**	**Kota Bima**	**100 Persen**	**949.968.000**	**DAU**		**100 Persen**	**1.424.780.000**
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Menurunnya luasan kumuh Kota Bima	Kota Bima	1 Dok./Lap.	148.340.000	DAU		1 Dok./Lap.	0
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Kota Bima	25 Unit	801.628.000	DAU		25 Unit	0
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Bima	0	0	DAU		2 Laporan	244.000.000

1.04.03.2.03.09	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Kota Bima	0	0	DAU		6,62 Ha	1.180.780.000
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		**Kota Bima**	**100 Persen**		**DAU**			**3.106.687.300**
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**		**Kota Bima**			**DAU**			**3.106.687.300**
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kota Bima			DAU		90 Unit	3.106.687.300
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**4.679.276.602**				**3.389.621.790**

2.10.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Kota Bima**		**0**	**DAU**		**1 Unit**	**15.080.000**
2.10.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Kota Bima**		**0**	**DAU**		**1 Unit**	**15.080.000**
2.10.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bima		**0**	**DAU**		**1 Unit**	**15.080.000**
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Prosentase Pengadaan Tanah Berdasrkan Prioritas Pembangunan**	**Kota Bima**	**100 Persen**	**4.153.019.202**	**DAU**		**100 Persen**	**3.159.767.390**
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Lahan untuk pembangunan**	**Kota Bima**	**3,5 Ha**	**4.153.019.202**	**DAU**		**3,5 Ha**	**3.159.767.390**

2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	3,5 Ha	4.153.019.202	DAU		10 Dokumen	3.159.767.390
2.10.08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Jumlah sertifikat aset tanah pemerintah yang diterbitkan**	**Kota Bima**	**230 Bidang**	**526.257.400**	**DAU**		**1 Laporan**	**214.774.400**
2.10.08.2.02	**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**Jumlah sertifikat aset tanah pemerintah yang diterbitkan**	**Kota Bima**	**230 Bidang**	**526.257.400**	**DAU**		**1 Laporan**	**214.774.400**
2.10.08.2.02.01	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Kota Bima	230 Bidang	526.257.400	DAU		1 Laporan	214.774.400
Jumlah Total Belanja Langsung					**11.269.007.382**				**12.976.364.160**

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima Tahun 2024 ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dan arah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara fungsional oleh masing-masing unit kerja dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang ditargetkan.

Keberhasilan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah periode tahun 2024 tidak hanya ditentukan oleh akurat dan realistisnya penyusunan rencana kerja melainkan didukung oleh tekad dan semangat pengabdian semua ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima yang akan melaksanakannya.

Disamping itu dalam melaksanakan semua rencana kerja di lapangan masih banyak muncul masalah, hambatan dan kendala yang perlu diantisipasi sebelumnya sehingga diperlukan kejelian dan kemampuan pelaksana dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian agar tercapai sasaran kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Demikian rencana kerja ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima semoga dapat dipahami, direalisasikan sebagaimana yang diharapkan oleh masing-masing unit kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima sesuai dengan fungsinya.

Kepala Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman
Dan Pertanahan Kota Bima,

A . FARUK, S.ST.Par.M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19780722 201001 1 011

LAPORAN

RENCANA KINERJA (RENJA)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOTA BIMA

TAHUN ANGGARAN 2024



Jl. Gajah mada No. 10 kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima

Nomor Tlpn : 037443214

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun Anggaran 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Rencana Kerja (RENJA) yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun 2024 ini memuat program dan kegiatan, alokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan juga prakiraan maju tahun berikutnya. Dengan kata lain, dokumen ini memberikan gambaran mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Kota Bima Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, Juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Melalui Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi tolak ukur bagi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Visi, Misi dan arahan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan segenap kerendahan hati dan atas segala keterbatasan, kami menyadari bahwa Renja ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami masih membuka diri terhadap masukan-masukan, koreksi dan saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesempurnaan laporan ini. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan ini, kami mengucapkan terimakasih atas sumbangan pikirannya.

Kota Bima, Februari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kota Bima,



H. LALU SUKARSANA, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660704 198608 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
Tabel- Tabel iii
BAB I. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023 ..... **8**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD 8
2.2 Analisis Kinerja SKPD 20
2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 21
2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD 22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **37**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 37
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **41**
BAB V. PENUTUP **52**

TABEL - TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD 12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD 20
Tabel 2.3 Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas 22
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 24
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan 36
Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran 39
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran 39
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama PD 40
Tabel 4.1 Sasaran dan Program/Kegiatan 42
Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Substansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD, saat ini disebut Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Selain itu juga untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2023. Dalam rangka integrasi Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima, seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja). Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena di dalam Renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Kota Bima sebagai salah satu Daerah Otonom di wilayah Provinsi NTB sesuai Undang Undang nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintahan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat, tentunya harus berupaya untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah sebaik – baiknya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah mengingat semakin berkurangnya ketergantungan pada pemerintah pusat. Maka untuk mendukung kebijakan daerah Kota Bima serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang perijinan dibentuklah SKPD Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kota Bima yang mempunyai kewenangan dalam pelayanan perijinan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima

Dengan adanya kebijkan tersebut membawa dampak perubahan pada sistem manajemen administrasi yang ada, dimana pemerintah Kota Bima diharapkan melaksanakan pembenahan pada aspek refitalisasi organisasi kelembagaan dengan cara menata kembali struktur organisasi secara terus menerus yang efektif dan efisien. Selain itu juga melakukan peningkatan profesionalisme aparatur untuk menciptakan Sumber Daya Aparatur yang mumpuni sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan Kota Bima sejak berdirinya hingga akhir tahun 2009 mengarah pada aktifitas perkotaan yang berfokus pada pelayanan jasa dan aktifitas non pertanian lainnya, hal ini ditandai adanya alih fungsi lahan menjadi sektor usaha jasa dan pembangunan gedung – gedung kantor dan perumahan, tentu saja perkembangan ini harus diikuti dengan perubahan arah kebijakan pembangunan untuk mengoptimalkan penataan ruang dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang diikuti dengan pengembangan aktifitas ekonomi lokal yang produktif. Pengembangan tersebut akan merambah pada peningkatan aktifitas.

Renja DPMPTSP disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparat di DPMPTSP Kota Bima di dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan publik yang optimal. Selain itu dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi kinerja tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada DPMPTSP Kota Bima.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Import
11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara elektronik dibidang Perdagangan.
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 - 2028;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan.
17. Peraturan Daerah kota Bima Nomor 5 tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
21. Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu kota bima
22. Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berbasis risiko
23. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 tahun 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan berbasis risiko kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapaun maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima :

1. **Tujuan Umum** : Untuk memberikan arah dan pedoman rencana pelaksanaan Program dan kegiatan bidang Penanaman Modal dan Perizinan tahun 2024 sebagai kebijakan dalam mencapai Visi dan Misi SKPD serta Visi dan Misi Kota Bima.
2. **Tujuan Khusus** :
   a. Mengetahui Kondisi Umum Pembangunan Bidang Penanaman Modal dan PTSP dan rencana pembangunan menuju tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta visi dan misi Pemerintah Kota Bima selama 1 (satu) tahun .
   b. Merencanakan Program dan Kegiatan Tahun 2024, SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan Jenis pelayanan (SPM) sehingga dapat menciptakan optimalisasi pelayanan perijinan serta Investasi Penanaman Modal dalam Negeri.
   c. Sebagai bahan Evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam LKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah penyajian Renja PD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran-gamabaran umum dalam penyusunan Renja PD agar substansi yang dibahas pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam Bab Pendahuluan ini terdiri atas beberapa subbab meliputi :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan Renja PD dengan RKPD, Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, permen, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan walikota dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD dalam rangka mendukung tercapainnya tujuan dan sasaran daerah sesuai RPD Kota Bima 2024-2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi indikator program/kegiatan terhadap
2. Faktor-faktor penyebab pemenuhan target (memenuhi/tidak memenuhi/melebihi)
3. Implikasi yang timbul terhadap target pencapaian program
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
5. Tampilkan Tabel Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD sampai dengan tahun berjalan (dalam Permendagri 86 tahun 2017 di halaman 402)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
2. Mengidentifikasi semua indikator PD didasarkan pada indikator RPD, RENSTRA PD, IKK, SPM, NSPK dan SDGs yang belum tercapai
3. Tampilkan tabel T-C.30 pencapaian Kinrja Pelayanan Perangkat Daerah (dalam permendagri 86 tahun 2017 di halaman 403). Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian atas tujuan dan sasaran daerah, serta capaian program dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain :

1. Menguraikan proses pembagian antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;
4. Tampilkan Tabel T-C.31 Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bima Tahun 2024 (dalam Permendagri 86 tahun 2017 di halaman 404)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Pengusulan dari Musrenbang;
2. Pengusulan dari pokok-pokok pikiran DPRD;
3. Pengusulan dari Forum Musrenbang Tematik;
4. Saran dan masukan dari forum/lintas Perangkat Daerah;
5. Pengajuan proposal dari lembaga/badan/kelompok masyarakat kepada Walikota
6. Sajikan Tabel T-C.32 Usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2024 (dalam permendagri 86 tahun 2017 di halaman 405)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang belum tercapai (sesuai Renstra PD tahun 2018-2023)
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan (jumlah program dan jumlah kegiatan, penyebaran lokasi atau kelompok sasaran, total kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 (unduh dari SIPD RI)

BAB V PENUTUP

Uraian Penutup antara lain :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun untuk ketersediaan anggaran sesuai kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan.

Evaluasi kinerja yang dimaksud adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan guna memberikan penjelasan lebih lanjut tentang :

1. Efektifitas dan efisiensi kegiatan.
2. Efektifitas pencapaian sasaran.

Disamping itu juga diuraikan mengenai hal –hal yang mendukung keberhasilan dan faktor yang menghambat dan langkah – langkah perbaikan (pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan kinerja untuk masa – masa yang akan datang (review) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (n-2/Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain tentang realisasi program dan kegiatan tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja keluaran dan realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran.

Pada tahun 2023 realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target hanya pada program Pelayanan Penanaman Modal pada sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dimana indikatornya adalah Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan target kinerja 30 orang terealisasi 11 orang dengan capaian kinerja 36 % sudah banyak masyarakat atau pelaku usaha yang sudah

memahami dan mengerti arti penting untuk mengurus izin usaha, baik izin lokasi yang dipergunakan untuk usaha maupun izin yang lainnya.

Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target yaitu pada Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dengan capaian kinerja 100 % dan Program promosi penanaman modal target 100 %

Banyak program dan kegiatan yang melebihi target diatas 100 % antara lain pada program Pelayanan Penanaman Modal pada sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik target 1.000 pelaku usaha realisasi kinerja 1.667 pelaku usaha dengan capaian kinerja 166 %. Kemuadian sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal target 2500 kegiatan usaha realisasi 4541 kegiatan usaha dengan capaian kinerja sebesar 181 % demikian juga dengan Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal (DANA DAK Non Fisik), pada sub Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal target 210 pelaku usaha realisasi 240 pelaku usaha dengan capaian 114 % pada sub Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal target 13 kegiatan usaha realisasi 30 kegiatan usaha dengan capaian 231 %. Faktor penyebab melebihi target adalah disebabkan karena sudah banyak pelaku usaha yang sudah mengerti dan menyadari akan pentingnya izin usaha.

Di perkiraan capaian target program dan kegiatan tahun berjalan akan mencapai rata-rata diatas 100 % dengan harapan agar masyarakat atau pelaku usaha dapat menyadari akan pentingnya izin usaha.

Adapun Faktor-faktor penyebab pemenuhan target (memenuhi/tidak memenuhi/melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2023

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas penanaman modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja. Penyebab keberhasilan yang dominan sehingga kinerja Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima mencapai target yang ditentukan atau mengalami peningkatan adalah :

1. Adanya Kemitraan dan koordinasi antara Dinas penanaman modal dan PTSP dengan Dinas Teknis terkait;
2. Pelaksanaan Survey yang rutin terhadap Pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha;
3. Pelaksanaan Monitoring yang intens terhadap Izin usaha yang telah berakhir masa berlakunya;
4. Pelaksanaan Sosialisasi cakupan produk hukum kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan perizinan kepada masyarakat pelaku usaha;

5. Tersedianya Sumber Daya Pegawai yang cukup dan memadai;
6. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan.

Ada beberapa faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2023, penyesuaian Program dan kegiatan yang sesuai dengan Kepemdagri 50 tahun 2022 Penyelerasan antara nama program dan kegiatan dari tahun yang sebelumnya dengan tahun sekarang target kinerja pada indikator sasaran atau indikator utama akan dipegaruhi oleh keadaan realisasi anggaran yang ada karena kegitannya masih dipengaruhi oleh situasi pandemi yang dirasakan yakni adanya pandemi covid-19 tahun 2019 walaupun sudah berlalu 4 tahun yang lalu namun penganggaran masih terasa dan masih berpengaruh dengan anggaran yang ada dan masih dirasakan sangat kurang dan minim untuk memajukan sarana dan prasana terkait peningkatan pelayanan publik, masih belum adanya aplikasi daerah yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik terkait kegiatan IKM masih dilakukan secara manual, yang diinginkan bisa menggunakan aplikasi mandiri atau sistem IKM online untuk masyarakat yang merasakan akan pelayanan pada DPMPTSP dan belum bisa dikatanan PTSP sebagai pelayanan satu pintu karena dinas terkait atau teknis belum ada yang berkantor ke DPMPTSP.

Implikasi yang timbul terhadap target pencapaian program, dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

1. Melakukan sosialisai kepada pelaku usaha (badan/perorangan) tentang aturan – aturan yang berkaitan dengan Perizinan;
2. Melakukan Pembinaan secara langsung kepada pelaku usaha (badan/perorangan) yang akan berakhir masa berlaku izinnya;
3. Mendorong dan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan;
4. Melakukan rapat- rapat koordinasi dengan Dinas Teknis terkait dalam hal kepengurusan pelayanan perijinan satu pintu.
5. Diharapkan bisa diberikan anggaran dan dana yang sesuai untuk sarana dan prasarana untuk meningkatkannya pelayanan publik;

Untuk lebih jelasnya dapat di sajikan Tabel 2.1 T-C.29 yang merupakan tabel Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan Tahun 2023 (sesuai dalam Permendagri 86 tahun 2017 di halaman 402) dan menjelaskan juga tentang program, kegiatan, indikator, target, realisasi dan tingkat persentase capaian realisasi kinerja sesuai yang telah direncanakan. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya pada tahun berjalan namun dilakukan juga pada tahun-tahun sebelumnya dari tahun n, tahun n-1 s/d tahun n-3,tabel T-C.29 berikut ini :

Tabel 2.1 T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2	18	0.0.0.0.1				DINAS PENANAMAN MODAL		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 %	100 Persen	100 Persen	100%
2	18	0.0.0.0.1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 %	100 Persen	100 Persen	100%

2	18	0.0.0.0.1	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Dokumen	'100	'Persen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	10	Dokumen	10	Dokumen	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	2	Dokumen	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	2	Laporan	100%

2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	2	Laporan	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.02		Administrasi Keuangan	Jumlah Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	30	orang/ Bulan	30	orang	35	orang/ Bulan	25	orang / Bulan	71%	35	orang/ Bulan	25	orang / Bulan	83%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	bulan	12	Dokumen	11	Dokumen	92%	12	Dokumen	12	Dokumen	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	1	laporan	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	laporan	1	laporan	2	laporan	2	laporan	100%	2	laporan	2	laporan	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.06		Administrasi Umum	Porsentase Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%

2	18	0.0.0.0.1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	jenis	2	Paket	2	Paket	100 %	2	Paket	2	Paket	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	jenis	12	Paket	12	Paket	100 %	12	Paket	12	Paket	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100 %	12	Paket	12	Paket	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	laporan	50	kali	12	laporan	12	lapor an	100 %	25	lapora n	25	lapor an	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	100	Persen	100	Perse n	100	Persen	100	Perse n	100 %	100	Perse n	100	Perse n	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	0	Unit	2	Unit	2	Unit	100 %	5	Unit	5	Unit	167%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	100	Persen	100	Perse n	100	Persen	100	Perse n	100 %	100	Perse n	100	Perse n	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12	laporan	2300	surat	12	laporan	12	lapor an	100 %	12	lapora n	12	lapor an	100%

2	18	0.0.0.0.1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	12	bulan	12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	12	laporan	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang milik daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	unit	4	unit	4	unit	4	unit	100%	4	unit	4	unit	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	unit	10	unit	4	unit	4	unit	100%	4	unit	4	unit	100%
2	18	0.0.0.0.1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	0	kegiatan	1	unit	1	unit	100%	1	unit	1	unit	100%
2	18	0.0.0.0.1	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%
2	18	0.0.0.0.1	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	680	Pelaku usaha	1	kegiatan	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	680	Pelaku usaha	433	Pelaku usaha	64%
2	18	0.0.0.0.1	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	kegiatan	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%

2	18	0.0.0.0.1	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	100	Persen	1	Hari	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%
2	18	0.0.0.0.1	04	2.01		Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	1000	Pelaku usaha	100	persen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1000	Pelaku usaha	1667	Pelaku usaha	167%
2	18	0.0.0.0.1	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000	Pelaku usaha	2000	lembar	1500	Pelaku usaha	1952	Pelaku usaha	130%	1000	Pelaku usaha	1667	Pelaku usaha	167%
2	18	0.0.0.0.1	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	2000	Kegiatan usaha	1500	Izin usaha	2500	Kegiatan usaha	2500	Kegiatan usaha	100%	2500	Kegiatan usaha	4541	Kegiatan usaha	227%
2	18	0.0.0.0.1	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25	Orang	100	persen	30	Orang	29	Orang	97%	30	Orang	11	Orang	44%
2	18	0.0.0.0.1	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporkan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%

2	18	0.0.0.0.1	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	100	Pelaku usaha	100	persen	100	Pelaku usaha	100	pesen	100 %	100	Pelaku usaha	110	Pelaku usaha	110%
2	18	0.0.0.0.1	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	195	Pelaku usaha	7	kegiatan	210	Pelaku usaha	240	Pelaku usaha	114 %	195	Pelaku usaha	236	Pelaku usaha	121%
2	18	0.0.0.0.1	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	0	Kegiatan usaha	4	Kegiatan	13	Kegiatan usaha	30	Kegiatan	231 %	12	Kegiatan usaha	24	Kegiatan usaha	#DIV/0!
2	18	0.0.0.0.1	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100 %	100	Persen	100	Persen	100%
2	18	0.0.0.0.1	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Periinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100 %	8	Dokumen	8	Dokumen	100%

2	18	0.0.0.0.1	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8	dokumen	1	dokumen	8	dokumen	1	dokumen	13%	8	dokumen	8	dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang dicerminkan dalam Capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut

Tabel 2.2 T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas penanaman modal dan PTSP

Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)			84,86	84,86	92,86	88,86	70,5	90,85	91,85	91,85	
		Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)			140.706.869.439	143.521.006.828	140.706.869.439	188.071.397.742	115.380.536.100	200.000.000.000	220.000.000.000	242.000.000.000	

Dalam menganalisis kinerja SKPD yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima meliputi :

1. Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dan tujuan, misi dan visi.

   Mulai dari penetapan Visi, Misi, Sasaran, Program sampai dengan kegiatan harus memiliki keterkaitan hubungan turunan, oleh karena itu antara turunan dengan yang menurunkan harus mempunyai hubungan yang logis sehingga semua komponen dapat diukur. Kegiatan tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima merupakan bagian dari program kerja dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2019 sampai tahun 2023, dan dilanjutkan lagi renstra tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Oleh karena demikian pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara bertahap sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dalam hal ini memiliki hubungan yang sangat logis.

2. Keterkaitan antara Pencapaian Kinerja dengan Pencapaian Sasaran

   Berdasarkan uraian – uraian sebelumnya dari 6 Program dan 10 kegiatan tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik dengan capaian realisasi keuangan sebesar 95,83 % dan realisasi kinerja rata-rata mencapai diatas 100% hanya sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu tidak tercapi target hanya sebesar 36 %.

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang berhasil didentifikasi pada setiap urusan pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada periode RPJMD tahun 2013-2018. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ini untuk memastikan bekerjanya perangkat daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat .

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam upaya menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
12	**Penanaman Modal**			
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan

Berdasarkan tabel 2.3. permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP berdasarkan RPJMD 2013 – 2018, tetapi pada akhir tahun 2018 untuk jumlah investor berskla nasional (PMDN/PMA) dan Jumlah nilai invetasi berskala nasional (PMDN/PMA) dapat meningkat melalui iklim investasi dan perijinan karena adanya peraturan kemudahan dalam berusaha yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan berusaha terintegritas dengan elektronik melalui Online Single Submission (OSS). Diharapkan berjalan dengan baik pada tahun berikutnya.

2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan terjadi perbedaan karna tahun 2024 akan mendirikan Mal Pelayanan Publik sehingga ada penambahan anggaran dari Rancangan awal, Mal Pelayanan Publik ini akan dijadikan program unggulan atau program prioritas DPMPTSP Kota Bima.

Untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik, pemerintah melalui Perpres 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP). Mal Pelayanan Publik (MPP) ini akan menggunakan system pelayanan publik yang terintegrasi, cepat, mudah, dan akuntabel.

Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan semangat inovasi dalam mendekatkan dan memperrmudah pelayanan publik kepada masyarakat, berusaha mengembangkan

pola pelayanan publik terintegrasi yang lebih progresif dalam memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam satu gedung dengan mengambil langkah pembaharuan berupa pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP). Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan suatu langkah strategis pemerintah sebagai bentuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Kota Bima. Mal Pelayanan Publik (MPP) mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan publik yang kewenangan pelayanannya pada pemerintah pusat, daerah serta BUMN/BUMD dan swasta yang diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kemudahan berusaha.

Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bima diharapkan mampu menjawab permasalahan keterbatasan pelayanan publik yang masih melakukan pelayanan dengan PTSP, dimana model pelayanan masih terbagi antara PTSP dengan OPD penerbitan perizinan disebabkan oleh jarak dan tekhnologi yang digunakan. Sebagai gambarannya, Kota Bima saat ini terdapat 125 pelayanan perizinan masih tercerai berai yang masih dilakukan di masing-masing OPD sedangkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) hanya memiliki 8 jenis pelayanan dan mengelola 21 sektor jenis pelayanan dari 16 OPD sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses pelayanan yang cepat, tepat dan efisien.

Tantangan kedepan yang akan dihadapi dalam pelayanan publik yang ada di pulau Sumbawa umumnya dan khususnya Kota Bima adalah dan event internasional MXGP serta regional lainnya sangat membutuhkan pemikiran serius tentang model pelayanan yang memberikan kenyamanan.

Selain itu juga hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia tahun 2022 tentang penilaian kepatuhan pelayanan publik menempatkan Kota Bima di di zona hijau (81,11), namun posisi ini melorot dari peringkat 3 nasional tahun 2021. Hasil penilaian kepatuhan ini merupakan barometer penataan perbaikan pelayanan publik.

Pemerintah Kota Bima terus berbenah meningkatkan daya saing dalam memberikan pelayanan publik baik tingkat regional maupun nasional, terutama para investor yang akan membangun infrastruktur pendukung seperti perhotelan, sistem transportasi dan lainnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 T-C.31 tentang Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bima tahun 2024 (dalam permendagri 86 tahun 2017)

TABEL.2.4 (T-C.31)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

DPMPTSP Kota Bima

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA BIMA

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.003.976.942,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.518.409.063,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bima	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.307.828.842,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bima	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.065.891.883,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	10 Dokumen	96.865.800,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	96.865.800,00	

			Daerah								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	16.802.100,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	16.802.100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	9.161.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	9.161.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	9.966.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	9.966.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.121.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.121.700,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.168.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.168.300,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	11.170.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	11.170.500,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	42.475.700,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	42.475.700,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	Laporan	2.796.920.942,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	Laporan	3.144.980.293,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/ bulan	2.674.318.042,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	3.022.377.393,00	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	108.216.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	108.216.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	8.530.700,00	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	8.530.700,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	5.856.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 laporan	5.856.200,00	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	100%	208.597.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	100%	199.854.300,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.164.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.164.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	26.992.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.714.400,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18.109.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.643.900,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	161.332.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	161.332.000,00	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	12 jenis	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	12 jenis	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	100%	145.825.100,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	100%	578.371.490,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	104.973.300,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	130.476.100,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	40.851.800,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	447.895.390,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	100%	59.620.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	100%	45.820.000,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	52.800.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	39.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	6.820.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	6.820.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	100%	35.023.200,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	100%	35.023.200,00	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	1 dokumen	35.023.200,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	1 dokumen	35.023.200,00	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman	1 dokumen	35.023.200,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 dokumen	35.023.200,00	

	Kabupaten/Kota		Modal Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	100%	160.183.500,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	100%	927.520.580,00	
	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	1000 Pelaku Usaha	160.183.500,00	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	1000 Pelaku Usaha	927.520.580,00	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	115.681.000,00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	893.637.480,00	Pemutahiran sesuai Kemendagri No. 900.1.15.5-1317 tahun 2023 perubahan

											atas kemendagri No.050-5889 tahun 2021
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bima	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku usaha	30.296.500,00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bima	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	19.677.100,00	Pemutahiran sesuai Kemendagri No. 900.1.15.5-1317 tahun 2023 perubahan atas kemendagri No.050-5889 tahun 2021

	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2000 kegiatan usaha	14.206.000,00	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2500 kegiatan usaha	14.206.000,00	Pemutahiran sesuai Kemendagri No. 900.1.15.5-1317 tahun 2023 perubahan atas kemendagri No.050-5889 tahun 2021
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	100%	459.100.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	100%	459.100.000,00	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	1 Dokumen	459.100.000,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	1 Dokumen	459.100.000,00	

	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usahadari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	195 Kegiatan Usaha	459.100.000,00	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usahadari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	195 Kegiatan Usaha	459.100.000,00	Pemutahiran sesuai Kemendagri No. 900.1.15.5-1317 tahun 2023 perubahan atas kemendagri No.050-5889 tahun 2021
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100%	41.841.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100%	30.873.400,00	

	Pengelolaan Data dan Informasi Periinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 dokumen	41.841.400,00	Pengelolaan Data dan Informasi Periinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	30.873.400,00	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	41.841.400,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 dokumen	30.873.400,00	
	Penyusunan Dokumen Realisasi Investasi	Kota Bima	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi	4 dokumen	12.021.500,00	Penyusunan Dokumen Realisasi Investasi	Kota Bima	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi	4 dokumen	-	
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Bima	Jumlah Dokumen Dokumen IKM	4 dokumen	29.819.900,00	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Bima	Jumlah Dokumen Dokumen IKM	4 dokumen	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, pokok-pokok pikiran DPRD maupun stake holder lainnya belum ada karena Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2023 belum dilaksanakan.

Tabel. 2.5 T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024
DPMPTSP Kota Bima

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan-kebijakan Nasional maupun Propinsi serta Program Prioritas tidak dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima karena pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh SKPD-SKPD teknis terkait kebijakan tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan program dan kegiatan secara optimal. Oleh karena itu setiap Satuan Kerja harus merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Bima secara komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan di bawah ini.

3.2.1. Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis tahun 2018-2023 adalah :

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah Kota Bima sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan.
3. Menjamin komitmen terhadap kesempatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan kedalam dokumen Renstra hingga penjabarannya.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

a. Mengetahui Kondisi Umum Pembangunan Bidang Perijinan dan rencana pembangunan menuju tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima serta visi dan misi Pemerintah Kota Bima.
b. Merencanakan Program dan Kegiatan Perubahan Renstra Tahun 2018 sampai Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan (SP) sehingga dapat menciptakan optimalisasi pelayanan perijinan

c. Sebagai bahan Evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam LKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima setiap tahunnya.

3.2.2. Sasaran

Sasaran strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Perangkat Daerah mengidentifikasi faktor internal dan faktor ekternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (strength), kelemahan (weakness) dan faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Identifikasi faktor internal yaitu :

- ***Kekuatan (Strength) :***
  a. Kewenangan fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku usaha bidang penanaman modal
  b. Kelengkapan sarana dan prasarana
  c. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani perijinan dan non perijinan
  d. Peta Potensi investasi
  e. Kewenangan perijinan terpadu melalui PTSP
- ***Kelemahan (Weakness) :***
  a. Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal
  c. Belum tersedianya potensi area logistik sebagai destinasi investasi

Identifikasi faktor eksternal yaitu :

- ***Peluang (Opportunities)***
  a. Penerapan SPIPISE dan OSS
  d. Eksistensi instansi diluar pemerintah kota untuk mendukung pelayanan perijinan dan pengawasan
  e. Pengembangan industri kerajinan tangan berbasis produk sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi lokal.
- ***Ancaman (Threats)***
  a. Adanya pengaduan masalah perijinan
  b. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan perijinan online
  d. Ketidaksesuaian kepemilikan perijinan
  e. Lemahnya daya saing industri kerajinan tangan berbasis produk kewenangan perijinan terpadu melalui PTSP.

Pada sub bagian ini berisi Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra PD. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran PD dengan format tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Prioritas dan Sasaran
DPMPTSP Kota Bima

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Efektifitas pelayanan penanaman modal	Rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu	Jumlah Dokumen Izin Usaha dan Non Usaha yang telah diterbitkan
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Realisasi Investasi	% Peningkatan capaian realisasi investasi	terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Investasi
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kerjasama investasi	Porsentase peningkatan kerjasama investasi	Terlaksananya Penyusunan Strategi promosi Penanaman Modal	jumlah dokumen startegi promosi
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin	% peningkatan perusahaan yang memenuhi ketentuan yang berlaku	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Dokumen LKPM

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD dengan tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran PD
DPMPTSP Kota Bima

No	Tujuan dan Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran
1	2	3	4
	Tujuan :	Indikator Tujuan :	
1	Meningkatnya pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi	10%
	Sasaran :	Indikator Sasaran :	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	92,86
		2. Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	10% Rp. 200.000.000.000

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah deperti disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Indikator Kinerja Utama PD
DPMPTSP Kota Bima

No	IKU	Indikator IKU	Targrt Kinerja IKU
1	2	3	4
1	Persentase Pertumbuhan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	'92,86
		Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	10% Rp. 200.000.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima yaitu meningkatkan realisasi penanaman modal dalam mewujudkan masyarakat Kota Bima yang semakin sejahtera dan meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah, telah ditetapkan sasaran melalui pencapaian indeks kepuasan masyarakat dan peningkatan realisasi penanaman modal.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman modal

   Kegiatan diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui Penyelesaian Perizinan Sesuai Standar Pelayanan diantaranya dengan pengembangan Gerai Pelayanan Perizinan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan sebesar 92%.
2. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

   Kegiatan diarahkan pada penanganan pengaduan serta peningkatan prasarana sarana layanan., melalui penyelesaian pengaduan masyarakatdan analisis Survai Kepuasan Masyarakat (SKM). Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat sebesar 100% dan Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan sebesar 90%.
3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

   Kegiatan diarahkan pada kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal diantaranya melalui Kemitraan Antar Pelaku Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM, serta Pameran Investasi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Rasio Jumlah Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Izin Operasional terhadap jumlah Kepeminatan Penanaman Modal sebesar 21% dan Rasio Jumlah Realisasi Kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM terhadap jumlah Kepeminatan Kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM sebesar 23%.
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

   Kegiatan diarahkan pada pengawasan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi, antar lain melalui Pemantauan Perusahaan, dan Penyelesaian Penanaman Modal. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Realisasi Proyek Penanaman Modal di Kota Bima sebesar 15%. Guna tercapainya target indikator tersebut, terlampir Rencana Kerja Program dan Kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif tahun 2023 serta

   Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya:
   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
   b. Prioritas pembangunan
   c. Pencapaian SDGs;
   d. Pengurangan kemiskinan;
   e. Pengurangan ketimpangan pendapatan dan wilayah
   f. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM);
   g. Pencapaian IKU
   h. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
   i. Pengembangan wilayah miskin;
   j. Dan sebagainya, dapat ditambahkan sesuai kondisi masing-masing.

Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel dengan format sebagai berikut :

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan

NO	Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP	PROGRAM/KEGIATAN
(1)		(2)
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
		DINAS PENANAMAN MODAL
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
a.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Jumlah dokumen RKA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Jumlah dokumen RKA-P	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Jumlah dokumen DPA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5	Jumlah dokumen DPA-P	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Jumlah dokumen LKIP, LPPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	Administrasi Keuangan

1	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD
3	Jumlah laporan keuangan semesteran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
4	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	Administrasi Umum
1	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
d.	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	Jumlah Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e.	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
f.	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Jumlah kendaraan dinas yang layak	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang yang terpelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3	Cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Porsentase peningkatan nilai investasi	B. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
g.	Jumlah Peta potensi Investasi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
1	Jumlah Peta potensi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
	Rata-rata Lama proses penyelesaian pelayanan perizinan	C. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
h.	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2	Jumlah persetujuan pemenuhan komitmen ijin usaha yang diterbitkan	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
3	porsentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
4	Jumlah Survey IKM	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
	Jumlah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi tentang pelayanan perizinan	D. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
i.	Porsentase usaha berizin dengan volume usaha meningkat	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota
1	Peningkatan Penyampaian LKPM Dalam Jaringan (Daring)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Peningkatan Penyampaian LKPM Dalam Jaringan (Daring)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
3	Peningkatan Realisasi Investasi melalui OSS dan LKPM	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
	Jumlah Dokumen hasil BAP Pengawasan	E. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
j.	Porsentase realisasi investasi yang diterbitkan tiap tahunnya	Pengelolaan Data dan Informasi Periinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota
1	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
3) Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
4) Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; Pada bagian ini dipaparkan juga rekapitulasi program dan kegiatan dikelompokkan berdasarkan 6 (enam) prioritas pembangunan yakni :

1. Pendidikan dan kesehatan
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Ekonomi dan Pariwisata
4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
5. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
7. disajikan dalam table sebagai berikut :

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL. 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025

dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Kota Bima

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA BIMA

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.088.022.354,26				4.210.663.024,89
2	18	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	100%	3.407.063.707,26	DAU		100%	3.509.275.618,48
2	18	001	02.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	10 Dokumen	99.771.774,00	DAU		100%	102.764.927,22
2	18	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	2 dokumen	17.306.163,00	DAU		2 dokumen	17.825.347,89
2	18	001	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	1 dokumen	9.435.830,00	DAU		1 dokumen	9.718.904,90

2	18	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	1 dokumen	10.265.495,00	DAU		1 dokumen	10.573.459,85
2	18	001	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	1 dokumen	4.245.351,00	DAU		1 dokumen	4.372.711,53
2	18	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	1 dokumen	3.263.349,00	DAU		1 dokumen	3.361.249,47
2	18	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	2 laporan	11.505.615,00	DAU		2 laporan	11.850.783,45
2	18	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	2 laporan	43.749.971,00	DAU		2 laporan	45.062.470,13
2	18	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	Kota Bima	Laporan	2.880.828.570,26	DAU		100%	2.967.253.427,37
2	18	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	30 orang/bulan	2.754.547.583,26	DAU		35 orang/bulan	2.837.184.010,76
2	18	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	12 dokumen	111.462.480,00	DAU		12 dokumen	114.806.354,40

2	18	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	1 laporan	8.786.621,00	DAU		1 laporan	9.050.219,63
2	18	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	2 laporan	6.031.886,00	DAU		2 laporan	6.212.842,58
2	18	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	Kota Bima	100%	214.854.910,00	DAU		100%	221.300.557,30
2	18	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	2 Paket	2.228.920,00	DAU		2 Paket	2.295.787,60
2	18	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	12 Paket	27.801.760,00	DAU		12 Paket	28.635.812,80
2	18	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bima	12 Paket	18.652.270,00	DAU		12 Paket	19.211.838,10
2	18	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	25 laporan	166.171.960,00	DAU		25 laporan	171.157.118,80
2	18	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Kota Bima	12 jenis	-	DAU		100%	-
2	18	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bima	3 unit	-	DAU		3 unit	0,00
2	18	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	Kota Bima	100%	150.199.853,00	DAU		100%	154.705.848,59
2	18	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	12 laporan	108.122.499,00	DAU		12 laporan	111.366.173,97

2	18	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bima	12 laporan	42.077.354,00	DAU		12 laporan	43.339.674,62
2	18	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	Kota Bima	100%	61.408.600,00	DAU		100%	63.250.858,00
2	18	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bima	4 unit	54.384.000,00	DAU		4 unit	56.015.520,00
2	18	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bima	4 unit	7.024.600,00	DAU		4 unit	7.235.338,00
2	18	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bima	1 unit	-	DAU		1 unit	0,00
2	18	002			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Kota Bima	100%	-	DAU		100%	0,00
2	18	002	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Bima	1 dokumen	-	DAU		1 dokumen	0,00
2	18	002	2.02	002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Bima	1 dokumen	-	DAU		1 dokumen	0,00
2	18	003			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Kota Bima	100%	36.073.896,00	DAU		1 dokumen	37.156.112,88
2	18	003	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Kota Bima	1 dokumen	36.073.896,00	DAU		1 dokumen	37.156.112,88
2	18	003	2.01	002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Bima	1 dokumen	36.073.896,00	DAU		1 dokumen	37.156.112,88
2	18	004			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Kota Bima	100%	164.989.005,00	DAU		100%	169.938.675,15

2	18	004	2.01		Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Kota Bima	1000 Pelaku Usaha	164.989.005,00	DAU		Dokumen	169.938.675,15
2	18	004	2.01	006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	1000 Pelaku Usaha	119.151.430,00	DAU		1500 pelaku usaha	122.725.972,90
2	18	004	2.01	007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	25 Pelaku usaha	31.205.395,00	DAU		30 orang	32.141.556,85
2	18	004	2.01	008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kota Bima	2000 kegiatan usaha	14.632.180,00	DAU		1000 kegiatan usaha	15.071.145,40
2	18	005			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	Kota Bima	100%	472.873.000,00	DAK		100%	487.059.190,00
2	18	005	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	Kota Bima	1 Dokumen	472.873.000,00	DAK		Dokumen	487.059.190,00

2	18	005	2.01	006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kota Bima	195 Kegiatan Usaha	472.873.000,00	DAK		195 Kegiatan Usaha	487.059.190,00
2	18	006			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Bima	100%	43.096.642,00	DAU		100%	44.389.541,26
2	18	006	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Periinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Bima	1 dokumen	43.096.642,00	DAU		1 dokumen	44.389.541,26
2	18	006	2.01	001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Bima	1 dokumen	43.096.642,00	DAU		1 dokumen	44.389.541,26
					Penyusunan Dokumen Realisasi Investasi	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi	Kota Bima	4 dokumen	12.382.145,00	DAU		1 dokumen	12.753.609,35
					Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Dokumen IKM	Kota Bima	4 dokumen	30.714.497,00	DAU		1 dokumen	31.635.931,91

BAB. V
P E N U T U P

Sebagai uraian terakhir pada bab penutup Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2024 ini, disampaikan dengan kaidah pelaksanaan rencana Kerja dengan rincian penjelasan sebaga berikut :

1. Sesuai Kententuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima ini, selanjutnya akan dijadikan bahan penyempurnaan Rencana Daerah Pemerintah daerah Kota bima (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penamana Modal dan PTSP Kota Bima.
2. Dengan ditetapkannya Renja DPMPTSP Kota Bima ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkup DPMPTSP Kota bima terikat untuk menjadikannya acuan dan arahan operasionalisasi dalm pelaksanaan Program dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).
3. Renja Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota bima tahun 2024 ini, akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada tahun yang sama.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima tahun 2024 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kegiatan dan program pembangunandab dapat dihindari adanya kegiatan dan program yang keluar dari kesepakatan Renja ini.

Kota Bima, Februari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kota Bima,

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. LALU SUKARSANA, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660704 198608 1 003

LAPORAN
RENCANA KERJA 2025
(RENJA)



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BIMA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Rencana Kerja Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun Anggaran 2025 ini memuat hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Sebulumnya dan Rencana Kinerja Tahun 2025.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan Rencana Kerja iPemerintah Tahun Anggaran 2025 ini dapat disusun dengan baik.

Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dimasa mendatang.

Raba – Bima, Juni 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bima,

Syarief Rustaman, S.Sos., M.AP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB. I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 3

1.3. Maksud danTujuan 6

1.4. Sisteatika 6

BAB. II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangka Daerah dan Capaian Renstra Restra Perangkat Daerah 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Prangkat Daerah 19

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggara Tugas dan Fungsi PD 20

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 36

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 36

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 40

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 44

4.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 …… 44

4.2 Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD 46

4.3 Rencana Progran Kerja dan Kegiatan Tahun 2025..... 49

BAB. VI. PENUTUP ……..…….. 62

BAB I
PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada, dan hal tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengatur lingkup dan tingkatan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD), hal ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap Kepala SKPD harus menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman atau arahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran Renstra OPD dan Memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan beberapa tahun ke depan. Benang merah Rencana Kerja OPD sebagai tindaklanjuti Rencana Startegis OPD adalah bagaimana mendorong pembangunan kota Bima dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Saat ini, wilayah operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam penanganan sampah mencapai 35 Kelurahan dari 41 kelurahan yang ada di kota Bima. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah keterbatasan jumlah armada operasional. Belum lagi umur armada operasional tersebut sebagian sudah lebih dari 15 tahun. Sementara itu, lokasi taman yang ada di Kota Bima saat ini meliputi 53 lokasi. Akan tetapi, dengan total luasan keseluruhan taman 271 hektar untuk wilayah kota Bima, tentu saja ruang terbuka hijau yang berupa taman kota masih perlu ditambah lagi jumlahnya guna mendukung estetika kota. Untuk pemakaman rakyat yang terkelola /

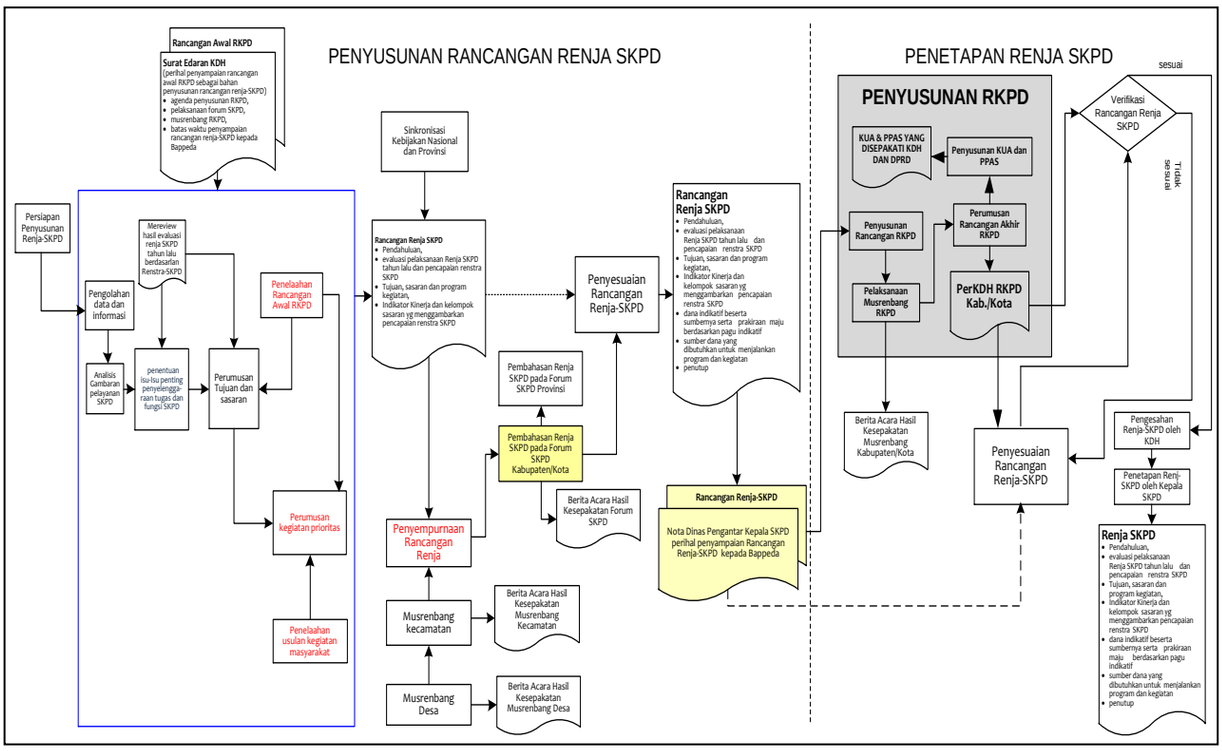
telah ditata sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai 55,68 hektar atau 89 lokasi pemakaman rakyat yang ada di kota Bima.

Rencana Kerja (Renja) ini berisi berbagai program dan kegiatan pembangunan baik kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin (belanja tidak langsung) maupun kegiatan-kegiatan pembangunan (belanja langsung).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH Kota Bima ini semuanya bermuara pada upaya peningkatan pelayanan baik pelayanan intern dalam rangka pengembangan organisasi maupun pelayanan kepada seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yakni ***"Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup"***

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah ini:

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2025 mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan seperti sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2007 tetang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 103);
22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019;

23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
24. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257).
25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 233);
26. Peraturan Walikota Bima nomor 6 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima tahun anggaran 2024 (Berita Daerah Kota BIma Tahun 2023 nomor 631).
27. Peraturan Walikota Bima Nomor 20 tahun 2023 tentang Penepatan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program serta kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang diharapkan dalam kurun waktu 1 tahun (jangka pendek) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunan Rencana Kerja OPD (RENJA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima Tahun 2025 dimaksudkan untuk :

a. Menjabarkan Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima Tahun 2024-2026
b. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2025
c. Sebagai sarana dalam menampung aspirasi masing-masing bidang untuk penyusunan program dan kegiatan Tahunan DLH Kota Bima.
d. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Bima.

Penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2025 bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Kegiatan SKPD Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan sasaran dan program pembangunan kota Bima yang akan

dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan.

Dokumen RKPD Kota Bima Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Memuat Evaluasi pelaksanaan renja dan capaianya, pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2023, Analisis kinerja pelayanan daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Reviu terhadap rancangan awal RKPD, serta Usulan progran dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran perangkat Daerah dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Perkiraan Maju

BAB V PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah Kota Bima tahun 2024 yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2025 yang telah di sepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

- Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah ditandatagani yang diukur mulai dari Capaian Kinerja Tujuan, Capaian Kinerja Sasaran, Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja kegiatan.
- Untuk mewujudkan Tujuan yang ingin dicapai, Dinas Lingkungan hidup telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis, dengan dukungan capaian progran dan kegiatan anatara lain:

1. **Capaian Strategis I dan 2, yaitu meningkatnya Indeks Kualitas Air dan Udara**

   Terwujudnya capaian kinerja sasaran strategis Peningkatan Indeks Kualitas Air.

   Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pada Sasaran strategis ini Ada 8 (delapan) Kegaiatan yang dilakukan untuk mewujutkan Capaian Kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup, yaitu:

   1. Kegiatan Peningkatan koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

      Ada 2 (dua) lokasi yaitu Pantai Ama Hami Lawata dan Sungai Padolo.

Kegiatan Bersih Pantai dasn Sungai telah mengeluarkan timbulan sampah pada 2 (dua) lokasi tersebut sebanyak 600 m3

2. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

   Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,
3. Kegiatan koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura.
4. Kegiatan Pencegahan, Pemulihan dan pengenalian;
5. *Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan*

   Untuk meningkatkan pelayanan persampahan se-Kota Bima, sangat diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Untuk dimaklumi bahwa jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam keadaan baik sebanyak 30 unit, sedangkan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 42 unit.
6. *Pemeliharaan kendaraan operasional pengangkutan sampah*

   Untuk meningkatkan pelayanan persampahan se-Kota Bima, sangat diperlukan kendaraan operasional dalam keadaan baik, untuk itu perlu dilakukan upaya pemeliharaan secara terus menerus sehingga kendaraan operasional tersebut tetap dapat melaksanakan pengangkutan sampah sesuai dengan SOP yang ditetapkan.
7. *Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan*
8. Dalam meningkatkan layanan persampahan selain melaui peningkatan sarana dan prasara persampahan diperlukan pula adanya peran serta dan partisipasi masayarakat melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dan bank sampah. Upaya peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup memiliki yaitu pelatihan dan Pokmas serta Bank sampah
9. Kegiatan Peningkatan penilaian Kota Sehat/Adipura, merupakan kegiatan pelaksanaan lintas sektoral sesuai dengan sasaran dan indikator Adipura, sehingga memerlukan koordinasi antar sektor, antar OPD. Selain itu, dibutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan Sekolah, untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata.
10. Kegiatan Koordinasi pelaksanaan

2. Capaian Strategis III, yaitu meningkatnya Persentase Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dalam rangka mendukkung Pencapaian sasaran strategis III ada berapa kegiatan yang di lakukan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dalam pengeloaan ruang terbuka hijau fokus pada lahan RTH 264 Ha, terdiri dari Taman Kota, area Pemakamnan, dan Hutan Kota, serta kawasan Terbuka Hijau Publik Lainnya.

- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan. Pada tahun 2020 ada 44 Taman yang tertata, sedangkan target yang ditetapkan adalah 49 taman, sehingga Capaian kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan.
- Pengelolaan Area Pertamanan

  Pengelolaan Areal Pemakaman diukur berdasarkan indikator KinerjaPeningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dan Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

  pada tahun 2022 ada 2023 makam yang di yang tertata (pembangunan pagar kuburan), sedangkan target yang ditetapkan adalah 25 makam

3. **Capaian Strategis IV Meningkatnya tutupan Lahan**

Untuk mengetahui Capaian Sasaran Strategis ***Meningkatnya tutupan lahan***, diukur berdasarkan porsentase perbandingan antara Kawasan SDA yang di rehabilitasi dengan Kawasan SDA yang rusak/kritis.

Ada 3 (Tiga) Kawasan SDA yang mempengaruhi Kualitas SDA dan LH, yaitu Kawasan Mata Air, Kawasan Mangrove dan Kawasan Terumbu Karang

Terwujudnya capaian kinerja sasaran, sangat ditentukan oleh keberhasilan capaian Kinerja Program. Terdapat 3 (tiga) Program yang mendukung keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Strategis " **Meningkatnya Rehabilitasi Lahan, yaitu;**

a. kegiatan Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Air

Untuk mengetahui Capaian Kinerja Program Konservasi Sumber daya air, diukur berdasarkan Prosentase Jumlah mata Air yang terlindungi. Adapun jumlah mata air yang ada di Kota Bima sampai saat ini adalah 29 titik, dengan luas kawasan 160 Ha, 30% dari Luas kawasan tersebut dalam keadaan kritis, atau seluas 48 Ha.

b. Program Rehabilitas Lahan kritis

Adapun Kegaiatan yang dilaksanakankan untuk mewujutkan Capaian Kinerja Rehabilitasi lahan adalah Kegiatan penanaman pada lahan kritis dan pemberian bibit lahan yang di miliki masyarakat..

Lebih detail dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Bima

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	**11**	**01**	**2.01**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	99,80%	100%	99,90%	99,9%	100%	298%	75%
2	**11**	**01**	**2.02**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	98%	98%	98%	98%	98%	98%	280%	74%
2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Pelayanan Adionistrasi umum	99%	99%	99%	99%	99%	99%	275%	73%
2	11	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusa Pemerintah Daerah		98%	98%	98%	98%	98%	98%	280%	75%
2	11	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang milik daerah	90%	90%	90%	90%	90%	90%	270%	67,5%

2	**11**	**02**		**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persetase menurunya pelanggaran terhadap RPPLH	100%	**40%**	**35%**	**45%**	35%	**45%**	37%	37%
2	**11**	**02**	**2.01**	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Laporan tersedia	76%	765	76%	76%	76%	76%	76%	60%
2	11	02	2.02	Penyelengaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Laporan tersedia	100%	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	300%	70%
2	**11**	**03**		**PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	% meningkatnya kualitas air dan Udara	85%	76,97%	78 %	78,98%	101,25%	80%	235,95%	58,99%
2	11	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Perse%ntase pencegahan dan kerusakan Lingkungan	40%	40%	40%	40%	40%	40%	120%	30%
2	11	03	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan pencemaran	50%	50%	50%	50%	50%	50%	150	40%
2	11	03	2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan kerusakan lingkungan hidup	55%	55%	55%	55%	55%	55%	165%	45%
2	**11**	**04**		**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHAYATI)**	**PERSENTASE TAMANKOTA YANG TERTANGANI**	100%	70,97%	79,03%	79,03%	100%	87,19%	229,13%	57,28%
2	11	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH dikelo	75%	75%	75%	76%	75%	780%	240%	60%
2	11	06		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN**	Persentase Peningkatan Jumlah Izin Lingkungan yang	50%	40%	55%	46%	50%	46%	135%	33,75
2	11	06	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Izin Lingkungan yang diawasi	- 50%	- 40%	- 55%	- 46%	- 50%	- 46%	- 135%	- 33,75

2	**11**	**08**		**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Meningkatnya Jumlah Ormas Sadar Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%
2	11	08	2.01	Penyelengaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Lingkungan Hidup	3	3	3	3	3	3	9	2,5
2	11	09		**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT**	Persentase meningkatnya penghargaan Bidang Lingkungan Hidupn	100%	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	- 300%	- 75%
2	11	09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kategori penghargaan dalam kegiatan lingkungan hidu	3	3	3	3	3	3	9	2,5
2	11	10		**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Menurunya Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	60%	35%	60%	35%	60%	30%	100%	25%
2	11	11		**Program PENGELOLAAN SAMPAH**	- **Persentase Sampa yang tertangani** - **Persentase Pengurangan sampah**	- 72%	- 70% - 5%	- 72% - - 15%	- 64,5% - 6,9%	- 72,03% - 46%	- 65% - 15%	- 70,5% - 26,9%	- 74% - 6,73%
2	**11**	**11**	**2.01**	Pengelolaan Sampah	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan berfungsi	50 Dump truck, 12 Ambroll dan 10 Pick Up	24 Dump truck, 5 Ambroll dan 2 Pick	30 Dump truck, 9 Ambroll dan 3 Pick	23 Dump truck, 5 Ambroll dan 2 Pick	95,83%	39 Dump truck, 10 Ambroll dan 4 Pick Up	86 Dump truck, 20 Ambroll dan 8 Pick	21,5 Dump truck, 2,5 Ambroll dan 2 Pick up

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2020 masih diperoleh dasar hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh nomenkaltur Dinas Lingkungan Hidup dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup. Dalam bab ini dibahas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja DLH.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangaan strategi organisasi ke masa akan datang. Dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat *performance* masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.untuk mengetahui capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dapat dilihat sebagai berikut:

Berdasarkan tabel dibawah ini, dapat dilihat bahwa terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran DLH yang mendukung indikator kinerja utama yaitu indeks kualitas air, dan udara dengan tingkat pencemaran sedang, persentase luas RTH publik dan persentase kawasan direhabilitasi. Pencapaian 4 (empat) indikator sasaran pada tahun 2023, hanya satu indikator sasaran yang menunjukkan hasil yang memenuhi target yaitu indeks kualitas udara dengan capaian kinerja 81,36 dengan target 80 sementara 3 (tiga) indikator sasaran tidak mencapai target, yaitu indikator sasaran indeks kualitas air, persentase luas RTH Publik dan persentase luas Kawasan direhabilitasi. Kurang terpenuhinya Pencapaian target ini dipengaruhi oleh minimnya anggaran rehabilitasi yang di targetkan 24,69 Ha, hanya tersedia anggaran 8 Ha, disamping itu kecilnya tingkat keberhasilan pada kegiatan penanaman pada daerah sekitar mata air yang kurang maksimal, hal ini terjadi banyaknya lahan di sekitar mata air mengalami kerusakan akibat pembakaran lahan, disamping itu juga kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hutan sangat minim.

2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bima

No	Indikator Sasaran	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023)	Tahun 2024	
1	Indeks Kualitas Air			4	50	50	50	24,50	28.75	30,75	31,75	
2	Indeks Kualitas Udara			80	82	85	82	86	87	85	88,33	
3	% Luas RTH Publik			11,01	11,01	11,34	11,64	11,21	11,23	11,50	11,66	
4	% Luas Kawasan direhablitasi			2	2,2	2,5	2,5	0,64	0,64	2,2	2	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dan efektif dalam mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan/kegiatan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan Identifikasi baik internal maupun ekternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi adapun isu-isu penting dalam penyelenggara tugas dan fungsi, antara lain:

A. permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya UPT Laboratorium menyebabkan operasional laboratorium tidak dapat maksimal;
2. Tidak adanya peralatan dan personil analis laboratorium sehingga menghambat operasional laboratorium;
3. Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal;
4. Masih minimnya peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pengendalian;
5. Belum adanya peta inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar untuk mengetahui potensi sumber pencemar;
6. Minimnya Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.
7. Alih fungsi lahan terbuka (open space) menjadi lahan terbangun
9. Kemerosotan keanekaragaman hayati akibat eksploitasi dan pemanfaatan secara berlebihan;
10. Dampak penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim yang berpotensi menyebabkan bencana lingkungan;
11. Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan, pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan;
12. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah masih relatif rendah;
13. Rendahnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

B. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Developmnet Goals*

C. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;

Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam meningkatkan pelayanan

- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengujian kualitas lingkungan hidup.
- Belum tersedianya laboratorium lingkungan hidup
- Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang berkualitas ramah masih rendah
- Masih kurangnya sosialisasi PERDA Lingkungan Hidup
- Kewenangan Pemerintah Kab/Kota dalam penanganan Hutan beralih pada provinsi
- Lemahnya koordinasi antar pemerintah provinsi dengan Kab/Kota dan antar sektor dalam penganan Hutan
- Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.
- Perubahan fungsi ekosistem menjadi fungsi yang lain.
- Masih minimnya pemahaman mengelola bank sampah di tingkat masyarakat
- Minimnya anggaran sosialisasi pentingnya Bank sampah dan PERDA persampahan untuk mengurangi limbah dan sampah.

Sedangkan peluang adalah sebagai berikut;

- Besarnya political will dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas dari Pemerintah
- Tingginya etos kerja Pegawai DLH dalam mewujudkan semangat kerja untuk lingkungan berkualitas dan ramah.
- Adanya komitmen bersama masyrakata pasca banjir bahwa mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah mutlak harus dilakukan agar banjir tidak terjadi lagi.

D. Ada isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, yang berkaitan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang paling berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Aktifitas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan manusia telah menurunkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan jumlah limbah yang yang mengakibatkan lingkungan akan tercemar. Kedua hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan ini semakin diperparah dengan terjadinya pemanasan global.

Demikian pula yang terjadi di Kota Bima, cukup banyak aspek yang ikut mempengaruhi kualitas lingkungan baik lokal maupun global, isu-isu penting tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Terjadinya pemanasan global yang berpengaruh terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatnya kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan pengelolaan lingkungan Hidup;
4. Menurunnya potensi sumber daya air (sumber mata air, air tanah dan air permukaan) akibat eksploitasi yang berlebihan dan pencemaran lingkungan;
5. Penanganan air limbah rumah tangga/domestik belum dilakukan secara terpadu dan optimal;
6. Masih rendahnya penerapan 3R dalam pengelolaan sampah rumah tangga;
7. Keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna semakin terancam keberadaannya;
8. Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan, pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan
9. Masih minimnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam melakukan pengelolaan lingkungan;
10. Masih minimnya regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup;
11. Masih rendahnya penegakan hukum lingkungan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Ada beberapa Program dan kegitaan yang anggaranya berubah pada Rancangan awal RKPD awal ke Rancangan akhir RKPD, yaitu antara lain:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dari anggaran sebesar Rp 193.499.600 menadi 246.500.000 pada rancangan RKPD ahir.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ada kenaikan dari RKPD rancangan awal ke Rancangan ahir, kenaikan tersebut berasal dari kenaikan kegiatan pengelolaan Laboratorium.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungn dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari anggaran awal sebesaer Rp 149.750.000 menjadi Rp 883.197.100 pada RKPD Akhir, kenaikan ini di akibatkan pada penganggaran kembali pada kegiatan pelepasan lahan kampus IAIN
4. Program Keanekaragaman Hayati (kehati) turun dari Rancangan RKPD

awal dari 4.212.063.250 menjadi 3.603.865.100 pada Rancangan RKPD ahir. Penurunan ini diakibatkan pada penurunan usalan pokir dewan.

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untik Masyarakat naik dari 110.000.000 Rancangan Awal RKPD menjadi 68.660.200 pada Rancangan Ahir'
6. Program Pengelolaan Persampahan turun dari 5.000.000.000 Rancangan RKPD awala menjadi 4.904.073.386 pada Rancangan RKPD ahir, ini terlihat pada tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Pentin
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	118.260.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	96,125,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Prerencanaan	4 Dokumen	12.592.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra	4 Dokumen	12.592.300	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.110.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,110,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.700.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.240.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.240.000	

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.150.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	36.155.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	36.155.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	29.313.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	29.313.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Orang/Bulan	11.575.615.932	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Bima	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Orang/Bulan	11.575.615.932	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	112 Orang/bulan	11.392.923.280	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	112 Orang/Bulan	11.392.923.280	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	30 Dokumen	161.435.052	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	161.435.052	

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.424.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.424.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	12.833.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan	12.833.600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	310.261.550	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Bima	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	310.261.550	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	jumlah komponen listrik dalam kondisi baik	1 Paket	13.773.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	jumlah komponen listrik dalam kondisi baik	1 Paket	13.773.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Paket	20.250.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Paket	20.250.000	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	jumlah bahan yang dicetak dan	4 Paket	26.011.250	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	jumlah bahan yang dicetak dan	4 Paket	26.011.250	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah SSPD	50 Laporan	250.227.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah SSPD	50 Laporan	250.227.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Laporan	**332.306.599**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			12 Laporan	**332.306.599**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	jumlah surat yang terkirim	1.200 lembar	16.641.599	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	jumlah surat yang terkirim	1.200 lembar	16.641.599	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	jumlah jasa komunikasi,	12 Laporan	51.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	jumlah jasa komunikasi	12 Laporan	51.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	jumlah penyediaan jasa peralatan	1 Laporan	21.680.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	jumlah penyediaan jasa peralatan	1 Laporan	21.680.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima	cakupan pemenuhan ATK	1 Laporan	242.985.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima	cakupan pemenuhan ATK	1 Laporan	242.985.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50 Unit	**244.362.650**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			50 Unit	**244.362.650**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	53 Unit	112.500.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	53 Unit	112.500.900	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	cakupan layanan perpajakan kendaraan	53 Unit	62.540.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	cakupan layanan perpajakan kendaraan	53 Unit	62.540.250	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Pemeliharaan	1 Unit	21.836.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Pemeliharaan	1 Unit	21.836.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	jumlah gedung, kantor yang terpelihara	1 Unit	35.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	jumlah gedung, kantor yang terpelihara	1 Unit	35.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bima	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang	1 Unit	12.485.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bima	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang	1 Unit	12.485.500	

	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Menurunya Pelanggaran	58 Persen	**343.500.000**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		ersentase Menurunya Pelanggaran te	58 Persen	**343.500.000**	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kota Bima	Jumlah Dokumen RPPLH Tata Ruang	1 Dokumen	**143.500.000**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**	Kota Bima	Jumlah KLHS Tata Ruang	1 Dokumen	**143.500.000**	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten	Kota Bima	Jumlah dokumen RPPLH	1 Dokumen	143.500.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten	Kota Bima	Jumlah KLHS RPJMD	1 dokumen	**143.500.000**	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			1 Dokumen	**200.000.000**	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**				**200.000.000**	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kota Bima	Jumlah Dokumen KLHS	1 Dokumen	**100.000.000**	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kota Bima		1 Dokumen	**100.000.000**	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Bima	Jumlah Dokumen KLHS	1 Dokumen	100.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Bima		1 Dokumen	**100.000.000**	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Air dan Udara	30,75/88,33 Persen	419.071.244	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			30,75/88,33 Persen	419.071.244	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Bima	jumlah kordinasi ttitik pencenaran	10 Dokumen	35.174.760	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Bima	jumlah kordinasi ttitik pencenaran	10 Dokumen	35.174.760	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Bima	Jumlah kelurahan Kampung iklim	3 Dokumen	75.541.970	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Bima	Jumlah kelurahan Kampung iklim	3 Dokumen	75.541.970	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Bima	Pengujian sample Yang Dilakukan terhadapa Media	22 Dokumen	80.476.564	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Bima	Pengujian sample Yang Dilakukan terhadapa Media	22 Dokumen	80.476.564	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			50 Persen	**69.467.950**	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**			50 Persen	**69.467.950**	

	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Bima	Jumlah Bentuk Media (sarana) Penyampaian Informasi	5 dokumen	29.491.900	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Bima	Jumlah Bentuk Media (sarana) Penyampaian Informasi	5 Dokumen	29.491.900	
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Bima	sosialisasi	5 Titik	39.976.050	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Bima	sosialisasi	5 Titik	39.976.050	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			40	**158.410.000**	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**			40	**61.410.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kota Bima	Jumlah Pantai yang dibersihkan	2 Dokumen	31.410.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kota Bima	Jumlah Pantai yang dibersihkan	2 Dokumen	31.410.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bima	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan rehabilitasi	3 Kegiatan	30.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bima	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan rehabilitasi	3 Kegiatan	30.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Luas RTH Publik	11,60 persen	1.683.430.400	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		Persentase Luas RTH Publik	11,60 persen	1.671.430.000	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bima	Jumlah Dokemen rencana penetapan pengelolaan kehati	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bima	Jumlah Dokemen rencana penetapan pengelolaan kehati	1 Dokumen	20.000.000	
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kota Bima	Jumlah Taman KEHATI yang dikelola	22,1 Ha	51.430.400	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kota Bima	Jumlah Taman KEHATI yang dikelola	22,1 Ha	51.430.400	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Bima	Luas RTH Publik Yang ditangani	243 Ha	4.600.000.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Bima	Luas RTH Publik Yang ditangani	243 Ha	4.800.000.000	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase Meningkatnya Jumlah Ijin Lingkungan yang diawasi	58 Persen	**251.586.660**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		Persentase Meningkatnya Jumlah Ijin Lingkungan yang diawasi	58 Persen	176.586.660	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Bima	Jumlah Izin Lingkungan yang diterbitkan	150 Dokumen	176.586.660	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Bima	Jumlah Izin Lingkungan yang diterbitkan	150 Dokumen	176.586.660	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Meningkatnya Jumlah Pokmas sadar Lingkungan	100 Persen 70 persen	**214.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		ersentase Meningkatnya Jumlah Pokmas sadar Lingkungan	100 Persen 70 persen	**214.000.000**	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bima	Jumlah Pokmas Peduli Lingkungan	3 Lembaga	176.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bima	Jumlah Pokmas Peduli Lingkungan	3 Lembaga	176.000.000	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Bima	Jumlah Pokmas/lembaga	12 Dokumen	38.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Bima	Jumlah Pokmas/lembaga	12 Dokumen	38.000.000	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase meningkatnya penghargaan bidang lingkungan	80 Persen	**53.265.000**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			80 Persen	**53.265.000**	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bima	Jumlah Pokmas/Lembaga yang dinilai	3 Entitas	53.265.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bima	Jumlah Pokmas/Lembaga yang dinilai	3 Entitas	53.265.000	

	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			65 Persen	**65.000.000**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Kota Bima		65 Persen	**65.000.000**	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	Kota Bima	jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	25 Pengaduan	65.000.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	Kota Bima	jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	25 Pengaduan	65.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase sampah yang tertangani	70 Persen 72 Persen	**4.874.603.542**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			70 Persen 72 Persen	**4.874.603.542**	
	Pengelolaan Sampah	Kota Bima	Persentase	485 M^2	4.859.603.542	**Pengelolaan Sampah**	Kota Bima		485 M^2	4.859.603.542	
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bima	volume sampah yang terangkut ke TPA	475 ton	4.028.220.089	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bima	volume sampah yang terangkut ke TPA	228 ton	4.028.220.089	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Bima	Jumlah pokmas pengelola sampah	8 kelompok	50.000.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Bima	Jumlah pokmas pengelola sampah	8 kelompok	50.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota Bima	Jumlah Koordinasi	11 Dokumen	40.586.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota Bima	Jumlah Koordinasi	11 Dokumen	40.586.200	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada musrenbang 2025 yang dilakukan, baik pada tingkat kelurahan maupun pada Lingkungan Hidup, yaitu usulan Paganisasi Kuburan TPU Lingkungan Spaga dan Lingkungan Rasalewi 400 meter dan usulan pengadaan 2 unit countainer . Dari dua usulan tersebut semua usulan yang diterima, yaitu usulan pagarnisasi TPU Lingkungan Spaga serta Lingkungan Rasalewi dan usulan container, sementara ada sembilan belas usulan lewat pokir dewan, yaitu untuk 17 paganisasi kuburan, 2 untuk penataan taman.

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Bima
Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Paving Taman Lapangan Tenis Rabangodu	Rabangodu Utara	Paving Block	200 meter	
2	Lanjutan Kuburan Bedi	Bedi	Panjang Pagar kuburan	400 meter	
3	Lanjutan Pemagaran Kuburan Alga Mande II	Mande II	Panjang Pagar kuburan	200 meter	
4	Pagarisasi TPU Gindi	Gindi	Panjang Pagar kuburan	200 meter	
5	Penataan Kuburan Kelurahan Kodo	Kodo	Panjang Pagar kuburan	200 meter	
7	Pemagaran Kuburan Tolotando Kel. Matakando	Matakando	Panjang Pagar kuburan	300 meter	
9	Pemagaran Kuburan Oi Fo,o	Oi Fo,o	Panjang Pagar kuburan	400 Meter	
10	Pemagaran Kuburan Panggi	Panggi	Panjang Pagar Kuburan	1Taman	
11	Pemagaran Kuburan Jatibaru	Jatibaru Timur	Panjang Pagar kuburan	400 Meter	
12	Pemagaran TPU Lama Gindi	Gindi	Panjang Pagar kuburan	400 Meter	
13	Pembuatan Gudang Kuburan (Manggemaci)	Manggemaci	Jumlah Bangunan	250 Meter	
14	Rehab Pagar Kuburan BTN Kel. Panggi	BTN panggi	Panjang Pagar Kuburan	400 meter	
15	Penataan Kuburan Santi	Santi	Panjang Pagar Kuburan	200 meter	
16	Penataan Kuburan Klate	Klate	Panjang Pagar Kuburan	400 meter	
17	Penataan Kuburan Kolo	Kolo	Panjang Pagar Kuburan	250 meter	

18	Penutupan Kuburan RT.24 Kel. Ule	Ule	Panjang Pagar Kuburan	400 meter	
19.	Penataan Kuburan Jatibaru	Jatibaru	Penataan taman Dengan timbulan	400 meter	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Untuk mempelajari Faktor penghambat dan pendorong Perangkat Daerah yang akan mempengaruhi pencapaian Visi Misi Kepala Daerah adalah dengan mengetahui sebab-sebab yang melatari penghambat dan pendorong perangkat daerah perlu menelaah terhadapat kebijakan nasional dan provinsi. Dalam menelaah tersebut perlu mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendorong, maka perangkat daerah bisa mengambil kebijakan untuk mengatasi faktor penghambat perangkat daerah tersebut. Untuk lebih jelas faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Menjaga kualitas Lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air,udara dan tutupan hutan	- Masih rendahnya Kualitas dan kuantitas SDM dalam pengujian kualitas lingkungan hidup - Belum tersedianya laboratorium lingkungan hidup - Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang berkualitas ramah masih rendah -Masih kurangnya sosialisasi PERDA Lingkungan Hidup	- Tidak ada tenaga teknis/ahli dalam pengujian kualitas lingkungan - Tidak adanya ASN yang berminat sebagai tenaga funsional penyidik lingkungan. - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadapa kebersihan lingkungan seperti pencemaran lingkungan dengan membuang sampah di sungai -Penerapan PERDA lingkungan belum dilaksanakan	- Besarnya political will dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas dari Pemerintah - Tingginya etos kerja Pegawai DLH dalam mewujudkan semangat kerja untuk lingkungan berkualitas dan ramah -Tersedianya lahan untuk pembangunan Laboratorium - Kebijakan relokasi masyarakat disempadan sungai.

2	Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport;	- Tidak adanya kewenangan Pemerintah Kab/Kota dalam penanganan Hutan - Lemahnya koordinasi antar pemerintah propinsi dengan Kab/Kota dan antar sektor dalam penganan Hutan	- Adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi ladang -Lemahnya penegakan hukum bagi pelaku Ilegal loging (Perusak Hutan) - Lahan mata air disekitar dikuasai oleh masyarakat dengan memiliki hak milik	- Dukungan pemerintah Kota untuk melestarikan hutan, khususnya dalam perlindungan mata air sangat besar - Adanya kelompok penyelamat mata air (kelompok masyarakat) untuk melindungi kawasan hutan di sekitar mata air - Adanya kesadaran masyarakat untuk mempertahankan Dan melindungi hutan, khususnya disekitar kawasan hutan.
3	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun	- Pencemaran dan kerusakan lingkungan - Rusaknya habitat yang ada - Adanya pembudidayaan pesies tertentu Polusi zat-zat kimia - Erosi tanah - Pencagaran yang tidak berjalan lancar - Perubahan fungsi ekosistem menjadi fungsi yang lain	- Adanya erosi tanah sehingga kedalaman air sunga/laut semakin berkurang. yang menyebabkan luas sungai/laut semakin berkurang - Adaptasi ekosistembaru pada habitat yang baru - Pertambahan jumlah penduduk - Kurangnya kesasdaranpemahaman, kepedulian masyarakat untuk menjaga keanekaragaman hayati - Penegakan hukum yang lemah	- Semakin berkembangnya agrowisata yang mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan - Mulai dibentuknya

4	Terwujudnya pengelolaan persampahan berbasis masyarakat menuju indonesia bebas sampah tahun 2024 melalui akses layanan 70% dan pengurangan 30%	- Kurangnya sarana dan prasarana - Kurangya SDM -Belum Optimal dalam mengelola bank sampah - Kurangnya sosialisasi pentingnya Bank sampah dan PERDA persampahan untuk mengurangi limbah dan sampah	- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dalam meminimalkan sampah -Penerapan PERDA sanksi kepada pelaku pembuang sampah sembarangan belum terjadi - Terbatasnya tempat untuk dijadikan TPS	- Adanya regulasi tentang pemberdayaan masyarakat terhadap pengangkutan sampah - Kebijakan optimalisasi bank sampah disetiap kelurahan ada bank sampah - Munculnya Komunitas Peduli sampah

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi besertaFaktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran jangka Menengah Renstra OPD Propinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Tertanganinya lahan kritis di dalam dan di luar			
2	Terpeliharanya sumberdaya air baik secara vegetatif maupun sipil teknis; eksport;	- Perubahan fungsi ekosistem menjadi fungsi yang lain	- Kurangnya kesasdaranpemaha ma n, kepedulian masyarakat untuk menjaga keanekaragaman hayati - Penegakan hukum yang lemah	- Dengan mendaur ulang limbah - Adanya pencagaran dengan mengembangan kan kelompok permata di sejumlah mata air.
3	Tersedianya data potensi dan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;			

4	Berkurangnya dampak negatif pembuangan sampah oleh masyarakat melalui upaya pengolahan sampah secara mandiri;	- Kurangnya sarana dan prasarana - Kurangya SDM -Belum Optimal dalam mengelola bank sampah - Kurangnya sosialisasi pentingnya Bank sampah dan PERDA persampahan untuk mengurangi limbah dan sampah	- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dalam meminimalkan sampah -Penerapan PERDA sanksi kepada pelaku pembuang sampah sembarangan belum terjadi -Terbatasnya tempat untuk dijadikan TPS	- Adanya regulasi tentang pemberdayaan masyarakat terhadap pengangkutan sampah - Kebijakan optimalisasi bank sampah disetiap kelurahan ada bank sampah - Munculnya Komunitas Peduli sampah
5	Terpantaunya kualitas udara dan air secara kontinu sebagai indikator lingkungan hidup	- Pencemaran dan kerusakan lingkungan - Rusaknya habitat yang ada - Adanya pembudidaya spesies tertentu - Polusi zat-zat kimia - Erosi tanah - Pencagaran yang tidak berjalan lancar - Perubahan fungsi ekosistem menjadi fungsi yang ain	- Adanya erosi tanah sehingga kedalaman air sunga/laut semakin berkurang. Yang menyebabkan luas sungai/laut semakin berkurang. - Adaptasi ekosistem baru pada habitat yang baru - Pertambahan jumlah penduduk - Kurangnya kesasdaranpemaha ma n, kepedulian masyarakat untuk menjaga keanekaragaman hayati - Penegakan hukum yang lemah	- semakin berkembangnya agrowisata yang mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan - Mulai dibentuknya eco-green dan eco industri dimana limbah yang ada bisa dikurangi dengan mendaur ulang limbah - Adanya pencagaran dengan mengembangan kan kelompok permata di sejumlah mata air.

6	Terpantaunya aktifitas perusahaan yang berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi NTB dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi NTB	- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengujian kualitas lingkungan hidup - Belumtersediany a laboratorium lingkungan hidup Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan	- Tidak ada tenaga teknis/ahli dalam pengujian kualitas lingkungan - Tidak adanya ASN yang berminat sebagai tenaga funsional penyidik lingkungan - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadapa kebersihan lingkungan seperti pencemaran	- Besarnya political will dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas dari Pemerintah Tingginya etos kerja Pegawai DLH dalam mewujudkan semangat kerja untuk lingkungan berkualitas dan ramah
7	Terlaksananya diklat teknis bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan tenaga di lapangan	- Tidak adanya ASN yang berminat sebagai tenaga funsionalPenyid ik lingkungan	- Kurangnya Tim teknis/ahli untuk pengujian laboratorium untuk pemantauan perusakan lingkungan (air,Udar dan tanah	- Pengiriman ASN untuk mengikuti tugas belajar/Diklat
8	Tersedianya sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan di lapangan	- Kurangnya sarana dan prasarana operasional	- Kurangnya sarana danprasarana operasional	- Adanya penambahan armada untuk peningkatan operasional sesuai dengan kebutuhan di lapangan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dapat dipaparkan sebagai berikut ini:

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Persen RTH Publik
4. Persen Kawasan direhabilitasi

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD diatas dijelaskan kembali dengan proyeksi target untuk Tiga tahun kedepan sebagaimana dalam tabel 3.2 tentang Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD dibawah ini.

Guna pencapaian sasaran tingkat daerah, maka ditetapkan 4 (lima) Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam mendukung sasaran daerah, yaitu :

1) Meningkatkan kualitas Air, Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
2) Meningkatkan Kualitas Udara Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
3) Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH yang estetis, fungsional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan Kawasan perkotaan

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah ditandatagani yang diukur mulai dari Capaian Kinerja Tujuan, Capaian Kinerja Sasaran, Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja kegiatan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dinas lingkungan hidup didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra antara lain;

a. Prioritas dan Sasaran perangkat daerah

Perioritas dan sasaran Perangkat Daerah mengacu kepada program prioritas pembangunan daerah yang didasarkan pada renstra perangkat daerah pada tabel dibawah ini;

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator sasaran daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator sasaran PD (outcome)
1	Program Pegelolaan Persampahan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air dan Udara	Meningkatnya Layanan Persampahan	Persentase Cakupan kawasan bebas sampah
2	Program Pengelolaan Keanekaraman Hayati (KEHATI)			Terwujud nya RTH Publik sesuai ketentuan	Persentase Luas RTH Publik
3	Program Penanganan untuk Pengaduan Lingkungan Hidup.			Terkendalinya kerusakan dan pencemaran lingkungan	Persentase Kualitas air, udara dan tanah
4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Menngkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi		
5	Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
6	Program Pembinaan dan Pengawsan				

	Terhadap izin Lingkungan Perlindungan dan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			Meningkatnya kualitas SDA dan LH	Persentase Kawasan Yang direhabilitas
7	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.				
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				

b. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.Melalui perjanjian kinerja, diharapkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2024-2026. Indikator Tujuan dan Sasaran ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. Penjelasan tentang Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut;

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran PD

No	Tujuan dan Sasaran PD		Indikator tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran
	Tujuan:	Sasaran:		
1	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Terkendalinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Persentase Cakupan kawasan bebas sampah	70%
2	Peningkatan Ideks Kualita Udara	Terkendalinya Pencemaran lingkunga		
3	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Terwujud nya RTH Publik sesuai ketentuan	Persentase Luas RTH Publik	11,64%
4	Peningkatnya Tutupan Lahan	Meningkatnya kualitas SDA dan LH	Persentase Kawasan direhabilitasi	2 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

4.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Kota Bima merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh berbagai instansi sektor dan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Seiring dengan Visi Pembangunan Pemerintah Kota Bima yang akan dicapai selama lima tahun mendatang yaitu: "**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Lingkungan**".

Salah satu pemaknaan kota yang maju adalah kota yang memiliki masyarakat dengan derajat kesehatannya tinggi dan angka harapan hidup tinggi serta tergambarkan pada misi yang keempat yaitu memantapkan infrastruktur sarana dan prasarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

Dalam Misi tersebut, kebijakan diarahkan untuk melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan memperhatikan pelestrian fungsi lingkungan. Hal ini secara jelas mengisyaratkan adanya keinginan untuk tetap menyeimbangkan antara upaya eksplorasi sumber daya alam demi pembangungan dengan kepentingan menjaga lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi diupayakan untuk diperbaiki, melalui berbagai kebijakan seperti : rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan, dapata dicapai melalui 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan Layanan persampahan,
2. Terwujudnya Ruang Terwujud Hijau Publik sesuai ketentuan
3. Meningkatnya Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup
4. Terkendalinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/Kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan
1	Meningkatkan Layanan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolan Persampahan dengan tiga pelaksanaan kegiatan: - Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan - Pemeliharaan kendaraan operasional pengangkutan sampah - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
2	Terwujudnya Ruang Terwujud Hijau Publik sesuai ketentuan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
3	Meningkatnya Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4	Terkendalinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing- masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggung jawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026, pada misi ke-4 Kota Bima yaitu, Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;

Dalam misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima selama kurun waktu tiga tahun kedepan adalah meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target capaian indikator sasaran ini ditetapkan dengan mengacu pada target IKLH Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN sampai dengan akhir periode tahun 2024 sebesar 68,17%. Kondisi kinerja pada awal periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebesar 56,8,25%. Target capaian mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 berturut-turut disesuaikan dengan target nasional yaitu sebesar 61,83%, 64,93% dan 68,17%. Sedangkan target untuk tahun 2024 sampai dengan akhir periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima ditetapkan sesuai dengan dengan nilai akhir target nasional yaitu sebesar 68,73,17%.

Guna pencapaian sasaran tingkat daerah, maka ditetapkan 4 (lima) Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam mendukung sasaran daerah, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Air Untuk Kualitas Lingkungan Hidup serta Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
2. Meningkatkan Kualitas Udara Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
3. Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH yang estetis, fungsional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan Kawasan perkotaan

Untuk mendukung Empat indikator kinerja utama maka dituangkan dalam tujuh prioritas pembangunan, sesuai dengan tabel di bawah ini;

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Bima

No	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Ket
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, DIDUKUNG TIGA KEGIATAN; **1.** Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA **2.** Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan **3.** enyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampaha	5,546,183,500	
2	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	900.0000.000	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	4.552.862.792	

4	Program Perlindungan Dan Konservasi SDA	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	629,000,000	
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	508.000.000	
6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198.895.181	

4.3.Rencana Progran dan Kegiatan Pada Tahun Anggaran 2024.

Pada tahun 2024 mumauat 9 program dan 46 kegiatan seperti termuat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
2	**11**				**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**				**21.521.292.603,00**				**21.747.995.867,00**
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**		**90 Persen**	11.030.269.667,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**90 Persen**	**11.242.445.667,00**
2	**11**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**12 Dokumen**	107.790.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**12 Dokumen**	111.100.000,00
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	15.500.000

2	11	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	11.200.000,00
2	11	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	12.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	13.000.000,00
2	11	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	12.000.000,00
2	11	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	12.190.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	13.000.000,00

2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	4 laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 laporan	10.200.000,00
2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	2 laporan	36,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 laporan	36.200.000,00
2	**11**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan**		**6 Dokumen**	**9,558,383,092**			**6 Dokumen**	**10,773,067,170**
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	1 tahun	9,375,447,092	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 tahun		10,598,061,930
2	11	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	162,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen		156,504,380

2	11	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	1 laporan	8,892,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan		8,481,020
2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	4 laporan	11,244,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 laporan		10,019,840
2	**11**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**95 Persen**	**372.000.000,00**			**95 Persen**	**373.600.000,00**
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	1 Paket	32.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	32.200.000,00
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	1 Paket	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	11.000.000,00

2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bima	1 Paket	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	30.200.000,00
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	70 Laporan	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Laporan	300.200.000,00
2	**11**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**95 Persen**	**354.000.000,00**			**95 Persen**	**356.400.000,00**
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	12 Laporan	18.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	19.000.000,00
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bima	12 Laporan	46.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	46.200.000,00
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	1 Laporan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	20.200.000,00
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Kota Bima	1 Laporan	270.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	271.000.000,00

						Umum Kantor yang Disediakan							
2	**11**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**95 Persen**	**374.000.000,00**			**95 Persen**	**377.400.000,00**
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bima	50 Unit	130.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	130.200.000,00
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bima	50 Unit	121.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	122.000.000,00
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bima	50 Unit	21.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	22.000.000,00
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bima	3 Unit	52.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	52.200.000,00

2	11	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bima	2 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	51.000.000,00
2	**11**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase menurunnya Pelanggaran Terhadap RPPLH**		**56 Persen**	**324.091.000,00**			**56 Persen**	**329.300.000,00**
2	**11**	**2**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Regulasi Bidang Lingkungan yang Disusun**		**1 Dokumen**	**143.500.000,00**			**1 Dokumen**	**144.500.000,00**
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Bima	1 dokumen	143.500.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 dokumen	144.500.000,00
2	**11**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah KLHS yang disusun**		**2 Dokumen**	**180,591,000**			**2 Dokumen**	**184,800,000**
2	11	2	2.02	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Bima	1 Dokumen	180,591,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	184,800,000

2	11	2	2.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Bima	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
2	**11**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Meningkatnya Kualitas Air dan Udara**		**30/88,33%**	**408.000.000**			**31/88,33%**	**411.900.000**
2	**11**	**3**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**				**200.000.000,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			**201.700.000,00**
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Bima	10 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	25.200.000,00
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Bima	3 Dokumen	95.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	96.000.000,00
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen	Kota Bima	19 Dokumen	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Dokumen	80.500.000,00

						Mutu yang Dilaksanakan							
2	**11**	**3**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanggulangn dan keruskan lingkungan hidup Terwujudnya Pelaksanaan Pencegahan dan keruskan lingkungan hidup**		**55 Persen**	**86.000.000,00**			**60 Persen**	**87.200.000,00**
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan sosialisasi informasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kota Bima	5 Laporan	38.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	38.200.000,00
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Kota Bima	5 Titik	48.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Titik	49.000.000,00

						jumlah sumber pencemar yang dihentikan							
2	**11**	**3**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemulihan Kerusakan Lingkungan hidup**		**70 Persen**	**122.000.000,00**			**70 Persen**	**123.000.000,00**
2	11	03	203	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengehentian sumber pencemaran kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang di laksanakan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan		2 Dokumen	31.000.000,00			2 Dokumen	31.500.000,00
2	11	3	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kota Bima	4 Dokumen	91.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	91.500.000,00

2	**11**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**		**11,64%**	**4.223.000.000,00**			**11,64%**	**4.224.700.000,00**
2	**11**	**4**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase luas RTH Publik Yang tertangani**		**11,34%**	**4.223.000.000,00**			**11,34%**	**4.224.700.000,00**
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Kota Bima	1 Dokumen	18.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	18.200.000,00
2	11	4	2.01	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kab/Kota	Kota Bima	2 Ha	180.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Ha	180.500.000,00
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	243 Ha	3.900.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		243 Ha	3.900.000.000,00
2	11	4	2.01	5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Kota Bima	4 Unit	125.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 Unit	126.000.000,00
2	**11**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Meningkatnnya Jumlah Izin yang diawasi**		**75%**	**150.000.000,00**			**75%**	**152.000.000,00**

2	**11**	**6**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH sesuai Ketentuan Yang berlaku**		**260 ijin**	**150.000.000,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**260 ijin**	**152.000.000,00**
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kota Bima	260 Dokumen	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		260 Dokumen	76.000.000,00
2	11	06	201	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	30 Laporan	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Laporan	76.000.000,00
2	**11**	**8**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase meningkatnya Jumlah Pokmas sadar Lingkungan**	**100%**		**110.000.000,00**			**100%**	**111.000.000,00**
2	**11**	**8**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk**	**Jumlah Kelompok Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan**		**13 Kelompok**	**110.000.000,00**			**13 Kelompok**	

					Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Lingkungan Hidup**							**111.000.000,00**
2	11	8	2.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kota Bima	3 Lembaga	110.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Lembaga	111.000.000,00
2	11	08	201	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Bima	10 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	0
2	**11**	**9**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan hidup**	**Kota Bima**	**100%**	**53.265.000,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100%**	**54.000.000,00**
2	**11**	**9**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Junlah kategori penghargaan dalam kegiatan lingkungan hidup**		**3 Enititas**	**53.265.000,00**			**3 Enititas**	**54.000.000,00**

2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Bima	3 Enititas	53.265.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Enititas	54.000.000,00
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Menurunnya Pelanggaran Terhadap RPPLH**		**60%**	**36.000.000,00**			**60%**	**36.200.000,00**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengaduan masyarakat yang diselesaikan**		**12 Dokumen**	**36.000.000,00**			**12 Dokumen**	**36.200.000,00**
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Kota Bima	25 Dokumen	36.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Dokumen	36.200.000,00
2	11	10	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Kota Bima	30 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Laporan	0

2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Sampah yang tertangani**		**70%**	**5.367.257.936,00**			**70%**	**5.371.250.200,00**
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Sampah yang tertangani**		**70%**	**5.367.257.936,00**			**70%**	**5.371.250.200,00**
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bima	470 m3	5.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		470 m3	5.000.000.000,00
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kota Bima	6 Kelompok	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Kelompok	150.000.000,00
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.	Kota Bima	5 Dokumen	53.070.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	53.070.200,00

						Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada						
2	11	11	201	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Bima	50 unit	164.187.736,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 unit	168.180.000,00
TOTAL									**21.521.292.603,00**			**21.747.995.867,00**

BAB V

PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup DLH Kota Bima tahun 2025 mendatang, dapat mencapai hasil yang optimal dan efisien.

Dalam mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yakni ***"Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup"*** Maka kematangan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang tertuang dalam Rencana Kerja tahunan adalah Pedoman kerja untuk tahun 2025.

Akhirnya kepada Tuhan jualah kita berserah diri seraya memohon bimbingan-Nya semoga apa yang direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan Negara, Amin.

Kota Bima, Juni 2024

Kepala Dinas,



Syarief Rustaman, S.Sos., M. Ap
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730409 199211 1 001

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Secara Nasional dalamsepuluh tahun terakhir, konsentrasi arah pembangunan nasional telah mengalami pergeseran, yang semula dititikberatkan pada sektor pertanian dan indistri, kini bergeser ke arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dimungkinkan karena potensi kelautan dan perikanan memiliki landasan yang kuat untuk dijadikan isu utama dalam pembangunan nasional baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Beberapa landasan tersebut antara lain; **Pertama** : melimpahnya sumber daya kelautan dan perikanan yang kita miliki, dengan sejumlah keunggulan komparatif dan kompetitif yang sangat tinggi; **Kedua** : keterkaitan yang kuat antara industri yang berbasis kelautan dan industri yang berbasis ekonomi lainnya; **Ketiga** : sumber daya kelautan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui ; **Keempat** : luasnya perairan dengan jaminan keamanan yang cukup menjadi simbol bargaining politik luar negeri yang kuat; **Kelima** : dari aspek sosial budaya orientasi dibidang kelautan dan perikanan dapat *menggugah* bangkitnya nilai budaya dan tradisi kita sebagai masyarakat bahari.

Untuk itu dalam memaksimalkan pemanfaatan potensi SDA tersebut, perlu merancang dan merumuskan arah pembangunan melalui kepekaan dan ketajaman analisa secara matang sesuai dengan potensi dan daya dukung yang tersedia. Karena itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) harus mempertimbangkan hasil analisa dan kajian yang komprehensif dari semua pihak, serta bercermin kepada arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) serta Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun.

Demikian kata pengantar dari kami, semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi referensi bagi kita semua dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara bijak dan berkesinambungan.

Raba-Bima, 26 April 2024

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kota Bima

Jamaludin, SP

Pembina /IVa

NIP. 19681231 200312 1 071

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana Kerja SKPD 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar I

Daftar Lampiran II

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sitematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA TAHUN 2023..... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Ranja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima..... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima..... 14

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima..... 17

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 29

` BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 31

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... 31

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 32

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan..... 35

3.4 Program dan Kegiatan..... 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 39Z

BAB V PENUTUP..... 50

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……			I
Daftar Lampiran ……			II
BAB I	PENDAHULUAN…….……..		1
	1.1	Latar Belakang .....…….	1
	1.2	Landasan Hukum.....…….	2
	1.3	Maksud dan Tujuan….....	4
	1.4	Sitematika Penulisan.....	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA TAHUN 2024.....		5
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Ranja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.....……..	5
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.....…….	21
	2.3	Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.……..…….	24
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD……..	28
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……..	32
` BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH……		33
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	33
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah……...	36
	3.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan……	37
	3.4	Program dan Kegiatan…….	38
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH…….		40
BAB V	PENUTUP……		50

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya perhatian yang cukup besar terhadap pembangunan kelautan dan perikanan baik secara nasional maupun regional dilandasi oleh pemikiran bahwa pembangunan sektor ini sangat strategis untuk mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Sejalan dengan itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan desentralisasi pembangunan dengan memberikan otonomi kepada daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi Daerah dapat mendorong keikutsertaan masyarakat dalam mengambil kebijakan pembangunan di daerah, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan dengan memperhatikan potensi daerah baik keuangan maupun sumber daya yang dimiliki.

Untuk menjamin kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan berhasil guna maka diperlukan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah salah satu diantaranya adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja (Renja) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pemerintah Daerah melalui Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Renja SKPD yang dihasilkan melalui forum SKPD dengan cara menyerasikan subtansi antar rancangan Renja masing-masing SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemuktahiran rancangan RKPD. Rancangan RKPD tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai Forum antara

pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Setelah rancangan akhir RKPD disusun, maka Kepala Daerah menetapkan rancangan RKPD menjadi RKPD Periode 1 tahun dengan Peraturan Daerah, yang selanjutnya akan digunakan dalam menyusun RAPBD Kota Bima Tahun 2024.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima diharapkan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan khususnya Tahun 2025 akan semakin baik.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Nomor Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
14. Peraturan Walikota Bima Nomor : 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima;

15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 239).
16. Peraturan Walikota Bima Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 706).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Renja ini disusun agar dapat dijadikan, sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima selama kurun waktu Tahun 2024. Selain itu Renja disusun sebagai acuan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun lalu dan rencana kinerja tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, ditetapkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima

Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Meliputi Kegiatan :
    1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        a. Kinerja fisik pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencapai 100%. Kinerja keuangan tidak terserap 100%, karena beberapa hal antara lain adanya sisa dari sisa anggaran pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkatan daerah dan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd.
        b. Kinerja fisik pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah telah mencapai 100%. Kinerja keuangan terserap 100%.
        c. Kinerja fisik pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah telah mencapai 100%. Kinerja keuangan tidak terserap 100%, karena beberapa hal antara lain adanya sisa pada sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang – undangan.
        d. Kinerja fisik pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah mencapai 100%. Kinerja keuangan terserap 100%.
        e. Kinerja fisik pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah telah mencapai 100%. Kinerja keuangan terserap 100%.

f. Kinerja fisik pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah telah mencapai 100%. Kinerja keuangan tidak terserap 100%, karena beberapa hal antara lain adanya sisa anggaran dari belanja barang dan jasa khususnya belanja alat tulis kantordan belanja jasa kantor

g. Kinerja fisik pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah telah mencapai 100%. Kinerja keuangan tidak terserap 100%, karena beberapa hal anatar lain adanya sisa belanja pemeliharaan pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya serta pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Meliputi Kegiatan :
   1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
   3. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
      a. Kinerja fisik pada kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota telah mencapai 100%. Kinerja keuangan tidak terserap 100%.
      b. Kinerja fisik pada kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota sudah mencapai 100%. Kinerja keuangan terserap 100%.
      c. Kinerja fisik pada kegiatan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota telah mencapai 100%, Kinerja keuangan terserap 100%.
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Meliputi Kegiatan :
   1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
   2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

a. Kinerja fisik pada kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan telah mencapai 100%. Kinerja keuangan tidak terserap 100% karena adanya sisa anggaran pada sub kegiatan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil
b. Kinerja fisik pada pengelolaan pembudidayaan ikan telah mencapai 100%. Kinerja keuangan tidak terserap 100% karena adanya sisa anggaran pada sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Meliputi Kegiatan :
   1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
   2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
   3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
      a. Kinerja fisik pada kegiatan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil telah 100%. Kinerja keuangan terserap 100%.
      b. kinerja fisik kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil sudah mencapai 18,66%. Kinerja keuangan tidak terserap 100%, karena beberapa hal anatar lain adanya sisa belanja pemeliharaan pada sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
      c. kinerja fisik kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota telah mencapai 100%.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kota Bima

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bima Lembar : .....

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)(tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3.	25				**Kelautan dan Perikanan**									
3.	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Presentase Kualitas Penyajian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Prangkata Daerah**	100 %							
3.	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	12 Dokemen	12 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	1	12	33 Dokumen	2,75
3.	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokemen	2 Dokumen	1 dokemen	1 Dokemen	1	2	5 Dokemen	2,5
3.	2	0	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA -	1 Doke	1 Doke	1 Doke	1 Dokem	1	1	3 Dokem	3

	5	1			Dokumen RKA- SKPD	SKPD		men		men		men		en				en	
3.	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1	Dokemen	1	Dokemen	1	Dokemen	1	Dokemen	1	1	3	Dokemen	3
3.	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1	Dokemen	1	Dokemen	1	Dokemen	1	Dokemen	1	1	3	Dokemen	3
3.	25	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunanan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1	Dokemen	1	Dokemen	1	Dokemen	1	Dokemen	1	1	3	Dokemen	3
3.	25	01	2.01	0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokemen	4	Dokemen	1	Dokemen	1	Dokemen	1	4	9	Dokemen	2,25
3.	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokemen	2	Dokemen	1	Dokemen	1	Dokemen	1	2	5	Dokemen	2,5
3.	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan**	1	Dokumen											
3.	**25**	**01**	**2.02**	**0001**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	34	Orang	34	Orang	24	Orang	24	Orang	1	24	82	Dokumen	2,41
3.	**25**	**01**	**2.02**	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	1	12	36	Orang	3,00
3.	**25**	**01**	**2.02**	0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	3	Bulan	3,00
3.	**25**	**01**	**2.02**	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	1	2	6	Dokumen	3,00
3.	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**	50	Orang											
3.	**25**	**01**	**2.05**	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	50	Orang	50	Orang	25	Orang	25	Orang	1	25	100	Orang	2,00
3.	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	80000	Lembar											
3.	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan perelengkapan kantor	7	Unit	7	Unit	7	Unit	7	Unit	1	7	21	Unit	3,00
3.	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan	80000	Lembar	80000	Lembar	80000	Lembar	80000	Lembar	1	80000	240000	Lembar	3,00
3.	25	01	2.06	0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	35	Orang	35	Orang	25	Orang	25	Orang	1	25	85	Orang	2,43
3.	**25**	**01**	**2.07**		**Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia**													
3.	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4	Unit	4	Unit	4	Unit	4	Unit	1	4	12	Unit	3,00

3.	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Permerintah Daerah**	3	Kegiatan									
3.	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim Selama 1 Tahun	500	Surat	500	Surat	500	Surat	500	Surat	1	500	1500	Surat	3,00
3.	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	Kegiatan	3	kegiatan	12	Bulan	12	Bulan	1	12	27	Bulan	9,00
3.	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang di perlihara**	49	Unit									
3.	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak	19	Unit	19	Unit	22	Unit	22	Unit	1	22	63	Unit	3,32
3.	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20	Unit	20	Unit	35	Unit	35	Unit	1	35	90	Unit	4,50
3.	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	1	unit	1	unit	50	%	50	%	1	35	86	%	86,00
3.	25	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	2,02	%									
3.	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Sarana, dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia**	6	Unit									
3.	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	5	Unit	5	Dok	1	Dokumen	1	Dok	1	1	7	Dokumen	1,40
3.	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1	Unit	1	Unit	723	Unit	723	Unit	1	723	1447	Unit	1447,00
3.	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Nelayan dan Unit Usaha yang diberdayakan**	15	Kelompok									
3.	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	25	0rang	10	Kelompok	10	Kelompok	10	Kelompok	1	10	30	Kelompok	1,20
3.	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10	Kelompok	10	Kelompok	5	Kelompok	5	Kelompok	1	5	20	Kelompok	2,00
3.	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan,	5	Unit Usaha	5	Unit Usaha	8	Unit Usaha	8	Unit Usaha	1	8	21	Unit Usaha	4,20

					Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha													
3.	**25**	**03**	**2.04**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang memiliki izin**	1	Dokumen											
3.	25	03	2.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	3	Dokumen	3,00
3.	**25**	**04**			**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	1,6	%											
3.	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah kelompok pembudidaya daya ikan Skala kecil yang diberdayakan**	15	Kelompok											
3.	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5	Kelompok	10	Kelompok	10	Kelompok	10	Kelompok	1	10	30	Kelompok	6,00
3.	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5	Kelompok	5	Kelompok	5	Kelompok	5	Kelompok	1	5	15	Kelompok	3,00
3.	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5	Kelompok	5	Kelompok	5	Kelompok	5	Kelompok	1	5	15	Kelompok	3,00
3.	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah pembudidaya ikan, luas lahan, produksi ikan, sarana dan prasarana yang dikelola**	**10**	**Unit**											
3.	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	1	4	12	Dokumen	3,00

3.	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	1	5	15	Unit	3,00
3.	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	1	5	15	Unit	3,00
3.	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2	Dokumen	2	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	1	6	14	Dokumen	7,00
3.	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30	Orang	30	Orang	20	Orang	20	Orang	1	20	70	Orang	2,33
3.	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan dan Persentase Peningkatan Produk Olahan Hasi Perikanan Serta Tingkat Angka Konsumsi Ikan Perkapita per Tahun**	3,40/8,28	%											
3.	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil**	**Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang terbit**	4	Dokumen											
3.	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	1	4	12	Dokumen	3,00
3.	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan**	60	Unit Usaha											
3.	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapat Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala	60	Unit Usaha	60	Unit Usaha	30	Unit Usaha	30	Unit Usaha	1	30	120	Unit Usaha	2,00

						Usaha dan Risiko									
3.	**25**	**06**	**02.03**		**Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia	1500 Ton									
3.	25	06	02.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1500 ton	1500 ton	3000 Ton	3000 Ton	1	3000	7500 Ton	5,00	
3.	25	06	02.03	0002	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	1	30	63 Unit Usaha	21,00	

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0 (2023)	Tahun 1 (2024)	Tahun 2 (2025)	Tahun 3 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	**1.** Persentase Peringkatan PDRB Sub Sektor Kelautan dan perikanan		3,56 %	4,62 %	5,68 %	13,86
		a. Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap		2,01 %	3,02 %	4,03 %	9,06
		B. Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya		1,55 %	1,60 %	1,65 %	4,8
2.	Meningkatnya Daya Saing Produk Perikanan	1. Presentase Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan		3,30 %	3.40 %	3,50	10,20
		2. Persentase Konsumsi Ikan (AKI)		6,36 %	8,28 %	8,76 %	23,40

Analisis kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Capaian jumlah produksi perikanan tangkap Tahun 2024 adalah sebesar 2.468,50 ton atau 106,14 % dari target sebesar 2.325,73 ton. Capaian tersebut meningkat sebesar 58,40 Ton (2,37%) dari tahun 2023. Peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 disebabkan oleh semakin tertib dan berkualitasnya pendataan statistik perikanan tangkap serta adanya program/kegiatan yang mendukung peningkatan upaya penangkapan seperti penyediaan sarana prasarana perikanan tangkap. Adapun perbandingan capaian dari indikator "Jumlah produksi perikanan tangkap" pada Tahun 2024 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA Tahun 2024-2026 MENCAPAI ANGKA 2.468,50 ton atau 106,14 % % dimana target kinerja pada akhir periode renstra adalah sebesar 7.221,27 Ton. Dengan demikian maka target Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan untuk periode 2024-2026 belum mencapai target. Perkembangan produksi perikanan tangkap selama Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :

CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

Tahun	JUMLAH PRODUKSI (Ton)
2023	2.410,1
2024	2.468,5

2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Capaian jumlah produksi perikanan budidaya pada Tahun 2023 adalah sebesar 833,98 ton, atau tercapai sebesar 92,74 % dari target 899,23 Ton dari target, capain ini meningkat sebesar 12,89 Ton (1,55 %) dari tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2024-2026, maka capaian indikator produksi perikanan budidaya pada Tahun 2023 adalah sebesar 92,74 %.

Perkembangan produksi perikanan budidaya Tahun 2024 s/d 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :

CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

Tahun	JUMLAH PRODUKSI (Ton)
2023	821,09
2024	833,98

3. Tingkat Konsumsi Ikan per kapita per tahun

Capaian Tingkat Konsumsi Ikan di Kota Bima pada Tahun 2024 adalah sebesar 50,55 kg/kapita/tahun atau 102,87 % dari target 49,14 kg/kapita/tahun. capain ini meningkat sebesar 0,73 kg/kapita/tahun atau 1,47 % dari tahun 2023.

Hal ini terjadi karena adanya program/kegiatan yang mendukung pengolahan dan pemasaran seperti penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil yang bersumber dari APBD II. Disamping itu, peningkatan jumlah konsumsi ikan disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam menkonsumsi ikan terutama ikan segar. Perkembangan tingkat konsumsi ikan selama kurun waktu 2024 s/d 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:

CAPAIAN TINGKAT KONSUMSI IKAN

Tahun	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg Per Kapita)
2023	46,82
2024	50,55

4. Jumlah Produk Pengolahan Hasil Perikanan

Capaian kinerja produk olahan hasil perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2024 sebesar 836,28 ton atau mencapai 0,88 % dari target 947,52 ton jika di bandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 499,440 ton atau 99,83 %.

Pengembangan produk hasil perikanan yang bernilai tambah merupakan suatu hal yang harus terus dilakukan, hal ini disebabkan karena adanya beberapa pergeseran yang terjadi di masyarakat antara lain adanya perubahan gaya hidup, perubahan pola konsumsi, banyaknya wanita/ibu rumah tangga yang bekerja, konsumen yang lebih menyukai produk yang lebih praktis, daya simpan produk olahan lebih lama dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka untuk tahun berikutnya peningkatan produk olahan akan dilakukan melalui beberapa cara antara lain lebih mengintensifkan pembinaan pada kelompok pengolahan yang ada baik melalui pembinaan rutin maupun Bimbingan Teknik atau pelatihan-pelatihan, promosi produk olahan baik skala lokal maupun nasional, pembentukan kelompok-kelompok pengolahan yang baru serta mengaktifkan kembali kelompok-kelompok yang sudah non aktif.

CAPAIAN BERDASARKAN JUMLAH PRODUK OLAHAN HASIL PERIKANAN

Tahun	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)
2023	500.276
2024	836,28

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima yaitu :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan luas wilayah Kota Bima yang cukup luas.
2. Harus jelasnya target/sasaran program/kegiatan sehingga tidak terjadi salah sasaran.
3. Peningkatan produksi dan produktivitas pembibitan/pembenihan sehingga bisa menghasilkan bibit unggul/benih unggul lokal.
4. Pengembangan sistem budidaya perikanan yang mampu meningkatkan produksi sehingga bisa secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dari luar daerah.
5. Peningkatan teknologi perikanan tepat guna di masyarakat sehingga dapat memudahkan dalam budidaya ikan.
6. Peningkatan pemasaran dengan pangan olahan hasil ikan yang bervariasi.
7. Peningkatan kelembagaan yang mendukung produktivitas usaha perikanan.
8. Pengembangan infrastruktur dibidang kelautan dan perikanan yang mendukung upaya pembibitan, budidaya, penangkapan, pengolahan, pemasaran dan pengelolaan wilayah pesisir.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Bima

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan Lembar....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bima				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kota Bima				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Presentase Kualitas Penyajian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Prangkata Daerah	100%		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kota Bima	Presentase Kualitas Penyajian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Prangkata Daerah	100%		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.075.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.075.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	3.890.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	3.890.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	3.895.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	3.895.000	

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	4.112.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	4.112.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	5.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.859.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.859.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Bima				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	34 tahun	3.466.136.085	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	34 tahun	3.466.136.085	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	153.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	153.200.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	10.472.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	10.472.300	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	26.630.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	26.630.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Bima				
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	50 Orang	20.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	50 Orang	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Bima				
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah alat tulis kantor dan perelengkapan kantor	7 unit	10.241.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah alat tulis kantor dan perelengkapan kantor	7 unit	10.241.000	
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan	80000 lembar	10.200.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan	80000 lembar	10.200.000	
3	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	35 orang	230.000.000	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	35 orang	230.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Bima				
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4 unit	100.105.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4 unit	100.105.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Bima				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah surat terkirim Selama 1 Tahun	500 Surat	22.921.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah surat terkirim Selama 1 Tahun	500 Surat	22.921.500	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Kegiatan	45.046.490	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Kegiatan	45.046.490	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Bima				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan yang layak	19 Unit	171.570.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan yang layak	19 Unit	171.570.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Kendaraan yang Layak	20 Unit	23.340.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Kendaraan yang Layak	20 Unit	23.340.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bima	cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	1 Unit	413.495.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bima	cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	1 Unit	413.495.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kota Bima	Jumlah produksi Perikanan Tangkap	2.395,57 Ton		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Kota Bima	Jumlah produksi Perikanan Tangkap	2.395,57 Ton		
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedi	5 Unit	120.147.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Sarana, dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia			
1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Asakota, Kolo	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1 Unit	62.108.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Asakota, Kolo	Jumlah data dan Informasi sumberdaya ikan	1 Dokumen	20.000.000	
2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, Asakota, Kolo	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	25 unit	4.837.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, Asakota, Kolo	Tersedianya sarana penunjang perikanan tangkap	375 unit	307.000.000	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Nelayan dan Unit Usaha yang diberdayakan	15 Kelompok		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 kelompok	5.702.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya kapasitas SDM nelayan kecil	10 kelompok	27.000.000	
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kota Bima,RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Asakota, Ule	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5 Unit Usaha	7.043.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kota Bima,RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Asakota, Ule	Meningkatnya jumlah kelompok yang terbentuk	5 kelompok	17.000.000	

3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Asakota, Ule	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.463.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Asakota, Ule	Meningkatnya jumlah lembaga usaha perikanan tangkap yang mendapat fasilitas bantuan pendanaan	8 kelompok	21.000.000	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang memiliki izin	1 Dokumen	5..463.000	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5..463.000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung	Meningkatanya Jumlah Kapal Yang Terdaftar	50 unit	19.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kota Bima,	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	913,62 Ton		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Kota Bima,	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	858,25 Ton		
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					
1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, RasanaE Timur, Oi Fo'o Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Ule Kota Bima, Mpunda, Santi Kota Bima, Mpunda, Mande	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	70.790.000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, RasanaE Timur, Oi Fo'o Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Ule Kota Bima, Mpunda, Santi Kota Bima, Mpunda, Mande	Meningkatnya penyediaan bibit dan pakan ikan	3 paket	200.000.000	
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Kumbe Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, RasanaE Timur, Oi Fo'o Kota Bima, RasanaE Timur, Oimbo Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Asakota, Jatibaru Timur Kota Bima, Asakota, Ule Kota Bima, Raba, Kendo Kota Bima, Raba, Rabangodu Selatan Kota Bima, Mpunda, Monggonao Kota Bima, Mpunda, Santi Kota Bima, Mpunda, Mande	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 kelompok	9.379.900	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Kumbe Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, RasanaE Timur, Oi Fo'o Kota Bima, RasanaE Timur, Oimbo Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Asakota, Jatibaru Timur Kota Bima, Asakota, Ule Kota Bima, Raba, Kendo Kota Bima, Raba, Rabangodu Selatan Kota Bima, Mpunda, Monggonao Kota Bima, Mpunda, Santi Kota Bima, Mpunda, Mande	Meningkatnya kelas kelompok pembudidaya ikan	10 kelompok	17.000.000	
3	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, Asakota, Ule	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	12.000.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, Asakota, Ule	Pelatihan dan pendampingan terhadap pelaku usaha perikanan Budi Daya	1 Kali	0	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					
1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dok	12.000.000						
2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabuoaten/Kota	5 Unit	59.975.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan prasarana penunjang perikanan budi daya	4 paket	85.000.000	
3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, Asakota, Melayu	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 Unit	39.743.800	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, Asakota, Melayu	jumlah ketersediaan sarana penunjang perikanan budidaya	120000 ekor	75.000.000	
4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Ule Kota Bima, Raba, Kendo	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	10.559.800	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Ule Kota Bima, Raba, Kendo	Jumlah pemantauan hama dan penyakit ikan serta lingkungan budidaya	2 Kali	20.000.000	
5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat**	**30 Orang i**	**15.580.000**	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaku usaha budidaya perikanan	2 Kali	20.000.000	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kota Bima	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikkanan, Angka Konsumsi Ikan (AKI)	979,73 Ton, 53,21 Kg/Kapita/Th n		**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Kota Bima	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikkanan, Angka Konsumsi Ikan (AKI)	877,06 Ton, 45,2 Kg/Kapita/Th n		
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil		Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi	4 Dokumen		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi					

	Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Usaha Skala Mikro dan Kecil yang terbi			Usaha Skala Mikro dan Kecil					
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Dara	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	306.071.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Dara	Jumlah dokumen informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Jumlah promosi produk kelautan dan perikanan	6 Dokumen 2 Kali	100.000.000	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan	60 Unit Usaha							
1	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Raba, Rabangodu Utara	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapat Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	50 Unit Usaha	70.464.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Raba, Rabangodu Utara	Jumlah dokumen informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Jumlah pasar/UPI yang memenuhi persyaratan dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan Jumlah Poklahsar yang mengikuti bimbingan/pelatihan Jumlah promosi produk kelautan dan perikanan	6 Dokumen 2 Lokasi 50 Orang 2 Kali	50.000.000	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia	1500 Ton		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1500 Ton	56.775.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung	Jumlah dokumen informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Jumlah pasar/UPI yang memenuhi persyaratan dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan Jumlah Poklahsar yang mengikuti bimbingan/pelatihan Jumlah promosi produk kelautan dan perikanan Jumlah sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tersedia Jumlah sarana rantai dingin yang difasilitasi	6 Dokumen 2 Lokasi 50 Orang 2 Kali 12 Unit 1 Unit	1.200.0000.000	
2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Pane Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Oimbo Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Raba, Penaraga Kota Bima, Raba, Rontu Kota Bima, Raba, Rabangodu Utara Kota Bima, Mpunda, Santi Kota Bima, Mpunda, Mande	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3 Unit Usaha	34.629.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Pane Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Oimbo Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Raba, Penaraga Kota Bima, Raba, Rontu Kota Bima, Raba, Rabangodu Utara Kota Bima, Mpunda, Santi Kota Bima, Mpunda, Mande	Jumlah dokumen informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Jumlah pasar/UPI yang memenuhi persyaratan dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan Jumlah Poklahsar yang mengikuti bimbingan/pelatihan Jumlah promosi produk kelautan dan perikanan Jumlah sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tersedia	6 Dokumen 2 Lokasi 50 Orang 2 Kali 12 Unit	75.000.000	

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD diambil berdasarkan analisis kebutuhan dari tiap bidang yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima. Namun, seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan-perubahan kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diprioritaskan.

Pada saat proses penginputan program dan kegiatan terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, sehingga

diperlukan penyesuaian rumusan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renstra SKPD dan RPJMD. Disamping itu, juga karena ada beberapa kegiatan yang mengalami rasionalisasi anggaran pada saat APBD Perubahan.

Tabel 2.4

Usulan Program Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kota Bima

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan/

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bima			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Presentase Kualitas Penyajian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Prangkata Daerah	100%	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	34 tahun	

2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	50 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah alat tulis kantor dan perelengkapan kantor	7 unit	
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan	80000 lembar	
3	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	35 orang	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4 unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah surat terkirim Selama 1 Tahun	500 Surat	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Kegiatan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan yang layak	19 Unit	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Kendaraan yang Layak	20 Unit	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bima	cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	1 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kota Bima	Jumlah produksi Perikanan Tangkap	2.395,57 Ton	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedi	5 Unit	
1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Asakota, Kolo	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1 Unit	
2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, Asakota, Kolo	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	25 unit	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Nelayan dan Unit Usaha yang diberdayakan	15 Kelompok	

1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 kelompok	
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kota Bima,Rasana E Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Asakota, Ule	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5 Unit Usaha	
3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Asakota, Ule	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,		Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,	1 Dokumen	

	Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		dan Genangan Air Lainnya yang memiliki izin		
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kota Bima,	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	913,62 Ton	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, RasanaE Timur, Oi Fo'o Kota Bima, Asakota, Melayu Kota Bima, Asakota, Ule Kota Bima, Mpunda, Santi Kota Bima, Mpunda, Mande	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima,	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 kelompok	

		RasanaE Timur, Kumbe Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, RasanaE Timur, Oi Fo'o Kota Bima, RasanaE Timur, Oimbo Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Asakota, Jatibaru Timur Kota Bima, Asakota, Ule Kota Bima, Raba, Kendo Kota Bima, Raba, Rabangodu Selatan Kota Bima, Mpunda, Monggonao Kota Bima, Mpunda, Santi Kota Bima, Mpunda, Mande			
3	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, Asakota, Ule	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	5 Kelompok	

			Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dok	
2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabuoaten/Kota	5 Unit	
3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, Asakota, Melayu	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 Unit	
4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Paruga Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Dodu Kota Bima, RasanaE Timur, Nungga Kota Bima, Asakota, Melayu Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	

		Bima, Asakota, Ule Kota Bima, Raba, Kendo			
5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat**	**30 Orang i**	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kota Bima	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikkanan, Angka Konsumsi Ikan (AKI)	979,73 Ton, 53,21 Kg/Kapita/Thn	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang terbi	4 Dokumen	
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Dara	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan	60 Unit Usaha	
1	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, Raba, Rabangodu Utara	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapat Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	60 Unit Usaha	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku		Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan	1500 Ton	

	Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Ikan yang tersedia		
1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1500 Ton	
2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, RasanaE Barat, Tanjung Kota Bima, RasanaE Barat, Pane Kota Bima, RasanaE Barat, Dara Kota Bima, RasanaE Timur, Oimbo Kota Bima, Asakota, Kolo Kota Bima, Raba, Penaraga Kota Bima, Raba, Rontu Kota Bima, Raba, Rabangodu Utara Kota Bima, Mpunda, Santi Kota Bima, Mpunda, Mande	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3 Unit Usaha	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan yang datang dari masyarakat di peroleh melalui Proposal yang diantar/diajukan langsung oleh masyarakat/kelompok ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.

Pada Umumnya Usulan-usulan yang berupa proposal yang datang dari kelompok-kelompok tersebut sangat sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam sepuluh tahun terakhir, konsentrasi arah pembangunan nasional telah mengalami pergeseran, yang semula dititik beratkan pada sektor pertanian dan industri, kini bergeser ke arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Dilihat dari segi ketersediaan sumber daya alam, sektor kelautan dan perikanan merupakan aset yang paling menguntungkan. Di sepanjang pantai sering terdapat hutan bakau dan akar nafasnya yang khas. Ekosistem laut sebagai tempat hidup berbagai flora dan fauna laut, membentuk keanekaragaman hayati yang tinggi. Di dalam perairan laut biasanya juga terdapat jejeran terumbu karang dan padang lamun yang sangat beraneka ragam. Potensi ini menjadi indikator bagi kelimpahan potensi ikan, karena merupakan habitat dan tempat berlindung bagi ikan dan biota laut lainnya. Selain itu keindahan terumbu karang juga dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi pengembangan wisata bahari.

Potensi kelautan dan perikanan memiliki landasan yang kuat untuk dijadikan isu utama dalam pembangunan nasional baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Beberapa landasan tersebut antara lain; (1) Melimpahnya sumber daya kelautan dan perikanan yang kita miliki, dengan sejumlah keunggulan komparatif dan kompetitif yang sangat tinggi; (2) Keterkaitan yang kuat antara industri yang berbasis kelautan dan industri yang berbasis ekonomi lainnya; (3) Sumber daya kelautan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui; (4) Luasnya perairan dengan jaminan keamanan yang cukup menjadi simbol bargaining politik luar negeri yang kuat; (5) Dari aspek sosial budaya orientasi di bidang kelautan dan perikanan dapat menggugah bangkitnya nilai budaya dan tradisi kita sebagai masyarakat bahari.

Meskipun demikian, kerusakan di sektor kelautan dan perikanan yang terus menurun daya dukungnya, menjadi masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan. Berbagai macam bahan pencemar dari sungai, daratan atau lautan dapat mencemari pantai. Sungai yang bermuara di laut membawa berbagai macam limbah padat, cair, bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah dan sebagainya. Selain itu eksploitasi dan eksplorasi sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan secara destruktif dan tidak

bertanggung jawab oleh manusia dan tenaga asing telah menyebabkan potensi tersebut telah mengalami degradasi yang cukup signifikan, sehingga semakin memperparah rusaknya ekosistem laut dan pesisir serta menurunnya biota-biota laut.

Fenomena ini berdampak pada semakin menurunnya hasil penangkapan ikan para nelayan. Para nelayan yang biasanya cukup dengan menangkap ikan di sekitar perairan atau teluk terdekat kini harus berjuang keras dan mencari ikan pada laut lepas. Tentu saja dengan peralatan atau sarana dan prasarana yang sangat terbatas menjadi pembatas dalam perolehan ikan bagi nelayan kecil. Kenyataan ini mengharuskan kita untuk terus memperhatikan dan menjadikan sektor kelautan dan perikanan dan perairannya sebagai potensi yang vital untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendapatkan perlindungan, pengawasan dari pemerintah dan masyarakat setempat.

Secara nasional kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan telah diarahkan untuk : (1) Pengentasan kemiskinan (*pro poor*); (2) Penciptaan Lapangan kerja (*pro job*); (3) Percepatan pertumbuhan (*pro growth*); (4) Pengembangan agribisnis (*pro bussines*); dan (5) Pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable development*). Bahkan untuk pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang sebagian besar merupakan daerah kepulauan, pembangunan sektor kelautan mendapat prioritas cukup tinggi dan menjadi salah satu andalan sebagai motor penggerak perekonomian regional maupun nasional.

Secara Fisik, Provinsi NTB memiliki potensi pembangunan kelautan dan perikanan yang cukup menjanjikan dengan luas perairan laut ± 29.159,04 km, (sedangkan luas wilayah darat 20.153,15 km2), dan panjang garis pantai sekitar 2.333 km. Dengan kondisi perairan laut yang pada umumnya masih bersih, provinsi NTB memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan perikanan budidaya, baik untuk budidaya laut maupun budidaya tambak (*Marineculture*).

Disisi lain rata-rata luas pemilikan lahan pertanian hanya sekitar 0,3 HA per KK sehingga kurang mampu memberikan pendapatan yang layak bagi masyarakat. Fakta tersebut merupakan isyarat bahwa kita harus berpaling ke laut, sehingga sektor kelautan menjadi andalan NTB di masa depan. Namun demikian saat ini, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di NTB belum optimal karena beberapa faktor yaitu : (1) Masih rendahnya kualitas SDM yang antara lain tercermin dari cara-cara pemanfaatan yang masih

tergolong tradisional dan belum didukung oleh sistem pengolahan dan strategi pemasaran hasil perikanan yang memadai. (2) Terbatasnya sarana dan parasarana penunjang perikanan dan kelautan. (3) Terbatasnya akses untuk memperoleh permodalan, (4) Masih berlangsungnya pola pemanfaatan sumberdaya dengan cara-cara yang merusak kelestarian sumberdaya dan lingkungan hidup.

Pemberlakuan otonomi daerah, diharapkan menjadi peluang yang lebih strategis bagi Daerah, dalam rangka penataan, pengelolaan, eksplorasi, eksploitasi, pengawasan, dan konservasi wilayah sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pemerintah Daerah Kota Bima memiliki panjang garis pantai sekitar 27,7 km dengan luas daerah konservasi 256 Ha, luas daerah budidaya laut 710 Ha, luas daerah budidaya air tawar 365 Ha, luas daerah budidaya air payau 350 Ha. Tingginya potensi tersebut memungkinkan dijadikannya sektor Kelautan dan Perikanan Kota Bima sebagai basis pengembangan agro bisnis di daerah.

Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima melaksanakan beberapa strategi dan kebijakan antara lain :

a. Strategi :

1. Fasilitasi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan
2. Mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan.
3. Mengintensifkan perlindungan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

b. Kebijakan :

1. Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Revitalisasi kelautan dan perikanan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima selama 5 Tahun adalah sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima 2024-2026 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima adalah meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima beserta target kinerja sasaran periode

tahun 2024–2026 secara lengkap tersaji pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	Pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomin	Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan :
					1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
					2.Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
				Meningkatnya daya saing Produk perikanan	1.Persentase Peningkatan Produk Olahan hasil perikanan
					2 Persentase peningkatan angka Konsumsi Ikan Per Kapita Per Tahun
				Meningkatnya Kualitas masyarakat kelautan dan perikanan	Persentase Peningkaytan Kelompok Perikanan Sampai Dengan Madya

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD dengan tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Prioritas dan Sasaran

No	Tujuan dan Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran
	Tujuan :		
1	Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan	PDRB Sub Sektor Perikanan	4,62 %
	Sasaran		
2	-.Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan :	4,62 %
		1. Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	3,02 %
		2.Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	1,6 %
3	-.Meningkatnya daya saing produk perikanan	1.Persentase Produk Olahan hasil perikanan	3,40 %
		2.Persentase peningkatan konsumsi ikan perkapita per tahun	8,28 Kg/kapita/ thn

Disajikan juga mengenai indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, seperti disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama PD

No	IKU	Indikator IKU	Target Kinerja IKU
1	-.Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan :	4,62 %
		1. Persentase Peningkatan Produksi perikanan Tangkap	3,02 %
		2. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,6 %

2	-.Meningkatnya daya saing produk perikanan	1. Persentase Produk Olahan hasil perikanan	3,40 %
		2.Persentase peningkatan konsumsi ikan perkapita per tahun	8,28 Kg/kapita/ thn

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan

Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima adalah sebagai berikut :

Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : "Mewujudkan Kota Bima Yang BERKUALITAS dan SETARA Menuju Masyarakat Maju Dan Mandiri"			
Misi ke-2 : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
	Meningkatkan Daya Saing Produk Perikanan	Fasilitasi pembinaan, pelatihan dan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	Meningkatnya kualitas masyarakat kelautan dan perikanan	Pembinaan, sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat	Optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan

3.4 Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2025 sebagai berikut :

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TAHUN 2024		
									TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1						2	3	4	5	6	7
3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
3	**25**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					
3	**25**	**3.25.00.00.01**				**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**5.617.010.575**	
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Presentase Kualitas Penyajian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Prangkata Daerah**	**Kota Bima**	**100 %**	**4.713.752.075**	**DAU**
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera**	**Kota Bima**	**12 dokumen**	**30.867.000**	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	2 dokumen	4.075.000	DAU

3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	Kota Bima	1	dokumen	3.890.000	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Bima	1	dokumen	3.895.000	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	Kota Bima	1	dokumen	5.000.000	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunanan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Kota Bima	1	dokumen	4.112.000	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	4	dokumen	5.000.000	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	2	dokumen	4.895.000	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan**	**Kota Bima**	**1**	**dokumen**	**3.655.966.085**	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	Kota Bima	34	Orang	3.466.136.085	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	12	Bulan	153.200.000	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.02	05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Bima	1	dokumen	10.000.000	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Bima	2	dokumen	26.630.000	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.05**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**	**Kota Bima**	**50**	**Orang**	20.000.000	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	Kota Bima	50	Orang	20.000.000	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**80000**	**Lembar**	**250.441.000**	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan perelengkapan kantor	Kota Bima	7	Unit	10.241.000	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan	Kota Bima	80000	Lembar	10.200.000	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	35	Orang	230.000.000	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.07**		**Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia**	**Kota Bima**	**4**	**Unit**	**100.105.000**	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Kota Bima	4	Unit	100.105.000	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Permerintah Daerah**	**Kota Bima**	**3**	**Keg**	**67.967.990**	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim Selama 1 Tahun	Kota Bima	500	Surat	22.921.500	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	3	Kegiatan	45.046.490	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang di perlihara**	**Kota Bima**	**57**	**Unit**	**608.405.000**	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak	Kota Bima	19	Unit	171.570.000	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Kota Bima	20	Unit	23.340.000	DAU
3	25	3.25.00.00.01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	Kota Bima	1	Unit	413.495.000	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	Kota Bima	**3,02**	**%**	**205.300.000**	DAU dan DAK
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Data/Informasi Sumber Daya Ikan, Sarana, dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia**	**Kota Bima**	**6**	**Unit**	**182.255.000**	DAU dan DAK
3	25	3.25.00.00.01	02	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Penunjang Perikanan Tangkap	Melayu, Dara, Tanjung, Ule, Paruga, Kolo	5	Unit	120.147.000	DAU dan DAK
3	25	3.25.00.00.01	02	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Melayu, Dara, Tanjung, Ule, Paruga, Kolo	1	Unit	62.108.000	DAU dan DAK
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Nelayan dan Unit Usaha yang diberdayakan**	**Kota Bima**	**15**	**Kelompok**	**17.582.000**	DAU

3	25	3.25.00.00.01	02	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Melayu, Dara, Tanjung, Paruga, Kolo,Ule	25	Orang	4.837.000	DAU
3	25	3.25.00.00.01	02	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Melayu, Dara, Tanjung, Paruga, Kolo, Ule	10	Kelompok	5.702.000	DAU
3	25	3.25.00.00.01	02	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Rasanae Barat, Asakota	5	Unit Usaha	7.043.000	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang memiliki izin**	**Kota Bima**	**1**	**Dokumen**	**5.463.000**	
3	25	3.25.00.00.01	02	2.04	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Melayu, Dara, Tanjung, Paruga, Ule, Kolo	1	Dokumen	5.463.000	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**		**1,6**	**%**	**230.019.500**	**DAU**
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah Kelompok pembudidaya ikan skala kecil yang diberdayakan**	**Kota Bima**	**15**	**Kelompok**	**92.169.900**	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kota Bima	5	Kelompok	70.790.000	DAU
3	25	3.25.00.00.01	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Jatiwangi, Nungga Dodu Mande Santi	5	Kelompok	9.379.900	DAU
3	25	3.25.00.00.01	03	2.02	04	Pemberian Pendampinga, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		5	Kelompok	12.000.000	
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**03**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah pembudidaya ikan, luas lahan, produksi ikan, sarana dan prasarana yang dikelola**		**10**	**Unit**	**137.849.600**	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	03	2.04	02	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Melayu, Dara, Paruga, Nungga, Lelamase, Mande, Rabangodu Selatan, Penatoi,Rabadompu, Kendo, Jatiwangi,Dodu	4	Dokumen	12.000.000	DAU/DAK
3	25	3.25.00.00.01	03	2.04	3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Melayu, Dara, Paruga, Nungga, Lelamase, Mande, Rabangodu Selatan, Penatoi,Rabadompu, Kendo, Jatiwangi,Dodu	5	Unit	59.975.000	DAU
						Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		5	Unit	39.734.800	DAU
3	25	3.25.00.00.01	03	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kota Bima	2	dokumen	10.559.800	DAU
3	25	3.25.00.00.01	03	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Bima	30	Orang	15.580.000	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**05**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan**		**3,40**	**%**	**467.939.000**	
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**05**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil**	**Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang terbit**	**Kota Bima**	**4**	**Dokumen**	**306.071.000**	**DAU**

3	25	3.25.00.00.01	05	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kota Bima	4	Dokumen	306.071.000	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**05**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan**	**Kota Bima**	**60**	**Unit Usaha**	**70.464.000**	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	05	2.02	01	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Bima	60	Unit Usaha	70.464.000	DAU
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**05**	**2.03**		**Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia**	**Kota Bima**	**1500**	**Ton**	**91.404.000**	**DAU**
3	25	3.25.00.00.01	05	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	1500	Ton	56.775.000	DAU
3	25	3.25.00.00.01	05	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kec. R. Barat, Kec. Asakota, Kec. Raba	3	Pelaku Usaha	34.629.000	DAU

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Sasaran dan Program / Kegiatan

No	Sasaran PD	Nama Program / Kegiatan
1	-.Meningkatnya Produksi Perikanan	Program Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
		Program Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
		Program Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
		Program Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	-.Meningkatnya daya saing produk perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
		Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	-.Meningkatnya kualitas masyarakat kelautan dan perikanan	Program Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Bima

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Ket
1	Program pengembangan budidaya perikanan	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	70.790.000	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	9.379.900	
		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	12.000.000	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
		Penyediaan Data dan Informasi	12.000.000	

		Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.975.000	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.734.800	
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.559.800	
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	15.580.000	
2	Program pengembangan perikanan tangkap	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	120.147.000	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	62.108.000	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	4.837.000	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	5.702.000	
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	7.043.000	
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.463.000	
3	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu)	306.071.000	

		Daerah Kabupaten/Kota		
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		
		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	70.464.000	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	56.775.000	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.629.000	

NAMA SKPD :

DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KOTA BIMA

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN TAHUN 2026	
									TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3	**25**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
3	**25**	**3.25.00.00.01**				**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**5.704.928.875,00**				**6.262.221.762,50**
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Presentase Kualitas Penyajian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**100 %**	**4.734.388.375,00**	**DAU**	**Kota Bima**	**100 %**	**5.207.827.212,50**
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**10 dokumen**	**30.831.000,00**	**DAU**	**Kota Bima**	**10 dokumen**	**33.914.100,00**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	2 dokumen	4.075.000,00	DAU	Kota Bima	1 dokumen	4.482.500,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	Kota Bima	1 dokumen	3.890.000,00	DAU	Kota Bima	1 dokumen	4.279.000,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Bima	1 dokumen	3.895.000,00	DAU	Kota Bima	1 dokumen	4.284.500,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	Kota Bima	1 dokumen	5.000.000,00	DAU	Kota Bima	1 dokumen	5.500.000,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunanan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Kota Bima	1 dokumen	4.112.000,00	DAU	Kota Bima	1 dokumen	4.523.200,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	2 dokumen	5.000.000,00	DAU	Kota Bima	2 dokumen	5.500.000,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	2 dokumen	4.859.000,00	DAU	Kota Bima	2 dokumen	5.344.900,00

3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan**	**Kota Bima**	**15**	**dokumen**	**3.656.438.385,00**	**DAU**	**Kota Bima**	**15**	**dokumen**	**4.022.082.223,50**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	Kota Bima	34	Orang	3.466.136.085,00	DAU	Kota Bima	34	Orang	3.812.749.693,50
3	25	3.25.00.00.01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	12	bulan	153.200.000,00	DAU	Kota Bima	12	dokumen	168.520.000,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.02	05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Bima	1	dokumen	10.472.300,00	DAU	Kota Bima	1	dokumen	11.519.530,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Bima	2	dokumen	26.630.000,00	DAU	Kota Bima	2	dokumen	29.293.000,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.05**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**	**Kota Bima**	**50**	**Orang**	**20.000.000,00**	**DAU**	**Kota Bima**	**50**	**Orang**	**22.000.000,00**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	Kota Bima	50	Orang	20.000.000,00	DAU	Kota Bima	50	Orang	22.000.000,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**80007**	**Lembar**	**250.441.000,00**	**DAU**	**Kota Bima**	**80007**	**Lembar**	**275.485.100,00**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan perelengkapan kantor	Kota Bima	7	Unit	10.241.000,00	DAU	Kota Bima	7	Unit	11.265.100,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan	Kota Bima	80000	Lembar	10.200.000,00	DAU	Kota Bima	80000	Lembar	11.220.000,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	30	Orang	230.000.000,00	DAU	Kota Bima	30	Orang	253.000.000,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.07**		**Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia**	**Kota Bima**	**4**	**Unit**	**100.105.000,00**	DAU	Kota Bima	**4**	**Unit**	**110.115.500,00**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Kota Bima	4	Unit	100.105.000,00	DAU	Kota Bima	4	Unit	110.115.500,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Permerintah Daerah**	**Kota Bima**	**3**	**Keg**	**67.967.990,00**	**DAU**	**Kota Bima**	3	Keg	**74.764.789,00**
3	25	3.25.00.00.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim Selama 1 Tahun	Kota Bima	500	Surat	22.921.500,00	DAU	Kota Bima	500	Surat	25.213.650,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	12	Bulan	45.046.490,00	DAU	Kota Bima	12	Bulan	49.551.139,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang di perlihara**	**Kota Bima**	**40**	**Unit**	**608.605.000,00**	**DAU**	**Kota Bima**	**40**	**Unit**	**669.465.500,00**

3	25	3.25.00.00.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak	Kota Bima	19	Unit	171.570.000,00	DAU	Kota Bima	19	Unit	188.727.000,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Kota Bima	20	Unit	23.540.000,00	DAU	Kota Bima	20	Unit	25.894.000,00
3	25	3.25.00.00.01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	Kota Bima	1	Unit	413.495.000,00	DAU	Kota Bima	1	Unit	454.844.500,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	Kota Bima	**3,02**	**%**	**272.562.000,00**	DAU dan DAK	Kota Bima	**3, 02**	**%**	**299.818.200,00**
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia**	**Kota Bima**	**6**	**Unit**	**250.147.000,00**	DAU dan DAK	Kota Bima	**6**	**Unit**	**275.161.700,00**
3	25	3.25.00.00.01	02	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Penunjang Perikanan Tangkap	Melayu, Dara, Tanjung, Ule, Paruga, Kolo	5	Unit	120.147.000,00	DAU dan DAK	Kota Bima	5	Unit	132.161.700,00
3	25	3.25.00.00.01	02	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Melayu, Dara, Tanjung, Ule, Paruga, Kolo	1	Unit	130.000.000,00	DAU dan DAK	Melayu, Dara, Tanjung, Ule, Paruga, Kolo	1	Unit	143.000.000,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Nelayan dan Unit Usaha yang diberdayakan**	**Kota Bima**	**23**	**Kelompok**	**16.952.000,00**	DAU	**Kota Bima**	**23**	**Kelompok**	**18.647.200,00**
3	25	3.25.00.00.01	02	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok Nelayan Kecil yang fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	Melayu, Dara, Tanjung, Paruga, Kolo,Ule	25	Orang	4.837.000,00	DAU	Melayu, Dara, Tanjung, Paruga, Kolo,Ule	25	Kelompok	5.320.700,00
3	25	3.25.00.00.01	02	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Melayu, Dara, Tanjung, Paruga, Kolo, Ule	10	Kelompok	5.072.000,00	DAU	Melayu, Dara, Tanjung, Paruga, Kolo, Ule	10	Kelompok	5.579.200,00
3	25	3.25.00.00.01	02	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Rasanae Barat, Asakota	5	Unit Usaha	7.043.000,00	DAU	Rasanae Barat, Asakota	5	Kelompok	7.747.300,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah**	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau,	Kota Bima	1	dokumen	**5.463.000,00**			**1**	**dokumen**	**6.009.300,00**

						Kabupaten/Kota	Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang memiliki izin								
3	25	3.25.00.00.01	02	2.04	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Melayu, Dara, Tanjung, Paruga, Ule, Kolo	1	dokumen	5.463.000,00	DAU	Melayu, Dara, Tanjung, Paruga, Ule, Kolo	50	Unit	6.009.300,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya		1,6	**%**	**230.039.500,00**	**DAU**	**Kota Bima**	1,60	**%**	**239.843.450,00**
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah pembudidaya ikan, luas lahan, produksi ikan, sarana dan prasarana yang dikelola**	**Kota Bima**	**15**	**Kelompok**	**92.169.900,00**	**DAU**	**Kota Bima**	**15**	**Kelompok**	**88.186.890,00**
3	25	3.25.00.00.01	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kota Bima	5	Klp	70.790.000,00	DAU	Kota Bima	5	Klp	77.869.000,00
3	25	3.25.00.00.01	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Jatiwangi, Nungga Dodu Mande Santi	5	Kelompok	9.379.900,00	DAU	Jatiwangi, Nungga Dodu Mande Santi	5	Kelompok	10.317.890,00
3	25	3.25.00.00.01				Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	Jatiwangi, Nungga Dodu Mande Santi	5	klp	12.000.000,00	DAU		5	klp	13.200.000,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**03**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jatiwangi, Nungga Dodu Mande Santi	10	Unit	**137.869.600,00**	**DAU**	**Kota Bima**	**10**	**Unit**	**151.656.560,00**
3	25	3.25.00.00.01	03	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jatiwangi, Nungga Dodu Mande Santi	4	Dokumen	12.000.000,00	DAU	Jatiwangi, Nungga Dodu Mande Santi	**4**	**Dokumen**	13.200.000,00

3	25	3.25.00.00.01	03	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Melayu, Dara, Paruga, Nungga, Lelamase, Mande, Rabangodu Selatan, Penatoi,Rabadompu, Kendo, Jatiwangi,Dodu	5	Unit	59.975.000,00	DAU/DAK	Melayu, Dara, Paruga, Nungga, Lelamase, Mande, Rabangodu Selatan, Penatoi,, Rabadompu, Kendo, Jatiwangi,Dodu	5	Unit	65.972.500,00
3	25	3.25.00.00.01	03	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Melayu, Dara, Paruga, Nungga, Lelamase, Mande, Rabangodu Selatan, Penatoi,Rabadompu, Kendo, Jatiwangi,Dodu	5	Unit	39.754.800,00	DAU	Melayu, Dara, Paruga, Nungga, Lelamase, Mande, Rabangodu Selatan, Penatoi,, Rabadompu, Kendo, Jatiwangi,Dodu	5	Unit	43.730.280,00
3	25	3.25.00.00.01	03	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kota Bima	2	dokumen	10.559.800,00	DAU	Kota Bima	2	dokumen	11.615.780,00
3	25	3.25.00.00.01	03	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Bima	30	Orang	15.580.000,00	DAU	Kota Bima	30	Orang	17.138.000,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**05**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan**		**3,4**	**%**	**467.939.000,00**			**3,4**	**%**	**514.732.900,00**
							Persentase Konsumsi Ikan (AKI)		**8,28**	**%**				**8,28**	**%**	
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**05**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil**	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang terbit	Kota Bima	6	Dokumen	**306.071.000,00**	DAU	Kota Bima	**6**	**Dokumen**	**336.678.100,00**
3	25	3.25.00.00.01	05	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kota Bima	4	Dokumen	306.071.000,00	DAU	Kota Bima	4	Dokumen	336.678.100,00

3	**25**	**3.25.00.00.01**	**05**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan	Kota Bima	60	Unit Usaha	**70.464.000,00**	DAU	Kota Bima	60	Upi/Pasar	**77.510.400,00**
3	25	3.25.00.00.01	05	2.02	2	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapat Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Bima	60	Unit Usaha	70.464.000,00	DAU	Kota Bima	60	Unit Usaha	77.510.400,00
3	**25**	**3.25.00.00.01**	**05**	**2.03**		**Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia	Kota Bima	1500	Ton	**91.404.000,00**	DAU	Kota Bima	**1500**	**Ton**	**100.544.400,00**
3	25	3.25.00.00.01	05	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	1500	Ton	56.775.000,00	DAU	Kota Bima	1500	Ton	62.452.500,00
3	25	3.25.00.00.01	05	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kec. R. Barat, Kec. Asakota, Kec. Raba	6	Pelaku Usaha	34.629.000,00	DAU	Kec. R. Barat, Kec. Asakota, Kec. Raba	6	Pelaku Usaha	38.091.900,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima. Dalam melaksanakan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2025 ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholder*s sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Raba – Bima, 26 April 2024

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan Kota Bima

Jamaludin, SP

Pembina /IVa

NIP. 19681231 200312 1 071

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat karunia-Nya, tim penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dapat menyelesaikan "Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2025".

Renja ini secara garis besar mengupas tentang tujuan, sasaran, program & kegiatan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima pada tahun 2025.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Renja ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah Kota Bima maupun masyarakat, serta DPRD dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Kota Bima, April 2024
Kepala Dinas Koperindag Kota Bima,

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Ir. TAFSIR
NIP. 19641014 199303 1 008

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah……..……...9

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lu..... .12

2.1.2 Capaian Kinerja 2025 Berdasarkan Bidang Urusan 16

2.1.3 Capaian Renstra Perangkat Daerah.....19

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 25

2.4 Isu Strategis Daerah.....32

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 66

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 67

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) OPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja OPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja OPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja OPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan;dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
6. Progam/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima Tahun 2025 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2024-2026 dan mengacu pada RKPD Kota Bima Tahun

2025. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima tahun 2025 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan perioritas daerah. Benang merah Rencana Kerja OPD sebagai penuangan Rencana Strategis OPD adalah bagaimana mendorong pembangunan Kota Bima dalam rangka mencapai Visi dan Misinya. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bima adalah: *"Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri"*

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima menetapkan 3 (tiga) Misi yang akan menjadi pegangan dalam mengembangkan atau merumuskan langkah - langkah selanjutnya sebagai berikut :

1. Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang berbasis pada potensi wilayah kelurahan ("One Village One Product");
2. Penataan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar serta memiliki kekhasan khusus dalam menjual produk;
3. Mengembangkan "1000" Wirausaha Mandiri Baru ;
4. Meningkatkan Pendampingan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu menjadi usaha yang professional, mandiri dan maju melalui Pelatihan, magang, Bantuan alat, Akses modal usaha dan fasilitasi pemasaran;
5. Memfasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
6. Mempercepat pembentukan BUMD Pasar dan Asosiasi Pedagang;
7. Memberikan ruang yang memadai, jaminan kepastian dan kemudahan usaha bagi PKL.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir degan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23) Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178));
26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
30) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
31) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor);
32) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88).

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja merupakan penjabaran dari sasaran & program yang telah ditetapkan rencana strategi, penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan & kebijakan anggaran. Tujuan utama dari rencana kerja adalah untuk :

a. Menghubungkan rencana strategis, action plan & perencanaan operasional terperinci;
b. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program / kegiatan;
c. Memudahkan proses pengukuran kinerja;
d. Membantu monitoring & evaluasi kinerja;
e. Membantu menetapkan tujuan kinerja pada periode yang akan datang.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, Dasar Hukum Penyusunan Maksud dan Tujuan serta Sistematika RKPD.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TahunLalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima pada Tahun 2023 mengelola anggaran belanja sebesar Rp. 10.162.302.136,00. realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 9.621.986.505,00 atau 94.68 % dari pagu anggaran. Sedangkan pagu anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima yang bersumber dari dana APBD Kota Bima Tahun 2022 berjumlah sebesar Rp. 11.252.515.085,00 Sampai dengan 31 Desember 2022, realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 8.369.545.629,00 atau 74.38 %. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran belanja langsung Tahun 2023 sebesar Rp. 10.162.302.136,00. maka pada Tahun 2023 terjadi Penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 1,090.212.949.00

Pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kota Bima.

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima TA. 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mencakup 6 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.229.779.002,00
2. Program dan kegiatan urusan Koperasi yang membiayai 5 program dan 6 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 967.937.300
3. Program dan kegiatan urusan Pilihan Perindustrian mencakup 2 program dan 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.400.808.250,00
4. Program dan kegiatan urusan Pilihan Perdagangan mencakup 2 program dan 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 563.777.584,00

Untuk lebih jelasnya alokasi anggaran beserta realisasi per program TA. 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1.1.1
Ringkasan Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2023

KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASAI		LEBIH KURANG	
			RP	%	RP	%
1	2	4	9	10	11	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.197.716.302,00	7.817.572.982,00	95,36	380.143.320,00	4,64
2-17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.197.716.302,00	7.817.572.982,00	95,36	380.143.320,00	4,64
2-17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.229.779.002,00	6.911.248.511,00	95,59	318.530.491,00	4,41

2-17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**83.965.000,00**	**57.623.000,00**	68,63	26.342.000,00	31,37
2-17.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.869.000,00	15.419.000,00	81,72	3.450.000,00	18,284
2-17.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	18.538.000,00	8.918.000,00	48,11	9.620.000,00	51,893
2-17.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.114.000,00	6.314.000,00	41,78	8.800.000,00	58,224
2-17.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.664.000,00	5.192.000,00	53,73	4.472.000,00	46,275
2-17.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.780.000,00	21.780.000,00	100,00	-	-
2-17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.524.672.162,00**	**4.366.608.339,00**	**88,96**	**158.063.823,00**	**3,49**
2-17.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.393.133.162,00	4.239.109.339,00	96,49	154.023.823,00	3,506
2-17.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	117.960.000,00	113.920.000,00	96,58	4.040.000,00	3,425
2-17.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.390.000,00	8.390.000,00	100,00	-	-
2-17.01.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.189.000,00	5.189.000,00	100,00	-	-
2-17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.280.688.800,00**	**1.264.575.137,00**	**53,14**	**16.113.663,00**	**1,26**
2-17.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.130.500,00	38.130.500,00	100,00	-	-
2-17.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.143.500,00	216.111.000,00	99,98	32.500,00	0,02
2-17.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	295.673.300,00	291.246.004,00	98,50	4.427.296,00	1,50
2-17.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.800.000,00	36.300.000,00	96,03	1.500.000,00	3,97
2-17.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.859.500,00	45.845.000,00	99,97	14.500,00	0,03
2-17.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	647.082.000,00	636.942.633,00	98,43	10.139.367,00	1,57
2-17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**130.790.000,00**	**130.228.000,00**	**98,28**	**562.000,00**	0,43
2-17.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.790.000,00	130.228.000,00	99,57	562.000,00	0,43
2-17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**949.344.240,00**	**839.437.017,00**	**68,31**	**109.907.223,00**	11,58
2-17.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108.480.000,00	107.350.000,00	98,96	1.130.000,00	1,04
2-17.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.864.240,00	95.437.017,00	65,88	49.427.223,00	34,12
2-17.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.100.000,00	23.075.000,00	99,89	25.000,00	0,11
2-17.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	672.900.000,00	613.575.000,00	91,18	59.325.000,00	8,82
2-17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**260.318.800,00**	**252.777.018,00**	**49,43**	**7.541.782,00**	2,90
2-17.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.443.800,00	127.905.018,00	94,43	7.538.782,00	5,57
2-17.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.875.000,00	124.872.000,00	100,00	3.000,00	0,00
2-17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**33.025.000,00**	**31.100.000,00**	**10,87**	**1.925.000,00**	**5,83**
2-17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	33.025.000,00	31.100.000,00	94,17	1.925.000,00	5,83
2-17.03.2.01.001	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	33.025.000,00	31.100.000,00	94,17	1.925.000,00	5,83

2-17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**268.812.700,00**	**262.264.500,00**	**97,56**	**6.548.200,00**	**2,44**
2-17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	268.812.700,00	262.264.500,00	97,56	6.548.200,00	2,44
2-17.05.2.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	268.812.700,00	262.264.500,00	97,56	6.548.200,00	2,44
2-17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**33.915.000,00**	**27.335.000,00**	**80,27**	**6.580.000,00**	**19,40**
2-17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	33.915.000,00	27.335.000,00	80,60	6.580.000,00	19,40
2-17.06.2.01.001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	33.915.000,00	27.335.000,00	80,60	6.580.000,00	19,40
2-17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**357.076.300,00**	**319.877.971,00**	**89,58**	**37.198.329,00**	**10,42**
2-17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	357.076.300,00	319.877.971,00	89,58	37.198.329,00	10,42
2-17.07.2.01.001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	17.776.000,00	14.265.000,00	80,25	3.511.000,00	19,75
2-17.07.2.01.003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	29.159.400,00	-	-	29.159.400,00	100,00
2-17.07.2.01.004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	39.963.600,00	37.796.800,00	94,58	2.166.800,00	5,42
2-17.07.2.01.006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	270.177.300,00	267.816.171,00	99,13	2.361.129,00	0,87
2-17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**275.108.300,00**	**265.747.000,00**	**96,60**	**9.361.300,00**	**3,40**
2-17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	275.108.300,00	265.747.000,00	96,60	9.361.300,00	3,40
2-17.08.2.01.001	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	275.108.300,00	265.747.000,00	96,60	9.361.300,00	3,40
			0		0	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**1.964.585.834,00**	**1.804.413.523,00**	91,85	**160.172.311,00**	
3.3	**PERDAGANGAN**	**563.777.584,00**	**427.231.853,00**	**75,78**	**136.545.731,00**	**24,22**
3-30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**45.900.000,00**	**42.090.200,00**	**91,70**	**3.809.800,00**	**8,30**
3-30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	45.900.000,00	42.090.200,00	91,70	3.809.800,00	8,30
3-30.03.2.01.001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	45.900.000,00	42.090.200,00	91,70	3.809.800,00	8,30
3-30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**390.537.584,00**	**304.265.603,00**	**77,91**	**86.271.981,00**	**22,09**
3-30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	390.537.584,00	304.265.603,00	77,91	86.271.981,00	22,09
3-30.04.2.01.003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	390.537.584,00	304.265.603,00	77,91	86.271.981,00	22,09
3-30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**127.340.000,00**	**80.876.050,00**	**63,51**	**46.463.950,00**	**36,49**
3-30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	127.340.000,00	80.876.050,00	63,51	46.463.950,00	36,49
3-30.06.2.01.001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	127.340.000,00	80.876.050,00	63,51	46.463.950,00	36,49

3.31	**PERINDUSTRIAN**	**1.400.808.250,00**	**1.377.181.670,00**	**98,31**	**23.626.580,00**	**1,69**
3-31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**1.302.728.250,00**	**1.279.101.670,00**	**98,19**	**23.626.580,00**	**1,81**
3-31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.302.728.250,00	1.279.101.670,00	98,19	23.626.580,00	1,81
3-31.02.2.01.003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	-	-
3-31.02.2.01.005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	702.728.250,00	679.101.670,00	96,64	23.626.580,00	3,36
3-31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**98.080.000,00**	**98.080.000,00**	**33,03**	**-**	**-**
3-31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	98.080.000,00	98.080.000,00	33,03	-	-
3-31.04.2.01.002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	98.080.000,00	98.080.000,00	33,03	-	-
JUMLAH		***10.162.302.136,00***	***9.621.986.505,00***	**94,68**	***540.315.631,00***	***5,32***

2.1.2 Capaian Kinerja 2023 Berdasarkan Bidang Urusan

a. Sekretariat

Anggaran untuk mendukung 1 program dan 6 kegiatan pada Sekretariat Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 sebesar Rp. 7.229.779.002,00**,** sedangkan realisasi sebesar Rp. 6.911.248.511,00 atau 95,59 % seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 2.1.2.1
Realisasi Anggaran Sekretariat
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan T.A 2023

NO	PROGRAM/	KEGATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***		**Eksistensi Dinas terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**7.229.779.002,00**	**6.911.248.511,00**	**94,56**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan keuangan dengan indeks SAKIP**	**100 %**	**100 %**	**83.965.000,00**	**57.623.000,00**	68,63
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	2 Dokumen	18.869.000,00	15.419.000,00	81,72
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023	2 Dokumen	1 Dokumen	18.538.000,00	8.918.000,00	48,11
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2023	1 Dokumen	1 Dokumen	15.114.000,00	6.314.000,00	41,78
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	1 Dokumen	2 Dokumen	9.664.000,00	5.192.000,00	53,73
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKIP dan LPPD	2 Dokumen	2 Dokumen	21.780.000,00	21.780.000,00	100,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Administrasi keuangan Perangkat Daerah***	**100 %**	**100 %**	**4.524.672.162,00**	**4.366.608.339,00**	**96,51**

		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang memperoleh Gaji dan Tunjangan	42 Orang	42 Orang	4.393.133.162,00	4.239.109.339,00	96,49
		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah PPTK / Pejabat Penata usaha Keungan dan Pembantu Administrasi Keuangan	8 Orang	8 Orang	117.960.000,00	113.920.000,00	96,58
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen/ Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	8.390.000,00	8.390.000,00	100,00
		- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen/ Laporan Keuangan Prognesis	1 Dokumen	1 Dokumen	5.189.000,00	5.189.000,00	100,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100 %**	**100 %**	**1.280.688.800,00**	**1.264.575.137,00**	**98,74**
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kopenen Instalasi Listrik yang tersedia	67 Komponen Listrik	67 Komponen Listrik	38.130.500,00	38.130.500,00	100,00
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64 Jenis Peralatan Kantor	64 Jenis Peralatan Kantor	216.143.500,00	216.111.000,00	99,98
		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Julah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	205.432 lembar	197.025 lembar	295.673.300,00	291.246.004,00	98,50
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	37.800.000,00	36.300.000,00	96,03
		- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Kali	25 Kali	45.859.500,00	45.845.000,00	99,97
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd	33 Kali	32 Kali	647.082.000,00	636.942.633,00	98,43

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**130.790.000,00**	**130.228.000,00**	**99,57**
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	27 Unit Kursi Laptop/ Printer	27 Unit Kursi Laptop/ Printer	130.790.000,00	130.228.000,00	99,57
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**949.344.240,00**	**839.437.017,00**	**88,42**
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Tenaga Surat Menyurat (Jasa Tenaga Kontrak)	12 Orang/ Tenaga Sukarela	12 Orang/ Tenaga Sukarela	108.480.000,00	107.350.000,00	98,96
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kantor/ Bangunan	12 Bulan	12 Bulan	144.864.240,00	95.437.017,00	65,88
		- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	19 Unit	19 Unit	23.100.000,00	23.075.000,00	99,89
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor (Jasa Tenaga Kontrak)	70 Orang/ Tenaga Sukarela	70 Orang/ Tenaga Sukarela	672.900.000,00	613.575.000,00	91,18
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**260.318.800,00**	**252.777.018,00**	**97,10**
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	135.443.800,00	127.905.018,00	94,43
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	124.875.000,00	124.872.000,00	100,00

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Administrasi keuangan Perangkat Daerah***	**100**	**%**	**96,78**	**%**	**3.475.769.266,00**	**3.364.011.234,00**	**96,78**
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang memperoleh Gaji dan Tunjangan	38	Orang	38	Orang	3.350.469.266,00	3.238.711.234,00	96,66
		3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah PPTK / Pejabat Penata usaha Keungan dan Pembantu Administrasi Keuangan	8	Orang	8	Orang	117.766.000,00	117.766.000,00	100,00
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen/ Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen	1	Dokumen	4.311.000,00	4.311.000,00	100,00
		5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen/ Laporan Keuangan Prognesis	1	Dokumen	1	Dokumen	3.223.000,00	3.223.000,00	100,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100**	**%**	**88,96**	**%**	**704.548.760,00**	**626.770.967,00**	**88,96**
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	67	Komponen Listrik	67	Komponen Listrik	15.466.600,00	15.466.600,00	100,00
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang / Jenis Barang Keperluan Kantor	64	Jenis Peralatan Kantor	64	Jenis Peralatan Kantor	159.153.440,00	158.840.000,00	99,80
		3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	188.176	lembar	188.000	lembar	197.022.700,00	196.980.400,00	99,98

		4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media	4	Media Masa	4	Media Masa	58.320.000,00	49.700.000,00	85,22
		5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum tamu	25	Kali			10.780.000,00	10.770.000,00	99,91
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kunjungan/ Konsultasi/ Koordinasi Keluar Daerah	31	Kali	29	Kali	263.806.020,00	195.013.967,00	73,92
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**105.213.200,00**	**103.415.500,00**	**98,29**
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23	Unit Kursi Laptop/ Printer	23	Unit Kursi Laptop/ Printer	105.213.200,00	103.415.500,00	**98,29**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**85,34**	**%**	**903.481.980,00**	**771.068.117,00**	**85,34**
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa Surat Menyurat (Tenaga Sukarela) yang dibayarkan	12	Orang/ Tenaga Sukarela	12	Orang/ Tenaga Sukarela	108.288.000,00	99.000.000,00	91,42
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Dana untk jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	12	Bulan	190.517.980,00	148.758.117,00	78,08
		3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang yang diperbaiki/ diservice	19	Unit	19	Unit	17.060.000,00	17.060.000,00	100,00
		4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanana Umum Kantor (Tenaga Sukarela) yang dibayarkan	70	Orang/ Tenaga Sukarela	70	Orang/ Tenaga Sukarela	587.616.000,00	506.250.000,00	86,15

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**93,21**	**%**	**643.027.183,00**	**599.390.659,18**	**93,21**

		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Barang yang diperbaiki/ diservice	5 Unit	5 Unit	117.296.000,00	79.629.376,00	**67,89**
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	525.731.183,00	519.761.283,18	**98,86**
TOTAL				- -	- -	- -	***5.877.966.389,00***	***5.503.832.477,18***	***93,63***

b. Bidang Koperasi dan UMKM

Anggaran untuk mendukung 4 program dan 5 kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 sebesar Rp. ***526.904.510,00*** sedangkan realisasi sebesar Rp. ***510.945.686,00*** atau 96,97 % seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 2.1.2.2
Realisasi Anggaran Bidang Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan T.A 2023

NO	PROGRAM/	KEGATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		**Pesentase Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi**	**75,35 %**	**89,57 %**	**33.025.000,00**	**31.100.000,00**	**97,84**
		- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	33.025.000,00	31.100.000,00	
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	103 Usaha Koperasi	103 Usaha Koperasi	33.025.000,00	31.100.000,00	97,84
3	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**Persentase Peningkatan Pengurus/ Keanggotaan Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**45,51 %**	**27,66 %**	**268.812.700,00**	**262.264.500,00**	**97,19**

		- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan/ diklat	100 %	100 %	268.812.700,00	262.264.500,00	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus/ Keanggotaan Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Pengurus/ Keanggotaan Koperasi	60 Pengurus/ Keanggotaan Koperasi	268.812.700,00	262.264.500,00	97,19
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		**Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha**	**100 %**	**79,61 %**	**33.915.000,00**	**58.609.500,00**	**96,22**
		- **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**100 %**	**100 %**	33.915.000,00		
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha	82 Pelaku Usaha Mikro	82 Unit Koperasi	33.915.000,00	16.164.500,00	99,99

	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		**Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro yang memiliki NIB**	**25,58 %**	**23,58 %**	**357.076.300,00**	**348.977.971,00**	**97,73**
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan	**Persentase tersedianya data Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan**	**100 %**	**100 %**	357.076.300,00	348.977.971,00	97,73
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen/Data Usaha Mikro	1 Dokumen	1 Dokumen	17.776.000,00	14.265.000,00	80,25
			Jumlah Usaha Mikro yang di input kedalam Sistim data Online (ODS)	150 Usaha Mikro	150 Usaha Mikro	29.159.400,00	29.100.000,00	99,80
			Jumlah Usaha Mikro yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	39.963.600,00	37.796.800,00	94,58
			Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	120 Pelaku UMKM yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan	120 Pelaku UMKM yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan	270.177.300,00	267.816.171,00	99,13

5	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		**Persentase Peningkatan UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran**	**10,13 %**	**10,13 %**	**275.108.300,00**	**265.747.000,00**	**96,60**
		- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pemasaran bagi UMKM**	100 %	100 %	275.108.300,00	265.747.000,00	96,60
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	*Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan Fasilitasi Pemasaran*	90 Pelaku Usaha Mikro	90 Pelaku Usaha Mikro	275.108.300,00	265.747.000,00	96,60
JUMLAH						***967.937.300,00***	***966.698.971,00***	**99,87**

c. Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Anggaran untuk mendukung 5 program dan 11 kegiatan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.753.186.150, sedangkan realisasi sebesar Rp. 1.208.498.200 atau 68,93 % seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 2.1.2.3
Realisasi Anggaran Bidang Perindustrian
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan T.A 2023

NO	PROGRAM/	KEGATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**Persentase perkembangan Kelompok Industri Kecil Menengah**	**100 %**	**100 %**	**1.302.728.250,00**	**1.279.101.670,00**	**98,19**
		- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kot	Persentase Terselenggaranya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					98,19
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Organisasi yang mendapat Hibah	*1 Organisasi (Degranasda)*	*1 Organisasi (Degranasda)*	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Kelompok Industri Kecil Menengah yang mendapat bantuan peralatan Usaha	*198 Industri Kecil Menengah*	*198 Industri Kecil Menengah*	702.728.250,00	679.101.670,00	96,64
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI**		**Persentase Ketersedian Dokumentasi Rencana Pembangunan Industri**	**100 %**	**100**	**98.080.000,00**	**98.080.000,00**	**100,00**

	NASIONAL							
		- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyusunan data IKM dan Sentra serta Profile IKM dan Provil Sentral IKM					
		- Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Tersedianya data dan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	98.080.000,00	98.080.000,00	100,00
JUMLAH						***874.555.600,00***	***823.641.000,00***	**98,31**

Tabel. 2.1.2.4
Realisasi Anggaran Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan T.A 2023

1	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**		**Persentase Capaian Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan**	**100 %**	**100 %**	**45.900.000,00**	**42.090.200,00**	**91,70**
		- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						
		- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang memadai	1 Unit	1 Unit	45.900.000,00	42.090.200,00	91,70
2	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya**	**100 %**	**100 %**	**390.537.584,00**	**304.265.603,00**	**77,91**
		- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terkendalinya Barang Kebutuhan Pokok	*100 %*	*100 %*	*390.537.584*	*304.265.603*	
		- Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	*Jumlah Pelaku Usaha yang menjual Barang Kadarluasa*	*12 Pelaku Usaha Perdagangan*	*12 Pelaku Usaha Perdagangan*	*182.097.584*	*155.825.603*	85,5726

			Jumlah Kios Pasar Milik Pemerintah yang dibina dan diawasi	*441*	*Kios Pasar Milik Pemerintah*	*441*	*Kios Pasar Milik Pemerintah*	*48.600.000*	*38.600.000*	79,4239
			Jumlah Penyalur dan Pangkalan LPG yang di awasi	*348*	*Pangkalan LPG 3 Kilogram Bersubsidi*	*348*	*Pangkalan LPG 3 Kilogram Bersubsidi*	*54.000.000*	*34.000.000*	62,963
			Jumlah Penyalu Pupuk Bersubsidi yang di Awasi	*48*	*Agen dan Pengecer*	*48*	*Agen dan Pengecer*	*54.000.000*	*34.000.000*	62,963
			Ketersediaan informasi Stabilitas Harga Bahan Pokok	*360*	*Informasi Ketersediaan Bahan Pokok*	*360*	*Informasi Ketersediaan Bahan Pokok*	*51.840.000*	*41.840.000*	80,7099
3	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera ulang dalam tahun berjalan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**127.340.000,00**	**80.876.050,00**	**63,51**
		- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang								
			Jumlah UTTP Bertanda Tera (SPBU)	*57*	*Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP)*	*57*	*Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP)*	5.940.000,00	5.940.000,00	**100,00**
			Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan	*127*	*Alat Ukur Takar (Timbangan)*	*127*	*Alat Ukur Takar (Timbangan)*	*16.200.000*	*16.200.000*	**100,00**

			Jumlah Peralatan Sidang Tera yang dikalibrasi Ulang	*120 Peralatan Sidang Tera*	*120 Peralatan Sidang Tera*	*105.200.000*	*58.736.050*	**55,83**
JUMLAH						***563.777.584,00***	***427.231.853,00***	**75,7802**

2.1.3 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima Tahun 2023 diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Pengukuran kinerja tersebut membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. Pembahasan berikut menunjukkan pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikator kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja.

Dalam tugasnya Dinas Koperindag mempunyai beberapa tujuan yang terdapat pada bidang Koperasi dan UMKM serta Perindustrian dan Perdagangan. Tujuan tersebut dicapai melalui capaian kinerja Dinas Koperindag yang meliputi pencapaian sasaran strategis. Adapun Dinas Koperindag memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yang terdapat pada bidang Koperasi dan UMKM serta bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Kota Bima sebagai kota perdagangan dan jasa sangat didukung oleh pelaku UMKM sebagai komponen utama pengerak ekonomi. Untuk itu perlu terus didorong dan ditingkatkan pembinaan terhadap pelaku UMKM terutama dalam hal SDM, bantuan peralatan dan modal guna meningkatkan kinerja dan kualitas kelembagaan usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Peningkatan kinerja dan kualitas kelembagaan usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan pencapaian sasaran strategis I.

1. Pencapaian Sasaran dari Strategis I

Sasaran strategis I yang merupakan Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima adalah meningkatnya kinerja dan kualitas kelembagaan usaha Koperasi dan UMKM, terdiri 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya pada tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Pada Pencapaian Strategis I Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Kelembagaan Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	13,25%	19,23%	117.67%

2. Pencapaian Sasaran dari Strategis II

Sasaran Strategi II adalah Meningkatnya jumlah dan Kualitas Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Realisasi pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah melebihi dari target yang direncanakan, ini menandakan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas baik berupa kegiatan pelatihan maupun sosialisasi diterapkan dengan baik oleh masyarakat.

sektor perindustrian sangat kecil dibandingkan pertumbuhan sektor perdagangan. Sehingga IKM yang merupakan sektor utama di perindustrian di kota Bima sangat memerlukan pembinaan yang berkelanjutan oleh dinas yang terkait. Pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi usaha industri dan akan berdampak terhadap pertumbuhan sektor perindustrian.

Meningkatnya investasi usaha industri merupakan pencapaian sasaran strategis II.

Tabel.3.2
Pengukuran Kinerja Pada Pencapaian Strategis II Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya pertumbuhan dan Kualitas Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	3.40%	8,66%	%

3. Pencapaian Sasaran dari Strategis III

Pencapaian sasaran strategis III adalah Meningkatnya Investasi Usaha bidang Perindustri dan Perdagangan.

Realisasi pertumbuhan investasi usaha industri melampau dari target yang direncanakan. IKM merupakan sektor utama di perindustrian di kota Bima mendapat perhatian pembinaan yang sangat besar oleh dinas Koperindag kota. Pembinaan ini meningkatkan investasi usaha industri dan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan sektor perindustrian.

Meningkatnya investasi usaha perdagangan. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa masyarakat Kota Bima didukung dengan sarana perdagangan/pasar sebanyak 8 (delapan) pasar sebagai tempat suply/penyediaan barang dan jasa terutama 9 (sembilan) kebutuhan bahan pokok.

Tabel.3.4
Pengukuran Kinerja Pada Pencapaian Strategis III Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Investasi Usaha bidang Perindustri dan Perdagangan	Persentase Peningkatan Investasi Usaha Industri	35,46%	48,23%	%
		Persentase Peningkatan Investasi Usaha Perdagangan	39,10%	40,23%	%

2.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa sub pelaksana baik setingkat bidang maupun seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing sub pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

3.2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, dapat dicapai oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima.

Performance kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel.3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Koperindag
Pada Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022				TAHUN 2023			
		TARGET	TARGET NASIONAL	REALISASI	CAPAIN %	TARGET	TARGET NASIONAL	REALISASI	CAPAIN %
1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	8.15%	-	9.59%	**117.67%**	13,25%	-	19,93%	**150,42**

2	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2.39%	-	3.12%	**130.54%**	3,40%	-	8,66%	**254,71**
3	Persentase Peningkatan Investasi Usaha Industri	1.16%	-	0.12%	**10.34%**	35,46%	-	48,23%	**136,01**
4	Persentase Peningkatan Investasi Usaha Perdagangan	75.37%	-	99.73%	**132.32%**	39,10%	-	40,23%	**102,89**

1. **Sasaran ‘‘Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Kelembagaan Usaha Koperasi” dengan indikator :**

Pada Tahun 2023 pencapaian peningkatan volume usaha koperasi dengan target 13,25%, realisasi 19,93%% dengan capaian kinerja 150,42%

Realisasi capaian melebihi target dikarenakan minat masyarakat untuk berwirausaha sangat besar yang di dukung dengan peran Pemerintah dalam memberikan bantuan bantuan peralatan maupun pembinaan pelatihan untuk UMKM.

2. **Sasaran ‘‘ Meningkatnya Pertumbuhan dan Kualitas Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)” dengan indikator :**

Pada tahun ini peningkatan Pertumbuhan dan Kualitas Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat tinggi. Target yang ditetapkan adalah 3,40% dengan realisasi 8,66% dengan capaian 254,71%.

Tingginya capainya target tahun 2023 ini disebabkan tingginya sumber daya manusia, produksi/operasional, finansial, pemasaran dan kemitraan

3. ***Sasaran ‘‘Meningkatnya Investasi Usaha Industri” dengan indikator :***

Pada tahun ini peningkatan investasi usaha industri tidak terlalu besar. Target yang ditetapkan adalah 35,46 % dengan realisasi 48,23% dengan capaian 136,01%.

Meningkatnya capaian target tahun 2023 ini disebabkan meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah.

4. Sasaran “Meningkatnya Investasi Usaha Perdagangan” dengan indikator :

Pada tahun ini capain investasi usaha perdagangan sebesar 39,10% dari target 40,23% dengan capain persentase sebesar 102,89%.

Capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan dikarenakan kembali bergeliatnya masyarakat dalam berdagang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima adalah sangat baik sesuai dengan target dari 4

indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima tahun 2018-2024.

program. Efisiensi dicapai bila pencapaian program sama atau kurang dari penggunaan anggaran. Apabila penggunaan anggaran melebihi dari pencapaian program bisa disimpulkan bahwa efisiensi tidak tercapai.

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa sebagian dari kinerja Dinas Koperindag mempunyai efisiensi tinggi dapat dilihat dari capaian Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sangat besar dan sebagian lagi mempunyai efisiensi rendah yaitu Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi, Persentase Peningkatan Investasi Usaha Industri dan Persentase Peningkatan Investasi Usaha Perdagangan

Indikator kinerja yang mempunyai efisiensi tinggi merupakan indikator kinerja yang mempunyai capaian kinerja melebihi capaian keuangan. Indikator kinerja investasi usaha industri dan investasi usaha perdagangan memiliki efisiensi tertinggi dikarenakan capaian kinerja melebihi capaian keuangan.

Indikator kinerja yang mempunyai efisiensi rendah merupakan indikator kinerja yang mempunyai capaian keuangan melebihi capaian kinerja. Secara garis besar efisiensi di Dinas Koperindag berpredikat cukup. Ini dikarenakan jumlah indikator kinerja yang efisien dengan yang tidak efisien adalah sama.

Tabel 3.6
Perbandingan antara Capaian Kinerja dan Capaian Keuangan terhadap Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan
1	Meningkatkan Produktivitas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	19,93%	97,48%
		Meningkatnya Pertumbuhan dan Kualitas Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	8,66%	92,64%
		Meningkatnya Investasi Sektor Usaha bidang Perindustri dan Perdagangan	Persentase Peningkatan Investasi Usaha Industri	48,23%	94,18%
			Persentase Peningkatan Investasi Usaha Perdagangan	40,23%	98,31%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perkembangan Kota Bima yang terbentuk pada bulan 10 April 2002 mulai meningkat pesat terutama di bidang perekonomian yang bertumpu pada sektor perdagangan, industri pengolahan serta jasa kemasyarakatan. Berdasarkan data Statistik ketiga sektor ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan pertumbuhan ketiga sektor ini harus dikelola dengan sebaiknya untuk memperoleh dampak yang positif. Selama ini pembangunan perekonomian tidak ditangani secara terencana. Ini dapat kita saksikan pada perkembangan kota-kota di Indonesia. Pemerintah Kota Bima, melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berupaya untuk meminimalisir hal tersebut di atas dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi hingga saat ini untuk dikelompokkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu :

a. Faktor Internal
   - Belum adanya pegawai yang memiliki keahlian yang spesifik dalam pembinaan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
   - Sarana dan prasarana kantor yang masih terbatas.
   - Sarana dan prasarana untuk pembinaan masing-masing bidang belum tersedia.
   - Database Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan belum tersusun secara baik.
   - Pola pembinaan yang tidak berkelanjutan tiap tahunnya dikarenakan belum adanya standar penilaian terhadap pembinaan saat ini. Adapun pola pembinaan yang dilakukan saat ini :
     1. Pembinaan sumber daya manusia
     2. Pembinaan pemanfaatan sumber daya alam lokal
     3. Pembinaan dan pemanfaatan teknologi
     4. Pembinaan/pengembangan dan peningkatan kreativitas dan inovasi
     5. Penyediaan sumber pembiayaan

b. Faktor Eksternal
   - Tumbuhnya wirausaha baru belum didukung oleh penguatan kapasitas yang memadai baik dari aspek lokasi usaha, permodalan, ketrampilan, maupun jaringan dan informasi pemasaran.
   - Masih rendahnya pemanfaatan sumber daya lokal dalam pengembangan industri rumah tangga dan industri kecil menengah.
   - Pengembangan industri olahan berbasis pertanian dan perikanan masih kurang diperhatikan baik perencanaan maupun pendanaannya.

- Bantuan modal usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum merata akibat tersendatnya pergerakan dana bergulir pada masyarakat, penyaluran Rp. 1.671.300.000. sedangkan pengembalian mengalami kemacetan
- Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum dikelola dan ditata secara optimal.
- Prasarana dan sarana ekonomi masih terbatas dalam rangka mendukung peran dan fungsi Kota Bima sebagai kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi NTB.
- Sifat pasif dari pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dan hanya menunggu dari bantuan pemerintah.
- Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dari para pelaku usaha.
- Kurangnya pembinaan terhadap koperasi sehingga perkembangan koperasi aktif cenderung tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan juga jumlah koperasi tidak mengalami kenaikan.

Untuk lebih jelasnya disajikan dalam bentuk Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Peningkatan keahlian aparatur pembina	1 Shindansi	1 Shindansi	Minimnya keinginan untuk meningkatkan keahlian		Keahlian aparatur yang spesifik dalam pembinaan
	0 Metrologi	1 Metrologi			
	0 PPNS	1 PPNS			
	4 D-3/S-1/S-2 Teknik Industri	1 D-3/S-1/S-2 Teknik Industri			
	2 D-3/S-1/S-2 Teknik Kimia	1 D-3/S-1/S-2 Teknik Kimia			
	0 D-3/S-1/S-2 Teknik Mesin	1 D-3/S-1/S-2 Teknik Mesin			
	0 D-3/S-1/S-2 Teknik Elektronika	1 D-3/S-1/S-2 Teknik Elektronika			
	1 D-3/S-1/S-2 Manajemen	1 D-3/S-1/S-2 Manajemen			
	0 D-3/S-1/S-2 Sistem Informasi	1 D-3/S-1/S-2 Sistem Informasi			
	2 D-3/S-1/S-2 Akuntansi	1 D-3/S-1/S-2 Akuntansi			
	0 D-3/S-1/S-2 Bisnis	1 D-3/S-1/S-2 Bisnis			
	0 D-3/S-1/S-2 Ilmu Makanan	1 D-3/S-1/S-2 Ilmu Makanan			
	0 D-3/S-1/S-2 Kewirausahaan dan Inovasi	1 D-3/S-1/S-2 Kewirausahaan dan Inovasi			
	0 D-3/S-1/S-2 Pemasaran	1 D-3/S-1/S-2 Pemasaran			
Sarana dan prasarana operasional kantor	1 mobil Jabatan/operasional	1 mobil operasional	Masih kurangnya alokasi anggaran pembelian dan perawatan operasional		Sarana dan prasarana kantor yang terbatas
	4 sepeda motor operasional	4 sepeda motor operasional			
	9 laptop	9 laptop			
	9 komputer	13 komputer			
	10 printer	6 printer			
	1 ruang arsip	1 ruang arsip			
	0 ruang penyimpanan	1 ruang penyimpanan			
	0 ruang pengujian	1 ruang pengujian			
	1 ruang pamer	1 ruang pamer			
	1 ruang sanggar kerja	2 ruang sanggar kerja			
	1 ruang rapat	1 ruang rapat			
	1 harian bisnis	1 harian bisnis			
	1 majalah bisnis	1 majalah bisnis			
	10 buku	10 buku			
Sarana dan prasarana tiap bidang	0 paket alat metrologi	1 paket alat metrologi	Masih terbatasnya ruangan		Sarana dan prasarana pembinaan tiap bidang
	0 paket alat penguji produk	1 paket alat penguji produk			
	0 paket alat industri kimia	1 paket alat industri kimia			
	0 paket alat industri agro	1 paket alat industri agro			
	0 paket alat industri hasil hutan	1 paket alat industri hasil hutan			
	0 paket alat industri logam	1 paket alat industri logam			
	1 paket alat industri mesin	1 paket alat industri mesin			
	0 paket alat industri elektronik	1 paket alat industri elektronik			
	0 paket alat industri aneka	1 paket alat industri aneka			

Pembenahan database para pelaku usaha	25%	100%	Belum terkelolanya data base dengan baik		Database yang masih belum tersusun baik
Perubahan pola pembinaan	3 pola pembinaan (pola 1, 2 dan 3)	5 pola pembinaan	Pengetahuan aparatur pembina	Regulasi dan kebijakan pemerintah daerah	Pola pembinaan yang tidak berkelanjutan
Identifikasi dukungan terhadap wirausaha baru				Sumber daya yang masih terbatas	Dukungan bagi wirausaha baru
Bahan baku lokal	25%	100%		Sedikitnya produksi bahan baku lokal	Pemanfaatan sumber daya lokal
Industri olahan berbasis pertanian dan perikanan	3 pola pembinaan (pola 1, 2 dan 3)	5 pola pembinaan	Pengetahuan aparatur pembina	Belum populer di kalangan masyarakat	Pengembangan industri olahan berbasis pertanian dan perikanan
Dana bergulir	pengembalian 31,8%	pengembalian 100%		Tersendatnya pembayaran dari masyarakat	Belum meratanya dana bergulir
Pedagang kaki lima	belum tersedia kawasan khusus pedagang kaki lima	tersedia kawasan khusus pedagang kaki lima		Belum tertatanya pedagang kaki lima	Penataan pedagang kaki lima
Prasarana dan sarana penunjang	75 % revitalisasi pasar raya	100 % revitalisasi pasar raya		Program MP3EI dari pusat	Prasarana dan sarana ekonomi masih terbatas
Sifat dari pelaku usaha				Pola pikir dari pelaku usaha	Sifat pasif dari para pelaku usaha
Faktor sumber daya manusia				Pendidikan dari pelaku usaha	Faktor SDM dari para pelaku usaha
Koperasi	105 koperasi aktif	140 koperasi aktif			Pembinaan terhadap koperasi

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan baik yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan tersebut adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat selaras dengan visi pembangunan nasional yakni “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong”. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik,
8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebijakan masing-masing kementrian yang menangani urusan perindustrian dan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional

NO	KEBIJAKAN	SUMBER	KET
	PERINDUSTRIAN		
1	Pengembangan perwilayahan industri diluar Pulau Jawa	Renstra Kementerian Perindustrian	
2	Penambahan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimaan 50 persen tumbuh di luar Jawa serta tumbuhnya industri kecil sekitar 20 ribu unit usaha		
3	Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai nilai tambah per tenaga kerja)		
	PERDAGANGAN		
1	Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama	Renstra Dinas Perdagangan	
2	Meningkatkan diversifikasi produk ekspor		
3	Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional		
4	Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		
5	Meningkatkan perlindungan konsumen		
6	Meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan logistic		
7	Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan		

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan Renja Perangkat Daerah ini adalah Meningkatkan Produktifitas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Sasaranyaa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Kelembagaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
2. Meningkatnya pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Meningkatnya Nilai Investasi Usaha Industri
4. Meningkatnya Nilai Investasi Usaha Perdagangan

Rencana target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel Target Pencapaian Tujuan

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2025	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	2%	2,50%	3,00%	3,50%	8,15%	8,50%	9,30%

2	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	4%	5,00%	7,00%	8,00%	2,39%	2,65%	3,25%
	Persentase Peningkatan Investasi Sektor Industri	14%	15,62%	17,00%	20,46%	1,16%	1,35%	1,70%
3	Persentase Peningkatan Investasi Sektor Perdagangan	45,0%	38,00%	35,50%	42,10%	75,37%	98,00%	99,35%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan dokumen rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Pemerintah Kota Bima Tahun 2024-2026. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Koperindag memerlukan perencanaan yang diwujudkan dalam bentuk kerangka program, pendanaan serta target capaian kinerja. Penyusunan perencanaan tersebut harus memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang dan aspirasi masyarakat.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi pada Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Rencana pendanaan untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagian besar ditopang oleh APBD Pemerintah Kota Bima.

Rencana Kerja Dinas Koperindag Kota Bima untuk Tahun 2025 terdapat 10 program utama dan 1 program pendukung. Dimana program utama dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
4. Program Pengembangan UMKM
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
9. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
10. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan adalah merupakan cara untuk mencapai tujuan yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Untuk mencapai tujuan / sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, maka dijabarkan kebijakan dan program sebagai pedoman / pegangan bagi para pelaksana kegiatan sebagai berikut:

Sementara yang menjadi kelompok sasaran dari indikator kinerja OPD adalah masyarakat kota Bima dan internal OPD sendiri agar dapat menghasilkan optimalisasi pelayanan fungsi OPD bagi pembangunan kota Bima dalam mencapai visi & misinya.

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima tahun 2025 yang terdiri atas 11 Program dan terurai melalui 47 kegiatan, maka dana indikatif yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp. 2,359,404,645,- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima (APBD II). Rincian program, kegiatan, target capaian kinerja beserta pendanaan dapat dilihat lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

SKPD : DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BIMA

NO.	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAAN MAJU TAHUN 2026		
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BIMA							9,387,291,693.00				10,928,291,693.00	
I.		2-17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				7,520,332,293.00				8,320,332,293.00	
	Meningkatnya Eksistensi Dinas terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	2-17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100.00 %	7,187,026,293.00	DAU		100.00 %	7,517,026,293.00	DAU
		2-17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen perencanaan dan kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Kota Bima	100.00 %	148,015,000.00	DAU		100.00 %	148,015,000.00	DAU
		2-17.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	2 Dokumen	18,154,000.00	DAU		2 Dokumen	18,154,000.00	DAU

		2-17.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	1	Dokumen	23,268,000.00	DAU		1	Dokumen	23,268,000.00	DAU
		2-17.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	2	Dokumen	58,717,000.00	DAU		2	Dokumen	58,717,000.00	DAU
		2-17.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Kota Bima	2	Laporan	20,576,000.00	DAU		2	Laporan	20,576,000.00	DAU
		2-17.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	2	Dokumen	27,300,000.00	DAU		2	Dokumen	27,300,000.00	DAU
		2-17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	100.00	%	5,074,987,683.00	DAU		100.00	%	5,074,987,683.00	DAU
		2-17.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	493	Orang/ Bulan	4,895,988,683.00	DAU		493	Orang/ Bulan	4,895,988,683.00	DAU
		2-17.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	108	Orang/ Bulan	164,880,000.00	DAU		108	Orang/ Bulan	164,880,000.00	DAU

		2-17.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kauangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	1 Laporan	8,930,000.00	DAU		1 Laporan	8,930,000.00	DAU
		2-17.01.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bima	1 Laporan	5,189,000.00	DAU		1 Laporan	5,189,000.00	DAU
		2-17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	100.00 %	15,000,000.00	DAU		100.00 %	15,000,000.00	DAU
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	Kota Bima	1 Dokumen	15,000,000.00			1 Dokumen	15,000,000.00	
		2-17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Bima	100.00 %	30,000,000.00	DAU		100.00 %	45,000,000.00	DAU
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Penyewa/ Pengguna Kios	Kota Bima	150 Penyewa/ Pengguna Kios	15,000,000.00			150 Penyewa/ Pengguna Kios	15,000,000.00	
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Penyewa/ Pengguna Kios	Kota Bima	150 Penyewa/ Pengguna Kios	15,000,000.00			150 Penyewa/ Pengguna Kios	15,000,000.00	
			Penetapan Wajib Retribusi Daerah							150 Penyewa/ Pengguna Kios	15,000,000.00	

		2-17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bima	100.00	%	65,000,000.00	DAU		100.00	%	80,000,000.00	DAU
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny	Jumlah Pegawai	Kota Bima	45	Pegawai	65,000,000.00			45	Pegawai	65,000,000.00	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								45	Pegawai	15,000,000.00	
		2-17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima	100.00	%	1,216,888,500.00	DAU		100.00	%	1,516,888,500.00	DAU
		2-17.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kopenen Instalasi Listrik yang tersedia	Kota Bima	234	Komponen Listrik	11,735,000.00	DAU		234	Komponen Listrik	11,735,000.00	DAU
		2-17.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	6291	Peralatan kantor	351,839,900.00	DAU		6291	Peralatan kantor	351,839,900.00	DAU
		2-17.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Julah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	Kota Bima	632,532	Lembar/ Blok	363,374,100.00	DAU		632,532	Lembar/ Blok	363,374,100.00	DAU
		2-17.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bima			-	DAU				-	DAU
		2-17.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bima	230	Orang/ Bulan	66,939,500.00	DAU		230	Orang/ Bulan	66,939,500.00	DAU

		2-17.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	85	Orang/ Bulan	423,000,000.00	DAU		85	Orang/ Bulan	723,000,000.00	DAU
		2-17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	100.00	%	110,421,250.00	DAU		100.00	%	110,421,250.00	DAU
		2-17.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Disediakan	Kota Bima	12	Unit Perlengkapan kantor	110,421,250.00	DAU		12	Unit Perlengkapan kantor	110,421,250.00	DAU
		2-17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	100.00	%	373,096,360.00	DAU		100.00	%	373,096,360.00	DAU
		2-17.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Tenaga Surat Menyurat (Jasa Tenaga Kontrak)	Kota Bima	144	Orang/ Bulan	54,000,000.00	DAU		144	Orang/ Bulan	54,000,000.00	DAU
		2-17.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kantor/ Bangunan	Kota Bima	144	Bulan/ Unit Bangunan	64,686,360.00	DAU		144	Bulan/ Unit Bangunan	64,686,360.00	DAU
		2-17.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	Kota Bima	8	Unit/Bulan	36,460,000.00	DAU		8	Unit/Bulan	36,460,000.00	DAU
		2-17.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor (Jasa Tenaga Kontrak)	Kota Bima	744	Orang/ Bulan	217,950,000.00	DAU		744	Orang/ Bulan	217,950,000.00	DAU
		2-17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Bima	100.00	%	153,617,500.00	DAU		100.00	%	153,617,500.00	DAU

		2-17.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Bima	7	Unit	118,467,500.00	DAU		7	Unit	118,467,500.00	DAU
		2-17.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang dipelihara	Kota Bima	1	Unit	35,150,000.00	DAU		1	Unit	35,150,000.00	DAU
	Meningkatnya Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	2-17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI	Persentase Terselenggaranya Penilaian Kesehatan Koperasi	Kota Bima	100.00	%	18,688,000.00	DAU		100.00	%	18,688,000.00	DAU
		2-17.03.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten Kota	Persentase Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Kota Bima	100	%	18,688,000.00	DAU		100	%	18,688,000.00	DAU
		2-17.03.2.01.001	Pelaksanaaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah koperasi yang diperiksa, diawasi dan dinilai kesehatanya	Kota Bima	113	Unit Koperasi	18,688,000.00	DAU		113	Unit Koperasi	18,688,000.00	DAU
	Meningkatnya Sumberdaya Manusia dalam pengelolaan kelembagaan usaha dan keuangan koperasi	2-17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mendapatkan Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bima	100.00	%	38,582,200.00	DAU		100.00	%	88,582,200.00	DAU

		2-17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kota Bima	60 Anggota Koperasi	38,582,200.00	DAU		60 Anggota Koperasi	88,582,200.00	DAU
		2-17.05.2.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus / Keanggotaan Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kota Bima	90 Anggota Koperasi	38,582,200.00	DAU		90 Anggota Koperasi	88,582,200.00	DAU
	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan ukturisasi saha Koperasi	2-17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan strukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	100.00 %	30,214,000.00	DAU		100.00 %	50,214,000.00	DAU
		2-17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang dilakukan bimtek dan pendampingan Perkoperasian	Kota Bima	100.00 %	30,214,000.00	DAU		100.00 %	50,214,000.00	DAU

		2-17.06.2.01.001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang meningkat Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	50 Unit Usaha Koperasi	30,214,000.00	DAU		50 Unit Usaha Koperasi	50,214,000.00	DAU
	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen UMKM	2-17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro yang memiliki NIB	Kota Bima	100.00 %	245,821,800.00	DAU		100.00 %	645,821,800.00	DAU
		2-17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang dilakukan Pemberdayaan dan Penguatan kelembagaan	Kota Bima			DAU				DAU
		2-17.07.2.01.005	Penyususnan Basis data Usaha Mikro	Jumlah Dokumen/Data Usaha Mikro	Kota Bima	1 Dokumen	31,600,000.00	DAU		1 Dokumen	31,600,000.00	DAU

		2-17.07.2.01.006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Bima	120 Pelaku Usaha Mikro	214,221,800.00	DAU		120 Pelaku Usaha Mikro	614,221,800.00	DAU
II.		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1,248,892,500.00				1,862,892,500.00	
		3.30	PERDAGANGAN				334,256,500.00				364,256,500.00	
	Tersedianya saarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Memadai	3-30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Capaian Sarana dan Prasarana Pasar yang dibangun/ direvitalisasi/ Direhabilitasi	Kota Bima		-			100.00 %	375,000,000.00	DAU
		3-30.03.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bima					100.00 %	375,000,000.00	DAU
		3-30.03.2.01.001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasara yang dibangun/di Revitalisasi / Rehabilitasi	Kota Bima					1 Peket Pembangunan/ Revitalisasi Pasar	375,000,000.00	DAU
	Terkendalinya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3-30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Kota Bima	100.00 %	179,252,500.00	DAU		100.00 %	209,252,500.00	DAU

		3-30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terkendalinya Barang Kebutuhan Pokok	Kota Bima	100.00	%	179,252,500.00	DAU		100.00	%	209,252,500.00	DAU
		3-30.04.2.01.003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1). Ketersediaan informasi Stabilitas Harga Bahan Pokok	Kota Bima	360	Informasi Ketersediaan Bahan Pokok	45,360,000.00	DAU		360	Informasi Ketersediaan Bahan Pokok	45,360,000.00	DAU
				2). Jumlah Pelaku Usaha yang menjual Barang Kadarluasa	Kota Bima	10	Pelaku Usaha Perdagangan	44,792,500.00	DAU		10	Pelaku Usaha Perdagangan	74,792,500.00	DAU
				3). Jumlah agen Distribusi Pupuk	Kota Bima	3	Distributor / Pengecer	24,300,000.00	DAU		3	Distributor/ Pengecer	24,300,000.00	DAU
				4). Jumlah Pasar yang dilakukan Penataaan/ diawasi	Kota Bima			32,400,000.00	DAU				32,400,000.00	DAU
				5). Jumlah agen/ Pangkalan Distribusi Gas LPG	Kota Bima	350	2 Agen dan 348 Pangkalan	32,400,000.00	DAU		350	2 Agen dan 348 Pangkalan	32,400,000.00	DAU
	Terwujudnya Tertib Ukur UTTP yang menjamin adanya kepasian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen	3-30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera ulang dalam tahun berjalan	Kota Bima	100.00	%	155,004,000.00	DAU		100.00	%	155,004,000.00	DAU
		3-30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan											

		3-30.06.2.01.001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase Jumlah Pedagang yang dilakukan Pengawasan terhadap Peralatan Timbang	Kota Bima	100 %	155,004,000.00	DAU		100 %	155,004,000.00	DAU
				Jumlah Peralatan Sidang Tera yang dikalibrasi Ulang	Kota Bima	34 Peralatan Sidang Tera	68,784,000.00	DAU		34 Peralatan Sidang Tera	68,784,000.00	DAU
				Jumlah Dokumen	Kota Bima	1 Dokumen	24,300,000.00	DAU		1 Dokumen	24,300,000.00	DAU
				Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan	Kota Bima	175 UTTP	41,760,000.00	DAU		175 UTTP	41,760,000.00	DAU
				Jumlah Pasar disosialisasi	Kota Bima	5 Pasar	20,160,000.00	DAU		5 Pasar	20,160,000.00	DAU
III.		3.30	PERINDUSTRIAN				914,636,000.00				1,498,636,000.00	
	Berkembangnya Pelaku Usaha Industri Kecil menengah	3-31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perkembangan Kelompok Industri Kecil Menengah	Kota Bima	100.00 %	850,560,000.00	DAU		100.00 %	1,454,560,000.00	DAU
		3-31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Bima	100 %	850,560,000.00	DAU		100 %	1,454,560,000.00	DAU
		3-31.02.2.01.003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang mendapat Bantuan HIBAH	Kota Bima	1 Unit Organisasi (Degranasda)	500,000,000.00	DAU		1 Unit Organisasi (Degranasda)	500,000,000.00	DAU

		3-31.02.2.01.005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Kelompok Industri Kecil Menengah yang mendapat bantuan peralatan Usaha	Kota Bima	158	Kelompok Industri Kecil	350,560,000.00	DAU		158	Kelompok Industri Kecil	954,560,000.00	DAU
	Tersedianya Data dan Dokumen Informasi Industri	3-31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersedian Dokumentasi Rencana Pembangunan Industri	Kota Bima	100.00	%	64,076,000.00	DAU		100.00	%	44,076,000.00	DAU
		3-31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyusunan data IKM dan Sentra serta Profile IKM dan Provil Sentral IKM	Kota Bima	100.00	%	64,076,000.00	DAU		100.00	%	44,076,000.00	DAU
		3-31.04.2.01.002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Tersedianya data dan Rencana Pembangunan Industri	Kota Bima	1	Dokumen	64,076,000.00	DAU		1	Dokumen	44,076,000.00	DAU
IV.		2.17.3.30.3.31.17.0001	UPT SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					508,980,900.00					527,980,900.00	
		02 2:17	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											

	Meningkatnya Eksistensi UPT Perdagangan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	2-17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	100.00 %	62,475,000.00	DAU			62,475,000.00	DAU
		2-17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Bima	100.00 %	62,475,000.00	DAU		100.00 %	62,475,000.00	DAU
		2-17.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Bima	1 Unit	37,500,000.00	DAU		1 Unit	37,500,000.00	DAU
		2-17.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang dipelihara	Kota Bima	1 Unit	24,975,000.00	DAU		1 Unit	24,975,000.00	DAU
		03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
		3.30	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN									
		3.30.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				446,505,900.00	DAU			465,505,900.00	DAU
		2-17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100.00 %	76,269,100.00	DAU		100.00 %	76,269,100.00	DAU

		2-17.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kopenen Instalasi Listrik yang tersedia	Kota Bima	134	Komponen Listrik	25,589,500.00	DAU		134	Komponen Listrik	25,589,500.00	DAU
		2-17.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	130	Peralatan kantor	30,049,600.00	DAU		130	Peralatan kantor	30,049,600.00	DAU
		2-17.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Julah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	Kota Bima	68,766	Lembar/ Blok	20,630,000.00	DAU		68,766	Lembar/ Blok	20,630,000.00	DAU
		2-17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100.00	%	370,236,800.00	DAU		100.00	%	389,236,800.00	DAU
		2-17.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Tenaga Surat Menyurat (Jasa Tenaga Kontrak)	Kota Bima	48	Orang/ Bulan	17,180,000.00	DAU		48	Orang/ Bulan	36,180,000.00	DAU
		2-17.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kantor/ Bangunan	Kota Bima	12	Bulan/ Unit Bangunan	20,056,800.00	DAU		12	Bulan/ Unit Bangunan	20,056,800.00	DAU
		2-17.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor (Jasa Tenaga Kontrak)	Kota Bima	324	Orang/ Bulan	333,000,000.00	DAU		324	Orang/ Bulan	333,000,000.00	DAU
V.		2.17.3.30.3.31.17.0001	UPT PLUT-KUMKM					109,086,000.00	DAU				217,086,000.00	
		02 2:17	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											

	Meningkatnya Eksistensi UPT PLUT-KUMKM terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	3.30.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				109,086,000.00	DAU				217,086,000.00	DAU
		2-17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100.00 %	50,194,000.00	DAU		100.00 %		79,194,000.00	DAU
		2-17.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kopenen Instalasi Listrik yang tersedia	Kota Bima	134 Komponen Listrik	5,609,000.00	DAU		134	Komponen Listrik	5,609,000.00	DAU
		2-17.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	342 Peralatan kantor	29,521,000.00	DAU		342	Peralatan kantor	29,521,000.00	DAU
		2-17.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Julah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	Kota Bima	32,880 Lembar/ Blok	15,064,000.00	DAU		32,880	Lembar/ Blok	44,064,000.00	DAU
		2-17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100.00 %	58,892,000.00	DAU		100.00 %		137,892,000.00	DAU
		2-17.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Tenaga Surat Menyurat (Jasa Tenaga Kontrak)	Kota Bima	144 Orang/ Bulan	18,066,000.00	DAU		144	Orang/ Bulan	18,066,000.00	DAU
		2-17.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kantor/ Bangunan	Kota Bima	144 Bulan/ Unit Bangunan	20,458,000.00	DAU		144	Bulan/ Unit Bangunan	25,458,000.00	DAU
		2-17.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor (Jasa Tenaga Kontrak)	Kota Bima	84 Orang/ Bulan	20,368,000.00	DAU		84	Orang/ Bulan	94,368,000.00	DAU
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							9,387,291,693.00					10,928,291,693.00	

BAB VII
PENUTUP

Dalam mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bima yakni " *Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri* ", maka kematangan rencana strategis 2024 – 2026 yang tertuang dalam rencana kerja tahunan adalah pedoman kerja untuk tahun 2025.

Sehingga langkah menuju Visi Kota Bima tersebut diatas dapat diwujudkan melalui partisipasi Dinas berdasarkan tupoksinya.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat dipedomani, ditindaklanjuti dan diwujudkan bersama.

RENCANA KERJA
(RENJA)

TAHUN 2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BIMA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunianya dan kekuasaannya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima Tahun 2025. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang beberapa program dan kegiatan yang telah kami kerjakan dan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaaan program dan kegiatan organisasi secara nyata. Laporan ini juga menyajikan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima dimaksudkan sebagai acuan untuk kami dalam merencanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya, sehingga dapat mengalokasikan anggaran sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Bima, Januari 2025

Kepala Satua Polisi Pamong Praja
Kota Bima,



ERWIN RAHADI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730422 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematikan Penyusunan 4

1.5. Struktur Organisasi 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 19

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 24

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja 24

3.2. Program dan Kegiatan 25

BAB IV PENUTUP 29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kota/Kabupaten) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun 2024.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana kerja ini bersifat dinamis, dengan kata lain akan diadakan evaluasi dan penyesuaian didasarkan pada perkembangan hasil pelaksanaannya, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka koordinasi

horizontal dan vertikal terus ditingkatkan, mengingat Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima Tahun Anggaran 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacar Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
30. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
32. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106);
33. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 86 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 86 Tahun 2021, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

A. Maksud :

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan arah dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025.

B. Tujuan :

1. Sebagai pedoman kerja dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima khususnya dan Visi Misi Pemerintah Kota Bima pada umumnya;
2. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat;

3. Menciptakan kesamaan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik (Good Governance).

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima Tahun Anggaran 2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja
- 1.5 Struktur Organisasi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

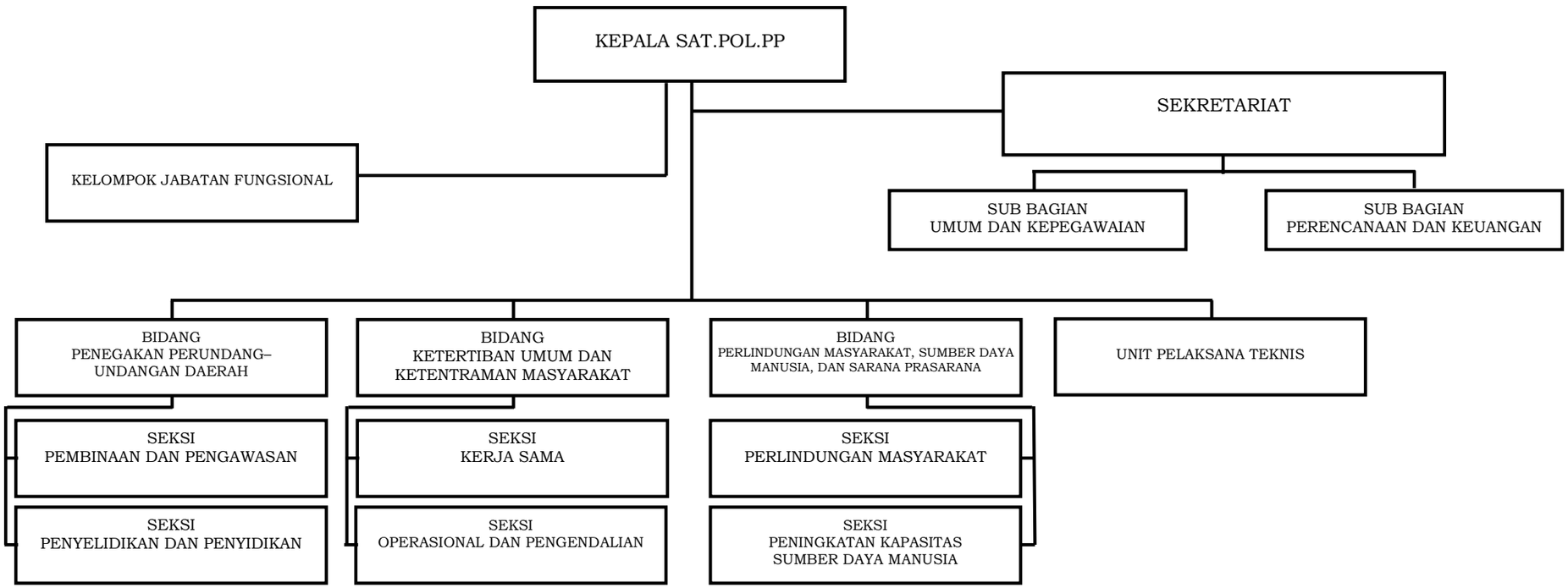
1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima nomor 86 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima

Susunan Organisasi Satpol. PP terdiri atas :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari :
    1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
    2. Seksi Penyidik dan Penyidikan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
    1. Seksi Kerja sama;
    2. Seksi Operasional dan pengendalian; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana, terdiri dari :
    1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
    2. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Unit Pelaksana Teknis.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BIMA



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025

Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak kegiatan-kegiatan dalam program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan obyektif. Pengklasifikasian dilaksanakan yakni sebelum berlangsung (ex ante), pada saat berlangsung (on going), atau sesudah selesai (ex post). Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai dan kegagalan yang dihadapi terhadap pelaksanaan dari suatu kegiatan. Parameter yang digunakan sebagai pembanding dalam melaksanakan evaluasi kinerja adalah kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya dan atau dengan kinerja lainnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2024
KOTA BIMA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra SKPD) Thn 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
				Target Kinerja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi%		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(6/5)*	*8*	*9=(4+6+8)*	*10=(9/4)*
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.05.01.201	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.05.01.201.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang dikerjakan	3 Dokumen	3 Dok	100%	100%	3 Dokumen	100%	100%
1.05.01.201.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan	2 Dokumen	2 Dok	100%	100%	2 Dokumen	100%	100%
1.05.01.201.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang dikerjakan	2 Dokumen	2 Dok	100%	100%	2 Dokumen	100%	100%
1.05.01.201.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang dikerjakan	2 Dokumen	2 Dok	100%	100%	2 Dokumen	100%	100%
1.05.01.201.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang dikerjakan	2 Dokumen	2 Dok	100%	100%	2 Dokumen	100%	100%
1.05.01.201.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi PD yang dikerjakan	2 Dokumen	2 Dok	100%	100%	2 Dokumen	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/4)
1.05.01.202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianyan Administrasi Keuangan**	**100%**	**100%**	**94,75%**	**94,75%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.05.01.202.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	41 Org/Bln	41 Org/Bln	95,28%	95,28%	41 Org/Bln	100%	100%
1.05.01.202.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
1.05.01.202.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Dokumen	12 Dok	77,15%	77,15%	12 Dokumen	100%	100%
1.05.01.202.0004	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar yang dikerjakan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
1.05.01.202.0005	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dikerjakan	2 Dokumen	2 Dok	100%	100%	2 Dokumen	100%	100%
1.05.01.202.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang dikerjakan	2 Laporan	2 Lap	100%	100%	2 Laporan	100%	100%
1.05.01.202.0008	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-
1.05.01.205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**93.35%**	**93.35%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.05.01.205.0001	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pendidikan dan pelatihan	1 Paket	-	-	-	-	-	-
1.05.01.205.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 Paket	-	-	-	-	-	-
1.05.01.205.0003	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	1 Paket	-	-	-	-	-	-
1.05.01.205.0004	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	1 Paket	-	-	-	-	-	-
1.05.01.205.0005	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	32 Org	-	-	-	-	-	-
1.05.01.205.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Kegiatan Pelatihan	32 Org	32 Org	93.35%	93.35%	32 Org	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/4)
1.05.01.206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah Umum**	**100%**	**100%**	**60,95%**	**60,95%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.05.01.206.0001	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	93,80%	93,80%	1 Paket	100%	100%
1.05.01.206.0002	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan	1 Paket	1 Paket	99,98%	99,98%	1 Paket	100%	100%
1.05.01.206.0003	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	1 Paket	100%	100%
1.05.01.206.0004	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang yang disediakan Makanan dan Minumannya	15 Laporan	15 Lap	100%	100%	15 Laporan	100%	100%
1.05.01.206.0005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi/Konsultasi Keluar Daerah	1 Paket	1 Paket	48,09%	48,09%	1 Paket	100%	100%
1.05.01.208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersediannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**92,25%**	**92,25%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.05.01.208.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Lap	98,91%	98,91%	1 Laporan	100%	100%
.1.05.01.208.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Lap	83,78%	83,78%	12 Laporan	100%	100%
1.05.01.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersediannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**84,76%**	**84,76%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.05.01.209.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabata	1 Unit	1 Unit	92,63%	92,63%	1 Unit	100%	100%
1.05.01.209.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	15 Unit	15 Unit	82,32%	82,32%	15 Unit	100%	100%
1.05.01.209.0003	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	1 Unit	1 Unit	99,53%	99,53%	1 Unit	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/4)
1.05.01.209.0004	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	--	-	1 Unit	100%	100%
1.05.02	**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**	**Tingkat penyelesaian keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3)**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.05.02.201	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**36,18%**	**36,18%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.05.02.201.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelengggaran ketentrman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Lap	17,55%	17,55%	1 Laporan	100%	100%
1.05.02.201.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasam antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	6 Laporan	6 Lap	57,07%	57,07%	6 Laporan	100%	100%
1.05.02.201.0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yg di cegah melalui diteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan wilayah.	30 Kasus	30 Kasus	33,33%	33,33%	30 Kasus	100%	100%
1.05.02.202	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Penunjang Urusan Kantor	**100%**	**100%**	**39,08%**	**39,08%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.05.02.202.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan	6 Laporan	6 Lap	48,18%	48,18%	6 Laporan	100%	100%
1.05.02.202.0011	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah Penindakan Atas Gangguan Ketentaraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penrtiaban unjuk rasa dan Kerusuhan Massa	7 Laporan	7 Lap	36,91%	36,91%	7 Laporan	100%	100%
1.05.02.202.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yg dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	1 Laporan	1 Lap	33,29%	33,29%	1 Laporan	100%	100%

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Hasil analisis akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kota Bima pada tahun 2024, dilaksanakan melalui sumber pembiayaan yakni Anggaran DPA-SKPD (APBD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima dengan mengimplementasikan sebanyak 2 Program 8 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan.
2. Total nilai realisasi capaian kinerja sasaran sampai dengan tahun 2024 terhadap 2 program sumber pembiayaan APBD dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kota Bima, secara komulatif menunjukkan bahwa prosentase tingkat pencapaian terhadap target tahun 2024 sebesar 86,96% menurun jika dibandingkan dengan prosentase tingkat pencapaian terhadap kinerja tahun sebelumnya (2023) sebesar 93,11%, dan prosentase capaian tahun 2024 lebih kecil terhadap proyeksi target tahun 2022 yaitu sebesar 86,96%.
3. Berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat tahun 2020, diperoleh hasil capaian kinerja sebagai berikut :
    1. Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban yang dapat diatasi sebanyak 90% penertiban.
    2. Jumlah Patroli Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam sebanyak 454 kali.
    4. Rata-rata kejadian gangguan keamanan per tahun/10.000 penduduk sebanyak 15 pengamanan.
    5. Jumlah Pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan/Jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun berkenaan x 100 sebanyak 27 kali.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Bima tahun 2024 ada beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi yaitu :

- **Hambatan :**

a. Kualitas SDM personil masih harus ditingkatkan, sebagian masih belum mengikuti diklat teknis Satuan Polisi Pamong Praja, dan diklat selaku penyidik pelanggaran perda (PPNS) baik pejabat maupun staf/anggota;

b. Jumlah Personil/Anggota Satuan Polisi Pamong Praja belum ideal, akibatnya pelaksanaan tugas berjalan kurang optimal. Idealnya untuk Kota Bima dengan kompleksitas masalah dan jumlah penduduk serta luas wilayah minimal harus memiliki 300 personil Satpol. PP;
c. Belum optimalnya tugas penegakan Perda karena kendala koordinasi dan minimalnya sinergitas instansi terkait untuk melibatkan Polisi Pamong Praja dan terbatasnya PPNS untuk menyidik pelanggaran perda;
d. Sarana dan Prasarana penunjang yang masih kurang, termasuk didalamnya kendaraan operasional, bahkan ada kendaraan operasional yang kondisinya sudah rusak berat, sehingga menggagu mobilisasi anggota ketika menangani kejadian-kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban.

- **Permasalahan :**

a. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan merencanakan serta menganggarkan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan teknis Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima;
b. Meningkatkan jumlah personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui perekrutan anggota baru dan meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan pembinaan pegawai, baik yang diselenggarakan internal maupun bekerjasama dengan instansi terkait;
c. Meningkatkan sinergitas dengan SKPD dalam sosialisasi perundang-undangan daerah yang terkait langsung dengan program SKPD yang bersangkutan dan menambah jumlah PPNS yang memiliki kualifikasi penyidik dengan mengirim PNS untuk ikut Diklat PPNS;
d. Mengalokasikan anggaran pengadaan kendaraan operasional untuk memudahkan dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol, baik itu kendaraan roda empat maupun roda dua.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima adalah :

- **Permasalahan dan Hambatan :**

1. Sumber Daya Aparatur (Anggota) Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang.
2. Kualitas Sumber Daya Aparatur masih rendah.
3. Masih tingginya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.
4. Tingkat kriminalitas masih tinggi.
5. Masih maraknya penyakit masyarakat.
6. Konflik-konflik horizontal masih tinggi.
7. Penegakan Perda dan Perwali yg masih lemah.

- **Rekomendasi dan Catatan Strategis :**

1. **Sumber Daya Aparatur (Anggota) masih kurang**.

   Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi masih belum memadai, sehingga berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tugas baik administrasi maupun operasional. Untuk itu perlu ditingkatkan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga diharapkan jumlah anggota yang ideal mencapai 300 personil. Kebijakan ini dilakukan guna menunjang

tugas fungsi serta operasional pengamanan dan penegakan Perda dan PerwalS sejalan dengan perkembangan pembangunan.

2. **Kualitas Sumber Daya Aparatur masih rendah.**

   Sumber Daya Aparatur merupakan unsur penentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sebagai satu kebutuhan dasar merupakan bagian usaha dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima. Kondisi relatif masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja Kota Bima tercermin dari tingkat kemampuan dalam kajian dan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya yang terkait dengan tugas-tugas teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda/Perwal (PPNS) serta teknis perlindungan masyarakat.

3. **Masih tingginya pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum.**

   Untuk mendukung pelaksanaan tugas trantibum perlu ditingkatkan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan dan menuntaskan kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran hukum yaitu, pelanggaran Perda, Perwal. Proses pelaksanaan tugas harus selalu mengacu pada pedoman prosedur tetap (protap), sehingga pelaksanaan tugas tidak melanggar rambu-rambu aturan yang ditetapkan dalam upaya penyelesaian masalah trantibun di masyarakat. Kasus-kasus yang menyangkut gangguan trantibum Berupa : Konflik/perkelahian masal antar lingkungan, antar kelompok, demonstrasi anarkis dan bencana alam serta pengaruh alam lainnya.

4. **Tingkat kriminalitas masih tinggi**.

   Kota Bima merupakan pusat pendidikan dan perkonomian yang berkembang cukup pesat dibandingkan dengan kabupaten lainnya, tentunya memberikan dampak terhadap tingkat kriminalitasnya, ini ditandai masih banyaknya pelanggaran hukum seperti pencurian, tawuran dll, upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan hukum agar tercapai ketentraman dan ketertiban masyarakat. Karena ketenteraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan utama dalam menjamin kehidupan yang nyaman dan tentram.

5. **Masih Maraknya Penyakit masyarakat.**

   Bahwa sejalan dengan perkembangan zaman dalam kehidupan global yang mempunyai berdampak positif dan negatif terhadap dinamika kehidupan ekonomi masyarakat yang mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat sosial maupun ekonomi masyarakat, sehinggga berpengaruh besar terhadap ketenteraman dan ketertiban. Ekonomi masyarakat yang rendah dan majemuk akan menjadi salah satu pemicu timbulnya kasus-kasus penyakit masyarakat, sehingga perilaku dalam kehidupam bermasyarakat menjadi terganggu dan tidak harmonis. Upaya-upaya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat perlu ditingkatkan baik melalui : operasi non yustisi dan pencegahan peradaran minuman keras, praktik prostitusi dan premanisme, serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.

6. **Konflik-konflik horizontal masih tinggi.**

   Konflik horizontal yang terjadi di masyarakat diantaranya, perkelahian antar kampung dan agama. Konflik ini timbul disebabkan komunikasi yang buruk, perebutan kekuasaan baik kepentingan perorangan dan kelompok, ketidak puasaan dan kurangnya keterbukaan kedua belah pihak. Upaya-

upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan antisipasi secara dini agar konflik tidak meluas ketempat yang lain. Penyelesaian konflik ini perlu dilakukan pendekatan kekeluargaan dan mediasi dengan aparat penegak hukum agar kondisi keamanan dan ketertiban agar dapat berjalan secara kondusif.

7. **Penegakan Perda dan Perwal masih lemah.**

   Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda/Perwal serta Perlindungan Masyarakat. Penegakan Perda/Perwal kegiatannya masih sangat terbatas, upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain :

   a. Meningkatkan pembinaan masyarakat agar dapat mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
   b. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu dengan kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau aparatur lainnya yang terkait, diantaranya dengan membentuk sekretariat PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima sehingga memberikan peran kepada PPNS dalam menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4.1

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bima**	**Cakupan Penunjang Urusan Kantor**	**100%**	**8.022.871.102**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bima**	**Cakupan Penunjang Urusan Kantor**	**100%**	**8.876.308.877**	
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**Terlaksananya kegiatan Perencanaan dan evaluasi kinerja selama satu tahun**	**100%**	**13.573.600**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**Terlaksananya kegiatan Perencanaan dan evaluasi kinerja selama satu tahun**	**100%**	**14.252.280,00**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3.573.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3.752.280,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2.100.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	2.100.000,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2.100.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	2.100.000,00	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	2.100.000,00	

II	**Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**Tersedianyan Administrasi Keuangan**	**100%**	**4.416.394.102**	**Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**Tersedianyan Administrasi Keuangan**	**100%**	**4.637.213.807,10**	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	4.279.794.102	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	4.493.783.807,10	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Lap	132.600.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Lap	139.230.000,00	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	2.100.000,00	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Lap	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Lap	2.100.000,00	
III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**2.926.670.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**3.073.003.500,00**	
11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bima	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Pkt	350.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bima	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Pkt	367.500.000,00	
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bima	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	131 Orang	2.546.670.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bima	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	131 Orang	2.674.003.500,00	
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 Org	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 Org	31.500.000,00	
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**Tersedianya Administrasi Umum**	**100%**	**450.855.200**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**Tersedianya Administrasi Umum**	**100%**	**925.692.180,00**	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	103.868.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	109.062.240,00	
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pkt	27.044.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pkt	28.397.040,00	
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bima	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	14.244.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bima	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	14.956.200,00	
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	305.697.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	320.982.480,00	
V	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**	**Tersediannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**50.328.800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**	**Tersediannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**52.845.240**	
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	28.160.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	29.568.000,00	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	22.168.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	23.277.240,00	
2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kota Bima**	**Persentase penurunan angka gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat**	**100%**	**2,200,317,000**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUMr**	**Kota Bima**	**Persentase penurunan angka gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat**	**100%**	**2,310,332,850**	

VI	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**1,149,771,000**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**1,207,259,550**	
21	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	297,602,500	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	312,482,625.00	
22	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bima	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dok	75,000,000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bima	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dok	78,750,000.00	
23	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	6 Dok	296,888,500	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	6 Dok	311,732,925.00	
24	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Bima	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	30 Kasus	230,280,000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Bima	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	30 Kasus	241,794,000.00	
25	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Bima	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	75,000,000	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Bima	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	78,750,000.00	
26	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bima	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Unit	175,000,000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bima	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Unit	183,750,000.00	
VII	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Kota Bima**	**Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**100%**	**1,020,546,000**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Kota Bima**	**Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**100%**	**1,071,573,300**	
27	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Bima	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	6 Lap	203,288,000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Bima	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	6 Lap	213,452,400.00	
28	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Bima	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	7 Lap	796,712,000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Bima	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	7 Lap	836,547,600.00	

29	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Kota Bima	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yg dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	1 Lap	20,546,000	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Kota Bima	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yg dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	1 Lap	21,573,300.00	
VIII	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Terselenggaranya Penyidikan yang handal**	**100%**	**30,000,000**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Terselenggaranya Penyidikan yang handal**	**100%**	**31,500,000.00**	
30	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Bima	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Lap	30,000,000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Bima	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Lap	31,500,000.00	

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota, dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Bima. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan

BAB. III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan-kebijakan Nasional maupun Propinsi serta Program Prioritas tidak dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima karena pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh SKPD-SKPD teknis terkait kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Identifikasi Kebijakan Nasional
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Ketertiban Umum	DAU	-

Dengan focus :

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2025 adalah Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Bima. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima melaksanakan fungsi Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan program dan kegiatan secara optimal. Oleh karena itu setiap Satuan Kerja harus merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Bima secara komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima, menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan di bawah ini.

3.2.1. Tujuan

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 telah ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima :

"*Terwujudnya Kota Bima yang Sejahtera, Maju dan Mandiri*"

3.2.2. Sasaran

Sasaran dari tujuan yang telah dirumuskan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima yaitu sebagai berikut :

a. Menurunnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban
b. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
c. Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah.

Tabel 3.2.1
Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban daerah	Meningkatnya keamanan dan ketertiban Umam	Indeks Rasa Aman	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat

Tabel 3.2.2
Tujuan dan Sasaran PD

No	Tujuan dan Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
1	*2*	*3*	*4*
I	**Tujuan :**		
	Meningkatkan keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan masyarakat		
II	**Sasaran :**		
1	Menurunnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	85%
2	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Petugas Pelindungan Masyarakat (Linmas)	80%
3	Meningkatnya penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	85%

Tabel 3.2.3
Indikator Kinerja Utama PD

NO.	IKU	INDIKATOR KINERJA IKU	TARGET KINERJA IKU
1	*2*	*3*	*4*
1	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Persentase menurunnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	85%
2	Meningkatnya Kapasitas Peran Satuan Pelindungan Masyarakat	Cakupan Petugas Pelindungan Masyarakat (Linmas)	80%
3	Meningkatnya Kualitas Perda/Perkada	Persentase Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	85%

3.3. Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima merupakan penjabaran teknis dari pada visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program dengan mengerahkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, prasarana dan sarana maupun financial sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output). Adapun uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakn pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan beberapa kegiatan berupa :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp.13.571.600,-
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 7.894.659,-
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 2.392.455.000,-
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 389.974.100,-
5. Penyediaan Jasa Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran Rp. 50.477.400,-
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp. 196.570.000,-

II. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan beberapa kegiatan berupa :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp. 423.237.200,-
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Rp. 1.000.000.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Mempedomani RKPD Kota Bima Tahun 2024 serta Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bima. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Bima;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan
1	*2*	*3*
1	Sasaran 1 : Menurunnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** ➢ Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum ➢ Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Peran Satuan Pelindungan Masyarakat (Linmas)	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** ➢ Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

1	*2*	*3*
3	Sasaran 3 : Meningkatnya penegakan Peraturan Perundang-undangan	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** ➢ Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota ➢ Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Tabel 4.1 diatas menjelsakan beberapa program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No	Prioritas Pembanguan	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		
		➢ Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	161.439.600	
		➢ Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	212.111.600	
		➢ Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	49.686.000	
		➢ Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	221.483.500	
		➢ Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	778.516.500	

Tabel 4.3
Matrik Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima
Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10,223,361,827							10,734,529,918	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Kantor	0	7,621,430,609	8,547,645,207	100%	8,564,107,622						100%	8,992,313,003	
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Perencanaan dan evaluasi kinerja selama satu tahun	0	13,573,600	13,571,600	100%	14,152,280						100%	14,859,894	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3,573,600	3,571,600	2 Dokumen	3,752,280	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		2 Dokumen	3,939,894	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2,000,000	2,000,000	2 Dokumen	2,100,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		2 Dokumen	2,205,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2,000,000	2,000,000	1 Dokumen	2,100,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		1 Dokumen	2,205,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2,000,000	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		2 Dokumen	2,100,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2,000,000	2,000,000	1 Dokumen	2,100,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		1 Dokumen	2,205,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2,000,000	2,000,000	3 Laporan	2,100,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		3 Laporan	2,205,000	Satuan Polisi Pamong Praja

1	**5**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianyan Administrasi Keuangan**	**0**	**4,512,691,409**	**7,894,659,652**	**100%**	**5,235,108,702**						**100%**	**5,496,864,137**	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4,376,091,409	7,712,167,152	50 Orang/bulan	5,091,678,702	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		50 Orang/bulan	5,346,262,637	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0	0	1 Dokumen	0	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		1 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		132,600,000	178,492,500	12 Dokumen	139,230,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		12 Dokumen	146,191,500	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2,000,000	2,000,000	1 Dokumen	2,100,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		1 Dokumen	2,205,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2,000,000	2,000,000	2 Laporan	2,100,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		2 Laporan	2,205,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	**2,546,670,000**	**2,392,455**	**100%**	**2,737,738,500**						**100%**	**2,874,625,425**	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	0	190 Paket	0	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		190 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2,546,670,000	2,392,455	32 Orang	2,674,003,500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		32 Orang	2,807,703,675	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0		100 Orang	63,735,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		100 Orang	66,921,750	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum**	**0**	**316,348,000**	**389,974,100**	**100%**	**332,165,400**						**100%**	**348,773,670**	

1	5	1	2.06	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan		0	0		0	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama			0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	0	1 Paket	0	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		1 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		27,044,800	27,754,100	1 Paket	28,397,040	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		1 Paket	29,816,892	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		18,540,000	63,080,000	15 Laporan	19,467,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		15 Laporan	20,440,350	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		270,763,200	299,140,000	1 Laporan	284,301,360	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		1 Laporan	298,516,428	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0**	**43,997,600**	**50,477,400**	**100%**	**47,385,240**						**100%**	**49,754,502**	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		24,989,600	31,469,400	1 Laporan	24,108,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		1 Laporan	25,313,400	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		19,008,000	19,008,000	12 Laporan	23,277,240	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		12 Laporan	24,441,102	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0		1 Laporan	0	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		1 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0**	**188.150.000**	**196,570,000**	**100%**	**197,557,500**						**100%**	**207,435,375**	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		39,100,000	37,400,000	2 Unit	41,055,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		2 Unit	43,107,750	Satuan Polisi Pamong Praja

1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		140,890,000	149,020,000	15 Unit	147,934,500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		15 Unit	155,331,225	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8,160,000	10,150,000	1 Unit	8,568,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	8,996,400	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	0	1 Unit	0	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		1 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**1,520,242,100**	**1,423,237,200**	**100%**	**1,659,254,205**						**100%**	**1,742,216,915**	
1	**5**	**2**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**0**	**576,111,100**	**423,237,200**	**100%**	**604,916,655**						**100%**	**635,162,488**	
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		231,945,000	212,111,600	30 Kasus	243,542,250	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		30 Kasus	255,719,363	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		228,115,600	49,686,000	1 Laporan	239,521,380	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		1 Laporan	251,497,449	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		116,050,500	161,439,600	6 Laporan	121,853,025	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		6 Laporan	127,945,676	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**2**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**0**	**944,131,000**	**1,000,000,000**	**100%**	**991,337,550**						**100%**	**1,040,904,428**	

1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/		247,723,500	221,483,500	8 Laporan	260,109,675	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DBHCHT)		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		6 Laporan	273,115,159	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yg dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota		15,071,500	0	1 Laporan	15,825,075	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		1 Laporan	16,616,329	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP		681,336,000	778,516,500	10 Laporan	715,402,800	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DBHCHT)		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		7 Laporan	751,172,940	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**2**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**0**	**0**	**0**	**100%**	**63,000,000**						**100%**	**66,150,000**	
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada		0	0	1 Laporan	63,000,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perlindungan masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama		1 Laporan	66,150,000	Satuan Polisi Pamong Praja
TOTAL							**0**	**9,141,672,709**	**9,970,882,407**		**10,223,361,827**							**10,734,529,918**	

BAB IV
PENUTUP

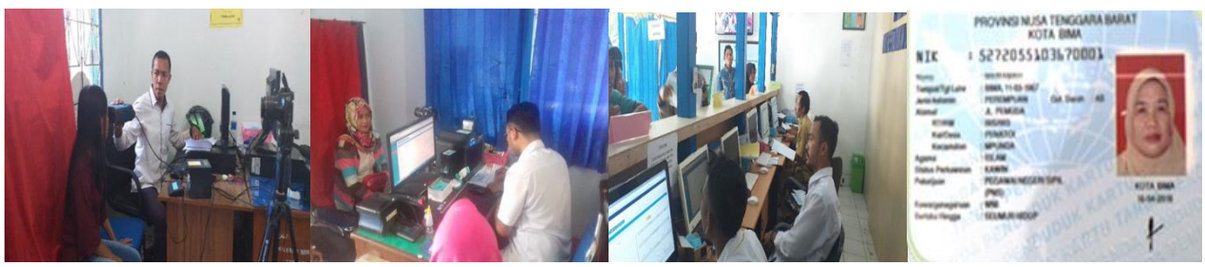
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dan arah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara fungsional oleh masing-masing unit kerja dalam angka tercapainya tujuan dan sasaran yang ditargetkan.

Keberhasilan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran SKPD periode Tahun 2025 tidak hanya ditentukan oleh akurat dan realistisnya penyusunan rencana kerja melainkan didukung oleh tekad dan semangat pengabdian semua personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima yang akan melaksanakannya.

Disamping itu dalam melaksanakan semua rencana kerja di lapangan masih banyak muncul masalah, hambatan dan kendala yang perlu diantisipasi sebelumnya sehingga diperlukan kejelian dan kemampuan pelaksana dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian agar tercapai sasaran kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Demikian rencana kerja ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima semoga dapat dipahami, direalisasikan sebagaimana yang diharapkan oleh masing-masing unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima sesuai dengan fungsinya.

RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, atas Ijin dan Perkenan-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2025 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Rencana kerja ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Bima yang diemban oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Selain itu, laporan ini disusun sebagai instrumen penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*). Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024-2026 sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Rencana kerja telah diupayakan sebaik mungkin. Walaupun demikian, disadari bahwa semua tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehingga masih terus memerlukan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Akhirnya semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat bagi evaluasi kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil khususnya di Kota Bima pada umumnya.

Raba-Bima, 2025
Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil

Hj. MARIAMAH, SH.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670311 199303 2 013

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam dokumen Renja-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima terkandung arti bahwa penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah memerlukan perencanaan kerja tahunan berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Visi Misi Kepala Daerah, dan RPJMD per 5 (lima) tahun.

Dengan Perencanaan serta penetapan target yang akurat dan Rencana Kerja tentunya akan mempermudah pengukuran pencapaian sasaran dan tujuan dalam akhir periode tahunan nantinya, sehingga akan mempermudah pula dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Akhirnya dapat dilihat pada tercapaianya peningkatan kinerja serta terwujudnya akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.

Informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja ini diupayakan untuk menyampaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaiamana yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2025.

Pemerintah Kota Bima telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024-2026 yang merupakan acuan dan tolak ukur pelaksanaan program dan kegiatan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima selama penerapannya diselaraskan agar terjadi kesinambungan antara perencanaan dan pertanggungjawaban.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 17);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2010 pasal 16 tentang Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima;

1.3. M a k s u d dan T u j u a n

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 15 Tahun 2014, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

A. Maksud:

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan arah dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025.

B. Tujuan:

1. Sebagai pedoman kerja dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima khususnya dan Visi Misi Pemerintah Kota Bima pada umumnya;
2. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat;
3. Menciptakan kesamaan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik (Good Governance).

1.4. Sistimatika Penulisan

Adapun sistimatika penulisan Renja Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Dearah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Dearah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Bima.

Penetapan target kinerja atas kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) berupa: *input, output, dan outcome*. Evaluasi kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi indikator kinerja dari setiap kegiatan serta rencana kinerja dan realisasi dari setiap indikator kinerja sasaran.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian sasaran beserta target dan realisasinya dapat dilihat dalam tabel 1 berikut :

Tabel T.C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

KOTA BIMA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Skpd Tahun 2024			Target Program/Kegiatan Renja Pd Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Targert Program/Kegiatan Renstra Pd Sampai Dengan Tahun 2025	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PERKIRAAN TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4		5	6	7=(6/5) * 100	8	9=(4+6+8)	10 = (9/3)
2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**12**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
2	**12**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Jumlah dokumen program penunjang urusan pemerintah daerah**	**12 Dok**	**12 Dok**	**12 Dok**	**12 Dok**	**100%**	**12 Dok**	**36 dok**	**100%**
2	12	01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 dok	100%
2	12	01.2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 dok	100%
2	12	01.2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 dok	100%
2	12	01.2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	12	01.2.01	04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%

2	**12**	**01.2.01**	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	**12**	**01.2.01**	06	Koordinasi dan penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	**12**	**01.2.01**	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	6 dok	100%
2	**12**	**01.2.02**		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 Dok**	**12 Dok**	**12 Dok**	**12 Dok**	**100%**	**12 Dok**	**36 dok**	100%
2	**12**	**01.2.02**	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	37 orang	37 orang	30 orang	30 orang	100	37 orang	111 orang	100%
2	**12**	**01.2.02**	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah laporan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	100%
2	**12**	**01.2.02**	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	100%
2	**12**	**01.2.02**	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	**12**	**01.2.02**	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	6 dok	100%
2	**12**	**01.2.06**		**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah**	**12 dok**	**12 dok**	**12 dok**	**12 dok**	**100%**	**12 dok**	**36 dok**	100%
2	12	01.2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	12	01.2.06	04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Laporan Penyediaan bahan logistic kantor	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	12	01.2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	100%
2	12	01.2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	100%
2	**12**	**01.2.08**		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	100%
2	12	01.2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	100%
2	12	01.2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan lsitrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan lsitrik	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	100%

2	12	01.2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	6 dok	100%
2	**12**	**01.2.09**		**Pemeliharaan barang milik daerah penjunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan barang milik daerah penjunjang urusan pemerintah daerah**	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	100%
2	12	01.2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah laporan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	100%
2	12	01.2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah dokumen Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	100%
2	12	01.2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah dokumen Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	**12**	**02**		**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Peresentase Pendaftaran Kependudukan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	100%
2	**12**	**02.2.01**		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Masyarakat Yang Mendapatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	100%
2	12	02.2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2000 dok	2000 dok	2000 dok	2000 dok	100%	2000 dok	6000 dok	100%
2	12	02.2.01	02	Pencatatn, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen berupa Kartu Keluarga	2000 dok	2000 dok	2000 dok	2000 dok	100%	2000 dok	6000 dok	100%
2	12	02.2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	41 dok	41 dok	41 dok	41 dok	100%	41 dok	123 dok	100%
2	**12**	**02.2.02**		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	9 dok	100%
2	12	02.2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir dan buku terkait pendafatran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Pengadaan Ribon KTP dan KIA	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	9 dok	100%
2	**12**	**02.2.03**		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	15 dok	100%
2	12	02.2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		5 dok	5 dok	5 dok	100%			
2	**12**	**03**		**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Jumlah Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0-17 Tahun**	**98%**	**98%**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**98%**	**298%**	100%
2	12	03.2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%

2	12	03.2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatn, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	12	03.2.01	02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penlayanan Pencatatan Sipil Melalui Kerjasama Bidan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	12	03.2.01	03	Pengumpulan, Analisa dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisa dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	12	03.2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	15 dok	100%
2	12	03.2.02	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	6 dok	100%
2	12	03.2.02	10	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil		5 dok	5 dok	5 dok	100%			
2	**12**	**04**		**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Jumlah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat**	99,27%	99,27%	100%	100%	100%	99,27%	299%	100%
2	**12**	**04.2.01**		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	JumlahDokumen Hasil Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	12	04.2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Yang Diolah dan Disajikan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	12	04.2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan						1 dok	1 dok	100%
2	**12**	**04.2.02**		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	12	04.2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	**12**	**04.2.03**		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	12	04.2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Infromasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Hasil Fasilitasi Terkait Pengelolaan Infromasi Administrasi Kependudukan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	12	04.2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	12	04.2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	12	04.2.03	07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%

					Masyarakat								
2	**12**	**04.2.04**		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	12	04.2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan PMPRB, SIPP, IKM dan Ombusman	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	**12**	**05**		**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Jumlah Dokumen Profil Kependudukan dan Agregat Kota Bima**	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok		
2	**12**	**05.2.01**		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Kota Bima	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	9 dok	100%
2	12	05.2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan Data Kependudukan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	12	05.2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	6 dok	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Dearah
Kota Bima

NO	Indikator *)	SPM	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Masyrakat	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi kependuduk	90 %	91 %	92 %	88.79%	91.43 %	91 %	92 %	
2.	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	Persentase penduduk yang memiliki Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	96 %	97 %	98 %	110.12%	97.33 %	97 %	98 %	
3.	Presentase OPD yang memmanfaatkan data kependudukan dalam perencanaan kebijakan OPD	-	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	96 %	97 %	98 %	96.29%	66.66 %	97 %	98 %	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- Permasalahan dan Hambatan:
  a. Kurangnya SDM yang mumpuni baik dalam jumlah maupun kualifikasi,
  b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai,
  c. Penganggaran yang kurang dapat mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang tujuan maupun target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.

- Rekomendasi dan Catatan Strategis:
  a. Diharapkan adanya tambahan SDM yang qualified sehingga dapat menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  b. Tersedianya sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan dan tujuan SKPD.
  c. Ketersediaan anggaran untuk menunjang dan mempercepat kegiatan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Sehingga dapat mencapai tujuan maupun target yang telah ditetapkan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Setelah dilakukan perbandingan terhadap rangcangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan terhadap sub sub kegiatan yang dibutuhkan maka dilakukan rasionalisasi pengurangan sub kegiatan yang diangap tidak perlu dibutuhkan lagi untuk mendukung pencapaian sasaran strategis PD yang selanjutnya besaran tersebut dialihkan untuk mendukung sub kegiatan lain terutama untuk menunjang indicator kinerja utama.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Bima

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Kota Bima**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	125.465.824.00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	397.267.681	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bima	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	450 Lembar	15.526.000.00	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bima	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	60 Dok.	2.500.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	92.209.824.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	99.567.681	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Bima	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa kebersihan kantor	2 Orang	18.000.000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima	Jumlah Jasa Kebersihan Yang tersedia	2 Orang	295.200.000	
						Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima	Cakupan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	250.649.000.00	
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56 unit	101.923.250.00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit	65.304.000	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.750 lembar	7.094.100.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.647 lembar	10.600.000	
6	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Bima	Jumlah bahan logistic kantor	12 Bulan	17.200.000.00	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Bima	Jumlah bahan logistic kantor	12 Bulan	16.073.600	
7	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Bima	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50 laporan	257.253.000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	49 kali	167.769.084	
						Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kota Bima**	Cakupan administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	4.588.149.125	

8	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	3.618 bh/rim/btl /ktk	157.549.000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah bulan gaji ASN terbayar	12 Bulan	4.315.483.625	
9	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Bima	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	5 Orang	87.100.000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bima	Jumlah bulan gaji ASN terbayar	12 Bulan	176.746.000	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa untuk penatausahaan administrasi keuangan	9 Orang	89.850.000	
						Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	3.062.000	
						Penyusunan Laporan Keuangan akhir semesteran	Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akh semesteran	1 Laporan	3.007.500	
IV	**Program Peningkatan Pengembagan Sistem Pelaporan Capaian Realisasi Kinerja**	**Kota Bima**	**Nilai LKIP PD**	**8 Dokumen**	**125.230.000.00**						
10	Penyusunan Laporan Keuangan akhir semesteran	Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akh semesteran	1 Laporan	3.000.000,00						
11	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	3.000.000.00						
						Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kota Bima**	**Jumlah Dokumen Renja dan Renstra**	**9 Laporan**	**21.148.000**	
12	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Laporan	21.290.000.00	Koordinasi dan Peny.lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen SIPD	1 Laporan	2.007.000	
13	Penyusunan Rencana kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	Kota Bima	Jumlah Dokumen Rencana kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	3 dokumen	53.705.000.00	Koordinasi dan Peny.Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	2.150.000	
						Koordinasi dan Peny.Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1.987.000	
						Koordinasi dan Peny.Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	Dokumen DKA SKPD	1 dokumen	2.342.000	
						Koordinasi dan Peny.Dokumen Perubahan DPAA-SKPD	Kota Bima	Dokumen Perubahan DKA SKPD	1 dokumen	2.181.000	
						Peny.Dokumen Perencanaan	Kota	Jumlah Dokumen Renja	2	2.089.000	

						Perangkat Daerah	Bima	dan Renstra	Dokumen		
14	Penyusunan lakip,LPJ dan LPPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen lakip,LPJ dan LPPD	3 dokumen	5.000.000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen lakip dan LPPD	2 dokumen	8.392.000	
I	**Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur**	Kota Bima	**Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur**	**100%**	**17.500.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur**	**100%**	**244.815.000**	
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Bima	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Unit	9.990.000.00	Pemeliharaan rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Unit	150.000.000	
16	Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Jumlah Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	8 Unit	25.999.900.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kota Bima	Jumlah Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	5 Unit	75.655.000	
17	-	-	-	-	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor Lainnya yang terpelihara	15 Unit	19.160.000	
II	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Kota Bima**	**Perentase pegawai yang disiplin**	**100%**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Kota Bima**	**Perentase pegawai yang disiplin**	**100%**		
18	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kota Bima	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	33 Setel	-	-	-	-	-	-	
V	**Program Peningkatan Administrasi Kependudukan**	**Kota Bima**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Terhadap Pelayanan Publik**	**100%**	**62.814.100.00**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kota Bima**	**Cakupan Penduduk yang mendapatkan layanan kependudukan**	**100%**	**75.538.000**	
19	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Kota Bima	Jumlah Dokumen peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	1 dokumen	15.000.000.00	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bima	Jumlah masyarakat yang terlayani	1 Tahun	38.951.000	
20	Pemutahiran data Kependudukan	Kota Bima	Jumlah pelaksanaan hasil Pemutahiran data Kependudukan	1 Laporan	24.174.100.00	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Bima	Jumlah penduduk rentan adminduk yang tertangani dengan mobile perekaman ktp-el di 41 kelurahan	3518 jiwa	26.749.000	
21	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Kota Bima	Perentase Hasil Survei IKM	5000 Jiwa	23.640.000.00	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas pendaftaran penduduk	Kota Bima	Jumlah penduduk yang terlayani pendaftaran dokumen kependudukan berupa mobile penerbitan KIA di SD dan SMP se	32.000 Jiwa	9.838.000	

								Kota Bima			
22	Penerbitan Dokumen Kependudukan	Kota Bima	Jumlah Penduduk yang terlayani	35.600 Jiwa	365.000.000.00	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Kota Bima**	**Cakupan Penduduk yang mendapatkan layanan kependudukan**	**100%**	156.428.000	
						Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan		Jumlah Jiwa yang mendapatkan Blako dan Formulir Adminduk	35.000 Jiwa	156.428.000	
23	Sosialisasi Pelayanan Publik dibidang Kepedudukan dan Pencatatan Sipil	Kota Bima	Jumlah dokumen pelaksanaan hasil Sosialisasi Pelayanan Publik dibidang Kepedudukan dan Pencatatan Sipil	1 dokumen	30.650.750.00	**Penyelenggaran Pencatatan Sipil**	**Kota Bima**	**Terselenggaranya Koordinasi maupun sosialisasi mengenai Pencatatan Sipil**	**100%**	**7.241.000**	
						Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabu/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Bima	Terlaksananya Kordinasi dengan KUA dan Pengadilan Agama dan dengan pemuka agama lain	790 Pasangan	7.241.000	
24	Peningkatan Pelayanan Publik dibidang pencatatan Sipil	Kota Bima	Perentase Masyarakat yang terlayani	2230 Jiwa	122.411.100.00	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Kota Bima	Perentase Masyarakat yang terlayani	**100%**	55.731.900	
25	-	-	-	-	-	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Kota Bima	Jumlah masyarakat yang mengurus dokumen akta kematian dan akta perunahan status	950 Jiwa	1.452.000	
26	-	-	-	-	-	Pengumpulan , Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Kota Bima	Terintegrasinya Aka kelahiran Non Siak ke dalam SIAK	1000 akta	11.998.000	
						Pengumpulan Data Kependukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Kota Bima**	**Jumlah Dokumen dan Database yang disajikan**	**14 Dokumen**	**12.625.000**	
27	Penyediaan Informasi yang bisa diakses masyarakat	Kota Bima	Perentase masyarakat yang dapat mengakses informasi Kependudukan	20 Akses	29.186.850.00	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Bima	Jumlah Dokumen dan Database yang disajikan	14 Dokumen	4.764.000	
						Kerjasama pemanfaatan data	Kota	Jumlah kerjasama	1 Dokumen	7.861.000	

						kependudukan	Bima	pemanfaatan data kependudukan			
						Penataan Pengelolaan Informasi Aministrasi Kependudukan	**Kota Bima**	**Jumlah Dokumen Perda,Perwali, SP,dan SOP Pelayanan**	**1 Dokumen**	**11.987.000**	
	-	-	-	-	-	Penyusunan Tata Cara perencanaan,pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait pengelolaan Informasi administrasi Kependuduka	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perda,Perwali, SP,dan SOP Pelayanan, IKM, dan SIPP	3 Dokumen	11.987.000	
						Penyelenggaran pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Kota Bima**	**Cakupan terselenggaranya Pengelolaan Informasi Kependudukan**	**100%**	**69.709.000**	
28	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi kependudukan	Kota Bima	Jumlah pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi kependudukan	1 Paket Jaringan	323.755.250	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bima	Meningkatnya pengelolaan informasi kependudukan Operator SIAK	31 Orang	53.530.000	
29	Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Bima	Rasio Penduduk yang memiliki dokjmen kependudukan dan pencatatan sipil	26 OPD	9.066.000.00	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Bima	Jumlah OPD yang mendapatkan hak Akses	26 OPD	7.735.000	
30	-	-	-	-	-	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi Kependudukan	Kota Bima	Jumlah Informasi yang disampaikan ke masyarakat	100 %	2.925.000	
31	Kerja Sama dan Inovasi pelayanan	Kota Bima	Jumlah OPD Kampung Administrasi Kependudukan di 5 Kelurahan	22 OPD	102.954.000.00	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentngan dan Masyarakat	Kota Bima	Jumlah Permasalahan/ Pengaduan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22 Kasus	5.519.000	
32	Pelayanan Pengaduan	Kota Bima	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pelayanan pengaduan	12 dokumen	38.104.500.00						
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Kota Bima**	**Meningkatnya MonevPengawasaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**80 %**	**4.975.000**	
33	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Bima	Jumlah Dokumen pelaksanaan hasil	1 dokumen	12.032.400.00	Pembinaan dan Pengawasan terkait pengelolaan informasi	Kota Bima	Dokumen IKM yang dapat dipertanggung jawabkan	1 Dokemen	4.975.000	

			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			administrasi kependudukan					
						Penyusunan Profil Kependudukan	**Kota Bima**	**Tersedianya Dokumen Profil Kependudukan**	**100%**	**9.273.000**	
34	Penyusunan Buku Agregat	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penyusunan Buku Agregat	20 Buku	6.274.000.00	Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota	Kota Bima	Tersedianya Dokumen Profil Kependudukan	2 Dokumen	5.066.000	
35	Profile kependudukan	Kota Bima	Jumlah penyusunan buku Profile kependudukan	35 Buku	6.988.000.00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Kota Bima	Jumlah dokumen profil dan proyeksi kependudukan	2 Dokumen	4.207.000	

2.5. Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahapan penyusunan RPD diawali dengan musyawarah tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Pemerintah Kota Bima. Musyawarah ini dilakukan untuk mendapatkan usulan langsung para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kab/kota, LSM, asosiasi asosiasi, perguruna tinggi atau lainya yang langsung ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dari rangkaian kegiatan tersebut diatas tidak ada masukan/usulan langsung yang diarahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kota Bima

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB. III
TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan-kebijakan Nasional maupun Propinsi serta Program Prioritas tidak dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima karena pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh SKPD-SKPD teknis terkait kebijakan tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan program dan kegiatan secara optimal. Oleh karena itu setiap Satuan Kerja harus merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Bima secara komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan di bawah ini.

3.2.1. Tujuan

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 telah ditetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima :

‘’ Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ‘’

3.2.2. Sasaran

Sasaran dari tujuan yang telah dirumuskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
b. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
c. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan.

3.3. Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima merupakan penjabaran teknis daripada visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program dengan mengerahkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, prasarana dan sarana maupun financial sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) di Kota Bima.

Program dan Kegiatan yang akan dirancang harus berdasarkan Renstra SKPD seperti pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kota Bima

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Target Kinerja	LOKASI KEGIATAN	DANA/PAGU 2025	Target Kinerja	LOKASI KEGIATAN	DANA/PAGU 2026
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.928.057.990**			**6.031.222.718**
2.12	**Administrasi Kependudukan dan Capil**				5.928.057.990			5.992.222.718
2.12 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***				5.511.127.090			5.531.450.522
2.12 . 01 . 2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		80 persen		21.148.000	80 persen		18.137.270
2.12 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (D A U)	2 dokumen	Kota Bima	2.089.000	2 dokumen	Kota Bima	2.818.000
2.12 . 01 . 2.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 dokumen	Kota Bima	2.150.000	1 dokumen	Kota Bima	2.436.000

2.12 . 01 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 dokumen	Kota Bima	1.987.000	1 dokumen	Kota Bima	2.568.000
2.12 . 01 . 2.01 . 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (D A U)	80 persen	Kota Bima	2.342.000	80 persen	Kota Bima	2.714.000
2.12 . 01 . 2.01 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 dokumen	Kota Bima	2.181.000	1 dokumen	Kota Bima	2.568.000
2.12 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (D A U)	2 dokumen	Kota Bima	2.007.000	2 dokumen	Kota Bima	2.816.000
2.12 . 01 . 2.01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (D A U)	2 dokumen	Kota Bima	8.392.000	2 dokumen	Kota Bima	5.968.000
2.12 . 01 . 2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		80 persen		4.588.149.125	80 persen		4.721.801.607
2.12 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 tahun	Kota Bima	4.315.483.625	1 tahun	Kota Bima	4.415.096.826
2.12 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 tahun	Kota Bima	176.746.000	1 tahun	Kota Bima	180.421.414
2.12 . 01 . 2.02 . 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 tahun	Kota Bima	89.850.000	1 tahun	Kota Bima	108.590.000
2.12 . 01 . 2.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 dokumen	Kota Bima	3.062.000	1 dokumen	Kota Bima	3.278.000
2.12 . 01 . 2.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (D A U)	2 dokumen	Kota Bima	3.007.500	2 dokumen	Kota Bima	3.124.000
2.12 . 01 . 2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		80 persen		259.747.284	80 persen		301.276.117
2.12 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan	Dana Alokasi	7 unit	Kota Bima	65.304.000	4 unit	Kota Bima	68.725.720

	Perlengkapan Kantor	Umum (D A U)							
2.12 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 tahun	Kota Bima	16.073.600	1 tahun	Kota Bima	18.920.000
2.12 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 tahun	Kota Bima	10.600.000	1 tahun	Kota Bima	9.200.000
2.12 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 tahun	Kota Bima	167.769.084	1 tahun	Kota Bima	228.162.604
2.12 . 01 . 2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		80 persen		397.267.681	80 persen		443.503.965
2.12 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (D A U)	1200 lembar	Kota Bima	2.500.000	1200 lembar	Kota Bima	2.600.000
2.12 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 tahun	Kota Bima	99.567.681	1 tahun	Kota Bima	102.839.360
2.12 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 tahun	Kota Bima	295.200.000	1 tahun	Kota Bima	18.000.000
2.12 . 01 . 2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		80 persen		244.815.000	80 persen		257.731.563
2.12 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (D A U)	5 unit	Kota Bima	75.655.000	5 unit	Kota Bima	83.100.000
2.12 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (D A U)	45 unit	Kota bima	19.160.000	45 unit	Kota bima	20.000.000
2.12 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 unit	Kota Bima	150.000.000	1 unit	Kota Bima	10.989.000
2.12 . 02	***Program Pendaftaran Penduduk***				231.966.000			344.916.203

2.12 . 02 . 2.01	*Pelayanan Pendaftaran Penduduk*		80 persen		75.538.000	80 persen		83.381.153
2.12 . 02 . 2.01 . 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dana Alokasi Umum (D A U)	3518 jiwa	Kota Bima	26.749.000	3518 jiwa	Kota Bima	28.591.510
2.12 . 02 . 2.01 . 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dana Alokasi Umum (D A U)	32000 jiwa	Kota Bima	9.838.000	32000 jiwa	Kota Bima	12.004.000
2.12 . 02 . 2.01 . 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dana Alokasi Umum (D A U)	18 sekolah	Kota Bima	38.951.000	18 sekolah	Kota Bima	46.500.000
2.12 . 02 . 2.02	*Penataan Pendaftaran Penduduk*		80 persen		165.428.000	80 persen		281.535.050
2.12 . 02 . 2.02 . 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dana Alokasi Umum (D A U)	35000 jiwa	Kota Bima	165.428.000	35000 jiwa	Kota Bima	281.535.050
2.12 . 03	***Program Pencatatan Sipil***				76.395.900			78.687.674
2.12 . 03 . 2.01	*Pelayanan Pencatatan Sipil*		80 persen		69.181.900	80 persen		71.254.473
2.12 . 03 . 2.01 . 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dana Alokasi Umum (D A U)	800 jiwa	Kota Bima	1.452.000	800 jiwa	Kota Bima	2.000.000
2.12 . 03 . 2.01 . 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dana Alokasi Umum (D A U)	5500 jiwa	Kota Bima	55.731.900	5500 jiwa	Kota Bima	58.556.280
2.12 . 03 . 2.01 . 03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dana Alokasi Umum (D A U)	1000 jiwa	Kota Bima	11.998.000	1000 jiwa	Kota Bima	14.998.280
2.12 . 03 . 2.02	*Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*		80 persen		7.214.000	80 persen		7.433.201

2.12 . 03 . 2.02 . 03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Dana Alokasi Umum (D A U)	750 pasang	Kota Bima	7.214.000	750 pasang	Kota Bima	7.433.201
2.12 . 04	***Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***				99.296.000			102.136.732
2.12 . 04 . 2.01	*Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan*		80 persen		12.625.000	80 persen		14.953.822
2.12 . 04 . 2.01 . 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dana Alokasi Umum (D A U)	14 dokumen	Kota Bima	4.764.000	14 dokumen	Kota Bima	5,735,200
2.12 . 04 . 2.01 . 02	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Dana Alokasi Umum (D A U	1 Dokumen	Kota Bima	7.861.000	1 Dokumen	Kota Bima	9.320.000
2.12 . 04 . 2.02	*Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*		80 persen		11.987.000	80 persen		12.545.200
2.12 . 04 . 2.02 . 01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 dokumen	Kota Bima	11.987.000	1 dokumen	Kota Bima	12.545.200
2.12 . 04 . 2.03	*Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*		80 persen		69.709.000	80 persen		73.966.175
2.12 . 04 . 2.03 . 03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dana Alokasi Umum (D A U)	31 orang	Kota Bima	53.530.000	31 orang	Kota Bima	56.130.775

2.12 . 04 . 2.03 . 04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dana Alokasi Umum (D A U)	26 opd	Kota Bima	7.735.000	26 opd	Kota Bima	8.972.600
2.12 . 04 . 2.03 . 05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 kali	Kota Bima	2.925.000	1 kali	Kota Bima	4.287.800
2.12 . 04 . 2.03 . 07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dana Alokasi Umum (D A U)	22 kasus	Kota Bima	5.519.000	22 kasus	Kota Bima	6.575.000
2.12 . 04 . 2.04	*Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*		80 persen		4.975.000	80 persen		5.235.640
2.12 . 04 . 2.04 . 01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dana Alokasi Umum (D A U)	1 dokumen	Kota Bima	4.975.000	1 dokumen	Kota Bima	5.235.640
2.12 . 05	***Program Pengelolaan Profil Kependudukan***				9.273.000			14.031.587
2.12 . 05 . 2.01	*Penyusunan Profil Kependudukan*		80 persen		9.273.000	80 persen		14.031.587
2.12 . 05 . 2.01 . 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (D A U)	2 dokumen	Kota Bima	5.066.000	2 dokumen	Kota Bima	7.901.400
2.12 . 05 . 2.01 . 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dana Alokasi Umum (D A U)	2 dokumen	Kota Bima	4.207.000	2 dokumen	Kota Bima	6.333.573
					5.467.206.522			**5.631.222.522**

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						5,467,206,522							5,631,222,718	
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,962,573,322							5,111,450,522	
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17,609,000							18,137,270	
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2,082,800	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2 Dok	2,145,284	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,158,800	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dok	2,223,564	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,095,600	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,158,468	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,212,200	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,278,566	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,236,200	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,303,286	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,273,800	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dok	2,342,014	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4,549,600	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dok	4,686,088	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**4,117,283,114**							**4,240,801,607**	
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		34 ASN	32 ASN	32 ASN	3,853,492,064	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				37 ORANG	3,969,096,826	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	151,865,450	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 tahun	156,421,414	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	105,840,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8 Orang	109,015,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3,078,200	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dok	3,170,546	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3,007,400	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Dok	3,097,622	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**292,501,084**							**301,276,117**	
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	66,724,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 paket	68,725,720	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	17,408,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	17,930,240	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10,600,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				23333 lembar	10,918,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	197,769,084	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	203,702,157	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**430,586,374**							**443,503,965**	
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2,500,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	2,575,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	89,686,374	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	92,376,965	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	338,400,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Orang	348,552,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**104,593,750**							**107,731,563**	
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 unit	5 unit	5 unit	5 unit	75,258,750	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Unit	77,516,513	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	325 Unit	65 Unit	65 Unit	65 Unit	19,160,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				65 Unit	19,734,800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	3 unit	3 unit	3 unit	10,175,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Gedung	10,480,250	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**334,870,100**							**344,916,203**	
2	**12**	**2**	2.01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**						**61,535,100**							**63,381,153**	
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	10000 dokumen/orang	2000 Dokumen /orang	500 Dokumen/ orang	500 Dokumen /orang	23,724,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional		Penduduk Kota Bima	2000 jiwa	24,435,720	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	80000 dokumen/orang	16000 Dokumen/orang	12 Dokumen	12 Dokumen	7,545,300	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional		Penduduk Kota Bima	16000 Keping	7,771,659	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	205 laporan	41 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	30,265,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional			41 kel	31,173,774	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**2**	2.02		**Penataan Pendaftaran Penduduk**						**273,335,000**							**281,535,050**	
2	12	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	25 Paket	5 Paket	2 Paket	2 Paket	273,335,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional		Penduduk Kota Bima	29600 keping	281,535,050	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**76,395,800**							**78,687,674**	
2	**12**	**3**	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**						**69,179,100**							**71,254,473**	

2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4100 dokumen	820 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1,451,500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Penduduk Kota Bima	820 Akta	1,495,045	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yangDitingkatkan	5 layanan	1 Layanan	4 dokumen	4 dokumen	55,711,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional		Penduduk Kota Bima	5500 akta	57,382,330	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	2.01	3	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	5500 dokumen	1100 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12,016,600	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional		Penduduk Kota Bima	1100 Akta	12,377,098	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**3**	2.02		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**						**7,216,700**							**7,433,201**	
2	12	3	2.02	3	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	10 Laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	7,216,700	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional			2 MOU	7,433,201	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**79,744,400**							**82,136,732**	
2	**12**	**4**	2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**						**13,547,400**							**13,953,822**	
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	70 dokumen	14 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	4,894,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional			14 dokumen	5,040,923	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan					8,653,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	**12**	**4**	2.02		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**						**4,408,200**							**4,540,446**	

2	12	4	2.02	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	5 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4,408,200	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional			1 dokumen	4,540,446	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**4**	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**						**47,773,000**							**49,206,190**	
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	1 laporan	12 laporan	12 laporan	35,810,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional			1 paket jaringan	36,884,506	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	135 Dokumen	27 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	7,752,300	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional			27 OPD	7,984,869	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2,996,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional			1 kali	3,085,880	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	110 Laporan	22 laporan	12 laporan	12 laporan	1,214,500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional			22 kasus	1,250,935	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**4**	2.04		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**						**14,015,800**							**14,436,274**	
2	12	4	2.04	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	14,015,800	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional			4 dokumen	14,436,274	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**13,622,900**							**14,031,587**	
2	**12**	**5**	2.01		**Penyusunan Profil Kependudukan**						**13,622,900**							**14,031,587**	

2	12	5	2.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	7,473,800	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional			2 dokumen	7,698,014	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan danProyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	5 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6,149,100	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional			1 dokumen	6,333,573	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB. V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Catatan penting yang perlu menjadi perhatian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 adalah kurangnya kompetensi ASN/Non ASN pelayanan administrasi kependudukan dan sarana prasarana yang merupakan rekomendasi hasil penilaian IKM oleh Ombusman serta hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan public oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terhadap hal tersebut rencana tindak lanjut kedepannya yang harus dipenuhi yaitu peningkatan SDM melalui Bimtek dan diikutnya Diklat-Diklat Kompetensi sebagai Pelayan Publik demikian juga dengan peningkatan sarana dan prasarana Pemerintah Kota Bima semestinya segera membangun gedung pelayanan public yang representative dengan perkembangan mobilisasi dan tuntutan masyarakat kekinian.

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima akan terlaksana dengan efektif dan efisien.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dibuat sebagai Pedoman Dasar Dalam Kerangka Penyusunan RKPD Kota Bima Tahun Anggaran 2025.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bima,

Hj. MARIAMAH, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670311 199303 2 013

RENCANA KERJA (RENJA) AWAL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
TAHUN 2025



DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 24 Kota Bima
Email : dpad@kotabima.go.id
Website : https://perpus.bimakota.go.id
perpusarsipkobi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bima

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Awal Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dapat diselesaikan dengan baik.

RENJA Awal Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima tahun 2025 disusun sesuai yang diamanatkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan implementasi dari pelaksanaan Otonomi Daerah yang dituangkan dalam UU No. 32 tahun 2004 dengan memperhatikan beberapa urusan wajib dan urusan pilihan untuk menentukan program kegiatan. Penyusunan Renja merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen kebijakan umum Pemerintah Kota Bima.

Dalam penyusunan RENJA Awal tahun 2025 ini tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima (RPD) dan RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima. Penyusunan Rencana kerja merupakan salah satu upaya sistematis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dalam melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan satu tahun kedepan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal khususnya dalam hal pelayanan perpustakaan dan kearsipan.

Kami berharap RENJA Awal yang merupakan dokumen rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan pada tahun 2025 dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima, yang pada gilirannya memberikan manfaat bagi peningkatan pertumbuhan sumber daya manusia yang ditandainya dengan semakin tumbuh dan berkembangnya minat dan kebiasaan membaca masyarakat serta perkembangan kearsipan di Kota Bima.

Demikian RENJA tahun 2024 disusun semoga bermanfaat dalam kelanjutan pembangunan Kota Bima, atas dukungan berbagai pihak disampaikan terima kasih

Kota Bima, 3 Juni 2024

Kepala Dinas,



ACH. FATHONI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650620 198903 1 023

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	1
1.3.	Maksud danTujuan	3
1.4.	Sistematika Penulisan	3
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2.	Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5.	Penelaahan Ususlan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	22
3.3.	Program dan Kegiatan	23
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB V	PENUTUP	33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) awal merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Strategi (RENSTRA), yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) awal Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima adalah mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024-2026 serta berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026.

Dengan demikian Rencana Kerja (RENJA) awal Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bima ini disamping sebagai arahan kegiatan tahunan bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga merupakan bahan kelengkapan atau penyempurnaan dari RKPD tahun 2024 sebagai dokumen yang mengarahkan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bima secara keseluruhan.

Dokumen ini menyediakan suatu acuan yang resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota, APBD Propinsi, APBN dan Sumber dana lainnya yang bermuara pada upaya peningkatan pelayanan intern maupun pelayanan ekstern atau seluruh SKPD dalam rangka perencanaan dan koordinasi kebijakan pembangunan Daerah Kota Bima.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nopetisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Walikota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 313);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini untuk memberikan petunjuk/ gambaran rencana program/ kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan pedoman ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah dan DPA-Perangkat Daerah berdasarkan standar satuan harga Kota Bima Tahun Anggaran 2025.
b. Penyusunan pedoman ini ditujukan untuk menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan dengan perencanaan anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
c. Memberikan pedoman dan pengetahuan aparat perencanaan dalam menentukan sasaran prioritas strategi pembangunan dan kegiatan tahunan
d. Merupakan suatu tolak ukur sekaligus untuk mengukur serta sebagai bahan untuk mengevaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di prioritaskan.
e. Memudahkan dalam mencapai tujuan program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Awal (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi Renja Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Perangkat Daerah,

Evaluasi RENJA tahun lalu digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi. berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan secara internal oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran tahun lalu (tahun 2024), sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	2024	
			Target	Realisasi
I	Meningkatnya Pembangunan Literasi masyarakat	1. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	61	69,03
		2. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat	53	69,46
II	Meningkatnnya tata kelola arsip daerah	1. Persentase Perangkat Daerah yang telah dilkukan audit kearsipan	37%	37,14%
		2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	13%	14,28

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima telah menentukan dua sasaran strategis.

Sasaran Strategis I Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima yaitu Meningkatnya Indeks Literasi masyarakat kota bima dengan dua indikator kinerja yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut adalah Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat.

Sasaran strategis II yaitu Meningkatnya tata kelola arsip daerah yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai ketentuan dan peningkatan SDM pengelola kearsipan daerah.

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NTB

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (Output)	Target capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Urusan Wajib Perpustakaann									
2.17.2.17.01.19	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**									

2.17.2.17.01.19.01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pemebelajar	Jumlah Anggota yang meminjam buku	500 Anggota	-					-	
2.217.2.17.01.19.02	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah Pengunjung Perpustakaan keliling	15.000 Pengunjung	-					-	
2.217.2.17.01.19.03	Supervisi, pembinaaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khususs, perpustakaan sekolah dan masyarakat	Laporan Supervisi dan Pembinaan	73 Perpustakaan /TBM	-					-	
2.217.2.17.01.19.09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah bahan pustaka perpustakaan daerah	2.000 Eksemplar	-					-	
2.217.2.17.01.19.08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Jumlah pengelola yang kompoten	80 Peserta	-					-	
2.17.2.17.01.19.12	Pengolahan bahan pustaka	Jumlah bahan pustaka perpustakaan daerah	2.000 eksemplar	-					-	

2.23.02	***Program Pembinaan Perpustakaan***	***Meningkatnya Pembianaan dan Pengelolaan Perpustakaan Daerah***		***90%***					***-***	
		Presentase perpustakaan yang representatif		***-***	***80 %***	***88%***	***101%***	***3%***	***3%-***	
2.23.02.2.01	***Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota***	***Jumlah Perpustakaan yang representative***	***-***	***-***	***25 Perpustakaan***	***22 Perpustakaan***	***88%***			
		Perpustakaan Daerah terakreditasi B	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***B***		
		Peningkatan pengelolaan perpustakaan daerah						***1***		
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Teknologi Informasi berupa Koleksi e-book	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %			

		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	-	-	-	-	-	1 Layanan	1 Layanan	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan ditingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yng tersebar diberbagai instansi-	-	2 Puskesmas	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	100%	-	-	
		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	-	-	-	-	-	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	

	Pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Bedah Lokal yang terlaksana	-	-	1 Kali	1 Kali	-	-	-	
		Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-	-	-	-		100 Eksemplar	0	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar Nasiaonal Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada pendidikan dasar yang terakreditasi	-	-	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	100%	-		
		Jumlah perpustakaan pada pendidikan dasar yang sesuai standar nasional perpustakaan	-	10 Perpustakaan	-	-	-	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai	-	-	5 Perpustakaan	2 Perpustakaan	40%	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	

		Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan								
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelola Perpustakaan yang Mempunyai Kemampuan dan Bersertifikat	-	-	1 Orang	0				
		Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemustaka Perpustakaan	-	-	18.000 Pengunjung	13.694 Pengunjung	76%	-		
		Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang	-	-	-	-	-	1 Layanan	1 Layanan	

		Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi								
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang beragam dan Variatif yang tersedia	-	-	1250 Judul	1250 Judul	100 %	-	-	-
		Jumlah Bahan Pustaka Pengadaan	-	369 Judul	-	-	-	1.000 Ekesemplar	941 Eksemplar	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang diolah	-	-	8118 Judul	8118 Judul	100%			
		Jumlah Perawatan dan Pengolahan Bahan Pustaka	-	369 Judul		-	-	1.000 Ekesemplar	1155 Eksemplar	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Rekapitulasi Data Pustakawan dan Profil Perpustakaan se-Kota Bima	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %			

		Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	
2.23.02.2.02	***Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Meningkatnya Minat Baca Masyarakat***	-	-	80%	77,78%	97,23			
		Porsentase masyarakat yang gemar membaca	-	-	-	-	-	***30 %***		
		Jumlah lokus Gemar Membaca						***48 Lokus***	***48 Lokus***	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah Sosialisasi budaya baca dan pelayanan perpustakaan keliling yang dilakukan	-	5 Kali						

		Jumlah Lokus pembudayaan kegemar an membaca dan literasi pada satuan pendidikan	-	-	-	-	-	5 lokus	5 Lokus	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pojok Baca di Tempat Umum yang tersedia	-	-	1 Paket	1 Paket	100%			
		Jumlah Gedung dan sarana perpustakaan yang representative	-	1 Unit						
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Pelajar yang mendapatkan penghargaan	-	9 Orang	24 Orang	24 Orang	100%			
		Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	-	-				12 Orang	12 Orang	

	Pengembangan Literasi berbasis inkulusi Sosial	Jumlah Kampung literasi yang terbentuk	-	-	3 Lokasi	2 Lokasi	66%			
		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Social di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-	-				3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	
	Pemilihan Duta Baca	Jumlah Duta Baca	-	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100%	-	-	
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	**Meningkatnya Jumlah Koleksi Etnis budaya yang dimiliki dan dilestarikan**	**-**	**-**	**80%**	**42%**	52,5%	-	-	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Buku dan Dokumen lain yang Dialihmediakan*	**-**	**-**	*100 Buku*	*51 Buku*	51%	-	-	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Buku yang dialihmediakan	**-**	**-**	100 Buku	51 Buku	51%	-	-	

	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan Koleksi Etnis Nusantara*	-	-	*150 Buku*	*51 Buku*	*34%*	-	-	
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Etnis Nusantara	Jumlah Pengadaan Koleksi Etnis Nusantara	-	-	150 Judul	51 Buku	34%	-	-	
	Pengolahan dan penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah buku yang direparasi	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	-	-	
	Urusan Kearsipan									
2.17.2.17.01.08	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen /Arsip Daerah**									
2.17.2.17.01.08.02	**Pengolahan Arsip hasil akuisisi**	Jumlah Arsip yang diolah	**60 Boks**							
2.17.2.17.01.09	**Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan**									

2.17.2.17.01.09.03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan pemerintah/swasta	Laporan hasil Lomba/penilaian	1 Dokumen							
2.17.2.17.01.09.17	**Program pemeliharaan/rutin berkalaa sarana dan prasarana kearsipan**									
2.17.2.17.01.09.17.01	pemeliharaan/rutin berkla a sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Arsip dinamis	-							
2.17.2.17.01.09.17.02	Pelaksanaan Audit Pengawasan	Laporan Audit	1 Dokumen							
2.24.02	***Program Pengelolaan Arsip***	***Meningkatnya pengolahan Arsip***		***62,33%***				***100%***		
		Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Kearsipan Daerah	***-***	***-***	***80 %***	***104,30%***	***130,37***			
2.24.02.2.01	***Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/Kota***	***Jumlah Arsip Dinamis***	***-***	***-***	***10 Arsip***	***14 Arsip***	***140%***			
		Jumlah Arsip dinamis yang telah dikelola						***250 Arsip***	***306 Arsip***	

2.24.02.2.02.01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah Penciptaan dan Penggunaan arsip dinamis	-	9 Boks	10 Boks	14 Boks	140%			
		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan						100 Berkas	96 Berkas	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase arsip yang terawatt	-	100%						
		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	-	-				150 Berkas	210 Berkas	
2.24.02.2.02.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang diaudit	-	3 SKPD	3 OPD	3 OPD	100%			
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-				3 Laporan	3 Laporan	
2.24.02.2.02	***Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota***	***Meningkatnya Arsip Statis Daerah***	-	-	80 %	98,33%	122,91%			
		Jumlah Arsip	-	-	-	-	-	-		

		Statis yang telah dikelola								
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian salinan otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah penarikan arsip perangkat daerah	-	25 Boks						
		Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	-	-	-	-	-	-	-	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan akses arsip statis	Jumlah arsip hasilakuisisi	-	25 Boks	60 Arsip	59 Arsip	98,33%			
		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	-	-	-	-	-	-		

	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-	-				3 Laporan	3 Laporan	
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Tersedianya Informasi Kearsipan**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**			
		Jumlah Pengguna yang memanfaatkan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional						**50 Pengguna**	**3772 Pengguna**	
	Pemberdayaan kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM kearsipan yang handaldi unit kearsipan	-	2 OPD						
	Penyediaan informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah	Persentase pemanfaatan arsip yang berkualitas	-	-	100%	100%	100%			

	Kabupaten/Kota Melalui JIKN									
		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-	-				50 Pengguna	**3772** Pengguna	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis	-	-	1 Orang	1 Orang	**100%**			
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						3 Laporan	3 Laporan	
2.24.03	***Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip***	***Presentasi perlindungan arsip***			***100 %***	***100%***	***100%***	***100 %***	***114%***	

2.24.03.2.01	***Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi Dibawah 10 (sepuluh) Tahun***	***Tersedianya arsip daerah yang dinilai***	-	-	1 Eksemplar	1 Eksemplar	100%			
		Jumlah Arsip yang Dimusnahkan memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahu dibawah 10 (sepuluh) tahun	-	-	-	-	-	***100 Arsip***	***114 Arsip***	
	Penilaian,Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang dinilai dan ditetapkan	-	1 Eksemplar	1 Eksemplar	1 Eksemplar	100%			
		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	-	-	-	*100 Arsip*	*114 Arsip*	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dalam tabel berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BIMA

No.	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGITAN	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**BIDANG PERPUSTAKAAN**											
	Persentase Perpustakaan yang Representatif		Mengukur Indeksi Pembangunan Literasi Masyarakat	80%	61	62	63	88%	69,03	62	63	
			Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	14.000	14.600	15.200	15.800	13.711	7.143	600 Pengnjung pertahun	600 Pengnjung pertahun	
			Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan	17.116	32.726	34.750	36.250	30.469	34.346	1750 Eksemplar per tahun	1750 Eksemplar per tahun	
			Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	1:633	1:525	1:480	1:400			0.05 Pertahun	0.05 Pertahun	

1	*Jumlah Perpustakaan yang representatif*			*25 Perpustakaan*	-			100%	1%			
	Peningkatan pengelolaan perpustakaan daerah				100%	1%	1%	-	-			
2	Jumlah Layanan Teknologi Informasi berupa koleksi e-book			1 Paket	-			-	-			
	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan			
3	Jumlah Perpustakaan yang tersebar diberbagai instansi		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	10 Perpustakaan	-	-	-	-				

	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah				10 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan			
4	Jumlah kegiatan bedah lokal yang terlaksana			1 Kali	-	-	-					
	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				50 Eksemplar	87 Judul	90 Judul	100 Eksemplar	0			
5	Jumlah Perpustakaan pada pendidikan dasar yang terakreditasi		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	10 Perpustakaan	-			-				
	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional				10 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan			

6	Jumlah Perpustakaan Khusus yang memenuhi syarat dan standar perpustakaan nasional		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	5 Perpustakaan	-	-	-	2 Perpustakaan				
	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan			
7	Pengelola perpustakaan yang mempunyai kemampuan dan bersertifikat			1 Orang	-	-	-	-				
	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50 Orang	7 Orang	9 Orang	50 Orang	50 Orang			

8	Jumlah Pemustaka Perpustakaan		Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh	18.000 Pengunjung	-	-	-	13.694 Pengunjung				
	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan				1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan			
9	Jumlah Bahan Pustaka yang beragam dan variatif yang tersedia		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan	1250 Judul	B	-	-					
	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				1.000 Eksemplar	-	1250 Elsemplar	2417 Eksemplar	941 Eksemplar			
10	Jumlah Bahan Pustaka yang diolah			8118 Judul								
	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1.000 Eksemplar	1.250 eksemplar	1.250 Eksemplar	2417 Eksemplar	1155 Eksemplar			

11	Laporan Rekapitulasi Data Pustakawan dan Profil Perpustakaan Se-Kota Bima		Rasio ketercakupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	2 Dokumen	-			-				
	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen			
12	*Meningkatnya Minat Baca Masyarakat*		Mengukur tingkat kegemaran membaca masyarakat	*80%*	-	-	-	-				
	Porsentase Masyarakat yang gemar membaca			-	30 %	**-**	-	-				
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat					57	60	*49,19*	69,46			

13	Jumlah Sosialiasai Budaya Baca dan Pelayanan Perpustakaan Keliling yang dilakukan		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	1 Kali	-			-				
	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				5 Lokus	50 Lokus	54 Lokus	5 Lokus	5 Lokus			
14	Jumlah Sarana dan Prasarana Pojok Baca di Tempat Umum yang Tersedia			1 Paket	-		-	-				
15	Jumlah Pelajar yang mendapat penghargaan			24 Orang	-	-	-	-				
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				12 Orang	6 Orang	6 Orang	12 Orang	12 Orang			
16	Jumlah Kampung literasi yang terbentuk			3 Lokasi	-	-	-	-				

	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				5 Perpustakaan	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	4 Perpustakaan	3 Perpustakaan			
17	Jumlah Duta Baca			1 Orang	-	-	-	-	-			
18	**Meningkatnya Jumlah Koleksi Etnis budaya yang dimiliki dan dilestarikan**		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	**80%**	-	-	-	**-**	-			
19	Jumlah Buku dan Dokumen Lain yang Dialihmediakan			*100 Buku*	-	-	-	-	-			
20	Jumlah buku yang dialihmediakan			100 Buku	-	-	-	-	-			
21	*Jumlah Pengadaan Koleksi Etnis Nusantara*		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar di wilayah (item)	*150 Buku*	-	-	-	-	-			

22	Jumlah pengadaan koleksi etnis nusantara			150 Buku	-	-	-	-	-			
23	Jumlah buku yang direparasi			1 Kegiatan	-	-	-	-	-			
II	**BIDANG KEARSIPAN**											
1	**Meningkatnya persentase pemanfaatan kearsipan daerah**		Mengukur tingkat ketersiapan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungja waban nasional) pasal 40 dan pasal 59 undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	80 %	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,2				

	Persentase Jumlah Arsip yang Diolah		Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara baku Arsip sesuai Ketentuan		100%	14%	16%	-		Kenaikan 2% pertahun	Kenaikan 2% pertahun	
			Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan			13%	13%	-		1 % Persen	1 % Persen	
2	*Jumlah Arsip Dinamis*		Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	*10 Arsip*	-	5 SKPD	5 SKPD					
	Jumlah Arsip Dinamis yang telah Dikelola			-	250 Arsip	250 Arsip	250 Arsip	250 Arsip	306 Arsip			
3	Jumlah Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			10 Boks	-	-	1 Laporan	-				
	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan			-	100 Arsip	100 berkas	100 berkas	152 berkas	96 berkas			
4	Jumlah Naskah DInas yang dilakukan Pemeliharaan dan penyususutan			-	-	150 Berkas	150 Berkas	152 Berkas	210 Berkas			

5	Jumlah Perangkat Daerah yang diaudit			3 OPD	-	-	5 %					
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan			
6	*Meningkatnya arsip statis daerah*		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	80%	-	60 Boks	-					
	Jumlah Arsip Statis yang telah dikelola				10 Arsip	10 Arsip	-	144 Arsip				
7	Jumlah Arsip Hasil Akuisisi		dibuatkan sarana bantu temu balik	60 Arsip	-	-	-					
	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			-	10 Arsip	10 Arsip	10 Arsip	144 Arsip				
8	*Jumlah Salinan Otentik naskah asli arsip terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI*					-	-	-				

9	*Tersedianya Informasi Kearsipan*		Porsentase arsip statis yang telah	*100%*	-	-	-					
10	Persentase pemanfaatan arsip yang berkualitas		Porsentase jumlah arsip yang dimasukan	100%	-	-	-					
11	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis			1 Orang	-	-	-					
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan				2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	4 Laporan			
12	*Jumlah Pengguna yang memanfaatkan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional*				50 Pengguna	50 Pengguna	50 Pengguna	38 Pengguna	3772 Pengguna			
13	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				50 Pengguna	50 Pengguna	50 Pengguna	38 Pengguna	3772 Pengguna			

11	**Persentasi perlindungan arsip**		**Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	100%	100%	100%					
12	*Tersedianya arsip daerah yang dinilai*			1 Eksemplar		*100 Arsip*	*100 Arsip*		114 Arsip			
	Jumlah Arsip yang Dimusnahkan memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun				*100 Arsip*	*100 Arsip*	*100 Arsip*	139 Arsip	114 Arsip			
13	Jumlah Arsip yang dinilai dan ditetapkan			1 Eksemplar	-	-	-					

	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					*100 Arsip*	*100 Arsip*	139 Arsip				
14	*Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kearsipan di Masyarakat*			*1 Kegiatan*		-	-					
15	Jumlah arsip hasil autentikasi yang dinyatakan hilang			5 Boks Arsip		-	-					
	Persentase tersedianya perijinan penggunaan arsip							-	-			
	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup					1 Arsip	1 Arsip	-	-			

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang mempunyai fungsi meningkatkan minat baca masyarakat dan meningkatkan tata kelola arsip lingkup Pemerintah Kota Bima dihadapkan beberapa isu strategis yang antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya minat kunjung masyarakat di perpustakaan daerah
2. Rendahnya perhatian pimpinan SKPD di lingkup Pemerintah Kota Bima terkait masalah penataan arsip di lingkungan kerjanya
3. Pengadaan koleksi melalui dana BOS dan atau dana DAK sekolah tidak berdasarkan kebutuhan bacaan siswa/i
4. Alokasi anggaran untuk kegiatan promosi dan publikasi perpustakaan daerah yang tidak memadai
5. Masih kurangnya sumber daya manusia yang profesional dibidang perpustakaan dan kearsipan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal dalam tabel berikut

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Taahun 2025

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NTB

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu indikatif (RP.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Meningkatnya pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Kantor	90%	**5.886.955.901**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Meningkatnya pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Kantor	90%	**5,320,172,424**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Terlaksananya kegiatan perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peragkat Daerah	90%	40.958.639	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Terlaksananya kegiatan perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peragkat Daerah	90%	**40,494,700**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.972.889	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,745,700	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.604.250	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	1 Dokumen	2,367,500	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.350.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,035,300	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.721.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,721,300	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.095.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,095,100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	3 Laporan	28.529.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	28,529,800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dinas Perpustakaan dan Arsipda**	**Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**4.908.463.690**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Perpustakaan dan Arsipda**	**Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**4,297,279,352**	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	4.768.347.090	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	**4,157,162,752**	
	Pelaksanaan Penataaussahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	134.274.400	Pelaksanaan Penataaussahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	134,274,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.476.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,476,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	4.365.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	4,365,800	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Dinas Perpustakaan dan Arsipda**	**Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**1 Paket**	30.000.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas Perpustakaan dan Arsipda**	**Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**1 Paket**	30,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	30,000,000	

						Kelengkapannya		Kelengkapan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Dinas Perpustakaan dan Arsipda**	**Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	378.278.500	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Perpustakaan dan Arsipda**	**Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	90%	378,368,500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.988.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,988,200	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	67.369.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Paket	67,369,700	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.665.100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,665,100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	10,000,000	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.580.600	Fasilitasi kunjungan tamu	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah makan minum yang disediakan	1 Tahun	11,580,600	
	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1 Laporan	261.005.000	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah perjalan dinas dalam rangka koordinasi/konsultasi keluar daerah	1 Tahun	261,095,000	

			Konsultasi SKPD								
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.669.900	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10,669,900	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Dinas Perpustakaan dan Arsipda**	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**1 Paket**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	2 Unit		
	Pengdaan Mebel	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
	Pengadaan Kendaraan DInas Perorangan atau Jabatan	**Dinas Perpustakaan dan Arsipda**	Jumlah Unit kendaraan dinas perorangan atau abatan yang diadakan	1 Unit	-				1 Unit	27,302,500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Dinas Perpustakaan dan Arsipda**	Tersediannya Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100 %	293.709.622	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Perpustakaan dan Arsipda**			293,709,622	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7,000,000	

	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	129.509.622	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	129,509,622	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	157.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	157,200,000	
	Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	235.545.450	**Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	Dinas Perpustakaan dan Arsipda			253,017,750	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak perijzinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	83.510.250	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak perijzinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	83,510,250	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak perijzinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	67.187.500	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak perijzinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	67,186,500	
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	62.320.000	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	62,320,000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.527.700					40,000,000	
2	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Dinas Perpustakaan dan Arsipda**	**Porsentase Perpustakaan yang representatif**	**3 %**	**716.468.250**	**Program Pembinaan Perpustakaan**	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	**Presentase Perpustakaan yang representatif**	**3 %**	**806,678,250**	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas Perpustakaan dan Arsipda**	Peningkatan pengelolaan perpustakaan daerah	1%	620.255.850	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	**Terwujudnya perpustakaan yang representatif**		720,465,850	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	521.287.200	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	521,287,200	
	Pegembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10 Perpustakan	7.212.500	Pegembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10	7,212,500	

	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	50	Eksemplar	-	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		100,000	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesua dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10	Perpustakaan	19.540.800	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesua dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	19,540,800	
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3	Perpustakaan Khusus	6.228.000	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan Khusus	6,228,000	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabuapten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7	Orang	16.037.550	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabuapten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	16,037,550	

	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan	24.911.800	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan	24,911,800	
	Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	1000 Eksemplar	-	Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	1000 Eksemplar	100,110,000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	6.582.800	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	6,582,800	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	18.455.200	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	18,455,200	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**	**57**	96.212.400	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	**Meningkatnya Minat Baca**		86,212,400	

	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	50 Lokus	17.507.600	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	5 lokus	7,507,600	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	61.586.200	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang	61,586,200	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi sosial	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Perpustakaan	17.118.600	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi sosial	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	17,118,600	
4	**Program Pengelolaan Arsip**	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Persentase Jumlah Arsip yang Diolah	100 %	**292.843.900**	**Program Pengelolaan Arsip**	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Presentase Pemanfaatan Kearsipan	100 %	**444,493,900**	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Arsip Dinamis yang telah dikelola	250 Arsip	104.917.150	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Tersedianya Arsip Dinamis	250 Arsip	**156,567,150**	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100 Berkas	20.017.200	Penciptaan dan Penggunaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Penciptaan dan Penggunaan Arsip	100 Berkas	25,017,200	

	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	150 Berkas	4.532.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	150 Berkas	51,182,000	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	80.367.950	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	80,367,950	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas Perpustakaan dan Arsipda**	Jumlah Arsip Statis yang telah dikelola	**10 Arsip**	7.429.100	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Perpustakaan dan Arsipda**	Jumlah Arsip Statis yang telah dikelola	**10 Arsip**	**15.000.000**	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10 Arsip	7.429.100	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		15.000.000	
6	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Pengguna yang memanfaatkan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasionalnasional kearsipan	50 Pengguna	180.497.650	**Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Cakupan Dokumen Arsip yang dikelola	100 %	**287.926,750**	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	50 Pengguna	46.780.000	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengguna	54,209,100	

								Melalui JIKN			
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	133.717.650	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	J Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan apasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	233,717,650	
7	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	**Persentasi perlindungan arsip**	100 %	16.332.700	**Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi**	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Cakupan Pelayanan Informasi Kearsipan	100 %	**15,332,700**	
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Arsip yang Dimusnahkan memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahunretensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	50 Berkas	1.000.000					**15,332,700**	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)	100 Arsip	11.332.700	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)	Arsip	15,332,700	
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda			4.000.000	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota				-	

	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	10 Arsip	2.000.000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				-	
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 Arsip	2.000.000	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				-	
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsipda			6.081.361	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				-	
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda			6.081.361	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota				-	
	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP	3.081.361	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				-	
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Arsip	3.000.000	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				-	
				JUMLAH	**6.918.682.112**						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BIMA

NO	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Program pembinaan perpustakaan	5 (lima) Kecamatan	Jumlah taman bacaan masyarakat yang terbentuk di pinggir kota	5 unit	
2	Program Peningkatan pengelolaan arsip perangkat daerah dan penyelamatan arsip bersejarah	Museum Samparaja dan 3 (tiga) Perangkat Daerah percontohan di Kota Bima	Jumlah arsip statis bernilai sejarah yang diselamatkan dan jumlah kegiatan pengolahan di perangkat daerah	10 Arsip naskah kuno dan 10 kegiatan pengelolaan arsip di 3 (tiga) Perangkat Daerah Percontohan	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

1. Meningkatkan budaya baca berbasis *inklusi social* melalui:
   a. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan *Skill* dan keterampilan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan.
   b. Pengadaan koleksi bahan pustaka yang menambah wawasan dan motivasi masyarakat.
   c. Pemberian dukungan secara intensif kepada masyarakat dalam pendampingan peningkatan *Skill* dan keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja.
2. Ikut serta dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) melalui:
   a. Penyediaan sarana dan prasarana Simpul Jaringan Kearsipan Nasional.
   b. Peningkatan integritas Arsiparis, dan
   c. Peningkatan khasanah arsip statis Depot Arsip di Lembaga Kearsipan Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), dijabarkan sesuai dengan tujuan dari Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat Kota Bima yang cerdas dan berbudi pekerti luhur dan amanah melalui Peningkatan Minat Baca dan Penataan Arsip yang baik sebagai wahana penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memberikan layanan yang inovatif, berorientasi pada kepuasan pengguna
2. Menjadi mitra profesional bagi masyarakat dengan berperan sebagai pendamping proses belajar mandiri.
3. Menjadi pusat akses informasi bagi masyarakat global.
4. Ikut membentuk masyarakat belajar.
5. Mengumpulkan, mengelolah dan menyimpan semua Arsip Aktif serta Arsip Inaktif yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bima.

B. Sasaran

Adapun sasaran *(target)* adalah hasil yang akan dicapai dan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan (a). Meningkatnya indeks literasi masyarakat (b). Meningkatnya tata kelola arsip daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

A. Faktor-Faktor Perumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:

1. Pencapaian tujuan pemerintah kota bima yang tertuang dalam RPD Kota Bima Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Pendidikan dengan indikator Indeks SPM Pendidikan melalui peningkatan indeks literasi masyarakat Kota Bima dan peningkatan pengelolaan tata kelola arsip daerah.
2. Rendahnya minat baca pelajar dan minat kunjung pelajar ke perpustakaan daerah
3. Rendahnya tata kelola arsip di SKPD Lingkup Pemerintah Kota Bima
4. Peningkatan kompetensi tenaga pengelola perpustakaan di perpustakaan sekolah dan di perpustakaan kelurahan serta rendahnya kompetensi tenaga pengelola arsip di tiap-tiap SKPD lingkup Pemerintah Kota Bima

B. Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Kota Bima adalah sebagai berikut:

TABEL 3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BIMA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.23.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan kantor**	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	**100%**	**7.978.058.830**	**APBD II**		**100%**	**8.775.864.713**
2.23.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	9 Dokumen	43.711.500	APBD II		9 Dokumen	48.082.650
2.23.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	2 Dokumen	2.732.500	APBD II		2 Dokumen	3.005.750
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Dokuemn	3.264.000	APBD II		1 Dokuemn	3.590.400
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Dokuemn	2.392.800	APBD II		1 Dokuemn	2.632.080
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Dokumen	2.392.800	APBD II		1 Dokumen	2.714.800

2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Dokumen	2.468.000	APBD II		1 Dokumen	2.714.800
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	3 Laporan	30.461.400	APBD II		3 Dokumen	33.507.540
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	100 %	**4.941.356.490**	APBD II		100 %	4.914.356.490
2.23.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	39 Orang/bulan	4.768.347.090	APBD II		39 Orang	4.768.347.090
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Dokumen	139.219.400	APBD II		1 Tahun	151.141.340
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Laporan	2.420.000	APBD II		1 dokumen	2.662.000
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	3 Laporan	4.370.000	APBD II		3 Dokumen	4.807.000
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Paket	33.600.000	APBD II		1 Paket	36.960.000
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Paket	33.600.000	APBD II		1 Paket	36.960.000

2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	100%	**639.319.190**	APBD II		100%	703.252.109
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Paket	13. 342.000	APBD II		1 Tahun	14.676.200
2.23.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Paket	58.020.390	APBD II		1 Tahun	63.822.429
2.23.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Paket	8.468.400	APBD II		1 Tahun	9.315.240
2.23.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Dokumen	25.000.000	APBD II		1 Media	27.500.000
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Laporan	23.536.200	APBD II		12 bulan	25.889.820
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Laporan	463.124.000	APBD II		1 tahun	509.436.400
2.23.01.2.06.011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Dokumen	47.828.200	APBD II		1 Tahun	52.611.020
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	100%	**1.140.391.650**	APBD II		100%	1.148.159.815

2.23.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	2 Unit					
	Kendaraan bermotor R2 Kabis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	2 Unit	38.951.650	APBD II			
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin LAinnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Unit				1 Unit	
	Pengadaan kendaraan bermotor penumpang		Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Unit	1.000.000.000				
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		Dinas Perpustakaan dan Arsipda	3 OB	4.830.000				
2.23.01.2.07.05	**Pengadaan Mebel**	Tersedianya mebel	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Paket	40.930.000				45.023.000
	- Pengadaan Kursi Pejabat eselon II		Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Unit	20.000.000				
	Gorden Gedung Layanan Perpustakan		Dinas Perpustakaan dan Arsipda	27 Lembar	20.250.000				
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 OB	680.000				
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	100%	287.200.000	APBD II			315.902.000
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Laporan	10.000.000	APBD II		12 Laporan	11.000.000
2.23.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Laporan	121.200.000	APBD II		12 Laporan	133.320.000

2.23.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	16 Laporan	156.000.000	APBD II		16 Laporan	171.600.000
2.23.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpeliharanya barang milik pemerintah daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	100%	919.480.000	APBD II		664.124.500	211.200.000
2.23.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	5 Unit	68.510.000	APBD II		5 Unit	75.361.000
2.23.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemelihranaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	2 Unit	80.300.000	APBD II		6 Unit	88.330.000
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	62 Unit	43.190.000	APBD II		73 Unit	47.509.000
2.23.01.2.09.07	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilakuan peliharaan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	I Unit	727.480.000	APBD II		1 Unit	40.000
	Perbaikan Plafon atap PVC lantai 2 dan 3 Gedung Layanan Perpustakaan; pengecatan				195.000.000				
	Pemeliharan Gedung Penyimpanan Record Center Arsip				195.000.000				
	Pembuatan kanopi								
	Pembongkaran dan pemasangan kembali			1 Paket	8.000.000				
	Pembuatan tambahan kanopi baru			60 Meter	27.000.000				

	Pemasangan Paving Halaman Kantor			224 m2	60.480.000				
	Pemasangan Tirai Jendela Ruang Baca Perpustakaan			223 m2	223.000.000				
	Belanja Jasa Perencanaan (18,11%)			1 Paket	10.000.000				
	Belanja Jasa Pengawasan (10,59 %)			1 Paket	9.000.000				
2.23.02	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase perpustakan yang representatif**	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	**3 %**	**927.934.000**	APBD II		**3 %**	**356.795.850**
2.23.02.2.01	Pengelolan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 %	**643.747.500**	APBD II		1 %	**708.122.250**
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Layanan	112.359.000	APBD II		1 Layanan	123.594.900
2.23.02.2.01.02	Pengembangan perpustakaan ditingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	3 perpustakaan	21.718.000	APBD II		3 perpustakaan	23.889.800
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	87 Eksemplar	8.700.000	APBD II		87 judul	9.570.000

2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	3 perpustakaan	54.006.000	APBD II		3 perpustakaan	59.406.600
2.23.02.2.01.05	Pembinaan perpustakan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	3 Perpustakaan	13.591.000	APBD II		3 Perpustakaan	14.950.100
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	7 Orang	94.791.000	APBD II		50 Orang	104.270.100
2.23.02.2.01.07	Pengembangan layaran perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Layanan	56.065.500	APBD II		1 Layanan	61.672.050
2.23.02.2.01.08	Pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1.250 eksemplar	203.005.500	APBD II		1.500 eksemplar	223.306.050
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1.250 eksemplar	37.227.500	APBD II		1.500 eksemplar	40.950.250
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	1 Dokumen	42.284.000	APBD II		2 Dokumen	46.512.400
2.23.02.2.02	Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tingkat Kegemaran Membaca Masayarakat (TGM)	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	57	284.186.500	APBD II			236.764.550

2.23.02.2.02.01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	50 lokus	22.670.500	APBD II		50 lokus	24.937.550
2.23.02.2.02.03	Pemberian pengharagaan gerakan budaya gemar membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan PenghargaanGerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	6 Orang	192.570.000	APBD II		6 Orang	211.827.000
2.23.02.2.02.04	Pengembangan literasi berbasisi inklusi sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	2 Perpustakaan	68.946.000	APBD II		2 Perpustakaan	75.840.600
2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase jumlah arsip yang di olah**	**Dinas Perpustakaan dan Arsipda**	**100%**	**431.413.600**	**APBD II**		**100 %**	**474.554.960**
2.24.02.2.01	Pengelolaan arsip dinamis derah kabupaten/ Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang telah dikelola	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	250 Arsip	237.228.000	APBD II		250 Arsip	260.950.800
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	100 Berkas	33.561.200	APBD II		100 Berkas	36.917.320
2.24.02.2.01.02	Pemeriharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	150 Berkas	37.662.800	APBD II		150 Berkas	41.429.080
2.24.02.2.01.03	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabepatn/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	3 Laporan	166.004.000	**APBD II**		3 Laporan	182.604.400
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Arsip Statis yang telah dikelola	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	10 Arsip	96.341.800	APBD II		100%	105.975.980

2.24.02.2.02.02	Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	10 Arsip	96.341.800	APBD II		10 Arsip	13.731.000
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/ kota	Jumlah Pengguna yang memanfaatkan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	50 Pengguna	**97.843.800**	APBD II		50 Pengguna	**107.628.180**
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	50 Pengguna	37.142.800	APBD II		50 Pengguna	40.857.080
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	3 Laporan	60.701.000	APBD II		2 Laporan	66.771.100
2.24.03	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Persentase perlindungan arsip**	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	**100%**	**10.493.000**	APBD II		**100 Arsip**	**11.542.300**
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Terlaksannya pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	100 Arsip	10.493.000	APBD II		100 Arsip	**11.542.300**
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Dinas Perpustakaan dan Arsipda	100 Arsip	**10.493.000**	APBD II		100 Arsip	13.528.000
2.24.04	**Program Peijinan Penggunaan Arsip**	**Tersedianya Perijinan Penggunaan Arsip SKPD**	**Dinas Perpustakaan dan Arsipda**	**1 Layanan**	**3.300.000**	APBD II		**1 Layanan**	**3.630.000**
2.24.04.2.01	Pelayanan Ijin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Tersedianya ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	**Dinas Perpustakaan dan Arsipda**	1 Layanan	3.300.000	APBD II		1 Layanan	3.630.000

2.24.04.2.01.01	Penyediaan Daftar dan Penetapan Ijin Penggunaan Arsip yang Bersifat tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	**Dinas Perpustakaan dan Arsipda**	10 Arsip	3.300.000	APBD II		10 Arsip	3.630.000
JUMLAH					**9.351.199.430**				**10.282.689.373**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan yang dibutuhkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima untuk membiayai Program Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dalam tahun 2025 yang sudah diunduh dalam Sistim Informasi Perencanaan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dari Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2025 dan disajikan dalam tabel IV.1 (terlampir).

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) awal tahun 2025 adalah merupakan penjabaran Rencana Strategi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan tahunan. Adapun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima 2025 adalah :

1. Melaksanakan kegiatan organisasi sebagai bagian dari pelayanan Publik
2. Peningkatan Kwalitas dan Kwantitas Tenaga Pustakawan dan Tenaga Pengelola Arsip.
3. Meningkatkan peran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dalam pembagunan Kota Bima dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi dengan profesional, bertanggung jawab serta berkomitmen mewujudkan Visi dan Misi.

Agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan akuntabel, diharapkan masukan/bantuan yang bersifat konstruktif dari semua pihak terkait sehingga dapat direalisasikan sesuai rencana yang ditetapkan.

Kota Bima, 3 Juni 2024

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

ACH. FATHONI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650620 198903 1 023

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BIMA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH						**6.918.682.112,00**							**2.683.847.103,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.918.682.112,00**							**2.683.847.103,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**6.603.424.151,00**							**2.314.369.546,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.886.955.901,00**						**-**	**1.557.788.221,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	40.958.639,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-	-	45.054.502,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.972.889,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		3.270.177,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.604.250,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		2.864.675,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.035.300,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		2.238.830,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.721.300,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		2.993.430,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.095.100,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		2.304.610,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	28.529.800,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		31.382.780,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.908.463.690,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-	-	154.128.260,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	4.768.347.090,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	134.274.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		147.701.840,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.476.400,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		1.624.040,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4.365.800,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		4.802.380,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-	-	33.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	30.000.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		33.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	378.278.500,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-	-	416.205.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.988.200,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		13.187.020,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	67.369.700,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		74.106.670,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.665.100,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		6.231.610,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	11.580.600,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		12.738.660,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1` Laporan	261.005.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		287.204.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	10.669.900,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		11.736.890,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-	-	65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	293.709.622,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-	-	323.080.584,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.000.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		7.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	129.509.622,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		142.460.584,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 Laporan	157.200.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		172.920.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	235.545.450,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-	-	521.319.525,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	83.510.250,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		91.861.275,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	67.187.500,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		73.906.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	62.320.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		68.552.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	22.527.700,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		287.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Persentase perpustakan yang representatif***	**3 persen**			**3 persen**	**716.468.250,00**						**3 persen**	**756.581.325,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan pengelolaan perpustakaan daerah Peningkatan pengelolaan perpustakaan daerah*	9 Persen			1 Persen 3 Persen	620.255.850,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-	3 Persen	650.747.685,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	9 Perpustakaan			3 Perpustakaan	19.540.800,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-	3 Perpustakaan	21.494.880,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				3 Perpustakaan	7.212.500,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				1 Layanan	24.911.800,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		27.402.980,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan				3 Perpustakaan	6.228.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		6.850.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				7 Orang	16.037.550,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		17.641.305,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	18.455.200,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		20.300.720,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1250 Eksemplar	6.582.800,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		511.641.080,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	521.287.200,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		23.415.920,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	9 Persen			-	96.212.400,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-	3 Persen	105.833.640,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				2 Perpustakaan	17.118.600,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		18.830.460,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				6 Orang	61.586.200,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		67.744.820,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				50 Lokus	17.507.600,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	PD-2 Pembangunan Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan	-		19.258.360,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**315.257.961,00**							**369.477.557,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Persentase Jumah Arsip yang Diolah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**292.843.900,00**						**100 Persen**	**338.622.090,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	750 Arsip			-	104.917.150,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Daerah Aman dan Kompetitif	-	250 Arsip	121.908.865,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	300 Berkas			100 Berkas	20.017.200,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Daerah Aman dan Kompetitif	-	100 Berkas	27.518.920,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	450 Berkas			150 Berkas	4.532.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	-	150 Berkas	5.985.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Laporan			3 Laporan	80.367.950,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Daerah Aman dan Kompetitif	-	3 Laporan	88.404.745,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	180 Arsip			-	7.429.100,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Daerah Aman dan Kompetitif	-	60 Arsip	8.172.010,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				10 Arsip	7.429.100,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Daerah Aman dan Kompetitif	-		8.172.010,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	150 Pengguna			-	180.497.650,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Daerah Aman dan Kompetitif	LKD dan Unit Kearsipan Kota Bima	50 Penggun a	208.541.215,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	150 Pengguna			50 Pengguna	46.780.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Daerah Aman dan Kompetitif	LKD dan Unit Kearsipan Kota Bima	50 Pengguna	51.451.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	9 Laporan			3 Laporan	133.717.650,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Daerah Aman dan Kompetitif	LKD dan Unit Kearsipan Kota Bima	3 Laporan	157.089.415,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	***Persentasi perlindungan arsip***	**100 Persen**			**100 Persen**	**16.332.700,00**						**100 Persen**	**12.465.970,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	300 Arsip			-	12.332.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Daerah Aman dan Kompetitif	OPD, ORMAS/ORPOL dan Masyarakat	100 Arsip	12.465.970,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				50 Berkas	1.000.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Daerah Aman dan Kompetitif	OPD, ORMAS/ORPOL dan Masyarakat		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				100 Arsip	11.332.700,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Daerah Aman dan Kompetitif	OPD, ORMAS/ORPOL dan Masyarakat		12.465.970,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-			-	4.000.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Daerah Aman dan Kompetitif	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				10 Arsip	2.000.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Daerah Aman dan Kompetitif	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				10 Arsip	2.000.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Daerah Aman dan Kompetitif	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
3.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**-**	**-**			**-**	**6.081.361,00**						**-**	**18.389.497,00**	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-	-			-	6.081.361,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Daerah Aman dan Kompetitif	OPD, ORMAS/ORPOL dan Masyarakat	-	18.389.497,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				1 SOP	3.081.361,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Daerah Aman dan Kompetitif	OPD, ORMAS/ORPOL dan Masyarakat		3.389.497,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				1 Arsip	3.000.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Daerah Aman dan Kompetitif	OPD, ORMAS/ORPOL dan Masyarakat		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	J U M L A H							**6.918.682.112,00**							**2.683.847.103,00**	

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Soekarno-Hatta Raba-Bima Telp/Fax (0374) 646120

RENCANA KERJA
(R E N J A)
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah Dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2025 yang memuat VISI dan MISI Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun kedepan.

Rencana Kerja pada dasarnya merupakan rangkaian rencana kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra BPKAD dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026 yang diproses secara sistimatis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki baik yang bersifat *knowledge* termasuk pemahaman tentang struktur kegiatan yang terorganisasi sehingga hasil kinerja dapat terukur dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran positif bagi pihak-pihak yang berkompeten tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran yang bersifat konstruktif dalam penyempurnaan Rencana Kerja ini sangat diharapkan. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Kota Bima, Januari 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset
Daerah Kota Bima,

Abdul Haris, SE
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 196800424 199803 1 014

DAFTAR ISI

		Hal.
Kata Pengantar……		i
Daftar Isi……		ii
Daftar Tabel ……		iii
BAB I	PENDAHULUAN…….	1
	1.1 Latar Belakang ……	1
	1.2 Landasan Hukum …….	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.. ……	5
	1.4 Sistimatika Penulisan……..	6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU ……	8
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	29
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH……	39
	3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional..……..	39
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja perangkat Daerah……	39
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH……..	41
	4.1 Sasaran dan Program Kegiatan..……..	41
	4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kota Bima ……..	43
BAB V	P E N U T U P ……..	54

Daftar Tabel

		Hal.
Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2023 Pagu dan Realisasi Anggaran BPKAD Kota Bima	9
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan KLeuangan dan Aset Daerah Kota Bima	28
Tabel 3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	31
Tabel 4	Identifikasi Kebijakan Nasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima	39
Tabel 5	Sasaran dan Program/Kegiatan	41
Tabel 6	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kota Bima	43

RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA BIMA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, parsitipatif dan *top down/bottom up*.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana kerja OPD Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Bima Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026.

Dokumen Renja SKPD merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang serta memberikan fasilitas suatu program dan kegiatan.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan PERANGKAT DAERAH untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam dokumen Renja-PD terkandung arti bahwa penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah memerlukan perencanaan kerja tahunan berdasarkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima tahun 2024-2026.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima telah berjalan selama 8 (delapan) tahun dengan 2 (dua) periode Renstra yaitu Renstra 2013 s/d 2018, Renstra 2018 s/d 2023 dan Renstra 2024 s/d 2026. Renja BPKAD selama penerapannya diselaraskan dengan 3 hal di atas agar terjadi kesinambungan antara perencanaan dan pertanggungjawaban.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 221);
13. Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita

Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 318) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 360);

1.3. M a k s u d dan T u j u a n

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

A. Maksud:

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima tahun 2025.

B. Tujuan:

1. Sebagai pedoman kerja dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima khususnya dan Visi Misi Pemerintah Kota Bima pada umumnya;
2. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat;
3. Menciptakan kesamaan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.4. Sistimatika Penulisan

Adapun sistimatika penulisan Renja Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari :

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyara-kat

Bab III Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Bab V Penutup

Berisi uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah – kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Bima.

Penetapan target kinerja atas kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) berupa: *input, output, dan outcome*. Evaluasi kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi indikator kinerja dari setiap kegiatan serta rencana kinerja dan realisasi dari setiap indikator kinerja sasaran.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian sasaran beserta target dan realisasinya dapat dilihat dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2024

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima

Kode						Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian	Tingkat capaian realisasi
1						2	3	4		5		6		7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
5						**Urusan Pendukung**												
5	**2**					**Keuangan**												
5	**2**	**0.0.0.0.1**				**Badan pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah**												
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**										
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**1**	**2.01**		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	100 %										
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**1**	**2.01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100 %	2	Dokumen	16	Dokumen	8.00%

Kode						Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi			Realisasi capaian		Tingkat capaian realisasi
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = 5+7+9		11 = 10/4
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**1**	**2.01**	**02**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100 %	1	Dokumen	8	Dokumen	8.00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**1**	**2.01**	**03**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100 %	1	Dokumen	8	Dokumen	8.00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**1**	**2.01**	**04**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100 %	1	Dokumen	8	Dokumen	8.00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**1**	**2.01**	**05**	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100 %	1	Dokumen	8	Dokumen	8.00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**1**	**2.01**	**06**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	4	Laporan	24	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100 %	4	Laporan	32	Laporan	8.00%

Kode						Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi			Realisasi capaian		Tingkat capaian realisasi
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = 5+7+9		11 = 10/4
							Kinerja SKPD														
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**1**	**2.01**	**07**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokumen	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100 %	2	Dokumen	16	Dokumen	8.00%
5	2	**0.0.0.0.1**	01	**2.02**		Administrasi Keuangan	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	100	%												
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.02**	**01**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77	Orang	462	Orang	77	Orang	77	Orang	100 %	77	Orang	616	Orang	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.02**	**03**	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100 %	12	Dokumen	96	Dokumen	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.02**	**05**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100 %	1	Dokumen	8	Dokumen	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.02**	**06**	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100 %	1	Dokumen	8	Dokumen	8,00%

Kode						Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi			Realisasi capaian		Tingkat capaian realisasi
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = 5+7+9		11 = 10/4
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.02**	**07**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	Laporan	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100 %	2	Laporan	16	Laporan	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100 %	1	Dokumen	8	Dokumen	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum**	**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	100	%												
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.06**	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	72	Paket	12	Paket	12	Paket	100 %	12	Paket	96	Paket	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.06**	**04**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	72	Paket	12	Paket	12	Paket	100 %	12	Paket	96	Paket	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Tahun	6	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	100 %	1	Tahun	8	Tahun	8,00%

Kode						Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi			Realisasi capaian		Tingkat capaian realisasi
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = 5+7+9		11 = 10/4
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.06**	**09**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100 %	12	Laporan	96	Laporan	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.07**		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%												
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.07**	**6**	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	35	Unit	5	Unit	5	Unit	100 %	8	Unit	45	Unit	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.08**		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%												
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.08**	**01**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100 %	12	Laporan	96	Laporan	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.08**	**02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100 %	12	Laporan	96	Laporan	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.08**	**03**	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100 %	12	Laporan	96	Laporan	8,00%

Kode						Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi			Realisasi capaian		Tingkat capaian realisasi
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = 5+7+9		11 = 10/4
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.08**	**04**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lapor an	72	Laporan	12	Lapora n	12	Lapora n	100 %	12	Lapora n	96	Laporan	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.09**		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%												
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.09**	**01**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	12	Unit	2	Unit	2	Unit	100 %	2	Unit	16	Unit	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**	**2.09**	**02**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	unit	60	Unit	10	Unit	10	Unit	100 %	13	Unit	83	Unit	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**02**			**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik**	100	%												
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**02**	**2.01**		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase penyusunan APBD tepat Waktu	100	%	12	Dokume n	2	Dokum en	2	Dokum en	100 %	2	Dokum en	16	Dokum en	8,00%

Kode						Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi			Realisasi capaian		Tingkat capaian realisasi
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = 5+7+9		11 = 10/4
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**02**	**2.01**	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100 %	2	Dokumen	16	Dokumen	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**02**	**2.01**	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100 %	2	Dokumen	16	Dokumen	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**02**	**2.01**	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi										34	RKA-SKPD	34	RKA-SKPD	100%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**02**	**2.01**	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100 %	2	Dokumen	16	Dokumen	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**02**	**2.01**	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100 %	2	Dokumen	16	Dokumen	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**02**	**2.01**	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	Dokumen	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100 %	2	Dokumen	16	Dokumen	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**02**	**2.01**	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2	Dokumen	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100 %	2	Dokumen	16	Dokumen	8,00%

Kode						Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi			Realisasi capaian		Tingkat capaian realisasi
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = 5+7+9		11 = 10/4
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**02**	**2.01**	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50	Orang	300	Orang	50	Orang	50	Orang	100 %	50	Orang	400	Orang	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase PD yang melakukan penatausahaan keuangan dengan baik**	100	%												
5	2	0.0.0.0.1	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5	Dokumen	30	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100 %	5	Dokumen	40	Dokumen	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6	Dokumen	36	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100 %	6	Dokumen	144	Dokumen	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	8	Dokumen	48	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	100 %	8	Dokumen	64	Dokumen	8,00%

Kode						Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi			Realisasi capaian		Tingkat capaian realisasi
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = 5+7+9		11 = 10/4
							Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
5	2	0.0.0.0.1	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	Dokumen	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100 %	12	Dokumen	96	Dokumen	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3	Dokumen	18	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100 %	3	Dokumen	24	Dokumen	8,00%

Kode						Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi			Realisasi capaian		Tingkat capaian realisasi
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = 5+7+9		11 = 10/4
5	2	0.0.0.0.1	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50	Orang	300	Orang	50	Orang	50	Orang	100 %	50	Orang	400	Orang	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase PD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	100	%	100	%	100	%	100	%	100 %	100	%	300	%	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12	Dokumen	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100 %	12	Dokumen	96	Dokumen	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	02	2.03	03	Koordinasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2	Dokumen	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100 %	2	Dokumen	16	Dokumen	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2	Dokumen	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100 %	2	Dokumen	16	Dokumen	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4	Dokumen	24	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100 %	4	Dokumen	32	Dokumen	8,00%

Kode						Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi			Realisasi capaian		Tingkat capaian realisasi
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = 5+7+9		11 = 10/4
						Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota												
5	2	0.0.0.0.1	02	2.03	07	Koordinasi Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	Dokumen	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100 %	1	Dokumen	8	Dokumen	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dari Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50	Orang	300	Orang	50	Orang	50	Orang	100 %	50	Orang	400	Orang	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian pelayanan pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100 %	100	%	300	%	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	02	2.04	009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Laporan	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100 %	1	Laporan	8	Laporan	8,00%

Kode						Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi			Realisasi capaian		Tingkat capaian realisasi
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = 5+7+9		11 = 10/4
5	2	0.0.0.0.1	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1	Dokumen	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100 %	1	Dokumen	8	Dokumen	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	02	2.05	003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50	Orang	300	Orang	50	Orang	50	Orang	100 %	50	Orang	400	Orang	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**03**			**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase PD yang mengelola BMD dengan baik**	100	%												
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**03**	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	100	%												
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100 %	1	Dokumen	8	Dokumen	8,00%

Kode						Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi			Realisasi capaian		Tingkat capaian realisasi
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = 5+7+9		11 = 10/4
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100 %	2	Dokumen	16	Dokumen	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100 %	1	Dokumen	8	Dokumen	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	05	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100 %	1	Laporan	8	Laporan	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	06	Inventarisasi Barang milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Laporan	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100 %	1	Laporan	8	Laporan	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Laporan	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100 %	1	Laporan	8	Laporan	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	Laporan	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100 %	2	Laporan	16	Laporan	8,00%

Kode						Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi			Realisasi capaian		Tingkat capaian realisasi
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = 5+7+9		11 = 10/4
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100 %	1	Dokumen	8	Dokumen	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	Laporan	24	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100 %	4	Laporan	32	Laporan	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Laporan	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100 %	1	Laporan	8	Laporan	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50	Orang	300	Orang	50	Orang	50	Orang	100 %	50	Orang	400	Orang	8,00%
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**04**			**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Objek Pajak Daerah Yang dilakukan Pendataan dengan baik Tiap Tahunnya	100	%												

Kode						Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi			Realisasi capaian		Tingkat capaian realisasi
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = 5+7+9		11 = 10/4
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Objek Pajak Daerah Yang Di Lakukan Pendataan Baru, Penetapan dan Persentase Peningkatan PAD Tiap Tahunnya	100	%												
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daer	2	Dokumen	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100 %	2	Dokumen	16	Dokumen	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Dokumen	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100 %	1	Dokumen	8	Dokumen	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3	Unit	18	Unit	3	Unit	3	Unit	100 %	3	Unit	24	Unit	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2	Laporan	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100 %	2	Laporan	16	Laporan	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6	Laporan	36	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100 %	6	Laporan	48	Laporan	8,00 %

Kode						Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi			Realisasi capaian		Tingkat capaian realisasi
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = 5+7+9		11 = 10/4
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2	Dokumen	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100 %	2	Dokumen	16	Dokumen	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	525	Layanan	3150	Layanan	525	Layanan	525	Layanan	100 %	525	Layanan	4200	Layanan	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	Laporan	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100 %	12	Laporan	96	Laporan	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	11	Penagihan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100 %	12	Dokumen	96	Dokumen	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4	Dokumen	24	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100 %	4	Dokumen	32	Dokumen	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2	Dokumen	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100 %	2	Dokumen	36	Dokumen	8,00%
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100 %	12	Laporan	96	Laporan	8,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PERANGKAT DAERAH					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (tahun n-3)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-3)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan tentang Laporan Keuangan Daerah	-	Hasil LHP BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		-	-	
2	Tingkat Pertumbuhan PAD	-	Kenaikan/ penurunan pendapatan daerah dibagi pendapatan tahun lalu	5,2%	5,3%	5,6%	6%	6,1%	73,33 %	79,02%	86,6%	7,69 %		-	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- Permasalahan dan Hambatan:
  a) Adanya Perbedaan nomor rekening atau kode akun yang ada di SIPD dengan SIMDA
  b) Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah;
  c) Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi;
  d) Masih berharap banyak terhadap Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat;
  e) Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk 5 tahun ke depan;
  f) Pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan;
  g) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana aplikasi penunjang;
  h) Tingkat pemahaman pengurus barang terhadap aplikasi Simda BMD masih kurang.

- Rekomendasi dan Catatan Strategis:
  a) Perlu dilakukan konsultasi lebih lanjut pada instansi yang membuat system tersebut
  b) Peningkatan PAD dari sisi pajak dilakukan dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan sistem

online, mobil keliling, dan partisipasi terhadap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Bima berkenaan dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

c) Peningkatan optimalisasi/pemanfaatan aset pemerintah daerah sebagai sumber PAD
d) Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan
e) Menyediakan sarana dan prasarana serta meningkatkan kompetensi SDM untuk pengembangan keuangan daerah
f) Membuat Regulasi yang dapat mengakomodir pengenaan pajak terhadap potensi yang layak menjadi sumber PAD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bima

Nama PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	-12
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bima	Jumlah surat menyurat	9.036	materai dan paket kirim barang	29.554.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bima	Jumlah surat menyurat	9.126	materai dan paket kirim barang	30.145.080	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12	Bulan	38.400.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12	Bulan	39.168.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Bima	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan memiliki ijin	102	Service dan STNK	31.360.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Bima	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan memiliki ijin	103	Service dan STNK	31.987.200	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Bima	waktu penyelesaian pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bulan	520.692.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Bima	waktu penyelesaian pembayaran jasa administrasi keuangan	12	Bulan	531.105.840	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Bima	Tersedianya jasa kebersihan kantor	375	buah alat pembersih dan bahan contoh	25.950.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Bima	Tersedianya jasa kebersihan kantor	379	buah alat pembersih dan bahan contoh	26.469.000	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Bima	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	96	kali service	57.000.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Bima	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	97	kali service	58.140.000	

	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	3.306	Jumlah ATK	394.559.000	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	3.339	Jumlah ATK	402.450.180	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	200500	Jumlah barang cetakan dan pengganda an	168.250.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	202505	Jumlah barang cetakan dan pengganda an	171.615.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Bima	Jumlah komponen instalasi istrik dan penerangan dalam gedung kantor yang tersedia	12	Bulan	6.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Bima	Jumlah komponen instalasi istrik dan penerangan dalam gedung kantor yang tersedia	12	bulan	6.120.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sebagai pendukung sarana peralatan administrasi perkantoran yang tersedia	11	unit peralatan/ perlengkap an kantor	201.007.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sebagai pendukung sarana peralatan administrasi perkantoran yang tersedia	11	unit peralatan/ perlengkap an kantor	205.027.140	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12	Bulan	172.445.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12	Bulan	175.893.900	
	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Jumlah pegawai yang makan minum	75	Pegawai	410.880.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Jumlah pegawai yang makan minum	76	pegawai	419.097.600	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kota Bima	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	360	laporan perjalanan dinas luar daerah	569.231.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kota Bima	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	364	laporan perjalanan dinas luar daerah	580.615.620	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Bima	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	204	laporan perjalanan dinas dalam daerah		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Bima	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	206	laporan perjalanan dinas dalam daerah	-	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Bima	**Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kerja**				**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Kota Bima	**Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kerja**			-	

	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Bima	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0	-		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Bima	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0	-	-	
	Pengadaan Meubelair	Kota Bima	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	0	-		Pengadaan Meubelair	Kota Bima	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	0	-	-	
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ oprasional	Kota Bima	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/ berkala	51	kendaraan dinas		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ oprasional	Kota Bima	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/ berkala	52	kendaraan dinas	-	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kota Bima	**Kualitas Kinerja Aparatur**			-	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	Kota Bima	**Kualitas Kinerja Aparatur**				
	Pengadaan pakaian khususu hari-hari tertentu	Kota Bima	Jumlah pakaian olahraga	-	buah	27.500.000	Pengadaan pakaian khususu hari-hari tertentu	Kota Bima	Jumlah pakaian olahraga	-	buah	28.050.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Bima	**Persentase PERANGKAT DAERAH Dengan Indeks SAKIP Baik**				**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Kota Bima	**Persentase PERANGKAT DAERAH Dengan Indeks SAKIP Baik**			-	
	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah laporan realisasi kinerja serta pelaporan monev SKPD	8	Dokumen	85.975.000	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah laporan realisasi kinerja serta pelaporan monev SKPD	8	Dokumen	87.694.500	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan semesteran	2	Dokumen	126.051.000	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan semesteran	2	Dokumen	128.572.020	
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kota Bima	Jumlah laporan prognosis pengelolaan keuangan	2	Dokumen	128.460.000	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kota Bima	Jumlah laporan prognosis pengelolaan keuangan	2	Dokumen	131.029.200	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporam Akhir Tahun	2	Dokumen	409.322.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporam Akhir Tahun	2	Dokumen	417.508.440	
	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja pernagkat daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan/RKA/DPA organisasi perangkat daerah yang dihasilkan	5	Dokumen	262.750.000	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja pernagkat daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan/RKA/DPA organisasi perangkat daerah yang dihasilkan	5	Dokumen	268.005.000	
	Penyusunan LAKIP dan LPPD	Kota Bima	Jumlah dokumen Lakip dan LPPD	2	Dokumen	77.125.000	Penyusunan LAKIP dan LPPD	Kota Bima	Jumlah dokumen Lakip dan LPPD	2	Dokumen	78.667.500	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Bima	Opini BPK Atas Audit LKPD				**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Kota Bima	Opini BPK Atas Audit LKPD			-	

	Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD	Kota Bima	Jumlah Raperda tentang APBD yang disusun	1	Perda	1.066.052.000	Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD	Kota Bima	Jumlah Raperda tentang APBD yang disusun	1	perda	1.087.373.040	
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Kota Bima	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD yang disusun	1	Perwali	180.690.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Kota Bima	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD yang disusun	1	Perwali	184.303.800	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Kota Bima	jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang disusun	1	Perda	881.604.500	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Kota Bima	jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang disusun	1	perda	899.236.590	
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Kota Bima	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	1	Perwali	295.852.500	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Kota Bima	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	1	perwali	301.769.550	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kota Bima	Jumlah rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Perda	162.690.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kota Bima	Jumlah rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	perda	165.943.800	
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kota Bima	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Perwali	101.934.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kota Bima	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	perwali	103.972.680	
	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi per bulan	12	bulan	309.110.000	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi per bulan	12	bulan	315.292.200	
	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Kota Bima	Jumlah sosisalisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	-	-	36.850.000	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Kota Bima	Jumlah sosisalisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	-	-	37.587.000	
	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Kota Bima	Jumlah bimtek imlementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	1	Bimtek	90.062.000	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Kota Bima	Jumlah bimtek imlementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	1	Bimtek	91.863.240	

	Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah	Kota Bima	terupdet jumlah dana penyertaan modal pemerintah	2	Dokumen		Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah	Kota Bima	terupdet jumlah dana penyertaan modal pemerintah	2	dokumen	-	
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pedoman anggaran	Kota Bima	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang pedoman anggaran	2	dokumen (Surat Edaran)	410.795.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pedoman anggaran	Kota Bima	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang pedoman anggaran	2	dokumen (Surat Edaran)	419.010.900	
	Pengelolaan administrasi penerimaan dan belanja daerah	Kota Bima	pembayaran jasa pengelolaan administrasi penerimaan dan belanja daerah yang tepat waktu	12	Bulan	1.812.200.000	Pengelolaan administrasi penerimaan dan belanja daerah	Kota Bima	pembayaran jasa pengelolaan administrasi penerimaan dan belanja daerah yang tepat waktu	12	bulan	1.848.444.000	
	Penyusunan Laporan DAK	Kota Bima	jumlah Laporan DAK yang dilaporkan	4	Dokumen	139.000.000	Penyusunan Laporan DAK	Kota Bima	jumlah Laporan DAK yang dilaporkan	4	Dokumen	141.780.000	
	Pelaksanaan penatausahaan gaji pegawai	Kota Bima	dokumen penatausahaan gaji pegawai yang disusun	12	laporan penatausahaan gaji pegawai	316.780.000	Pelaksanaan penatausahaan gaji pegawai	Kota Bima	dokumen penatausahaan gaji pegawai yang disusun	12	laporan penatausahaan gaji pegawai	323.115.600	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan seksi akuntansi	Kota Bima	jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksnakan	4	Laporan	201.911.100	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan seksi akuntansi	Kota Bima	jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksnakan	4	laporan	205.949.322	
	Pelaksanaan proses TPTGR aset/ barang milik daerah	Kota Bima	Jumlah penyelesaian kasus kerugian daerah	36	Dokumen	426.425.500	Pelaksanaan proses TPTGR aset/ barang milik daerah	Kota Bima	Jumlah penyelesaian kasus kerugian daerah	36	dokumen	434.954.010	
	Program Peningkatan Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah	Kota Bima	Opini BPK Atas Audit LKPD				**Program Peningkatan Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah**	Kota Bima	Opini BPK Atas Audit LKPD			-	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Aset/Barang Daerah	Kota Bima	Jumlah SOP tentang Pengelolaan BMD yang diterbitkan	1	Dokumen	77.924.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Aset/Barang Daerah	Kota Bima	Jumlah SOP tentang Pengelolaan BMD yang diterbitkan	1	Dokumen	79.482.480	
	Peningkatan manajemen aset / barang daerah	Kota Bima	Dokumen Tata Kelola Aset yang dilaporkan	3	Dokumen	214.775.000	Peningkatan manajemen aset / barang daerah	Kota Bima	Dokumen Tata Kelola Aset yang dilaporkan	3	Dokumen	219.070.500	
	Revaluasi / appraisal aset / barang daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen revaluasi/appraisal aset daerah yang disetujui	1	Dokumen potensi pemanfaatan BMD	74.925.000	Revaluasi / appraisal aset / barang daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen revaluasi/appraisal aset daerah yang disetujui	1	Dokumen potensi pemanfaatan BMD	76.423.500	

	Penyusunan data inventarisasi aset daerah	Kota Bima	Dokumen penatausahaan inventarisasi Aset/barang daerah yang dilporakan	19	Dokumen	253.173.000	Penyusunan data inventarisasi aset daerah	Kota Bima	Dokumen penatausahaan inventarisasi Aset/barang daerah yang dilporakan	19	dokumen	258.236.460	
	Pendataan ulang/ pemutahiran kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan bangunan Pemerintah Kota Bima	Kota Bima	Jumlah tanah dan bangunan Pemerintah Kota Bima yang didata ulang/ dimutahirkan kepemilikannya, dan dipergunakan	25	Lokasi	136.975.000	Pendataan ulang/ pemutahiran kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan bangunan Pemerintah Kota Bima	Kota Bima	Jumlah tanah dan bangunan Pemerintah Kota Bima yang didata ulang/ dimutahirkan kepemilikannya, dan dipergunakan	25	lokasi	139.714.500	
	Penyusunan Laporan Tahunan Aset/Barang Daerah	Kota Bima	Terlaksananya penyusunan Dokumen laporan Tahunan Aset/ Barang Milik Daerah	1	Dokumen	145.175.000	Penyusunan Laporan Tahunan Aset/Barang Daerah	Kota Bima	Terlaksananya penyusunan Dokumen laporan Tahunan Aset/ Barang Milik Daerah	1	dokumen	148.078.500	
	Penyusunan Analisa Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD Kota Bima	Kota Bima	Tersusunnya Dokumen Analisis Kebutuhan dan Dokumen Analisa Kebutuhan Pemeliharaan	2	Dokumen	175.819.000	Penyusunan Analisa Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD Kota Bima	Kota Bima	Tersusunnya Dokumen Analisis Kebutuhan dan Dokumen Analisa Kebutuhan Pemeliharaan	2	Dokumen	179.335.380	
	Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah	Kota Bima	Terlaksananya Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	40	Dokumen	99.600.000	Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah	Kota Bima	Terlaksananya Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	40	Dokumen	101.592.000	
	Bimbingan Teknis SIMDA BMD	Kota Bima	JUmlah Bimtek SIMDA BMD yang diselenggarakan	1	Kali		Bimbingan Teknis SIMDA BMD	Kota Bima	JUmlah Bimtek SIMDA BMD yang diselenggarakan	1	kali	-	
	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Bima	Persentase Peningkatan PAD Tiap Tahunnya				**Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Kota Bima	Persentase Peningkatan PAD Tiap Tahunnya				
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah	Kota Bima	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang disetujui	1	Perwali	19.875.700	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah	Kota Bima	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang disetujui	1	perwali	20.273.214	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah	Kota Bima	Jumlahi sumber - sumber pendapatan daerah yang Intensifikasi dan ekstensifikas	10	Dok		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah	Kota Bima	Jumlahi sumber - sumber pendapatan daerah yang Intensifikasi dan ekstensifikas	10	dok	-	
	Sosialisasi dan pembekalan juru pungut PBB	Kota Bima	Jumlah sosialisasi dan pembekalan juru pungut PBB	1	Kali		Sosialisasi dan pembekalan juru pungut PBB	Kota Bima	Jumlah sosialisasi dan pembekalan juru pungut PBB	1	kali	-	

	Penagihan PBB pada seluruh kelurahan	Kota Bima	Jumlah Laporan penagihan PBB pada seluruh kelurahan	12	Bulan		Penagihan PBB pada seluruh kelurahan	Kota Bima	Jumlah Laporan penagihan PBB pada seluruh kelurahan	12	bulan	-	
	Pendataan ulang / pemutahiran data PBB sektor perkotaan	Kota Bima	Jumlah data PBB sektor perkotaan yang dilakukan pendataan ulang	2	Bulan		Pendataan ulang / pemutahiran data PBB sektor perkotaan	Kota Bima	Jumlah data PBB sektor perkotaan yang dilakukan pendataan ulang	2	bulan	-	
	Pengelolaan dan penagihan pajak daerah / retribusi daerah / sewa aset daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen pajak daerah/retribusi daerah dan sewa aset daerah dan Asistensi Penyelesaian Kepatuhan pembayaran PAD yang dilaporkan dikelola dan ditagih	4	Bulan		Pengelolaan dan penagihan pajak daerah / retribusi daerah / sewa aset daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen pajak daerah/retribusi daerah dan sewa aset daerah dan Asistensi Penyelesaian Kepatuhan pembayaran PAD yang dilaporkan dikelola dan ditagih	4	bulan	-	
	Monitoring dan Rapat Evaluasi PBB per Triwulan	Kota Bima	Jumlah Monitoring dan Rapat Evaluasi PBB per Triwulan yang terselenggara	-	-		Monitoring dan Rapat Evaluasi PBB per Triwulan	Kota Bima	Jumlah Monitoring dan Rapat Evaluasi PBB per Triwulan yang terselenggara	-	-	-	
	Pemeliharaan Data dan system PBB	Kota Bima	jumlah Data dan Pelayanan Sistem PBB uang dilaporkan pemeliharaannya	12	kali laporan pemeliharaan database		Pemeliharaan Data dan system PBB	Kota Bima	jumlah Data dan Pelayanan Sistem PBB uang dilaporkan pemeliharaannya	12	kali laporan pemeliharaan database	-	
	Peningkatan manajemen perhitungan, penetapan dan pemeriksaan pajak daerah	Kota Bima	Jumlah manajemen perhitungan, penetapan dan pemeriksaan pajak daerah yang dilaksnaakan	-	-		Peningkatan manajemen perhitungan, penetapan dan pemeriksaan pajak daerah	Kota Bima	Jumlah manajemen perhitungan, penetapan dan pemeriksaan pajak daerah yang dilaksnaakan	-	-	-	
	Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Bima	Jumlah sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang terlaksana	2	sosialisasi	63.352.000	Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Bima	Jumlah sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang terlaksana	2	sosialisasi	64.619.040	
	Uji Petik Terhadap Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang dilakukan uji petik	0	Kali	20.000.000	Uji Petik Terhadap Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang dilakukan uji petik	0	kali	20.400.000	

	Pendataan Objek Pajak, Retribusi, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang sah	Kota Bima	Jumlah data otentik tentang potensi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah	2	Bulan	543.938.950	Pendataan Objek Pajak, Retribusi, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang sah	Kota Bima	Jumlah data otentik tentang potensi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah	2	bulan	554.817.729	
	Penetapan Objek Pajak, Retribusi, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang sah	Kota Bima	data otentik tentang potensi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah	1	dokumen penetapan	131.073.850	Penetapan Objek Pajak, Retribusi, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang sah	Kota Bima	data otentik tentang potensi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah	1	dokumen penetapan	133.695.327	
	Penatausahaan/Rekonsiliasi pendapatan dan belanja daerah	Kota Bima	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi per bulan	12	Laporan	172.516.000	Penatausahaan/Rekonsiliasi pendapatan dan belanja daerah	Kota Bima	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi per bulan	12	laporan	175.966.320	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Kota Bima	Jumlah laporan monev PAD per triwulan	4	Laporan	80.169.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Kota Bima	Jumlah laporan monev PAD per triwulan	4	laporan	81.772.380	

BAB. III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan-kebijakan Nasional tidak dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima karena pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait kebijakan tersebut.

Tabel 4

Identifikasi Kebijakan Nasional
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bima

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	-	-	-

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan program dan kegiatan secara optimal. Oleh karena itu setiap Satuan Kerja harus merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Bima secara komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan di bawah ini.

3.2.1. Tujuan

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 telah ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima :

"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"

3.2.2. Sasaran

Sasaran dari tujuan yang telah dirumuskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima yaitu :

Tabel 5

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bima

trategis	*Indikator Sasaran*	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-		
		2024	2025	2026
akuntabilitas ah	*Opini BPK terhadap Laporan Keuangan*	WTP	WTP	WTP
Efektifitas Pelayanan Keuangan	Persentase PD yang mengelola keuangan daerah dengan baik	100%	100%	100%
istem t	Persentase Aset yang tertib	100%	100%	100%
Penerimaan	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	6,4%	6,5%	6,6%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Efektifitas Penatausahaan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
3	Meningkatnya sistem manajemen asset	2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
4	Meningkatnya Penerimaan PAD	3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam mewujudkan 4 (empat) sasaran strategis yang terlihat pada tabel diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjalankan 3 program dengan 6 kegiatan.

Tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan penjabaran teknis daripada visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada dalam Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur

pada program dengan mengerahkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, prasarana dan sarana maupun financial sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) walaupun kinerja prioritasnya adalah peningkatan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bima.

Program dan Kegiatan yang akan dirancang harus berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 202 Kota Bima

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting SIPD	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5						UNSUR PENDUKUNG				23.300.217.960,00				23.749.614.073,50
5	2					KEUANGAN				23.300.217.960,00				23.749.614.073,50
5	**2**	**0.0.0.0.1**				**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**				**23.300.217.960,00**				**23.749.614.073,50**
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Bima**	**100%**	**15.255.668.220,00**	**DAU**		**100%**	**15.302.836.846,50**
5	2	0.0.0.0.1	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Kota Bima	100%	43.650.900,00	DAU		100%	45.833.445,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	2 dokumen	26.907.800,00	DAU		2 dokumen	28.253.190,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	1 dokumen	7.478.000,00	DAU		1 dokumen	7.851.900,00

5	2	0.0.0.0.1	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	1dokumen	1.959.800,00	DAU		1dokumen	2.057.790,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	1 dokumen	2.039.900,00	DAU		1 dokumen	2.141.895,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	1 dokumen	1.951.700,00	DAU		1 dokumen	2.049.285,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	4 dokumen	1.515.900,00	DAU		4 dokumen	1.591.695,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	2 dokumen	1.797.800,00	DAU		2 dokumen	1.887.690,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	Kota Bima	100%	13.705.502.530,00	DAU		100%	14.390.777.656,50
5	2	0.0.0.0.1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	78 orang	12.278.628.098,00	DAU		78 orang	12.892.559.502,90
5	2	0.0.0.0.1	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	65 Dokumen	1.201.961.332,00	DAU		65 Dokumen	1.262.059.398,60
5	2	0.0.0.0.1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Kota Bima	1 dokumen	18.919.400,00	DAU		1 dokumen	19.865.370,00

							Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
5	2	0.0.0.0.1	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Bima	1 dokumen	161.721.300,00	DAU		1 dokumen	169.807.365,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bima	2 Laporan	28.379.600,00	DAU		2 Laporan	29.798.580,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bima	1 dokumen	15.892.800,00	DAU		1 dokumen	16.687.440,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.06		Administrasi Umum	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bima	100%	824.976.900,00	DAU		100%	866.225.745,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	12 Paket	5.443.200,00	DAU		12 Paket	5.715.360,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (alat2 kebersihan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bima	12 Paket	353.330.000,00	DAU		12 Paket	370.996.500,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bima	1 tahun	72.003.700,00	DAU		1 tahun	75.603.885,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	12 Laporan	394.200.000,00	DAU		12 Laporan	413.910.000,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Bima	100%	181.764.000,00	DAU		100%	190.852.200,00

							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
5	2	0.0.0.0.1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bima	5 jenis	181.764.000,00	DAU		5 jenis	190.852.200,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bima	0	0,00	DAU		0	0,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	100%	369.267.840,00	DAU		100%	387.731.232,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	12 Laporan	53.280.000,00	DAU		12 Laporan	55.944.000,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bima	12 Laporan	165.327.400,00	DAU		12 Laporan	173.593.770,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	12 Laporan	64.814.500,00	DAU		12 Laporan	68.055.225,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (atk)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bima	12 Laporan	85.845.940,00	DAU		12 Laporan	90.138.237,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	100%	130.506.050,00	DAU		100%	137.031.352,50
5	2	0.0.0.0.1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bima	2 unit	73.293.750,00	DAU		2 unit	76.958.437,50

5	2	0.0.0.0.1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bima	21 unit	57.212.300,00	DAU		21 unit	60.072.915,00
5	2	0.0.0.0.1	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bima	120 Unit	0,00	DAU		120 Unit	0,00
5	2	0.0.0.0.1	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik	Kota Bima	100%	4.788.288.700,00	DAU		100%	5.027.703.135,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase penyusunan APBD tepat Waktu	Kota Bima	100%	1.402.048.800,00	DAU		100%	**1.472.151.240,00**
5	2	0.0.0.0.1	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Bima	2 Dokumen	30.815.200,00	DAU		2 Dokumen	32.355.960,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Bima	2 dokumen	36.428.000,00	DAU		2 dokumen	38.249.400,00
5	2	0.0.0.0.2	03	2.02	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah PD yang melakukan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Bima	34 OPD	49.589.400,00	DAU		34 OPD	52.068.870,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Bima	2 dokumen	139.267.000,00	DAU		2 dokumen	146.230.350,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Bima	2 dokumen	107.840.000,00	DAU		2 dokumen	113.232.000,00

5	2	0.0.0.0.1	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Bima	2 dokumen	133.485.400,00	DAU		2 dokumen	140.159.670,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Bima	4 Laporan	707.659.500,00	DAU		4 Laporan	743.042.475,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bima	50 Orang	196.964.300,00	DAU		50 Orang	206.812.515,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase PD yang melakukan penatausahaan keuangan dengan baik	Kota Bima	100%	588.904.000,00			100%	618.349.200,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Bima	6 dokumen	49.127.000,00	DAU		6 dokumen	51.583.350,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Bima	6 dokumen	87.304.000,00	DAU		6 dokumen	91.669.200,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan	Kota Bima	12 Laporan	66.846.000,00	DAU		12 Laporan	70.188.300,00

							Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
5	2	0.0.0.0.1	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Bima	14 Dokumen	136.121.000,00	DAU		14 Dokumen	142.927.050,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Bima	2 dokumen	108.218.000,00	DAU		2 dokumen	113.628.900,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bima	50 Orang	141.288.000,00	DAU		50 Orang	148.352.400,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase PD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Kota Bima	100%	478.867.600,00	DAU		100%	502.810.980,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kota Bima	6 dokumen	24.646.600,00	DAU		6 dokumen	25.878.930,00

5	2	0.0.0.0.1	02	2.03	03	Koordinasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Bima	1 Dokumen	20.214.800,00	DAU		1 Dokumen	21.225.540,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Bima	4 dokumen	178.063.000,00	DAU		4 dokumen	186.966.150,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Bima	2 Dokumen	89.762.400,00	DAU		2 Dokumen	94.250.520,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.03	07	Koordinasi Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Bima	2 dokumen	157.814.400,00	DAU		2 dokumen	165.705.120,00
5	2	0.0.0.0.1	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dari Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bima	50 Orang	8.366.400,00	DAU		50 Orang	8.784.720,00
5	2	0.0.0.0.2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				2.139.400.000,00				

5	02	0.0.0.0.3	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Bima	12 Laporan	2.139.400.000,00	DAU		12 Laporan	2.246.370.000,00
5	2	0.0.0.0.4	2	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				179.068.300,00				
5	02	0.0.0.0.5	002	2.05	003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bima	50 Orang	179.068.300,00	DAU		50 Orang	188.021.715,00
5	2	0.0.0.0.1	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang mengelola BMD dengan baik	Kota Bima	100%	896.780.376,00	DAU		100%	941.619.394,80
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	Kota Bima	100%	896.780.376,00	DAU		100%	941.619.394,80
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Bima	1 dokumen	70.965.900,00	DAU		1 dokumen	74.514.195,00
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Bima	2 dokumen	58.553.600,00	DAU		2 dokumen	61.481.280,00
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Bima	1 dokumen	8.315.500,00	DAU		1 dokumen	8.731.275,00
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	05	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Bima	1 dokumen	255.578.686,00	DAU		1 dokumen	268.357.620,30
5	2	0.0.0.0.2	04	2.02	06	Inventarisasi Barang milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kota Bima	1 Laporan	118.257.800,00	DAU		1 Laporan	124.170.690,00
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Bima	35 dokumen	94.693.000,00	DAU		35 dokumen	99.427.650,00
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Bima	2 dokumen	60.715.300,00	DAU		2 dokumen	63.751.065,00

5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Bima	1 dokumen	72.553.000,00	DAU		1 dokumen	76.180.650,00
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Bima	6 Laporan	124.268.390,00	DAU		6 Laporan	130.481.809,50
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kota Bima	42 dokumen	23.473.200,00	DAU		42 dokumen	24.646.860,00
5	2	0.0.0.0.1	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bima	1 dokumen	9.406.000,00	DAU		1 dokumen	9.876.300,00
5	**2**	**0.0.0.0.1**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Objek Pajak Daerah Yang dilakukan Pendataan dengan baik Tiap Tahunnya**	**Kota Bima**	**100%**	**2.359.480.664,00**	**DAU**		**100%**	2.477.454.697,20
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Objek Pajak Daerah Yang Di Lakukan Pendataan Baru, Penetapan dan Persentase Peningkatan PAD Tiap Tahunnya	Kota Bima	100%	1.262.667.600,00	DAU		100%	1.325.800.980,00
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bima	2 Laporan	22.247.600,00	DAU		2 Laporan	23.359.980,00
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Bima	1 Dokumen	66.392.600,00	DAU		1 Dokumen	69.712.230,00

5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bima	1 Unit	127.721.400,00	DAU		1 Unit	134.107.470,00
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kota Bima	2 Laporan	637.217.800,00	DAU		2 Laporan	669.078.690,00
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Bima	6 Laporan	221.147.300,00	DAU		6 Laporan	232.204.665,00
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kota Bima	2 Dokumen	187.940.900,00	DAU		2 Dokumen	197.337.945,00
							Persentase Objek Pajak Daerah Yang Bisa di Tagih tiap tahunnya	**Kota Bima**	**100%**	1.096.813.064,00	DAU		**100%**	1.151.653.717,20
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Bima	1.045 Layanan	17.990.000,00	DAU		1.045 Layanan	18.889.500,00
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kota Bima	12 Dokumen	51.260.000,00	DAU		12 Dokumen	53.823.000,00
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	11	Penagihan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kota Bima	12 dokumen	835.330.364,00	DAU		12 dokumen	877.096.882,20
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Bima	4 dokumen	37.383.900,00	DAU		4 dokumen	39.253.095,00
5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Bima	2 dokumen	80.768.900,00	DAU		2 dokumen	84.807.345,00

5	2	0.0.0.0.1	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Bima	2 Laporan	74.079.900,00	DAU		2 Laporan	77.783.895,00

BAB. V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima akan terlaksana dengan efektif dan efisien.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima dibuat sebagai Pedoman Dasar Dalam Kerangka Penyusunan RKPD Kota Bima Tahun Anggaran 2024.

Kota Bima, Januari 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima,

Abdul Haris, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196800424 199803 1 014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah Dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2025 yang memuat VISI dan MISI Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun kedepan.

Rencana Kerja pada dasarnya merupakan rangkaian rencana kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra BPKAD dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026 yang diproses secara sistimatis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki baik yang bersifat *knowledge* termasuk pemahaman tentang struktur kegiatan yang terorganisasi sehingga hasil kinerja dapat terukur dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran positif bagi pihak-pihak yang berkompeten tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran yang bersifat konstruktif dalam penyempurnaan Rencana Kerja ini sangat diharapkan. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Kota Bima, Januari 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima,

Abdul Haris, SE
Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 196800424 199803 1 014

DAFTAR ISI

		Hal.
Kata Pengantar……		i
Daftar Isi……		ii
Daftar Tabel ……		iii
BAB I	PENDAHULUAN……	1
	1.1 Latar Belakang ……	1
	1.2 Landasan Hukum …….	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.. ……	5
	1.4 Sistimatika Penulisan……..	6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU ……	8
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	29
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH……	39
	3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional..……..	39
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja perangkat Daerah……	39
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH……..	41
	4.1 Sasaran dan Program Kegiatan..……..	41
	4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kota Bima ……..	43
BAB V	P E N U T U P ……..	54

Daftar Tabel

		Hal.
Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2023 Pagu dan Realisasi Anggaran BPKAD Kota Bima	9
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan KLeuangan dan Aset Daerah Kota Bima	28
Tabel 3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	31
Tabel 4	Identifikasi Kebijakan Nasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima	39
Tabel 5	Sasaran dan Program/Kegiatan	41
Tabel 6	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kota Bima	43

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Soekarno-Hatta Raba-Bima Telp/Fax (0374) 646120

RENCANA KERJA
(R E N J A)
2025

RENCANA KERJA

BAPPEDA KOTA BIMA
TAHUN 2025





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkankehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Rahmat-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bima 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sedangkan aturan secara rinci mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan RENJA merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat di-pertanggungjawab-kan semua kebijakan, program, dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Oleh karena itu, penyusunan RENJA BAPPEDA Kota Bima Tahun 2024 ini merupakan acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-bidang lingkup BAPPEDA Kota Bima selama 1 (satu) tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima 2024-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kota Bima 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2024.

Kami menyadari dalam penyusunan RENJA ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja ini untuk masa mendatang.

Raba-Bima, November 2024
Kepala Badan,

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Drs.ADISAN
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19650729 200501 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 5
1.3. Sistematika Penulisan 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16
2.4. Reviu Terhadap RKPD Tahun 2025 23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 71
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 72
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 72
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 73
3.2.1. Perumusan Tujuan BAPPEDA Memperhatikan Sasaran Strategis RPD Kota Bima 2024-2026 73
3.2.2. Sasaran 76
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 77
BAB V PENUTUP 128

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Rekapitulasi Belanja BAPPEDA Kota Bima Tahun Anggaran 2024 8
Tabel 2. 2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung 1
Tabel 2. 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 2
Tabel 2. 4. Reviu Terhadap Penetapan RKPD Tahun 2025 Kota Bima 24
Tabel 3. 1. Perumusan Penjelasan Tujuan 74
Tabel 3. 2. Perumusan Penjelasan Indikator Tujuan/Sasaran 75
Tabel 3. 3. Tujuan BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025 76
Tabel 3. 4. Sasaran BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025 76
Tabel 4. 1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 (disesuaikan dengan APBD Tahun 2025) 81

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk perode 1 (satu) tahun. Berdasarkan permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan rencana Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan, yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Proses Penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Renstra BAPPEDA Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan Tahun kedua dari RPD Kota Bima tahun 2024-2026 yang berfungsi sebagai pengganti RPJMD sampai dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota yang baru. Sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA, Renja BAPPEDA diselaraskan dengan visi pembangunan tahun 2024-2026 untuk misi "***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik***".

Renja ini berisi berbagai program dan kegiatan pembangunan baik kegiatan yang bersifat rutin (Belanja Tidak Langsung) maupun kegiatan pembangunan (Belanja Langsung) yang bermuara pada upaya peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut BAPPEDA melaksanakan pembinaan dan koordinasi perencanaan, pengendalian

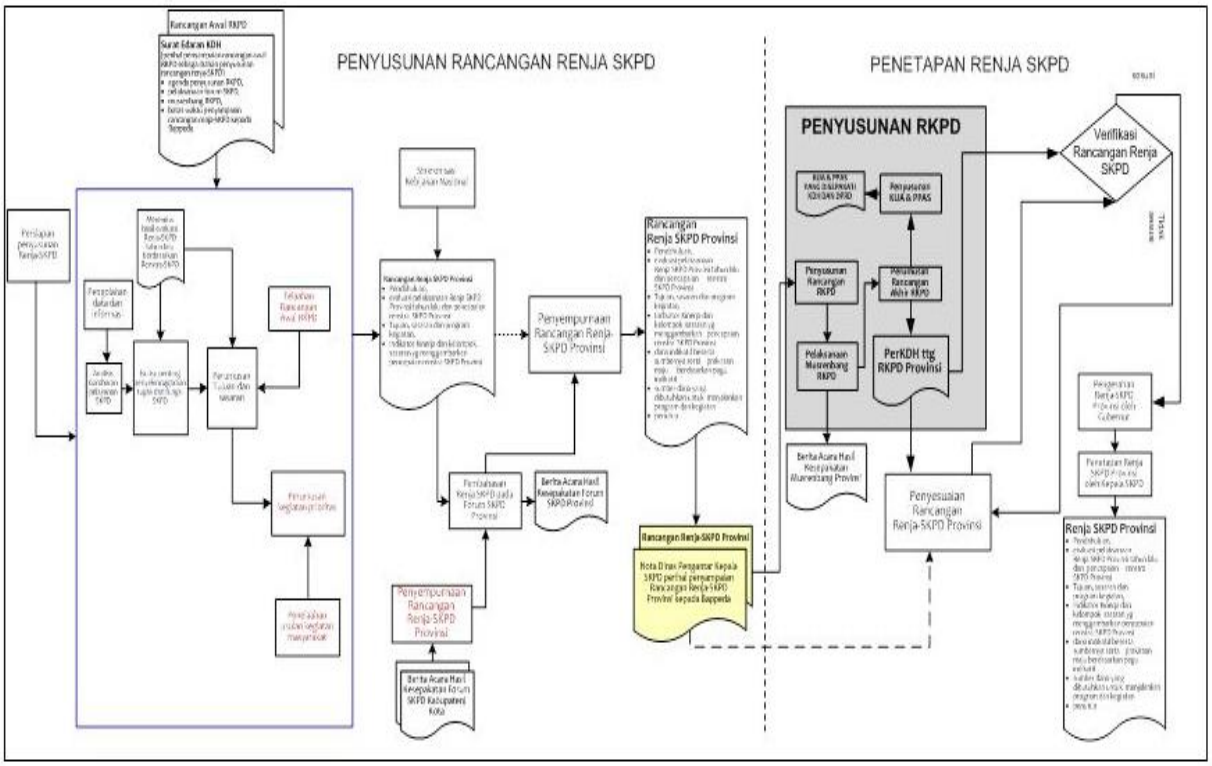
evaluasi perencanaan serta pengembangan penelitian dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya Renja BAPPEDA digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran BAPPEDA tahun 2025 sebagai tahapan penyempurnaan rancangan APBD Kota Bima tahun 2025.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA PD adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Penyusunan Renja BAPPEDA Kota Bima 2025 mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan seperti sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);

18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 8);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Renja BAPPEDA Kota Bima 2025 adalah untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025 ini adalah:

1. Menjabarkan Rencana Strategis BAPPEDA Kota Bima ke dalam rencana operasional;
2. Untuk mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026;
3. Untuk menjadi pedoman yang memberikan arahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan oleh Sekretariat dan Bidang-

bidang dalam lingkup BAPPEDA Kota Bima sesuai tugas pokok dan fungsinya;

4. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada BAPPEDA Kota Bima;
5. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran;
6. Untuk menjadi acuan dan standar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA Kota Bima dalam penyusunan laporan tahunan;
7. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025.

1.3. Sistematika Penulisan

Renja BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang.

RENSTRA BAPPEDA Kota Bima tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Kondisi Daerah Kota Bima terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu ketersediaan dokumen perencanaan yang sangat diperlukan untuk menjamin agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sampai tahun anggaran 2024, BAPPEDA Kota Bima telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya yaitu menyusun dokumen perencanaan baik jangka Panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD Teknokratik), dan jangka pendek (RKPD 2025). Adapun dokumen dimaksud yang sudah diselesaikan pada tahun 2024 adalah:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor ……
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Tahun 2025-2029
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2024

d. RENSTRA BAPPEDA Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.
e. RENJA BAPPEDA Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2024, pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 9.313.391.245,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.735.097.301,00 atau sebesar 93,79%. Anggaran ini terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dari target belanja operasi sebesar Rp 8.962.563.195,00 BAPPEDA Kota Bima merealisasikan sebesar Rp 8.394.889.251,00 atau sebesar 93,67%. Adapun belanja modal, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 350.828.050,00 direalisasikan sebesar Rp 340.208.050,00 atau sebesar 96,97%.

Alokasi anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun 2024 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1. Rekapitulasi Belanja BAPPEDA Kota Bima Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Operasi	8.962.563.195,00	8.394.889.251,00	93,67
2	Belanja Modal	350.828.050,00	340.208.050,00	96,97
Jumlah		**9.313.391.245,00**	**8.735.097.301,00**	**93,79**

Sumber: Laporan Keuangan BAPPEDA 2024

Belanja Pegawai digunakan untuk membiayai Belanja Gaji dan Tunjangan, yang digunakan untuk membiayai gaji dan tujangan PNS BAPPEDA Kota Bima selama 12 bulan. Belanja ini Gaji dan Tunjangan ini dianggarkan sebesar Rp 4.579.990.495,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.529.983.508 atau 98,39%.

Sedangkan, Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai belanja seperti berikut:

a) Belanja Bahan Pakai Habis. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp7.856.000,00 dan terealisasi sebesar Rp Rp7.856.000,00 atau 100%.
b) Belanja Jasa Kantor. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp64.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp40.008.000,00 atau 61,57%.
c) Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp89.688.000,00 atau 99,65%.
d) Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp 31.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp31.302.000,00 atau 99,00%.
e) Belanja Perjalanan Dinas. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp 1.826.248.050,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.788.171.182 atau 97,92%.

Belanja Modal digunakan untuk pengadaan alat kantor dan rumah tangga serta pengadaan komputer. Belanja Modal tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 350.828.050,00 dan terealisasi sebesar Rp. 340.208.050,00 atau 96,67%.

Anggaran dan realisasi pelaksanaan program/kegiatan selama tahun anggaran 2024 digambarkan pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024 s/d				LEBIH/ KURANG	PERSENTASE
								TWI	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
5		**URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**											
5.01		**PERENCANAAN**				**7.860.295.910,00**	**9.313.391.245,00**				**8.735.097.301,00**	**-578.293.944,00**	**93,79**
1	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**	**1**	**Satuan**	**5.495.915.630,00**	**6.702.583.965,00**	**853.196.080,00**	**2.880.097.451,00**	**4.415.932.187,00**	**6.356.716.907,00**	**-345.867.058,00**	**94,84**
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Satuan	132.126.120,00	223.399.820,00	44.037.400,00	48.946.600,00	74.952.500,00	159.337.500,00	**-64.062.320,00**	**71,32**
		Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	4.714.000,00	4.714.000,00	4.714.000,00	4.714.000,00	4.714.000,00	4.714.000,00	**0,00**	**100,00**
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	4.050.500,00	4.050.500,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.500,00	**0,00**	**100,00**
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	dokumen	5.405.000,00	5.405.000,00		0,00	3.430.200,00	5.275.200,00	**-129.800,00**	**97,60**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024 s/d				LEBIH/ KURANG	PERSENTASE
								TWI	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	3.482.000,00	3.482.000,00		0,00	2.827.200,00	2.827.200,00	**-654.800,00**	**81,19**
		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	8.265.000,00	8.265.000,00		0,00	3.053.400,00	8.258.400,00	**-6.600,00**	**99,92**
		Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan standar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	7.856.000,00	7.856.000,00	7.856.000,00	7.856.000,00	7.856.000,00	7.856.000,00	**0,00**	**100,00**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024 s/d				LEBIH/ KURANG	PERSENTASE
								TWI	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	laporan	98.353.620,00	189.627.320,00	27.416.900,00	32.326.100,00	49.021.200,00	126.356.200,00	**-63.271.120,00**	**66,63**
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Satuan	4.243.571.310,00	4.775.630.445,00	685.765.382,00	2.305.540.352,00	3.511.572.301,00	4.698.825.008,00	**-76.805.437,00**	**98,39**
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Org/bln	4.078.670.210,00	4.579.990.495,00	672.625.382,00	2.255.356.352,00	3.430.360.801,00	4.529.983.508,00	**-50.006.987,00**	**98,91**
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	dokumen	121.920.000,00	122.370.000,00		33.240.000,00	58.170.000,00	100.170.000,00	**-22.200.000,00**	**81,86**
		Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	13.140.000,00	13.140.000,00	13.140.000,00	13.140.000,00	13.140.000,00	13.140.000,00	**0,00**	**100,00**
		Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	1	laporan	19.021.700,00	49.310.550,00		3.804.000,00	7.921.500,00	47.081.500,00	**-2.229.050,00**	**95,48**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024 s/d				LEBIH/ KURANG	PERSENTASE
								TWI	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										
		Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	10.819.400,00	10.819.400,00		0,00	1.980.000,00	8.450.000,00	**-2.369.400,00**	**78,10**
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Satuan	766.708.200,00	1.339.073.700,00	83.288.498,00	451.620.649,00	670.465.449,00	1.239.633.688,00	**-99.440.012,00**	**92,57**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	9.285.000,00	9.285.000,00		0,00	6.853.000,00	9.253.000,00	**-32.000,00**	**99,66**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	234.060.000,00	399.533.000,00		203.500.000,00	203.500.000,00	386.768.050,00	**-12.764.950,00**	**96,81**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	113.240.000,00	270.782.500,00	24.434.000,00	39.644.000,00	91.422.000,00	206.762.400,00	**-64.020.100,00**	**76,36**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024 s/d				LEBIH/ KURANG	PERSENTASE
								TWI	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	101.173.200,00	150.523.200,00	18.107.100,00	36.435.000,00	71.230.800,00	130.116.000,00	**-20.407.200,00**	**86,44**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	308.950.000,00	508.950.000,00	40.747.398,00	172.041.649,00	297.459.649,00	506.734.238,00	**-2.215.762,00**	**99,56**
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Satuan	179.660.000,00	189.420.000,00	32.104.800,00	55.539.850,00	109.229.936,00	167.431.710,00	**-21.988.290,00**	**88,39**
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	98.400.000,00	89.400.000,00	20.100.000,00	33.500.000,00	53.600.000,00	80.400.000,00	**-9.000.000,00**	**89,93**
		Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	40.590.000,00	40.590.000,00	9.125.800,00	15.171.850,00	27.221.936,00	34.684.710,00	**-5.905.290,00**	**85,45**
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	7.320.000,00	17.080.000,00		2.000.000,00	7.000.000,00	13.750.000,00	**-3.330.000,00**	**80,50**
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	33.350.000,00	42.350.000,00	2.879.000,00	4.868.000,00	21.408.000,00	38.597.000,00	**-3.753.000,00**	**91,14**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024 s/d				LEBIH/ KURANG	PERSENTASE
								TWI	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Satuan	173.850.000,00	175.060.000,00	8.000.000,00	18.450.000,00	49.712.001,00	91.489.001,00	**-83.570.999,00**	**52,26**
		Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	112.490.000,00	147.240.000,00	8.000.000,00	16.450.000,00	49.712.001,00	77.457.001,00	**-69.782.999,00**	**52,61**
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	11.360.000,00	27.820.000,00		2.000.000,00	4.000.000,00	14.032.000,00	**-13.788.000,00**	**50,44**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD (Program)**	**98,5**	**Satuan**	**617.639.000,00**	**648.336.000,00**	**97.288.285,00**	**245.259.601,00**	**410.281.179,00**	**633.702.162,00**	**-14.633.838,00**	**97,74**
			Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang dilaksanakan	98,5	Satuan	617.639.000,00	648.336.000,00	97.288.285,00	245.259.601,00	410.281.179,00	633.702.162,00	**-14.633.838,00**	**97,74**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024 s/d				LEBIH/ KURANG	PERSENTASE
								TWI	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	98,5 %	Satuan	476.451.100,00	507.148.100,00	72.106.991,00	220.078.307,00	332.795.165,00	494.094.762,00	**-13.053.338,00**	**97,43**
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	berita acara	23.825.900,00	20.925.900,00	0,00	20.925.900,00	20.925.900,00	20.925.900,00	**0,00**	**100,00**
		Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2	berita acara	57.602.400,00	31.252.400,00	0,00	14.264.100,00	30.552.400,00	30.552.400,00	**-700.000,00**	**97,76**
		Pelaksanaan musrembang kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	berita acara	234.637.800,00	205.021.800,00	21.244.800,00	127.624.800,00	193.462.995,00	193.462.995,00	**-11.558.805,00**	**94,36**
		Koodinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kota/kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6	dokumen	160.385.000,00	249.948.000,00	50.862.191,00	57.263.507,00	87.853.870,00	249.153.467,00	**-794.533,00**	**99,68**
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	98,5 %	Satuan	141.187.900,00	141.187.900,00	25.181.294,00	25.181.294,00	77.486.014,00	139.607.400,00	**-1.580.500,00**	**98,88**
		Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	2	Laporan	40.932.900,00	40.932.900,00	4.236.000,00	4.236.000,00	25.713.700,00	40.782.900,00	**-150.000,00**	**99,63**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024 s/d				LEBIH/ KURANG	PERSENTASE
								TWI	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		di Kabupaten/Kota	Pembangunan										
		Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Laporan	100.255.000,00	100.255.000,00	20.945.294,00	20.945.294,00	51.772.314,00	98.824.500,00	**-1.430.500,00**	**98,57**
3	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) sektor pemerintahan dan pembangunan manusia**	**98,5**	**Satuan**	**1.746.741.280,00**	**1.962.471.280,00**	**165.981.802,00**	**518.390.713,00**	**986.434.906,00**	**1.744.678.232,00**	**-217.793.048,00**	**88,90**
			Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) sektor perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	98,5	Satuan	1.746.741.280,00	1.962.471.280,00	165.981.802,00	518.390.713,00	986.434.906,00	1.744.678.232,00	**-217.793.048,00**	**88,90**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024 s/d				LEBIH/ KURANG	PERSENTASE
								TWI	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) sektor infrastruktur dan kewilayahan	98,5	Satuan	1.746.741.280,00	1.962.471.280,00	165.981.802,00	518.390.713,00	986.434.906,00	1.744.678.232,00	**-217.793.048,00**	**88,90**
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan program/kegiatan /Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	98,5 %	Satuan	551.154.200,00	600.904.200,00	95.219.175,00	147.258.426,00	264.067.788,00	501.210.532,00	**-99.693.668,00**	**83,41**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Laporan	66.000.000,00	110.000.000,00	2.204.000,00	2.204.000,00	31.806.460,00	96.265.942,00	**-13.734.058,00**	**87,51**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024 s/d				LEBIH/ KURANG	PERSENTASE
								TWI	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	Laporan	60.703.000,00	60.703.000,00	17.354.133,00	22.714.333,00	37.830.983,00	45.098.183,00	**-15.604.817,00**	**74,29**
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	Dokumen	75.633.200,00	75.183.200,00	10.152.800,00	11.919.600,00	15.278.600,00	54.974.400,00	**-20.208.800,00**	**73,12**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Laporan	185.048.000,00	214.248.000,00	38.725.722,00	72.292.273,00	106.083.283,00	186.953.145,00	**-27.294.855,00**	**87,26**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024 s/d				LEBIH/ KURANG	PERSENTASE
								TWI	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	Laporan	105.967.000,00	88.367.000,00	18.125.520,00	22.807.420,00	49.902.162,00	72.641.062,00	**-15.725.938,00**	**82,20**
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	Dokumen	57.803.000,00	52.403.000,00	8.657.000,00	15.320.800,00	23.166.300,00	45.277.800,00	**-7.125.200,00**	**86,40**
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan program/kegiatan /Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	98,5 %	Satuan	519.107.800,00	592.647.800,00	29.717.460,00	143.375.620,00	273.668.485,00	523.666.512,00	**-68.981.288,00**	**88,36**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024 s/d				LEBIH/ KURANG	PERSENTASE
								TWI	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Laporan	121.076.600,00	162.166.600,00	490.000,00	51.564.100,00	69.243.285,00	155.975.101,00	**-6.191.499,00**	**96,18**
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	Laporan	112.265.500,00	112.265.500,00	764.100,00	4.773.160,00	55.459.260,00	80.026.660,00	**-32.238.840,00**	**71,28**
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	Dokumen	21.172.800,00	21.172.800,00	7.882.800,00	7.882.800,00	8.608.800,00	17.404.400,00	**-3.768.400,00**	**82,20**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya	4	Laporan	135.580.800,00	179.580.800,00	5.843.200,00	47.275.400,00	78.673.739,00	160.536.830,00	**-19.043.970,00**	**89,40**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024 s/d				LEBIH/ KURANG	PERSENTASE
								TWI	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			(RPJPD. RPJMD dan RKPD)										
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	Laporan	106.022.100,00	94.472.100,00	9.757.360,00	26.368.160,00	54.656.801,00	94.229.721,00	**-242.379,00**	**99,74**
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	Dokumen	22.990.000,00	22.990.000,00	4.980.000,00	5.512.000,00	7.026.600,00	15.493.800,00	**-7.496.200,00**	**67,39**
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan program/kegiatan /Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	98,5 %	Satuan	676.479.280,00	768.919.280,00	41.045.167,00	227.756.667,00	448.698.633,00	719.801.188,00	**-49.118.092,00**	**93,61**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024 s/d				LEBIH/ KURANG	PERSENTASE
								TWI	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	Laporan	171.683.500,00	202.033.500,00	10.123.671,00	68.063.671,00	91.086.237,00	186.356.992,00	**-15.676.508,00**	**92,24**
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	Laporan	170.370.800,00	170.370.800,00	13.139.936,00	18.139.936,00	161.309.916,00	169.253.916,00	**-1.116.884,00**	**99,34**
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	dokumen	24.616.400,00	18.766.400,00	1.700.000,00	1.700.000,00	3.150.000,00	14.092.000,00	**-4.674.400,00**	**75,09**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024 s/d				LEBIH/ KURANG	PERSENTASE
								TWI	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Laporan	125.859.700,00	179.724.700,00	6.621.560,00	80.143.060,00	99.774.480,00	167.583.280,00	**-12.141.420,00**	**93,24**
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	Laporan	173.920.880,00	187.995.880,00	5.335.000,00	55.585.000,00	89.253.000,00	173.070.000,00	**-14.925.880,00**	**92,06**
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	dokumen	10.028.000,00	10.028.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	9.445.000,00	**-583.000,00**	**94,19**

Sumber: LRA Bappeda Tahun 2024

Evaluasi RENJA Bappeda Tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Bima Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		REALISASI KINERJA	PERSENTASE / CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
5		**URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**									
5.01		**PERENCANAAN**						**7.860.295.910,00**	**9.313.391.245,00**	**8.735.097.301,00**	**93,79**
1	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**	**1**	**Satuan**	**1**	**100,00**	**5.495.915.630,00**	**6.702.583.965,00**	**6.356.716.907,00**	**94,84**
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Satuan	**A**	**100,00**	132.126.120,00	223.399.820,00	159.337.500,00	**71,32**
		Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	**4**	**100,00**	4.714.000,00	4.714.000,00	4.714.000,00	**100,00**
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	**1**	**100,00**	4.050.500,00	4.050.500,00	4.050.500,00	**100,00**
		Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	**1**	**100,00**	5.405.000,00	5.405.000,00	5.275.200,00	**97,60**
		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	**1**	**100,00**	3.482.000,00	3.482.000,00	2.827.200,00	**81,19**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		REALISASI KINERJA	PERSENTASE / CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	**1**	**100,00**	8.265.000,00	8.265.000,00	8.258.400,00	**99,92**
		Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan standar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	**1**	**100,00**	7.856.000,00	7.856.000,00	7.856.000,00	**100,00**
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	laporan	**6**	**100,00**	98.353.620,00	189.627.320,00	126.356.200,00	**66,63**
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Satuan	**1**	**100,00**	4.243.571.310,00	4.775.630.445,00	4.698.825.008,00	**98,39**
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Org/bln	**29**	**100,00**	4.078.670.210,00	4.579.990.495,00	4.529.983.508,00	**98,91**
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	dokumen	**1**	**100,00**	121.920.000,00	122.370.000,00	100.170.000,00	**81,86**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		REALISASI KINERJA	PERSENTASE / CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	**1**	**100,00**	13.140.000,00	13.140.000,00	13.140.000,00	**100,00**
		Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	laporan	**1**	**100,00**	19.021.700,00	49.310.550,00	47.081.500,00	**95,48**
		Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	**1**	**100,00**	10.819.400,00	10.819.400,00	8.450.000,00	**78,10**
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Satuan	**1**	**100,00**	766.708.200,00	1.339.073.700,00	1.239.633.688,00	**92,57**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	**1**	**100,00**	9.285.000,00	9.285.000,00	9.253.000,00	**99,66**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	**1**	**100,00**	234.060.000,00	399.533.000,00	386.768.050,00	**96,81**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		REALISASI KINERJA	PERSENTASE / CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	**1**	**100,00**	113.240.000,00	270.782.500,00	206.762.400,00	**76,36**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	**1**	**100,00**	101.173.200,00	150.523.200,00	130.116.000,00	**86,44**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	**1**	**100,00**	308.950.000,00	508.950.000,00	506.734.238,00	**99,56**
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Satuan	**1**	**100,00**	179.660.000,00	189.420.000,00	167.431.710,00	**88,39**
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	**1**	**100,00**	98.400.000,00	89.400.000,00	80.400.000,00	**89,93**
		Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	**1**	**100,00**	40.590.000,00	40.590.000,00	34.684.710,00	**85,45**
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	**1**	**100,00**	7.320.000,00	17.080.000,00	13.750.000,00	**80,50**
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	**1**	**100,00**	33.350.000,00	42.350.000,00	38.597.000,00	**91,14**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		REALISASI KINERJA	PERSENTASE / CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Satuan	**1**	**100,00**	173.850.000,00	175.060.000,00	91.489.001,00	**52,26**
		Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	**11**	**100,00**	112.490.000,00	147.240.000,00	77.457.001,00	**52,61**
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	**5**	**50,00**	11.360.000,00	27.820.000,00	14.032.000,00	**50,44**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	**0**	**0,00**	50.000.000,00	0,00	0,00	**0,00**
2	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD (Program)**	**98,5**	**Satuan**	**98,5**	**100,00**	**617.639.000,00**	**648.336.000,00**	**633.702.162,00**	**97,74**
			Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang dilaksanakan	98,5	Satuan	**98,5**	**100,00**	617.639.000,00	648.336.000,00	633.702.162,00	**97,74**
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	98,5 %	Satuan	**98,5%**	**100,00**	476.451.100,00	507.148.100,00	494.094.762,00	**97,43**
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	berita acara	**2**	**100,00**	23.825.900,00	20.925.900,00	20.925.900,00	**100,00**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		REALISASI KINERJA	PERSENTASE / CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2	berita acara	**2**	**100,00**	57.602.400,00	31.252.400,00	30.552.400,00	**97,76**
		Pelaksanaan musrembang kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	berita acara	**2**	**100,00**	234.637.800,00	205.021.800,00	193.462.995,00	**94,36**
		Koodinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kota/kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6	dokumen	**6**	**100,00**	160.385.000,00	249.948.000,00	249.153.467,00	**99,68**
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	98,5 %	Satuan	**98,5%**	**100,00**	141.187.900,00	141.187.900,00	139.607.400,00	**98,88**
		Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2	Laporan	**2**	**100,00**	40.932.900,00	40.932.900,00	40.782.900,00	**99,63**
		Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Laporan	**4**	**100,00**	100.255.000,00	100.255.000,00	98.824.500,00	**98,57**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		REALISASI KINERJA	PERSENTASE / CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
3	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) sektor pemerintahan dan pembangunan manusia**	**98,5**	**Satuan**	**95**	**96,45**	**1.746.741.280,00**	**1.962.471.280,00**	**1.744.678.232,00**	**88,90**
			Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) sektor perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	98,5	Satuan	**95**	**96,45**	1.746.741.280,00	1.962.471.280,00	1.744.678.232,00	**88,90**
			Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) sektor infrastruktur dan kewilayahan	98,5	Satuan	**95**	**96,45**	1.746.741.280,00	1.962.471.280,00	1.744.678.232,00	**88,90**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		REALISASI KINERJA	PERSENTASE / CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	98,5 %	Satuan	**95**	**9.644,67**	551.154.200,00	600.904.200,00	501.210.532,00	**83,41**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Laporan	**4**	**100,00**	66.000.000,00	110.000.000,00	96.265.942,00	**87,51**
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	Laporan	**3**	**75,00**	60.703.000,00	60.703.000,00	45.098.183,00	**74,29**
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	Dokumen	**3**	**75,00**	75.633.200,00	75.183.200,00	54.974.400,00	**73,12**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		REALISASI KINERJA	PERSENTASE / CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Laporan	**4**	**100,00**	185.048.000,00	214.248.000,00	186.953.145,00	**87,26**
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	Laporan	**4**	**100,00**	105.967.000,00	88.367.000,00	72.641.062,00	**82,20**
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	Dokumen	**4**	**100,00**	57.803.000,00	52.403.000,00	45.277.800,00	**86,40**
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	98,5 %	Satuan	**98,5%**	**100,00**	519.107.800,00	592.647.800,00	523.666.512,00	**88,36**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		REALISASI KINERJA	PERSENTASE / CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Laporan	**4**	**100,00**	121.076.600,00	162.166.600,00	155.975.101,00	**96,18**
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	Laporan	**3**	**75,00**	112.265.500,00	112.265.500,00	80.026.660,00	**71,28**
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	Dokumen	**4**	**100,00**	21.172.800,00	21.172.800,00	17.404.400,00	**82,20**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	Laporan	**4**	**100,00**	135.580.800,00	179.580.800,00	160.536.830,00	**89,40**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		REALISASI KINERJA	PERSENTASE / CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	Laporan	**4**	**100,00**	106.022.100,00	94.472.100,00	94.229.721,00	**99,74**
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	Dokumen	**3**	**75,00**	22.990.000,00	22.990.000,00	15.493.800,00	**67,39**
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	98,5 %	Satuan	**98,5%**	**100,00**	676.479.280,00	768.919.280,00	719.801.188,00	**93,61**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	Laporan	**4**	**100,00**	171.683.500,00	202.033.500,00	186.356.992,00	**92,24**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		REALISASI KINERJA	PERSENTASE / CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	Laporan	**4**	**100,00**	170.370.800,00	170.370.800,00	169.253.916,00	**99,34**
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	dokumen	**3**	**75,00**	24.616.400,00	18.766.400,00	14.092.000,00	**75,09**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Laporan	**4**	**100,00**	125.859.700,00	179.724.700,00	167.583.280,00	**93,24**
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	Laporan	**4**	**100,00**	173.920.880,00	187.995.880,00	173.070.000,00	**92,06**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		REALISASI KINERJA	PERSENTASE / CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	dokumen	**4**	**100,00**	10.028.000,00	10.028.000,00	9.445.000,00	**94,19**

Sumber: Bappeda Kota Bima, hasil analisi

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja PD dan Renstra PD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem SIPD membantu kerja bidang-bidang di Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan PD yang dilaksanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2024 BAPPEDA Kota Bima telah melaksanakan 4 Program dan 16 Kegiatan, dengan realisasi Anggaran dan capaian indikator sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencapai 71,32%
2. Realisasi Anggaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di angka 98,39%
3. Realisasi Anggaran Administrasi Umum Perangkat Daerah mencapai 92,57%
4. Realisasi Anggaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 88,39%
5. Realisasi Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 52,26%
6. Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan mencapai 97,43%
7. Realisasi Anggaran Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mencapai 98,88%
8. Realisasi Anggaran Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mencapai 83,41%
9. Realisasi Anggaran Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) mencapai 88,36%
10. Realisasi Anggaran Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mencapai 93,61%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAPPEDA Kota Bima dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima.Kedudukan BAPPEDA Kota Bima yang merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah yangdipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bima.

BAPPEDA Kota Bima, berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi seperti dijabarkan sebagaiberikut.

A. Kepala Badan

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan koordinasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai denganvisi dan misi;
   b. penetapan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan;
   c. penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perencanaan Pembangunan Daerah,Penelitian dan Pengembangan;
   d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka perencanaan dan percepatan pembangunan Daerah;

e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
f. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah secara makro;
g. Penyusunan dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
h. pelaksanaan program kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Prasana Wilayah dan Sumber Daya Alam serta Penyiapan potensi Sumber Daya infrastruktur, Sarana dan Prasarana Daerah
i. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan petunjuk teknis pembangunan daerah,pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan serta wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan daerah serta keserasian pembangunan daerah sesuai manajemen pengembangan wilayah dan kawasan daerah yang searah dengan kebijakan umum daerah;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas danfungsinya.

3. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membawahi:

a. Sekreariat
b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah: dan
c. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.

B. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan,keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinas.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
    a. koordinasi penyusunan program dan anggaran;
    b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
    d. pembinaan aparatur;
    e. pengelolaan urusan kepegawaian;
    f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
    g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat membawahi dan mengoordinasikan:
    a. Subbagian Umum; dan
    b. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
    a. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
    b. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik daerah;
    c. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
    d. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
    e. Melaksanakan kegiatan urusan perencanaan di lingkunganbadan;
    f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
    a. Melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan keterampilan dan keahlian serta kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang• undangan.

b. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

C. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan Mengkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
    a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
    b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
    c. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
    d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
    e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
    f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
    g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
    h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
    i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
    j. menyajikan dan mengamankan data dan informasi pembangunan daerah

k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;.
n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional:
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
   a. Melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan keterampilan dan keahlian serta kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang• undangan;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

D. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur

1. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai fungsi:
   a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
f. mengoordinasikan sinergitas dan harrnonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harrnonisasi kegiatan Kernenterian/Lernbaga di kabupaten/kota;
h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersarna kerjasarna antar daerah; dan
j. mengoordinasikan pernbinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional:
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
   a. Melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Keterampilan dan keahlian serta kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang• undangan;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Kota Bima didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat

pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- Kurangnya SDM Perencanaan
- Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja
- Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan.

Permasalahan – permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indicator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja BAPPEDA dimasa yang akan dating , tantangan yang dihadapi BAPPEDA dalam jangka waktu 5 (lima) yang akan datang adalah :

- Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Persentase kemiskinan yang masih relative tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi NTB;
- Perubahan kebiajakan perencanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*;
- Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya;
- Masih rendahnya proporsi Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah.

Sedangkan peluang bagi BAPPEDA Kota Bima dalam melaksanakan tugasnya adalah :

- Keterpaduan perencanaan antar kabupaten/kota di provinsi NTB;
- Tawaran Diklat dari Bappenas, Lembaga Diklat, dan Perguruan Tinggi;
- Program Prioritas Nasional dan Provinsi NTB yang ada di Kota Bima.

Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun selanjutnya adalah adanya kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja (RENJA) bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif,efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranyaterdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),Rencana Strategis (RENSTRA) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) PD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025, program dan kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai dengan Rancangan awal RKPD Kota Bima Tahun 2025, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan masing-masing PD.

Tabel 2. 4. Reviu Terhadap Penetapan RKPD Tahun 2025 Kota Bima

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			8.419.304.800,00				8.615.479.900,00
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.297.384.800,00				8.491.159.900,00
	5	01				PERENCANAAN			8.297.384.800,00				8.491.159.900,00
152	**5**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**5.929.213.100,00**				**6.143.921.100,00**
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	132.126.620,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	132.126.620,00
	5	01	01	2.01	0001								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.714.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	4.714.000,00
	5	01	01	2.01	0002								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.050.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	4.050.500,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	
	5	01	01	2.01	0003								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	5.405.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	5.405.500,00
	5	01	01	2.01	0004								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.482.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	3.482.000,00
	5	01	01	2.01	0005								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.265.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	8.265.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	
	5	01	01	2.01	0006								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.856.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	7.856.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	01	01	2.01	0007								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	98.353.620,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	98.353.620,00
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.900.268.200,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	4.900.268.200,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	
	5	01	01	2.02	0001								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.854.787.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	4.854.787.100,00
	5	01	01	2.02	0005								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.140.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	13.140.000,00
	5	01	01	2.02	0006								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	2.500.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	
	5	01	01	2.02	0007								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	19.021.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	19.021.700,00
	5	01	01	2.02	0008								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	10.819.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	10.819.400,00
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.500.000,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang	7.500.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												bersih	
	5	01	01	2.03	0001								
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	2.500.000,00
	5	01	01	2.03	0003								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	2.500.000,00
	5	01	01	2.03	0005								
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	2.500.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	10.000.000,00
	5	01	01	2.05	0002								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	2.500.000,00
	5	01	01	2.05	0003								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	2.500.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	
	5	01	01	2.05	0004								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	2.500.000,00
	5	01	01	2.05	0005								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	2.500.000,00
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	525.808.280,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang	740.516.280,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												bersih	
	5	01	01	2.06	0001								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.285.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	9.285.000,00
	5	01	01	2.06	0002								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.352.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	234.060.000,00
	5	01	01	2.06	0004								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	113.240.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	113.240.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	
	5	01	01	2.06	0005								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	101.173.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	101.173.200,00
	5	01	01	2.06	0009								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	282.758.080,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	282.758.080,00
	5	01	01	2.06	0011								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	179.660.000,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	179.660.000,00
	5	01	01	2.08	0001								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 LAPORAN Laporan	98.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	98.400.000,00
	5	01	01	2.08	0002								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	40.590.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	40.590.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	
	5	01	01	2.08	0003								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.320.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	7.320.000,00
	5	01	01	2.08	0004								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	01 Laporan	33.350.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	33.350.000,00
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	173.850.000,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang	173.850.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												bersih	
	5	01	01	2.09	0002								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	112.490.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	112.490.000,00
	5	01	01	2.09	0006								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	11.360.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	11.360.000,00
	5	01	01	2.09	0009								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	50.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	
153	**5**	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase capaian kinerja perangkat daerah Persentase hasil dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan**	**98,6 Persen 98.60 persen**	**693.836.500,00**				**652.903.600,00**
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	98,6 Persen	537.648.600,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintaha	537.648.600,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												n yang bersih	
	5	01	02	2.01	0003								
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara Berita Acara	23.825.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	23.825.900,00
	5	01	02	2.01	0004								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara Berita Acara	57.602.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	57.602.400,00
	5	01	02	2.01	0005								
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	1 LAPORAN Berita Acara	285.835.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	285.835.300,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	
	5	01	02	2.01	0007								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	170.385.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	170.385.000,00
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	156.187.900,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	115.255.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	
	5	01	02	2.03	0001								
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	40.932.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	01	02	2.03	0003								
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	115.255.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	115.255.000,00
154	**5**	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**	**-**	**1.674.335.200,00**				**1.694.335.200,00**
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	573.754.200,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan	573.754.200,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	
	5	01	03	2.01	0001								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	75.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	01	03	2.01	0002								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	60.303.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	60.303.000,00
	5	01	03	2.01	0003								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	74.633.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	74.633.200,00
	5	01	03	2.01	0005								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan	6 Dokumen	190.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	190.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							RKPD)					mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	
	5	01	03	2.01	0006								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	116.015.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	116.015.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	01	03	2.01	0007								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	57.803.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	57.803.000,00
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	544.107.800,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	544.107.800,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	
	5	01	03	2.02	0001								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	131.076.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	131.076.600,00
	5	01	03	2.02	0002								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	112.265.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	112.265.500,00
	5	01	03	2.02	0003								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	5 Laporan	21.172.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	21.172.800,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Perekonomian					mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	
	5	01	03	2.02	0005								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	135.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	135.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	01	03	2.02	0006								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	124.569.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	124.569.900,00
	5	01	03	2.02	0007								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	20.023.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	20.023.000,00
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	556.473.200,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang	576.473.200,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
												bersih	
	5	01	03	2.03	0001								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	190.876.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	190.876.400,00
	5	01	03	2.03	0002								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	100.499.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	100.499.400,00
	5	01	03	2.03	0003								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	5 Laporan	49.201.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	69.201.400,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Infrastruktur					mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	
	5	01	03	2.03	0005								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	114.714.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	114.714.700,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	01	03	2.03	0006								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	77.473.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	77.473.500,00
	5	01	03	2.03	0007								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)
											Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	23.707.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	23.707.800,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahun pertama penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kota Bima Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2025.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA Kota Bima dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, BAPPEDA dituntut untuk siap dan sanggup membuat dan menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan RENJA BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025 didasarkan kepada RENSTRA BAPPEDA Kota Bima Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergi antara dokumen perencanaan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Prioritas nasional di tahun 2024, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2022-2025 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Petangkat Daerah

3.2.1. Perumusan Tujuan BAPPEDA Memperhatikan Sasaran Strategis RPD Kota Bima 2024-2026

Berkaitan dengan hal tersebut berikut diuraikan intisari RPD Kota Bima.Tujuan Kota Bima untuk periode RPD Tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal. Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai.
3. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel akan diwujudkan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Sungguh-sungguh Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Meningkatkan Nilai-nilai Efektif, Efisien dan Partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukimam
5. Meningkatnya keamanan dan ketertiban daerah

Tabel 3. 1. Perumusan Penjelasan Tujuan

Tujuan	Pokok-Pokok Tujuan	Penjelasan Tujuan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi	terbentuknya suatu masyarakat yang mampu berfikir secara komperhensip dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan sehingga memiliki daya saing diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif	Kesejahteraan masyarakat	pembangunan yang dapat menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan sehingga mampu mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya
Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik	transparansi	keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
	Akuntabilitas	proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic
Meningkatkan kualitas lingkungan permukimam	Lingkungan perkotaanyang nyaman dan aman	menciptakan lingkungan yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah
Meningkatnya keamanan dan ketertiban daerah	Kesadaran hukum dan toleransi	kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku dan memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan tersebut, maka dijabarkan kedalam 5 (lima) Indikator Tujuan dan Sasaran Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima yang akan dijelaskan pada Tabel 3.2.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Indeks Gini
3. Indeks Reformasi Birokrasi
4. Persentase kawasan pemukiman layak huni
5. Indeks Rasa Aman

Tabel 3. 2. Perumusan Penjelasan Indikator Tujuan/Sasaran

No	Pokok-Pokok Tujuan	Indikator Tujuan	Penjelasan Sasaran
1	Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, meningkatnya daya beli masyarakat dan meningkatnya ketahanan pangan
2	Kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, Meningkatnya kesempatan kerja,dan Menurunnya tingkat kemiskinan
3	Transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pelaksanaan tahapan-tahapan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4	Akuntabilitas		
5	Lingkungan perkotaanyang nyaman dan aman	Persentase kawasan pemukiman layak huni	Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah. Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota Bima yang masih memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana banjir, maka Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan akan difokuskan terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana;
6	Kesadaran hukum dan toleransi	Indeks Rasa Aman	Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan dan ketaqwaan yang baik, mematuhi aturan hukum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman dan pengamalan yang benar dan baik.

Dengan demikian tujuan BAPPEDA Kota Bima adalah

Tabel 3. 3. Tujuan BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025

TUJUAN RPD	TUJUAN OPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	*2*	*3*	*4*
MeningkatkanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks kualitas perencanaan

3.2.2. Sasaran

Dalam kaitannya dengan tujuan tiga tahunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun atau lebih. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka telah ditetapkan sasaran strategis BAPPEDA Kota Bima sebagai berikut:

Tabel 3. 4. Sasaran BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET		
			2024	***2025***	***2026***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Meningkatkan kualitas perencanaan pem-bangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pem-bangunan daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	98,50%	98,60%	98,70%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung misi Pemerintah Kota Bima yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Adil melalui Pembangunan yang Merata Dimana Masyarakat Memiliki Akses dan Tingkat Pelayanan Pemerintah yang Prima BAPPEDA Kota Bima merumuskan tujuan yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Perumusan Program dan Kegiatan di BAPPEDA Kota Bima didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah dan pengentasan kemiskinan, Rencana Kerja BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025 mencakup 3 program terdiri dari 10 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan yaitu:

A	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
I	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**
1	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang (RPJPD<RPJMD dan RKPD)*
2	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan*
3	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*
4	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD/ RPJMD dan RKPD)*
5	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*
6	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*
II	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**
7	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)*
8	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*
9	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*
10	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)*

11	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*
12	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*
III	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**
13	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)*
14	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*
15	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*
16	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)*
17	*Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*
18	*Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*
B	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
IV	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**
19	*Pelaksanaan Konsultasi Publik*
20	*Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah*
21	*Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota*
22	*Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota*
V	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
23	*Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota*
24	*Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah*
C	**Program Penunjang Uusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
VI	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
25	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
26	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
27	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
28	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*

29	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD*
30	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
31	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
VII	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
32	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
33	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*
34	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
35	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*
36	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*
VIII	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
37	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor*
38	*Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
39	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
40	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*
41	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
IX	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
42	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
43	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
44	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
45	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
X	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
46	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
47	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

48	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

Usulan Program dan kegiatan diharapkan dapat mendukung prioritas nasional serta diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Bima dapat mewujudkan Tujuan Pembangunan Kota Bima tahun 2024 - 2026. Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 (disesuaikan dengan APBD Tahun 2025)

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			8.419.304.800,00				8.615.479.900,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.297.384.800,00				8.491.159.900,00	
	5	01				PERENCANAAN			8.297.384.800,00				8.491.159.900,00	
152	**5**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**5.929.213.100,00**				**6.143.921.100,00**	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	132.126.620,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	132.126.620,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.714.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	4.714.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	4.050.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan	4.050.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							RKA-SKPD					, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih		
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	5.405.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	5.405.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.482.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	3.482.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	8.265.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan	8.265.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Dokumen Perubahan DPA-SKPD					, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih		
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.856.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	7.856.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	98.353.620,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	98.353.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.900.268.200,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	4.900.268.200,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih		
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.854.787.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	4.854.787.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.140.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	13.140.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih		
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	19.021.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	19.021.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	10.819.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	10.819.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.500.000,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang	7.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												bersih		
	5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih		
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	10.000.000,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	10.000.000,00	
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih		
	5	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	525.808.280,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang	740.516.280,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												bersih		
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.285.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	9.285.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.352.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	234.060.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	113.240.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	113.240.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih		
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	101.173.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	101.173.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	282.758.080,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	282.758.080,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih		
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	179.660.000,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	179.660.000,00	
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 LAPORAN Laporan	98.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	98.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	40.590.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	40.590.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih		
	5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.320.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	7.320.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	01 Laporan	33.350.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	33.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	173.850.000,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang	173.850.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												bersih		
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	112.490.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	112.490.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	11.360.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	11.360.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih		
153	**5**	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase capaian kinerja perangkat daerah Persentase hasil dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan**	**98,6 Persen 98.60 persen**	**693.836.500,00**				**652.903.600,00**	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	98,6 Persen	537.648.600,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintaha	537.648.600,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												n yang bersih		
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik								
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara Berita Acara	23.825.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	23.825.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara Berita Acara	57.602.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	57.602.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 LAPORAN Berita Acara	285.835.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	285.835.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih		
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	170.385.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	170.385.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	156.187.900,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	115.255.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih		
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	40.932.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	115.255.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	115.255.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
154	**5**	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**	**-**	**1.674.335.200,00**				**1.694.335.200,00**	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	573.754.200,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan	573.754.200,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih		
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	60.303.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	60.303.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	74.633.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	74.633.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan	6 Dokumen	190.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							RKPD)					mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih		
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	116.015.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	116.015.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	57.803.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	57.803.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	544.107.800,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	544.107.800,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih		
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	131.076.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	131.076.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	112.265.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	112.265.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	5 Laporan	21.172.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	21.172.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Perekonomian					mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih		
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	135.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	135.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	124.569.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	124.569.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	20.023.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	20.023.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	556.473.200,00		-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang	576.473.200,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
												bersih		
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	190.876.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	190.876.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	100.499.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	100.499.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	5 Laporan	49.201.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk	69.201.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Infrastruktur					mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih		
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	114.714.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	114.714.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	77.473.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	77.473.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					PERKIRAAN MAJU	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	23.707.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan kinerja perencanaan, penganggaran dan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih	23.707.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda yang disusun dengan berpedoman pada Renstra 2024-2026 BAPPEDA kota Bima, RKPD Kota Bima Tahun 2025 serta Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Penetapan Program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja ini didasarkan atas prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan Kota Bima yang arah pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi , terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan Rencana kerja ini diutamakan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan. Apabila tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja ini, Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan didasarkan pada skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kota Bima.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BAPPEDA Kota Bima dalam menjalankan fungsi dan tugas BAPPEDA Kota Bima pada Tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Bima Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai BAPPEDA Kota Bima serta peran aktif stakeholder yang terlibat.

Demikian Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan RKA-PD.

Kota Bima, Januari 2025
Kepala Badan,

PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Drs.ADISAN
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19650729 200501 1 004

PEMERINTAH KOTA BIMA

RENCANA KERJA (RENJA-PD)
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA BIMA
TAHUN 2024



BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN SDM

KOTA BIMA TAHUN

2023

KATA PENGANTAR

Atas karunia dan hidayah-Nya kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan proses sistematis yang berkelanjutan sebagai rangkaian kegiatan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dan merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta Sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas terhadap kegiatan-kegiatan pada BKPSDM Kota Bima. Renja ini juga berisi tentang visi dan misi BKPSDM Kota Bima. Pada tahun 2024 terjadi perubahan dokumen Perencanaan, dengan diberlakukannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima 2024-2026, Perubahan RPJMD dengan melakukan penajaman sasaran RPJMD dan beberapa program, kegiatan serta Sub Kegiatan yang berdampak pada perubahan dokumen Renstra SKPD Tahun 2024-2026 dan Renja SKPD Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) yang tersusun ini masih jauh dari sempurna sehingga diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengkajian yang lebih mendalam, karena adanya pengembangan kegiatan organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup.

Demikian Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Bima Tahun 2024 ini yang dapat kami susun, dengan harapan adanya saran, petunjuk dan usulan sehingga Renja ini representatif dan lebih baik.

Raba - Bima, 10 April 2023.

Kepala BKPSDM Kota Bima,



Drs. A. Wahid

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19640407 199203 1007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 18

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 19

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 20

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 28

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 28

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 30

3.3. Program dan Kegiatan 31

AB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....

BAB IV PENUTUP 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dan hal tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengatur lingkup dan tingkatan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD).

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap Kepala SKPD harus menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Oleh karena itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman atau arahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun.

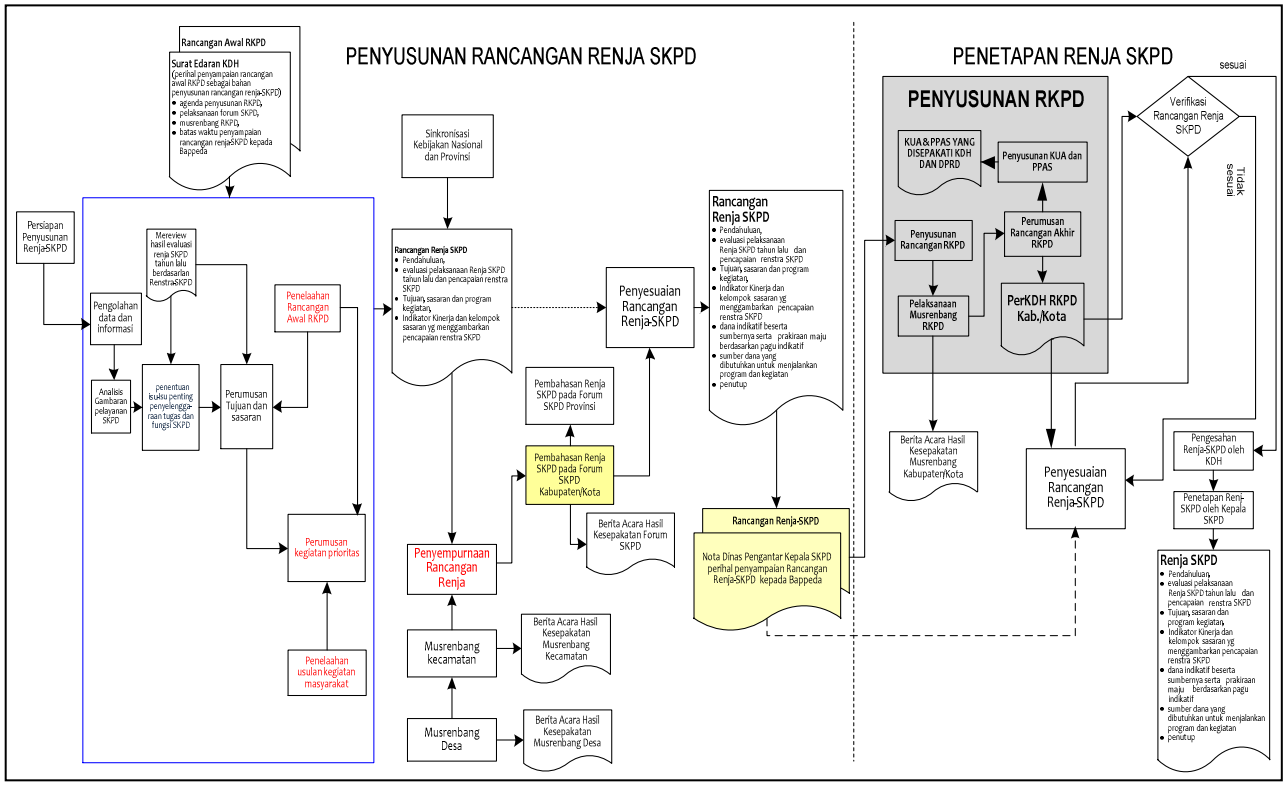
Penyusunan Renja BKPSDM Kota Bima Tahun 2024 ini sebagai Arahan kegiatan tahunan bagi BKPSDM sebagai SKPD juga merupakan bahan untuk kelengkapan atau penyempurnaan RKPD Tahun 2024 sebagai Dokumen yang mengarahkan Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bima secara keseluruhan.

Rencana Kerja (Renja) ini berisi berbagai program dan kegiatan pembangunan baik kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin (belanja tidak langsung) maupun kegiatan-kegiatan pembangunan (belanja langsung).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Bima ini semuanya bermuara pada upaya peningkatan pelayanan baik pelayanan intern dalam rangka pengembangan organisasi maupun pelayanan ekstern atau kepada seluruh SKPD dalam rangka pembinaan perencanaan dan koordinasi kebijakan Pembangunan Daerah Kota Bima.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Bima tahun 2024 mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan seperti sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 69 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 239).

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Bima Tahun 2024 ini adalah:

1. Untuk menjadi pedoman yang memberikan arahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dalam lingkup BKPSDM Kota Bima sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan baik oleh Sekretariat maupun bidang-bidang dalam lingkup BKPSDM Kota Bima;
3. Untuk menjadi acuan dan standar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan BKPSDM Kota Bima dalam penyusunan laporan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Bima Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKATDAERAH TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analsis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2023 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2019-2023 merupakan suatu upaya untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Renja perangkat daerah guna mendapatkan solusi dan langkah pengendalian dan perbaikan guna mencapai target Renja dan Renstra perangkat daerah.

Dari keseluruhan 3 Program dan 13 kegiatan yang direncanakan dalam Renja BKPSDM Kota Bima Tahun 2023, keseluruhan sejumlah 3 program dan 13 kegiatan dapat terealisasi dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) BKPSDM kota bima tahun anggaran 2023 akan tetapi terjadi penurunan Anggaran pada Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh karena adanya keterbatasan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah sehubungan dengan adanya keharusan pemerintah kota bima untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19.

Selanjutnya, dari hasil pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Bima Tahun 2022 yang merupakan tahun keempat dalam rangka pelaksanaan Renstra BKPSDM Tahun 2019-2023, maka secara umum capaian kinerja program dan kegiatan belum bisa diukur secara pasti. Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis BKPSDM Kota Bima juga rata-rata baik, yaitu dengan rata-rata tingkat capaian kinerja mencapai 80%. Adanya beberapa program dan kegiatan yang tidak mencapai target kinerja sebagaimana yang telah direncanakan, akan menjadi perhatian dan landasan awal bagi BKPSDM Kota

Bima dalam menyusun dokumen perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Berikut disajikan capaian indikator kinerja utama (IKU) BKPSDM Kota Bima Tahun 2022.

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Bima Tahun 2022

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya ASN Profesionalitas	Indeks Profesionalitas ASN	Kategori	Rendah	Sangat Rendah

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi ASN dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut:

a. Nilai 91-100 Berkategori Sangat Tinggi;

b. Nilai 81-90 Berkategori Tinggi;

c. Nilai 71-80 Berkategori Sedang;

d. Nilai 61-70 Berkategori Rendah;

e. Nilai 0-60 Berkategori Sangat Rendah.

Dari hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas ASN secara nasional yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional menggunakan metode SAPK menunjukan bahwa nilai rata-rata profesionalitas ASN Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 adalah 45,00 atau kategori sangat rendah.

Berikut perkembangan kinerja IKU Indeks Profesionalitas ASN terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan BKPSDM Kota Bima Tahun 2018-2023 yang ditunjukan pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Bima terhadap Renstra 2018-2023.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Capaian		
				2021	2022	2023
Meningkatnya ASN Profesionalitas	Indeks Profesionalitas ASN	Kategori	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	-

Perkembangan Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2022 berada pada kriteria Sangat Rendah (rentang nilai 0-60) yaitu dengan capaian nilai 51,11 atau lebih rendah 4,89 dari nilai tahun 2020 sebesar 56. Dan bila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2023 pencapaian kinerja masih sangat rendah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi ASN ditetapkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN yaitu sebagai berikut:

a. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);

b. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen);

c. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);

d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Program yang relevan mendukung pencapaian kinerja IKU Indeks Profesionalitas ASN adalah Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Program Kepegawaian Daerah

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;

2. Mutasi dan Promosi ASN;

3. Pengembangan Kompetensi ASN;

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

B. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan Kompetensi Teknis;

2. Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Upaya yang dilakukan BKPSDM Kota Bima pada untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 antara lain:

1. Mengirimkan 14 (empat belas) orang pejabat Pemerintah Kota Bima untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan;

2. Mendorong peningkatan kompetensi teknis melalui pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis secara daring pada ASN Pemerintah Kota Bima;

3. Mendorong peningkatan disiplin dan kinerja PNS Kota Bima dengan Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bima berdasarkan Beban Kerja dengan perhitungan berdasarkan Produktivitas Kerja (50%) dan Disiplin Kerja (30%) yang pengukurannya dilakukan secara elektronik yaitu melalui E-Disiplin;

4. Melaksanakan Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan Pejabat Tinggi Non ASN secara Elektronik Tahun 2021 sesuai dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan Pejabat Tinggi Non ASN secara Elektronik.

5. Melaksanakan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bima yang diikuti oleh 24 (dua puluh empat) orang peserta Eselon II.

6. Mendorong peningkatan Kualifikasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bima melalui pemberian Beasiswa Tugas Belajar Strata-2 dan pemberian beasiswa bantuan tugas akhir bagi PNS yang sedang meningkatkan kualifikasinya melalui ijin belajar.

Prestasi yang diraih oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2022 yaitu mendapatkan Penghargaan dari BKN Award atas Capaian Penyelesaian Permasalahan Data Anomali 100%.

Adapun rendahnya capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2022 terdapat beberapa hal yang mempengaruhi yaitu :

1. Belum optimalnya mekanisme pelaporan peningkatan kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;

2. Belum tersusunnya rencana kebutuhan peningkatan kompetensi teknis dan fungsional bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bima; Penggunaan sumber daya anggaran untuk pelaksanaan program pada BKPSDM Kota Bima TA. 2022 telah dilakukan secara efisien, hal ini ditunjukan oleh rasio realisasi belanja terhadap unit kinerja program lebih kecil daripada rasio rencana belanja terhadap unit kinerja program. Secara efektifitas pelaksanaan belanja daerah untuk program terdapat satu kinerja program yang tidak efektif yaitu pada program kepegawaian daerah dengan pada indikator % pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan, karena realisasi kinerja (hasil) lebih kecil dari rencana kinerja (hasil).

2.2 . Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam pasal 12 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima termasuk ke dalam pelayanan dasar yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan diatas, maka harus berpedoman pada standar pelayananan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah .Standar pelayanan minimal sendiri adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Disisi lain sampai saat ini belum ada indikator urusan kepegawaian yang di tetapkan dalam bentuk SPM yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Oleh sebab itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima dalam menentukan kinerja pelayanannya berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima.Selain itu, dalam mengimplikasikan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima Tahun 2024-2026 guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah (Walikota dan Wakil Walikota Bima) terpilih pada periode yang sama, maka sasaran prioritas bidang kepegawaian adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur yang berkualifikasi sesuai kebutuhan organisasi dalam rangka pemenuhan pegawai dan pengisian jabatan.Sebagaimana diketahui bahwa pelayanan publik di Kota Bima dewasa ini menjadi isu strategis dan sekaligus merupakan gambaran masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah yang memiliki implikasi luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.Perbaikan kinerja pelayanan di bidang kepegawaian yang berkelanjutan akan mendorong terciptanya iklim kondusif bagi kegiatan pelayanan aparatur pegawai negeri sipil yang pada gilirannya akan memberikan kesejahteraan kepada pegawai.Selain itu perbaikan kinerja pelayanan bidang layanan kepegawaian juga akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan dan legitimasi terhadap Pemerintah Daerah sehingga mampu memberikan daya dukung peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini mengingat bahwa peningkatan kualitas pelayanan khususnya pelayanan kepegawaian yang berkualitas merupakan salah satu indikator terjadinya paradigma dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan pegawai. Untuk itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima akan selalu berusaha melaksanakan perbaikan berkelanjutan menuju pelayanan yang diharapkan yaitu pelayanan yang prima dan ini memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan, dan keterlibatan semua komponen yang saling terkait.

A. Jenis-jenis Pelayanan.

Sesuai tugas pokok dan Fungsinya secara garis besar jenis pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi :

1. Pelayanan proses administrasi penetapan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil;

2. Pelayanan Mutasi / Pindah Pegawai Negeri Sipil;

3. Pelayanan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

4. Pelayanan Peninjauan Masa Kerja dan gaji PNS;

5. Pelayanan penyaluran Bantuan Perumahan PNS dan Bapetarum PNS;

6. Pengajuan Izin Belajar / Tugas Belajar;

7. Pelayanan penerbitan KARPEG, KARIS DAN KARSU;

8. Pelayanan Pensiun / Pemberhentian PNS;

9. Pelayanan Diklat Aparatur dan Diklat Teknis Fungsional; dan

10. Pelayanan administrasi lainnya di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

B. Permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima sebagai berikut :

1. Masalah Perlunya Konsistensi Program.

   Untuk mewujudkan misi yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima,sangat diperlukan adanya konsistensi kegiatan operasional tahunan dengan program sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA),Tanpa adanya konsistensi program, akan sulit untuk diharapkan misi yang diemban dapat tercapai.

2. Masalah Pengembangan Budaya Kerja.

   Kendala internal yang dihadapi dalam upaya mewujudkan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima bersumber juga pada belum optimalnya penerapan nilai nilai budaya kerja terutama budaya pelayanan sebagai satu sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma norma yang disepakati dan dijadikan pedoman tingkah laku, akibatnya berbagai masalah yang berhubungan dengan adaptasi eksternal dan integrasi internal belum sepenuhnya mengarah kepada perubahan sikap dan perilaku serta motivasi kerja untuk menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktifitas yang diharapkan.

   3. Masalah Peningkatan Koordinasi Internal

   Keterpaduan perencanaan dalam RENSTRA, baik keterpaduan program maupun sasaran, memerlukan kemantapan koordinasi dalam pelaksanaan, pemantuan, dan evaluasi pada tataran operasionalnya, khususnya koordinasi antar bidang dan internal bidang. Oleh karenanya dengan semakin meningkatnya tuntutan peningkatan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, diperlukan pemantapan koordinasi internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Bima

1. Masalah Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur.Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima mendesak untuk dilaksanakan agar tetap mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang terus berkembang sesuai dinamika perubahan.
2. Masalah Optimalisasi Hasil Program dan kegiatan.
   Dampak dari belum optimalnya konsistensi program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima serta belum optimalnya komitmen untuk berbuat yang terbaik dari seluruh jajaran organisasi akan menciptakan sasaran hasil atau manfaat (Outcomes) yang diharapkan dari setiap kegiatan operasional belum sepenuhnya dapat tercapai.

C. Capaian Kinerja.

Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima dalam melaksanakan RENSTRA tahun sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi terhadap program kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2020 menunjukkan bahwa belum seluruh program kegiatan mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal ini antara lain dikarenakan program atau kegiatan yang ada belum sepenuhnya menggunakan pendekatan manajemen sumber daya manusia, yaitu pendekatan yang memandang seluruh siklus pengembangan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan, pembinaan kepegawaian hingga penetapan imbalan sebagai suatu proses integral yang tidak terpisahkan.

Secara umum, efektifitas anggaran terhadap capaian misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

Sebagai salah satu perangkat daerah Kota Bima yang melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota bima telah menetapkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima Tahun 2024-2026 sebagai pedoman operasional

dalam pemberian pelayanan perangkat daerah kepada masyarakat maupun kepada stake holder lainnya, yang terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis untuk mencapai tujuan perangkat daerah selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun. Realisasi pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima tahun 2021-2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PEMERINTAH KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Proyeksi Tahun ke-	Catatan Penting
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	
		INDEKS PROFESIONALITAS ASN				45	50		55			
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
	KEPEGAWAIAN											
	PROGRAM PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	100%		100%	100%	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanaya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	100%		100%	100%	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-		2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	-	-		1 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	-	-		1 Dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	-	-		1 Dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	-	-		1 Dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-		2 laporan	2 laporan		2 laporan	2 laporan	2 laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		100%	100%		100%	100%	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	35 Orang/12 Bulan		Orang/12 Bulan		35 Orang/12 Bulan	35 Orang/12 Bulan	35 Orang/12 Bulan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-		12 Dokumen	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-		1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-		18 Laporan	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		100%	100%		100%	100%	100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-		35 Paket	35 stel		35 stel	35 stel	35 stel	

	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	-	-		12 Dokumen	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-		100%	100%		100%	100%	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	-	-		15 Paket	15 Unit		15 Unit	15 Unit	15 Unit	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-		40 Paket	6 Unit		6 Unit	6 Unit	6 Unit	
	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-		43 Paket	43 Unit		43 Unit	43 Unit	43 Unit	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-		12 Paket	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-		122257 Paket	122257 Lembar		122257 Lembar	122257 Lembar	122257 Lembar	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-		14 Dokumen	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-		67 Laporan	67 Kali		67 Kali	67 Kali	67 Kali	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-		100%	100%		100%	100%	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-		125 Unit	125 Unit		125 Unit	125 Unit	125 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-		100%	100%		100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-		1580 Laporan	1580 surat		1580 surat	1580 surat	1580 surat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-		12 Laporan	12 kali		12 kali	12 kali	12 kali	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-		12 Laporan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**persentase terlaksannanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-		100%	100%		100%	100%	100%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-		19 unit	16 unit		16 unit	16 unit	16 unit	
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-		15 unit	15 unit		15 unit	15 unit	15 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-		1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	Program Kepegawaian Daerah	**Meningkatnya tingkat Kepuasan ASN terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian**	-	-		100%	100%		100%	100%	100%	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan Pengadaan, Pemberhentian Kepegawaian yang ditangani.	-	-		100%	100%		100%	100%	100%	
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	-	-		350 Laporan	350 Laporan		350 Laporan	350 Laporan	350 Laporan	
	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan	-	-		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil penanaman Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	-	-		166 Dokumen	166 Dokumen		166 Dokumen	166 Dokumen	166 Dokumen	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-		12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase dokumen mutasi dan kenaikan pangkat yg diurusi	-	-		**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-	-		122 Dokumen	122 Dokumen		122 Dokumen	122 Dokumen	122 Dokumen	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-	-		850 Dokumen	850 Dokumen		850 Dokumen	850 Dokumen	850 Dokumen	
	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki Kompetensi sesuai ketentuan	-	-		**100,00%**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-	-		55 Orang	55 Orang		55 Orang	55 Orang	55 Orang	
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	-	-		5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	-	-		85 Dokumen	85 Dokumen		85 Dokumen	85 Dokumen	85 Dokumen	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin dan ijin perceraian yang ditangani	-	-		**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-		Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	Dokumen	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	-	-		Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-	-		35 Laporan	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai	-	-		18 Dokumen	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Persentase penegakan ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan**	-	-		**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	**Persentase Kebijakan Teknis yang telah di susun**	-	-		**100%**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Pengawasan,Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Pimpinan, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	-	-		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-	-		15 Orang	17 Orang		17 Orang	17 Orang	17 Orang	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai ketentuan**	-	-		**100,00%**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pengawas, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pengawas, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-	-		285 Laporan	285 Laporan		285 Laporan	285 Laporan	285 Laporan	
	Pembinaan, Pengendalian, Evaluasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja	-	-		**285 Dokumen**	**285 Dokumen**		**285 Dokumen**	**285 Dokumen**	**285 Dokumen**	

Bima, 10 April 2023

Kepala Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan SDM Kota Bima,

Drs. A. Wahid

NIP. 19640807 199203 1 007

Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Adapun dalam penyusunan Renja PD, analisis SWOT dilakukan dengan mengkaji berbagai faktor internal dan faktor eksternal sehingga dirumuskan strategi ke depan guna mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja. Pada pelayanan BKPSDM telah dilakukan dengan 4 (empat) indikator yaitu:

1. Kekuatan (*Strengths*)

   Berikut beberapa kekuatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM:

   a) Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi kepegawaian, perencanaan, keungan dan aset.
   b) Adanya komitmen dan kebijakan Reformasi Birokrasi dalam tata Kelola pemerintah yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis.
   c) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan penguatan manajemen ASN berbasis Sistem Merit.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

   Kelemahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM, yaitu penerapan system merit sebagai upaya percepatan *Road map* Reformasi Birokrasi melalui penerapan penguatan Manajemen ASN masih belum optimal.

3. Peluang (*Opportunities*)

   Peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM, yaitu adanya regulasi baru dan pembangunan *Smart* ASN untuk mendukung Reformasi Birokrasi sebagai solusi peningkatan kompetensi ASN guna meningkatkan pelayanan publik khususnya layanan kepegawaian menuju *e-Goverment*.

4. Ancaman (*Threats*)

   Berikut ancaman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM:

   a) Ketentuan jadwal dan pelaksanaan penerimaan seleksi CASN yang bersifat kondisional.
   b) Jumlah penetapan formasi pegawai tidak sesuai dengan Usulan Kebutuhan Pegawai sehingga tingkat kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bima masih dapat dikatakan tinggi.
   c) administrasidilakukan secara terpadu dan elektronik sehingga penerapan system/aplikasi pelayanan kepegawaian dapat berfungsi secara optimal.

d) Jumlah aparatur yang profesional masih tergolong rendah sehingga diperlukan upaya percepatan guna peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur secara berkelanjutan bagi seluruh aparatur.

Tabel 2.2.1

Analisis SWOT

Kekuatan (Strengths)	**Peluang (Opportunities)**
a. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset. b. Adanya komitmen dan Kebijakan Reformasi Birokrasi dalam tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan	a. Peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM, adanya regulasi baru dan pembangunan Smart ASN untuk mendukung Reformasi Birokrasi sebagai solusi peningkatan kompetensi ASN guna meningkatkan pelayanan public khususnya layanan kepegawaian menuju e-Govemend.
Kelemahan (Weaknesses)	**Ancaman (Threats)**
a. Kelemahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM yaitu penerapan system merit sebagai upaya percepatan Road Map Reformasi Birokrasi melalui Penerapan penguatan manajemen ASN masih belum optimal.	a. Ketentuan jadwal dan pelaksanaan seleksi CASN yang bersifat kondisional. b. Jumlah penetapan formasi pegawai tidak sesuai dengan Usulan Kebutuhan Pegawai sehingga tingkat kebutuhan pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Bima masih dapat

	dikatakan tinggi. c. Percepatan pelaksanaan otomatisasi pelayanan adminstrasi kepegawaian dilakukan secara terpadu dan elektronik sehingga penerapan system/aplikasi pelayanan kepegawaian dapat berfungsi secara optimal. d. Jumlah aparatur yang profesional masih tergolong rendah sehingga diperlukan upaya percepatan guna peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur secara berkelanjutan bagi seluruh aparatur.

2.3. Isu-isu Penting Penyelennggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan tugas dan fungsi yang terdampak pada pencapaian Program Nasional dan daerah perlu di perhatikan adalah :

1. Adanya penyesuaian ketentuan yang kondisional atas pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS oleh pemerintah pusat.
2. Adanya regulasi baru untuk mendukung percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pelayanan public, maka dituntut adanya penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan yang berbasis elektronik.
3. Adanya tuntutan terwujudnya sumber daya manusia yang profesional.

4. Adanya regulasi baru atas pemetaan program dan kegiatan yang bertujuan mengintegrasikan dan menyelaraskan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, keuangan dan aset daerah.
5. Adanya ketentuan sesuaikebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pengembangan system informasi pelayanan kepegawaian.

Permasalahan dan hambatan diatas mengakibatkan kurang optimalnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik yang merupakan isu strategis pada pencapaian visi misi Kepala Daerah. Tantangan dalam melaksanakan tugas dan BKPSDM adalah:

1. Tuntutan penguatan sumber daya aparatur dengan meningkatkan kompetensi aparatur melalui Pendidikan dan pelatihan, tugas belajar dan *assessment* bagi aparatur, serta pengadaan seleksi penerimaan CPNS sesuai kebutuhan pegawai.
2. Terwujudnya manajemen Aparatur Sipil Negara menuju pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*) melalui pelayanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi dengan didukung Pegawai Negeri Sipil yang profesional.
3. Pengembangan sumberdaya aparatur yang belum terintegrasi dengan system pengembangan karier.
4. Pemutakhiran sistem dan manajemen informasi pelayanan kepegawaian secara berkala.

Seuhubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan umum dalam menyelenggarakan Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Isu-isu pelayanan kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa peraturan tersebut mengatur manajemen kepegawaian PNS mulai dari proses pengadaan sampai dengan pemberhentian pegawai.

Pada skala Provinsi Nusa Tenggara Barat, isu pelayanan kepegawaian yang menjadi fokus perhatian adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan pelayanan publik di daerah. Untuk Kota Bima tuntutan peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang

baik, dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, pembinaan dan pengembangan aparatur.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1. Perlu dilakukan rekruitmen pegawai sesuai kebutuhan daerah melalui seleksi penerimaan CASN untuk mengatasi keterbatasan jumlah aparatur akibat pension, mutase dan pemberhentian pegawai.
2. Perlunya peningkatan kapasitas aparatur melalui Pendidikan dan pelatihan, sosialisasi/bimbingan teknis administrasi dan pelayanan kepegawaian serta peningkatan Pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi dengan memberikan informasi dan pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas guna mewujudkan ASN yang professional melalui *Smart* ASN;
3. Penataan Manajemen Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Dengan menerapkan sistem merit sebagai kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur dan atau kondisi kecacatan maka dapat mewujudkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian untuk mengoptimalkan pelayanan publik serta pengelolan pelayanan informasi dan administrasi kepegawaian secara elektronik; dan
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan *database* kepegawaian.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yaitu dengan melakukan perbandingan antara Rancangan Awal Renja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan terhadap Program dan Kegiatan baik Program/Kegiatan Wajib maupun Teknis, yang meliputi indicator kinerja, target capaian dan pagu anggaran atau kebutuhan dana yang ditetapkan dari perbandingan ini

ditemukan perbedaan target kegiatan, serta pagu anggaran sub kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian.

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut didapatkan beberapa hasil Review sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan **Penyesuaian pagu anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan**

   pada :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan :
   1) Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada 6 (enam) Sub Kegiatan :
      a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d) Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD
      e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD
      f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,pada 4 (empat) Sub Kegiatan :
      a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pada 2 (dua) Sub Kegiatan :
      a) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
      b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada 7 (tujuh) Sub Kegiatan :
      a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada 1 (satu) Sub Kegiatan :
a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada 3 (tiga) Sub Kegiatan :
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada 3 (tiga) Sub Kegiatan :
a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Kepegawaian Daerah, terdiri dari 4 (empat) Kegiatan :

1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, pada 4 (empat) Sub Kegiatan :
a) Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
b) Evaluasi Pemberhentian ASN
c) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
d) Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian

2) Mutasi dan Promosi ASN, pada 2 (dua) Sub Kegiatan :
a) Pengelolaan Mutasi ASN
b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

3) Pengembangan Kompetensi ASN, pada 2 (dua) Sub Kegiatan :
a) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
b) Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional

4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, pada 4 (empat) Sub Kegiatan :

a) Pelaksanaan Pembinaan Disiplin ASN
b) Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
c) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
d) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan :
   1) Pengembangan Kompetensi Teknis, pada 1 (satu) Sub Kegiatan :
      a) Penyusunan Dokumen Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi
   2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
      b) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Dasar dilakukannya penyesuaian pada hasil analisis kebutuhan disebabkan adanya perbedaan jumlah target kinerja dan pagu anggaran yang tercantum dalam rancangan awal rencana kerja Pemerintah daerah dengan pagu dana indikatif yang sudah ditetapkan dan adanya kebutuhan kegiatan untuk menunjang kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di tahun 2024. Untuk lebih jelasnya Review terhadap Rancangan Awal rencana kerja Pemerintah Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 2.4 Review Ranwal RKPD BKPSDM TAHUN 2024

REVIEW TERHADAP RANCANA AWAL RKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal 2024			Hasil Analisa Kebutuhan RKPD		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	KEPEGAWAIAN				9.210.236.746		0	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKPSDM KOTA BIMA	100%	5.131.601.502	100%	1	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM KOTA BIMA	100%	44.269.752	100%	1	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM KOTA BIMA	2 dokumen	7.020.848	2 dokumen	8.005.773	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	BKPSDM KOTA BIMA	1 dokumen	8.310.386	2 dokumen	8.535.882	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	BKPSDM KOTA BIMA	1 Dokumen	7.453.700	1 dokumen	7.654.651	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	BKPSDM KOTA BIMA	1 Dokumen	7.104.300	1 dokumen	8.005.423	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA SKPD	BKPSDM KOTA BIMA	1 Dokumen	7.134.746	1 dokumen	7.346.788	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM KOTA BIMA	2 laporan	5.741.172	2 laporan	5.913.407	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM KOTA BIMA	100%	3.458.303.006	100%	3.562.052.096	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM KOTA BIMA	35 Orang/12 Bulan	3.207.477.989	35 Orang/12 Bulan	3.406.702.329	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM KOTA BIMA	12 Dokumen	131.527.998	12 Bulan	135.433.819	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM KOTA BIMA	1 Laporan	8.603.384	1 Laporan	8.861.486	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM KOTA BIMA	10 Laporan	10.692.653	10 Laporan	11.013.433	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM KOTA BIMA	100%	55.866.000	100%	57.541.980	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM KOTA BIMA	35 Paket	30.000.000	35 stel	30.900.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	BKPSDM KOTA BIMA	12 Dokumen	25.866.000	12 bulan	26.641.980	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM KOTA BIMA	100%	563.685.166	100%	580.513.221	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	BKPSDM KOTA BIMA	15 Paket	25.637.104	15 Unit	26.406.217	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM KOTA BIMA	80 Paket	[illegible]	6 Unit	[illegible]	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BKPSDM KOTA BIMA	43 Paket	57.660.782	43 Unit	59.390.605	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM KOTA BIMA	12 Paket	51.807.693	12 Bulan	53.361.918	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM KOTA BIMA	11.2257 Paket	75.900.000	122257 Lembar	78.260.224	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKPSDM KOTA BIMA	14 Dokumen	18.647.520	14 Dokumen	19.206.946	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM KOTA BIMA	67 Laporan	251.000.000	67 Kali	257.530.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100%**	**579.000.000**	**100%**	**596.370.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKPSDM KOTA BIMA	125 Unit	579.000.000	125 Unit	596.370.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100%**	**201.921.292**	**100%**	**207.978.931**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM KOTA BIMA	1500 Laporan	28.738.092	1500 surat	29.601.235	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM KOTA BIMA	12 Laporan	79.872.000	12 bull	82.268.160	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM KOTA BIMA	12 Laporan	93.310.600	12 Bulan	96.109.712	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100%**	**228.639.364**	**100%**	**235.498.547**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BKPSDM KOTA BIMA	19 unit	110.300.000	16 unit	121.049.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKPSDM KOTA BIMA	15 unit	58.005.200	15 unit	59.745.356	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM KOTA BIMA	1 Unit	52.334.166	1 Unit	53.904.191	
	Program Kepegawaian Daerah	**Meningkatnya tingkat Kepuasan ASN terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100%**	**1.585.215.664**	**100%**	**1.632.772.134**	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan Pengadaan, Pemberhentian Kepegawaian yang diberikan	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100%**	**589.440.524**	**100%**	**607.123.742**	
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	BKPSDM KOTA BIMA	320 Laporan	384.084.586	350 Laporan	394.607.124	
	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenisdan jumlah jabatan untukpelaksanaan pengadaan	BKPSDM KOTA BIMA	1 Dokumen	28.000.000	1 Dokumen	28.840.000	
	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	BKPSDM KOTA BIMA	1 Dokumen	81.355.938	1 Dokumen	83.796.616	

	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM KOTA BIMA	12 Dokumen	149.419.000	12 Dokumen	153.902.570	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM KOTA BIMA	12 Laporan	33.352.960	12 Laporan	38.885.549	
	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase dokumen mutasi dan kenaikan pangkat yg ditangani	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100%**	**282.398.670**	**100%**	**290.862.630**	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM KOTA BIMA	122 Dokumen	204.189.780	122 Dokumen	210.375.282	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM KOTA BIMA	850 Dokumen	78.140.890	900 Dokumen	80.691.117	
	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki Kompetensi sesuai ketentuan	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100.00%**	**526.617.000**	**100%**	**542.415.510**	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	BKPSDM KOTA BIMA	55 Orang	467.631.000	55 Orang	481.628.010	
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	BKPSDM KOTA BIMA	5 Dokumen	25.111.000	5 Dokumen	25.753.330	
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	BKPSDM KOTA BIMA	05 Dokumen	34.037.000	05 Dokumen	35.037.510	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin dan tata perceraan yang ditangani	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100%**	**186.767.460**	**100%**	**192.370.484**	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM KOTA BIMA	Dokumen	25.111.000	Dokumen	25.753.330	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	BKPSDM KOTA BIMA	Orang	25.111.000	Orang	25.753.330	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM KOTA BIMA	35 Laporan	112.944.000	35 Laporan	116.332.320	
	Pelayanan Pensiun dan Pemberian Pegawai	Jumlah Dokumen Pensiun dan Pemberian Pegawai	BKPSDM KOTA BIMA	10 Dokumen	23.023.460	10 Dokumen	24.538.164	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Persentase peningkatan ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai kewenanan**	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100%**	**2.553.414.500**	**100%**	**2.580.827.595**	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	**Persentase Kebijakan Teknis yang telah di Susun**	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100%**	**238.140.000**	**100%**	**245.284.200**	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Pejabatan Struktural Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kecamatan, Perangkat Daerah Perangkat, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Melayani	BKPSDM KOTA BIMA	1 Dokumen	110.640.000	1 Dokumen	113.959.200	

	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Dasar, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	BKPSDM KOTA BIMA	15 Orang	127.500.000	17 Orang	131.325.000	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan**	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100,00%**	**2.275.279.500**	**100%**	**2.343.537.885**	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM KOTA BIMA	285 Laporan	2.184.375.000	285 Laporan	2.249.906.250	
	Penilaian, Pengendalian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja	BKPSDM KOTA BIMA	285 Dokumen	90.900.500	285 Dokumen	93.631.625	

Bima, 10 April 2023

Kepala Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan SDM Kota Bima,

Drs. A. Wahid

NIP. 19640407 199203 1 007

2.5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Usulan program dan kegiatan masyarakat dari para pemangku kepentingan tahun 2024 sesuai spesifik dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi kepegawaian dan pengembangan SDM dalam Renja BKPSDM Tahun 2024 Tidak Ada atau NIHIL

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Pengusul	Urusan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
-	-	-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan melanjutkan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025, berbagai kebijakan ditujukan untuk mewujudkan 8 area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi Nasional, meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik. Terwujudnya ASN yang profesional merupakan salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi, untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. ASN yang profesional, berintegrasi, kreatif, inovatif dan netral merupakan salah satu isu strategis dalam area perubahan Reformasi Birokrasi dan menjadi sasaran pengarustamaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada RPJMN tahun 2020-2024. Sejumlah kebijakan terkait dengan pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta reformasi birokrasi diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Daerah menjadi salah satu kekuatan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk perbaikan manajemen ASN dan 25 manajemen kinerja ASN dan manajemen kinerja ASN daerah yang selama ini kualitasnya masih dianggap masih belum sesuai harapan. Selaras dengan kebijakan nasional, Pemerintah Kota Bima melalui RPJMD 2018-2023 telah menetapkan meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi sebagai salah satu sasaran pembangunan, yang kemudian diturunkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan sasaran strategis meningkatnya profesionalitas ASN pada Pemerintah Kota Bima.

3.1.1 ISU STRATEGIS DAERAH

Seiring dengan adanya kebijakan nasional berupa telah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdapat suatu perubahan yang cukup signifikan terhadap bentuk dan besaran perangkat daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan berlakunya ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah diharuskan untuk melakukan penyesuaian bentuk dan besaran serta nomenklatur perangkat daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hal ini berdampak pada adanya perubahan nomenklatur serta perubahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Pemerintah Kota Bima telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, dimana salah satu perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur serta perubahan kewenangan penanganan urusan pemerintahan daerah adalah “Badan Kepegawaian Daerah” yang mana sesuai Peraturan Daerah dimaksud diubah nomenklaturnya menjadi “Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Di sisi lain, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pemerintah Daerah di dorong untuk melakukan penataan dan perbaikan manajemen kepegawaian, dimana fokus dan penekanan dalam pengimplementasian Undang-Undang Aparatur Sipli Negara ini, yaitu pemberlakuan Sistem Merit (Meryt Sistem) dalam penataan dan pengelolaan kepegawaian baik pusat maupun daerah. Pelaksanaan system merit tersebut dilakukan melalui perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka, kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Meryt tersebut terdapat beberapa isu strategis nasional di bidang kepegawaian yang harus menjadi pemerintah daerah, yaitu antara lain “Bagaimana menempatkan aparatur sipil negara pada suatu jabatan yang sesuai dengan kompetensinya”.

Sejalan dengan isu strategis nasional tersebut dan memperhatikan situasi dan kondisi serta dinamika pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan di wilayah kota bima, maka terdapat beberapa isu strategis daerah di bidang kepegawaian yang perlu

menjadi perhatian guna mendapatkan antisipasi dan penyelesaian di masa mendatang. Adapaun isu strategis tersebut adalah:

1. Belum tersedianya data informasi jabatan dan data beban kerja PNS hasil pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja PNS sebagai data dasar dalam penyusunan pedman dan standar di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Telah terisinya formasi CPNS untuk Pemerintah Kota Bima melalui seleksi pengadaan CPNS tahun 2021 yang berdampak pada keharusan pemerintah kota bima untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan bagi CPNS yang lulus tersebut dimana sesuai ketentuan harus dilaksanakan paling lambat 1 tahun sejak diangkat sebagai CPNS ;
3. Adanya visi dan misi Walikota untuk meningkatkan kesejahteraaan pegawai eks honorer K-2 dan tenaga kontrak berupa pemberian gaji/insentif sebesar Rp. 1.000.000,- perorang perbulan, sehingga perlu dilakukan verifikasi dan validasi terhadap pegawai eks honorer K-2 dan tenaga kontrak SKPD yang masih aktif dan tidak aktif bekerja;
4. Adanya kekosongan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama Kepala Dinas/Badan dan Staf Ahli yang disebabkan karena pejabatnya memasuki masa purna bhakti, sehingga perlu dilakukan pengisian formasi JPT pratama yang lowong dimaksud melalui seleksi terbuka.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 – 2026, dimana dokumen ini merupakan bentuk pelaksanaan teknis masa Transisi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPD Kota Bima Tahun 2024-2026. Sehingga strategi, kebijakan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di arahkan pada upaya pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Capaian Pembangunan Tahun 2024 – 2026 diprioritaskan atas terwujudnya Kota Bima Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028. Visi RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028 “Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028”

Adapun Tujuan Pelayanan BKPSDM Kota Bima dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.1

Tujuan BKPSDM Kota Bima

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1.	Meningkatkan Meritrokrasi dalam Manajemen ASN	Nilai System Merit	249,00

Dalam kaitannya dengan tujuan lima tahunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun atau lebih. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis BKPSDM Kota Bima tahun 2024, yaitu Meningkatnya Manajemen Kepegawaian.

Adapun secara rinci sasaran strategis pelayanan jangka menengah BKPSDM Kota Bima Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.2
Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM Kota Bima Tahun 2024-2026

No	**Tujuan**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Sasaran Strategis**	**Target (2024)**
1.	Meningkatkan Meritrokrasi dalam Manajemen ASN	Meningkatnya Meritrokrasi dalam Manajemen ASN	Nilai System Merit	249,00

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN

Kebijakan reformasi birokrasi dilaksanakan melalui peningkatan profesionalisme dan Peningkatan pelayanan publik, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024-2026. Program – Program yang akan dilaksanakan ada 3 (tiga). Terdiri dari program rutin dan program teknis, yaitu :

A. Program Rutin :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Program Teknis :
    a. Program Kepegawaian Daerah
    b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

    Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari kmpulan Tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia). Barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran output) dalam bentuk barang/jasa.

    Rencana kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 sesuai dengan review terhadap perencanaan dan penganggaran dalam rencana kerja tersusun sebagai berikut :

    Kegiatan Rutin :

1. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan Teknis:

1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN:
   - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
   - Evaluasi Pemberhentian ASN
   - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
   - Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian

2 Mutasi dan Promosi ASN:
   - Pengelolaan Mutasi ASN
   - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

3 Pengembangan Kompetensi ASN, pada 2 (dua) Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur:

- Pelaksanaan Pembinaan Disiplin ASN
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

4 Pengembangan Kompetensi Teknis:

- Penyusunan Dokumen Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi

5 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Program Pengarusutaman Gender dan Perlindungan Anak di Daerah, khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat terwujud dengan melaksanakan Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia serta memperhatikan isu gender dan factor kesenjangan gender pada kegiatan Disiplin dan Penghargaan Aparatur. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, masih terdapat Pegawai Negeri Sipil Laki-laki dan Peremuan yang mengajukan proses ijin perceraian yang sangat berdampak dan merugikan kaum perempuan dan anak.

Dari factor tersebut, diperlukan pemahaman sosialisasi peraturan pemerintah tentang izinn perkawinan dan perceraian bagi ASN yang mengarah pada pengarusutamaan gender sehingga terwujud pemahaman dan wawasan secara umum tentang kepegawaian serta untuk mengurangi pelanggaran disiplin ASN yang bersumber dari proses perceraian.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai tugas dan fungsi akan melaksanakan Rencana Kerja dan Pendanaan dalam program dan kegiatan untuk medukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melaksanakan kegiatan pemetaan kompetensi bagi seluruh jabatan berbasis CAT dan/atau dengan memanfaatkan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bima. Dengan komitmen Reformasi di tingkat daerah akan terwujud pengembangan reformasi birokrasi yang modern, bersih dan berintegritas, profesional dan berkinerja tinggi melalui Smart ASN sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal, khususnya pelayanan kepegawaian.

Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024-2026. Sehingga Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki tujuan meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsive serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan public dengan sasaran yaitu meningkatnya kapasitas ASN Pemerintah Daerah dengan Indikator Kinerja Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN.

Kegiatan Rutin :

1. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam Sub Kegiatan):

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
- Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan:

:

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan:

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan Teknis:

8. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan:

- Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
- Evaluasi Pemberhentian ASN
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian

9. Mutasi dan Promosi ASN terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan:
    - Pengelolaan Mutasi ASN
    - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
10. Pengembangan Kompetensi ASN, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan:
    - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
    - Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
11. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan:
    - Pelaksanaan Pembinaan Disiplin ASN
    - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
    - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
    - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
12. Pengembangan Kompetensi Teknis terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan:
    - Penyusunan Dokumen Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi
13. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan:
    - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

BKPSDM Kota Bima dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak didaerah dengan memperhatikan isu gender dan factor kesenjangan gender, melalui :

1. Program Kepegawaian Daerah pada kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Penyelenggaraan Disiplin ASN melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Penyelenggaraan Disiplin ASN. Kegiatan ini menangani pemrosesan izin Perceraian ini sangat berdampak dan merugikan kaum perempuan dan anak. Sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pemahaman dan wawasan secara umum tentang kepegawaian untuk mengurangi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui sosialisasi peraturan pemerintah tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengarah pada pengarusutamaan gender.
2. Program Pengembangan Sumber daya manusia pada kegiatan pengembangan kompetensi teknis melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan. Kegiatan ini menangani pemrosesan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional. Dalam

Pelaksanaannya diharapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat lebih meningkatkan kompetensi bagi ASN perempuan sehingga dapat menunjang pelaksanaan pangarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Rumusan Rencana Kerja Program/Kegiatan, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Pertriwulan Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di jelaskan pada table 4.1.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2024
DAK PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kode Rekening	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.03	KEPEGAWAIAN				9.210.236.746				9.537.145.000
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKPSDM KOTA BIMA	100%	5.181.601.582	APBD		100%	5.283.609.629
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM KOTA BIMA	100%	44.269.752	APBD		100%	45.997.000
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM KOTA BIMA	2 dokumen	7.830.840	APBD		2 dokumen	8.063.773
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	BKPSDM KOTA BIMA	1 dokumen	8.287.188	APBD		2 dokumen	8.535.802
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	BKPSDM KOTA BIMA	1 Dokumen	7.431.731	APBD		1 dokumen	7.654.651
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	BKPSDM KOTA BIMA	1 Dokumen	7.844.181	APBD		1 dokumen	8.079.423
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	BKPSDM KOTA BIMA	1 Dokumen	7.134.741	APBD		1 dokumen	7.348.783
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM KOTA BIMA	2 laporan	5.741.172	APBD		2 laporan	5.913.407
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM KOTA BIMA	100%	3.410.312.086	APBD		100%	3.512.651.449
5.03.01.2.02.01	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM KOTA BIMA	35 Orang/12 Bulan	3.307.477.989	APBD		35 Orang/12 Bulan	3.406.702.329
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDM KOTA BIMA	12 Dokumen	131.527.981	APBD		12 Bulan	135.473.819
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM KOTA BIMA	1 Laporan	8.603.384	APBD		1 Laporan	8.861.486
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM KOTA BIMA	10 Laporan	10.692.653	APBD		10 Laporan	11.013.433
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM KOTA BIMA	100%	55.864.000	APBD		100%	57.539.920
5.03.01.2.05.02	Pengelolaan Pelayanan Dasar Reserda Akibat Kelangkapanaya	Jumlah Paket Pelayanan Dasar Reserda Akibat Kelangkapanaya	BKPSDM KOTA BIMA	35 Paket	41.880.000	APBD		35 Unit	43.980.000
5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BKPSDM KOTA BIMA	12 Dokumen	25.864.000	APBD		12 bulan	26.639.920
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM KOTA BIMA	100%	563.695.166	APBD		100%	580.515.523

5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	BKPSDM KOTA BIMA	15 Paket	25.617.106	APBD		15 Unit	26.406.217
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM KOTA BIMA	40 Paket	83.071.200	APBD		6 Unit	86.387.418
5.03.01.2.06.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BKPSDM KOTA BIMA	43 Paket	57.663.792	APBD		43 Unit	59.351.685
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM KOTA BIMA	12 Paket	51.807.600	APBD		12 Bulan	53.361.918
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM KOTA BIMA	112257 Paket	75.980.800	APBD		112257 Lembar	78.260.224
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKPSDM KOTA BIMA	14 Dokumen	18.647.520	APBD		14 Dokumen	19.210.946
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM KOTA BIMA	67 Laporan	250.000.000	APBD		67 Kali	257.500.000
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100%**	**579.000.000**	**APBD**		**100%**	**596.370.000**
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKPSDM KOTA BIMA	125 Unit	579.000.000	APBD		125 Unit	596.370.000
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100%**	**281.923.231**	**APBD**		**100%**	**287.978.931**
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM KOTA BIMA	1 Laporan	28.214.967	APBD		1 Laporan	29.161.916
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM KOTA BIMA	12 Laporan	79.072.000	APBD		12 kali	80.268.160
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM KOTA BIMA	12 Laporan	93.510.800	APBD		12 Bulan	96.315.712
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100%**	**228.639.366**	**APBD**		**100%**	**235.498.547**
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BKPSDM KOTA BIMA	19 unit	118.031.000	APBD		19 unit	121.571.930
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKPSDM KOTA BIMA	15 unit	58.005.200	APBD		15 unit	59.745.356
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM KOTA BIMA	1 Unit	52.316.166	APBD		1 Unit	53.814.191
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Meningkatnya tingkat Kepuasan ASN terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100%**	**1.585.215.044**	**APBD**		**100%**	**1.632.772.334**
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase layanan Pengadaan, Pemberhentian Kepegawaian yang ditangani.	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100%**	**580.440.326**	**APBD**		**100%**	**607.123.742**
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	BKPSDM KOTA BIMA	338 Laporan	344.034.506	APBD		350 Laporan	354.417.324
5.03.02.2.01.02	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis,dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan	BKPSDM KOTA BIMA	1 Dokumen	28.000.000	APBD		1 Dokumen	28.840.000
5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan Bahan kebijakan Pemberhentian ASN	BKPSDM KOTA BIMA	166 Dokumen	30.103.500	APBD		166 Dokumen	31.006.605

5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM KOTA BIMA	12 Dokumen	149.415.480	APBD		12 Dokumen	153.902.064
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM KOTA BIMA	12 Laporan	37.752.960	APBD		12 Laporan	38.885.549
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase dokumen mutasi dan usulan pangkat yg ditangani	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100%**	**282.300.678**	**APBD**		**100%**	**290.862.398**
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM KOTA BIMA	122 Dokumen	204.048.780	APBD		122 Dokumen	210.171.282
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM KOTA BIMA	850 Dokumen	78.341.890	APBD		850 Dokumen	80.691.117
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100,00%**	**526.617.860**	**APBD**		**100%**	**542.415.516**
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	BKPSDM KOTA BIMA	55 Orang	467.610.800	APBD		55 Orang	481.639.000
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	BKPSDM KOTA BIMA	1 Dokumen	25.910.800	APBD		1 Dokumen	25.750.000
5.03.02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	BKPSDM KOTA BIMA	85 Dokumen	34.017.800	APBD		85 Dokumen	35.037.534
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Persentase pelanggaran disiplin dan tindak pemerintah yang ditangani	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100%**	**186.767.460**	**APBD**		**100%**	**192.370.484**
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM KOTA BIMA	Dokumen	25.910.800	APBD		Dokumen	25.750.000
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	BKPSDM KOTA BIMA	Orang	25.910.800	APBD		Orang	25.750.000
5.03.02.2.04.09	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM KOTA BIMA	35 Laporan	112.944.800	APBD		35 Laporan	116.332.324
5.03.02.2.04.19	Pelayanan Proses Isin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Isin Perceraian Pegawai	BKPSDM KOTA BIMA	10 Dokumen	23.921.460	APBD		10 Dokumen	24.530.164
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase peningkatan ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan**	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100%**	**2.513.419.500**	**APBD**		**100%**	**113.959.200**
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase Kebijakan Teknis yang telah di Susun**	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100%**	**238.140.800**	**APBD**		**100%**	**113.959.200**
5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	BKPSDM KOTA BIMA	1 Dokumen	113.640.800	APBD		1 Dokumen	113.959.200

5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	BKPSDM KOTA BIMA	19 Orang	127.500.000	APBD		17 Orang	144.500.000
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai ketentuan**	**BKPSDM KOTA BIMA**	**100,00%**	**2.275.279.500**	**APBD**		**100%**	**93.631.635**
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM KOTA BIMA	285 Laporan	2.184.375.000	APBD		285 Laporan	2.184.375.000
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja	BKPSDM KOTA BIMA	285 Dokumen	98.931.500	APBD		285 Dokumen	93.631.635

Kota Bima, 10 Februari 2023

Kepala BKPSDM Kota Bima

Dra. H. A. Wahid

Nip. 19640407 199003 1 007

BAB V

PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan serta Sub Kegiatan pada lingkup BKPSDM Kota Bima Tahun 2024 mendatang, dapat mencapai hasil yang optimal dan efisien.

Harapan dari tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah semakin kuat dan profesionalnya Aparatur BKPSDM dalam memberikan layanan perencanaan serta semakin tersedia dan lengkapnya dokumen pendukung sebagai referensi perencanaan sehingga output perencanaan yang dihasilkan oleh BKPSDM akan semakin integratif dan komprehensif.

Akhirnya kepada Tuhan jualah kita berserah diri seraya memohon bimbingan-Nya semoga apa yang direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan Negara, Amin.

Kota Bima, 10 April 2023.

Kepala BKPSDM Kota Bima,

Drs. A. Wahid

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19640407 199203 1007

RENCANA KERJA (RENJA) 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERHA
KOTA BIMA



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BIMA

TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bima menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2025.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2024-2028 pada Periode ke empat dengan Visi " Mewujudkan Kota Bima yang sejahtera, maju dan mandiri pada tahun 2028 yang menjadi acuan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 -2026, maka untuk dapat mewujudkan Visi Kota Bima tersebut Badan penanggulangan Bencana Daerah menetapkan tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis dalam Rencana Kerja Tahun 2025

1.1.2 Proses Penyusunan Renja PD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahdan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan renja meliputi :
   (a). Penyusunan rancangan keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
   (b). Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
   (c). Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan
   (d). Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup:

   (a). Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan
   (b). Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kota Bima dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan,

   lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan

   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2025 menjabarkan rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah (Lembaran Daerah tahun 2010 Nomor 05);

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan dari rancangan awal renja sampai rancangan akhir renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, rancangan awal RKPD dan rancangan akhir RKPD.

Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan

kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Kota Bima untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah (Lembaran Daerah tahun 2010 Nomor 05);

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a.Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b.Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya

c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya

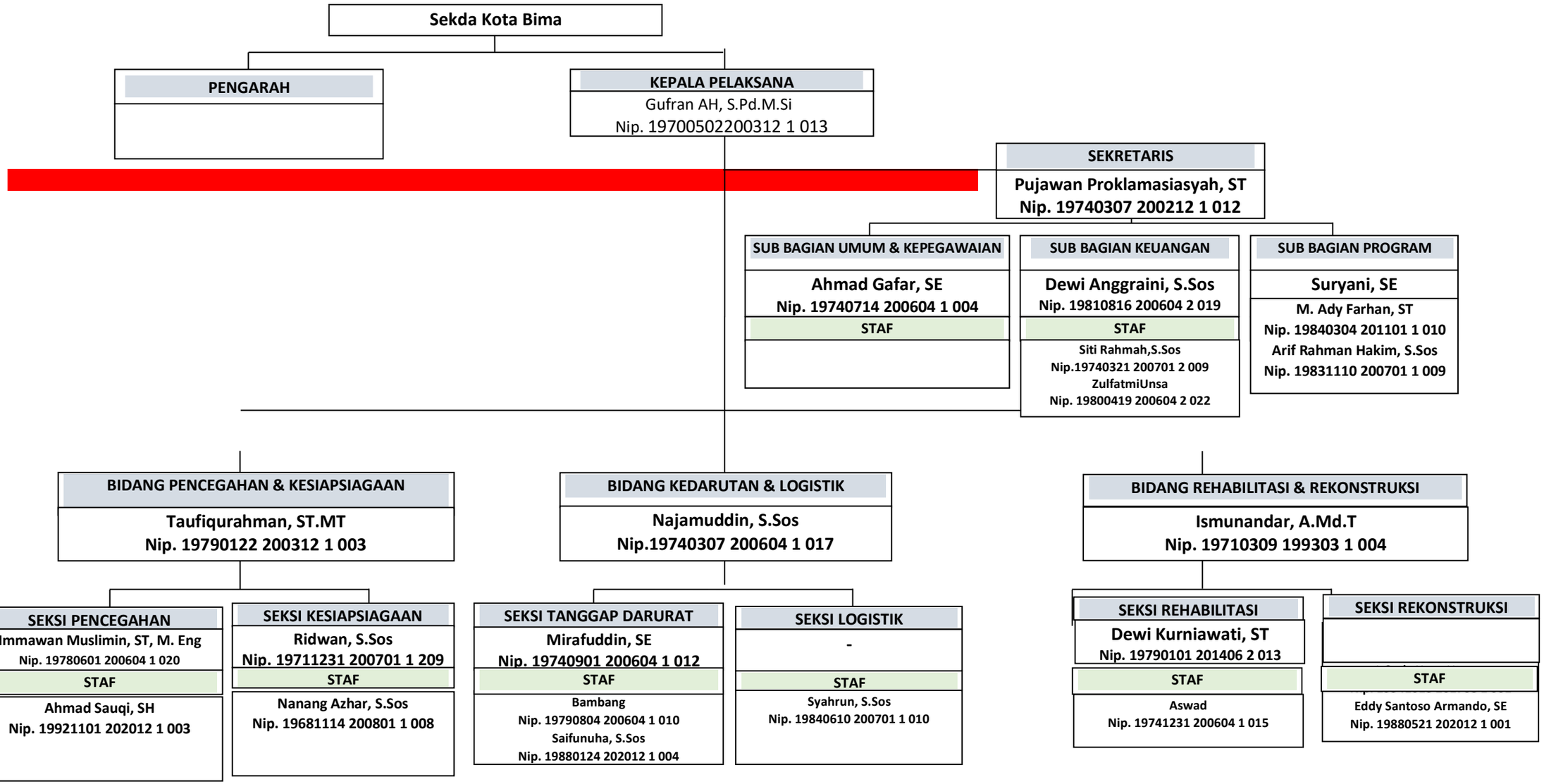
d.Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut gambaran struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima berdasarkan Peratura Walikota Bima nomor 06 Tahun 2011 sesuai gambar 1.1

:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima



1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Adapun peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan adalah:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahdan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perngkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 259).
17. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026
18. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 915).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2025 disusun dengan maksud:

1. Menjabarkan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima jangka pendek 1(satu) tahun untuk tahun 2025;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah;

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja PD

Tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2025disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyara-kat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Beberapa hal dapat kami sajikan Review hasil evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PerangkatDaerah dan Pencapaian

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nama OPD : BPBD Kota Bima

NO	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan *(Output)*	Indikator Kinerja Program *(outcame*/Kegiatan/ Subkegiatan *(output)*		Target RPJMD Kab/Kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kab/Kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4			6		7		8		13		14=17+13		15=14/6x100%		16
								Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BIMA																						
1							**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN BERKAITAN DENGAN PELATANAN DASAR**																
	Meningkatnya sistem kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terhadap bencana	1	05				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**Indek Ketahanan Daerah**	**%**	**85**	**60,625,197,389**	74	**4,451,016,324**	73	**4,907,824,818**		**5,718,383,936.00**	73	60,625,197,388.52	85.88	100	BPBD

	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan penanggulangan kedarurata n	1	05	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	**%**	**100**	**12,996,286,246**	100	**3,582,968,230**	100	**3,577,283,428**		**3,524,857,871.00**	100	12,996,286,245.52	100.00	100	BPBD
	Tercapainya pemulihan sarana prasarana ekonomi dan sosial pasca bencana	1	05	01	2.01		**Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	12	**425,172,200.00**	12	**33,771,500.00**	12	**70,635,500.00**	12	**110,577,600.00**	12	425,172,200.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	129,755,000.00	2	8,660,000.00	2	17,760,000.00	2	25,285,000.00	2	129,755,000.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumentasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	10,485,000.00	1	2,831,000.00	1	4,201,000.00	1	10,485,000.00	1	10,485,000.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumentasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5,625,000.00	1	2,321,000.00	1	4,411,000.00	1	5,625,000.00	1	5,625,000.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumentasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	1	93,437,000.00	1	2,831,000.00	1	4,201,000.00	1	2,845,000.00	1	93,437,000.00	100.00	100	BPBD

							Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD													
		1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumentasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2,845,000.00	1	2,831,000.00	1	4,201,000.00	1	2,845,000.00	1	2,845,000.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	32,093,600.00	4	1,282,000.00	4	1,684,000.00	4	29,127,600.00	4	32,093,600.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkap Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	150,931,600.00	2	13,015,500.00	2	34,177,500.00	2	34,365,000.00	2	150,931,600.00	100.00	100	BPBD
		1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyerapan Anggaran OPD	**%**	**100**	**9,049,656,550.00**	**100**	**2,863,796,717**	**100**	**2,923,907,908**		**2,748,254,786**	**100**	9,049,656,550.00	100.00	100	BPBD

		1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	60	8,326,768,850.00	12	2,675,445,417.00	12	2,744,425,908.00	12	2,565,222,164.00	60	8,326,768,850.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguajian/ Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	35	629,335,800.00	35	179,500,800.00	35	171,150,000.00	35	164,605,000.00	35	629,335,800.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	47,070,100.00	1	2,910,000.00	1	2,960,000.00	1	2,760,000.00	1	47,070,100.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	4	6,680,000.00	4	1,465,000.00	4	2,025,000.00	4	3,190,000.00	4	6,680,000.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Smesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	Dokumen	4	12,166,500.00	4	3,343,500.00	4	2,155,000.00	4	6,667,622.00	4	12,166,500.00	100.00	100	BPBD

							steran SKPD														
		1	05	01	2.02	08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	27,635,300.00	1	1,132,000.00	1	1,192,000.00	1	5,810,000.00	1	27,635,300.00	100.00	100	BPBD
		1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah	**%**	**100**	**59,730,000.00**	100	**2,035,000**	100	**12,375,000**		**45,320,000.00**	100	59,730,000.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.03	06	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	60	59,730,000.00	12	2,035,000.00	12	12,375,000	12	45,320,000.00	60	59,730,000.00	100.00	100	BPBD
		1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	Persentase Ketersediaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**%**	**100**	**18,860,000.00**	100	**1,420,000**	100	**11,770,000**		**5,670,000.00**	100	18,860,000.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Orang/ Dokumen	33	18,860,000.00	33	1,420,000.00	33	11,770,000	33	5,670,000.00	33	18,860,000.00	100.00	100	BPBD
		1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**%**	**100**	**1,461,015,658**	100	**260,760,448**	100	**242,931,620**		**265,880,805**	100	1,461,015,657.52	100.00	100	BPBD

		1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket / Jenis	5	37,083,500.00	1	5,797,500.00	1	4,837,100	1	2,775,400.00	5	37,083,500.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket / Jenis	10	146,470,000.00	2	-	2	26,475,000	2	22,745,000.00	10	146,470,000.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket / Jenis	5	34,859,040.00	1	7,512,020.00	1	7,512,020	1	5,290,000.00	5	34,859,040.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.06	05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket / Jenis	10	159,697,394.52	2	23,041,900.00	2	37,754,400	2	15,592,000.00	10	159,697,394.52	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	60	79,010,000.00	12	10,434,000.00	12	10,440,000	12	10,440,000.00	60	79,010,000.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	60	1,003,895,723.00	12	213,975,028.00	12	155,913,100	12	209,038,405.00	60	1,003,895,723.00	100.00	100	BPBD
		1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**%**	**100**	**1,015,181,153.00**	100	**155,977,478**	1	**133,410,900**	100	**164,321,230**	100	1,015,181,153.00	100.00	100	BPBD

		1	05	01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan surat keluar	Bulan	60	495,298,000.00	12	43,804,000.00	12	35,019,000	12	34,500,000.00	60	495,298,000.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	60	341,458,153.00	12	70,423,478.00	12	63,891,900	12	78,471,230.00	60	341,458,153.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	60	178,425,000.00	12	41,750,000.00	12	34,500,000	12	51,350,000.00	60	178,425,000.00	100.00	100	BPBD
		1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**%**	**100**	**966,670,685.00**	100	**265,207,087**	100	**182,252,500**		**184,833,450**	100	966,670,685.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemerintah ,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaran dinas Oprasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	669,333,737.00	15	150,118,587.00	15	151,010,000	15	147,000,450.00	15	669,333,737.00	100.00	100	BPBD
		1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipeliharaa	Unit	19	122,206,948.00	19	16,078,500.00	19	16,078,500	19	13,550,000.00	19	122,206,948.00	100.00	100	BPBD

		1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	175,130,000.00	1	99,010,000.00	1	15,164,000	1	24,283,000.00	1	175,130,000.00	100.00	100	BPBD
		1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase pemenuhan sistem kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap bencana	%	81.85	**47,628,911,143**		**868,048,094**	70,39 %	**1,330,541,390**	**71.15**	**2,193,526,065**	**71.15**	47,628,911,143.00	86.93	100	BPBD
								Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layananan kedaruratan	%	88.34				81,59		81.59		81.59		92.36		BPBD
								Persentase sarana dan prasarana terdampak bencana yang dimanfaatkan kembali	%	64.79		78.5				78.5		78.5		121.16		BPBD
								Persentase kelompok usaha ekonomi terdampak bencana yang aktif		36.84		36.84						33.33		90.47		BPBD
								Persentase peningkatan upaya Penanggulangan Bencana		**53,79**		53,79										
		1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi rawan Bencana Kabupaten/ Kota**	Persentase Pelayanan Informasi Rawan bencana	**%**	**100**	**622,778,673.00**		**39,997,000**	50%	-	50	145,123,400.00	50	622,778,673.00	50.00	100	BPBD

		1	05	03	2.01	01	Sosialisasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk rentan dikawasan rawan bencana yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi di kawasan tempat tinggalnya selama 1 tahun	orang	132,595	622,778,673.00		39,997,000.00			68,506	145,123,400.00	83,705	622,778,673.00	63.13	100	BPBD
		1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**%**	**75.42**	**4,401,299,018.00**		**545,399,941.00**	58,84 %	**683,438,690.00**	**60,42**	**1,175,413,068.00**	**60.42**	4,401,299,018.00	80.11	100	BPBD
		1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan legal	Dokumen	1	760,178,082.00		-	1	290,040,900	0.5	209,664,363.00	0.5	760,178,082.00	50.00	100	BPBD
		1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana Kab/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi	Orang	844	400,757,315.00		58,162,000.00			120	290,306,615.00	964	400,757,315.00	114.22	100	BPBD

							bencana														
		1	05	03	2.02	03	Pengedalian Oprasional dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ Kota	Jumlah laporan layanan pusat Pengendalian Operasi (pusdalops) dengan maklumat layanan yang syah dan legal sesuai dengan ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Dokumen	60	614,110,500.00		166,831,000.00	12	73,159,200	12	233,388,100.00	60	614,110,500.00	100.00	100	BPBD
		1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Resiko bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah Risiko bencana (perjenis ancaman bencana prioritas (Kab/Kota) tang tertangani	Dokumen	5	1,167,659,670.00		235,391,590.00	1	214,791,590	0	256,196,690.00	5	1,167,659,670.00	100.00	100	BPBD
		1	05	03	2.02	06	Penguatan kapasitas kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	41	319,101,100.00		-		-	0	185,857,300.00	38	319,101,100.00	92.68	100	BPBD

							bencana														
						Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	5	1,139,492,351.00	1	**85,015,351.00**	1	105,447,000	0		5	1,139,492,351.00	100.00	100	BPBD
		1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyalamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**%**	**100**	**1,267,610,704.00**	**100**	**157,268,904**	**100**	**326,318,600**	**100**	**488,168,995**	100	1,267,610,704.00	100.00	100	BPBD
		1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten /Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	5	91,252,000.00	1	35,187,000.00	1	31,568,000	0	24,497,000.00	5	91,252,000.00	100.00	100	BPBD

		1	05	03	2.03	03	Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	Orang	64,955	24,272,000.00	58,905		58,905		64,955	24,272,000.00	64,955	24,272,000.00	100.00	100	BPBD
		1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyalamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	64,955	1,152,086,704.00	58,905	122,081,904.00	58,905	294,750,600	64,955	439,399,995.00	64,955	1,152,086,704.00	100.00	100	BPBD
		1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistim dasar Penanggulangan Bencana**	Persentase Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	**%**	**49.41**	**41,337,222,748.00**		**125,382,249.00**	45.88	**320,784,100.00**	47.06	**384,820,602.00**	47.06	41,337,222,748.00	95.24	100	BPBD
		1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	5	224,351,980.00	1	125,382,249.00	1	320,784,100	0	224,351,980.00	5	224,351,980.00	100.00	100	BPBD
		1	05	03	2.04	03	Kerja sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Dokumen	5	50,000,000.00					0	49,907,811.00	5	50,000,000.00	100.00	100	BPBD

		1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	5	41,062,870,768.00					0	110,560,811.00	5	41,062,870,768.00	100.00	100	BPBD

Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2023 dilaksanakan Dalam 2 program dan Keseluruhan Program tersebut diwujudkan dalam 11 kegiatan,.Adapun factor-faktor penyebab tidak tercapainya program / kegiatan antara lain dapat dijelaskan antara lain :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selama tahun 2023 dapat disajikan dalam LKIP tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKIP), serta mengukur capaian kinerja organisasi selama periode tertentu.

Capaian kinerja organisasi adalah hasil pengukuran dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi yang dianalisa dan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra BPBD Kota Bima. Disamping itu juga dapat menganalisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusinya, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mengukur Keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dalam mencapai tujuan dalam periode Lima tahunan, yaitu meningkatnya ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana selaras dengan target pemerintah adalah menurunkan Indeks Risiko Bencana. Parameter perhitungan Indeks Risiko Bencana adalah :

$$\text{Indeks Risiko Bencana} = \frac{\text{Hazard x Vulnareability}}{\text{Capacity}}$$

Dengan demikian, interfensi yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan upaya – upaya peningkatan kapasitas daerah dalam rangka mengurangi Risiko Bencana.Instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketahanan daerah adalah dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Untuk melihat kesiapan suatu daerah dalam menghadapi ancaman bencana baik itu sebelum terjadinya bencana, saat bencana terjadi, maupun sesudah bencana itu terjadi maka perlu dilakukannya pengukuran ketahanan suatu daerah dalam menghadapi ancaman bencana melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Dalam Penilaian IKD terdapat 7 prioritas dan 71 indikator dimana setiap indikator memiliki 4 pertanyaan yang saling berkaitan yang artinya jika pertanyaan diatasnya dijawab tidak maka pertanyaan dibawahnya akan bernilai tidak juga. Sedangkan jika terdapat jawaban iya dari pertanyaan dalam 71 indikator tersebut maka jawaban tersebut harus mampu dibuktikan dalam bentuk dokumen verifikasi sesuai dengan masing-masing pertanyaan. Dalam proses pengisian jawaban IKD juga dibutuhkan peran serta dari berbagai Organisasi Pemerintah

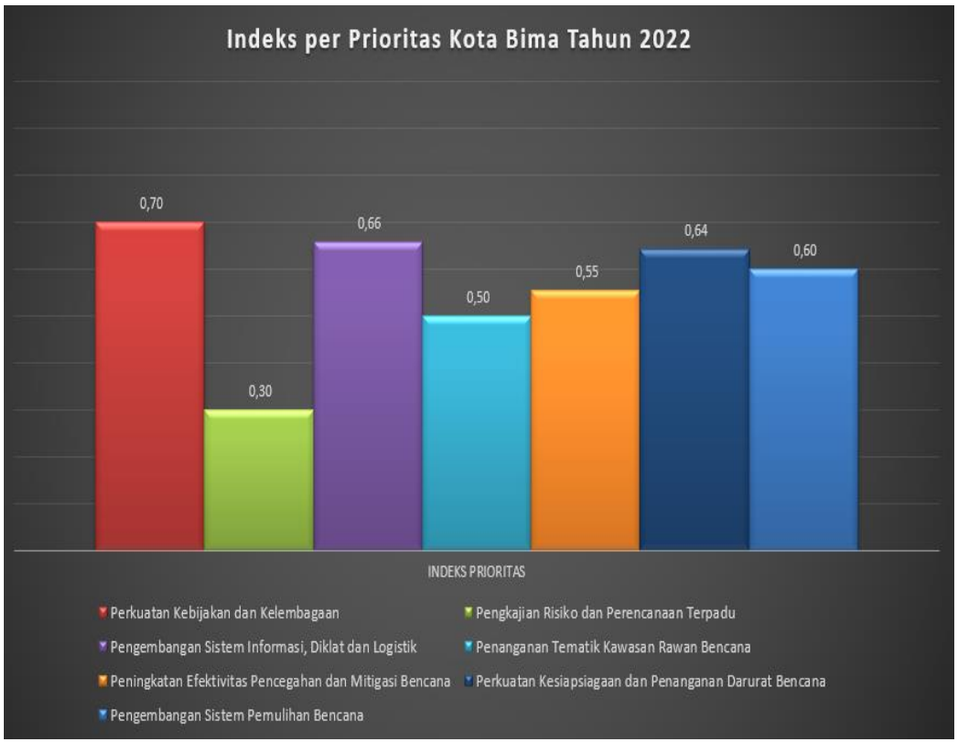
Daerah (OPD), relawan kebencanaan, masyarakat, TNI, POLRI dan LSM dalam menjawab sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Berdasarkan hasil penilaian, menunjukkan bahwa Kota Bima masih masuk dalam kategori yang memiliki Ketahanan **Sedang** *dalam menghadapi ancaman bencana. Nilai Sedang tersebut menunjukan masih banyaknya hal yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan di Kota Bima untuk bisa mencapai ketahanan Tinggi dalam menghadapi ancaman bencana.*

Hasil dari penilaian yang dilakukan terhadap 71 indikator pertanyaan dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2023 mengalami perubahan nilai indeks per-prioritas jika dibandingkan dengan hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah tahun 2022. Pada tahun 2022 indeks prioritas perkuatan kebijakan dan kelembagaan sebelumnya berada pada nilai 0,74 sedangkan pada tahun 2023 berada pada nilai 0,72. Indeks prioritas pengkajian risiko dan perencanaan terpadu pada tahun 2022 berada pada nilai 0,30 sedangkan pada tahun 2023 berada pada nilai 0,57. Indeks prioritas pengembangan system informasi, diklat dan logistic pada tahun 2022 berada pada nilai 0,66 sedangkan pada tahun 2023 berada pada nilai 0,68. Indeks prioritas penanganan tematik Kawasan rawan bencana pada tahun 2022 berada pada nilai 0,50 sedangkan pada tahun 2023 berada pada nilai 0,67. Indeks prioritas peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana pada tahun 2022 berada pada nilai 0,55 sedangkan pada tahun 2023 berada pada nilai 0,72. Indeks prioritas perkuatan keisiapsiagaan dan penanganan darurat bencana pada tahun 2022 berada pada nilai 0,64 sedangkan pada tahun 2023 berada pada nilai 0,70. Indeks prioritas system pengembangan system pemulihan becana pada tahun 2022 berada pada nilai 0,60 sedangkan pada tahun 2023 berada pada nilai 0,91. Perbandingan IKD tahun 2022 dan IKD tahun 2023 dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

Grafik 3.1

Indeks per Prioritas Kota Bima Tahun 2022



Grafik 3.2

Indeks per Prioritas Kota Bima Tahun 2023



Jika memperhatikan perbandingan grafik hasil penilaian indeks per-prioritas Indeks Ketahanan Daerah Kota Bima maka dapat terlihat bahawa terdapat penurunan nilai kapasitas daerah Kota Bima dalam menghadapi bencana. Hal tersebut dikarenakan dalam proses penilaian 7 indeks prioritas yang berisi 71 indikator pertanyaan harus dapat melampirkan bukti dokumen

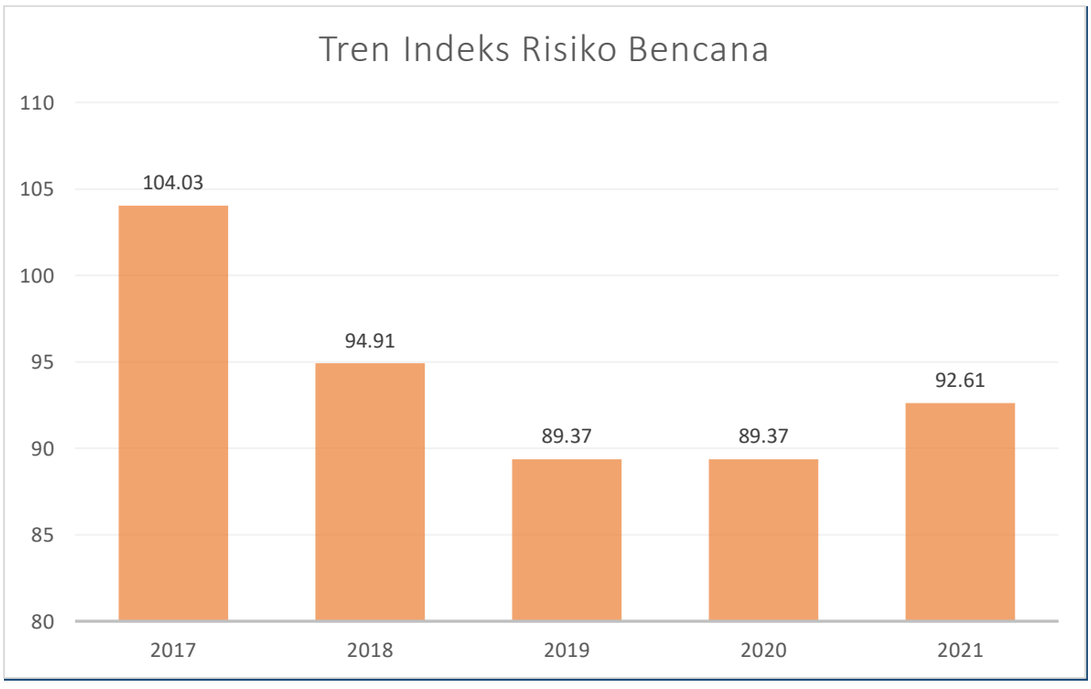
sebagai bahan verifikasi kebenaran dari pertanyaan tersebut. Hal yang mempengaruhi penurunan dikarenakan pada tahun 2023 terdapat beberapa dokumen yang sudah habis masa berlakunya atau kadaluarsa dan hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi penilaian dari Indeks Ketahanan Daerah Kota Bima. Penurunan nilai kapasitas daerah Kota Bima dalam menghadapi bencana juga akan berpengaruh pada hasil penilaian Indeksi Risiko Bencana yang dipublikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana nantinya.

Dalam publikasi data Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kota Bima sedikit mengalami kenaikan tren risiko bencana jika dibandingkan dengan tahun 2021. Dalam publikasi tersebut menunjukan pada tahun 2021 Kota Bima berada pada kategori sedang dalam menghadapi ancaman risiko bencana. Agar mampu mencapai kelas risiko rendah dalam menghadapi ancaman bencana maka Pemerintah Kota Bima sebagai penanggung jawab dalam penyelanggaraan penanggulangan bencana perlu bahu membahu dalam melakukan upaya – upaya pengurangan risiko bencana dalam setiap tahap penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.

Adapun tren Indeks risiko bencana Kota Bima Tahun 2017 -2021 tertera dalam grafik berikut :

Grafik 3.3

Trend Indeks Risiko Bencana Kota Bima Periode 5 Tahun Terakhir



(Sumber Data : Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2020)

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 tren Indeks Risiko Bencana di Kota Bima mengalami penurunan secara signifikan walaupun pada tahun 2021 tedapat sedikit kenaikan risiko jika dibandingkan dengan tahun 2020, hal tersebut dikarenakan

semakin tingginya atau semakin meningkatnya nilai Indeks Ketahanan Daerah Kota Bima. Penurunan Indeks Risiko Bencana yang paling besar terjadi pada tahun 2017 sampai dengan 2018, dimana terjadi penurunan poin sebesar 9,12 dan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 nilai indeks risiko bencana tidak mengalami perubahan disebabkan kecendrungan nilai kapasitas yang konstan.

Indeks Ketahanan Daerah Kota Bima dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di propinsi Nusa Tenggara Barat berada di posisi ke 3 dari 10 kabupaten/kota yang ada. Hal ini dapat dijelaskan dengan nilai yang diperoleh kota bima sebesar 0, 72 dengan rincian nilai 71 indikator yang ada di dalam 7 prioritas pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Perbandingan Nilai IKD BPBD Kota Bima dengan BPBD Kab./Kota yang ada di Propinsi NTB

Tahun 2023

Kab./Kota di Provinsi NTB	Per.1	Per.2	Per.3	Per.4	Per.5	Per.6	Per.7	IKD
Bima	0,59	0,20	0,51	0,42	0,52	0,48	0,54	0,48
Dompu	0,76	0,80	0,69	0,48	0,47	0,42	0,60	0,52
Kota Bima	0,73	0,57	0,68	0,67	0,72	0,70	0,91	0,72
Kota Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombok Barat	0,92	0,20	0,99	1,00	078	0,57	0,78	0,72
Lombok Tengah	0,67	0,60	0,29	0,70	0,48	0,47	0,40	0,49
Lombok Timur	0,83	0,20	0,63	0,49	0,47	0,65	0,60	0,57
Lombok Utara	0,95	1,00	0,75	0,70	0,71	0,62	0,85	0,73
Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumbawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-

Dalam rangka pencapai tujuan Organisasi, pada tahun 2023 melakukan strategi – strategi dengan 2 (dua) Indokator Sasaran yaitu (1) Persentase Kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terhadap bencana dan (2) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kedaruratan

Pencapaian sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah dapat diuraikan secara detail pada analisa pencapaian masing – masing sasaran berikut :

1.1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 (S.1): Persentase Kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terhadap bencana

Kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terhadap bencana merupakan satu kesatuan sistim dari berbagai komponen yang bekerja saling mendukung satu sama lain dalam mencapai kesiagaan dan pencegahan bencana. Indikator - indikator tercapainya kesiapsiagaan dan pencegahan bencana ini meliputi antara lain :

1. *Tingkat kesiapan Erly Worning Sistem (EWS) dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan*
2. *Kesiapan Sumber Daya Manusia yang mumpuni*
3. *Penyiapan sarana mitigasi bencana untuk pengelolaan risiko bencana*

4. Peningkatan Ketangguhan masyarakat berbasis Kelurahan

Adapun capaian kinerja sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja
			2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terhadap bencana	Porsentase pemenuhan sistym kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terhadap bencana	79,30 %	71,15 %	89,72 %

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi sasaran 1 pada Tahun 2023, sebesar 71,15 %, kurang dari target yang ditetapkan sebesar 79,30 % yang berarti tingkat persentase capaian kinerja sebesar 89,72 %. Unsur – unsur yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran ini adalah, (1) Kesiapan Erly Worning System (EWS) dalam mempersiapkan informasi rawan bencana, (2) kesiapan Sumber Daya Manusia melalui diklat Keahlian bagi aparatur, (3) kesiapan dan penguatan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pembentukan dan penguatan Kelurahan Tangguh Bencana dan (4) kesiapan Mitigasi struktural melalui Pembuatan sumur resapan dan Penampungan air hujan dalam rangka mengurangi genangan banjir dan mengatasi kekurangan air bersih.

Tabel 3.3

Perbandingan *Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1* dari tahun sebelumnya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian kinerja (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terhadap bencana	Porsentase kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terhadap bencana	70,39 %	79,30 %	60,66 %	71,15 %	86,18 %	89,72 %

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 1 dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 dari target yang ditetapkan sebesar 70,39 % yang terealisasi sebesar 60,66 % sehingga capaian kinerja sebesar 86,18 %. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan sebesar 79,30 % yang terealisasi sebesar 71,15 % sehingga capaian kinerja sebesar 89,72 %.

Adapun Kegiatan pendukung dari sasaran strategis 1 adalah :

Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah - langkah tepat guna dan berdaya guna. Program Penanggulangan Bencana meliputi Kegiatan :

1). Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota

Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota adalah upaya pelayanan minimal yang dilakukan pada tahapan informasi rawan bencana kabupaten/kota sebagai langkah kesiapsiagaan dalam rangka mengurangi risiko jika terjadi bencana.

Adapun sub kegiatan pendukung dari kegiatan ini adalah

a. Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten/Kota

Pada Sub Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota memuat antara lain Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten/Kota, sub kegiatan ini memastikan bahwa pekerjaan ini idealnya dapat melakukan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten/Kota kepada masyarakat yang berada di wilayah yang berpotensi terjadinya bencana terhadap seluruh jenis risiko yang paling berpotensi terjadi di Kota Bima, tentunya dasar pelaksanaanya mengacu pada Dokumen kajian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun output dari Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah warga negara termasuk rentan dikawasan rawan bencana yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi di kawasan tempat tinggalnya selama 1 tahun. Salah satu solusi pemecahan masalah ini dengan diciptakannya aplikasi Sistem Inforrmasi Rawan Bencana (Si IwaN) yang secara tidak langsung berkontribusi dan penyebarluasan informasi kebencanaan dan disebarluaskan dengan media sosial berupa Facebook, Instagram, WhatsApp yang didukung penuh oleh data yang bersumber dari kerjasama antara BMKG Bima dan BPBD yang tertuang dalam MoU kedua belah pihak yang berpedoman pada peraturan Wali Kota Bima Nomor tahun 2023 tentang Penyebaran informasi kebencanaan di kota Bima.

Tabel 3.4

Realisasi kegiatan pendukung Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota

Tahun 2023

NO	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten/Kota	132.595 orang	77.224 orang	58,24 %

Realisasi dari kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota adalah 77.224 orang dari target sebesar 132.595 orang. Ini berarti realisasinya sebesar 58,24 %. Masih rendahnya capaian ini karena masih kurangnya media penyampaian informasi, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana yang memiliki keterbatasan pemahaman teknologi informasi. Media penyampaian informasi yang digunakan selama tahun 2023 adalah : Sosialisasi kepada masyarakat melalui tatap muka, Baliho, Buku Saku, Pamplet, Spanduk, Media On line, Berita Radio Spot, Sosial Media dan Melalui Radio pancar ulang melalui HT.

2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan adalah upaya pelayanan minimal yang dilakukan pada tahapan pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai langkah kesiapsiagaan dalam rangka mengurangi risiko jika terjadi bencana.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan meliputi :

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (PK1)
2. Penyusunan Rencana Kontigensi (PK2)
3. Pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan (PK3)
4. Gladi kesiapsiagaan (PK4)
5. Pengendalian operasi dan penyediaan sarpras (PK5)
6. Penyediaan peralatan perlindungan (PK6)

Perhitungan Target dan Capaian dalam Kegiatan ini merupakan akumulasi dari capaian dari unsur pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan tahun sebelum sampai pada lima tahun perencanaan.

Formulasi perhitungan

Pelayanan PK = (PK 1 + PK 2 +PK 3 +PK 4 + PK 5 + PK 6)/PKn

Ket :

1. Pelayanan PK : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. PK1 = Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (dengan Bobot 0,30)
3. PK2 = Penyusunan Rencana Kontigensi (dengan Bobot 0,15)
4. PK3 = Pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan (dengan Bobot 0,10)
5. PK4 = Gladi kesiapsiagaan (dengan bobot 0,15)
6. PK5 = Pengendalian operasi dan penyediaan sarpras (dengan bobot 0,15)
7. PK6 = Penyediaan peralatan perlindungan (dengan bobot 0,15)
8. PKn = Kondisi Pelayanan Pencegahan minimal (Total keseluruhan Bobotnya PK1-PK6 =1)

Tabel 3.5

Realisasi kegiatan pendukung Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan *terhadap bencana*

Tahun 2023

NO	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2023	2023	2022
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	75,42 %	60,42 %	80,11 %

Realisasi dari kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah 60,42 % dari target sebesar 75,42 %. Ini berarti realisasinya sebesar 80,11 %.capaian ini mengalami penurunan dari target, ini disebabkan terjadinya kendala pada penyusunan Rencana penanggulangan bencana.

Pada tahun 2023 ini Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana tidak bisa diselesaikan sampai dengan 100 % karena keterbatasan dana dan sumber daya lainnya.

Adapun sub kegiatan pendukung dari kegiatan ini adalah

a). Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota

Pada Sub Kegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana memiliki target tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota sampai dinyatakan sah/legal.

Dalam penyusunan dokumen kebencanaan, setidaknya memuat dokumen-dokumen yang saling berkaitan yaitu :

1. Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)
2. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
3. Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon)

Dokumen rencana penanggulangan bencana ini merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana lima tahunan yang memuat tentang Visi, misi, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dan sampai pada program dan kegiatan serta penganggarannya. Dokumen ini menjadi rujukan bagi semua stakeholders dalam melakukan upaya – upaya penanggulangan bencana di Kota Bima selama 5 tahun. Dokumen RPB ini disusun berdasarkan kajian risiko bencana yang dilakukan sebelumnya yang termuat dalam dokumen kajian Risiko bencana

Tabel 3.6

Realisasi sub. kegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana *Tahun 2023*

NO	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1	penyusunan rencana penanggulangan bencana	1 Dok.	0,5 dok	50 %

Pada tahun 2023 realisasi dari sub kegiatan ini sebanyak 0,5 dokumen dari target 1 dokumen yang ditetapkan. Ini berarti realisasinya sebesar 50 %. Dalam artian penyusunan dokumen ini baru pada tahap draf yang nantinya akan di asistensi oleh Tim Asistensi BNPB, yang kemudian menjadi dokumen Final jika sudah dilakukan FGD dan terakhir dilegalisasi dengan Peraturan Walikota Bima Adapun proses penyusunan Dokumen rencana Penanggulangan Bencana dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar. 3. 1

Kegiatan Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Dokumen PB



b). Pengelolaan risiko bencana kab./kota

Pengelolaan risiko bencana adalah upaya terencana yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana, pengelolaan Risiko bencana atau manajemen Risiko bencana adalah pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan melakukan observasi secara sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*), terkait dengan pencegahan (*preventif*), pengurangan (mitigasi), persiapan, respon darurat dan pemulihan. Pengelolaan dalam bantuan bencana merupakan hal-hal yang penting bagi Manajemen puncak yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*directing*), pengorganisasian (*coordinating*) dan pengendalian (*controlling*).

Tujuan dari Manajemen Risiko Bencana di antaranya:

1. Mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan atau masyarakat dan negara.
2. Mengurangi penderitaan korban bencana.
3. Mempercepat pemulihan.
4. Memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang mempunyai Risiko Tinggi menimbulkan bencana adalah suatu kegiatan menganalisis kemungkinan risiko yang timbul atas suatu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan manajemen risiko dilakukan dengan menemukan kerugian potensial atau mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi suatu entitas. Setelah risiko tersebut dapat diidentifikasi, maka perlu segera dilakukan evaluasi terhadap kerugian potensial yang dapat terjadi meliputi:

a. Menghitung besarnya kemungkinan atau frekuensi terjadinya kerugian.

b. Mengukur besarnya kegawatan atau menilai besarnya kerugian yang mungkin akan diderita.

Setelah evaluasi disusun, maka langkah selanjutnya adalah memilih cara atau kombinasi dari cara yang tepat guna menanggulangi kerugian. (Menurut Djojosoedarso (2003: 14)

Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana ini, terdapat beberapa aktifitas antara lain :

1. Dokumen analisis fluktuasi ketinggian muka air tanah
2. Dokumen analisis kebutuhan penampungan air hujan untuk pengurangan genangan banjir dan kekeringan
3. Penampungan air Hujan dan Pembuatan Alat Elektrolisis Air Hujan (2 Unit PAh dan 2 Unit Elektrolisis Air Hujan)
4. Sosialisasi Penampungan air Hujan dan Pembuatan Alat Elektrolisis Air Hujan

Aktifitas Pembuatan Penampungan air Hujan dan Pembuatan Alat Elektrolisis Air Hujan (2 Unit PAh dan 2 Unit Elektrolisis Air Hujan) dilakukan untuk mengurangi genangan pada pemukiman yang telah terbangun, tindakan ini juga dilakukan atas pengalaman pada Lokasi lain sebelumnya, dimana kegiatan serupa dapat mengurangi genangan hingga 30% dan dapat menambah pasokan air di dalam tanah.

Tabel 3.7

Realisasi sub. kegiatan Pengelolaan Resiko bencana kab./kota *Tahun 2023*

NO	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Resiko bencana kab./kota	2 Dok.	2 dok	100 %

Pada Tahun 2023 realisasi dari sub kegiatan ini sebesar 2 dokumen dari 2 dokumen yang ditargetkan. Ini berarti realisasi dari sub kegiatan ini sebesar 100 %.

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi sub. kegiatan Pengelolaan Resiko bencana kab./kota *Tahun 2022 dan 2023*

NO	Sub Kegiatan	Target	Target	Realisasi	Realisasi	Capaian kinerja	Capaian kinerja
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengelolaan Resiko bencana kab./kota	1 Dok.	2 Dok.	1 dok	2 Dok.	100 %	100 %

Pada tabel di atas dapat di jelaskan realisasi dari sub kegiatan Pengelolaan Resiko bencana kab./kota pada tahun 2022 target kegiatan ini sebanyak 1 Dokumen yang terealisasi sebanyak 1 Dokumen artinya capaian realisasi kegiatan ini sebesar 100 %. Pada Tahun 2022 yang menjadi output dari kegiatan ini adalah *memperbahrui dokumen yang sudah melewati masa aktif atau kadaluarsa.* Pada tahun 2023 target dari kegiatan ini sebanyak 2 dokumen dan yang terealisasi

sebanyak 2 dokumen yang artinya capaian kinerja sebesar 100 %. *Adapun 2 dokumen output yang dihasilkan yaitu 1* Dokumen analisis fluktuasi ketinggian muka air tanah dan 1 Dokumen analisis kebutuhan penampungan air hujan untuk pengurangan genangan banjir dan kekeringan. Selain itu juga output yang dihasilkan di tahun 2023 adalah pembuatan Penampungan air Hujan dan Pembuatan Alat Elektrolisis Air Hujan (2 Unit PAh dan 2 Unit Elektrolisis Air Hujan).

Adapun proses pelaksanaan sub kegiatan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.2

Pembuatan Panel air Hujan



c). Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Definisi operasional sub Kegiatan ini antara lain :

1. **Informasi** adalah suatu proses pengumpulan, penyimpanan,pengorganisasian, pengolahan serta penyajian data dan informasi.
2. **Sistem Komunikasi** adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen peralatan, jaringan, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memperoleh serta menyampaikan informasi.
3. **Laporan Harian** adalah laporan dari operator kepada Manajer Pusdalops PB berisi rangkuman atau rekapitulasi yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan.
4. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Pengendalian operasi dalam sub kegiatan ini adalah dijewantahkan dalam Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) BPBD Kota Bima dengan tugas, fungsi dan bertanggung jawab antara lain :

I. Tugas Pusdalops PB antara lain :

1. Sebelum Bencana :
   Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah,penyaji data dan informasi kebencanaan)secara rutin.
2. Saat Bencana
   Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan PelaksanaanKegiatanDarurat.
3. Pasca Bencana
   Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasidan rekonstruksi).

I. Fungsi Pusdalops PB adalah sebagai berikut:

1. Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan.

2. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansiterkait dan masyarakat.
3. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif.
4. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

II. Tanggung Jawab Pusdalops PB

1. Secara Struktural Unit pemantau kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana.
2. Secara Institusional Sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan yang berlaku.
3. Secara Operasional Sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran Pusdalops PB.

Petugas pusdalops BPBD Kota Bima melakukan pelaporan ke BNPB mengenai kondisi cuaca dan kondisi kebencanaan di Kota Bima melalui radio komunikasi SSB sebanyak 2 x dalam sehari, petugas pusdalops harus siap siaga dalam kondisi apapun ketika keadaan bencana walaupun kejadian bencana tidak dalam hari kerja, bahkan diwaktu malampun petugas pusdalops BPBD Kota Bima harus siap ketika dibutuhkan. Jumlah dokumen Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebanyak 12 Dokumen laporan cuaca harian dan 4 dokumen laporan kejadian bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima telah mengembangkan akses komunikasi dan pengembangan sistem peringatan dini. Salah satu diantaranya adalah peringatan dini Longsor yang ada di Kelurahan Penana'E serta peringatan dini banjir yang di pasang dibagian hulu dan hilir. Sistem peringatan dini bencana adalah elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan adanya peringatan dini bencana, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut. Sarana dan Prasarana Peringatan dini yang mendukung kerja PUSDALOP dijelaskan pada Tabel 3.10 di bawah ini.

Tabel 3. 10
Sarana Prasarana Peringatan Dini yang telah tersedia terdapat pada table berikut :

No	JENIS	VOLUME	KONDISI	LOKASI PENEMPATAN
1	Sirene Tanda Longsor	1 unit	Kurang terawat	Kel PenanaE Kota Bima
2	Handy Talky	27 unit	Baik	Tersebar di Kota Bima
3	Kamera Pemantau Tinggi Muka Air Sungai	2 unit	Baik	Kel Lampe dan Ntobo Kota Bima
4	Alat Ukur Curah Hujan Otomatis	1 unit	Baik	Kel Lelamase Kota Bima
5	Radar Hujan	1 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Bima
6	Pusdalops (Yang dilengkapi dengan peralatan kerja yang cukup memadai)	1 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Bima
7	Repeater	1 unit	Baik	Doronae Kab. Bima (Pengadaan tahun 2023)
8	RIG	1 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Bima
9	SSB	1 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Bima

Agar sistem peringatan dini dapat berjalan secara efektif maka dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat yang berada di daerah berisiko, memfasilitasi kegiatan-kegatan penyadaran publik dan kesiapsiagaan masyarakat, serta penyampaian peringatan yang terpercaya. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya serta berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Peringatan dini sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Agar dapat berjalan efektif, sistem peringatan dini harus dikelola secara terpadu dan menyeluruh, serta melibatkan secara aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait. Syarat sebuah peringatan dini yang lengkap dan efektif serta berpusat pada masyarakat adalah terpenuhinya empat komponen yaitu pengetahuan risiko, pemantauan bahaya dan layanan peringatan, penyebaran dan komunikasi dan kemampuan respon.

Tujuan utama sistem peringatan dini berbasis masyarakat adalah menguatkan individu dan masyarakat yang terancam bahaya untuk bertindak secara tepat waktu dan benar sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan fisik seseorang dan kematian. Penyebaran informasi ini juga didukung dengan kegiatan Pengendalian operasi melalui (PUSDALOPS), yang mengeluarkan informasi harian baik saat bencana maupun tidak terjadinya bencana selama 12 bulan.

Tabel 3.9

Realisasi sub. kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota *Tahun 2023*

NO	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2023	2023	2023
1	2	4	5	6
1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dok.	12 dok	100 %

Pada Tahun 2023 realisasi dari sub kegiatan ini sebesar 12 dokumen dari target sebanyak 12 dokumen yang ditetapkan.Artinya realisasi dari sub kegiatan ini sebesar 100 %.

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi sub. kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota *Tahun 2022 dan 2023*

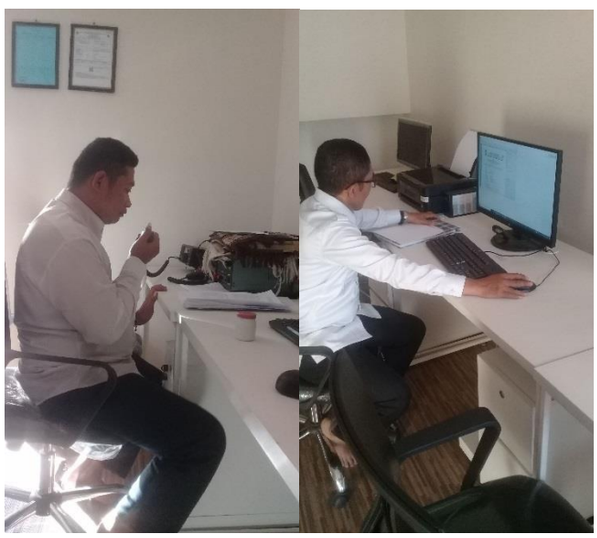
NO	Sub Kegiatan	Target	Target	Realisasi	Realisasi	Capaian kinerja	Capaian kinerja
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 dok	12 Dok.	12 dok	12 dok	100 %	100 %

Pada tabel di atas dapat dijelaskan realisasi yang dicapai sub kegiatan ini selama 2 tahun terakhir selalu tercapai 100 %. Ini dapat dilihat pada tabel di atas target kegiatan tahun 2022 sebanyak 12 dokumen yang terealisasi sebanyak 12 dokumen. Sedangkan pada tahun 2023 dari target 12 dokumen yang terealisasi sebanyak 12 dokumen.Ini berarti realisasinya sebesar 100 %.

Adapun proses pelaksanaan kegiatan PUSDALOS Kota Bima dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.3

Kegiatan PUSDALOPS BPBD



d. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Pada Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota memastikan bahwa pekerjaan ini idealnya dapat melakukan pelatihan dan mitigasi bencana kepada masyarakat yang berada di wilayah yang berpotensi terjadinya bencana terhadap seluruh jenis risiko yang paling berpotensi terjadi di Kota Bima, tentunya dasar pelaksanaanya mengacu pada Dokumen kajian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun output dari Indikator sub

kegiatan ini adalah Jumlah warga negara termasuk rentan dikawasan rawan bencana yang memperoleh pelatihan di kawasan tempat tinggalnya selama 1 tahun.

Tabel 3.11

Realisasi kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana bencana kabupaten/kota

Tahun 2023

NO	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	844 orang	964 orang	114,22 %

Realisasi dari kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota adalah 964 orang dari target sebesar 844 orang. Ini berarti realisasinya sebesar 114,22 %. Tingginya capaian ini karena timbulnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dan selain itu juga mengikuti elatihan ini sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan sosialisasi di lingkungannya masing – masing dariilmu yang diperoleh nya.

Gambar 3.44

Kegiatan Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/Kota



e. Sub Kegiatan Penguatan kapasitas kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pada Sub Kegiatan Penguatan kapasitas kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan memastikan bahwa pekerjaan ini idealnya adalah pembentukan kelurahan tangguh. Pada Tahun 2023 ini kelurahan yang akan di bentuk adalah kelurahan nitu. Pembentukan kelurahan tangguh ini sangat penting bagi kelancaran dan tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, karena dengan adanya kelurahan tangguh ini sangat membnatu proses pelaporan dan pengiriman data informasi terkait dengan kebencanaan di kelurahan setempat. Karena BPBD dalam hal menangani kebencanaan tidak dapat bekerja sendiri melainkan perlu dukungan dari masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari BPBD. Samapi dengan saat ini jumah kelurahan tangguh yang sudah di bentuk sebayak 3 kelurahan dari 41 kelurahan yang ada di Kota Bima.

Tabel 3. 44

Kegiatan penguatan kapasitas kawasan di Kelurahan Nitu



Tabel 3.12

Realisasi kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan

Tahun 2023

NO	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1	penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	1 kawasan	1 kawasan	100 %

Realisasi dari kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan adalah 1 kelurahan dari target 1 kelurahan. Ini berarti realisasinya sebesar 100 %.

3). Penataan sistem dasar penanggualngan bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia. Bencana mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, hingga dampak psikologis. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Risiko bencana dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

Tabel 3.13

Realisasi kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana *Tahun 2023*

NO	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2023	2023	2023

1	2	4	5	6
1	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana	49,41 %	47,06 %	95,24 %

Pada Tahun 2023 realisasi dari kegiatan ini sebesar 47,06 % dari target sebesar 49,41 % artinya realisasi kegiatan sebesar 95,24 %.

Tiga aspek sistem penanggulangan bencana Menurut BNPB, sistem nasional penanggulangan bencana mencakup tiga aspek, yaitu:

1.Aspek Legislasi

2. Aspek Kelembagaan

3. Aspek Pendanaan

Formulasi :

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

= Jumlah Kelembagaan Bencana yang dibentuk dan dikuatkan X 100 %

Jumlah Kelembagaan Bencana yang harus dibentuk

Lembaga Kebencanaan yang perlu dibentuk antara lain :

Tabel. Lembaga Kebencanaan yang perlu dibentuk antara lain :

NO	KELEMBAGAAN BENCANA	JUMLAH
1	TSBK	41
2	FTSB	1
3	Forum PRB Kota Bima	1
4	Satuan Komunitas Pramuka Peduli bencana	1
5	Forum PRB Kel	41
	Jumlah	85

Sub kegiatan yang mendukung kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana adalah sub kegiatan penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota, Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab/kota dan sub kegiatan penanganan pasca bencana kab/kota. Salah satu masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah di bidang kebencanaan yang perlu ditingkatkan seperti belum maksimal pembentukan dan komunitas lembaga seperti kaderisasi penggerak pembangunan yaitu dalam bentuk Organisasi masyarakat setempat yang merupakan dukungan kelembagaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, infrastruktur, dalam hal ini perlu adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pembangunan masyarakat yang tangguh bencana dapat bermanfaat bagi masyarakat dan berkesinambuangan, diperlukan upaya untuk menempatkan masyarakat dalam posisi sentral dalam pembagunan, perlu melibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya. Dengan demikian pembangunan tersebut sesuai dengan keinginan

dan kebutuhan masyarakat yang ada dan pada akhirnya akan timbul rasa memiliki, tanggung jawab dan keinginan untuk meneruskan pembangunan tersebut. Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana antara lain :

1. **Sub kegiatan penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota**

   Pada Sub Kegiatan ini penguatan kelembagaan Penanggulangan bencana dilakukan pada Forum Pengurangan risiko Bencana "Mbojo Ma Tenggo Kota Bima dengan memberikan dukungan Dana Hibah untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Bencana di daerah. Dalam hal ini BPBD melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Forum PRB selama tahun 2023 minimal 1 kali 1 tahun. Selain itu pada Sub Kegiatan dihasilkan 1 Dokumen Peraturan Walikota Bima Nomor tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Bima. Peraturan ini mendukung upaya penguatan kelembagaan bencana di tingkat masyarakat paling bawah sebagai ujung tombak pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.

Tabel 3.14

Realisasi sub. kegiatan Penanganan pasca bencana kab./kota *Tahun 2023*

NO	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1	Penguatan kelembagaan bencana kab./kota	1 Dok.	1 dok	100 %

Pada Tahun 2023 realisasi dari sub kegiatan ini sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen. Ini berarti realisasinya sebesar 100 %.

Tabel 3.15

Perbandingan Realisasi sub. kegiatan Penanganan pasca bencana kab./kota *Tahun 2022 dan 2023*

NO	Sub Kegiatan	Target	Target	Realisasi	Realisasi	Capaian kinerja	Capaian kinerja
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penguatan kelembagaan bencana kab./kota	2 Dok.	1 Dok.	2 Dok.	1 dok	100 %	100 %

Pada tabel di atas dapat dijelaskan pada tahun 2022 BPBD Kota Bima lebih fokus pada peremajaan dokumen – dokumen yang sudah melewati masa berlakunya. Pada tabel di atas dari target 2 dokumen yang terealisasi 2 dokumen ini berarti capaian kinerja sebesar 100 %. Sedangkan pada tahun 2023 dari target 1 dokumen yang terealisasi 1 dokumen yang artinya terealisasi 100 %.

Adapun Proses pelaksanaan sub kegiatan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.5

Rapat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah



2. Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab/kota

Berdasarkan kategori iklim, Kota Bima memiliki iklim sabana tropis. Tingkat curah hujan tahunan kota Bima berkisar antara 1000–2000 mm per tahun dengan jumlah hari hujan bervariasi antara 80–140 hari hujan per tahun. Sementara itu, matahari bersinar terik sepanjang musim dengan rata-rata intensitas penyinaran rata-rata 71,1%. Suhu udara rata-rata di wilayah ini sebesar 21 °C sampai 32,8 °C. Suhu tertinggi terjadi pada Bulan Oktober dengan suhu berkisar 37.2 °C sampai 38 °C. Hal ini menyebabkan kota Bima ditetapkan sebagai kota terpanas di Indonesia pada tahun 2014.

Suhu yang tinggi dan panas menyebabkan Kota Bima rentan dengan bencana kekeringan yang melanda tiap tahun. Data Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima di Tahun 2021 telah dilakukan pendropingan air bersih pada 21 (dua puluh satu) Kelurahan pada 5 (lima) Kecamatan Kota Bima yang mengalami kekeringan dengan jumlah terdampak sebesar 8.257 kk dan 25.639 jiwa. Pada tahun 2022 kekeringan kembali melanda wilayah Kota Bima di 9 (sembilan) Kelurahan pada 4 Kecamatan dengan jumlah kk terdampak 5.600 dan jumlah jiwa terdampak 17.980. Dibandingkan tahun 2021, pendropingan air bersih untuk Tahun 2022 mengalami penurunan lebih dari 50% ini diakibatkan musim hujan di tahun 2022 lebih Panjang dari tahun 2021. Berdasarkan data bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bima peningkatan dampak kekeringan di wilayah Kota Bima kembali terjadi di 15 (lima belas) kelurahan sehingga pendropingan air bersih tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima namun menggandeng instansi BUMN, POLRI bahkan BPBD Propinsi NTB juga ikut menyiapkan 1000 tangki air bersih untuk didistribusikan ke daerah rawan kekeringan salah satunya adalah Kota Bima. Dampak kekeringan di tahun 2023 telah berdampak pada 7.311 KK dan 22.759 jiwa. Pendropingan air bersih untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan lebih dari 50% ini diakibatkan musim kering di tahun 2023 lebih Panjang dari tahun 2022.

Berdasarkan pertimbangan bahwa Kota Bima adalah daerah yang setiap tahunnya mengalami krisis air bersih maka Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Bima melakukan kegiatan kerjasama antar lembaga dengan berkoordinasi yang intensif dengan pihak BPBD Propinsi NTB untuk pengeboran sumur Yayasan The Foundation of the Church of Jesus Christ of the Letter Day (FCJCDLS).

Hasil identifikasi awal oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Bima dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Propinsi NTB diputuskan untuk melakukan pengeboran sumur dalam pada 2 (dua) Kelurahan yaitu Kelurahan Dara dan Kelurahan Paruga. Di Kelurahan Dara yang dapat di pertimbangkan untuk melakukan pengeboran sebanyak 3 titik yaitu di RT 05 RW 02 sebanyak 1 titik dan RT 07 RW 03 sebanyak 2 titik. Kelurahan Paruga setelah dilakukan survei lokasi diputuskan untuk pengeboran sumur dalam dilaksanakan di lokasi Masjid Sultan Muhammad Salahuddin yang berlokasi di kampung Sigi. Pengerjaan pengeboran sumur dalam ini akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dengan pengeboran sumur dalam pada Kelurahan Dara dan Kelurahan Paruga diharapkan dapat menjadi solusi untuk kebutuhan air bersih bagi warga di 2 (dua) Kelurahan tersebut.

Tabel 3.16

Realisasi Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab/kota *Tahun 2023*

NO	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab/kota	1 Dok.	1 dok	100 %

Dari tabel di atas dapat dijelaskan pencampaian dari sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab/kota adalah 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga realisasi sub kegiatan ini mencapai 100 %.

3. Sub kegiatan penanganan pasca bencana kab/kota

Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksidilaksanakan setelah terjadinya bencana yang meliputi:

a. Pendataan atas kerusakan yang terjadi

Tindakan penanganan bencana merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data yang akurat dan cepat pada saat bencana dibutuhkan agar penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan cepat,tepat, terkoordinasi dan menyeluruh dengan instansi-instansi pemerintah yang terkait. Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan besar dalam membantu proses pengumpulan data yang akurat dan cepat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima pada tahun 2023 ini membentuk Tim JITU PASNA (Pengkajian dan perhitungan Kerugian pasca bencana). Jitupasna merupakan suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan perhitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai agregat dari akibat bencana dan impilkasi umumnya terhadap aspek-aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya, politik dan tata pemerintahan.

Tahun 2023 ini BPBD Menyusun 1 (Satu) Dokumen Jitu Pasna dengan mengakumulasi dampak kejadian bencana selama tahun 2023.

b. Melaksanakan verifikasi jenis kerusakan yang ditimbulkan

Verifikasi data kerusakan fisik berbagai fasilitas umum, pemerintah maupun rumah warga harus segera diverifikasi agar masyarakat bisa cepat mendapatkan bantuan.

Verifikasi ini dilakukan dengan lengkap *by name by address*, foto dan titik koordinatnya sehingga jelas. Sebab ini berkaitan dengan anggaran, keberadaan data ini sangat penting dan dalam hal ini Bappeda dan BPBD memiliki peran penting. Termasuk untuk data kebutuhan pemulihan kerusakan fisik untuk usaha kecil menengah (UKM), pasar dan lainnya agar masyarakat atau para korban bisa segera melaksanakan aktifitas seperti biasanya dan Pemerintah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi secepatnya.

c. Mengusulkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi baik melalui Dana APBD, APBD Prov dan APBN (melalui dana Bantuan Sosial berpola hibah)

Tugas utama Bidang RR adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Rehabilitasi adalah Perbaikan dan Pemulihan semua aspek layanan publik/ masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama Normalisasi/ berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. **Rekonstruksi adalah** Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan/ masyarakat dengan sasaran utama Tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pada Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi (RR), terdapat 5 (lima) sektor yang menjadi fokus dalam penanganan Pasca Bencana yaitu :

1. Sektor Perumahan & Permukiman
2. Sektor Infrastruktur Publik
3. Sektor Ekonomi Produktif
4. Sektor Sosial, dan
5. Lintas Sektor

Untuk melaksanakan program Rehabilitasi & Rekonstruksi dengan 5 (lima) sektor yang menjadi kewenangan, bidang RR menggunakan metode Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana/ Jitupasna yang tercantum pada Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011.

Guna mendukung program/ kegiatan yang dilaksanakan Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi diperlukan sumber dana yang cukup. Merujuk pada PP nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pelaksanakan Program Rehabilitasi & Rekonstruksi bersumber pada :

1. APBD Kabupaten/ Kota (Melekat Pada SKPD terkait)
2. APBD Provinsi (Bantuan Sosial, Hibah)
3. APBN (Hibah Murni)
4. Masyarakat
5. Bantuan Luar Negeri

Selama tahun 2023 ini sampai dengan bulan Oktober 2023, BPBD Kota Bima tidak mengusulkan dana Rehabilitasi dan rekosntruksi pasca bencana ke BNPB, mengingat dampak bencana yang terjadi hingga Bulan Oktober 2023 tidak menimbulkan dampak kerusakan yang massif terhadap

sarana dan prasarana umum. Sementara kejadian angin kencang yang terjadi pada awal bulan nopember 2023 yang berdampak pada kerusakan rumah warga 107 Unit yang berlokasi di Kelurahan Oi Foo dan wilayah Rumah Relokasi Kadole OI Fo'o , Dampak bencana tersebut sudah dilakukan perhitungan kerugian dan perhitungan kebutuhan bekerja sama dengan Dinas Perkim Kota bima, dan sedang dikoordinasikan penggangaran untuk perbaikan rumah masyarakat tersebut.

d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Sarana dan prasarana Umum.

Prasarana dan sarana umum adalah jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kegiatan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Prasarana umum atau jaringan infrastruktur fisik disini mencakup : jaringan jalan/ perhubungan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan sanitasi dan limbah, dan jaringan irigasi/ pertanian.

Sarana umum atau fasilitas sosial dan umum mencakup : fasilitas kesehatan, fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran pemerintah, dan fasilitas peribadatan.

Selama Tahun 2023 belum ada kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.

e. Relokasi Warga terdampak bencana

Sejak banjir tahun 2016 yang lalu, warga yang terdampak bencana yang bermukim di sempadan sungai belum semuanya pindah di Lokasi Relokasi Kadole, Oi Foo dan Jatibaru meskipun Bantuan Dana Rumah (BDR) telah dibangun dan telah dilengkapi Sebagian sarana prasarana perumahan yang relatif memadai. Sementara Lokasi sempadan sungai merupakan daerah yang rawan terhadap bencana banjir yang selalu mengintainya. Maka untuk meminimalisir korban bencana banjir yang setiap musim penghujan selalu mengintai masyarakat, maka pemerintah berupaya melalui BPBD bekerja sama dengan Tim terkait (Dinas Perkim, Dinas PUPR, TNI, Polri,Camat dan Lurah) melakukan pembongkaran terhadap rumah di sempadan sungai Padolo pada bulan Juli dan Agustus Tahun 2023 agar masyarakat segera menempati rumah mereka di daerah Relokasi yang tersedia. Kegiatan Pembongkaran Rumah di sempadan sungai ini menggunakan Dana Tak Terduga yang tersedia di BPKAD. Jumlah bangunan/Rumah yang berhasil dibongkar adalah sebanyak 180 unit. Untuk bangunan masyarakat yang berada disempadan sungai namun tidak menerima bantuan Dana Rumah (BDR), akan dilakukan Apraisal terlebih dahulu yang dikoordinasikan oleh Dinas Perkim Kota Bima.

Jumlah Bangunan/rumah yang di Bongkar di Sempadan Sungai Padolo dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.17
Jumlah Bangunan/rumah yang di Bongkar di Sempadan Sungai Padolo

NO	KELURAHAN	JUMLAH BANGUNAN/RUMAH	SATUAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Sambinae	2	Unit	
2	Pane	2	Unit	
3	Dara	53	Unit	1 Unit Rumah menolak di bongkar

4	Paruga	58	Unit	
5	Manggemaci	62	Unit	
	Total	180	Unit	

Pada tahun 2023 realisasi sub kegiatan ini sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen. Ini artinya realisasi kegiatan ini sebesar 100 %. Dokumen yang dihasilkan adalah Dokumen Kajian Perhitungan Kerugian Pasca bencana (JITU Pasna) yang memuat tentang perhitungan kerugian pasca bencana disamping itu memuat koordinasi lintas sektor Pusat dan Daerah terhadap hasil kajian setelah bencana untuk memastikan adanya tindaklanjut perbaikan atau rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana prasarana pasca bencana seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas terkait lainnya serta BNPB dan Kemendagri.

Tabel 3.18

Realisasi sub. kegiatan Penanganan pasca bencana kab./kota *Tahun 2023*

NO	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2023	2023	2023
1	2	4	5	6
1	Penanganan pasca bencana kab./kota	1 Dok.	1 dok	100 %

Tabel 3.19

Perbandingan Realisasi sub. kegiatan Penanganan pasca bencana kab./kota *Tahun 2022 dan 2023*

NO	Sub Kegiatan	Target	Target	Realisasi	Realisasi	Capaian kinerja	Capaian kinerja
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penanganan pasca bencana kab./kota	1 Dok.	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	100 %

Pada tabel di atas dapat dijelaskan perbandingan realisasi sub kegiatan ini selalu mencapai target 100 %. Karena selama 2 tahun terakhir dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen.

Gambar 3.6

Kegiatan Penanganan pasca bencana kab./kota longsor tebing dan talud pemukiman warga RT.05/RW.02 Kel. Nungga



Gambar 3.7

Kegiatan Penanganan pasca bencana kab./kota longsor tebing dan talud pemukiman warga RT.05 RW/02 Kel. Nungga



1.2. **Sasaran Strategis 2 (S2): Tingkat Kepuasan Masyarakata Terhadap layanan kedaruratan.**

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (propenas), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Penyelenggaraan pelayanan diukur tingkat keberhasilannya oleh penerima pelayanan. Pencapaian pelayanan didapat apabila penerima pelayanan sudah merasa sesuai dengan kebutuhan dan harapannya. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya survei Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pelayanan. Dapat disimpulkan maka kepuasan masyarakat merupakan perasaan yang timbul dari diri individu itu sendiri bisa perasaan senang atau kecewa dan dicapai apabila penerimaan pelayanan sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Pada prinsipnya kualitas pelayanan dapat dinilai dari persepsi yang dibandingkan dengan harapan masyarakat. Jika pelayanan jasa sudah sesuai dengan harapan maka dikatakan kualitas atribut jasa di instansi tersebut sudah memuaskan. Jika pelayanan jasa melebihi harapan maka dikatakan sangat memuaskan. Begitupun sebaliknya jika pelayanan jasa tidak sesuai atau rendah dari harapan maka dikatakan buruk. Kualitas pelayanan merupakan materi yang kompleks, maka perlu adanya penilaian dari masyarakat. Berdasarkan peraturan menteri pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan

Masyarakat. Ada 9 unsur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan survey antara lain. Dapat terlihat pada lampiran LKIP.

Seiring dengan tuntutan paradigma *good governance* yang menghendaki dipenuhinya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas dan partisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maka kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perlu dilakukan. Kegiatan utama dalam penyusunan IKM ini adalah survey masyarakat pengguna jasa layanan untuk memperoleh informasi nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa yang telah mereka terima. Pada bab ini akan dipaparkan hasil survey IKM terhadap 377 responden yang meliputi karakteristik responden dan nilai rata-rata unsur pelayanan.

A. Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada survey IKM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima meliputi karakteristik menurut umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan utama. Pembahasan lebih lanjut tentang karakteristik responden berdasarkan 4 (*empat*) kategori tersebut adalah sebagai berikut.

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.

Umur mencerminkan kematangan seseorang dalam berpikir dan memberikan tanggapan. Karakteristik responden berdasarkan kelompok umur dapat memberikan informasi kelompok umur mana yang dominan sehingga peningkatan program pelayanan dapat diarahkan sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat menurut perbedaan umur. Dari 377 orang responden yang telah dimintai keterangan terkait IKM ini, karakteristiknya berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel 2:

Tabel 3.20

Karakteristik responden berdasarkan umur

No	Kategori Umur	Jumlah Responden	
		Orang	Prosentase
1	≤ 30 tahun	36	9,5
2	31 – 40 tahun	79	21,0
3	41 – 50 tahun	119	31,6
4	51 – 60	80	21,2
5	≥ 61	63	16,7
	Total	377	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden atau pengguna jasa layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima paling dominan berada pada kelompok 41-50 tahun (31,6%) disusul pada kategori umur 51-60 (21,2%), kemudian 31-40 tahun (21,0%), kemudian kelompok umur ≥ 61 tahun (16,7%), sedangkan kelompok umur ≤ 30 tahun menempati proporsi yang paling sedikit yaitu (9,5 %).

Responden pada pengukuran IKM yang menggunakan jasa layanan dari Badan Penagggulangan Bencana Daerah Kota Bima ini sebagian besar merupakan pelaku wiraswasta, lainnya, Pegawai Swasta dan PNS. Dari proporsi tersebut dapat dilihat bahwa pelaku usaha Wiraswasta menempati porsi tertinggi dari korban bencana tahun 2023.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kajian variabel jenis kelamin pada 377 orang responden dapat memberikan informasi kelompok mana yang dominan sehingga peningkatan kualitas pelayanan dapat dirancang dan diarahkan sesuai jenis kelamin yang dominan. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.21

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No	Kategori Jenis Kelamin	Jumlah Responden	
		Orang	Prosentase
1	Laki-laki	168	44,6
2	Perempuan	209	55,4
	Total	377	100%

Responden Perempuan dominan sebagai sampel yang mengisi kuisioner dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima yaitu sebesar 55,4 % sedangkan responden Laki-laki hanya sebanyak 44,6 %.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden ini dapat memberikan informasi tingkat pendidikan masyarakat pengguna layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima. Informasi ini penting untuk memprediksi tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat, serta ekspektasi dan persepsi masyarakat terhadap layanan publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Secara lengkap, kelompok responden berdasarkan pendidikan tercantum pada Tabel 4.

Tabel 3.22

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Kategori berdasarkan Pendidikan	Jumlah Responden	
		Orang	Prosentase
1	SD kebawah	29	7,7 %
2	SLTP	72	19,1 %
3	SLTA	258	68,4 %
4	D1	4	1,1 %
5	D3	1	0,3 %
6	S1	13	3,4 %
	Total	377	100%

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa responden dengan pendidikan SLTA mendominasi (68,4%), diikuti dengan kelompok pendidikan SLTP (19,1%), SD Kebawah (7,7%), S1 (3,4%) D1 (1,1%) dan D3 (0,3%). Dapat disimpulkan bahwa pengguna jasa layanan terbanyak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima memiliki pendidikan SLTA.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama

Informasi jenis pekerjaan responden bermanfaat dalam memahami kemampuan ekonomi dan ekpektasi serta persepsi masyarakat pengguna jasa layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima. Pendidikan responden pada pengukuran IKM ini dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 5.

Tabel 3.23

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama

No	Kategori berdasarkan Pendidikan	Jumlah Responden	
		Orang	Prosentase
1	PNS/TNI/POLRI	3	0,8 %
2	Wiraswasta	178	47,2 %
3	Pegawai Swasta	18	4,8 %
4	Lainnya	176	46,7 %
5	Pelajar / Mahasiswa	2	0,5 %
	Total	377	100 %

Sebanyak 178 orang responden memiliki pekerjaan utama yaitu kelompok pekerjaan wiraswasta, ini mendominasi (47,2%) disusul pekerjaan Lainnya 46,7 %, Pegawai Swasta 4,8 %, PNS/TNI/Polri 0,8 % dan Pelajar /Mahasiswa 0,5 %.

B. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima diperoleh dari survey terhadap 377 responden yang telah diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima. Survey dilakukan pada tanggal 1 Februari sampai 28 Februari 2024. Responden diminta memberikan penilaian terhadap 9 unsur pelayanan dan hasil pengisian kuesioner direkap untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan. Rekapitulasi nilai tiap unsur pelayanan dari 377 orang responden seperti pada Lampiran 3**.** Berdasarkan data yang dihimpun dari kuesioner, maka didapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan seperti pada Tabel 6.

Tabel 3.24

Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Persyaratan	3,41
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,46
U3	Waktu Penyelesaian	3,32
U4	Biaya / tarif	3,33
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,38
U6	Kompetensi pelaksana	3,47
U7	Perilaku pelaksana	3,41
U8	Sarana dan prasarana	3,34
U9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,68

Dari Gambar 5 di atas terlihat bahwa, nilai terendah ada pada U3 atau Unsur Waktu Penyelesaian Pelayanan. Hal ini memperlihatkan bahwa Waktu Penyelesaian Pelayanan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima menjadi kelemahan atau kekurangan pada pelayanan kepada masyarakat. Kemungkinan rendahnya penilaian masyarakat pada survei IKM terkait dengan unsur Waktu Penyelesaian Pelayanan dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Waktu Penyelesaian Pelayanan sesuai Standart Operasional Prosedure. Sedangkan yang menjadi unsur pelayanan dengan nilai tertinggi adalah U9 atau unsur Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sangat memenuhi standar dalam memberikan pelayanan, ini sangat berdampak pada kepuasan pengguna layanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima. Maka dari itu sisi yang sudah baik perlu dipertahankan ataupun ditingkatkan.

Sesuai dengan Peraturan dari KEMENPANRB No. 14 Tahun 2017 bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil analisis terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang sudah disebar kepada 377 responden adalah < 90 berarti baik, ini menunjukkan bahwa nilai IKM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah **85,51 atau kategori baik.** Kuesioner hasil dari responden seperti pada Lampiran 4.

Tabel 3.25

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 1,75	(0-44,30)	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	(44,31-76,60)	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	(76,61-88,30)	B	Baik
4	3,26 – 4,00	(88,31-100)	A	Sangat Baik

Dengan nilai IKM (Nilai Interval Konversi IKM) sebesar 85,51. apabila kita lihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah **"BAIK"**.

Dilihat dari capaian Sasaran Startegis 2 yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kedaruratan dapat dilihat dari capaian layanan kepuasan masyarakat sebesar 85,51 dari yang ditargetkan < 85. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.26

Capaian Sasaran Strategis 2

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Capaian (%) 2022	Capaian (%) 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan penanggulanagan kedaruratan bencana	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kedaruratan	<85	<85	<85	81,59	81,59	85,51	81,59	85,51

Dari tabel di atas dapat dijelaskan dari tahun 2021 capaian kinerja tingkat kepuasan layanan masyarakat sudah terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari capaian yang sudah dilakukan selam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 capaian kinerja tingkat kepuasan layanan masyarakat sebesar 81,59 melebihi dari target sebesar <85. Sedangkan pada tahun 2022 capaian kinerja tingkat kepuasan masyarakat mengalami penurunan dengan nilai persentase kepuasan masyarakat sebesar 81,59 atau capaian dibawah target <85. Sedangkan pada tahun 2023 capaian kinerja tingkat kepuasan masyarakat mengalami penurunan dengan nilai persentase kepuasan masyarakat sebesar 85,51 atau capaian di atas target < 85.

Permasalahan yang ada di lapangan dalam kegiatan survey IKM dapat bermacam – macam. Namun berdasarkan pengamatan dan evaluasi yang diperoleh,penyebab yang dianggap paling dominan terhadap timbulnya masalah tersebut dapat disajikan uraian sebagai berikut :

Masalah masyarakat (responden) kurang respek/tidak bersungguh – sungguh dalam memberikan pendaatnya (tidak obyektif) adalah :

1. Kurangnya pemahaman responden akan pentingnya hasil survey IKM
2. Kurangnya kepercayaan responden (masyarakat) terhadap upaya perubahan paradigma PNS

Berdasarkan analisa permasalahan tersebut di atas maka alternatif pemecahan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima layanan,
2. Diperlukan konsistensi para penyelenggara pelayanan publik disemua sektor untuk terus menerus meningkatan kemampuannya, keterampilan,kenyamanan, keamanan dan kelengkapan sarana prasarana pendukung serta mampu melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel,
3. Perlunya peningkatan SDM aparatur melalui seminar – seminar, pelatihan dan diklat teknis tentang pelayanan publik dalam upaya mendukung pelaksanaan survey IKM.

Kegiatan pendukung sasaran strategis 2 adalah kegiatan pelayanan dan penyelamatan evakuasi korban bencana.

Indikator Kegiatan ini adalah : Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan **Target Kinerja** : 100 %

Definisi Operasional :

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah Upaya yang dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi melalui upaya:

a. pencarian dan penyelamatan korban;

b. pertolongan darurat; dan/atau

c. evakuasi korban.

Kecepatan respon dalam hal melakukan respon penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah kecepatan dan ketepatan waktu respon dari penetapan darurat bencana hingga sampai lokasi pencarian penyelamatan korban, pertolongan darurat dan evakuasi korban.

Formulasi :

Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana

$$= \frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap darurat bencana}}{\text{Jumlah Kejadian bencana}} \times 100\%$$

Indikator Kegiatan pelayanan dan penyelamatan evakuasi korban bencana pada tahun 2023 realisasi sebesar 100 % dari target sebesar 100 %. Capaian ini sangat tinggi mengingat sudah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Darurat Bencana, meskipun dalam prakteknya Proses Penanganan bencana mulai tahap pengkajian cepat di Lokasi kejadian, rapat tim dan pelaporan hasil kajian serta pemberian bantuan bencana untuk bencana – bencana kecil sebelum dikeluarkannya SK Tanggap darurat menyebabkan adanya pengeluaran satuan biaya tertentu. Jumlah Kejadian bencana yang terjadi dalam tahun 2023 ini tetap tercatat

sebagai akumulasi kejadian bencana dan termasuk dalam kinerja pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pada Kejadian bencana tahun 2023 ini terdapat 4 Kejadian bencana yang ditetapkan menjadi Keadaan Darurat Bencana , 3 kejadian ditetapkan sampai tahap tanggap darurat dan 1 kejadian ditetapkan sampai pada tahapan siaga darurat bencana yaitu :

1. Penetapan Darurat Bencana Banjir melalui Surat Keputusan Wali Kota Bima Nomor : 188.45/206/360/II/2023 tentang Tanggap Darurat Bencana Banjir tahun 2023 tanggal 24 Pebruari 2023
2. Penetapan Darurat Bencana Banjir melalui Surat Keputusan Wali Kota Bima Nomor : 188.45/349/360/IV/2023 tentang Tanggap Darurat Bencana Banjir tahun 2023 tanggal 4 April 2023
3. Penetapan Darurat Bencana Angin Kencang melalui Surat Keputusan Wali Kota Bima Nomor : 188.45/755/360/XI/2023 tentang Tanggap Darurat Bencana Banjir tahun 2023 tanggal 9 Nopember 2023
4. Penetapan Siaga Darurat Kekeringan melalui Surat Keputusan Wali Kota Bima Nomor : 188.45/481/360/VI/2023 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan, Kekeringan, Kabakaran Hutan dan Lahan di Kota Bima Tahun 2023 .
   Selama masa Siaga darurat Kekeringan, sebanyak 2.014.000 ltr atau setara 403 Tangki yang didistribusikan kepada korban sebanyak 22.759 Jiwa, 7.311 KK di 15 Kelurahan.

Adapun tabel capaian kinerja pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana selama 2 Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.27

Perbandingan capaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2 tahun terakhir

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100%	100%	100%	100	100

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2022 pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana BPBD Kota Bima dalam menangani bencana selalu tepat waktu atau dikatagorikan sangat baik, atau terealisasi 100 %. Sedangkan pada tahun 2023 pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana BPBD Kota Bima dalam menangani bencana selalu tepat waktu atau dikatagorikan sangat baik, atau terealisasi 100 %. Disebabkan karena Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana tidak sampai mengeluarkan status tanggap darurat bencana, namun secara makro, tidak terjadinya bencana masif ini akibat daya tampung permukaan tanah terhadap air hujan masih cukup terpenuhi dan intensitas curah hujan kurang, termasuk sudah mulai bagusnya penataan drainase perkotaan.

Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :

1). Respon Cepat Darurat Bencana Kab./Kota

Respon Cepat Darurat Bencana Kab./Kota merupakan sistem informasi yang sangat diperlukan dalam penanganan darurat dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kebutuhan terhadap sistem informasi pada proses penanggulangan bencana berbasis manajemen adalah untuk memudahkan melakukan kerja operasional yang sistematis dan terkontrol dengan baik. Untuk itu sistem manajemen kebencanaan menjadi mendesak untuk diterapkan. Sistem ini juga selalu berhubungan dengan pengolahan informasi yang didasarkan pada *computer based information processing*.

Pada Tahun 2023 sub kegiatan ini mempunyai target sebanyak 1 dokumen dengan realisasi dokumen sebanyak 1 dokumen. Ini artinya realisasi kegiatan ini sebesar 100 %. Capaian sub kegiatan ini sangat baik akibat diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan Status Keadaan darurat bencana karena kejadian bencana yang terjadi selama kurun waktu tahun 2023 kejadian bencana yang cukup besar yang menyebabkan kerugian material maupun non material, sehingga penanganannya perlu dilakukan lintas sektor baik itu Pemerintah, Swasta dan masyarakat.

2). Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab./Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelematan dan Evakuasi Korban Bencana Kab./Kota pada Tahun 2023 mempunyai target sebanyak 64.955 orang dengan realisasi sebanyak 64.955 orang. Ini artinya persentase realisasinya sebesar 100 %. Selama tahun 2023 terdapat kejadian bencana sebanyak 5 kali dengan level kejadian bencana lokal/ kecil, kejadian bencana yang paling banyak terjadi adalah kekurangan air bersih di Lokasi yang tidak memiliki air baku seperti Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Paruga. Kekurangan air bersih pada lokasi tersebut akibat tidak operasionalnya perusahaan PDAM yang merupakan satu satunya penyuplay air bersih selama ini, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah ini kesulitan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari –hari, sehingga BPBD melakukan pendropingan air bersih dengan mobil tangki ke Tempat penampungan/Bak penampung di Lokasi terdekat di Kelurahan terdampak bahkan disuplay langsung ke rumah – rumah warga. Untuk penanganan kekurangan air bersih ini, sebenarnya bukan penanganan masa darurat akan tetapi merupakan penanganan pada keadaan tertentu sesuai Peraturan Walikota Bima Nomor Tahun 2023 tentang penetapan keadaan tertentu. Perwali ini yang secara tidak langsung berkontribusi dalam mengatur keluar masuk barang logistik yang akan di serahkan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana. Dalam hal ini setiap pemberian bantuan bencana harus di dasarkan pada Surat Keputusan Tanggap Darurat Bencana, oleh karena itu dengan adanya produk yang dihasilkan oleh BPBD Kota Bima yaitu Perwali tentang penetapan keadaan tertentu maka pemberian bantuan bencana yang masih dalam skala kecil yang tanpa harus mengeluarkan SK Tanggap Darurat bencana maka dapat menggunakan perwali tersebut untuk memberikan bantuan logistik kepada masyarakat, sehingga kinerja BPBD khususnya bidang Darlog dapat dinilai kinerjanya tanpa harus mengeluarkan SK Tanggap Darurat.

Tabel 3.28

Sub Kegiatan yang mendukung program penanggulangan bencana kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	**Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana**				
	1. Respon Cepat Darurat Bencana Kab./Kota	Dok	1	1	100
	2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab./Kota	Orang	64.955	64.955	100

Tabel 3.29

Perbandingan Realisasi Sub Kegiatan yang mendukung program penanggulangan bencana kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2 Tahun terakhir

No	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi		% Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana**							
	1. Respon Cepat Darurat Bencana Kab./Kota	Jam/dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	100	100
	2.Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab./Kota	Jenis/orang	6.750 Orang	64.955 Orang	17.983 Orang	64.955 Orang	266,41	100

Dari tabel di atas dapat dijeaskan bahwa kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana selama 2 tahun terakhir selalu terpenuhi, itu dapat dilihat dari respon cepat darurat bencana dan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana output yang dihasilkan 100 %. Ini menandakan kesiapsiagaan pemerintah dalam hal ini BPBD Kota Bima dalam menghadapi bencana selalu tanggap dan cepat baik itu tenaga maupun logistik serta koordinasi lintas sektor yang sangat baik sehingga memudahkan penanganan bencana yang terjadi cepat teratasi.

Adapun dokumentasi sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab./Kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.8

Kegiatan Manajemen Logistik dan Pergudangan



Gambar 3.9

Pendropingan Air Bersih di Kelurahan Dara



Gambar 3.10

Pendropingan Air Bersih di Kelurahan Rontu



Gambar 3.11

Pendropingan Air Bersih di Binabaru



1.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alaternatif solusi yang telah dilakukan

Pada umumnya, dalam menjalankan roda organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, ada beberapa faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran utama yang telah direncanakan sebelumnya.

Faktor – faktor penentu keberhasilan antara lain :

a. Unsur Pimpinan memiliki strategi vision dalam menjalankan roda organisasi sehingga gerak organisasi BPBD Kota Bima sangat dinamis

Selama tahun 2022 BPBD Kota Bima dalam melaksanakan fungsi organisasi sangat didukung oleh adanya kerjasama dengan Stakeholders terkait seperti Dinas teknis terkait, BMKG, TNI/POLRI, PMI termasuk dukungan Dana CSR dari Perbankan dan BAZNAS Kota Bima, Forum PRB Mbojo Ma Tenggo Kota Bima, Federasi TSBK, TSBK dan pendukung lainnya. Keberhasilan yang diuraikan di atas merupakan keberhasilan bersama atas manajemen organisasi yang cukup baik dari pimpinan BPBD Kota Bima dalam mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada baik sumber daya manusia maupun peralatan yang masih terbatas.

b. Perencanaan Organisasi yang sesuai dengan tuntutan paradigma Organisasi

Selain unsur kepemimpinan, unsur perencanaan yang baik dalam organisasi memberikan pengaruh yang cukup besar untuk keberhasilan organisasi, Dokumen Perencanaan yang strategis dan penilaian yang tepat ke depan akan memberikan dampak ketepatan dalam pengambilan arah kebijakan – kebijakan organisasi. Dokumen Perencanaan yang telah disusun BPBD Kota Bima adalah seperti Rencana Strategis Periode 2019-2023, Rencana kerja tahun 2022. Dokumen – dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Bima baik sebagai fungsi Pelaksana penanggulangan bencana maupun sebagai fungsi koordinasi dan Komando dalam Penanggulangan bencana di Kota Bima.

c. Sumber daya manusia yang mumpuni

Jumlah Pegawai BPBD Kota Bima sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 46 Orang. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai BPBD didominasi oleh pegawai pada tingkat pendidikan Sarjana S1 sebesar 54 %, kemudian Tenaga dengan pendidikan SMA sederajat sebanyak 0 % , sebanyak 0 % tenaga dengan pendidikan S2 sebanyak 7 %. Berdasarkan penempatan pegawai pada jabatannya, Jabatan Struktural pada BPBD Kota Bima telah terisi penuh oleh aparatur yang mumpuni, sehingga cukup memberikan sumbangsih bagi keberhasilan BPBD sehingga tercapai indikator target yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun ada beberapa capaian yang masih minim karena penyebab lainnya.

d. Penerapan teknologi yang memadai

Penguasaan teknologi yang memadai akan berdampak besar terhadap penyelesaian pekerjaan – pekerjaan yang diemban. BPBD Kota Bima dalam menjalankan tugasnya telah menggunakan teknologi informasi yang cukup memadai seperti ketersediaan Wifi, peralatan kumputerisasi yang memadai, SIPD, E - Lapor, teknologi jaringan informasi untuk menerima dan melaporkan kejadian dan potensi bencana melalui radio HT,dan penggunaan Early Worning System (EWS) yang berbasik IT dan peralatan pendukung lainnya menjadi faktor pendukung keberhasilan BPBD dalam mencapai indikator target pada tahun 2022.

e. Dukungan donor dan Lembaga Kemitraan Lokal

Proyek kerjasama membangun ketangguhan masyarakat melalui program pengurangan risiko bencana antara Pemerintah Kota Bima dalam hal ini BPBD Kota Bima dengan OXFAM indonesia melalui LP2DER dan Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Islamic Relief, sangat mendukung keberhasilan program program peningkatan kapasitas baik kelembagaan BPBD maupun masyarakat masih menjadi faktor pendukung meskipun andilnya dibandingkan tahun - tahun sebelumnya sudah berkurang.

Dukungan lain juga adalah dari Lembaga Lokal LP2DER Bima, Forum PRB Mbojo matenggo Kota Bima yang didalammnya memiliki unsur Perguruan tinggi , Lembaga Masyarakat, PMI, FTSB - TSBK, dan Lembaga yang peduli terhadap penanggulangan lainnya. Lembaga tersebut sangat membantu dalam menyelesaikan kegiatan - kegiatan prioritas Penanggulangan bencana rangka menuju kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana.

.

1.4. Faktor – Faktor yang menyebabkan kegagalan organisasi.

a. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Pada uraian tentang keberhasilan BPBD, Sumberdaya yang mumpuni cukup tersedia pada struktur organisasi BPBD, namun pada tugas - tugas khusus seperti Pengoperasi komputer, pengelola gudang dan Operator Pusdalops termasuk tenaga maintenance peralatan EWS belum memiliki tenaga yang bersertifikat keahlian untuk menyelesaikan tugas - tugas secara profesional

b. Ego Sektoral masih sangat tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selain sebagai fungsi pelaksana penanggulangan bencana, juga memiliki fungsi koordinasi. Sebagai organisasi yang memiliki fungsi koordinasi dibidang penanggulangan bencana, diharapkan dapat menjalin koordinasi yang lebih baik dengan stakeholder terkait mengingat pekerjaan penanggulangan bencana memerlukan kerjasama yang baik antara tiga pilar yaitu Pemerintah, Swasta dan Dunia Usaha baik pada pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana untuk program rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana.

Khusus pada kegiatan penanganan pasca bencana pemindahan warga di lokasi relokasi menjadi terhambat akibat kebutuhan sarana prasarana pendukung seperti Sekolah, Rumah Sakit Telekomunikasi dan sarana pendukung lainnya belum terpenuhi.

c. Dukungan Penganggaran

Kurangnya dukungan anggaran untuk membiayai sub kegiatan terkait pemenuhan SPM menyebabkan kurangnya capaian kinerja SPM terutama pada penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan bencana yang membutuhkan pembiayaan yang cukup besar yang menyebabkan pemenuhan sub kegiatan untuk pemenuhan SPM lainnya tidak bisa teranggarkan

d. Dukungan Masyarakat yang masih kurang

Khusus pada sub kegiatan penanganan pasca bencana, pemindahan penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana (pinggir Sungai) masih terkendala, dengan berbagai alasan seperti masih kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan dan telekomunikasi termasuk jauhnya jarak tempat relokasi ke tempat kerja menjadi alasan Masyarakat untuk enggan pindah ke Lokasi relokasi sehingga menghambat pelaksanaan program kerjasama Pemerintah Daerah dengan JICA untuk penataan bantaran sungai dan membuat jalan inpeksi,

e. Fasilitas Sarana Prasarana Pendukung masih kurang memadai

Dalam rangka meningkatkan pelayanan bencana,fasilitas sarana prasarana pendukung sangat diperlukan.Berdasarkan analisa kebutuhan sarana prasarana pendukung saat bencana, porsentase ketersediaan sarana prasarana penunjang saat bencana selama tahun 2022 sebesar 80%, ini berarti ketersediaannya cukup memadai, sarana prasarana yang masih kurang diantaranya adalah, Gudang Logistik yang kurang luas, Alat berat seperti eksavator ampibi, Perahu karet masih kurang, Sistem Peringatan Dini untuk semua bencana masih terbatas dll.

3.4 Solusi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima untuk mengurangi ketidakberhasilan di atas adalah :

a. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya yang ada dan Upaya pemenuhann tenaga trampil dapat dilakukan dengan merekrut tenaga kontrak sebagai tenaga operator komputer mengingat semua penyelesaian pekerjaan menggunakan aplikasi dan memanfaatkan Sumberdaya Forum PRB Kota Bima, TSBK dan lembaga lainnya untuk secara bersama – sama berkolaborasi pada kegiatan Penguranagan Risiko Bencana, maupun kegiatan Kedaruratan bencana.
b. Tetap Terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung di Lokasi relokasi seperti Dinas PUPR, Dinas Dikbud dan Dinas Kominfo, termasuk mengajukan Proposal batuan sarana dan prasarana kepada BNPB maupun Kementerian dalam Negeri.
c. Mengupayakan bantuan dari BNPB dan BPBD Provinsi untuk menambah fasilitas sarana prasarana penanggulangan bencana termasuk bantuan Logistik bencana maupun kerjasama untuk Pengurangan risiko bencana.
d. Terus melakukan pendekatan kepada masyarakat penerima BDR untuk segera pindah menempati rumahnya di Lokasi Relokasi agar rumahnya terurus dan tidak mudah rusak, kegiatan pemindahan ini menggunakan dana tak terduga untuk kebutuhan mendesak, berkolaborasi dengan Dinas DLH, TNI/POLRI, Aparat Kelurahan dan dinas terkait lainnya
e. Memprioritaskan pembayaran pada kegiatan - kegiatan yang telah terlaksana, dan menggunakan metode pembayaran dengan LS (Pembayaran Langsung) khusus untuk

pembayaran Honor, makan minum dan pengadaan dengan kontrak kecil untuk memaksimalkan realisasi karena keterbatan Nilai UP atau GU.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran seperti yang terdapat dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih menghadapi kendala-kendala antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM);
2. Banyak Masyarakat yang kurang respon positif terhadap kegiatan pembangunan rumah masyarakat sehingga masih ada beberapa komponen masyarakat yang belum bersedia di relokasi pada daerah yang lebih aman dari banjir;
3. Peningkatan koordinasi dan sinergi pemangku kepentingan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam meningkatan dan menguatkan kualitas kelembagaan;

2.3.1 Tingkat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Memperhatikan tingkat capaian program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2023, dapat diambil kesimpulan kinerja Perangkat Daerah sangat baik. Perumusan kegiatan telah mengacu kepada RKPD 2023 dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023, mengingat periode Pelaksanaan Renja Tahun 2025 ini merupakan periode ke 2 dari RPD Kota Bima Tahun 2024- 2026 maka tentu saja hasil evaluasi pelaksanaan Periode Renstra Sebelumnya akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan pada tahun ini. Terutama pada aspek – aspek untuk mendorong tercapainya peningkatan nilai Indek ketahanan Daerah sehingga dapat mengurangi tingkat risiko bencana di Kota Bima

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi,kinerja pelayanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta tantangan eksternal baik dari lokal yang bersifat kedaerahan maupun nasional bahkan internasional,mengingat Kota Bima merupakan Kota Tangguh di Indonesia. Isu strategis merupakan kondisi keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari Bencana Alam yang ditimbulkan.

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini diantaranya adalah 1) Hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan 2) Hasil analisis komparasi Renstra K/L dan Renstra PD Kota Bima.maka permasalahan dan hambatan tersebut antara lain :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga Relawan yang kompeten untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat; hal ini karena terbatasnya jumlah Kelurahan tangguh yang telah dibentuk termasuk peningkatan level/status ketangguhan Kelurahan hingga pada level Kota Bima
2. Terbatasnya fasilitas EWS bagi peningkatan akses konektifitas bagi masyarakat untuk mengetahui informasi kebencanaan;
3. Belum di updatenya Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana yaitu : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Dokumen Analisa Risiko Bencana, dan Dokumen Rencana Kontigensi Bencana sampai dengan legalisasinya
4. Masih kurang selarasnya dokumen - dokumen perencanaan penanggulangan bencana dengan Dokumen perencanaan lainnya di Kota Bima

5. Masih kurangnya peran swasta dan masyarakat dalam mekanisme atau prosedur penyebaran informasi kebencanaan
6. Di Bidang Logistik dan pergudangan belum memenuhi standar kwalitas maupun kwantitas sehingga perlu dilakukan penilaian secara berkala oleh pihak penilai eksternal
7. Belum adanya jaringan yang terintegrasi antara fasilitas pergudangan dengan suply cine
8. Di Bidang tata ruang, belum secara maksimal untuk menetapkan program kerja sesuai dengan struktur ruang dan pola ruang dalam RDTR
9. Program SMAB belum dikembangkan secara komprehensif sesuai aturan 3 Pilar ke semua sekolah
10. Belum semua Jenis ancaman bencana dilengkapi dengan Rencana kontinjensi bencana
11. Setelah dilakukan perbaikan rumah penduduk pasca bencana, perlu adanya data yang terukur tentang pengurangan risiko bencana terhadap ancaman bencana yang telah terjadi.
12. Perlu terus melakukan peningkatan palayanan terhadap informasi bencana, serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
13. Perlunya koordinasi dan advokasi kepada OPD terkait tentang keberlanjutan Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar terrcapai pemulihan sosial, ekonomi yang komprehensip pasca bencana.

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima tahun 2025 merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja Organisasi pemerintah Daerah. Dengan telah ditetapkannya Rencana Pemerintah Daerah RPD tahun 2024 -2026, maka RKPD perlu direview untuk menyesuaikan dengan Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPD yang menjadi sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil Analisa kebutuhan yang didukung oleh BPBD untuk tujuan tersebut. Berikut disajikan table Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun **2024** Kota Bima

Nama Perangkat Daerah: BPBD KOTA BIMA Lembar…….dari…

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				4.940.368.580,00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				5.970.368.580,00	
	Perencanaan, Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75.500.000,00	**Perencanaan, Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				75.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen Renja dan Renstra SKPD	2 Dokumen	16.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen Renja dan Renstra SKPD	2 Dokumen	16.000.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Tersedianya dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Tersedianya dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	7.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	7.500.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen SAKIP dan LPPD	2 Laporan	30.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen SAKIP dan LPPD	2 Laporan	30.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.048.118.580,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				4.048.118.580,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.897.118.580,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.897.118.580,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya dokumen SPP/SPM, UP, GU/TU/LS	35 Dokumen	130.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya dokumen SPP/SPM, UP, GU/TU/LS	35 Dokumen	130.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	4.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	4.500.000,00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Tersedianya laporan tanggapan pemeriksaan	6 Dokumen	5.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Tersedianya laporan tanggapan pemeriksaan	6 Dokumen	5.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Tersedianya laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Smesteran SKPD	18 Laporan	8.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Tersedianya laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Smesteran SKPD	18 Laporan	8.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	3.500.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	3.500.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50.000.000,00	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				50.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Tersedianya data penatausahaan aset SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Tersedianya data penatausahaan aset SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**31,111,500,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**31,111,500,00**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a		Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapanny a	55 Paket	35.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a		Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapanny a	55 Paket	35.000.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Tersedianya data administrasi kepegawaian	32 Dokumen	3.500.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Tersedianya data administrasi kepegawaian	32 Dokumen	3.500.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				222.940.000,0 0	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				222.940.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor	6 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor	6 Paket	5.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Paket	35.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Paket	35.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga	10 Paket	5.500.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga	10 Paket	5.500.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6 Paket	17.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6 Paket	17.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	10.440.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	10.440.000,00	
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Laporan	150.000.000,0 0	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Laporan	150.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				15.000.000,00					15.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya **Peralatan dan Mesin Lainnya**	18 Unit	15.000.000,00				18 Unit	15.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				313.300.000,0 0	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				313.300.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat	12 Laporan	18.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat	12 Laporan	18.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Laporan	86.500.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Laporan	86.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor	12 Laporan	208.800.000,0 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor	12 Laporan	208.800.000,00	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				177.010.000,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				177.010.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Unit	147.010.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Unit	187.010.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	16 Unit	20.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi rusak ringan	1 Unit	30.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi rusak ringan	1 Unit	600.000.000	
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**				892.830.197,00	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**				892.830.197,00	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				30.000.000,00	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**				30.000.000,00	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kot	100 Orang	30.000.000,00	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kot	100 Orang	60.000.000,00	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				294.625.250,00	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**				294.625.250,00	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan	1 Kawasan	27.000.000,00	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan	1 Kawasan	27.000.000,00	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis	1 Kegiatan	57.625.250,00				1 Kegiatan	57.625.250,00	
	Penyusunan Rencana Kontijensi		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	45.000.000,00	Penyusunan Rencana Kontijensi		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	145.000.000,00	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 Orang	35.000.000,00	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi	500 Orang	35.000.000,00	

	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	25.000.000,00	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	25.000.000,00	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana	50 Kawasan	30.000.000,00	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana	50 Kawasan	30.000.000,00	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman	12 laporan	75.000.000,00	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman	12 laporan	75.000.000,00	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Respon time darurat bencana 1 kali 24 jam	100 %	257.458.947,00	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		Respon time darurat bencana 1 kali 24 jam	100 %	257.458.947,00	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	30.507.900,00	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	30.507.900,00	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12000 Orang	12.841.500,00	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12000 Orang	12.841.500,00	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	12000 Orang	214.109.547,00	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban		Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	12000 Orang	314.109.547,00	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Peningkatan sistim dasar dan Penanganan Pasca bencana		310.746.000,00	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		Persentase Peningkatan sistim dasar dan Penanganan Pasca bencana		310.746.000,00	

	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	14.263.200,00	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	14.263.200,00	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan	1 Dokumen	166.352.300,00	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan	1 Dokumen	166.352.300,00	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	17.050.200,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	17.050.200,00	
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	113.080.300,00	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	113.080.300,00	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang rancangan recana kerja pemerintah tahun 2025. Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada Prioritas ke 8 PN yaitu " Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan dan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur ".

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat. Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana. menjauhkan bencana dari masyarakat. meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana. Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi. mengadaptasi. memproteksi. serta menghindari/meminimalisir dampak bencana. serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan misi Kota Bima sebagaimana penjelasan di atas maka Badan penanggulangan Bencana daerah Kota Bima merumuskan tujuan Perangkat Daerah yaitu : " ***Menurunnya Risiko Bencana Daerah".***

Secara Lengkap Tujuan dan Sasaran Rencana kerja perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator sasaran daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator sasaran PD (outcome)
1	Menurunnya risiko bencana Daerah	Menurunnya Risiko Bencana Daerah	Indek Risiko Bencana Daerah	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indek Ketahanan Daerah (IKD)
					Indeks Ketahanan Masyarakat (IKM) pelayanan kedaruratan

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran PD

No	Tujuan dan Sasaran PD	Indikator tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran
1	**Tujuan:** Menurunnya risiko bencana Daerah	Indek Risiko Bencana (IRB) Daerah	90 %
2	**Sasaran:**		
	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indek Ketahanan Daerah (IKD)	0,78
		Indeks Ketahanan Masyarakat (IKM)	0.34

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

4.1.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2025.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2025
3. Prioritas pembangunan dalam RPD Kota Bima tahun 2024 - 2026.

4.1.2 Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2024 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026 yang mengacu pada RPD Kota Bima Tahun 2024-2026. Pada tahun 2024 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima merencanakan program sebanyak 2 (Dua) program dan 7 (Tujuh) kegiatan, serta. 39 (Tiga puluh sembilan) sub kegiatan sesuai nomenklatur yang baru menurut permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2024 sebagaimana pada Tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 berikut :

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/Kegiatan

No	Sasaran PD	Nama Program/Kegiatan
1	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** 1. Pelayanan Informasi rawan bencana Kab/Kota 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

		1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Bima

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Ket
1	**Mitigasi Bencana**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** Kegiatan: 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**869.250.150,00** **72.773.200,00** **282.457.200,00** **292.912.750,** **221.107.000,00**	

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**										**5.087.390.222**	**6.328.000.000**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah**	Kota Bima	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					**4.075.435.532**	**4.197.698.598**
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							12 dokumen	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	**78.630.800,00**	**84.000.000**

1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dokumen Renja dan Renstra SKPD	2 Dokumen	Tersedianya dokumen Renja dan Renstra SKPD		p16.904.000,00	. 17.000.000,00
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya dokumen RKA-SKPD		p5.034.000,00	8.500.000,00
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD		p1.744.000,00	8.500.000
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya dokumen DPA-SKPD		Rp1.744.000,00	8.500.000
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD		p1.744.000,00	5.500.000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dokumen	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		12.891.000,00	5.500.000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dokumen SAKIP dan LPPD	2 Dokumen	Tersedianya dokumen SAKIP dan LPPD		p16.904.000,00	p16.904.000,00
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									100%	3.725.184.991,00	Rp. 4.163.500.000,00

1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	30 Orang	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		Rp. 3.520.837.991,00	Rp. 4.000.000.000
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dokumen SPP/SPM, UP, GU/TU/LS	35 Dokumen	Tersedianya dokumen SPP/SPM, UP, GU/TU/LS		Rp. 179.143.000,00	Rp. 140.000.000,00
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD		Rp. 3.348.000,00	Rp. 5.000.000,00
1	05	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya laporan tanggapan pemeriksaan	4 Dokumen	Tersedianya laporan tanggapan pemeriksaan		Rp. 4.052.000,00	Rp. 5.500.000,00
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Dokumen	Tersedianya laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Smesteran SKPD		Rp. 16.416.000,00	Rp. 9.000.000,0
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran		Rp. 1.388.000,00	Rp. 4.000.000,00
1	**05**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**									100%	Rp. 1.181.000,00	Rp. 54.000.000
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya data penatausahaan aset SKPD	12 Bulan	Tersedianya data penatausahaan aset SKPD		Rp. 1.181.000,00	Rp. 54.000.000
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									100%	Rp. 27.000.000,00	Rp. 41.000.000,0

1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	60 Set	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Rp. 19.500.000,00	37.000.000,00
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya data administrasi kepegawaian	66 Orang	Tersedianya data administrasi kepegawaian		7.500.000	4.000.000
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									100%	Rp. 148.731.100,00	Rp. 261.500.000,00
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Jenis	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Rp. 4.582.600,00	Rp. 5.500.000,0
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Unit	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Rp. 4.582.600,00	Rp. 5.500.000,0
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya peralatan rumah tangga	10 Jenis	Tersedianya peralatan rumah tangga		Rp. 5.108.000,00	Rp. 6.000.000,0
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Rp. 13.914.500,00	Rp. 18.500.000,00
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu		Rp. 8.040.000,00	Rp. 12.500.000,0

1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Rp. 86.806.000,00	Rp. 180.000.000,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					2 Unit		Rp. 25.450.000,00	Rp. 16.000.000,00
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					2 Unit		Rp. 25.450.000,00	Rp. 16.000.000,00
	05	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						Tersedianya jasa surat menyurat			100%	Rp. 325.739.600,00	Rp. 317.800.000,00
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	Tersedianya jasa surat menyurat		Rp. 15.776.000,00	Rp. 20.000.000,00
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor	12 Bulan	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Rp. 84.363.600,00	89.000.000,00
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Bulan	Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor		Rp. 225.600.000,00	Rp. 208.800.000
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			100%	Rp. 386.888.750,00	Rp. 355.000.000,00

1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	15 Unit	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Rp. 186.718.750,00	Rp. 155.000.000,00
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi rusak ringan	12 Bulan	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		0	0
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Paket	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi rusak ringan		Rp. 200.170.000,00	Rp. 200.000.000,00
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana**	**Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana**	Kota Bima	Persentase peningkatan upaya Penanggulangan Bencana	65,90 %				100%	**1,514,801,000,00**	**1.042.313.331**
1	**05**	**03**	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**				Persentase **Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	65 %	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	161.000.000 Jiwa	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100%	**196,232,000,00**	**59.546.566**

1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Rp. 72.773.200,00	123.153.200,00
1	**05**	**03**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**				**Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	83,51 %	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	**Rp. 282.457.200,00**	**p. 240.000.000,00**
1	05	03	2.02	01	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		205,058,200,00	10.300.000
1	05	03	2.02	02	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1800.000	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		p. 67.277.400,00	p. 45.000.000,00
					Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 d0kumen			p. 149.829.600,00	60.000.000
1	05	03	2.02	03	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya		21.000.000,00	104.208.602
1	05	03	2.02	05	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			Kota Bima, RasanaE Barat, NaE			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan	50 Orang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti		27.201.200,00	45.000.000

											pencegahan dan mitigasi bencana		pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			
1	05	03	2.02	06	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			Kota Bima, Raba, Rabangodu Utara			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		Rp. 38.149.000,00	90.000.000
1	05	03	2.02	07	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	100 %	Respon time darurat bencana 1 kali 24 jam	100 %	Respon time darurat bencana 1 kali 24 jam	100 %	p. 292.912.750,00	Rp. 267.000.000,
1	**05**	**03**	2.03		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	100%	p. 7.876.500,00	Rp. 33.000.000,00
1	05	03	2.03	02	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		Rp. 4.327.000,00	14.000.000,00
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana		p. 280.709.250,00	Rp. 220.000.000,00

1	**05**	**03**	2.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**				Persentase Peningkatan sistim dasar dan Penanganan Pasca bencana	62 %	Persentase Peningkatan sistim dasar dan Penanganan Pasca bencana		Persentase Peningkatan sistim dasar dan Penanganan Pasca bencana	100%	Rp. 221.107.000,00	Rp. 303.500.000,00
1	05	03	2.04	02	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 dokume	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		**344.707.000,00**	z774.739
					Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen			Rp. 150.000.000,00	Rp. 170.000.000,0
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen			Rp. 18.894.000,00	Rp. 18.500.000,0
					Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan			Rp. 52.213.000,00	Rp. 115.000.000,00
TOTAL															Rp. 5.557.810.591,00	Rp. 6.115.300.000,00

BAB V
PENUTUP

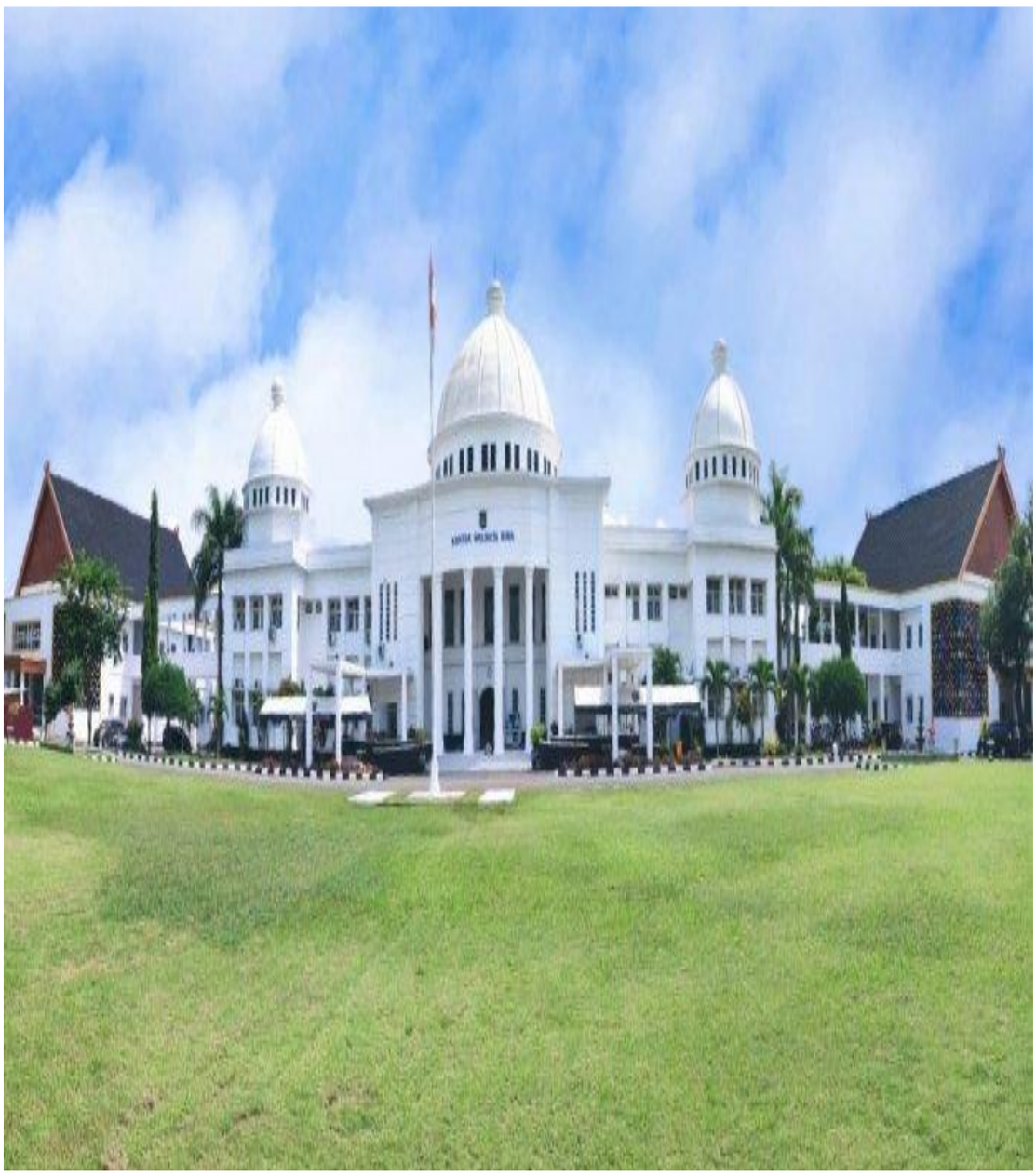
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota BimaTahun 2025 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BPBD Kota Bima dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Dalam melaksanakan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Kerja ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dengan penganggaran yang sesuai dengan peruntukannya sehingga secara konsisten dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya *goodgovernance*.

Kota Bima, Nopember 2024
Kepala Pelaksana BPBD
Kota Bima,



Gufran AH, S.Pd. Msi
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19700502200312 1 013

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
(BRIDA)
TAHUN 2025



TAHUN ANGGARAN 2024
BRIDA KOTA BIMA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA)Kota Bima 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sedangkan aturan secara rinci mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RENJA merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat di-pertanggungjawab-kan semua kebijakan, program, dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Oleh karena itu, penyusunan RENJA BRIDA Kota Bima Tahun 2025 ini merupakan acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-bidang lingkup BRIDA Kota Bima selama 1 (satu) tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima 2024-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) BRIDA Kota Bima 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan tiga tahunan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2025.

Kami menyadari dalam penyusunan RENJA ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja ini untuk masa mendatang.

Raba-Bima, Juli 2024
Kepala Badan,

A. Rafik,ST
Pembina (IV/a)
Nip. 19850213 199203 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1. Latar Belakang 5

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja 6

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 75

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 75

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 80

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 95

BAB III 96

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 96

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 96

BAB IV 101

BAB V PENUTUP 121

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Rekapitulasi Belanja BRIDA Kota Bima Tahun Anggaran 2020	11
TABEL 2.2	Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung	12
TABEL 2.3	Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2020 Kota Bima	16
TABEL 2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Bima	60
TABEL 3.1	Perumusan Penjelasan Visi	84
TABEL 3.2	Perumusan Penjelasan Misi	85
TABEL 3.3	Tujuan BRIDA Kota Bima.....	86
TABEL 3.4	Sasaran BRIDA Kota Bima	87
TABEL 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2024.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan rencana Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan, yaitu tahap persiapan penyusunan , penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Proses Penyusunan Renja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bima berdasarkan Renstra BRIDA Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan Tahun ke-1 dari RPD Kota Bima 2024-2026. Tahun 2025 merupakan tahun ke-2 perencanaan pembangunan Kota Bima yang berpedoman pada RPD 2024-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Riset Dan Inovasi Daerah serta sejalan dengan visi pembangunan jangka Panjang daerah tahun 2008-2028 yaitu "***Mewujudkan Kota Bima yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028***".

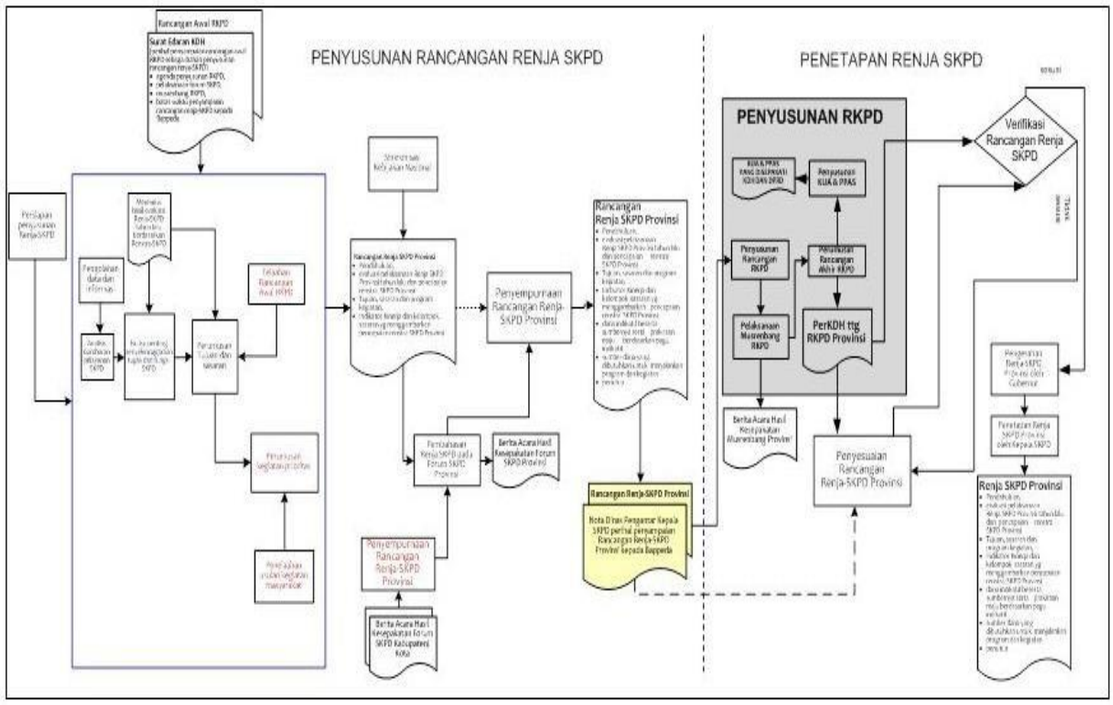
Renja ini berisi berbagai program dan kegiatan pembangunan baik kegiatan yang bersifat rutin (Belanja Tidak Langsung) maupun kegiatan pembangunan (Belanja Langsung) yang bermuara pada upaya peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut Badan Riset Dan Inovasi Daerah melaksanakan pembinaan dan koordinasi

pengembangan penelitian dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya Renja BRIDA sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran BRIDA tahun 2025 sebagai tahapan penyempurnaan rancangan APBD Kota Bima tahun 2025.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA SKPD adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja BRIDA Kota Bima 2025 mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan seperti sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik

   Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun

2008 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima dan kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Renja BRIDA Kota Bima 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja BRIDA Kota Bima Tahun 2025 ini adalah:

1. Menjabarkan Rencana Strategis BRIDA Kota Bima ke dalam rencana operasional;
2. Untuk mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025;
3. Untuk menjadi pedoman yang memberikan arahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan oleh Sekretariat dan Bidang- bidang dalam lingkup BRIDA Kota Bima sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada BRIDA Kota Bima;
5. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran;
6. Untuk menjadi acuan dan standar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan BRIDA Kota Bima dalam penyusunan laporan tahunan;
7. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BRIDA Kota Bima Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja BRIDA Kota Bima Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Dalam subbab ini menjelaskan hasil capaian tahun sebelumnya, maka yang tergambar pada renja ini adalah capaian yang dilakukan oleh BRIDA Kota Bima. Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh BRIDA dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang.

Renstra BRIDA Kota Bima tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (Tiga) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Kondisi Daerah Kota Bima terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu ketersediaan dokumen perencanaan yang sangat diperlukan untuk menjamin agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Tahun anggaran 2024, BRIDA Kota Bima telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya yaitu menyusun dokumen perencanaan jangka menengah, dan jangka pendek. Adapun dokumen dimaksud yang sudah diselesaikan pada tahun 2024 adalah:

a. RANCANGAN RENSTRA BRIDA Kota Bima Tahun 2024-2026
b. RANCANGAN RENJA BRIDA Kota Bima Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA BRIDA Tahun 2023, pelaksanaan kinerja BRIDA Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 6.016.321.520 dan terealisasi sebesar Rp 5.487.860.901 atau sebesar 91.22 %. Anggaran ini terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dari target belanja operasi sebesar Rp 6.016.321.520 BRIDA Kota Bima merealisasikan sebesar Rp 5.487.860.901 atau sebesar 91.22 %. Sampai akhir tahun anggaran.

Alokasi anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun 2023 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Belanja BRIDA Kota Bima Tahun Anggaran 2024 TW.II

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Operasi	5.565.153.720	1.945.207.115	34.95
	Jumlah	5.565.153.720	1.945.207.115	**34.95**

Sumber: Laporan Keuangan BRIDA2024

Belanja Pegawai digunakan untuk membiayai belanja berikut:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan, yang digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan PNS BRIDA Kota Bima selama 12 bulan. Belanja ini Gaji dan Tunjangan ini dianggarkan sebesar Rp 2.730.071.806 dan terealisasi pada TW.II sebesar Rp 858.455.783 atau 31.44%.
b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS, berupa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk PNS BRIDA

   Kota Bima selama 12 bulan pada tahun 2024. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp98.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.280.000,00 atau 34.98%.

Sedangkan, Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai belanja seperti berikut:

a) Belanja Bahan Pakai Habis.
b) Belanja Jasa Kantor.
c) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.
d) Belanja Cetak dan Penggandaan.
e) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir.
f) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor.
g) Belanja Makanan dan Minuman.
h) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya.
i) Belanja Perjalanan Dinas.
j) Belanja Pemeliharaan.

Belanja Modal digunakan untuk pengadaan alat angkutan darat bermotor.

Anggaran dan realisasi pelaksanaan program/kegiatan selama tahun anggaran 2024 TW.II digambarkan pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Program/ Kegiatan
Tahun Anggaran 2024 Triwulan II

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	4.099.482.920	3.835.576.944	263.905.976	93,56%
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	33.035.000	32.709.800	325.200	99.01%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.074.697.506	1.937.659.566	137.037.940	93.39%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah	76.600.000	74.850.000	1.750.000	10.20%
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	1.407.316.214	1.310.958.139	96.358.075	93.00%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.554.200	92.715.241	3.920.241	91.00%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.485.000	304.084.198	13.400.802	72.97%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	88.795.000	82.600.000	6.195.000	93.00%
B	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	1.916.838.600	1.652.283.957	264.554.643	86,20%
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*582.371.400*	*549.810.899*	32.560.501	94,41%
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	122.665.400	77.894.500	44.770.900	63,50%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*110.420.000*	*105.916.500*	4.503.500	95,92%
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.101.381.800	918.662.058	182.719.742	83,41%
JUMLAH		*6.016.321.520*	*5.487.860.901*	528.460.619	*91,22.%*

Sumber: Laporan Keuangan BRIDA 2024

Evaluasi RENJA-SKPD TW.II Tahun 2024 dan pencapaian RENSTRA BAPPEDA LITBANG Tahun 2019-2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

TABEL2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2022 BAPPEDA LITBANG
Daerah Kota Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
5	01				**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**										**6,845,347,119**	**7,050,707,533**
5	**01**				**PERENCANAAN**										**6,030,017,964**	6,210,918,503
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan	100 %					**3,414,778,279**	3,517,221,627
5	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua					Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran,	100%	**31,372,500**	32,313,675

								Kelurahan					dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Renstra dan Renja	1 dokumen			5,613,500	5,781,905
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA/RKA-P dan DPA/DPPA	4 Dokumen			5,459,000	5,622,770
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen			5,150,000	5,304,500

5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen			5,000,000	5,150,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			5,000,000	5,150,000
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah LKIP/LPPD/LPJ	3 Dokumen			5,150,000	5,304,500

5	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								Terwujud nya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	100%	**2,450,208,604**	2,523,714,863
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang mendapatkan jaminan Kesehatan Jumlah pegawai yang menerim	35 Orang 35 Orang			2,377,160,643	2,448,475,462

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
											a gaji dan tunjanga n					
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang memperol eh jasa administr asi keuangan	1 Tahun			53,045,000	54,636,350
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Keuanga n satu Tahun	1 Laporan			5,768,000	5,941,040

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan keuangan Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	12 Laporan 2 Laporan			5,150,000	5,304,500
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan analisi prognosis	1 Laporan			9,084,962	9,357,511
5	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								Terlaksanya Administrasi	100%	**50,000,000**	51,500,000

													Kepegawaian Perangkat Daerah			
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN Jumlah tim Lapangan	35 Orang 15 Orang			50,000,000	51,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	**608,900,515**	627,167,530
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cakupan Penyedian Komponen Instalasi Listrik	100 persen			25,000,000	25,750,000
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurah			Cakupan peralatan dan perlengkapan yang disediakan	100 persen 1 Paket			28,747,815	29,610,249

								an			Jumlah alat tulis kantor					
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan makan minum rapat	1 Dokumen			57,257,700	58,975,431

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	1 paket			30,900,000	31,827,000
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kerjasama dengan media	2 Dokumen			16,995,000	17,504,850
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	1 Dokumen			450,000,000	463,500,000

5	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								Terlaksanaanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**144,296,660**	148,625,560

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	370 surat			30,282,000	31,190,460
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	105 kl			57,084,660	58,797,200

5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pearalatan kerja yang diperbaiki	22 Unit			25,000,000	25,750,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			cakupan gedung kantor yang memperoleh kebersihan	1 Tahun			31,930,000	32,887,900
5	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	100%	**130,000,000**	133,900,000

													h			
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas yang layak	22 Unit			50,000,000	51,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan mesin	3 Unit			50,000,000	51,500,000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung yang akan di rehab Jumlah ruangan yang akan di renovasi	1 Gedung 1 Gedung			30,000,000	30,900,000

5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**				Persenta se capaian kinerja pengendalian perencanaan pembangunan daerah	100 %					**615,239,685**	633,696,876
5	**01**	**02**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**								Terlaksanya Forum OPD, Musrenbang dan RKPD 2024	3 dokumen	**400,000,000**	412,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanya Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1 dokumen			100,000,000	103,000,000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanya Musrenbang Kabupaten/Kota	1 dokumen			200,000,000	206,000,000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua			Terlaksanya RKPD 2024 Kot	1 dokumen			100,000,000	103,000,000

					Daerah Kabupaten/Kota			Kelurahan			a Bima					
5	**01**	**02**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								Terlaksanya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembang	3 dokumen	**215,239,685**	221,696,876

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
													unan Daerah			
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen			75,000,000	77,250,000
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanya Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama	1 Dokumen			75,000,000	77,250,000

											Daerah					
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala	1 Dokumen			65,239,685	67,196,876

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
											Pelaksanaan Pembangunan Daerah					
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				Persentase program prioritas dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKPD	100 %					**2,000,000,000**	2,060,000,000

5	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**								Penyelenggaraan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 dokumen	**800,000,000**	824,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen			100,000,000	103,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terselenggarannya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen			100,000,000	103,000,000

5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 dokumen			100,000,000	103,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanannya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen			100,000,000	103,000,000

5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanany a Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen			100,000,000	103,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terselenggarannya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen			100,000,000	103,000,000

5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terselenggarannya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen			100,000,000	103,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terselenggranya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen			100,000,000	103,000,000

5	**01**	**03**	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**								Terselenggaranya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	6 dokumen	**600,000,000**	618,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 dokumen			100,000,000	103,000,000
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 dokumen			100,000,000	103,000,000

											Bidang Perekonomian					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 dokumen			100,000,000	103,000,000

5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 dokumen			100,000,000	103,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 dokumen			100,000,000	103,000,000
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pemba	1 dokumen			100,000,000	103,000,000

					Bidang SDA						ng unan Perang ka t Daera h Bidang SDA					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	**01**	**03**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**								Terselenggaranya Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6 dokumen	**600,000,000**	618,000,000
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastr	1 dokumen			100,000,000	103,000,000

											u ktur					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 dokumen			100,000,000	103,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 dokumen			100,000,000	103,000,000

5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 dokumen			100,000,000	103,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 dokumen			100,000,000	103,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 dokumen			100,000,000	103,000,000
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										**815,329,155**	839,789,030

5	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Persenta seketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100 %					**15,000,000**	15,450,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	**05**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**15,000,000**	15,450,000
5	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD	1 Laporan			15,000,000	15,450,000

5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				Persenta se peningkatan pemanfaatan hasil kelitbangan (riset) untuk perumusan kebijakanperencanaa pembangunan	100 %					**800,329,155**	824,339,030

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	**05**	**02**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**								Terlaksanany a Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	**54,048,735**	55,670,197
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanany a Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 Dokumen			54,048,735	55,670,197

5	**05**	**02**	2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**								Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 dokumen	**172,694,950**	177,875,799

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen			92,479,580	95,253,967
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen			80,215,370	82,621,831
5	**05**	**02**	2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**								Pengkajian Bidang Ekonomi dan Pembang	1 dokumen	**75,000,000**	77,250,000

													unan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Lingkung an Hidup	1 Dokumen			75,000,000	77,250,000
5	**05**	**02**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**								Terlaksanany a Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 dokum en	**498,585,470**	513,543,034

5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengajian Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen			268,802,437	276,866,510

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengajian Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Dokumen			75,000,000	77,250,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengajian Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1 Dokumen			53,528,173	55,134,018

5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersel enggar anya Sosial isasi dan Disem inasi Hasil-Hasil Kelitb angan	1 Dokumen			50,000,000	51,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah hak kekayaan intelektual yang dihasilkan	1 Dokumen			51,254,860	52,792,506
TOTAL											**6,845,347,119**			**7,050,707,533**		

PD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bima

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2023 BRIDA Kota Bima telah melaksanakan 2 Program 9 Kegiatan, dengan capaian indikator sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahaan Daearah Kabupaten/Kota

   Program Penunjang Urusan Pemerintahaan Daearah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 kegiatan dan 26 subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,896.383.720 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) program ini yang berisi kegiatan rutin setiap perangkat daerah, sehingga capaian kinerja pada TW.II Tahun 2024 mencapai 39,06% karena Tahun.

2. Program Penelitian Dan Pengembangan Daearah

   Program Penelitian Dan Pengembangan Daearah yang terdiri dari 4 Kegiatan dan 7 subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.668.770.000 (Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) program ini yang berisi kegiatan urusan Brida dalam melaksanakan tujuan OPD berdasarkan pada pencapaian target yang ditetapkan selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bima pada RKPD Kota Bima Tahun 2023 dan Visi Misi RPJMD 2018-2024. sehingga capaian kinerja pada TW.II Tahun 2024 mencapai 25,36%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BRIDA Kota Bima dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima. Kedudukan BRIDA Kota Bima yang merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bima.

BRIDA Kota Bima, berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi seperti dijabarkan sebagai berikut.

A. Kepala Badan

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang riset dan inovasi daerah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan rencana strategis dan rencana kerja Badan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan visi dan misi pembangunan Daerah;
   b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang

berpedoman pada nilai pancasila;

c. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai pancasila;
d. pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan di bidang riset dan inovasi, pelaksanaan kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dari inovasi di Daerah;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
f. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dari inovasi di Daerah;
g. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan permanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
h. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
i. pengoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah;
j. pengoordinasian dalam rangka pengembangan dan permanfaatan riset, inovasi dan teknologi tepat guna di Daerah;
k. pembinaan dan pernberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur perangkat Daerah dalam rangka pengembangan inovasi;
l. pemberdayaan Sumber Daya aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana perangkat Daerah
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas rnenyelenggarakan pelayanan adrninistrasi dan teknis yang rneliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rurnah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Badan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
   a. penyusunan program sekretariat;
   b. koordinasi penyusunan program Badan;
   c. koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis

kesekretaria tan;

d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
e. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, serta efisiensi dan tatalaksana Badan;
f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan;
g. penyelenggaran administrasi barang milik Daerah pada Badan;
h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat;
i. penyelenggaran monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Badan;
j. pengoordinasian pengelolaan data, dan pengembangan sisterm informasi Badan;
k. evaluasi dan penyusunan laporan Badan;
l. pembinaan aparatur;
m. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
n. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
o. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
p. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
q. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat membawahi dan mengoordinasikan:

a. Subbagian Umum; dan

1) melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
2) melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik Daerah;
3) melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
4) melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
5) melaksanakan kegiatan urusan keuangan di lingkungan Badan;
6) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan keterampilan dan keahlian serta kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

4. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset

a. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan hasil riset melalui koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, pelayanan, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan.

c. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset mempunyai fungsi:

1) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

2) penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

3) penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

4) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi clan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

5) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian clan pengembangan pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

6) pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;

7) fasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan hasil riset;

8) melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan hasil riset;

9) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil pelaksanaan penelitian clan pengembangan pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

10) fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan

11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengembangan clan Pemanfaatan Riset membawahi clan menkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan keterampilan dan keahlian serta kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset.

g. Kepala Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset mempunyai tugas:

1). menyusun program kerja dan anggaran Bidang berdasarkan rencana program Badan;

2). membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

3). menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

4). menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di

bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

5). menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

6). menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

7). menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

8). mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;

9), memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan hasil riset;

10).melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan hasil riset;

11). menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

12). memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

13). menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang; dan

14). melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi

a. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual melalui koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

c. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:

1) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;

2) penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BRIDA Kota Bima didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat

pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- Belum adanya SDM Peneliti
- Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja
- Belum ada lengkapnya sarana prasarana yang dapat mendukung kegiatan Riset dan Inovasi.

Permasalahan – permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta

Berdasarkan pada permasalahan yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja BRIDA dimasa yang akan datang , tantangan yang dihadapi BRIDA dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun yang akan datang adalah :

- Semakin strategisnya peran Brida terhadap proses perencanaan Pembangunan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Persentase kemiskinan yang masih relative tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi NTB;
- Belum maksimalnya koordinasi fungsi kajian di Brida dengan fungsi perencanaan di bappeda sehingga menghasilkan perencanaan berkualitas dengan berbasis kajian pembangunan
- Perubahan kebiajakan perencanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*;
- Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya;
- Masih rendahnya proporsi Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah.

Sedangkan peluang bagi BRIDA Kota Bima dalam melaksanakan tugasnya adalah :

- Keterpaduan antara hasil kajian dengan perencanaan di Tingkat kota
- Tawaran Kerjasama Riset dari Badan Riset Nasional, Badan Riset Daearah Provinsi , Lembaga- Lembaga Riset lainnya, dan Lembaga Riset Perguruan Tinggi;
- Program Prioritas Nasional dan Provinsi NTB yang ada di Kota Bima.

Isu penting yang perlu intervensi dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun selanjutnya adalah adanya hasil riset dan inovasi yang direkomendasikan untuk mendapatkan tindak lanjut .

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja (RENJA) bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang

baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja (RENJA) BRIDA Kota Bima Tahun 2025, program dan kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai dengan Rancangan awal RKPD Kota Bima Tahun 2025, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan masing-masing OPD.

TABEL 2.4
Review Terhadap Ranwal RKPD Tahun 2025 Kota Bima

	RANCANGAN AWAL RKPD PERMENDAGRI 90						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO.	**PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**		**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**		**KEBUTUHAN DANA**
				SATUAN	**NILAI**					**SATUAN**	**NILAI**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*		*9*	*10*	*11*	
A	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**4.550.750.633**						**4.550.750.633**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**	persen	100	**3.529.887.033,00**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**	persen	100	**3.529.887.033,00**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Angka Kumulatif**	**A**	**108.291.600,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Angka Kumulatif**	**A**	**108.291.600,00**

	RANCANGAN AWAL RKPD PERMENDAGRI 90						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA
				SATUAN	NILAI					SATUAN	NILAI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*		*9*	*10*	*11*	
	Kinerja Perangkat Daerah						**Kinerja Perangkat Daerah**					
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	77.526.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	77.526.000,00
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.500.000,00
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.500.000,00
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.500.000,00
e	Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	765.600,00	Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	765.600,00

	RANCANGAN AWAL RKPD PERMENDAGRI 90						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA
				SATUAN	NILAI					SATUAN	NILAI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*		*9*	*10*	*11*	
	Perubahan DPA-SKPD		dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				Perubahan DPA-SKPD		dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	7.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	7.500.000,00
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**2.217.017.833,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**2.217.017.833,00**
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	18	2.095.750.433,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	18	2.095.750.433,00
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	109.996.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	109.996.000,00

	RANCANGAN AWAL RKPD PERMENDAGRI 90						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA
				SATUAN	NILAI					SATUAN	NILAI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*		*9*	*10*	*11*	
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4.759.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4.759.400,00
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13	4.332.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13	4.332.000,00
e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	2.180.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	2.180.000,00
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan tertib layanan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**%**	**25**	**6.885.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan tertib layanan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**%**	**25**	**6.885.000,00**

	RANCANGAN AWAL RKPD PERMENDAGRI 90						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA
				SATUAN	NILAI					SATUAN	NILAI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*		*9*	*10*	*11*	
a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	6.885.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	6.885.000,00
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**742.336.600,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**742.336.600,00**
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.732.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.732.000,00
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	210.360.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	210.360.000,00
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	24.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	24.000.000,00

	RANCANGAN AWAL RKPD PERMENDAGRI 90						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA
				SATUAN	NILAI					SATUAN	NILAI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*		*9*	*10*	*11*	
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	93.844.600,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	93.844.600,00
e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	37.400.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	37.400.000,00
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	24.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	24.000.000,00
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	350.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	350.000.000,00
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah**	**%**	**50**	**90.644.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah**	**%**	**50**	**90.644.000,00**

	RANCANGAN AWAL RKPD PERMENDAGRI 90						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA
				SATUAN	NILAI					SATUAN	NILAI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*		*9*	*10*	*11*	
a	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	90.644.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	90.644.000,00
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**256.337.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**256.337.000,00**
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	76.503.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	76.503.000,00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12.474.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12.474.000,00
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	26.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	26.000.000,00

	RANCANGAN AWAL RKPD PERMENDAGRI 90						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO.	**PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**		**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**		**KEBUTUHAN DANA**
				SATUAN	**NILAI**					**SATUAN**	**NILAI**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*		*9*	*10*	*11*	
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	141.360.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	141.360.000,00
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**108.375.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**108.375.000,00**
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	57.485.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	57.485.000,00
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	14.890.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	14.890.000,00

	RANCANGAN AWAL RKPD PERMENDAGRI 90						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA
				SATUAN	NILAI					SATUAN	NILAI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*		*9*	*10*	*11*	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	36.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	36.000.000,00
II	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		**Persentase kebermanfaatan hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti**	%	50	**1.020.863.600,00**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		**Persentase kebermanfaatan hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti**	%	50	**1.020.863.600,00**
1	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**		**Persentase hasil riset Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti**	**%**	**50**	**294.230.000,00**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**		**Persentase hasil riset Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti**	**%**	**50**	**294.230.000,00**
a	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	12	84.220.000,00	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	12	84.220.000,00
b	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi	Rekomendasi	12	210.010.000,00	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi	Rekomendasi	12	210.010.000,00

	RANCANGAN AWAL RKPD PERMENDAGRI 90						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO.	**PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**		**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**		**KEBUTUHAN DANA**
				SATUAN	**NILAI**					**SATUAN**	**NILAI**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*		*9*	*10*	*11*	
	Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan			
2	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**		**Persentase hasil riset bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti**	**%**	**50**	**35.640.000,00**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**		**Persentase hasil riset bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti**	**%**	**50**	**35.640.000,00**
a	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	10.640.000,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	10.640.000,00
b	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1	25.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1	25.000.000,00
3	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**		**Persentase hasil riset bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti**	**%**	**50**	**86.810.000,00**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**		**Persentase hasil riset bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti**	**%**	**50**	**86.810.000,00**

	RANCANGAN AWAL RKPD PERMENDAGRI 90						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA
				SATUAN	NILAI					SATUAN	NILAI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*		*9*	*10*	*11*	
a	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	2	86.810.000,00	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	2	86.810.000,00
4	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**		**Persentase hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang ditindaklanjuti**	**%**	**50**	**604.183.600,00**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**		**Persentase hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang ditindaklanjuti**	**%**	**50**	**604.183.600,00**
a	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	30.333.000,00	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	30.333.000,00
b	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	35.000.000,00	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	35.000.000,00

	RANCANGAN AWAL RKPD PERMENDAGRI 90						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA
				SATUAN	NILAI					SATUAN	NILAI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*		*9*	*10*	*11*	
c	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	4	528.850.600,00	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	4	528.850.600,00
d	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	10.000.000,00	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	10.000.000,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) BRIDA Kota Bima Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahun kedua penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kota Bima Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2025.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, BRIDA Kota Bima dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, BRIDA dituntut untuk siap dan sanggup membuat dan menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan RENJA BRIDA Kota Bima Tahun 2025 didasarkan kepada RENSTRA BRIDA Kota Bima Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam RKP Tahun 2025 adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas yang dijabarkan menjadi 5 (lima) Prioritas nasional di tahun 2025, yaitu :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2024-2025 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Perumusan Tujuan BRIDA Memperhatikan Sasaran Strategis RPD Kota Bima 2024-2026

Berkaitan dengan hal tersebut berikut diuraikan intisari RPJMD Kota Bima.Visi Kota Bima untuk periode RPD Tahun 2024-2026 adalah:

"Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri"

Visi tersebut di atas memiliki makna sebagai berikut:

Bagian Pertama: **Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara**

a. **Kota Bima yang Berkualitas** adalah terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
b. **Setara** adalah akronim dari kata Sejahtera, Transparan, Akuntabel, Ramah, dan Agamais. dengan demikian, pengertian dari masing- masing kata tersebut dijelaskan sebagai berikut:
   - Masyarakat **Sejahtera** adalah suatu kondisi dimana taraf hidup

masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal;

- **Transparan** adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah;
- **Akuntabilitas** adalah proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel akan diwujudkan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Sungguh-sungguh Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Meningkatkan Nilai-nilai Efektif, Efisien dan Partisipatif;
- Lingkungan Perkotaan yang **Ramah** adalah lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat

  meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.
- Masyarakat **Agamais** adalah masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama.

Bagian Kedua: ***Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri***

Pengertian kalimat Visi pada bagian Kedua merupakan bagian dari pernyataan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 sebagaimana telah disebutkan diatas.Oleh karenanya pengertian kalimat visi pada bagian kedua tidak dapat dipisahkan dari dokumen RPJPD Kota Bima tersebut.

Adapun berdasarkan Rencana Jangka Panjang tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

a. Terwujudnya Masyarakat yang Maju ditandai dengan adanya perkembangan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan meningkatnya kesejahteraan. Kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan daya beli masyarakat; tingkat layanan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan modal bagi masyarakat.
b. Masyarakat yang mandiri diukur berdasarkan perubahan Indeks

Pembangunan Manusia, yang mencakup: Tingkat Pendidikan Penduduk; Tingkat Partisipasi Sekolah; Daya Serap Lembaga Pendidikan Formal; Usia Harapan Hidup Penduduk; Lama Hari Sakit Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana Kesehatan per Penduduk. Berkaitan dengan derajat otonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah, derajat otonomi fiskal diukur berdasarkan perubahan Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang berasal dari

sumber-sumber keuangan asli daerah dan penerimaan yang berasal dari pemerintah Provinsi dan Pusat.

Tabel 3.1.
Perumusan Penjelasan Visi

Visi	**Pokok-Pokok Visi**	**Penjelasan Visi**
Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri	Kota Bima yang Berkualitas	terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensip dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
	Masyarakat Sejahtera	suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal
	Transparan	keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
	Akuntabilitas	proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic
	Lingkungan Perkotaan yang Ramah	lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah
	Masyarakat Agamais	masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama

Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut, maka dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima yang akan dijelaskan pada Tabel 3.2.

1. Mewujudkan Masyarakat **Berkualitas** yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Masyarakat **Sejahtera** melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan **Ramah**, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan **Agamais**.

Tabel 3.2.
Perumusan Penjelasan Misi

No	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	Kota Bima yang Berkualitas	Misi Pertama: Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing	Mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik secara kolektif maupun individual memiliki wawasan yang luas, cara berfikir komperhensip dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan.
2	Masyarakat Sejahtera	Misi Kedua: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan	- Adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara signifikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat disertai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu juga dengan memberikan keberpihakan/affirmatif dalam peningkatan ekonomi khususnya kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal. - Peningkatan ekonomi masyarakat akan berbasis pada potensi produk unggulan yang ada di Kota Bima baik di sektor pertanian maupun non pertanian, yang pada pengembangannya dapat memberikan lapangan kerja baru dan nilai tambah ekonomi;
3	Transparan	Misi Ketiga: Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pelaksanaan tahapan-tahapan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4	Akuntabilitas		

5	Lingkungan Perkotaan yang Ramah	Misi Keempat: Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana	Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah. Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota Bima yang masih memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana banjir, maka Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan akan difokuskan terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana;
6	Masyarakat	Misi Kelima:	Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan

No	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
	Agamais	Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais	dan ketaqwaan yang baik, mematuhi aturan hukum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman dan pengamalan yang benar dan baik.

Dengan demikian tujuan BRIDA Kota Bima sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Tujuan BRIDA Kota Bima Tahun 2024

MISI RPJMD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TUJUAN OPD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Meningkatnya Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah(IDSD)	Nilai Indeks. 3.20

3.2.2. Sasaran

Dalam kaitannya dengan tujuan lima tahunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran

yang harus dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun atau lebih. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka telah ditetapkan sasaran strategis BRIDA Kota Bima sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Sasaran BRIDA Kota Bima Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET	SATUAN
Indeks Daya Saing Daerag	3,2	Terwujudnya kebermanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	INDEKS INOVASI DAERAH	Kota sangat Inovatif (> 70)	Angka
			Persentase Riset yang dilaksanakan	75	Persen

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung misi Pemerintah Kota Bima yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Adil melalui Pembangunan yang Merata Dimana Masyarakat Memiliki Akses dan Tingkat Pelayanan Pemerintah yang Prima. BRIDA Kota Bima merumuskan tujuan yaitu Meningkatnya Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.

Perumusan Program dan Kegiatan di BRIDA Kota Bima didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah dan pengentasan kemiskinan, Rencana Kerja BRIDA Kota Bima Tahun 2025 mencakup 2 program yang terdiri dari 9 kegiatan dan 33 sub kegiatan yaitu :

A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**
I	**Penelitian,Pengembangan, Pengkajian Dan Penerapan**
1	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
2	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset
3	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
4	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
5	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
6	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
II	**Invensi Dan Inovasi**
1	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah
2	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi
3	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah
4	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
5	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.
6	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi
7	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
8	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi
9	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi
10	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi

Usulan Program dan kegiatan diharapkan dapat mendukung prioritas nasional serta diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja BRIDA Kota Bima dapat mewujudkan visi dan misi Walikota terpilih 2024-2026. Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan BRIDA Kota Bima Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 (disesuaikan dengan APBD 2025)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	05				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**4.550.750.633**	**APBD**				**5.005.825.696**
5	05	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**		persen	100	**3.529.887.033**			persen	100	**3.882.875.736**
5	05	01	201		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		**Angka Kumulatif**	**A**	**108.291.600**	**APBD**		**Angka Kumulatif**	**A**	**119.120.760**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	05	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	2	77.526.000			Dokumen	2	**85.278.600**
5	05	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	1	7.500.000	**APBD**		Dokumen	1	**8.250.000**
5	05	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	1	7.500.000			Dokumen	1	**8.250.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	05	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	Dokumen	1	7.500.000	**APBD**		Dokumen	1	**8.250.000**
5	05	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	1	765.600			Dokumen	1	**842.160**
5	05	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Laporan	4	7.500.000	**APBD**		Laporan	4	**8.250.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	05	01	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		%	**100**	**2.217.017.833**			%	**100**	**2.438.719.616**
5	05	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Orang/bulan	20	2.095.750.433	**APBD**		Orang/bulan	20	**2.305.325.476**
5	05	01	202	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	12	109.996.000			Dokumen	12	**120.995.600**
5	05	01	202	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Laporan	1	4.759.400	**APBD**		Laporan	1	**5.235.340**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	05	01	202	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	13	4.332.000			Laporan	13	**4.765.200**
5	05	01	202	05	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bima	Dokumen	1	2.180.000	**APBD**		Dokumen	1	**2.398.000**
5	05	01	203		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan tertib layanan Administrasi BMD Perangkat Daerah**		**%**	**25**	**6.885.000**			**%**	**25**	**7.573.500**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	05	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bima	Dokumen	1	6.885.000	**APBD**		Dokumen	1	**7.573.500**
5	05	01	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**%**	**100**	**742.336.600**			**%**	**100**	**816.570.260**
5	05	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	Paket	1	2.732.000	**APBD**		Paket	1	**3.005.200**
5	05	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	1	210.360.000			Paket	1	**231.396.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	05	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**Kota Bima**	Paket	1	24.000.000	**APBD**		Paket	1	**26.400.000**
5	05	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	1	93.844.600			Paket	1	**103.229.060**
5	05	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bima	Paket	1	37.400.000	**APBD**		Paket	1	**41.140.000**
5	05	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	4	24.000.000			Dokumen	4	**26.400.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	05	01	206	07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Laporan	12	350.000.000	**APBD**		Laporan	12	**385.000.000**
5	05	01	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah**		**%**	**50**	**90.644.000**			**%**	**50**	**99.708.400**
5	05	01	207	01	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bima	Unit	1	90.644.000	**APBD**		Unit	1	**99.708.400**
5	05	01	208		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**%**	**100**	**256.337.000**			**%**	**100**	**281.970.700**
5	05	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Laporan	12	76.503.000	**APBD**		Laporan	12	**84.153.300**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	05	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	12.474.000			Laporan	12	**13.721.400**
5	05	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	Laporan	1	26.000.000	**APBD**		Laporan	1	**28.600.000**
5	05	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	1	141.360.000			Laporan	1	**155.496.000**
5	05	01	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah**	**Kota Bima**	**%**	**100**	**108.375.000**	**APBD**		**%**	**100**	**119.212.500**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
5	05	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	1	57.485.000			Unit	1	**63.233.500**
5	05	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bima	Unit	1	14.890.000	**APBD**		Unit	1	**16.379.000**
5	05	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	1	36.000.000			Unit	1	**39.600.000**
5	05	03	2		**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**Persentase kebermanfaatan hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti**	Kota Bima	%	50	**1.020.863.600**	**APBD**		%	50	**1.122.949.960**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	05	03	2.01		**Penelitian,Pengembangan, Pengkajian Dan Penerapan**	**Persentase hasil kegiatan Penelitian,Pengembangan, Pengkajian Dan Penerapan**		**Persen**	**50**	**294.230.000**	APBD		**Persen**	**50**	**323.653.000**
5	05	03	201	0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Kota Bima	Laporan	12	84.220.000	**APBD**		Laporan	12	**92.642.000**
5	05	03	201	0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset		Rekomendasi	12	210.010.000	APBD		Rekomendasi	12	**231.011.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Kota Bima	Laporan	1	35.640.000	APBD		Laporan	1	39.204.000
5	05	03	201	0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan		Laporan	1	10.640.000	APBD		Laporan	1	**11.704.000**
5	05	03	201	0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,	**Kota Bima**	kegiatan	2	25.000.000	**APBD**		Kegiatan	1	**27.500.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
					kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan										
5	05	03	201	0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah		Dokumen	1	86.810.000	APBD		Dokumen	1	95.491.000
5	05	03	202		**Invensi Dan Inovasi**	**Persentase tindaklanjut hasil Invensi dan Inovasi**	Kota Bima	Persen	50	1.1007.000 000	**APBD**		Persen	55	**95.491.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	05	03	202	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah		Laporan	1	87.000.000	APBD		Laporan	**50**	64.601.960
5	05	03	202	0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Kota Bima	Laporan	4	400.000.000	APBD		Dokumen	1	33.366.300
5	05	03	202	0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah		Laporan	4	25.000.000	APBD		Laporan	1	38.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
9	05	03	204	0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Kota Bima	Laporan	4	75.000.000	APBD		Laporan	4	81.735.660
10	05	03	204	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)		Laporan	1	50.000.000	APBD		Laporan	1	55.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
10	05	03	204	00011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.		Laporan	1	200.000.000	APBD		Laporan	1	220.000.000
10	05	03	204	00012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi		Laporan	1	100.000.000	APBD		Laporan	1	110.000.000
10	05	03	204	00013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah		Sistem Informasi	1	50.000.000	APBD		Laporan	1	55.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					pengetahuan dan teknologi di daerah										
1 0	0 5	0 3	20 4	000 19	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi		Naskah	2	50.000.000	APBD		Naskah	2	55.000.000
1 0	0 5	0 3	20 4	000 21	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi		Laporan	1	50.000.000	APBD		Laporan	1	55.000.000
1 0	0 5	0 3	20 4	000 23	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi		Laporan	1	70.000.000	APBD		Laporan	1	55.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja BRIDA Kota Bima merupakan dokumen perencanaan tahunan Brida yang disusun dengan berpedoman pada Renstra 2024-2026 BRIDA Kota Bima serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Nasional (RPN) 2024-2026 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Penetapan Program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja ini didasarkan atas prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kota Bima yang arah pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan Rencana kerja ini diutamakan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan. Apabila tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja ini, Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan didasarkan pada skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kota Bima.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BRIDA Kota Bima dalam menjalankan fungsi dan tugas BRIDA Kota Bima pada Tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja BRIDA Kota Bima Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai BRIDA Kota Bima serta peran aktif stakeholder yang terlibat.

Demikian Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan RKA-PD.

Raba-Bima, Juli 2024
Kepala Badan

A.Rafik. ST
Pembina Muda (IV/a)
Nip. 19850213 199203 1 011

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2025

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BIMA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmad dan HidayahNyalah kita dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 hingga selesai.

Sehubungan dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88), serta Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja OPD Kota Bima, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selaku Perangkat Daerah (PD) Kota Bima perlu menindaklanjuti dengan menyusun Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Harapan kami Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 dan tentunya saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan guna kelancaran dalam implementasinya.

Kota Bima, Juni 2024

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Kota Bima,

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DIDI FAHDIANSYAH, ST., MT..
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19740910 200210 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 23
2.4 Review Rancangan Awal RKPD tahun 2025 24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 35
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah..... 40
3.3 Program dan Kegiatan..... 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 41

BAB V PENUTUP 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis dan terarah, mengacu pada peraturan yang ada dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja , yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan PD untuk 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan PD mempunyai arti Strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupaka acuan PD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja PD merupakan salah satu instrument untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja PD pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunanya sebagaimana tertuang dalam

Peratutan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Tujuan dan sasaran RPD pada tahun berkenaan.
3. Program dan Kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indicator kinerja hasil (outcome), indicator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukan prakiran maju.

Rencaan kerja ini bersifat dinamis, dengan kata lain akan diadakan evaluasi dan penyesuaian didasarkan pada perkembangan hasil pelaksanaanya, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka koordinasi horizontal dan vertical terus ditingkatkan, mengingat Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima adalah merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan {enyelamatan Kota Bima Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 trntang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6633);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6634);
27. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
28. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619)
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

38. Permendagri Nomer 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer 283);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1731);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
45. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor)
47. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
48. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

49. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106).
50. Peraturan Walikota Bima Nomer 68 tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 615).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Bima Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Bima dalam melaksanakan Pembangunan (merealisasikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) selama satu tahun (2025).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 adalah Untuk menjabarkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan, sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Bima yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, sebagai upaya mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima tahun 2024-2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2023
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Capaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektifitas, dan dampak kegiatan-kegiatan dalam program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan obyektif. Pengklasifikasian dilaksanakan yakni sebelum berlangsung (ex ante), pada saat berlangsung (on going), atau sesudah selesai (ex post). Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kerja yang berhasil dicapai dan kegagalan yang dihadapi terhadap pelaksanaan dari suatu kegiatan. Parameter yang digunakan sebagai pembanding dalam melaksanakan evaluasi kinerja adalah kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sbeelumnya dan atau dengan kinerja lainnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pemgukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima selama tahun 2024.

2.1.1 Realisasi Indikator Program/Kegiatan Terhadap Target

Berdasarkan realisasi indicator program/kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 maka dapat dipaparkan data-datanya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Indikator Program/Kegiatan
Terhadap Target Tahun 2023

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Keg.			Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
1					2	3	6	7	8 = (7/6)
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%
1	05	01	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Porsentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 Porsen	100 Porsen	100%
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Porsen	100 Porsen	100%
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terdata	100 Porsen	100 Porsen	100%
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Porsen	100 Porsen	100%
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 Porsen	100 Porsen	100%
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Porsen	100 Porsen	100%
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Porsen	100 Porsen	100%
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Kelurahan dalam daerah layanan WMK	31 Kel	31 Kel	100%
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Kegiatan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Laporan Masyarakat	90%	100%	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Keg.			Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
1					2	3	6	7	8 = (7/6)
1	05	04	2.03		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Presentase Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi	100%	100%	100%
1	05	04	2.05		Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Kegiatan Operasi Pencarian dan pertolongan terhadap Kondisi Membayakan Manusia	1 Keg	1 Keg	100%
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen	110%
1	05	04	2.02		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Kecamatan yang dilakukan kegiatan inspeksi peralatan kebakaran	5 Kecamatan	5 Kecamatan	100%
1	05	04	2.04		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Jumlah Kelurahan yang sudah terbentuk Relawan Kebakaran (Redkar)	41 Kel	41 Kel	100%

Berdasarkan data realisasi program dan kegiatan sesuai table diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima rata-rata telah mencapai 100% da nada beberapa kegiatan yang mampu melebihi diatas 100%.

Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan cukup efektif, antara lain :

1. Leadership atau kememimpinan yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan.
2. Koordinasi dan kerjasama antar Bidang yang baik;
3. Sistem evaluasi kinerja yang rutin dilakukan oleh Pimpinan;
4. Penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kinerja yang dilakukan dengan secepat mungkin sehingga meminimalisir dampak dari hambatan-hambatan tersebut.

Untuk kebijakan dan tindakan yang perlu dilakukan kedepannya dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan anggaran Operasional dalam rangka penanggulangan kebakaran dan non kebakaran
2. Peningkatan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana dalm penanggulangan kebakaran dan non kebakaran
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan (sertifikasi)

4. Peningkatan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terutama untuk masyarakat yang berada pada wilayah diluar WMK.

Sebagai dasar dalam penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025, maka perlu dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023. Adapun data evaluasi pelaksanaan Renja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Keg.					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Porsen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Porsentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Porsen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	02.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	100%	2 Dok.	2 Dok.	100%
1	05	01	02.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok.	2 Dok.	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Keg.					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	01	02.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok.	2 Dok.	100%
1	05	01	02.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok.	2 Dok.	100%
1	05	01	02.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok.	2 Dok.	100%
1	05	01	02.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok.	4 Dok.	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Keg.					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100%	100 Porsen	100 Porsen	100%
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/Bulan	31 Orang/Bulan	31 Orang/Bulan	31 Orang/Bulan	100%	38 Orang/Bulan	38 Orang/Bulan	100%
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	216 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	70 Dok.	100 Dok.	143%
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100%	2 Lap.	2 Lap.	100%
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42 Lap	4	4	4	100%	14 Lap.	14 Lap.	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Keg.					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Lap.	1 Lap.	100%
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100%	100 Porsen	100 Porsen	100%
1	05	01	2.03	**05**	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100%	4 Lap.	4 Lap.	100%
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Lap.	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap.	12 Lap.	100%
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terdata	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100%	100 Porsen	100 Porsen	100%
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	0 Stel	0 Stel	0%
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	2 Dok.	2 Dok.	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Keg.					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	0 Dok.	0 Dok.	0%
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100%	100 Porsen	100 Porsen	100%
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	100%	12 Lap.	12 Lap.	100%
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100%	100 Porsen	100 Porsen	100%
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Keg.					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100%	100 Porsen	100 Porsen	100%
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	100%	12 Lap.	12 Lap.	100%
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	100%	12 Lap.	12 Lap.	100%
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	100%	100 Porsen	100 Porsen	100%
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Keg.					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	22 Unit	22 Unit	100%
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Luas Wilayah yang terlayani kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	90%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	100%
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Kegiatan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Laporan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Keg.					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36 Lap.	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	100%
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	36 Dok.	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0 Dok	0%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Keg.					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	26 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Keg.					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Kelurahan Setiap Tahunnya	41 Kelurahan	41 Kelurahan	41 Kelurahan	41 Kelurahan	100%	41 Kelurahan	41 Kelurahan	100%
1	05	04	2.03		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Presentase Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	3 Dok.	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
1	05	04	2.05		Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	3 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Keg.					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	2 Lap.	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	100%
1	05	04	2.05	02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Keg.					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	35 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan Pencegahan Kebakaran dan Jumlah Laporan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	15 Dok/Lap	3 Dok/Lap	3 Dok/Lap	3 Dok/Lap	100%	5 Dok/Lap	5 Dok/Lap	100%
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Keg.					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	45 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	100%
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0 Dok	0%
1	05	04	2.02		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Keg.					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	3 Dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0 Dok	0%
1	05	04	2.04		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang dilakukan Pembinaan	2265 Orang	770 Orang	230 Orang	770 Orang	335%	705 Orang	1705 Orang	242%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Keg.					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1650 Orang	565 Orang	25 Orang	565 Orang	2260%	500 Orang	1500 Orang	300%
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	41 Kelurahan	41 Kel	41 Kel	41 Kel	100%	41 Kel	41 Kel	100%
1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	2 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0 Dok	0%

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/dTahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Keg.					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	05	04	2.05		Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	3 Lap.	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	100%
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	3 Lap.	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	100%

2.1.2 Capaian Kinerja Keuangan

Selain melakukan evaluasi terhadap indicator kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) dalam penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025 maka perlu juga dilakukan evaluasi Capaian Kinerja Keuangan. Evaluasi capaian kinerja keuangan adalah sebagai dasar untuk menilai kemampuan Perangkat Daerah dalam mengelola dan merealisasikan anggaran. Adapun realisasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Bima tahun 2023 melalui berbagai Program dan kegiatan yang terdapat pada table berikut ini:

Tabel 2.3

Realisasi Keuangan Dinas Damkar dan penyelamatan tahun 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**10.750.500,00**	**10.659.500,00**	**91.000,00**	**99,15%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.217.500,00	2.217.500,00	0,00	100,00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.108.000,00	2.108.000,00	0,00	100,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.376.500,00	1.376.500,00	0,00	100,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	100,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	100,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.804.500,00	2.713.500,00	91.000,00	96,76%
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**3.564.171.192,00**	**3.475.038.997,00**	**89.132.195,00**	**97,50%**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.444.465.692,00	3.356.353.497,00	88.112.195,00	97,44%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.356.000,00	115.444.000,00	912.000,00	99,22%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	918.000,00	918.000,00	0,00	100,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.623.500,00	1.563.500,00	60.000,00	96,30%
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	808.000,00	760.000,00	48.000,00	94,06%
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**28.568.000,00**	**28.567.700,00**	**300,00**	**100,00%**
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.568.000,00	3.568.000,00	0,00	100,00%
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000,00	24.999.700,00	300,00	100,00%
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**202.077.000,00**	**199.732.600,00**	**2.344.400,00**	**98,84%**
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	191.110.000,00	188.868.600,00	2.241.400,00	98,83%
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	967.000,00	967.000,00	0,00	100,00%
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000,00	9.897.000,00	103.000,00	98,97%
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah		**351.513.500,00**	**350.253.650,00**	**1.259.850,00**	**99,64%**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.447.500,00	19.439.500,00	8.000,00	99,96%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.696.000,00	15.696.000,00	0,00	100,00%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.820.000,00	18.201.700,00	618.300,00	96,71%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	297.550.000,00	296.916.450,00	633.550,00	99,79%
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**283.068.000,00**	**279.630.000,00**	**3.438.000,00**	**98,79%**
1	Pengadaan Mebel	283.068.000,00	279.630.000,00	3.438.000,00	98,79%
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**475.400.000,00**	**465.465.800,00**	**9.934.200,00**	**97,91%**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.160.000,00	8.040.800,00	119.200,00	98,54%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	467.240.000,00	457.425.000,00	9.815.000,00	97,90%
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**364.640.000,00**	**362.194.400,00**	**2.445.600,00**	**99,33%**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	356.970.000,00	354.554.400,00	2.415.600,00	99,32%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.670.000,00	7.640.000,00	30.000,00	99,61%
i. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		**799.742.800,00**	**791.785.430,00**	**7.957.370,00**	**99,01%**
1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.028.300,00	4.028.300,00	0,00	100,00%
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	303.687.000,00	302.187.000,00	1.500.000,00	99,51%
3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	180.417.000,00	175.872.000,00	4.545.000,00	97,48%
4	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	27.693.400,00	27.693.400,00	0,00	100,00%
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	122.820.500,00	122.820.500,00	0,00	100,00%
6	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	33.070.400,00	32.995.400,00	75.000,00	99,77%
7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	128.026.200,00	126.188.830,00	1.837.370,00	98,56%
j. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		**15.071.000,00**	**15.071.000,00**	**0,00**	**100,00%**
1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	15.071.000,00	15.071.000,00	0,00	100,00%
k. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		**99.121.100,00**	**97.541.100,00**	**1.580.000,00**	**98,41%**
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	17.509.300,00	17.509.300,00	0,00	100,00%
2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	81.611.800,00	80.031.800,00	1.580.000,00	98,06%
l. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		**39.024.000,00**	**38.494.000,00**	**530.000,00**	**98,64%**
1	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	7.704.000,00	7.704.000,00	0,00	100,00%
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	15.850.000,00	15.320.000,00	530.000,00	96,66%
3	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	15.470.000,00	15.470.000,00	0,00	100,00%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menganalisa kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima dilakukan melalui peninjauan kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan indikator yang telah ditentukan dalam Standar Pelayana Minimum (SPM) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), karena kinerja TA. 2024 belum selesai 100% maka kinerja pelayanan yang dipakai adalah hasil kinerja tahun sebelumnya, yaitu capaian SPM dan IKK Tahun Anggaran 2023.

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematik dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik dan perencanaan kinerja tahunan. Pengukuran kinerja tahun 2023 dilaksanakan terhadap kinerja realisasi aktual penetapan kinerja tahun 2023 sebagai ikhtisar rencana kinerja tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima yang diturunkan dari kebijakan program dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2024-2026. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian terhadap kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator keluaran (*output*), dan indikator hasil (*outcome*), sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Proyeksi			Catatan Analisa
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	11	12		13
1	Tingkat Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			Indikator tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang juga menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah serta serta Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM).

2.3 ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima yang baru dibentuk dan mempertimbangkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada RPD Kota Bima; sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah terdapat beberapa isu strategi.

Adapun isu strategis yang dapat diangkat dalam Renstra ini dan perlu disiapkan landasannya bagi pembangunan kedepan, yaitu:

1. Penguatan kelembagaan OPD yang tangguh dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Perkuatan data dan regulasi dasar pelaksanaan tugas;
3. Peningkatan sarana prasarana, diantaranya pembangunan pos pemadam kebakaran, dan penambahan kendaraan unit pemadam kebakaran;
4. Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
5. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
6. Peningkatan Sinergitas dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran baik dengan instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
7. Kebijakan penanggulangan kebakaran yang preventive, yaitu perubahan paradigma penanggulangan kebakaran dari responsif ke preventif, dimana penanggulangan kebakaran lebih bertitik berat di dalam pengurangan risiko, daripada merespon yang terjadi;

8. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum;
9. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, dan pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Relawan Pemadam Kebakaran);
10. Peningkatan kompensasi bagi aparatur yang memiliki risiko kerja.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan perencanaan awal yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk tahun berikutnya. Rancangan awal RKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima terdiri dari 2 Program Utama dan beberapa Kegiatan serta Sub kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima untuk Tahun 2025.

Adapun Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bima,	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5.819.998.683	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bima,	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	7.590.040.583	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima,	Porsentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	33.203.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima,	Porsentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.320.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2.382.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2.502.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima,	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2.135.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima,	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2.186.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	1.415.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	1.488.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima,	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	1.218.700	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima,	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	1.245.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	1.182.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	1.209.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima,	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	24.868.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima,	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	6.690.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima,	Prosentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 Porsen	4.665.312.683	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima,	Prosentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 Porsen	6.335.750.783	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima,	Jumlah Bulan ASN Menerima Gaji dan Tunjangan	38 Orang/Bulan	4.545.981.943	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima,	Jumlah Bulan ASN Menerima Gaji dan Tunjangan	38 Orang/Bulan	6.184.797.783	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Dok	113.433.450	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Dok	145.005.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima,	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	897.290	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima,	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	886.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima,	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Lap	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima,	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Lap	4.054.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1.008.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Bima,	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Porsen	21.626.300	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Bima,	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Porsen	19.478.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima,	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	3.679.500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima,	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	3.612.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima,	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	17.946.800	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima,	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	15.866.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bima,	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terdata	100 Porsen	3.464.700	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bima,	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terdata	100 Porsen	972.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	964.700	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	972.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	2.500.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dok	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima,	Jumlah Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Porsen	315.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima,	Jumlah Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Porsen	350.562.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima,	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima,	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	19.991.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima,	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima,	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.390.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima,	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima,	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.693.300	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	255.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	287.488.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima,	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Porsen	415.551.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima,	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Porsen	414.912.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	9.977.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	9.979.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	405.574.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	404.933.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima,	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Porsen	365.840.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima,	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Porsen	453.045.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.360.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	286.060.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	376.910.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.680.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	16.900.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima,	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima,	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	13.875.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Bima,	Jumlah Kelurahan dalam daerah layanan WMK	85%	826.218.900	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Bima,	Jumlah Kelurahan dalam daerah layanan WMK	85%	1.153.017.775	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima,	Prosentase Jumlah Kegiatan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Laporan Masyarakat	100%	559.426.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima,	Prosentase Jumlah Kegiatan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Laporan Masyarakat	100%	825.056.775	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bima,	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Lap	289.719.200	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bima,	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Lap	272.801.000	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dok	180.231.800	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dok	144.544.000	
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dok	26.475.000	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dok	27.035.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri	Kota Bima,	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	30.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri	Kota Bima,	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	345.548.000	
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kota Bima,	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Kelurahan Setiap Tahunnya	41 Kelurahan	33.000.000	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kota Bima,	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Kelurahan Setiap Tahunnya	41 Kelurahan	35.128.775	
	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kota Bima,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Lap	31.975.100	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kota Bima,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Lap	80.437.000	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Bima,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Lap	5.000.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Bima,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Lap	62.904.000	
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Bima,	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dok	16.975.100	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Bima,	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dok	16.823.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Bima,	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1 Unit	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Bima,	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1 Unit	710.000	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima,	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya dan Jumlah Laporan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	5 Dokumen	29.658.200	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima,	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya dan Jumlah Laporan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	5 Dokumen	47.325.000	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima,	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dok	7.271.200	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima,	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dok	6.410.000	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	22.387.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	40.915.000	
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Dokumen hasil kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1 Dok	30.998.000	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Dokumen hasil kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1 Dok	20.811.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan Sarpras Proteksi Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dok	20.998.000	Pendataan Sarpras Proteksi Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dok	20.811.000	
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dok	10.000.000	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dok	-	
	Investigasi Kejadian Kebakaran	Kota Bima,	Persentase Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigas	100%	25.467.500	Investigasi Kejadian Kebakaran	Kota Bima,	Persentase Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigas	100%	25.458.000	
	Investigasi Kejadian Kebakaran Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dok	25.467.500	Investigasi Kejadian Kebakaran Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dok	25.458.000	
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang dilakukan Pembinaan	755 Orang	135.906.000	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang dilakukan Pembinaan	755 Orang	141.753.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Bima,	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	550 Orang	55.150.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Bima,	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	550 Orang	53.032.000	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	41 Kelurahan	80.756.000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	41 Kelurahan	88.721.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kota Bima,	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Lap	12.788.100	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kota Bima,	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Lap	12.177.000	
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Bima,	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Lap	12.788.100	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Bima,	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Lap	12.177.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam menyusun Renja PD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Bima, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat Kelurahani, Kecamatan maupun di tingkat Kota. Dalam Musrenbang tahun 2024, ada beberapa aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sehingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus mampu memilih dan memperioritaskan usulan yang diterima dan dimasukkan dalam Renja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan menjadi perhatian Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan telaah terhadap Kementerian Dalam Negeri sebagai lintas koordinasi dan pembinaan vertikal bagi SKPD.

"Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa"

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:**
  Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
- **Meningkatkan Pelayanan Publik:**
  Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.
- **Menegakkan Demokrasi:**
  Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyakarat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

- **Menjaga Integrasi Bangsa:**
  Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Misi Kementerian Dalam Negeri:

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideology dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Dari Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri RI tersebut dijabarkan dalam renstra kementerian dalam negeri tahun 2020. Lintas koordinasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibawah pembinaan langsung dari

Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan. Sedangkan Direktorat yang menaungi kewenangan sub urusan kebakaran yaitu pada Direktorat Manajemen Penanggulangan Bancana dan Kebakaran. Rencana strategis tersebut mengarah pada program/kegiatan **Fasilitasi Pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran** dengan sasaran program (outcome) dan Sasaran kegiatan (output) sebagai indikator kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Program, Kegiatan, sasaran dan Indikator Sub Urusan Bencana dan Kebakaran

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program/ sasaran Kegiatan	Indikator
1240	**Fasilitasi Pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran**	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana secara terintegrasi	Jumlah Daerah yang menerapkan SPM sub urusan bencana
		Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Bidang Bencana
		Jumlah Daerah yang mendapatkan Bimbingan teknis, dimonev, dan melapor SPM bidang trantibumlinmas
		Penerapan pengintegrasian dan pengarustamaan pengurangan risiko bencana di daerah
		Jumlah Daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standart
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen penanggulangan kebakaran sesuai standart	Jumlah daerah yang menerapkan SPM sub urusan kebakaran.

Dalam tabel tersebut diatas, pada program **Fasilitasi Pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran** dengan sasaran program kedua, yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen penanggulangan kebakaran sesuai standart memiliki indikator keberhasilan program adalah jumlah daerah yang menerapkan SPM sub urusan kebakaran. Untuk mengimplemenasikan manajemen penanggulangan kebakaran sesuai standart haruslah memenuhi kecukupan unsur dalam manajemen. Lima unsur manajemen atau 5 M tersebut antara lain: Man, Money, Machine, Matherials,

dan Method. Analisis kajian kebutuhan terhadap unsur 5 M ini perlu dilakukan secara terukur ditinjau dari wilayah manajemen kebakaran yang telah ditetapkan dan kondisi geografis pada daerah.

Berdasarkan permendagri nomer 31 tahun 2019, arah kebijakan penanggulangan kebakaran dalam RKPD tahun 2020 dapat terlihat dari table sebagai berikut:

Tabel 3.1

Arah Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Dalam RKPD 2025

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		**Tujuan dan Sasaran**	**Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Pemda Dalam Menyusun RKPD 2025**
Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	**Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**		
Penanggulangan Bencana	Percepatan pemenuhan SPM Bidang Trantibum Linmas di daerah meliputi: a. Sub Urusan Bencana; b. Sub Urusan Kebakaran.	Tersediany a layanan dasar sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran bagi warga Negara yang wajib diberikan pelayanan sesuai kriteria	Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Kebakaran melalui layanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran yang mencakup: a. Layanan respons cepat *(response time)* penanggulangan kejadian Kebakaran b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian Kebakaran c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi d. Layanan pemberdayaan masyarakat/ relawan kebakaran; dan e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Sementara dalam Permendagri Nomer 33 Tahun 2020, arah kebijakan penganggaran kebakaran dalam APBD Tahun 2025 diharapkan dalam rangka Peningkatan kinerja daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, yang diprioritaskan untuk:

a. Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
b. Pengadaan alat pelindung diri Petugas Pemadam Penyelamatan;
c. Pelatihan Petugas Kebakaran dan Penyelamatan;
d. Peningkatan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan piket Pemadam Kebakaran
e. Pelaksanaan kegiatan inspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran
f. Pelaksanaan kegiatan investigasi pasca kejadian kebakaran

g. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran
h. Pembinaan relawan pemadam kebakaran
i. Sosialisasi Kebijakan, pemetaan, dan pemutakhiran daerah rawan kebakaran;
j. Pengelolaan Data dan Informasi kebakaran; dan
k. Implementasi jabatan fungsional pemadam kebakaran tingkat ketrampilan dan keahlian di kabupaten/Kota.

Jika meninjau Renstra K/L, arahan Menteri Dalam Negeri dalam Permendagri Nomer 31 tahun 2019 dan permendagri nomer 33 tahun 2020 tersebut diatas pelayanan dasar sub urusan kebakaran di Kota Bima memiliki faktor-faktor penghambat sebagai berikut:

1. Turunan regulasi belum tersedia.
2. Sumber Daya Manusia yang tersertifikasi masih sangat terbatas.
3. Kebijakan Anggaran belum tercukupi.
4. Sarana dan Prasarana belum tercukupi.
5. Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap pencegahan kebakaran.

Faktor-faktor pendorong pelayanan dasar wajib sub urusan kebakaran di Kota Bima antara lain:

1. Dorongan dari K/L untuk kemandirian manajemen penanggulangan kebakaran.
2. Perkembangan Kota yang semakin padat menuntut perencanaan sistem proteksi kebakaran lingkungan harus dilaksanakan secepatnya.
3. Tersedianya bimtek/diklat untuk peningkatan kapasitas aparatur.
4. Pelaksanaan Sosialisasi memberi edukasi kepada masyarakat dan dunia usaha.
5. Tersedianya sarana dan prasarana.

3.1.2. Telaahan Renstra Provinsi

Pada Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) lintas koordinasi pelayanan wajib dasar sub urusan kebakaran terdapat pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. NTB.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemetaan daerah rawan kebakaran. Sedangkan dalam Permendagri Nomer 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota, pemerintah memiliki

kewenangan dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan SPM sub urusan kebakaran pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Renja merupakan pedoman perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan PD secara rinci. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyiapkan Renja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra PD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3.2.1 Tujuan dan Prioritas

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 1 (Satu) tahun mendatang yaitu "Terlindunginya Masyarakat dari bahaya kebakaran dan Non Kebakaran.

Sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima yang dicapai dalam 3 (Tiga) Tahun sesuai dengan RPD dan Rnstra tahun 2024-2026 adalah **Peningkatan Cakupan Layanan Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**, dengan indikator "**Luas Wilayah yang terlayani kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran"**.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Utama SKPD)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Terlindunginya Masyarakat dari bahaya kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Peningkatan Cakupan Layanan Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Luas Wilayah yang terlayani kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Tabel 3.3

Sasaran Perangkat Daerah serta indikator dan target

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Utama SKPD)	Target Kinerja Pada Tahun		
			2024	2025	2026
1	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Peningkatan Cakupan Layanan Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Luas Wilayah yang terlayani kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	80%	85%	90%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2024 berdasarkan evaluasi pelaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa sub kegiatan yang belum dimasukan dalam Renja tahun sebelumnya dan ada beberapa sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan tersebuut dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.4

Faktor penghambat pelaksanaan sub kegiatan tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Faktor Penyebab
1.	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Belum adanya tenaga yang bersertifikat yang dapat melaksanakan investigasi kejadian Kebakaran
2.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Keterbatasan Anggaran dan belum adanya MoU dengan Pihak Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan Kerjasama penanggulangan Kebakaran
3.	Penilaian Sarpras Proteksi Kebakaran	Keterbatasan Anggaran serta belum adanya tenaga yang bersertifikat Inspektur yang bias melakukan Inspeksi dan penilaian Sarpras Proteksi Kebakaran
4.	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Belum adanya kerjasama dengan pihak masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran
5.	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keterbatasan Anggaran serta belum adanya tenaga yang bersertifikat Investigator yang bias melakukan penanganan Bahan Berbahaya beracun

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Renstra maupun Renja masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPD dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima.

Tabel 3.5

Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Sasaran	Nama Program/Kegiatan
1	2	3
1	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

No.	Sasaran	Nama Program/Kegiatan
1	2	3
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1	Peningkatan Cakupan Layanan Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri
		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
		Investigasi Kejadian Kebakaran
		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
		Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

No.	Sasaran	Nama Program/Kegiatan
1	2	3
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Kebakaran
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
		Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Secara garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan di atas, berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima tahun 2024 melaksanakan 2 program dan 14 kegiatan yang terbagi dalam 2 urusan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 1 Program dengan 7 kegiatan dan 24 sub kegiatan rutin yang mendukung program/kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari 2 program dengan 7 kegiatan dan 15 sub kegiatan.

b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan ;

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kota Bima sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kota Bima dan melingkupi semua Kelurahan.

c. Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah sebesar Rp. 6.646.217.583,00 dan prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sebesar Rp. 9.037970.726,00.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Renstra maupun Renja masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPD dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima.

Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; Pada bagian ini dipaparkan juga rekapitulasi program dan kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan prioritas pembangunan, sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bima,	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5.819.998.683		100%	6.142.021.751
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima,	Porsentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	33.203.200		100%	34.101.225
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2.382.700		2 Dok	2.501.835
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima,	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2.135.100		2 Dok	2.241.855
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	1.415.600		2 Dok	1.486.380
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima,	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	1.218.700		2 Dok	1.279.635

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	1.182.400		2 Dok	1.241.520
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima,	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	24.868.700		4 Lap	25.350.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima,	Prosentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 Porsen	4.665.312.683		100 Porsen	4.827.247.276
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima,	Jumlah Bulan ASN Menerima Gaji dan Tunjangan	38 Orang/Bulan	4.545.981.943		38 Orang/Bulan	4.700.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Dok	113.433.450		72 Dok	119.105.122
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima,	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	897.290		2 Lap	942.154
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima,	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Lap	4.000.000		14 Lap	6.000.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1.000.000		1 Dok	1.200.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Bima,	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Porsen	21.626.300		100 Porsen	22.707.615
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima,	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	3.679.500		4 Lap	3.863.475
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima,	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	17.946.800		12 Lap	18.844.140
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bima,	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terdata	100 Porsen	3.464.700		100 Porsen	4.012.935
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	964.700		2 Dok	1.012.935
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	2.500.000		1 Dok	3.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima,	Jumlah Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Porsen	315.000.000		100 Porsen	375.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima,	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000		12 Paket	25.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima,	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000		12 Paket	25.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima,	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000		12 Paket	25.000.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	255.000.000		12 Lap	300.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima,	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Porsen	415.551.800		100 Porsen	437.852.700
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	9.977.800		12 Lap	12.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	405.574.000		12 Lap	425.852.700
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima,	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Porsen	365.840.000		100 Porsen	441.100.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.100.000		1 Unit	39.100.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	286.060.000		7 Unit	350.000.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.680.000		20 Unit	17.000.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima,	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	25.000.000		1 Unit	35.000.000
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Bima,	Jumlah Kelurahan dalam daerah layanan WMK	85%	826.218.900		85%	2.895.948.975
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima,	Prosentase Jumlah Kegiatan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Laporan Masyarakat	100%	559.426.000		100%	2.406.708.100
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bima,	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Lap	289.719.200		12 Lap	320.572.350
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dok	180.231.800		12 Dok	208.337.000
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Bima,	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dok	26.475.000		1 Dok	27.798.750

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri	Kota Bima,	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	30.000.000		2 Unit	1.800.000.000
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kota Bima,	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Kelurahan Setiap Tahunnya	41 Kelurahan	33.000.000		41 Kelurahan	50.000.000
	Investigasi Kejadian Kebakaran	Kota Bima,	Persentase Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigas	100%	25.467.500		100%	26.740.875
	Investigasi Kejadian Kebakaran Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dok	25.467.500		1 Dok	26.740.875
	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kota Bima,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Lap	31.975.100		1 Lap	110.000.000
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Bima,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Lap	5.000.000		1 Lap	10.000.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Bima,	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dok	16.975.100		1 Dok	75.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Bima,	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1 Unit	10.000.000		1 Unit	25.000.000
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima,	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya dan Jumlah Laporan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	5 Dokumen	29.658.200		5 Dokumen	60.000.000
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima,	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dok	7.271.200		1 Dok	10.000.000
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	22.387.000		10 Orang	50.000.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Dokumen hasil kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1 Dok	30.998.000		1 Dok	45.000.000
	Pendataan Sarpras Proteksi Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dok	20.998.000		1 Dok	25.000.000
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dok	10.000.000		1 Dok	20.000.000
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang dilakukan Pembinaan	755 Orang	135.906.000		755 Orang	232.500.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Bima,	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	550 Orang	55.150.000		550 Orang	75.000.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Bima,	Jumlah Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	41 Kelurahan	80.756.000		41 Kelurahan	157.500.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kota Bima,	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Lap	12.788.100		1 Lap	15.000.000
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Bima,	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Lap	12.788.100		1 Lap	15.000.000

BAB V

PENUTUP

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima tahun 2025 yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima tahun 2024 s/d 2026 ini dimaksudkan agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan masyarakat yaitu Terlindunginya Masyarakat dari bahaya kebakaran dan Non Kebakaran pada tahun 2025.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima serta seluruh aparatnya diharapkan dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Bima dalam rangka pembangunan daerah dan memberikan Perlindungan bagi Masyarakat serta mampu menciptakan *good governance* di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima.

Kota Bima, Juni 2024

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan Kota Bima

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DIDI FAHDIANSYAH, ST., MT.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740910 200210 1 001

PEMERINTAH KOTA BIMA

RENJA
RENCANA KERJA 2024



DINAS PERTANIAN

Jalan Soekarno-Hatta No. 2Raba-Bima 84115
Telp/Fac. (0374) 44085 Website: pertanian.bimakota.go.id e-mail : dispertannakkobi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2024 telah selesai disusun.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2024 merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2024-2026 yang akan dititikberatkan pada pemantapan kebijakan dan program yang telah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran akhir sektor pertanian di tahun 2024 dari periodisasi RPD Kota Bima 2024-2026.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian terutama sub sektor pertanian, peternakan dan perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kota Bima, maka Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja tahun 2024 ini disampaikan ucapan terima kasih.

Raba-Bima, Agustus 2023

Kepala SKPD,

PEMERINTAH KOTA DINAS PERTANIAN BIMA

IR. H. SARAFUDDIN, M.M.
NIP. 19640715 199203 1 017

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistimatika Penulisan 4

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra SKPD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 49
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 68
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 76

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 78
3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi 82
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 90
3.4. Program dan Kegiatan 91

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 92

BAB V. PENUTUP 111

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 1 huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD menyebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Awal RKPD mencakup Penelaahan dokumen Rancangan Awal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2024 berisikan target kinerja yang hendak dicapai dan penganggaran kegiatan yang dibangun dari rancangan awal SKPD berupa uraian kegiatan yang bersifat *top down* (Rancangan Awal SKPD) dan usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang (*bottom up*) yang terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Kota Bima tahun 2024, bersinergi dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta harus dijadikan sebagai standar dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pertanian Kota Bima dan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kota Bima.

Pembangunan pertanian kedepannya harus selalu bertumpu pada pendekatan sistim agribisnis yaitu keseluruhan kinerja sistim usaha yang saling terkait, saling bergantung dan saling mempengaruhi mulai dari sub sistem hulu, sub sistem usaha tani (*off farm*) sub sistim hilir (*on farm*) dan sub sisitem penunjang yang dikembangkan secara simultan, serasi dan seimbang.

Pemerintah Kota Bima telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang merupakan acuan dan tolak ukur pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam rangka mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju Pemilihan Umum Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bima yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, strategi dan arah pembangunan pertanian Kota Bima khususnya pada sektor pertanian diarahkan dalam rangka ***"Mewujudkan Kota Bima yang Sejahtera, maju dan Mandiri pada Tahun 2028"*** guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani dan peternak di Kota Bima.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di propinsi NTB (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima.
20. Peraturan Walikota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018 – 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan rencana program/kegiatan SKPD Dinas Pertanian Kota Bima dalam kurun waktu satu tahun yang akan datang, sehingga arah dan tujuan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hotikultura, Perkebunan dan Peternakan dapat konsisten dan berkesinambungan. Dimana Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 ini telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Bima waktu dimulai sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka pendek yang menjabarkan Renstra Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pertanian Kota Bima sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima;
2. Sebagai salah satu upaya merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis serta perumusan program dan kegiatan pembangunan pada sektor pertanian dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi;

3. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah, yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pertanian Kota Bima dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024;
4. Sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Dinas Pertanian tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan program/kegiatan tahun 2024, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di tahun 2024;
2. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Pertanian Kota Bima;
3. Disamping itu RENJA ini merupakan bahan informasi bagi instansi terkait lainnya dalam merumuskan program-program pembangunan secara terpadu antara instansi di pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang
b. Landasan Hukum
c. Maksud dan Tujuan
d. Sistimatika Penulisan

II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
b. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
c. Program dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2024 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima.

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Pertanian Kota Bima mendapat alokasi anggaran sebesar *Rp.* 12.844.908.059,00 *(dua belas milyar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu lima puluh sembilan rupiah)* terdiri dari:

1.	Belanja Operasi	= Rp.	**12.819.162.964,00**
	1.1. Belanja Pegawai	= Rp.	10.853.816.708,00
	1.2. Belanja Barang dan Jasa	= Rp.	1.965.346.256,00
2.	Belanja Modal	= Rp.	**25.745.095,00**

Melalui fasilitasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2022 telah mendorong masyarakat petani dan peternak di Kota Bima, baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan sasaran program maupun kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2022, maka evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2022 dengan realisasi yang diperoleh pada akhir tahun anggaran, komponen yang diukur kinerjanya adalah kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Adapun sasaran strategis Dinas Pertanian Kota Bima yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi pertanian, meningkatnya produksi perkebunan,

dan meningkatnya produksi peternakan dengan beberapa indikator yang dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	***Meningkatnya Produksi Pertanian***	***Persentase pertumbuhan produksi pertanian:***	***%***	***2,97***	**3,04**	**111,79**
		- Padi (GKP)	Ton	29.728,00	20.460,00	68,82
		- Jagung (PK)	Ton	31.835,00	49.193,00	154,52
		- Kedelai (BK)	Ton	200,00	132,00	66,00
		- Kacang Tanah (BK)	Ton	384,00	3,00	0,78
		- Kacang Hijau (BK)	Ton	22,00	47,00	213,64
		- Ubi Kayu	Ton	1.181,00	-	0,00
		- Ubi Jalar	Ton	26,00	1.015,00	3.903,85
Jumlah			**Ton**	**63.376,00**	**70.850,00**	**4.407,61**
2.	***Meningkatnya Produksi Perkebunan***	***Persentase pertumbuhan produksi perkebunan:***	***%***	***2,17***	***2,31***	**93,09**
		- Tembakau	Ton	0,83	2,05	246,99
		- Jambu Mente	Ton	145,79	138,77	95,18
		- Kelapa	Ton	22,05	16,20	73,47
Jumlah			**Ton**	**168,67**	**157,02**	**415,64**
3.	***Meningkatnya Produksi Peternakan***	***Persentase pertumbuhan produksi peternakan:***	***%***	***1,10***	***1,30***	**238,78**
		- Daging	Ton	508,55	1.214,00	238,72
		- Kulit	Ton	55,72	109,29	196,14
		- Telur	Ton	50,65	145,00	286,28
Jumlah			**Ton**	**614,92**	**1.468,29**	**721,14**

Keterangan : Produksi Pertanian Tanaman Pangan adalah Angka Sementara Tahun 2022.

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kota Bima hanya produksi peternakan yang melampaui target dari target 1,10% meningkat menjadi 1,30%. Sementara produksi pertanian yang dibangun oleh 7 (tujuh) komoditas strategis tanaman pangan mengalami peningkatan produksi dari target 2,97% naik menjadi 3,04%. Pertumbuhan produksi perkebunan juga mengalami peningkatan yang cukup berarti dari target 2,17% dan terealisasi 2,31%.

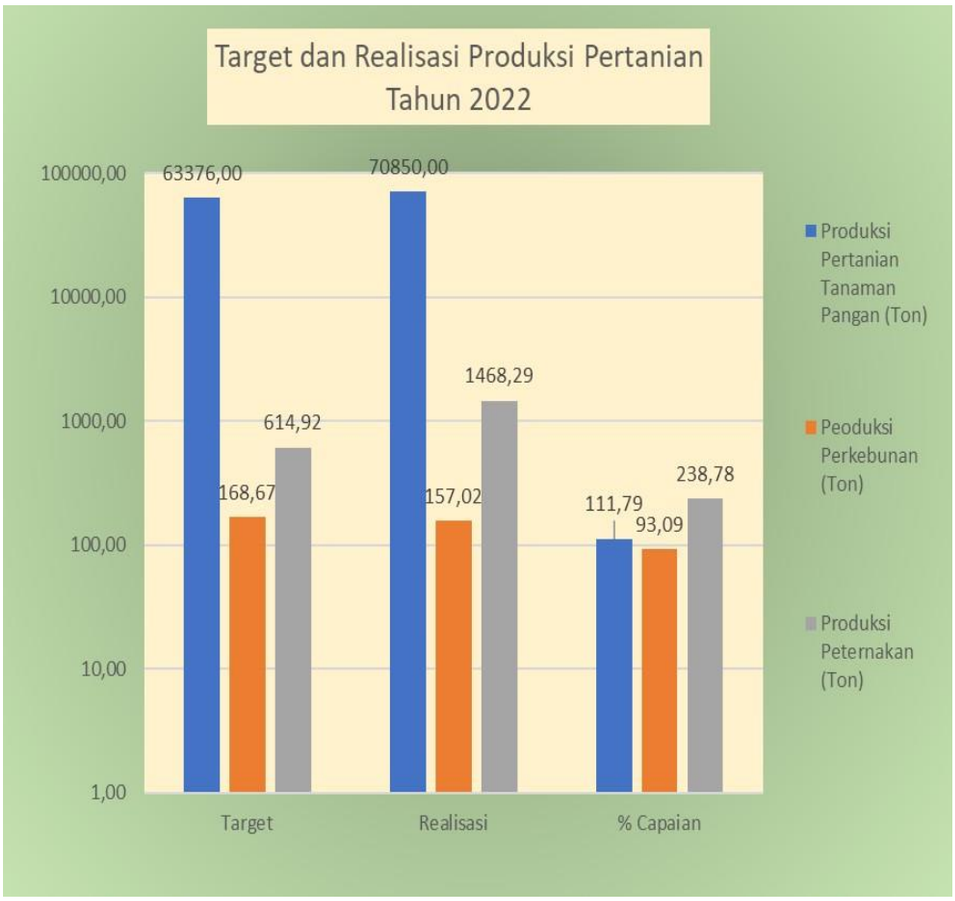


Grafik 1. Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Dilihat dari pencapaian produksi masing-masing sub sektor lebih rinci dapat dijelaskan bahwa:

Lebih rinci dapat dijelaskan bahwa:

1. Realisasi peningkatan produksi pertanian sebesar 70.850 ton dari target 63.376 ton atau terdapat peningkatan produksi sebesar 7.474 ton dengan tingkat capaian sebesar 111,79%. Pencapaian tersebut sebagian besar disumbang oleh komoditi jagung, sementara komoditi padi, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan ubi kayu tidak cukup memberikan kontribusi yang siginifikan.
2. Realisasi peningkatan produksi perkebunan sebesar 157,02 ton dari target 168,67 ton atau terjadi penurunan produksi sebesar 11,65 ton dengan capaian sebesar 93,09%. Kontribusi terbesar disumbang oleh komoditi tembakau, sementara jambu mete dan kelapa mengalami pertumbuhan minus.
3. Realisasi peningkatan produksi peternakan sebesar 1.468,29 ton dari target 614,92 ton atau terjadi peningkatan sebesar 853,37 ton dengan tingkat capaian 238,78%. Semua komoditi peternakan memberikan sumbangan yang baik terhadap peningkatan produksi sub sektor peternakan.



Grafik 2. Target dan Realiasi Produksi Pertanian Tahun 2022

Pencapaian sasaran strategis "*Meningkatnya Produksi Pertanian*" tahun 2022 sudah mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 111,79% dimana komoditi jagung dengan luas tanam 8.565 ha (dari total luas tanam 13.809 ha (62,76%) adalah kontributor tertinggi yakni sebesar 154,52% dari 5 komoditi strategis sedangkan untuk komoditi lainnya seperti padi, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar produksinya belum melebihi target, hal ini disebabkan oleh besarnya animo masyarakat untuk menanam komoditi jagung yang dikarenakan oleh harganya yang menjanjikan dan adanya bantuan benih dari pusat dalam mendukung peningkatan produksi jagung.

Tingginya permintaan pasar atas komoditi jagung merangsang sebagian besar petani mengusahakan komoditi ini dengan luas tanam yang lebih besar dibandingkan dalam tiga tahun terakhir terutama pada lahan-lahan tegalan dan ladang/huma di Kota Bima. Peningkatan luas tanam komoditi jagung menjadi faktor pembatas utama penurunan provitas komoditi lain yang diusahakan pada areal ladang dan tegalan/huma, baik padi ladang maupun tanaman pangan lainnya. Faktor lain yang ikut memberikan sumbangan terhadap penurunan beberapa komoditi tanaman pangan adalah perubahan cuaca dan iklim.

Produksi padi sebesar 20.460 ton tahun 2022 dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan beras masyarakat masih terjadi surplus sebesar 4.719,63

ton dengan asumsi rata-rata konsumsi perkapita/pertahun sebesar 114,6 kg/kapita/tahun (*Biro Humas dan Informasi Publik Kementan RI Tanggal 28 September 2017*) dan jumlah penduduk Kota Bima sebesar 149.567 jiwa.

Pencapaian sasaran strategis "*Meningkatnya Produksi Perkebunan*" tahun 2022 dengan indikator kinerja meningkatnya produksi perkebunan belum mencapai target yang ditentukan yakni hanya 157,02 ton dari target 168,67 ton atau dengan persentase capaian sebesar 99,09%. Komoditi tembakau memberikan sumbangan terbesar dari realisasi pencapaian target kinerja yakni sebesar 59,42% dengan capaian sebesar 246,99%, hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran petani tembakau untuk menambah luas tanam akibat adanya permintaan pasar khususnya tembakau lokal.

Peningkatan produksi komoditi perkebunan secara keseluruhan tidak cukup siginifikan akibat: (1) jumlah pohon yang berproduksi semakin berkurang, (2) pembalakan lahan, (3) belum dilakukan peremajaan tanaman jambu mete dan kelapa pada areal yang lebih luas, (4) berkurangnya animo masyarakat dalam menanam tanaman tembakau kemudian ditambah lagi dengan (5) bertambahnya animo masyarakat terhadap komoditi jagung yang mempengaruhi penurunan penggunaan sumberdaya atau input produksi terhadap komoditi perkebunan.

Pencapaian sasaran strategis "*Meningkatnya Produksi Peternakan*" dengan indikator kinerja meningkatnya produksi peternakan sudah melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 238,78%. Hal tersebut dimungkinkan karena (1) realisasi Inseminasi Buatan melampaui target, (2) meningkatnya animo masyarakat untuk memelihara ternak unggas akibat meningkatnya permintaan pasar akan daging unggas, (3) meningkatnya penggunaan bibit unggul dan pakan berkualitas, dan (4) meningkatnya teknik budidaya dan penerapan teknologi.

Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. **12.661.123.910,00** atau (98,57%) dari total rencana anggaran sebesar Rp. **11.884.907.859,00**, uraian kegiatan beserta target dan realisasi anggaran serta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Program dan Kegiatan Pada Tahun Angaran 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Kegiatan	Selisih +/-	% Realisasi
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.848.952.168,00**	**11.675.793.210,00**	**173.158.958,00**	**98,54**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**87.064.000,00**	**86.716.300,00**	**347.700,00**	**99,60**
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.616.000,00	66.377.300,00	238.700	99,64
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	240.000,00	240.000,00	-	100,00
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.019.000,00	2.019.000,00	-	100,00
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.174.000,00	1.174.000,00	-	100,00
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.429.000,00	6.354.000,00	75.000	98,83
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.086.000,00	8.052.000,00	34.000	99,58
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.890.534.708,00**	**10.735.230.787,00**	**155.303.921**	**98,57**
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.668.536.708,00	10.513.616.787,00	154.919.921	98,55
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	219.125.000,00	218.741.000,00	384.000	99,82
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.569.000,00	1.569.000,00	-	100,00
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	898.000,00	898.000,00	-	100,00
2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	406.000,00	406.000,00	-	100,00
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5.214.000,00**	**5.214.000,00**	**-**	**100,00**
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.214.000,00	5.214.000,00	-	100,00
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15.342.000,00**	**15.342.000,00**	**-**	**100,00**
4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.342.000,00	15.342.000,00	-	100,00
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**370.600.060,00**	**363.779.898,00**	**6.820.162**	**98,16**
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	696.000,00	696.000,00	-	**100,00**
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.880.690,00	25.863.450,00	17.240	99,93
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.263.700,00	7.930.000,00	333.700	95,96
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.451.670,00	55.746.200,00	4.705.470	92,22

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Kegiatan	Selisih +/-	% Realisasi
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	-	-
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.588.000,00	270.824.248,00	1.763.752	99,35
5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.720.000,00	2.720.000,00	-	100,00
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**426.824.900,00**	**418.717.350,00**	**8.107.550**	**98,10**
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.844.900,00	71.257.350,00	587.550	99,18
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.980.000,00	347.460.000,00	7.520.000	97,88
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.372.500,00**	**50.792.875,00**	**2.579.625**	**95,17**
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.882.500,00	39.302.875,00	2.579.625	93,84
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.490.000,00	11.490.000,00	-	100,00
II	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**450.276.600,00**	**448.878.900,00**	**1.397.700**	**99,69**
8	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**237.919.300,00**	**237.258.400,00**	**660.900**	**99,72**
8.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	78.819.300,00	78.296.400,00	522.900	99,34
8.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	159.100.000,00	158.962.000,00	138.000	99,91
9	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**13.060.800,00**	**13.059.000,00**	**1.800**	**99,99**
9.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	6.979.900,00	6.979.000,00	900	99,99
9.2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	6.080.900,00	6.080.000,00	900	99,99
10	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**39.196.500,00**	**38.836.500,00**	**360.000**	**99,08**
10.1	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	1.080.000,00	720.000,00	360.000	66,67
10.2	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	38.116.500,00	37.216.500,00	-	100,00
11	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**160.100.000,00**	**159.725.000,00**	**375.000**	**99,77**
11.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	160.100.000,00	159.725.000,00	375.000	99,77

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Kegiatan	Selisih +/-	% Realisasi
III	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**20.808.700,00**	**20.558.700,00**	**250.000**	**98,80**
12	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**20.808.700,00**	**20.558.700,00**	**250.000**	**98,80**
12.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	20.808.700,00	20.378.700,00	250.000	98,80
IV	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**198.718.591,00**	**196.815.100,00**	**1.903.491**	**99,04**
13	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**143.133.836,00**	**141.514.200,00**	**1.619.636**	**98,87**
13.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	128.795.830,00	127.177.200,00	1.618.630	98,74
13.2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.338.006,00	14.337.000,00	1.006	99,99
14	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**10.324.355,00**	**10.321.500,00**	**2.855**	**99,97**
14.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	10.324.355,00	10.321.500,00	2.855	99,97
15	**Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**45.260.400,00**	**44.979.400,00**	**281.000**	**99,38**
15.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	17.610.500,00	17.610.500,00	-	100,00
15.2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	27.649.900,00	27.368.900,00	281.000	98,98
V	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**189.517.000,00**	**187.606.000,00**	**1.911.000**	**98,99**
16	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**189.517.000,00**	**187.606.000,00**	**1.911.000**	**98,99**
16.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	45.991.800,00	45.913.400,00	78.400	99,83
16.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	143.525.200,00	141.692.600,00	1.832.600	98,72
VI	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**46.367.800,00**	**43.388.000,00**	**2.979.800**	**93,57**
17	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**46.367.800,00**	**43.388.000,00**	**2.979.800**	**93,57**
17.1	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	14.498.800,00	13.958.000,00	800	99,99
17.2	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	31.869.000,00	28.890.000,00	2.979.000	90,65

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Kegiatan	Selisih +/-	% Realisasi
VIII	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**90.267.000,00**	**89.704.000,00**	**563.000**	**99,38**
18	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**90.267.000,00**	**89.704.000,00**	**563.000**	**99,38**
18.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	45.810.000,00	45.809.000,00	1.000	100,00
18.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	17.500.100,00	17.500.100,00	-	100,00
18.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	17.082.000,00	16.880.000,00	202.000	98,82
18.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	9.874.900,00	9.514.900,00	360.000	96,35
Jumlah Keseluruhan		**12.844.907.859,00**	**12.661.123.910,00**	**183.784.149**	**98,57**

Tahun 2022 Dinas Pertanian Kota Bima mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 12.844.907.859,00 yang bersumber dari APBD Kota Bima dan perkiraan capaian realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 12.661.123.910,00 atau sebesar 98,57%. Dan untuk capaian kinerja sesuai target yang telah ditentukan dalam Sasaran Strategis Dinas Pertanian adalah tercapai dengan target rata-rata sebesar 100,00%.

Berikut akan disampaikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8 = (7/6)*	*9*		*10=(5+7+9)*		*11=(10/4)*
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian kinerja urusan pemerintah daerah														
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun/direview	20	dokumen	4	dokumen	8	dokumen	4	dokumen	50,00	4	dokumen	12	dokumen	60
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	5	dokumen	1	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	50,00	1	dokumen	3	dokumen	60
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun	5	dokumen	1	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	50,00	1	dokumen	3	dokumen	60
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	5	dokumen	1	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	50,00	1	dokumen	3	dokumen	60
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun	5	dokumen	1	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	50,00	1	dokumen	3	dokumen	60
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	5	laporan	1	laporan	2	laporan	1	laporan	50,00	1	laporan	3	laporan	60
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja Unit Pelayanan Terpadu Daerah	5	tahun	1	tahun	2	tahun	1	tahun	50,00	1	tahun	3	tahun	60
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8 = (7/6)*	*9*		*10=(5+7+9)*		*11=(10/4)*
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya haji dan tunjangan ASN	5	tahun	1	tahun	2	tahun	1	tahun	50,00	1	tahun	3	tahun	60
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan sesuai ketentuan	90	laporan	18	laporan	36	laporan	18	laporan	50,00	18	laporan	54	laporan	60
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun tepat waktu	5	dokumen	1	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	50,00	1	dokumen	3	dokumen	60
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tepat wakti	90	laporan	18	laporan	36	laporan	18	laporan	50,00	18	laporan	54	laporan	60
3	27	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran tepat waktu	5	dokumen	1	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	50,00	1	dokumen	3	dokumen	60
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi BMD														
3	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terdokumentasinya barang milik daerah dengan tertib dan baik	5	dokumen	1	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	50,00	1	dokumen	3	dokumen	60
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya data administrasi perangkat daerah														
3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan peningkatan kinerja pegawai	100	%	20	%	40	%	20	%	50,00	20	%	60	%	60
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	paket	1	paket	2	paket	1	paket	50,00	1	paket	3	paket	60

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8 = (7/6)*	*9*		*10=(5+7+9)*		*11=(10/4)*
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan komputer dan perlengakapan kantor lainnya	50	unit	10	unit	20	unit	10	unit	50,00	10	unit	30	unit	60
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kanto	Tersedian peralatan/bahan pembersih dan makan minum kantor	5	tahun	1	tahun	2	tahun	1	tahun	50,00	1	tahun	3	tahun	60
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya layanan cetakan dan penggandaan kantor	5	paket	1	paket	2	paket	1	paket	50,00	1	paket	3	paket	60
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	60	bulan	12	bulan	24	bulan	12	bulan	50,00	12	bulan	36	bulan	60
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultansi aparatur	60	bulan	12	bulan	24	bulan	12	bulan	50,00	12	bulan	36	bulan	60
3	27	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya bahan dan peralatan penataan arsip kantor	5	dokumen	1	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	50,00	1	dokumen	3	dokumen	60
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		0			0				
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	35	rekening	7	rekening	14	rekening	7	rekening	50,00	7	rekening	21	rekening	60
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	225	orang	45	orang	90	orang	45	orang	50,00	45	orang	135	orang	60
3	27	01	2.09		3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8 = (7/6)*	*9*		*10=(5+7+9)*		*11=(10/4)*
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak STNK/pajak kendaraan dinas/operasional yang dibayar	150	unit	30	unit	60	unit	30	unit	50,00	30	unit	90	unit	60
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	100	%	20	%	40	%	20	%	50,00	20	%	60	%	60
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Cakupan penyediaan sarana pertanian sesuai anjuran			-		-		-			-				
3	27	2	201		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan pemanfataan sarana pertanian sesuai anjuran	100	%	20	%	40	%	20	%	50,00	20	%	60	%	60
3	27	2	201	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan yang mengikuti Bimbingan Teknis budidaya sesuai anjuran	230	orang	46	orang	92	orang	46	orang	50,00	46	orang	138	orang	60
						Penambahan luas tanam komoditi:														
						Cabai rawit	250	ha	50	ha	100	ha	50	ha	50,00	50	ha	150	ha	60
						Kacang panjang	250	ha	50	ha	100	ha	50	ha	50,00	50	ha	150	ha	60
						Porang	25	ha	5	ha	10	ha	5	ha	50,00	5	ha	15	ha	60
						Mete	500	ha	100	ha	200	ha	100	ha	50,00	100	ha	300	ha	60
						Kelapa Genjah	75	ha	15	ha	30	ha	15	ha	50,00	15	ha	45	ha	60
						Tomat	100	ha	20	ha	40	ha	20	ha	50,00	20	ha	60	ha	60
						Durian	250	ha	50	ha	100	ha	50	ha	50,00	50	ha	150	ha	60

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8 = (7/6)*	*9*		*10=(5+7+9)*		*11=(10/4)*
						Sawo	125	ha	25	ha	50	ha	25	ha	50,00	25	ha	75	ha	60
3	27	2	201	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan yang mengikuti Bimbingan Teknis budidaya sesuai anjuran	230	orang	46	orang	92	orang	46	orang	50,00	46	orang	138	orang	60
						Tersalurnya bantuan mesin pengolahan pertanian	150	unit	30	unit	60	unit	30	unit	50,00	30	unit	90	unit	60
						Meningkatnya luas tanam komoditi tanaman pangan	50000	ha	10000	ha	20000	ha	10000	ha	50,00	10000	ha	30000	ha	60
3	27	2	202		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Inseminasi Buatan														
3	27	2	202	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase penambahan populasi ternak dari hasil IB	70	%	14	%	28	%	14	%	50,00	14	%	42	%	60,00
						Jumlah sapi IB	2625	ekor	525	ekor	1050	ekor	525	ekor	50,00	525	ekor	1575	ekor	60
						Sapi Kawin Alam	6500	ekor	1300	ekor	2600	ekor	1300	ekor	50,00	1300	ekor	3900	ekor	60
						IB Unggas	25000	ekor	5000	ekor	10000	ekor	5000	ekor	50,00	5000	ekor	15000	ekor	60
						Ternak kecil	31000	ekor	6200	ekor	12400	ekor	6200	ekor	50,00	6200	ekor	18600	ekor	60
3	27	2	203		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pakan ternak yang memenuhi persyaratan mutu pakan	100	%	20	%	40	%	20	%	50,00	20	%	60	%	60

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8 = (7/6)*	*9*		*10=(5+7+9)*		*11=(10/4)*
3	27	2	203	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah distributor dan pengecer pakan yang mengikuti sosialisasi mutu pakan ternak	75	pelaku usaha	15	pelaku usaha	30	pelaku usaha	15	pelaku usaha	50,00	15	pelaku usaha	45	pelaku usaha	60
						Dokumen profil pelaku usaha produsen bahan pakan dan pakan ternak	1	buku	0,2	buku	0,4	buku	0,2	buku	50,00	0,2	buku	0,6	buku	60
						Jumlah pelaku usaha pakan ternak yang dibina dan diawasi	125	pelaku usaha	25	pelaku usaha	50	pelaku usaha	25	pelaku usaha	50,00	25	pelaku usaha	75	pelaku usaha	60
3	27	2	203	2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi standar teknis bahan/pakan ternak	175	pelaku usaha	35	pelaku usaha	70	pelaku usaha	35	pelaku usaha	50,00	35	pelaku usaha	105	pelaku usaha	60
						Jumlah pelaku usaha bahan pakan ternak yang dibina	175	pelaku usaha	35	pelaku usaha	70	pelaku usaha	35	pelaku usaha	50,00	35	pelaku usaha	105	pelaku usaha	60
3	27	2	205		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan dan peredaran bibit dan hijauan pakan ternak yang memenuhi standar teknis	85	%	17	%	34	%	17	%	50,00	17	%	51	%	60,00
3	27	2	205	3	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Dokumen pelaku usaha penyedia bibit dan hijauan pakan ternak	20	laporan	4	laporan	8	laporan	4	laporan	50,00	4	laporan	12	laporan	60
						Jumlah pelaku usaha bibit dan hijauan pakan ternak yang dibina	75	pelaku usaha	15	pelaku usaha	30	pelaku usaha	15	pelaku usaha	50,00	15	pelaku usaha	45	pelaku usaha	60
3	27	2	205	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah peternak yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas pakan ternak	150	orang	30	orang	60	orang	30	orang	50,00	30	orang	90	orang	60

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8 = (7/6)*	*9*		*10=(5+7+9)*		*11=(10/4)*
						Jumlah pelaku usaha bibit dan hijauan pakan ternak yang dibina	75	pelaku usaha	15	pelaku usaha	30	pelaku usaha	15	pelaku usaha	50,00	15	pelaku usaha	45	pelaku usaha	60
3	27	2	206		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase peternak yang menggunakan bibit unggul bermutu	85	%	17	%	34	%	17	%	50,00	17	%	51	%	60,00
3	27	2	206	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah peternak yang mengikuti pelatihan teknis budidaya unggas	250	orang	50	orang	100	orang	50	orang	50,00	50	orang	150	orang	60
						Jumlah kelompok ternak unggas penerima bantuan yang dibina	250	kelompok	50	kelompok	100	kelompok	50	kelompok	50,00	50	kelompok	150	kelompok	60
						Jumlah peternak yang dibina dan diawasi	250	kelompok	50	kelompok	100	kelompok	50	kelompok	50,00	50	kelompok	150	kelompok	60
3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Cakupan prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)	**60**	**%**	**12**	**%**	**24**	**%**	**12**	**%**	**50,00**	**12**	**%**	**36**	**%**	**60,00**
3	27	3	201		Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas lahan LP2B	1117	ha	223,4	ha	446,8	ha	223,4	ha	50,00	223,4	ha	670,2	ha	60
3	27	3	201	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah pemilik lahan yang dilibatkan dalam sosialisasinya LP2B	60	orang	12	orang	24	orang	12	orang	0,00	12	orang	36	orang	60
						Jumlah P3A yang dibina	125	P3A	25	P3A	50	P3A	25	P3A	50,00	25	P3A	75	P3A	60
						Jumlah jaringan irigasi yang diidentifikasi	125	lokasi	25	lokasi	50	lokasi	25	lokasi	50,00	25	lokasi	75	lokasi	60

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8 = (7/6)*	*9*		*10=(5+7+9)*		*11=(10/4)*
						Jumlah jalan usaha tani yang diidentifikasi	180	lokasi	36	lokasi	72	lokasi	36	lokasi	50,00	36	lokasi	108	lokasi	60,00
						Jumlah poktan penerima bantuan prasarana pertanian yang dibina	50	poktan	10	poktan	20	poktan	10	poktan	50,00	10	poktan	30	poktan	60
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan ternak yang terinveksi PHMS (%)	**0,12**	**%**	**0,02**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**	**50,00**	**0**	**%**	**0**	**%**	**60,00**
3	27	4	201		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemantauan lalulintas ternak dalam daerah	2500	ekor	500	ekor	1000	ekor	500	ekor	50,00	500	ekor	1500	ekor	60
3	27	4	201	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang dilayani melalui vaksinasi ternak	50000	ekor	10000	ekor	20000	ekor	10000	ekor	50,00	10000	ekor	30000	ekor	60
						Jumlah sampel pemeriksaan penyakit hewan menular	2500	sampel	500	sampel	1000	sampel	500	sampel	50,00	500	sampel	1500	sampel	60
						Jumlah wilayah pengendalian penyakit hewan menular zoonosis	41	kelurahan	8,2	kelurahan	16,4	kelurahan	8,2	kelurahan	50,00	8,2	kelurahan	24,6	kelurahan	60
						Jumlah ternak diantarpulaukan yang diperiksa	5000	ekor	1000	ekor	2000	ekor	1000	ekor	50,00	1000	ekor	3000	ekor	60
3	27	4	201	2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang dilayani melalui vaksinasi ternak	1000	ekor	200	ekor	400	ekor	200	ekor	50,00	200	ekor	600	ekor	60
						Jumlah sampel pemeriksaan penyakit hewan menular	150	ekor	30	ekor	60	ekor	30	ekor	50,00	30	ekor	90	ekor	60

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8 = (7/6)*	*9*		*10=(5+7+9)*		*11=(10/4)*
						Jumlah wilayah pengendalian penyakit hewan menular zoonosis	41	kelurahan	8,2	kelurahan	16,4	kelurahan	8,2	kelurahan	50,00	8,2	kelurahan	24,6	kelurahan	60
						Jumlah ternak diantarpulaukan yang diperiksa	80	kelompok	16	kelompok	32	kelompok	16	kelompok	50,00	16	kelompok	48	kelompok	60
3	27	4	203		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang mampu dilayani	50	%	10	%	20	%	10	%	50,00	10	%	30	%	60
3	27	4	203	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pengadaan bahan dan peralatan petugas pelayanan medik veteriner	1	paket	0,2	paket	0,4	paket	0,2	paket	50,00	0,2	paket	0,6	paket	60
						Jumlah pelayanan aktif UPTD	60	kali	12	kali	24	kali	12	kali	50,00	12	kali	36	kali	60
3	27	4	204		Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pelaku usaha yang menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada unitusahanya	25	%	5	%	10	%	5	%	50,00	5	%	15	%	60
3	27	4	204	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan memiliki PIRT yang dibina	15	unit usaha	3	unit usaha	6	unit usaha	3	unit usaha	50,00	3	unit usaha	9	unit usaha	60
						Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang dibina dan diawasi	20	unit usaha	4	unit usaha	8	unit usaha	4	unit usaha	50,00	4	unit usaha	12	unit usaha	60
3	27	4	204	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah hewan/daging qurban yang diperiksa	1300	ekor	260	ekor	520	ekor	260	ekor	50,00	260	ekor	780	ekor	60
						Jumlah pelaku usaha pemotongan ternak yang dibina	12	pelaku usaha	2,4	pelaku usaha	4,8	pelaku usaha	2,4	pelaku usaha	50,00	2,4	pelaku usaha	7,2	pelaku usaha	60

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8 = (7/6)*	*9*		*10=(5+7+9)*		*11=(10/4)*
						Jumlah pelaku usaha bahan asal hewan yang dibina	10	pelaku usaha	2	pelaku usaha	4	pelaku usaha	2	pelaku usaha	50,00	2	pelaku usaha	6	pelaku usaha	60
						Jumlah pelaku usaha yang dibina persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	10	pelaku usaha	2	pelaku usaha	4	pelaku usaha	2	pelaku usaha	50,00	2	pelaku usaha	6	pelaku usaha	60
3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Cakupan berkurangnya dampak bencana pertanian	**50**	**%**	**10**	**%**	**20**	**%**	**10**	**%**	**50,00**	**10**	**%**	**30**	**%**	**60,00**
3	27	5	201		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan dampak bencana pertanian yang ditangani	50	%	10	%	20	%	10	%	50,00	10	%	30	%	60
3	27	5	201	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah petani yang mengikuti SLPHT tanaman pangan	50	orang	10	orang	20	orang	10	orang	50,00	10	orang	30	orang	60
						Jenis obat-obatan pengendalian hama terpadu	6	jenis	1,2	jenis	2,4	jenis	1,2	jenis	50,00	1,2	jenis	3,6	jenis	60
3	27	5	201	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatnya pemahaman petani dalam penanganan dampak kekeringan	50	orang	10	orang	20	orang	10	orang	50,00	10	orang	30	orang	60
						Jumlah areal demplot mitigasi kekeringan	10	ha	2	ha	4	ha	2	ha	50,00	2	ha	6	ha	60
						Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penanganan pasca panen mete	80	orang	16	orang	32	orang	16	orang	50,00	16	orang	48	orang	60

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8 = (7/6)*	*9*		*10=(5+7+9)*		*11=(10/4)*
						Tersalurnya bantuan mesin kacip mete	20	unit	4	unit	8	unit	4	unit	50,00	4	unit	12	unit	60
						Jumlah pelaku usaha pasca panen komoditi perkebunan yang dibina	25	pelaku usaha	5	pelaku usaha	10	pelaku usaha	5	pelaku usaha	50,00	5	pelaku usaha	15	pelaku usaha	60
						Jumlah kelompok petani kebun yang dibina dalam teknik budidaya komoditi perkebunan	100	kelompok	20	kelompok	40	kelompok	20	kelompok	50,00	20	kelompok	60	kelompok	60
3	**27**	**6**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Cakupan pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	**100**	**%**	**20**	**%**	**40**	**%**	**20**	**%**	**50,00**	**20**	**%**	**60**	**%**	**60,00**
3	27	6	201		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis izin usaha sektor pertanian	25	rekomendasi	5	rekomendasi	10	rekomendasi	5	rekomendasi	50,00	5	rekomendasi	15	rekomendasi	60
3	27	6	201	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah pelaku usaha yang dilibatkan	30	orang	6	orang	12	orang	6	orang	50,00	6	orang	18	orang	60
						Luasan usahatani padi yang difasilitasi untuk menjadi calon lokasi Asuransi Usahatani Padi (AUTP)	500	ha	100	ha	200	ha	100	ha	50,00	100	ha	300	ha	60
						Jumlah ternak sapi yang difasilitasi untuk menjadi calon lokasi Asuransi Usaha Ternak Sapi Padi (AUTS)	250	ekor	50	ekor	100	ekor	50	ekor	50,00	50	ekor	150	ekor	60

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8 = (7/6)*	*9*		*10=(5+7+9)*		*11=(10/4)*
						Jumlah petani yang difasilitasi untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR)	200	orang	40	orang	80	orang	40	orang	50,00	40	orang	120	orang	60
3	27	6	201	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah distributor/pengecer pupuk dan pestisida yang diawasi dan dibina	47	pelaku usaha	9,4	pelaku usaha	18,8	pelaku usaha	9,4	pelaku usaha	50,00	9,4	pelaku usaha	28,2	pelaku usaha	60
						Jumlah kelompok tani penerima bantuan yang dibina	36	poktan	7,2	poktan	14,4	poktan	7,2	poktan	50,00	7,2	poktan	21,6	poktan	60
						Jumlah peserta rapat koordinasi penyusunan RDKK	74	orang	14,8	orang	29,6	orang	14,8	orang	50,00	14,8	orang	44,4	orang	60
						Jumlah peserta rapat Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida	33	orang	6,6	orang	13,2	orang	6,6	orang	50,00	6,6	orang	19,8	orang	60
						Jumlah peserta rapat koordinasi dan updating RDKK dalam e-EDKK	74	orang	14,8	orang	29,6	orang	14,8	orang	50,00	14,8	orang	44,4	orang	60
						Jumlah distributor/pengecer pupuk dan pestisida yang diawasi dan dibina	47	pelaku usaha	9,4	pelaku usaha	18,8	pelaku usaha	9.4	pelaku usaha	50,00	9,4	pelaku usaha	28,2	pelaku usaha	60
						Jumlah kelompok tani penerima alsintan yang diidentifikasi (CP/CL)	36	poktan	7,2	poktan	14,4	poktan	7,2	poktan	50,00	7,2	poktan	21,6	poktan	60
3	27	6	202		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Cakupan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan yang diberikan	100	%	20	%	40	%	20	%	50,00	20	%	60	%	60

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8 = (7/6)*	*9*		*10=(5+7+9)*		*11=(10/4)*
3	27	6	202	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah pelaku usaha yang dibina tentang kepemilikan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	30	pelaku usaha	6	pelaku usaha	12	pelaku usaha	6	pelaku usaha	50,00	6	pelaku usaha	18	pelaku usaha	60
						Buku profil pelaku usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	1	buku	0,2	buku	0,4	buku	0,2	buku	50,00	0,2	buku	0,6	buku	60
3	27	6	203		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Cakupan pengecer sarana pertanian yang memiliki izin usaha	100	%	20	%	40	%	20	%	50,00	20	%	60	%	60
3	27	6	203	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah pelaku usaha yang dibina tentang izin usaha pengecer obat hewan	20	pelaku usaha	4	pelaku usaha	8	pelaku usaha	4	pelaku usaha	50,00	4	pelaku usaha	12	pelaku usaha	60
						Jumlah pelaku usaha pengecer obat hewan yang dibina	25	pelaku usaha	5	pelaku usaha	10	pelaku usaha	5	pelaku usaha	50,00	5	pelaku usaha	15	pelaku usaha	60
3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Cakupan peningkatan SDM Pertanian	**20**	**%**	**4**	**%**	**8**	**%**	**4**	**%**	**50,00**	**4**	**%**	**12**	**%**	**60,00**
3	27	7	201		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Presentase peningkatan jabatan fungsional penyuluh pertanian	14	%	2,8	%	5,6	%	2,8	%	50,00	2,8	%	8,4	%	60
						Presentase pelaku utama yang menerapkan teknologi budidaya sesuai anjuran	3	%	0,6	%	1,2	%	0,6	%	50,00	0,6	%	1,8	%	60
						Persentase peningkatan kelas kelompok tani			0		0		0			0				
						Pemula ke Lanjut	3	%	0,6	%	1,2	%	0,6	%	50,00	0,6	%	1,8	%	60
						Lanjut ke Mandya	1	%	0,2	%	0,4	%	0,2	%	50,00	0,2	%	0,6	%	60

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8 = (7/6)*	*9*		*10=(5+7+9)*		*11=(10/4)*
						Madya ke Utama	1	%	0,2	%	0,4	%	0,2	%	50,00	0,2	%	0,6	%	60
3	27	7	201	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani yang dibina	50	poktan	10	poktan	20	poktan	10	poktan	50,00	10	poktan	30	poktan	60
						Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang dibina	50	poktan	10	poktan	20	poktan	10	poktan	50,00	10	poktan	30	poktan	60
						Jumlah kelompok P3A yang dibina	25	P3A	5	P3A	10	P3A	5	P3A	50,00	5	P3A	15	P3A	60
						Jumlah kelompok usaha yang dibina	50	poktan	10	poktan	20	poktan	10	poktan	50,00	10	poktan	30	poktan	60
3	27	7	201	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani yang dibina	50	poktan	10	poktan	20	poktan	10	poktan	50,00	10	poktan	30	poktan	60
						Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang dibina	50	poktan	10	poktan	20	poktan	10	poktan	50,00	10	poktan	30	poktan	60
						Jumlah kelompok P3A yang dibina	25	P3A	5	P3A	10	P3A	5	P3A	50,00	5	P3A	15	P3A	60
						Jumlah kelompok usaha yang dibina	50	poktan	10	poktan	20	poktan	10	poktan	50,00	10	poktan	30	poktan	60
3	27	7	201	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah PPL yang dilibatkan	15	orang	3	orang	6	orang	3	orang	50,00	3	orang	9	orang	60
						Jumlah PPL yang dilibatkan	15	orang	3	orang	6	orang	3	orang	50,00	3	orang	9	orang	60
						Jumlah dokumen programa penyuluahan pertanian tingkat kecamatan yang tersusun	4	dokumen	0,8	dokumen	1,6	dokumen	0,8	dokumen	50,00	0,8	dokumen	2,4	dokumen	60
						Jumlah PPL yang dibina	42	orang	8,4	orang	16,8	orang	8,4	orang	50,00	8,4	orang	25,2	orang	60

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8 = (7/6)*	*9*		*10=(5+7+9)*		*11=(10/4)*
						Jumlah wilayah identifikasi potensi pertanian	4	kecamatan	0,8	kecamatan	1,6	kecamatan	0,8	kecamatan	50,00	0,8	kecamatan	2,4	kecamatan	60
3	27	7	201	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah PPL yang melakukan pendampingan diseminasi tekonologi pertanian	40	orang	8	orang	16	orang	8	orang	50,00	8	orang	24	orang	60

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produktivitas Pertanian

Sasaran ini diterjemahkan kedalam indikator sasaran persentase pertumbuhan produksi pertanian.

a. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kota Bima pada sasaran strategis meningkatnya produksi pertanian merupakan akumulasi dari produksi 7 (tujuh) komoditi utama tanaman pangan padi dan palawija yang dihitung dalam satuan ton. Porsentase pertumbuhan produksi pertanian pada tahun 2021, dari target sebesar 2,80% yang terealisasi sebesar 2,95%. Secara rinci capaian indikator disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Ase
1.	Meningkatnya pengawasan pemanfaatan sarana pertanian sesuai anjuran	Cakupan penggunaan sarana pertanian sesuai anjuran (%)	65,00	69,00	106,15
2.	Meningkatnya Produktivitas Komoditi Utama Tanaman Pangan Padi dan Bahan Pangan Lokal Lainnnya.	Persentase Peningkatan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya per Hektar (%)	2,97	3,04	111,79
		Padi (Ton/Ha) GKP	5,96	5,69	95,41
		Jagung (Ton/Ha) PK	5,07	6,01	118,54
		Kedelai (Ton/Ha) BK	1,45	1,40	96,85
		Kacang Tanah (Ton/Ha) BK	1,38	3,00	217,39
		Kacang Hijau (Ton/Ha) BK	0,96	1,04	108,80
		Ubi Kayu (Ton/Ha) UB	10,00	22,56	225,56
		Ubi Jalar (Ton/Ha) UB	0,00	0,00	0
3.	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Hortikultura Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Unggulan per Hektar (%)	5,00	7,81	156,1
		Bawang Merah (Kw/Ha)	55,00	90,00	163,64
		Cabai (Kw/Ha)	45,00	64,00	142,22
		Durian (Kw/Pohon)	0,12	0,19	158,33
		Sawo (Kw/Pohon)	0,29	0,62	213,79
		Pisang (Kw/Rumpun)	0,37	0,45	121,62
		Mangga (Kw/Pohon)	0,63	0,65	103,17
4.	Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di Kota Bima	Cakupan bencana pertanian yang ditangani (%)	50,00	89,84	179,68

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Ase
5.	Meningkatkan pemasarana produk hasil pertanian baik segar maupun olahan	Porsentase peningkatan pemasaran hasil produk pertanian yang dipasarkan dan atau diolah (%)	30,00	39,97	133,25

Berdasarkan pengukuran kinerja Tabel 4, dapat dilihat pencapaian kinerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut :

1. Persentase Cakupan Penggunaan Sarana Pertanian Sesuai Anjuran, dari target sebesar 65% yang terealisasi sebesar 67,00%. Realisasi dari target mencapai sebesar 103,08% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.
2. Persentase Peningkatan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya per Hektar, dari target sebesar 2,67% yang terealisasi sebesar 1,74%. Realisasi dari target mencapai sebesar 64,99% dan ini masuk dalam kategori cukup berhasil.
3. Tingkat produktivitas tanaman padi, dari target sebesar 5,96 ton/ha yang terealisasi sebesar 5,52 ton/ha. Realisasi dari target mencapai sebesar 92,62% dan ini masuk dalam kategori berhasil.
4. Tingkat produktivitas tanaman jagung, dari target sebesar 5,07 ton/ha yang terealisasi sebesar 6,49 ton/ha. Realisasi dari target mencapai sebesar 128,01% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.
5. Tingkat produktivitas tanaman kedelai, dari target sebesar 1,45 ton/ha yang terealisasi sebesar 1,42 ton/ha. Realisasi dari target mencapai sebesar 97,93% dan ini masuk dalam kategori berhasil.
6. Tingkat produktivitas tanaman kacang tanah, dari target sebesar 1,38 ton/ha yang terealisasi sebesar 1,47 ton/ha. Realisasi dari target mencapai sebesar 106,52% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.
7. Tingkat produktivitas tanaman kacang hijau, dari target sebesar 0,96 ton/ha yang terealisasi sebesar 1,03 ton/ha. Realisasi dari target mencapai sebesar 107,29% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.
8. Tingkat produktivitas tanaman ubi kayu, dari target sebesar 10,00 ton/ha yang terealisasi sebesar 23,44 ton/ha. Realisasi dari target mencapai sebesar 234,40% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.

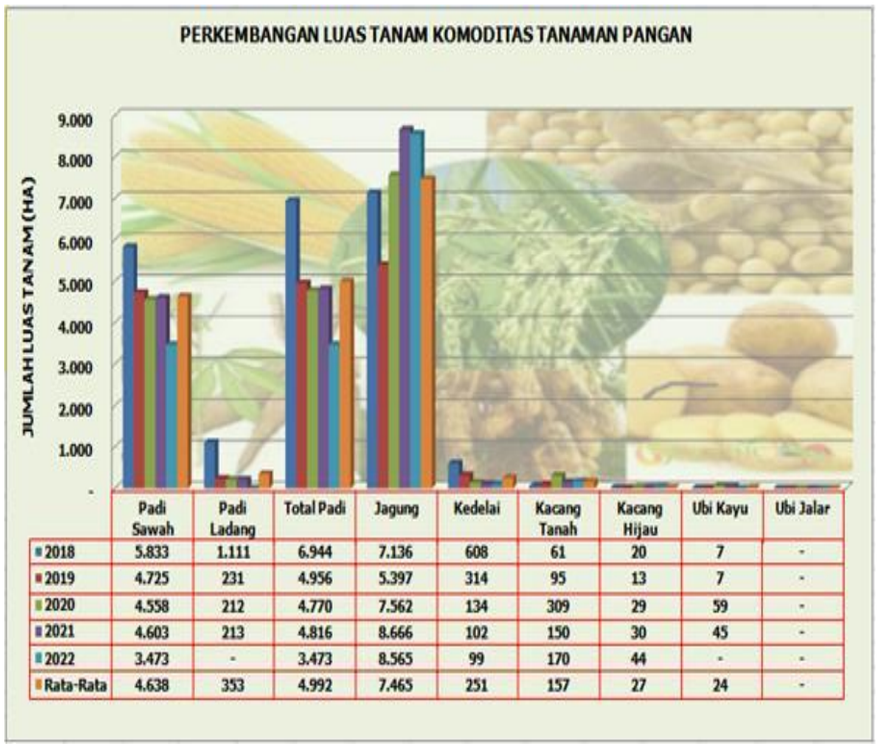
9. Tingkat produktivitas tanaman ubi jalar, dari target sebesar 13,00 ton/ha yang terealisasi sebesar 12,83 ton/ha. Realisasi dari target mencapai sebesar 98,69% dan ini masuk dalam kategori berhasil.
10. Tingkat produktivitas tanaman sorghum, dari target sebesar 4,00 ton/ha yang terealisasi sebesar 3,96 ton/ha. Realisasi dari target mencapai sebesar 99,00% dan ini masuk dalam kategori berhasil.
11. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Unggulan per Hektar. dari target sebesar 5,00% yang terealisasi sebesar 2,70%. Realisasi dari target mencapai sebesar 54,08% dan ini masuk dalam kategori kurang berhasil.
12. Tingkat produktivitas tanaman bawang merah, dari target sebesar 55,00 kw/ha yang terealisasi sebesar 90,00 kw/ha. Realisasi dari target mencapai sebesar 163,64% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.
13. Tingkat produktivitas tanaman cabai, dari target sebesar 45,00 kw/ha yang terealisasi sebesar 64,00 kw/ha. Realisasi dari target mencapai sebesar 142,22% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.
14. Tingkat produktivitas tanaman durian, dari target sebesar 0,12 kw/pohon yang terealisasi sebesar 0,19 kw/pohon. Realisasi dari target mencapai sebesar 158,33% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.
15. Tingkat produktivitas tanaman sawo, dari target sebesar 0,29 kw/pohon yang terealisasi sebesar 0,62 kw/pohon. Realisasi dari target mencapai sebesar 215,23% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.
16. Tingkat produktivitas tanaman pisang, dari target sebesar 0,37 kw/rumpun yang terealisasi sebesar 0,45 kw/rumpun. Realisasi dari target mencapai sebesar 121,62% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.
17. Tingkat produktivitas tanaman mangga, dari target sebesar 0,63 kw/pohon yang terealisasi sebesar 0,65 kw/pohon. Realisasi dari target mencapai sebesar 103,17% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.
18. Porsentase Cakupan Bencana Pertanian Yang Ditangani, dari target sebesar 50,00% yang terealisasi sebesar 85,00%. Realisasi dari target mencapai sebesar 170,00% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.

19. Porsentase Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian Yang Dipasarkan dan atau Diolah, dari target sebesar 30,00% yang terealisasi sebesar 39,97%. Realisasi dari target mencapai sebesar 133,25% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.

b. Perbandigan Realisasi Terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi peningkatan produksi pertanian yang dibangun oleh komoditi tanaman pangan secara keseluruhan sangat bervariasi dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya komoditi jagung yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang cukup berarti setiap tahunnya.

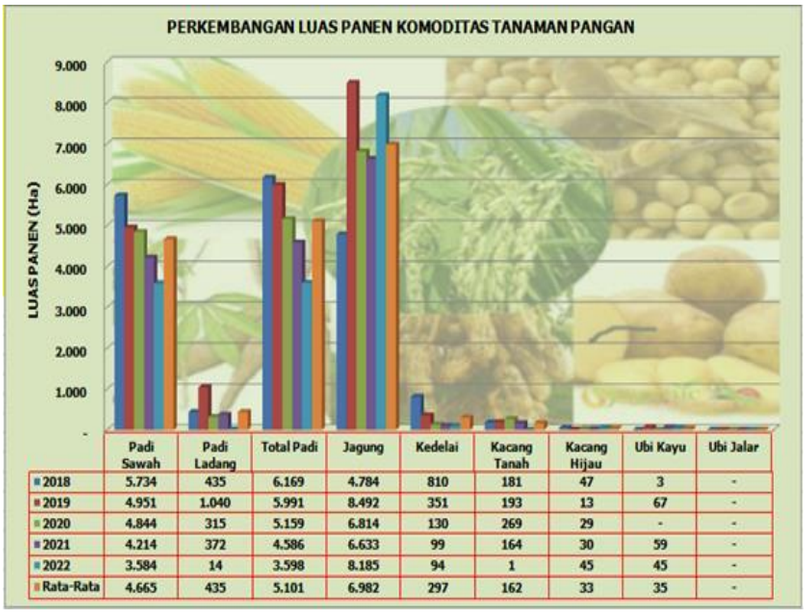
1. Perkembangan capaian realisasi luas tanam komoditas tanaman pangan dalam 5 tahun terakhir



	Padi Sawah	Padi Ladang	Total Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
2018	5.833	1.111	6.944	7.136	608	61	20	7	-
2019	4.725	231	4.956	5.397	314	95	13	7	-
2020	4.558	212	4.770	7.562	134	309	29	59	-
2021	4.603	213	4.816	8.666	102	150	30	45	-
2022	3.473	-	3.473	8.565	99	170	44	-	-
Rata-Rata	4.638	353	4.992	7.465	251	157	27	24	-

Grafik 2. Perkembangan luas tanam komoditi tanaman pangan di Kota Bima Tahun 2018 -2022

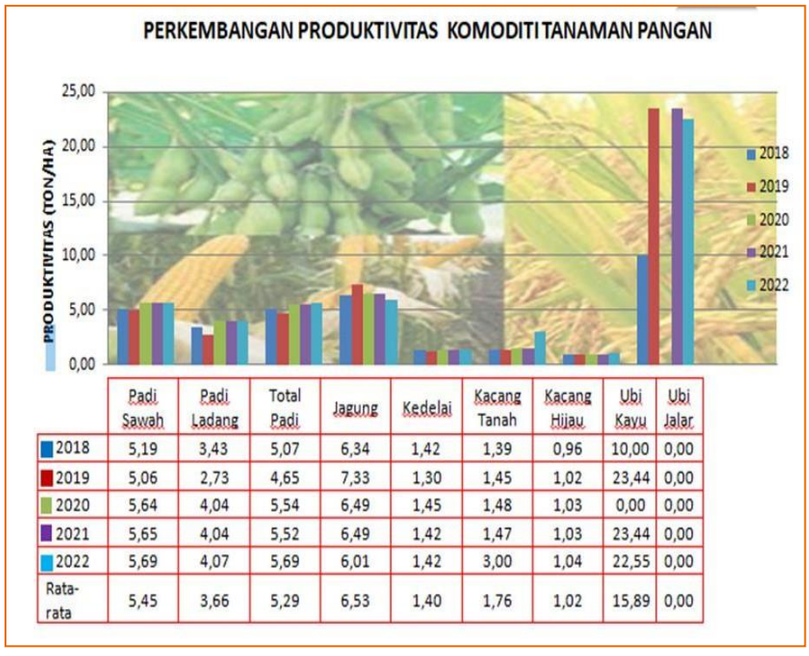
2. Perkembangan capaian realisasi luas panen komoditas tanaman pangan dalam 5 tahun terakhir



	Padi Sawah	Padi Ladang	Total Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
2018	5.734	435	6.169	4.784	810	181	47	3	-
2019	4.951	1.040	5.991	8.492	351	193	13	67	-
2020	4.844	315	5.159	6.814	130	269	29	-	-
2021	4.214	372	4.586	6.633	99	164	30	59	-
2022	3.584	14	3.598	8.185	94	1	45	45	-
Rata-Rata	4.665	435	5.101	6.982	297	162	33	35	-

Grafik 3. Perkembangan luas panen komoditi tanaman pangan di Kota Bima Tahun 2018 -2022

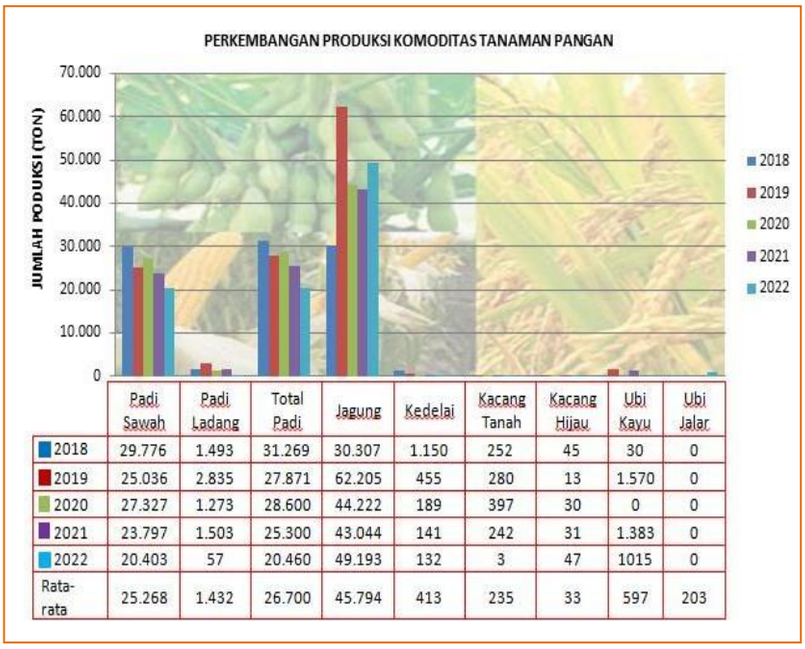
3. Perkembangan capaian realisasi produktivitas komoditas tanaman pangan dalam 5 tahun terakhir



	Padi Sawah	Padi Ladang	Total Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
2018	5,19	3,43	5,07	6,34	1,42	1,39	0,96	10,00	0,00
2019	5,06	2,73	4,65	7,33	1,30	1,45	1,02	23,44	0,00
2020	5,64	4,04	5,54	6,49	1,45	1,48	1,03	0,00	0,00
2021	5,65	4,04	5,52	6,49	1,42	1,47	1,03	23,44	0,00
2022	5,69	4,07	5,69	6,01	1,42	3,00	1,04	22,55	0,00
Rata-rata	5,45	3,66	5,29	6,53	1,40	1,76	1,02	15,89	0,00

Grafik 4. Perkembangan produktivitas komoditi tanaman pangan di Kota Bima Tahun 2018 -2022

4. Perkembangan capaian realisasi produksi tanaman pangan dalam 5 tahun terakhir



	Padi Sawah	Padi Ladang	Total Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
2018	29.776	1.493	31.269	30.307	1.150	252	45	30	0
2019	25.036	2.835	27.871	62.205	455	280	13	1.570	0
2020	27.327	1.273	28.600	44.222	189	397	30	0	0
2021	23.797	1.503	25.300	43.044	141	242	31	1.383	0
2022	20.403	57	20.460	49.193	132	3	47	1015	0
Rata-rata	25.268	1.432	26.700	45.794	413	235	33	597	203

Grafik 5. Perkembangan produksi komoditi tanaman pangan di Kota Bima Tahun 2018 -2022

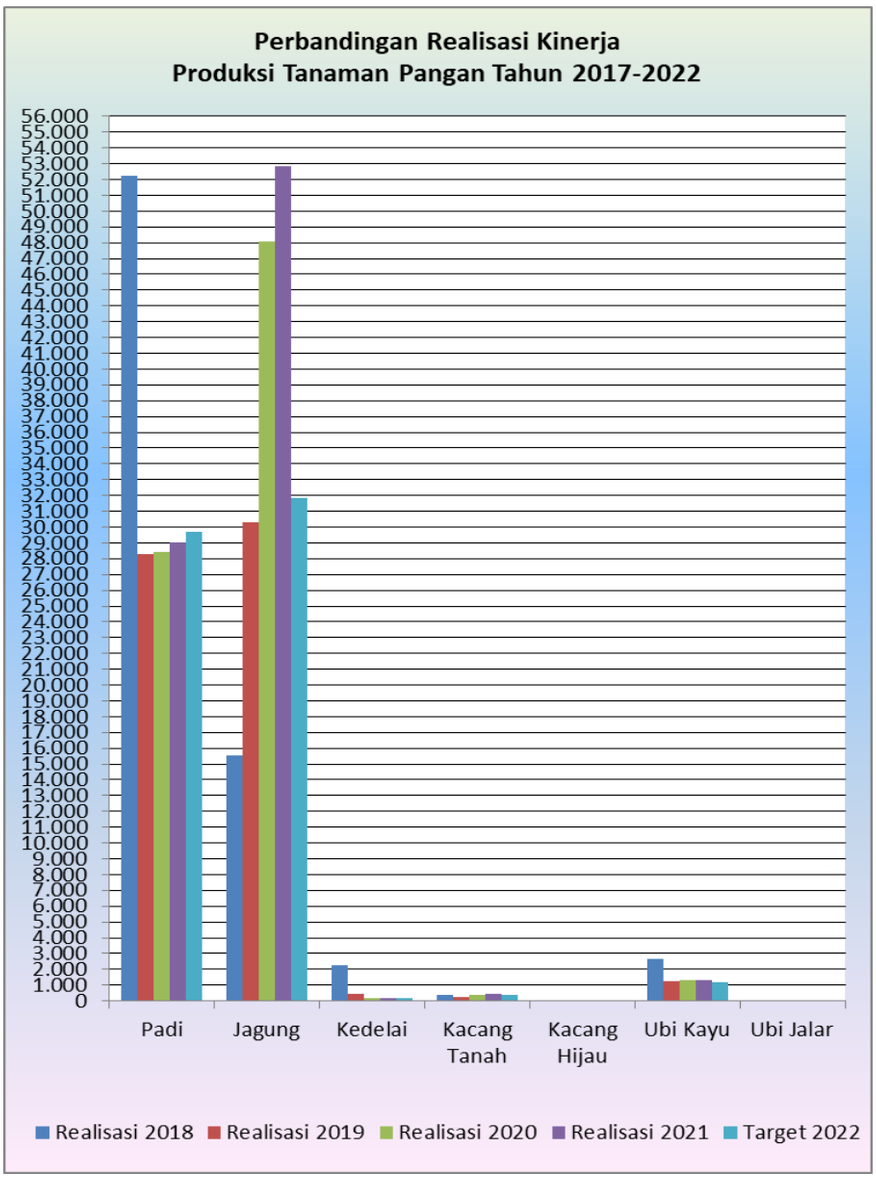
c. Perbandigan Realisasi Kinerja Terhadap Target Renstra

Secara keseluruhan realisasi komoditi tanaman pangan khususnya komoditi jagung pada tahun 2022 sangat tinggi. Selain ditunjang dengan cuaca yang memadai, pasokan pupuk, penyebaran benih dan mekanisasi sangat mendukung melalui bantuan pemerintah kepada kelompok tani dikarenakan animo dan permintaan pasar yang sangat tinggi.

Tabel 2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Tanaman Pangan Tahun 2022 Terhadap Target Renstra (Ton)

Komoditi	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023
Padi	28.269	28.427	25.301	20.460	21.082,20
Jagung	30.307	48.070	43.044	49.193	50.688,99
Kedelai	479	196	141	132	136,01
Kacang Tanah	252	380	242	3	3,09
Kacang Hijau	11	12	31	47	48,43
Ubi Kayu	1.223	1.322	1.383	1.015	1.015
Ubi Jalar	0	0	-	0	0
Jumlah	**60.541**	**78.407**	**70.142**	**70.850**	**72.973,72**

Tabel di atas menunjukan bahwa komoditi pertanian nampak sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Tahun 2019 akumulasi realisasi produksi 7 (tujuh) komoditi pertanian tanaman pangan sebesar 60.541 ton sementara pada akhir tahun 2022 realisasi produksi mencapai 70.850 ton. Nampak terjadi peningkatan produksi sebesar 10.309 ton atau terjadi peningkatan sebesar 17,03%. Perlu menjadi catatan bahwa produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan khususnya sangat fluktuatif dan rentan terhadap pengaruh eksternal seperti kondisi pasar (*supply demand*) dan cuaca termasuk perubahan kebijakan dan dukungan/bantuan pemerintah akibat terjadinya pandemi covid-19 semenjak akhir Desember 2019. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap pergeseran animo masyarakat terhadap komoditi yang diusahakan.



Grafik 6. Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Tanaman Pangan Tahun 2018 s.d. 2022 (Ton)

d. Perbandigan Realisasi Kinerja Terhadap Target Regional Dan Nasional

Perbandingan indikator kinerja Dinas Pertanian Kota Bima untuk 3 (tiga) komoditi utama tanaman pangan "Pajale" (padi-jagung-kedelai) dibandingkan dengan target regional (provinsi) dan target nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Perbandingan Produksi Komoditi Utama Tanaman Pangan Kota Bima dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

Komoditi (Ton)	Realisasi Kota Bima (Ton)	Target Provinsi (Ton)	% Thdp Realisasi Provinsi	Target Nasional (Ton)	% Thdp Realisasi Nasional
Padi	20.460	2.185.544	0,01%	59.150.000	0,05%
Jagung	49.193	2.234.032	0,02%	30.900.000	0,16%
Kedelai	132	40.809	0,32%	480.000	0,04%
Jumlah	**69.785**	**4.460.385**	**0,35%**	**90.530.000**	0,08%

Sumber Data Produksi NTB: Proksimantap NTB MT. 2020/2021; Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa posisi produksi 3 (tiga) komoditi strategis utama sub sektor tanaman pangan Kota Bima menyumbang 0,35% terhadap target produksi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 0,01% terhadap target produksi nasional. Sumbangan terbesar diperoleh dari komoditi jagung sebesar 0,16%.

Pada tahun 2022, Pemerintah Propinsi NTB mencanangkan target produksi padi menembus 2,46 juta ton. Dari target itu, produksi dihitung rata-rata 55 kuintal per ha, maka akan terakumulasi produksi mencapai 2,4 juta ton, dengan luas lahan tanam dicanangkan seluas 368.000 ha untuk padi sawah dan 16.000 ha padi ladang. Dari target tersebut, Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pertanian Kota Bima menyumbang produksi padi sebesar 28.247 ton atau sebesar 1,15 %.

e. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Indikator

Pencapaian sasaran strategis "*Meningkatnya Produksi Pertanian*" tahun 2021 sudah mencapai target yang ditentukan yaitu terealisasi 104,37% dimana komoditi jagung adalah kontributor tertinggi yakni sebesar 78,33% bila dilihat berdasarkan luas tanam dan luas panen sedangkan untuk komoditi lainnya seperti padi, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar produksinya tidak memberikan sumbangan yang cukup berarti.

Pencapaian sasaran strategis "*Meningkatnya Produksi Pertanian*" tahun 2022 mencapai target. Dari target peningkatan produksi tanaman pangan sebesar 2,97 % mampu terealisasi 3,04%. Dari semua komoditi tanaman pangan ada yang mengalami penurunan dan peningkatan produksi yang cukup berarti sepanjang tahun 2022. Hanya komoditi ubi kayu yang tidak berproduksi. Tahun 2020 hingga 2022 tidak ada data produksi ubi kayu. Kecenderungan produksi tanaman pangan sepanjang tahun 2022 analisis keberhasilan dan kegagalannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Porsentase pertumbuhan produksi pertanian pada tahun 2022, dari target sebesar 2,97% yang terealisasi sebesar 3,04%. Realisasi dari target yang ditetapkan masuk dalam kategori berhasil.*

   Pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan mengalami pertumbuhan yang minus, diakibatkan oleh menurunnya luas panen komoditi tanaman pangan sebesar 397 Ha. Penurunan luas panen yang paling tinggi terlihat pada komoditi padi seluas 988 Ha, kemudian diikuti oleh komoditi jagung seluas 163 Ha, komoditi ubi kayu seluas 14 Ha, jagung seluas 5 Ha dan komoditi ubi jalar sama sekali tidak ada realisasi panennya, hal inilah yang menyebabkan penurunan produksi tanaman pangan yang sangat signifikan. Penurunan juga terjadi pada luas tanam, penurunan mencapai angka 1.458 Ha. Ini artinya menunjukkan bahwa beberapa komoditi andalan tidak melakukan penanaman pada tahun 2022. Hal terseut disebabkan oleh beberapa kondisi. Jika dilihat per komoditi pertanian dan alasan penurunannya adalah sebagai berikut :

   a. Komoditi padi mengalami penurunan produksi sebesar 19,13% dari tahun sebelumnya, kalau dilihat dari luas panen sebenarnya ada penurunan seluas 988 Ha.

      Penurunan luas panen tersebut disebabkan oleh Kondisi iklim yang kurang menguntungkan ditambah lagi dengan kondisi irigasi yang kurang baik yang menyebabkan suplay air irigasi berkurang terutama sekali pada MK2, sehingga petani yang mengalami hal tersebut memundurkan jadwal tanamnya sampai lahan sawahnya tersedia cukup air, siap diolah dan ditanami.

   b. Komoditi jagung mengalami peningkatan produksi sebesar 14,29% atau 6.149 Ton dari tahun sebelumnya, kalau dilihat

dari luas panen juga mengalami peningkatan seluas 1.552 Ha, peningkatan luas panen tahun 2022 tersebut lebih disebabkan oleh peningkatan luas panen pada musim tanam MKII yang disebabkan oleh kondisi kondisi irigasi yang telah di perbaiki yang menyebabkan suplay air irigasi berlimpah, sehingga petani berani menanam jagung pada MKII. Peningkatan ini juga diakibatkan oleh penanaman yang sebagian besar dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dan secara otomatis proses panennya akan dilaksanakan pada awal MK I.

c. Komoditi kedelai mengalami penurunan produksi sebesar 6,38% atau 9 Ton dari tahun sebelumnya, kalau dilihat dari luas panen mengalami penurunan seluas 5 Ha, penurunan luas panen tersebut disebabkan oleh kurangnya animo masyarakat untuk menanam kedelai, ini karenakan oleh kurangnya akses pasar untuk komoditi tersebut sehingga petani mengalami kesulitan ketika ingin menjual produknya, kesulitan dalam memperoleh benih unggul dan musim tanam kedelei yang dilaksanakan oleh petani pada MKII. Hal tersebut tersebut dibuktikan dengan berkurangnya luas tanam tahun 2022 sebesar 3 Ha.
d. Komoditi kacang tanah mengalami penurunan produksi sebesar 98,76% atau 239 Ton dari tahun sebelumnya, kalau dilihat dari luas panen mengalami penurunan seluas 163 Ha, penurunan luas panen tersebut disebabkan oleh kurangnya animo masyarakat untuk menanam kacang tanah, sehingga pada MH banyak lahan yang sebelumnya ditanami kacang tanah beralih ke tanaman jagung. Namun jika dicermati animo masyarakat jusrtu naik pada MH II Hal tersebut tersebut dibuktikan dengan bertambahnya luas tanam tahun 2022 sebesar 20 Ha dan akan di panen pada tahun anggaran berikutnya.
e. Komoditi kacang hijau mengalami peningkatan produksi sebesar 51,61% atau 16 Ton dari tahun sebelumnya, kalau dilihat dari luas tanam memang mengalami peningkatan seluas 14 Ha.
f. Komoditi ubi kayu mengalami peningkatan produksi yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.015 Ton. Penurunan dan atau peningkatan produksi untuk

komoditi ini sangat tergantung pada ada tidaknya akses pasar yang siap menampung hasil produksi.

g. Sementara untuk komoditi ubi jalar tidak tercatat adanya luas tanam pada tahun 2022. Penurunan dan atau peningkatan produksi untuk komoditi ini sangat tergantung pada ada tidaknya akses pasar yang siap menampung hasil produksi.

h. Untuk komoditi hortikultura rata-rata mengalami peningkatan produksi yang sangat signifikan, dari 6 (enam) komoditi hortikultura yang diukur peningkatan produksinya, tercatat untuk komoditi Bawang Merah mengalami peningkatan sebesar 8,50 Ton dari tahun sebelumnya, komoditi Cabai mengalami peningkatan sebesar 8,06 Ton dari tahun sebelumnya, komoditi Durian mengalami peningkatan sebesar 0,11 Ton dari tahun sebelumnya, komoditi Mangga mengalami peningkatan sebesar 1.331,12 Ton dari tahun sebelumnya, komoditi Pisang mengalami peningkatan sebesar 1.156,00 Ton dari tahun sebelumnya, dan komoditi sawo juga mengalami peningkatan sebesar 155,61 Ton dari tahun sebelumnya.

2. *Cakupan penggunaan sarana pertanian sesuai anjuran, dari target sebesar 65% yang terealisasi sebesar 69%. Realisasi dari target mencapai sebesar 106,15%% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.*

   Peningkatan penggunaan sarana pertanian sesuai anjuran ini terlihat dari proses pemupukan berimbang yang dilaksanakan oleh petani sudah mencapai 50% dari semua aktivitas, penggunaan benih/bibit unggul yang dilaksanakan oleh petani sudah mencapai 90% dari semua aktivitas, sistim penanaman jajar yang dilaksanakan oleh petani sudah mencapai 35% dari semua aktivitas, pengendalian hama yang tetap waktu dan tepat dosis yang dilaksanakan oleh petani sudah mencapai 85% dari semua aktivitas dan penanganan pasca panen yang baik dan benar yang dilaksanakan oleh petani sudah mencapai 75% dari semua aktivitas.

3. *Persentase Peningkatan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya per Hektar, dari target sebesar 2,97% yang terealisasi sebesar 3,04%. Realisasi dari target mencapai sebesar 102,39% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.*

Peningkatan produktivitas padi dan bahan pangan lokal lainnya (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini dapat tercapai dengan adanya kerja keras semua pihak dalam memberikan pemahaman atau peningkatan pengetahuan petani dalam penerapan sistem budidaya sesuai anjuran, yaitu meningkatnya pemahaman petani tentang sistem tanam jajar legowo, penggunaan bibit unggul, pemupukan berimbang dan sistem pengendalian hama yang cepat dan tepat pada semua jenis tanaman pangan.

4. *Tingkat produktivitas tanaman padi, dari target sebesar 5,96 ton/ha yang terealisasi sebesar 5,69 ton/ha. Realisasi dari target mencapai sebesar 95,41% dan ini masuk dalam kategori berhasil.*

   Tingkat produktivitas tanaman padi terealisasi hanya sebesar 95,41% dari target yang telah ditentukan. Ini dikerenakan oleh masih adanya petani padi sawah yang belum menerapkan sistem budidaya sesuai anjuran. Masih ada diantara petani padi sawah yang masih menggunakan sistem pertanaman tradisional, penggunaan pupuk yang belum berimbang, pengendalian hama yang belum tepat waktu, dan masih ada yang belum menggunakan benih unggul. Ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman mereka tentang beberapa hal tersebut diatas dalam upaya menunjang peningkatan produktivitas usaha tani mereka. Selain itu, ketersedian air irigasi yang juga masih bermasalah. Perubahan iklim yang terjadi ditambah lagi dengan kondisi irigasi yang kurang baik, menyebabkan banyak lahan-lahpertanian kurang mendapat pasokan air irigasi terutama dimusim tanam ke III (MK II).

   Produktivitas maksimal hanya terjadi di beberapa tempat, seperti di areal penangkaran benih padi milik petani di Kelurahan Jatibaru Barat dan Jatiwangi, serta di areal pertanaman yang cukup mendapat asokan air irigasi seperti di Kelurahan Nungga, Dodu, Ntobo dan Kendo. Ini perlu mendapat perhatian semua pihak, agar upaya peningkatan produktivitas tanaman padi dapat terlaksana dengan baik sesuai target yang telah ditentukan.

5. *Tingkat produktivitas tanaman jagung, dari target sebesar 5,07 ton/ha yang terealisasi sebesar 6,01 ton/ha. Realisasi dari target mencapai sebesar 118,54% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.*

Tingkat produktivitas tanaman jagung terealisasi secara signifikan sebesar 118,54% dari target yang telah ditentukan. Tingkat produktivitas jagung pada tahun 2022 melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 1,42 ton/ha dari tahun sebelumnya, dengan jumlah produksi 49.193 ton. Proses budidaya sebagian besar dilaksanakan oleh petani pada musim hujan (MH) dengan menggunakan benih hibrida, petani dalam melakukan usahanya lebih memilih benih jagung hibrida yang memiliki produktivitas tinggi. Disamping itu pengendalian hama yang tepat waktu seperti serangan ulat daun juga memberikan kontribusi dalam pencapaian target tersebut.

6. *Tingkat produktivitas tanaman kedelai, dari target sebesar 1,45 ton/ha yang terealisasi sebesar 1,40 ton/ha. Realisasi dari target mencapai sebesar 96,85% dan ini masuk dalam kategori berhasil.*

   Tingkat produktivitas tanaman kedelai terealisasi sebesar 96,85% dari target yang telah ditentukan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat produktivitas mengalami penurunan sebesar 0,02 ton/ha. Dari segi produksi mengalami penurunan dari sebesar 9 ton dari tahun 2021. Ini disebabkan oleh menurunnya realisasi panen tanaman kedelai tahun 2022 yang hanya sebesar 132 ha dari 141 ha pada tahun 2021. Penurunan luas tanam dan panen ini, disebabkan oleh menurunnya minat petani dalam menanam kedelai, penurunan minat ini lebih disebabkan oleh kurangnya akses pasar untuk komoditi tersebut, sehingga petani mengalami kesulitan ketika ingin menjual produk mereka.

7. *Tingkat produktivitas tanaman kacang tanah, dari target sebesar 1,38 ton/ha yang terealisasi sebesar 3 ton/ha. Realisasi dari target mencapai sebesar 217,39% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.*

   Tingkat produktivitas tanaman kacang tanah yang terealisasi sebesar 217,39% dari target yang telah ditentukan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat produktivitas mengalami peningkatan sebesar 1,53 ton/ha. Dari segi produksi mengalami penurunan sebesar 239 ton dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 produksi kacang tanah sebesar 242 ton, dan pada tahun 2022 pengalami penurunan menjadi sebesar 3 ton. Penurunan produksi ini disebabkan karena adanya

penurunan luas panen sebesar 163 ha dari tahun sebelumnya. Upaya peningkatan produksi kacang tanah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, karena disebabkan oleh kurang minat petani dalam menanam kacang tanah, kurangnya minat ini lebih disebabkan oleh kurangnya akses pasar untuk komoditi tersebut, sehingga petani mengalami kesulitan ketika ingin menjual produk mereka.

8. *Tingkat produktivitas tanaman kacang hijau, dari target sebesar 0,96 ton/ha yang terealisasi sebesar 1,04 ton/ha. Realisasi dari target mencapai sebesar 108,80% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.*

   Tingkat produktivitas tanaman kacang hijau terealisasi sebesar 108,80% dari target yang telah ditentukan, tingkat produktivitas masih sama seperti tahun sebelumnya. Namun dari segi produksi mengalami peningkatan sebesar 16 ton, dimana pada tahun 2021 tingkat produksinya sebesar 31 ton dan meningkat menjadi 47 ton pada tahun 2022. Upaya peningkatan produksi kacang hijau tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, karena disebabkan oleh kurang minat petani dalam menanam kacang tanah, kurangnya minat ini lebih disebabkan oleh kurangnya akses pasar untuk komoditi tersebut, sehingga petani mengalami kesulitan ketika ingin menjual produk mereka.

9. *Tingkat produktivitas tanaman ubi kayu, dari target sebesar 10,00 ton/ha yang terealisasi sebesar 22,56 ton/ha. Realisasi dari target mencapai sebesar 225,56% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.*

   Tingkat produktivitas tanaman ubi kayu terealisasi sebesar 234,40% dari target yang telah ditentukan, tingkat produktivitas masih sama seperti tahun sebelumnya. Namun dari segi produksi mengalami peningkatan sebesar 1.015 ton, dimana pada tahun 2021 komoditi ini tidak berkontribusi.

10. *Tingkat produktivitas tanaman ubi jalar dari target yang sudah ditentukan belum ada yang terealisasi, ini disebabkan oleh proses pendataan dan pencatatan produksi yang belum baik ditingkat lapangan dan kurangnya minat petani dalam menanam ubi jalar, kurangnya minat ini lebih disebabkan oleh kurangnya akses pasar untuk komoditi tersebut, sehingga petani mengalami kesulitan ketika ingin menjual produk mereka. Penurunan dan atau peningkatan produksi untuk*

komoditi ini sangat tergantung pada ada tidaknya akses pasar yang siap menampung hasil produksi.

11. *Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Unggulan per Hektar, dari target sebesar 5,00% yang terealisasi sebesar 2,70%. Realisasi dari target mencapai sebesar 54,08% dan ini masuk dalam kategori kurang berhasil.*

    Tingkat produktivitas tanaman hortikultura di Kota Bima terjadi peningkatan sebesar 16,22%, pertumbuhan produktivitas tersebut dikarenakan Dinas Pertanian Kota Bima sedang mengupayakan pembentukan sentra produksi hortikultura. Pembinaan dan bantuan bibit/benih hortikultura terus dilakukan untuk merangsang petani untuk terus memproduksi sayur-sayuran guna memenuhi kebutuhan sayur-sayuran masyarakat Kota Bima yang harganya selalu fluktuatif, dan mendorong peningkatan produksi buah-buahan karena pasarnya di Kota Bima masih sangat menjanjikan.

12. *Tingkat produktivitas tanaman bawang merah dari target sebesar 55,00 kw/ha yang terealisasi sebesar 90,00 kw/ha, realisasi dari target mencapai sebesar 163,64%. Tingkat produktivitas tanaman cabai dari target sebesar 45,00 kw/ha yang terealisasi sebesar 64,00 kw/ha, realisasi dari target mencapai sebesar 142,22%. Tingkat produktivitas tanaman durian dari target sebesar 0,12 kw/pohon yang terealisasi sebesar 0,19 kw/ha, realisasi dari target mencapai sebesar 158,33%. Tingkat produktivitas tanaman sawo dari target sebesar 0,29 kw/pohon yang terealisasi sebesar 0,62 kw/pohon, realisasi dari target mencapai sebesar 215,23%. Tingkat produktivitas tanaman pisang dari target sebesar 0,37 kw/rumpun yang terealisasi sebesar 0,45 kw/rumpun, realisasi dari target mencapai sebesar 121,62%. Tingkat produktivitas tanaman mangga dari target sebesar 0,63 kw/pohon yang terealisasi sebesar 0,65 kw/pohon, realisasi dari target mencapai sebesar 103,17%.*

13. *Tingkat produktivitas tanaman hortikultura (Bawang Merah, Cabai, Durian, Sawo, Pisang dan Mangga) pada tahun 2022 rata-rata mencapai 150% dari target yang telah ditentukan dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil. Upaya peningkatan produksi tanaman hortikultura terus dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bima melalui perbanyakan benih/bibit yang*

akan disalurkan kepada masyarakat dan juga melalui perbanyakan sentra-sentra produksi tanaman hortikultura.

14. *Cakupan bencana pertanian yang ditangani, dari target sebesar 5,00% yang terealisasi sebesar 85,00%. Realisasi dari target mencapai sebesar 170% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.*

    Penanganan bencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bima melalui Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura produktivitas tanaman hortikultura di Kota Bima meliputi penanganan OPT dan dampak bencana banjir. Untuk penanganan OPT, telah dilaksanakan dengan maksimal melalui penyediaan obat-obatan dan proses penanganan yang tepat waktu dan tepat sasaran. Sementara pennganan dampak banjir yang terjadi, dilakukan penyerahan bantuan benih kepada petani yang terimbas bencana tersebut sebagai ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Penanganan yang belum maksimal dilaksanakan adalah terkait dengan infrastruktur yang rusak akibat banjir, ini akan segera dilaksanakan koordinasi dengan pihak terkait yang memiliki kewenangan dengan hal tersebut.

15. *Porsentase peningkatan pemasaran hasil produk pertanian yang dipasarkan dan atau diolah, dari target sebesar 30,00% yang terealisasi sebesar 39,97%. Realisasi dari target mencapai sebesar 133,25% dan ini masuk dalam kategori sangat berhasil.*

    Untuk peningkatan pemasaran hasil produk pertanian (benih dan produk olahan), terjadi peningkatan sebesar 133,25%, dan upaya peningkatan pemasaran hasil produk pertanian sebenarnya masih bisa terus ditingkatkan dengan jalan meningkatkan kualitas kemasan dan jaminan pasar terhadap produk tersebut. Permasalahan yang sering dijumpai dalam hal pemasaran produk pertanian (hasil olahan) adalah masih rendahya kualitas kemasan dari hasil olahan pelaku usaha yang ada di Kota Bima, ini akan terus menjadi atensi Pemerintah Kota Bima untuk terus meningkatkan kualitas hasil olahan yang ada. Ditahun 2020 Pemerintah Kota Bima telah membangun rumah kemasan, mudah-mudahan ini dapat dijadikan oleh para pelaku usaha yang ada di Kota Bima untuk meningkatkan kualitas hasil produk mereka.

    Sementara permasalahan yang dijumpai dalam hal pemasaran produk pertanian (benih padi) adalah kurangnya akses pasar.

Para penangkar yang ada sebenarnya mampu memperoduksi benih dalam skala besar, namun yang terjadi dilapangan, mereka hanya memproduksi benih padi dalam skala yang kecil atau untuk memenuhi kebutuhan lokal. Ini juga merupakan salah satu atensi Pemerintah Kota Bima dalam membantu para penangkar yang ada di Kota Bima. Ditahun 2022, Pemerintah Kota Bima telah membentuk BUMD Aneka Usaha yang nanti diharapkan mampu menampung hasil produksi para penangkar yang ada.

Produksi padi sebesar 20.460 ton tahun 2022 dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan beras masyarakat masih terjadi surplus sebesar 4.719,63 ton dengan asumsi rata-rata konsumsi perkapita/pertahun sebesar 114,6 kg/kapita/tahun (*Biro Humas dan Informasi Publik Kementan RI Tanggal 28 September 2017*) dan jumlah penduduk Kota Bima sebesar 149.567 jiwa.

2.2.2 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Produktivitas Perkebunan

Sasaran ini diterjemahkan kedalam indikator sasaran persentase pertumbuhan produksi perkebunan.

a. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kota Bima untuk sub sektor perkebunan diperoleh dengan menjumlahkan produksi 3 (tiga) komoditi utama sub sektor perkebunan yaitu tembakau, mete dan kelapa. Tahun 2022, capaian produksi komoditi perkebunan sebesar 157,02 ton dari yang ditargetkan 169 ton atau mengalami penurunan sebesar 11,65 ton atau capaianya hanya 6,91 %. Secara rinci capaian indikator disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Produksi Perkebunan Tahun 2022

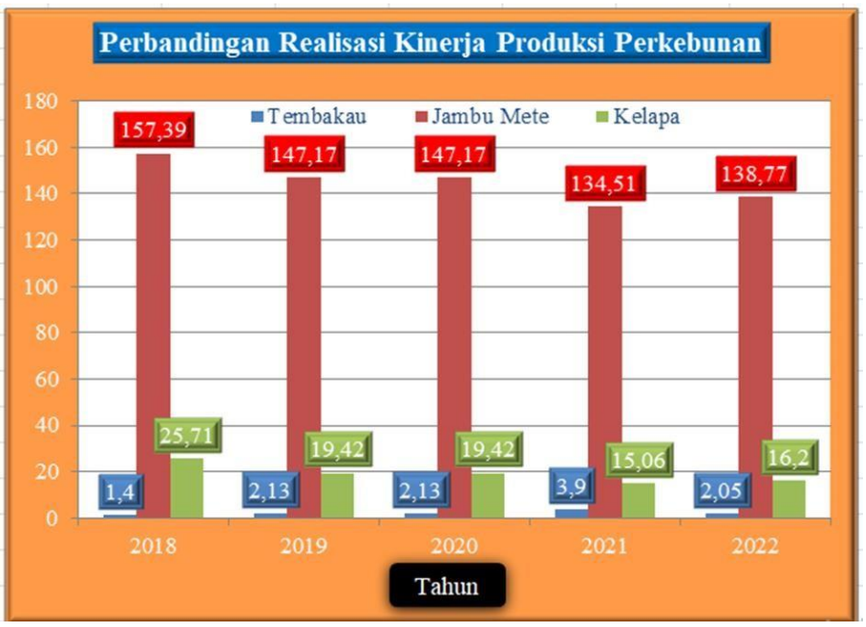
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Produksi Perkebunan	***Persentase pertumbuhan produksi perkebunan (%)***	***2,17***	***2,31***	***93,09***
	- Tembakau (Ton)	1,00	2,05	246,99
	- Jambu Mente (Ton)	146	138,77	95,18
	- Kelapa (Ton)	22	16,20	73,47
	Jumlah	**169**	**157,02**	**415,64**

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi perkebunan sebesar 2,31% dari

target 2,31% dengan tingkat capaian 93,09%. Komoditi tembakau merupakan penyumpang terbesar dari persentase capaian target kinerja indikator sasaran sebesar 246,99%. Tingkat capaian terendah dari sub sektor perkebunan adalah komoditi kelapa yakni hanya sebesar 73,47%.

b. Perbandigan Realisasi Terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi komoditi perkebunan secara keseluruhan tidak cukup siginifikan dari tahun-tahun sebelumnya.



Grafik 7. Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2018-2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan produksi komoditi perkebunan terutama selama dua tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup berarti. Bila dihitung dari realisasi awal tahun rencana (tahun 2020) sebesar 168,72 ton dikurangi realisasi akhir tahun rencana (2022) 157,02 ton terjadi penurunan produksi sebesar 11,7 ton. Penurunan tersebut tidak cukup siginifikan. Hal tersebut dimungkinkan karena belum berproduksinya tanaman hasil peremajaan pada lahan existing serta pada perluasan areal tanam. Peningkatan produksi dimungkinkan terjadi pada tiga sampai lima tahun kedepan setelah komoditi-komoditi tersebut memasuki fase generatif.

c. Perbandigan Realisasi Kinerja Terhadap Target Renstra

Secara keseluruhan realisasi komoditi perkebunan pada tahun 2022 tidak cukup tinggi. Selain diakibatkan oleh cuaca yang tidak memadai faktor terbesar adalah adanya pergeseran animo masyarakat terhadap komoditi jagung akibat permintaan pasar yang tinggi. Fenomena ini berakibat pada penurunan produksi tanaman lain yang diusahakan pada daerah tegalan.

Tabel 2.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2021 Terhadap Target Renstra (Ton)

Komoditi	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023
Tembakau	2,13	2,13	3,90	2,05	2,10
Jambu Mente	147,17	147,17	134,51	138,77	141,98
Kelapa	19,42	19,42	15,06	16,20	16,57
Jumlah	168,72	168,72	153,47	157,02	160,65

Tabel di atas menunjukan bahwa dari 3 (tiga) komoditi tanaman perkebunan secara keseluruhan tahun 2022 realisasinya cukup berarti bila dilhat dari target pertumbuhan produksi sebesar 2,17 %. Kelapa cenderung mengalami penurunan produksi pada akhir tahun Renstra. Perlu menjadi catatan bahwa komoditi tanaman pertanian khususnya komoditi perkebunan sangat rentan terhadap pengaruh eksternal seperti kondisi pasar (*supply demand*) dan cuaca termasuk perubahan kebijakan dan dukungan/bantuan pemerintah. Faktor-faktor tersebut tentunya akan berkontribusi terhadap pergeseran animo masyarakat terhadap komoditi yang diusahakan. Faktor lain adalah masih rendahnya animo masyarakat dalam mengusahakan komoditi perkebunan sebagai akibat dari masih rendahnya harga dari beberapa komoditi tersebut, untuk komoditi tembakau lahannya masih bersaing dengan komoditi tanaman pangan (padi dan jagung) sehingga perlu upaya khusus dalam pemberdayaan petani untuk membentuk kawasan khusus untuk produksi tanaman tembakau, begitu pula dengan komoditi perkebunan lainnya seperti jambu mete dan kelapa.

d. Perbandigan Realisasi Kinerja Terhadap Target Standar Regional Dan Nasional

Perbandingan indikator kinerja sasaran Dinas Pertanian Kota Bima untuk 3 (tiga) komoditi utama tanaman perkebunan dibandingkan dengan target regional (provinsi) dan target nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9. Perbandingan Produksi Komoditi Utama Tanaman Perkebunan Kota Bima dengan Target Provinsi dan Nasional (Ton)

Komoditi (Ton)	Realisasi Kota Bima (Ton)	Target Provinsi (Ton)	% Thdp Realisasi Provinsi	Target Nasional (Ton)	% Thdp Realisasi Nasional
Tembakau	2,05	84.490	0,002%	365.140	0,0006%
Jambu Mente	138,77	10.564	1,314%	132.660	0,1046%
Kelapa	16,20	47.140	0,034%	34.091.420	0,0001%
Jumlah	157,02	142.194	0,110%	34.589.220	0,0005%

Tabel di atas menunjukkan bahwa posisi produksi 3 (tiga) komoditi perkebunan Kota Bima hanya menyumbang 0,110% terhadap target produksi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 0,0005% terhadap target produksi nasional dari sub sektor tanaman perkebunan. Sumbangan terbesar diperoleh dari komoditi mete sebesar 1,314%.

e. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Indikator

Pencapaian sasaran strategis "*Meningkatnya Produksi Perkebunan*" tahun 2022 dengan indikator kinerja meningkatnya produksi perkebunan sudah mencapai target yang ditentukan yaitu 2,31% dari target 2,17 %. Komoditi tembakau memberikan sumbangan terbesar dari realisasi pencapaian target kinerja yakni sebesar 2,05% dengan capaian sebesar 246,99%, hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran petani tembakau untuk menambah luas tanam akibat adanya permintaan pasar khususnya tembakau lokal.

Peningkatan produksi komoditi perkebunan secara keseluruhan tidak cukup siginifikan akibat: (1) jumlah pohon yang berproduksi semakin berkurang, (2) pembalakan lahan, (3) belum dilakukan peremajaan tanaman jambu mete dan kelapa pada areal yang lebih luas, (4) berkurangnya animo masyarakat dalam menanam tanaman tembakau kemudian ditambah lagi dengan (5) bertambahnya animo masyarakat terhadap komoditi jagung yang mempengaruhi

penurunan penggunaan sumberdaya atau input produksi terhadap komoditi perkebunan.

2.2.3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Produktivitas Peternakan

Sasaran ini diterjemahkan kedalam indikator sasaran persentase pertumbuhan produksi peternakan.

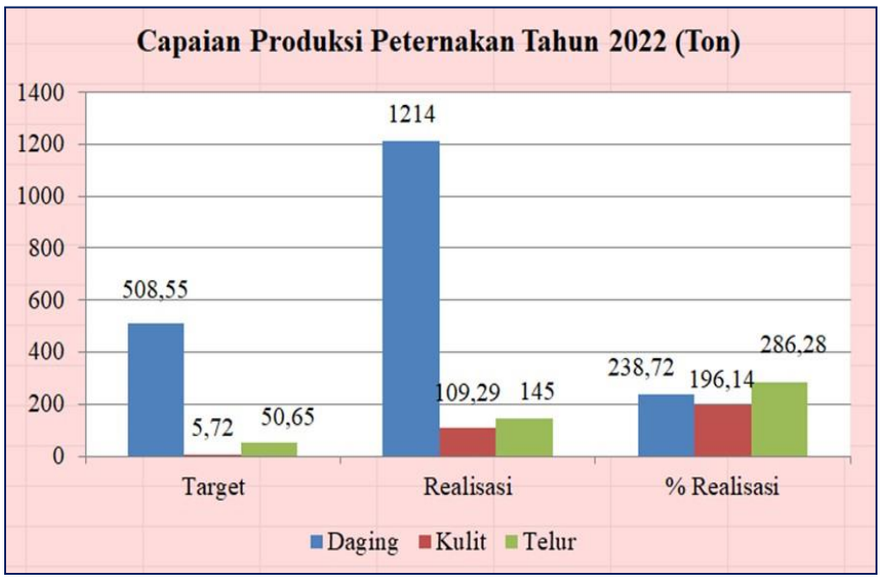
a. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kota Bima pada sub sektor peternakan diperoleh dengan menjumlahkan produksi 3 (tiga) komoditi utama sub sektor peternakan yaitu produksi daging, kulit dan telur. Tahun 2022, capaian produksi hasil peternakan sebesar 1.468,29 ton dari yang ditargetkan 615 ton atau mengalami peningkatan sebesar 853,37 ton atau capaiannya sebesar 138,78%. Produksi daging merupakan produksi peternakan yang mengalami peningkatan yang cukup siginiffikan dengan peningkatan produksi menjadi 1.214 ton dari target 509 ton atau 238,72% ini diakibatkan oleh pemenuhan kebutuhan daging masyarakat Kota Bima sebagian besarnya berasal dari daging yang masuk dari Kabupaten Bima dan Dompu, ini terlihat dari daging yang dipasarkan di Pasar Raya Kota Bima sebagian besarnya berasal dari kabupaten tetangga. Secara rinci capaian indikator disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Produksi Peternakan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Produksi Perternakan	***Persentase pertumbuhan produksi peternakan (%)***	***1,10***	***1,30***	***238,78***
	- Daging (Ton)	509	1.214	238,72
	- Kulit (Ton)	56	109,29	196,14
	- Telur (Ton)	51	145	286,28
	Jumlah	**615**	**1.468,29**	**721,14**

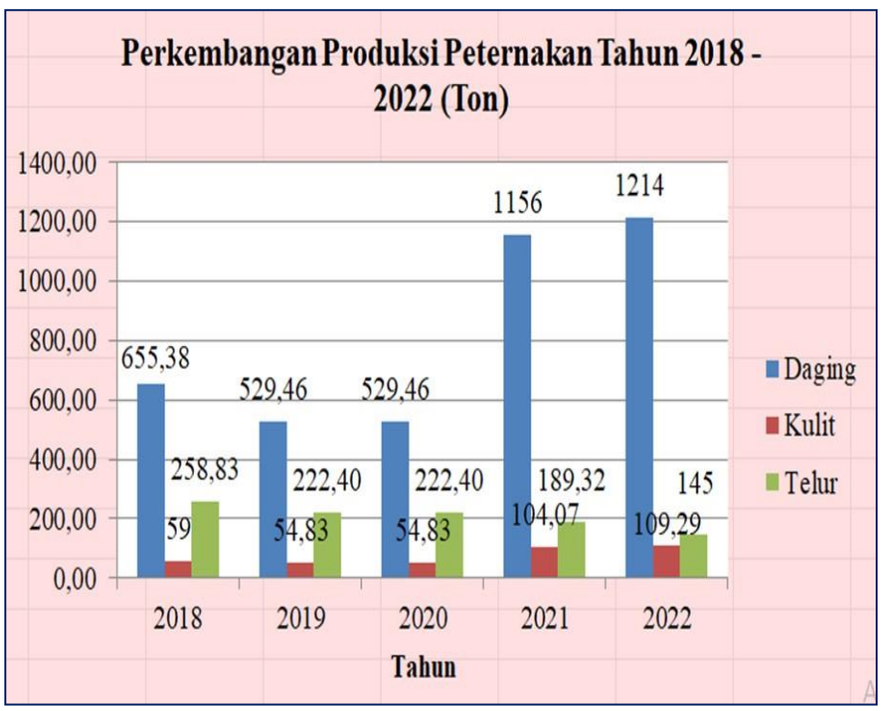
Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi peternakan sebesar 1,30% dari target 1,10%. Produksi daging merupakan penyumpang terbesar dari persentase capaian target kinerja indikator sasaran sebesar 238,72%. Tingkat capaian terendah dari sub sektor peternakan adalah produksi kulit yakni hanya sebesar 196,14%.



Grafik 8. Capaian Produksi Peternakan Tahun 2022

b. Perbandigan Realisasi Terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi produksi peternakan secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan terjadinya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.



Grafik 9. Perkembangan Produksi Hasil Peternakan Tahun 2018-2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan produksi hasil peternakan menunjukkan kecenderuangan peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi produksi daging merupakan penyumbang tertinggi atas peningkatan produksi sub sektor peternakan. Hal ini

nampak pada dua tahun terakhir bahwa peningkatan produksi daging cukup signifikan dengan meningkatnya animo dan perhatian pemerintah terhadap budidaya penggemukan ternak besar maupun trenak kecil akibat meningkatnya tingkat konsumsi daging dan daya beli masyarakat akan sumber protein yang bersumber dari daging hewan ternak.

c. Perbandigan Realisasi Kinerja Terhadap Target Renstra

Secara keseluruhan realisasi produksi hasil peternakan tahun 2020 cukup tinggi dari target yang ditetapkan.

Tabel 2.11. Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Hasil Peternakan Tahun 2020 Terhadap Target Renstra (Ton)

Komoditi	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023
Daging	529,46	529,46	1.156,00	1.214,00	1.229,83
Kulit	54,83	54,83	104,07	109,29	110,71
Telur	222,40	222,40	189,32	145,00	146,89
Jumlah	**806,69**	**806,69**	**1.449,39**	**1.468,29**	**1.487,44**

Tabel di atas menunjukan bahwa komoditi utama produksi hasil peternakan tahun 2022 hanya daging realisasinya mengalami peningkatan produksi pada akhir tahun Renstra. Tahun 2019 akumulasi realisasi produksi hasil peternakan 806,69 ton sementara pada akhir tahun 2022 realisasi produksi mencapai 1.468,29 ton, artinya terdapat peningkatan produksi sebesar 661,60 ton dengan tingkat capaian sebesar 82,01%.

d. Perbandigan Realisasi Kinerja Terhadap Target Standar Regional Dan Nasional

Perbandingan indikator kinerja sasaran Dinas Pertanian Kota Bima untuk 3 (tiga) komoditi utama hasil peternakan dibandingkan dengan target regional (provinsi) dan target nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12. Perbandingan Produksi Hasil Peternakan Kota Bima dengan Target Provinsi dan Nasional (Ton)

Komoditi (Ton)	Realisasi Kota Bima (Ton)	Target Provinsi (Ton)	% Thdp Realisasi Provinsi	Target Nasional (Ton)	% Thdp Realisasi Nasional
Daging	1.214	161.379	0,0075	9.823.220	0,0124
Telur	145	53.341	0,0027	33.946.610	0,0004
Jumlah	**1.359**	**214.720**	**0,0063**	43.769.840	0,0031

Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi hasil peternakan Kota Bima menyumbang 0,0063% terhadap realisasi Provinsi NTB dan 0,0031% terhadap realisasi nasional. Kontribusi terbesar dari disumbang oleh produksi daging.

e. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Indikator

Pencapaian sasaran strategis "*Meningkatnya Produksi Peternakan*" dengan indikator kinerja meningkatnya produksi peternakan sudah melampaui target yang ditentukan yaitu rata-rata capaian sebesar 4,36%. Hal tersebut dimungkinkan karena (1) realisasi Inseminasi Buatan melampaui target, (2) meningkatnya animo masyarakat untuk memelihara ternak unggas akibat meningkatnya permintaan pasar akan daging unggas, (3) meningkatnya penggunaan bibit unggul dan pakan berkualitas, dan (4) meningkatnya teknik budidaya dan penerapan teknologi.

Pencapaiannya ini tidak cukup besar dari yang telah ditargetkan, dikarenakan oleh jumlah pemotongan ternak di Kota Bima menurun diakibatkan oleh (1) pengiriman ternak potong dalam keadaan hidup keluar daerah (ternak yang diantarpulaukan), (2) bebasnya daging dari luar masuk ke Kota Bima, karena tinggi rendahnya pemotongan di Kota Bima sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar lokal, dan pada kenyataannya permintaan pasar lokal sebahagian besar dipenuhi oleh daging impor dari luar Kota Bima.

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Bima

No	Indikator *)	SPM / Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Ton)											
	- Padi (GKP)	-	-	28.980	30.006	29.728	30.912	32.177	29.377	30.135	30.912	
	- Jagung (PK)	-	-	31.035	34.955	31.835	39.007	32.070	37.070	38.026	39.007	
	- Kedelai (BK)	-	-	500	517	200	129	196	123	126	129	
	- Kacang Tanah (BK)	-	-	374	390	384	213	387	202	207	213	
	- Kacang Hijau (BK)	-	-	11	12	22	16	29	15	15	16	
	- Ubi Kayu (UB)	-	-	1.122	1.151	1.181	1.391	1.223	1.322	1.356	1.391	
	- Ubi Jalar (UB)	-	-	25	26	26	0	0	0	0	0	
II.	Produksi Perkebunan (Ton)											
	- Tembakau	-	-	0,81	2,13	0,83	1,01	0,87	0,98	1,00	1,01	
	- Jambu Mente	-	-	143,27	144,11	145,79	144,11	160,00	139,17	141,62	144,11	
	- Kelapa	-	-	21,66	19,52	22,05	9,75	15,00	9,42	9,59	9,75	
III.	Produksi Peternakan (Ton)											
	- Produksi Daging	-	-	505,30	520,36	508,55	1.162,43	1.408,46	1.147,46	1.154,92	1.162,43	
	- Produksi Kulit	-	-	51,30	53,34	55,72	152,70	232,83	150,73	151,71	152,70	
	- Produksi Telur	-	-	216,40	251,63	50,65	591,62	222,40	584,00	587,80	591,62	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kota Bima dengan kepemilikan lahan yang sempit (keterbatasan lahan) pertanian dan padang pengembalaan yang tidak cukup luas menjadi faktor pembatas sekaligus menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian dalam menumbuhkembangkan sektor pertanian. Keterbatasan itu juga mendorong Dinas Pertanian Kota Bima untuk mendorong dan menumbuhkan komoditi yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sehingga mampu mengembangkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan. Dalam perjalanannya Dinas Pertanian Kota Bima terus berupaya memaksimalkan sumberdaya yang ada dengan terus mengikuti dinamika permasalahan dan kebutuhan. Persoalan utama yang dihadapi sektor pertanian Kota Bima adalah jaminan kualitas produk dipasar sehingga perlu mendorong penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra komoditi unggulan sebagai basis dengan fokus pada proses produksi, panen dan pascapanen sampai dengan proses distribusi.

Dalam proses produksi, masih rendahnya produktivitas faktor penyebab dominan adalah rendahnya pengetahuan dan penguasaan teknologi (adopsi) ditingkat petani serta waktu dan pola tanam. Permasalahan tersebut harus dijawab dengan intensifikasi penyuluhan dan pelatihan yang berkualitas serta berbasis komoditi unggulan.

Permasalahan utama tersebut di atas, maka isu-isu strategis dan mendasar yang harus diterapkan guna membangun sektor pertanian Kota Bima dengan menerapkan konsep *competitiveness* dan *comparativeness* antara lain dengan: (1) indentifikasi dan penguatan sumberdaya lokal; (2) menciptakan kemitraan dan konsolidasi yang solid antara pelaku utama, pelaku usaha, *stakeholder* dan pemerintah; (3) peningkatan kualitas dan kuantitas produk serta berkelanjutan melalui penerapan teknologi sesuai anjuran; (4) membangun dan menyediakan prasarana dan sarana, penguatan kelembagaan penyuluh dan petani, penguatan akses pasar dan permodalan.

ISU NASIONAL

Dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Secara nasional,

diperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7 - 6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi ditandai dengan perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia di antaranya stabilisasi inflasi, turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran, turunnya tingkat rasio gini dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar.

Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani. Orientasi pertumbuhan ekonomi bukan hanya mengejar kepada target pertumbuhan, tetapi bagaimana kualitas dan distribusi ekonomi (kesejahteraannya) semakin merata. Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam 5 (lima) tahun ke depan melalui proses transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan transformasi sektor jasa. Paradigma pembangunan pertanian yang hanya menitikberatkan di sektor hulu, perlu diperbaharui dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh atau disebut pertanian untuk pembangunan (Agriculture for Development).

Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju zero waste (tidak ada yang disia-siakan).

Pembangunan pertanian yang menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan ke-4 dan kelanjutan dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN keempat (2020-2024) ini, masyarakat Indonesia diharapkan sudah

mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk di sektor pertanian. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan dalam RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian periode 2020-2024

Kondisi umum selama periode 2015-2019, sektor pertanian menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Agenda prioritas Kabinet Kerja “NAWACITA” mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di antaranya: mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri dan melindungi serta menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

Untuk mencapai target dalam Nawacita, Kementerian Pertanian telah menerapkan strategi untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi: (1) pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah serta peningkatan produksi gula dan daging; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; (5) peningkatan pendapatan keluarga petani; dan (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan strategi tersebut, di antaranya: (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4) penguatan kelembagaan petani; (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan; (6) pengembangan serta penguatan bioindustri dan bioenergi; dan (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian. Penguatan kondisi ketahanan pangan dan peningkatan daya saing dapat dilihat pada kondisi umum dan permasalahan sektor pertanian.

Adapun kondisi permasalahan dan potensi umum pembangunan pertanian di Indonesia selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

a. Keanekaragaman Hayari



Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan potensi sumber daya pertanian yang besar, termasuk plasma nutfah yang melimpah (*mega biodiversity*). Keanekaragaman hayati (*biodiversity*) darat Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sejak lama telah diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografis yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun.

b. Lahan Pertanian

Indonesia juga memiliki potensi lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar lahan tersebut merupakan lahan suboptimal, seperti lahan kering, rawa pasang surut, dan rawa lebak yang produktivitasnya rendah karena berbagai kendala, seperti kekurangan dan/atau kelebihan air, tingginya kemasaman tanah dan salinitas, serta keracunan dan kahat unsur hara. Apabila lahan suboptimal dapat dimanfaatkan melalui rekayasa penerapan inovasi teknologi budi daya dan dukungan infrastruktur yang memadai, maka lahan tersebut dapat diubah menjadi lahan-lahan produktif untuk pengembangan budi daya berbagai komoditas pertanian.



Data Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan (2016) menunjukkan total luas daratan Indonesia sekitar 191,1 juta ha, yang terbagi atas 43,6 juta ha lahan

basah dan 144,5 juta ha lahan kering. Dari total luasan tersebut, 15,9 juta ha di antaranya berpotensi untuk areal pertanian, yang terdiri atas 3,4 juta ha lahan APL (Areal Penggunaan Lain), 3,7 juta ha lahan HP (Hutan Produksi), dan 8,9 juta ha lahan HPK (Hutan Produksi dapat Dikonversi). Potensi ketersediaan sumber daya lahan untuk pengembangan padi sawah seluas 7,5 juta ha, tanaman pangan, cabai, bawang merah dan tebu 7,3 juta ha, serta tanaman cabai dan bawang merah dataran tinggi 154,1 ribu ha.

Luas dan sebaran hutan, sungai, rawa, dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi dan merata sepanjang tahun sesungguhnya juga merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik. Waduk, bendungan, embung, air tanah dan air permukaan potensial mendukung pengembangan usaha pertanian. Berdasarkan analisis ketersediaan air, diprediksikan bahwa kebutuhan air sampai tahun 2020 untuk Indonesia masih dapat dipenuhi dari air yang tersedia saat ini. Proyeksi permintaan air untuk tahun 2020 sebesar 18% dari total air tersedia, yang digunakan sebagian besar untuk keperluan irigasi (66%), sisanya 17% untuk rumah tangga, 7% untuk perkotaan dan 9 % untuk industri. Sedangkan berdasarkan analisis yang sama untuk satuan pulau, pada tahun 2020 Pulau Bali dan Nusa Tenggara akan membutuhkan sebanyak 75% dari air yang tersedia saat ini di wilayahnya, disusul Pulau Jawa sebesar 72%, Sulawesi 42%, Sumatera 34%, adapun Kalimantan dan Maluku-Papua masing-masing membutuhkan 2,3% dan 1,8% dari total air tersedia saat ini.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah. Permasalahan di sektor pertanian dan pangan bisa di kategorikan sebagai berikut :

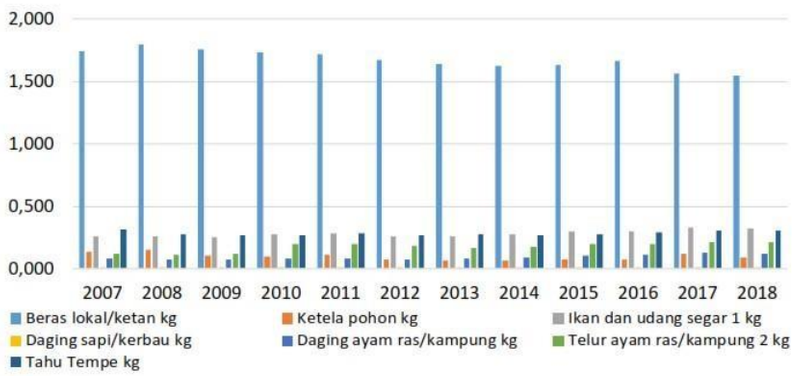
a. Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi



Berdasarkan data dan proyeksi pertumbuhan Penduduk 2015-2045, diperkirakan pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318,96 juta atau tumbuh 24.80% (63,37 Juta Jiwa) dari 2015. Sektor pertanian dituntut memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh penduduk Indonesia sepanjang waktu sebagai syarat dasar

dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja nasional.

Selanjutnya, terkait konsumsi per kapita, terdapat 5 (lima) bahan makanan penting nasional yang konsumsinya berpotensi terus meningkat yaitu: beras, ikan, udang segar, tahu-tempe, telur ayam ras/kampung, dan daging ayam ras/kampung. Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan, maka diperlukan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan swasembada padi (data KSA sudah melebihi konsumsi nasional), dan meningkatkan produksi jagung pakan (untuk pemenuhan budidaya ayam ras/kampung untuk telur dan dagingnya) serta kedelai (bahan baku tahu tempe). Rata-rata konsumsi per kapita beberapa macam bahan pangan penting di Indonesia 2007-2018 dapat dilihat pada gambat di bawah ini: (Sumber: BPS Tahun 2018).



Dalam rangka ketersediaan dan akses pangan penduduk berdasarkan kelompok pengeluaran, perlu diketahui bahwa: (1) Ketersediaan kalori pangan penduduk dalam rentang waktu 2013-2017 selalu lebih tinggi dari angka kecukupan dan konsumsinya, dan rata-rata tingkat konsumsinya masih di bawah angka kecukupannya; (2) Ketersediaan protein penduduk dalam rentang waktu 2013-2017 selalu lebih tinggi dari angka kecukupan dan konsumsinya; (3) dalam kurun waktu 2013-2015 rata-rata tingkat konsumsinya masih dibawah angka kecukupannya; dan (4) setelah itu (kurun waktu 2015-2017) rata-rata tingkat konsumsinya telah di atas angka kecukupannya. Dengan demikian, ketersediaan kalori dan protein secara nasional mengalami surplus, namun demikian jika konsumsi pangan dilihat dari kelompok pengeluaran penduduk, konsumsi pada kelompok kuintil 1 sampai 2 masih di bawah standar kecukupan gizi nasional. Hal ini, disebabkan permasalahan akses penduduk berpenghasilan rendah terhadap pangan

karena kemiskinan walaupun secara nasional ketersediaan kalori dan protein dalam kondisi surplus.

Permasalahan pada aspek gizi, isu stunting, gizi buruk dan kekurangan gizi pada wanita usia produktif merupakan hal yang mengemuka. Indonesia termasuk dalam 26 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi (Global Nutrition Report, 2018). Saat ini sebanyak 150,8 juta anak mengalami stunting di seluruh dunia, dan di antaranya 7,3 juta merupakan anak yang berada di Indonesia. Stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, berakibat hilangnya 11% PDB serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu, stunting juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan menyebabkan kemiskinan antar generasi. World Food Programme (WFP) dalam studi tentang biaya pangan Indonesia 2017, menyatakan bahwa secara nasional hanya 62% rumah tangga Indonesia yang dapat membeli pangan bergizi dikarenakan hambatan daya beli rumah tangga miskin, dan program subsidi pemerintah untuk masyarakat miskin belum memenuhi standar kecukupan gizi.

b. Defisit Perdagangan Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Karakteristik usaha pertanian di Indonesia adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat produktivitas dan mutu produk yang beragam. Dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor sebagai instrumen non tariff barier yang kerap diberlakukan banyak negara di era globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya saing produk-produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor.

Kondisi tersebut akan semakin diperparah apabila terjadi pelemahan daya Beli konsumen pada Neraca perdagangan pertanian Indonesia periode 2015-2019 menunjukkan nilai surplus rata-rata US$ 11,9 miliar/tahun. Subsektor perkebunan merupakan penyumbang ekspor dan surplus terbesar di sektor pertanian. Sementara perdagangan subsektor pertanian Indonesia lainnya masih dalam posisi defisit. Ke depan perlu diupayakan bagaimana meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk serta memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerjasama ekonomi

antar wilayah (kawasan), baik dalam skala nasional (antardaerah) maupun kerja sama regional (antarnegara).

c. Status dan Luas Kepemilikan Lahan

Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor pertanian adalah konversi lahan yang tidak hanya menyebabkan produksi pangan turun, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, yang berakibat semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak. Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Luas lahan menjadi salah satu faktor penentu tercapainya target produksi. Khusus untuk lahan padi sawah, penetapan luas baku lahan sawah dilakukan melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN. Penghitungan luas lahan baku sawah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dengan menggunakan metode survei KSA yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan BPS, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Badan Informasi dan Geospasial (BIG); serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Kementerian Pertanian. Sejak tahun 2017, perhitungan luas lahan baku sawah dilakukan melalui dua tahapan yaitu menggunakan citra satelit resolusi sangat tinggi dan melalui validasi ulang di lapangan. Pada tahun 2018, dua tahapan tersebut dilakukan di 16 provinsi sentra produksi padi yang mencakup 87 persen dari total luas lahan baku sawah di Indonesia.

Luas lahan baku sawah nasional menurut Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 399/KEP-23.3/X/2018, tanggal 8 Oktober 2018, tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2018 seluas 7.105.145 Hektar atau berkurang 645.854 Hektar dari luas lahan 2013. Pada 2019, Kementerian ATR/BPN kembali menetapkan luas lahan baku sawah nasional 2019 berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019 yaitu sebesar 7.463.948 hektar.

Selain masalah luas lahan yang menurun, masalah lain yang terkait dengan lahan yaitu kepemilikan lahan oleh petani yang semakin sempit.

Berdasarkan Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) tahun 2018, luas lahan pertanian yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian kurang dari 0,5 hektar sebanyak 15,89 juta rumah tangga atau 59,07% dari total rumah tangga petani. Rumah tangga petani yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 14,62 juta rumah tangga pada tahun 2013 menjadi 15,89 juta rumah tangga pada tahun 2018. Kondisi kepemilikan lahan ini disebabkan oleh: (1) meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum; (2) terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan; dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah.

d. Pendidikan dan Usia Petani

Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil SUTAS BPS tahun 2018, sebanyak 27,4% tenaga kerja di sektor pertanian merupakan tenaga kerja yang berusia antara 45-54 tahun, kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 24,4% dan disusul tenaga kerja kelompok usia 55-64 sebanyak 20,8%. Dari sisi usia petani, diketahui bahwa usia muda di sektor pertanian masih cukup tinggi, walaupun semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian.

Dilihat dari sisi pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat Sekolah Dasar mencapai 66,42%, disusul oleh lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 16,13% dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 14,33%. Dengan pendidikan yang masih didominasi SLTP ke bawah dan munculnya kelompok petani baru yang belum berpengalaman, diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (vocational training), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru.

e. Kemiskinan Perdesaan

Pembangunan pertanian selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan penghasil devisa nasional melalui ekspor, juga sebagai faktor utama pertumbuhan wilayah perdesaan. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah, sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat

di perdesaan. Berdasarkan data BPS (2018), penghasilan utama penduduk Indonesia di 73 ribu desa (87%) berasal dari sektor pertanian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan harus dilakukan dengan membangun pertanian dan perdesaan.

Subsektor padi dan palawija berkontribusi terhadap 60% penghasilan penduduk desa, yang diikuti oleh perkebunan karet dan kelapa sawit sebesar 16%, hortikultura 5%, kelapa 5%, kopi 3%, kakao 2% dan lainnya 9%. Peternakan sebagai sumber protein nasional hanya berkembang di 1% wilayah pertanian perdesaan. Kepemilikan lahan/ternak, teknologi, kompetensi, inovasi, produktivitas, efesiensi, serta kepastian harga dan pasar akan sangat berpengaruh terhadap kemiskinan perdesaan. Laju penurunan kemiskinan perdesaan adalah sebesar 1,08% per tahun, lebih rendah jika dibandingkan perkotaan. Secara nasional jumlah penduduk miskin menunjukan tren yang menurun (3,32%/tahun) selama periode 2015-2019.

Masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan menunjukkan bahwa penduduk desa yang sebagian besar bekerja sebagai petani belum menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Arus uang yang mengalir ke desa baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber pembiayaan lainnya belum sepenuhnya dinikmati penduduk miskin di perdesaan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, anggaran untuk kedaulatan pangan cukup tinggi mencapai Rp 96,2 triliun pada tahun 2019.

f. Dampak Disrupsi Revolusi Industri 4.0

Perubahan dunia yang begitu cepat dengan berkembangnya inovasi dan teknologi mendorong revolusi baru yang disebut revolusi industri 4.0. Revolusi ini ditandai dengan penggunaan mesin-mesin otomatis yang terintegrasi dengan jaringan internet. Semua itu mengubah cara manusia berinteraksi hingga pada level yang paling mendasar, sekaligus dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri termasuk industri pertanian.

Di era digitalisasi pada revolusi industri 4.0, para pemangku kepentingan di sektor pertanian harus mampu mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Salah satu kunci dari perubahan ini adalah penggunaan internet oleh petani. BPS (2018) menyatakan bahwa potensi internet di tingkat petani dan perdesaan sebesar 93,9%.

Sebagian besar pengguna internet melakukan akses internet melalui Smartphone/telepon seluler (96,6%). Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) tahun 2018, terdapat 77.172 (91,95%) desa/kelurahan yang telah dapat menerima sinyal telepon selular. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2011 dan 2014, di mana desa/kelurahan yang dapat menerima sinyal telepon selular hanya sebanyak 70.610 (89,82%) desa/kelurahan pada tahun 2011 dan 74.473 (90,61%) desa/kelurahan pada tahun 2014.

Dari total petani Indonesia (33,4 juta petani), terdapat 4,5 juta petani menggunakan internet (13%). Secara umum, sinyal internet telah merata pada sebagian besar perdesaan dan telah terjangkau sinyal 2G, 3G dan 4G. Berdasarkan data tersebut, era industri 4.0 yang salah satunya menggunakan keterhubungan semua perangkat dengan internet dapat dijadikan modal awal transformasi digital di pertanian.

g. Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Perubahan iklim global merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi baik secara fisik agroekologi sumber daya pertanian maupun kesejahteraan petani. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan serta berkurangnya hasil produksi pertanian.

Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celsius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2-3 persen per tahun. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata luas lahan sawah yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 188.662 Ha terkena banjir (52.265 ha di antaranya puso karena banjir) dan 255.974 Ha terkena kekeringan (75.246 ha di antaranya puso karena kekeringan).

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan antisipasi dan mitigasi dampak

perubahan iklim adalah melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim dan modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Di samping itu, perlu menciptakan teknologi tepat guna dan menciptakan varietas yang memiliki potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah, toleran kenaikan suhu, kekeringan, banjir atau genangan dan salinitas.

h. Keterbatasan akses pembiayaan bagi petani

Pembiayaan adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan usaha pertanian yang menguntungkan dan berkelanjutan. Namun demikian aksesibilitas petani terhadap pembiayaan merupakan masalah utama yang sering dikeluhkan oleh petani. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang berbagai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh petani. Di sisi lain lembaga pembiayaaan masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang kurang atraktif karena dianggap sangat berisiko (high risk), tergantung musim dan jaminan harga yang tidak pasti.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 menyatakan hanya sekitar 15 persen dari sekitar 8.000 sampel petani yang sudah mengakses kredit bank, sedangkan mayoritas sebesar 52 persen masih mengandalkan modal sendiri, koperasi, kerabat, dan lembaga keuangan non-Bank lainnya. Sementara itu, 33 persen petani lainnya mengandalkan kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan kredit usaha rakyat (KUR). Meskipun skema pembiayaan usaha pertanian telah tersedia tetapi kondisi masyarakat petani masih dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk menambah permodalan melalui lembaga pembiayaan dan investasi. Pemerintah telah memberi berbagai fasilitas pembiayaan untuk memudahkan petani untuk mengakses permodalan untuk usaha taninya. Namun dalam implementasinya petani masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal sehingga hasilnya belum sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya realisasi penyaluran KUR untuk sektor pertanian.

Ketidakmampuan petani untuk mengakses sumber pemodalan formal diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan. Tantangan ke depan dari kondisi ini adalah bagaimana berkolaborasi dengan lembaga pembiayaan agar berpihak dan mau menyalurkan modalnya ke sektor pertanian.

ISU REGIONAL

1. Isu-Isu Pembangunan Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Isu pembangunan pertanian di NTB sangat kompleks mulai dari ketersediaan lahan, alih fungsi lahan pertanian, ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, alat dan mesin pertanian, pengolahan hasil, kebijakan harga dan pemasaran serta implementasi dan integrasi program berbagai SKPD dan berbagai kebijakan lainnya.

Ketersediaan Lahan Pertanian

Ketersediaan lahan pertanian mengalami pertumbuhan yang lamban sekali. Penambahan lahan sawah melalui percetakan sawah baru masih terbatas pada tambahan lahan saja dan belum mendapat jaringan irigasi. Artinya pencetakan lahan sawah yang ada selama ini tidak diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi. Implikasi dari kondisi yang ada tersebut yaitu tidak mengakibatkan peningkatan produksi dan kualitas produksi.

Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi isu sentral pembangunan pertanian saat ini. Alih fungsi lahan tersebut dapat dilakukan oleh individu, berkelompok, pihak swasta dan bahkan oleh pemerintah melalui pemberian ijin kepada pihak swasta. Bentuk alih fungsi lahan sawah khususnya yaitu untuk perumahan penduduk, fasilitas umum, perkantoran dan sebagainya. Alih fungsi lahan tersebut berdampak langsung terhadap penurunan hasil produksi pertanian dan berkurangnya nilai guna dari bendungan, cek dam dan embung yang merupakan investasi dari pemerintah. Untuk melindungi lahan pertanian tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perda NTB Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan Berkelanjutan (LP2B). Kedua kebijakan tersebut belum diakomodiri oleh pemerintah daerah (kabupaten dan kota) di Provinsi NTB.

Prasarana dan Sarana Pertanin

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki jumlah bendung, embung dan cek dam terbanyak di Indonesia, namun keterjangkauannya belum merata, sehingga sarana dan prasarana terus dibangun dan mengalami perkembangan. Jumlah bendung, embung dan cek dam pada tahun 2017 sekitar 163 unit dan khususnya prasarana pertanian seperti embung telah

mengalami perbaikan sejumlah 11.400 unit mulai dari tahun 2012. Demikian juga kondisinya dengan Jalan Usaha Tani (JUT) selalu bertambah setiap tahunnya. Tahun 2012 panjang jalan usaha tani sekitar 36.000 meter dengan sebaran 48,06% berada di Kab. Lombok Timur dan 26,39% berlokasi di Kab. Lombok Tengah dan sisanya 24,55% berada di kabupaten lain.

Alat dan Mesin Pertanian

Alat dan mesin pertanian selalu berkembang sertiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah alat mesin pertanian yaitu 1495 unit dan pada tahun 2014 bertambah menjadi 1565 unit dan kemudian pada tahun 2017 terdapat tambahan sejumlah 522 unit termasuk traktor roda 4. Distribusi hand traktor tersebut sebadian besar berada di Kabupaten Sumbawa, Lombok Timur dan Bima. Selain hand traktor terdapat juga tambahan alat pertanian berupa pompa air dan alat panen padi (combine) dan sebagainya dengan ragam jumlah yaitu 14 jenis alat dan mesin pertanian.

Pengolahan Hasil Pertanian

Hasil produksi pertanian seperti tanaman pangan dan hortikultura masih belum banyak memberikan nilai tambah karena hampir seluruh komoditas pertanian diperdagangkan dalam bentuk produk primer, khususnya jagung, bawang dan cabe. Kondisi ini yang menyebabkan munculnya resiko pada pengusahaannya. Pasar jagung sangat ditentukan oleh permintaan dari luar provinsi, demikian juga halnya dengan bawang merah dan cabe. Permintaan lokal terhadap komoditas tersebut sangat lemah, mengingat bahwa industri yang berbahan baku jagung dan hortikultura sangat terbatas dengan volume yang rendah. Peumbuhan industri berbahan baku jagung dan hortikultura perlu didorong pertumbuhannya oleh pemerintah sehingga mampu mendatangkan nilai tambah dan secara regional Provinsi NTB dapat berkembang menjadi sektor basis.

Distribusi Sarana Produksi

Permasalahan distribusi sarana produksi menjadi isu strategis yang mendapat perhatian serius dalam pembangunan pertanian pangan dan hortikultura saat ini. Ketersediaan pupuk di lokasi pada saat dibutuhkan sering menjadi persoalan yang dihadapi petani. Terganggunya ketersediaan pupuk terjadi pada saat Musim Hujan

(MH). Hal ini diduga akibat dari adanya persaingan dari usahatani padi pada lahan sawah dan jagung untuk lahan kering, sehingga pupuk yang seharusnya disediakan untuk padi namun digunakan untuk padi jagung pada lahan kering.

Kondisi ini dapat tejadi dikarenakan kurang sempurnanya perencanaan kebutuhan pupuk pada masing-masing lokasi, terutama perencanaan kebutuhan untuk pupuk jagung pada lahan kering. Peran kelembagaan yang terlibat dalam distribusi pupuk seharusnya seharusnya ditertibkan. Bisa saja kelembagaan yang diberikan tanggungjawab untuk mendistribusikan pupuk untuk padi, namun dengan adanya rent seeking pada usahatani jagung, maka pupuk tersebut didistribusikan untuk usahatani jagung.

Pasar dan Kebijakan Dasar (*Floor Price*)

Pasar komoditas jagung dan hortikultura sangat tergantung pada pasar luar daerah. Kondisi ini yang menyebabkan petani berada pada kondisi prices taker, sehingga menyerah pada kondisi pasar monopsoni. Pasar tidak mampu mengahadapi para pembeli yang bersatu. Lemahnya daya tawar petani akan berakibat jangka panjang yaitu menurunnya gairah untuk berproduksi.

Kebijakan harga sesungguhnya merupakan instrumen untuk mendorong dan menggairahkan petani untuk berproduksi. Namun kebijakan harga seperti kebijakan harga dasar masih belum optimum dalam implementasinya. Sering sekali petani menerima harga jauh lebih rendah dari harga dasar yang berlaku. Komoditas pangan seperti padi jagung dan kedele sudah memiliki harga dasar, sedangkan komoditas bawang merah dan cabe belum mempunyai harga dasar, sehingga harga komoditas tersebut sangat berpluktuatif sekali.

Program Terintegratif

Isu yang sering ditemui dalam penyusunan perencanaan adalah adanya keegoaan masing-masing SKPD atau dinas terkait. Setiap SKPD menyusun perencanaan sesuai dengan tupoksi masing-masing, namun tidak ada kolaborasi antar SKPD, Kelembagaan ini belum mengkaji secara lengkap visi misi pembangunan pertanian secara utuh, sehingga belum mampu menyusun program dan kegiatan bersama sebagai tujuan bersama untuk mencapai misi bersama.

Sebagai contoh, pada saat petani mengembangkan produk pertanian tertentu, maka petani akan menghadapi persoalan teknis, kelembagaan, pasar, pengolahan dan keuangan. Petani butuh suatu

pengetahuan dan teknlogi usahatani, petani butuh masalah kelembagaan keuangan, petani butuh kepastian harga dan pasar.

Dalam pembangunan pertanian tentu seharusnya banyak melibatkan sektor terkait, seperti sekto teknis, sektor industri pengolahan dan pasar, sektor keuangan/koperasi dan ketahanan pangan. Dari sektor yang terlibat tersebut, maka dapat disusun SKPD yang seharusnya terintegrasi yaitu Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi.

Sebagai Lumbung Pangan Nasional khususnya produksi ketersediaan pangan pokok pasca gempa dan harga kebutuhan pangan pokok terkendali ditunjang dengan angka pangan pokok NTB pada pertengahan 2019 terkendali dalam rentang 3,5 kurang dari 1% ini merupakan sinergi yg kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Capaian NTB Gemilang Pertanian dan Perkebunan:

a. Inflasi terkendali dari sasaran 3,5% tetap terjaga pertengahan 2019 kurang dari 1%;

b. Ketersediaan stock pangan beras NTB dan bahan pangan lainnya seperti cabe, bawang merah dan sayuran lainnya tetap terjaga, bahkan menunjukkan tren peningkatan signifikan;

c. TPID NTB mendapat penghargaan terbaik nasional dalam menjaga harga, ketersediaan dan inflasi di NTB;

d. Stock pengadaan beras nasional NTB urutan 4 nasional;

e. Dimulainya implementasi industrialisasi pertanian dimulai dari daerah terdampak bencana 2018 dengan teknologi *Drip Irigation* guna peningkatan Indeks Pertanaman lahan tadah hujan;

f. Rehabilitasi jaringan irigasi berdampak kekurangan air irigasi di beberapa wilayah kabupaten/kota dilakukan melalui sinergisitas pemerintah pusat dan daerah;

g. Trend kenaikan produksi padi dari angka proyeksi 2019 BPS 2 juta ton menjadi 2,4 juta ton Angka Ramalan 2 BPS 2019;

h. Indikator kesejahteraan petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) terjaga diatas 100% yakni rata-rata 103%.

NTB merupakan daerah penyangga pangan untuk propinsi tetangga seperti Bali dan NTT, dan bila sektor ini digarap lebih serius dari hulu sampai hilir, dari proses penanaman, pasca panen hingga ke industrilisasi

atau pengolahan, maka pertanian di NTB bisa menjadi sumber penghasilan atau kekuatan yang mensejahterakan warga masyarakatnya.

2. Isu-Isu Pembangunan Sub Sektor Perkebunan

Propinsi NTB telah merumuskan program pembangunan perkebunan berdimensi global, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing masyarakat.

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat struktur ekonomi wilayah dan nasional. Secara ekologis berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, dan secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dan salah satu komoditas pertanian yang pertumbuhannya positif terhadap pendapatan devisa negara adalah komoditas perkebunan.

Komoditas perkebunan secara ekonomi mampu bertahan pada saat krisis ekonomi terutama peluangnya dibidang ekspor, sementara itu kebijakan dasar pembangunan perkebunan mengarah kepada upaya menggerakkan dan memfasilitasi pengembangan produksi perkebunan yang berorientasi pasar melalui pemberdayaan dan penguatan hilir guna memperoleh nilai tambah dan daya saing dengan dukungan partisipasi masyarakat, beberapa komoditas unggulan di sub sektor perkebunan di wilayah NTB yang saat ini dibudidayakan antara lain kopi, kakao, tembakau, jambu mete dan kelapa. Komoditas yang dibudidayakan ini, tentunya perlu didukung oleh upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas komoditas perkebunan, serta meningkatkan nilai tambah dari produk-produk perkebunan tersebut.

Secara garis besar, masalah-masalah pembangunan perkebunan yang dihadapi saat ini mencakup dua kelompok permasalahan. Selain permasalahan struktural yang berkaitan dengan program pelaksanaan pembangunan perkebunan, juga permasalahan fungsional yang terkait dengan aspek pembangunan perkebunan, yang meliputi aspek budidaya dan produktivitas, kemampuan dan pemantapan SDM petani dan petugas lapangan, penguatan kelembagaan petani serta pengembangan kemitraan, oleh karenanya perlu lebih memperhatikan aspek-aspek kewilayahan dan sumber daya secara keseluruhan.

3. Isu-Isu Pembangunan Sub Sektor Peternakan

3.1. Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan sub sektor peternakan Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

a. Banyaknya produk impor akibat perdagangan bebas;
b. Meningkatnya permintaan pangan asal ternak sebagai pemenuhan sumber protein;
c. Manajemen pengelolaan RPH;
d. Budidaya, pakan, keswan;
e. Pemasaran, manajemen usaha dan kapasitas SDM
f. Belum bisa bersaing di pasar regional / nasional industri olahan
g. NTB menjadi objek daerah tujuan wisata regional, nasional dan internasional (mendukung kek mandalika untuk pelaksanaan Moto-GP 2021.

3.2. Arah Kebijakan

a. Manajemen pengelolaan RPH dan RPU
   - Sosialisasi, Optimalisasi Penyediaan Daging ASUH (Outlet Daging ASUH pada pusat pariwisata)
   - Penyediaan Cold Storage
b. Manajemen budidaya
   - Peningkatan produksi dan produktifitas ternak melalui IB
   - Pertukaran pejantan unggul dikawasan padang penggenbalaan
c. Manajemen pakan
   - Pengembangan pakan ternak berbasis lamtoro taramba, pengembangan teknologi pakan serta pembangunan pabrik pakan skala industri rumah tangga
d. Manajemen kesehatan hewan
   - Pencegahan dan penanggulangan penyakit PHMS
e. Manajemen pemasaran dan usaha
   - Eksposisi hasil peternakan
   - Meningkatkan kualitas dan Legalitas Produk
   - Akses modal usaha
f. Peningkatan kapasitas SDM
   - Bimtek , Pelatihan, Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Dalam kerangka pengembangan ekonomi wilayah peran sub sektor peternakan memiliki kaitan yang kuat di hulu dan hilir. Namun dekimian peran strategis tersebut belum mampu mendorong partisipasi swasta dan masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan peluang ekonomi yang

dapat membawa perubahan dan Dinamisasi Kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat peran strategis pemerinth daerah provinsi NTB untuk mewujudkan swasembada daging dan telur adalah mengatasi masalah ditingkat usaha tani melalui penyerataan usaha kelompokk dan mendukung masyarakat terhadap akses pembiayaan serta mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi serta swasta pada usaha penggemukan budidaya dan pengolahan hasil komoditas startegis seperti sapi, kambing dan unggas.

Berdasarkan data release BPS yang menjadi data dasar tahun 2020 bahwa peningkatan populasi ternak sapi adalah 4,3% dari 1.183.570 ekor menjadi 1.234.357 ekor, untuk ternak kambing mengalami peningkatan sebesar 1,3 % dari 675.852 ekor menjadi 684.688 ekor sedangkan perunggasan (Ayam Buras, Ayam Ras, Itik) mengalami peningkatan sebesar 30,2% 19.872.625 ekor menjadi 25.871.052 ekor. Produksi dan konsumsi daging pada masing-masing komoditas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14. Produksi dan Konsumsi Daging di Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2022

Komoditi	Produksi Daging (Ton)		Konsumsi Daging (Kg/Kap/Thn)	
	2021	2022*)	2021	2022*)
S a p i	10.743.210	11.159.006	1,9800	1,5781
Kerbau	798.541	838.418	0,1900	0,1070
Kambing	392.819	412.483	0,0900	0,0526
Ayam Ras	45.016.739	45.234.672	6,2100	6,0006
Ayam Buras	12.465.414	12.677.327	1,1300	1,3355
TOTAL	**69.416.723**	**70.321.906**	**9,60**	**9,07**

*) Data Sementara

Perkembangan usaha pembibitan dalam mengembangkan usaha budidaya sub sektor peternakan bibit merupakan komponen terpenting yang mempengaruhi keberlanjutan usaha penggemukan sapi potong berbasis kelompok membutuhkan bibit sebanyak 50-60 ekor dengan skala kepemilikan 2-3 ekor/orang yang dilaksanakan dalam kurun waktu 90- 180 hari dengan asumsi pertambahan bobot badan yang diharapkan 0,5- 0,7 kg, sehingga di akhir massa penggemukan peternak dapat memperoleh keuntungan dengan bobot.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 mengenai pendanaan indikatif untuk program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Bima adalah sebesar Rp. **19.170.035.784,00** (*sembilan belas milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*). Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan dana, maka anggaran tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dengan telah mempertimbangkan :

1. Penyesuaian terhadap perkiraan anggaran yang diterima SKPD;
2. Peningkatan anggaran pada kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat;
3. Adanya perubahan nomenklatur SKPD yang menyebabkan penambahan beberapa kewenangan dibidang perkebunan dan penyuluhan; serta
4. Melakukan efesiensi anggaran untuk kegiatan yang bersifat belanja aparatur.

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024 Dinas Pertanian Kota Bima dapat dilihat pada Tabel 15 (***terlampir***).

Tabel 2.15. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bima	Cakupan pemenuhan penunjang peningkatan kinerja SKPD	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bima	Cakupan pemenuhan penunjang peningkatan kinerja SKPD	100%		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Cakupan penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	100%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Cakupan penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	100%		
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun/direview	2 dokumen	1.189.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun/direview	2 dokumen	8.337.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	4.353.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	5.837.000	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun	1 dokumen	2.818.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun	1 dokumen	3.413.500	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 dokumen	3.843.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 dokumen	5.152.000	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun	1 dokumen	2.322.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun	1 dokumen	2.917.500	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan yang disusun	5 laporan	1.106.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan yang disusun	5 laporan	1.666.700	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Terlaksananya evaluasi kinerja Unit Pelayanan Terpadu Daerah	6 UPTD	8.071.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Terlaksananya evaluasi kinerja Unit Pelayanan Terpadu Daerah	6 UPTD	21.443.200	
2.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			waktu					waktu			
2.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	10.222.882.961	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	10.222.883.077	
2.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bima	Tersedianya administrasi penunjang pelaksanaan tugas ASN	1 tahun	104.506.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bima	Tersedianya administrasi penunjang pelaksanaan tugas ASN	1 tahun	-	
2.1.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan sesuai ketentuan	1 tahun	108.300.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan sesuai ketentuan	1 tahun	169.830.000	
2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun tepat waktu	1 dokumen	1.923.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun tepat waktu	1 dokumen	1.923.000	
2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tepat wakti	18 laporan	1.084.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tepat wakti	18 laporan	1.636.000	
2.1.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bima	Tersusunnya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran tepat waktu	1 dokumen	386.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bima	Tersusunnya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran tepat waktu	1 dokumen	386.000	
3.1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Bima	Cakupan pembukuan administrasi barang milik daerah dengan baik dan tertib	100%		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Bima	Cakupan pembukuan administrasi barang milik daerah dengan baik dan tertib	1		
3.1.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima	Terdokumentasinya barang milik daerah dengan tertib dan baik	1 dokumen	17.120.500	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima	Terdokumentasinya barang milik daerah dengan tertib dan baik	1 dokumen	7.520.500	
3.1.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Bima	Cakupan peningkatan kinerja pegawai	100%	27.444.200	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Bima	Cakupan peningkatan kinerja pegawai	1	27.444.200	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima	Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi penunjang pelaksanaan tugas	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima	Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi penunjang pelaksanaan tugas	1		
4.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	5.569.740	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	5.569.740	
4.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Tersedianya peralatan komputer dan perlengakapan kantor lainnya	14 unit	81.632.725	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Tersedianya peralatan komputer dan perlengakapan kantor lainnya	14 unit	104.801.950	
4.1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima	Tersedian peralatan/bahan pembersih dan makan minum kantor	1 tahun	21.582.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima	Tersedian peralatan/bahan pembersih dan makan minum kantor	1 tahun	20.289.895	
4.1.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Tersedianya layanan cetakan dan penggandaan kantor	1 tahun	76.945.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Tersedianya layanan cetakan dan penggandaan kantor	1 tahun	76.945.000	
4.1.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bima	Tersedianya bahan bacaan kantor	6 media	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bima	Tersedianya bahan bacaan kantor	6 media	6.000.000	
4.1.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultansi aparatur	1 tahun	401.410.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultansi aparatur	1 tahun	401.410.000	
4.1.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bima	Tersedianya bahan dan peralatan penataan arsip kantor	1 tahun	4.892.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bima	Tersedianya bahan dan peralatan penataan arsip kantor	1 tahun	4.892.000	
5.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan kantor	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan kantor	100%		
5.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah rekening yang dibayarkan	17 rekening	85.852.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah rekening yang dibayarkan	17 rekening	85.852.800	
5.1.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	45 orang	365.850.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	45 orang	423.570.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Tingkat pemeliharaan barang milik daerah	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Tingkat pemeliharaan barang milik daerah	100%		
6.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	Jumlah pajak STNK/pajak kendaraan dinas/operasional yang dibayar	30 unit	113.599.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	Jumlah pajak STNK/pajak kendaraan dinas/operasional yang dibayar	30 unit	99.125.000	
6.1.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	35%	15.411.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	35%	15.411.000	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kota Bima	Cakupan penyediaan sarana pertanian sesuai anjuran	100%		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kota Bima	Cakupan penyediaan sarana pertanian sesuai anjuran	100%		
2.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kota Bima	Cakupan pemanfataan sarana pertanian sesuai anjuran	65%		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kota Bima	Cakupan pemanfataan sarana pertanian sesuai anjuran	65%		
2.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Bima	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan yang mengikuti Bimbingan Teknis budidaya sesuai anjuran	42 orang	73.364.276	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Bima	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan yang mengikuti Bimbingan Teknis budidaya sesuai anjuran	42 orang	88.683.160	
			Penambahan luas tanam komoditi:	0%				Penambahan luas tanam komoditi:	0%		
			Cabai rawit	20 Ha				Cabai rawit	20 Ha		
			Kacang panjang	20 Ha				Kacang panjang	20 Ha		
			Porang	0,25 Ha				Porang	0,25 Ha		
			Tomat	20 Ha				Tomat	20 Ha		
			Durian	0,6 ha				Durian	0,6 ha		
			Sawo	0,6 ha				Sawo	0,6 ha		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Bima	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan yang mengikuti Bimbingan Teknis budidaya sesuai anjuran	42 orang	178.992.700	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Bima	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan yang mengikuti Bimbingan Teknis budidaya sesuai anjuran	42 orang	166.569.500	
			Tersalurnya bantuan mesin pengolahan sorghum	3 unit				Tersalurnya bantuan mesin pengolahan sorghum	3 unit		
			Meningkatnya luas tanam komoditi tanaman pangan	11.000 Ha				Meningkatnya luas tanam komoditi tanaman pangan	11.000 Ha		
2.2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	Cakupan pelayanan Inseminasi Buatan	4%		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	Cakupan pelayanan Inseminasi Buatan	4%		
2.2.1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Bima	Persentase penambahan populasi ternak dari hasil IB	70%	26.717.700	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Bima	Persentase penambahan populasi ternak dari hasil IB	70%	15.929.700	
			Jumlah sapi IB	525 ekor				Jumlah sapi IB	525 ekor		
			Sapi Kawin Alam	1300 ekor				Sapi Kawin Alam	1300 ekor		
			IB Unggas	15000 ekor				IB Unggas	15000 ekor		
			Ternak kecil	6200 ekor				Ternak kecil	6200 ekor		
2.3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Cakupan pakan ternak yang memenuhi persyaratan mutu pakan	100%		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Cakupan pakan ternak yang memenuhi persyaratan mutu pakan	100%		
2.3.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kota Bima	Jumlah distributor dan pengecer pakan yang mengikuti sosialisasi mutu pakan ternak	30 pelaku usaha	13.120.000	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kota Bima	Jumlah distributor dan pengecer pakan yang mengikuti sosialisasi mutu pakan ternak	30 pelaku usaha	9.520.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dokumen profil pelaku usaha produsen bahan pakan dan pakan ternak	1 buku				Dokumen profil pelaku usaha produsen bahan pakan dan pakan ternak	1 buku		
			Jumlah pelaku usaha pakan ternak yang dibina dan diawasi	30 pelaku usaha				Jumlah pelaku usaha pakan ternak yang dibina dan diawasi	30 pelaku usaha		
2.3.2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kota Bima	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi standar teknis bahan/pakan ternak	50 pelaku usaha	11.431.500	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kota Bima	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi standar teknis bahan/pakan ternak	50 pelaku usaha	9.031.500	
			Jumlah pelaku usaha bahan pakan ternak yang dibina	50 pelaku usaha				Jumlah pelaku usaha bahan pakan ternak yang dibina	50 pelaku usaha		
2.4	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Cakupan penyediaan dan peredaran bibit dan hijauan pakan ternak yang memenuhi standar teknis	85%		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Cakupan penyediaan dan peredaran bibit dan hijauan pakan ternak yang memenuhi standar teknis	85%		
2.4.1	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Kota Bima	Dokumen pelaku usaha penyedia bibit dan hijauan pakan ternak	1 buku	10.334.000	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Kota Bima	Dokumen pelaku usaha penyedia bibit dan hijauan pakan ternak	1 buku	5.654.000	
			Jumlah pelaku usaha bibit dan hijauan pakan ternak yang dibina	15 pelaku usaha				Jumlah pelaku usaha bibit dan hijauan pakan ternak yang dibina	15 pelaku usaha		
2.4.2	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kota Bima	Jumlah peternak yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas pakan ternak	30 orang	13.551.000	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kota Bima	Jumlah peternak yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas pakan ternak	30 orang	9.006.800	
			Jumlah pelaku usaha bibit dan hijauan pakan ternak yang dibina	15 pelaku usaha				Jumlah pelaku usaha bibit dan hijauan pakan ternak yang dibina	15 pelaku usaha		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Bima	Persentase peternak yang menggunakan bibit unggul bermutu	85%		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Bima	Persentase peternak yang menggunakan bibit unggul bermutu	85%		
2.5.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Bima	Jumlah peternak yang mengikuti pelatihan teknis budidaya unggas	40 orang	358.005.200	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Bima	Jumlah peternak yang mengikuti pelatihan teknis budidaya unggas	40 orang	384.182.200	
			Jumlah kelompok ternak unggas penerima bantuan yang dibina	20 kelompok				Jumlah kelompok ternak unggas penerima bantuan yang dibina	20 kelompok		
			Jumlah peternak yang dibina dan diawasi	150 kelompok				Jumlah peternak yang dibina dan diawasi	150 kelompok		
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kota Bima	Cakupan prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)	60%		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kota Bima	Cakupan prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)	60%		
3.1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kota Bima	Luas lahan LP2B	1117 ha		Pengembangan Prasarana Pertanian	Kota Bima	Luas lahan LP2B	1117 ha		
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kota Bima	Jumlah pemilik lahan yang dilibatkan dalam sosialisasinya LP2B	60 orang	39.127.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kota Bima	Jumlah pemilik lahan yang dilibatkan dalam sosialisasinya LP2B	60 orang	20.020.200	
			Jumlah P3A yang dibina	25 P3A				Jumlah P3A yang dibina	25 P3A		
			Jumlah jaringan irigasi yang diidentifikasi	24 lokasi				Jumlah jaringan irigasi yang diidentifikasi	24 lokasi		
			Jumlah jalan usaha tani yang diidentifikasi	36 lokasi				Jumlah jalan usaha tani yang diidentifikasi	36 lokasi		
			Jumlah poktan penerima bantuan prasarana pertanian yang dibina	100 poktan				Jumlah poktan penerima bantuan prasarana pertanian yang dibina	100 poktan		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kota Bima	Persentase penurunan ternak yang terinveksi PHMS (%)	0,12%		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kota Bima	Persentase penurunan ternak yang terinveksi PHMS (%)	0,12%		
4.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Cakupan pemantauan lalulintas ternak dalam daerah	100%		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Cakupan pemantauan lalulintas ternak dalam daerah	100%		
4.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kota Bima	Jumlah ternak yang dilayani melalui vaksinasi ternak	10000 ekor	56.260.445	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kota Bima	Jumlah ternak yang dilayani melalui vaksinasi ternak	10000 ekor	56.260.445	
			Jumlah sampel pemeriksaan penyakit hewan menular	600 sampel				Jumlah sampel pemeriksaan penyakit hewan menular	600 sampel		
			Jumlah wilayah pengendalian penyakit hewan menular zoonosis	41 kelurahan				Jumlah wilayah pengendalian penyakit hewan menular zoonosis	41 kelurahan		
			Jumlah ternak diantarpulaukan yang diperiksa	1000 ekor				Jumlah ternak diantarpulaukan yang diperiksa	1000 ekor		
4.1.2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah ternak yang dilayani melalui vaksinasi ternak	1000 ekor	12.879.000	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah ternak yang dilayani melalui vaksinasi ternak	1000 ekor	12.879.000	
			Jumlah sampel pemeriksaan penyakit hewan menular	150 ekor				Jumlah sampel pemeriksaan penyakit hewan menular	150 ekor		
			Jumlah wilayah pengendalian penyakit hewan menular zoonosis	41 kelurahan				Jumlah wilayah pengendalian penyakit hewan menular zoonosis	41 kelurahan		
			Jumlah ternak diantarpulaukan yang diperiksa	180 kelompok				Jumlah ternak diantarpulaukan yang diperiksa	180 kelompok		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang mampu dilayani	50%		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang mampu dilayani	50%		
4.2.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Bima	Pengadaan bahan dan peralatan petugas pelayanan medik veteriner	1 paket	10.014.140	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Bima	Pengadaan bahan dan peralatan petugas pelayanan medik veteriner	1 paket	10.014.140	
			Jumlah pelayanan aktif UPTD	60 kali				Jumlah pelayanan aktif UPTD	60 kali		
4.3	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kota Bima	Cakupan pelaku usaha yang menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada unitusahanya	25%		Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kota Bima	Cakupan pelaku usaha yang menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada unitusahanya	25%		
4.3.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kota Bima	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan memiliki PIRT yang dibina	15 unit usaha	22.565.000	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kota Bima	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan memiliki PIRT yang dibina	15 unit usaha	24.437.000	
			Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang dibina dan diawasi	20 unit usaha				Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang dibina dan diawasi	20 unit usaha		
4.3.2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kota Bima	Jumlah hewan/daging qurban yang diperiksa	1300 ekor	59.758.600	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kota Bima	Jumlah hewan/daging qurban yang diperiksa	1300 ekor	52.630.600	
			Jumlah pelaku usaha pemotongan ternak yang dibina	12 pelaku usaha				Jumlah pelaku usaha pemotongan ternak yang dibina	12 pelaku usaha		
			Jumlah pelaku usaha bahan asal hewan yang dibina	10 pelaku usaha				Jumlah pelaku usaha bahan asal hewan yang dibina	10 pelaku usaha		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pelaku usaha yang dibina persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	10 pelaku usaha				Jumlah pelaku usaha yang dibina persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	10 pelaku usaha		
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kota Bima	Cakupan berkurangnya dampak bencana pertanian	50%		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kota Bima	Cakupan berkurangnya dampak bencana pertanian	50%		
5.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kota Bima	Cakupan dampak bencana pertanian yang ditangani	50%		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kota Bima	Cakupan dampak bencana pertanian yang ditangani	50%		
5.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Bima	Jumlah petani yang mengikuti SLPHT tanaman pangan	40 orang	30.774.800	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Bima	Jumlah petani yang mengikuti SLPHT tanaman pangan	40 orang	22.253.200	
		Kota Bima	Jenis obat-obatan pengendalian hama terpadu	6 jenis				Jenis obat-obatan pengendalian hama terpadu	6 jenis		
5.1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Bima	Meningkatnya pemahaman petani dalam penanganan dampak kekeringan	25 orang	419.825.320	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Bima	Meningkatnya pemahaman petani dalam penanganan dampak kekeringan	25 orang	469.239.120	
			Jumlah areal demplot mitigasi kekeringan	2 Ha				Jumlah areal demplot mitigasi kekeringan	2 Ha		
			Tersalurnya bantuan bibit kemiri	73.000 pohon				Tersalurnya bantuan bibit kemiri	73.000 pohon		
			Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penanganan pasca panen mete	40 orang				Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penanganan pasca panen mete	40 orang		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tersalurnya bantuan mesin kacip mete	2 unit				Tersalurnya bantuan mesin kacip mete	2 unit		
			Jumlah pelaku usaha pasca panen komoditi perkebunan yang dibina	10 pelaku usaha				Jumlah pelaku usaha pasca panen komoditi perkebunan yang dibina	10 pelaku usaha		
			Jumlah kelompok petani kebun yang dibina dalam teknik budidaya komoditi perkebunan	50 kelompok				Jumlah kelompok petani kebun yang dibina dalam teknik budidaya komoditi perkebunan	50 kelompok		
6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kota Bima	Cakupan pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	50%		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kota Bima	Cakupan pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	50%		
6.1.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis izin usaha sektor pertanian	100 rekomendasi		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis izin usaha sektor pertanian	100 rekomendasi		
6.1.1	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kota Bima	Jumlah pelaku usaha yang dilibatkan	30 orang	34.499.000	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kota Bima	Jumlah pelaku usaha yang dilibatkan	30 orang	24.320.000	
			Luasan usahatani padi yang difasilitasi untuk menjadi calon lokasi Asuransi Usahatani Padi (AUTP)	300 Ha				Luasan usahatani padi yang difasilitasi untuk menjadi calon lokasi Asuransi Usahatani Padi (AUTP)	300 Ha		
			Jumlah ternak sapi yang difasilitasi untuk menjadi calon lokasi Asuransi Usaha Ternak Sapi Padi (AUTS)	220 ekor				Jumlah ternak sapi yang difasilitasi untuk menjadi calon lokasi Asuransi Usaha Ternak Sapi Padi (AUTS)	220 ekor		
			Jumlah petani yang difasilitasi untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR)	150 orang				Jumlah petani yang difasilitasi untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR)	150 orang		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kota Bima	Jumlah distributor/pengecer pupuk dan pestisida yang diawasi dan dibina	47 pelaku usaha	37.279.320	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kota Bima	Jumlah distributor/pengecer pupuk dan pestisida yang diawasi dan dibina	47 pelaku usaha	30.603.600	
			Jumlah kelompok tani penerima bantuan yang dibina	36 poktan				Jumlah kelompok tani penerima bantuan yang dibina	36 poktan		
			Jumlah peserta rapat koordinasi penyusunan RDKK	74 orang				Jumlah peserta rapat koordinasi penyusunan RDKK	74 orang		
			Jumlah peserta rapat Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida	33 orang				Jumlah peserta rapat Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida	33 orang		
			Jumlah peserta rapat koordinasi dan updating RDKK dalam e-EDKK	74 orang				Jumlah peserta rapat koordinasi dan updating RDKK dalam e-EDKK	74 orang		
			Jumlah distributor/pengecer pupuk dan pestisida yang diawasi dan dibina	47 pelaku usaha				Jumlah distributor/pengecer pupuk dan pestisida yang diawasi dan dibina	47 pelaku usaha		
			Jumlah kelompok tani penerima alsintan yang diidentifikasi (CP/CL)	36 poktan				Jumlah kelompok tani penerima alsintan yang diidentifikasi (CP/CL)	36 poktan		
6.2	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kota Bima	Cakupan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan yang diberikan	75%		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kota Bima	Cakupan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan yang diberikan	75%		
6.2.1	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Kota Bima	Jumlah pelaku usaha yang dibina tentang kepemilikan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	15 pelaku usaha	11.581.700	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Kota Bima	Jumlah pelaku usaha yang dibina tentang kepemilikan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	15 pelaku usaha	6.541.700	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Buku profil pelaku usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	1 buku				Buku profil pelaku usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	1 buku		
6.3	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Kota Bima	Cakupan pengecer sarana pertanian yang memiliki izin usaha	100%		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Kota Bima	Cakupan pengecer sarana pertanian yang memiliki izin usaha	100%		
6.3.1	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kota Bima	Jumlah pelaku usaha yang dibina tentang izin usaha pengecer obat hewan	10 pelaku usaha	25.882.500	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kota Bima	Jumlah pelaku usaha yang dibina tentang izin usaha pengecer obat hewan	10 pelaku usaha	15.290.500	
			Jumlah pelaku usaha pengecer obat hewan yang dibina	10 pelaku usaha				Jumlah pelaku usaha pengecer obat hewan yang dibina	10 pelaku usaha		
7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kota Bima	Cakupan peningkatan SDM Pertanian	20%		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kota Bima	Cakupan peningkatan SDM Pertanian	20%		
7.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kota Bima	Presentase peningkatan jabatan fungsional penyuluh pertanian	14%		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kota Bima	Presentase peningkatan jabatan fungsional penyuluh pertanian	14%		
			Presentase pelaku utama yang menerapkan teknologi budidaya sesuai anjuran	30%				Presentase pelaku utama yang menerapkan teknologi budidaya sesuai anjuran	30%		
			Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Pemula ke Lanjut 3%				Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Pemula ke Lanjut 3%		
				Lanjut ke Mandya 1%					Lanjut ke Mandya 1%		
				Madya ke Utama 1%					Madya ke Utama 1%		
7.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kota Bima	Jumlah kelembagaan petani yang dibina	50 kelompok	33.600.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kota Bima	Jumlah kelembagaan petani yang dibina	50 kelompok	27.545.700	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang dibina	50 kelompok				Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang dibina	50 kelompok		
			Jumlah kelompok P3A yang dibina	25 P3A				Jumlah kelompok P3A yang dibina	25 P3A		
			Jumlah kelompok usaha yang dibina	50 kelompok				Jumlah kelompok usaha yang dibina	50 kelompok		
7.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Bima	Jumlah kelembagaan petani yang dibina	50 kelompok	33.700.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Bima	Jumlah kelembagaan petani yang dibina	50 kelompok	19.180.000	
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang dibina	50 kelompok				Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang dibina	50 kelompok		
			Jumlah kelompok P3A yang dibina	25 P3A				Jumlah kelompok P3A yang dibina	25 P3A		
			Jumlah kelompok usaha yang dibina	50 kelompok				Jumlah kelompok usaha yang dibina	50 kelompok		
7.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Bima	Jumlah PPL yang dilibatkan	15 orang	33.699.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Bima	Jumlah PPL yang dilibatkan	15 orang	32.656.000	
			Jumlah PPL yang dilibatkan	15 orang				Jumlah PPL yang dilibatkan	15 orang		
			Jumlah dokumen programa penyuluahan pertanian tingkat kecamatan yang tersusun	4 dokumen				Jumlah dokumen programa penyuluahan pertanian tingkat kecamatan yang tersusun	4 dokumen		
			Jumlah PPL yang dibina	42 orang				Jumlah PPL yang dibina	42 orang		
			Jumlah wilayah identifikasi potensi pertanian	4 kecamatan				Jumlah wilayah identifikasi potensi pertanian	4 kecamatan		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah PPL yang melakukan pendampingan diseminasi tekonologi pertanian	40 orang	14.318.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah PPL yang melakukan pendampingan diseminasi tekonologi pertanian	40 orang	11.438.000	
JUMLAH KESELURUHAN					13.247.375.627	JUMLAH KESELURUHAN				13.248.143.127	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2024-2026, program dan kegiatan dikategorikan kedalam program/kegiatan lokasilitas SKPD dan program/kegiatan lintas SKPD. Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD.

Program dan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan didasarkan pada prioritas pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan, prioritas pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan tersebut difokuskan pada ketersediaan bahan pangan asal pertanian seperti : padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang panjang, ubi kayu dan ubi jalar dan peternakan seperti : daging, kulit dan telur serta komoditas perkebunan seperti : tembakau, jambu mete dan kelapa dengan sasaran :

a. Meningkatnya ketersediaan dan kesinambungan input produksi bahan pangan;
b. Terkendalinya stock pangan dan keanekaragaman bahan pangan pada sentra produksi;
c. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan dan kecukupan gizi masyarakat;
d. Terkendalinya distribusi dan stabilitas harga bahan pangan, serta perlindungan konsumen;
e. Meningkatnya dukungan infrastruktur di sentra produksi pangan;
f. Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta perbaikan iklim investasi yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi;
g. Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi;
h. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing;
i. Terkendalinya tata niaga hulu-hilir dan perlindungan konsumen, dalam menghadapi persaingan global;
j. Meningkatnya dukungan infrastruktur ekonomi di kawasan agribisnis pertanian, perkebunan dan peternakan.

Berikut disajikan Program dan Kegiatan yang sering diusulkan para pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi melalui

pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 2.16

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS**				
A	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Kota Bima	Bertambahnya keterampilan, pengatahuan dan manajemen usaha para pelaku usaha pertanian	1 Keg.	
B	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Kota Bima	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani	1 Keg.	
2	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN**				
A	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Kota Bima	Meningkatnya produksi pertanian tanaman padi palawija	1 Keg.	
B	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Bima	Tersedianya benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura unggul	1 Keg.	
C	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasin	Kota Bima	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi produk pertanian	1 Keg.	
3	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN**				
A	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Bima	Berkembangnya upaya-upaya pembibitan dan perawatan ternak sesuai teknik budidaya	1 Keg.	
B	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kota Bima	Terlaksananya penyuluhan dan atau pelatihan penyediaan pakan ternak	1 Keg.	
C	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kota Bima	Bertambahnya keterampilan dan pengatahuan peternak	1 Keg.	
D	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Bima	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi produk peternakan	1 Keg.	

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Secara nasional, diperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7 - 6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi ditandai dengan perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia di antaranya stabilisasi inflasi, turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran turunnya tingkat rasio gini dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Orientasi pertumbuhan ekonomi bukan hanya mengejar kepada target pertumbuhan, tetapi bagaimana kualitas dan distribusi ekonomi (kesejahteraannya) semakin merata. Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam 5 (lima) tahun ke depan melalui proses transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan transformasi sektor jasa. Paradigma pembangunan pertanian yang hanya menitikberatkan disektor hulu, perlu diperbaharui dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh atau disebut pertanian untuk pembangunan (*Agriculture for Development*). Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju zero waste (tidak ada yang disia-siakan).

Adapun arah kebijakan nasional pembangunan pertanian sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Pertanian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/05/2020 Tanggal 04 Mei 2020 Tentang Rencana Strategis

Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 secara garis besarnya dapat diuraikan di bawah ini.

a. Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan agenda sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

   Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Terdapat 4 (empat) faktor sebagai penggerak dalam pembangunan ekonomi, yaitu: (1) pengelolaan SDA secara optimal; (2) SDM berkualitas: (3)teknologi maju dan (4) konsolidasi kelembagaan pertanian. Adapun untuk kebijakan pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah yang didukung oleh pertanian di antaranya:

   1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT).
   2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
   3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
   4. Penguatan kewirausahan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi.
   5. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.
   6. Peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

   Pengembangan ekonomi wilayah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan wilayah dilakukan melalui pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang disertai pemerataan (*growth with equity*).

   Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera, serta peningkatan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah salah satunya dengan pembangunan kawasan strategis prioritas yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai

tambah komoditas unggulan, khususnya hasil-hasil perkebunan seperti: kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, karet, tebu, lada, pala dan cengkeh.

3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Dari agenda pembangunan nasional tersebut, Kementerian Pertanian lebih difokuskan dalam mendukung agenda pembangunan "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan".

b. Pengarusutamaan dan Proyek Prioritas Pertanian

Target-target pembangunan nasional khususnya di sektor pertanian perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dalam satu arah yang sama atau satu gerakan. Setiap kegiatan utama di Kementerian Pertanian perlu mengadopsi pengarusutamaan yang berada di Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) dan proyek nasional 2020-2024. Adapun pengarusutamaan dan proyek prioritas sektor pertanian adalah sebagai berikut :

1. Korporasi petani

Korporasi petani dibangun melalui pemberdayaan petani dengan mengkonsolidasikan petani dalam suatu kelembagaan petani (kelompok/ gabungan kelompok tani) yang didorong untuk bertransformasi menjadi kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) diharapkan meningkatkan skala usaha petani karena tergabung dalam kelompok yang lebih besar, menjalankan usaha dengan manajemen yang profesional, meningkatkan aksesibilitas permodalan dan infrastruktur, jangkauan pasar, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian.

Pendekatan pembangunan pertanian melalui pengembangan kawasan dalam suatu sistem usaha tani terpadu yang mengintegrasikan subsistem hulu, on farm, hilir, pengolahan dan pemasaran serta penunjang. Konsep korporasi petani memerlukan terobosan dalam mengubah pola pikir petani agar menjadi pelaku utama bisnis pertanian, sehingga perlu dilakukan penguatan kapasitas baik aspek usaha tani maupun aspek

manajerial. Program atau kegiatan di pemerintah pusat mulai penguatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian, revitalisasi perbenihan, pengembangan pupuk organik, optimalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi, pembangunan sarana panen air, mekanisasi pertanian, hingga pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta bantuan akses pembiayaan dan asuransi petani, bisa menjadi modal besar dalam menumbuhkan dan mengembangkan korporasi petani.

Korporasi petani selain bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, juga meningkatkan aksesbilitas pemasaran dengan mengintegrasikan antara produk pertanian baik segar maupun olahan dengan akses pasar, seperti Toko Tani Indonesia sebagai simpul distribusi perdagangan komoditas pangan dan pertanian yang membantu petani dalam memperluas jaringan pemasarannya. Melalui pengembangan unit bisnis di dalam korporasi petani, diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar petani melalui sinergi dan kerja sama dengan pelaku usaha besar lainnya karena korporasi petani memiliki potensi untuk menjadi organisasi bisnis yang modern di antaranya yaitu :

a. Memiliki skala ekonomi sesuai prinsip pengelolaan usaha yang efisien;
b. Produksi disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau industri pengguna bahan baku yang dihasilkan oleh anggota korporasi petani;
c. Menjadi organisasi bisnis yang dikelola secara profesional untuk menjamin keberlanjutan usaha pertanian;
d. Menyediakan bahan baku yang berkualitas bagi industri besar secara berkesinambungan;
e. Menciptakan kemitraan antara korporasi petani dan usaha besar yang saling menguntungkan bagi pertumbuhan pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian;
f. Mampu mengakses sumber pendanaan inklusif untuk meningkatkan produktivitas sekaligus ketahanan pangan nasional;
g. Dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan badan usaha lainnya untuk membentuk unit usaha profesional yang berkualitas dan berdaya saing.

Proyek nasional korporasi petani ditargetkan meningkatkan produktivitas hingga 5% dan meningkatkan nilai tambah tenaga kerja pertanian menjadi Rp. 59,80 juta/petani/tahun pada tahun 2024. Proyek Nasional pengembangan korporasi petani merupakan kerja bersama dan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang bergerak di sektor pertanian baik lintas kementerian dan lembaga, pelaku usaha termasuk Perguruan Tinggi.

Pengembangan korporasi petani dilakukan melalui pendekatan kawasan. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan pertanian pada lokasi yang memenuhi persyaratan agroekologis, memenuhi kelayakan agroekonomi dan agro-sosio-teknologi, aksesibilitas lokasi memadai, dan *diseconomic-externality* yang ditimbulkannya dapat dikendalikan. Pengembangan kawasan pada hakikatnya terdiri atas melakukan pemetaan, evaluasi potensi lahan dan sentra-sentra produksi pertanian, seperti tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan lainnya. Pengembangan kawasan komoditas dilakukan berdasarkan Kepmentan Nomor 472 Tahun 2018 tentang lokasi kawasan pertanian nasional yang menetapkan kawasan komoditas prioritas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di seluruh kabupaten.

2. Kolaborasi dan Koordinasi Strategi Pembangunan Pertanian dalam Satu Komando

Kolaborasi Srategis Pembangunan Pertanian adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi untuk menyelaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga tercipta kesamaan arah atau satu komando. Gerakan pembaharuan pembangunan pertanian ini bertujuan mensinergikan semua pemangku kepentingan (stakeholder) pertanian dengan strategi kolaborasi berupa Gerakan Satu Komando secara berjenjang mulai dari pusat hingga ke kecamatan.

Secara operasional, gerakan secara masif dilaksanakan di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dilengkapi dengan perangkat dan memanfaatkan TIK sebagai instrumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut meliputi : 1) Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan SDM pertanian; 2) Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan; 3) Pusat pembelajaran sebagai wadah dan wahana untuk peningkatan kapasitas SDM pertanian, melalui proses belajar mengajar, dalam bentuk bimbingan teknis, percontohan (Sekolah Lapangan/ Demplot/Demfarm/Demarea); 4) Pusat konsultasi agribisnis antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain; dan 5) Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

Salah satu tujuan dari gerakan komando strategis di kecamatan yaitu terjaminnya pemutakhiran dan arus data pembangunan pertanian dari

kecamatan sampai Pusat. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung program Satu Data Indonesia. Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan Satu Data Pertanian dengan didukung oleh stakeholder terkait yang dikelola secara terbuka dan real time. Dashboard besar satu data sebagai sarana komunikasi dan informasi di tingkat nasional dibangun oleh Kementerian Pertanian sebagai pusat komando dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pembangunan pertanian dan pangan.

3. Pertanian Keluarga (*Family Farming*)

Pertanian keluarga atau *family farming* (FAO,2014) merupakan cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga dengan sebagian besar bergantung pada tenaga kerja keluarga baik perempuan dan laki-laki dan merupakan basis produksi yang berkelanjutan.

Program dan kegiatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang mendukung pertanian keluarga diarahkan untuk :

a. Mengembangkan lingkungan kebijakan yang memungkinkan untuk memperkuat pertanian keluarga;
b. Keberlanjutan generasi pertanian keluarga;
c. Memperkuat organisasi keluarga petani dan kapasitas mereka untuk menghasilkan pengetahuan, mewakili kepentingan petani dan menyediakan layanan inklusif di daerah pedesaan;
d. Meningkatkan inklusi sosial-ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan petani keluarga, rumah tangga pedesaan dan masyarakat;
e. Mempromosikan keberlanjutan pertanian keluarga untuk sistem pangan yang tahan terhadap perubahan iklim;
f. Memperkuat multidimensionalitas pertanian keluarga untuk mempromosikan inovasi sosial yang berkontribusi pada pengembangan wilayah dan sistem pangan yang melindungi keanekaragaman hayati, lingkungan dan budaya.

Pelaksanaan program family farming ini perlu didukung keberlanjutannya agar generasi muda penerus pembangunan pertanian mampu mengembangkan usaha pertanian berbasis korporasi yang terintegrasi dengan pengelolaan lahan-lahan pertanian oleh keluarga petani secara modern sehingga mampu meningkatkan manajemen usaha taninya serta mampu menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian.

4. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDG's)

Sebagaimana RPJMN 2020-2024 yang telah mengarusutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam agenda-agenda pembangunan nasional maka Kementerian Pertanian sebagai bagian dari pendukung pembangunan nasional juga telah mengarusutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pertanian berkontribusi pada pencapaian SDGs, karena korban paling serius dari permasalahan SDGs terjadi di sektor pertanian. Kemiskinan, kelaparan dan malnutrisi di perdesaan berhubungan dengan pertanian, bahkan pertanian diharapakan menjadi sektor unggulan dalam pengentasan kelaparan dengan peningkatan akses pangan masyarakat.

Tantangan lain dalam turunnya produktivitas pertanian, salah satunya disebabkan adanya dampak perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan dan kebanjiran. Perubahan iklim yang ekstrim berupa musim kemarau panjang (kekeringan) dan banjir besar yang terjadi di Indonesia sangat berdampak terhadap sektor pertanian. Hasil berbagai riset menunjukkan bahwa kenaikan suhu bumi antara 1,5 hingga 4 derajat celcius tidak hanya meningkatkan risiko bencana alam tetapi juga berdampak terhadap penurunan produksi dan produktivitas pangan secara signifikan. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mendukung dunia untuk menjaga kenaikan suhu bumi dibawah 2 derajat Celsius dan beradaptasi terhadap dampak terburuk perubahan iklim melalui *Intended Nationally Determined Contributions* (INDCs).

Perubahan iklim juga dapat menimbulkan potensi kerugian PDB hingga 20 persen, Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk mewujudkan perencanaan pembangunan rendah karbon atau Low Carbon Development Indonesia (LCDI). Oleh karena itu, sektor pertanian harus menjalankan prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan yang diharapkan mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, pembangunan pertanian juga telah menerapkan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam SDG's. Pengarusutamaan gender (PUG) ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

c. Program Kementerian Pertanian

Berdasarkan Kerangka Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian yang telah ditetapkan, maka program-program Kementerian Pertanian Tahun 20202024 sesuai dengan kewenangannya dirumuskan sebagai berikut :

Program dan Sasaran Program Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024:

No.	Program	Sasaran Program
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 2. Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas
2.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	1. Meningkatnya akuntabiitas pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian 2. Meningkatnya kualitas pengawasan internal 3. Meningkatnya maturitas SPIP
3.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis tanaman pangan 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian tanaman pangan 3. Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan yang sesuai dengan kebutuhan 4. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman pangan
4.	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	1. Pemenuhan kebutuhan komoditas strategis hortikultura 2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian 3. Penyediaan sarana hortikultura sesuai kebutuhan 4. Terkendalinya serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura
5.	Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Perkebunan	1. Meningkatnya Pertumbuhan produksi dan ekspor produk perkebunan nasional. 2. Menurunnya impor produk perkebunan nasional.
6.	Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak 2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak 4. Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan
7.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan
8.	Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	1. Termanfaatkannya teknologi dan inovasi pertanian
9.	Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	1. Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian
10.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Meningkatnya lembaga distribusi pangan yang mandiri 2. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan 3. Meningkatnya pengawasan pangan segar yang beredar 4. Meningkatnya konsumsi sayur, buah dan daging
11.	Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	1. Peningkatan daya saing pertanian (Ekspor) 2. Aman dari ancaman Organisme Penggangu Tumbuhan Karantina (OPTK), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan keamanan hayati 3. Terkendalinyapenyebaran HPHK pada hewan 4. Tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien
12.	Pendidikan Pertanian	1. Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian

Program-program di atas telah mengacu kepada tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian yang dijadikan rujukan setiap kegiatan-kegiatan dan indikatornya yang tersaji secara lengkap dalam lampiran. Setiap program memilki indikator kinerja (*key performance index*) yang melekat dalam setiap sasaran programnya.

Pada awal tahun 2020, Kementerian Keuangan menginisiasi perancangan kembali (*redesign*) penyederhanaan program di masing-masing Kementerian/ Lembaga. Dengan adanya perancangan kembali (*redesign*) tersebut maka sistem penganggaran dan Program Indikatif Kementerian Pertanian pada tahun 2021-2024 akan berubah menjadi:

Program dan Sasaran Program Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024:

No.	Program	Sasaran Program
1.	Dukungan Manajemen	1. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 2. Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas 3. Meningkatnya akuntabiitas pengelolaan keuangan Kementan 4. Meningkatnya kualitas pengawasan internal 5. Meningkatnya maturitas SPIP
2.	Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Termanfaatkannya teknologi dan inovasi pertanian
3.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian
4.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis 2. Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen pertanian yang sesuai dengan kebutuhan 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan 4. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI sektor pertanian 5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai kebutuhan 6. Meningkatnya lembaga distribusi pangan yang mandiri 7. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan 8. Meningkatnya pengawasan pangan segar yang beredar
		9. Aman dari ancaman Organisme Penggangu Tumbuhan Karantina (OPTK), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan keamanan hayati 10. Tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien
5.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian 2. Meningkatnya Pertumbuhan ekspor pertanian.

d. Target Kinerja Kementerian Pertanian

Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertanian dalam mendukung tercapainya kebijakan pembangunan nasional, Kementerian Pertanian menetapkan 3 (tiga) tujuan dengan 9 (sembilan) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Kementerian Pertanian. Target kinerja Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam periode 2020-2024. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran strategis memilliki indikator kinerja yang menjadi indiktor kinerja utama Kementerian Pertanian.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertanian dalam mendukung tercapainya kebijakan pembangunan nasional, Kementerian Pertanian menetapkan 3 (tiga) tujuan dengan 9 (sembilan) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Kementerian Pertanian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian 2020-2024:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	%	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional	2	Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	1,30	1,35	1,40	1,45	2,00
		3	Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian	%	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	4	Persentase Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional	%	80,00	83,50	87,00	90,00	93,00
		5	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	%	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00
4	Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian	6	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	%	65,00	70,00	70,00	75,00	75,00
		7	Teknologi yang diterapkan oleh petani	%	70,00	74,00	78,00	82,00	85,00
5	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	8	Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	Indeks	62,55	63,10	63,56	64,05	64,55
		9	Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	Indeks	77,92	77,92	77,92	77,92	77,92
6	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	10	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	58,45	58,71	59,34	60,53	62,56
		11	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	78,90	79,50	80,10	80,80	81,60
		12	Persentase Tindakan Karantina terhadap Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Hama Penyakit Hewan Karantina	%	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
7	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	13	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya	%	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
		14	Persentase Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian	%	65,00	75,00	80,00	85,00	90,00
8	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	15	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	79,96	80,71	81,46	82,21	82,96
9	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	16	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	91,23	91,61	91,98	92,36	92,73

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2026 disebutkan bahwa Provinsi NTB merencanakan suatu perubahan yang ditampakkan melalui capaian transformasi ekonomi NTB yang selama ini ditentukan pertumbuhannya oleh sektor tambang, berkembang menjadi lebih inklusif dengan meningkatnya pertumbuhan sektor non-tambang dan kontribusi non-tambang terhadap PDRB terus meningkat hingga mencapai diatas lima puluh persen. Sektor non-tambang yang dimaksud adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, pariwisata dengan mengotimalkan basis keunggulan sektor pertanian dalam arti luas.

Pada level satu; indikator kinerja daerah yang perlu dicapai untuk mewujudkan transformasi ekonomi diatas adalah produktivitas berbagai sektor yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi NTB di luar tambang meningkat dari taraf rendah menjadi tinggi; didukung capaian peningkatan indeks fiskal daerah dari rendah menjadi tinggi.

Peningkatan produktivitas dan kapasitas fiskal akan dapat terealisasi apabila dapat dilakukan capaian peningkatan tatakelola pemerintahan daerah; peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan peningkatan dayasaing daerah, terutama technological capability yang dapat mewujudkan industrial competiveness (dayasaing industri) dan peningkatan investasi.

Oleh karena itu sebagai intermediate outcome yang perlu dicapai adalah indeks tatakelola pemerintahan daerah meningkat dari sedang menjadi tinggi; persentase capaian kinerja SDGs meningkat dari rendah menjadi tinggi; serta indeks dayasaing daerah meningkat dari rendah menjadi menjadi tinggi.

Di bidang Pertanian secara umum terdapat 11 isu pengembangan regional wilayah Bali – Nusra yang tertuang dalam RPD) Provinsi NTB 2024 – 2026. Sebelas isu tersebut yaitu pemantapan Bali-Nusra menjadi koridor pariwisata berkualitas, Bali-Nusra menjadi *hub* dari ekonomi kretaif yang mampu menjadi sumber ekonomi yang besar, kemudian Bali-Nusra menjadi

ladang percontohan dan pilot project untuk penerapan ekonomi sirkural dan riset *blue economy*.

Selanjutnya transisi energi melalu *Energy Transition Mechanism* (ETM) dengan didukung pengembangan EV, pembangunan energi angin dan surya, biomassa, serta energi arus laut, penerapan ekonomi sirkular dengan sistem pengolahan sampah terpadu (*green economy*), pengembangan sistem pertanian terpadu dengan pembentukan korporasi petani. Hal lain yaitu Pertanian inovatif dengan pemberdayaan lembaga di daerah dan *System Intensification Rice* (SRI). Pembangunan *nexus foo*f, energi, *water* dengan penggunaan EBT , peningkatan konektivitas logistik multimoda transportasi, penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi kedekatan dengan Australia dan New Zealand serta perlu penguatan banwidth 5G untuk meningkatkan konektivitas dan ekonomi digital di Bali-Nusra.

Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan tranformasi ekonomi NTB, sebab wilayah Nusa Tenggara menjadi wilayah yang memiliki pertumbuhan terendah sebesar 2,4% di tahun 2021. Salah satu tantangannya yaitu belum optimalnya peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya melalui MICE. Selain itu pengembangan industri kreatif berbasis budaya, industri pengolahan produk pertanian, perikanan, pertambangan masih terbatas. Optimalisasi tiga sektor dominan pendorong pertumbuhan sektor konstruksi, pertanian, dan perdagangan sangat diperlukan dalan hal ini dengan pendekatan teori Endogen untuk pertumbuhan ekonomi NTB. Di mana model pertumbuhan endogen meliputi modal manusia, modal fisik serta pelibatan teknologi yang meliputi riset dan pengembangan. Pertumbuhan ekonomi endogen adalah model ekonomi yang mengoptimalkan potensi internal negara atau daerah. Model ini mengutamanakan sumberdaya manusia dengan kekuatan ilmu pengetahuan, sumberdaya alam , aset teknologi dan kelembagaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian Kota Bima secara fungsional memiliki fungsi dan peranan sebagai lembaga yang tidak hanya menjabarkan kebijakan daerah, akan tetapi harus menjabarkan pula kebijakan pembangunan yang telah digariskan secara nasional.

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra PD. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran PD dengan format tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Bima

No	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (*outcome*)	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (*outcome*)
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Terwujudnya Kebutuhan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya produksi tanaman Pangan	Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan
				Meningkatnya produksi perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi perkebunan
				Meningkatnya produksi peternakan	Persentase pertumbuhan produksi peternakan

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan	Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan	2,00 %
2	Meningkatnya produksi perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi perkebunan	3,50 %
3	Meningkatnya produksi peternakan	Persentase pertumbuhan produksi peternakan	1,65 %

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu Dinas Pertanian Kota Bima dalam mencapai tujuan. Dengan membaca rencana kerja, maka akan dapat memahami skala sebuah kegiatan dengan lebih baik. Perencanaan kerja ialah suatu proses mempersiapkan usaha atau kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sistematis dalam arti teratur, dan logis dalam arti masuk akal sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan yang dimaksud sudah tentu dalam arti bukan tujuan individual (perorangan) melainkan merupakan tujuan kolektif (ramai-ramai) atau tujuan organisasi (kelompok) yang secara tepat dapat dikatakan sebagai tujuan kantor yang akan menghasilkan rencana sebagai bentuk konkritnya.

Jadi, perencanaan kerja ialah suatu proses mempersiapkan usaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara sistematis dan logis, sampai pekerjaan itu selesai dan membuahkan hasil yang diharapkan bersama. Untuk menyusun dan melaksanakan perencanaan atau perencanaan kerja, harus dilakukan serangkaian kegiatan konkrit sebagai berikut:

i. Mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan.
ii. Mengumpulkan pemikiran-pemikiran tentang materi yang direncanakan.
iii. Menentukan tujuan yang hendak dicapai
iv. Menentukan apa saja yang harus dilakukan berikut urutan pelaksanaan untuk mencapai tujuan.
v. Menentukan fasilitas yang diperlukan.
vi. Menentukan kapan dan di mana harus dilaksanakan.
vii. Menentukan oleh siap dan berapa lama harus dilaksanakan.
viii. Menentukan mengapa dan bagaimana cara melaksanakannya.

1. Sasaran Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian Kota Bima dalam mendukung tercapainya kebijakan pembangunan daerah, Dinas Pertanian Kota Bima menetapkan 3 (tiga) tujuan dengan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Dinas Pertanian Kota Bima. Target kinerja Dinas Pertanian Kota Bima 2018-2023 adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian Kota Bima dalam periode 2024-2026. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran strategis memilliki indikator kinerja yang menjadi indiktor kinerja utama Dinas Pertanian Kota Bima.

Indikator kinerja tersebut kemudian di turunkan (*cascading*) ke dalam masing-masing program dan sasaran program. Indikator sasaran program merupakan capaian *outcome* yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Selanjutnya, sasaran program diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan dan indikatornya. Untuk lebih mendetailkan lagi, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pertanian Kota Bima secara rinci disajikan pada Tabel 4.1, sedangkan setiap indikator sasaran program dan kegiatan tertuang dalam matriks target kinerja pada Tabel 4.3.

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2024

No	Sasaran	Nama Program/Kegiatan
1	Meningkatnya kualitas manajemen dan aparat dinas yang profesional dan berkarakter yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan: 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; 1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; 1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan: 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub

No	Sasaran	Nama Program/Kegiatan
		kegiatan: 3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan 4.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan: 5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan: 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan: 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	Meningkatnya penyediaan sarana pertanian sesuai anjuran	Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
1.1	Meningkatnya pengawasan pemanfaatan sarana pertanian sesuai anjuran	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
1.1.1	Terawasinya penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Sub Kegiatan KePengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
1.1.2	Terdampinginya penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai anjuran	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
1.2	Meningkatnya pengelolaan SDG Hewan	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
1.2.1	Meningkatnya kualitas SDG	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG

No	Sasaran	Nama Program/Kegiatan
	hewan	Hewan/Tanaman
1.3	Meningkatnya peredaran pakan ternak bermutu	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.3.1	Terawasinya mutu benih/bibit ternak dan bahan pakan/pakan ternak sesuai standar atau persyaratan teknis minimal (PTM)	Sub Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
1.3.2	Terawasinya peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	Sub Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
1.4	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran bibit dan hijauan pakan ternak	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.4.1	Terawasinya peredaran benih/bibit ternak bersertifikat	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
1.4.2	Terawasinya produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak serta bahan pakan/pakan	Sub Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
1.5	Meningkatnya penyediaan benih/bibit ternak yan berkualitas	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
1.5.1	Meningkatnya ketersediaan benih/bibit unggul ternak	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
2	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
2.1	Meningkatnya pengembangan prasarana pertanian	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
2.1.1	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
2.1.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya embung pertanian
2.1.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya embung pertanian
2.1.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya jalan usaha tani
2.1.5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Rumah Potong Hewan
2.1.6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
2.1.7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya prasarana pertanian lainnya

No	Sasaran	Nama Program/Kegiatan
3	Menurunnya kejadian dan kasus penyakit menular hewan ternak	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.1	Meningkatnya jaminan pelayanan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1	Meningkatnya pengendalian dan penanggullangan penyakit hewan dan zoonosis	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
3.1.2	Terbebasnya Kota Bima dari penyakit hewan menular	Sub Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.2.	Meningkatnya pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.2.1	Meningkatnya ketersediaan sarana pelayanan jasa medik veteriner	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
3.3	Meningkatnya penerapan dan pengawasaan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Kegiatan Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.3.1	Meningkatnya unit usaha hewan dan produk hewan yang memiliki ijin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)	Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
3.3.2	Meningkatnya pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
4	Meningkatnya upaya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di Kota Bima	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4.1	Meningkatnya upaya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di Kota Bima	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
4.1.1	Menurunnya intesitas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
4.1.2	Menurunnya dampak kekeringan akibat perubahan iklim	Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
5	Meningkatnya pelayanan teknis perizinan pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian
5.1	Meningkatnya fasilitasi rekomendasi teknis izin usaha sektor pertanian	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.1.1	Terlaksananya penilaian kelayakan izin usaha pertanian	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
5.1.2	Terbina dan terawasinya penerapan izin usaha pertanian	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
5.2	Meningkatnya rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas

No	Sasaran	Nama Program/Kegiatan
	ternak dan pakan yang diberikan	Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
5.2.1	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap kepemilikan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
5.2.2	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap kepemilikan izin usaha pengecer obat hewan	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
6	Meningkatnya SDM pelaku utama pembangunan pertanian sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (better farming) dan berusaha tani lebih menguntungkan (better bussines)	Program Penyuluhan Pertanian
6.1	Meningkatnya pelaksanaan penyuluhan pertanian Meningkanya pengetahuan ketrampilan pelaku utama dengan melalui penerapan inovasi teknologi budidaya sesuai anjuran Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani dan pelaku agribisnis	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
6.1.1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Penyuluh Pertanian Kota Bima	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
6.1.2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani di Kota Bima	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
6.1.3	Meningkatnya penyediaan dan pemanfataan sarana dan prasarana pertanian sesuai anjuran Terbaharuinya program penyuluhan pertanian Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian lapangan Tersedianya data potensi wilayah dimasing-masing UPTD BPP	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
6.1.4	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan petani tentang diseminisi teknologi pertanian	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

2. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan pertanian, serta pencapaian target sasaran utama membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi pendanaan secara tepat sasaran, serta penggunaan dana yang efektif dan efisien. Indikasi kebutuhan pendanaan pembangunan pertanin disajikan pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Pembangunan
Sektor Pertanian Kota Bima Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Ket
1	Peningkatan ekonomi masyarakat	*1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	14.017.066.510,00	
		1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:	95.818.800,00	
		1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	30.160.000,00	
		1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;	4.899.800,00	
		1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;	3.320.000,00	
		1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;	2.019.000,00	
		1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;	1.174.000,00	
		1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.429.000,00	
		1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.817.000,00	
		1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:	12.851.515.416,00	
		1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.585.974.116,00	
		1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	261.447.200,00	
		1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.569.000,00	
		1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	898.000,00	
		1.2.5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.627.100,00	
		1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:	5.934.000,00	
		1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.934.000,00	

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Ket
		1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:	38.187.000,00	
		1.4.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	38.187.000,00	
		1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:	450.851.294,00	
		1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	696.000,00	
		1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.200.000,00	
		1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000,00	
		1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	73.235.294,00	
		1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	
		1.5.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.720.000,00	
		1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:	494.730.000,00	
		1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	
		1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	394.730.000,00	
		1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:	80.570.000,00	
		1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.000.000,00	
		1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.570.000,00	
		2. Progam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.416.158.060,00	
		2.1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan :	2.731.030.360,00	
		2.1.1. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.651.030.260,00	
		2.1.2. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	80.000.000,00	
		2.2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:	22.506.950,00	

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Ket
		2.2.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	22.506.950,00	
		2.3. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:	32.879.950,00	
		2.3.1. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	20.289.850,00	
.		2.3.2.Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	12.590.100,00	
		2.4. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:	39.741.300,00	
		2.4.1. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	0,00	
		2.4.2.Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	39.741.300,00	
		2.5. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan sub kegiatan:	589.999.500,00	
		2.5.1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	589.999.500,00	
		3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.001.670.000,00	
		3.1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan:	1.001.670.000,00	
		3.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	0,00	
		3.1.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	0,00	
		3.1.3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0,00	
		3.1.4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	0,00	
		3.1.5 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	0,00	
		3.1.6 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.001.670.000,00	
		4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	255.872.394,00	

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Ket
		4.1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:	131.519.664,00	
		4.1.1 Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	17.755.450,00	
		4.1.2 Sub Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	113.764.214,00	
		4.2. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:	40.010.230,00	
		4.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	40.010.230,00	
		4.3. Kegiatan Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan sub kegiatan:	84.342.500,00	
		4.3.1 Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	52.078.700,00	
		4.3.2 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	32.263.800,00	
		5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0,00	
		5.1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:	0,00	
		5.1.1 Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	
		5.1.2 Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	
		6. Program Perizinan Usaha Pertanian	24.639.900,00	
		6.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:	24.639.900,00	
		6.1.1 Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	24.639.900,00	
		6.1.2 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	0,00	
		6.2. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah	0,00	

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Ket
		Potong Hewan, dengan sub kegiatan:		
		6.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	0,00	
		6.2.2 Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	0,00	
		7. Program Penyuluhan Pertanian	454.628.920,00	
		7.1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan:	454.628.920,00	
		7.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	86.999.900,00	
		7.1.2 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	269.394.220,00	
		7.1.3 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	98.234.800,00	
		7.1.4 Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	
Jumlah Keseluruhan			**19.170.035.784,00**	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 4.3 (***terlampir***).

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian kinerja urusan pemerintah daerah		100%										
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun/direview	Kota Bima	4 dokumen	30.160.000	30.160.000							4 dokumen	34.684.000
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Kota Bima	1 dokumen	4.899.800	4.899.800							1 dokumen	5.634.770
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun	Kota Bima	1 dokumen	3.320.000	3.320.000							1 dokumen	3.818.000
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	Kota Bima	1 dokumen	2.019.000	2.019.000							1 dokumen	2.321.850
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun	Kota Bima	1 dokumen	1.174.000	1.174.000							1 dokumen	1.350.100

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	Kota Bima	5 laporan	6.429.000	6.429.000							5 laporan	7.393.350
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja Unit Pelayanan Terpadu Daerah	Kota Bima	6 UPTD	47.817.000	47.817.000							6 UPTD	54.989.550
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-								
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya haji dan tunjangan ASN	Kota Bima	1 tahun	12.585.974.116	12.585.974.116							1 tahun	14.473.870.233
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan sesuai ketentuan	Kota Bima	1 tahun	261.447.200	261.447.200							1 tahun	300.664.280
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun tepat waktu	Kota Bima	1 dokumen	1.569.000	1.569.000							1 dokumen	1.804.350
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tepat wakti	Kota Bima	18 laporan	898.000	898.000							18 laporan	1.032.700
3	27	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran tepat	Kota Bima	1 dokumen	1.627.100	1.627.100							1 dokumen	1.871.165

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
						waktu												
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					-								
3	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terdokumentasinya barang milik daerah dengan tertib dan baik	Kota Bima	1 dokumen	5.934.000	5.934.000							1 dokumen	6.824.100
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-								
3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan peningkatan kinerja pegawai	Kota Bima	100%	38.187.000	38.187.000							100%	43.915.050
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					-								
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	1 paket	696.000	696.000							1 paket	800.400
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan komputer dan perlengakapan kantor lainnya	Kota Bima	14 unit	152.200.000	152.200.000							14 unit	175.030.000
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kanto	Tersedian peralatan/bahan pembersih dan makan minum kantor	Kota Bima	1 tahun	22.000.000	22.000.000							1 tahun	25.300.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya layanan cetakan dan penggandaan kantor	Kota Bima	1 tahun	73.235.294	73.235.294							1 tahun	84.220.588
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	Kota Bima	6 media	-	-							6 media	-
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultansi aparatur	Kota Bima	1 tahun	200.000.000	200.000.000							1 tahun	230.000.000
3	27	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya bahan dan peralatan penataan arsip kantor	Kota Bima	1 tahun	2.720.000	2.720.000							1 tahun	3.128.000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-								
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Kota Bima	17 rekening	100.000.000	100.000.000							17 rekening	115.000.000
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Kota Bima	45 orang	394.730.000	394.730.000							45 orang	453.939.500
3	27	01	2.09		3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-								

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak STNK/pajak kendaraan dinas/operasional yang dibayar	Kota Bima	30 unit	74.000.000	74.000.000							30 unit	85.100.000
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	Kota Bima	35%	6.570.000	6.570.000							35%	7.555.500
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan sarana pertanian sesuai anjuran		100%										
3	27	02	201		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan pemanfataan sarana pertanian sesuai anjuran		65%										
3	27	02	201	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan yang mengikuti Bimbingan Teknis budidaya sesuai anjuran	Kota Bima	42 orang	2.651.030.260	173.968.000	520.000.000	1.957.062.260	-	-		100 orang	3.048.684.799
						Penambahan luas tanam komoditi:												
						Cabai rawit		50 Ha								100 ha		
						Kacang panjang		50 Ha								100 ha		
						Porang		5 Ha								10 ha		

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
						Mete		100 Ha									100 Ha	
						Kelapa Genjah		15 Ha									15 Ha	
						Tomat		20 Ha									20 Ha	
						Durian		50 Ha									50 Ha	
						Sawo		25 Ha									25 Ha	
3	27	02	201	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan yang mengikuti Bimbingan Teknis budidaya sesuai anjuran	Kota Bima	42 orang	80.000.000	80.000.000	-		1.600.000.000	6.000.000.000	Bantuan benih dari Pusat dan Propinsi		92.000.000
						Tersalurnya bantuan mesin pengolahan pertanian	Kota Bima	30 unit								-	
						Meningkatnya luas tanam komoditi tanaman pangan	Kota Bima	11.000 Ha								15000 ha	
3	27	02	202		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Inseminasi Buatan		4%									
3	27	02	202	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase penambahan populasi ternak dari hasil IB	Kota Bima	70%	22.506.950	22.506.950	-		-	-			25.882.993
						Jumlah sapi IB		525 ekor								600 ekor	
						Sapi Kawin Alam		1300 ekor								1500 ekor	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
						IB Unggas		15000 ekor									17000 ekor	
						Ternak kecil		6200 ekor									7000 ekor	
3	27	02	203		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pakan ternak yang memenuhi persyaratan mutu pakan		100%										
3	27	02	203	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah distributor dan pengecer pakan yang mengikuti sosialisasi mutu pakan ternak	Kota Bima	30 pelaku usaha	20.289.850	20.289.850	-		-	-		50 pelaku usaha	23.333.328
						Dokumen profil pelaku usaha produsen bahan pakan dan pakan ternak		1 buku									-	
						Jumlah pelaku usaha pakan ternak yang dibina dan diawasi		30 pelaku usaha									50 pelaku usaha	
3	27	02	203	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi standar teknis bahan/pakan ternak	Kota Bima	50 pelaku usaha	12.590.100	12.590.100	-		-	-		60 pelaku usaha	14.478.615
						Jumlah pelaku usaha bahan pakan		50 pelaku usaha									60 pelaku	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)									Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)			
						ternak yang dibina										usaha	
3	27	02	205		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan dan peredaran bibit dan hijauan pakan ternak yang memenuhi standar teknis		85%									
3	27	02	205	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Dokumen pelaku usaha penyedia bibit dan hijauan pakan ternak	Kota Bima	1 buku	39.741.300	39.741.300	-		-	-		-	45.702.495
						Jumlah pelaku usaha bibit dan hijauan pakan ternak yang dibina		15 pelaku usaha								20 pelaku usaha	
3	27	02	205	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah peternak yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas pakan ternak	Kota Bima	30 orang	-	-	-		-	-		50 orang	35.600.000
						Jumlah pelaku usaha bibit dan hijauan pakan ternak yang dibina		15 pelaku usaha								20 pelaku usaha	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
3	27	02	206		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase peternak yang menggunakan bibit unggul bermutu		85%										
3	27	02	206	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah peternak yang mengikuti pelatihan teknis budidaya unggas	Kota Bima	40 orang	589.999.500	589.999.500	-		-	-		50 orang	678.499.425
						Jumlah kelompok ternak unggas penerima bantuan yang dibina		50 kelompok								35 kelompok	
						Jumlah peternak yang dibina dan diawasi		250 kelompok								175 kelompok	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)		60%										
3	27	03	201		Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas lahan LP2B		1117 ha										
3	27	03	201	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah pemilik lahan yang dilibatkan dalam sosialisasinya LP2B	Kota Bima	60 orang	-	-	-		800.000.000	1.500.000.000	Bantuan prasarana lahan dan irigasi	70 orang	250.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
						Jumlah P3A yang dibina		25 P3A									30 P3A	
						Jumlah jaringan irigasi yang diidentifikasi		24 lokasi									35 lokasi	
						Jumlah jalan usaha tani yang diidentifikasi		36 lokasi									45 lokasi	
						Jumlah poktan penerima bantuan prasarana pertanian yang dibina		100 poktan									125 poktan	
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung terbangun/direhabilitasi dan dipelihara		5 unit										875.000.000
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani terbangun/direhabilitasi dan dipelihara		5 unit										875.000.000
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah sarana prasarana rumah potong hewan terbangun/direhabilitasi dan dipelihara		5 unit										875.000.000
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah BPP dan prasarana lainnya terbangun/direhabilitasi dan dipelihara		5 unit										875.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		5 unit	1.001.670.000	25.360.000		976.310.000						1.500.000.000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan ternak yang terinveksi PHMS (%)		0,12%										
3	27	04	201		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemantauan lalulintas ternak dalam daerah		100%										
3	27	04	201	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang dilayani melalui vaksinasi ternak	Kota Bima	10000 ekor	17.755.450	17.755.450	-		-	-		12000 ekor	235.000.000
						Jumlah sampel pemeriksaan penyakit hewan menular		600 sampel								700 sampel	
						Jumlah wilayah pengendalian penyakit hewan menular zoonosis		41 kelurahan								41 kelurahan	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
						Jumlah ternak diantarpulaukan yang diperiksa		1000 ekor									1200 ekor	
3	27	04	201	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang dilayani melalui vaksinasi ternak	Kota Bima	1000 ekor	113.764.214	113.764.214	-		-	-		1200 ekor	456.000.000
						Jumlah sampel pemeriksaan penyakit hewan menular		150 ekor									200 ekor	
						Jumlah wilayah pengendalian penyakit hewan menular zoonosis		41 kelurahan									41 kelurahan	
						Jumlah ternak diantarpulaukan yang diperiksa		180 kelompok									200 kelompok	
3	27	04	203		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang mampu dilayani		50%										
3	27	04	203	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pengadaan bahan dan peralatan petugas pelayanan medik veteriner	Kota Bima	1 paket	40.010.230	40.010.230	-		-	-		1 paket	46.011.765
						Jumlah pelayanan		60 kali									70 kali	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)									Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)			
						aktif UPTD											
3	27	04	204		Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pelaku usaha yang menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada unitusahanya		25%									
3	27	04	204	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan memiliki PIRT yang dibina	Kota Bima	15 unit usaha	52.078.700	52.078.700	-		-	-		20 unit usaha	59.890.505
						Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang dibina dan diawasi		20 unit usaha								25 unit usaha	
3	27	04	204	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah hewan/daging qurban yang diperiksa	Kota Bima	1300 ekor	32.263.800	32.263.800	3.500.000.000		-	-		1500 ekor	37.103.370
						Jumlah pelaku usaha pemotongan ternak yang dibina		12 pelaku usaha								15 pelaku usaha	
						Jumlah pelaku usaha bahan asal hewan yang dibina		10 pelaku usaha								15 pelaku usaha	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
						Jumlah pelaku usaha yang dibina persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner		10 pelaku usaha									15 pelaku usaha	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan berkurangnya dampak bencana pertanian		50,00%										
3	27	05	201		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan dampak bencana pertanian yang ditangani		50%										
3	27	05	201	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah petani yang mengikuti SLPHT tanaman pangan	Kota Bima	50 orang	-	-	-	-	-	-			100 orang	350.000.000
						Jenis obat-obatan pengendalian hama terpadu		6 jenis									6 jenis	
3	27	05	201	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatnya pemahaman petani dalam penanganan dampak kekeringan	Kota Bima	50 orang	-	-	-	-	-	-			75 orang	750.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
						Jumlah areal demplot mitigasi kekeringan		10 Ha									5 ha	
						Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penanganan pasca panen mete		80 orang									60 orang	
						Tersalurnya bantuan mesin kacip mete		20 unit									50 unit	
						Jumlah pelaku usaha pasca panen komoditi perkebunan yang dibina		25 pelaku usaha									15 pelaku usaha	
						Jumlah kelompok petani kebun yang dibina dalam teknik budidaya komoditi perkebunan		100 kelompok									75 kelompok	
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian		50,00%										
3	27	06	201		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis izin usaha sektor pertanian		100 rekomendasi										

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
3	27	06	201	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah pelaku usaha yang dilibatkan	Kota Bima	30 orang	24.639.900	24.639.900	-		-	-		50 orang	28.335.885
						Luasan usahatani padi yang difasilitasi untuk menjadi calon lokasi Asuransi Usahatani Padi (AUTP)		500 Ha								500 ha	
						Jumlah ternak sapi yang difasilitasi untuk menjadi calon lokasi Asuransi Usaha Ternak Sapi Padi (AUTS)		250 ekor								250 ekor	
						Jumlah petani yang difasilitasi untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR)		200 orang								200 orang	
3	27	06	201	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah distributor/pengecer pupuk dan pestisida yang diawasi dan dibina	Kota Bima	47 pelaku usaha	-	-	-		-	-		30 pelaku usaha	35.000.000
						Jumlah kelompok tani penerima bantuan yang dibina		36 poktan								40 poktan	
						Jumlah peserta rapat koordinasi penyusunan RDKK		74 orang								80 orang	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
						Jumlah peserta rapat Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida		33 orang									33 orang	
						Jumlah peserta rapat koordinasi dan updating RDKK dalam e-EDKK		74 orang									80 orang	
						Jumlah distributor/pengecer pupuk dan pestisida yang diawasi dan dibina		47 pelaku usaha									47 pelaku usaha	
						Jumlah kelompok tani penerima alsintan yang diidentifikasi (CP/CL)		36 poktan									50 poktan	
3	27	06	202		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Cakupan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan yang diberikan		75%										
3	27	06	202	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah pelaku usaha yang dibina tentang kepemilikan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	Kota Bima	30 pelaku usaha	-	-	-	-	-	-			20 pelaku usaha	23.500.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
						Buku profil pelaku usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan		1 buku									-	
3	27	06	203		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Cakupan pengecer sarana pertanian yang memiliki izin usaha		100%										
3	27	06	203	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah pelaku usaha yang dibina tentang izin usaha pengecer obat hewan	Kota Bima	20 pelaku usaha	-	-	-	-	-	-			15 pelaku usaha	35.000.000
						Jumlah pelaku usaha pengecer obat hewan yang dibina		25 pelaku usaha									15 pelaku usaha	35.000.000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan peningkatan SDM Pertanian		20,00%										
3	27	07	201		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Presentase peningkatan jabatan fungsional penyuluh pertanian		14%										
						Presentase pelaku utama yang menerapkan teknologi budidaya sesuai anjuran		30%									35%	
						Persentase peningkatan kelas kelompok tani		Pemula ke Lanjut 3%									Pemula ke Lanjut 3%	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
								Lanjut ke Mandya 1%									Lanjut ke Mandya 1%	
								Madya ke Utama 1%									Madya ke Utama 1%	
3	27	07	201	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani yang dibina	Kota Bima	50 kelompok	86.999.900	9.900.000	-	77.099.900	-	-			65 kelompok	100.049.885
						Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang dibina		50 kelompok									65 kelompok	
						Jumlah kelompok P3A yang dibina		25 P3A									29 P3A	
						Jumlah kelompok usaha yang dibina		50 kelompok									65 kelompok	
3	27	07	201	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani yang dibina	Kota Bima	50 kelompok	269.394.220	10.001.800	-	76.999.900	-	-			65 kelompok	309.803.353
						Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang dibina		50 kelompok									65 kelompok	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
						Jumlah kelompok P3A yang dibina		25 P3A									29 P3A	
						Jumlah kelompok usaha yang dibina		50 kelompok									65 kelompok	
3	27	07	201	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah PPL yang dilibatkan	Kota Bima	15 orang	98.234.800	10.998.900		86.875.900	-	-		20 orang	112.970.020
						Jumlah PPL yang dilibatkan		15 orang								20 orang	
						Jumlah dokumen programa penyuluahan pertanian tingkat kecamatan yang tersusun		4 dokumen								4 dokumen	
						Jumlah PPL yang dibina		42 orang								42 orang	
						Jumlah wilayah identifikasi potensi pertanian		4 kecamatan								4 kecamatan	
3	27	07	201	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah PPL yang melakukan pendampingan diseminasi tekonologi pertanian	Kota Bima	40 orang	-	-	-		-	-		40 orang	123.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)										Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										DAU	DAK	DBHCHT	APBD PROVINSI	APBN (TP)				
JUMLAH KESELURUHAN									19.170.035.784	15.293.475.204	4.020.000.000		2.400.000.000	7.500.000.000				28.071.093.923

BAB 5 PENUTUP

Keberhasilan Rencana Kerja Tahunan ini sangat ditentukan oleh keterlibatan dan peran aktif dari seluruh masyarakat tani ternak serta semangat dan disiplin dari seluruh aparatur Dinas Pertanian Kota Bima.

Besarnya anggaran sangat penting dan tentunya berpengaruh pada pencapaian sasaran pembangunan pertanian. Namun perlu disadari bahwa yang lebih penting sesungguhnya adalah efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan anggaran itu sendiri. Dengan demikian diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran baik ditingkat eksekutif maupun legislatif untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, serta partisipasi dan kemandirian pelaku utama yakni petani.

Dukungan kebijakan terhadap reposisi dan reoreintasi perencanaan pembangunan pertanian di Kota Bima saat ini diperlukan agar dihasilkan kebijakan dan program pembangunan pertanian yang sesuai, serta sebagai acuan dalam fasilitasi anggaran dan implementasinya yang sesuai dengan kebijakan dan program yang digariskan. Dalam kaitan itu maka reposisi sistem perencanaan pembangunan pertanian maka terlebih dahulu diawali dengan reposisi kebijakan pembangunan pertanian.

Berdasarkan UU no 18/2012 tentang Pangan, Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Penciptaan kedaulatan pangan berkaitan dengan peningkatan kemampuan pendayagunaan segala sumberdaya pertanian yang ada dalam rangka penumbuhan produksi pangan agar terbangun ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat.

Upaya peningkatan produksi dalam rangka pencapaian kedulatan pangan dihadapkan kepada permasalahan kemerosotan dukungan sumber daya bagi produksi pertanian seperti lahan, air, SDM berkualitas, teknologi, kelembagaan dan lainnya, untuk itu dukungan ketersediaan sumber daya ini harus dikembalikan agar pelaksanaan pembangunan pertanian selanjutnya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Peningkatan produksi pertanian dilakukan melalui perluasan lahan usaha dan atu peningkatan produktivitas. Untuk itu upaya untuk mengembalikan dan memperkuat lahan ketersediaan air bagi usaha pertanian dan memperkuat peningkatan produktivitas harus menjadi langkah awal. Diperlukan kebijakan terpadu pada banyak aspek dan dilaksanakan secara konsisten yang mencakup: (a) perlindungan lahan sawah produktif, (b) penataan pemilikan lahan, (c) perluasan

lahan pertanian/sawah, (d) penyediaan infrastruktur, (e) rehabilitasi lahan dan irigasi, (f) peningkatan nilai ekonomi usahatani, (g) pengendalian laju penduduk dan distribusinya, (h) sistem insentif dan (i) penegakan hukum.

Pembangunan pertanian kedepan juga dihadapkan kepada tantangan tuntutan konsumen akan produk bermutu, persaingan pasar dan penerapan berbagai perlindungan bagi produksi domestik antara lain melalui mekanisme yang perlndungan non tarif. Untuk itu kegiatan peningkatan produksi juga harus dapat menghasilkan produksi berkualitas. Untuk itu program sertifikasi dan jaminan mutu produk harus menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peningkatan produksi.

Memperhatikan kinerja pembangunan pertanian yang telah kita alami dalam beberapa dasawarsa terakhir dan memperhatikan perkembangan global yang dihadapi Kota Bima pembangunan pertanian dimasa yang akan datang, maka pembangunan pertanian mendatang tidak dapat hanya mengandalkan pada kebijakan dan program pembangunan yang telah pernah dilakukan. Pendekatan pembangunan pertanian selama ini lebih kepada pendekatan komoditi dengan penekanan komoditi tertentu (padi, jagung, kedele, gula dan daging sapi). Dengan adanya fokus tersebut maka pengembangan komoditi lain relatif terabaikan, dan konsumen cenderung dipaksakan untuk mengkonsumsi komoditi tersebut. Dengan didasarkan kepada potensi keragaman sumberdaya spesifik lokasi yang dimiliki maka pembangunan pertanian kedepan harus dirubah dari pengembangan berbasis komoditi menjadi pendekatan pembangunan wilayah dengan mengutamakan keunggulan potensi wilayah. Melalui pendekatan wilayah maka program pembangunan tidak lagi berbasiskan pembangunan monokultur komoditi tetapi polikultur komoditi pertanian. Dengan pendekatan kedaulatan pangan maka ukuran kecukupan pangan terutama karbohidrat tidak lagi berdasarkan kecukupan makan beras, namun kecukupan gizi makanan dari sumber setempat. Untuk itu tidak ada lagi pemaksaan penetapan target produksi suatu komoditi tertentu berdasarkan target nasional/wilayah. Kebijakan yang memaksakan untuk menargetkan swasembada beras dan komoditas pangan lain melalui penerapan teknologi revolusi hijau pada kondisi lahan yang masin menyusut dinilai merupakan salah satu penyebab keterpurukan pertanian.

Pembangunan pertanian kedepan juga dihadapkan kepada tuntutan pembangunan yang menganut kaidah keberlanjutan atau membangun pertanian kedepan/tidak merusak. Pertanian berkelanjutan adalah usaha pertanian yang menggabungkan secara integral antara usaha produksi dengan tindakan pelestarian lingkungan, sumber daya alam pertanian secara berkelanjutan. Dalam pola ini kegiatan pemanfaatan sumberdaya lahan unk kegiatan produksi secara produktif dibarengi oleh tindakan-tindakan pelestarian SDLP dan penyehatan tanah dan sumberdaya air.

Pada kondisi demikian maka fisolofi pembangunan pertanian selayaknya tidak hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga masalah etika, kultural, sosial dan kekayaan bukan fisik, tetapi juga masalah etika, kultural, sosial dan kekayaan bukan fisik (*non*

physical assets) pada umumnya, seperti etika pembangunan, etika religius, etika bisnis, etika keberlanjutan dan mengutamakan kepemimpinan petani (*farmers leadership*). Etika religius keberlanjutan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan dicirikan oleh keserasian antara kegunaan (*utility*), keindahan (*beauty*) dan cinta kasih (*love*) harus menjadi acuan penyusunan rancangan dan pelaksanaan pembangunan sat ini dan kedepan. Perlu dibangun etika bersalah bagi pelaku pembangunan yang bersifat merusak.

Pembangunan pertanian harus bersifat integratif dengan sektor lain dan sejalan dengan otonomi daerah sehingga pembangunan kewilayahan harus ditonjolkan. Program pusat harus selalu disesuaikan dengan orientasi pembangunan pertanian di daerah. Otonomi daerah yang sudah dilaksanakan di lapangan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan pertanian di daerah, tanpa adanya keserasian antara pemerintah pusat dan daerah, maka program dan kegiatan pembangunan pertanian berpotensi tidak mencapai tujuan atau pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan.

Perubahan dalam pendekatan ini tentunya akan merubah penentuan program program pembangunan dan fasilitasi anggaran. Penyusunan program dan fasilitasi anggaran harus lebih didasarkan kepada usulan kebutuhan dari masing masing wilayah petani/kelompok tani. Pada kondisi demikian maka proses perencanaan partisipatif harus lebih diutamakan dibandingksan proses teknokratik dan politik. Sistem perencanaan program pembangunan harus tidak lagi dimulai dari penentuan target yang kemudian dibagi habis kepada setiap wilayah, tetapi rancangan program pembangunan harus merupakan rangkuman dari usulan kebutuhan fasilitasi yang diminta dari petani wilayah.

Sejak awal disadari bahwa pembangunan nasional, utamanya pembangunan pertanian indonesia dicirikan oleh pola pengusahaan pertanian yang dilakukan dominan oleh skala kecil dengan keterbatasan disegala aspek. Selama ini kondisi usaha kecil tertinggal apalagi dihadapkan kepada persaingan dengan kekuatan ekonomi besar dari luar. Untuk itu diperlukan upaya khusus untuk pengembangan usaha skala kecil tersebut melalui pemberdayan peningkatan kemampuannya.

Pemberdayaan masyarakat tersebut perlu diarahkan untuk membangun masyarakat belajar (*learning society*) merupakan tahapan awal penting dalam reposisi sistem perencanaan pembangunan pertanian. Pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Peran pemerintah dalam hal ini adalah: (a) memfasilitasi, dinamisasi dan regulasi agar tercipta suasana/iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi/daya yang dimiliki masyarakat, baik potensi sumber daya maupun potensi sistem nilai tradisional/kearifan lokal yang telah membudaya dalam menata kehidupan masyarakat; (b) fasilitasi untuk lebih mendinamiskan masyarakat dalam bentuk penyediaan infrastruktur/prasarana dan

sarana, baik fisik (jalan, irigasi, listrik) maupun sosial (pendidikan, kesehatan), akses terhadap teknologi, pembiayaan, pasar dan lainnya, dan (c) perlindungan masyarakat dari persaingan yang tidak seimbang.

Untuk menuju kearah itu maka reformasi mental terutama di birokasi harus dilakukan. Reformasi birokrasi perlu dilakukan menuju perubahan dari peran birokrasi dari yang sifatnya mengatur (*steering*) menjadi memfasilitasi (*facilitating*) agar pelaku pembangunan dapat membangun diringa sendiri.

Dinamika lingkungan strategis pembangunan terus bergerak semakin cepat dan kompleks sehingga kegiatan pembangunan pertanian juga terus bergerak menjadi semakin kompleks dan dinamis. Sejalan dengan itu seluruh proses pembangunan pertanian mulai dari perencanaan dituntut pula ikut berproses secara dinamis. Proses pembangunan saat ini dan kedepan dituntut lebih mengarah kepada kegiatan pembangunan yang lebih memberdayakan masyarakat menuju masyarakat belajar (*learning society*) yaitu peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Dalam kaitan itu pentingnya lebih ditegaskan akan peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator agar kemampuan membangun diri masyarakat tersebut berjalan secara dinamis. Reposisi perencanaan perlu dilakukan agar proses tersebut berjalan lebih cepat.

Kami berharap mudah-mudahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini dapat berguna sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintahan sebagai wujud tanggungjawab untuk lebih memperbaiki kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat luas dimasa-masa mendatang.

Raba-Bima, Agustus 2023

Kepala SKPD,

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PERTANIAN

IR. H. SARAFUDDIN, M.M.
NIP. 19640715 199203 1 017

LAPORAN
RENCANA KERJA 2024
(RENJA)



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BIMA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Rencana Kerja) tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun Anggaran 2024 ini memuat hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024.

Pengukuran keberhasilan dengan tolak ukur Renstra dan Renja SKPD mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya, untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program / kegiatan / kebijakan pada tahun berjalan.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan Laporan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini dapat disusun dengan baik.

Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dimasa mendatang.

Raba – Bima, Juni 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bima,



Syarief Rustaman, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730409 199211 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB. I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 3

1.3. Maksud danTujuan 6

1.4. Sisteatika 6

BAB. II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangka Daerah dan Capaian Renstra Restra Perangkat Daerah 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Prangkat Daerah 19

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggara Tugas dan Fungsi PD 20

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 36

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 36

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 40

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 44

4.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 …… 44

4.2 Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD 46

4.3 Rencana Progran Kerja dan Kegiatan Tahun 2025..... 49

BAB. VI. PENUTUP ……..…….. 62

BAB I
PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada, dan hal tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengatur lingkup dan tingkatan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD), hal ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap Kepala SKPD harus menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman atau arahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran Renstra OPD dan Memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan beberapa tahun ke depan. Benang merah Rencana Kerja OPD sebagai tindaklanjuti Rencana Startegis OPD adalah bagaimana mendorong pembangunan kota Bima dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Saat ini, wilayah operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam penanganan sampah mencapai 35 Kelurahan dari 41 kelurahan yang ada di kota Bima.

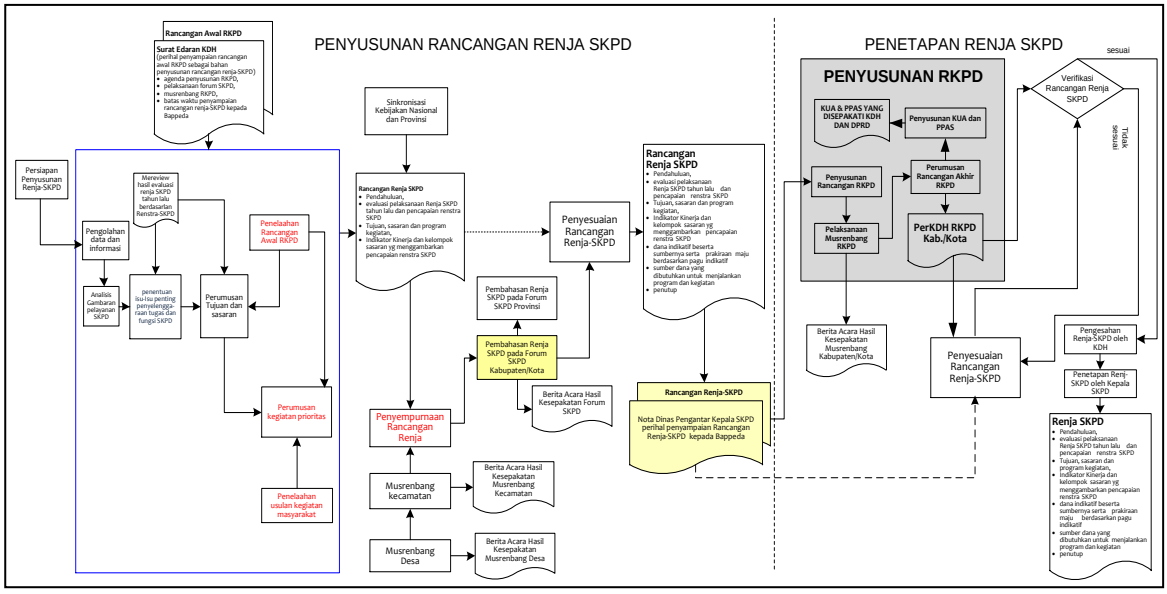
Salah satu hal yang menjadi kendala adalah keterbatasan jumlah armada operasional. Belum lagi umur armada operasional tersebut sebagian sudah lebih dari 15 tahun. Sementara itu, lokasi taman yang ada di Kota Bima saat ini meliputi 53 lokasi. Akan tetapi, dengan total luasan keseluruhan taman 349,2 hektar untuk wilayah kota Bima, tentu saja ruang terbuka hijau yang berupa taman kota masih perlu ditambah lagi jumlahnya guna mendukung estetika kota. Untuk pemakaman rakyat yang terkelola / telah ditata sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 55,68 hektar atau 89 lokasi pemakaman rakyat yang ada di kota Bima.

Rencana Kerja (Renja) ini berisi berbagai program dan kegiatan pembangunan baik kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin (belanja tidak langsung) maupun kegiatan-kegiatan pembangunan (belanja langsung).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH Kota Bima ini semuanya bermuara pada upaya peningkatan pelayanan baik pelayanan intern dalam rangka pengembangan organisasi maupun pelayanan kepada seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yakni ***"Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup"***

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah ini:

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2024 mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan seperti sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2007 tetang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 103);
22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019;
23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
24. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257).
25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 233);
26. Peraturan Walikota Bima nomor 84 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima tahun anggaran 2024 (Berita Daerah Kota BIma Tahun 2023 nomor 631).

27. Peraturan Walikota Bima nomor 20 tahun 2023 tentang Penepatan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program serta kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang diharapkan dalam kurun waktu 1 tahun (jangka pendek) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunan Rencana Kerja OPD (RENJA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima Tahun 2024 dimaksudkan untuk :

a. Menjabarkan Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima Tahun 2024-2026
b. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2024
c. Sebagai sarana dalam menampung aspirasi masing-masing bidang untuk penyusunan program dan kegiatan Tahunan DLH Kota Bima.
d. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Bima.

Penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2024 bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Kegiatan SKPD Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan sasaran dan program pembangunan kota Bima yang akan dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan.

Dokumen RKPD Kota Bima Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Memuat Evaluasi pelaksanaan renja dan capaianya, pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2023, Analisis kinerja pelayanan daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Reviu terhadap rancangan awal RKPD, serta Usulan progran dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran perangkat Daerah dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Perkiraan Maju

BAB V PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah Kota Bima tahun 2024 yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2023 yang telah di sepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

- Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah ditandatagani yang diukur mulai dari Capaian Kinerja Tujuan, Capaian Kinerja Sasaran, Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja kegiatan.
- Untuk mewujudkan Tujuan yang ingin dicapai, Dinas Lingkungan hidup telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis, dengan dukungan capaian progran dan kegiatan anatara lain:

I. Capaian Strategis I, yaitu meningkatnya inedeks Kualitas Air dan Udara

Terwujudnya capaian kinerja sasaran strategis Peningkatan Indeks Kualitas Air, sangat ditentukan oleh keberhasilan capaian Kinerja Program. Adapun

Program yang mendukung keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tersebut adalah :

1. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolan Persampahan**

   Untuk mengetahui Capaian Kinerja Program Pengembangan Kinerja Pengelolan Persampahan, diukur berdasarkan persentase sampah yang terangkut dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dalam mendukung program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan didukung dengan tiga kegiatan, yaitu:

   a. ***Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan***

      Untuk meningkatkan pelayanan persampahan se-Kota Bima, sangat diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Untuk dimaklumi bahwa jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam keadaan baik sebanyak 30 unit, sedangkan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 42 unit.

   b. ***Pemeliharaan kendaraan operasional pengangkutan sampah***

      Untuk meningkatkan pelayanan persampahan se-Kota Bima, sangat diperlukan kendaraan operasional dalam keadaan baik, untuk itu perlu dilakukan upaya pemeliharaan secara terus menerus sehingga kendaraan operasional tersebut tetap dapat melaksanakan pengangkutan sampah sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

   c. ***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan***

      Dalam meningkatkan layanan persampahan selain melaui peningkatan sarana dan prasara persampahan diperlukan pula adanya peran serta dan partisipasi masayarakat melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dan bank sampah. Upaya peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup memiliki yaitu pelatihan dan Pokmas serta Bank sampah

2. **ProgramPengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan**

Untuk mendukung pencapaian program di dukung oleh tiga kegiatan, yatiu:

a. Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan fokus pada pelaksanaan pengendalian Emisi gas Rumah Kaca, mitigasi dan adaptasi peruabahan iklim, serta melakukan uji terhadap media tanah, air dan udara.

b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan fokus pada sosialisasi dan pemberian informasi pada masyarakat tentang bahaya kerusakan lingkungan hidup.

c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup fokus pada kegiatan pembersihan sungai dan laut.

II. Capaian Strategis II yaitu, Persentase RTH Publik .

Capaian Kinerja Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau Publik diukur dengan Luas Ruang terbuka Hijau Publik Yang tersedia dibandingkan dengan Target Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan. Pada tahun 2023, Kota Bima memiliki Rung terbuka Hijau seluas 62,99 Ha, terdiri dari Taman Kota, area Pemakamnan, dan Hutan Kota, serta kawasan Terbuka Hijau Publik Lainnya

Dalam mendukung tercapaianya ruang terbuka hijau publik didukung oleh 1 program, yaitu ; Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan 1 kegitan, dan sub kegiatan yaitu;

a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Kehati.

b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan pada kegiatanpenanaman dan pemeliharaan taman.

c. PengelolaanTaman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan, dengan fokus pada penanaman pohon peneduh.

III. Capaian Strategis III, Meningkatnya Rehabilitas Lahan Kritis

Untuk mengetahui Capaian Sasaran Strategis ***Meningkatnya***

Kualitas SDA dan LH, diukur berdasarkan porsentase perbandingan antara Kawasan SDA yang di rehabilitasi dengan Kawasan SDA yang rusak/kritis.
Ada 3 (Tiga) Kawasan SDA yang mempengaruhi Kualitas SDA dan LH, yaitu Kawasan Mata Air, Kawasan Mangrove dan Kawasan Terumbu Karang
Terwujudnya capaian kinerja sasaran, sangat ditentukan oleh keberhasilan capaian Kinerja Program. Terdapat 2 Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat dan Penghargaan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat, keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ini; **yaitu;**

a. Kegiatan Peningkatkan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lngkungan Hidup pada Masyarakat

Untuk mengetahui Capaian Kinerja Program Tersebut melakukan penyuluhan pada daerah lahan kritis dan Konservasi Sumber daya air, diukur berdasarkan Prosentase Jumlah mata Air yang terlindungi. Adapun formulasi perhitungannya adalah :
Capaian Kinerja = Mata Air yang dilindungi/ Jumlah Mata Air x 100%
Untuk di maklumi jumlah mata air yang ada di Kota Bima sampai saat ini adalah 29 titik, dengan luas kawasan 160 Ha, 30% dari Luas kawasan tersebut dalam keadaan kritis, atau seluas 48 Ha.

b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Untuk mengetahui Capaian Kinerja Program Konservasi Sumber daya alam, diukur berdasarkan Prosentase Konservasi Mangrove dan Terumbu Karang . Adapun formulasi perhitungannya adalah :

Capaian Kinerja = Luas kawasan terkonservasi/ Luas kawasan kritis x 100%. kawasan Mangrove dan terumbu karang yang ada di Kota Bima sampai saat ini adalah 36,7 Ha, dengan Luas kawasan dalam keadaan kritis, seluas 16,39 Ha

c. Kegiatan Rehabilitas Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Air

Adapun Kegaiatan yang dilaksanakankan untuk mewujutkan Capaian Kinerja Program **Program Rehabilitas Dan Pemulihan Cadangan**

. Lebih detail dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Bima

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program	alisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan	t dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**1**	**2.01**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Kinerja Perangkat Daerah**	100%	99,80%	100%	99,90%	99,9%	100%		
2	1	2.01.1.	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangka Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Perencanaan,**	100%	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
2	1	2.01.2	Dministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Lap. Keuangan Perangkat Daerah	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	9 bulan
2	1	2.01.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi**	100%	90 %	**90%**	**90%**	100%	**95%**	95%	98%
2	1	2.01.4	**Penyediaan Jasa Penunjang kantor**	**Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang**	100%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
2	1	2.01.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Pelayanan pemeliharaan Barang**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	

2	1	2.01.6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Menurunnya Pelanggaran Persentase Terhadap RPPLH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%
2	1	2.01.7	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	75%
2	**1**	**2.02**	PrigramPengendalian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Indeks Kualitas air dan Udara Hidup Kota Bima	50	50	50	50	50	50	50	50
2	1	2.02.1	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran Kerusakan Linhkungan hidup	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
2	1	2.02.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan tersedia	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
2	1	2.02.5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luas RTH Publik	11,54	900 kali	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54
2	1	2.02.7	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Persentase Luas RTH di Kelola	100%	56 kali	48 kali	46 kali	96%	48 kali	150 kali	37,5 kali
2	**1**	**2.06**	Program Pembinaan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Izin Lingkungan yang diawasi	50	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**
2	1	2.06.1	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah	Persentase izin yang Patuhi	45	45	45	45	45	45	45	45
2	1	2.06.2	Program Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota	Persentase Meningkatnya Jumlah Ormas Sadar Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2	12.06.5	Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemsyarakatan Kab/Kota	Jumlah Kelompok Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Lingkungan Hidup	100%	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok
2	12.06.9	Program Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kota	Persentase meningkatnya penghargaan Bidang Lingkungan Hidupn	100%	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	300%	75%
2	**12.08**	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidupn Tingkat Kab/Kota	Jumlah kategori penghargaan dalam kegiatan lingkungan hidup	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok
2	12.08.1	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Menurunya Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
2	12.08.2	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Dokumen Pengaduan masyarakat yang diselesaikan	25	25	25	25	25	25	25	25
2	12.08.4	Program Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang tertangani	- 72%	- 57%	- 62% -	- 64,5%	- 104,03%	- 65%	- 186,5%	- 46,63%
2	**12.09**	Pengelolaan Sampah	Volume Sampah Yang tertangani.	460	460	- 460	- 460	460	- 460	- 460	- 460
2	12.09.1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Volume sampah yang tertangani	372 M3	179,33 M3	216 M3	322 M3	149,07%	240 M3	741,33 M3	185,333
2	12.09.2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok Bank sampah yang dibina	10 klp	5 Kelompo	10 Kelompok	2 kelompok	20%	10 kelompok	17 Kelompok	4,25 klp

2	1	2.09.6	**Program Pengendalian pencemaran dan perusakan LH**	% meningkatnya kualitas air dan Udara	85%	76,97%	78 %	78,98%	101,25%	80%	235,95%	58,99%
2	1	2.09.9	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah kriteria yang sudah dipenuhi Sehat/Adipura	90%	71%	80%	71%	88,75%	83%	225%	56,25%
2	1	2.09.10	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan	15 Izin	20 izin	25 Izin	20 Izin	80%	25 izin	65 izin	16,25 izin
2	**2**	**2.01**	Koordinasi pengelolaan Prokasih/superkasih	Panjang sungai dan pantai yang ditangani Prokasih/Superkasih	3 Lokasi (250 meter)	250 meter	250 meter	225 Meter	90%	0	475 meter	118,75 meter
2	2	2.01.1	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Jumlah Perwali	3 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	1,5 dokumen
2	**2**	**2.02**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM**	**MENINGKATNYA LUAS LAHAN YANG**	86%	34%	52%	20%	38,46%	69%	123%	30,75%
2	2	2.02.1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Sumber Air	Luas lahan yang dikonservasi	125 Ha	5 ha	15 ha	2 ha	13,33%	47 ha	54 ha	13,5 ha
2	2	2.02.2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah Kelompok perlindungan mata air	25 kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	4 Kelompok	80%	10 Kelompok	19 kelompok	4,75 klp
2	**3**		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN**	**PERSENTASEE MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN LH**								
2	**3**	**2.01**	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah data informasi lingkungan informasi SDA dan LH	tidak ada							
2	3	2.01	**Program Peningkatan Pengendalian Polusi**	% Kualitas Udara dan Tanah	80%							
2	3	2.01	Pengujian emisi/polusi Udara akibat aktivitas industri	Jumlah Pengujian emisi/polusi udara	20 Sampel	20 Sampel	30 sampel	25 sampel	83,33%	30 sampel	75 sampel	18,75 sampep

2	3	2.01	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3 Kali						
2	**3**	**2.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN**	**PERSENTASE AREAPEMAKAMAN YANG TERTATA**	100%	69%	69%	69%	100%	79%	217%	54,25%
2	3	2.02	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Panjang pagar kuburan	920	1.949 Meter	64 meter	560 Meter	875%	74 meter	2.583 meter	645,75 meter
2	3	2.02	Pemeliharaan s arana dan prasarana pemakaman	Jumlah sarana dan prasarana pemakaman dalam	92 makan	35	40 makam	56 makam	140%	56 makam	147 makam	36,75 makam
2	**3**	**2.03**	**PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANA PERTAMANAN**	**PERSENTASE TAMANKOTA YANG TERTANGANI**	100%	70,97%	79,03%	79,03%	100%	87,19%	229,13%	57,28%
2	3	2.03	Pemeliharaan rutin/berkalasarana dan prasarana pertamanan	Jumlah taman yang dipelihara dengan baik	62 Taman	44 taman	49 taman	44 taman	89,80	54 taman	142 taman	35,5 taman
2	3	2.03	Pembangunan sarana dan prasarana pertamanan	Luas taman yang dibangun	287	267,2 ha	272 ha	267,5 ha	98,35%	277 ha	811,7 ha	202,93 ha

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 masih diperoleh dasar hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh nomenkaltur Dinas Lingkungan Hidup dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup. Dalam bab ini dibahas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja DLH.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangaan strategi organisasi ke masa akan datang. Dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat *performance* masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.untuk mengetahui capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dapat dilihat sebagai berikut:

Berdasarkan tabel dibawah ini, dapat dilihat bahwa terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran DLH yang mendukung indikator kinerja utama yaitu indeks kualitas air, dan udara dengan tingkat pencemaran sedang, persentase luas RTH publik dan persentase kawasan direhabilitasi. Pencapaian 4 (empat) indikator sasaran pada tahun 2021, hanya satu indikator sasaran yang menunjukkan hasil yang memenuhi target yaitu indeks kualitas udara dengan capaian kinerja 81,36 dengan target 80 sementara 3 (tiga) indikator sasaran tidak mencapai target, yaitu indikator sasaran indeks kualitas air, persentase luas RTH Publik dan persentase luas Kawasan direhabilitasi. Kurang terpenuhinya Pencapaian target ini dipengaruhi oleh minimnya anggaran rehabilitasi yang di targetkan 24,69 Ha, hanya tersedia anggaran 8 Ha, disamping itu kecilnya tingkat keberhasilan pada kegiatan penanaman pada daerah sekitar mata air yang kurang maksimal, hal ini terjadi banyaknya lahan di sekitar mata air mengalami kerusakan akibat pembakaran lahan, disamping itu juga kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hutan sangat minim.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bima

No	Indikator Sasaran	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023)	Tahun 2024	
1	Indeks Kualitas Air			4	50	50	29,75	24,50	28.75	30	31	
2	Indeks Kualitas Udara			80	82	85	87,33	86	87,33	87,50	88	
3	% Luas RTH Publik			11,01	11,01	11,34	11,64	11,21	11,23	11,50	11,60	
4	% Luas Kawasan direhablitasi			2	2,2	2	2,5	0,64	0,64	1	1,2	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dan efektif dalam mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan/kegiatan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan Identifikasi baik internal maupun ekternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi adapun isu-isu penting dalam penyelenggara tugas dan fungsi, antara lain:

A. permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya UPT Laboratorium menyebabkan operasional laboratorium tidak dapat maksimal;
2. Tidak adanya peralatan dan personil analis laboratorium sehingga menghambat operasional laboratorium;
3. Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal;
4. Masih minimnya peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pengendalian;

5. Belum adanya peta inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar untuk mengetahui potensi sumber pencemar;
6. Minimnya Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.
7. Alih fungsi lahan terbuka (open space) menjadi lahan terbangun
9. Kemerosotan keanekaragaman hayati akibat eksploitasi dan pemanfaatan secara berlebihan;
10. Dampak penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim yang berpotensi menyebabkan bencana lingkungan;
11. Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan, pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan;
12. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah masih relatif rendah;
13. Rendahnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

B. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Developmnet Goals*

C. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;

Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam meningkatkan pelayanan

- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengujian kualitas lingkungan hidup.
- Belum tersedianya laboratorium lingkungan hidup
- Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang berkualitas ramah masih rendah
- Masih kurangnya sosialisasi PERDA Lingkungan Hidup
- Kewenangan Pemerintah Kab/Kota dalam penanganan Hutan beralih pada provinsi
- Lemahnya koordinasi antar pemerintah provinsi dengan Kab/Kota dan antar sektor dalam penganan Hutan
- Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.
- Perubahan fungsi ekosistem menjadi fungsi yang lain.

- Masih minimnya pemahaman mengelola bank sampah di tingkat masyarakat
- Minimnya anggaran sosialisasi pentingnya Bank sampah dan PERDA persampahan untuk mengurangi limbah dan sampah.

Sedangkan peluang adalah sebagai berikut;

- Besarnya political will dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas dari Pemerintah
- Tingginya etos kerja Pegawai DLH dalam mewujudkan semangat kerja untuk lingkungan berkualitas dan ramah.
- Adanya komitmen bersama masyrakata pasca banjir bahwa mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah mutlak harus dilakukan agar banjir tidak terjadi lagi.

D. Ada isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, yang berkaitan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang paling berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Aktifitas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan manusia telah menurunkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan jumlah limbah yang yang mengakibatkan lingkungan akan tercemar. Kedua hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan ini semakin diperparah dengan terjadinya pemanasan global.

Demikian pula yang terjadi di Kota Bima, cukup banyak aspek yang ikut mempengaruhi kualitas lingkungan baik lokal maupun global, isu-isu penting tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Terjadinya pemanasan global yang berpengaruh terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatnya kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan pengelolaan lingkungan Hidup;
4. Menurunnya potensi sumber daya air (sumber mata air, air tanah dan air permukaan) akibat eksploitasi yang berlebihan dan pencemaran lingkungan;

5. Penanganan air limbah rumah tangga/domestik belum dilakukan secara terpadu dan optimal;
6. Masih rendahnya penerapan 3R dalam pengelolaan sampah rumah tangga;
7. Keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna semakin terancam keberadaannya;
8. Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan, pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan
9. Masih minimnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam melakukan pengelolaan lingkungan;
10. Masih minimnya regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup;
11. Masih rendahnya penegakan hukum lingkungan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Ada beberapa Program dan kegitaan yang anggaranya berubah pada Rancangan awal RKPD awal ke Rancangan akhir RKPD, yaitu antara lain:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dari anggaran sebesar Rp 193.499.600 menadi 246.500.000 pada rancangan RKPD ahir.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ada kenaikan dari RKPD rancangan awal ke Rancangan ahir, kenaikan tersebut berasal dari kenaikan kegiatan pengelolaan Laboratorium.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungn dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari anggaran awal sebesaer Rp 149.750.000 menjadi Rp 883.197.100 pada RKPD Akhir, kenaikan ini di akibatkan pada penganggaran kembali pada kegiatan pelepasan lahan kampus IAIN
4. Program Keanekaragaman Hayati (kehati) turun dari Rancangan RKPD awal dari 4.212.063.250 menjadi 3.603.865.100 pada Rancangan RKPD ahir. Penurunan ini diakibatkan pada penurunan usalan pokir dewan.
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan

Lingkungan Hidup untik Masyarakat naik dari 110.000.000 Rancangan Awal RKPD menjadi 68.660.200 pada Rancangan Ahir'

6. Program Pengelolaan Persampahan turun dari 5.000.000.000 Rancangan RKPD awala menjadi 4.904.073.386 pada Rancangan RKPD ahir, ini terlihat pada tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Pentin
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	96,125,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	96,125,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Prerencanaan	2 Dokumen	15,615,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra	2 Dokumen	15,615,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,010,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,010,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12,600,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,740,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,740,000	

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12,180,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12,180,000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,980,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8,980,000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	30,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	35,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Dokumen	9,558,383,092	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Bima	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Dokumen		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	1 Bulan	9,375,447,092	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Bulan	9,375,447,092	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1 Dokumen	162,800,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	162,800,000	

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8,892,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11,892,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	11,244,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 laporan	11,244,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	483,894,500	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Bima	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kota Bima	jumlah komponen listrik dalam kondisi baik	1 kegiatan	8,250,625	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kota Bima	jumlah komponen listrik dalam kondisi baik	1 kegiatan	25.522.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100 Persen	14,605,397	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100 Persen	20.000.000	

	Penyediaan Barang Cetakan dan	Kota Bima	jumlah bahan yang dicetak dan	65.0000 lembar	18,411,222	Penyediaan Barang Cetakan dan	Kota Bima	jumlah bahan yang dicetak dan	65.0000 lembar	50.250.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah SSPD	66 kali	400,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah SSPD	66 kali	388.122.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				**372,282,56**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	jumlah surat yang terkirim	1.000 lembar	131,989,268	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	jumlah surat yang terkirim	1.000 lembar	247.770.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	45,861,518	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	jumlah jasa komunikasi,	12 bulan	32.364.696	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Kota Bima	jumlah penyediaan jasa peralatan	1 kegiatan	23,981,590	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Kota Bima	jumlah penyediaan jasa peralatan	1 kegiatan	19.930.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kota Bima	cakupan pemenuhan ATK	100 Persen	170,450,185	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kota Bima	cakupan pemenuhan ATK	100 Persen	99.950.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				**334,583,889**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kota Bima	jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	50 kendaraan	153,624,588	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kota Bima	jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	50 kendaraan	101.021.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Kota Bima	cakupan layanan perpajakan kendaraan	50 kendaraan	153,624,588	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kota Bima	cakupan layanan perpajakan kendaraan	50 kendaraan	130.558.600	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Pemeliharaan	50 kendaraan	155,500,27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Pemeliharaan	50 kendaraan	20.050.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	jumlah gedung, kantor yang terpelihara	1 Bangunan	8,548,986	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	jumlah gedung, kantor yang terpelihara	1 Bangunan	90.109.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Kota Bima	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang	1 Banguna	8,470,337	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Kota Bima	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang	1 Banguna	50.000.000	
	Penataan Organisasi				**20,000,000**	**Penataan Organisasi**					
	eningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				**20,000,000**	eningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Bima				
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Menurunya Pelanggaran terhadap RPPLH	60	**388,897,864**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		ersentase Menurunya Pelanggaran te			
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Dokumen RPPLH Tata Ruang	1 Dokumen	**200,000,000**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**	Kota Bima	Jumlah KLHS Tata Ruang	1 Dokumen	150.291.000	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH	Kota Bima	Jumlah dokumen RPPLH	1 dokumen	200,000,000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH	Kota Bima	Jumlah KLHS RPJMD	1 dokumen	150.291.000	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis				**188,897,864**	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**					
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	Kota Bima	Jumlah Dokumen KLHS	1 Dokumen	**188,897,864**	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	Kota Bima		1 Dokumen	150.291.000	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	Kota Bima	Jumlah Dokumen KLHS	1 Dokumen	0	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	Kota Bima			250.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Air dan Udara	82%	**330,236,620**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**					

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah	Kota Bima	jumlah kordinasi ttitik pencenaran	10 titik	35,304,03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Kota Bima	jumlah kordinasi ttitik pencenaran	10 titik	40.414.380	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan	Kota Bima	Jumlah kelurahan Kampung iklim	3 Kelurahan	77,924,767	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,	Kota Bima	Jumlah kelurahan Kampung iklim	3 Kelurahan	84.085.750	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Kota Bima	Pengujian sample Yang Dilakukan terhadapa Media	19 titik	26,000,000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Kota Bima	Pengujian sample Yang Dilakukan terhadapa Media	19 titik	79.790.000	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan				**117,212,194**	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan**					
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada	Kota Bima	Jumlah Bentuk Media (sarana) Penyampaian Informasi	2 dokumen	38,145,181	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Bima	Jumlah Bentuk Media (sarana) Penyampaian Informasi	3 kali	37.219.500	
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Bima	sosialisasi		79,067,013	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Bima	sosialisasi	5 Kali	47.982.500	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				**73,795,626**	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kota Bima	Jumlah Pantai yang dibersihkan	3 kali	20,663,659	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kota Bima	Jumlah Pantai yang dibersihkan	3 kali	30.577.500	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bima	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan rehabilitasi		53,131,967	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bima	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan rehabilitasi		30.576.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Luas RTH Publik	11,34%	**3,811,817,176**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**		Persentase Luas RTH Publik			
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bima	Jumlah Dokemen rencana penetapan pengelolaan kehati	2 Dokumen	14,396,137	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman	Kota Bima	Jumlah Dokemen rencana penetapan pengelolaan kehati	2 Dokumen	40.000.000	
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kota Bima	Jumlah Taman KEHATI yang dikelola	24 taman	51,652,712	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar	Kota Bima	Jumlah Taman KEHATI yang dikelola	24 taman	108.000.000	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Bima	Luas RTH Publik Yang ditangani	24 makam	3,745,768,327	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Bima	Luas RTH Publik Yang ditangani	10 makam	4.482.840.660	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN		Persentase Meningkatnya Jumlah Ijin Lingkungan yang diawasi	60%	**49,068,169**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN**		Persentase Meningkatnya Jumlah Ijin Lingkungan yang diawasi		73.724.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	Kota Bima	Jumlah Izin Lingkungan yang diterbitkan	500 izin	49,068,169	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	Kota Bima	Jumlah Izin Lingkungan yang diterbitkan	500 izin	73.724.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN		Persentase Meningkatnya Jumlah Pokmas sadar Lingkungan	100	**110.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN**		ersentase Meningkatnya Jumlah Pokmas sadar Lingkungan			

	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Kota Bima	Jumlah Pokmas Peduli Lingkungan	3 kelompok	41,459,799	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Kota Bima	Jumlah Pokmas Peduli Lingkungan	3 kelompok	105.935.000	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan	Kota Bima	Jumlah Pokmas/lembaga	3 kelompok	0	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan	Kota Bima	Jumlah Pokmas/lembaga	3 kelompok	29.902.200	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK		Persentase meningkatnya penghargaan bidang lingkungan	100	**36,610,793**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK**				53.242.000	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan	Kota Bima	Jumlah Pokmas/Lembaga yang dinilai	3 lembaga	36,610,793	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan	Kota Bima	Jumlah Pokmas/Lembaga yang dinilai	3 lembaga	53.242.000	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN				**14,467,285**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN**	Kota Bima			35.117.000	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	Kota Bima	jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	10 kasus	14,467,285	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	Kota Bima	jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	10 kasus	35.117.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase sampah yang tertangani		**5.000.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**					
	Pengelolaan Sampah	Kota Bima	Persentase pengurangan			**Pengelolaan Sampah**	Kota Bima				

	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di	Kota Bima	volume sampah yang terangkut ke TPA	228 ton	4.811.388.000	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di	Kota Bima	volume sampah yang terangkut ke TPA	228 ton	6.455.398.650	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan	Kota Bima	Jumlah pokmas pengelola sampah	3 kelompok	56,333,741	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan	Kota Bima	Jumlah pokmas pengelola sampah	6 kelompok	50.500.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota Bima	Jumlah Koordinasi	10 kali	137,791,733	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota Bima	Jumlah Koordinasi	10 kali	54.004.500	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada musrenbang 2024 yang dilakukan, baik pada tingkat kelurahan maupun pada tingkat kecamatan ada beberapa usulan masyarakat yang dilakukan verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, yaitu usulan Paganisasi Kuburan TPU Tolobali sepanjang 400 meter, usulan pengadaan container dan usulan Pengadaan mesin daur ulang sampah. Dari tiga usulan tersebut hanya satu usulan yang diterima, yaitu usulan pagarnisasi TPU Tolobali, sementara usulan container dimasukan pada kegiatan pendanaan pada Kelurahan dan usulan untuk pengadaan mesin daur ulang diteruskan pada musrenbang tingkat kelurahan, sementara ada dua belas usulan lewat pokir dewan, yaitu 12 untuk paganisasi kuburan, 1 untuk pemeliharan taman.

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Bima
Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Lanjutan Pemagaran Kuburan Belanda	Melayu	Panjang Pagar kuburan	200 meter	
2	Lanjutan Pemagaran Kuburan Monggonao	Monggonao	Panjang Pagar kuburan	400 meter	
3	Lanjutan Pemagaran Kuburan Tionghoa Dara	Dara	Panjang Pagar kuburan	200 meter	
4	Pagarisasi TPU Lingkungan Tambana	Tambana	Panjang Pagar kuburan	200 meter	
5	Penataan Kuburan Jembatan Cinta II	Kel. Dara	Panjang Pagar kuburan	200 meter	
7	Pemagaran Kuburan Kel. Lewirato	Lewirato	Panjang Pagar kuburan	300 meter	
9	Pemagaran Kuburan Lingkungan Tolobali	Tolobali	Panjang Pagar kuburan	400 Meter	
10	Penataan Taman Manggemaci	Manggemaci	I pkaet taman	1Taman	
11	Pemagaran Kuburan Umum Panggi	Panggi	Panjang Pagar kuburan	400 Meter	
12	Pemagaran TPU Lama Gindi	Gindi	Panjang Pagar kuburan	400 Meter	
13	Pembuatan Gudang Kuburan (Manggemaci)	Manggemaci	Jumlah Bangunan	250 Meter	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Untuk mempelajari Faktor penghambat dan pendorong Perangkat Daerah yang akan mempengaruhi pencapaian Visi Misi Kepala Daerah adalah dengan mengetahui sebab-sebab yang melatari penghambat dan pendorong perangkat daerah perlu menelaah terhadapat kebijakan nasional dan provinsi. Dalam menelaah tersebut perlu mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendorong, maka perangkat daerah bisa mengambil kebijakan untuk mengatasi faktor penghambat perangkat daerah tersebut. Untuk lebih jelas faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Menjaga kualitas Lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air,udara dan tutupan hutan	- Masih rendahnya Kualitas dan kuantitas SDM dalam pengujian kualitas lingkungan hidup - Belum tersedianya laboratorium lingkungan hidup - Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang berkualitas ramah masih rendah -Masih kurangnya sosialisasi PERDA Lingkungan Hidup	- Tidak ada tenaga teknis/ahli dalam pengujian kualitas lingkungan - Tidak adanya ASN yang berminat sebagai tenaga funsional penyidik lingkungan. - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadapa kebersihan lingkungan seperti pencemaran lingkungan dengan membuang sampah di sungai -Penerapan PERDA lingkungan belum dilaksanakan	- Besarnya political will dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas dari Pemerintah - Tingginya etos kerja Pegawai DLH dalam mewujudkan semangat kerja untuk lingkungan berkualitas dan ramah -Tersedianya lahan untuk pembangunan Laboratorium - Kebijakan relokasi masyarakat disempadan sungai.

2	Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport;	- Tidak adanya kewenangan Pemerintah Kab/Kota dalam penanganan Hutan - Lemahnya koordinasi antar pemerintah propinsi dengan Kab/Kota dan antar sektor dalam penganan Hutan	- Adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi ladang -Lemahnya penegakan hukum bagi pelaku Ilegal loging (Perusak Hutan) - Lahan mata air disekitar dikuasai oleh masyarakat dengan memiliki hak milik	- Dukungan pemerintah Kota untuk melestarikan hutan, khususnya dalam perlindungan mata air sangat besar - Adanya kelompok penyelamat mata air (kelompok masyarakat) untuk melindungi kawasan hutan di sekitar mata air - Adanya kesadaran masyarakat untuk mempertahankan Dan melindungi hutan, khususnya disekitar kawasan hutan.
3	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun	- Pencemaran dan kerusakan lingkungan - Rusaknya habitat yang ada - Adanya pembudidayaan pesies tertentu Polusi zat-zat kimia - Erosi tanah - Pencagaran yang tidak berjalan lancar - Perubahan fungsi ekosistem menjadi fungsi yang lain	- Adanya erosi tanah sehingga kedalaman air sunga/laut semakin berkurang. yang menyebabkan luas sungai/laut semakin berkurang - Adaptasi ekosistembaru pada habitat yang baru - Pertambahan jumlah penduduk - Kurangnya kesasdaranpemahaman, kepedulian masyarakat untuk menjaga keanekaragaman hayati - Penegakan hukum yang lemah	- Semakin berkembangnya agrowisata yang mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan - Mulai dibentuknya

4	Terwujudnya pengelolaan persampahan berbasis masyarakat menuju indonesia bebas sampah tahun 2024 melalui akses layanan 70% dan pengurangan 30%	- Kurangnya sarana dan prasarana - Kurangya SDM -Belum Optimal dalam mengelola bank sampah - Kurangnya sosialisasi pentingnya Bank sampah dan PERDA persampahan untuk mengurangi limbah dan sampah	- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dalam meminimalkan sampah -Penerapan PERDA sanksi kepada pelaku pembuang sampah sembarangan belum terjadi - Terbatasnya tempat untuk dijadikan TPS	- Adanya regulasi tentang pemberdayaan masyarakat terhadap pengangkutan sampah - Kebijakan optimalisasi bank sampah disetiap kelurahan ada bank sampah - Munculnya Komunitas Peduli sampah

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi besertaFaktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran jangka Menengah Renstra OPD Propinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Tertanganinya lahan kritis di dalam dan di luar			
2	Terpeliharanya sumberdaya air baik secara vegetatif maupun sipil teknis; eksport;	- Perubahan fungsi ekosistem menjadi fungsi yang lain	- Kurangnya kesasdaranpemaha ma n, kepedulian masyarakat untuk menjaga keanekaragaman hayati - Penegakan hukum yang lemah	- Dengan mendaur ulang limbah - Adanya pencagaran dengan mengembangan kan kelompok permata di sejumlah mata air.
3	Tersedianya data potensi dan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;			

4	Berkurangnya dampak negatif pembuangan sampah oleh masyarakat melalui upaya pengolahan sampah secara mandiri;	- Kurangnya sarana dan prasarana - Kurangya SDM -Belum Optimal dalam mengelola bank sampah - Kurangnya sosialisasi pentingnya Bank sampah dan PERDA persampahan untuk mengurangi limbah dan sampah	- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dalam meminimalkan sampah -Penerapan PERDA sanksi kepada pelaku pembuang sampah sembarangan belum terjadi -Terbatasnya tempat untuk dijadikan TPS	- Adanya regulasi tentang pemberdayaan masyarakat terhadap pengangkutan sampah - Kebijakan optimalisasi bank sampah disetiap kelurahan ada bank sampah - Munculnya Komunitas Peduli sampah

5	Terpantaunya kualitas udara dan air secara kontinu sebagai indikator lingkungan hidup	- Pencemaran dan kerusakan lingkungan - Rusaknya habitat yang ada - Adanya pembudidaya spesies tertentu - Polusi zat-zat kimia - Erosi tanah - Pencagaran yang tidak berjalan lancar - Perubahan fungsi ekosistem menjadi fungsi yang ain	- Adanya erosi tanah sehingga kedalaman air sunga/laut semakin berkurang. Yang menyebabkan luas sungai/laut semakin berkurang. - Adaptasi ekosistem baru pada habitat yang baru - Pertambahan jumlah penduduk - Kurangnya kesasdaranpemaha ma n, kepedulian masyarakat untuk menjaga keanekaragaman hayati - Penegakan hukum yang lemah	- semakin berkembangnya agrowisata yang mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan - Mulai dibentuknya eco-green dan eco industri dimana limbah yang ada bisa dikurangi dengan mendaur ulang limbah - Adanya pencagaran dengan mengembangan kan kelompok permata di sejumlah mata air.

6	Terpantaunya aktifitas perusahaan yang berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi NTB dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi NTB	- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengujian kualitas lingkungan hidup - Belumtersediany a laboratorium lingkungan hidup Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan	- Tidak ada tenaga teknis/ahli dalam pengujian kualitas lingkungan - Tidak adanya ASN yang berminat sebagai tenaga funsional penyidik lingkungan - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadapa kebersihan lingkungan seperti pencemaran	- Besarnya political will dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas dari Pemerintah Tingginya etos kerja Pegawai DLH dalam mewujudkan semangat kerja untuk lingkungan berkualitas dan ramah
7	Terlaksananya diklat teknis bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan tenaga di lapangan	- Tidak adanya ASN yang berminat sebagai tenaga funsionalPenyid ik lingkungan	- Kurangnya Tim teknis/ahli untuk pengujian laboratorium untuk pemantauan perusakan lingkungan (air,Udar dan tanah	- Pengiriman ASN untuk mengikuti tugas belajar/Diklat
8	Tersedianya sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan di lapangan	- Kurangnya sarana dan prasarana operasional	- Kurangnya sarana danprasarana operasional	- Adanya penambahan armada untuk peningkatan operasional sesuai dengan kebutuhan di lapangan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rentra yang mengacu pada RPJMD. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rentstra dapat dipaparkan sebagai berikut ini:

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualias Udara
3. Persentase Luas RTH Publik
4. Persentase Kawasan direhabilitasi

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD diatas dijelaskan kembali dengan proyeksi target untuk 4 tahun kedepan sebagaimana dalam tabel 3.2 tentang Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dibawah ini.

Guna pencapaian sasaran tingkat daerah, maka ditetapkan 3 (3) Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam mendukung sasaran daerah, yaitu :

1) Meningkatkan kualitas layananan kebersihan dan pengelolaan persampahan lingkungan perkotaan;
2) Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup serta Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
3) Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH yang estetis, fungsional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan Kawasan perkotaan
5) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah ditandatagani yang diukur mulai dari Capaian Kinerja Tujuan, Capaian Kinerja Sasaran, Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja kegiatan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dinas lingkungan hidup didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra antara lain;

a. Prioritas dan Sasaran perangkat daerah

Perioritas dan sasaran Perangkat Daerah mengacu kepada program prioritas pembangunan daerah yang didasarkan pada renstra perangkat daerah pada tabel dibawah ini;

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator sasaran daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator sasaran PD (outcome)
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air dan Udara	Meningkatnya Layanan Persampahan	Persentase Cakupan kawasan bebas sampah
2	Program KEHATI			Terwujud nya RTH Publik sesuai ketentuan	Persentase Luas RTH Publik
3	Program Perncanaan Lingkungan Hidup				
4	Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup		Menngkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi	Terkendalinya kerusakan dan pencemaran lingkungan	Persentase Kualitas air, udara dan tanah
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup				
6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			Meningkatnya kualitas SDA dan LH	Persentase Kawasan Yang direhabilitas
7	Program Peningkatan Pengendalian Polusi				

b. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.Melalui perjanjian kinerja, diharapkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2024-2026. Indikator Tujuan dan Sasaran ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. Penjelasan tentang Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut;

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran PD

No	Tujuan dan Sasaran PD		Indikator tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran
	Tujuan:	Sasaran:		
1	Peningkatkan kualitas Peningkatan Kualitas Hidup	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	29,75
			Indeks Kualitas Udara	87,33
		Meningkatnya Kualita Tutupan Lahan	Persentase Luas RTH Publik	11,64
			Perssentase luas Kawasan direhabilitasi	2

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

4.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Kota Bima merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh berbagai instansi sektor dan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Seiring dengan Visi Pembangunan Pemerintah Kota Bima yang akan dicapai selama lima tahun mendatang yaitu: "**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Lingkungan Perkotaaan Yang Bersih, Nyaman dan Asri Sesuai Tata Ruang**".

Salah satu pemaknaan kota yang maju adalah kota yang memiliki masyarakat dengan derajat kesehatannya tinggi dan angka harapan hidup tinggi serta tergambarkan pada misi yang keempat yaitu memantapkan infrastruktur sarana dan prasarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

Dalam Misi tersebut, kebijakan diarahkan untuk melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan memperhatikan pelestrian fungsi lingkungan. Hal ini secara jelas mengisyaratkan adanya keinginan untuk tetap menyeimbangkan antara upaya eksplorasi sumber daya alam demi pembangungan dengan kepentingan menjaga lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi diupayakan untuk diperbaiki, melalui berbagai kebijakan seperti : rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan, dapata dicapai melalui 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Air
2. Meningkatkan Kualitas Udara
3. Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/Kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan
1	Meningkatkan Layanan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolan Persampahan dengan tiga pelaksanaan kegiatan: - Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan - Pemeliharaan kendaraan operasional pengangkutan sampah - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
2	Terwujudnya Ruang Terwujud Hijau Publik sesuai ketentuan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
3	Meningkatnya Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4	Terkendalinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing- masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggung jawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026, pada misi ke-4 Kota Bima yaitu, Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui

Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;

Dalam misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima selama kurun waktu tiga tahun kedepan adalah meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target capaian indikator sasaran ini ditetapkan dengan mengacu pada target IKLH Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN sampai dengan akhir periode tahun 2024 sebesar 68,17%. Kondisi kinerja pada awal periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebesar 56,8,25%. Target capaian mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 berturut-turut disesuaikan dengan target nasional yaitu sebesar 61,83%, 64,93% dan 68,17%. Sedangkan target untuk tahun 2024 sampai dengan akhir periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima ditetapkan sesuai dengan dengan nilai akhir target nasional yaitu sebesar 68,73,17%.

Guna pencapaian sasaran tingkat daerah, maka ditetapkan 5 (lima) Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam mendukung sasaran daerah, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas layananan kebersihan dan pengelolaan persampahan lingkungan perkotaan;
2. Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup serta Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
3. Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH yang estetis, fungsional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan Kawasan perkotaan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mendukung lima indikator kinerja utama maka dituangkan dalam tujuh prioritas pembangunan, sesuai dengan tabel di bawah ini;

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Bima

No	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Ket
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, DIDUKUNG TIGA KEGIATAN; **1.** Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA **2.** Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan **3.** enyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampaha	5,546,183,500	
2	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	900.0000.000	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	4.552.862.792	
4	Program Perlindungan Dan Konservasi SDA	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	629,000,000	
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN		

		LINGKUNGAN HIDUP - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	508.000.000	
6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198.895.181	

4.3.Rencana Progran dan Kegiatan Pada Tahun Anggaran 2024.

Pada tahun 2024 mumauat 9 program dan 46 kegiatan seperti termuat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
2	**11**				**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**				**21.521.292.603,00**				**21.747.995.867,00**
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**		**90 Persen**	11.030.269.667,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**90 Persen**	**11.242.445.667,00**
2	**11**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**12 Dokumen**	107.790.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**12 Dokumen**	111.100.000,00
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	15.500.000

2	11	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	11.200.000,00
2	11	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	12.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	13.000.000,00
2	11	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	12.000.000,00
2	11	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	12.190.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	13.000.000,00
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kota Bima	4 laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 laporan	10.200.000,00

						dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	2 laporan	36,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 laporan	36.200.000,00
2	**11**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan**		**6 Dokumen**	**9,558,383,092**			**6 Dokumen**	**10,773,067,170**
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	1 tahun	9,375,447,092	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 tahun		10,598,061,930
2	11	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	162,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen		156,504,380
2	11	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	1 laporan	8,892,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan		8,481,020
2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Bima	4 laporan	11,244,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 laporan		10,019,840

						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
2	**11**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**95 Persen**	**372.000.000,00**			**95 Persen**	**373.600.000,00**
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	1 Paket	32.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	32.200.000,00
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	1 Paket	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	11.000.000,00
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bima	1 Paket	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	30.200.000,00
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	70 Laporan	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Laporan	300.200.000,00
2	**11**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**95 Persen**	**354.000.000,00**			**95 Persen**	**356.400.000,00**
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	12 Laporan	18.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	19.000.000,00

2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bima	12 Laporan	46.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	46.200.000,00
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	1 Laporan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	20.200.000,00
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bima	1 Laporan	270.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	271.000.000,00
2	**11**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**95 Persen**	**374.000.000,00**			**95 Persen**	**377.400.000,00**
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bima	50 Unit	130.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	130.200.000,00
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bima	50 Unit	121.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	122.000.000,00

2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bima	50 Unit	21.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	22.000.000,00
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bima	3 Unit	52.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	52.200.000,00
2	11	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bima	2 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	51.000.000,00
2	**11**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase menurunnya Pelanggaran Terhadap RPPLH**		**56 Persen**	**324.091.000,00**			**456Persen**	**329.300.000,00**
2	**11**	**2**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Regulasi Bidang Lingkungan yang Disusun**		**1 Dokumen**	**143.500.000,00**			**1 Dokumen**	**144.500.000,00**
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Bima	1 dokumen	143.500.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 dokumen	144.500.000,00

2	**11**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah KLHS yang disusun**		**2 Dokumen**	**180,591,000**			**2 Dokumen**	**184,800,000**
2	11	2	2.02	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Bima	1 Dokumen	180,591,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	184,800,000
2	11	2	2.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Bima	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
2	**11**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Meningkatnya Kualitas Air dan Udara**		**4/80%**	**408.000.000**			**4/80%**	**411.900.000**
2	**11**	**3**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan dan keruskan lingkungan hidup Terwujudnya Pelaksanaan Pencegahan dan keruskan lingkungan hidup**		**32 Dokumen**	**200.000.000,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**32 Dokumen**	**201.700.000,00**
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Bima	10 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	25.200.000,00

2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Bima	3 Dokumen	95.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	96.000.000,00
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Kota Bima	19 Dokumen	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Dokumen	80.500.000,00
2	**11**	**3**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanggulangn dan keruskan lingkungan hidup Terwujudnya Pelaksanaan Pencegahan dan keruskan lingkungan hidup**		**55 Persen**	**86.000.000,00**			**60 Persen**	**87.200.000,00**
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan sosialisasi informasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang	Kota Bima	5 Laporan	38.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	38.200.000,00

						Dilaksanakan							
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan jumlah sumber pencemar yang dihentikan	Kota Bima	5 Titik	48.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Titik	49.000.000,00
2	**11**	**3**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemulihan Kerusakan Lingkungan hidup**		**70 Persen**	**122.000.000,00**			**70 Persen**	**123.000.000,00**
2	11	03	203	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengehentian sumber pencemaran kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang di laksanakan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan		2 Dokumen	31.000.000,00			2 Dokumen	31.500.000,00

2	11	3	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kota Bima	4 Dokumen	91.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	91.500.000,00
2	**11**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**		**11,64%**	**4.223.000.000,00**			**11,64%**	**4.224.700.000,00**
2	**11**	**4**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase luas RTH Publik Yang tertangani**		**11,34%**	**4.223.000.000,00**			**11,34%**	**4.224.700.000,00**
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Kota Bima	1 Dokumen	18.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	18.200.000,00
2	11	4	2.01	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kab/Kota	Kota Bima	2 Ha	180.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Ha	180.500.000,00
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	243 Ha	3.900.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		243 Ha	3.900.000.000,00
2	11	4	2.01	5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Kota Bima	4 Unit	125.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 Unit	126.000.000,00
2	**11**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Meningkatnnya Jumlah Izin yang diawasi**		**75%**	**150.000.000,00**			**75%**	**152.000.000,00**

					(PPLH)								
2	**11**	**6**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH sesuai Ketentuan Yang berlaku**		**260 ijin**	**150.000.000,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**260 ijin**	**152.000.000,00**
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kota Bima	260 Dokumen	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		260 Dokumen	76.000.000,00
2	11	06	201	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	30 Laporan	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Laporan	76.000.000,00
2	**11**	**8**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase meningkatnya Jumlah Pokmas sadar Lingkungan**	**100%**		**110.000.000,00**			**100%**	**111.000.000,00**
2	**11**	**8**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga**	**Jumlah Kelompok Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan**		**13 Kelompok**	**110.000.000,00**			**13 Kelompok**	

					Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Lingkungan Hidup**						**111.000.000,00**
2	11	8	2.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kota Bima	3 Lembaga	110.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Lembaga	111.000.000,00
2	11	08	201	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Bima	10 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	0
2	**11**	**9**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan hidup**	**Kota Bima**	**100%**	**53.265.000,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100%**	**54.000.000,00**
2	**11**	**9**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Junlah kategori penghargaan dalam kegiatan lingkungan hidup**		**3 Enititas**	**53.265.000,00**			**3 Enititas**	**54.000.000,00**
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya	Kota Bima	3 Enititas	53.265.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Enititas	54.000.000,00

					Hidup	dalam rangka PPLH							
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Menurunnya Pelanggaran Terhadap RPPLH**		**60%**	**36.000.000,00**			**60%**	**36.200.000,00**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengaduan masyarakat yang diselesaikan**		**12 Dokumen**	**36.000.000,00**			**12 Dokumen**	**36.200.000,00**
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Kota Bima	25 Dokumen	36.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Dokumen	36.200.000,00
2	11	10	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Kota Bima	30 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Laporan	0
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Sampah yang tertangani**		**70%**	**5.367.257.936,00**			**70%**	**5.371.250.200,00**
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**							**70%**	**5.371.250.200,00**

						Persentase Sampah yang tertangani		**70%**	**5.367.257.936,00**				
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bima	470 m3	5.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		470 m3	5.000.000.000,00
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kota Bima	6 Kelompok	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Kelompok	150.000.000,00
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Kota Bima	5 Dokumen	53.070.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	53.070.200,00

2	11	11	201	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Bima	50 unit	164.187.736,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 unit	168.180.000,00
								TOTAL	**21.521.292.603,00**			**21.747.995.867,00**

BAB V

PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup DLH Kota Bima tahun 2024 mendatang, dapat mencapai hasil yang optimal dan efisien.

Dalam mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yakni ***"Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup"*** Maka kematangan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang tertuang dalam Rencana Kerja tahunan adalah Pedoman kerja untuk tahun 2024.

Akhirnya kepada Tuhan jualah kita berserah diri seraya memohon bimbingan-Nya semoga apa yang direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan Negara, Amin.

Kota Bima, Juni 2023

Kepala Dinas,



Syarief Rustaman, S.Sos., M. Ap
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730409 199211 1 001

PEMERINTAH KOTA BIMA

RENJA 2024

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota Bima

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu tahapan proses penyusunan kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua komponen manajerial secara berjenjang dengan tujuan memanfaatkan sumber daya - sumber daya yang ada, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang ini mengatur lingkup dan tingkatan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD).

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Pemerintah Daerah (Renja SKPD) yang menyangkut program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka kelahiran/ Total Fertility Rate (TFR), presentase penurunan Unmet Need , penurunan *Age Spesific Fertility Rate* (ASFR), menurunkan angka prevalensi kesetaraan dalam ber KB pasangan usia subur (PUS) di Kota Bima dan memperkuat ketahanan, kesejahteraan dan karakter keluarga melalui persentase penurunan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Upaya tersebut hendak dilakukan secara berjenjang dalam bentuk beberapa kegiatan prioritas, antara lain :

1. Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal
2. Membentuk rumah data kependudukan di Kampung KB
3. Penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya local dalam pencitraan program KKBPK
4. Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini lapangan
5. Pengendalian penditribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan
6. Peningkatan kesertaan penggunanaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
7. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
8. Pembinaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di Fasilitas kesehatan
9. Dukungan operasional pelayanan KB bergerak
10. Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK R, UPPKA)
11. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan,

melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Kondisi dan permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan dan keluarga berencana di awal tahun 2023 ini antara lain :

1. Stagnansi TFR ini disebabkan angka pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate*/CPR) yang masih rendah dan jangkauan layanan KB yang belum menjangkau secara merata.
   - Pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB namun tidak terlayani (*unmet need*), juga tinggi, yaitu untuk nasional sebesar 8,5 persen (hanya mengalami penurunan sebesar 0,6 persen dari tahun 2007 ke 2022); bahkan di Kota Bima masih 8,82 %.
   - Faktor lain yang mempengaruhi angka kelahiran adalah usia kawin pertama (UKP) bagi wanita, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi kelahiran di usia remaja. Hasil SDKI 2016, UKP adalah 20,1 tahun.
   - Pelayanan KB dan pelaksanaan advokasi-KIE (advokasi dan komunikasi, infomasi dan edukasi) program KB belum optimal
   - Jangkauan sasaran target calon akseptor kurang terfokus pada pasangan usia muda dan paritas rendah atau pasangan yang memiliki jumlah 2 anak ke bawah; dan lemahnya pembinaan untuk upaya pelestarian akseptor KB;

Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima

Terwujudnya generasi berkualitas melalui keluarga kecil bahagia sejahtera.

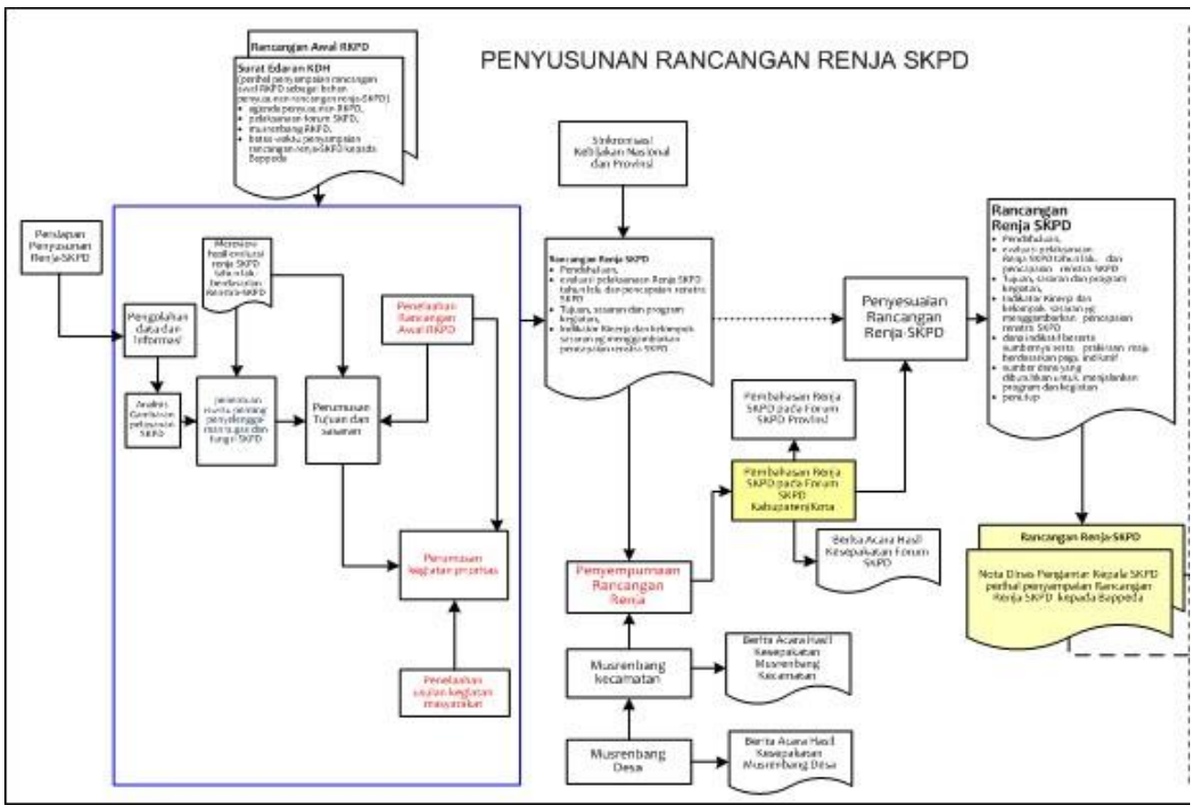
Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima

1. Meningkatkan Ketahanan Keluarga.
2. Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi.
3. Meningkatkan Kualitas Data Dan Informasi Keluarga Berencana Berbasis Data Mikro.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima merupakan suatu proses penyusunan rencana secara *bottom up* melalui tahapan dan siklus. Tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPP dan KB Kota Bima 2023 adalah :

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;

11. Pembahasan forum SKPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM



Visi DPP dan KB tersebut di atas akan dicapai melalui penerapan Strategi dan Kebijakan sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana strategis tahun 2019- 2023

Cara	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera	**1.** Menurunkan disparitas TFR, *Unmet need*, peningkatan mCPR , penurunan ASFR **2.** Meningkatkan kesertaan ber KB pasangan usia subur (PUS) Pra- S dan KS I	Menurunnya angka kelahiran TFR Meningkatkan prevalensi kesertaan ber-KB terhadap PUS

1. 2 . Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
12. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro Kependudukan dan Keluarga
13. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja DPP dan KB 2024

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja:

a. sebagai dasar/acuan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun yang akan datang agar setiap kegiatan yang dilakukan itu terarah dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.
b. Himpunan usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Bima di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
c. Sebagai informasi tentang kebutuhan Dinas PP dan KB dalam melaksanakan

Tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2024;

d. Sebagai upaya perbaikan akuntabilitas kinerja perencanaan pada Dinas PP dan KB Kota Bima.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja

Untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Kota Bima Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana kerja (Renja) Dinas PP dan KB Kota Bima 2023 adalah sebagai berikut :

BabI. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen PD dan Renstra PD serta ditindaklanjuti dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja DPPKB Kota Bima Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2022, pelaksanaan kinerja DPPKB Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 7.911.127.029,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.713.248.573,00 atau sebesar 97,50%. Anggaran ini terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dari target belanja operasi sebesar Rp 6.646.527.029,00 DPPKB Kota Bima merealisasikan sebesar Rp 6.468.054.573,00 atau sebesar 97,31%. Adapun belanja modal, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.264.600.000,00 direalisasikan sebesar Rp 1.245.194.000,00 atau sebesar 98.47%.

Alokasi anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun 2022 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Belanja DPPKB Kota Bima Tahun Anggaran 2022

No.		Tahun 2023 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Operasi	6.646.527.029,00	6.468.054.573,00	97,31
2	Belanja Modal	1.264.600.000,00	1.245.194.000,00	98,47
Jumlah Belanja		**7.911.127.029,00**	**7.713.248.573,00**	**97,50**

Sumber: Laporan Keuangan DPPKB Tahun 2022

Belanja Pegawai digunakan untuk membiayai belanja berikut:

Belanja Gaji dan Tunjangan, yang digunakan untuk membiayai gaji dan tujangan PNS DPPKB Kota Bima selama 12 bulan.

a. Belanja ini Gaji dan Tunjangan ini dianggarkan sebesar Rp 2.120.449.079,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.075.726.529,00 atau 97.89%.
b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk PNS DPPKB Kota Bima selama 12 bulan pada tahun 2022. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp 881.655.152,00 dan terealisasi sebesar Rp 865.761.280,00 atau 98.20%.
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN untuk ASN DPPKB Kota Bima selama 12 bulan pada tahun 2022. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp 147.590.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 147.590.000,00 atau 100,00%.

Sedangkan, Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai belanja seperti berikut:

a. Belanja Bahan Pakai Habis. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp 817.888.164,00 dan terealisasi sebesar Rp 813.559.600,00 atau 99.47 %.
b. Belanja Jasa Kantor. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp 1.387.014.634,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.374.687.689,00 atau 99,11 %.
c. Belanja Perjalanan Dinas. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp 1.007.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 905.819.997,00atau 89,89 %.
d. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp 274.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 273.949.478,00 atau 99,73 %.
e. BBelanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp 9.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.500.000,00 atau 100 %.

Belanja Modal Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.264.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.245.194.000,00 atau 98,47%.

Anggaran dan realisasi pelaksanaan program/kegiatan selama tahun anggaran 2022 digambarkan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2022

NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Capaian (%)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.026.111.129**	**3.957.824.741**	**68.286.388**	**98,30**
A.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**23.020.000**	**22.860.000**	**160.000**	**99,30**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	0,00	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	1.950.000	50.000	97,50
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	0,00	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	2.940.000	60.000	98,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	0,00	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2.000.000	1.950.000	50.000	97,50

NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Capaian (%)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.020.000	9.020.000	0,00	100
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.178.520.031**	**3.117.873.509**	**60.646.522**	**98,09**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.002.104.231	2.941.487.809	60.616.422	97,98
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	162.679.700	162.679.700	0,00	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.370.000	6.370.000	0,00	100
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.366.100	4.336.000	30.100	99,31
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000	3.000.000	0,00	100
C	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.240.000**	**6.240.000**	**0,00**	**100**
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.332.000	4.332.000	0,00	100
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.908.000	1.908.000	0,00	100
D	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**7.871.400**	**7.871.400**	**0,00**	**100**
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.871.400	7.871.400	0,00	100
E	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**264.049.744**	**261.539.697**	**2.501.047**	**99,05**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.299.200	7.299.200	0,00	100
2	Penyediaan Peralatan dan	23.815.500	23.814.500	1.000	99,99

NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Capaian (%)
	Perlengkapan Kantor				
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.135.044	25.126.000	9.044	99,96
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.800.000	205.299.997	2.500.003	98,80
F	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**271.729.954**	**267.490.657**	**4.239.297**	**98,44**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.378.954	50.217.657	1.161.297	97,74
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.351.000	217.273.000	3.078.000	98,60
G	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**274.680.000**	**273.949.478**	**730.522**	**99,73**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.280.000	140.249.478	30.522	99,98
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.600.000	24.600.000	0,00	100
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.800.000	109.100.000	700.000	99,36
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**60.802.500**	**58.221.590**	**2.580.910**	**95,76**
A	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**60.802.500**	**58.221.590**	**2.580.910**	**95,76**
1	Penyediaan dan pengolahan data kependudukan	49.341.000	46.760.290	2.580.710	94,77
2	Penyusunan profil kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	11.461.500	11.461.300	200	99,99
3	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00

NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Capaian (%)
3	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**2.318.477.500**	**2.302.002.742**	**16.474.758**	**99,29**
A	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**480.015.000**	**477.946.052**	**2.068.948**	**99,57**
1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	4.320.000	55.000	98,74
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	24.999.900	100	99,99
3	Pengendalian program KKBPK	450.640.000	448.626.152	2.013.848	99,55
B	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**196.800.000**	**196.800.000**	**0,00**	**100**
1	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	196.800.000	196.800.000	0,00	100
C	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.365.662.500**	**1.351.276.690**	**14.385.810**	**98,95**
1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5.850.000	5.755.000	95.000	98,38
2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	346.482.700	336.905.400	9.577.300	97,24
3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.006.150.000	1.001.436.490	4.713.510	99,53

NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Capaian (%)
4	Dukungan OperasionalPelayanan KB bergerak	7.179.800	7.179.800	0,00	100
D	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**276.000.000**	**275.980.000**	**20.000**	**98.95**
1	Pembinaan Terpadu Kampung KB	276.800.000	275.980.000	20.000	98.95
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**1.505.735.900**	**1.395.199.500**	**110.536.400**	**92,65%**
A	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**1.505.735.900**	**1.395.199.500**	**110.536.400**	**92,65%**
1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	618.000.000	602.064.000	15.936.000	97,42
2	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	862.735.900	768.135.500	94.600.400	89,03
3	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran kelaurga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	25.000.000	25.000.000	0,00	100
	JUMLAH	**7.911.127.029**	**7.713.248.573**	**197.878.456**	**97,50**

Evaluasi RENJA-SKPD Tahun 2022 dan pencapaian RENSTRA DPPKB sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Hasil Kegiatan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase urusan pemerintahan daerah yang dihasilkan**		**100%**	5,524,543,504				
2.14.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan dan kinerja yang disusun sesuai ketentuan**	**Kota Bima**	**100%**	**28.244.000**	**DAU –Dana Tranfer umum**			
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja SKPD		2 dokumen	3.084.000	DAU –Dana Tranfer umum			
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD		1 dokumen	3.826.000	DAU –Dana Tranfer umum			
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD		1 dokumen	3.194.000	DAU –Dana Tranfer umum			
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD		1 dokumen	3.114.000	DAU –Dana Tranfer umum			
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD		1 dokumen	2.876.000	DAU –Dana Tranfer umum			
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen LAKIP, PK, LPPD dan Evaluasi Renja)		4 dokumen	3.210.000	DAU –Dana Tranfer umum			

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Hasil Kegiatan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pejabat fungsional dinilai angka kredit		19 Dokumen	8.940.000	DAU –Dana Tranfer umum			
2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi keuangan**	**Kota Bima**	**100%**	**3.116.260.884**				
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan		29 Orang	2.950.741.884	DAU –Dana Tranfer umum			
2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen SPP-SPM LS/GU/NIHIL)		12 bulan	150.762.000	DAU –Dana Tranfer umum			
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 dokumen	6.320.000	DAU –Dana Tranfer umum			
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan (SPJ Fungsional)		12 dokumen	5.227.000	DAU –Dana Tranfer umum			
2.14.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 dokumen	3.210.000	DAU –Dana Tranfer umum			
2.14.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah**	**Kota Bima**	**100%**	**8.550.000**	**DAU –Dana Tranfer umum**			
2.14.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsialiasi BMD pada SKPD		4 kali	4.194.000	DAU –Dana Tranfer umum			
2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Inventarisir BMD pada SKPD		1 dokumen	4.356.000	APBD II			
2.14.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**Kota Bima**	**100%**	**16.302.400**	**APBD II**			
2.14.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		2 kali	7.662.400	APBD II			

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Hasil Kegiatan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
2.14.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksanannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4 kali	8.640.000	APBD II			
2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum**	**Kota Bima**	**100%**	**368.611.100**	**APBD II +DAK FISIK**			
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Komponen Listrik Kantor		12 bulan	7.084.200	APBD II			
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		78 unit	25.204.000	DAK FISIK			
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya kebutuhan Bahan Logistik Kantor		12 bulan	24.900.000	APBD II			
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		12.000 lbr	37.922.900	APBD II			
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjadin Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		16 orang/kali	273.500.000	APBD II			
		Terlaksananya Perjadin Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		50 orang/kali					
2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**	**100%**	**629.207.120**	**APBD II+BOKB**			
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik		12 bulan	111.726.120	APBD II + BOKB			
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Tenaga Kontrak Jasa Pelayanan Umum Kantor dan pelayanan umu kantor		19 orang	517.481.000	APBD II			
2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**	**100%**	**1.357.368.000**	**APBD II+DAK FISIK**			
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Tersedianya Jasa Pemiliharaan, Biaya Pajak dan Perijinan Kendaraan		5 unit	163.020.000	APBD II			

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Hasil Kegiatan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Dinas							
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemiliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20 unit	28.860.000	APBD II			
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		3 Paket	1.165.488.000	DAK FISIK			
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Menurunnya Total Fertilitiy Rate (TFR)**		**2,25%**	368,134,000.00	**APBD II+BOKB**			
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**100%**	**368.134.000**	**APBD II+BOKB**			
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Terbentuknya Rumah Data kependudukan dikampung KB		5 Kecamatan	26.734.000	APBD II			
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Tersedianya Tenaga Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		41 Kelurahan	41.400.000	APBD II			
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tersedianya Dokumen hasil pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		1 dokumen	300.000.000	APBD II			
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Presentase peningkatan peserta KB aktif MKPJ**		**53%**	**3.178.637.000**	**APBD II +DAK FISIK + BOKB**			
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Bima	100%	439.270.000	APBD II + BOKB			

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Hasil Kegiatan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
	Kearifan Budaya Lokal								
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Kota Bima		120.000.000	APBD II			
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Kader di Wilayah Kerjanya	Kota Bima	10 Kali/ Kelurahan	27.067.000	BOKB			
		PUS yang Mendapatkan Penyuluhan dan Kader yang Mendapatakan Pendampingan di Lapangan	Kota Bima	3.210 PUS					
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE program KKBPK melalui media cetak dan elektronik serta media luar ruang	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Kader di Wilayah Kerjanya	Kota Bima	10 Kali/ Kelurahan	27.067.000	BOKB			
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi (Rakorcam, Rakordes dan Minilok)	Terlaksananya rapat koordinasi (Rakorcam, Rakordes dan Minilok)	Kota Bima	5 Kali/ Kelurahan	65.000.000	BOKB			
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhann KKBPK	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhann KKBPK	Kota Bima		127.2.03.000	BOKB			
2.14.03.2.01.08	Pengelolaan program KKBPK	Terbentuknya Tim Manajemen Pengelolaan Kegiatan BOKB di OPD DPPKB	Kota Bima	1 tim	80.000.000				
		Tersedianya Sarana Pra Sarana Administrasi Kegiatan BOKB	Kota Bima	12 bulan					
		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sosialisasi	Kota Bima	12 kali					
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Kegiatan BOKB	Kota Bima	12 kali					

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Hasil Kegiatan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Kota Bima**	**100%**	**194.750.000**	**BOKB**			
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan Kader		1 Kali	2.000.000	BOKB			
		Terlaksananya Kegiatan Orientasi Tenaga Lini Lapangan							
		Terlaksananya Kegiatan Mekanisme Operasional Lini Lapangan							
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan KB		6 Kali/ Kecamatan	110.750.000	BOKB			
2.14.03.2.02.04	Penggerakan IMP	Terlaksananya Kegiatan IMP	Kota Bima	2 Kali/ kecamatan	82.000.000				
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**100%**	**1.727.617.000**	**APBD II +DAK FISIK + BOKB**			
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	Terlaksannya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB		63 Faskes	12.600.000	BOKB			

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Hasil Kegiatan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya kegiatan pembinaan akseptor non MKJP tk Kelurahan		5kali/kecamatan	514.517.000	APBD II			
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang obgyn bad		10 Unit	1.190.000.000	DAK FISIK			
		Tersedianya Sarana Penunjang IUD Kit		20 unit					
		Tersedianya Sarana Penunjang Implan Removal Kit		20 unit					
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Kota Bima**	**100%**	**81777.000.000**	**BOKB**			
2.14.03.2.04.02	Integrrasi pembangunan lintas sector di kampong KB	Terlaksananya Pertemuan Pembinaan Kelompok Kerja di Kampung KB		1 Kali/ Kecamatan	7.920.000	BOKB			
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampong KB	Terlaksananya Pertemuan Pembinaan Kelompok Kerja di Kampung KB		15 Kali/ Kecamatan	560.000.000	BOKB			
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksananya Pertemuan Pembinaan Kelompok Kerja di Kampung KB		4 Kali/ Kecamatan	249.080.000	BOKB			
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Presentase penurunan ASFR (Age Spesific Fertility Rate)**		**38/1000**	**1.166.797.000**	**APBD II + BOKB**			

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Hasil Kegiatan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kota Bima**		**182.375.450**	**APBD II + BOKB**			
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok UPPKS yang mendapatkan bantuan sarana Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		30 Kelompok	360.000.000	APBD II			
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang mendapatkan Biaya/ Alat dan Bahan Operasional		50 Kelompok	756.000.000	APBD II			
2.14.04.2.01.14	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran kelaurga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok		4 Kali/ Kecamatan	50.797.000	BOKB			

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja PD dan Renstra PD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem SIPD membantu kerja bidang-bidang di DPPKB dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan PD yang dilaksanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2023 DPPKB Kota Bima telah melaksanakan 4 Program dan 13 Kegiatan , dengan realisasi Anggaran dan capaian indikator sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencapai 99,30%
2. Realisasi Anggaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di angka 99,68%
3. Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah mencapai 100%
4. Realisasi Anggaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mencapai 100%
5. Realisasi Anggaran Administrasi Umum Perangkat Daerah mencapai 99,05%
6. Realisasi Anggaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 98,44%
7. Realisasi Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 99,73%
8. Realisasi Anggaran Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 95,76%
9. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal mencapai 99,57%
10. Realisasi Anggaran Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) mencapai 100%
11. Realisasi Anggaran Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota mencapai 98,95%
12. Realisasi Anggaran Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB mencapai 98,95%
13. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mencapai 92,65%

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2019- 2023, permasalahan dan isu strategis untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Perkembangan program keluarga berencana di Kota Bima cukup baik. Salah satu keberhasilan program KB ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB (peserta aktif/pasangan usia subur). Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai

pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Permasalahan utama yang dirasakan oleh DPPKB adalah :

1) Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata;
2) Tingkat partisipasi KB masih rendah, baru sekitar 79,94 persen;
3) Petugas Keluarga Berencana (PKB/PLKB) masih kurang;
4) Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) belum optimal;
5) Kepesertaan pasangan usia subur tidak ber KB cukup tinggi;
6) Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal.
7) Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (BKB, BKL, BKR dan PLK) belum optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja (RENJA) bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif,efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah

Diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja (RENJA) DPPKB Kota Bima Tahun 2024, program dan kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai dengan Rancangan awal RKPD Kota Bima Tahun 2024, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan masing-masing OPD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024

RANCANGAN AWAL RKPD PERMENDAGRI 90						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No	**PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**9.759.735.172**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**9.316.500.668**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan**	**Angka Harapan Hidup**	**2,25**	**9.759.735.172**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan**	**Angka Harapan Hidup**	**2,25**	**9.316.500.668**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**BB**	**5.601.010.172**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**BB**	**5.157.775.668**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kota Bima, semua Kecamatan,*	*Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun*	*21 Dokumen*	*33.290.000*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kota Bima, semua Kecamatan,*	*Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun*	*21 Dokumen*	*29.007.200*

		semua Keluraha n					*semua Keluraha n*			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokume n	7.350.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokume n	6.960.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokume n	5.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokume n	4.168.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokume n	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokume n	3.294.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokume n	3.800.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokume n	3.226.000

		n					n			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokume n	3.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokume n	3.138.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.668.600
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.390.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.552.600
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n*	*Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan*	*67 Laporan*	*3.513.837.772*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n*	*Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan*	*67 Laporan*	*3.463.076.772*

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	3.257.837.772	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	3.257.837.772
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	235.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	189.164.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.046.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	8.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.386.300
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Kota Bima, semua	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	2 Laporan	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Kota Bima, semua	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	2 Laporan	4.642.700

	Realisasi Anggaran	Kecamatan, semua Keluraha n	Anggaran			Realisasi Anggaran	Kecamatan, semua Keluraha n	Anggaran		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n*	*Presentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik*	*100%*	*18.000.000*	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n*	*Presentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik*	*100%*	*8.550.000*
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.194.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.356.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua*	*Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*37 Orang*	*16.302.400*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua*	*Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*37 Orang*	*16.302.400*

		Kelurahan					*Kelurahan*			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	7.662.400	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	7.662.400
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	8.640.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	8.640.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*Presentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum*	*100%*	*794.200.000*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*Presentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum*	*100%*	*648.168.700*
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.300.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	7.084.200

		n					n			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	540.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	402.817.600
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.900.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.900.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	42.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	41.766.900
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	185.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	171.600.000

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*100%*	*837.600.000*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*100%*	*690.040.596*
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	237.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	131.289.660
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	558.750.936
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*Persentase Pelaksanaan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*100%*	*387.780.000*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*Persentase Pelaksanaan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*100%*	*302.630.000*
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Kota Bima, semua	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	43 Unit	123.920.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Kota Bima, semua	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	43 Unit	123.920.000

	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan, semua Keluraha n	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan, semua Keluraha n	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	28.860.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	28.860.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	235.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	149.850.000
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n**	**PERSENTASE PENURUNAN ANGKA TFR**	**0,02**	**71.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n**	**PERSENTASE PENURUNAN ANGKA TFR**	**0,02**	**71.000.000**
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua*	*Persentase Keterpaduan Kebijakan Provinsi dengan Kebijakan Pemerintah Kota Bima*	*100%*	*71.000.000*	*Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua*	*Persentase Keterpaduan Kebijakan Provinsi dengan Kebijakan Pemerintah Kota Bima*	*100%*	*71.000.000*

		Kelurahan					*Kelurahan*			
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	41.000.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	41.000.000
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	30.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	30.000.000
3	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan**	**PERSENTASE PENURUNAN (UNMET NEED)**	**8,50**	**Rp3.283.725.000**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan**	**PERSENTASE PENURUNAN (UNMET NEED)**	**8,50**	**Rp3.283.725.000**
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha*	*Persentase PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsi*	*100%*	*Rp703.000.000*	*Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha*	*Persentase PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsi*	*100%*	*Rp703.000.000*

	Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*n*				*Sesuai Kearifan Budaya Lokal*	*n*			
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organis asi	Rp250.000.00 0	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organis asi	Rp250.000.00 0
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokume n	Rp150.000.00 0	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokume n	Rp150.000.00 0
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	Rp75.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Keluraha n	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	Rp75.000.000
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga	Kota Bima, semua Kecamat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga	12 Laporan	Rp148.000.00 0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga	Kota Bima, semua Kecamat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga	12 Laporan	Rp148.000.00 0

	Kencana	an, semua Keluraha n	Kencana			Kencana	an, semua Keluraha n	Kencana		
	Pengendalian Program KKBPK	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	Rp80.000.000	Pengendalian Program KKBPK	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	Rp80.000.000
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n*	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB*	*100%*	*248.000.000*	*Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*	*Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n*	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB*	*100%*	*248.000.000*
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organis asi	123.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organis asi	123.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2 Laporan	125.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2 Laporan	125.000.000

	Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB	n				Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB	n			
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*Preentase Faskes Penerima Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kota Bima*	*100%*	*2.050.241.000*	*Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*Preentase Faskes Penerima Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kota Bima*	*100%*	*2.050.241.000*
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	12.600.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	12.600.000
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	125 Orang	477.649.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	125 Orang	477.649.000
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Bima, semua Kecamat	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	80 Unit	1.544.692.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Bima, semua Kecamat	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	80 Unit	1.544.692.000

		an, semua Keluraha n					an, semua Keluraha n			
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	15.300.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	15.300.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n*	*Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*	*100%*	*282.484.000*	*Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*	*Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n*	*Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*	*100%*	*282.484.000*
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokume n	3.750.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokume n	3.750.000
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kota Bima, semua Kecamat an,	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	16 Kampun g KB	252.000.000	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kota Bima, semua Kecamat an,	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	16 Kampun g KB	252.000.000

		semua Keluraha n	Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				semua Keluraha n	Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	12 Laporan	26.734.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	12 Laporan	26.734.000
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n**	**Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan upaya pemberdayaan ekonomi**	**100%**	**804.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n**	**Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan upaya pemberdayaan ekonomi**	**100%**	**804.000.000**
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n*	*Persentase penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahunnya*	*100%*	*804.000.000*	*Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	*Kota Bima, semua Kecamat an, semua Keluraha n*	*Persentase penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahunnya*	*100%*	*804.000.000*
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan	Kota Bima, semua Kecamat an, semua	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	360 Kader	756.000.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan	Kota Bima, semua Kecamat an, semua	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	360 Kader	756.000.000

	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelurahan	Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelurahan	Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4 Laporan	48.000.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4 Laporan	48.000.000

2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (RENJA) DPPKB Kota Bima Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahun pertama penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) DPPKB Kota Bima Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2024.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, DPPKB Kota Bima dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, DPPKB dituntut untuk siap dan sanggup membuat dan menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan RENJA DPPKB Kota Bima Tahun 2024 didasarkan kepada RENSTRA DPPKB Kota Bima Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Prioritas nasional di tahun 2024, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2022-2025 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi BKKBN dan disesuaikan dengan Visi Misi DPPKB Kota Bima.

VISI MISI BKKBN

Visi : “Mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”

Misi :

“Mewujudkan pengendalian pertumbuhan penduduk menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.”

VISI dan MISI Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima

Visi

Terwujudnya generasi berkualitas melalui keluarga kecil bahagia sejahtera.

MISI.

1. Meningkatkan Ketahanan Keluarga.
2. Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi.
3. Meningkatkan Kualitas Data Dan Informasi Keluarga Berencana Berbasis Data Mikro

Sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk

tiga tahun ke depan adalah Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan penduduk dalam upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP). Selain itu dalam penyempurnaan Renstra ini DPPKB juga memperhatikan berbagai prioritas pembangunan yang telah dirumuskan didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya.

- **Tujuan DPPKB Kota Bima.**
  1. Terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi dan layanan KB khususnya bagi keluarga miskin;
  2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan koordinasi dengan semua stekholder;
  3. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi dan kualitas perencanaan dan pelaporan;
  4. Terbinanya kelompok kegiatan yang ada seperti BKB, BKR dan BKL
  5. Terbinanya akseptor KB aktif dan tercapainya target capaian akseptor KB baru;
  6. Tersedianya data mikro keluarga untuk kebutuhan perencanaan

  Adapun indikator kinerja tujuan-nya adalah laju pertumbuhan penduduk.

- **Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran DPPKB Kota Bima**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Maka sasaran DPPKB adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka Kelahiran;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas.

Indikator Kinerja Sasaran :

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis DPPKB Tahun 2018 maka DPPKB menetapkan Indikator kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut: Sasaran 1:

1. Tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahuran Total);
2. Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 th);

Sasaran 2:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas
2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun 2024 mencakup 10 program terdiri dari 48 kegiatan yaitu 14 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan Yaitu:

I	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
III	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IV	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
14	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
VI	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
VII	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VIII	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
IX	*Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*
26	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
27	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
X	*Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal*

28	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
29	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
30	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)
31	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
32	Pengendalian Program KKBPK
XI	*Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP
33	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB
XII	*Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*
34	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
35	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
36	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
37	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
XIII	*Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*
38	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
39	Pembinaan Terpadu Kampung KB
40	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
XIV	*Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*
41	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
42	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 (disesuaikan dengan APBD Tahun 2024)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	14				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**Angka Harapan Hidup**	**Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan**	**2,25**	**9.316.500.668**			**Angka Harapan Hidup**	**9.744.980.772**
2	14	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan**	**BB**	**5.157.775.668**			**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**5.371.547.772**
2	14	1	2.01		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*21 Dokumen*	*29.007.200*			*Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun*	*35.450.000*
2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 Dokumen	6.960.000	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	14	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 Dokumen	4.168.000	DAU		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000
2	14	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 Dokumen	3.294.000	DAU		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.500.000
2	14	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 Dokumen	3.226.000	DAU		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.000.000
2	14	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 Dokumen	3.138.000	DAU		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.750.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	14	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	2 Laporan	3.668.600	DAU		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.200.000
2	14	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	2 Laporan	4.552.600	DAU		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000
2	14	1	2.02		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*67 Laporan*	*3.463.076.772*			*Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan*	*3.486.037.772*
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	37 Orang	3.257.837.772	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.257.837.772

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	14	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	12 Dokumen	189.164.000	DAU		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	210.000.000
2	14	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 Laporan	6.046.000	DAU		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000
2	14	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	12 Laporan	5.386.300	DAU		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.200.000
2	14	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	2 Laporan	4.642.700	DAU		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	14	1	2.03		*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Presentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*100%*	*8.550.000*			*Presentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik*	*13.500.000*
2	14	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	4 Laporan	4.194.000	DAU		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000
2	14	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	2 Laporan	4.356.000	DAU		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000
2	14	1	2.05		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*37 Orang*	*16.302.400*			*Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*17.500.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	14	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 Dokumen	7.662.400	DAU		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.200.000
2	14	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	2 Dokumen	8.640.000	DAU		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.300.000
2	14	1	2.06		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Presentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*100%*	*648.168.700*			*Presentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum*	*762.200.000*
2	14	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	10 Paket	7.084.200	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	20 Paket	402.817.600	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	450.000.000
2	14	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	2 Paket	24.900.000	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30.000.000
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	4 Paket	41.766.900	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	54.200.000
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	45 Laporan	171.600.000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	14	1	2.08		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*100%*	*690.040.596*			*Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*740.000.000*
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	7 Laporan	131.289.660	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	140.000.000
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	12 Laporan	558.750.936	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	600.000.000
2	14	1	2.09		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Pelaksanaan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*100%*	*302.630.000*			*Persentase Pelaksanaan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*316.860.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	14	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	43 Unit	123.920.000	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	163.000.000
2	14	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	34 Unit	28.860.000	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28.860.000
2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	6 Unit	149.850.000	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	125.000.000
2	14	2			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**PERSENTASE PENURUNAN ANGKA TFR**	**Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan**	**0,02**	**71.000.000**			**PERSENTASE PENURUNAN ANGKA TFR**	**80.400.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	14	2	2.02		*Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Keterpaduan Kebijakan Provinsi dengan Kebijakan Pemerintah Kota Bima*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*100%*	*71.000.000*			*Persentase Keterpaduan Kebijakan Provinsi dengan Kebijakan Pemerintah Kota Bima*	*80.400.000*
2	14	2	2.02	8	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	2 Laporan	41.000.000	DAK dan DAU		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	75.000.000
2	14	2	2.02	#	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	2 Dokumen	30.000.000	DAK dan DAU		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	5.400.000
2	14	3			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**PERSENTASE PENURUNAN (UNMET NEED)**	**Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan**	**8,50**	**Rp3.283.725.000**			**PERSENTASE PENURUNAN (UNMET NEED)**	**Rp3.489.033.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	14	3	2.01		*Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal*	*Persentase PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsi*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*100%*	*Rp703.000.000*			*Persentase PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsi*	*Rp703.000.000*
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	4 Organisasi	Rp250.000.000	DAK dan DAU		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Rp250.000.000
2	14	3	2.01	2	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp150.000.000	DAK dan DAU		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Rp150.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	14	3	2.01	4	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	10 Laporan	Rp75.000.000	DAK dan DAU		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Rp75.000.000
2	14	3	2.01	6	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	12 Laporan	Rp148.000.000	DAK dan DAU		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Rp148.000.000
2	14	3	2.01	7	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	4 Laporan	Rp80.000.000	DAK dan DAU		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Rp80.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	14	3	2.02		*Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*100%*	*248.000.000*			*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB*	*248.000.000*
2	14	3	2.02	1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 Organisasi	123.000.000	DAK dan DAU		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	123.000.000
2	14	3	2.02	6	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	2 Laporan	125.000.000	DAK dan DAU		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	125.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	14	3	2.03		*Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*	*Preentase Faskes Penerima Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kota Bima*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*100%*	*2.050.241.000*			*Preentase Faskes Penerima Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kota Bima*	*2.255.549.000*
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	12 Laporan	12.600.000	DAK dan DAU		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12.600.000
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	125 Orang	477.649.000	DAK dan DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	477.649.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	80 Unit	1.544.692.000	DAK dan DAU		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.750.000.000
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	12 Laporan	15.300.000	DAK dan DAU		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15.300.000
2	14	3	2.04		*Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*	*Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*100%*	*282.484.000*			*Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*	*282.484.000*
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 Dokumen	3.750.000	DAK dan DAU		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	14	3	2.04	3	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	16 Kampung KB	252.000.000	DAK dan DAU		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	252.000.000
2	14	3	2.04	4	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	12 Laporan	26.734.000	DAK dan DAU		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	26.734.000
2	14	4			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan upaya pemberdayaan ekonomi**	**Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan**	**100%**	**804.000.000**			**Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan upaya pemberdayaan ekonomi**	**804.000.000**
2	14	4	2.01		*Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	*Persentase penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahunnya*	*Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan*	*100%*	*804.000.000*			*Persentase penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahunnya*	*804.000.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2	14	4	2.01	2	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	360 Kader	756.000.000	DAK dan DAU		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	756.000.000
2	14	4	2.01	5	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Bima, semua Kecamatan, semua Kelurahan	4 Laporan	48.000.000	DAK dan DAU		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	48.000.000

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja DPPKB Kota Bima Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan DPPKB yang disusun dengan berpedoman pada Renstra 2024-2026 DPPKB kota Bima, RKPD Kota Bima Tahun 2024 serta Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Penetapan Program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja ini didasarkan atas prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan Kota Bima yang arah pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi , terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan Rencana kerja ini diutamakan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan. Apabila tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja ini, Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan didasarkan pada skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi DPPKB Kota Bima dalam menjalankan fungsi dan tugas DPPKB Kota Bima pada Tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja DPPKB Kota Bima Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai DPPKB Kota Bima serta peran aktif stakeholder yang terlibat.

Demikian Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan RKA-PD.

Raba-Bima, 14 Agustus 2023
Kepala Dinas PP dan KB

Nurjanah, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631016 198703 2 009

DOKUMEN

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2025



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA BIMA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Rahmatnya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) satuan kerja Perangkat Daerah renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja adalah merupakan acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima selama periode satu (1) tahun, yaitu Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kota Bima.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 telah tersusun melalui beberapa tahapan yang cukup panjang dan rumit.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajian untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja ini untuk masa mendatang.

Raba-Bima, Mei 2024

Kepala,

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Syahruddin, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19690707 198903 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI..... iii
BAB I. PENDAHULUAN..... 1
I.1. Latar belakang..... 1
I.2. Dasar Hukum..... 3
I.3. Maksud dan Tujuan penyusunan Renja..... 10
I.4. Sistematika penulisan..... 10
BAB.II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 12
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja mengacu pada APBD..... 12
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima..... 24
II.3. Isu – isu Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 27
II.4. Review terhadap rancangan awal RKPD..... 28
II.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan 42
BAB.III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 49
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan provinsi..... 49
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 51
3.3. Program dan Kegiatan..... 51
BAB.IV. PERENCANAAN KEGIATAN DAN PENDANAAN DAERAH 64
BAB.V. PENUTUP 66

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menyatakan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah meliputi perencanaan jangka panjang, menegah dan tahunan.

Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pemerintah Kota Bima Tahun 2025 dapat berjalan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Adapun tahapan dan tata cara penyusunan renja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan Rancangan Awal;
c. Penyusunan Rancangan;
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan Rancangan Akhir dan;
f. Penetapan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja dimulai dengan melakukan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana berikut :

a. Pendahuluan;
b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
e. Penutup.

1.1.3. Keterkaiatan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom, maka RKPD Kota Bima Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Kota Bima periode 2024 - 2026 dan mengacu pada RPD Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 -2026 dan RPJMN Tahun 2019 - 2024, di mana RPD Kota Bima periode 2024-2026 sebagai pedoman didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Pada lingkup pemerintahan Rancangan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1(satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima serta sebagai dasar pengusulan program / kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 mengacu pada landasan hukum dan ketentuan sebagai berikut.

1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2025 menyelenggarakan fungsi sebagai:

A. Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima.

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah;
- Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
- Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
- Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah;
- Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah;
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah;
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
- Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayana administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

- Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- Pengelolaan urusan keuangan;
- Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- Pengelolaan urusan ASN; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh:

1. Kasubag Umum

   Subbagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

   - Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
   - Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik daerah;
   - Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
   - Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
   - Melaksanakan kegiatan urusan pengelolaan keuangan lingkup Dinas; dan
   - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kualitas Hidup Perempuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
- pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan

- kesetaraan gender dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
- Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Permpuan.

D. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemenuhan Hak Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan

bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;

- Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
- Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak; dan

E. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahankekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh:

1. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Permpuan.

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Untuk uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan;
8. Peratuaran meteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak;
9. Peratuaran meteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 11 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak;
10. Peratuaran meteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Evaluasi Kota Layak Anak;
11. Peratuaran meteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 03 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perlindungan Anak;
12. Peratuaran meteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 04 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Kota Layak Anak;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Baerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bima:

16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 253, tanggal 28 Desember 2023);
20. Peraturan Walikota Bima Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 714);
21. Peraturan Walikota Bima Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 870, tanggal 29 Desember 2023).

1.3. Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja)

1.3.1. Maksud adalah :

a. Himpunan usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Bima di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. Sebagai informasi tentang kebutuhan Dinas PP dan PA Kota Bima dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025;
c. Sebagai upaya perbaikan akuntabilitas kinerja perencanaan pada Dinas PP dan PA Kota Bima.

1.3.2. Tujuan adalah :

Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Kota Bima Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana kerja Dinas PP dan PA Kota Bima 2025 sbb :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan penyusunan Renja
1.4. Sistematika penulisan
BAB.II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja mengacu pada APBD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu – isu Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Mrovinsi.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PERENCANAAN KEGIATAN DAN PENDANAAN DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPP-PA TAHUN LALU

Proses penyusunan perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi Rencana Strategis Dinas PP-PA Kota Bima Tahun 2024-2026 yang memuat Indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) Tahun, sesuai Rencana Pembagunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas PP dan PA

Evaluasi kinerja merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang, sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan dalam melaksanakan pengembanan visi dan misi. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Salah satu indikator kinerja terukur adalah berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang memuat laporan kinerja tahun berjalan capaian kinerja berdasarkan input–output. Kinerja sektor Pemberdayaan Perempuan dan data kekerasan menggambarkan hasil, tetapi ditunjukkan oleh dampak program (outcome). Berdasarkan Renstra, terdapat dua faktor prioritas pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di Kota Bima antara lain: peningkatan ketersediaan layanan, peningkatan keterjangkauan layanan. Jika pemerintah daerah fokus terhadap peningkatan ketersediaan maka program/kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta data dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun demikian untuk mengevaluasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Dinas PP da PA sampai dengan Tahun 2023

Kode Program / Kegiatan					Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Progam dan kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2013			Target Program Kegiatan Renja Prangkat daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Prangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realaisasi Renja Prangkat daerah (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realaisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**
2	08	01	2.01	01	Penyusunan rencana kerja tahunan,Renja/Renstra	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
2	08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2	08	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerahyang sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**

Kode Program / Kegiatan					Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Progam dan kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2013			Target Program Kegiatan Renja Prangkat daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Prangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realaisasi Renja Prangkat daerah (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realaisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 org	22 org	22 org	22 org	100%	22 org	22 org	100,00%
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan KPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum**	**CakupanPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahyang sesuai dengan aturan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	100%	8 Paket	8 Paket	100,00%
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	36 Paket	36 Paket	36 Paket	100%	36 Paket	36 Paket	100,00%
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100,00%
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	10 Paket	100,00%
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**CakupanPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahyang sesuai dengan aturan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**

Kode Program / Kegiatan					Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Progam dan kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2013			Target Program Kegiatan Renja Prangkat daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Prangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realaisasi Renja Prangkat daerah (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realaisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	08	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100,00%
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan aturan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**
2	08	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan aturan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	13 Unit	13 Unit	100,00%
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100,00%
2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	13 Unit	13 Unit	100,00%
2	**08**	**02**			**Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi**	**9,60%**	**9,58%**	**32,00%**	**11,13%**	**34,80%**	**9,58%**	**9,58%**	**100%**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**% SKPD yang melaksanakan PPRG**	**61,29%**	**35,29%**	**64,52%**	**88,24%**	**136,76%**	**48,39%**	**48,39%**	**79%**

Kode Program / Kegiatan					Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Progam dan kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2013			Target Program Kegiatan Renja Prangkat daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Prangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realaisasi Renja Prangkat daerah (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realaisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		12 Dokumen	10 dokumen	83,33%	2 dokumen	2 dokumen	100%
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah laporan SKPD hasil pelaksanaan kegiatan PUG Termasuk PPRG		12 Dokumen						
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG		30 org						
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			32 Perangkat daerah	30 perangkat daerah	93,75%			
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan**	**5260 org**	**78 org**	**80 org**	**160 orang**	**200,00%**	**5244 org**	**5244 org**	**100%**
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi perempuan yang dibina		48 organisasi						
						Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi		30 Organisasi	30 Organisasi	100,00%	30 Organisasi	30 Organisasi	100%
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina**	**45%**	**192%**	**50%**	**36%**	**71,21%**	**34%**	**34%**	**75%**

Kode Program / Kegiatan					Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Progam dan kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2013			Target Program Kegiatan Renja Prangkat daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Prangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realaisasi Renja Prangkat daerah (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realaisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	40 lembaga		25 lembaga	25 lembaga	100,00%	30 lembaga	30 lembaga	75%
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 org		25 org	200 org	800,00%	30 org	30 org	75
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayan Perempuan	Jumlah Rumah Aspirasi yang terbentuk		6 klp						
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen		5 Dokumen	1 dokumen	20,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2	**08**	**03**			**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**% Pernikahan pasangan usia dini**		**6,40%**						
						Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	**47 kasus**		**56 kasus**	**26 kasus**	**153,57%**	**53 kasus**	**53 kasus**	**113%**
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan		100 org						
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 dokumen	2 dokumen	100

Kode Program / Kegiatan					Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Progam dan kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2013			Target Program Kegiatan Renja Prangkat daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Prangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realaisasi Renja Prangkat daerah (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realaisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah peserta Sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan		20 org						
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat daerah		25 Perangkat daerah	25 Perangkat daerah	100%	30 Perangkat daerah	30 Perangkat daerah	100
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Porsentase kasus rujukan lanjutan pagi perempuan korban kekerasan yang dilayani**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas PPA yang terbentuk		11 kel						
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	47 Org		17 Org	26 orang	152,94%	53 Org	53 Org	112,77
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan		33 kss						
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Layanan		17 Layanan	26 orang	152,94%	53 Layanan	53 Layanan	113%
2	**08**	**05**			**Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	**Persentase pemenuhan data gender dan anak**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	**Jumlah data kekerasan yang dihasilkan**	**3 jenis data**	**3 jenis data**	**3 jenis data**	**3 jenis data**	**100,00%**	**3 jenis data**	**3 jenis data**	**100**

Kode Program / Kegiatan					Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Progam dan kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2013			Target Program Kegiatan Renja Prangkat daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Prangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realaisasi Renja Prangkat daerah (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realaisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak		10 dok						
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen		10 Dokumen	10 dok	100,00%	10 Dokumen	10 Dokumen	100
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengimputan data pada aplikasi SIMPONI		4 kl						
						Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100
2	**08**	**07**			**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak**	**52 kasus**	**60 kss**	**46 kasus**	**39 kasus**	**115,22%**	**58 kasus**	**58 kasus**	**112%**
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		50 Org						
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	100%			
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak		200 org						
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Kode Program / Kegiatan					Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Progam dan kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2013			Target Program Kegiatan Renja Prangkat daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Prangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realaisasi Renja Prangkat daerah (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realaisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	08	07	2.01	03	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 keg	2 keg	100
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban kekerasan anak yang dirujuk**		**60 kasus**	**40 kasus**	**29 kasus**	**128%**			
						Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	**100%**					**100%**	**100%**	**100**
2	08	07	2.02	05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilayani		24 kasus						
						Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Orang		41 Orang	29 orang	129%	58 Orang	58 Orang	112%
2	08	07	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perlindungan khusus yanng dilakukan pendampingan		24 kasus						
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Orang		41 Layanan	29 layanan	129%	58 Layanan	58 Layanan	112%
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk**	**41 Lembaga**	**15 lembaga**	**10 Lembaga**	**10 Lembaga**	**100%**	**10 Lembaga**	**15 Lembaga**	**36,59**

Kode Program / Kegiatan					Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Progam dan kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2013			Target Program Kegiatan Renja Prangkat daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Prangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realaisasi Renja Prangkat daerah (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realaisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan PATBM		50 org						
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasi Masyarakat (PATBM) yang terbentuk		15 kelompok PATBM						
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			5 Dokumen	5 Dokumen	100%			
2	08	7	2.03	05	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 keg					2 keg	2 keg	100,00
2	08	07	2.03	06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 org					30 org	30 org	100,00
2	**08**	**06**			**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak**	**54,76**	**47,62**	**54,76**	**54,76%**	**100%**	**61,90%**	**61,90%**	**1,13%**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak**	**46 lembaga**	**20 lembaga**	**23 lembaga**	**23 Lembaga**	**100%**	**46 lembaga**	**46 lembaga**	**100,00**

Kode Program / Kegiatan					Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Progam dan kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2013			Target Program Kegiatan Renja Prangkat daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Prangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realaisasi Renja Prangkat daerah (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realaisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas yang terbentuk pada kecamatan dan kelurahan		14 lembaga						
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	40 Organisasi		11 Organisasi	11 Organisasi	100%	30 Organisasi	30 Organisasi	75,00
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase pembinaan gugus tugas KLA tingkat kelurahan di kecamatan		55%						
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak**		**3 PKM & 35 Sekolah**	**8 PKM, RS & 35 Sekolah**	**8 PKM & 35 sekolah**	**100%**			
						Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan pennguatan dan pengembangan	**38 lembaga**					**38 lembaga**	**38 lembaga**	**100,00**
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan sekolah dan puskesmas ramah anak		36 sekolah & 2 puskesmas						
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang		60 Orang	60 orang	100%	80 Orang	80 Orang	100%
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif		80,85						

Kode Program / Kegiatan					Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Progam dan kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2013			Target Program Kegiatan Renja Prangkat daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Prangkat daerah Tahun (n-2) 2023	Realaisasi Renja Prangkat daerah (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realaisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	80,85				24 Dokumen	24 Dokumen	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Berdasarkan sasaran/target Rencana (RENSTRA) Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk urusan wajib serta Indikator Kinerja Pelayanan. Kinerja Pelayanan digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan.

Dengan melihat kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dapat mensinergiskan proses perencanaan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Kota Bima dalam rangka:

a. Perencanaan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
b. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan
c. Peningkatan pelayanan pencegahan dan perlindungan perempuan dan Anak
d. Peningkatan dalam pemenuhan hak anak.
e. Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender, dan
f. Peningkatan pencapaian indicator Kota Layan Anak (KLA)

Dengan melihat kondisi pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Kota Bima dapat dilihat pada tabel 2.2.sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah baik di Tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Kota Bima

No	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Angka KDRT			0,58%	0,56%	0,55%		0,11%	0,050%			
2	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)		8,58				9,68			9,68	9,13	
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		70,30	64,77	66,29	67,81	70,23	70,16	69,86	70,23	70,27	
4	Angka Kekerasan terhadap anak			0,067	0,057 %	0,076%		0,012%	0,076%			

No	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)		10,13				11,29			11,29	10,71	
6	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak		75,50%	60%	80%	100%	70,5%	80%	100%	70,5%	73,0%	

2.3. Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang di singkat DPP-PA Kota Bima di bentuk berdasarkan Peratuaran Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi lembaga tehnis Daerah Kota Bima dan Peraturan Walikota Bima Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang merupakan lembaga tehnis daerah sebagai unsur penting pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bima.

Yang menjadi isu penting pelayanan tugas dan fungsi Dinas PP-PA Kota Bima dengan uraian sebagai berikut:

a. Penguatan kelembagaan
   - Penataan organisasi : Terbentuknya DPP dan PA Kota Bima, dan masih Kurangnya SDM
   - Ada beberapa Produk hukum Daerah (perwali PP) terkait dengan Perlindungan Perempuan

b. Kurangnya kuantitas, jangkauan dan kualitas Komunikasi Informasi Eduasi (KIE)

c. Kualitas dan pemanfaatan data mikro Kekerasan untuk perencanaan di berbagai OPD

d. Data dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum tersedia

e. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

f. Pengembangan program Dinas PP dan PA Kota Bima diarahkan untuk meningkatkan kinerja program untuk mempercepat terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

g. Memaksimalkan akses dan kualitas kesetaraan dan keadilan Gender. Meningkatkan jangkauan dan kualitas informasi.

h. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga, pola asuh dan tumbuh embang anak, serta kualitas lingkungan keluarga dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

i. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan program, termasuk peningkatan kinerja, kualitas SDM dan pengembangan sistem manajemen.

j. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dan lembaga-lembaga yang berbasis masyarakat dalam bidang PP dan PA.

k. Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

2.4. Reviw terhadap rancangan awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan prodak dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan terdiri dari Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Dokumen Perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja (Renja) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024. Program dan kegiatan yang dilaksanakan mengalami perubahan sesuai dengan rancangan awal RKPD Kota Bima Tahun 2025 agar terwujudnya dokumen perencanaan mulai dari RPD dengan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan oleh Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. ***Dapat dilihat dalam tabel Reviw terhadap Rancangan awal RKPD di bawah ini***.

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kota Bima**	**Persentase urusan pemerintahan daerah yang dihasilkan**	**100%**	**4.315.913.665,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kota Bima**	**Persentase urusan pemerintahan daerah yang dihasilkan**	**100%**	**4.315.913.665,00**	
2.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Kota Bima**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**22.253.300,00**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Kota Bima**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**22.253.300,00**	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.705.800,00	Penyusunan rencana kerja tahunan,Renja/Renstra		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.705.800,00	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.658.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.658.400,00	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.258.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.258.400,00	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.162.500,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.162.500,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.572.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.572.400,00	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	6.111.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	6.111.000,00	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.784.800,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.784.800,00	
2.02	**Administrasi Keuangan**	**Kota Bima**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerahyang sesuai dengan ketentuan**	100%	**3.593.751.365,00**	**Administrasi Keuangan**	**Kota Bima**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerahyang sesuai dengan ketentuan**	100%	**3.593.751.365,00**	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 org	3.422.479.465,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 org	3.422.479.465,00	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan KPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	167.200.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan KPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	167.200.000,00	
05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.933.400,00	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.933.400,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.138.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.138.500,00	
2.06	**Administrasi Umum**	**Kota Bima**	**CakupanPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahyang sesuai dengan aturan**	**100%**	**351.126.000,00**	**Administrasi Umum**	**Kota Bima**	**CakupanPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahyang sesuai dengan aturan**	**100%**	**351.126.000,00**	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2.212.800,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2.212.800,00	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12.990.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12.990.000,00	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.797.300,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.797.300,00	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.145.400,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.145.400,00	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	270.980.500,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	270.980.500,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bima**	**CakupanPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahyang sesuai dengan aturan**	**100%**	**2.040.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bima**	**CakupanPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahyang sesuai dengan aturan**	**100%**	**2.040.000,00**	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2.040.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2.040.000,00	
2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan aturan**	**100%**	**168.348.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan aturan**	**100%**	**168.348.000,00**	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	11.748.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	11.748.000,00	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	156.600.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	156.600.000,00	
2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan aturan**	**100%**	**178.395.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan aturan**	**100%**	**178.395.000,00**	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	120.110.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	120.110.000,00	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	44.765.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	44.765.000,00	
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	13.520.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	13.520.000,00	
02	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Kota Bima**	**Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi**	**9,59%**	**2.111.132.550,00**	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Kota Bima**	**Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi**	**9,59%**	**2.111.132.550,00**	
2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**% SKPD yang melaksanakan PPRG**	**54,84%**	**40.787.900,00**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**% SKPD yang melaksanakan PPRG**	**54,84 %**	**40.787.900,00**	
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	40.787.900,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	40.787.900,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan**	**5244 orang**	**989.880.100,00**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan**	**5244 orang**	**989.880.100,00**	
02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 organisasi	989.880.100,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 organisasi	989.880.100,00	
2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina**	**39,33%**	**1.080.464.550,00**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina**	**39%**	**1.080.464.550,00**	
01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	35 lembaga	134.783.800,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	35 lembaga	134.783.800,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	35 org	593.241.350,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	35 org	593.241.350,00	
03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	352.439.400,00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	352.439.400,00	
03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Kota Bima**	**Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan**	**0,091%**	**337.460.600,00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Kota Bima**	**Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan**	**0,091 %**	**337.460.600,00**	
2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan**	**50 kasus**	**80.287.300,00**	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan**	**50 kasus**	**80.287.300,00**	
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	31.540.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	31.540.000,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota					
02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat daerah	48.747.300,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat daerah	48.747.300,00	
2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani**	**100%**	**257.173.300,00**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani**	**100,000%**	**257.173.300,00**	
01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Org	168.116.300,00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Org	168.116.300,00	
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	89.057.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	89.057.000,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Kota Bima**	**Persentase pemenuhan data gender dan anak**	**100%**	**73.543.200,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Kota Bima**	**Persentase pemenuhan data gender dan anak**	**100,000%**	**73.543.200,00**	
2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	**Kota Bima**	**Jumlah data kekerasan gender dan anak**	**3 jenis data**	**73.543.200,00**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	**Kota Bima**	**Jumlah data kekerasan gender dan anak**	**3 jenis data**	**73.543.200,00**	
01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	54.646.100,00	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	54.646.100,00	
02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	18.897.100,00	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	18.897.100,00	
06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kota Bima**	**% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak**	**54,76%**	**283.150.000,00**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kota Bima**	**% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak**	**54,760%**	**283.150.000,00**	
2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak**	**46 lembaga**	**154.917.250,00**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak**	**46 lembaga**	**154.917.250,00**	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	54.456.750,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	54.456.750,00	
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.460.500,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.460.500,00	
2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan pennguatan dan pengembangan**	**38 lembaga**	**128.232.750,00**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan pennguatan dan pengembangan**	**38 lembaga**	**128.232.750,00**	
01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	3.780.000,00	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	3.780.000,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	102.927.100,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	102.927.100,00	
03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	21.525.650,00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	21.525.650,00	
07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Kota Bima**	**Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak**	**0,107%**	**562.431.200,00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Kota Bima**	**Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak**	**0,107 %**	**562.431.200,00**	
2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak**	**55 kasus**	**79.960.000,00**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak**	**55 kasus**	**79.960.000,00**	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
03	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA		Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 keg	10.000.000,00	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA		Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 keg	10.000.000,00	
04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 org	69.960.000,00	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 org	69.960.000,00	
2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi**	**100%**	**223.703.000,00**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi**	**100,000%**	**223.703.000,00**	
05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	55 Orang	146.423.000,00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	55 Orang	146.423.000,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
07	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	55 Orang	77.280.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	55 Orang	77.280.000,00	
2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk**	**41 Lembaga**	**258.768.200,00**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk**	**41 Lembaga**	**258.768.200,00**	
05	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 keg	162.644.200	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 keg	162.644.200	
06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 org	96.124.000	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 org	96.124.000	
					7.683.631.215,00					**7.683.631.215,00**	

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja tahun Kedua Penjabaran dari pelaksanaan Pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024-2026. Rencana kerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan pada Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2025.

Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 didasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas, agar didalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari Para pemangku kepentingan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.5.sebagai berikut:

Tabel 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi Maupun Tingkat Kota Bima
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran Volume	Catatan Penting
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kota Bima**	**Persentase urusan pemerintahan daerah yang dihasilkan**	**100%**	
	A		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Kota Bima**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan**	**100%**	
		01	Penyusunan rencana kerja tahunan,Renja/Renstra		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
		04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
		05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	
	B		**Administrasi Keuangan**	**Kota Bima**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerahyang sesuai dengan ketentuan**	**100%**	
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 org	
		02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	

No			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran Volume	Catatan Penting
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
		04	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	
	C		**Administrasi Umum**	**Kota Bima**	**CakupanPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahyang sesuai dengan aturan**	**100%**	
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	
		03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	
		04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	
		05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
	D		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bima**	**CakupanPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahyang sesuai dengan aturan**	**100%**	
		01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	
	E		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan aturan**	**100%**	
		01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	
		02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	

No			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran Volume	Catatan Penting
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	F		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan aturan**	**100%**	
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	
		02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	
		03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	
II			**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Kota Bima**	**Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi**	**9,59%**	
	A		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**% SKPD yang melaksanakan PPRG**	**54,84%**	
		01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	
	B		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan**	**5244 orang**	
		01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 organisasi	
	C		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina**	**39,33%**	
		01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	35 lembaga	
		02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	35 org	

No			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran Volume	Catatan Penting
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	
III			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Kota Bima**	**Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan**	**0,091%**	
	A		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan**	**50 kasus**	
		01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	
		02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat daerah	
	B		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani**	**100%**	
		01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Org	
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	
IV			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Kota Bima**	**Persentase pemenuhan data gender dan anak**	**100%**	
	A		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	**Kota Bima**	**Jumlah data kekerasan gender dan anak**	**3 jenis data**	
		01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	
		02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	

No			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran Volume	Catatan Penting
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
V			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kota Bima**	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	54,76%	
	A		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak**	**46 lembaga**	
		01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	
	B		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan pennguatan dan pengembangan**	**38 lembaga**	
		01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	
		03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	
VI			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Kota Bima**	**Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak**	**0,107%**	
	A		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak**	**55 kasus**	
		01	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA		Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 keg	

No			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran Volume	Catatan Penting
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		02	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 org	
	B		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi**	**100%**	
		01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	55 Orang	
		02	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	55 Orang	
	C		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bima**	**Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk**	**41 Lembaga**	
		01	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 keg	
		02	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 org	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima tertuang pada Peraturan Walikota Bima Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 82 Tahun 2021, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Kantor dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan dan tugas dekosentrasi.

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun isu prioritas pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Wirausaha.
2. Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga Dalam Pengasuhan Anak.
3. Pengurangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak .
4. Pengurangan Pekerja Anak.
5. Pencegahan Perkawinan Anak.

Sedangkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Implementasi Pengaurusutamaan Gender
2. Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Jabatan Publik Dan Pendapatan Keluarga
3. Berkurangnya Kasus Kekerasan Pada Perempuan Termaksud TPPO
4. Meningkatnya Kualitas Penanganan Kasus Terhadap Perempuan Termaksud TPPO
5. Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak
6. Berkurangnya Kasus Kekerasan Pada Anak
7. Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan Khusus Anak
8. Meningkatnya Kualitas Data Pilah Gender Dan Anak

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik di tingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kota diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bima dapat menyentuh sasaran yang tepat.

Tantangan pembangunan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak makin kompleks dan bahkan tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bima periode 2024-2026 guna mendukung terwujudnya tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima, serta pencapaian dari sasaran strategis di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat yaitu sebagai berikut:

1. Revitalisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Penyerasian kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditekankan pada :
    - Penyusunan produk hukum Daerah tentang Perwali Perlindungan Perempuan dan Perwali Perlindungan Anak.
    - Kerjasama lintas sector Pemberdayaan perempuan yang serasi dan efektif.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan pemberdayaan Perempuan dan pengarusutamaan hak Anak.
    - Penyediaan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
    - Fasilitasi pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
    - Penyediaan sistem Pendataan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menyeluruh, dengan menekankan koordinasi lintas sector dan partisipasi masyarakat dan menuju penggunaan sistem pendataan perempuan dan anak berbasis Teknologi Informatika.
    - Pelatihan, dan pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang melaksanakan pembangunan khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan membantu Walikota Bima dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan dan Sasaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja		
					2024	2025	2026
1	Pemberdaaya n Perempuan dalam Pembagunan	Meningkatnya peran perempuan dalam pembanguna n Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	1	Indeks Pemberdayaan Genger (IDG)	70,23	70,27	70,30
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	1	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	9,68	9,13	8,58
2	Mewujudkan Kota layak anak	Meningkatnya perlindungan terhadap Anak dan Pemenuhan hak anak	1	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	11,29	10,71	10,13
			1	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	70,5%	73,0%	75,50%

3.3. Program dan Kegiatan.

3.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026 serta Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas PP-PA Kota Bima 2024-2026.

Adapun Prioritas Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.
Prioritas Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		
		2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
		01	Penyusunan rencana kerja tahunan,Renja/Renstra
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
		2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	
02	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		
		2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**
		02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**
		01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		
		2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
		01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**
		01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		
		2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**
		01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
		02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		
		2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**
		01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**
		01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		
		2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
		03	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
		04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
		2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
		05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		07	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
		2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
		05	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
		06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima pada Rencana Kerja Tahun 2025 terdapat 6 Program, 17 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan pendukung. Secara umum Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8)	(9)	(10)
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase urusan pemerintahan daerah yang dihasilkan**	**Kota Bima**	**100%**	**4.322.816.415**			**1**	**4.452.500.907**
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**01**	**20.1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan**	**Kota Bima**	**100%**	**27.959.200**			**100%**	**28.797.976**
2	08	2.08.00.00.01	01	2.01	01	Penyusunan rencana kerja tahunan,Renja/Renstra	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	3.925.800			2 Dokumen	4.043.574
2	08	2.08.00.00.01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	3.030.000			1 Dokumen	3.120.900
2	08	2.08.00.00.01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	2.808.400			1 Dokumen	2.892.652
2	08	2.08.00.00.01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1.755.000			1 Dokumen	1.807.650
2	08	2.08.00.00.01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	3.578.000			1 Dokumen	3.685.340
2	08	2.08.00.00.01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	6.111.000			1 Dokumen	6.294.330
2	08	2.08.00.00.01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	6.751.000			2 Laporan	6.953.530

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8)	(9)	(10)
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerahyang sesuai dengan ketentuan**	**Kota Bima**	100%	**3.595.033.015**			**100%**	**3.702.884.005**
2	08	2.08.00.0 0.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 org	3.422.479.215			22 org	3.525.153.591
2	08	2.08.00.0 0.01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	167.200.000			12 dokumen	172.216.000
2	08	2.08.00.0 0.01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	2.706.800			1 Laporan	2.788.004
2	08	2.08.00.0 0.01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	2.647.000			1 Laporan	2.726.410
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**CakupanPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahyang sesuai dengan aturan**	**Kota Bima**	**100%**	**349.851.200**			**100%**	**360.346.736**
2	08	2.08.00.0 0.01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 Paket	2.192.700			8 Paket	2.258.481
2	08	2.08.00.0 0.01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		36 Paket	13.870.000			36 Paket	14.286.100
2	08	2.08.00.0 0.01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	35.788.000			12 Paket	36.861.640
2	08	2.08.00.0 0.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	28.252.000			10 Paket	29.099.560

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8)	(9)	(10)
2	08	2.08.00.00.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	269.748.500			8 Laporan	277.840.955
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**CakupanPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahyang sesuai dengan aturan**	**Kota Bima**	**100%**	**2.040.000**			**100%**	**2.101.200**
2	08	2.08.00.00.01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4 Unit	2.040.000			4 Unit	2.101.200
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan aturan**	**Kota Bima**	**100%**	**168.348.000**			**100%**	**173.398.440**
2	08	2.08.00.00.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Bulan	11.748.000			12 Bulan	12.100.440
2	08	2.08.00.00.01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Bulan	156.600.000			12 Bulan	161.298.000
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan aturan**	**Kota Bima**	**100%**	**179.585.000**			**100%**	**184.972.550**
2	08	2.08.00.00.01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		13 Unit	121.300.000			13 Unit	124.939.000
2	08	2.08.00.00.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	44.765.000			1 unit	46.107.950
2	08	2.08.00.00.01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		13 unit	13.520.000			13 unit	13.925.600

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8)	(9)	(10)
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**02**			**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi**		**9,59%**	**2.104.229.800**			**9,60%**	**2.167.356.694**
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**% SKPD yang melaksanakan PPRG**	**Kota Bima**	**54,84 %**	**40.787.700**			**61,29%**	**42.011.331**
2	08	2.08.00.00.01	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		2 dokumen	40.787.700			2 dokumen	42.011.331
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan**	**Kota Bima**	**5244 orang**	**989.880.100**			**5260 org**	**1.019.576.503**
2	08	2.08.00.00.01	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		30 organisasi	989.880.100			30 organisasi	1.019.576.503
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina**	**Kota Bima**	**39,33 %**	**1.073.562.000**			**44,94%**	**1.105.768.860**
2	08	2.08.00.00.01	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota		35 lembaga	134.783.800			40 lembaga	138.827.314

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8)	(9)	(10)
						Kewenangan Kabupaten/Kota	yang mendapat advokasi dan pendampingan							
2	08	2.08.00.00.01	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota yang mendapat advokasi dan pendampingan		35 org	593.241.300			40 org	611.038.539
2	08	2.08.00.00.01	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		2 Dokumen	345.536.900			2 Dokumen	355.903.007
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan**	**Kota Bima**	**0,091 %**	**345.831.000**			**0,086%**	**356.205.930**
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan**	**Kota Bima**	**50 kasus**	**91.208.800**			**47 kasus**	**93.945.064**
2	08	2.08.00.00.01	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		2 dokumen	32.710.000			2 dokumen	33.691.300
2	08	2.08.00.00.01	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Perangkat daerah	58.498.800			30 Perangkat daerah	60.253.764

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8)	(9)	(10)
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani**	**Kota Bima**	**100%**	**254.622.200**			**100%**	**262.260.866**
2	08	2.08.00.00.01	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		50 Org	152.365.200			47 Org	156.936.156
2	08	2.08.00.00.01	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		50 Layanan	102.257.000			47 Layanan	105.324.710
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase pemenuhan data gender dan anak**	**Kota Bima**	**100%**	**67.133.000**			**100%**	**69.146.990**
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	**Jumlah data kekerasan gender dan anak**	**Kota Bima**	**3 jenis data**	**67.133.000**			**3 jenis data**	**69.146.990**
2	08	2.08.00.00.01	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		10 Dokumen	48.754.000			10 Dokumen	50.216.620
2	08	2.08.00.00.01	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Dokumen	18.379.000			4 Dokumen	18.930.370

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8)	(9)	(10)
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak**	**Kota Bima**	**54,76 %**	**283.150.000**			**54,76%**	**291.644.500**
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak**	**Kota Bima**	**46 lembaga**	**137.800.300**			**46 lembaga**	**141.934.309**
2	08	2.08.00.00.01	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		35 Organisasi	8.744.300			40 Organisasi	9.006.629
2	08	2.08.00.00.01	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	129.056.000			2 Dokumen	132.927.680
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan pennguatan dan pengembangan**	**Kota Bima**	**38 lembaga**	**145.349.700**			**38 lembaga**	**149.710.191**
2	08	2.08.00.00.01	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		80 Orang	3.780.000			80 Orang	3.893.400
2	08	2.08.00.00.01	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Dokumen	117.975.000			5 Dokumen	121.514.250

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8)	(9)	(10)
2	08	2.08.00.00.01	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		24 Dokumen	23.594.700			24 Dokumen	24.302.541
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak**	**Kota Bima**	**0,107 %**	**560.471.000**			**0,101%**	**577.285.130**
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak**	**Kota Bima**	**55 kasus**	**68.790.000**			**52 kasus**	**70.853.700**
2	08	2.08.00.00.01	07	2.01	04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pencegahan KTA		50 org	68.790.000			50 org	70.853.700
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi**	**Kota Bima**	**100%**	**220.503.000**			**100%**	**227.118.090**
2	08	2.08.00.00.01	07	2.02	05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		55 Orang	87.280.000			52 Orang	89.898.400
2	08	2.08.00.00.01	07	2.02	07	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		55 Orang	133.223.000			52 Layanan	137.219.690

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/ Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8)	(9)	(10)
2	**08**	**2.08.00.00.01**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk**	**Kota Bima**	**41 Lembaga**	**271.178.000**			**41 Lembaga**	**279.313.340**
2	08	2.08.00.00.01	07	2.03	05	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK		2 keg	166.139.000			2 keg	171.123.170
2	08	2.08.00.00.01	07	2.03	06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		30 org	105.039.000			30 org	108.190.170
						JUMLAH				**7.683.631.215**				**7.914.140.151**

BAB IV.
RENCANA KEGIATAN, DAN PENDANAAN DAERAH

Dari uraian kegiatan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

Untuk meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat serta membuka peluang kaum Perempuan dalam mendapatkan hak maupuan kesempatan yang sama dengan kaum laki laki sehingga pemberdayaan perempuan sangat perlu diperlukan.

Salah satu Program Inovasi melalui Dinas PP dan PA kota Bima adalah menyediakan Rumah Aspirasi pemberdayaan Perempuan (RAPP) sebagai wadah kaum perempuan dalam mengembangkan diri.

Adapun tujuan Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan (RAPP) adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan pengembangan lainnya ke arah kemampauan hidup
2. Sebagai sarana aspirasi dan tukar pikiran kau perempuan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehimgga mampu membangun masyarakat dan lingkungannya
4. Mewadahi dan menfasilitasi kaum perempuan guna mendukung pembangunan diri dan peren permpuan dalam masyarakat
5. Meningkatkan nilai nilai dasar agama, sisial dan budaya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

   Dari kelima tujuan rumah aspirasi tersebut dapat dilaksanan kegiatan melalui :

   Peningkatan pengetahuan, Peningkatan Ketrampilan, Peningkatan Iman dan Taqwa, Wadah Pengaduan Perempuan, Media diskusi dan tukar pikiran
6. Dengan memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada, maka pencapaian indicator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dapat dicapai 6 Program, 17 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan.
7. Kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan adalah pendataan kekerasan perempuan dan pendataan kekerasan anak di Kota Bima dalam hal KDRT.
8. Total kebutuhan dan/pagu indukaif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Pemberdayaan Perempuyan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RDP) Pemerintah Kota Bima. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3.3 diatas. Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan RENSTRA tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2025 yang sudah ditetapkan. Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuyan dan Perlindungan Anak berdasarkan arah kebijakan Tahun 2025 dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima adalah Pemberdaayan Perempuan dalam Pembangunan dan Mewujudkan Kota layak anak. Pada Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuyan dan Perlindungan Anak Kota Bima memiliki 6 Program, 17 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan pendukung untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuyan dan Perlindungan Anak.

BAB V
P E N U T U P

Dengan selesainya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2025 mendatang dapat mencapai hasil yang optimal dan efisien.

Harapan dari tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah semakin kuat dan profesionalnya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam memberikan layanan perencanaan serta semakin tersedia dan lengkapnya dokumen pendukung sebagai referensi perencanaan sehingga output perencanaan yan dihasilkan oleh Dinas PP dan PA Kota Bima akan semakin integratif dan komperehensif.

Dari uraian pada bab-bab diatas, maka dapat diambil beberapa catatan:

1. Dengan memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada, maka pencapaian indicator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dapat dicapai.
2. Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun Anggaran 2025 perlu di tambahkan lagi.
3. Perlu ada laporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara menyeluruh.

Demikian penyusunan Rencana Kerja yang kami buat, kepada Tuhan jualah kita berserah diri seraya memohon bimbingan-nya semoga apa yang direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, Amin.

Raba-Bima, Mei 2024

Kepala Dinas.



SYAHRUDDIN, SH, MM.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19690707 198903 1 004

PEMERINTAH KOTA BIMA

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025



INSPEKTORAT

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Bima Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan salah satu upaya sistimatis dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan satu tahun kedepan.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Bima Tahun 2025 disusun sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan Implementasi dari Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan beberapa urusan wajib dan urusan pilihan untuk menentukan program kegiatan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dalam perencanaan stategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh karena itu untuk masa 5 (lima) tahun kedepan harapan yang sama yang diinginkan oleh organisasi Inspektorat Kota Bima guna mewujudkan wisi dan misi pembanguna Kota Bima menuju Masuarakat yang sejahtera .

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/Sub Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Kota Bima Tahun anggaran 2025 dan untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui

Rencana Kerja (Renja) pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun masyarakat secara umum.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menemgah (RPJM) dan Renstra Inspektorat Kota Bima.

Inspektur,

Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680828 199203 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Terhadap Capaian Rencana Strategis 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat 20
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat 35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 40
2.5 Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 49

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH 50
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi NTB 50
3.2 Tujuan dan Sasaran 52
3.3 Program Dan Kegiatan 55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 68
BAB V PENUTUP 78

DAFTAR TABEL

1.	Table 2.1.1	Sasaran Program Dan Kegiatan Serta Anggaran Tahun 2025	6
2.	Tabel 2.1.2	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai Dengan Tahun 2024	11
3.	Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Bima Kinerja Utama	21
4.	Tabel 2.2.2	Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Bima	30
5.	Tabel 2.4.1	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Bima	41
7.	Tabel 3.2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat 2024-2026	53
8.	Tabel 3.3.1	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bima Tahun 2025	
9.	Tabel 3.3.2	Indikator Kinerja Utama dan Porgram Kegiatan Utama Tahun 2025	58
10.	Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Inspektorat Kota Bima	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Kota Bima ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Periode 2024 - 2026 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dimana keduanya merupakan bagian utuh dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024- 2026, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan Implementasi dari Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Inspektorat Kota Bima dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga target kinerja yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat ini yang secara simultan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Bima Tahun 2025 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Udang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik lndonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lernbaran Negara Republik lndonesia tahun 2002 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234););
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4438)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima;

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
20. Peraturan Walikota Bima Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bima;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Kota Bima ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Lainnya.

Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2025 maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2025 ini Inspektorat akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber – sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini juga terdapat informasi – informasi yang akan memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

Dari gambaran tersebut diatas maka tujuan penyusunan Rencana Kinerja ini adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kota Bima dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Inspektorat;
3. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi- fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat;

4. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Bima dalam mewujudkan Pemerintahan Yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Governmen

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan RENJA ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2. Dasar Hukum
- I.3. Tujuan
- I.4. Sistimatika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU (TAHUN 2024)

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran dan hasil dari kegiatan dan program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Oleh karena itu evaluasi rencana kerja tahun lalu digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi.

Adapun hasil evaluasi kinerja yang dilakukan secara internal oleh Inspektorat Kota Bima terhadap kinerja program dan kegiatan serta kinerja sasaran tahun lalu dapat dijelaskan dibawah ini :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Terhadap Capaian Rencana Strategis (Renstra)

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) tahun 2024 terhadap pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bima sebagaimana tersebut dibawah ini.

Pada tahun 2024 Inspekrorat Kota Bima melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program dengan kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) Kegiatan dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.928.476.355 dengan realisasi sebesar Rp.11.675.815.244 atau 97,88 %. Adapun sasaran dan anggaran dari masing – masing program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

Table 2.1.1

Sasaran Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Anggaran Tahun 2024

NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI	PERSEN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 10,648,549,455.00	Rp 10,482,855,244.00	98.44%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 13,339,200.00	Rp 13,183,000.00	98.83%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	1,905,600.00	Rp	1,861,000.00	97.66%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	1,905,600.00	Rp	1,890,000.00	99.18%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	1,905,600.00	Rp	1,882,000.00	98.76%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	1,905,600.00	Rp	1,886,000.00	98.97%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp	1,905,600.00	Rp	1,890,000.00	99.18%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	1,905,600.00	Rp	1,878,000.00	98.55%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	1,905,600.00	Rp	1,896,000.00	99.50%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	8,892,171,205.00	Rp	8,734,078,171.00	98.22%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	8,725,438,405.00	Rp	8,567,372,171.00	98.19%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	161,016,000.00	Rp	161,012,000.00	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	1,905,600.00	Rp	1,897,000.00	99.55%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp	1,905,600.00	Rp	1,893,000.00	99.34%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	1,905,600.00	Rp	1,904,000.00	99.92%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	5,716,800.00	Rp	5,687,000.00	99.48%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	1,905,600.00	Rp	1,882,000.00	98.76%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	1,905,600.00	Rp	1,900,000.00	99.71%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	1,905,600.00	Rp	1,905,000.00	99.97%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	166,622,100.00	Rp	165,011,529.00	99.03%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	42,000,000.00	Rp	41,978,325.00	99.95%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	1,905,600.00	Rp	1,905,000.00	99.97%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp	1,905,600.00	Rp	1,899,000.00	99.65%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp	1,905,600.00	Rp	1,905,000.00	99.97%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	118,905,300.00	Rp	117,324,204.00	98.67%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1,268,556,750.00	Rp	1,263,837,888.00	99.63%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	3,750,000.00	Rp	-	0.00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	86,347,250.00	Rp	86,288,000.00	99.93%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	38,525,000.00	Rp	37,831,000.00	98.20%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	52,846,300.00	Rp	52,752,000.00	99.82%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	69,083,700.00	Rp	69,079,000.00	99.99%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	67,840,000.00	Rp	67,821,000.00	99.97%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	950,164,500.00	Rp	950,066,888.00	99.99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	13,650,000.00	Rp	13,619,700.00	99.78%

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	13,650,000.00	Rp	13,619,700.00	99.78%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	230,903,400.00	Rp	230,826,000.00	99.97%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	14,704,800.00	Rp	14,695,000.00	99.93%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	35,343,000.00	Rp	35,278,000.00	99.82%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	180,855,600.00	Rp	180,853,000.00	100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	57,590,000.00	Rp	56,611,956.00	98.30%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	33,750,000.00	Rp	33,546,871.00	99.40%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	8,840,000.00	Rp	8,165,000.00	92.36%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	15,000,000.00	Rp	14,900,085.00	99.33%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp	884,656,500.00	Rp	846,664,000.00	95.71%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp	752,356,500.00	Rp	735,604,000.00	97.77%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp	107,115,000.00	Rp	106,800,000.00	99.71%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp	89,475,000.00	Rp	88,080,000.00	98.44%
Reviu Laporan Kinerja	Rp	275,610,000.00	Rp	266,595,000.00	96.73%
Reviu Laporan Keuangan	Rp	-	Rp	-	-
Kerja Sama Pengawasan Internal	Rp	113,344,300.00	Rp	107,386,000.00	94.74%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp	166,812,200.00	Rp	166,743,000.00	99.96%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp	132,300,000.00	Rp	111,060,000.00	83.95%
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp	132,300,000.00	Rp	111,060,000.00	83.95%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp	395,270,400.00	Rp	346,296,000.00	87.61%
Pendampingan dan Asistensi	Rp	395,270,400.00	Rp	346,296,000.00	87.61%
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	133,980,000.00	Rp	102,390,000.00	76.42%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp	27,000,000.00	Rp	26,460,000.00	98.00%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp	182,390,400.00	Rp	168,351,000.00	92.30%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp	51,900,000.00	Rp	49,095,000.00	94.60%
Total	Rp	11,928,476,355.00	Rp	11,675,815,244.00	97.88%

Untuk mengetahui sejauhmana capaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas, maka dilakukan pengukuran atas indikator dan target dari masing - masing program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut melalui evaluasi hasil capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan bagian penting

dari hasil pelaksanaan rencana kerja organisasi perangkat daerah (RENJA-OPD) tahun 2024 terhadap pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bima. Adapun hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diatas, dapat dijelaskan melalui table berikut ini :

TABEL 2.1.2
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD
SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

OPD : Inspektorat Kota Bima

NO	SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/INDIKATOR KEGIATAN/INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	REALISASI KINERJA 2024	CAPAIAN ANGGARAN 2024	CAPAIAN KINERJA 2024
A	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah**	**FUNGSI PENUNJANG**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase urusan pemerintahan daerah yang dihasilkan**	**100%**	**Rp 10,648,549,455.00**	**Rp 10,482,855,244.00**	**100%**	**98.44%**	**100%**
I			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**Rp 13,339,200.00**	**Rp 13,183,000.00**	**100%**	**98.83%**	**100%**
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok.	Rp 1,905,600.00	Rp 1,861,000.00	1 Dok.	97.66%	100%
2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok.	Rp 1,905,600.00	Rp 1,890,000.00	1 Dok.	99.18%	100%
3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok.	Rp 1,905,600.00	Rp 1,882,000.00	1 Dok.	98.76%	100%
4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok.	Rp 1,905,600.00	Rp 1,886,000.00	1 Dok.	98.97%	100%
5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok.	Rp 1,905,600.00	Rp 1,890,000.00	1 Dok.	99.18%	100%
6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 1,905,600.00	Rp 1,878,000.00	1 Laporan	98.55%	100%

7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp	1,905,600.00	Rp	1,896,000.00	1 Laporan	99.50%	100%
II			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**Rp**	**8,892,171,205.00**	**Rp**	**8,734,078,171.00**	**100%**	**98.22%**	**100%**
1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang/bulan	Rp	8,725,438,405.00	Rp	8,567,372,171.00	56 orang/bulan	98.19%	100%
2			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	Rp	161,016,000.00	Rp	161,012,000.00	1 Dok	100%	100%
3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp	1,905,600.00	Rp	1,897,000.00	1 Laporan	99.55%	100%
4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Rp	1,905,600.00	Rp	1,893,000.00	1 Laporan	99.34%	100%
5			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	Rp	1,905,600.00	Rp	1,904,000.00	1 Dok	99.92%	100%
III			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**Rp**	**5,716,800.00**	**Rp**	**5,687,000.00**	**100%**	**99.48%**	**100%**
1			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	Rp	1,905,600.00	Rp	1,882,000.00	1 Dok	98.76%	100%
2			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	Rp	1,905,600.00	Rp	1,900,000.00	1 Laporan	99.71%	100%
3			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp	1,905,600.00	Rp	1,905,000.00	1 Laporan	99.97%	100%
IV			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**Rp**	**166,622,100.00**	**Rp**	**165,011,529.00**	**100%**	**99.03%**	**100%**
1			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	Rp	42,000,000.00	Rp	41,978,325.00	1 Paket	99.95%	100%

2			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	Rp 1,905,600.00	Rp 1,905,000.00	1 Dok	99.97%	100%
3			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dok	Rp 1,905,600.00	Rp 1,899,000.00	0 Dok	99.65%	100%
4			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	Rp 1,905,600.00	Rp 1,905,000.00	1 Dok	99.97%	100%
5			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Rp 118,905,300.00	Rp 117,324,204.00	6 Orang	98.67%	100%
V			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**Rp 1,268,556,750.00**	**Rp 1,263,837,888.00**	**100%**	**99.63%**	**100%**
1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	Rp 3,750,000.00	Rp -	4 Paket	0.00%	100%
2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	4 Paket	Rp 86,347,250.00	Rp 86,288,000.00	4 Paket	99.93%	100%
3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	Rp 38,525,000.00	Rp 37,831,000.00	4 Paket	98.20%	100%
4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Junmlah Paket Bahan Logistik Kantor	15 Paket	Rp 52,846,300.00	Rp 52,752,000.00	15 Paket	99.82%	100%
5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	Rp 69,083,700.00	Rp 69,079,000.00	1 Paket	99.99%	100%
6			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 67,840,000.00	Rp 67,821,000.00	12 Laporan	99.97%	100%
7			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 950,164,500.00	Rp 950,066,888.00	12 Laporan	99.99%	100%
VI			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**CakupanPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan aturan**	**100%**	**Rp 13,650,000.00**	**Rp 13,619,700.00**	**100%**	**99.78%**	**100%**
1			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	Rp 13,650,000.00	Rp 13,619,700.00	2 Unit	99.78%	100%
VII			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan aturan**	**100%**	**Rp 230,903,400.00**	**Rp 230,826,000.00**	**100%**	**99.97%**	**100%**

1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp	14,704,800.00	Rp	14,695,000.00	1 Laporan	99.93%	100%
2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	Rp	35,343,000.00	Rp	35,278,000.00	1 Laporan	99.82%	100%
3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	Rp	180,855,600.00	Rp	180,853,000.00	1 Laporan	100.00%	100%
VIII			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan aturan**	**100%**	**Rp**	**57,590,000.00**	**Rp**	**56,611,956.00**	**100%**	**98.30%**	**100%**
1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Rp	33,750,000.00	Rp	33,546,871.00	1 Unit	99.40%	100%
2			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	Rp	8,840,000.00	Rp	8,165,000.00	1 Unit	92.36%	100%
3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	Rp	15,000,000.00	Rp	14,900,085.00	1 Unit	99.33%	100%
B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Tercapainya Nilai Kapabilitas APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Bima**	**3**	**Rp**	**884,656,500.00**	**Rp**	**846,664,000.00**	**3**	**95.71%**	**100%**
I			**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Internal**	**71**	**Rp**	**752,356,500.00**	**Rp**	**735,604,000.00**	**71**	**97.77%**	**100%**
1			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21	Rp	107,115,000.00	Rp	106,800,000.00	21	99.71%	100%
2			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Rp	89,475,000.00	Rp	88,080,000.00	2	98.44%	100%

3			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah	34	Rp	275,610,000.00	Rp	266,595,000.00	34	96.73%	100%
4			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Rp	-	Rp	-	1	-	-
5			Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan internal yang terbentuk	1	Rp	113,344,300.00	Rp	107,386,000.00	1	94.74%	100%
6			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12	Rp	166,812,200.00	Rp	166,743,000.00	12	99.96%	100%
II			**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Tersusunnya Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**7**	**Rp**	**132,300,000.00**	**Rp**	**111,060,000.00**	**7**	**83.95%**	**100%**
1			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengaduan masyarakat dan Instansi Pemerintah yang diselesaikan.	7	Rp	132,300,000.00	Rp	111,060,000.00	7	83.95%	100%
C			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Meningkatnya Nilai SAKIP**	**57,18**	**Rp**	**395,270,400.00**	**Rp**	**346,296,000.00**	**57,18**	**87.61%**	**100%**
I			**Pendampingan dan Asistensi**	Meningkatnya jumlah OPD yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	20	**Rp**	**395,270,400.00**	**Rp**	**346,296,000.00**	**20**	**87.61%**	**100%**
1			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	4	Rp	133,980,000.00	Rp	102,390,000.00	4	76.42%	100%
2			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah	8	Rp	27,000,000.00	Rp	26,460,000.00	8	98.00%	100%
3			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	4	Rp	182,390,400.00	Rp	168,351,000.00	4	92.30%	100%
4			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan ,Asistensi , Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.	4	Rp	51,900,000.00	Rp	49,095,000.00	4	94.60%	100%
			Total			**Rp**	**11,928,476,355.00**	**Rp**	**11,675,815,244.00**		**97.88%**	**100%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Khusus untuk Inspektorat sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, maupun IKK. Oleh karena itu Inspektorat menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta Norma dan standar pelayanan Inspektorat lainnya yang berkaitan.

Berikut tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat :

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Bima Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Persentase Capaian pada Tahun ke-			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20
	OPINI BPK		WTP		WTP	WTP	WTP	WTP								
	INDEK SAKIP		A		BB	BB	A	A								
1	Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan		100,00%		57,15 %	55,04 %	52,38 %	50,04 %	61,90 %	0,00%	0,00%	0,00%	108,31 %	0,00%	0,00%	0,00%
2	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP		Level 3		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	0,00%	0,00%	0,00%	100 %	100 %	0,00%	0,00%

Dari hasil evaluasi atas capaian hasil dari dua sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan

1) Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material.

Jumlah OPD yang dijadikan target sampai dengan tahun 2024 sebanyak 41 OPD atas temuan berulang dilihat dari beberapa belanja antara lain belanja perjalanan dinas, Makan Minum, Belanja BBM, belanja Honorarium, belanja pemeliharaan dan belanja bahan makanan dengan kriteria temuan lebih dari satu kali atas belanja tersebut. Adapun baseline data temuan tahun 2024 dimana OPD yang tidak mendapat temuan sebanyak 27 OPD atau hanya 14 OPD yang mendapatkan temuan yang berulang.

Pada tahun 2024 capaian Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material sebesar 34,15 % dari target sebesar 55,04 % sehingga capaian persentase di tahun 2024 sebesar 62 %. Adapun hasil evaluasi dari indikator Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material rata-rata capaian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sebesar 72,28% dari rata – rata target 46,33%. Dilihat dari capaian yang diperoleh besarnya capaian kinerja pada indikator kinerja ini disebabkan oleh semakin membaiknya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh OPD serta semakin membaiknya sistem pengendalian intern pemerintah yang yang dilakukan oleh OPD dilingkup pemerintah Kota Bima. Disamping semakin membaiknya beberapa aspek pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut diatas, target indikator yang disajikan masih rendah sehingga belum sebanding/seimbang dengan realisasi serta capaian yang telah diraih di tahun 2024. Untuk itu masih diperlukan perbaikan atas target untuk indikator dalam rencana strategis lima tahun yang akan datang mengingat pasti akan adanya temuan – temuan yang berulang yang ditemukan dalam pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh APIP maupun Eksternal (BPK) yang bersifat audit dengan tujuan tertentu.

2) Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK

Komitmen pemerintah daerah akan peran dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bima dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan dilihat dari komitmen pimpinan, komitmen pegawai sekaligus tim teknis TLHP dalam mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas jalannya organisasi dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bima. Keberhasilan dari peran dan tugas yang diemban oleh Inspektorat (internal auditor) salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Banyaknya temuan audit yang belum ditindaklanjuti merupakan tanggung jawab bagi auditi untuk penyelesaiannya dengan tetap dimonitor oleh APIP. Penyelesaian TLHP yang merupakan perwujudan kinerja Inspektorat Daerah Kota Bima tercermin dalam data pemantauan tindak lanjut tahun 2024. Hasil Pemantauan di tahun 2024 menunjukan bahwa tindak lanjut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi sebesar Rp. 1.033.350.533,00 dan yang sudah di tindaklanjuti sebesar Rp. 361.797.607,00 (35%) dan yang belum di tindak lanjuti sebesar Rp. 671.552.926,00 (65%). Sehingga realisasi persentase kinerja tindak lanjut sebesar 35 % dari target sebesar 47,61 % dan capaian persentase tindak lanjut tahun 2024 sebesar 74 % . Pada Tahun 2023 Hasil pemantauan menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi sebanyak 94 rekomendasi atau 86,31 % dari 130 rekomendasi, tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan belum ditindaklanjuti sebanyak 36 rekomendasi atau sebesar 8.63 %, serta rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi atau sebesar 0 %. Jika dilihat *progress* TLHP tahun 2023 sebanyak 21 rekomendasi atau 65,63 % dari target sebanyak 32 rekomendasi atau 90,00% dengan capaian sebesar 72,92% ini mengalami peningkatan walaupun belum mencapai target yang ditentukan. Upaya tindak lanjut belum maksimal dilakukan, terlihat masih adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, dan keterlambatan penyelesaian tindak lanjut (tidak tepat waktu) serta respon pejabat yang diperiksa atau

pejabat yang bertanggung jawab dalam hal tindak lanjut masih kurang. Dari gambaran tersebut diatas dapat dikatakan belum optimalnya dukungan/keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan TLHP sebagai wujud akuntabilitas.

3) Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi atau Pengendalian telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sesuai dengan pedoman BPKP, merincikan level maturitas SPIP menjadi enam tingkatan sebagai berikut:

Level	Keterangan	Interval Skor
Belum ada	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian intern.	Kurang dari 1,0 (0<skor<1,0)
Rintisan	Praktik pengendalian intern bersifat ad hoc dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan.	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0≤skor<2,0)
Berkembang	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektivitasnya.	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0≤skor<3,0)
Terdefinisi	Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai.	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0≤skor<4,0)
Terkelola dan terukur	Pengendalian intern diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi.	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0≤skor<4,5)
Optimum	Pengendalian intern diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis .	Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5≤skor≤5)

Pada tahun 2024 indikator Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima. Dari Target Level/Nilai hasil Quality Assurance *terdefinisi (3,80)* terealisasi *berkembang (2,84)* atau tercapai sebesar 73,96 %. hal tersebut

menunjukan tidak tercapainya target.

Adapun faktor tidak tercapainya target ini lebih disebabkan oleh beberapa faktor baik internal OPD maupun dari Inspektorat sendiri. Salah satu fungsi Inspektorat Kota Bima adalah melakukan koordinasi dan pembinaan terkait dengan penyelenggaraan SPIP dimana didalamnya terdapat lingkungan pengendalian sebagai salah satu unsur SPIP. Beberapa faktor internal OPD antara lain tidak tersedia petunjuk teknis dan atau Standar operasional prosedur atas program dan kegiatan, belum maksimal penerapan dari Standar operasional prosedur atas program dan kegiatan yang telah ada, kurangnya penerapan penegakan integritas dan nilai etika sehingga di tahun 2025 harus ditingkatkan lagi semangat kerja atas penyelenggaraan SPIP sehingga berpengaruh pada tercapainya indikator kinerja yang lebih baik lagi.

4) Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B

Indikator ini berguna untuk dapat mengukur sejauhmana OPD telah pertanggungjawaban kinerjanya pertahun sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi OPD. Penerapan SAKIP oleh OPD telah menunjukan peningkatan yang cukup baik hal tersebut tercermin dengan telah tercapainya target yang ditentukan dalam pengukuran persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B dimana Pada tahun 2024 capaian untuk indikator ini sebanyak 24 OPD atau 67,10 % dari total OPD dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 67,10 % pada tahun 2023 capaian untuk indikator ini sebanyak 18 OPD atau 62,07 % dari total OPD dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 62,07 % demikian pula pada tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 capaian tersebut mampu dipertahankan sebesar target keberhasilan yang ditentukan dengan realisasi 93,10% OPD atau capaian sebesar 100,00,% dengan target 27 OPD dari total sebanyak 29 OPD dengan rata capaian dengan nilai B. Keberhasilan capaian kinerja ini tentunya tidak terlepas dari peran seluruh unsur untuk menciptakan akuntabilas

kinerja instansi pemerintah sebagaimana dijelaskan atas capaian kinerja pemerintah daerah yang telah memenuhi target yang telah ditentukan diatas hal tersebut antara lain karena membaiknya perencanaan kinerja baik yang dilakukan oleh bappeda, Inspektorat maupun OPD terkait melalui pola asistensi, koordinasi, dan pembinaan serta reviu atas dokumen perencanaan sehingga dapat menyajikan tujuan, sasaran, indikator dan target - target yang dapat diukur, baik dalam dokumen RPJMD, Renstra, renja sampai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, dengan mulai membaiknya perencaanan tentunya berpengaruh terhadap membaiknya pemenuhan, dan pemanfaatan laporan kinerja yang lebih terarah sehingga program dan kegiatan serta penyerapan yang menunjang sasaran dan indikator kinerja dapat diukur, dengan demikian akuntabiltas kinerja instansi pemerintah khususnya OPD dapat dipertanggung jawabkan.

5) Persentase OPD yang dibangun Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM

untuk tahun 2024 belum dilaksanakan penilaian yang disebabkan oleh belum adanya penetapan terhadap OPD yang akan dinilai. Adapun faktor belum berhasilnya pencapaian ini antara lain belum membaiknya penerapan manajemen perubahan dalam organisasi pemerintahan khususnya OPD, belum optimalnya penataan tatalaksana organisasi pemerintahan khususnya OPD kordinatif, belum optimalnya penataan sistem manajemen sumber daya manusia pada pemerintah daerah, belum optimalnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan pengawasan serta belum optimalnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang dilakukan oleh OPD yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan capaian akuntabilitas kinerja instasi pemerintah sebagaimana dijelaskan diatas.

b. Meningkatnya nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

1) Level Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kota Bima

Salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur efektivitas peran unit audit intern di sektor publik adalah model penilaian yang disebut Internal Audit Capability Model (IA-CM) atau model kapabilitas audit

intern. Kapabilitas audit intern umumnya terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks.

Level kapabilitas unit audit intern adalah sebagai berikut : (1) initial; (2) infrastructure; (3) integrated; (4) managed; dan (5) optimizing. Setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit intern pada level tersebut. Dengan meningkatnya ukuran atau kompleksitas organisasi atau risiko terkait dengan kegiatan, maka membutuhkan kapabilitas audit intern yang lebih baik lagi. Pada masing-masing level kapabilitas di atas terdapat enam elemen audit intern, yaitu (1) peran dan layanan audit intern, (2) manajemen SDM, (3) praktik profesional, (4) manajemen kinerja dan akuntabilitas, (5) hubungan dan budaya organisasi, dan (6) struktur tata kelola. Elemen (1) sampai dengan (4) merupakan area peningkatan yang sepenuhnya bergantung pada upaya dari aktivitas audit intern sendiri untuk mewujudkannya. Sedangkan elemen (5) dan (6) juga mencakup hubungan aktivitas audit intern dengan organisasi yang didukungnya serta dengan lingkungan internal dan eksternal.

Pada tahun 2024 indikator Level Kapabilitas APIP terealisasi pada level 3 dari target Level 4 , dari hasil pencapaian ini kapabiltas APIP belum mencapai target yang ditentukan.

Keberhasilan capaian kinerja ini tentunya tidak terlepas dari peran seluruh unsur, serta terpenuhinya standar level kapabilitas sesuai dengan karakteristik dan kapabilitas unit audit intern yaitu :

- Kebijakan, proses, dan prosedur audit intern telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi.
- Manajemen serta praktik profesional unit audit intern telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan audit intern.
- Unit audit intern mulai menyelaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi organisasi.
- Unit audit intern berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen

risiko.

- Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan audit intern, independensi serta objektivitas.
- Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan standar audit.

2) Persentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas

Indikator kinerja ini merupakan salah satu indikator kinerja penting kerena merupakan cerminanan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia Inspektorat Kota Bima dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Perlu dijelaskan bahwa sebelum tahun 2015 belum terdapat tenaga fungsional auditor dan P2UPD pada Inspektorat Kota Bima, baru pada tahun 2015 dibuka inspassing oleh pemerintah pusat sehingga pada tahun 2015 jumlah auditor sebanyak 20 (dua puluh) orang (base data) diangkat dalam jabatan fungsional. Walaupun tenaga fungsional telah diangkat dalam jabatan fungsional namun belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis fungsional dan penjenjangan secara memadai. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 mulai adanya peningkatan kapabilitas melalui optimalisasi kerjasama dalam bentuk peningkatan kapabilitas APIP dengan BPKP selaku pembina APIP di daerah. Sehingga secara kualitas mulai terjadi peningkatan, hal tersebut ditunjukan dengan mulai meningkatnya tenaga fungsional yang memiliki sertifikat keahlian, penjenjangan. Walaupun secara kuantitas tenaga fungsional masih tertabas dimana sampai dengan tahun 2024 baru sebanyak 51 orang dari target yang diharapkan terpenuhi sampai dengan akhir masa renstra sejumlah 64 orang tenaga fungsional. hal tersebut disebabkan karena adanya mutasi dari jabatan fungsional kejabatan struktural, meninggal dunia, terbatasnya rekrutmen oleh pemerintah daerah, masih kurangnya minat ASN lain untuk menduduki jabatan fungsional, kurangnya penghargaan dan pengembangan karir yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada tenaga fungsional Inspektorat, lebih lanjut hal lainnya adalah terbatasnya anggaran diklat bagi yang telah menduduki jabatan fungsional terutama tenaga fungsional P2UPD dan tenaga fungsional umum. Namun secara keseluruhan tenaga fungsional telah mengikuti dan memiliki sertifikat untuk diangkat dalam jabatan fungsional telah

tercapai sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 100% atau sebanyak 51 orang ditahun 2024. Namun bila kita dibandingkan jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional baik Auditor maupun P2UPD pertahunnya mengalami peningkatan hal tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran yang dialokasikan untuk itu dan adanya peluang yang dibuka oleh pemerintah pusat melalui pola Inspassing, serta semakin membaiknya pola komunikasi dan koordinasi antara sesama APIP terutama BPKP perwakilan provinsi NTB selaku pembina APIP yang ada di NTB, terkait dengan penyelenggaraan diklat fungsional sehingga dapat merangsang minat sumberdaya aparatur baik didalam maupun diluar APIP Kota Bima untuk menjadi tenaga fungsional APIP diKota Bima.

Disamping gambaran sasaran dan indikator pelayanan Inspektorat sebagaimana di uraikan diatas, maka salah satu yang aspek yang sangat menentukan terlaksananya kinerja pelayanan adalah ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kinerja tersebut, maka berikut ini disajikan anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan inspektorat Kota Bima dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024

Berikut disajikan data realisasi anggaran pada Inspektorat Kota Bima tahun 2024.

Tabel : 2.2.2
Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Bima
Capaian Realisasi Anggaran Program/Kegiatan

NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI	PERSEN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Rp 10,648,549,455.00**	**Rp 10,482,855,244.00**	**98.44%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Rp 13,339,200.00**	**Rp 13,183,000.00**	**98.83%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1,905,600.00	Rp 1,861,000.00	97.66%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1,905,600.00	Rp 1,890,000.00	99.18%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1,905,600.00	Rp 1,882,000.00	98.76%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 1,905,600.00	Rp 1,886,000.00	98.97%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 1,905,600.00	Rp 1,890,000.00	99.18%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 1,905,600.00	Rp 1,878,000.00	98.55%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1,905,600.00	Rp 1,896,000.00	99.50%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Rp 8,892,171,205.00**	**Rp 8,734,078,171.00**	**98.22%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8,725,438,405.00	Rp 8,567,372,171.00	98.19%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 161,016,000.00	Rp 161,012,000.00	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1,905,600.00	Rp 1,897,000.00	99.55%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 1,905,600.00	Rp 1,893,000.00	99.34%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 1,905,600.00	Rp 1,904,000.00	99.92%

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Rp**	**5,716,800.00**	**Rp**	**5,687,000.00**	**99.48%**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	1,905,600.00	Rp	1,882,000.00	98.76%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	1,905,600.00	Rp	1,900,000.00	99.71%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	1,905,600.00	Rp	1,905,000.00	99.97%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rp**	**166,622,100.00**	**Rp**	**165,011,529.00**	**99.03%**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	42,000,000.00	Rp	41,978,325.00	99.95%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	1,905,600.00	Rp	1,905,000.00	99.97%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp	1,905,600.00	Rp	1,899,000.00	99.65%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp	1,905,600.00	Rp	1,905,000.00	99.97%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	118,905,300.00	Rp	117,324,204.00	98.67%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Rp**	**1,268,556,750.00**	**Rp**	**1,263,837,888.00**	**99.63%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	3,750,000.00	Rp	-	0.00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	86,347,250.00	Rp	86,288,000.00	99.93%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	38,525,000.00	Rp	37,831,000.00	98.20%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	52,846,300.00	Rp	52,752,000.00	99.82%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	69,083,700.00	Rp	69,079,000.00	99.99%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	67,840,000.00	Rp	67,821,000.00	99.97%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	950,164,500.00	Rp	950,066,888.00	99.99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp**	**13,650,000.00**	**Rp**	**13,619,700.00**	**99.78%**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	13,650,000.00	Rp	13,619,700.00	99.78%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp**	**230,903,400.00**	**Rp**	**230,826,000.00**	**99.97%**

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	14,704,800.00	Rp	14,695,000.00	99.93%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	35,343,000.00	Rp	35,278,000.00	99.82%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	180,855,600.00	Rp	180,853,000.00	100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp**	**57,590,000.00**	**Rp**	**56,611,956.00**	**98.30%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	33,750,000.00	Rp	33,546,871.00	99.40%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	8,840,000.00	Rp	8,165,000.00	92.36%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	15,000,000.00	Rp	14,900,085.00	99.33%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Rp**	**884,656,500.00**	**Rp**	**846,664,000.00**	**95.71%**
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Rp**	**752,356,500.00**	**Rp**	**735,604,000.00**	**97.77%**
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp	107,115,000.00	Rp	106,800,000.00	99.71%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp	89,475,000.00	Rp	88,080,000.00	98.44%
Reviu Laporan Kinerja	Rp	275,610,000.00	Rp	266,595,000.00	96.73%
Reviu Laporan Keuangan	Rp	-	Rp	-	-
Kerja Sama Pengawasan Internal	Rp	113,344,300.00	Rp	107,386,000.00	94.74%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp	166,812,200.00	Rp	166,743,000.00	99.96%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Rp**	**132,300,000.00**	**Rp**	**111,060,000.00**	**83.95%**
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp	132,300,000.00	Rp	111,060,000.00	83.95%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Rp**	**395,270,400.00**	**Rp**	**346,296,000.00**	**87.61%**
Pendampingan dan Asistensi	**Rp**	**395,270,400.00**	**Rp**	**346,296,000.00**	**87.61%**

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	133,980,000.00	Rp	102,390,000.00	76.42%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp	27,000,000.00	Rp	26,460,000.00	98.00%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp	182,390,400.00	Rp	168,351,000.00	92.30%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp	51,900,000.00	Rp	49,095,000.00	94.60%
Total	**Rp**	**11,928,476,355.00**	**Rp**	**11,675,815,244.00**	**97.88%**

2.3. Isu isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Inspektorat adalah unsur pendukung tugas Wali Kota di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88), maka Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota Bima melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Bima tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan maupun *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal, paradigmanya menjadi berubah yang tadinya sebagai pemeriksa saat ini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernaung di dalam Pemerintah Kota Bima. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Bima

Berdasarkan tugas pokok tersebut di atas, lnspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan perencanaan program pengawasan
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
c. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota dan berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 95 Tahun 2022 menetapkan susunan organisasi lnspektorat sebagai berikut:

a. Unsur Pimpinan adalah lnspektur.
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat yang terdiri dari:

- Sekretaris
- Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

c. Unsur Pelaksana adalah lnspektur Pembantu Wilayah, yang terdiri dari
   - lrban Wilayah I
   - lrban Wilayah II
   - Irban Investigasi

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat Kota Bima mulai melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelengara Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelengara Urusan Pemerintah Daerah maka ada 2 kelompok jabatan fungsional di Inspektorat, antara lain :

1. Jabatan Fungsional Auditor
2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

1. Faktor Internal
   a. Masih belum efektifnya dampak pemeriksaan, hal ini dapat terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dalam setiap pemeriksaan berkala, adapun yang mempengaruhi masalah inia dalah kurangnya jangka waktu pemeriksaan dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia untuk Inspektorat.
   b. Masih kurangnya pelatihan dan diklat untuk peningkatan kompetensi bagi Auditor dan P2UPD yang dimiliki oleh Inspektorat yaitu sebanyak 5 1 orang,
   c. Kurangnya dukungan anggaran dari Pemerintah dalam hal Sarana dan Prasarana yang kurang memadahi sehingga sangat

berpengaruh sekali dengan etos kerja pegawai, kerahasiaan kerja, keamanan penyimpanan Arsip dan dokumen.

2. Faktor Eksternal
   a. Kualitas Auditor Inspektorat Daerah yang rata-rata masih ada pada level 1 (Initial) dan 2 (Insfrastructure) seharusnya Auditor diInspektorat Daerah sudah berada pada level 3 (Integrated) atau level 4 (Managed) atau 5 (Optimized), hal ini disebabkan karena masih terbatasnya penyertaan Auditor dan P2UPD dalam pelaksanaan diklat teknis kepengawasan.
   b. Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang masih belum memenuhi Standart Pemeriksaan, hal ini disebabkan belum pernah dilaksanakannya Bintek Penulisan LHP yang Efektif.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Bima dengan permasalahan tersebut diatas, Inspektorat Kota Bima memiliki dukungan sumber daya aparatur dan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Sumber Daya Aparatur

   Jumlah keseluruhan pegawai Inspektorat Kota Bima adalah :

Eselon II	:	1	Orang
Eselon III	:	3	Orang
Eselon IV	:	1	Orang
Jabatan Fungsional	:	49	Orang
Staf	:	6	Orang
Jumlah		60	Orang

   Bedasarkan tingkat pendidikan dapat dikatagorikan sebagai berikut:

Pendidikan Strata III	:	0	Orang
Pendidikan Strata II	:	9	Orang
Pendidikan Strata I	:	48	Orang
Pendidikan D3/Sarjana Muda	:	2	Orang
Pendidikan SMA	:	1	Orang
Jumlah		60	Orang

   Dari jumlah 60 pegawai, Inspektorat Kota Bima mempunyai tenaga pemeriksa dan telah memiliki sertifikat serta telah diangkat dalam jabatan fungsional sebanyak 49 orang :

1. 22 Orang Auditor
2. 24 Orang PPUPD

Dengan pembagian kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD). Pada Inspektorat Kota Bima dengan rincian sebagai berikut :

1. Jabatan Fungsional Auditor :
   a. Auditor Madya : 3 Orang
   b. Auditor Muda : 12 Orang
   c. Auditor Pertama : 5 Orang
   d. Auditor Terampil : 2 Orang
2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) :
   a. Pengawas Pemerintahan Madya : 3 Orang
   b. Pengawas Pemerintah Muda : 13 Orang
   c. Pengawas Pemerintah Pertama : 8 Orang

2. Sarana dan prasarana .

Sarana dan prasarana digunakan untuk pendukung kegiatan operasional Inspektorat. Adapun sarana dan prasara yang dimiliki Inspektorat Kota Bima antara lain:

a. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet dan mesin faksimili;
c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis pengawasan, dilengkapi dengan ketersediaan printer,
d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital dan LCD proyektor;
e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemaries, air conditioner (AC), dispenser, kipasangin dan televisi;
f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat dan sumber daya yang dimiliki, maka dapat ditentukan isu-isu penting

dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Mewujudkan Inspektorat sebagai Counsultant Partner.
4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

Sedangkan tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawasan dan Pemerintah Daerah pada umumnya.
2. Kurangnya tanggapan Objek Pemeriksaan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan.

Dari uraian tersebut diatas, Inspektorat Kota Bima mengambil langkah – langkah penyelesaian sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah tenaga aparatur pemeriksa melalui rekrutmen pegawai atau mutasi pegawai;
2. Peningkatan kompetensi melalui diklat fungsional Pembentukan dan Penjenjangan JFA;
3. Peningkatan kompetensi melalui diklat teknis substantif;
4. Pengoptimalan jumlah anggaran untuk kegiatan pengawasan;
5. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak yang masih mempunyai tunggakan tindak lanjut;
6. Perlu adanya Gelar pengawasan secara berkala dan Rapat Pemutahiran data temuan hasil pemeriksaan;
7. Melakukan pendekatan kepada Tim TAPD untuk meningkatkan lagi alokasi anggaran Pengawasan Inspektorat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, disamping permasalahan/kendala dan isu – isu Inspektorat Kota Bima mempunyai peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Adanya program pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) secara periodik bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
2. Adanya dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dari Walikota Bima;

3. Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklatwas BPKP, Pusbin Depdagri serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan;
4. Adanya semangat Pemerintah Kota Bima untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menyelenggaraan tata kelola pemerinatahn yang baik;
5. Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan Kinerja Pemerintah Kota Bima;
6. Adanya komitmen Pemerintah Daerah tentang Kepemerintahan yang baik.

Tantangan, isu dan Peluang tersebut harus dijadikan acuan bagi Inspektorat Kota Bima untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bima.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dalam pelaksanaanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengalami perubahan di sesuaikan dengan kemampuan pendapatan dan besaran belanja maka perlu diadakan reviu terhadap Rancangan Kerja Awal RKPD . Adapun reviu tersebut tergambar pada tabel berikut:

TABEL. 2.4.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 KOTA BIMA

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Prgram/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Prgram/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Kota Bima**	**Prosentase administrasi perkantoran tersedia.**	**100,00%**	**1.306.899.550**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Bima**	**Prosentase administrasi perkantoran tersedia.**	**100,00%**	**1.306.899.550**
1 Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bima	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terlayani	1100 EKs	248.100.000,00	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bima	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terlayani	1100 EKs	248.100.000,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	Persentase pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terlayani	100%	18.500.000,00	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	Persentase pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terlayani	100%	18.500.000,00
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	jumlah ruangan dan peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara	10 Unit	3.600.000,00	3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	jumlah ruangan dan peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara	10 Unit	3.600.000,00
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan yang terlayani	6 Unit	4.950.000,00	4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan yang terlayani	6 Unit	4.950.000,00
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	2 Dok	64.644.000,00	5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	2 Dok	64.644.000,00
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Bima	Jumlah ruangan yang tertata dan terpelihara kebersihannya	8 Ruangan	33.683.800,00	6 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Bima	Jumlah ruangan yang tertata dan terpelihara kebersihannya	8 Ruangan	33.683.800,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Bima	Jumlah Peralatan kerja yang berfungsi normal	10 Unit	4.800.000,00	7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Bima	Jumlah Peralatan kerja yang berfungsi normal	10 Unit	4.800.000,00
8 Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia	1485 BH/PCS/Rim	39.443.000,00	8 Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia	1485 BH/PCS/Rim	39.443.000,00
9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Jumlah kertersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan	155.000 Lembar	59.053.750,00	9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Jumlah kertersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan	155.000 Lembar	59.053.750,00
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Jumlah ketersediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	58.700.000,00	10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Jumlah ketersediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	58.700.000,00
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Jumlah bahan bacaan	5 Dok	33.100.000,00	11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Jumlah bahan bacaan	5 Dok	33.100.000,00
12 Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Jumlah tamu yang terlayani dengan penyediaan makan dan minum	75 Orang	94.125.000,00	12 Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Jumlah tamu yang terlayani dengan penyediaan makan dan minum	75 Orang	94.125.000,00
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kota	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi	16 laporan	644.200.000,00	13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kota	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi	16 laporan	644.200.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Prgram/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Prgram/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Kota Bima**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional APIP**	**100,00%**	**85.189.080**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Bima**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional APIP**	**100,00%**	**85.189.080**
1 Pengadaan Mebeleur	Kota Bima	Jumlah Mebeleur Kantor yang tersedia	10 Unit	35.200.000,00	1 Pengadaan Mebeleur	Kota Bima	Jumlah Mebeleur Kantor yang tersedia	10 Unit	35.200.000,00
2 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Kota Bima	Jumlah ruangan dan peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara	8 Ruangan	22.000.000,00	2 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Kota Bima	Jumlah ruangan dan peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara	8 Ruangan	22.000.000,00
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan yang terlayani	6 Unit	27.989.080,00	3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan yang terlayani	6 Unit	27.989.080,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Kota Bima**	**Jumlah aparatur yang tidak mendapatkan sanksi disiplin**	**51 Org**	**12.500.000**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Kota Bima**	**Jumlah aparatur yang tidak mendapatkan sanksi disiplin**	**0 Org**	**-**
1 Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya	Kota Bima	Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk ASN	52 Lembar	12.500.000,00	1 Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya	Kota Bima	Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk ASN	0 Lembar	-
2 Pengadaan Pakaian Olahraga	Kota Bima	Jumlah pakaian olahraga yang tersedia untuk ASN			2 Pengadaan Pakaian Olahraga	Kota Bima	Jumlah pakaian olahraga yang tersedia untuk ASN		

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Prgram/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Prgram/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Kota Bima**	**Jumlah APIP yang mengikuti diklat pembentukan/Inpasing/diklat PIM**	**12,50%**	**53.050.000**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kota Bima**	**Jumlah APIP yang mengikuti diklat pembentukan/Inpasing/diklat PIM**	**12,50%**	**53.050.000**
1 Pelaksanaan Penilaian AKJG	Kota Bima	Jumlah ASN Fungsional yang dinilai AKJG	32 Orang	22.050.000,00	1 Pelaksanaan Penilaian AKJG	Kota Bima	Jumlah ASN Fungsional yang dinilai AKJG	32 Orang	22.050.000,00
2 Pengelolaan Website dan aplikasi	Kota Bima	Jumlah Website yang tertangani	10 Website	31.000.000,00	2 Pengelolaan Website dan aplikasi	Kota Bima	Jumlah Website yang tertangani	10 Website	31.000.000,00
3 Seminar,Sipmposium,Lokakarya dan pertemuan ilmiah	Kota Bima	Jumlah APIP yang bersertifikasi			3 Seminar,Sipmposium,Lokakarya dan pertemuan ilmiah	Kota Bima	Jumlah APIP yang bersertifikasi		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Kota Bima**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan APIP**	**100,00%**	**220.550.000**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kota Bima**	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan APIP**	**100,00%**	**75.060.000**
1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan Keuangan	2 Dok	29.350.000,00	1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan Keuangan	2 Dok	13.010.000,00
2 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terselesaikan	5 Dok	135.350.000,00	2 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terselesaikan	5 Dok	36.274.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Prgram/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Prgram/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***
3 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Akuntabiltas Kinerja yang terselesaikan	3 Dok	55.850.000,00	3 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Akuntabiltas Kinerja yang terselesaikan	3 Dok	25.776.000,00
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	**Kota Bima**	**Laporan Keuangan Pemerintah Sesuai dengan SAP**	**Sesuai**	**862.050.000**	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota**	**Kota Bima**	**Laporan Keuangan Pemerintah Sesuai dengan SAP**	**Sesuai**	**731.725.000**
1 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bima	Jumlah OPD yang laporan keuangannya sesuai dengan SAP dan SPI	34 OPD	68.825.000,00	1 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bima	Jumlah OPD yang laporan keuangannya sesuai dengan SAP dan SPI	34 OPD	48.400.000,00
2 Reviu Penyerapan anggaran	Kota Bima	Persentase Perbaikan atas Rekomendasi oleh SKPD	100,00%	72.075.000,00	2 Reviu Penyerapan anggaran	Kota Bima	Persentase Perbaikan atas Rekomendasi oleh SKPD	100,00%	172.250.000,00
3 Reviu Penyerapan pengadaan barang dan jasa	Kota Bima	Persentase Perbaikan atas Rekomendasi oleh SKPD	99,00%	138.825.000,00	3 Reviu Penyerapan pengadaan barang dan Jasa	Kota Bima	Persentase Perbaikan atas Rekomendasi oleh SKPD	99,00%	135.975.000,00
4 Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	Kota Bima	Jumlah SKPD yang dievaluasi	99,00%	44.075.000,00	4 Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	Kota Bima	Jumlah SKPD yang dievaluasi	99,00%	32.725.000,00
5 Reviu LAKIP Kota Bima	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan hasil reviu SAKIP	1 Dok	72.075.000,00	5 Reviu LAKIP Kota Bima	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan hasil reviu SAKIP	1 Dok	56.750.000,00
6 Reviu RKA	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan hasil reviu RKA	1 Dok	44.075.000,00	6 Reviu RKA	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan hasil reviu RKA	1 Dok	32.325.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Prgram/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Prgram/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***
7 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	1 Dok	74.325.000,00	7 Penilaian mandiri Reformasi birokrasi	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	1 Dok	57.825.000,00
8 Verivikasi Pelaporan Rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Kota Bima	Jumlah Dokumen laporan yang dilakukan verifikasi	2 Dok	107.625.000,00	9 Verivikasi Pelaporan Rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Kota Bima	Jumlah Dokumen laporan yang dilakukan verifikasi	2 Dok	53.025.000,00
9 Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan hasil Evaluasi SAKIP	1 Dok	107.825.000,00	4 Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan hasil Evaluasi SAKIP	1 Dok	86.925.000,00
10 Evaluasi pelayanan publik	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan hasil Evaluasi Pelayanan Publik	2 Dok	132.325.000,00	8 Evaluasi pelayanan publik	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan hasil Evaluasi Pelayanan Publik	2 Dok	55.525.000,00
11 Evaluasi perencanaan dan penganggaran	Kota Bima	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran hasil evaluasi		-	10 Evaluasi perencanaan dan penganggaran	Kota Bima	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran hasil evaluasi		
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	**Kota Bima**	**Porsentase Menurunnya Temuan APIP dan BPK**	**88,24%**	**2.363.975.000**	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Kota Bima**	**Porsentase Menurunnya Temuan APIP dan BPK**	**88,24%**	**1.774.525.000**
1 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Kota Bima	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (Operasional)	37 Dok	938.450.000,00	1 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Kota Bima	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (Operasional)	37 Dok	578.860.000,00
2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan	8 Dok	160.600.000,00	2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan	8 Dok	308.060.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kota Bima	Jumlah OPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang dikawal (Probity dan Monev)	6 OPD	247.950.000,00	3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kota Bima	Jumlah OPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang dikawal (Probity dan Monev)	6 OPD	53.700.000,00
4 Invetarisasi temuan pengawasan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Invetarisasi temuan pengawasan	2 Dok	53.000.000,00	4 Inverisasi temuan pengawasan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Invetarisasi temuan pengawasan	2 Dok	25.175.000,00
5 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Kota Bima	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan PTL Atas hasil Pemeriksaan Kruneg	125 Dok	307.500.000,00	5 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Kota Bima	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan PTL Atas hasil Pemeriksaan Kruneg	125 Dok	239.000.000,00
6 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi pengawasan	17 Dok	170.000.000,00	6 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi pengawasan	17 Dok	230.505.000,00
7 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan	4 Dok	195.075.000,00	7 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan	4 Dok	56.475.000,00
8 Pemantauan LHKASN	Kota Bima	Persentase SN yang menyampaikan LHKASN dan LHKPN	65%	123.000.000,00	8 Pemantauan LHKASN	Kota Bima	Persentase SN yang menyampaikan LHKASN dan LHKPN	65%	60.900.000,00
9 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kapabilitas APIP	Kota Bima	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP	3 Dok	59.075.000,00	9 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kapabilitas APIP	Kota Bima	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP	3 Dok	44.525.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Prgram/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Prgram/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***
10 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Kota Bima	Jumlah dokumen Sistem dan prosedur yang terselesaikan	6 Dok	74.325.000,00	10 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Kota Bima	Jumlah dokumen Sistem dan prosedur yang terselesaikan	6 Dok	130.925.000,00
11 Pengendalian manajemen pelaksanaan Kapabilitas APIP	Kota Bima	Jumlah Laporan Pelaksanaan Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang terpenuhi untuk Level 3	1 Dok	35.000.000,00	11 Pengendalian manajemen pelaksanaan Kapabilitas APIP	Kota Bima	Jumlah Laporan Pelaksanaan Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang terpenuhi untuk Level 3	1 Dok	46.400.000,00
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	**Kota Bima**	**Persentase ASN APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, subtansi, penjenjangan, dan profesi**	**66,67%**	**374.940.000**	**Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	**Kota Bima**	**Persentase ASN APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, subtansi, penjenjangan, dan profesi**	**66,67%**	**622.060.000**
1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Kota Bima	Jumlah APIP yang mengikuti Pendidikan penjenjangan	2 Orang	75.000.000,00	1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Kota Bima	Jumlah APIP yang mengikuti Pendidikan penjenjangan	2 Orang	356.620.000,00
2 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Kota Bima	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat Subtantif	32 Orang	180.000.000,00	2 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Kota Bima	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat Subtantif	32 Orang	199.080.000,00
3 Bimtek Pengawasan Operasional	Kota Bima	Jumlah APIP yang mengikuti Bimtek Pengawasan Operasioanl	32 Orang	119.940.000,00	3 Bimtek Pengawasan Operasional	Kota Bima	Jumlah APIP yang mengikuti Bimtek Pengawasan Operasioanl	32 Orang	66.360.000,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Bima tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kota belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholders.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi NTB

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut diatas maka kebijakan nasional pengawasan terdiri dari dua hal pokok yaitu pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi : pembinaan kepada propinsi dilakukan oleh Menteri, untuk pembinaan umum; dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian, untuk pembinaan teknis; sedangkan pembinaan untuk kabupaten dan Kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis. Adapun pembinaan Umum yang menjadi kebijakan nasional adalah sebagai berikut :

a. pembagian urusan pemerintahan;
b. kelembagaan daerah;
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d. keuangan daerah;
e. pcmbangunan daerah;
f. pelayanan publik di daerah;
g. kerja sama daerah;
h. kebijakan daerah;
i. kepala daerah dan DPRD; dan
j. bcntuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pembinaan teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan ke daerah kabupaten/kota.

Disamping kebijakan nasional terkait pembinaan umum dan teknis terdapat pula kebijakan pengawasan penyelenggaraan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan propinsi, kabupaten dan Kota yang dilakukan pada setiap tingkatan berupa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi dilakukan oleh Menteri, untuk pengawasan umum; dan menteri teknis/kepala

lembaga pemerintah non kementerian, untuk pengawasan teknis; sedangkan pengawasan untuk kabupaten dan Kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis. Adapun pengawasan Umum yang menjadi kebijakan nasional adalah sebagai berikut :

a. pembagian urusan pemerintahan;
b. kelembagaan daerah;
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d. keuangan daerah;
e. pembangunan daerah;
f. pelayanan publik di daerah;
g. kerja sama daerah;
h. kebijakan daerah;
i. kepala daerah dan DPRD; dan
j. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pengawasan teknis sebagaimana dijelaskan diatas meliputi:

a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelalsanaan norna, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Sebagai bentuk inplementasi dari kebijakan nasional sebagaimana dijelaskan diatas maka perlu didukung oleh perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan dalam hal ini adalah Inspektorat Kota Bima sebagai pembantu Walikota Bima dalam melaksanakan fungsi pengawasan didaerah oleh karena itu tentunya harus memiliki Tujuan dan sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, maka Inspektorat Kota Bima Sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan, lnspektorat

Kota Bima dituntut untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024 - 2026 yaitu ***" Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri "*.** dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah tepatnya Misi ketiga yaitu ***Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*** sebagai bagian dari rencana strategi organisasi Inspektorat Kota Bima. Dengan adanya Visi dan Misi pembangunan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai sebagai alat untuk menguasai dan mengendalikan jalanya organisasi Inspektorat sehingga manajemen (pengelolaan) sesuai dengan tujuan organisasi yaitu pengawasan yang efiktif, efesien dan tepat guna sehingga tercipta Kota Bima yang berkualitas dan setara menuju masyarakat yang maju dan mandiri.

Untuk mencapai efektifitas pengawasan yang lebih tinggi Inspektorat Daerah Kota Bima dalam melaksanakan tugas pengawasan perlu memperhatikan kode etik dan standar pengawasan sebagai salah satu pedoman selaku Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP). Adapun standar pemeriksaan APFP adalah sebagai berikut:

1. Standar umum
2. Standar Koordinasi dan kendali mutu
3. Standar pelaksanaan
4. Standar laporan
5. Standar tindak lanjut.

Demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Inspektorat Kota Bima akan berupaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Inspektorat dengan meningkatkan kompetensi aparatur dan menambah kuantitas aparatur. Sehingga diharapkan *output* dari pemeriksaan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan akan semakin mendekati Standar Pelaporan Audit.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Bima tentunya mengacu pada tujuan dan sasaran dalam renstra Inspektorat oleh karena itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Bima dalam pelaksanaan RENJA tahun 2025 ke depan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Sasaran

Sesuai dengan tuiuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penjabaran dalam bentuk sasaran yang harus dipenuhi dalam ukuran waktu tertentu (tahunan) yang merupakan rencana tindakan aksi dan alokasi sumber daya dan dana yang tersedia. Untuk itu lnspektorat Kota Bima menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan.
2. Meningkatnya Nilai SAKIP.
3. Meningkatnya Nilai LPPD

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan target kinerja sasaran untuk setiap tahunnya selama tahun perencanaan strategis, berikut kami sajikan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Kota Bima :

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
			1 2024	2 2025	3 2026
1	2	3	4	5	6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Bima yang menjadi Tanggung Jawab Inspektorat Kota Bima					
Indeks Reformasi Birokrasi	Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan	Persentase Penurunan temuan Hasil Pengawasan	38,10%	47,62%	55,04%
	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP	Persentase peningkatan Nilai Kapabilitas APIP	28,57%	38,10%	57,18%
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-**		
			1 2024	**2 2025**	**3 2026**
1	2	3	4	5	6

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat					
Indeks Reformasi Birokrasi	Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan	Persentase Penurunan temuan Hasil Pengawasan	38,10%	47,62%	55,04%
		Rumus Target : Jumlah OPD dengan total jumlah (42 OPD) termasuk bagian dan kecamatan dikali 100%			
		Realisasi : Realisasi Jumlah OPD yang tidak mendapat temuan dikali 100%			
		Capaian : Realisasi Jumlah OPD yang tidak mendapat temuan tahun N dibagi target jumlah OPD yang tidak mendapat temuan tahun N dikali 100%			
		Persentase tindaklanjut penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan	80,04%	82,88%	88,61%
		Terget : ditentukan dengan persentase yang diharapkan tercapai Pertahun			
		Realisasi : Jumlah penyelesaian temuan yang di tindaklanjuti sampai dengan Tahun N dibagi dengan total jumlah temuan sampai dengan tahun N (temuan APIP dan BPK) dikali 100%			
		Capaian : Persentase realisasi penyelesaian temuan yang ditindak lanjut dibagi persentase target dikali 100%			
	Meningkatnya Nilai SAKIP	Persentase peningkatan Nilai SAKIP	28,57%	38,10%	57,18%
		Rumus Target : Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi target Tahun N dikali 100%			
		Rumus Realisasi : Jumlah Perangkat Daerah yang mengalami peningkatan nilai dikali 100%			
		Rumus Capaian : Realisasi tahun N dibagi taget tahun N dikali 100%			
	Meningkatnya Nilai LPPD	Persentase peningkatan Nilai LPPD	28,57%	38,10%	57,18%
		Rumus Target : Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi target Tahun N dikali 100%			
		Rumus Realisasi : Jumlah Perangkat Daerah yang mengalami peningkatan nilai dikali 100%			
		Rumus Capaian : Realisasi tahun N dibagi taget tahun N dikali 100%			

3.3 Program Dan Kegiatan

Untuk mencapai visi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, dan visioner perlu didukung oleh tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bima sebagai acuan unsur organisasi Inspektorat dan menjalankan tugas dan fungsi dalam kurun 5 tahun dan tahunan. Adapun, indikator Kinerja Utama dari Sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima serta program, kegiatan dan sub kegiatan serta sasarannya masing – masing Sebagai Berikut :

Tabel 3.3.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bima Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
			1 2024	2 2025	3 2026
1	2	3	4	5	6
Indeks Reformasi Birokrasi	Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan	Persentase Penurunan temuan Hasil Pengawasan	38,10%	47,62%	55,04%
	Meningkatnya Nilai SAKIP	Persentase peningkatan Nilai SAKIP	28,57%	38,10%	57,18%
	Meningkatnya Nilai LPPD	Persentase peningkatan Nilai LPPD	28,57%	38,10%	57,18%
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat					
Indeks Reformasi Birokrasi	Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan	Persentase Penurunan temuan Hasil Pengawasan	38,10%	47,62%	55,04%
		Rumus Target : Jumlah OPD dengan total jumlah (42 OPD) termasuk bagian dan kecamatan dikali 100%			
		Realisasi : Realisasi Jumlah OPD yang tidak mendapat temuan dikali 100%			
		Capaian : Realisasi Jumlah OPD yang tidak mendapat temuan tahun N dibagi target jumlah OPD yang tidak mendapat temuan tahun N dikali 100%			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
			1 2024	2 2025	3 2026
1	2	3	4	5	6
		Persentase tindaklanjut penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan	80,04%	82,88%	88,61%
		Terget : ditentukan dengan persentase yang diharapkan tercapai Pertahun			
		Realisasi : Jumlah penyelesaian temuan yang di tindaklanjuti sampai dengan Tahun N dibagi dengan total jumlah temuan sampai dengan tahun N (temuan APIP dan BPK) dikali 100%			
		Capaian : Persentase realisasi penyelesaian temuan yang ditindak lanjut dibagi persentase target dikali 100%			
	Meningkatnya Nilai SAKIP	Persentase peningkatan Nilai SAKIP	28,57%	38,10%	57,18%
		Rumus Target : Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi target Tahun N dikali 100%			
		Rumus Realisasi : Jumlah Perangkat Daerah yang mengalami peningkatan nilai dikali 100%			
		Rumus Capaian : Realisasi tahun N dibagi taget tahun N dikali 100%			
	Meningkatnya Nilai LPPD	Persentase peningkatan Nilai LPPD	28,57%	38,10%	57,18%
		Rumus Target : Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi target Tahun N dikali 100%			
		Rumus Realisasi : Jumlah Perangkat Daerah yang mengalami peningkatan nilai dikali 100%			
		Rumus Capaian : Realisasi tahun N dibagi taget tahun N dikali 100%			

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bima sebagaimana diterakan dalam tabel 3.3.1 diatas maka program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung utama yang diperlukan sebagai tolak ukur Rencana Kinerja tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3.2
Indikator Kinerja Utama dan Program Kegiatan Utama Tahun 2025

Misi RPJMD	Sasaran Kota	IKU Kota	Target	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran OPD	IKU OPD	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	23
Misi ke-3: Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	**Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**52,97**	**Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**52,97**	**1 Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan**	**1.1 Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan**	**52,38**	**1 Program Penyelenggaraan Pengawasan**			**Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan**	**Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan**	**52,38%**	**702.843.700**
											Penyelenggaraan Pengawasan Internal		**Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti**	**38**	**607.825.300**
												Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	64	176.741.800
												Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1	21.258.200
												Reviu Laporan Kinerja	Terlaksanya Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah	13	88.961.000
												Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	34.155.100
												Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal Terbentuk	1	72.648.600
												Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	28	214.060.600

														Penyelengaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		**Terlaksanya Penyelengaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah Rekomendasi Penyelengaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti**	6	**95.018.400**
															Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	1	40.682.800
															Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5	54.335.600
								2	**Meningkatnya Nilai SAKIP dan LPPD**	**2.1 Persentase Peningkatan Nilai SAKIP dan LPPD**	**42,86**	**1**	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**			**Meningkatnya Nilai SAKIP dan LPPD Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Nilai SAKIP dan LPPD Perangkat Daerah**	**42,86%**	39.319.900
														Pendampingan dan Asistensi		**Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi**	**30**	39.319.900
															Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanaya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	1	8.489.900
															Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang di Asistensi Reformasi Birokrasi	1	15.190.500
															Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang di lakukan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	1	15.639.500

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2025

INSPEKTORAT KOTA BIMA

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Kota Bima dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Adapun program dan kegiatan dalam rencana kerja tahun anggaran 2025 terdiri dari 3 (tiga) program dengan kegiatan pendukung sebanyak 10 (sepuluh) dan sub kegiatan sebanyak 41 (empat puluh satu). Berikut uraian dan rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Inspektorat tahun 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	ANGGARAN 2025
1	2	3	4
	INSPEKTORAT DAERAH		
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**	**12,739,760,194**
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**33,460,000**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,780,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	4,780,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD Perubahan	4,780,000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4,780,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4,780,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,780,000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,780,000
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan**	**9,433,855,794**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8,910,995,794
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	508,520,000

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,780,000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4,780,000
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4,780,000
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan**	**14,382,000**
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4,822,000
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,780,000
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,780,000
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan**	**942,793,000**
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90,000,000
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4,780,000
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	848,013,000
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan**	**1,961,837,400**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9,750,000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	658,970,000

3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	46,799,400
4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis pada SKPD	20,350,000
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72,110,000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60,970,000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,092,888,000
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan aturan**	**223,662,000**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,792,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	39,270,000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	171,600,000
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan aturan**	**129,770,000**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	106,620,000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23,150,000
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Tercapainya Nilai Kapabilitas APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Bima**	**925,350,800**
I	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Internal**	**826,350,800**

1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	107,115,000
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	89,475,000
3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	266,970,000
4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12,600,000
5	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	183,851,000
6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	166,339,800
II	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Tersusunnya Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**99,000,000**
1	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	99,000,000
C	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Meningkatnya Nilai SAKIP**	**510,137,000**
I	**Pendampingan dan Asistensi**	**Meningkatnya jumlah OPD yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**510,137,000**
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	168,060,000
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	29,700,000
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	206,536,000
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	105,841,000
	J U M L A H		**14,175,247,994**

Dalam pelaksanaan tugas, Inspektur dibantu oleh Inspektur Pembantu I, II dan III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan;
2. pengkoordinasian penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan;
3. pelaksanaan perencanaan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk dan mengatur pelaksanaan tugas pengawasan yang meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, audit dengan tujuan tertentu dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. pelaksanaan pembagian tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional;
5. pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
6. pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
7. pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja; h. pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
8. pelaksanaan Pengawasan Desa;
9. pelaksanaan Kerjasama Pengawasan Internal ;
10. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
11. pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
12. pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;
13. pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
14. pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
15. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintahan;
16. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu I,II dan III sebagai bahan pertanggungjawaban;

17. pelaksanaan penilaian pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
18. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Inspektur sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintahan; dan
19. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lnspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Rencana Kerja Inspektorat Kota Bima dapat dilihat dari masing – masing kinerja Inspektur Pembantu dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/ mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Berikut rencana kerja dan pendanaan inspektur pembantu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2. berikut ini:

Tabel 4.2 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Pembantu Wilayah I Tahun 2025

No	Nama Diklat	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Perangkat daerah	Jumlah orang	Jumlah hari	SPPD/hari	Jumlah	Tgl/bulan	Nama Personil	Jabatan dalam TIM
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10
1	Monitoring Saldo Kas	Monitoring Penutupan kas akhir tahun	Memastikan Kas (Sisa GU) pada bendahara pengeluaran pada OPD telah disetor ke kas Daerah., Pajak Telah dilakukan pembayaran , dan Informasi terkait belanja Kegiatan yang dianggarkan kembali untuk tahun berikutnya.	OPD pada Wilayah Irban I	6	5	180,000	5,400,000	Januari Minggu ke 1-2	Tim 1	
										Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Friyanti, S. Sos Nurwahida Rahmah, S.Sos. Muhammad Furqan, S. Sos Rosni Puspasari, S.Sos. Umardin, SE.	Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota
				OPD pada Wilayah Irban I	5	5	180,000	4,500,000	Januari Minggu ke 1-2	Tim 2	
										Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Leo Ori Wibowo, ST., M. Ak Yusransyah, SP Priharyati Maylan, SE. Haikal Aturansyah, SH. Than Tie Amirah, A. Md	Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota
				OPD pada Wilayah Irban I	4	5	180,000	3,600,000	Januari Minggu ke 1-2	Tim 3	
										Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Leo Ori Wibowo, ST., M. Ak Saodah, S. Sos. Sinta Ramdani Ridwan, S.IP Ahiruddin M. Aqil Zen	Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota
				OPD pada Wilayah Irban I	4	5	180,000	3,600,000	Januari Minggu ke 1-2	Tim 4	
										Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Friyanti, S. Sos Sri Mulyati, ST.M.Ak Mulyadin, S. Sos M. Yusuf, S.Sos Anryadi R. SE	Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota
Jumlah Biaya / Kegiatan								**17,100,000**			
2	Reviu Dana Kapitasi	Dana Kapitasi Pada Puskesmas	Memastikan Sisa dana Kapitasi pada Kas Puskesmas telah Sesuai dengan pelaporan	Puskesmas Se Kota Bima PKM. Rastim PKM. Kumbe PKM. Penanae	3 4	10 9	180,000 180,000	5,400,000 6,480,000	Januari (Minggu Ke -2)	Tim 1	
										Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Leo Ori Wibowo, ST., M. Ak Priharyati Maylan, SE. Saodah, S. Sos. Haikal Aturansyah, SH. Muhammad Furqan, S. Sos Muhamad Yusuf, S.Sos.	Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
				Puskesmas Se Kota Bima PKM. Jatibaru PKM. Kolo	2 4	10 9	180,000 180,000	3,600,000 6,480,000	Januari (Minggu Ke -2)	Tim 2	
										Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Friyanti, S. Sos Muhammad Aqilzen, ST Yusransyah, SP Aryadi Rusmana, SE Mulyadin, S. Sos Sinta Ramdani Ridwan, S.IP	Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
				Puskesmas Se Kota Bima PKM. Mpunda	2 4	10 9	180,000 180,000	3,600,000 6,480,000	Januari (Minggu Ke -2)	Tim 3	

				PKM. Dara/Paruga						Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Sri Mulyati, ST.M.Ak Umardin, SE. Than Tie Amirah, A. Md Ahiruddin, S.E Nurwahida Rahmah, S.Sos. Rosni Puspasari, S.Sos.	Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
Jumlah Biaya / Kegiatan								**32,040,000**			
3	Reviu pelayan publik	Dinas dan UPT yang Melaksanakan Pelayanan Publik	Memastikan Standar Pelayanan Publik telah terlaksana dengan baik	Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas se Kota Bima PKM. Kolo PKM. Jatibaru	3 4	10 9	180,000 180,000	5,400,000 6,480,000	Februari Minggu ke 1- 3	Tim 1 Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Leo Ori Wibowo, ST., M. Ak Ahiruddin, SE. Priharyati Maylan, SE. Yusransyah, SP Aryadi Rusmana, SE Umardin, SE.	 Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim
				Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas se Kota Bima PKM. Rastim PKM. Kumbe PKM. Penanae	2 4	10 9	180,000 180,000	3,600,000 6,480,000	Februari Minggu ke 1- 3	Tim 2 Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Friyanti, S. Sos Sinta Ramdani Ridwan, S.IP Saodah, S. Sos. Than Tie Amirah, A. Md Muhammad Furqan, S. Sos Muhammad Yusuf, S.Sos.	 Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim
				Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas se Kota Bima PKM. Mpunda	2 4	10 9	180,000 180,000	3,600,000 6,480,000	Februari Minggu ke 1- 3	Tim 3 Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Sri Mulayti, ST.M.Ak	 Pengendali Mutu Pengendali Teknis
No	**Nama Diklat**	**Ruang Lingkup**	**Tujuan/Sasaran**	**Perangkat daerah**	**Jumlah orang**	**Jumlah hari**	**SPPD/hari**	**Jumlah**	**Tgl/bulan**	**Nama Personil**	**Jabatan dalam TIM**
1	**2**	**3**	**4**	**5** PKM. Paruga Dikes	**6**	**7**			**8**	**9** Nurwahida Rahmah, S.Sos. Haikal Aturansyah, SH. Muhammad Aqilzen, ST Mulyadin, S. Sos Rosni Puspasari, S.Sos.	**10** Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim
Jumlah Biaya / Kegiatan								**32,040,000**			
4	Reviu LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah	Memastikan Laporan Keuangan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerinta (SAP) dan tepat waktu	Pemkot Bima/ BPKAD Sampel beberapa OPD	3 5	10 9	180,000 180,000	5,400,000 8,100,000	Maret Minggu Ke- 1-2	Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Leo Ori Wibowo, ST., M. Ak Saodah, S. Sos. Ahiruddin, SE. Priharyati Maylan, SE. Rosni Puspasari, S.Sos. Than Tie Amirah, A. Md Yusransyah, SP	Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim
Jumlah Biaya / Kegiatan								**13,500,000**			

5	Evaluasi SAKIP A B	Laporan SAKIP SKPD	Memastikan SAKIP SKPD Telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SKPD lingkup Pemerintah Kota Bima	11	10	180,000	19,800,000	Maret Minggu Ke- 3-4	Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Friyanti, S. Sos Sri Mulayti, ST.M.Ak Aryadi Rusmana, SE Haikal Aturansyah, SH. Muhammad Aqilzen, ST Muhammad Furqan, S. Sos Muhammad Yusuf, S.Sos. Mulyadin, S. Sos Nurwahida Rahmah, S.Sos. Sinta Ramdani Ridwan, S.IP Umardin, SE.	Pengendali Teknis Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim
Jumlah Biaya / Kegiatan								**19,800,000**			
6	Reviu RPJMD B	Dokumen Ranhir RPJMD Kota	Meastikan bahwa RPJMD disusun dengan Ketentuan yang berlaku	Bappeda Kota Bima	3 4	10 9	180,000 180,000	5,400,000 6,480,000	April Minggu ke 1-4	Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Leo Ori Wibowo, ST., M. Ak Sri Mulayti, ST.M.Ak Muhammad Furqan, S. Sos Mulyadin, S. Sos Sinta Ramdani Ridwan, S.IP Than Tie Amirah, A. Md	Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
Jumlah Biaya / Kegiatan								**11,880,000**			
7	Reviu RENSTRA B	Dokumen Restra SKPD	Mmemastikan Restra SKPD disusun telah sesuai dengan Kaidah yang berlaku dan keterhubungan dengan RPJMD	SKPD pada Wilayah Irban I	3 10	10 9	180,000 180,000	5,400,000 16,200,000	April Minggu ke 1-4	Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Friyanti, S. Sos Nurwahida Rahmah, S.Sos. Ahiruddin, SE. Priharyati Maylan, SE. Rosni Puspasari, S.Sos. Saodah, S. Sos. Yusransyah, SP Aryadi Rusmana, SE Haikal Aturansyah, SH. Muhammad Aqilzen, ST Muhammad Yusuf, S.Sos. Umardin, SE.	Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
Jumlah Biaya / Kegiatan								**21,600,000**			
8	Reviu RKPD Perubahan A B	Dokumen RKPD Perubahan	Memastikan RKPD P disusun berdasarkan Renja pada OPD dan mempunyai keselarasan dengan Restra	SKPD Pada Pemkot Bima	3 4	10 9	180,000 180,000	5,400,000 6,480,000	Mei Minggu ke 1-4	Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Friyanti, S. Sos Sri Mulayti, ST.M.Ak Ahiruddin, SE. Rosni Puspasari, S.Sos. Aryadi Rusmana, SE Muhammad Aqilzen, ST	Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
Jumlah Biaya / Kegiatan								**11,880,000**			
9	Reviu SSH A B	Dokumen SSH	Memastikan Bahwa SSH telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Setda Kota Bima Bagian Administrasi Pembangunan (AP)	2 10	10 9	180,000 180,000	3,600,000 16,200,000	Mei Minggu ke 1-4	Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Leo Ori Wibowo, ST., M. Ak Sinta Ramdani Ridwan, S.IP Priharyati Maylan, SE. Saodah, S. Sos. Than Tie Amirah, A. Md Yusransyah, SP Haikal Aturansyah, SH.	Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
No	**Nama Diklat**	**Ruang Lingkup**	**Tujuan/Sasaran**	**Perangkat daerah**	**Jumlah orang**	**Jumlah hari**	**SPPD/hari**	**Jumlah**	**Tgl/bulan**	**Nama Personil**	**Jabatan dalam TIM**

1	2	3	4	5	6	7			8	9 Muhammad Furqan, S. Sos Muhammad Yusuf, S.Sos. Mulyadin, S. Sos Nurwahida Rahmah, S.Sos. Umardin, SE.	10 Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
Jumlah Biaya / Kegiatan								**19,800,000**			
10	Reviu KUA PPAS A B	Dokumen KUA PPAS	Memastikan KUA PPAS disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPKAD	3 4	10 9	180,000 180,000	5,400,000 6,480,000	Juni Minggu ke 1-4	Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Friyanti, S. Sos Sinta Ramdani Ridwan, S.IP Sri Mulayti, ST.M.Ak Muhammad Furqan, S. Sos Nurwahida Rahmah, S.Sos. Umardin, SE.	Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
Jumlah Biaya / Kegiatan								**11,880,000**			
11	P3DN Semester I A B	Kontrak yang telah terbit dan ditandatangani oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak mulai Januari s/d Juni	Memastikan bahwa dalam pelaksanaan PBJ termuat nilai minimal TKDN yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	SKPD yang telah berkontrak	2 5	10 9	180,000 180,000	3,600,000 8,100,000	Juni Minggu ke 1-4	Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Leo Ori Wibowo, ST., M. Ak Priharyati Maylan, SE. Yusransyah, SP Rosni Puspasari, S.Sos. Saodah, S. Sos. Muhammad Yusuf, S.Sos. Than Tie Amirah, A. Md	Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
Jumlah Biaya / Kegiatan								**11,700,000**			
12	Audit/Pengawasan B	Pendapatan Asli Daerah	Memastikan bahwa penerimaan daerah telah dilaksanakan dan dikelola dengan baik.	OPD yang memiliki PAD pada Wilayah Irban I Dinas Pariwisata Dikes	3 4	10 9	180,000 180,000	5,400,000 6,480,000	juli Miggu ke 1-4	Tim 1 Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Leo Ori Wibowo, ST., M. Ak Muhammad Aqilzen, ST Muhammad Furqan, S. Sos Muhammad Yusuf, S.Sos. Nurwahida Rahmah, S.Sos. Rosni Puspasari, S.Sos.	 Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
				Dinas Koperindag	2 4	10 9	180,000 180,000	3,600,000 6,480,000	juli Miggu ke 1-4	Tim 2 Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Friyanti, S. Sos Priharyati Maylan, SE. Saodah, S. Sos. Aryadi Rusmana, SE Mulyadin, S. Sos Ahiruddin, SE.	 Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
				Dinas Perkim Dinas Perhubungan	2 4	10 9	180,000 180,000	3,600,000 6,480,000	juli Miggu ke 1-4	Tim 3 Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Sri Mulayti, ST.M.Ak Yusransyah, SP Haikal Aturansyah, SH. Sinta Ramdani Ridwan, S.IP Umardin, SE. Than Tie Amirah, A. Md	 Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
Jumlah Biaya / Kegiatan								**32,040,000**			

13	Reviu RKA Perubahan A B	Dokumen RKA P SKPD	Memastikan RKA P disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai keselarasan dengan RKPD P.	SKPD pada Pemerintah Kota Bima OPD pada Wilayah Irban I Urusan Kesehatan Urusan Perumahan Urusan Ketenagakerjaan	3 5	10 9	180,000 180,000	5,400,000 8,100,000	Agustus Minggu ke 1-4	Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Sri Mulayti, ST.M.Ak Umardin, SE. Ahiruddin, SE. Rosni Puspasari, S.Sos. Aryadi Rusmana, SE Haikal Aturansyah, SH. Muhammad Furqan, S. Sos	Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
Jumlah Biaya / Kegiatan								**13,500,000**			
14	Audit Kinerja Strategis	Prioritas Daerah Dibidang Ekonomi	Memastikan Laju pertumbuhan Ekonomi sesui dengan target yang ditetapkan	SKPD yang terkait dengan Laju pertumbuhan ekonomi Perangkat Daerah terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi	11	20	180,000	39,600,000	Agustus & september Minggu ke 1-4	Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Leo Ori Wibowo, ST., M. Ak Priharyati Maylan, SE. Saodah, S. Sos. Than Tie Amirah, A. Md Yusransyah, SP Friyanti, S. Sos Muhammad Aqilzen, ST Mulyadin, S. Sos Nurwahida Rahmah, S.Sos. Sinta Ramdani Ridwan, S.IP	Pengendali Mutu Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
No	**Nama Diklat**	**Ruang Lingkup**	**Tujuan/Sasaran**	**Perangkat daerah**	**Jumlah orang**	**Jumlah hari**	**SPPD/hari**	**Jumlah**	**Tgl/bulan**	**Nama Personil**	**Jabatan dalam TIM**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**			**8**	**9**	**10**
Jumlah Biaya / Kegiatan								**39,600,000**			
15	Audit Knerja	Honorarium	Memastikan bahwa pembayaran honorarium pada OPD telah mengikuti peraturan yang berlaku dan dilaksanakan secara 3E	SKPD yang memiliki belanja Honoraium yang besar dalam wilayah Irban I Dikes Dinas Kominfotik Dinas Pariwisata Kec. Rastim	3 4	10 9	180,000 180,000	5,400,000 6,480,000	September Minggu ke 1-4	Tim 1 Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Leo Ori Wibowo, ST., M. Ak Muhammad Aqilzen, ST Saodah, S. Sos. Haikal Aturansyah, SH. Muhammad Furqan, S. Sos Priharyati Maylan, SE.	 Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
					2	10	180,000	3,600,000	September	Tim 2	
				Dinas Koperindag Damkar Dinas Perkim Dinas Ketahanan Pangan	4	9	180,000	6,480,000	Minggu ke 1-4	Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Friyanti, S. Sos Ahiruddin, SE. Than Tie Amirah, A. Md Sinta Ramdani Ridwan, S.IP Nurwahida Rahmah, S.Sos. Umardin, SE.	Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
				Dinas Perhubungan Setwan DPPKB Kec. Rasbar	2 4	10 9	180,000 180,000	3,600,000 6,480,000	September Minggu ke 1-4	Tim 3 Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Sri Mulayti, ST.M.Ak Rosni Puspasari, S.Sos. Yusransyah, SP Aryadi Rusmana, SE Muhammad Yusuf, S.Sos. Mulyadin, S. Sos	 Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
Jumlah Biaya / Kegiatan								**32,040,000**			
16	Audit Knerja	Perjalanan Dinas	Memastikan bahwa pembayaran belanja perjalanan Dinas pada	OPD yang memiliki pembayaran	3 4	10 9	180,000 180,000	5,400,000 6,480,000	Oktober Minggu ke 1-4	Tim 1	

			OPD telah mengikuti peraturan yang berlaku dan dilaksanakan secara 3E	Perjalanan Dinas Yang bernilai besar pada Wilayah Irban I Setwan						Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Leo Ori Wibowo, ST., M. Ak Yusransyah, SP Muhammad Furqan, S. Sos Aryadi Rusmana, SE Muhammad Yusuf, S.Sos. Sinta Ramdani Ridwan, S.IP	Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
				Bag. Humas Prokopim	2 4	10 9	180,000 180,000	3,600,000 6,480,000	Oktober Minggu ke 1-4	Tim 2 Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Friyanti, S. Sos Saodah, S. Sos. Rosni Puspasari, S.Sos. Ahiruddin, SE. Muhammad Aqilzen, ST Mulyadin, S. Sos	 Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
				Dikes	2 4	10 9	180,000 180,000	3,600,000 6,480,000	Oktober Minggu ke 1-4	Tim 3 Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Sri Mulayti, ST.M.Ak Umardin, SE. Priharyati Maylan, SE. Than Tie Amirah, A. Md Haikal Aturansyah, SH. Nurwahida Rahmah, S.Sos.	 Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
Jumlah Biaya / Kegiatan								**32,040,000**			
17	Reviu BOK	Dana BOK Pada Puskesmas	Memastikan penggunaan dana BOK dan penatausahaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	Puskesamas Se Kota Bima PKM. Rastim PKM. Kumbe PKM. Penanae	3 4	10 9	180,000 180,000	5,400,000 6,480,000	November Minggu ke 1-4	Tim 1 Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Leo Ori Wibowo, ST., M. Ak Rosni Puspasari, S.Sos. Haikal Aturansyah, SH. Muhammad Furqan, S. Sos Nurwahida Rahmah, S.Sos. Umardin, SE.	 Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
				Dikes PKM. Jatibaru PKM. Kolo	2 4	10 9	180,000 180,000	3,600,000 6,480,000	November Minggu ke 1-4	Tim 2 Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Friyanti, S. Sos Yusransyah, SP Than Tie Amirah, A. Md Priharyati Maylan, SE Ahiruddin, SE. Aryadi Rusmana, SE	 Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
				PKM. Mpunda PKM. Paruga	2 3	10 9	180,000 180,000	3,600,000 4,860,000	November Minggu ke 1-4	Tim 3 Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Sri Mulayti, ST.M.Ak Sinta Ramdani Ridwan, S.IP Saodah, S. Sos. Muhammad Aqilzen, ST Mulyadin, S. Sos	 Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
No	**Nama Diklat**	**Ruang Lingkup**	**Tujuan/Sasaran**	**Perangkat daerah**	**Jumlah orang**	**Jumlah hari**	**SPPD/hari**	**Jumlah**	**Tgl/bulan**	**Nama Personil**	**Jabatan dalam TIM**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**			**8**	**9**	**10**
Jumlah Biaya / Kegiatan								**30,420,000**			

19	P3DN Semester II	Kontrak yang telah terbit dan ditandatangani oleh PPK/pejabat penandatangan Kontrak mulai Juli s/d Desember	Memastikan bahwa dalam pelaksanaan PBJ termuat nilai minimal TKDN yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	SKPD yang telah berkontrak selain SKPD yang menjadi sampel pada semester I	3 4	10 9	180,000 180,000	5,400,000 6,480,000	Desember	Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Leo Ori Wibowo, ST., M. Ak Friyanti, S. Sos Haikal Aturansyah, SH. Muhammad Aqilzen, ST Sinta Ramdani Ridwan, S.IP Ahiruddin, SE.	Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
Jumlah Biaya / Kegiatan								**11,880,000**			
20	Reviu E Renggar	Perencanaan melalui E renggar pada Puskesmas	Memastikan Perencanaan pada aplikasi e- rengar oleh puskesamas telah sesuai dan mengikuti peraturan yang berlaku	Puskesmas Se Kota Bima Dikes PKM. Jatibaru PKM. Kolo	3 4	10 9	180,000 180,000	5,400,000 6,480,000	Desember	Tim 1 Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Leo Ori Wibowo, ST., M. Ak Saodah, S. Sos. Than Tie Amirah, A. Md Aryadi Rusmana, SE Priharyati Maylan, SE.	 Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
				PKM. Mpunda PKM. Paruga	2 4	10 9	180,000 180,000	3,600,000 6,480,000		Tim 2 Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Friyanti, S. Sos Haikal Aturansyah, SH. Mulyadin, S. Sos Ahiruddin, SE. Sinta Ramdani Ridwan, S.IP Umardin, SE.	 Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
				PKM. Rastim PKM. Kumbe PKM. Penanae	2 4	10 9	180,000 180,000	3,600,000 6,480,000		Tim 3 Adhie Aulia, ST.,M.Ec.Dev Sri Mulayti, ST.M.Ak Nurwahida Rahmah, S.Sos. Rosni Puspasari, S.Sos. Yusransyah, SP Aryadi Rusmana, SE Muhammad Furqan, S. Sos	 Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM Anggota TIM
Jumlah Biaya / Kegiatan								**32,040,000**			
Total General Biaya Kegiatan Irban I								**426,780,000**			

Tabel 4.3 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Pembantu Wilayah II Tahun 2025

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	RUANG LINGKUP	TUJUAN/SASARAN	OBJEK PENGAWASAN	JUMLAH				WAKTU PELAKSANAAN	NAMA PERSONIL DAN KEDUDUKAN DALAM TIM		
					ORANG	HARI	BIAYA	JUMLAH		NAMA		KEDUDUKAN
JANUARI												
1	Asistensi/ Monitoring/ Pendampingan	Penutupan Kas Akhir Tahun 2024	Memastikan Kas (Sisa UP) pada Bendahara Pengeluaran pada OPD telah disetor ke Kas Daerah, Pajak telah disetor/pembayaran, dan informasi terkait belanja kegiatan yang dianggarkan kembali untuk tahun berikutnya.							**Tim I**		
				1. DPPPA 2. PERTANIAN 3. KESBANGPOL 4. DIKPORA 5. DUKCAPIL	5	5	180,000	4,500,000	Januari, Minggu I-IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Ahmad Yani, ST	Pengendali Teknis
										3	Fithratullah, SE	Ketua
										4	Nuryanti, ST., MM	Anggota
										5	Ikhwan, SE	Anggota
										Tim II		
				1. ARSIP & PERPUSTAKAAN 2. SAT.POL.PP 3. BAG.PEMERINTAHAN 4. DISLUTKAN 5. KEC.MPUNDA	6	5	180,000	5,400,000	Januari, Minggu I-IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Titi Mulyati, SE	Pengendali Teknis
										3	Fathurrahmi, ST	Ketua
										4	Ade Irma Suryani,S.Sos	Anggota
										5	Jubaer, S.Sos	Anggota
										6	Ade Sukmawati, S.Sos	Anggota
										Tim III		
				1. BRIDA 2. DLH 3. KEC.RABA 4. BKPSDM	4	5	180,000	3,600,000	Januari, Minggu I-IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Ahmad Yani, ST	Pengendali Teknis
										3	Uswatun Hasanah, S.TP,. M.Ak	Ketua

				5. BAG.OPA 6. BAG.UMUM						4	Ichwan, SE	Anggota
										5	Ali Imran, S.IP	Anggota
										6	Irwansyah, S.Sos	Anggota
										Tim IV		
				1. DPMPTSP 2. PUPR 3. INSPEKTORAT 4. KEC. ASAKOTA 5. BAG. KESRA 6. BPKAD	4	5	180,000	3,600,000	Januari, Minggu I-IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Titi Mulyati, SE	Pengendali Teknis
										3	Hardi Candra, SH	Ketua
										4	Muhammad Sabirin Jamil, ST	Anggota
										5	Muhayan, S.Sos	Anggota
										6	Nurul Isnaini, SE	Anggota
JUMLAH BIAYA/KEGIATAN					**19**	**5**	**180,000**	**17,100,000**				
FEBRUARI												
2	Reviu Pelayanan Publik	Pelayanan Publik Sektor Pendidikan	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyelenggaraan pemerataan pendidikan telah sesuai dengan aturan yang berlaku	DIKPORA	6	10	180,000	10,800,000	Februari, Minggu I-IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Titi Mulyati, SE	Pengendali Teknis
										3	Uswatun Hasanah, S.TP,. M.Ak	Ketua
										4	Nurul Isnaini, SE	Anggota
										5	Nuryanti, ST., MM	Anggota
										6	Muhayan,S.Sos	Anggota
										7	Ade Irma Suryani,S.Sos	Anggota
3	Reviu Pelayanan Publik	Pelayanan Publik Sektor	Memberikan keyakinan terbatas	DPMPTSP	6	10	180,000	10,800,000	Februari, Minggu I-IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Ahmad Yani, ST	Pengendali Teknis

		Perizinan	bahwa penyelenggaraan perizinan dan non perizinan telah sesuai dengan aturan yang berlaku						3	Ali Imran, S.IP	Ketua
									4	Fathurrahmi, ST	Anggota
									5	Ikhwan,SE	Anggota
									6	Jubaer,S.Sos	Anggota
									7	Ichwan,SE	Anggota
									8	Ade Sukmawati, S.Sos	Anggota
4	Monitoring Pengadaan ASN (CPNS & PPPK)	Pengadaan ASN (CPNS & PPPK)	Untuk memastikan dan menjamin proses seleksi berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan mengurangi risiko kecurangan.	BKPSDM	7	10	180,000	12,600,000	Februari, Minggu I-IV	1	Drs. Muhammad Fakhrunraji, ME	Penanggung Jawab
										2	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										3	Ahmad Yani, ST	Pengendali Teknis
										4	Fitratullah,SE	Ketua
										5	Hardi Candra, SH	Anggota
										6	Irwansyah, S.Sos	Anggota
										7	Muhammad Sabirin Jamil, ST	Anggota
JUMLAH BIAYA/KEGIATAN					**19**	**10**	**180,000**	**34,200,000**				
MARET												
5	Evaluasi SAKIP	Laporan SAKIP Perangkat Daerah	Meyakinkan bahwa laporan kinerja perangkat daerah telah menyajikan informasi kinerja yang	OPD Kota Bima	12	10	180,000	21,600,000	Maret, Minggu I-IV	1	Anwar,S.Hut	Pengendali Mutu
										2	(1)	Pengendali Teknis
										3	Ahmad Yani, ST	Ketua
										4	Uswatun Hasanah, S.TP,. M.Ak	Anggota
										5	Ade Irma Suryani,S.Sos	Anggota

			andal, akurat dan berkualitas							6	Muhammad Sabirin Jamil, ST	Anggota
										7	Ali Imran,S.IP	Anggota
										8	Fithratullah, SE	Anggota
										9	Jubaer,S.Sos	Anggota
										10	Ikhwan,SE	Anggota
										11	Muhayan, S.Sos	Anggota
										12	Ade Sukmawati, S.Sos	Anggota
										13	Irwansyah, S.Sos	Anggota
6	Reviu LPPD	LPPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2024	Memberikan keyakinan terbatas terhadap akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam LPPD	Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima	7	10	180,000	12,600,000	Maret, Minggu IV	1	Anwar, S.Hut.	Pengendali Mutu
										2	Titi Mulyati, SE	Pengendali Teknis
										3	Hardi Candra, SH	Ketua
										4	Nuryanti, ST., MM	Anggota
										5	Fathurrahmi, ST	Anggota
										6	Ichwan, SE	Anggota
										7	Nurul Isnaini, SE	Anggota
JUMLAH BIAYA/KEGIATAN					**19**	**10**	**180,000**	**34,200,000**				
APRIL												
7	Evaluasi Penyerapan	Evaluasi Penyerapan Anggaran	Menilai Penyerapan Anggaran dan	BPKAD dan UKPBJ	7	10	180,000	12,600,000	April, Minggu I - IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Ahmad Yani, ST	Pengendali Teknis

	Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ)	dan Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ) Tri Wulan I	Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ) Pemerintah Daerah Kota Bima Triwulan I Tahun 2025						3	Nuryanti, ST., MM	Ketua
									4	Fathurrahmi, ST	Anggota
									5	Hardi Candra, SH	Anggota
									6	Nurul Isnaini, SE	Anggota
									7	Ade Sukmawati, S.Sos	Anggota
8	Reviu RENSTRA	Reviu RENSTRA OPD Tahun 2025 - 2029	Memberikan keyakinan terbatas atas konsistensi dan Keterhubungan antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen RPJMD	BAPPEDA/TAPD	11	10	180,000	19,800,000	April, Minggu I - IV	Tim 1	
										1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Titi Mulyati, SE	Pengendali Teknis
										3	Ichwan, SE	Ketua
										4	Fithratullah, SE	Anggota
										5	Ikhwan,SE	Anggota
										6	Muhayan, Sos	Anggota
										7	Ali Imran,S.IP	Anggota
										Tim 2		
										1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Titi Mulyati, SE	Pengendali Teknis
										3	Ade Irma Suryani,S.Sos	Ketua
										4	Muhammad Sabirin Jamil, ST	Anggota
										5	Uswatun Hasanah, S.TP.,M.Ak	Anggota
										6	Jubaer, S.sos	Anggota
										7	Irwansyah, S.Sos	Anggota
JUMLAH BIAYA/KEGIATAN					**18**	**10**	**180,000**	**32,400,000**			

MEI											
9	Monitoring Pengadaan ASN (CPNS & PPPK)	Pengadaan ASN (CPNS & PPPK)	Untuk memastikan dan menjamin proses seleksi berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan mengurangi risiko kecurangan.	BKPSDM	7	10	180,000	12,600,000	Mei, Minggu I - IV	1	Drs. Muhammad Fakhrunraji, ME	Penanggung Jawab
										2	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										3	Ahmad Yani, ST	Pengendali Teknis
										4	Fitratullah,SE	Ketua
										5	Hardi Candra, SH	Anggota
										6	Irwansyah, S.Sos	Anggota
										7	Muhammad Sabirin Jamil, ST	Anggota
10	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek Strategis Kota Bima TA.2025	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan	OPD Kota Bima (Proyek Strategis Kota Bima TA.2025)	5	10	180,000	9,000,000	Mei, Minggu I - IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Ahmad Yani, ST	Pengendali Teknis
										3	Fathurrahmi, ST	Ketua
										4	Ade Irma Suryani,S.Sos	Anggota
										5	Ikhwan, SE	Anggota
										6	Jubaer, S.sos	Anggota
										7	Nurul Isnaini, SE	Anggota
11	Reviu RKPD	RKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2026	Memberikan keyakinan terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan	BAPPEDA/TAPD	8	10	180,000	14,400,000	Mei, Minggu I - IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Titi Mulyati, SE	Pengendali Teknis
										3	Nuryanti, ST.,MM	Ketua
										4	Ichwan, SE	Anggota
										5	Uswatun Hasanah, S.TP.,M.Ak	Anggota

			RKPD						6	Muhayan, Sos	Anggota
									7	Ade Sukmawati, S.Sos	Anggota
									8	Ali Imran, S.IP	Anggota
JUMLAH BIAYA/KEGIATAN					**20**	**10**	**180,000**	**36,000,000**			
JUNI											
12	Reviu Manajemen ASN	Manajemen ASN (rotasi, promosi dan mutasi ASN)	Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuain pelaksanaan rekrutmen, rotasi, promosi dan mutasi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bima dengan NSPK yang ditetapkan	BKPSDM	6	10	180,000	10,800,000	Juni, Minggu I - IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Titi Mulyati, SE	Pengendali Teknis
										3	Jubair, S.Sos	Ketua
										4	Ichwan, SE	Anggota
										5	Ade Irma Suryani,S.Sos	Anggota
										6	Fithratullah, SE	Anggota
										7	Ikhwan, SE	Anggota
13	Reviu Pelayanan Publik	Pelayanan Publik Sektor kependudukan dan Catatan Sipil	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku	DUKCAPIL	5	10	180,000	9,000,000	Juni, Minggu I - IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Titi Mulyati, SE	Pengendali Teknis
										3	Uswatun Hasanah, S.TP.,M.Ak	Ketua
										4	Ali Imran, S.IP	Anggota
										5	Muhayan,S.Sos	Anggota
										6	Muhammad Sabirin Jamil,ST	Anggota
										7	Irwansyah, S.Sos	Anggota

14	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ)	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ) Tri Wulan II	Menilai Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ) Pemerintah Daerah Kota Bima Triwulan II Tahun 2025	BPKAD dan UKPBJ	7	10	180,000	12,600,000	Juni, Minggu I - IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Ahmad Yani, ST	Pengendali Teknis
										3	Nuryanti, ST., MM	Ketua
										4	Fathurrahmi, ST	Anggota
										5	Hardi Candra, SH	Anggota
										6	Nurul Isnaini, SE	Anggota
										7	Ade Sukmawati, S.Sos	Anggota
JUMLAH BIAYA/KEGIATAN					**18**	**10**	**180,000**	**32,400,000**				
JULI												
15	Audit Kinerja	1. Penilaian Capaian Kinerja SPI 2. Penilaian Aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan 3. Penilaian Risiko dan Efektivitas Pengendalian 4. ketaatan terhadap perundang - undangan 5.	Memberikan penilaian independen terkait keekonomian, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/tugas/fungsi/entitas serta memberikan saran perbaikan							**Tim I**		
				DP3A	7	10	180,000	12,600,000	Juli, Minggu I-IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Ahmad Yani, ST	Pengendali Teknis
										3	Fathurrahmi, ST	Ketua
										4	Ade Sukmawati, S.Sos	Anggota
										5	Fithratullah, SE	Anggota
										6	Ikhwan, SE	Anggota
										7	Ali Imran, S.IP	Anggota
										Tim II		
				KELAUTAN & PERIKANAN	7	10	180,000	12,600,000	Juli, Minggu I-IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Titi Mulyati, SE	Pengendali Teknis
										3	Ichwan, SE	Ketua
										4	Nuryanti, ST., MM	Anggota
										5	Uswatun Hasanah, S.TP.,	Anggota

		penetapan parameter dan sampel									M.Ak	
										6	Irwansyah, S.Sos	Anggota
										7	Muhammad Sabirin Jamil, ST	Anggota
										Tim III		
				DINAS PERTANIAN	5	10	180,000	9,000,000	Juli, Minggu I-IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Ahmad Yani, ST	Pengendali Teknis
										3	Hardi Candra, SH	Ketua
										4	Ade Irma Suryani, S.Sos	Anggota
										5	Jubaer, S.Sos	Anggota
										6	Muhayan, S.Sos	Anggota
										7	Nurul Isnaini, SE	Anggota
JUMLAH BIAYA/KEGIATAN					**19**	**10**	**180,000**	**34,200,000**				
AGUSTUS												
16	Reviu KUPA PPAS Perubahan Tahun 2025	Reviu KUPA PPAS Perubahan Pemerintah Kota Bima Tahun 2025	Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian rancangan KUPA-PPAS Perubahan dengan RKPD Perubahan	BPKAD dan TAPD	8	10	180,000	14,400,000	Agustus, Minggu I-IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Ahmad Yani, ST	Pengendali Teknis
										3	Titi Mulyati, SE	Ketua
										4	Uswatun Hasanah, S.TP., M.Ak	Anggota
										5	Ichwan, SE	Anggota
										6	Ade Irma Suryani,S.Sos	Anggota
										7	Muhayan, S.Sos	Anggota
										8	Ikhwan, SE	Anggota
										9	Muhammad Sabirin Jamil, ST	Anggota

17	Audit Kinerja Strategis Daerah	Kinerja Strategis Daerah (Program ……..)	Memberikan keyakinan bahwa Program ……	OPD Kota Bima	10	10	180,000	18,000,000	Agustus, Minggu I-IV	1	(1)	Pengendali Mutu
										2	Anwar, S.Hut	Pengendali Teknis
										3	Fathurrahmi, ST (2)	Anggota
										4	Nuryanti, ST., MM (2)	Anggota
										5	Hardi Candra, SH (2)	Anggota
										6	Fithratullah, SE (2)	Anggota
										7	Ali Imran, S.IP (2)	Anggota
										8	Ade Sukmawati, S.Sos (2)	Anggota
										9	Jubair, S.Sos (2)	Anggota
										10	Irwansyah, S.Sos	Anggota
										11	Nurul Isnaini, SE	Anggota
JUMLAH BIAYA/KEGIATAN					**18**	**10**	**180,000**	**32,400,000**				
SEPTEMBER												
18	Audit Kinerja Strategis Daerah	Kinerja Strategis Daerah (Program ……..)	Memberikan keyakinan bahwa Program ……	OPD Kota Bima	10	10	180,000	18,000,000	September, Minggu I -IV	1	(1)	Pengendali Mutu
										2	Anwar, S.Hut	Pengendali Teknis
										3	Fathurrahmi, ST (2)	Anggota
										4	Nuryanti, ST., MM (2)	Anggota
										5	Hardi Candra, SH (2)	Anggota
										6	Fithratullah, SE (2)	Anggota
										7	Ali Imran, S.IP (2)	Anggota
										8	Ade Sukmawati, S.Sos (2)	Anggota
										9	Jubair, S.Sos (2)	Anggota
										10	Irwansyah, S.Sos	Anggota
										11	Nurul Isnaini, SE	Anggota

19	Reviu RKA-SKPD	Reviu RKA-SKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2026	Memberikan Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKA	OPD Kota Bima	9	10	180,000	16,200,000	September, Minggu I -IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Titi Mulyati, SE	Pengendali Teknis
										3	Ahmad Yani, ST	Ketua
										4	Uswatun Hasanah, S.TP., M.Ak	Anggota
										5	Ichwan, SE	Anggota
										6	Ade Irma Suryani,S.Sos	Anggota
										7	Muhayan, S.Sos	Anggota
										8	Ikhwan, SE	Anggota
										9	Muhammad Sabirin Jamil, ST	Anggota
JUMLAH BIAYA/KEGIATAN					**19**	**10**	**180,000**	**34,200,000**				
OKTOBER												
20	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ)	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ) Tri Wulan III	Menilai Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ) Pemerintah Daerah Kota Bima Triwulan III Tahun 2025	BPKAD dan UKPBJ	7	10	180,000	12,600,000	Oktober, Minggu I - IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Ahmad Yani, ST	Pengendali Teknis
										3	Nuryanti, ST., MM	Ketua
										4	Fathurrahmi, ST	Anggota
										5	Hardi Candra, SH	Anggota
										6	Nurul Isnaini, SE	Anggota
										7	Ade Sukmawati, S.Sos	Anggota
21	Audit Kepatuhan / Ketaatan	Kepatuhan/ Ketaatan atas	Memastikan Pengelolaan Keuangan	CAMAT RABA	6	10	180,000	10,800,000	Oktober, Minggu I - IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Titi Mulyati, SE	Pengendali Teknis

		Pengelolaan Keuangan Daerah	Daerah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku						3	Ade Irma Suryani, S.Sos	Ketua
									4	Fithratullah, SE	Anggota
									5	Ichwan, SE	Anggota
									6	Jubair, S.Sos	Anggota
									7	Muhammad Sabirin Jamil,ST	Anggota
22	Audit Kepatuhan / Ketaatan	Kepatuhan/ Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Daerah	Memastikan Pengelolaan Keuangan Daerah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku	CAMAT MPUNDA	5	10	180,000	9,000,000	Oktober, Minggu I - IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Titi Mulyati, SE	Pengendali Teknis
										3	Ali Imran, S.IP	Ketua
										4	Uswatun Hasanah, S.TP., M.Ak	Anggota
										5	Irwansyah, S.Sos	Anggota
										6	Muhayan, S.Sos	Anggota
										7	Ikhwan,SE	Anggota
JUMLAH BIAYA/KEGIATAN					**18**	**10**	**180,000**	**32,400,000**				
NOVEMBER												
										Tim I		
23	Audit Kepatuhan / Ketaatan	Kepatuhan/ Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Daerah	Memastikan Pengelolaan Keuangan Daerah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku	DIKPORA	7	10	180,000	12,600,000	November, Minggu I-IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Ahmad Yani, ST	Pengendali Teknis
										3	Fathurrahmi, ST	Ketua
										4	Ade Irma Suryani, S.Sos	Anggota
										5	Fithratullah, SE	Ichwan,SE
										6	Ikhwan, SE	Anggota
										7	Ali Imran, S.IP	Anggota

										Tim II		
				BKPSDM	7	10	180,000	12,600,000	November, Minggu I-IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Titi Mulyati, SE	Pengendali Teknis
										3	Uswatun Hasanah, S.TP., M.Ak	Ketua
										4	Muhammad Sabirin Jamil, ST	Anggota
										5	Nuryanti, ST., MM	Anggota
										6	Jubaer, S.Sos	Anggota
										7	Nurul Isnaini, SE	Anggota
										Tim III		
				PUPR	5	10	180,000	9,000,000	November, Minggu I-IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Ahmad Yani, ST	Pengendali Teknis
										3	Hardi Candra, SH	Ketua
										4	Ichwan, SE	Anggota
										5	Muhayan, S.Sos	Anggota
										6	Irwansyah, S.Sos	Anggota
										7	Ade Sukmawati, S.Sos	Anggota
JUMLAH BIAYA/KEGIATAN					**19**	**10**	**180,000**	**34,200,000**				
DESEMBER												
24	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaa	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa	Menilai Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ)	BPKAD dan UKPBJ	7	10	180,000	12,600,000	Desember, Minggu I - III	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Ahmad Yani, ST	Pengendali Teknis
										3	Nuryanti, ST., MM	Ketua
										4	Fathurrahmi, ST	Anggota

	n Barang Jasa (PAPBJ)	(PAPBJ) Tri Wulan IV	Pemerintah Daerah Kota Bima Triwulan IV Tahun 2025							5	Hardi Candra, SH	Anggota
										6	Nurul Isnaini, SE	Anggota
										7	Ade Sukmawati, S.Sos	Anggota
25	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan pengelolaan BMD dengan setiap jenis regulasi yang berlaku, pada setiap tahapannya	BPKAD	5	10	180,000	9,000,000	Desember, Minggu I - III	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Ahmad Yani, ST	Pengendali Teknis
										3	Ichwan, SE	Ketua
										4	Ade Irma Suryani,S.Sos	Anggota
										5	Ikhwan,SE	Anggota
										6	Muhayan, Sos	Anggota
										7	Ali Imran,S.IP	Anggota
26	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	Memberikan keyakinan terbatas atas pengelolaan pajak daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bima telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	BPKAD	6	10	180,000	10,800,000	Desember, Minggu I - III	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Titi Mulyati, SE	Pengendali Teknis
										3	Fithratullah,SE	Ketua
										4	Muhammad Sabirin Jamil, ST	Anggota
										5	Uswatun Hasanah, S.TP., M.Ak	Anggota
										6	Jubaer, S.sos	Anggota
										7	Irwansyah, S.Sos	Anggota
27	Asistensi/ Monitorin	Penutupan Kas Tahun	Memastikan Kas (Sisa UP)							**Tim I**		
				OPD Kota Bima	7	10	180,000		Desember,	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu

	g/ Pendampingan	Anggaran 2025	pada Bendahara Pengeluaran pada OPD telah disetor ke Kas Daerah, Pajak telah disetor/pembayaran, dan informasi terkait belanja kegiatan yang dianggarkan kembali untuk tahun berikutnya.					12,600,000	Minggu IV			
										2	Ahmad Yani, ST	Pengendali Teknis
										3	Ade Irma Suryani, S.Sos	Ketua
										4	Fathurrahmi, ST	Anggota
										5	Fithratullah, SE	Ichwan,SE
										6	Ikhwan, SE	Anggota
										7	Ichwan, SE	Anggota
										Tim II		
				OPD Kota Bima	6	10	180,000	10,800,000	Desember, Minggu IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Titi Mulyati, SE	Pengendali Teknis
										3	Jubaer, S.Sos	Ketua
										4	Muhammad Sabirin Jamil, ST	Anggota
										5	Nuryanti, ST., MM	Anggota
										6	Uswatun Hasanah, S.TP., M.Ak	Anggota
										7	Nurul Isnaini, SE	Anggota
										Tim III		
				OPD Kota Bima	5	10	180,000	9,000,000	Desember, Minggu IV	1	Anwar, S.Hut	Pengendali Mutu
										2	Titi Mulyati, SE	Pengendali Teknis
										3	Ali Imran, S.IP	Ketua
										4	Hardi Candra, SH	Anggota
										5	Muhayan, S.Sos	Anggota
										6	Irwansyah, S.Sos	Anggota
										7	Ade Sukmawati, S.Sos	Anggota
JUMLAH BIAYA/KEGIATAN					**36**	**10**	**180,000**	**64,800,000**				

TOTAL BIAYA/KEGIATAN IRBAN II	418,500,000	

Tabel 4.4 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Pembantu Investigasi Tahun 2025

NO	KEGIATAN	NAMA DAN KEDUDUKAN DALAM TIM			WAKTU PELAKSANAAN	ALOKASI WAKTU	OBJEK PENGAWASAN	KETERANGAN
			NAMA	KEDUDUKAN				
1	2		3	4	5	6	7	8
BULAN JANUARI								
1	Reviu Sisa DAK Non Fisik - DAK Non Fisik	1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	6-8 Januari 2025	3 Hari	Dikbud, Dukcapil, Dinas Pariwisata	Reviu
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Alfian, ST	Ketua				
		5	Abdul Shomad, SE	Anggota				
		6	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		7	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		8	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		9	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		10	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		11	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		12	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
2	Evaluasi Reformasi Birokrasi	1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	13-15 Januari 2025	3 Hari	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, DPMPTSP	Evaluasi
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Alfian, ST	Ketua				
		5	Abdul Shomad, SE	Anggota				
		6	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		7	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				

		8	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		9	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		10	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		11	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		12	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
3	Reviu DAK Fisik Tahun Sebelumnya	**Tim I**					Dikbud	Reviu
		1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	16-20 Januari 2025	3 Hari		
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Abdul Shomad, SE	Ketua				
		5	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		6	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		Tim II					DPPKB	Reviu
		1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	21-23 Januari 2025	3 Hari		
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Alfian, ST	Ketua				
		4	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		5	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		6	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		7	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		8	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
BULAN FEBRUARI								
4	Reviu DAK Fisik Tahun Sebelumnya	**Tim I**					PUPR	Reviu
		1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	3-5 Februari 2025	3 Hari		
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Abdul Shomad, SE	Ketua				

		5	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota			Dikes	
		6	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		Tim II						
		1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	10-12 Februari 2025	3 Hari		
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Alfian, ST	Ketua				
		4	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		5	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		6	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		7	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		8	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
BULAN MARET								
5	Audit Dengan Tujuan Tertentu	1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	Tentatif	5 Hari	Tentatif	Audit
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Alfian, ST	Ketua				
		5	Abdul Shomad, SE	Anggota				
		6	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		7	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		8	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		9	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		10	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		11	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		12	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
BULAN APRIL								
6	Evaluasi Reformasi	1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	3-7 April 2025	5 Hari	OPD se-Kota Bima	Evaluasi
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				

	Birokrasi	3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Alfian, ST	Ketua				
		5	Abdul Shomad, SE	Anggota				
		6	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		7	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		8	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		9	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		10	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		11	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		12	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
7	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	8-15 April 2025	6 Hari	BPKAD/ Inspektorat	Penilaian Mandiri
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Alfian, ST	Ketua				
		5	Abdul Shomad, SE	Anggota				
		6	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		7	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		8	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		9	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		10	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		11	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		12	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
BULAN JUNI								
9	Reviu DAK Fisik - Kontrak	**Tim I**					Dikbud	Reviu
		1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	9 - 11 Juni 2025	3 Hari		
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				

		4	Abdul Shomad, SE	Ketua				
		5	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		6	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		Tim II						
		1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	16 - 18 Juni 2024	3 Hari	Dikes	
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Alfian, ST	Ketua				
		4	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		5	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		6	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		7	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		8	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
BULAN JULI								
10	Reviu DAK Fisik - Kontrak	**Tim I**						Reviu
		1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	1-3 Juli 2025	3 Hari	PUPR	
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Abdul Shomad, SE	Ketua				
		5	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		6	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		Tim II						
		1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	7-9 Juli 2025	3 Hari	DPPKB	
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Alfian, ST	Ketua				
		4	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		5	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		6	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				

		7	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		8	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
11	Evaluasi Reformasi Birokrasi	1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	14-16 Juli 2025	3 Hari	OPD se-Kota Bima	Evaluasi Reformasi
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Alfian, ST	Ketua				
		5	Abdul Shomad, SE	Anggota				
		6	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		7	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		8	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		9	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		10	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		11	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		12	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
12	PK Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	17-24 Juli 2024	6 Hari	OPD se-Kota Bima	Penjaminan Kualitas
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Alfian, ST	Ketua				
		5	Abdul Shomad, SE	Anggota				
		6	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		7	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		8	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		9	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		10	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		11	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		12	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
		11	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				

13	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	25-31 Juli 2025	5 Hari	BPKAD/ Inspektorat	Penilaian Mandiri
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Alfian, ST	Ketua				
		5	Abdul Shomad, SE	Anggota				
		6	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		7	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		8	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		9	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		10	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		11	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		12	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
BULAN AGUSTUS								
14	Audit Dengan Tujuan Tertentu	1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	tentatif	5 Hari	tentatif	Audit
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Alfian, ST	Ketua				
		5	Abdul Shomad, SE	Anggota				
		6	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		7	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		8	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		9	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		10	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		11	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		12	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
BULAN SEPTEMBER								
15	Reviu DAK Fisik -	**Tim I**					Dikbud	Reviu

	Tahap I	1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	9-11 September 2025	3 Hari		
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Abdul Shomad, SE	Ketua				
		5	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		6	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		Tim II					Dikes	
		1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	9-11 September 2025	3 Hari		
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Alfian, ST	Ketua				
		4	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		5	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		6	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		7	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		8	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
BULAN OKTOBER								
16	Reviu DAK Fisik - Tahap I	1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	1-3 Oktober 2025	3 Hari	DPPKB	Reviu
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Alfian, ST	Ketua				
		5	Abdul Shomad, SE	Anggota				
		6	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		7	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		8	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		9	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		10	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		11	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				

		12	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
17	Evaluasi Reformasi Birokrasi	1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	6-8 Oktober 2025	3 Hari	OPD se-Kota Bima	Evaluasi
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Alfian, ST	Ketua				
		5	Abdul Shomad, SE	Anggota				
		6	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		7	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		8	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		9	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		10	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		11	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		12	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
18	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	13-15 Oktober 2025	3 Hari	BPKAD/ Inspektorat	Penilaian Mandiri
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Alfian, ST	Ketua				
		5	Abdul Shomad, SE	Anggota				
		6	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		7	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		8	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		9	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		10	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		11	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		12	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
BULAN NOVEMBER								
19	Reviu DAK Fisik -	**Tim I**					Dikbud	Reviu

	Tahap I I	1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	3-5 November 2025	3 Hari		
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Abdul Shomad, SE	Ketua				
		5	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		6	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		Tim II						
		1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	10-12 November 2025	3 Hari	Dikes	
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Alfian, ST	Ketua				
		4	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		5	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		6	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		7	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		8	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
BULAN DESEMBER								
20	Reviu DAK Fisik - Tahap I I	**Tim I**						
		1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	1-3 Desember 2025	3 Hari	PUPR	Reviu
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Abdul Shomad, SE	Ketua				
		5	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		6	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		Tim II						
		1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	4-8 Desember 2025	3 Hari	DPPKB	
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Alfian, ST	Ketua				

		4	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		5	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		6	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		7	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		8	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
21	Evaluasi Reformasi Birokrasi	1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	15-17 Desember 2025	3 Hari	OPD se-Kota Bima	Evaluasi Reformasi
		2	Firdaus Ryswari, SH., MH	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Alfian, ST	Ketua				
		5	Abdul Shomad, SE	Anggota				
		6	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		7	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		8	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		9	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		10	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				
		11	Muhammad Aria R. Semba, S.Tr.IP	Anggota				
		12	Muhammad Nasrul Hadi, A.Md.Ak	Anggota				
22	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	1	Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E	Penanggungjawab	22-24 Desember 2025	3 Hari	OPD se-Kota Bima	Penilaian Mandiri
		2	Siswadi, S.Si., M.Ak	Pengendali Mutu				
		3	Muzakir, SP	Pengendali Teknis				
		4	Alfian, ST	Ketua				
		5	Abdul Shomad, SE	Anggota				
		6	Anggun Nurillah, SE	Anggota				
		7	Rudi Hartono, S.Sos	Anggota				
		8	Shanti Rahayu Hayathun N., SE., M.Ak	Anggota				
		9	Yunita Purnama Dewi Al Aqad, S.STP	Anggota				
		10	Putri Dinul Islamy, S.Ak	Anggota				

V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kota Bima Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima Periode 2024 – 2026. Dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksnakan dalam rangka mencapai target – target yang ingiin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan dinamika perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Keja Tahun 2025 merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kota Bima, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada Tahun 2025. Adapun keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan,disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu dukungan maupun Political Will dari Pemerintah Daerah dan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima karena tanpa adanya dukungan tersebut, kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil, seta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di Bidang Pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kota Bima umumnya.

Inspektur,

Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19680828 199203 1 010

PEMERINTAH KOTA BIMA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Soekarno-Hatta No.02 Raba-Bima Kode Pos 84113 Nusa Tenggara Barat
Telp. (0374) 646441-646442, Fax. (0374) 646569

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA
NOMOR : 100.3.3.6/ 318 / VII /2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025, perlu disusun dokumen perencanaan kerja Sekretariat Daerah Kota Bima untuk periode 1 (satu) tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106);
10. Peraturan Walikota Bima Bima Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 820);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman untuk Sekretariat Daerah Kota Bima dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

Drs. MUKHTAR, M.H
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690531 199003 1 004

Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima di Raba;
3. Kepala BPKAD Kota Bima di Raba.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA
NOMOR : 100.3.3.6/ 318 / VII /2024
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, maka Rencana Kerja (*RENJA*) Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (*RENJA*) Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk membuat perencanaan kinerja selama 1 (*satu*) tahun terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024 - 2026.

Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026, yang merupakan pedoman utama perencanaan kegiatan Sekretariat Kota Bima.

Dengan dibagi-baginya tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu yang lebih pendek, yaitu tahunan, diharapkan rencana kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman penganggaran maupun pelaksanaan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bima ini disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

Drs. MUKHTAR, M.H
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690531 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Tabel 2.2. Evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2023

Tabel 2.3. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024

Tabel 3.1. Tujuan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bima mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat ;

a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemalah dari Tujuan, Sasaran dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
b. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
c. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bima ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bima. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini diantaranya adalah:

a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar program antar bagian di Sekretariat Daerah Kota Bima.
b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar kegiatan di masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kota Bima.
c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.
d. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasa hukum, maksud dan tujuan dan hubungan dengan dokumen perencanaan lain serta sistematika laporan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunn lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Sekretariat Daerah Kota Bima, program dan kegiatan menguraikan mengenai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Rumusan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bima adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan. Gambaran mengenai evaluasi capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pencapaian kinerja pelayanan sekretariat daerah Kota Bima.

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI / CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terdapat perbaikan implementasi SAKIP, LPPD dan IKM diantaranya, perbaikan perencanaan tingkat Kota maupun SKPD, pengukuran kinerja, pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan evaluasi SAKIP dan LPPD SKPD. Indikator ini merupakan indikator Tujuan Sekretariat Daerah Kota Bima
2	Nilai Sakip	-	-	(85,00)	(68,48)	(68,48)	(68,48)	(67,42)	A (64,48)	A (64,48)	
3	Nilai LPPD	-	-	Sangat Tinggi (3,2300)	Sedang (2,80)	Sedang (2,90)	Sedang (3,00)	Sedang (2,7091)	Sedang (2,80)	Sedang (2,80)	
4	Skor rata-rata IKM	-	-	A (88,50)	B (80,00)	B (85,00)	A (88,35)	A (88,50)	A (88,50)	A (88,50)	
5	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan makanisme pembentukan produk hukum daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase PD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase PD yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	porsentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Indeks kerukunan umat beragama	-	-	80%	80%	82%	84%	80%	80%	82%	

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Bima tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sembilan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima. Evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima ditampilkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja				
		Target 2023				Porsentase
		Target		Realisasi		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120,00	Orang/bulan	120,00	Orang/bulan	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3,00	Dokumen	3,00	Dokumen	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18,00	Laporan	18,00	Laporan	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6,00	Dokumen	6,00	Dokumen	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0,00	Dokumen	0,00	Dokumen	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	Laporan	12,00	Laporan	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54,00	Laporan	54,00	Laporan	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	58,00	Unit	58,00	Unit	100,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30,00	unit	30,00	unit	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,00	Laporan	4,00	Laporan	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	Laporan	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	Laporan	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24,00	Unit	24,00	Unit	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28,00	Unit	28,00	Unit	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211,00	Unit	211,00	Unit	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10,00	Unit	10,00	Unit	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ipelihara/Direhabilitasi	3,00	Unit	3,00	Unit	100,00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	Orang/Bulan	2,00	Orang/Bulan	100,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10,00	Orang	10,00	Orang	100,00

Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	Orang/Bulan	2,00	Orang/Bulan	100,00
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretarit Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00
Penataan Organisasi	**Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10,00	Dokumen	10,00	Dokumen	100,00
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	100,00
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	100,00
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	900,00	Laporan	900,00	Laporan	100,00
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10,00	Laporan	10,00	Laporan	100,00
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12,00	Laporan	12,00	Laporan	100,00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**
Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	21,00	Dokumen	21,00	Dokumen	100,00
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6,00	Dokumen	6,00	Dokumen	100,00
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	100,00
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13,00	Dokumen	13,00	Dokumen	100,00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	3,00	Dokumen	3,00	Dokumen	100,00

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4,00	Dokumen	0,00	Dokumen	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bima sebagai Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SKPD dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap Tugas dan Fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
5. Adanya aplikai pengolahan data yang memadai untuk penemuan kembali surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah.
6. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut:

1. Adanya penafsiran yang berbeda terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sering berubah dan berubah dalam jangka waktu yang pendek dan tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda-beda.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah Kota Bima dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Kota Bima pada tahun 2022 mendapat nilai 68,17 sedangkan nilai 2023 mendapat nilai 67,42 dengan point B. Hal tersebut memacu Pemerintah Kota Bima untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya di tahun 2024 dan tahun-tahun mendatang.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mulai didengungkan memerlukan perhatian lebih dari semua pihak di Sekretariat Daerah sebagai leading sektor dan seluruh Pemerintah Kota Bima, dan ini merupakan tantangan tersendiri terhadap team perencana Sekretariat Daerah agar dapat benar-benar mempersiapkan implementasi Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah kedalam dokumen perencanaan.
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada SKPD, sehingga pada survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia, Kota Bima masih memperoleh point 86,89 pada tahun 2022 merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tingkat kepuasan Tinggi dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan perolehan point 88,05.
4. Masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota dimulai pada tahun 2025 yang menandakan tahun awal RPJMD Walikota dan Wakil Walikota terpilih, hal tersebut juga merupakan suatu tantangan, dimana dokumen perencanaan nantinya harus dapat mengakomodir Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bima dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

Bagian Pemerintahan :

1. Belum seluruh Perangkat Daerah menyampaikan Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tepat waktu sesuai dengan urusan yang dilaksanakan pada masing-masing PD.
2. Beberapa Data pendukung yang disampaikan belum lengkap dan tidak sesuai dengan format IKK

Bagian Kesejahteraan Rakyat :

1. Belum maksimalnya koordinasi terkait Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Kota Bima sesuai Program UHC (Universal Health Coverage)
2. Belum maksimalnya koordinasi terkait kegiatan dibidang Sosial dan Budaya.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam :

1. Masih adanya ego sektoral di masing-masing PD terkait dalam upaya pengendalian inflasi.
2. Pemahaman PD dan instansi terkait masih lemah tentang inflasi daerah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Lemahnya data/informasi yang dimiliki oleh PD teknis sehingga pelaporan tidak bisa maksimal
4. Kurangnya sumberdaya manusia kualitas dan kwatintas sehingga cukup menghambat proses pelaksanaan tugas.

Bagian Administrasi Pembangunan :

1. Dalam pelaksanaan Inspeksi masih adanya Paket pembangunan yang tidak sesuai dengan spek dan secedule penyelesaian.
2. Dalam pelaksanaan Temu wirasa terkadang undangan yang hadir melebihi dari undangan sehingga berakibat kekurangan persediaan makan dan minum

Bagian Umum :

1. Dalam pelaksanaan langkah - langkah proaktif guna mencapai visi dan misi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bima terdapat beberapa kendala yang harus diberikan perhatian guna peningkatan kinerja pada tahun – tahun selanjutnya. Kendala pertama bersumber pada kualitas sumber daya manusia yang dituntut untuk menguasai keahlian pada bidang yang menjadi tanggung jawab masing – masing personil. Dalam pengelolaan administrasi yang sangat bersentuhan dengan pengorganisasian file-file maupun surat-surat dinas sangat membutuhkan tenaga arsiparis yang handal demi terkelolanya tatanan arsip yang sistematis, efektif dan efisien.
2. Penguasaan teknologi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Sistem teknologi merupakan katalisator sistem kerja yang dapat membantu dari beberapa aspek antara lain penghematan waktu, biaya, tenaga, dan terjaminnya akurasi data guna menyajian laporan yang akuntabel. Keterbatasan ruang untuk penyimpanan dan pengelolaan arsip dan informasi juga menjadikan kendala membutuhkan solusi pemecahan.
3. Belum tercapainya pelayanan yang maksimal terhadap pemenuhan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Organisasi :

1. Belum seluruh SKPD menyampaikan Laporan Kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Belum seluruh SKPD menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018 tepat waktu.
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD.
4. Belum optimalnya penyusunan SOP di masing-masing SKPD.
5. Belum optimalnya pencapaian SPM ditingkat SKPD.
6. Belum optimalnya penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah yang dapat mencerminkan kebutuhan dan beban kerja perangkat daerah secara objektif.
7. Pembentukan Perangkat Daerah hendaknya didasarkan terhadap Analisa kebutuhan organisasi dan memeprtimbangkan prinsip-prinsip manajemen yang baik sehingga dapat berkinerja dengan maksimal. Namun beberapa Struktur Perangkat Daerah memerlukan Revisi karena belum dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan internal maupun eksternal pelaksanaan birokrasi.
8. Uraian tugas perangkat daerah merupakan kiblat Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan maupun tugas dan tanggungjawabnya, namun beberapa uraian tugas perangkat daerah tumpang tindih baik antara perangkat daerah maupun didalam internal perangkat daerah, sehingga seringkali tidak dapat menjadi suatu kiblat dalam menentukan Batasan wewenang antar perangkat daerah, maupun antar sub bagian organisasi didalam perangkat daerah.

Pada tingkat teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada bagian/unit kerja masih kurang.
2. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja dan peralatan yang digunakan belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Kota Bima termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kota Bima yaitu Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bima dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Bima sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Kinerja					
		Target 2024				Pagu Indikatif	
		Semula		Menjadi		RKPD 2024	APBD 2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**25.983.353.823,00**	**29.079.277.358,00**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**12.504.000,00**	**12.504.000,00**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	1.648.000,00	1.648.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	2.714.000,00	2.714.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	2.714.000,00	2.714.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	2.714.000,00	2.714.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	2.714.000,00	2.714.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**13.841.465.622,00**	**16.310.410.167,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120,00	Orang/bulan	120,00	Orang/bulan	13.205.893.122,00	15.674.837.667,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3,00	Dokumen	3,00	Dokumen	630.939.500,00	630.939.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	Laporan	1,00	Laporan	1.843.000,00	1.843.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18,00	Laporan	18,00	Laporan	2.790.000,00	2.790.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**13.234.200,00**	**15.334.200,00**

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6,00	Dokumen	6,00	Dokumen	13.234.200,00	15.334.200,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**1.487.736.136,00**	**1.526.736.376,00**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	63.889.100,00	63.889.100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	94.710.075,00	94.710.075,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	59.073.900,00	74.391.900,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0,00	Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	Laporan	12,00	Laporan	946.513.050,00	942.147.050,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54,00	Laporan	54,00	Laporan	323.550.011,00	351.598.251,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**		**100,00**	**Porsen**	**1.900.000,00**	**1.325.580.000,00**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	58,00	Unit	58,00	Unit	1.000.000,00	1.150.000.000,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30,00	unit	30,00	unit	900.000,00	175.580.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**3.276.982.880,00**	**2.799.715.880,00**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,00	Laporan	4,00	Laporan	292.264.900,00	295.564.900,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	Laporan	1.355.455.800,00	769.888.800,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	Laporan	1.629.262.180,00	1.734.262.180,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**1.713.868.000,00**	**1.584.473.000,00**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24,00	Unit	24,00	Unit	450.630.000,00	450.630.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28,00	Unit	28,00	Unit	653.470.000,00	653.470.000,00

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211,00	Unit	211,00	Unit	201.210.000,00	201.210.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10,00	Unit	10,00	Unit	339.492.000,00	210.097.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ipelihara/Direhabilitasi	3,00	Unit	3,00	Unit	69.066.000,00	69.066.000,00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**1.182.399.585,00**	**1.182.399.585,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	Orang/Bulan	2,00	Orang/Bulan	521.399.585,00	521.399.585,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	81.000.000,00	81.000.000,00
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10,00	Orang	10,00	Orang	180.000.000,00	180.000.000,00
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	Orang/Bulan	2,00	Orang/Bulan	400.000.000,00	400.000.000,00
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretarit Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**1.464.111.900,00**	**1.173.972.900,00**
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	1.039.808.000,00	1.010.008.000,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	261.801.000,00	1.462.000,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	Paket	162.502.900,00	162.502.900,00
Penataan Organisasi	**Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**440.378.500,00**	**449.378.250,00**
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10,00	Dokumen	10,00	Dokumen	188.266.200,00	197.265.950,00
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1,00	Laporan	1,00	Laporan	63.128.300,00	63.128.300,00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	63.065.650,00	63.065.650,00
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	62.904.000,00	62.904.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	63.014.350,00	63.014.350,00

	Daerah						
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**2.548.773.000,00**	**2.698.773.000,00**
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	900,00	Laporan	900,00	Laporan	1.666.060.000,00	1.816.060.000,00
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10,00	Laporan	10,00	Laporan	541.582.500,00	541.582.500,00
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12,00	Laporan	12,00	Laporan	341.130.500,00	341.130.500,00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		**100,00**		**100,00**		**13.640.628.890,00**	**14.452.018.150,00**
Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**950.479.190,00**	**1.925.476.750,00**
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	21,00	Dokumen	21,00	Dokumen	334.483.050,00	500.229.550,00
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6,00	Dokumen	6,00	Dokumen	269.263.240,00	978.515.300,00
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	346.732.900,00	446.731.900,00
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**11.730.959.700,00**	**11.438.958.400,00**
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13,00	Dokumen	13,00	Dokumen	11.383.386.800,00	10.358.985.500,00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3,00	Dokumen	3,00	Dokumen	189.739.100,00	219.139.100,00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2,00	Dokumen	2,00	Dokumen	157.833.800,00	860.833.800,00
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**959.190.000,00**	**1.087.583.000,00**
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	655,00	Dokumen	655,00	Dokumen	483.682.000,00	511.435.000,00
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2,00	Kasus	2,00	Kasus	296.672.000,00	274.232.000,00

Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	90,00	Dokumen	90,00	Dokumen	178.836.000,00	301.916.000,00
Program Perekonomian Dan Pembangunan	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan**	**100,00**		**100,00**		**2.111.897.960,00**	**2.951.976.250,00**
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**398.378.600,00**	**448.378.600,00**
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5,00	Dokumen	5,00	Dokumen	73.726.300,00	73.726.300,00
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4,00	Laporan	4,00	Laporan	199.394.700,00	249.394.700,00
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8,00	Dokumen	8,00	Dokumen	68.815.000,00	68.815.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	56.442.600,00	56.442.600,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	0,00	0,00
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**1.200.656.060,00**	**1.254.984.750,00**
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen	73.706.250,00	73.706.250,00
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6,00	Laporan	6,00	Laporan	979.724.310,00	1.034.053.000,00
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16,00	Laporan	16,00	Laporan	147.225.500,00	147.225.500,00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**400.875.000,00**	**1.136.624.600,00**
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	72,00	Dokumen	72,00	Dokumen	97.882.400,00	228.814.100,00
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	32,00	Dokumen	32,00	Dokumen	145.667.700,00	353.968.500,00
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	46,00	Orang	46,00	Orang	157.324.900,00	553.842.000,00
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**Porsen**	**111.988.300,00**	**111.988.300,00**
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	34.286.900,00	34.286.900,00

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	77.701.400	77.701.400,00
						41.735.880.673	**46.483.271.758**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat. Peranan Sekretariat Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengusung tema "*Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas*" yang diimplementasikan dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Salah satu program prioritas terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bima adalah prioritas Reformasi Birokrasi yang akan mulai digarap sebagai upaya dukungan terhadap pencapaian program nasional. Selain pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah Kota Bima juga akan meningkatkan peran pada kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik. Tabel 3.2 menyajikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bima.

Dalam upaya mendukung peran Kota Bima dalam membangun Daerah yang selaras dengan arah prioritas pembangunan nasional, Sekretariat Daerah Kota Bima mendukung melalui:

1. Prioritas Pangan dan Prioritas Perdagangan (Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting)

   Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan di Kota Bima, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bima turut mendukung melalui kebijakan stabilitasi harga bahan pangan, dimana Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bima melakukan monitoring terhadap harga bahan pokok dan selanjutnya jika ditemukan harga bahan pangan diatas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan, dilakukan upaya berupa pelaksanaan pasar murah di titik-titik yang berpotensi menjadi suatu titik rawan peningkatan harga bahan pangan pokok.

2. Prioritas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

   Dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang pengembangan UMKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya Bagian Perekonomian membentuk Tim Monev KUR dan Tim Monitoring Penyertaan Modal Daerah. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi sejauhmana kebijakan pemerintah mampu berkinerja sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Prioritas Pengelolaan Pengawasan Perkotaan

Dalam rangka mendukung program nasional pengelolaan pengawasan perkotaan, Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan yang disinergikan dalam pelaksanaan Inspeksi Kegiatan Pembangunan di Kota Bima Bersama Kepala Daerah. Hal ini merupakan suatu dukungan dalam bidang pengawasan perkotaan.

4. Prioritas Otonomi Daerah dan Desentralisasi

a. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka mendukung prioritas otonomi daerah dan desentralisasi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima mendukung melalui pembentukan produk hukum daerah yang responsif, akomodatif dan akuntabel. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, fokus yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima adalah menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan serta meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah.

b. Evaluasi Perangkat Daerah

Peningkatan efektivitas tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan suatu tantangan bagi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima, dimana fokus penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Operasional Prosedur, Sistem Kerja, Budaya Kerja dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah belum terselenggara secara maksimal. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, fokus evaluasi Perangkat Daerah ini juga diarahkan untuk menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal instansi pemerintah serta meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kedua hal tersebut juga merupakan suatu pengungkit dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bima. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026, maka selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pengaruh kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100
2.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	68,48
3.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah	3. Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Nilai LPPD	2,90
4.	Tertatanya Produk Hukum Daerah	4. Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan makanisme pembentukan produk hukum daerah	100
5.	Meningkatkan Pengendalian Administrasi Pembangunan	5. Meningkatnya kepatuhan PD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Persentase PD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	100
		6. Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Rasio Nilai Beanja yang dilakukan melalui pengadaan	29,30
6.	Meningkatkan pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	7. Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	porsentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti	100
7.	meningkatkan kualitas pelayanan admnistrasi dan sarana prasarana pendukung kinerja aparatur	8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekertariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100
8.	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	9. Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	82

Sumber : Renstra Setda Kota Bima 2024-2026

.Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Bima telah ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2025	Program Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pengaruh kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Program Perekonomian dan Pembangunan
2.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	68,48	
3.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah	3. Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Nilai LPPD	2,90	
4.	Tertatanya Produk Hukum Daerah	4. Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan makanisme pembentukan produk hukum daerah	100	
5.	Meningkatkan Pengendalian Administrasi Pembangunan	5. Meningkatnya kepatuhan PD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Persentase PD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	100	
		6. Meningkatnya akuntabilitas *Layanan Pengadaan Barang/Jasa* Pemerintah Daerah	Rasio Nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	29,30	
6.	Meningkatkan pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	7. Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	porsentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti	100	

7.	meningkatkan kualitas pelayanan admnistrasi dan sarana prasarana pendukung kinerja aparatur	8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekertariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100	
8.	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	9. Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	82	

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka direncanakan program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bima adalah sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.3.
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana
		Target 2025				
		Lokasi	Target			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**	**Kota Bima**	**100,00**	**Porsen**	**29.079.277.358,00**	**DAU**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Kota Bima**	**100,00**	**Porsen**	**12.504.000,00**	**DAU**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	1,00	Dokumen	1.648.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	1,00	Dokumen	2.714.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	1,00	Dokumen	2.714.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	1,00	Dokumen	2.714.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	1,00	Dokumen	2.714.000,00	DAU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**100,00**	**Porsen**	**16.310.410.167,00**	**DAU**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	120,00	Orang/bulan	15.674.837.667,00	DAU
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	3,00	Dokumen	630.939.500,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	1,00	Laporan	1.843.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bima	18,00	Laporan	2.790.000,00	DAU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**100,00**	**Porsen**	**15.334.200,00**	**DAU**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Bima	6,00	Dokumen	15.334.200,00	DAU
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bima**	**100,00**	**Porsen**	**1.526.736.376,00**	**DAU**

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bima	1,00	Paket	63.889.100,00	DAU
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bima	1,00	Paket	94.710.075,00	DAU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bima	1,00	Paket	74.391.900,00	DAU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bima	0,00	Dokumen	0,00	DAU
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bima	12,00	Laporan	942.147.050,00	DAU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	54,00	Laporan	351.598.251,00	DAU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bima**	**100,00**		**1.325.580.000,00**	**DAU**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bima	58,00	Unit	1.150.000.000,00	DAU
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bima	30,00	unit	175.580.000,00	DAU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bima**	**100,00**	**Porsen**	**2.799.715.880,00**	**DAU**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	4,00	Laporan	295.564.900,00	DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bima	12,00	Laporan	769.888.800,00	DAU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bima	12,00	Laporan	1.734.262.180,00	DAU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah**	**Kota Bima**	**100,00**	**Porsen**	**1.584.473.000,00**	**DAU**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bima	24,00	Unit	450.630.000,00	DAU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bima	28,00	Unit	653.470.000,00	DAU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bima	211,00	Unit	201.210.000,00	DAU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bima	10,00	Unit	210.097.000,00	DAU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ipelihara/Direhabilitasi	Kota Bima	3,00	Unit	69.066.000,00	DAU
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kota Bima**	**100,00**	**Porsen**	**1.182.399.585,00**	**DAU**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bima	2,00	Orang/Bulan	521.399.585,00	DAU

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Bima	1,00	Paket	81.000.000,00	DAU
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bima	10,00	Orang	180.000.000,00	DAU
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bima	2,00	Orang/Bulan	400.000.000,00	DAU
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretarit Daerah**	**Kota Bima**	**100,00**	**Porsen**	**1.173.972.900,00**	**DAU**
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Bima	1,00	Paket	1.010.008.000,00	DAU
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Bima	1,00	Paket	1.462.000,00	DAU
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kota Bima	1,00	Paket	162.502.900,00	DAU
Penataan Organisasi	**Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi**	**Kota Bima**	**100,00**	**Porsen**	**449.378.250,00**	**DAU**
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Bima	10,00	Dokumen	197.265.950,00	DAU
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Bima	1,00	Laporan	63.128.300,00	DAU
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Bima	2,00	Dokumen	63.065.650,00	DAU
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Bima	4,00	Dokumen	62.904.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Bima	2,00	Dokumen	63.014.350,00	DAU
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Kota Bima**	**100,00**	**Porsen**	**2.698.773.000,00**	**DAU**
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Bima	900,00	Laporan	1.816.060.000,00	DAU
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Bima	10,00	Laporan	541.582.500,00	DAU
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Bima	12,00	Laporan	341.130.500,00	DAU
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		**Kota Bima**	**100,00**		**14.452.018.150,00**	**DAU**
Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan**	**Kota Bima**	**100,00**	**Porsen**	**1.925.476.750,00**	**DAU**
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Bima	21,00	Dokumen	500.229.550,00	DAU
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Bima	6,00	Dokumen	978.515.300,00	DAU
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Bima	4,00	Dokumen	446.731.900,00	DAU

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Kota Bima**	**100,00**	**Porsen**	**11.438.958.400,00**	**DAU**
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Bima	13,00	Dokumen	10.358.985.500,00	DAU
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kota Bima	3,00	Dokumen	219.139.100,00	DAU
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kota Bima	2,00	Dokumen	860.833.800,00	DAU
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Kota Bima**	**100,00**	**Porsen**	**1.087.583.000,00**	**DAU**
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Bima	655,00	Dokumen	511.435.000,00	DAU
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Bima	2,00	Kasus	274.232.000,00	DAU
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kota Bima	90,00	Dokumen	301.916.000,00	DAU
Program Perekonomian Dan Pembangunan	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan**	**Kota Bima**	**100,00**		**2.951.976.250,00**	**DAU**
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Kota Bima**	**100,00**	**Porsen**	**448.378.600,00**	**DAU**
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Bima	5,00	Dokumen	73.726.300,00	DAU
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Bima	4,00	Laporan	249.394.700,00	DAU
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Bima	8,00	Dokumen	68.815.000,00	DAU
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kota Bima	1,00	Dokumen	56.442.600,00	DAU
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Bima	1,00	Dokumen	0,00	DAU
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan**	**Kota Bima**	**100,00**	**Porsen**	**1.254.984.750,00**	**DAU**
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kota Bima	1,00	Dokumen	73.706.250,00	DAU
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Bima	6,00	Laporan	1.034.053.000,00	DAU
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Bima	16,00	Laporan	147.225.500,00	DAU
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Kota Bima**	**100,00**	**Porsen**	**1.136.624.600,00**	**DAU**
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bima	72,00	Dokumen	228.814.100,00	DAU

Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Bima	32,00	Dokumen	353.968.500,00	DAU
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bima	46,00	Orang	553.842.000,00	DAU
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Kota Bima**	**100,00**	**Porsen**	**111.988.300,00**	**DAU**
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kota Bima	4,00	Dokumen	34.286.900,00	DAU
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kota Bima	4,00	Dokumen		DAU
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kota Bima	4,00	Dokumen	77.701.400,00	DAU
					46.483.271.758,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan, indikator dan target perencanaan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada table 4.1

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	**1**	**1**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**18.896.742.641**			**19.841.579.773**
4	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 porsen	120 Orang/bulan	100 porsen	18.265.803.141	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	19.179.093.298
4	1	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 porsen	3 Dokumen	100 porsen	630.939.500	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	662.486.475
4	**1**	**1**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**15.334.200**			**16.100.910**
4	1	1	2.05	3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 porsen	6 Dokumen	100 porsen	15.334.200	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	16.100.910
4	**1**	**1**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**1.526.736.376**			1.603.073.195
4	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terwujudnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	100 porsen	1 Paket	100 porsen	63.889.100	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	67.083.555
4	1	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terwujudnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	100 porsen	1 Paket	100 porsen	94.710.075	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	99.445.579

4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terwujudnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	100 porsen	1 Paket	100 porsen	74.391.900	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	78.111.495
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	100 porsen	12 Laporan	100 porsen	942.147.050	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	989.254.403
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	100 porsen	54 Laporan	100 porsen	351.598.251	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	369.178.164
4	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							-			-
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 porsen	58 Unit	100 porsen	-	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	-
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 porsen	10 Unit	100 porsen	-	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	-
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2.773.715.880**			2.912.401.674
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya layanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 porsen	4 Laporan	100 porsen	295.564.900	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	310.343.145

4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terwujudnya layanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 porsen	12 Laporan		100 porsen	769.888.800	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	808.383.240
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terwujudnya layanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 porsen	12 Laporan		100 porsen	1.708.262.180	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	1.793.675.289
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.584.473.000**			1.663.696.650
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpenuhinya kebutuhan pemenfaatan barang milik daerah	100 porsen		24	100 porsen	450.630.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	473.161.500
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya kebutuhan pemenfaatan barang milik daerah	100 porsen	28 Unit		100 porsen	653.470.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	686.143.500
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya kebutuhan pemenfaatan barang milik daerah	100 porsen	211 Unit		100 porsen	201.210.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	211.270.500
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya kebutuhan pemenfaatan barang milik daerah	100 porsen	10 Unit		100 porsen	210.097.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	220.601.850
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya kebutuhan pemenfaatan barang milik daerah	100 porsen	3 Unit		100 porsen	69.066.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	72.519.300

4	**1**	**1**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**							**1.182.399.585**			1.241.519.564
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 porsen	2 Orang/Bulan	100 porsen	521.399.585	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	547.469.564
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Terwujudnya Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 porsen	1 Paket	100 porsen	81.000.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	85.050.000
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 porsen	10 Orang	100 porsen	180.000.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	189.000.000
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 porsen	2 Orang/Bulan	100 porsen	400.000.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	420.000.000
4	**1**	**1**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**							**1.173.972.900**			**2,062,178,347**
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 porsen	1 Paket	100 Porsen	1010008000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	1.060.508.400

4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 porsen	1 Paket	100 Porsen	1462000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	1.535.100
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 porsen	1 Paket	100 Porsen	162502900	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	170.628.045
4	**1**	**1**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**							**2.698.773.000**			2.833.711.650
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 porsen	900 Laporan	100 porsen	1.816.060.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	1.906.863.000
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 porsen	10 Laporan	100 porsen	541.582.500	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	568.661.625
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 porsen	12 Laporan	100 porsen	341.130.500	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	358.187.025
4	**1**	**1**	**2.13**		**Penataan Organisasi**							**449.378.250**			471.847.163
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Penataan Organisasi	100 porsen	10 Dokumen	100 porsen	197265950	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	207.129.248
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Penataan Organisasi	100 porsen		100 porsen	63128300	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	66.284.715

4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	100 porsen	2 Dokumen	100 porsen	63065650	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	66.218.933
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Penataan Organisasi	100 porsen	4 Dokumen	100 porsen	62904000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	66.049.200
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penataan Organisasi	100 porsen	2 Dokumen	100 porsen	63014350	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	66.165.068
4	**1**	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**							**448.378.600**			470.797.530
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 porsen	5 Dokumen	100 porsen	73726300	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 porsen	77.412.615
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 porsen	4 Laporan	100 porsen	249394700	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 porsen	261.864.435
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 porsen	8 Dokumen	100 porsen	68815000	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 porsen	72.255.750
4	1	3	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 porsen	1 Dokumen	100 porsen	55442600	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 porsen	58.214.730

4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 porsen	1 Dokumen	100 porsen	1000000	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 porsen	1.050.000
4	**1**	**3**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**							**111.988.300**			117.587.715
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Terselenggaranya Kebijakan Sumber Daya Alam	100 porsen	4 Dokumen	100 porsen	34.286.900	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 porsen	36.001.245
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Terselenggaranya Kebijakan Sumber Daya Alam	100 porsen	4 Dokumen	100 porsen		Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 porsen	-
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Terselenggaranya Kebijakan Sumber Daya Alam	100 porsen	4 Dokumen	100 porsen	77.701.400	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 porsen	81.586.470
4	**1**	**2**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**							**10.913.958.400**			11.459.656.320

4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 porsen	13 Dokumen	100 porsen	9.833.985.500	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 porsen	10.325.684.775
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 porsen	3 Dokumen	100 porsen	219.139.100	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 porsen	230.096.055
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 porsen	2 Dokumen	100 porsen	860.833.800	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 porsen	903.875.490
4	**1**	**2**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**							**1.087.583.000**			1.141.962.150

4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 porsen	655 Dokumen	100 porsen	511435000	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 porsen	537.006.750
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 porsen	2 Kasus	100 porsen	274232000	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 porsen	287.943.600
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 porsen	90 Dokumen	100 porsen	301916000	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 porsen	317.011.800
4	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**12.504.000**			13.129.200
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 porsen	1 Dokumen	100 porsen	1.648.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	1.730.400
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terwujudnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 porsen	1 Dokumen	100 porsen	2.714.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	2.849.700

4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terwujudnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 porsen	1 Dokumen	100 porsen	2.714.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	2.849.700
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terwujudnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 porsen	1 Dokumen	100 porsen	2.714.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	2.849.700
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terwujudnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 porsen	1 Dokumen	100 porsen	2.714.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	2.849.700
4	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4.633.000**			4.864.650
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 porsen	1 Laporan	100 porsen	1.843.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	1.935.150
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 porsen	18 Laporan	100 porsen	2.790.000	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 porsen	2.929.500
4	**1**	**3**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**							**1.254.984.750**			1.317.733.988

4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Terlaksanya Admnistrasi Pembangunan	100 porsen	1 Dokumen	100 porsen	73.706.250	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 porsen	77.391.563
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksanya Admnistrasi Pembangunan	100 porsen	6 Laporan	100 porsen	1.034.053.000	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 porsen	1.085.755.650
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksanya Admnistrasi Pembangunan	100 porsen	16 Laporan	100 porsen	147.225.500	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 porsen	154.586.775
4	**1**	**2**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**							**1.225.476.750**			1.286.750.588
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksanya Admnistrasi Tata Pemerintahan	100 porsen	7 Dokumen	100 porsen	600.229.550	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 porsen	630.241.028
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksanya Admnistrasi Tata Pemerintahan	100 porsen	3 Dokumen	100 porsen	278.515.300	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 porsen	292.441.065
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksanya Admnistrasi Tata Pemerintahan	100 porsen	5 Dokumen	100 porsen	346.731.900	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 porsen	364.068.495
4	**1**	**3**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**							**698.102.600**			733.007.730
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 porsen	72 Dokumen	100 porsen	225.814.100	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 porsen	237.104.805
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 porsen	36 dokumen	100 porsen	150.096.500	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 porsen	157.601.325
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 porsen	46 Orang	100 porsen	322.192.000	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 porsen	338.301.600

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2024 – 2026. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Bima dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kota Bima yang telah ditetapkan pada tahun 2024 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

Lebih dari sekedar memenuhi amanah Peraturan Perundang-Undangan, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah Kota Bima memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis.

Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bima, meskipun perlu disampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif, dimana dalam pelaksanaanya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan dimasa mendatang, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja dimasa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalm pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2025.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

Drs. MUKHTAR, M.H
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690531 199003 1 004

RENJA

(RENCANA KERJA TAHUN 2025)

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BIMA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun 2025 disusun berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk menetapkan standar ukuran keberhasilan pembangunan selama lima tahun yaitu tahun 2025 dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sekaligus sabagai dasar evaluasi keberhasilan program dan kegiatan dalam tiap tahunnya.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan *(stakeholders)* pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima, partisipasi seluruh pejabat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pada bidang pendidikan sampai dengan saat ini. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pada bidang Pendidikan yang hendak dicapai Dinas Pendidkan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima pada periode 2025.

Rencana Kerja (Renja) ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima bertujuan untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi organisasi, sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima.

Kota Bima, 6 Januari 2025
PLH. Kepala Dinas

PEMERINTAH KOTA BIMA
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Drs. M Saleh
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19660119199403 10

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan capaian Renstra 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 20
2.4 Review Terhadap Rancangan Renja RKPD..... 24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 37

BAB Ill. Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 38
3.2 Sasaran Renja 38
3.3 Program Kegiatan dan Indikator Program 39

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan 49

BAB V. Penutup 50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah disusun dalam rangka Menyusun rancangan awal RKPD dengan mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu sebagai saran dan masukan untuk tahun berikutnya, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

A. Persiapan penyusunan;
B. Penyusunan Rancangan Renja;
C. Penyusunan rancangan;
D. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
E. Perumusan Rancangan Renja; dan
F. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalarn Rancangan Renja RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah diguna.kan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menyusun Rancangan Renja Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam ha1 ini Rancangan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun 2025. Penyusunan Rancangan Renja Renja Dinas Pendidian, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun 2025 mengacu pada program dan kegiatan perangkat daerah Kota Bima Tahun 2024 serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD, Organisasi Perangkat Daerah juga menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD). Penyusunan Renstra-OPD ini mengacu pada RPJMD. Renstra-OPD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa produk hukum yang dipakai dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencaa Pembangunann Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyara.kat di Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota;
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas daerah Kota Bima;
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Rencana Startegis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima. Oleh karena itu penyusunan Renja dimaksudkan untuk acuan bagi penyelenggaraan program/kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima selama Periode 1 (satu) tahun.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan di bidang pendidikan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Renja RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program Kegiatan dan Indikator Program

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Salah satu indikator kinerja terukur adalah berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang memuat laporan kinerja tahun berjalan (data kuantitatif capaian kinerja berdasarkan input–output). Kinerja sektor pendidikan justru data kuantitatif diatas tidak menggambarkan hasil, tetapi ditunjukkan oleh dampak program (outcome). Pada Program kegiatan tahun 2024 terdapat berbagai macam capaian yang didapat olah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, adapun indikator program kegiatan yang memenuhi hasil yang telah direncanakan sebagai berikut :

1. Program kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2024, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 173.162.031.189.00 dengan realisasi anggaran Rp. 173.702.224.592,00 dan capaian sebesar 99,95% yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan alokasi anggaran Rp 264.487.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 257.021.845,00 atau capaian 97,18%
   b. Administrasi keuangan perangkat daerah dengan alolaksi anggaran Rp. 170.605.019,889 dan terealisasi sebesar Rp. 170.549.842.245 dengan capaian 99,97%
   c. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.493.000,00 dan terealisasi Rp. 43.293.000,00 dengan capaian 99,54%
   d. Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan alokasi anggaran Rp. 346.894.900,00 dan terealisasi Rp. 336.528.900,00 dengan capaian 97,01%
   e. Administrasi umum perangkat daerah dengan alokasi anggaran Rp. 1.397.235.300,00 dan terealisasi Rp. 1.391.152.387,00 dengan capaian 99,56%
   f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 173.880.600,00 dan terealisasi Rp. 164.567.563,00 dengan capaian 94,64%
   g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 331.020.000,00 dan terealisasi Rp. 329.818.652,00 dengan capaian 99,64%
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

   Pada Tahun 2024 jumlah dana sebesar Rp. 63.363.085.050,00 dengan realisasi Rp. 31.281.327.699,00 dengan capaian 49,37% yang digambarkan pada kegiatan berikut :
   a. Pengelolaan pendidikan sekolah Dasar dengan anggaran Rp. 34.259.822.100,00 dan terealisasi Rp. 17.057.270.028,00 dengan capaian 49,79%
   b. Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama dengan anggaran Rp. 19.814.669.000,00 dan terealisasi Rp. 11.522.018.241,00 dengan capaian 58.15%

c. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dengan anggaran Rp. 7.307.515.850,00 dan terealisasi Rp. 2.518.995.330,00 dengan capaian 34,47%
d. Pengelolaan pendidikan Non formal/kesetaraan dengan anggaran Rp. 1.981.078.100,00 dan terealisasi Rp. 183.044.100,00 dengan capaian 9,24%

3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pada Tahun 2024 jumlah dana sebesar Rp. 28.050.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 28.050.000,00 dan capaian sebesar 100% yang digambarkan pada kegiatan berikut :

a. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 28.050.000,00 dan terealisasi Rp. 28.050.000,00 dengan capaian sebesar 100%

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Pada Tahun 2024 jumlah dana sebesar Rp. 348.878.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 343.939.280,00 dan capaian sebesar 98,58% yang digambarkan pada kegiatan berikut :

a. Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 218.778.000,00 dan terealisasi Rp. 215.867.400.00 dengan capaian 98,67%
b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah dengan alokasi anggaran Rp. 130.100.000,00 dan terealisasi Rp. 128.071.880,00 dengan capaian 98,44%

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Pada tahun anggaran 2024 jumlah dana sebesar Rp. 2.836.941.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.813.476.498,00 dan capaian sebesar 99,17% yang digambarkan pada kegiatan berikut :

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 37.571.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 36.860.000,00 atau sebesar 98,11%.
2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 474.370.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 451.616.498,00 atau sebesar 95,20%.
3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan Alokasi Anggaran Rp. 1.825.000,000,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 1.825.000,000,00 atau sebesar 100%
4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan Alokasi Anggaran Rp. 500.000.000,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 500.000.000,00 atau Sebesar 100%

Berkaitan dengan hal diatas Dinas Pendidikan menyajikan dasar pengukuran kinerja, kegiatan dan sasaran sampai periode Tahun 2024 dengan Tabel sebagai berikut :

Tabel T.C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kota Bima

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcames)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1)2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**204.381.602.291.00**	**86,40%**
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**204.381.602.291.00**	**86,40%**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Cakupan Program Penunjang urusan pemerintah Daerah**	**100%**						**173.072.224.592.00**	**99,95%**
1	**01**	**01**	2		**Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daearh**	**Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**						**257.021.845.00**	**97,18%**
1	01	01	2	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah							0	0,00%
1	01	01	2	0002	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Pennyusunan							15.203.000,00	100%
1	01	01	2	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							14.876.000,00	99,89%
1	01	01	2	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							16.090.500,00	100%

1	01	01	2	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ahtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Caoaian Kinerja dan Okhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD							83.477.200,00	96,59%
1		01	2	0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah							127.375.145,00	96,58%
1	**01**	**01**	**2**		**Administasi keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**100%**						**170.549.842.245,00**	**99,97%**
1	01	01	2	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN							170.358.601.945,00	99,97%
1	01	01	2	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD							149.547.000,00	97.55%
1	01	01	2	0004	Koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD							12.163.900,00	100%
1	01	01	2	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							14.404.000,00	100%
1	01	01	2	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan							9.988.900,00	100%
1	01	01	2	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							5.136.500,00	100%
1	**01**	**01**	**2**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**						**43.293.000,00**	**99,54%**
1	01	01	2	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							3.849.600,00	100%
1	01	01	2	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD							4.860.000,00	100%
1	01	01	2	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							34.583.400,00	99,43%
1	**01**	**01**	**2**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**						**336.528.900,00**	**97,01%**
1	01	01	2	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							29.884.000,00	99,61%

1	01	01	2	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							231.226.100,00	98,40%
1	01	01	2	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							27.800.000,00	82,25%
1	01	01	2	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti							47.618.800,00	98,96%
1	**01**	**01**	**2**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**						**1.391.152.387,00**	**99,56%**
1	01	01	2	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							294.500.000,00	98,08%
1	01	01	2	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							16.230.000,00	100%
1	01	01	2	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							181.806.400,00	99,93%
1	01	01	2	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							129.420.000,00	100%
1	01	01	2	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							622.285.987.00	99,97%
1	01	01	2	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							146.910.000,00	100%
1	**01**	**01**	**2**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksannya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**						**164.567.563,00**	**94,64%**
1	01	01	2	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							134.667.563,00	93,53%
1	01	01	2	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							29.900.000,00	100%
1	**01**	**01**	**2**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**						**329.818.652,00**	**99,64%**
1	01	01	2	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							59.568.652,00	98,84%

1	01	01	2	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							23.750.000,00	100%
1	01	01	2	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							246.500.000,00	99,80%
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**31.281.327.699.00**	**49,37%**
1	01	02	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Kemampuan Literasi SD Negeri/Swasta Se-Kota Bima	100%						17.057.270.028.00	49,79%
1	01	02	2	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun							8.933.510.650,00	96,65%
1	01	02	2	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia							149.739.000.00	99,83%
1	01	02	2	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik							115.025.000,00	96,29%
1	01	02	2	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							2.374.838.300,00	99,34%
1	01	02	2	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							435.545.228,00	97,05%
1	01	02	2	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS							-	0,00%
1	01	02	2	0035	Pembinaan Penggunaan Tehnologi, Informasi dan Komunikatif (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Tehnologi, Informasi dan Komunikatif (TIK) untuk Pendidikan							82.800.000.00	87,34%
1	01	02	2	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							98.910.000.00	95,37%
1	01	02	2	0041	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terfasilitasi							5.410.000.00	100%
1	01	02	2	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah							1.639.613.150.00	74,19%

1	01	02	2	0049	Bimbingan Tekhnis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Tekhnis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan							38.025.000.00	97,44%
1	01	02	2	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah direhabilitasi Sedang/Berat							3.183.853.700.00	88,66%
1	**01**	**02**	**2**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Meningkatnya Kemampuan Literasi SMP Negeri/Swasta Se-Kota Bima**	**100%**						**11.522.018.241.00**	**58,15%**
1	01	02	2	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun							8.101.412.950,00	90,69%
1	01	02	2	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah direhabilitasi Sedang/Berat							2.310.999.000.00	85,75%
1	01	02	2	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi Lomba Akademik/Non Akademik							134.140.211.00	95,33%
1	01	02	2	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							728.767.080.00	98,10%
1	01	02	2	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan							108.650.000.00	95,96%
1	01	02	2	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS							-	0,00%
1	01	02	2	0048	Pembinaan Penggunaan Tehnologi, Informasi dan Komunikatif (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Tehnologi, Informasi dan Komunikatif (TIK) untuk Pendidikan							-	0,00%
1	01	02	2	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							96.790.000.00	84,91%
1	01	02	2	0054	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terfasilitasi							5.724.000.00	100%
1	01	02	2	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar							16.890.000.00	97,12%

1	01	02	2	0060	Bimbingan Tekhnis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Tekhnis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan							18.645.000.00	83,76%
1	**01**	**02**	**2**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun**	**100%**						**2.518.995.330.00**	**34,47%**
1	01	02	2	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun							1.457.249.300.00	94,11%
1	01	02	2	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar							194.159.330.00	98,08%
1	01	02	2	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD							51.600.000.00	99,23%
1	01	02	2	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							531.118.500.00	91,04%
1	01	02	2	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen							220.798.400.00	99,60%
1	01	02	2	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP							-	0,00%
1	01	02	2	0022	Pembinaan Penggunaan Tehnologi, Informasi dan Komunikatif (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Tehnologi, Informasi dan Komunikatif (TIK) untuk Pendidikan							57.600.000.00	60,00%
1	01	02	2	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							-	0,00%
1	01	02	2	0026	Sosialoisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan							6.469.800.00	100%
1	**01**	**02**	**2**		**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah 7 – 18 Tahun**	**100%**						**183.044.100.00**	**9,24%**
1	01	02	2	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen							64.458.000.00	84,36%

1	01	02	2	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP							-	0,00%
1	01	02	2	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							6.480.000.00	50,00%
1	01	02	2	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar							112.106.100.00	85,80%
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		**100%**						28.050.000.00	100%
1	01	04	2		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang TK, SD, SMP yang Terlayani							28.050.000.00	100%
1	01	04	2	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							28.050.000.00	100%
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**2.610.209.480.00**	**80.62%**
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								**2.610.209.480.00**	**80,62%**
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**								**343.939.280.00**	**98,58%**
2	**19**	**02**	**2**		**Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemberdayaan, dan Pengembagan Pemuda Pelopor**	**100%**						**215.867.400.00**	**98,67%**
2	19	02	2	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya							28.849.400.00	99,89%

						Saingnya							
2	19	02	2	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan							187.018.000.00	98,48%
2	**19**	**02**	**2**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudan di Kota Bima	**100%**						**128.071.880.00**	**98,44%**
2	19	02	2	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan							128.071.880.00	98,44%
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**								**2.813.476.498.00**	**99,17%**
3	**2**	**01**			**Pembinaan dan Pengenbangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Jenjang Pendidikan	**100%**						**36.860.000.00**	**98,11%**
3	2	01	3		Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan termanfaatkan	100%						36.860.000.00	98,11%
3	**2**	**03**			**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Terlaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi**	**100%**						**451.616.498.00**	**95,20%**
3	2	03	3		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	100%						451.616.498.00	95,20%
3	**2**	**04**			**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**100%**						**1.825.000.000.00**	**100%**
3	2	04	3		Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	100%						1.825.000.000.00	100%
3	**2**	**05**			**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Terlaksananya Kegiatan Olahraga Rekreasi**	**100%**						**500.000.000.00**	**100%**

3	2	05	1		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	100%						500.000.000.00	100%

Dari Pengukuran tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa program kegiatan yang tidak memenuhi hasil target dan kegiatan yang memenuhi target adapun Faktor penyebabnya serta solusinya akan jelaskan sebagai berikut :

1. **Realisasi/Kegiatan Yang Memenuhi Target yang Direncakanan**

   Adapun kegiatan yang memenuhi target yang direncanakan adalah Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2. **Realisasi Program/Kegiatan dan Indikator Sasaran dan Program Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

   Realisasi Kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima pada Tahun Anggaran 2024 Program yang tidak memenuhi target kinerja adalah Program Pengelolaan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Anak Usia Dini pada level Kurang baik hal ini dapat dibuktikan dengan capaian realisasi fisik sampai dengan bulan Desember berada pada Prosentase 49,37% dengan Capaian Realisasi Keuangan sebesar Rp. 31.281.327.699,00 dari total Pagu Anggaran Rp. 63.363.085.050.00

   Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapaianya target kegiatan yang telah ditetapkan diantaranya:

   a. Masih Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan.
   b. Kompetensi guru relatif rendah dibandingkan dengan rata – rata nasional
   c. Kompetensi siswa belum memiliki daya saing
   d. Angka tidak melanjutkan masih masif (dari jenjang SMA/SMK ke PT)
   e. Kualitas pembelajaran masih rendah

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima berisi kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan, Adapun Beberapa Poin Penting dari Kinerja Tersebut Meliputi dampak yang ditimbulkan, Identifikasi Permasalahan dan Peningkatan Capaian Pelayanan.

Beberapa Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja itu antara lain Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi Kewenangan Dinas Dikpora Kota Bima sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2019-2024 yang menekankan pencapaian target yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dikpora Kota Bima atau berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelayanan.

Untuk memperjelas Analisis kinerja Pelayanan Dinas Dikpora Kota Bima maka perlu disajikan Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sebagai Berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Dikpora
Kota Bima

INDIKATOR SASARAN		SPM/Standar Nasional	TARGET RENSTRA			REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	87,29	45	67	78	48,34	69,90	80,76	100	100	100
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	104,82	100	94	96	102,46	96,52	98,39	100	100	100
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	87,29	100	100	98	109,18	106,74	108,33	100	100	100
4	Angka Partisipasi Kesetaraan	98,26	32	30	30	28,91	29,98	29,97	0	30	40
5	Nilai Literasi SD	53,94	48,17	52,45	68,84	51,53	59,83	74,04	-	-	100
	Nilai Numerasi SD	40,27	38,18	45	62,28	33,81	53,38	74,93	-	-	100
	Nilai Literasi SMP	63,12	40	60	60,00	35,3	58,28	50,35	-	-	100
	Nilai Numerasi SMP	54,80	49,93	40	57,2	23,22	56,92	53,99	-	-	100
6	Persentase Pemuda dan Atlet berprestasi	10	0	0	60	0	0	60	100	100	100

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sikronisasi Program Pemerintah dan Pemerintah daerah (pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota) merupakan satu kesatuan tata kelola, pemerintah menetapkan kebijakan sedangkan implementasi dari kebijakan tersebut dilaksanakan oleh daerah sehingga otonomi sektor pendidikan hanya bersifat teknis pelaksanaan.

Kegiatan yang yang dilakukan oleh daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya sinergisitas antara pusat, propinsi dan daerah didalam menjalankan visi dan misinya terutama yang berkaitan dengan pendanaan. Banyak anggaran di dunia pendidikan yang tidak merata seperti anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah, sehingga kota/ kabupaten banyak terjadi ketimpangan terhadap pembangunan. Sehingga dampak yang dirasakan olah kita bersama adalah tidak selarasnya lagi visi dan misi pemerintah pusat, propinsi dan kota/kabupaten.

Dilihat dari berbagai macam permasalahan yang ada di dunia pendidikan diperlukannya lebih mengintensifkan lagi koordinasi terhadap tiga lembaga tersebut didalam menjalankan Visi Misi dengan mengedepankan asas kebutuhan dalam memajukan dunia pendidikan yang ada di indonesia.

3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sinkronisasi Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) merupakan satu kesatuan tata kelola, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sedangkan implementasi dari kebijakan tersebut dilaksanakan daerah sehingga otonomi sektor pendidikan hanya bersifat teknis pelaksanaan di lapangan. Untuk membuktikan keterpaduan program/kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah

Misi Kemendikbud	Misi Dinas Dikpora NTB	Sasaran Dinas Dikpora Kota
1. Meningkatkan KETERSEDIAAN layanan pendidikan. 2. Memperluas KETERJANGKAUAN layanan pendidikan 3. Meningkatkan KUALITAS/MUTU dan relevansi layanan pendidikan. 4. Mewujudkan KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan 5. Menjamin KEPASTIAN memperoleh layanan pendidikan.	1. Mewujudkan pendidikan efektif, efisien, dan bertanggung jawab; 2. Mewujudkan pendidikan yang merata dan bermutu; 3. Menuntaskan Buta Aksara dan wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu; Mewujudkan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga sebagai wahana cerdasan bangsa secara berkelanjutan sepanjang hayat; 4. Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pendidikan, kepemudaan, dan olahraga; 5. Mewujudkan koordinasi pembangunan	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan. 2. Meningkatnya Aksesbilitas Pendidikan 3. Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga. .

3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan umum dari kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Bima adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan
2. Peningkatan mutu Pendidikan
3. Peningkatan Relevansi Pendidikan
4. Peningkatan Efisiensi Pendidikan

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan diatas maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Mempunyai beberapa strategi dalam meminimalisir permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini hingga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.
2. Meningkatkan pembangunan dan rehab sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka menambah daya tampung dan untuk kelancaran proses belajar mengajar pada jenjang Pendidikan Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini hingga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.
3. Memenuhi sarana penunjang pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui diklat dan pelatihan.
5. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan siswa berprestasi pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

3.3 Peluang dan Tantangan

Peluang bagi Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga untuk mengatasi tantangan di atas tersebut antara lain :

1. Kesiapan Pemerintah Pusat untuk membantu memperluas layanan pendidikan melalui program DAK untuk membangun RKB, ruang penunjang, ruang perpustakaan, rehabilitasi ruang kelas, peningkatan kapasitas SDM dan penyaluran biaya operasional satuan pendidikan jenjang SD dan SMP.
2. Komitmen Pimpinan Daerah Pusat dan Propinsi yang menempatkan pendidikan pada skala prioritas pembangunan.
3. Kemajuan Teknologi IT yang memungkinkan proses managemen penyelenggaraan pendidikan lebih efektif khususnya terkait akses layanan data dan informasi.

Berdasarkan tantangan dan peluang di atas dalam konteks layanan penyelenggaraan pendidikan di Kota Bima yang harus diperhatikan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Pendidikan yang berkualitas tetap harus menjadi prioritas dan bahkan ditingkatkan volume sasarannya seperti kegiatan perluasan daya tampung melalui Pembangunan dan Rehab Sarana Prasarana Pendidikan serta bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu dan siswa berprestasi dalam mengantisipasi meningkatnya angka putus sekolah dan pencapaian SPM.
2. Layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan perlu diperluas, terutama di daerah-daerah pemukiman yang belum tersedia layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.
3. Peningkatan mutu pendidik dan dan tenaga kependidikan diarahkan pada upaya pemenuhan standar nasional pendidikan seperti pemenuhan kualifikasi akademik, kepemilikan sertifikat pendidik, keikutsertaan dalam program diklat dan pelatihan.

3.4 Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan

Dalam Perpres Nomor 10 tahun tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah dijelaskan bahwa pendidikan merupakan instrumen pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk di antaranya untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Terkait upaya mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi memainkan peran penting untuk meningkatkan daya saing regional. Dalam hal ini, pendidikan dituntut untuk mampu melengkapi lulusannya agar memiliki keterampilan teknis (*hard skill*), dan juga kemampuan untuk berpikir analitis, berkomunikasi, serta bekerjasama dalam tim yang secara keseluruhan sering dirangkum sebagai keterampilan lunak (*soft skill*) yang didasari olah nilai-nalai budaya bangsa indonesia.

Di samping itu, pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap jati diri bangsa melalui pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dalam konteks lebih luas, pendidikan merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumberdaya manusia dalam kerangka pembangunan nasional yang komprehensif, misalnya: pendidikan dasar dikaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan; pendidikan menengah diarahkan untuk meningkatkan potensi kebekerjaan (*employment*); dan pendidikan tinggi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan dalam masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan nasional perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik, serta mengedepankan cara pandang anak didik sebagai manusia utuh. isu - isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sektor pendidikan, adalah sebagai berikut:

1. Upaya perluasan dan pemerataan pendidikan masih belum sepenuhnya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat usia sekolah. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya adalah Ketidakmampuan ekonomi sebagian besar masyarakat untuk membiayai operasional pendidikan individual anaknya dan Sikap budaya sebagian masyarakat yang tidak memandang pendidikan sebagai faktor penting dalam membangun kehidupan anaknya.
2. Upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan masih dihadapkan pada persoalan seperti banyak gedung yang rusak, kurangnya fasilitas penunjang untuk kegiatan pembelajaran yang efektif, dan kurang optimalnya pemahaman tenaga pendidik terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang berdampak pada lemahnya implementasi Kurikulum dalam proses .kegiatan pembelajaran di kelas.

Isu-isu penting di atas, bila tidak segera diantisipasi dalam proses perencanaan pembangunan akan berdampak pada pencapaian visi misi Kepala Daerah, serta berdampak pada capaian program nasional pendidikan. Oleh karena pertimbangan di atas, maka tantangan ke depan bagi Dinas Pendidikan adalah :

1. Melanjutkan upaya perluasan dan pemerataan pendidikan melalui pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

2. Pemenuhan SPM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, yaitu menyiapkan sarana fisik dan non fisik untuk kegiatan pelayanan pendidikan yang berkualitas.
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan terkait kompetensi managerial, kurikulum, profesional dan kompetensi sosial yang sejauh ini masih belum merata antar satuan/program dan jenjang pendidikan.

4. REVIUW AWAL RANCANGAN AWAL RKPD 2025

Hasil Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Bima

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Rancangan Awal SKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
A	**Program Penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Presentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**173.006.501.927**	**Program Penunjang urusan pemerintah Daerah**		**Presentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**173.006.501.927**	
1	**Perencanaan dan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**Presentase Perencanaan dan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**378.359.700**	**Perencanaan dan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daearh**		**Presentase Perencanaan dan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**378.359.700**	
1.1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	66.992.600	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	66.992.600	
1.2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	15.203.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	15.203.000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14.876.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14.876.000	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	16.090.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	16.090.500	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan	Kota Bima	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	6 Laporan	86.422.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan	Kota Bima	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Laporan	86.422.100	

	ahtisar realisasi kinerja SKPD		Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ahtisar realisasi kinerja SKPD			ahtisar realisasi kinerja SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ahtisar realisasi kinerja SKPD		
1.6	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Laporan	178.775.500	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Laporan	178.775.500
2	**Administasi keuangan Perangkat Daerah**		**Presentase Administasi keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**170.813.487.727**	**Administasi keungan Perangkat Daerah**		**Administasi keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**170.813.487.727**
2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	170.632.902.827	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	12 orang/bulan	170.632.902.827
2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	153.597.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	153.597.000
2.3	Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD	1 Dokumen	7.883.900	Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD	1 Dokumen	7.883.900
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.564.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.564.000
2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.320.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.320.000
2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	0,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24 Laporan	0,00

2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bima	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.220.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bima	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.220.000
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**100%**	**40.490.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**100%**	**40.490.000**
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bima	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.560.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Bima	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.560.000
3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.430.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.430.000
3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	29.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	29.500.000
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**100%**	**331.956.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**100%**	**331.956.000**
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bima	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	90 Paket	34.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bima	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	90 Paket	34.000.000
4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Bima	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	244.200.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Bima	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	244.200.000
4.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	30 Dokumen	0,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	30 Dokumen	0,00
4.4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Bima	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	15.600.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Bima	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	15.600.000
4.5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bima	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	36.156.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bima	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	30 orang	36.156.000

									Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**100%**	**1.146.599.700**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**100%**	**1.146.599.700**
5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	285.254.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10 Paket	285.254.000
5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bima	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	16.230.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bima	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	16.230.000
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	153.995.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	153.995.700
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	114.300.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	114.300.000
5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	430.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	430.000.000
5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	146.820.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	146.820.000
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**165.958.800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100%**	**165.958.800**
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	0,00
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	136.058.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	136.058.800
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29.900.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan		1 Laporan	0,00

7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**129.650.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**129.650.000**
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	49.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	49.800.000
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	8.850.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	8.850.000
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	71.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	71.000.000
B	**Program Pengelolaan Pendidikan**		**APS Usia 7-15 Pendidikan Dasar** **Kemampuan Numerasi SMP** **Kemampuan Numerasi SD** **Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B** **Kemampuan Literasi SD** **APS Usia 7-18 Pendidikan Kesetaraan** **Indeks Inklusivitas SD** **Kemampuan Literasi SMP** **Indeks Iklim Kebinekaan SMP** **Indeks Iklim Keamanan SMP** **Indeks Iklim Kebinekaan SD** **Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S-1** **APS Usia 5-6 PAUD**	**100 Persen** **42 Persen** **47 Persen** **50 Persen** **54 Persen** **60 Persen** **64 Persen** **67 Persen** **75 Persen** **77 Persen** **80 Persen** **87 Persen** **93 Persen**	**52.722.223.550**	**Program Pengelolaan Pendidikan**		**Presentase Pengelolaan Pendidikan**	**100%**	**52.722.223.550**
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Presentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	20.653.275.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Presentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	20.653.275.000
1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Bima	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	39 Unit	1.003.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Bima	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	39 Unit	1.003.000.000

1.2	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Bima	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	200 Paket	100.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Bima	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	200 Paket	100.000.000
1.3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Bima	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Pesrta Didik	78.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Bima	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	78.000.000
1.4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Bima	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada SatuanPendidikan Sekolah Dasar	50 orang	0	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Bima	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada SatuanPendidikan Sekolah Dasar	50 orang	0
1.5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Bima	Jumlah Pendidik dan Tenaga P Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 orang	1.050.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Bima	Jumlah Pendidik dan Tenaga P Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 orang	1.050.000.000
1.6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Bima	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	82 Satuan Pendidikan	20.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Bima	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	82 Satuan Pendidikan	20.000.000
1.7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bima	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	87 Satuan Pendidikan	15.863.520.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bima	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	87 Satuan Pendidikan	15.863.520.000
1.8	Pembinaan Penggunaan Tehnologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Tehnologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	8.700.000	Pembinaan Penggunaan Tehnologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Tehnologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	8.700.000
1.9	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	12.500.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	12.500.000

2.0	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidk dan Tenaga Kependidikan	Kota Bima	Jumlah Komunitas Belajar Pendidk dan Tenaga Kependidikan yang Terfasilitasi	4 Komunitas	18.600.000	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidk dan Tenaga Kependidikan	Kota Bima	Jumlah Komunitas Belajar Pendidk dan Tenaga Kependidikan yang Terfasilitasi	4 Komunitas	18.600.000
2.1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Bima	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	400.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Bima	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	400.000.000
2.2	Bimbingan Tekhnis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Peserta Bimbingan Tekhnis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	7.840.000	Bimbingan Tekhnis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Peserta Bimbingan Tekhnis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	7.840.000
2.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Bima	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	2.091.115.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Bima	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	2.091.115.000
2	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			**100%**	**14.186.279.100**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			**100%**	**14.186.279.100**
2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Bima	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	3.718.871.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Bima	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	3.718.871.000
2.2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Bima	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2150 Peserta Didik	111.715.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Bima	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2150 Peserta Didik	111.715.000
2.3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Bima	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	650 orang	473.829.100	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Bima	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	650 orang	473.829.100
2.4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Bima	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	23 Satuan Pendidikan	82.500.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Bima	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	23 Satuan Pendidikan	82.500.000

2.5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Bima	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	25 Satuan Pendidikan	7.001.280.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Bima	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	25 Satuan Pendidikan	7.001.280.000
2.6	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 orang	9.800.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 orang	9.800.000
2.7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	38.000.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	38.000.000
2.8	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidk dan Tenaga Kependidikan	Kota Bima	Jumlah Komunitas Belajar Pendidk dan Tenaga Kependidikan yang Terfasilitasi	8 Komunitas	6.224.000	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidk dan Tenaga Kependidikan	Kota Bima	Jumlah Komunitas Belajar Pendidk dan Tenaga Kependidikan yang Terfasilitasi	8 Komunitas	6.224.000
2.9	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Bima	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	26.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Bima	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	26.000.000
2.10	Bimbingan Tekhnis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Peserta Bimbingan Tekhnis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	23.290.000	Bimbingan Tekhnis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Peserta Bimbingan Tekhnis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	23.290.000
3	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**			**100%**	**15.943.343.450**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**			**100%**	**15.943.343.450**
3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Bima	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	10.010.857.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Bima	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	10.010.857.000
3.2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Kota Bima	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan PAUD	55 Orang	52.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Kota Bima	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan PAUD	55 Orang	52.000.000

3.3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kota Bima	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	768.785.500	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kota Bima	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	768.785.500
3.4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Bima	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	162 Satuan Pendidikan	238.180.950	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Bima	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	162 Satuan Pendidikan	238.180.950
3.5	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Bima	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	164 Satuan Pendidikan	4.594.670.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Bima	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	164 Satuan Pendidikan	4.594.670.000
3.6	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Tehnologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	170 Orang	56.000.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Tehnologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	170 Orang	56.000.000
3.7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	18.700.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	18.700.000
3.8	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2 Dokumen	23.500.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2 Dokumen	23.500.000
3.9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Bima	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	180.650.000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Bima	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	180.650.000
4	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**			**100%**	**1.939.326.000**	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**			**100%**	**1.939.326.000**
4.1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kota Bima	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang	19 Satuan Pendidikan	46.300.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kota Bima	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan	19 Satuan Pendidikan	46.300.000

			Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
4.2	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Keselarasan	Kota Bima	Jumlah Sekolah NonFormal/ Keselarasan yang Mengelola Dana BOP	19 Satuan Pendidikan	1.761.050.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Keselarasan	Kota Bima	Jumlah Sekolah NonFormal/ Keselarasan yang Mengelola Dana BOP	19 Satuan Pendidikan	1.761.050.000
4.3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Tehnologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25 Orang	8.970.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Tehnologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25 Orang	8.970.000
4.4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	12.430.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	12.430.000
4.5	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidk dan Tenaga Kependidikan	Kota Bima	Jumlah Komunitas Belajar Pendidk dan Tenaga Kependidikan yang Terfasilitasi	1 Komunitas	11.500.000	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidk dan Tenaga Kependidikan	Kota Bima	Jumlah Komunitas Belajar Pendidk dan Tenaga Kependidikan yang Terfasilitasi	1 Komunitas	11.500.000
4.6	Bimbingan Tekhnis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Peserta Bimbingan Tekhnis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	12.600.000	Bimbingan Tekhnis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Bima	Jumlah Peserta Bimbingan Tekhnis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	12.600.000
4.7	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Bima	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	17500 Peserta Didik	86.476.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	17500 Peserta Didik	86.476.000
III	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**				**252.700.000**	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**				**252.700.000**
1	**Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan**				**227.700.000**	**Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan**				**227.700.000**

	Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					**Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**				
1.1	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Serta Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kab/Kota	Kota Bima	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Tim Koordinasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Serta Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kab/Kota	Kota Bima	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Tim Koordinasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000
1.2	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kab/Kota	Kota Bima	Jumlah Kabupaten/Kota dari dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	6 Kegiatan	180.700.000	dan Penyelenggaraan Peningkatan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kab/Kota	Kota Bima	Jumlah Kabupaten/Kota dari dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	6 Kegiatan	180.700.000
1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh kabupaten/Kota yang difasilitasi Dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 Orang	32.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh	20 orang	32.000.000
2	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**25.000.000**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**25.000.000**
2.1	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	20 orang	25.000.000	dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang	25.000.000

C	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**			**100%**	**2.380.000.000**	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**				**22.380.000.000**
1	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**32.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**32.000.000**
1.1	Koordinasi Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga ditingkat Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	32.000.000	Koordinasi Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga ditingkat Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	32.000.000
2	**Pembinaan dan Pengembangan olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**				**248.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**				**248.000.000**
2.1	Seleksi Atlet Daerah	Kota Bima	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	50 orang	198.000.000	Seleksi Atlet Daerah	Kota Bima	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	50 orang	198.000.000
2.2	Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi yang Berprestasi dan/atau Berjasa dalam Memajukan Olahraga	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.600.000.000	Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi yang Berprestasi dan/atau Berjasa dalam Memajukan Olahraga	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.600.000.000
3	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**			**100%**	**500.000.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**			**100%**	**500.000.000**
3.1	Pemasalan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival OlahragaRekreasi yang Berjenjang dan Berkelanjutan Pada Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional	Kota Bima	Jumlah Lembaga yang Terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	500.000.000	Pemasalan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival OlahragaRekreasi yang Berjenjang dan Berkelanjutan Pada Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional	Kota Bima	Jumlah Lembaga yang Terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	500.000.000

5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan ditujukan untuk Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan, Peningkatan Akses Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Serta Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter.

Dengan terintegrasinya Pendidikan, Pemuda dan Olahraga keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan dan adaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa.

Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Bima

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan Penunjang urusan pemerintah daerah	99,95%	
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Kota Bima	Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan program pengelolaaan pendidikan	49,37%	
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kota Bima	Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kota Bima	Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	98,58%	
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kota Bima	Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	99,17%	

BAB III
SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sikronisasi program pemerintah dan pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) merupakan satu kesatuan tata kelola, pemerintah pusat menetapkan kebijakan sedangkan implementasi dari kebijakan tersebut dilaksanakan daerah sehingga otonomi sektor pendidikan hanya bersifat teknis pelaksanaan di lapangan. Untuk membuktikan keterpaduan program/kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Kebijakan Nasional, Propinsi

Misi Kemendikbud	Misi Dinas Dikpora NTB
1. Meningkatkan KETERSEDIAAN layanan pendidikan. 2. Memperluas KETERJANGKAUAN layanan pendidikan 3. Meningkatkan KUALITAS/MUTU dan relevansi layanan pendidikan. 4. Mewujudkan KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan 5. Menjamin KEPASTIAN memperoleh layanan pendidikan.	1. Mewujudkan pendidikan efektif, efisien, dan bertanggung jawab; 2. Mewujudkan pendidikan yang merata dan bermutu; 3. Menuntaskan Buta Aksara dan wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu; Mewujudkan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga sebagai wahana cerdasan bangsa secara berkelanjutan sepanjang hayat; 4. Mewujudkan peran serta masyarakatdalam pendidikan, kepemudaan, dan olahraga; 5. Mewujudkan koordinasi pembangunan

3.2. SASARAN RENJA

Sasaran dan Indikator Sasaran

telah ditetapkan 3 sasaran strategis Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
3. Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan keolahragaan

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1 Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional SD	82
		2 Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional SD	78
		3 Rata-rata Kemapuan Literasi Siswa Berdasarkan Hasil Asesmen Nsional SMP	67
		4 Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa Bersadarkan Hasil Asessmen Nasional SMP	60
2	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	1 Angka Partisipasi Sekolah PAUD	80
		2 Angka Partisipasi Sekolah SD	100
		3 Angka Partisipasi Sekolah SMP	100
		4 Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan	32
3	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan	Indeks Kapasitas Pemuda dan Olahraga	80

3.3. PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKATOR PROGRAM

Untuk mendukung tercapainya visi, misi, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Bima yang telah ditetapkan 2 (Dua) tujuan dan 3 sasaran maka diperlukan program dan kegiatan seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Bima
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE REKENING						PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	LOKASI	ANGGARAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
										TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET		PERKIRAAN DANA
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**1**	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan PROGRAM Penunjang urusan pemerintah Daerah**	**Kota Bima**			**173.006.501.927.00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				**173.189.825.927.00**
	1	01	01	2	01		Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Perencanaan dan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bima			378.359.700.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				388.359.700.00
	1	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Bima			66.992.600.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				69.992.600.00
	1	01	01	2	01	0002	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen SKA SKPD	Kota Bima			15.203.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17.203.000.00
	1	01	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumentasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima			14.876.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16.876.000.00
	1	01	01	2	01	0004	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima			16.090.500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17.090.500.00
	1	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ihtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ihtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ihtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Bima			86.422.100.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				87.422.100.00
	1	01	01	2	01	0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bima			178.775.500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				179.775.500.00
	1	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bima**			**170.813.487.727.00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				**170.916.167.727.00**
	1	01	01	2	02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Bima			170.632.902.827.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				170.732.902.827.00
	1	01	01	2	02	0003	Pelaksanaan/penatausahaan dan pengujian Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian Verifikasi keuangan SKPD	Kota Bima			153.597.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				153.897.000.00
	1	01	01	2	02	0004	Koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	Kota Bima			7.883.900.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7.983.900.00

	1	01	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima			10.564.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11.564.000.00
	1	01	01	2	02	0006	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan tanggapan pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Bima			4.320.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4.720.000.00
	1	01	01	2	02	0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan.triwulanan /semesteran SKPD	Kota Bima			0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0,00
	1	01	01	2	02	0008	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kota Bima			4.220.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5.300.000.00
	1	**01**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Bima**			**40.490.000.00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				**42.790.000.00**
	1	01	01	2	03	0001	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kota Bima			4.560.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4.860.000.00
	1	01	01	2	03	0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan banrang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kota Bima			6.430.000.00	Restribusi Jasa Umum				6.430.000.00
	1	01	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima			29.500.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				31.500.000.00
	1	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Bima**			**331.956.000.00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				**356.150.000.00**
	1	01	01	2	05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				34.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				36.000.000.00
	1	01	01	2	05	0003	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kota Bima			244.200.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				264.200.000.00
	1	01	01	2	05	0004	Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	Kota Bima			0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0,00
	1	01	01	2	05	0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kota Bima			15.600.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15.800.000.00
	1	01	01	2	05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bima			38.156.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40.150.000.00

	1	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bima**			**1.146.599.700.00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				**1.184.599.700.00**
	1	01	01	2	06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Kota Bima			285.254.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				287.254.000.00
	1	01	01	2	06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Bima			16.230.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17.230.000.00
	1	01	01	2	06	0004	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket bahan logistic kantor yang Disediakan	Kota Bima			153.995.700.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				156.995.700.00
	1	01	01	2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Kota Bima			114.300.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				116.300.000.00
	1	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Bima			430.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				450.000.000.00
	1	01	01	2	06	0010	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kota Bima			146.820.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				156.820.000.00
	1	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**			**165.958.000.00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				**168.958.800.00**
	1	01	01	2	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bima			0.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0,00
	1	01	01	2	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Llistrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Bima			136.058.800.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				138.058.800.00
	1	01	01	2	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	Kota Bima	3		29.900.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30.900.000.00
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	1	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bima**			**129.650.000.00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				**132.800.000.00**
	1	01	01	2	09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang diperlihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bima			49.800.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				51.800.000.00

	1	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah peralatan dan mesin lainya yang dipelihara	Kota Bima			8.850.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10.000.000.00
	1	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Kota Bima			71.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				71.000.000.00
2	**1**	**01**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Program Pengelolaan Pendidikan**	Kota Bima			52.722.223.550.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				193.932.188.450.00
	1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Bima			20.653.275.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				165.874.175.000.00
	1	01	02	2	01	0006	Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Bima			1.003.000.000.00	Dana Alokasi Khusus				1.100.000.000.00
	1	01	02	2	01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Disediakan				100.000.000.00	Dana Alokasi Khusus				150.000.000.00
	1	01	02	2	01	0025	Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Bima			78.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				79.000.000.00
	1	01	02	2	01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Bima			0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0,00
	1	01	02	2	01	0027	Pengembangnan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidk dan tenaga kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Bima			1.050.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.200.000.000.00
	1	01	02	2	01	0028	Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang dilaksanakan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Kota Bima			20.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40.000.000.00
	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah dasar yang Mengelola Dana BOS	Kota Bima			15.863.520.000.00	Dana Alokasi Khusus				159.963.520.000.00
	1	01	02	2	01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Bima			8.700.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9.000.000.00
	1	01	02	2	01	0038	Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Bima			12.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13.600.000.00
	1	01	02	2	01	0041	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Terfasilitasi	Kota Bima			18.600.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20.000.000.00

	1	01	02	2	01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Bima			400.000.000.00	Dana Alokasi Khusus				600.000.000.00
	1	01	02	2	01	0049	Bimbingan Tekhnis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Tekhnis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Bima			7.840.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7.940.000.00
	1	01	02	2	01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah di Rehabilitasi Sedang/Berat	Kota Bima			2.091.115.000.00	Dana Alokasi Khusus				2.691.115.000.00
	1	**01**	**02**	**2**	**02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Kota Bima**			**14.186.279.100.00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				**18.535.814.000.00**
	1	01	02	2	02	0012	Pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan utilitas sekolah yang Telah di Bangun	Kota Bima			3.718.671.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7.818.671.000.00
	1	01	02	2	02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Bima			2.695.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2.795.000.000.00
	1	01	02	2	02	0038	Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Bima			111.715.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				116.715.000.00
	1	01	02	2	02	0040	Pengembangnan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetisi dan Kualifikasi	Kota Bima			473.829.100.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				482.764.000.00
	1	01	02	2	02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang diLaksanakan Pembinaan	Kota Bima			82.500.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				84.500.000.00
	1	01	02	2	02	0042	pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Kota Bima			7.001.280.000.00	Dana Alokasi Khusus				7.101.280.000.00
	1	01	02	2	02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Bima			9.800.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10.000.000.00
	1	01	02	2	02	0051	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Bima			38.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				69.000.000.00
	1	01	02	2	02	0054	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Terfasilitasi	Kota Bima			6.224.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6.624.000.00
	1	01	02	2	02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Bima			26.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27.000.000.00

	1	01	02	2	02	0060	Bimbingan Tekhnis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Tekhnis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Bima			23.250.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27.000.000.00
	1	**01**	**02**	**2**	**03**		**Pengelolaan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**	**Cakupan Pengelolaan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**	Kota Bima			15.943.343.450.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7.377.343.450.00
	1	01	02	2	03	0002	Pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas PAUD	Jumlah sarana prasarana dan utilitas PAUD yang telah dibangun	Kota Bima			10.010.857.000.00	Dana Alokasi Khusus				1.015.857.000.00
	1	01	02	2	03	0015	Penyedian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada PAUD	Kota Bima			52.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				53.000.000.00
	1	01	02	2	03	0016	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidian pada satuan pendidikan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidian yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/Golongan pemberian promosi peningkatan kompetisi dan kualifikasi	Kota Bima			768.785.500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				778.785.500.00
	1	01	02	2	03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kota Bima			238.180.950.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				248.180.950.00
	1	01	02	2	03	0018	Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kota Bima			4.594.670.000.00	Dana Alokasi Khusus				4.994.670.000.00
	1	01	02	2	03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Bima			56.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				57.000.000.00
	1	01	02	2	03	0025	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Bima			18.700.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				19.700.000.00
	1	01	02	2	03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Bima			23.500.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24.500.000.00
	1	01	02	2	03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Bima			180.650.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				185.650.000.00
	1	**01**	**02**	**2**	**04**		**Pengelolaan pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**Cakupan Pengelolaan pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**Kota Bima**			**1.939.326.000.00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				**2.144.856.000.00**
	1	01	02	2	04	0016	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah non formal/kesetaraan	Jumlah sekolah non formal/kesetaraan yang dilaksanakan Pembinaan kelembagaan dan Manajemen	Kota Bima			46.300.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				47.300.000.00

	1	01	02	2	04	0017	Pengelolaan dana BOP sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah sekolah NonFormal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kota Bima			1.761.050.000.00	Dana Alokasi Khusus				1.961.050.000.00
	1	01	02	2	04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Bima			8.970.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9.000.000.00
	1	01	02	2	04	0027	Koordinasi, Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Bima			12.430.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13.430.000.00
	1	01	02	2	04	0030	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Terfasilitasi	Kota Bima			11.500.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12.600.000.00
	1	01	02	2	04	0042	Bimbingan Tekhnis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Tekhnis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Bima			12.600.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13.000.000.00
	1	01	02	2	04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kota Bima			86.476.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				88.476.000.00
1	**2**	**19**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Cakupan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Kota Bima**			**252.700.000.00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				**258.700.000.00**
	2	**19**	**02**	**2**	**01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota**		**Kota Bima**			**227.700.000.00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				**232.700.000.00**
	2	19	02	2	01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Serta Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten/Kota	Kota Bima			15.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16.000.000.00

	2	19	02	2	01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Kepemimpinan dari Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kota Bima			180..700.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				182.700.000.00
	2	19	02	2	01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kab/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kab/Kota dari Seluruh Kab/Kota yang difasilitasi Dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Kota Bima			32.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				34.000.000.00
	2	**19**	**02**	**2**	**02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					25.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26.000.000.00
	2	19	02	2	02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan PenyelenggaraanPemberdayaan Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda Tingkat Kab/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kab/Kota	Kota Bima			25.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26.000.000.00
2	**2**	**19**	**03**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**					**2.380.000.000.00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				**2.514.000.000.00**
	2	**19**	**03**	**2**	**01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendididkan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					**32.000.000.00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				**34.000.000.00**
	2	19	03	2	01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Bima			32.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				34.000.000.00
	2	**19**	**03**	**2**	**03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga**					**248.000.000.00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				**320.000.000.00**

							Prestasi Tingkat Daerah Provinsi										
	2	19	03	2	03	0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang di Seleksi	Kota Bima			196.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				210.000.000.00
	2	19	03	2	03	0007	Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi yang Berprestasi dan/atau Berjasa Dalam Memajukan Olahraga	Jumlah Penerima Penghargaan Olahraga	Kota Bima			50.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				110.000.000.00
	2	**19**	**03**	**2**	**04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**					**1.600.000.000.00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				**1.650.000.000.00**
	2	19	03	2	04	0006	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Kota Bima			1600.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.650.000.000.00
	2	19	03	2	05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**					**500.000.000.00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**				**500.000.000.00**
	2	18	03	2	05	0010	Pemasalan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi yang Berjenjang dan Berkelanjutan pada Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional	Jumlah Lembaga yang Terfasilitasi Dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kota Bima			500.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				500.000.000.00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kota bima, dalam rangka pencapaian visi dan misi yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan kualitas pendidikan pemuda dan olahraga. Pembangunan wilayah di bidang pendidikan pemuda dan olahraga pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan peningkatan fungsi dan keseimbangan, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat, serta penataan ruang. Arah kebijakan yang ditetapkan disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat, swasta dan pemerintah dalam mengatasi pendidikan dan meningkatkan sistem pengelolaan pendidikan, meningkatkan kemampuan peningkatan mutu pendidikan, Pada tahun 2025 arah kebijakan Dinas pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Bima adalah menjadi acuan penentuan pilihan program kegiatan Tahunan yang akan dibahas dalam serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang. Lebih lanjut, isi dan substansi dari Rencana kerja Rencana Kerja 2025 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mencakup indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang dirinci menurut fungsi Dinas pendidikan pemuda dan olahraga. Untuk pencapaian sasaran tersebut maka arah kebijakan Dinas pemuda dan olahraga kota bima akan ditempuh dalam rangka menunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), adapun sasaran Rencana Kinerja (Renja) dalam mendukung sasaran Rencana Strategis (Renstra) yaitu : Meningkatnya aksebilitas kualitas pendidikan Dalam upaya mencapai hasil yang diharapkan Dinas pendidikan pemuda dan olahraga kota bima menetapkan tujuan sesuai dengan sasaran Rencana Strategis (Renstra), Visi, Misi, Dinas pendidikan, adapun tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai berikut : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan OPD : meningkatnya aksebilitasi kualitas pendidikan

4.2 Pendanaan Program dan Kegiatan

Pendanaan Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan perioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Dalam menetapkan program dan kegiatan Dinas Dinas pendidikan pemuda dan olahraga kota bima Tahun 2024 s.d 2029, harus menyiapkan pendanaan program pembangunan lima tahun kedepan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima 2024 – 2026, sehingga target indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Kerja ini dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025.

Untuk kesempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima di masa mendatang.

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL)
KOTA BIMA

TAHUN 2024 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat limpahan rahmat, karunia serta izin-Nya lah Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima periode 2024-2026 dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Propinsi serta RPD Kota Bima. Renstra ini disusun untuk menjadi pedoman dan sebagai bahan acuan Bakesbangpol dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam bidang Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENSTRA Bakesbangpol ini masih jauh dari sempurna karena masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dan menuju perbaikan sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang

KEPALA BAKESBANGPOL KOTA BIMA,



Dr. Muhammad Hasyim, SH,S,Sos,M.Ec,Dev
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19720824 199303 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang ……... 1

1.2 Landasan Hukum …….. 2

1.3 Maksud dan Tujuan …….. 3

1.4 Sistematika Penulisan ……..... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH …… 5

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah …… 5

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah …… 8

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …… 10

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ……. 11

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ……..... 13

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan …… 13

3.2 Isu-isu Strategis ……. 15

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN …… 17

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah… .

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ……..… 19

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN …. 22

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN ……..……

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra pada tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggara Urusan pemerintah daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP ……..…… 28

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan perlunya Rencana Strategi di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Undang-undang ini kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini. Dokumen Renstra disusun guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Bima, difokuskan pada kegiatan yang sifatnya spesifikasi yang bersinergi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 merupakan kelanjutan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen lima tahunan OPD yang dijadikan pedoman yang terukur beserta ketentuan pagu anggarannya bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh OPD maupun yang ditempuh dengan mendorong peran serta masyarakat.

Di sisi lain, Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2024-2026 ini merupakan turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Bima yang secara langsung merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan memperhatikan isu strategis kota serta rumusan permasalahannya.

Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima merupakan dasar bagi OPD untuk menyusun Rencana Tahunan dalam 3 (Tiga) tahun ke depan, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima memiliki arah dan tujuan yang sesuai dengan arah Kebijakan Walikota. Dengan berpedoman pada RPD dengan memperhatikan RPJMD, Renstra dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang ditandatangani Walikota Bima.

Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5) Permendagri no. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
6) Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
7) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
8) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
9) Peraturan Walikota Bima Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata cara Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan *stakeholders* lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Tujuan penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026 ini adalah:

1. Untuk menjadi pedoman yang memberikan arahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 3 (tiga) tahun ke depan;
2. Untuk menjadi pedoman yang memberikan arahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan oleh unit organisasi dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan dalam unit organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Untuk menjadi acuan dan standar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik Laporan Tahunan maupun Laporan Tiga Tahunan;
5. Untuk menfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horisontal, antar dan lintas Perangkat Daerah dengan Masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2024-2026 ini adalah sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu - isu Strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB 5 STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra pada tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
- 7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggara Urusan pemerintah daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB 8 PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bima dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Bakesbangpol mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Bidang. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional Perencana dan Fungsional Analis Pusat dan Daerah Sedangkan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Membawahi dan Mengkoordinasikan Kelompok jabatan Fungsional. Bidang Politik Dalam Negeri. Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Sebagaimana ditetapkan Peraturan Walikota Kota Bima Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakesbangpol mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Sedangkan fungsinya yaitu:

a. Menyusun kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. Pelaksanaan tugas pendukung teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

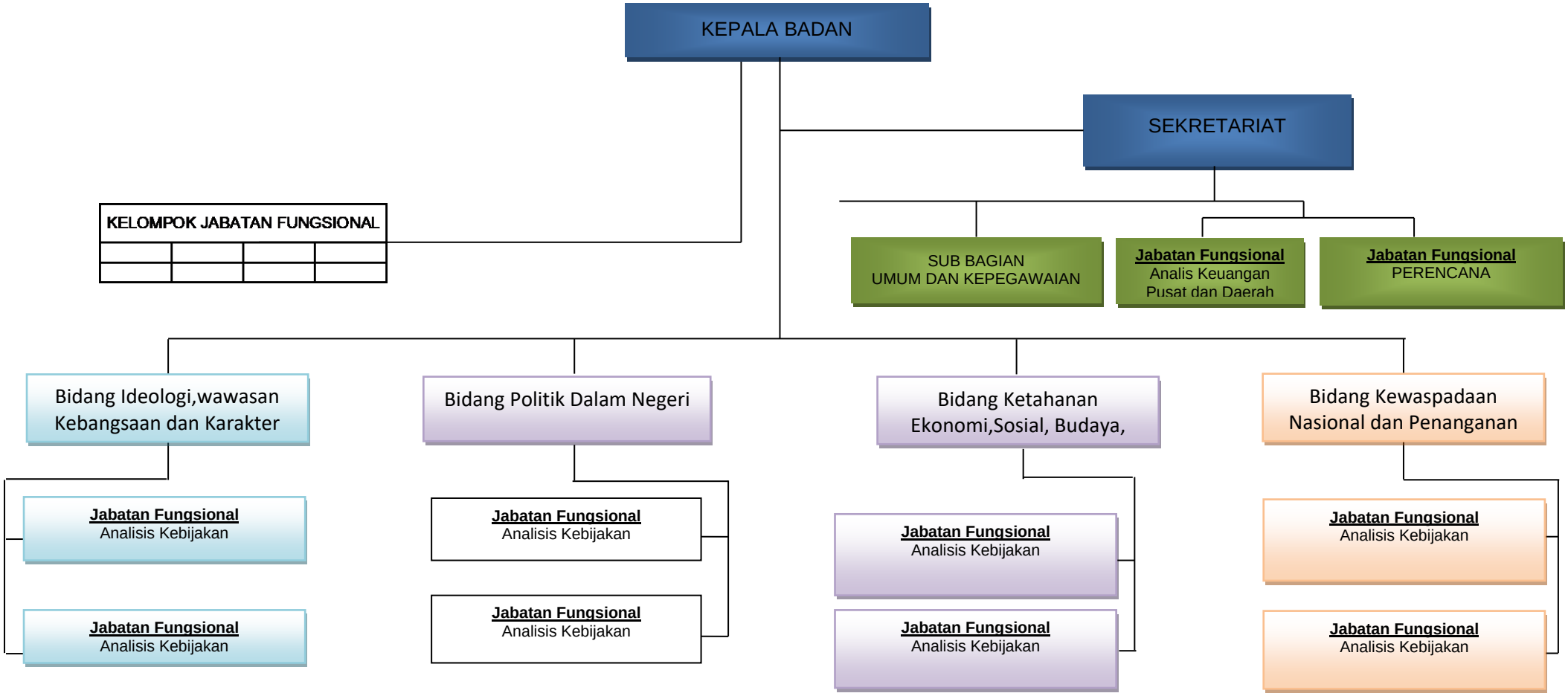
2.1.2. Struktur Organisasi

Adapun Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima terdiri dari:

a. Kepala Badan
b. Sekertariat terdiri dari:
    1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Kelompok Jabatan fungsional (Perencana, Analis Keuangan pusat dan Daerah)
c. Bidang Ideologi,wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa terdiri dari:
    1. Kelompok Jabatan Fungsional (Analis Kebijakan)
d. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari:
    1. Kelompok Jabatan Fungsional (Analis Kebijakan)
e. Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
    1. Kelompok Jabatan Fungsional (Analis Kebijakan)
f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
    1. Kelompok Jabatan Fungsional. (Analis Kebijakan)

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini.

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima



2.2. Sumberdaya SKPD

2.2.1. Sumber daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah orang, terdiri dari: 27 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan pengelompokan pegawai menurut Status, Pangkat dan Golongan sebagai berikut:

Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan
dan Pangkat/Golongan Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
A	**APARATUR SIPIL NEGARA**		
1	Kepala Badan	Pembina Pembina Tk I IV/B	1 orang
2	Sekretaris Badan	Pembina IV/A	1 orang
3	Kepala Bidang	Pembina Tk I IV/B Pembina IV/A	1 orang 5 orang
4	Kepala Sub Bagian	Penata Tk I III/D	1 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	Penata Tk I III/D Penata lll/C Penata Muda TK I III/B Penata Muda III/A Pengatur Tk I II/D	6 orang 3 orang 4 orang 1 orang 4 orang

2.2.2. Sumberdaya Aset/Modal

BAKESBANGPOL Kota Bima terletak di Jalan Soekarno-Hatta No.2 Raba, Kota Bima. Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional tugas BAKESBANGPOL pun belum tersedia.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh BAKESBANGPOL Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet, dan mesin faksimili;
c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis perencanaan, dilengkapi dengan ketersediaan printer;
d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, GPS, mesintik, dan LCD proyektor;
e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemaries, *air conditioner* (AC), *dispenser*, kipasangin, dan televisi;
f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

BAKESBANGPOL Kota Bima merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang berperan penting di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga keamanan dan ketertiban agar tetap konduktif.

Sedangkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar tetap konduktif BAKESBANGPOL Kota Bima melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui :

1) Merumuskan dan menetapkan Visi Misi, rencana strategis serta program kerja Badan dan Kebijakan Teknis di bidang Kesatuan Bangsa, politik dan pengkajian masalah strategis;
2) Melakukan penyediaan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3) Melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
4) Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, politik dan pengkajian masalah strategis;
5) Melakukan pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan pengkajian masalah strategis;
6) Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan pengkajian masalah strategis;
7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Tabel. 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bima terlampir.

Tabel. 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bima

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BAKESBANGPOL memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

2.4.1. Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat;
b. Masih adanya sikap arogansi dan apriori pelaku birokrasi terhadap partisipasi public;
c. Masih adanya pemahaman yang kurang terhadap makna desentralisasi maupun demokratisasi;
d. Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri;
e. Tingkat Pendidikan Politik masyarakat tidak merata;
f. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat;
g. Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat.

2.4.2. Peluang

Adapun beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

a. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik.
b. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam menjaga keaman dan ketertiban.
c. Makin meningkatnya peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/ swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
d. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kota Bima
e. Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah .

Berdasarkan Permasalahan keamanan dan ketertiban yang kurang kondusif, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bima didalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Ketentraman dan ketertiban Masyarakat belum optimal	Angka Konflik Sosial masih tinggi	Peran FKUB dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan belum Optimal Deteksi Dini Potensi Konflik masih rendah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Program	Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air	Melaksanakan kegiatan peningkatan rasa cinta tanah air untuk masyarakat dengan cakupan yang lebih luas lagi
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengetahuan politik dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemerintahan	Memperbanyak pelaksanaan pendidikan politik tidak hanya untuk pelajar sekolah, tetapi juga untuk masyarakat umum
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Masih adanya ormas yang tidak melapor dan tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan SKT	Lebih aktif mendatangi ormas-ormas yang ada di Kota Bima untuk memberikan edukasi dan bimbingan mengenai peraturan perundang-undangan
Program Pembinaan dan	Masih adanya konflik berbasis sosial, ekonomi	Memperkuat kinerja forum- forum,

Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	dan budaya di Kota Bima	meningkatkan sosialisasi, monitoring dan evaluasi
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Masih adanya gangguan ketertiban di masyarakat yang mengganggu kondusifitas daerah	Meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan, pemantapan forum serta kerjasama dengan instansi terkait untuk koordinasi yang lebih baik

Berdasarkan hasil analisis dari identifikasi permasalahan daerah, maka diperoleh isu trategis dalam perencanaan pembangunan selama tiga tahun kedepan yaitu Keamanan dan ketenteraman wilayah

3.2. Isu-Isu Strategis

Terciptanya keamanan dan ketertiban yang kondusif memerlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup internasional, nasional, regional termasuk isu daerah.

Bakesbangpol sebagai SKPD yang mempunyai tugas dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis, memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal dalam proses menjaga keamanan dan ketertiban Daerah.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol, beberapa isu strategis yang dihadapi, antara lain sebagai berikut :

1. Lemahnya etika, moral dan budaya politik yang beradap dapat menghambat proses demokratisasi.

2. Merosotnya kredibilitas pemerintahan dan peneggakan hukum mendorong kearah timbulnya anarkisme atau tirani massa/social.
3. Uforia reformasi yang makin menguat yang ditandai antara lain dengan kecendrungan
4. Mengabaikan atau tidak menghormati pendapat orang lain, sehingga menghambat proses pendewasaan prilaku berdemokrasi. Oleh karenanya pendidikan politik, wawasan kebangsaan, demokratisasi, penegakan hukum/HAM dan kerukunan hidup dalam aspek IPOLEKSOSBUD perlu dikembangkan dan ditingkatkan melalui forum komunikasi,Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima, forum silaturrahmi rapat koordinasi terpadu dan lain-lain berdasarkan pada etika hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan komitmen yang sama dari seluruh jajaran aparatur dan tokoh-tokoh masyarakat/agama agar kesadaran untuk menjaga kerukunan, toleransi solidaritas social dan partisipasi masyarakat terus ditingkatkan guna tercapainya masyarakat Kota Bima yang adil, sejahtera dan berahlak sehingga dapat memperkuat kesadaran berbangsa dan bertanah air dalam wilayah NKRI.

Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan di daerah, terutama dalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bakesbangpol diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan partisipatif diawali dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tuiuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024–2026, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA,TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Presentase penurunan Angka konflik sosial	4,76%	25%	33,33%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Presentase penurunan Angka konflik sosial	$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial Thn n-1 - Jumlah Konflik Sosial Thn n}}{\text{Jumlah Konflik Sosial Thn n-1}} \times 100\%$	Laporan Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol Kota bima

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah untuk menjaga kondusifitas Kota Bima. Kota Bima yang sangat heterogen sehingga harus memiliki strategi yang khusus untuk menyiasati potensi konflik yang mungkin terjadi. Menurunnya konflik sosial akan mengakibatkan kondusifitas daerah yang terjaga.

BAB V STARTEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dalam pencapaian tujuan organisasi dapat di rumuskan sebelumnya dengan melakukan sesuatu analisis terhadap keseluruhan indikasi dalam dalam organisasi tersebut. Dengan mengadakan analisis maka sang pemimpin mampu menemukan formula (strategi) yang baik untuk mengarahkan seluruh potensi organisasi, guna pencapaian tujuan organisasi. Berbagai teknik analisis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk salah satunya menggunakan analisis SWOT.

Data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima yang telah dikumpulkan dan dilakukan analisis pada faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT adalah sebagai berikut:

Tujuan 5:			
Meningkatnya keamanan dan ketertiban daerah			
Sasaran 13:			
Meningkatnya keamanan dan ketertiban			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Mampu menurunkan Angka Konflik Sosial	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan keamanan ketentraman dan ketertiban mulai dari skala lingkungan
KELEMAHAN	Penurunan Angka Konflik Sosial belum maksimal	MENGATASI KELEMAHAN	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama FKPD dalam mewjudkan stabilitas keamanan daerah
PELUANG	Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam membantumeredam konflik, dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian di masyarakat	MENANGKAP PELUANG	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana kelurahan termasuk didalamnya menjaga K3
ANCAMAN	Konflik Sosial masih tinggi	MEREDUKSI ANCAMAN	Memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan Meningkatkan peran lembaga keagamaan, organisasi social kemasyarakatan dan tokoh agama/tokoh masyarakat

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan diperoleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima didapat beberapa isu strategis dan arah Kebijakan yaitu dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya keamanan dan ketertiban daerah	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	1. Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sesuai dengan Tatakala
		2. Meningkatkan Peran partai politik dan lembaga pendidikan politik, serta etika budaya politik masyarakat	2. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sesuai dengan Tatakala
		3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	3. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sesuai dengan Tatakala
		4. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	

		5. Meningkatkan penyelesaian konflik di wilayah	4. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sesuai dengan Tatakala 5. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sesuai dengan Tatakala

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rincian Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Petanausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranan bangunan kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan Peralatan dan Mesin

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***
  - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
  - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
  - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, ser***
  - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***
  - Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
  - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
  - Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

- Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

- ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***

- Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***

- Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indicator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan . Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indicator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja Bakesbangpol Kota Bima yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Bima adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bakesbangpol Kota Bima dalam rentang tiga tahun (2024-2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Bima.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2024-2026 ini merupakan rencana kerja tiga tahunan. Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima merupakan bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Kota Bima, APBD Propinsi dan APBN, yang diimplemetasikan dalam program dan kegiatan pelaksanaan selama tiga tahunan kedepan.

Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tiga tahunan ini, maka akan merefleksikan rencana strategis prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Propinsi dan Kementerian/Lembaga di Pemerintah Pusat.

Raba – Bima, Juni 2023

Kepala Badan,



Dr. Muhammad Hasyim, SH,S,Sos,M.Ec,Dev
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19720824 199303 1 003

Tabel. 4.2
CASCADING SASARAN STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BIMA
TAHUN 2024 - 2026

NO	TUJUAN KOTA	INDIKATOR TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	INDIKATOR SASARAN KOTA	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	TARGET			SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	TARGET			PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET			KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET			SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET			ANGGARAN TAHUN CASCADING (TAHUN n)
							2024	2025	2026			2024	2025	2026				2024	2025	2026				2024	2025	2026				2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Daerah	Indeks Rasa Aman	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	Indeks Rasa Aman	Meningkatnya Keamanan dan ketertiban	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	4,76%	25%	33,33%	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	4,76%	25%	33,33%	Program Peningkatan Kewaspa daan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	67%	78%	82%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial	Terlaksanany a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	60 Konflik	45 Konflik	30 Konflik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksana nya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3320	3652	4017	
																											Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksanany a Kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	148 Org	163 Org	179 Org	
																											Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksanany a Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Lap	18 Lap	24 Lap	
																											Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dok	12 Dok	12 Dok	
															Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Pemahaman tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa	70%	70%	70%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksanany a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	6 Kip	6 Kip	6 Kip	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksanany a Kegiatan Kebijakan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	305 Org	305 Org	305 Org	
																											Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksanany a Kegiatan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Org	100 Org	150 Org	
															Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	80%	80%	80%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksanany a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	38 dari 43 Kelompok	38 dari 43 Kelompok	33 dari 43 Kelompok	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Terlaksanany a Kegiatan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Org	100 Org	100 Org	
																											Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Terlaksanany a Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Org	100 Org	150 Org	
															Program Pembinda yaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80%	80%	80%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksanany a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	134 dari 149 Kelompok	136 dari 149 Kelompok	140 dari 149 Kelompok	Pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Ormas, Pendaftaran Ormas, Pembinaan dan Mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Terlaksanakan kebijakan di bidang Pembinaan Ormas, Pendaftaran Ormas, Pembinaan dan Mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembinaan Ormas, Pendaftaran Ormas, Pembinbdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Org	150 Org	200 Org	

NO	TUJUAN KOTA	INDIKATOR TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	INDIKATOR SASARAN KOTA	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	TARGET			SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	TARGET			PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET			KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET			SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET			ANGGARAN TAHUN CASCADING (TAHUN n)
							2024	2025	2026			2024	2025	2026				2024	2025	2026				2024	2025	2026				2024	2025	2026	
															Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengemba ngan Etika serta Budaya Politik	Meningkatnya Partisipasi Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	70%	70%	70%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelenggaraan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,Serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelenggaraan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	3 Elemen (Pemilih Pemula, Wanita dan Masyrakat Umum)	3 Elemen (Pemilih Pemula, Wanita dan Masyrakat Umum)	3 Elemen (Pemilih Pemula, Wanita dan Masyrakat Umum)	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik,Etika budaya politik,Peningka tan demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan,Penyelenggaraan dan partai politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantau situasi politik	Terlaksananya pendidikan politik,Etika budaya politik,Peningkatan demokrasi,Fasili tasi Kelembagaan pemerintahan,Per siakilan dan partai politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantau situasi politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelenggaraan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	129 Org	129 Org	129 Org	
																											Pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan politik,Etika budaya politik,Peningka tan demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan,Penyelenggaraan dan partai politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantau situasi politik	Terlaksananya pendidikan politik,Etika budaya politik,Peningkatan demokrasi,Fasili tasi Kelembagaan pemerintahan,Per siakilan dan partai politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantau situasi politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelenkan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	101422 Org	101422 Org	101422 Org	

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bima

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penangung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	19	20	21
Meningkatnya Stabilitas Keamanan Daerah	Meningkatnya stabilitas politik dan wawasan kebangsaan	Presentase Penurunan Angka Konflik Sosial	**8 01 01**	**A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**A Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**100 %**	**100 %**	**#NAME?**	**100 %**	**3.249.599.291**	**100 %**	**3.265.847.287**	**100 %**	**3.265.847.287**	**Badan Kesbangpol**	**Kota Bima**
			8 01 01 2 01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**23.260.100**	**100 %**	**23.376.401**	**100 %**	**23.493.283**	**100 %**	**23.493.283**	**Badan Kesbangpol**	**Kota Bima**
			8 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	3.235.900	2 Dok	3.252.080	2 Dok	3.268.340	2 Dok	3.268.340	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 01 02	Koordinasi dan Penusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	3.038.900	1 Dok	3.054.095	1 Dok	3.069.365	1 Dok	3.069.365	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 01 03	Koordinasi dan Penusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	3.038.000	1 Dok	3.053.190	1 Dok	3.068.456	1 Dok	3.068.456	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 01 04	Koordinasi dan Penusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	3.536.200	1 Dok	3.553.881	1 Dok	3.571.650	1 Dok	3.571.650	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPDnan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	3.513.000	1 Dok	3.530.565	1 Dok	3.548.218	1 Dok	3.548.218	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	4 Lap	3.125.300	2 Lap	3.140.927	2 Lap	3.156.631	2 Lap	3.156.631	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	2 Lap	3.772.800	2 Lap	3.791.664	2 Lap	3.810.622	2 Lap	3.810.622	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**2.869.234.044**	**100 %**	**2.883.580.214**	**100 %**	**2.897.998.115**	**100 %**	**2.897.998.115**	**Badan Kesbangpol**	**Kota Bima**
			8 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Org	27 Org	2.677.173.644	26 Org	2.690.559.512	30 Org	2.704.012.310	30 Org	2.704.012.310	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dok	20 Dok	164.803.000	22 Dok	165.627.015	22 Dok	166.455.150	22 Dok	166.455.150	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	3.125.300	1 Lap	3.140.927	1 Lap	3.156.631	1 Lap	3.156.631	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Lap	18 Lap	20.661.300	2 Lap	20.764.607	2 Lap	20.868.430	2 Lap	20.868.430	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	3.470.800	1 Dok	3.488.154	1 Dok	3.505.595	1 Dok	3.505.595	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**219.936.790**	**100 %**	**221.036.474**	**100 %**	**222.141.656**	**100 %**	**222.141.656**	**Badan Kesbangpol**	**Kota Bima**
			8 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	46 Paket	2.180.800	35 Paket	2.191.704	35 Paket	2.202.663	35 Paket	2.202.663	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	37.620.000	4 Paket	37.808.100	3 Paket	37.997.141	3 Paket	37.997.141	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 06 05	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18 Paket	10.934.850	20 Paket	10.989.524	25 Paket	11.044.472	25 Paket	11.044.472		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	19	20	21
			8 01 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Lap	3 Lap	3.480.000	3 Lap	3.497.400	3 Lap	3.514.887	3 Lap	3.514.887	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Lap	20 Lap	165.721.140	25 Lap	166.549.746	25 Lap	167.382.494	25 Lap	167.382.494	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**25.963.000**	**100 %**	**38.944.500**	**100 %**	**39.139.223**	**100 %**	**39.139.223**	**Badan Kesbangpol**	**Kota Bima**
			8 01 01 2 08 01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700 Lap	45 Lap	5.995.000	45 Lap	8.992.500	50 Lap	9.037.463	50 Lap	9.037.463	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	19.968.000	12 Lap	29.952.000	12 Lap	30.101.760	12 Lap	30.101.760	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**82.250.450**	**100 -**	**82.661.702**	**100 %**	**83.075.011**	**100 %**	**83.075.011**	**Badan Kesbangpol**	**Kota Bima**
			8 01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	77.460.450	11 Unit	77.847.752	11 Unit	78.236.991	11 Unit	78.236.991	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	6 Unit	4.790.000	6 Unit	4.813.950	8 Unit	4.838.020	8 Unit	4.838.020	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa**	**75 %**	**75 %**	**689.446.809**	**88 %**	**692.894.043**	**100 %**	**696.358.513**	**100 %**	**696.358.513**	**Badan Kesbangpol**	**Kota Bima**
			8 01 02 2 01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter kebangsaan**	**6 dari 8 Klp**	**6 dari 8 Klp**	**689.446.809**	**7 dari 8 Klp**	**692.894.043**	**8 dari 8 Klp**	**696.358.513**	**8 dari 8 Klp**	**696.358.513**	**Badan Kesbangpol**	**Kota Bima**
			8 01 02 2 01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	- -	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 02 2 01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	- -	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 02 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 Org	305 Org	532.088.400	345 Org	534.748.842	350 Org	537.422.586	350 Org	537.422.586	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 02 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Org	80 Org	157.358.409	100 Org	158.145.201	150 Org	158.935.927	150 Org	158.935.927	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 02 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- -	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 02 2 01 08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	- -	- -	-	73 Org	1.152.000.000	73 Org	1.267.200.000	73 Org	1.267.200.000	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 02 2 01 09	Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	- -	- -	-	1 Dok	86.234.800	1 Dok	90.234.800	1 Dok	90.234.800	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 02 2 01 10	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	- -	- -	-	5 Dok	124.017.000	5 Dok	136.418.700	5 Dok	136.418.700	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 02 2 01 11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	- -	- -	-	70 Org	69.394.800	70 Org	76.334.280	70 Org	76.334.280	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**60 %**	**60 %**	**1.404.236.300**	**80 %**	**1.411.257.482**	**80 %**	**1.418.313.769**	**80 %**	**1.418.313.769**	**Badan Kesbangpol**	**Kota Bima**
			8 01 03 2 01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, ser**	**Jumlah Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi**	**3 Elemen (Pemilih Pemula,Wanita dan Masyrakat Umum)**	**3 dari 5 Elemen (Pemilih Pemula,Wanita dan Masyrakat Umum)**	**1.404.236.300**	**4 dari 5 Elemen (Pemilih Pemula,Wanita dan Masyrakat Umum)**	**1.411.257.482**	**4 dari 5 Elemen (Pemilih Pemula,Wanita dan Masyrakat Umum)**	**1.418.313.769**	**4 dari 5 Elemen (Pemilih Pemula,Wanita dan Masyrakat Umum)**	**1.418.313.769**	**Badan Kesbangpol**	**Kota Bima**
			8 01 03 2 01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	- -	- -	-	- -	-					Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 03 2 01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	- -	- -	-	- -	-			-	-	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 03 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Poli	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Org	129 Org	1.277.792.300	150 Org	1.284.181.262	200 Org	1.290.602.168	200 Org	1.290.602.168	Badan Kesbangpol	Kota Bima

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	19	20	21
			8 01 03 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	150 Org	101422 Org	126.444.000	101450 Org	127.076.220	101470 Org	127.711.601	101470 Org	127.711.601	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 03 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sert	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- -	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	Badan Kesbangpol	Kota Bima

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	19	20	21
			8 01 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**75 %**	**90 %**	**181.184.600**	**91 %**	**182.090.523**	**94 %**	**183.000.976**	**94 %**	**183.000.976**	**Badan Kesbangpol**	**Kota Bima**
			8 01 04 2 01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**134 dari 149 Kelompok**	**134 dari 149 Kelompok**	**181.184.600**	**136 dari 149 Kelompok**	**182.090.523**	**140 dari 149 Kelompok**	**183.000.976**	**140 dari 149 Kelompok**	**183.000.976**	**Badan Kesbangpol**	**Kota Bima**
			8 01 04 2 01 01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang di susun	- -	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 04 2 01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang di susun	- -	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 04 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Org	150 Org	181.184.600	150 Org	182.090.523	200 Org	183.000.976	200 Org	183.000.976	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 04 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengkuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- -	- -					-	- -	-	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 04 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- -	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**	**Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**65 %**	**65 %**	**121.937.200**	**69 %**	**122.546.886**	**77 %**	**123.159.620**	**77 %**	**123.159.620**	**Badan Kesbangpol**	**Kota Bima**
			8 01 05 2 01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**28 dari 43 Kelompok**	**28 dari 43 Kelompok**	**121.937.200**	**30 dari 43 Kelompok**	**122.546.886**	**33 dari 43 Kelompok**	**123.159.620**	**33 dari 43 Kelompok**	**123.159.620**	**Badan Kesbangpol**	**Kota Bima**
			8 01 05 2 01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	- -	- -	-	- -	-					Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 05 2 01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	- -	- -	-	- -	-					Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 05 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	50 Org	100 Org	31.157.600	100 Org	31.313.388	150 Org	31.469.955	150 Org	31.469.955	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 05 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengkuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Org	100 Org	90.779.600	100 Org	91.233.498	100 Org	91.689.665	100 Org	91.689.665	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 05 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- -	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Konflik Sosial yang tertangani**	**63 %**	**67 %**	**2.394.072.191**	**78 %**	**2.403.133.259**	**83 %**	**2.384.841.318**	**83 %**	**2.384.841.318**	**Badan Kesbangpol**	**Kota Bima**
			8 01 06 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Jumlah Konflik Sosial yang ditangani**	**15 dari 24 konflik**	**40 dari 60 konflik**	**2.394.072.191**	**35 dari 45 konflik**	**2.403.133.259**	**25 dari 30 konflik**	**2.384.841.318**	**25 dari 30 konflik**	**2.384.841.318**	**Badan Kesbangpol**	**Kota Bima**
			8 01 06 2 01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	- -	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 06 2 01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	- -	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	Badan Kesbangpol	Kota Bima

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	19	20	21
			8 01 06 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2580 Org	3320 Org	548.940.800	3652 Org	551.685.504	4017 Org	554.443.932	4017 Org	554.443.932	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 06 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70 Org	148 Org	114.921.000	163 Org	115.495.605	179 Org	116.073.083	179 Org	116.073.083	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 06 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, s	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- -	12 Lap	33.199.673	18 Lap	33.365.671	24 Lap	33.532.500	24 Lap	33.532.500	Badan Kesbangpol	Kota Bima
			8 01 06 2 01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dok	12 Dok	1.697.010.718	12 Dok	1.702.586.479	12 Dok	1.680.791.804	12 Dok	1.680.791.804	Badan Kesbangpol	Kota Bima
JUMLAH								**8.011.521.484**		**8.061.521.484**		**8.071.521.484**		**8.071.521.484**		